

# PENGUATAN MANDAT INSTITUSI UNTUK **MENINGKATKAN EKSPOR DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

Empowering Institutional Mandate  
in Supporting Export and National Economic Recovery



PENGUATAN MANDAT INSTITUSI UNTUK

# MENINGKATKAN EKSPOR DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Empowering Institutional Mandate  
in Supporting Export and National Economic Recovery

**2021** Laporan Tahunan  
Annual Report



Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Prosperity Tower Lantai 1, District 8,  
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190  
□ Tel. (62-21) 395 03600  
✉ Fax. (62-21) 395 03699  
✉ Email: [corpsec@indonesiaeximbank.go.id](mailto:corpsec@indonesiaeximbank.go.id)  
✉ [www.indonesiaeximbank.go.id](http://www.indonesiaeximbank.go.id)





# PENGUATAN MANDAT INSTITUSI UNTUK MENINGKATKAN EKSPOR DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Empowering Institutional Mandate  
in Supporting Export and National Economic Recovery

Pemerintah memberikan mandat kepada LPEI untuk menyediakan penjaminan atas kredit modal kerja yang disalurkan oleh perbankan kepada pelaku usaha korporasi melalui program Penjaminan Pemerintah atau JAMINAH dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. Mandat ini sebagai wujud keberpihakan pemerintah terhadap kebangkitan UMKM dan korporasi akibat pandemi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

LPEI memiliki tiga peran penting dalam rangka meningkatkan Pemulihan Ekonomi Nasional dan ekspor nasional sebagai *Special Mission Vehichle* (SMV) Kementerian Keuangan. Ketiga peran penting yang dijalankan LPEI adalah pertama, Penjaminan Pemerintah untuk pelaku usaha korporasi yang bertujuan melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha. Kedua, sebagai pelaksana pada program investasi pemerintah dengan tujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi BUMN atau lembaga. Ketiga, penugasan khusus ekspor atau PKE dengan tujuan menyediakan pembiayaan ekspor atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi dianggap perlu oleh pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor.

Program Penjaminan Pemerintah atau JAMINAH merupakan penugasan khusus pemerintah kepada LPEI untuk menjamin pembiayaan modal kerja baru atau modal kerja tambahan yang diberikan oleh perbankan kepada pelaku usaha korporasi yang terdampak pandemi. Semua perbankan umum yang sehat dengan peringkat komposit 1 atau 2 (dari penilaian OJK) dapat bertindak sebagai penerima JAMINAH. Kredit yang dijamin JAMINAH dikecualikan dari perhitungan BMPK, dan ATMR 0% kolektibilitasnya dikategorikan lancar sehingga perbankan dapat menambah eksposur penyaluran kredit. Sementara, untuk coverage penjaminan, jaminan akan diberikan 60% atau 80% dari nilai penjaminan.

In the framework of national economic recovery, the government mandates Indonesia Eximbank to provide guarantees for working capital loans disbursement by banks to corporate business entities through the Government Guarantee program or JAMINAH. This mandate is a form of government contribution to elevate MSMEs and corporations impacted by the pandemic through the National Economic Recovery (PEN).

To improve the national economic recovery and to enhance the national exports as a Special Mission Vehicle (SMV) of the Ministry of Finance, Indonesia Eximbank is mandated with three key roles. First, government guarantees for corporate business practitioners that aimed at protecting, maintaining and improving the economic capabilities of business players. Second, as an executor on government investment programs with the aim of safeguarding, maintaining, and improving the economic capabilities of SOEs or institutions. Third, the national interest account or PKE with the aim of providing export financing for transactions or projects that are commercially difficult to implement, however, are considered necessary by the government to support export policies or programs.

The Government Guarantee Program or JAMINAH is a national interest account of the government to Indonesia Eximbank to guarantee new working capital financing or additional working capital provided by banks to corporates impacted by the pandemic. The sound general banks with a composite rating of 1 or 2 (from the OJK assessment) can act as JAMINAH recipients. Credit guaranteed by JAMINAH is excluded from the calculation of LLL, and ATMR 0% collectibility is categorized as current hence the banks can increase loan disbursement exposure. Meanwhile, for guarantee coverage, the guarantee will be given 60% or 80% of the guarantee value.



## LPEI Salurkan Rp 4,8 triliun Penjaminan Pemerintah di **20 Sektor Strategis**

Indonesia Eximbank  
Disbursed Rp4.8 trillion of  
Government Guarantee for  
20 Strategic Sectors

Realisasi program Penjaminan Pemerintah atau JAMINAH mencapai Rp4,8 triliun per Desember 2021, yang disalurkan untuk 20 sektor industri strategis. Sektor tersebut antara lain otomotif, konstruksi, pertanian, jasa keuangan, perikanan, obat-obatan dan kosmetik, hotel, alas kaki serta pertambangan. Tenaga kerja terjamin dengan adanya program ini mencapai lebih dari 80 ribu orang.

Realization of Government Guarantee program or JAMINAH reached Rp4,8 trillion as of December 2021, disbursed for 20 strategic industries such as automotive, construction, agriculture, financial services, fisheries, medicines and cosmetics, hospitality, shoes as well as mining. The manpower that received benefit from this program is more than 80 thousand personnel.



## LPEI Salurkan Penjaminan Kredit Hingga **Rp 100** miliar ke Pelaku **Pariwisata Bali**

Indonesia Eximbank Disbursed  
Loans Guarantee reaching  
Rp100 billion to Bali  
Tourism Practitioners

Untuk merealisasikan dukungan ke sektor pariwisata dan hotel, restoran dan kafe (HOREKA), LPEI membagikan sertifikat Penjaminan Pemerintah di Bali. LPEI memberikan sertifikat Penjaminan Pemerintah kepada Bank Mandiri, BNI, Permata dan BPD Bali. JAMINAH ini memberikan akses fasilitas pembiayaan senilai Rp166,1 miliar kepada 8 hotel. Diperkirakan lebih dari 4.000 tenaga kerja akan terlibat dari program JAMINAH di sektor pariwisata khususnya Horeka.

To realize its support to tourism and hotel-restaurant-café sectors, Indonesia Eximbank provided certificates of government guarantee in Bali, which were rendered to Bank Mandiri, BNI, Permata and BPD Bali. JAMINAH has provided financing facility of Rp166.1 billion to 8 hotels. Estimated of around 4,000 manpower will be engaged in JAMINAH program for the tourism sector, specifically hotel restaurants- cafe sectors.

## KESINAMBUNGAN TEMA | Theme Continuity



2016



2017



Gejolak perekonomian global dalam beberapa tahun terakhir ini berdampak pada stagnasi dan bahkan pelemahan kinerja ekspor Indonesia yang merupakan salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini semakin menggarisbawahi pentingnya penguatan peran Indonesia Eximbank, sebagai perpanjangan tangan Pemerintah yang diberi mandat untuk menyukkseskan program ekspor nasional melalui penyediaan pembiayaan, penjaminan dan asuransi.

The global economic turmoil in recent years has had an impact on the stagnation and even weakening of Indonesia's export performance, which is one of the driving growth of the national economic. This situation further underscores the importance of strengthening the role of Indonesia Eximbank, as an extension of the Government which is mandated to succeed the national export program through financing, guarantees, and insurance facilities.



2018



Pengembangan ekosistem ekspor merupakan salah satu pilar utama dari strategi akselerasi peningkatan ekspor nasional Indonesia. Sebagai lembaga yang mendapatkan amanat untuk menjadi katalis ekspor Indonesia, Lembaga Pembangunan Ekspor Indonesia (LPEI) melakukan upaya-upaya berkesinambungan untuk memperkokoh posisinya dalam ekosistem ekspor nasional. Upaya-upaya tersebut mencakup peningkatan fokus pembiayaan ke sejumlah lembaga komoditi unggulan pemerintah, penetrasi ke pasar ekspor non-tradisional, mendorong UKM berorientasi ekspor, serta melaksanakan penugasan khusus bersinergi dengan beberapa BUMN. Kesemua upaya tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan dukungan LPEI terhadap pengembangan ekspor nasional.

The development of the export ecosystem represents one of the core pillars of the strategies for acceleration of Indonesia's national exports. As the institution with the mandate to be a catalyst for Indonesian export, Indonesia Eximbank engages in continuing efforts to solidify its position within the national export ecosystem. These efforts include increased focus on financing a number of governments designated leading export commodities, penetration to non-traditional export markets, encouraging growth of export-oriented MSMEs, and the implementation of special-assignment export projects in synergy with a number of other SOEs. In these ways, Indonesia Eximbank is optimizing support to the development of Indonesia's national export.

Lembaga Pembangunan Ekspor Indonesia tetap fokus pada upaya meningkatkan daya saing ekspor Indonesia di pasar global dan terus memperluas negara tujuan ekspor non tradisional. Untuk mencapai target tersebut, Indonesia Eximbank menerapkan tiga lembaga strategi yaitu menjaga kualitas produk dan jasa; memberikan pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi untuk para eksportir; serta memberikan pelayanan prima (*service excellence*).

Indonesia Eximbank continued to focus on driving Indonesia's export competitiveness in the global market and expanding the destinations of non-traditional exports. To achieve its goals, Indonesia Eximbank applies three prong strategies, namely maintaining product and service quality, providing financing, guarantee, insurance, and advisory services for exporters, and providing service excellence.



2019



LPEI terus berupaya mengoptimalkan perannya menjadi lembaga yang berstatus sui generis mampu berkontribusi besar bagi peningkatan ekspor nasional dengan tetap mengedepankan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, serta manajemen risiko yang baik dan kehati-hatian guna mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Dukungan LPEI terhadap peningkatan ekspor nasional selama tahun 2019, dilakukan melalui penyaluran fasilitas pembiayaan, penjaminan dan asuransi; penyediaan tingkat suku bunga yang terjangkau bagi eksportir terutama untuk segmen UKM berorientasi ekspor (UKME); pembiayaan kepada komoditi ekspor potensial dan jasa; serta penambahan jumlah eksportir baru (UKME) melalui program *Coaching Program For New Exporters* dari kegiatan jasa konsultasi. LPEI juga memberikan catatan positif, khususnya dalam hal dampak ekonomi dan sosial (*developmental impacts*) yang diberikan. Berdasarkan hasil pengukuran dampak ekonomi dan sosial (*developmental impacts*), fasilitas pembiayaan yang disalurkan LPEI dapat berkontribusi terhadap kenaikan ekspor sebesar 3,6 kali Pembiayaan dan kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 2,7 kali Pembiayaan.

**KESINAMBUNGAN TEMA**  
Theme Continuity



**2020**  


Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia mengimbangi masa pandemi di tahun 2020 melalui penguatan fondasi dengan misi "Regain Our Footing". Tujuannya agar LPEI tetap menjadi penggerak pembangunan di masa pandemi. LPEI juga berupaya menjadi Lembaga yang penuh aspirasi menuju resiliensi dengan ketangkasian. Oleh karenanya di tahun 2020, LPEI memfokuskan pada tiga aspek agar mampu cepat beradaptasi dan tetap tangkas dalam situasi sulit. Ketiga aspek tersebut yaitu melakukan restrukturisasi dan efisiensi, menjalankan mandat dan bisnis secara selektif termasuk Jasa Konsultasi, dan penguatan proses Internal. Ketiga aspek ini kemudian dituangkan menjadi sembilan prioritas utama, serta sekaligus menjadi strategi pengembangan bisnis LPEI di tahun 2020.

Indonesia Eximbank navigated the crisis in 2020 by strengthening its foundation through its "Regain Our Footing" mission in order to continue propelling the nation during the pandemic. Indonesia Eximbank also aspires toward resilience with agility. To that end, in 2020 Indonesia Eximbank focused on three improvement areas that would accelerate its capability to adapt and stay agile amid a difficult situation. These areas were restructuring and efficiency, selective exercise of mandate and business activities including the Advisory Services, and internal process strengthening. These aspects have been translated into nine key priorities that also formed Indonesia Eximbank's business development strategies in 2020.

Indonesia Eximbank continued to optimize its role as an institution sui generis that is able to contribute to the sustainable growth of national exports while upholding the principles of good governance, rigorous risk management, and prudence. The Company's support in enhancing national export during 2019 is manifested through financing, guaranteeing, and insurance facilities, provided competitive interest rate to exporters particularly in the export-oriented SMEs segment, financing to potential export commodities and services, and contributed in increasing the number of new exporters by holding a coaching program as part of Indonesia Eximbank's advisory segment. Indonesia Eximbank also delivered positive outcome, specifically in terms of developmental impacts in both economy and social aspects. Based on the measurement of developmental impacts, Indonesia Eximbank was able to contribute through financing facility an increase in export by 3.6 times Financing and an increase of Gross Domestic Product (GDP) by 2.7 times Financing.



**2021**  


Pemerintah memberikan mandat kepada LPEI untuk menyediakan penjaminan atas kredit modal kerja yang disalurkan oleh perbankan kepada pelaku usaha korporasi melalui program Penjaminan Pemerintah atau JAMINAH dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. Terkait dengan hal tersebut, LPEI memiliki tiga peran penting dalam rangka meningkatkan Pemulihan Ekonomi Nasional dan ekspor nasional sebagai Special Mission Vehichle (SMV) Kementerian Keuangan yang meliputi Penjaminan Pemerintah untuk pelaku usaha korporasi; pelaksana pada program investasi pemerintah; dan penugasan khusus ekspor atau PKE dengan tujuan menyediakan pembiayaan ekspor.

Indonesia Eximbank has been given the mandates by the government to provide guarantees for working capital loans disbursement by banks to corporate business practitioners through the Government Guarantee program or JAMINAH in the framework of national economic recovery. As such, Indonesia Eximbank has three key roles in order to improve the national economic recovery and enhance the national exports as a Special Mission Vehicles (SMV) of the Ministry of Finance which includes government guarantees for corporate business players; the executor of government investment programs; and export-specific assignments or PKE with the aim at providing export financing.



# DAFTAR ISI

## Table of Contents

Kesinambungan Tema Theme Continuity	4	Struktur Organisasi Organization Structure	82
<b>Daftar Isi</b> Table of Contents	<b>6</b>	<b>Profil Dewan Direktur</b> Board of Directors' Profile	<b>84</b>
<b>KINERJA UTAMA</b> <b>Highlights</b>	<b>8</b>	<b>Profil Direktur Pelaksana</b> Managing Directors' Profile	<b>92</b>
Kinerja Keuangan & Operasional Utama Financial & Operations Performance Highlights	10	<b>Manajemen Senior</b> Senior Management	<b>98</b>
Ikhtisar Keuangan Financial Highlights	12	<b>Demografi Pegawai</b> Employees Demography	<b>109</b>
Ikhtisar Obligasi Bonds Highlights	14	<b>Komposisi Pemegang Saham</b> Shareholders Composition	<b>110</b>
Peristiwa Penting Events Highlights	17	<b>Kronologi Penerbitan Efek Lain</b> Other Stocks Listing Chronology	<b>113</b>
<b>LAPORAN MANAJEMEN</b> <b>Management Reports</b>	<b>24</b>	<b>Lembaga Profesi Penunjang</b> Supporting Professional Institutions	<b>116</b>
Laporan Dewan Direktur Board of Directors Report	26	<b>Informasi Pada Website Perusahaan</b> Information On Company Website	<b>118</b>
Dewan Direktur Dan Direktur Eksekutif Board of Directors and Executive Director	38		
Laporan Direktur Eksekutif-Direktur Pelaksana Executive Directors & Managing Directors Report	40	<b>ANALISIS &amp; PEMBAHASAN</b> <b>MANAJEMEN</b>	<b>120</b>
Direktur Pelaksana Managing Directors	58	<b>Management Discussion &amp; Analysis</b>	
Laporan Dewan Pengawas Syariah Report from the Sharia Supervisory Board	60	Tinjauan Makro Ekonomi Operational Review per Business Segment	122
Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Tahunan 2021 Oleh Dewan Direktur Statements of Accountability of 2021 Annual Report by the Board of Directors	64	Prospek Usaha Business Prospects	135
Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Tahunan 2021 Oleh Direktur Eksekutif & Direktur Pelaksana Statements of Accountability of 2021 Annual Report by the Executive Directors & Managing Directors	65	Aspek Pemasaran Marketing Aspects	136
<b>PROFIL PERUSAHAAN</b> <b>Company Profile</b>	<b>66</b>	Strategi Bisnis Business Strategy	138
Identitas Perusahaan Corporate Identity	68	Tinjauan Operasional Per Segmen Usaha Operational Review Per Business Segment	141
Skala Usaha Business Scale	69	Tinjauan Kinerja Keuangan Financial Performance Review	193
Sekilas Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Indonesia Eximbank at a Glance	71	Teknologi Informasi Information Technology	220
Produk dan Jasa Products and Services	74		
Jejak Langkah Milestones	76		
Visi, Misi & Nilai Perusahaan Vision, Mission & Corporate Value	80	<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN</b> <b>Corporate Governance</b>	<b>226</b>
		Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance	230
		Rapat Pengesahan Ratification Meetings	255
		Dewan Direktur Board of Directors	258
		Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana Executive Director and Managing Director	264

**DAFTAR ISI**  
Table of Contents

<b>Rapat Dewan Direktur</b> Board of Directors Meetings	<b>275</b>	<b>Penerapan Pedoman GCG</b> GCG Guidelines Application	<b>510</b>
<b>Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali</b> Information on Ultimate and Controlling Shareholders	<b>299</b>	<b>Pengadaan Barang dan Jasa</b> Goods & Services Procurement	<b>519</b>
<b>Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana</b> Policy on The Diversity Of The Compositionof The Board of Directors, Executive Director, and Managing Director	<b>300</b>	<b>Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)</b> Implementation Of Anti Money Laundering (AML) and Counter Terrorism Financing (CTF)	<b>522</b>
<b>Hubungan Keuangan Dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Direktur Dengan Anggota Dewan Direktur Lain Dan Direktur Pelaksana</b> Financial Relationships and Family Relationship of The Board of Directors Members With Other Members of The Board of Directors and The Managing Directors	<b>301</b>	<b>Transparansi Keuangan dan Non-Keuangan Lembaga</b> Transparency of Institution's Financial and Non-Financial	<b>525</b>
<b>Penilaian Penerapan GCG Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif- Direktur Pelaksana</b> GCG Assessment For The Board of Directors and Executive	<b>302</b>	<b>Kebijakan Dan Prosedur Anti Korupsi</b> Anti Corruption Policy & Procedures	<b>534</b>
<b>Remunerasi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif &amp; Direktur Pelaksana</b> Remuneration Policy of The Board of Directors, Executive Director & Managing Directors	<b>306</b>	<b>Buy Back Saham dan Buy Back Obligasi</b> Share Buy Back and Bond Buy Back	<b>540</b>
<b>Dewan Pengawas Syariah</b> Sharia Supervisory Board	<b>317</b>	<b>Rencana Strategis Lembaga</b> Company Strategic Plan	<b>540</b>
<b>Organ Pendukung Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif</b> Supporting Organ of The Board of Directors and Executive Director	<b>326</b>	<b>Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar</b> Distribution of Fund To Related Parties and Large Exposures	<b>541</b>
<b>Komite Audit</b> Audit Committee	<b>326</b>	<b>Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kepentingan Politik</b> Funding For Social Activities and Political Interests	<b>541</b>
<b>Komite Remunerasi Dan Nominasi</b> Remuneration and Nomination Committee	<b>340</b>		
<b>Komite Pemantau Risiko</b> Risk Monitoring Committee	<b>349</b>		
<b>Organ Pendukung Direktur Eksekutif</b> Executive Director Supporting Organs	<b>365</b>		
<b>Sekretaris Dewan Direktur</b> Secretary to The Board of Directors	<b>413</b>		
<b>Sekretaris Lembaga</b> Corporate Secretary	<b>416</b>		
<b>Unit Audit Internal</b> Internal Audit Unit	<b>430</b>		
<b>Akuntan Publik</b> Public Accountant	<b>446</b>		
<b>Fungsi Kepatuhan</b> Compliance Function	<b>450</b>		
<b>Manajemen Risiko</b> Risk Management	<b>462</b>		
<b>Sistem Pengendalian Internal</b> Internal Control System	<b>484</b>		
<b>Akses Informasi dan Data Perusahaan</b> Information Access and Corporate Data	<b>497</b>		
<b>Kode Etik</b> Code of Conduct	<b>498</b>		
<b>Sistem Pelaporan Pelanggaran</b> Whistleblowing System	<b>503</b>		
<b>LAPORAN KEBERLANJUTAN</b> <span style="float: right;"><b>542</b></span> <i>Sustainability Report</i>			
<b>Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan</b> <span style="float: right;"><b>544</b></span> <i>Sustainable Performance Highlights</i>			
<b>Kerangka Dan Strategi Keberlanjutan LPEI</b> <span style="float: right;"><b>548</b></span> <i>Sustainability Framework and Strategy</i>			
<b>Kinerja Ekonomi</b> <span style="float: right;"><b>558</b></span> <i>Economics Performance</i>			
<b>Tanggung Jawab Terhadap Produk, Layanan dan Nasabah</b> <span style="float: right;"><b>574</b></span> <i>Responsibility Towards Products, Services and Customers</i>			
<b>Kinerja Aspek Lingkungan</b> <span style="float: right;"><b>585</b></span> <i>Environmental Performance</i>			
<b>Kinerja Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat</b> <span style="float: right;"><b>597</b></span> <i>Community Development and Empowerment Performance</i>			
<b>Mengembangkan Kompetensi Sumber Daya Manusia</b> <span style="float: right;"><b>606</b></span> <i>Managing and Developing Human Resources Competency</i>			
<b>Tentang Laporan Keberlanjutan</b> <span style="float: right;"><b>642</b></span> <i>About Sustainability Report</i>			
<b>Daftar Indeks GRI – Opsi Core</b> <span style="float: right;"><b>652</b></span> <i>GRI Index List – Core Option</i>			
<b>Daftar Pengungkapan Sesuai SEOJK No. 16/Seojk.04/2021</b> <span style="float: right;"><b>661</b></span> <i>GCG Assessment For The Board of Directors and Executive</i>			
<b>Lembar Umpan Balik</b> <span style="float: right;"><b>664</b></span> <i>Feedback Form</i>			
<b>LAPORAN KEUANGAN 2021</b> <span style="float: right;"><b>666</b></span> <i>Financial Statements 2021</i>			



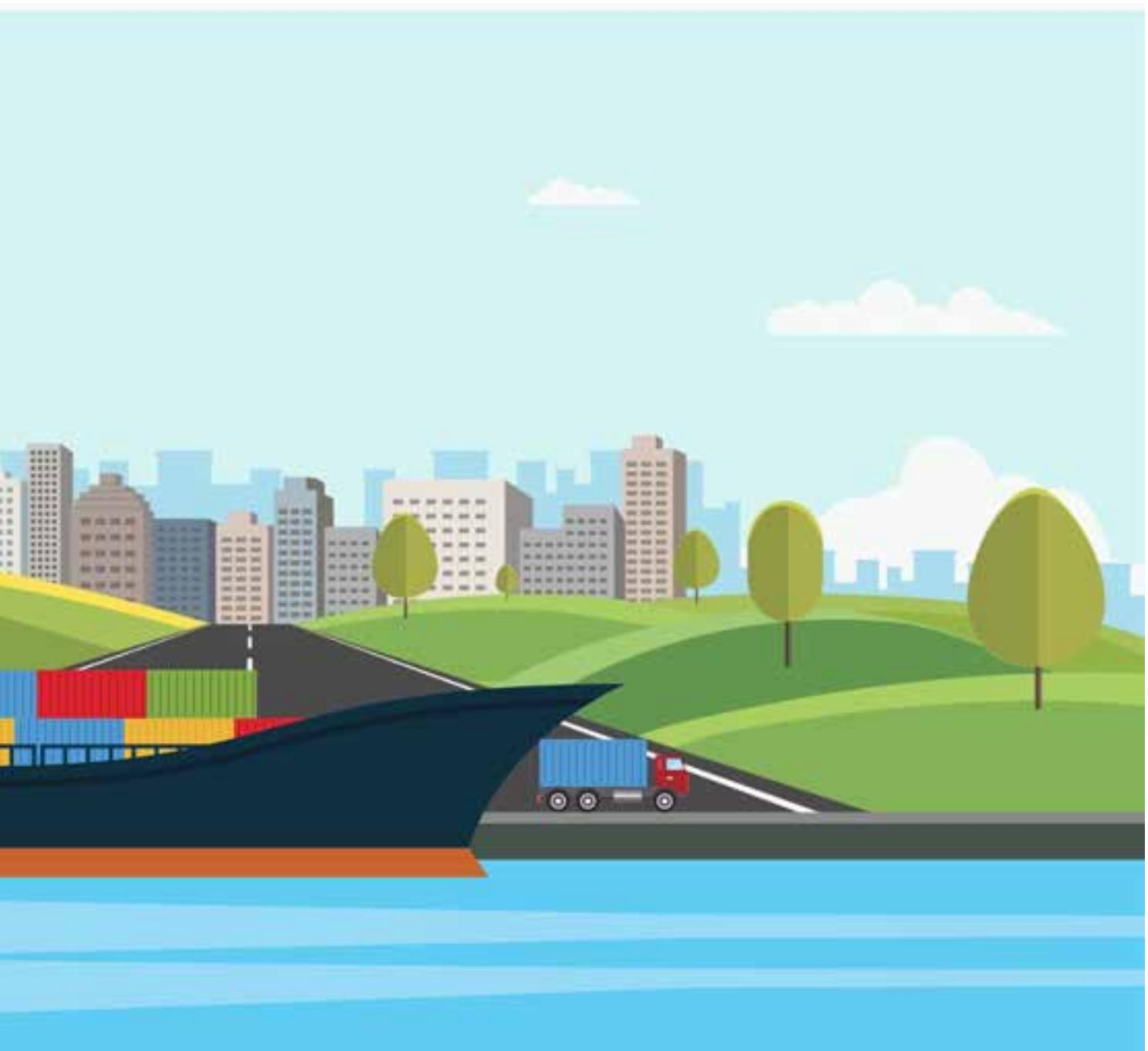
## KINERJA UTAMA

### Highlights

Di tengah kondisi pandemi yang masih berlangsung hingga tahun 2021, total pembiayaan LPEI yang disalurkan sebesar Rp83,96 triliun atau mencapai 89,06% dari target Rp94,28 triliun.

Amidst the prolonged pandemic in 2021, Indonesia Eximbank disbursed a total financing of Rp83.96 trillion or realizing 89.06% of its target of total Rp94.28 trillion







# KINERJA KEUANGAN & OPERASIONAL UTAMA

Financial & Operations Performance Highlights



↓ Pembiayaan mencapai  
**Rp 87,72**  
triliun  
atau turun **2,94% (ytd)**

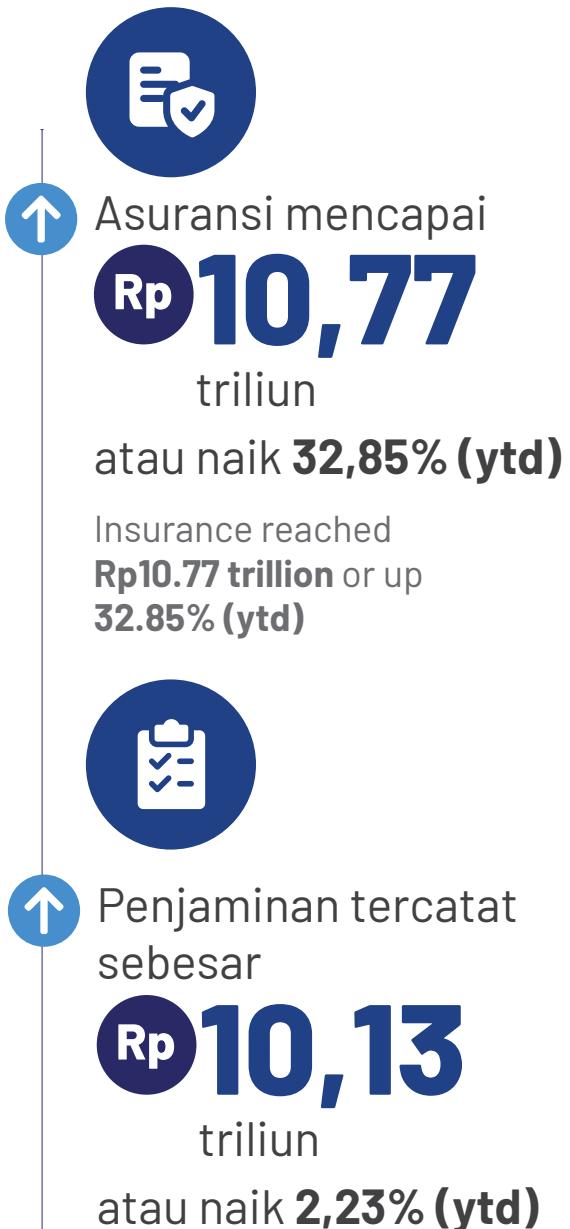
Financing reached  
**Rp87.72 trillion**  
or decreased  
by **2.94% (ytd)**



↑ Mencatat aset sebesar  
**Rp 89,09**  
triliun

Posted assets of  
**Rp89.09 trillion**







# IKHTISAR KEUANGAN

## Financial Highlights

<b>POSISI KEUANGAN</b> (dalam jutaan rupiah)	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>FINANCIAL POSITION</b> (in million rupiah)
Total Aset	89.040.921	92.084.560	108.701.725	120.071.057	110.475.577	Total Assets
Portofolio Tresuri - Bruto	17.827.636	14.110.026	18.466.036	12.422.358	9.564.188	Treasury Portfolio - Gross
Portofolio Pembiayaan dan Piutang - Bruto	83.963.162	90.408.073	97.806.606	108.858.667	101.012.284	Financing and Receivables Portfolio- Gross
Tagihan Derivatif	6	-	1.410	1.283	3.976	Derivatives Receivable
Piutang Asuransi dan Penjaminan - Bruto	285.656	35.540	1.400	5.415	5.580	Insurances Receivable - Gross
Aset Reasuransi	2.615	1.284	4.853	3.728	2.084	Reinsurances Assets
Tagihan Akseptasi - Bruto	460.540	562.727	658.289	1.407.413	1.485.828	Acceptances Receivable
<b>Total Liabilitas</b>	<b>58.920.543</b>	<b>67.288.011</b>	<b>89.762.973</b>	<b>98.881.645</b>	<b>89.207.566</b>	<b>Total Liabilities</b>
Efek-Efek Utang yang Diterbitkan - Bruto	27.743.500	36.524.500	45.209.502	44.169.595	39.972.728	Debt Securities Issued - Gross
Pinjaman yang Diterima	28.799.571	28.599.773	41.492.912	49.858.784	44.530.307	Fund Borrowings
Utang Asuransi	4.055	2.563	2.150	3.061	3.312	Insurances Payable
Utang Penjaminan	62.363	560	497	572	2.599	Guarantee Payable
Liabilitas Asuransi	6.390	3.230	6.515	4.109	2.963	Insurances Liabilities
<b>Total Ekuitas</b>	<b>30.120.378</b>	<b>24.796.549</b>	<b>18.938.752</b>	<b>21.189.412</b>	<b>21.268.011</b>	<b>Total Equity</b>
<b>LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF</b>						<b>STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME</b>
Pendapatan Operasional - Neto	1.421.725	1.157.483	1.709.727	2.463.674	2.766.412	Total Operating Income - Net
Pendapatan Bunga	4.263.520	5.102.881	7.061.466	7.541.717	7.327.072	Interest Income
Beban Bunga	(3.057.215)	(4.262.993)	(5.646.218)	(5.415.182)	(4.947.856)	Interest Expense
Pendapatan Bunga Bersih	1.206.305	839.888	1.415.248	2.126.535	2.379.216	Net Interest Income
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan	(257.752)	(423.080)	(6.681.341)	(1.700.719)	(928.898)	Provision for Impairment Losses on Financial Assets Value
Penyisihan Kerugian Estimasi Klaim Penjaminan	(114)	(1.946)	6.802	(5.578)	(900)	Provision for Impairment Losses on Estimated Guarantee Claim
Beban Operasional - Neto	(758.763)	(676.887)	(691.234)	(661.614)	(611.424)	Total Operating Expense - Net
Pendapatan(Beban) Non Operasional - Neto	3.943	6.152	21.188	14.458	16.086	Non-Operating Income (Expense)-Net
Laba(Rugi) Sebelum Pajak	409.039	61.722	(5.634.858)	110.221	1.241.276	Profit (Loss) Before Tax
Laba(Rugi) Setelah Pajak	387.396	288.388	(4.710.849)	171.673	1.016.608	Profit (Loss) After Tax
Pendapatan(Beban) Komprehensif Lain -Neto	14.890	109.837	15.982	25.330	(6.797)	Other Comprehensive Income (Expense)- Net
Laba(Rugi) Komprehensif	402.286	398.225	(4.694.867)	197.003	1.009.811	Comprehensive Income (Loss)
<b>KOMITMEN &amp; KONTINJENSI</b>						<b>COMMITMENT &amp; CONTINGENCIES</b>
Irrevocable L/C Masih Berjalan	379.096	164.415	280.657	1.052.563	1.121.059	Outstanding Irrevocable L/C
Penjaminan yang Diberikan	13.136.226	9.908.992	10.127.895	11.307.056	10.551.440	Guarantee Facility
Asuransi Ekspor	10.938.409	8.108.726	8.178.647	11.322.172	9.973.711	Export Insurance
<b>RASIO KEUANGAN (%)</b>						<b>COMMITMENT &amp; CONTINGENCIES</b>
Kecukupan Modal (CAR) - Risiko Kredit	38,19	29,47	17,62	17,57	18,07	Credit Risk - Capital Adequacy Ratio (CAR)
Kecukupan Modal (CAR) - Risiko Kredit dan Pasar	37,19	28,07	17,32	17,43	17,99	Market & Credit Risk - Capital Adequacy Ratio (CAR)
NPL Gross	21,03	26,08	23,39	13,73	6,81	NPL Gross
NPL Neto	7,12	11,49	13,96	10,31	4,78	NPL Net
Pengembalian atas Aktiva (ROA)	0,46	0,06	-4,84	0,10	1,17	Return on Assets (ROA)
Pengembalian atas Ekuitas (ROE)	1,54	1,41	-21,63	0,81	5,83	Return on Equity (ROE)
Pendapatan Bunga Bersih Terhadap Aktiva Produktif (NIM)	1,17	0,77	1,18	1,83	2,25	Net Interest Income to Earning Assets (NIM)
Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	90,87	98,86	179,63	100,51	86,17	Operating Expenses to Operating Income
Posisi Devisa Neto	7,07	16,96	9,7	4,68	2,31	Net Open Position
Kewajiban terhadap Ekuitas (kali)	1,96	2,71	4,74	4,67	4,19	Liabilities to Equity (times)
Kewajiban terhadap Aset (kali)	0,66	0,73	0,83	0,82	0,81	Liabilities to Assets (times)

## IKHTISAR KEUANGAN

Financial Highlights

**IKHTISAR UTAMA**  
01  
Performance Highlights

**LAPORAN MANAJEMEN**  
02  
Management Report

**PROFIL PERUSAHAAN**  
03  
Company Profile

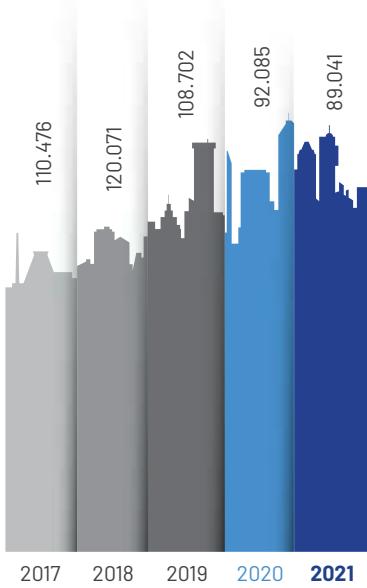
**ANALISIS & PEMBAHASAN**  
04  
Management Discussion & Analysis

**TATA KELOLA PERUSAHAAN**  
05  
Corporate Governance

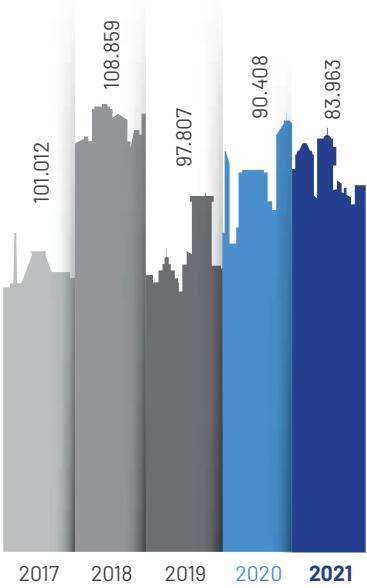
**LAPORAN KEUANGAN**  
06  
Financial Statement

13

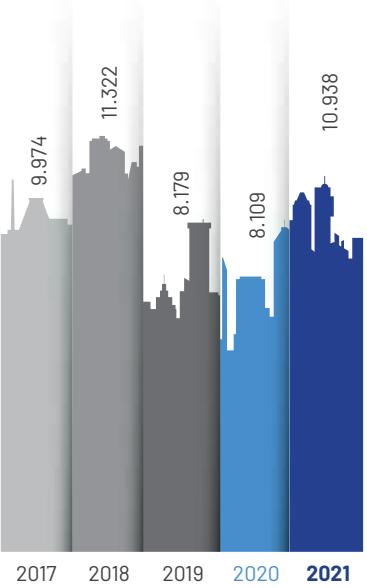
**Total Aset**  
Total Assets  
(Rp Miliar/ Billion)



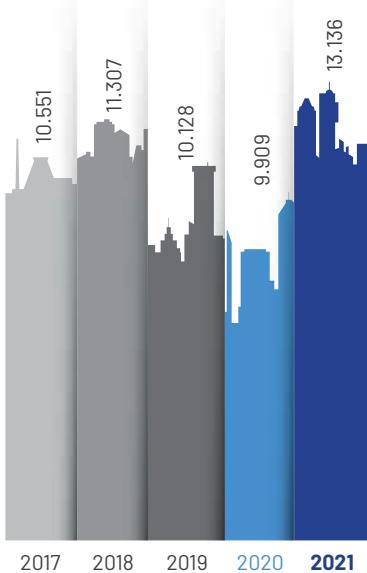
**Pembiayaan - Bruto**  
Financing - Gross  
(Rp Miliar/ Billion)



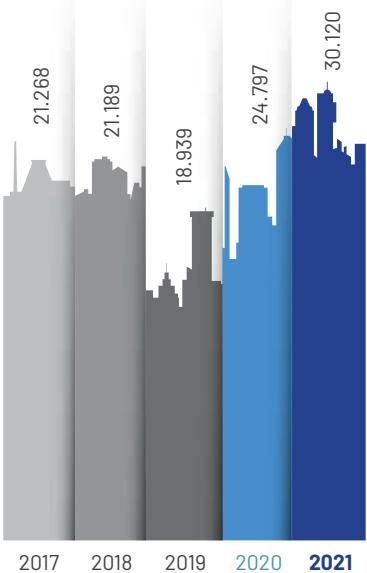
**Asuransi Ekspor**  
Export Insurance  
(Rp Miliar/ Billion)



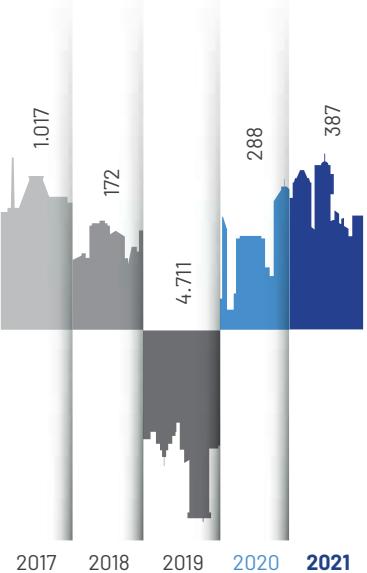
**Penjaminan yang Diberikan**  
Guarantee Facility  
(Rp Miliar/ Billion)



**Ekuitas**  
Equity  
(Rp Miliar/ Billion)



**Laba Bersih**  
Net Profit  
(Rp Miliar/ Billion)





# IKHTISAR OBLIGASI

## Bonds Highlights

Daftar obligasi dan sukuk korporasi yang telah diterbitkan oleh Indonesia Eximbank dan belum jatuh tempo per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Lists of corporate bonds and sukuk that have been issued by Indonesia Eximbank and not yet matured as of 31 December 2021 are as follows:

### Daftar obligasi korporasi Indonesia Eximbank | List of Indonesian Eximbank's corporate bonds

No	Nama Efek Securities Names	Seri Series	Jumlah yang Outstanding per 31 Des 2021 Total Outstanding as of 31 Dec 2021 (Rp Miliar/Billion)	Tingkat Bunga per Tahun Interest Rate Per Annum	Tanggal Penerbitan Issued Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
<b>A. Obligasi dalam mata uang Rupiah   Bonds denominated in Rupiah</b>								
1	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III Tahun 2016  Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering Bonds III – 2016	D	1,038	8.50%	22-Nov-16	22-Nov-23	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
2	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV Tahun 2017  Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds III Phase IV of 2017	C	748	8.90%	23-Feb-17	23-Feb-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	1,007	9.20%	23-Feb-17	23-Feb-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		E	1,266	9.40%	23-Feb-17	23-Feb-27	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
3	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V Tahun 2017  Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds III Phase V of 2017	B	436	7.90%	15-Aug-17	15-Aug-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	1,786	8.25%	15-Aug-17	15-Aug-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
4	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI Tahun 2018  Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds III Phase VI of 2018	B	1,650	6.70%	14-Feb-18	14-Feb-23	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	206	6.90%	14-Feb-18	14-Feb-25	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
5	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I Tahun 2018  Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase I of 2018	B	35	7.70%	06-Jun-18	6-Jun-23	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	1,756	8.30%	06-Jun-18	6-Jun-25	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
6	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II Tahun 2018  Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase II of 2018	C	276	8.40%	05-Sep-18	5-Sep-23	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	1,324	8.75%	05-Sep-18	5-Sep-25	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)

**IKHTISAR OBLIGASI**  
Bonds Highlights

No	Nama Efek Securities Names	Seri Series	Jumlah yang Outstanding per 31 Des 2021 Total Outstanding as of 31 Dec 2021 (Rp Miliar/Billion)	Tingkat Bunga per Tahun Interest Rate Per Annum	Tanggal Penerbitan Issued Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
7	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase III of 2018	C	28	9.25%	08-Nov-18	8-Nov-23	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	380	9.75%	08-Nov-18	8-Nov-25	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
8	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase IV of 2019	B	935	8.40%	23-Apr-19	23-Apr-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	1,523	8.90%	23-Apr-19	23-Apr-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	278	9.25%	23-Apr-19	23-Apr-26	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		E	349	9.50%	23-Apr-19	23-Apr-29	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		F	625	9.80%	23-Apr-19	23-Apr-34	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
9	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase V of 2019	B	621	8.45%	09-Jul-19	9-Jul-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	330	8.70%	09-Jul-19	9-Jul-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	737	9.20%	09-Jul-19	9-Jul-26	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
10	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase VI of 2019	B	15	7.80%	03-Sep-19	3-Sep-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	6	8.10%	03-Sep-19	3-Sep-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	714.5	8.50%	03-Sep-19	3-Sep-26	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
11	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase VII of 2019	B	101.3	7.80%	29-Oct-19	29-Oct-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	25.5	8.10%	29-Oct-19	29-Oct-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	112	8.50%	29-Oct-19	29-Oct-26	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		E	219.75	8.75%	29-Oct-19	29-Oct-29	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
12	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase VIII of 2019	A	88	7.50%	06-Dec-19	6-Dec-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		B	1,551	7.90%	06-Dec-19	6-Dec-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	22.5	8.20%	06-Dec-19	6-Dec-26	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
13	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I Tahun 2020 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds V Phase I of 2020		48	7.60%	08-Jul-20	8-Jul-23	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
<b>Jumlah Obligasi   Total Bonds</b>				<b>20,237.25</b>				

**IKHTISAR OBLIGASI**  
Bonds Highlights

**Daftar sukuk Indonesia Eximbank | List of Indonesian Eximbank's sukuk**

No	Nama Efek Securities Names	Seri Series	Jumlah yang Outstanding per 31 Des 2021 Total Outstanding as of 31 Dec 2021 (Rp Miliar/Billion)	Tingkat Bunga per Tahun Interest Rate Per Annum	Tanggal Penerbitan Issued Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
<b>B. Sukuk dalam mata uang Rupiah   Sukuk denominated in Rupiah</b>								
1	Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank I Tahap II Tahun 2018  Indonesia Eximbank Shelf Sukuk Mudharabah I Phase II of 2018	C  D	14  155	14  155	14  155	14  155	14  155	14  155
2	Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank I Tahap III Tahun 2019  Indonesia Eximbank Shelf Sukuk Mudharabah I Phase III of 2019	B  C	145  66	8.40%  8.90%	23-Apr-19  23-Apr-19	23-Apr-22  23-Apr-24	PT Bursa Efek Indonesia  PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)  idAAA (Pefindo)
<b>Jumlah Sukuk</b>			<b>380</b>					



# PERISTIWA PENTING

## Events Highlights



4 Februari | February 4, 2021

**Signed PKS dalam rangka Penjaminan Korporasi Pemerintah dengan Bank BTN**  
The Signing of PKS for Government Corporate Guarantee with Bank BTN

LPEI Tandatangani Kerja Sama Penjaminan dengan Bank BTN untuk Mendukung Pemulihian Ekonomi Nasional

LPEI Signed A Guarantee Cooperation with Bank BTN to Support National Economic Recovery



15 Februari | February 15, 2021

**Signed PKS antara LPEI dan PII untuk Penjaminan bersama Penjaminan Pemerintah**  
The Signing of PKS between LPEI and PII for Guarantee with Government Guarantee

LPEI & PT PII menandatangani kerja sama terkait pelaksanaan Penjaminan Pemerintah untuk pelaku korporasi

LPEI & PT PII signed a cooperation related to the implementation of Government Guarantee for corporates

24 Februari | February 24, 2021

**Kick off Meeting Secondment antara SMV dan Kemenkeu RI**

Kick off the Secondment Meeting between SMV and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia

Kementerian Keuangan RI Jalin Kolaborasi dengan SMV Kementerian Keuangan melaksanakan Kick Off Meeting Program Secondment 2021 untuk mengembangkan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Kementerian Keuangan RI

The Ministry of Finance of the Republic of Indonesia Collaborated with SMV The Ministry of Finance held a Kick-Off Meeting of 2021 Secondment Program to develop the competence and quality of Human Resources within the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia



24 Februari | February 24, 2021

**Webinar "Dukungan Pemerintah bagi UMKM dalam rangka PEN"**  
A Webinar of "Government Support for MSMEs under PEN"

LPEI menyelenggarakan Webinar dengan tema "Dukungan Pemerintah bagi UMKM" dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional melalui sosialisasi program-program dan Penugasan Khusus Eksport LPEI kepada UMKM Berorientasi Eksport

LPEI organized a Webinar with a theme of "Government Support for MSMEs" for national economic recovery through socialization of LPEI's Export-Oriented Programs and Special Assignments to Export-Oriented MSMEs



26 Februari | February 26, 2021

**Signed Kontrak Manajemen LPEI 2021**  
The Signing of LPEI Management Contract in 2021

Signed Kontrak Manajemen LPEI 2021 : LPEI diberi kepercayaan oleh Kementerian Keuangan RI dalam melaksanakan mandat Pemerintah untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional serta mendorong eksport nasional

The Signing of LPEI Management Contract 2021: LPEI was entrusted by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia to implement the Government's mandate to support the National Economic Recovery Program and encourage national exports



9 Maret | March 9, 2021

**Signed PKS dalam rangka Penjaminan Korporasi Pemerintah dengan BCA**  
The Signing of PKS for the Government's Corporate Guarantee with BCA

LPEI Menandatangani perjanjian kerja sama Penjaminan Pemerintah dengan PT Bank Central Asia(BCA) Tbk

LPEI Signed Government Guarantee Cooperation Agreement with PT Bank Central Asia(BCA) Tbk

## PERISTIWA PENTING

### Events Highlights



11 Maret | March 11, 2021

**Sinergi SMV memberikan bantuan bagi Masyarakat terdampak bencana Gempa Bumi di Kab Majene, Sulawesi Barat**  
A SMV Synergy provides assistance for Communities affected by the Earthquake in Majene Regency, West Sulawesi

Sinergi Aksi Kemanusiaan LPEI bersama PT SMF, PT PII & Geodipa sebagai #SpecialMissionVehicle Kementerian Keuangan RI bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia dalam memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak Gempa Bumi di Majene, Sulawesi Barat

LPEI Humanitarian Action Synergy with PT SMF, PT PII & Geodipa as #SpecialMissionVehicle The Finance Ministry of the Republic of Indonesia in collaboration with the Indonesian Red Cross in providing assistance to communities affected by the Earthquake in Majene, West Sulawesi



19 Maret | March 19, 2021

**Ferry Flight Pesawat CN 235-220 MPA PT Dirgantara Indonesia ke Senegal dengan NIA**  
Ferry Flight Airplane of PT Dirgantara Indonesia's CN 235-220 MPA to Senegal with NIA

LPEI Mendukung Industri Strategis Nasional memperluas pasar ekspor ke negara-negara non tradisional melalui Penugasan Khusus Ekspor yang diberikan Pemerintah. Kali ini, LPEI Mendukung PT DI Ekspor Pesawat CN235-220 MPA ke Senegal.

LPEI Supports National Strategic Industries to expand export markets to non-traditional countries through Special Export Assignments granted by the Government. This time, LPEI Supported PT DI to export the CN235-220 MPA aircraft to Senegal.

24 Maret | March 24, 2021



**Talkshow "Mendorong Potensi Wisata dengan Pembiayaan Homestay"**  
Talkshow "Encouraging Tourism Potential by Homestay Financing"

Dalam mendukung Pemerintah terkait pemulihhan pariwisata nasional khususnya sinergi LPEI dan PT SMF di Banyuwangi, LPEI Berpartisipasi sebagai narasumber pada acara talkshow yang diselenggarakan oleh PT SMF di Kota Solo

To support the Government regarding the recovery of national tourism, especially a synergy between LPEI and PT SMF in Banyuwangi, LPEI Participated as a resource person at a talk show organized by PT SMF in Solo City



25 Maret | March 25, 2021

**Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI bersama Kemenkeu RI dan LPEI ke Kendal dan Demak**  
A Working Visit of Commission XI of Indonesian Parliament together with the Finance Ministry of the Republic of Indonesia and LPEI to Kendal and Demak

Dalam upaya mengembangkan kapasitas UMKM di Jawa Tengah, LPEI melakukan kunjungan kerja bersama Komisi XI DPR RI dan Kementerian Keuangan RI ke Kendal dan Demak. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan MoU antara LPEI dengan Pemerintah Kabupaten Kendal dan Demak.

In an effort to develop the capacity of MSMEs in Central Java, LPEI made a working visit with Commission XI of DPR and Finance Ministry to Kendal and Demak. On this occasion, an MoU was also signed between LPEI and Kendal and Demak Regency Governments.



21 April | April 21, 2021

**Mitra binaan LPEI berpartisipasi pada talkshow Peringatan Hari Kartini di Kemenkeu RI**

LPEI fostered partners participate in the Kartini Day Commemoration talkshow at the Finance Ministry of the Republic of Indonesia



27 April | April 27, 2021

**Signing Penjaminan Pemerintah Korporasi MAP, LPEI dan PII kepada Standard Chartered Bank**

The Signing of Corporate Government Guarantee for MAP, LPEI and PII to Standard Chartered Bank

LPEI Menandatangani perjanjian Penjaminan Kredit melalui program Penjaminan Pemerintah (JAMINAH) dengan Standard Chartered Bank dan PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAP)

LPEI Signed a Credit Guarantee agreement through the Government Guarantee Program (JAMINAH) with Standard Chartered Bank and PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAP)

## PERISTIWA PENTING

### Events Highlights

24 Mei | May 24, 2021



#### Giling Tebu perdana dengan PTPN PTPN's First Sugarcane Mill

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) / Indonesia Eximbank yang merupakan Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan RI, menyalurkan dana senilai Rp 4 triliun kepada Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) berdasarkan PP 43 Tahun 2020 mengenai Investasi Pemerintah untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial.

The Indonesian Export Financing Agency (LPEI) / Indonesia Eximbank, as a Special Mission Vehicle (SMV) of the Finance Ministry of the Republic of Indonesia, distributed funds worth Rp4 trillion to the Nusantara Plantation Holding PTPN III (Persero) based on PP 43 Year 2020 concerning Government Investment to obtain economic benefits and social.



18 Juni | June 18, 2021



#### Signed PKS Penjaminan Pemerintah Korporasi dengan Bank Shinhan Indonesia

The signing of PKS on Corporate Government Guarantee with Bank Shinhan Indonesia

LPEI menandatangani kerja sama dengan PT Bank Shinhan Indonesia (Shinhan Bank Indonesia) dalam rangka pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah Kredit Pemerintah (JAMINAH).

LPEI signed a cooperation with PT Bank Shinhan Indonesia (Shinhan Bank Indonesia) to implement the Government Credit Guarantee Program (JAMINAH).



22 Juni | June 22, 2021



#### Signed Pendanaan senilai Rp 3 triliun dengan BCA

The signing of Funding worth Rp3 trillion with BCA

LPEI kembali mendapatkan dukungan pendanaan dari perbankan dalam negeri. Kali ini dukungan diberikan oleh PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dalam bentuk time loan facility senilai Rp 3 triliun dengan tenor 2 tahun

LPEI has received a funding support from domestic banks. This support was provided by PT Bank Central Asia Tbk (BCA) in the form of a time loan facility worth Rp3 trillion with a tenor of 2 years.



12 Juli | July 12, 2021



#### Peluncuran Desa Devisa Kopi Subang Subang Coffee Foreign Exchange Village Launch

LPEI bersama Pemerintah Kabupaten Subang dan pihak terkait bersinergi meluncurkan Desa Devisa Kopi Subang sebagai Desa Devisa ke 4 yang dibina oleh LPEI.

LPEI collaborated with the Subang Regency Government and related parties to launch the Subang Coffee Foreign Exchange Village as the 4th Foreign Exchange Village fostered by LPEI.



12 Agustus | August 12, 2021



#### Webinar UMKM naik kelas dengan Ekspor berkelas bersama Pemangku Kepentingan A Webinar of MSMEs upgraded with qualified exports with Stakeholders

LPEI bersinergi dengan DJKN Kementerian Keuangan RI melaksanakan Webinar "UMKM Naik Kelas dengan Eksport Berkelas" dengan mengangkat tema Dukungan Pemerintah melalui Penjaminan Pemerintah (JAMINAH) dan Penugasan Khusus Eksport untuk UMKM

LPEI synergizes with DJKN Finance Ministry of the Republic of Indonesia to conduct a Webinar "MSMEs Upgrade its Class with Classy Exports" with a theme of Government Support through Government Guarantees (JAMINAH) and Export Special Assignments for MSMEs



25 Agustus | August 25, 2021



#### Penandatanganan Nota Kesepahaman LPEI dan PLN terkait Penelitian Ketenagalistrikan The signing of Memorandum of Understanding between LPEI and PLN regarding Electricity Research

LPEI menandatangani Nota Kesepahaman dengan PLN tentang Kerja Sama Pelaksanaan Penelitian Ketenagalistrikan yang mencakup kegiatan penelitian bersama terkait konsumsi dan listrik khususnya industri yang berorientasi ekspor.

LPEI signed a Memorandum of Understanding with PLN regarding Cooperation in the Implementation of Electricity Research which includes joint research activities related to consumption and electricity, especially export-oriented industries.

## PERISTIWA PENTING

### Events Highlights



#### Webinar JAMINAH "Solusi Perbankan untuk mendukung Pelaku Usaha Korporasi terdampak Covid-19"

A Webinar JAMINAH entitled "Banking Solutions to Support Corporate Business Actors Affected by Covid-19"

LPEI Menandatangani perjanjian Penjaminan Kredit melalui program Penjaminan Pemerintah (JAMINAH) dengan Standard Chartered Bank dan PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAP)

LPEI Signed a Credit Guarantee agreement through the Government Guarantee Program (JAMINAH) with Standard Chartered Bank and PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAP)

3 September | September 3, 2021

#### Signed LPEI and BPPK Ministry of Finance of the Republic of Indonesia regarding Human Resource Capacity Development to Support National Export Increase

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebagai Special Mission Vehicle (SMV) pemerintah dalam peningkatan ekspor nasional menandatangi Nota Kesepahaman dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sumber daya manusia dalam menunjang peningkatan ekonomi nasional.

The Indonesian Export Financing Agency (LPEI) as the government's Special Mission Vehicle (SMV) strived to increase national exports by signing a Memorandum of Understanding with the Finance Education and Training Agency (BPPK) of the Finance Ministry in order to develop human resource competencies in supporting the improvement of the national economy.



#### Kegiatan Vaksinasi LPEI Peduli di Jakarta

LPEI Peduli Vaccination Activities in Jakarta

LPEI bersinergi dengan semua pihak terkait dengan menyelenggarakan vaksinasi bersama Muspida dan Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta.

LPEI synergizes with all related parties to hold vaccinations with the Muspida and the Kebon Jeruk District Health Center, Jakarta



17 September | September 17, 2021

#### Kegiatan Ekspor Perdana Desa Devisa Kopi Subang

The First Export Activities of Foreign Exchange Village of Subang Coffee

LPEI mendukung kegiatan ekspor perdana yang berlangsung pada tanggal 17 September 2021 yang dihadiri oleh Menteri Koperasi & UKM serta Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan dan lembaga terkait

LPEI supported the inaugural export activity taking place on 17 September 2021 which was attended by the Minister of Cooperatives & SMEs and the Director General of National Export Development (PEN) of the Ministry of Trade and related institutions



20 & 21 | September 20 & 21, 2021

#### Kegiatan Vaksinasi LPEI Peduli di Toba, Samosir Sumatera Utara

LPEI Peduli Vaccination Activities in Toba, Samosir, North Sumatra

LPEI bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Toba dan Pemerintah Kabupaten Samosir menyelenggarakan program vaksinasi dalam rangka mendukung pemerintah mempercepat cakupan vaksinasi bagi masyarakat

LPEI synergized with the Toba Regency Government and the Samosir Regency Government to organize a vaccination program in order to support the government in accelerating vaccination coverage for the community



28 September | September 28, 2021

#### Talkshow Ekspor Nasional "Sulawesi Utara sebagai Gerbang UKM Eksport di Wilayah Indonesia Timur"

National Export Talkshow entitled "North Sulawesi as a Gateway for Export SMEs in Eastern Indonesia"

LPEI bersama DJKN Kementerian Keuangan RI berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan Talkshow eksport nasional menggerakkan UMKM Sulawesi Utara Go Global

LPEI together with DJKN Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in collaboration with the Provincial Government of North Sulawesi organized a national export talkshow encouraging North Sulawesi MSMEs to Go Global

## PERISTIWA PENTING

### Events Highlights



07 Oktober | October 7, 2021



#### Pembangunan KEK Mandalika dengan NIA untuk Tingkatkan Devisa

Mandalika SEZ Development with NIA to Increase Foreign Exchange

LPEI mendukung pembiayaan untuk pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika melalui skema National Interest Account (NIA) dalam rangka mendorong sektor industri pariwisata berorientasi ekspor, meningkatkan devisa dan berkontribusi atas penciptaan lapangan pekerjaan baru

LPEI supports financing for the development of Mandalika Special Economic Zone through the National Interest Account (NIA) scheme in order to encourage the export-oriented tourism industry sector, increase foreign exchange and contribute to the creation of new jobs.



21 Okt - 20 Des | Oct 7 - Dec 20, 2021



#### Virtual Trade Expo Indonesia 2021

Indonesia Virtual Trade Expo 2021

LPEI ikut ambil bagian dalam Virtual Trade Expo Indonesia dengan mengundang dan menampilkan mitra binaan LPEI pada pagelaran virtual trade expo dalam rangka mempromosikan dan *business matching* dengan calon buyer luar negeri

LPEI took part in the Virtual Trade Expo Indonesia by inviting and presenting LPEI fostered partners at the virtual trade expo in order to promote and business matching with potential overseas buyers.



02 November | November 2, 2021



#### Peresmian Desa Devisa Wedani

Inauguration of Wedani Foreign Exchange Village

Dalam rangka mendorong Kain Tenun dari Desa Wedani, Kabupaten Gresik di Jawa Timur mendunia, LPEI Meresmikan Desa Devisa Tenun Gresik untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada 1.500 penenun perempuan serta menciptakan produk berdaya saing global

In order to encourage the weaving fabric from Wedani Village, Gresik Regency in East Java to become global, LPEI Inaugurated the Gresik Weaving Foreign Exchange Village to provide training and assistance to 1,500 female weavers and create globally competitive products.



06 November | November 5, 2021



#### Anjangsana Dukungan Penjaminan Pemerintah terhadap Percepatan Pemulihian HOREKA di Bali

Government Guarantee Support Visit to Accelerate HOREKA Recovery in Bali

Dalam rangka mendorong pemulihian pariwisata di Bali, LPEI bersama PT PII memberikan Penjaminan Pemerintah (JAMINAH) kepada para pelaku usaha korporasi melalui perbankan nasional.

In order to encourage the recovery of tourism in Bali, LPEI together with PT PII provide Government Guarantees (JAMINAH) to corporate business actors through national banks.



06 November | November 6, 2021



#### Peresmian Desa Devisa Kusamba

Inauguration of Kusamba Foreign Exchange Village

Dalam Rangka mendorong garam dari Desa Kusamba menembus pasar global, LPEI bersinergi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) meresmikan Program Desa Devisa Kusamba untuk meningkatkan kapasitas para petani garam serta menghasilkan produk garam kusamba yang berdaya saing global

In order to encourage salt from Kusamba Village to penetrate the global market, LPEI in synergy with the Directorate General of State Assets (DJKN) inaugurated the Kusamba Foreign Exchange Village Program to increase the capacity of salt farmers and produce kusamba salt products that are globally competitive.



18 Desember | December 18, 2021



#### Peresmian Desa Devisa Sidoarjo

Inauguration of Sidoarjo Foreign Exchange Village

Dalam rangka mendorong komoditas Rumput Laut Desa Kupang, Kabupaten Sidoarjo mendunia, LPEI meresmikan Desa Devisa Sidoarjo yang dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

In order to encourage the global commodity of Seaweed in Kupang Village, Sidoarjo Regency, LPEI inaugurated the Sidoarjo Foreign Exchange Village which was attended by Members of Commission XI DPR RI, East Java Provincial Government and Sidoarjo Regency Government

## PERISTIWA PENTING

### Events Highlights



#### Peresmian Rumah Ekspor Solo

Inauguration of Solo Export House

Dalam rangka mewujudkan UMKM menjadi eksportir yang handal dan berdaya saing global serta memberikan solusi bagi para pelaku UMKM dalam menghadapi berbagai tantangan ekspor, LPEI meresmikan Rumah Ekspor di Solo sebagai wadah layanan satu atap terpadu untuk para pelaku UMKM yang ingin mencari informasi seputar ekspor.

In order to make MSMEs become reliable and globally competitive exporters and provide solutions for MSME actors in facing various export challenges, LPEI inaugurated the Export House in Solo as an integrated one-stop service forum for MSME players who want to seek information about exports.



**KHTISAR UTAMA**  
Performance Highlights

**01**

**LAPORAN MANAJEMEN**  
Management Report

**02**

**PROFIL PERUSAHAAN**  
Company Profile

**03**

**ANALISIS & PEMBAHASAN**  
Management

Management Discussion & Analysis

**04**

**TATA KELOLA PERUSAHAAN**  
Corporate Governance

**05**

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL**  
Corporate Social Responsibility

**06**

**LAPORAN KEUANGAN**  
Financial Statement

**07**



# LAPORAN MANAJEMEN

## Management Reports

LPEI senantiasa menjalankan perannya menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional. LPEI tetap menyalurkan pembiayaan, penjaminan, asuransi dan penguatan UKM Indonesia melalui jasa konsultasi sesuai dengan mandat yang diberikan.

Indonesia Eximbank continued to support government policies that stimulate national export programs. In compliance with its mandates, Indonesia Eximbank provided funding, guarantee, insurance, and advisory services to SMEs.







# LAPORAN DEWAN DIREKTUR

Board of Directors Report

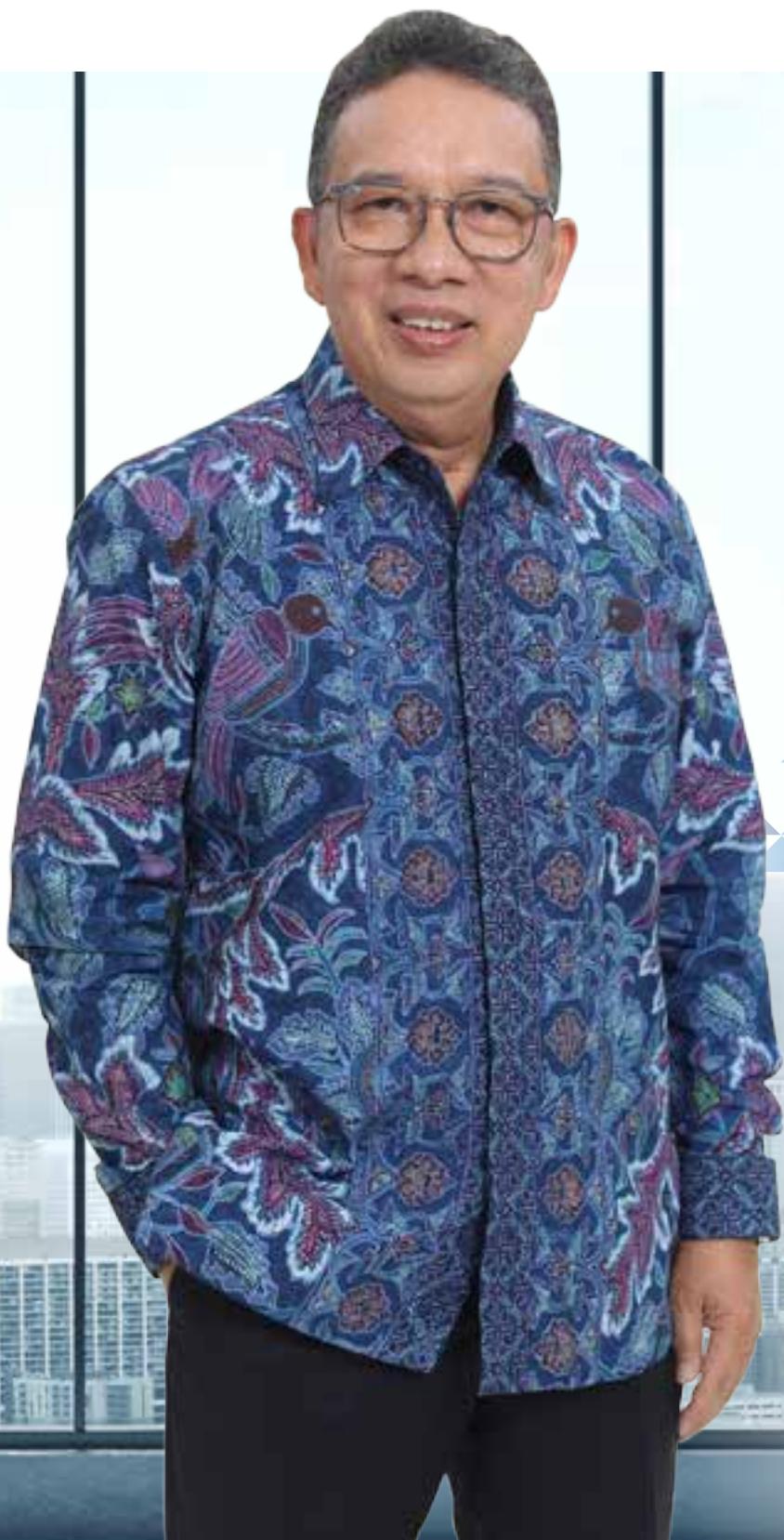
LPEI Salurkan  
**Rp 4,8**  
triliun

Penjaminan Pemerintah  
di **20 Sektor Strategis**

Indonesia Eximbank  
Disbursed Rp4.8 trillion of  
Government Guarantee for  
20 Strategic Sectors

## Daniel James Rompas

Ketua Dewan Direktur  
merangkap Direktur Eksekutif/  
Head of BOD concurrently  
Executive Director



“ Terlepas dari kondisi ekonomi yang menantang akibat pandemi yang masih berlanjut hingga tahun 2021, Dewan Direktur menilai pencapaian kinerja bisnis LPEI secara umum menunjukkan hasil yang baik dibandingkan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2021, baik secara kinerja keuangan maupun non-keuangan. Terjadi peningkatan kinerja bisnis dalam penyaluran Pembiayaan Khusus Ekspor (PKE), Penjaminan Pemerintah , asuransi, volume *Trade Finance*, dan perbaikan kualitas aset, yang pada akhirnya tercermin pada peningkatan laba bersih Lembaga dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian non finansial LPEI ditunjukkan melalui program Jasa Konsultasi antara lain melalui penciptaan eksportir baru, program Desa Devisa disamping pencapaian dari langkah-langkah penguatan proses bisnis internal yang telah dilaksanakan. Dewan Direktur juga mengapresiasi dan mendorong inisiatif strategis yang ditujukan untuk melaksanakan penugasan Pemerintah, baik dalam koridor Penugasan Khusus Ekspor (*National Interest Account*) maupun penugasan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Despite the unfavorable economic conditions impacted by the prolonged pandemic in 2021, Indonesia Eximbank's was able to deliver an overall strong business performance, both in financial and non-financial areas, compared to its 2021 Annual Work Plan and Budget (RKAT). Financing disbursement, trade finance volume, and asset quality improved across the board, which led to an increase in the Company's net income over the previous year. In non-financial performance, Indonesia Eximbank's achievements include its successful advisory services that generated new exporters, Desa Devisa program, and successful strengthening of internal business process. The Board of Directors also values and supports strategic efforts aimed at carrying out government assignments, both in the context of National Interest Account (NIA) and National Economic Recovery (PEN). ”

## LAPORAN DEWAN DIREKTUR

Board of Directors Report

### Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah nikmat dan karunia-Nya, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mampu melakukan pengelolaan atas mandat yang diberikan untuk menjalankan Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) di sepanjang tahun 2021 yang masih dihadapkan tantangan dampak dari pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga tahun 2021. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Dewan Direktur kepada Pemangku Kepentingan terkait pelaksanaan tugas pengawasan terhadap kegiatan operasional LPEI untuk tahun buku 2021.

### Kondisi Ekonomi dan Industri Tahun 2021

Pemulihan ekonomi global di sepanjang tahun 2021 menunjukkan ke arah perbaikan meski masih dihadapkan ketidakpastian akibat merebaknya varian Delta di pertengahan tahun 2021. Program akselerasi vaksinasi yang ditopang dengan stimulus ekonomi baik fiskal maupun moneter termasuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Sejalan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan oleh IMF sebesar 5,9% pada tahun 2021, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mampu tumbuh lebih kuat sebesar 3,69% dibandingkan kontraksi ekonomi pada tahun sebelumnya sebesar 2,07%.

Pertumbuhan Indonesia pada tahun 2021 tersebut terutama didorong oleh kenaikan ekspor barang sejalan dengan peningkatan harga-harga komoditas dunia. Mengacu kepada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2021, ekspor barang Indonesia mampu tumbuh 26,42% menjadi Rp2.481,82 triliun pada tahun 2021 dibandingkan kontraksi pertumbuhan ekspor sebesar -3,14% pada tahun sebelumnya. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia mencapai USD231,52 juta atau tumbuh signifikan sebesar 41,87%. Kenaikan ekspor tersebut disebabkan oleh kenaikan signifikan atas ekspor non minyak dan gas (migas) dan ekspor migas. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor non migas Indonesia menunjukkan kenaikan sebesar 41,50%

### Dear Esteemed Stakeholders,

We extend praise and gratitude to God Almighty for His blessings and for allowing Indonesia Eximbank to exercise its mandate in export financing throughout 2021 despite an ongoing pandemic during the year. On this occasion, we would like to report to our stakeholders the implementation of our supervisory responsibilities as the Board of Directors on the Company's operations in 2021.

### Economic and Industry Conditions in 2021

The global economic recovery continued its path in 2021, despite uncertainties due to Delta variant outbreak in mid-2021. Accelerated vaccination, supported by fiscal and monetary stimulus and the government's PEN initiative, favorably influence the economy. In line with the IMF's forecasted global economic growth of 5.9% in 2021, Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) increased by 3.69% in comparison to the previous year's economic contraction of 2.07%.

Indonesia's growth in 2021 was primarily driven by increase in exports of goods in line with increasing global commodity prices. In reference to Indonesia's 2021 GDP, exports of goods were able to grow by 26.42% to Rp2,481.82 trillion compared to a 3.14% contraction in the previous year. Indonesia's total export value reached USD231.52 million, representing a 41.87% increase. This was due to an increase in non-oil and gas and oil and gas exports. The Central Statistics Agency (BPS) data stated that Indonesia's non-oil and gas exports rose by 41.50% to USD219.25 billion in 2021. Oil and gas exports

LAPORAN DEWAN DIREKTUR  
Board of Directors Report

menjadi USD219,25 miliar pada tahun 2021. Ekspor migas mampu membukukan kenaikan lebih tinggi sebesar 48,78% menjadi USD12,28 miliar pada tahun 2021 dari USD8,25 miliar pada tahun sebelumnya sejalan dengan kenaikan harga komoditas dunia.

Perbaikan kinerja ekspor tersebut mendongkrak kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang mampu mencatat surplus sebesar USD13,5 miliar pada tahun 2021. Pencapaian ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dengan surplus sebesar USD2,6 miliar dan berkontribusi positif terhadap kenaikan posisi cadangan devisa Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia posisi cadangan devisa Indonesia akhir Desember 2021 mencapai USD144,9 miliar atau tumbuh 6,63% dari posisi tahun sebelumnya. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 8,0 bulan impor atau 7,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Selain itu, rata-rata kurs Rupiah pada tahun 2021 di level berada di level Rp14.318,50/USD atau mengalami penguatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp14.573,17/USD.

Terkait dengan pencapaian inflasi yang relatif rendah sebesar 1,87% di tengah daya beli masyarakat yang masih lemah pada tahun 2021, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25% pada akhir tahun tersebut. Keputusan tersebut diambil selain konsisten dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah juga mempertimbangkan stabilitas eksternal yang terjaga serta sebagai upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Sejalan dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun 2021, penyaluran kredit perbankan di Indonesia mencatatkan pertumbuhan meski masih terbatas sebesar 5,24% menjadi Rp5.768,6 triliun. Kenaikan pinjaman dari perbankan tersebut berkontribusi positif terhadap pertumbuhan aset bank sebesar 10,18% menjadi Rp10.112,30 triliun. Sementara itu, dana pihak ketiga berhasil tumbuh 12,21% atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit sehingga menyebabkan rasio LDR turun menjadi 77,13% pada

increased by 48.78% to USD12.28 billion in 2021 from USD8.25 billion the previous year, reflecting the increase in global commodity prices.

Stronger export performance fared well for Indonesia's Balance of Payments BOP, which was able to register a USD13.5 billion surplus in 2021. This level was significantly higher than the previous year's surplus of USD2.6 billion and contributed positively to Indonesia's increase in foreign exchange reserves. According to Bank Indonesia data, Indonesia posted USD144.9 billion in foreign exchange reserve at the end of December 2021, up 6.63 % from the previous year. This position is equivalent 8.0 months of import funding or 7.8 months of imports plus servicing government's external debt and was higher than international reserve threshold at approximately 3 months of imports. Furthermore, the average rupiah exchange rate in 2021 was 14,318.50/ USD, which was higher than the previous year's rate of USD14,573.17/USD.

Due to the relatively low inflation rate of 1.87% at the end of 2021, Bank Indonesia stipulated to keep the BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) at 3.50%, deposit facility interest rate at 2.75%, and the lending facility interest rate at 4.25%. Other than the low inflation rate, Bank Indonesia's decision was also informed by external stability and an effort to support the economic recovery.

As economic growth strengthened throughout 2021, loan disbursement by banks increased, despite at a moderate of 5.24% to Rp5,768.6 trillion. The increase in bank loans contributed positively to the 10.18% increase in banking assets to Rp10,112.30 trillion. Meanwhile, third-party funds grew by 12.21% or greater than loan growth, making the LDR ratio to fall to 77.13% in 2021. In general, the foundations of the Indonesian banking

tahun 2021. Secara umum, fundamental industri perbankan Indonesia masih kuat ditopang dengan rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 25,67% pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 23,89%.

#### **Penilaian Kinerja Usaha**

Terlepas dari kondisi ekonomi yang masih menantang akibat pandemi yang masih berlanjut hingga tahun 2021, Dewan Direktur menilai pencapaian kinerja bisnis LPEI secara umum menunjukkan hasil yang baik dibandingkan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2021, baik secara kinerja keuangan maupun non keuangan.

Terjadi peningkatan kinerja bisnis dalam penyaluran pembiayaan khusus ekspor (NIA), Penjaminan Pemerintah , asuransi, volume *Trade Finance*, dan perbaikan kualitas aset, yang pada akhirnya tercermin pada peningkatan laba bersih Lembaga dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian non finansial LPEI ditunjukkan melalui program Jasa Konsultasi antara lain melalui penciptaan eksportir baru, program Desa Devisa disamping pencapaian dari langkah-langkah penguatan proses bisnis internal yang telah dilaksanakan. Dewan Direktur juga mengapresiasi dan mendorong inisiatif strategis yang ditujukan untuk melaksanakan penugasan Pemerintah, baik dalam koridor Penugasan Khusus Ekspor (*National Interest Account*) maupun penugasan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dari perspektif keuangan, laba bersih LPEI mencapai Rp387,40 miliar atau naik 34,33% dari pencapaian tahun sebelumnya terutama ditopang oleh optimalisasi likuiditas dan efisiensi biaya. Sementara itu, total pembiayaan mencapai Rp83,96 triliun. Pertumbuhan pembiayaan *National Interest Account* (NIA) meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun lalu baik dari segmen korporasi maupun UKM. Di sisi lain, LPEI membukukan total penjaminan sebesar Rp13,14 triliun yang terdiri dari penjaminan umum sebesar Rp8,30 triliun dan penjaminan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp4,84 triliun.

Dari sisi rasio keuangan, LPEI mampu membukukan rasio permodalan yang lebih kuat sebesar 37,07%. Peningkatan rasio ini disebabkan oleh tambahan modal

industry remained solid, backed by capital adequacy ratio (CAR) of 25.67% in 2021, up from 23.89% the previous year.

#### **Assessment on Business Performance**

Despite the unfavorable economic conditions impacted by the pandemic throughout 2021, the Board of Directors noted that Indonesia Eximbank's delivered an overall strong business performance, both in financial and non-financial areas, compared to its 2021 Annual Work Plan and Budget (RKAT).

Financing disbursement for export-special assignment (NIA), government guarantee, insurance, trade finance volume, and asset quality improved across the board, which led to an increase in the Company's net income over the previous year. In non-financial performance, Indonesia Eximbank's achievements include its successful advisory services that generated new exporters, Desa Devisa program, and successful solidification of internal business process. The Board of Directors also values and supports strategic efforts aimed at carrying out government assignments, both in the context of NIA and National Economic Recovery (PEN).

From financial perspective, Indonesia Eximbank posted net income of Rp387.40 billion, grew 34.33% from the previous year's results, owing mostly to liquidity optimization and cost efficiency. Meanwhile, total financing reached Rp83.96 trillion. This was led by doubled growth of NIA financing from both the corporate segment and the Small and Medium Enterprises (SMEs) compared to the previous year. Moreover, the Company booked total guarantee of Rp13.14 trillion, which comprised Rp8.30 trillion of regular guarantee and Rp4.84 trillion of guarantee provided as part of PEN program.

On financial ratios, Indonesia Eximbank achieved a higher capital ratio of 37.07%. This increase was due to additional state equity participation (PMN) that

## LAPORAN DEWAN DIREKTUR

### Board of Directors Report

negara melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima di Desember 2021 serta kenaikan laba bersih. Sementara itu, dilihat dari kualitas aset, LPEI mampu membukukan rasio NPL (*gross*) sebesar 21,03% atau lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya dengan rasio NPL (*gross*) sebesar 26,08%, rasio NPL (*net*) mampu menjadi 7,12% lebih baik dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar 11,49%.

Seiring dengan peningkatan laba bersih tahun 2021, rasio profitabilitas LPEI seperti *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), dan *Net Interest Margin* (NIM) menunjukkan perbaikan menjadi 0,53%; 1,79%; dan 1,18% pada tahun 2021 dibandingkan capaian tahun sebelumnya atas ketiga rasio tersebut masing-masing sebesar 0,06%; 1,41%; dan 0,77%.

Selain aspek bisnis yang menghasilkan kinerja keuangan, LPEI juga menjalankan mandat Jasa Konsultasi antara lain melalui program pelatihan *Coaching Program for New Exporter* (CPNE) di 8 kota kepada lebih dari 322 pelaku UKM. Melalui pelatihan ini, 20 pelaku usaha telah berhasil menjadi eksportir baru dengan nilai ekspor sebesar Rp2,8 miliar. Disamping CPNE, LPEI selama tahun 2021 berhasil menciptakan 8 Desa Devisa baru. Desa Devisa merupakan program pengembangan wilayah (*community development*) yang dilakukan dalam bentuk program pendampingan pengembangan potensi ekspor daerah setempat dan aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR).

#### Pengawasan terhadap Implementasi Strategi

Dewan Direktur mendukung inisiatif strategis yang diajukan oleh Direktur Eksekutif yang tertuang dalam 8 Key Initiatives dan terbagi dalam 4 area fokus utama, yaitu: (1) Perbaikan NPL; (2) Pelaksanaan mandat; (3) Proses Bisnis; dan (4) Penguatan internal. Dewan Direktur menyetujui strategi penyaluran pembiayaan ekspor tahun 2021 dilakukan secara selektif dengan berfokus pada pembiayaan dalam rangka Penugasan Khusus Ekspor dan sektor UKM. Selain itu, Dewan Direktur juga mendorong peningkatan pelaksanaan mandat di luar Pembentukan yaitu Penjaminan, Asuransi dan Jasa Konsultasi.

was added in December 2021, as well as an increase in net income. Meanwhile, from asset management perspective, the Company reported NPL (*gross*) ratio of 21.03%, an improvement compared to the previous year of 26.08%. Meanwhile, net NPL ratio stood at 7.12% - an improvement from previous year's position of 11.49 %.

Aligned with an increase in net income in 2021, Indonesia Eximbank's profitability ratio such as *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), and *Net Interest Margin* (NIM) improved to 0.53%, 1.79%, and 1.18% in 2021 respectively, from 0.06%, 1.41%, and 0.77% respectively in the previous year.

Aside from revenue-focused business activities, the Company also has Advisory Service mandate. Under this mandate, the Company offers Coaching Program for New Exporters(CPNE) training program, which was delivered in 8 cities and to more than 322 SMEs in 2021. This training generated 20 new exporters with a combined export value of Rp2.8 billion. In addition to CPNE, the Company also established 8 new Desa Devisa in 2021. This is a community development program in target locations, aiming to develop local export potential as well as Corporate Social Responsibility (CSR) activities.

#### Oversight on Strategy Implementation

The Board of Directors endorsed 8 strategic initiatives proposed by the Executive Director, which are grouped into four key focal areas: (1) NPL improvements; (2) Implementation of mandates; (3) Business Processes; and (3) Internal solidifications. The Board of Directors agreed that export financing in 2021 should be more selective and focused on NIA as well as SME. Furthermore, the Board of Directors encouraged more activities under the Company's mandates other than financing, such as Guarantee, Insurance, and Consulting Services.

## LAPORAN DEWAN DIREKTUR

### Board of Directors Report

Dalam hal perbaikan kualitas pembiayaan, Dewan Direktur juga mendukung inisiatif strategis pembentukan *Special Purpose Vehicle* (SPV) yang ditujukan untuk mengelola aset bermasalah LPEI, sehingga LPEI dapat lebih fokus dalam pelaksanaan mandatnya. Inisiasi ini juga diyakini akan memberikan sinyal positif kepada stakeholders, khususnya investor dan kreditur LPEI. Kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung membuat NPL di market saat ini masih tinggi. Meskipun penanganan NPL LPEI yang telah dilakukan melalui program restrukturisasi secara internal telah berjalan dengan baik, namun dengan adanya SPV diharapkan dapat lebih mampu membuat kegiatan perbaikan NPL yang lebih *sustainable*.

Dewan Direktur juga mengapresiasi dan mendorong inisiatif strategis yang ditujukan untuk melaksanakan penugasan Pemerintah, baik dalam koridor Penugasan Khusus Ekspor (*National Interest Account*) maupun penugasan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Jumlah new disbursement pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor (PKE) selama tahun 2021 sebesar Rp2.560 miliar, terdiri dari fasilitas PKE UKM sebesar Rp299 miliar, PKE Trade Finance Rp1.138 miliar, PKE Mandalika sebesar Rp560 miliar, dan PKE Kawasan sebesar Rp562 miliar. Adapun untuk outstanding pembiayaan PKE posisi 31 Desember 2021 telah mencapai Rp2,9 triliun. Hingga 31 Desember 2021 total kelolaan dana Penugasan Khusus Ekspor tercatat sebesar Rp8,7 triliun, dimana dana penugasan ini telah dialokasikan antara lain pada 6 program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) yaitu: (1) PKE Kawasan Afrika, Asia Selatan dan Timur Tengah, (2) PKE dalam rangka Pengembangan Pariwisata KEK Mandalika, (3) PKE Industri Penerbangan (4) PKE UKM Berorientasi Ekspor, (5) PKE Trade Finance, serta (6) PKE Alat Transportasi.

Dalam rangka menyukkseskan penugasan pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) LPEI terus meningkatkan kerja sama untuk program ini bersama Perbankan. Hingga akhir Desember 2021, setidaknya ada 31 Bank yang telah melakukan kerja sama untuk program JAMINAH dengan LPEI baik dalam bentuk penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan LPEI mencatat outstanding program penjaminan PEN pada 31 Desember

In terms of enhancing financing quality, the Board of Directors also supported a strategic initiative of establishing a Special Purpose Vehicle (SPV) to manage Indonesia Eximbank's non-performing assets, hence the Company could focus more on its mandates. We believe this initiative sends a positive message to stakeholders, particularly our investors and creditors. As the ongoing Covid-19 pandemic, the market NPL remained high even today. While the Company's internal restructuring of NPL has been successful, the SPV is expected to make NPL improvement activities more sustainable.

The Board of Directors also values and supports strategic efforts aimed at carrying out government assignments, both in the context of NIA and PEN. The total amount of new financing for NIA in 2021 was Rp2,560 billion, which consisted of Rp299 billion of NIA facility for SMEs, Rp1,138 billion for NIA in Trade Finance, Rp560 billion for NIA Mandalika, and Rp562 billion in NIA for Regions and Special Zones. On 31 December 2021, the outstanding financing of NIA reached Rp2.9 trillion. From the amount, Rp8.7 trillion was allocated for 6 NIA programs: (1) NIA Africa, South Asia, and the Middle East, (2) NIA for tourism development in KEK Mandalika, (3) NIA Aviation Industry, (4) NIA for Export-Oriented SMEs, (5) NIA in Trade Finance, and (6) NIA Transportation.

In government guarantee program as part of PEN, Indonesia Eximbank continued to expand its collaboration with banks. As of the end of December 2021, there were at least 31 banks that have joined Indonesia Eximbank in the JAMINAH program, either through Memorandum of Understanding (MoU) or Cooperation Agreement (PKS). The Company recorded Rp4.84 trillion of outstanding guarantee program under PEN. Furthermore, also as part of PEN, Indonesia

## LAPORAN DEWAN DIREKTUR

### Board of Directors Report

2021 sebesar Rp4,84 triliun. Selain itu pada tahun 2021, LPEI telah membantu penyaluran investasi Pemerintah PEN sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional yang diberikan kepada BUMN strategis, dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp1,75 triliun kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

Dewan Direktur senantiasa menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk merumuskan, menetapkan kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LPEI. Terkait dengan pengawasan terhadap implementasi strategi yang telah ditetapkan tersebut, Dewan Direktur melakukan penyelenggaraan Rapat Dewan Direktur secara berkala pada tahun 2021 untuk kegiatan pengambilan keputusan kebijakan dan isu-isu strategis, serta dalam rangka pengawasan operasional lembaga. Rapat tersebut melibatkan Direktur Pelaksana, pejabat struktural lainnya dan peserta lainnya yang dianggap perlu sebagai peserta undangan dalam rangka koordinasi dan percepatan penyelesaian tindak lanjut keputusan rapat.

Selain itu, untuk memperkuat fungsi pengawasan tersebut sekaligus mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terkait pengawasan, Dewan Direktur didukung oleh komite-komite di bawah Dewan Direktur yang terdiri dari Komite Audit (KA), Komite Pemantau Risiko (KPR), Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN), dan Komite Program Penugasan Khusus (KNIA). Pada tahun 2021, Dewan Direktur juga memiliki Staf Ahli yang membantu melaksanakan pengawasan untuk area pelaksanaan Penugasan Khusus Ekspor, pelaksanaan strategi komunikasi Lembaga, serta program riset dan pengembangan LPEI.

Dewan Direktur juga memberikan rekomendasi kepada Manajemen untuk pelaksanaan inisiatif strategis tahun periode tahun 2022 yaitu menjaga momentum perbaikan kualitas aset, meneruskan penguatan manajemen risiko, menyeimbangkan pertumbuhan pembiayaan dengan pertumbuhan pada bisnis asuransi dan penjaminan serta meneruskan penguatan proses internal. Selain itu, rekomendasi Dewan Direktur lainnya adalah menyarankan kepada Manajemen untuk menginisiasi penerapan aksi keuangan berkelanjutan (*sustainable financing*) yang bertujuan kepada penerapan *Environment and Social Governance*, dan melakukan program penguatan budaya lembaga.

Eximbank supported the government in disbursing investments to strategic SOEs in 2021 and has disbursed Rp1.75 trillion to state-owned plantation company, PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

The Board of Directors is in charge of formulating and enacting policies and supervising the Company's operational activities. To oversee the Company's strategy implementation, we regularly convened throughout 2021. Our meetings discussed decision-making and strategic issues and are integral to our oversight activities. The meetings invited Managing Directors, other structural officials, and other relevant participants to coordinate with and accelerate meeting decisions' follow up.

Furthermore, to strengthen and support the effectiveness of our oversight responsibility, the Board of Directors is assisted by committees under the Board of Directors, namely Audit Committee (AC), Risk Monitoring Committee (RMC), Remuneration and Nomination Committee (RNC), and NIA Committee. In 2021, the Board of Directors also brought in expert staff to oversee NIA-related activities, the Company's communications strategy implementation, and the Company's research and development program.

The Board of Directors also provided recommendations to Indonesia Eximbank's management. For 2022 strategic initiatives, we advised the Company to maintain asset quality improvement momentum, continue to strengthen risk management, balance financing growth with growth in the insurance and guarantee services, and to strengthen internal processes. Furthermore, we recommended for the management to commence sustainable financing, implement environment and social governance, and to strengthen Indonesia Eximbank's institutional culture.

## LAPORAN DEWAN DIREKTUR

### Board of Directors Report

Manajemen LPEI juga disarankan oleh Dewan Direktur untuk menetapkan strategi komunikasi dan *stakeholders engagement* yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran stakeholders atas peran dan fungsi LPEI, serta menciptakan sinergi dan kolaborasi kelembagaan serta meningkatkan peran Jasa Konsultasi LPEI yang ditujukan untuk menciptakan dan meningkatkan daya saing ekspor pelaku usaha maupun daerah, serta memberikan manfaat sosial ekonomi yang dapat terukur.

#### Pandangan terhadap Prospek Usaha

Dewan Direktur telah menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan(RKAT)Tahun 2022 yang disusun oleh Direktur Eksekutif beserta jajaran Direktur Pelaksana. RKAT tersebut selaras dengan arahan yang diberikan Kementerian Keuangan RI. Penyusunan RKAT tersebut juga mempertimbangkan aktivitas ekonomi dunia yang mulai *rebound* meskipun dengan kecepatan yang berbeda antar negara pasca ekonomi dunia terkontraksi di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19.

Selanjutnya, pemulihan ekonomi diperkirakan terus berlanjut pada tahun 2022 namun dengan tren melambat menuju pertumbuhan jangka panjangnya. Mempertimbangkan hal tersebut dan tantangan Covid-19 yang belum berakhir selama tahun 2021, maka strategi LPEI untuk tahun 2022 akan tetap melanjutkan penguatan fondasi yang antara lain berfokus pada pertumbuhan mandat yang berkelanjutan, perbaikan kualitas aset, penguatan internal dan SDM, serta pengembangan bisnis.

Selain itu, LPEI fokus pada pertumbuhan mandat dan bisnis yang berkelanjutan dengan meningkatkan peran LPEI sebagai fasilitator, akselerator, *aggregator*, dan *arranger* dalam ekosistem ekspor, berfokus pada pertumbuhan pembiayaan yang sehat, serta pemerataan mandat dalam kegiatan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. LPEI juga akan melanjutkan momentum perbaikan kualitas aset, melakukan peningkatan control, tata kelola dan *risk management* dalam rangka penyaluran pembiayaan baru. Hal penting lainnya adalah penguatan internal dengan menjalankan proses *credit underwriting* yang robust, proses operasional yang efisien dan efektif, penguatan infrastruktur IT dan

The Board of Directors also advised the management to establish communications and stakeholder engagement strategies to raise awareness on Indonesia Eximbank's role, enhance institutional synergy and collaboration, strengthen its Advisory role to create and improve export competitiveness of businesses and regions, and to generate measurable social and economic benefits.

#### Assessment on Business Prospects

The Board of Directors approved the Executive Director and Managing Directors' 2022 Annual Work Plan and Budget (RKAT). The RKAT is consistent with the Ministry of Finance's direction. The formulation of RKAT has taken into account global economic situation, which is generally on the rebound despite at varying rates across countries, after the global economy contracted in 2020 as a result of the Covid-19 pandemic.

Economic recovery is predicted to continue in 2022, but at a slower pace towards its long-term growth. Given this, as well as Covid-19 related issues in 2021, Indonesia Eximbank's strategies for 2022 will continue to focus on reinforcing its foundation, such as by focusing on sustainable growth of its mandates, improving assets quality, strengthening of internal process and HR, as well as business development.

Moreover, Indonesia Eximbank will also focus on sustainably growing its mandate and business by strengthening its function as a facilitator, accelerator, aggregator, and arranger in the export ecosystem, focusing on healthy financing growth and balancing its mandates in financing, guarantee, and insurance activities. Indonesia Eximbank will also continue the momentum to improve assets quality, enhance control, governance, and risk management in new financing. The Company will continue internal strengthening through robust credit underwriting processes, efficient and effective operational processes, and reinforcing IT infrastructure and Management Information System

## LAPORAN DEWAN DIREKTUR

### Board of Directors Report

Management Information System (MIS), dan penguatan SDM. Selain itu juga manajemen aset dan liabilitas yang robust juga dilakukan agar tercapai optimalisasi likuiditas.

#### Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Lembaga

Dewan Direktur memberikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan Manajemen untuk senantiasa meningkatkan kualitas Tata Kelola Lembaga sepanjang tahun 2021 diantaranya melalui penerbitan dan penyempurnaan kebijakan dan peraturan internal, selain turut aktif dalam penyempurnaan peraturan yang menjadi pedoman tata kelola yaitu penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah.

#### Aktivitas Dewan Direktur dan Kinerja Komite di bawah Dewan Direktur

Dewan Direktur berkomitmen kuat untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip GCG yang terdiri dari keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Eksekutif, serta memberikan nasihat kepada Direktur Eksekutif. Kegiatan pengawasan Dewan Direktur dilaksanakan antara lain dalam bentuk penyampaian laporan berkala manajemen kepada Dewan Direktur serta penyelenggaraan Rapat Dewan Direktur.

Dewan Direktur menyelenggarakan Rapat Dewan Direktur secara rutin, dimana dalam forum ini fungsi penetapan kebijakan dan pengawasan Dewan Direktur dilaksanakan. Setiap arahan dan keputusan Rapat Dewan Direktur dicatat dan dimonitor tindak lanjut pelaksanaannya.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terkait pengawasan, Dewan Direktur didukung oleh Komite-komite dan Staf Ahli. Komite-komite di bawah Dewan Direktur meliputi: Komite Audit (KA), Komite Pemantau Risiko (KPR), Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN), dan Komite Program Penugasan Khusus (KNIA). Adapun staf ahli

(MIS), as well as strengthening of its HR. Moreover, to achieve optimum liquidity, the robust assets and liabilities management will also be implemented.

#### Overview on Corporate Governance Practices

The Board of Directors appreciates the management's efforts to continuously improve governance quality throughout 2021, including the issuance and refinement of internal policies and regulations, as well as actively participating in the improvement of regulations that serves as a guideline, namely Finance Minister Regulation No. 208/PMK.06/2021 concerning Governance Principles, Risk Management, and Know Your Customer.

#### Board of Directors' Activities and Performance of Committees Under the Board

The Board of Directors is strongly committed to ensuring the implementation of GCG principles namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, as well as supervising the Executive Director's responsibility performance and providing advice to the Executive Director. As part of its oversight role, the Board of Directors receives regular management reports and holds the Board of Directors' meetings.

Regular Board of Directors' meetings also serve as decision-making forum on policy adoption and oversight measures. All decisions are documented and monitored against actual follow-ups.

The Board of Directors is assisted by the committees and expert staff to ensure the effectiveness of its oversight responsibilities. The Board of Directors has the following committees: Audit Committee (AC), Risk Monitoring Committee (RMC), Remuneration and Nomination Committee (RNC), and NIA Committee. The expert staff members oversee NIA-related activities, the

## LAPORAN DEWAN DIREKTUR

### Board of Directors Report

Dewan Direktur membantu melaksanakan pengawasan untuk area pelaksanaan penugasan khusus Ekspor, pelaksanaan strategi komunikasi Lembaga, serta program riset dan pengembangan LPEI.

Komite-komite Dewan Direktur melaksanakan peran dan fungsinya secara baik melalui koordinasi dan komunikasi dengan unit-unit kerja terkait, sehingga dapat dijaga keselarasan arah kebijakan dan eksekusi pelaksanaannya.

#### Penerapan *Whistleblowing System*

Dewan Direktur menilai inisiatif strategis yang diambil untuk penguatan sistem pengendalian internal melalui peluncuran *Whistleblowing System* (WBS) dan Pengendalian Gratifikasi, atas kerja sama dengan Kementerian Keuangan, merupakan langkah yang sangat baik. Selain program sosialisasi berkelanjutan terkait WBS dan Gratifikasi kepada seluruh pegawai LPEI bersama Itjen Kemenkeu dan Pusintek Kementerian Keuangan, langkah inovatif lainnya adalah publikasi animasi *Whistleblowing System* (WBS) di laman YouTube LPEI.

Dewan Direktur meyakini berbagai langkah penguatan yang ditempuh Manajemen secara berkelanjutan akan mampu mencapai tujuan penerapan WBS di LPEI yaitu menciptakan Pegawai LPEI yang memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi, memperkuat penerapan prinsip tata kelola LPEI, dan memperkuat sistem pengendalian internal LPEI.

#### Perubahan Komposisi Dewan Direktur

Komposisi Dewan Direktur LPEI tidak mengalami perubahan di sepanjang tahun 2021.

#### Apresiasi

Dewan Direktur mengapresiasi kepercayaan dan dukungan yang diberikan Pemerintah kepada LPEI untuk menjalankan tugas dan fungsinya mendorong eksport nasional. Dukungan ini diberikan antara lain melalui dukungan *regulatory framework*, Penyertaan Modal Negara, dan ijin pembentukan *Special Purpose Vehicle* (SPV). Kami juga memberikan penghargaan kepada

Company's communications strategy implementation, and the Company's research and development program.

The Board of Directors' committees carry out their duties and functions effectively through coordination and communication with relevant work units, ensuring that policies and policy implementation are aligned.

#### **Whistleblowing System**

The Board of Directors appreciates the strategic measures launched in collaboration with the Ministry of Finance to strengthen internal control system, namely Whistleblowing System (WBS) and Gratification Control. Together with the Ministry's Inspectorate General and IT Center, the Company has been consistently promoting these programs to all employees. We value innovative campaign idea of an animation video to explain WBS, accessible on the Company's YouTube channel.

The Board of Directors believes that various measures taken consistently by the management will contribute to successful WBS program in Indonesia Eximbank, namely to have employees with strong integrity and professionalism, robust governance principles, and rigorous internal control system.

#### **Changes in Board of Directors' Composition**

The composition of Indonesia Eximbank's Board of Directors remained the same in 2021.

#### **Appreciation**

The Board of Directors would like to express our appreciation to the Government's confidence and support to Indonesia Eximbank in carrying out its mandates in boosting the national exports, such as through regulatory framework, state equity participation, and approval for the Company to establish a Special Purpose Vehicle (SPV). We also convey our

## LAPORAN DEWAN DIREKTUR

Board of Directors Report

segenap insan LPEI atas dedikasi dan kerja kerasnya sehingga mampu mencapai kinerja LPEI dengan hasil yang baik walaupun di tengah kondisi pandemi yang belum terkendali dan situasi ekonomi yang masih belum sepenuhnya pulih.

Demikian laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Dewan Direktur kami sampaikan. Kami optimis Manajemen mampu melanjutkan langkah perbaikan dan penguatan internal disamping pelaksanaan mandat dan peran LPEI dalam ekosistem ekspor di tahun mendatang.

appreciation to all employees for their dedication and hard work, and for delivering positive results for Indonesia Eximbank despite the challenging pandemic situation and an ongoing progress of economy to full recovery.

To conclude, we have no doubt that Indonesia Eximbank's management will be able to continue its internal transformation efforts while exercising its role in the export ecosystem.

Jakarta, Mei | May 2022



**Daniel James Rompas**

Ketua Dewan Direktur

Chairman of the Board of Directors



# DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF

Board of Directors and Executive Director



**DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF**  
Board of Directors and Executive Director



**.01**

**Daniel James Rompas**

Ketua Dewan Direktur  
merangkap Direktur Eksekutif  
Head of BOD concurrently Executive Director

**.02**

**Arus Gunawan**

Anggota Dewan Direktur  
Member of the BOD

**.03**

**Felia Salim**

Anggota Dewan Direktur  
Member of the BOD

**.04**

**Suminto**

Anggota Dewan Direktur  
Member of the BOD

**.05**

**Rijani Tirtoso**

Anggota Dewan Direktur  
Member of the BOD

**.06**

**Kasan**

Anggota Dewan Direktur  
Member of the BOD



# LAPORAN DIREKTUR EKSEKUTIF- DIREKTUR PELAKSANA

Executive Directors & Managing Directors Report



LAPORAN DIREKTUR EKSEKUTIF-DIREKTUR PELAKSANA  
Executive Directors & Managing Directors Report

“ Di tengah pandemi yang masih berlangsung hingga tahun 2021, LPEI senantiasa menjalankan perannya menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional. LPEI tetap menyalurkan Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi dan penguatan UKM Indonesia melalui Jasa Konsultasi sesuai dengan mandat yang diberikan.

Indonesia Eximbank continued to support government policies that stimulate national export programs despite the lingering pandemic in 2021. In compliance with its mandates, Indonesia Eximbank provided funding, guarantee, insurance, and advisory services to the SMEs. ”

**Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,**

Puji dan syukur kami ucapan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank dapat melalui tahun 2021 dan mampu menghadapi tantangan eksternal berupa Pandemi COVID-19 pencapaian kinerja yang terkelola dengan baik. Peluang perbaikan di berbagai sektor usaha mulai terbuka pada tahun 2021 seiring dengan pengendalian pandemi yang lebih baik dan stimulus ekonomi dari pemerintah yang mendorong kebijakan membuka kembali pembatasan (*reopening policy*) sehingga dunia usaha perlahan kembali bergerak dan ekonomi dunia dan Indonesia ditutup menguat di zona positif setelah mengalami kontraksi di tahun sebelumnya. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pencapaian kinerja LPEI untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

**Dear Distinguished Shareholders and Stakeholders,**

We praise and express our gratefulness to God Almighty. With His favour, Indonesia Eximbank was able to journey through 2021, mitigating the challenges brought by the COVID-19 pandemic and eventually concluding the year with solid results. Business recovery opportunities has begun to emerge in 2021, as the pandemic was under control and the government continued with its economic stimulus, aiming at moving toward the re-opening policy. As the result, business sectors were gradually turning around and the global as well as national economy posted growth following contraction in the previous year. On this occasion, please allow us to report the Indonesia Eximbank management performance and results for the fiscal year ended on December 31, 2021.

## LAPORAN DIREKTUR EKSEKUTIF-DIREKTUR PELAKSANA

### Executive Directors & Managing Directors Report

#### Tinjauan Makro Ekonomi dan Industri Tahun 2021

Pandemi Covid-19 masih menjadi katalis utama yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dunia di sepanjang tahun 2021. Seiring dengan penanganan pandemi yang lebih baik ditopang dengan akselerasi program vaksinasi yang dilakukan di berbagai negara di dunia, pemulihan ekonomi global pada 2021 terus berlanjut di tengah ketidakpastian seputar Pandemi terutama akibat merebaknya varian Delta di pertengahan tahun 2021. Selain vaksinasi dukungan stimulus ekonomi oleh berbagai negara di dunia juga berperan meredam ketidakpastian kondisi perekonomian dunia sehingga perekonomian dunia diperkirakan tumbuh lebih kuat.

Setelah terkontraksi -3,1% di tahun 2020, perekonomian global diperkirakan mencapai 5,9% *year-on-year* (yoY) oleh International Monetary Fund (IMF) melalui *World Economic Outlook* (WEO) yang dirilis Januari 2022. Sejalan dengan IMF, lembaga internasional lainnya seperti *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dan *World Bank* juga memperkirakan perbaikan pertumbuhan dunia meski dengan tingkat pertumbuhan lebih konservatif masing-masing sebesar 5,6% yoY dan 5,5% yoY. Perbaikan ekonomi dunia pada tahun 2021 tersebut sejalan dengan perbaikan aktivitas investasi yang diproyeksikan dengan *Purchasing Manager Index* (PMI Komposit Global) yang mampu menunjukkan kinerja yang solid sepanjang tahun 2021 dengan tren ekspansi (PMI>50).

Dari sisi supply, perkembangan positif ini didorong pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas dan meluasnya program vaksinasi, sehingga aktivitas di sektor manufaktur maupun jasa dapat melakukan pembukaan bertahap (*gradual reopening*). Sementara itu, dari sisi demand, ekspansi didukung oleh lonjakan pesanan baru seiring dengan permintaan perusahaan perusahaan yang sedang melakukan restocking di tengah penurunan persediaan *finished goods*, terutama menjelang akhir tahun. Hal ini seiring dengan aktivitas konsumsi atau tingkat penjualan ritel (*retail sales*) di negara-negara utama dunia sebagian besar menunjukkan pertumbuhan positif.

Menurut IMF, volume perdagangan barang dan jasa dunia tahun 2021 diperkirakan tumbuh di level 9,3% yoY atau mengalami *rebound* signifikan dibandingkan

#### 2021 Macroeconomic and Industry Overview

Throughout the year the COVID-19 pandemic continued to be a predominant influence to the global economic development. At the same time, disease control measures were more effective and vaccination programs were taking place worldwide. As a result, economic recovery continued despite uncertainties, particularly due to the Delta variant outbreak in the middle of the year. In addition to vaccines, economic stimulus implemented by various governments contributed to alleviating economic uncertainty, allowing for the awaited revival of the global economy.

After falling by -3.1% in 2020, the World Economic Outlook (WEO) published by the International Monetary Fund (IMF) in January 2022 forecasted that the global economy would expand by 5.9% annually. In line with IMF's view, other international organizations, such as the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and the World Bank also anticipated global growth – although offering more conservative projections at 5.6% yoY and 5.5% yoY, respectively. A stronger global economy in 2021 was also consistent with increase in investment activity indicated by the Purchasing Managers' Index (global composite PMI) as proxy, in which the PMI exhibited robust performance with an expansionary trend (PMI>50) throughout 2021.

As a result of the easing of mobility restriction policies and vaccination programs, the manufacturing and service sectors could gradually resume operations (gradual re-opening), thereby improving supply. In terms of demand, the expansion was bolstered by a surge in new orders, as businesses needed to restock in response to a decline in finished goods availability, especially towards the end of the year. Demand increase was aligned with growth in consumption, or retail sales, in major markets that were primarily demonstrating an upward trend.

IMF projected that the volume of global trade of goods and services would grow by 9.3% yoY in 2021, representing a considerable rebound from the previous

## LAPORAN DIREKTUR EKSEKUTIF-DIREKTUR PELAKSANA

### Executive Directors & Managing Directors Report

pertumbuhan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar -8,2% yoy. Pemulihan perdagangan barang mulai meluas, tidak hanya terkonsentrasi pada pembelian barang yang berkaitan dengan pandemi dan *medical equipment*. Sedangkan, pemulihannya perdagangan di sektor jasa masih berjalan lambat karena masih terbatasnya aktivitas perjalanan lintas batas dan kegiatan di ruang publik.

Sejalan dengan yang terjadi di pasar global, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 3,69% pada tahun 2021 dibandingkan kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,07% pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan Indonesia pada tahun 2021 tersebut terutama didorong oleh kenaikan ekspor barang yang sejalan dengan peningkatan harga-harga komoditas dunia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor barang mencapai Rp2.481,82 triliun dengan pertumbuhan sebesar 26,42% pada tahun 2021 dibandingkan kontraksi pertumbuhan ekspor sebesar -3,14% pada tahun sebelumnya. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia mencapai USD231,52 juta atau tumbuh signifikan sebesar 41,87%.

Peningkatan tajam atas ekspor barang tersebut ditopang oleh kenaikan tajam atas ekspor non minyak dan gas (migas) dan ekspor migas. Ekspor non migas Indonesia berdasarkan data BPS menunjukkan kenaikan sebesar 41,50% dari USD154,94 miliar di tahun 2020 menjadi USD219,25 miliar pada tahun 2021. Sementara itu, ekspor migas mampu membukukan kenaikan lebih tinggi sebesar 48,78% menjadi USD12,28 miliar pada tahun 2021 dari USD8,25 miliar pada tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh kenaikan harga komoditas dunia seperti minyak (*Brent*), gas alam, dan batubara masing-masing mencapai USD70,85/bbl; USD3,72/MMBTU; dan USD136,31/MT pada tahun 2021. Pada tahun sebelumnya harga ketiga komoditas tersebut sebesar USD43,29/bbl; USD2,13/MMBTU; dan USD60,33/MT.

Perbaikan kinerja tersebut berdampak positif terhadap Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Menurut Bank Indonesia, perkembangan NPI secara keseluruhan tahun 2021 mencatat surplus tinggi, sehingga ketahanan sektor eksternal tetap terjaga. Surplus NPI tahun 2021 tercatat sebesar USD13,5 miliar, meningkat signifikan dibandingkan capaian surplus pada tahun sebelumnya sebesar USD2,6 miliar. Perkembangan tersebut

year's contraction of -8.2 % yoy. The recovery of trade in goods began to increase, expanding beyond the purchase of pandemic-related commodities and medical equipment. However, the recovery of service trade was lagging behind sluggish as cross-border travels and public activities remain limited.

In accordance with the global market conditions, Indonesia's economy was able to grow by 3.69% in 2021, compared to a contraction of 2.07% the previous year. The growth was primarily driven by an increase in exports of goods along with the rise in global commodity prices. The Central Statistics Agency (BPS) stated that exports of goods increased by 26.42% to Rp2,481.82 trillion in 2021, compared to a decrease of -3.14% in the previous year. Cumulatively, Indonesia's export value reached USD231.52 million, a 41.87% increase.

The sharp increase in exports of goods was supported by a substantial jump in exports of commodities other than oil and gas as well as exports of oil and gas. According to BPS data, Indonesia's non-oil and gas exports rose by 41.50% from USD154.94 billion in 2020 to USD219.25 billion in 2021. In the meantime, oil and gas exports increased by 48.78% to USD12.28 billion in 2021, up from USD8.25 billion in the previous year. The increase was driven by the prices of global commodities such as oil (*Brent*), natural gas, and coal that reached USD70.85/bbl, USD3.72/MMBTU, and USD136.31/MT, respectively. In comparison, the same commodities had price points of USD43.29/bbl, USD2.13/MMBTU, and USD60.33/MT, respectively, in 2020.

Indonesia's overall stronger performance was favourable to its Balance of Payments (BOP). Bank Indonesia stated that Indonesia's NPI reported a substantial surplus in 2021, hence preserving the economy's external resilience. In 2021, NPI surplus reached USD13.5 billion, a considerable increase from USD2.6 billion in the previous year. This growth was backed by surplus in account, capital account, and financial account. In 2021, current

## LAPORAN DIREKTUR EKSEKUTIF-DIREKTUR PELAKSANA

### Executive Directors & Managing Directors Report

ditopang oleh surplus transaksi berjalan serta surplus transaksi modal dan finansial. Transaksi berjalan pada 2021 membukukan surplus sebesar USD3,3 miliar (0,3% dari PDB), setelah mencatat defisit pada 2020 sebesar USD4,4 miliar (0,4% dari PDB). Selain itu, transaksi modal dan finansial pada 2021 juga membukukan surplus USD11,7 miliar, lebih tinggi dari capaian pada tahun sebelumnya sebesar USD7,9 miliar terutama ditopang oleh investasi langsung dan investasi portofolio.

Berbagai capaian positif tersebut berdampak positif terhadap posisi cadangan devisa Indonesia. Menurut Bank Indonesia, posisi cadangan devisa Indonesia akhir Desember 2021 tetap tinggi, yakni USD144,9 miliar, setara pembiayaan 8,0 bulan impor atau 7,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Selain itu, rata-rata kurs Rupiah pada tahun 2021 di level berada di level Rp14.318,50/USD atau mengalami penguatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp14.573,17/USD.

Di sisi lain, seiring dengan tingkat inflasi yang relative rendah sebesar 1,87% pada akhir tahun 2021, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%. Keputusan tersebut selain konsisten dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah juga mempertimbangkan stabilitas eksternal yang terjaga serta sebagai upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Sejalan dengan perbaikan indikator ekonomi di sepanjang tahun 2021, kredit yang disalurkan oleh industri perbankan mengalami pertumbuhan meski masih terbatas sebesar 5,24% menjadi Rp5.768,6 triliun. Sejalan dengan kenaikan kredit tersebut, total aset perbankan tumbuh sebesar 10,18% menjadi Rp10.112,30 triliun. Sementara itu, dana pihak ketiga berhasil tumbuh 12,21% atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit sehingga menyebabkan rasio LDR turun menjadi 77,13% pada tahun 2021. Perbaikan rasio keuangan lainnya yang dibukukan oleh industry perbankan pada tahun 2021 adalah rasio NIM sebesar 4,51% yang diikuti dengan perbaikan rasio BOPO menjadi 83,58% menjadikan rasio ROA baik meningkat menjadi 1,84%. Secara umum, meski di tengah tekanan pandemi

account reported a surplus of USD3.3 billion (0.3% of GDP), compared to a deficit of USD4.4 billion in 2020 (0.4 % of GDP). Moreover, driven by direct investment and portfolio investment, capital and financial accounts recorded a surplus of USD11.7 billion in 2021, surpassing the previous year's surplus of USD7.9 billion.

These accomplishments rendered a positive effect on Indonesia's foreign exchange reserve, which stayed at a strong USD144.9 billion by the end of December 2021 as per Bank Indonesia data. That amount was equivalent to 8.0 months of import financing or 7.8 months of imports and servicing government's external debt, and at the same time exceeded international reserve adequacy standard of approximately 3 months of import financing. In addition, the average rupiah exchange rate in 2021 was Rp14,318.50/USD, or stronger than the previous year's figure of Rp14,573.7/USD.

Due to the relatively low inflation rate of 1.87% at the end of 2021, Bank Indonesia has maintained the BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) at 3.50%, deposit facility interest rate at 2.75%, and the lending facility interest rate at 4.25%. Other than the low inflation rate, Bank Indonesia's decision was also informed by external stability and an effort to support economic recovery.

As economic performance indicators strengthened throughout 2021, loan disbursement by the banking industry moderately increased by 5.24% to Rp5,768.6 trillion. In tandem with the increase in lending, total bank assets grew by 10.18% to Rp10,112.30 trillion. Third-party funds grew by 12.21%, or higher than credit growth, and contributed to the decline of LDR ratio to 77.13% in 2021. The banking industry also saw an increase in NIM ratio to 4.51% in 2021, followed by an increase in the BOPO ratio to 83.58%, resulting in growth of ROA ratio to 1.84%. Overall, despite pressures due to the pandemic, the

## LAPORAN DIREKTUR EKSEKUTIF-DIREKTUR PELAKSANA

Executive Directors & Managing Directors Report

fundamental industri perbankan Indonesia masih baik ditopang dengan rasio kecukupan modal (CAR) masih tetap tinggi sebesar 25,67% pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 23,89%.

### Analisa Kinerja Tahun 2021

LPEI didirikan berdasarkan UU No. 2 Tahun 2009 untuk melaksanakan Pembiayaan Ekspor Nasional melalui pembiayaan, penjaminan dan/atau asuransi yang bertujuan menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional. Di tengah kondisi pandemi yang masih berlangsung hingga tahun 2021, total pembiayaan LPEI yang disalurkan sebesar Rp83,96 triliun atau mencapai 89,06% dari target Rp94,28 triliun. Pencapaian ini juga lebih rendah 7,13% dibandingkan total pembiayaan pada tahun 2020 yang mencapai Rp90,41 triliun. Penurunan pembiayaan ini disebabkan penurunan pada segmen korporasi (termasuk NIA) sebesar 6,37% namun terjadi peningkatan pada segmen UKM (termasuk NIA) sebesar 1,74%. Penurunan Pembiayaan di 2021 dibandingkan tahun lalu antara lain by design dimana sedang dilakukan secara bertahap penajaman mandat, serta kondisi excess liquidity akibat kenaikan harga beberapa komoditas ekspor telah mendorong pelunasan beberapa debitur. Namun, demikian di tahun 2021 new disbursement pembiayaan yang dilakukan LPEI meningkat dibandingkan tahun lalu dan porsi pembiayaan UKM terhadap total pembiayaan meningkat menjadi 17,19% dibandingkan tahun 2020 sebesar 15,69%.

Berdasarkan jenis pembiayaan, terkecuali penjaminan untuk konsumsi yang mengalami pertumbuhan, penjaminan untuk modal kerja dan investasi masing-masing mengalami penurunan sebesar 5,23% dan 9,31% menjadi Rp45,05 triliun dan Rp38,78 triliun. Dari total pembiayaan tersebut, pembiayaan dan piutang Penugasan Khusus mencapai Rp2,95 triliun atau naik 84,59% dari tahun sebelumnya.

Selain itu, LPEI mampu membukukan penjaminan senilai Rp13,14 triliun per Desember 2021 atau 17,10% dari target RKAT tahun 2021 sebesar atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar Rp9,91 triliun dengan pendapatan Rp77,29 miliar dari 202 terjamin. Termasuk di dalamnya adalah Program Penjaminan Pemerintah dalam rangka PEN dengan outstanding Rp4,8 triliun

fundamental of Indonesian banking industry was solid. This was evidenced by capital adequacy ratio (CAR) that stood at 25.67% in 2021, compared to 23.89 % in 2020.

### Assessment on 2021 Performance

Indonesia Eximbank was founded in accordance with Law No. 2 of 2009 to implement National Export Financing via financing facilities, guarantee, and/or insurance to support government policies and national export initiatives. Amidst the prolonged pandemic in 2021, Indonesia Eximbank disbursed a total financing of Rp94.28 trillion or 89.06% of its target. This result was 7.13% less than the total financing disbursed in 2020 at Rp90.41 trillion. This decline was attributed to a 6.37% decrease in the corporate segment (including NIA), although there was a 1.74% increase in the SME segment (including NIA). At the same time, the decline also happened by design, as Indonesia Eximbank was refining its mandates, and due to the increase in several export commodities – resulting in full repayment by several debtors and excess liquidity. However, new disbursement grew in 2021 compared to the previous year, and the proportion of SME financing to overall financing increased to 17.19% from 15.69% in 2020.

By type of financing, only guarantee for consumer sector that saw growth; the guarantee for working capital and investment fell by 5.23% and 9.31% to Rp45.05 trillion and Rp38.78 trillion, respectively. Of the total financing, financing and receivables associated with NIA reached Rp2.95 trillion, an increase of 84.59% over the prior year.

In addition, as of December 2021, LPEI was able to book guarantee of Rp13.14 trillion, or 17.10% of the 2021 RKAT targets, or greater than the previous year's Rp9.91 trillion, with revenues of Rp77.29 billion from 202 guarantee. This included Government Guarantee Program under the purview of the National Economy Recovery (PEN) program, which had an outstanding balance of Rp4.8

## LAPORAN DIREKTUR EKSEKUTIF-DIREKTUR PELAKSANA

### Executive Directors & Managing Directors Report

per Desember 2021 atau meningkat dari Rp867 miliar di tahun sebelumnya.

Di sisi lain, realisasi volume *Trade Finance* tahun 2021 tercatat sebesar USD667,6 triliun atau ekuivalen Rp9,52 triliun atau sebesar 118,94% dari target Desember Tahun 2021 sebesar Rp8 triliun. Pencapaian tersebut tumbuh 57,67% dari posisi tahun sebelumnya senilai Rp6,03 triliun. Kenaikan ini dikontribusi oleh peningkatan pada segmen korporasi.

Peningkatan juga terjadi pada plafon Asuransi, dimana per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp10,94 triliun atau 118,61% dari target sebesar Rp9,22 triliun. Pencapaian tersebut juga lebih tinggi 35% dari posisi tahun sebelumnya yang mencapai Rp8,11 triliun. Kinerja Asuransi tersebut menyumbangkan *fee based income* dalam bentuk pendapatan premi netto sebesar Rp2,80 miliar dari 72 tertanggung.

Sejalan dengan berkurangnya pembiayaan di sepanjang tahun 2021, total aset LPEI mencapai Rp89,04 triliun atau 91,03% dari target sebesar Rp97,81 triliun dan lebih rendah 3,31% dari posisi tahun sebelumnya yang mencapai Rp92,08 triliun. Namun demikian, dari sisi kualitas pembiayaan LPEI terjadi perbaikan selama tahun 2021, dimana NPL Gross turun mencapai Rp17,66 triliun dengan rasio NPL gross sebesar Rp 21,03% dari target 19,26% dan NPL Netto 7,12% dari target 9,50%. Pencapaian tersebut terutama dipengaruhi oleh upaya *collection* berupa restrukturisasi, *recovery* dan hapus buku yang dilakukan LPEI.

Dari sisi profitabilitas, seiring dengan berkurangnya penjaminan LPEI total pendapatan bunga dan usaha syariah LPEI mengalami penurunan 16,45% menjadi Rp4,26 triliun. Namun demikian, pendapatan bunga dan usaha syariah netto LPEI mengalami peningkatan sebesar 43,63% menjadi Rp1,21 triliun ditopang oleh beban bunga yang turun sebesar 28,28% menjadi Rp3,06 triliun. Selain itu, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan yang lebih rendah menjadi Rp258,68 miliar pada tahun 2021 dari Rp425,03 miliar menyumbang peningkatan laba bersih tahun berjalan yang mencapai Rp387,40 miliar pada tahun 2021.

trillion as of December 2021, an increase from the previous year's figure of Rp867 billion.

In contrast, the realized volume of trade finance in 2021 was USD667.6 trillion, or an equivalent to Rp9.52 trillion or 118.94% of the December 2021 target of Rp8 trillion. This achievement meant an increase of 57.67% over the prior year's level of Rp6.03 trillion. This growth was due to the expansion of the corporate segment.

Growth was also seen in insurance ceiling that stood at Rp10.94 trillion as of 31 December 2021, or 118.61% of the targeted Rp9.22 trillion. This achievement was also 35% higher than the previous year's position of Rp8.11 trillion. The insurance performance generated fee-based income of Rp2.80 billion in net premium income from 72 insured entities.

In accordance with the decrease in financing throughout 2021, Indonesia Eximbank's total assets reached Rp89.04 trillion, or 91.03% of the targeted Rp97.81 trillion and 3.31% less than the previous year's position of Rp92.08 trillion. However, the quality of Indonesia Eximbank financing improved in 2021, as gross NPL decreased to Rp17.66 trillion with a gross NPL ratio of 21.03%, compared to the target of 19.26%, and net NPL stood at 7.12%, compared to the target of 9.50%. The NPL results reflected Indonesia Eximbank's collection strategies, comprising loan restructuring, recovery, and write off.

On profitability, as the Company's guarantee declined, the total interest income and income from sharia business fell by 16.45% to Rp4.26 trillion. Nonetheless, net sharia interest income and income from sharia business grew by 43.63% to Rp1.21 trillion, supported by a 28.28% decline in interest expense to Rp3.06 trillion. In addition, the Company reduced its allowance for impairment losses to Rp258.68 billion in 2021 from Rp425.03 billion - this measure contributed to an increase in net income for the current year, which reached Rp387.40 billion in 2021.

## LAPORAN DIREKTUR EKSEKUTIF-DIREKTUR PELAKSANA

### Executive Directors & Managing Directors Report

#### Kebijakan Strategis 2021

Di tengah pandemi yang masih berlangsung hingga tahun 2021, LPEI senantiasa menjalankan perannya menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional. LPEI tetap menyalurkan pembiayaan, penjaminan, asuransi dan penguatan UKM Indonesia melalui jasa konsultasi sesuai dengan mandat yang diberikan. Adapun garis besar kebijakan strategis yang ditempuh oleh LPEI di Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

##### a. Pengelolaan dan perbaikan kualitas aset

Pengelolaan dan perbaikan kualitas aset sudah menunjukkan progres yang baik, namun demikian ketidakpastian kondisi pasar yang masih terdampak pandemi sampai saat ini menyebabkan masih terdapat risiko penurunan kualitas aset, oleh karena itu LPEI senantiasa berhati-hati dan terus berupaya melakukan penguatan internal dalam bentuk antara lain selektif dalam penyaluran pembiayaan, memperkuat unit kerja reviewer dan restrukturisasi, serta menjalankan mekanisme *early warning detection* secara regular

##### b. Peningkatan Penjaminan, Pembiayaan, *Trade Finance* dan Asuransi

Sebagai bagian dari mandat untuk meningkatkan ekspor nasional, LPEI terus meningkatkan perannya dalam hal tersebut antara lain dengan mendorong pembiayaan umum berupa pembiayaan *direct export tier 1*, peningkatan *Trade Finance*, pembiayaan melalui skema *supply chain financing* dengan melakukan *mapping* dalam hal orientasi ekspor bisnis debitur, *product holding* dan *wallet size* melalui produk penjaminan dan asuransi.

##### c. Pelaksanaan PKE, PEN dan IP

Dalam situasi ekonomi yang belum pulih akibat dari pandemi COVID-19 yang dimulai dari tahun 2020, LPEI sebagai SMV Pemerintah mengemban tugas khusus dalam mengakselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional melalui pelaksanaan program PEN. Salah satu program utama yaitu dengan melaksanakan program jaminan Pemerintah (JAMINAH) atas pembiayaan yang diberikan perbankan sehingga diharapkan penyaluran kredit perbankan tetap dapat terus bergulir dan mempercepat pemulihan

#### Strategic Policies in 2021

Amidst the ongoing pandemic in 2021, Indonesia Eximbank continued to support government policies that stimulate national export programs. In compliance with its mandates, Indonesia Eximbank provided funding, guarantee, insurance, and advisory services to SMEs. The strategic policies that the Company adopted in 2021 are as follows:

##### a. Improving assets management and quality

We noted good progress on assets management and quality improvement, however we also aware of market uncertainties due to the pandemic that could unfavourably affected assets quality. The Company maintained its prudence and focused on internal strengthening, such as by applying selective financing, strengthening reviewer and restructuring units, and regularly implementing early warning detection mechanism.

##### b. Enhancing guarantee, financing, trade finance, and insurance facilities

As part of its mandates to boost the national exports, Indonesia Eximbank continued to strengthen its role in financing, such as in tier-1 direct exports, increasing trade finance, providing supply chain financing informed by a mapping of debtors' export focus, product holding and maintaining wallet size through guarantee and insurance facilities.

##### c. Engaging in NIA, PEN, and IP

Amidst the ongoing progress of economy to rebound since the COVID-19 pandemic began in 2020, Indonesia Eximbank as the government's SMV is tasked with accelerating national economic recovery through export financing (PEN). One of PEN's primary programs is the government guarantee (JAMINAH) for banking financing. JAMINAH is expected to sustain financing activities, therefore triggering faster recovery. In accordance with the directives from the government, the Company also disbursed NIA, such

## LAPORAN DIREKTUR EKSEKUTIF-DIREKTUR PELAKSANA

### Executive Directors & Managing Directors Report

ekonomi nasional. Selain itu, LPEI juga menyalurkan pembiayaan khusus ekspor (PKE) sesuai dengan arahan pemerintah, antara lain PKE Trade Finance, PKE Pariwisata, PKE Industri Penerbangan, PKE Kawasan, dan PKE UKM. LPEI juga melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana investasi pemerintah kepada PTPN (PT Perkebunan Nusantara).

#### d. Pengembangan Bisnis UMKM & UMBe

Sektor UMKM diharapkan menjadi pendorong ekonomi padat karya dalam meningkatkan eksport nasional menembus pasar global. Dalam kaitan dengan hal tersebut, LPEI senantiasa berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan sektor UMKM. Strategi LPEI untuk segmen UKM dilaksanakan melalui pembiayaan umum antara lain melalui *supply chain financing*, pembiayaan PKE, dan juga layanan jasa konsultasi untuk terus meningkatkan kelas UKM Indonesia melalui *Coaching Program for New Eksporitir* (CPNE), pendampingan mitra binaan dan *Community Development* untuk menghasilkan Desa Devisa yang membawa nama Indonesia ke pasar global dan mendorong peningkatan ekspor nasional.

#### e. Penguatan Operasional, Manajemen Risiko, dan Tata Kelola

LPEI senantiasa terus melakukan penguatan internal antara lain dengan penguatan pada Operasional, Manajemen Risiko dan Tata Kelola. Salah satu yang telah dijalankan adalah mekanisme *Early Warning Detection* untuk mendeteksi lebih awal potensi pemburukan kualitas aset sehingga diharapkan langkah-langkah antisipasi dapat diambil lebih dulu untuk mencegah terjadinya pemburukan kualitas aset. Terkait dengan peningkatan *monitoring covenant* dilakukan dengan melakukan pengembangan mekanisme pemantauan *covenant* kredit dan pembentahan *credit file*. Selain itu pemenuhan tindak lanjut atas rekomendasi auditor eksternal dan internal akan terus dilakukan sebagai bentuk kepatuhan dan peningkatan kinerja lembaga. Selain itu juga LPEI melakukan peningkatan aspek tata kelola yang setiap tahunnya akan dinilai oleh konsultan independen. Penguatan tata kelola lembaga dilakukan secara berkelanjutan melalui sosialisasi pilar tata kelola lembaga kepada pegawai.

as for Trade Finance, Tourism, Aviation Industry, Regions, and SMEs. The Company is also responsible for executing government investments in the state-owned plantation corporation, PTPN.

#### d. Supporting the growth of MSMEs and export-oriented SMEs

The MSME sector is expected to be the growth engine in labour-intensive economy and contribute to global penetration of national exports. Indonesia Eximbank has always supported the expansion of this sector through financing activities, such as supply chain financing and NIA, and advisory services to upgrade SMEs' business scale. The Company offers Coaching Program for New Exporters (CPNE), assistance for partner SMEs, and community development program, Desa Devisa, that can strengthen the national exports.

#### e. Strengthening operations, risk management, and governance

The Company continued to reinforce its internal operations, risk management, and governance. Indonesia Eximbank has an early warning detection mechanism to detect potential decline in assets quality and enable prevention measures. The Company also monitors credit covenant monitoring and refines credit file and ensures its compliance with recommendations from external and internal auditors as a way to improve its performance. The Company enhances its governance practices by having the system assessed on annual basis by an independent consultant. Indonesia Eximbank also regularly promotes the governance pillars to employees.

## LAPORAN DIREKTUR EKSEKUTIF-DIREKTUR PELAKSANA

### Executive Directors & Managing Directors Report

#### f. Efisiensi Biaya yang Berkelanjutan

Strategi efisiensi menjadi salah satu bagian penting dalam menyeimbangkan penurunan pendapatan yang di saat kondisi ekonomi yang belum pulih dan masih terdampak oleh pandemi. Efisiensi tidak hanya mencakup biaya operasional namun juga efisiensi dalam hal beban bunga yang didapat dari optimalisasi likuiditas dan strategi pendanaan. Monitoring efisiensi biaya dilakukan secara rutin melalui working group yang membahas efisiensi, di mana di dalamnya selain membahas realisasi biaya namun juga membahas usulan mengenai inisiatif-inisiatif efisiensi lainnya. Selain itu untuk membangun *Cost Culture* yang kuat ke depannya, dilakukan juga sosialisasi dan himbauan penerapan *Internal Green Office* yang berkontribusi terhadap efisiensi total biaya Lembaga.

#### g. Transformasi MIS dan Pengembangan Teknologi

Dukungan MIS dan Teknologi sangat penting untuk peningkatan layanan LPEI, dengan peningkatan kapabilitas MIS yang lebih baik dapat membantu analisa dan pengambilan keputusan manajemen yang lebih cepat dan lebih baik. Penguatan dari sisi MIS dan teknologi terus dilakukan untuk memperkuat kemampuan lembaga dan hal IT security dan juga penyediaan indikator yang lebih baik untuk pengambilan keputusan.

#### h. Pengembangan Kompetensi SDM, Pemberdayaan Budaya Kerja Lembaga dan Manajemen Kinerja yang terintegrasi

LPEI sadar bahwa SDM merupakan komponen utama dalam mengerakkan seluruh roda aktivitas Lembaga, oleh karena itu untuk mendukung semua rencana strategis yang akan dilakukan, tidak ketinggalan adalah pengembangan dari SDM yang dimiliki itu sendiri. Pengembangan SDM juga dibarengi dengan penguatan Budaya Lembaga yaitu TRUST (*Trustworthy, Reliable, Unique, Service Excellence* dan *Team Work*) yang dilakukan melalui serangkaian *Culture Transform* Program yang diukur dengan survey engagement pegawai. Dalam hal eksekusi prioritas utama lembaga, alignment indikator kinerja utama yang jelas dan terukur dari level Lembaga sampai dengan level unit kerja akan dilakukan sebagai bagian dari manajemen kinerja yang terintegrasi.

#### f. Promoting sustainable cost efficiency

At a time when the economy has not yet recovered and remained impacted by the pandemic, strategies to achieve greater efficiency became instrumental to offset a decline in revenues. Efficiency measures targeted not only operational expenditure but also interest expenditure, driven by optimizing liquidity and funding options. The Company regularly monitored its cost-efficiency progress and discussed other potential efficiency initiatives in a working group. To build a strong cost culture, the Company campaigned and called for internal green office policy, which would contribute to the overall cost effectiveness of Indonesia Eximbank.

#### g. Executing MIS transformation and technological developments

Support from MIS and technology is crucial to the enhancement of Indonesia Eximbank's services. Enhanced MIS capabilities facilitate faster and more accurate management analysis and decision-making. The Company continued to improve its technology application and MIS to improve its IT security capacity, as well as to provide better decision-making indicators.

#### h. Enhancing people's skills, promoting work culture, and implementing integrated performance management system

Indonesia Eximbank believes in people as the backbone of its operations. As such, people development is integral to its strategic plan. Aside from developing skills, the Company also continually strengthens its culture called TRUST (*Trustworthy, Reliable, Unique, Service Excellence, and Teamwork*), through a series of *Culture Transform* programs and measured using employee engagement survey. In terms Indonesia Eximbank's priority program implementation, the Company has clear and measurable performance indicators that are aligned organization-wide, from the organizational to work unit level. This strategy is part of its integrated performance management.

## LAPORAN DIREKTUR EKSEKUTIF-DIREKTUR PELAKSANA

### Executive Directors & Managing Directors Report

Direktur Eksekutif menerapkan prioritas tersebut di atas dengan mempertimbangkan arahan dari Kementerian Keuangan. Kemudian prioritas utama yang akan diturunkan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) di tahun tersebut. Selanjutnya, monitoring pencapaian dari target dilakukan secara rutin melalui rapat dengan manajemen atau rapat yang membahas kinerja secara berkala. Untuk prioritas lembaga sendiri, LPEI melakukan monitoring atas pencapaianya melalui aktivitas *project management* untuk memastikan pelaksanaan dapat dilakukan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

#### Kendala dan Solusi 2021

LPEI berkomitmen tinggi terhadap implementasi atas mandat yang diberikan sekaligus berupaya semaksimal untuk mencapai target disertai dengan beragam kebijakan strategis yang dijalankan. Namun demikian, faktor eksternal berupa pandemi yang di luar kendali LPEI dan masih berlangsung hingga tahun 2021 menjadi kendala bagi LPEI yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penyaluran Pembiayaan di Tahun 2021 masih terdampak dengan pandemi dengan risiko kualitas aset yang masih tinggi. Dari sisi portofolio pembiayaan LPEI menurun disebabkan antara lain by design dimana sedang dilakukan secara bertahap penajaman mandat, serta kondisi *excess liquidity* akibat kenaikan harga beberapa komoditas eksport elah mendorong pelunasan beberapa debitur. Namun, demikian di Tahun 2021 New Disbursement pembiayaan yang dilakukan LPEI meningkat dibandingkan tahun lalu dan porsi pembiayaan UKM terhadap total pembiayaan meningkat menjadi 17,2% dibandingkan Tahun 2020 sebesar 15,7%;
- b. Terkait mandat penjaminan terdapat beberapa kendala, di antaranya di masa pandemi ini perbankan jauh lebih selektif dalam memberikan kredit sehingga berdampak pada penjaminan yang bisa diberikan. LPEI dengan dukungan pemerintah telah melakukan upaya-upaya melalui revisi PMK hingga sosialisasi yang lebih intensif yang berdampak pada program penyaluran penjaminan. Berbagai upaya tersebut telah mulai memberikan hasil, dengan meningkatnya penyaluran program Penjaminan Pemerintah walaupun masih belum sesuai dengan yang ditargetkan.

Indonesia Eximbank's priorities are formulated by the Executive Director based on the directives from the Ministry of Finance. The priorities are translated into the Company's Annual Budget Work Plan (RKAT) for the year. Target milestones are monitored from time to time in management meetings or performance meetings. Indonesia Eximbank also has internal priorities, where progress is monitored against project management activities to ensure target achievement.

#### Challenges and their solutions in 2021

Indonesia Eximbank is highly committed to exercising its mandates and meeting its targets through its various strategic policies. At the same time, it recognized external challenges, such as the pandemic, that were beyond its control in 2021:

- a. Financing disbursement in 2021 was remained affected by the pandemic, as evident from high assets quality risks. Indonesia Eximbank's financing portfolio declined by design, as the Company is gradually sharpening its mandates, and due to excess liquidity resulting from full financing repayment of several debtors following commodity price increase. Nevertheless, by the end of 2021, new financing increased and contribution of SME financing to total financing rose to 17.2% from 15.7% in 2020.
- b. On guarantee facility mandate, the challenge was strict credit selection by banks during the pandemic, which affected the volume of guarantee. With government's support, such as through Finance Minister Regulation amendment, Indonesia Eximbank took measures to increase uptake of guarantee facility including program promotion. While the end results were under target, the Company saw increase in guarantee disbursement resulted from these efforts.

## LAPORAN DIREKTUR EKSEKUTIF-DIREKTUR PELAKSANA

### Executive Directors & Managing Directors Report

c. Tingkat NPL masih cukup tinggi walaupun telah terjadi perbaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berbagai inisiatif telah dilakukan untuk Perbaikan kualitas aset antara lain; *Extensive Monitoring Watchlist Account*, optimalisasi penurunan NPL melalui restrukturisasi, *recovery* dan *write off*.

### Prospek Usaha 2022

Pertimbangan digunakan Dewan Eksekutif dalam menyusun prospek usaha LPEI adalah kondisi ekonomi baik secara global dan domestik, kondisi internal LPEI dimana dalam kurun waktu 2 tahun sedang menjalani transformasi bisnis, pemurnian dan penajaman mandat, dan fokus bisnis dan prioritas utama LPEI yang ingin di Tahun 2022.

World Bank dalam laporan *Global Economy Prospect* bulan Januari 2022 memperkirakan Perekonomian dunia diperkirakan tumbuh lebih moderat pada tahun 2022 menjadi 4,4% seiring dengan berkurangnya dukungan stimulus ekonomi seiring dengan Kebijakan pembatasan mobilitas yang kembali diterapkan akibat lonjakan kasus infeksi COVID-19 seiring dengan merebaknya varian Omicron, meningkatnya ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina, dimana diikuti pengenaan sanksi kepada Rusia, sehingga mendorong kenaikan harga komoditas semakin tinggi dan disrupti rantai pasok global menjadi semakin kompleks, dan Percepatan normalisasi kebijakan moneter, terutama dinegara maju untuk mengatasi tekanan inflasi. Sejalan dengan perkiraan pertumbuhan dunia yang tumbuh moderat tersebut IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 4,4%.

Di sisi domestik, sejalan dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi tahun 2021, Pemerintah Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dalam negeri sebesar 4,5-5,2% pada tahun 2022. Sementara itu, Bank Indonesia merevisi proyeksi pertumbuhan perekonomian Indonesia berada di kisaran 4,5%-5,3% ditahun 2022 sejalan dengan proyeksi pertumbuhan perekonomian oleh Pemerintah. Estimasi perbaikan ekonomi ini ditopang dengan fungsi intermediasi perbankan akan semakin membaik, dengan pertumbuhan kredit sebesar 6,0-8,0% pada tahun 2022.

c. NPL rate was remained relatively high despite significant improvements. Several initiatives have been implemented to enhance assets quality, including the Extensive Monitoring Watchlist Account and the optimization of NPL reduction via restructuring, recovery, and write-off.

### Business Prospect in 2022

The Executive Board develops the Company's business outlook by considering global and domestic economic conditions and the Company's internal condition. Internally, in the past two years, Indonesia Eximbank has been going through a business transformation in which mandates, business focus, and priorities for 2022 are refined and sharpened.

In its January 2022 Global Economy Prospect report, the World Bank predicted that the global economy would grow at a more moderate rate of 4.4% in 2022 due to reduced economic stimulus support and the re-implementation of the mobility restriction policy in response to an increase in cases of COVID-19 infection and the outbreak of the Omicron variant, rising geopolitical tensions between Russia and Ukraine, and the imposition of sanctions on Russia. As a result, commodity prices increase and disruption of global supply chain become more complex, and the normalization of monetary policy is quickened, particularly in advanced nations, to counter inflationary pressures. Consistent with projections of low global growth, the IMF anticipates a global economic expansion of 4.4%.

Nationally, in line with economic growth in 2021, the Indonesian government projects that domestic economic growth would range between 4.5 and 5.2% in 2022. Meanwhile, Bank Indonesia revised growth predictions for 2022 to a range of 4.5 % to 5.3 %, in line with government projections. The forecasted economic development will be backed by an increase in loan growth between 6.0-8.0% in 2022, as a result of improved banking intermediation.

## LAPORAN DIREKTUR EKSEKUTIF-DIREKTUR PELAKSANA

### Executive Directors & Managing Directors Report

Optimisme perbaikan ekonomi tersebut diharapkan membantu kinerja ekspor nasional antara lain membangun kembali iklim usaha yang kondusif dalam rangka produksi barang ekspor untuk mengambil momentum permintaan ekonomi global yang meningkat. Namun demikian, LPEI senantiasa menyikapi kondisi terkini secara hati-hati mengingat dampak pandemic yang belum usai dengan memprioritaskan pada hal-hal berikut ini:

- Pertumbuhan Mandat dan Bisnis yang berkelanjutan
- Perbaikan Kualitas Aset;
- Penguatan Internal;
- Penguatan SDM;
- Pengembangan Bisnis.

Sehubungan dengan sasaran dan strategi di atas, beberapa target yang akan dicapai oleh LPEI pada tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Target penyaluran mandat:
  - a. *Outstanding* pembiayaan ekuivalen Rp88,23 triliun dengan porsi UKME meningkat menjadi 18,4%;
  - b. *Outstanding* penjaminan (komersial dan PEN) sebesar Rp11,44 triliun;
  - c. *Plafon* asuransi sebesar Rp12,10 triliun;
  - d. Volume *Trade Finance* ekuivalen Rp9,35 triliun.
2. Profitabilitas dan Rasio Utama:
  - a. Laba bersih sebesar Rp456 miliar;
  - b. Rasio NPL Gros sebesar 16,35% dan NPL Neto sebesar 7,05%;
  - c. NIM sebesar 1,50%; dan
  - d. CER sebesar 45,80%

#### Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Sebagai sebuah lembaga keuangan khusus milik Pemerintah Republik Indonesia yang didirikan untuk menjalankan Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN), dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) LPEI senantiasa mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk perubahan peraturan guna merespons dinamika yang terjadi saat ini. Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia No.208/PMK.06/2021 tentang Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko dan Prinsip Mengenal

The economic improvement is expected to foster the national export performance, as positive business climate returns to enable exports and manufacturing of exported goods in keeping with demand growth momentum. However, Indonesia Eximbank responds to this situation with caution, as the pandemic and its impacts continue. The Company prioritizes the following:

- Mandate expansion and sustainable business growth
- Assets quality improvement
- Internal strengthening
- People strengthening
- Business development

With respect to the above goals and strategies, Indonesia Eximbank has agreed on the following targets for 2022:

1. Mandate implementation:
  - a. Financing outstanding at an equivalent of Rp88.23 trillion, with growth in SME contribution to 18.4%
  - b. Guarantee outstanding (commercial and PEN) amounting Rp11.44 trillion;
  - c. Insurance ceiling of Rp12.10 trillion;
  - d. Trade finance volume at an equivalent of Rp9.35 trillion
2. Profitability and key performance ratio:
  - a. Net income of Rp456 billion
  - b. Gross NPL at 16.35% and net NPL at 7.05%
  - c. NIM at 1.50%, and
  - d. CER at 45.80%

#### Corporate Governance Practices

As a special financial institution owned by the Government of the Republic of Indonesia and established to carry out export financing, Indonesia Eximbank practices good corporate governance (GCG) that refers to applicable laws and regulations, including changes to regulations in response to the current dynamics. In compliance with Finance Minister Regulation No. 208/PMK.06/2021 on Governance, Risk Management Principles, and Know

## LAPORAN DIREKTUR EKSEKUTIF-DIREKTUR PELAKSANA

Executive Directors & Managing Directors Report

Nasabah LPEI ditindaklanjuti dengan penerapannya sebagai berikut:

Dalam menjalankan prinsip Tata Kelola yang Baik di LPEI menerapkan prinsip Tata Kelola sebagaimana dimaksud di atas merupakan penerapan prinsip Tata Kelola yang baik pada LPEI, meliputi:

1. Keterbukaan;
2. Akuntabilitas;
3. Pertanggungjawaban;
4. Kemandirian; dan
5. Kewajaran

Disamping hal tersebut, LPEI telah menerapkan Manajemen Risiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha LPEI. Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud telah mencakup:

1. Pengawasan aktif Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

LPEI juga menata kembali penerapan kerangka manajemen risiko, khususnya pada jenis-jenis risiko, *risk appetite*, alat pengukuran, metodologi, pengukuran ataupun internalisasi *risk culture* sebagai satu kesatuan dalam penerapan *Enterprise Risk Management Framework* di LPEI. LPEI juga telah menyusun regulasi terkait debitur terdampak pandemi Covid-19 melalui Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0012/PDE/04/2021 tentang Manual Operasional Tindak Lanjut Pengelolaan Nasabah terdampak pandemi.

Selanjutnya, terkait dengan penugasan khusus kepada LPEI yang terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 183/PMK/08/2021 tentang penugasan khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, langkah yang ditempuh oleh LPEI diantaranya meliputi penerbitan manual Produk Program Penugasan Khusus dalam Rangka Mendukung Sektor Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Ekspor LPEI dan penetapan anggota Komite Pembiayaan Program Penugasan Khusus Ekspor dalam Rangka Mendukung Sektor Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Ekspor.

Your Customers, Indonesia Eximbank implements the following:

Indonesia Eximbank applies GCG principles of:

1. Transparency
2. Accountability
3. Responsibility
4. Independence; and
5. Fairness

In addition, Indonesia Eximbank implements effective risk management that is tailored to the Company's objectives, business policies, and business size and complexity. The Company's risk management entails:

1. Active oversight by the Board of Directors and Executive Director
2. Adequate risk policies, procedures, and threshold
3. Adequate risk identification, measurement, monitoring, and control, as well as availability of risk management information system, and
4. Comprehensive internal control.

Indonesia Eximbank has also reorganized the application of risk management framework, particularly with regard to the types of risk, risk appetite, measurement tools, methodologies, measurements, and the internalization of risk culture as an integral part of our Enterprise Risk Management Framework. The Company also has a regulation concerning debtors impacted by the pandemic, namely Executive Director Regulation No. 0012/PDE/04/2021 on Operational Manual to Manage Customers affected by the pandemic.

In addition, Indonesia Eximbank also operates NIA in compliance with the Finance Minister Regulation No. 183/PMK/08/2021 concerning National Interest Account under Indonesia Eximbank. Internally, the Company has issued a Manual on NIA to Support Export-Oriented SMEs and established the NIA Committee to Support Export-Oriented SMEs.

## LAPORAN DIREKTUR EKSEKUTIF-DIREKTUR PELAKSANA

### Executive Directors & Managing Directors Report

LPEI juga menjalankan berbagai langkah antisipatif yang berkelanjutan terkait dengan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga tahun 2021. LPEI melakukan stress testing untuk mengantisipasi kondisi terburuk yang dilakukan untuk mengetahui kekuatan *balance sheet* dan *cash flow* dengan memperhatikan beberapa faktor diantaranya epidemiologi COVID-19, makro ekonomi, kondisi sektoral, kondisi debitur baik bagi debitur pembiayaan konvensional maupun syariah serta tekanan terhadap *balance sheet*; analisa berdasarkan segmen korporasi dan UKM secara *bottom up* untuk mengetahui kekuatan *cash flow* masing-masing debitur guna menghindari potensi *moral hazard*. Di sepanjang tahun 2021, Stress Testing terkait pandemi dilakukan pada bulan Maret, Juni, dan Juli 2021.

Di sisi lain, pada level yang lebih tinggi, Direktur Pelaksana membantu tugas Direktur Eksekutif dalam melaksanakan operasional LPEI. Di LPEI, hubungan baik diantaranya keduanya diwujudkan dengan koordinasi secara intens dan sistematis diantaranya dalam Rapat-rapat yang mereka hadiri untuk memastikan operasional LPEI sesuai sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Rapat-rapat rutin yang dilaksanakan adalah rapat *Board of Management* satu kali dalam satu minggu dan rapat ALCO minimal satu kali dalam satu bulan. Selain itu, Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur melaksanakan rapat koordinasi lainnya untuk memastikan operasional LPEI berjalan dengan baik. Di sepanjang tahun 2021 telah dilakukan Rapat antara Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana sebanyak 53 kali.

Koordinasi yang baik juga telah dilaksanakan oleh komite-komite di bawah Direktur Eksekutif. Pada tahun 2021, secara umum kinerja komite-komite di bawah Direktur Eksekutif telah sejalan dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

#### Perubahan Komposisi Manajemen

Selama tahun 2021, LPEI melakukan perubahan komposisi Direktur Pelaksana sehingga komposisi manajemen per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

1. Daniel James Rompas – Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif;
2. Dikdik Yustandi – Direktur Pelaksana I

Responding to the ongoing pandemic in 2021, Indonesia Eximbank took various measures and analysis. The Company conducted stress testing using worst case-scenarios to determine its balance sheet and cashflow condition. Testing scenarios considered several factors, such as COVID-19 epidemiology, macroeconomics, sectoral conditions, debtor conditions for both conventional and Sharia financing, and pressure on balance sheets. In order to prevent moral hazard, the Company carried out bottom-up analysis on corporate and SME segments in to identify cash flow capability of each debtor. Stress testing activities under pandemic situation took place in March, June, and July of 2021.

On managerial relationship, the Managing Directors assisted Executive Director in carrying out Indonesia Eximbank's high-level operations. Both sides cooperate closely through meetings to ensure the Company's operations are on the right track towards Indonesia Eximbank's vision and mission. Regular meetings include weekly Board of Management meetings and at least monthly meeting of ALCO. Executive Director and the Board of Directors convened other coordination meetings to ensure efficient operations of the Company. In total, there were 53 meetings between Executive Director and Managing Director in 2021.

The Committees under Executive Director have also coordinated effectively. In 2021, the committees fulfilled their roles and responsibilities.

#### Changes in Management Composition

In 2021, Indonesia Eximbank amended the composition of Managing Directors. The composition as of 31 December 2021 was as follows:

1. Daniel James Rompas – Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director
2. Dikdik Yustandi – Managing Director I

## LAPORAN DIREKTUR EKSEKUTIF-DIREKTUR PELAKSANA

Executive Directors & Managing Directors Report

3. Maqin U. Norhadi – Direktur Pelaksana II
4. Agus Windiarto – Direktur Pelaksana III
5. Henry Sihotang – Direktur Pelaksana IV
6. Chesna F. Anwar – Direktur Pelaksana V

### FOKUS PADA ASPEK KEBERLANJUTAN

Sebagai Lembaga yang mengemban misi khusus mendukung kemajuan produk barang dan jasa di pasar ekspor dan seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, LPEI mendukung penuh upaya yang dijalankan Pemerintah RI dalam memenuhi komitmen pencapaian berbagai target pembangunan berkelanjutan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang disampaikan dalam *Paris Agreement* pada Paris COP 21. Salah satu komitmen utama yang dikemukakan adalah penurunan emisi karbondioksida (CO2) – elemen gas rumah kaca (GRK) – hingga sebesar 29% dari basis pengukuran bisnis as usual di akhir tahun 2015 dalam 15 (lima belas) tahun kedepan (2030) melalui upaya mandiri, atau hingga sebesar 41%, jika mendapatkan dukungan internasional.

Untuk mendukung pencapaian komitmen tersebut, LPEI berfokus pada dua pendekatan, yakni menyusun dan menerapkan kebijakan pembiayaan, penjaminan dan penutupan asuransi mengacu pada pemenuhan kaidah keberlanjutan dan intensifikasi penerapan kebijakan Green Office LPEI.

#### Kebijakan Keuangan Berkelanjutan

Dalam rangka menerapkan kaidah keberlanjutan pada kegiatan usaha yang dijalankan, LPEI selama ini mewujudkan komitmen pemberian fasilitas pembiayaan, penjaminan dan penutupan asuransi ramah lingkungan melalui penerapan kebijakan ketentuan internal dan komitmen pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) yang telah diintegrasikan ke dalam proses penyediaan produk dan layanan keuangan yang disediakan.

Guna meningkatkan kualitas implementasi kebijakan LST tersebut, kami saat ini tengah menyusun rancangan Kebijakan *Environmental and Social Management System* (ESMS) dan rancangan Manual Operasional ESMS. Melalui penerapan Kebijakan ESMS dimaksud, kelak LPEI akan dapat memantau ketaatan para nasabah

3. Maqin U. Norhadi – Managing Director II
4. Agus Windiarto – Managing Director III
5. Henry Sihotang – Managing Director IV
6. Chesna F. Anwar – Managing Director V

### FOCUS ON SUSTAINABILITY

As a state-owned institution with a special mission to promote the export of goods and services, Indonesia Eximbank fully supports the Government of Indonesia's efforts to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) and the targets outlined in Paris Agreement at COP 21. One of the main pledges is to reduce emission of carbon dioxide (CO2) – a greenhouse gas (GHG) component – by 29% on own efforts or up to 41% with international support by 2030 compared to business-as-usual baseline measured at the end of 2015.

To assist the fulfillment of this commitment, Indonesia Eximbank focuses on two approaches, which are incorporating sustainability principles in its financing, guarantee, and insurance services, and strengthening green office implementation.

#### Sustainable Finance Policy

To realize sustainability goals, Indonesia Eximbank has been exercising green financing, guarantee, and insurance services through its internal policies and commitment to incorporate environmental, social, and governance (ESG) principles in its financial services and products.

To strengthen our ESG policy, we are developing an Environmental and Social Management System (ESMS) Policy and the ESMS Operational Manual. ESMS will allow the Company to monitor customers' environmental compliance and to make this monitoring as part of the covenant of financing, guarantee, and insurance

## LAPORAN DIREKTUR EKSEKUTIF-DIREKTUR PELAKSANA

### Executive Directors & Managing Directors Report

dalam memenuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang lingkungan sebagai bagian dari covenant pemberian dukungan pembiayaan, penjaminan maupun penutupan asuransi. Kami akan menjadikan penerapan Kebijakan ESMS tersebut sebagai bagian integral dari terlaksananya Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Lembaga.

Guna mewujudkan dukungan pencapaian tujuan keberlanjutan tersebut, sejak tahun 2020 kami telah menyusun dokumen RAKB, dan menyampaikan dokumen tersebut kepada OJK. Tahun 2021, kembali kami menyusun dan menyerahkan dokumen RAKB kepada OJK, berisi rencana aksi untuk tahun 2021 dan rencana aksi keuangan berkelanjutan selama periode 2021-2025.

#### Prioritas Implementasi Keuangan Berkelanjutan

Kami menetapkan prioritas implementasi keuangan berkelanjutan sesuai dengan pedoman teknis POJK No.51/POJK.03/2017. Untuk tahun 2021, prioritas RAKB LPEI adalah:

1. Pemenuhan Kebijakan Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial, dengan tujuan diantaranya:
  - a. Memberikan pedoman dalam pembagian peran, fungsi dan tanggung jawab unit kerja terkait dalam pengelolaan ESMS LPEI.
  - b. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ESMS dalam aktivitas kelembagaan LPEI.
  - c. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ESMS dalam aktivitas kegiatan usaha debitur LPEI.
  - d. Melakukan pengaturan dalam penerapan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pembentukan unit khusus pengelola keuangan berkelanjutan
3. Penyusunan Pedoman Keuangan Berkelanjutan.
4. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Aksi Keuangan Berkelanjutan, dengan tujuan utama mempersiapkan SDM yang berkompeten untuk bertugas pada Unit Khusus Pengelola Keuangan Berkelanjutan.

services. We plan to make ESMS as an integral part of our Sustainable Financial Action Plan (RAKB).

Indonesia Eximbank first developed and submitted its RAKB to OJK in 2020. We developed an updated document in 2021 and completed our submission. The 2021 RAKB contains our action plan for 2021-2025.

#### Priorities on Sustainable Finance

Our priorities on sustainable finance are identified based on a technical guideline outlined in OJK Regulation No.51/POJK.03/2017. The priorities in Indonesia Eximbank RAKB are:

1. Develop Environmental and Social Management System, aiming to:
  - a. Provide guideline on the division of roles, functions, and responsibilities of work units relating to ESMS management
  - b. Guide ESMS implementation in Indonesia Eximbank's activities
  - c. Guide ESMS implementation in Indonesia Eximbank's borrowers' activities
  - d. Manage and apply sustainable finance principles according to regulations
2. Establish a dedicated unit on sustainable finance management
3. Develop Sustainable Finance Guideline
4. Build capacity of human resource on sustainable finance, prepare competent people to be assigned in the sustainable finance management unit

## LAPORAN DIREKTUR EKSEKUTIF-DIREKTUR PELAKSANA

Executive Directors & Managing Directors Report

5. Merealisasikan program-program edukasi bekerjasama dengan berbagai pihak eksternal untuk meningkatkan kompetensi LPEI terhadap Aksi Keuangan Berkelanjutan.

### Apresiasi

Kami mengapresiasi dukungan seluruh Pemangku Kepentingan dan Dewan Direktur dalam memberikan arahan atas tindakan Lembaga di tengah tantangan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga tahun 2021. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran manajemen dan segenap insan LPEI yang telah menunjukkan kerja keras di tengah dinamika tantangan selama tahun 2021, sehingga LPEI mampu melaluiinya dengan kondisi tetap baik dan terjaga.

Demikian laporan atas kegiatan kepengurusan LPEI ini kami sampaikan. Kami optimis mampu menerapkan strategi yang cermat dan memiliki tim yang tepat untuk senantiasa mengatasi berbagai tantangan yang kami hadapi dan memanfaatkan berbagai peluang guna mengembangkan bisnis kami di masa mendatang dalam menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional.

5. Carry out educational programs, engaging external parties, to improve Indonesia Eximbank's capability in sustainable finance.

### Appreciation

We are grateful for the cooperation of all stakeholders and the Board of Directors that helped us navigate a challenging year of 2021 due to the pandemic. We appreciate the management and all employees for their diligent work in the middle of dynamics in 2021. Their role was indispensable to Indonesia Eximbank's strong and stable performance.

In conclusion, we are confident that we have accurate strategies and the right team to address any challenges and seize opportunities in our future endeavours as we continue to support the Indonesian government in fostering the national exports.

Jakarta, Mei | May 2022



**Daniel James Rompas**  
Direktur Eksekutif  
Executive Director



# DIREKTUR PELAKSANA

Managing Directors



**DIREKTUR PELAKSANA**  
Managing Directors



**.01**

**Dikdik Yustandi**

Direktur Pelaksana I  
Managing Director I

**.02**

**Maqin U. Norhadi**

Direktur Pelaksana II  
Managing Director II

**.03**

**Agus Windiarto**

Direktur Pelaksana III  
Managing Director III

**.04**

**Henry Sihotang**

Direktur Pelaksana IV  
Managing Director IV

**.05**

**Chesna F. Anwar**

Direktur Pelaksana V  
Managing Director V



# LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Report from the Sharia Supervisory Board



## LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Report from the Sharia Supervisory Board

“ Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kegiatan Usaha Syariah LPEI untuk memastikan agar seluruh aspek kegiatan bisnis telah sesuai dengan prinsip Syariah.

The Sharia Supervisory Board carried out its oversight on Indonesia Eximbank's Sharia Unit to ensure that all business activities fully adhere to Sharia principles. ”

Bismillaahirrahmaanirrahim  
Assalamu'alaikum wa rahmatullaahi wa barakatuh

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'alaa atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, serta dimampukan dalam menjalankan tugas dan amanah yang dititipkan kepada kita. Shalawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.

Kami selaku Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki tugas dan tanggung jawab, salah satunya adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direktur Eksekutif serta mengawasi seluruh kegiatan usaha Syariah LPEI agar sesuai dengan prinsip Syariah dan dalam kerangka Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance. Oleh karenanya perkenan kami menyampaikan resume laporan pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan usaha Syariah LPEI selama tahun 2021.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank, selain melakukan kegiatan usaha konvensional, LPEI juga dirancang untuk dapat memberikan pembiayaan ekspor nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan

We extend praises to God Almighty for His blessings and grace, and for allowing us to see through the mandates that are entrusted to us. Praises be to Prophet Muhammad Peace be Upon Him.

As the Sharia Supervisory Board (SSB), our duties and responsibilities include to advise and counsel the Executive Director and to supervise all Sharia-related business activities of Indonesia Eximbank to ensure they are conducted in accordance with Sharia principles and within the framework of Good Corporate Governance. Therefore, allow us to submit a report on the supervision of Indonesia Eximbank's Sharia business activities in 2021.

According to Law No. 2 of 2009, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) or Indonesia Eximbank is designed to conduct conventional business activities in addition to providing national export financing based on Sharia principles. Indonesia Eximbank's financing is consistent with the development of Islamic Financial

**LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH**  
Report from the Sharia Supervisory Board

berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan LPEI sejalan dengan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, seperti bank syariah, asuransi dan reasuransi syariah, pegadaian syariah, Reksa Dana syariah dan LKS lainnya yang telah diterima oleh masyarakat dan dinilai mempunyai keunggulan, baik komparatif maupun kompetitif.

Selama tahun 2021, secara umum, Kami berpendapat bahwa kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang dijalankan oleh LPEI telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan opini yang kami keluarkan serta ketentuan terkait lainnya.

Demikian kami sampaikan resume laporan pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan usaha Syariah LPEI selama tahun 2021. Kami mengapresiasi Manajemen LPEI atas pencapaian kinerja usaha Syariah LPEI di tahun 2021. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita semua dalam menjalankan aktivitas kita, semoga kegiatan usaha Syariah lebih sukses pada tahun-tahun mendatang, dan kita berdoa serta berharap semoga pandemi COVID-19 yang terjadi hingga saat ini dapat segera berakhir.

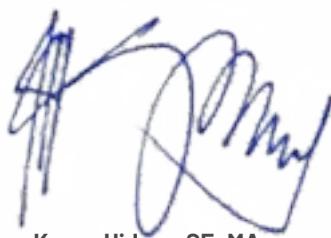
Institutions (IFIs) in Indonesia, including Islamic banks, sharia insurance and reinsurance, Sharia pawnshops, Sharia mutual funds, and other IFIs that have been accepted by the community and are considered to have comparative and competitive advantages.

Throughout 2021, we view that Indonesia Eximbank's Sharia business activities were consistent with the fatwas of the National Sharia Council-The Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), the opinions we issue, and other relevant provisions.

We hereby submit this summary report on the supervision of Indonesia Eximbank's Sharia business activities in 2021. We congratulate the Management on achieving Sharia compliance in 2021. May God Almighty always protect us all in our endeavors; we pray and hope that Sharia business activities will thrive in the coming years; and we pray and hope for the COVID-19 pandemic to end soon.

*Wassalamu'alaikum wa rahmatullaahi wa barakatuh*

Atas Nama Dewan Pengawas Syariah  
On Behalf of the Sharia Supervisory Board



Kanny Hidaya, SE.,MA

Ketua  
Chairman



**IKHTISAR UTAMA**  
Performance Highlights

**01**

**LAPORAN MANAJEMEN**  
Management Report

**02**

**PROFIL PERUSAHAAN**  
Company Profile

**03**

**ANALISIS & PEMBAHASAN**  
Management Discussion & Analysis

**04**

**TATA KELOLA PERUSAHAAN**  
Corporate Governance

**05**

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL**  
Corporate Social Responsibility

**06**

**LAPORAN KEUANGAN**  
Financial Statement

**07**

# Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Tahunan 2021 Oleh Dewan Direktur

Statements of Accountability of 2021 Annual Report by the Board of Directors

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tahun 2021 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Lembaga.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the signatories, hereby stated that all information contained in the 2021 Annual Report of Indonesia Eximbank has been comprehensively presented and that we are fully accountable for the accuracy of the contents of the Institution's Annual Report.

This statement is made truthfully.

Jakarta, Mei | May 2022

**Dewan Direktur\***

Board of Directors



**D. JAMES ROMPAS**

Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif  
Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director



**SUMINTO**

Anggota Dewan Direktur  
Member of the Board of Directors



**KASAN**

Anggota Dewan Direktur  
Member of the Board of Directors



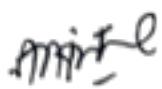
**ARUS GUNAWAN**

Anggota Dewan Direktur  
Member of the Board of Directors



**FELIA SALIM**

Anggota Dewan Direktur  
Member of the Board of Directors



**RIJANI TIRTOSO**

Anggota Dewan Direktur  
Member of the Board of Directors

\* Posisi per 31 Desember 2021 | Position as of December 31, 2021

# Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Tahunan 2021 Oleh Direktur Eksekutif & Direktur Pelaksana

Statements of Accountability of 2021 Annual Report by the Executive Directors & Managing Directors

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tahun 2021 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Lembaga.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the signatories, hereby stated that all information contained in the 2021 Annual Report of Indonesia Eximbank has been comprehensively presented and that we are fully accountable for the accuracy of the contents of the Institution's Annual Report.

This statement is made truthfully.

Jakarta, Mei | May 2022

**Direktur Eksekutif & Direktur Pelaksana\***  
Executive Directors & Managing Directors

**D. JAMES ROMPAS**

Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif  
Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director

**DIKDIK YUSTANDI**  
Direktur Pelaksana I  
Managing Director I

**MAQIN U. NORHADI**  
Direktur Pelaksana II  
Managing Director II

**AGUS WINDIARTO**  
Direktur Pelaksana III  
Managing Director III

**HENRY SIHOTANG**  
Direktur Pelaksana IV  
Managing Director IV

**CHESNA F. ANWAR**  
Direktur Pelaksana V  
Managing Director V

\* Posisi per 31 Desember 2021 | Position as of December 31, 2021

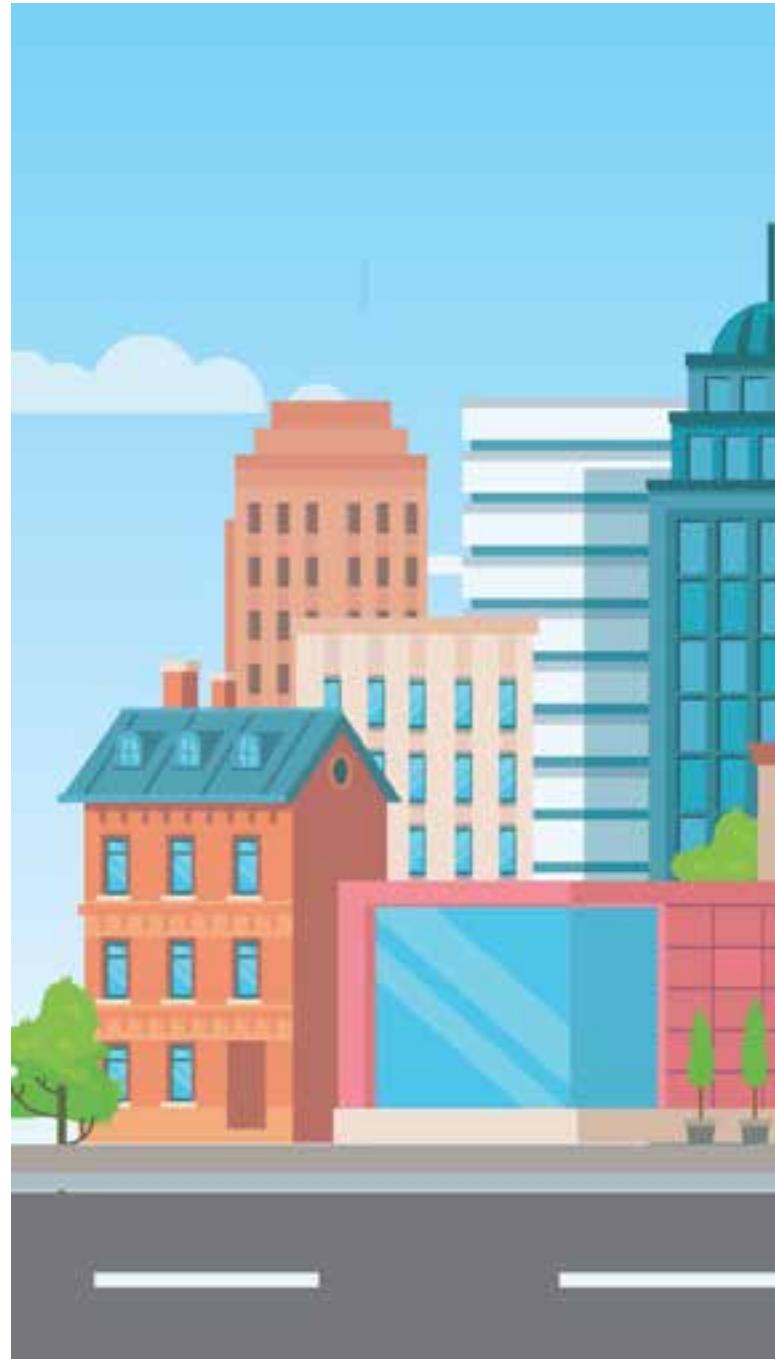


# PROFIL PERUSAHAAN

## Company Profile

Selama tahun 2021 LPEI telah mendorong terciptanya 20 eksportir baru.

During 2021, Indonesia Eximbank promoted the creation of 20 new exporters.





# IDENTITAS PERUSAHAAN

## Corporate Identity



### Nama Perusahaan Company Name

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia  
(LPEI)  
Indonesia Eximbank



### Perubahan Identitas Perusahaan Identity Changes of Entity

Sejak didirikan tanggal 1 September 2009, tidak pernah terjadi perubahan identitas seperti perubahan nama dan status hukum.

Since its establishment on 1 September 2009 there were no changes on the Company's identity, name or legal status



### Tanggal Pendirian Date of Establishment

1 September 2009



### Jenis/Badan Hukum Perusahaan Legal Status of Entity

Lembaga Keuangan Khusus yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2009.

Special Financial Institution established under the Act No. 2 of 2009.



### Bidang Usaha Line of Business

Lembaga keuangan khusus yang didirikan untuk melaksanakan Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) melalui penyediaan Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi, serta Jasa Konsultasi baik secara konvensional, maupun berdasarkan prinsip syariah baik di dalam, maupun di luar negeri.

A Financial Institution established specifically to provide the National Export Financing in the form of Financing, Guarantee and Insurance as well as Advisory Services conventionally and on sharia principle-based, domestically or overseas.



### Dasar Hukum Pendirian

#### Legal Basis of Establishment

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4957

Act of the Republic of Indonesia No. 2 of 2009 on Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Addition of the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4957



### Modal Dasar

#### Authorized Capital

Rp4.321.586.000.000



### Komposisi Pemegang Saham Shareholder Composition

100% milik Pemerintah Indonesia dan tidak terbagi atas saham.

100% Government-owned and not divided into shares.



### Bursa Efek

#### Stock Exchange

Obligasi LPEI dicatat dan diperdagangkan pada:

1. Bursa Efek Indonesia (IDX) dan
2. Bursa Efek Singapura (SGX)

Indonesia Eximbank Bonds are listed and traded at:

1. Indonesia Stock Exchange (IDX); and
2. Singapore Stock Exchange (SGX)



### Situs Web Perusahaan Corporate Website

[www.Indonesiaeximbank.go.id](http://www.Indonesiaeximbank.go.id)



### Alamat Email Perusahaan

#### Corporate Email Address

[corpsec@indonesiaeximbank.go.id](mailto:corpsec@indonesiaeximbank.go.id)

### Alamat Kantor Office Address

Prosperity Tower Lantai 1, District 8,  
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190,  
Indonesia  
Tel. (62-21) 395 03600  
Fax. (62-21) 395 03699

### Kantor Wilayah Regional Offices

**Jakarta**  
Prosperity Tower Lantai 1, District 8,  
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia  
Tel. (62-21) 395 03600  
Fax. (62-21) 395 03600

**Surabaya**  
Intiland Tower 2nd Floor, Suite 1  
Jl. Panglima Sudirman 101-103, Surabaya 60271, Indonesia  
Tel. : (62-31) 534 9382  
Fax. : (62-31) 534 9383

### Kantor Cabang Branch Offices

**Medan**  
B&G Tower, J.W. Marriott 6th Floor, Unit 12  
Jl. Putri Hijau No. 10, Medan 20111, Indonesia  
Tel. : (62-61) 800 10098  
Fax. : (62-81) 800 10096

**Makassar**  
Wisma Kalla Building 6th Floor  
Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8-10, Makassar 90125, Indonesia  
Tel. : (62-411) 852 916  
Fax. : (62-411) 852 917

**Surakarta**  
Indonesia Eximbank Building 2nd d Floor  
Jl. Slamet Riyadi No. 341,  
Surakarta 57141, Indonesia

### Kantor Pemasaran Representative Offices

**Balikpapan**  
Grand Sudirman Building  
Panin Tower, Main Lobby 203  
Jl. Jend. Sudirman No. 7, Balikpapan 76411, Indonesia  
Tel. : (62-542) 721 9810  
Fax. : (62-542) 721 9820

**Batam**  
Graha Pena Batam Building 7th Floor, Unit 704  
Jl. Raya Batam Center, Batam 29461, Indonesia  
Tel. : (62-778) 461 414  
Fax. : (62-778) 460 125

**Denpasar**  
Jl. Raya Puputan No. 160 Renon, Denpasar 80235, Indonesia  
Tel. : (62-361) 262 612  
Fax. : (62-361) 262 613



# SKALA USAHA

Business Scale



Jumlah Aset  
Total Assets

Rp **89,04**  
triliun/trillion



Jumlah Liabilitas  
Total Liabilities

Rp **58,92**  
triliun/trillion



Jumlah Pegawai  
Number of Employee

**567**



Laba Bersih  
Net Income

Rp **387,40**  
miliar | billion



Jumlah Ekuitas  
Total Equity

Rp **30,12**  
triliun/trillion



Kantor Pusat | Head Office 1  
Kantor Wilayah | Regional Offices 2  
Kantor Cabang | Branch Offices 3  
Kantor Pemasaran | Representative Offices 3

## Daftar Keanggotaan Asosiasi Associates Memberships

1
<p><b>Nama Forum</b> Forum Name AEBF</p>
<p><b>Tahun Bergabung</b> Year of Joining 1999</p> <p>Asian EXIM Banks Forum (AEBF) merupakan forum yang beranggotakan Eximbank-Eximbank di Asia dan Oceania. Forum AEBF diadakan sebagai upaya dalam meningkatkan kerjasama dan menciptakan bagi anggota Eximbank dalam rangka meningkatkan perdagangan dan investasi global.</p> <p>Asian EXIM Banks Forum (AEBF) is a forum with members of Eximbanks from Asia and Oceania. AEBF Forum was established to improve collaboration and creation of global trading and investment for Eximbank members.</p>
<p><b>Iuran Tahunan Keanggotaan</b> Annual Fees No annual fee</p>

2
<p><b>Nama Forum</b> Forum Name G-NEXID</p>
<p><b>Tahun Bergabung</b> Year of Joining 2007</p> <p><i>Global Network of Export-Import Banks and Development Finance Institutions</i> (G-NEXID) merupakan organisasi non-profit yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama bilateral dan multilateral antara anggota dengan tujuan mempromosikan perdagangan dan investasi pada negara berkembang.</p> <p><i>Global Network of Export-Import Banks and Development Finance Institutions</i> (G-NEXID) is a non-profit organization aims at improving bilateral and multilateral collaboration between members with the goals to promote the trading and investment of developed countries.</p>
<p><b>Iuran Tahunan Keanggotaan</b> Annual Fees USD10.000</p>

3
<p><b>Nama Forum</b> Forum Name Berne Union</p>
<p><b>Tahun Bergabung</b> Year of Joining 2015</p> <p>Berne Union adalah organisasi internasional untuk lembaga global <i>export credit and investment insurance</i> (ECA) yang bertujuan untuk mendukung perkembangan produk dan skema fasilitas asuransi kredit dan asuransi investasi.</p> <p>Berne Union is an international organization for global export credit and investment insurance (ECA) institutions that aims a supporting the development of credit and investment insurance facilities product and scheme.</p>
<p><b>Iuran Tahunan Keanggotaan</b> Annual Fees GBP8.900</p>

4
<p><b>Nama Forum</b> Forum Name Aman Union</p>
<p><b>Tahun Bergabung</b> Year of Joining 2018</p> <p>Aman Union merupakan forum <i>commercial</i> dan <i>non-commercial risk insurers</i> dan <i>reinsurers</i> bagi negara-negara anggota <i>Organization of Islamic Cooperation</i> (OIC).</p> <p>Aman Union is a commercial and non-commercial forum for insurers and reinsurers of members countries of Organization of Islamic Cooperation (OIC).</p>
<p><b>Iuran Tahunan Keanggotaan</b> Annual Fees USD3.750</p>

5
<p><b>Nama Forum</b> Forum Name AAUI</p>
<p><b>Tahun Bergabung</b> Year of Joining 2017</p> <p>Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) merupakan organisasi yang menjadi wadah perkumpulan seluruh perusahaan asuransi umum dan reasuransi di Indonesia.</p> <p>Indonesian General Insurance Association (AAUI) is an organization catered as a forum of all general insurance and reinsurance companies in Indonesia.</p>
<p><b>Iuran Tahunan Keanggotaan</b> Annual Fees IDR15.000.000</p>

6
<p><b>Nama Forum</b> Forum Name FCI</p>
<p><b>Tahun Bergabung</b> Year of Joining 2019</p> <p><i>Factor Chain International</i> (FCI) merupakan asosiasi internasional yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda yang menaungi Bank dan/atau Lembaga Keuangan pelaku usaha <i>Factoring</i> yang menawarkan solusi <i>cross-border receivables finance</i> kepada membernya untuk mengembangkan bisnis <i>trade finance</i>.</p> <p><i>Factor Chain International</i> (FCI) is an international association with head office in Amsterdam, Holland that manage the Banks and/or Financial Institutions engage in Factoring that offers cross-border receivables finance solution to its members to develop trade finance business.</p>
<p><b>Iuran Tahunan Keanggotaan</b> Annual Fees EUR 5000</p>



# PRODUK DAN JASA

## Products and Services

### PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan Modal Kerja Ekspor (PMKE)
  - a. *Cash Loan/Financing*:
    - 1) Fasilitas PMKE Revolving;
    - 2) Fasilitas PMKE Fixed Loan/Financing;
    - 3) Fasilitas PMKE Jangka Pendek;
    - 4) Fasilitas PMKE Transaksional; dan
    - 5) Fasilitas PMKE Term Loan/Financing.
  - b. *Non Cash Loan/Financing*, antara lain:
    - 1) Letter of Credit (LC);
    - 2) Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN); dan
    - 3) Garansi/SBLC.
2. Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE);
3. Produk Pembiayaan Lain:
  - a. *Trade Finance*;
  - b. *Buyer's Credit*;
  - c. Plasma Perkebunan;
  - d. Plasma Pertambangan;
  - e. *Supply Chain Financing*;
  - f. Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE);
  - g. Kredit Usaha Rakyat di Luar Negeri (KURLN); dan
  - h. Produk Pembiayaan Lainnya.
4. Akad Syariah Produk Pembiayaan Ekspor Nasional, antara lain:
  - a. Akad Murabahah;
  - b. Akad Musyarakah;
  - c. Akad Musyarakah Mutanaqishah;
  - d. Akad Ijarah Munthahiya Bittamlik (IMBT);
  - e. Akad Wakalah bil Ujrah dan Qardh;
  - f. Akad Hawalah bil Ujrah; dan
  - g. Akad Kafalah bil Ujrah.

### PENJAMINAN

- Penjaminan Proyek
- Jaminan Kepabeanan
- Penjaminan Kredit/Pembiayaan
  - Sovereignty Basis;
  - Commercial Basis.
- Penjaminan Pemerintah (JAMINAH)

### FINANCING

1. Export Working Capital Financing (PMKE)
  - a. *Cash Loan/Financing*:
    - 1) PMKE Revolving Facility;
    - 2) PMKE Fixed Loan/Financing Facility;
    - 3) PMKE Short Term Facility;
    - 4) PMKE Transactional Facility; and
    - 5) PMKE Term Loan/Financing Facility.
  - b. Non-Cash Loan Financing, such as:
    - 1) Letter of Credit (LC);
    - 2) Domestic Document Letter of Credit (SKBDN); and
    - 3) Guarantee/SBLC.
2. Export Investment Financing (PIE);
3. Other Financing Products:
  - a. *Trade Finance*;
  - b. *Buyer's Credit*;
  - c. *Plantation Plasma*;
  - d. *Aquaculture Plasma*;
  - e. *Supply Chain Financing*;
  - f. *Export Oriented Microfinancing (KURBE)*;
  - g. *Overseas Microfinancing (KURLN)*; and
  - h. Other Financing Products.
4. National Export Financing Product Sharia Contract, such as:
  - a. *Murabahah Contract*;
  - b. *Musyarakah Contract*;
  - c. *Musyarakah Mutanaqishah Contract*;
  - d. *Ijarah Munthahiya Bittamlik (IMBT) Contract*;
  - e. *Wakalah bil Ujrah and Qardh Contract*;
  - f. *Hawalah bil Ujrah Contract*; and
  - g. *Kafalah bil Ujrah Contract*.

### GUARANTEE

- Project Guarantee
- Custom Bond
- Credit Guarantee/Financing
  - Sovereignty Basis;
  - Commercial Basis.
- Government Guarantee

## PRODUK DAN JASA Products and Services

### **ASURANSI**

- Proteksi Piutang Dagang
- Marine Cargo
- Asuransi Investasi Luar Negeri

### **JASA KONSULTASI**

1. Pelatihan Ekspor (*Coaching Program for New Exporter - CPNE*), antara lain:
  - a. Pelatihan Ekspor;
  - b. Pendampingan Ekspor; dan
  - c. Bimbingan kepada alumni CPNE;
2. *Marketing Handholding*, antara lain:
  - a. *Global Marketplace*;
  - b. Pameran Internasional; dan
  - c. *Business Matching*;
3. *Community Development* (Desa Devisa)
4. Rumah Ekspor:
5. Pembiayaan Program Kemitraan; dan
6. Produk dan Kegiatan Lain terkait Jasa Konsultasi

### **PENUGASAN KHUSUS DAN PENUGASAN PEMERINTAH LAINNYA**

1. Penugasan Khusus, antara lain:
  - a. Penugasan Khusus Untuk Mendorong Ekspor ke Negara Kawasan Afrika, Asia Selatan dan Timur Tengah (PKE Kawasan);
  - b. Penugasan Khusus Pengembangan Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (PKE Pariwisata);
  - c. Penugasan Khusus Untuk Mendukung Industri Penerbangan Indonesia (PKE Penerbangan);
  - d. Penugasan Khusus Untuk Mendukung Sektor Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Ekspor (PKE UKM);
  - e. Penugasan Khusus Trade Finance Dalam Rangka Mendukung Pemulihian Ekonomi Nasional (PKE Trade Finance);
  - f. Penugasan Khusus Dalam Rangka Mendukung Industri Alat Transportasi (PKE Alat Transportasi).
2. Penugasan Pemerintah Lainnya, antara lain:
  - a. Penjaminan Kredit Korporasi Dalam Rangka Pemulihian Ekonomi Nasional;
  - b. Investasi Pemerintah Dalam Rangka Pemulihian Ekonomi Nasional (IP PEN).

### **INSURANCE**

- Trade Credit Insurance
- Marine Cargo
- Overseas Investment Insurance

### **ADVISORY SERVICES**

1. Export Coaching (*Coaching Program for new Exporter - CPNE*), such as:
  - a. Export Training;
  - b. Export Mentoring; and
  - c. Coaching to CPNE alumni;
2. Marketing Handholding, such as:
  - a. Global Marketplace;
  - b. International Exhibition; and
  - c. Business Matching;
3. Community Development (Desa Devisa)
4. Export Enabler:
5. Partnership Program Financing; and
6. Other Products and Activities related to Advisory Services

### **NATIONAL INTEREST ACCOUNTS AND OTHERS ASSIGNMENTS**

1. The National Interest Accounts, such as:
  - a. National interest account to foster Export to Countries in the African Regions, South Asia and Middle East (NIA Regions);
  - b. National interest account for Tourism Development of Mandalika Special Economic Region (NIA Tourism);
  - c. National interest account to foster Indonesian Aviation Industry (NIA Aviation);
  - d. National interest account to foster Export Small Medium Enterprises Sector (NIA SME);
  - e. National interest account of Trade Finance to foster National Economic Recovery (NIA Trade Finance);
  - f. National interest account to foster Transportation Equipment Industry (NIA Transportation Equipment).
2. Other national interest accounts, such as:
  - a. Corporate Loan Guarantee for the Recovery of National Economy;
  - b. Government Investment for the Recovery of National Economy (IP PEN).



# JEJAK LANGKAH

## Milestones



**2009**

Pemerintah Indonesia mendirikan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) berdasarkan UU No. 2/2009 dan membubarkan PT Bank Ekspor Indonesia (Persero). Seluruh hak dan kewajiban PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) menjadi hak dan kewajiban Indonesia Eximbank.

The Government of Indonesia established the Indonesian Export Financing Institution (Indonesia Eximbank) under Act No. 2/2009 and dissolved PT Bank Ekspor Indonesia (Persero). All rights and obligations of PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) become the rights and obligations of Indonesia Eximbank.



**2010**

Tahun 2010 merupakan tahun pertama bagi LPEI untuk menerbitkan Obligasi Indonesia Eximbank I senilai Rp3,00 triliun dan menandatangani perjanjian-perjanjian kerja sama baik bilateral, maupun multilateral. Selain itu, Pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp2,00 triliun untuk meningkatkan kapasitas LPEI dalam mendukung program ekspor nasional melalui kegiatan pembiayaan asuransi dan penjaminan.

2010 was the first year for Indonesia Eximbank to issue Indonesia Eximbank Bonds I amounting to Rp3.00 trillion and signed the bilateral and multilateral cooperation agreements. In addition, the Government provided State Equity Investment of Rp2.00 trillion to increase the capacity of Indonesia Eximbank in supporting the national exports programs through export financing, insurance and guarantee activities.

**2011**

- Sesuai mandat yang diemban, LPEI dapat melakukan pembiayaan di luar negeri. LPEI memberikan pembiayaan di luar negeri melalui fasilitas *Overseas Financing* di Amerika Serikat, Malaysia dan Arab Saudi.
- LPEI menjadi lembaga keuangan yang pertama dalam membiayai pembangunan smelter di Indonesia.
- LPEI meluncurkan program Pendidikan Calon Pegawai angkatan I sebagai salah satu strategi pemenuhan SDM Lembaga.
- Pursuant to the mandate, Indonesia Eximbank is able to provide financing abroad. This financing is provided through Overseas Financing facilities in the United States, Malaysia and Saudi Arabia.
- Indonesia Eximbank is the first financial institution to finance the construction of smelters in Indonesia.
- Indonesia Eximbank launched the first batch of Employees Candidate Education as one of the strategies to address the Institution's HR fulfillment.



**2012**

- LPEI menerbitkan *Euro Medium Terms Notes (EMTN)* Programme 2012 Reg. S Only senilai USD500 juta.
- LPEI menandatangani Fasilitas Kredit *Overseas Project Financing* dengan BUMN Karya dalam eksport jasa Waskita Karya untuk pembangunan bandara Suai Timor Leste.
- Indonesia Eximbank issued Euro Medium Terms Notes (EMTN) Programme 2012 Reg. S Only amounted to USD500 million.
- Indonesia Eximbank signed Credit Facility of Overseas Project Financing between Indonesia Eximbank and Karya State-Owned Enterprises in Waskita Karya export services for development of Suai Timor Leste airport

JEJAK LANGKAH  
Milestones**2013**

Pengangkatan Bapak Hadiyanto, Bapak A. Fuad Rahmany dan Bapak Bachrul Chairi selaku Anggota Dewan Direktur LPEI untuk periode 2013-2018 dan Bapak Isnen Sutopo selaku Direktur Pelaksana II Indonesia Eximbank yang sebelumnya dijabat oleh Bapak Suharsono. Keberadaan manajemen baru diharapkan dapat membawa LPEI menjadi lembaga yang "advanced in export services".

The Appointment of Hadiyanto, A. Fuad Rahmany and Bachrul Chairi as members of the Board of Directors for the period of 2013-2018 and Isnen Sutopo as the Managing Director II of Indonesia Eximbank, formerly held by Suharsono. The new management is expected to bring Indonesia Eximbank to become an "advanced institution in the export services".

**2014**

- LPEI mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah:
  - Penugasan Khusus Program Eksport Gerbong Kereta Penumpang ke Bangladesh
  - Penugasan Khusus Program Eksport Untuk Mendukung Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Tahun 2015
- LPEI meluncurkan *Coaching Program for New Exporters* (CPNE)
- Pemerintah kembali memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,00 triliun kepada LPEI untuk memperkuat modal, juga meningkatkan kapasitas kegiatan usahanya dalam mendukung program eksport nasional.
- Indonesia Eximbank was granted specific assignments from the government:
  - National Interest Account on the Passenger Train Cars Export to Bangladesh
  - National Interest Account on Export Program to Support the Government Economic Policy Package 2015.
- Indonesia Eximbank launched the Coaching Program for New Exporters(CPNE)
- The Government granted the State Capital Investment of Rp1.00 trillion to Indonesia Eximbank to strengthen its capital, as well as to increase the capacity of its business activities in supporting the national export programs.

**2015**

- LPEI meluncurkan produk asuransi baru, *Marine Cargo Insurance* untuk memberikan perlindungan atas pengiriman barang ekspor. Selain itu, LPEI bersinergi dengan 11 perusahaan asuransi dan reasuransi yang ditandai dengan penandatanganan *Treaty Marine Cargo Insurance*.
- Melalui program *Corporate Social Responsibility*, LPEI berkontribusi dalam Program Penghijauan Berbasis Agroforestry dengan menanam 10 ribu bibit pohon Sengon di Wonogiri, Jawa Tengah.
- Indonesia Eximbank launched a new insurance product, Marine Cargo Insurance to provide protection for the delivery of export goods. In addition, Indonesia Eximbank synergized with 11 insurance and reinsurance companies, which was marked by the signing of the Marine Cargo Insurance Treaty.
- Through its Corporate Social Responsibility, Indonesia Eximbank contributed to the Agroforestry-Based Green Program by planting 10 thousands of sengon tree seedlings in Wonogiri, Central Java.

**2016**

- Pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp3,20 triliun yang terdiri atas Rp1,00 triliun untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI dan Rp2,20 triliun untuk penugasan khusus.
- LPEI mendapatkan Penugasan Khusus dari pemerintah berupa Keputusan Menteri Keuangan dengan rincian sebagai berikut:
  - Keputusan Menteri Keuangan No. 374/KMK.08/2017 tentang penugasan khusus kepada Lembaga Pembiayaan Eksport Indonesia untuk menyediakan pembiayaan eksport gerbong kereta api.
  - Keputusan Menteri Keuangan No. 649/KMK.08/2017 tentang penugasan khusus kepada Lembaga Pembiayaan Eksport Indonesia untuk menyediakan pembiayaan eksport pesawat udara.
  - Keputusan Menteri Keuangan No. 787/KMK.08/2017 tentang penugasan khusus kepada Lembaga Pembiayaan Eksport Indonesia untuk mendorong eksport ke negara kawasan Afrika.
- The government provided the State Capital Investment (PMN) of Rp3.20 trillion, comprising of Rp1.00 trillion for operational capacity improvement and Rp2.20 trillion for the National Interest Account program implementation.
- Indonesia Eximbank received the National Interest Account from the government under the Finance

## JEJAK LANGKAH

### Milestones

## 2016

Minister's Decree with the following details:

1. Decree of Finance Minister No. 374/KMK.08/2017 on the interest account to the Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia to provide export financing for the passengers' train carriages.
2. Decree of Finance Minister No. 649/KMK.08/2017 on the interest account to the Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia to provide export financing of aircrafts.
3. Decree of Finance Minister No. 787/KMK.08/2017 on the interest account to the Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia to foster export to the African countries.

## 2018

LPEI melakukan Reformasi Kelembagaan dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Eximbank (IEB) 2020, yaitu *Top of Mind, Sovereign Entity, Regional Leader, An Institution of Proud, dan True Policy Bank*. Program Reformasi Kelembagaan merupakan suatu terobosan untuk mewujudkan cita-cita pembentukan lembaga sebagai salah satu bagian dari rencana pengembangan ekspor nasional yang berkelanjutan.

Dalam mengawali proses Reformasi Kelembagaan tersebut, arah perubahan mengacu pada 4 aspek mendasar yaitu:

- a. Proses bisnis dan operasional menjadi lebih efektif dan efisien.
- b. Fundamental manajemen risiko yang lebih kuat.
- c. Keandalan sistem digital dan layanan teknologi informasi komunikasi dalam mendukung operasional Lembaga
- d. Kompetensi sumber daya manusia yang kompeten dan internalisasi budaya Lembaga.

Indonesia Eximbank conducts Institutional Reform in order to realize the vision of Indonesia Eximbank (IEB) 2020, namely *Top of Mind, Sovereign Entity, Regional Leader, An Institution of Proud, and True Policy Bank*. The Institutional Reform Program is a breakthrough to realize the ideals of establishing an institution as part of a plan for sustainable national export development.

In guarding the Institutional Reform process, the direction of change refers to 4 fundamental aspects, namely:

- a. Business and operational processes are more effective and efficient.
- b. Stronger risk management fundamentals.
- c. Reliability of digital systems and communication information technology services in supporting the operations of the Institute.
- d. Competency of human resources and internalization of the corporate culture

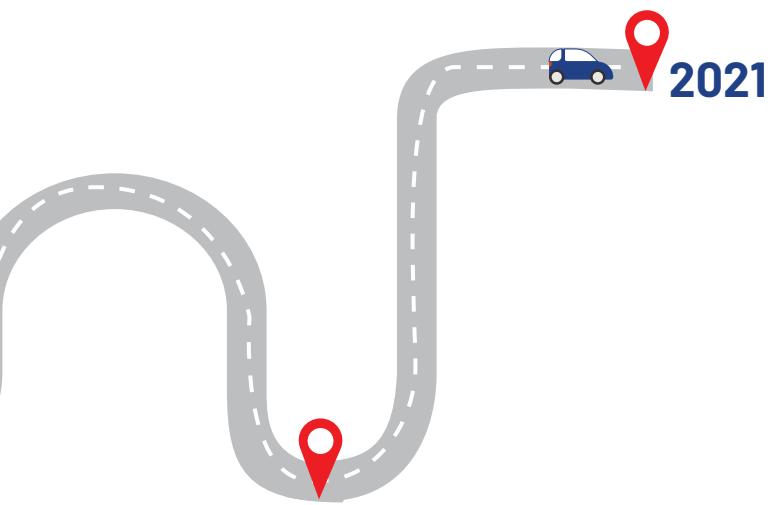
## 2017

- LPEI meluncurkan fasilitas KURBE (Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor) sebagai dukungan terhadap paket kebijakan ekonomi jilid XI.
- LPEI membuka Kantor Pemasaran di Batam dan Denpasar sebagai upaya untuk menjangkau potensi ekspor UKM di wilayah Sumatera dan Bali.
- Pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp4,00 triliun yang terdiri atas Rp2,00 triliun untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI dan Rp2,00 triliun untuk penugasan khusus.

- Indonesia Eximbank launched the Export- Oriented Small Business Loan (KURBE) facility in support of the Government's economic policy package series XI.
- Indonesia Eximbank established the Marketing Offices at Batam and Denpasar in an effort to reach the export potential of SMEs in Sumatra and Bali.
- The Government provided the State Capital Investment of Rp4.00 trillion of which Rp2.00 trillion is allocated to increase the business capacity of Indonesia Eximbank and Rp2.00 trillion for the National Interest Accounts.

## 2019

- Peresmian kantor pusat LPEI di Prosperity Tower, District 8 pada tanggal 12 Februari 2019.
- Peresmian Desa Devisa Koperasi Kerta Semaya Samaniya (KSS) pada tanggal 6 Desember 2019.
- Peresmian Desa Devisa Koperasi Asosiasi Pengembangan Industri Kerajinan Rakyat Indonesia (APIKRI) pada tanggal 20 Desember 2019.
- Inauguration of Indonesia Eximbank head office in Prosperity Tower, District 8 on 12 February 2019.
- Inauguration of Desa Devisa Koperasi Kerta Semaya Samaniya (KSS) on 6 December 2019.
- Inauguration of Desa Devisa Koperasi Asosiasi Pengembangan Industri Kerajinan Rakyat Indonesia (APIKRI) on 20 December 2019.

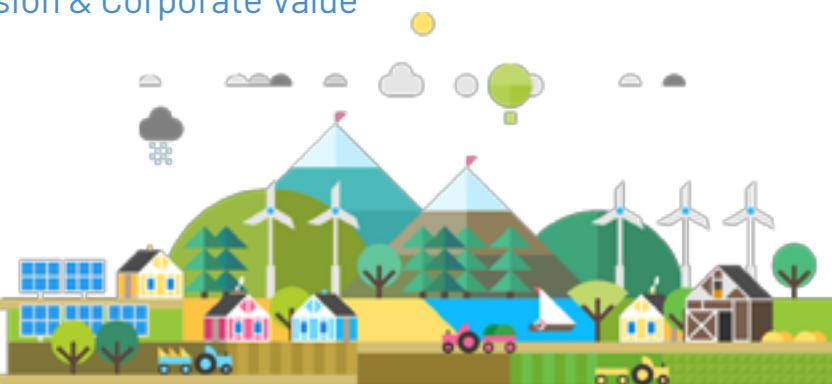
JEJAK LANGKAH  
Milestones**2020**

- Melaksanakan Jasa Konsultasi dalam bentuk pengembangan masyarakat yang disebut "Desa Devisa" dengan tujuan meningkatkan ekspor. Sampai dengan akhir tahun 2020, LPEI telah mengembangkan 2 Desa Devisa yaitu di Jembrana, Bali dan Bantul, Yogyakarta
- LPEI juga telah mendorong terciptanya 21 eksportir baru
- LPEI telah melakukan relaksasi terhadap debitur yang terdampak COVID-19
- Bekerjasama dengan 14 bank dalam program JAMINAH (Penjaminan Pemerintah) sebesar Rp867 miliar
- Penyaluran khusus PKE NIA sebesar Rp1,5 triliun antara lain pada sektor :
  - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
  - UKM berorientasi ekspor
  - Industri Penerbangan
  - PKE Trade Finance
- Penerimaan PMN total sebesar Rp10 triliun untuk penugasan umum, Penugasan Khusus Eksport dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
- Advisory in terms of community development called "Desa Devisa" with the objectives to enhance export. As of the end of 2020, Indonesia Eximbank has developed 2 Desa Devisa namely in jembrana, Bali and Bantul, Yogyakarta
- Indonesia Eximbank promotes the creation of 21 new exporters
- On the impact of the COVID-19, Indonesia Eximbank has carried out restructuring of a total of 125 borrowers impacted by the COVID-19
- Cooperate with 14 banks for the JAMINAH program (government assurance) amounted to Rp567 billion
- Specific disbursement of NIA amounted to Rp1,5 trillion among others on the sector:
  - Specific Economic Areas Development
  - Export-oriented SMEs
  - Aviation Industry
  - NIA Trade Finance
- Received State Equity Participation (SEP) amounted to Rp10 trillion for general assignment, National Interest Account and National Economy Recovery

- Melaksanakan Jasa Konsultasi dalam bentuk pengembangan masyarakat yang disebut "Desa Devisa" dengan tujuan meningkatkan ekspor. Sampai dengan akhir tahun 2021, LPEI telah mengembangkan 5 program Desa Devisa yaitu:
  - Desa Kopi Subang
  - Desa Devisa Ijen
  - Desa Devisa Tenun Wedani
  - Desa Devisa Rumput Laut Kupang
  - Desa Devisa Garam Kusamba
- LPEI juga telah mendorong terciptanya 20 eksportir baru.
- LPEI tetap berusaha mendorong maju para pelaku UKM Indonesia melalui pelaksanaan program jasa konsultasi berupa pelatihan CPNE di 8 kota (Solo, Denpasar, Medan, Kendal, Demak, Bandung, Manado dan Semarang) kepada lebih dari 322 pelaku UKM.
- Total penerima manfaat sampai dengan tahun 2021 sebanyak 27 desa dan 2.953 petani & pengrajin dengan meliputi 7 produk unggulan.
- Penyaluran dana Program Kemitraan melalui kerja sama dengan program Desa Devisa dan Linkage Program untuk 28 mitra binaan.
- LPEI telah melakukan relaksasi terhadap debitur yang terdampak COVID-19.
- Bekerja sama dengan 18 bank dalam program JAMINAH (Penjaminan Pemerintah) dengan volume sebesar Rp5,8 triliun dan outstanding sebesar Rp4,8 triliun.
- Penyaluran Penugasan Khusus sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp2,56 triliun antara lain pada sektor:
  - PKE Kawasan
  - PKE Pariwisata.
  - PKE Trade Finance.
  - PKE UKM.
- Penerimaan PMN total sebesar Rp5 triliun untuk penugasan umum dan Penugasan Khusus Eksport.
- Advisory in terms of community development called "Desa Devisa" with the objectives to enhance export. As of the end of 2021, Indonesia Eximbank has developed 5 Desa Devisa Programs, consisting of:
  - Desa Devisa Kopi Subang.
  - Desa Devisa Ijen.
  - Desa Devisa Tenun Wedani.
  - Desa Devisa Rumput Laut Kupang.
  - Desa Devisa Garam Kusamba.
- Indonesia Eximbank promotes the creation of 20 new exporters.
- Indonesia Eximbank continues to encourage SME participants through the implementation of a consulting service program in the form of CPNE Training in 8 cities (Solo, Denpasar, Medan, Kendal, Demak, Bandung, Manado and Semarang) to more than 322 SME participants.
- Total beneficiaries until 2021 were 27 villages and 2,953 farmers & artists covering 7 flagship products.
- Distribution of Partnership Program funds through collaboration with the Desa Devisa and Linkage Program for 28 partners.
- Indonesia Eximbank has carried out restructuring for borrowers impacted by the COVID-19.
- Cooperate with 18 banks for the JAMINAH program (government assurance) with total volume amounted to Rp5,8 trillion and total outstanding amounted of Rp4,8 trillion.
- Specific disbursement of NIA amounted to Rp2,56 trillion among others on the sector:
  - NIA Regions
  - NIA Tourism
  - NIA Trade Finance
  - NIA SME's
- Received State Equity Participation (SEP) amounted to Rp5 trillion for general assignment and National Interest Account.

# VISI, MISI & NILAI PERUSAHAAN

Vision, Mission & Corporate Value



## Visi Vision



Menjadi Eximbank yang unggul dan kredibel dalam mendorong eksport nasional yang berdaya saing tinggi pada tataran global.

To become an Eximbank that is credible and excels in promoting national export with high competitiveness on the global level.

### Penjelasan Pernyataan Visi | Explanation of Vision Statement

- LPEI memiliki kemampuan untuk mengemban tugas dan fungsi sebagai mana diamanatkan dalam UU No. 2/2009 dan memposisikan LPEI menjadi mitra ekonomi global yang dapat dipercaya.
- LPEI ikut berperan dalam menjadikan eksportir Indonesia sebagai pelaku usaha yang disegani di tataran global, karena mampu menghasilkan produk dan jasa eksport yang berkelas dunia.
- Indonesia Eximbank has a role in promoting Indonesian exporters as capable business players in the global markets with world-class export products and services.
- Indonesia Eximbank has the roles in promoting Indonesian exporters as respectful business players in the global markets with world-class export products and services.

## Misi Mission



- Mendorong kesinambungan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan eksport nasional yang berkelanjutan.
- Memberikan layanan pembiayaan eksport nasional dan jasa konsultasi yang berkualitas sebagai solusi terhadap kebutuhan eksport Indonesia.
- Meningkatkan kemampuan pelaku usaha, termasuk usaha kecil dan menengah, untuk menghasilkan produk berorientasi eksport yang unggul dan berdaya saing
- Encourage the sustainability of conducive business climate for the sustainable growth of national export.
- Provide national export financing services and consultancy services as the solution to the needs of Indonesian export.
- Improve the ability of business perpetrators, including the small and medium enterprises, to produce superior and competitive export-oriented products.

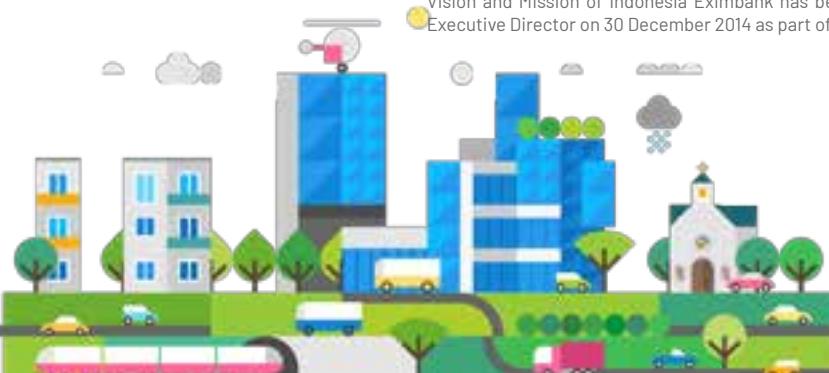
### Penjelasan Pernyataan Misi | Explanation of Mission Statement

- LPEI menjadi penggerak dalam melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah lain untuk menciptakan lingkungan eksport yang kondusif guna mendukung pertumbuhan eksport Indonesia yang berkelanjutan.
- Memberikan layanan pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi yang berkualitas sebagai solusi bernilai tambah terhadap kebutuhan eksport yang spesifik.
- LPEI mendapatkan mandat untuk menggerakkan pelaku usaha di Indonesia, termasuk usaha kecil dan menengah yang mampu menghasilkan produk berorientasi eksport yang berdaya saing.

Visi dan misi LPEI ditetapkan oleh Direktur Eksekutif pada tanggal 30 Desember 2014 yang merupakan bagian dari Rencana Jangka Panjang.

- Indonesia Eximbank is the driving force in the coordination with other government agencies in the creation of conducive export environment towards sustainable growth of Indonesia's exports.
- Providing high-quality financing, guarantee, insurance and consultation services as a value-added solution to specific export needs.
- Indonesia Eximbank has a mandate to mobilize businesses in Indonesia, including the Small and Medium Enterprise sector, to be capable of producing competitive export-oriented products.

Vision and Mission of Indonesia Eximbank has been stipulated by the Executive Director on 30 December 2014 as part of the Strategic Plan



## VISI, MISI & NILAI PERUSAHAAN

Vision, Mission & Corporate Value



### Budaya Kerja Lembaga Corporate Culture

Dalam menciptakan sumber daya manusia yang memiliki etos kerja, tanggung jawab dan produktivitas kinerja yang optimal guna mendukung visi, misi dan tujuan lembaga, LPEI memiliki acuan untuk bersikap, berperilaku dan bertindak yang tercermin dalam nilai-nilai budaya lembaga, yaitu TRUST. TRUST merupakan akronim dari 5 nilai budaya yang dimiliki LPEI dan telah ditetapkan melalui Peraturan Direktur Eksekutif No.0001/PDE/01/2014. nilai budaya tersebut menjadi landasan berperilaku dan bersikap oleh seluruh pegawai dan jajaran manajemen LPEI.

In creating a pool of human resources with optimum work ethics, responsibility and productivity in support of the vision, mission and objective of the institution, Indonesia Eximbank has established a code of conduct that reflects the core corporate culture of the institution, known as TRUST. TRUST is the acronym of the 5 core values of Indonesia Eximbank as formally established by Decree of the Executive Director No.0001/PDE/01/2014. These core values form a foundation for the conduct of all staff and management personnel at Indonesia Eximbank.



#### TRUSTWORTHY

Menjunjung tinggi integritas, didasari dengan niat ikhlas, hati yang tulus dan kejujuran serta menjaga kehormatan dan melaksanakan kode etik LPEI sehingga mampu mendapatkan dan memelihara kepercayaan.  
Upholding integrity with heartfelt sincerity, intentions and honesty as well as upholding honour and implementing Indonesian Eximbank code of ethics to gain and maintain trust.



#### RELIABLE

Melaksanakan tugas secara profesional, handal dan terpercaya dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan manajemen risiko serta bersikap proaktif dan antisipatif untuk mencapai kualitas hasil kerja yang optimal. To be professional, reliable, trustworthy in conducting one's responsibilities by applying the principles of Good Corporate Governance and risk management as well as being proactive and prepared to achieve optimal quality of work.



#### UNIQUE

Menjunjung tinggi kehormatan dan komitmen penuh terhadap fungsi, tugas dan wewenang sebagai lembaga keuangan khusus sesuai dengan undang-undang pendiriannya.  
To be honourable and fully committed to the functions, duties and authority of a specialized financial institution in accordance with the establishing act.



#### SERVICE EXCELLENCE

Memberikan pelayanan prima, yang melampaui harapan pemangku kepentingan LPEI secara lengkap dan profesional. Provide excellent service that exceeds the expectations of Indonesia Eximbank stakeholders thoroughly and professionally.



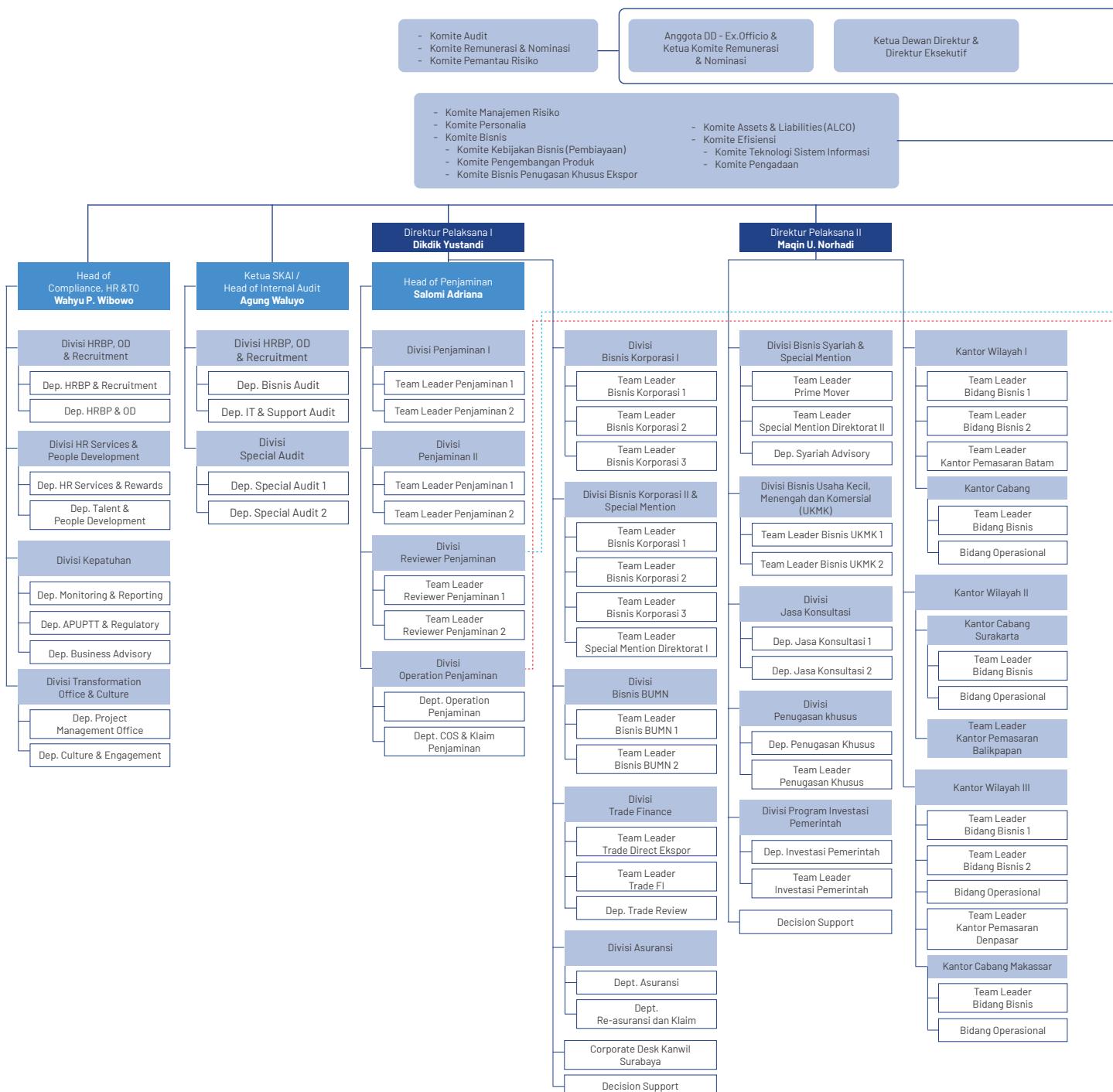
#### TEAMWORK

Berorientasi kepada pencapaian tujuan LPEI melalui penerapan kerja sama di dalam tim kerja yang solid, efektif dan efisien, dengan saling menghormati kewenangan masing-masing.  
To focus on Indonesia Eximbank's achievement of objectives by applying solid, effective and efficient cooperation within a solid team, with mutual respect for each other's authorities.

# STRUKTUR ORGANISASI

## Organization Structure

- Komite Manajemen Risiko
- Komite Personalia
- Komite Bisnis
  - Komite Kebijakan Bisnis (Pembinaan)
  - Komite Pengembangan Produk
  - Komite Bisnis Penugasan Khusus Ekspor
- Komite Assets & Liabilities
- Komite Efisiensi
  - Komite Teknologi Sistem Informasi
  - Komite Pengadaan
- Risk Management Committee
- Personnel Committee
- Business Committees
  - Business Policy (Financing) Committee
  - Product Development Committee
  - Export Special Assignment Business Committee
- Assets & Liabilities Committee
- Efficiency Committee
  - Information System Technology Committee
  - Procurement Committee

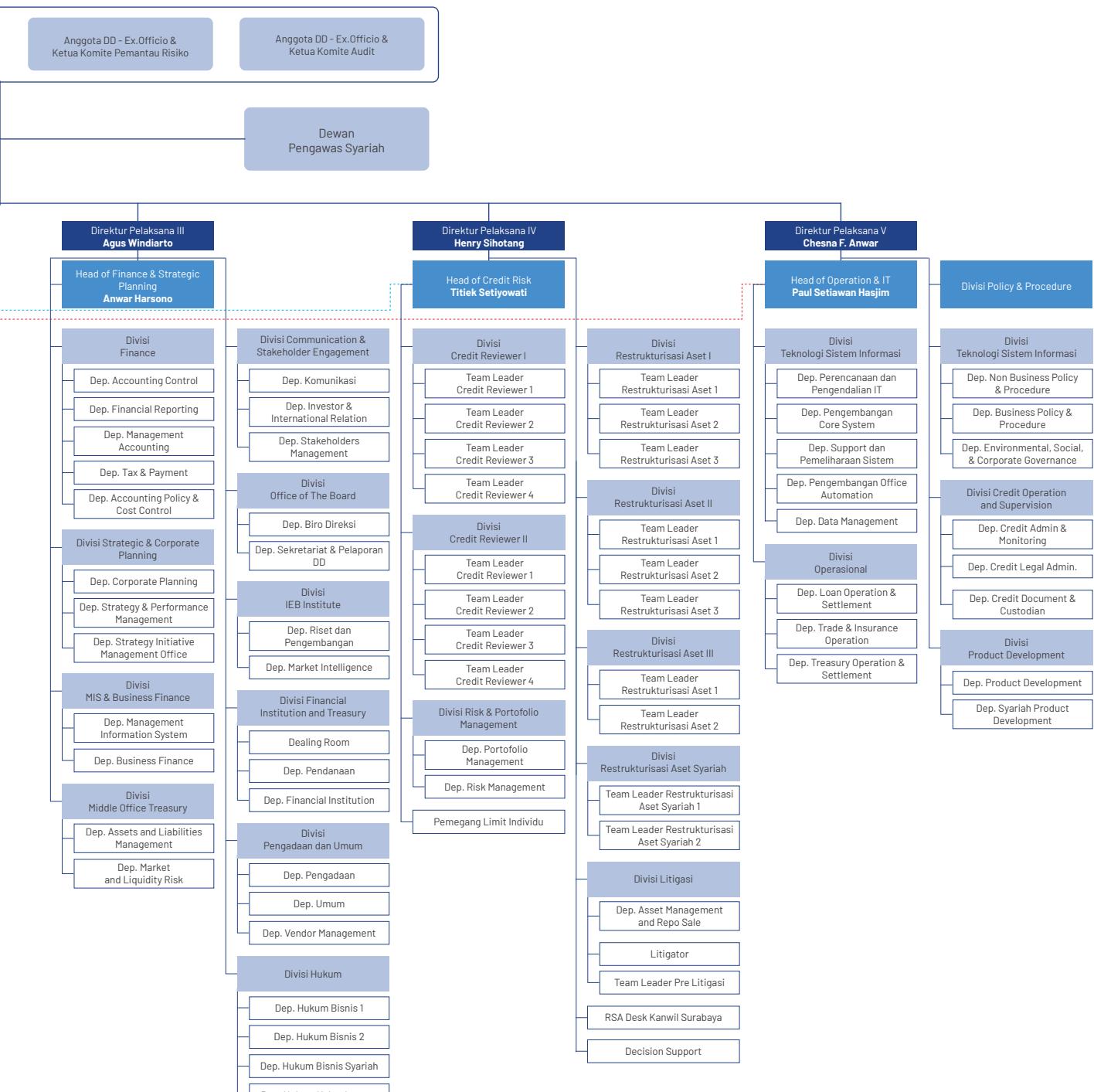


## STRUKTUR ORGANISASI

### Organization Structure

Struktur Organisasi yang berlaku sampai 31 Desember 2021 sesuai dengan Peraturan MPO.0029/CEO/11/2021 tentang Penyempurnaan Kedelapan PDE No.0065/PDE/11/2019 tentang Pedoman dan Tata Kerja Organisasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Organizational Structure that effective as of 31 December 2021 pursuant to the MPO.0029/CEO/11/2021 concerning the Eighth Refinement of PDE No. 0065/PDE/11/2019 regarding Organizational Guidelines and Procedures of Indonesia Eximbank.





# PROFIL DEWAN DIREKTUR

Board of Directors' Profile



## D. James Rompas

Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif

Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director

63 Tahun | Years old

Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship

Domisili | Domicile: Jakarta

### Riwayat Pendidikan | Educational Background

Sarjana Ekonomi, Universitas Jayabaya, Jakarta (1984).

Bachelor Degree of Economics, University of Jayabaya, Jakarta (1984).

### Dasar Hukum Pengangkatan | Appointment Basis

Menjabat sebagai Ketua Dewan Direktur Merangkap Direktur Eksekutif berdasarkan No. KMK 933/ KMK.06/2019 (Desember 2019 – sekarang)

Serves as Chairman of the Board of Directors and Executive Director No. KMK 933/KMK.06/2019 (December 2019 – present)

### Pengalaman Kerja | Professional Experience

- Wakil Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga (2006-2016)
- Direktur Bisnis PT Bank Niaga (2000-2006)
- Direktur Manajemen Risiko PT Bank Niaga (1999-2000)
- Vice President Director PT Bank CIMB Niaga (2006-2016)
- Business Banking Director PT Bank Niaga (2000-2006)
- Risk Management Director PT Bank Niaga (1999-2000)

### Rangkap Jabatan | Concurrent Position

Tidak ada rangkap jabatan

No concurrent position

### Hubungan Afiliasi | Affiliations

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

He does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.

## PROFIL DEWAN DIREKTUR

### Board of Directors' Profile



#### Arus Gunawan

Anggota Dewan Direktur  
Member of the Board of Directors

56 Tahun | Years old  
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship  
Domisili | Domicile: Jakarta

#### Riwayat Pendidikan | Educational Background

Sarjana Teknik Elektro, Institut Sains dan Teknologi Nasional (1993)  
Bachelor of Electrical Engineering, Institute of National Science and Technology (1993)

#### Dasar Hukum Pengangkatan | Appointment Basis

Menjabat sebagai anggota Dewan Direktur sejak 25 November 2020 berdasarkan KMK No. 530/KMK.06/2020  
Member of the Board of Directors since 25 November 2020 pursuant to KMK No. 530/KMK.06/2020

#### Pengalaman Kerja | Professional Experience

- Inspektur Jenderal, Kementerian Perindustrian RI (Maret 2020-Januari 2021)
- Inspektur Wilayah I, Inspektorat Jenderal, Kementerian Perindustrian RI (November 2018-Maret 2020)
- Direktur Pengembangan Wilayah Industri I, Kementerian Perindustrian RI (Desember 2016-November 2018)
- Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian, Kementerian Perindustrian RI (Januari 2016-Desember 2016)
- Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian (2014 - 2016)
- Inspector General, Ministry of Industry of the Republic of Indonesia (March 2020-January 2021)
- Inspector I, Inspectorate General, Ministry of Industry of the Republic of Indonesia (November 2018-March 2020)
- Director of Industrial Area Development I, Ministry of Industry of the Republic of Indonesia (December 2016-November 2018)
- Director of Machinery and Agricultural Machinery Equipment Industry, Ministry of Industry of the Republic of Indonesia (January 2016-December 2016)
- Secretary to Inspector General, the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia (2014 - 2016)

#### Rangkap Jabatan | Concurrent Position

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (2021-sekarang)  
Head of Industrial Human Resources Development Agency (2021-present)

#### Hubungan Afiliasi | Affiliations

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

He does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.

#### Pendidikan/Pelatihan | Workshop/Training

Loan Covid Restructuring After Implementation of POJK 48 2020, Bankers Association for Risk Management on 5 August 2021



### **Suminto**

Anggota Dewan Direktur  
Member of the Board of Directors

49 Tahun | Years old  
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship  
Domisili | Domicile: Jakarta

#### **Riwayat Pendidikan | Educational Background**

- Doktor di bidang Ekonomi Pembangunan dari Universitas Ritsumeikan Asia Pacific, Jepang (2012)
- Magister Sains Keuangan Pembangunan dari Universitas Hiroshima, Jepang (2002)
- Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Airlangga (1995).
- Doctorate degree in Development Economics from Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan (2012)
- Master degree in Development Finance from Hiroshima University, Japan (2002)
- Bachelor degree in International Relations from Airlangga University (1995).

#### **Dasar Hukum Pengangkatan | Appointment Basis**

Menjabat sebagai Anggota Dewan Direktur sejak tanggal 1 September 2018 berdasarkan KMK No. 554/KMK.06/2018  
Member of the Board of Directors since 1 September 2018 pursuant to KMK No. 554/KMK.06/2018

#### **Pengalaman Kerja | Professional Experience**

- Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional (Oktober 2019-Juli 2021)
- Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara (Juli 2018-Oktober 2019)
- Kepala Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) (2020-2021)
- Direktur Eksekutif, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) (2019-2021)
- Gubernur dan Ketua Dewan Gubernur, International Fund for Agricultural Development (IFAD) (2019 – 2021)
- Deputi G20 Finance (2019-2021)
- Pelaksana Tugas Direktur Pinjaman dan Hibah (2017-2018)
- Direktur Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Februari 2015–Juli 2018)
- Direktur Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian (Oktober 2014–Februari 2015)
- Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang, Direktorat Strategi dan Portofolio Utang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (Januari 2013–Oktober 2014)
- Berbagai penugasan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan RI

## PROFIL DEWAN DIREKTUR

Board of Directors' Profile

- Assistant Finance Minister for Macro Economy and International Finance (October 2019-July 2021)
- Assistant Finance Minister for Government Expenditures (July 2018-October 2019)
- Head of Secretariat, National Islamic Economic and Finance Committee (KNEKS)(2020-2021)
- Director, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)(2019-2021)
- Governor and Chairman of Governing Council Bureau, International Fund for Agricultural Development (IFAD), (2019 – 2021)
- G20 Finance Deputy (2019-2021)
- Acting Director for Loans and Grants, Ministry of Finance (2017-2018)
- Director of Islamic Financing, Directorate General of Financing and Risk Management (February 2015-July 2018)
- Director of Islamic Financing, Directorate General of Debt Management (October 2014-February 2015)
- Deputy Director of Debt Planning and Strategy, Directorate General of Debt Management (January 2013-October 2014)
- Various assignments in the Directorate General of Budget, Directorate General of Treasury, Secretariat General, Directorate General of Debt Management, and Directorate General of Financing and Risk Management.

### Rangkap Jabatan | Concurrent Position

- Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Kementerian Keuangan RI (Agustus 2021 – sekarang)
- Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) (Agustus 2021 – sekarang)
- Dewan Pengawas Rumah Sakit Kanker Dharmais (2020 – sekarang)
- Anggota Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) (2020 – sekarang)
- Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) (2019 – sekarang)
- Assistant Finance Minister for Financial Sector Policy (August 2021 – present)
- Executive Secretary, Financial System Stability Committee (KSSK) (August 2021 – present)
- Supervisory Board of Dharmais Hospital (2020 - present)
- Commissioner of National Board of Zakat (Baznas) (2020 - present)
- Commissioner, National Social Security Council (2019 - present)

### Hubungan Afiliasi | Affiliations

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

He does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.

### Pendidikan/Pelatihan | Workshop/Training

Sepanjang tahun 2021 tidak mengikuti pelatihan  
No training during 2021

## **PROFIL DEWAN DIREKTUR**

Board of Directors' Profile



### **Kasan**

Anggota Dewan Direktur  
Member of the Board of Directors

55 Tahun | Years old  
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship  
Domisili | Domicile: Jakarta

#### **Riwayat Pendidikan | Educational Background**

- Doktor Ilmu Ekonomi Pertanian, di bidang Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (2012)
- Magister Manajemen, di bidang Manajemen Internasional dari Universitas Indonesia (1998)
- Sarjana Pertanian di bidang Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya dari Institut Pertanian Bogor (1989)
- Doctorate of Agriculture Economics Science, in Agricultural Economy from Institute of Agriculture Bogor (2012)
- Master of Management, in International Management from University of Indonesia (1998)
- Bachelor of Agriculture, in Agricultural Economy and Resources from Institute of Agriculture Bogor (1989)

#### **Dasar Hukum Pengangkatan | Appointment Basis**

Menjabat sebagai anggota Dewan Direktur sejak 8 Juni 2020 berdasarkan KMK No. 274/KMK.06/2020  
Member of the Board of Directors since 8 June 2020 pursuant to KMK No. 274/KMK.06/2020

#### **Pengalaman Kerja | Professional Experience**

- Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan RI (April 2020 – April 2021)
- Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (2019 – 2020)
- Anggota Board of Directors International Rubber Consortium Limited (IRCo) – The International Tripartite Rubber Council (ITRC), (2018 – 2020)
- Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan RI (Januari 2017 – April 2020)

## PROFIL DEWAN DIREKTUR

### Board of Directors' Profile

- Staf Ahli bidang Hubungan Internasional, Kementerian Perdagangan RI (2016)
- Kepala Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan, Perdagangan, Kementerian Perdagangan RI (2010-2016)
- Berbagai penugasan di lingkungan Kementerian Perdagangan RI
- Director General National Export Development, Ministry of Commerce of RI (April 2020 - April 2021)
- Member of the Supervisory Board for the Palm Oil Plantations Fund Management Agency, (2019-2020)
- Member of Board of Directors International Rubber Consortium Limited (IRCo) – The International Tripartite Rubber Council (ITRC), (2018 – 2020)
- Head of Trade Research & Development of Indonesia (2017-April 2020)
- International Expert Staff, Ministry of Commerce of the Republic of Indonesia (2016)
- Director of Centre for Foreign Trade Policy (TREDA), Ministry of Commerce of the Republic of Indonesia (2010-2016)
- Various assignments in the Ministry of Commerce of the Republic of Indonesia

#### Rangkap Jabatan | Concurrent Position

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan RI (Mei 2021 - sekarang).

Head of Trade Analysis and Development Agency, Ministry of Trade of the Republic of Indonesia (April 2020 – present)

#### Hubungan Afiliasi | Affiliations

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

He does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.

#### Pendidikan/Pelatihan | Workshop/Training

Loan Covid Restructuring After Implementation of POJK 48 2020, Bankers Association for Risk Management on 5 August 2021

## PROFIL DEWAN DIREKTUR

Board of Directors' Profile



### Felia Salim

Anggota Dewan Direktur  
Member of the Board of Directors

64 Tahun | Years old  
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship  
Domicili | Domicile: Jakarta

#### Riwayat Pendidikan | Educational Background

- The Aspen Institute Fellow, Colorado, USA (2014)
- MIT Sloan School of Management Fellow, USA (2010)
- Georgetown University Fellow, Washington DC, USA (2003)
- Sarjana Fakultas Ekonomi dan Politik, Carleton University, Ottawa Canada (1983)
- The Aspen Institute Fellow, Colorado, USA (2014)
- MIT Sloan School of Management Fellow, USA (2010)
- Georgetown University Fellow, Washington DC, USA (2003)
- Bachelor Degree of Economics and Politic Faculty, Carleton University, Ottawa Canada (1983)

#### Dasar Hukum Pengangkatan | Appointment Basis

Menjabat sebagai Anggota Dewan Direktur sejak 25 Juli 2018 berdasarkan KMK No. 522/KMK.06/2018  
Member of the Board of Directors since 25 July 2018 pursuant to KMK No.522/KMK.06/2018

#### Pengalaman Kerja | Professional Experience

- Wakil Direktur Utama/Direktur Transformasi PT Bank Negara Indonesia (Persero),Tbk. (2006-2015)
- Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia(Persero),Tbk yang bertanggungjawab memimpin Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan(2003-2005)
- Ketua Komite sekretariat keuangan berlanjut sebagai Wakil Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN)(1999-2002)
- Direktur Bursa Efek Jakarta(1994-1999)
- Vice President Director/Transformation Director of PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. (2004-2015)
- Independent Commissioner of PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk who is responsible for leading the Risk and Compliance Management Committee(2003-2005)
- Chairperson of the financial secretariat committee and as Deputy Chairperson of the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA)(1999-2002)
- Director of Jakarta Stock Exchange (1994-1999)

#### Rangkap Jabatan | Concurrent Position

Anggota Dewan Direktur dan AndGreen Fund (2017 - sekarang)  
Member of the Board of Directors and AndGreen Fund (2017 - present)

#### Hubungan Afiliasi | Affiliations

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.  
She does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.

#### Pendidikan/Pelatihan | Workshop/Training

Loan Covid Restructuring After Implementation of POJK 48 2020, Bankers Association for Risk Management on 5 August 2021

## PROFIL DEWAN DIREKTUR

### Board of Directors' Profile



#### Rijani Tirtoso

Anggota Dewan Direktur  
Member of the Board of Directors

60 Tahun | Years old  
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship  
Domisili | Domicile: Jakarta

#### Riwayat Pendidikan | Educational Background

- Master of Business Administration University of Illinois At Urbana-Champaign, 1994
- Sarjana (S-1) Keahlian Tanah, Institut Pertanian Bogor, Indonesia, 1984
- Master of Business Administration University of Illinois At Urbana-Champaign, 1994
- Bachelor Degree in Soil Experts, Institute of Agriculture Bogor, Indonesia, 1984

#### Dasar Hukum Pengangkatan | Appointment Basis

Menjabat sebagai Anggota Dewan Direktur sejak 23 Desember 2019 berdasarkan KMK No. 934/KMK.06/2019  
Member of the Board of Directors since 23 December 2019 pursuant to KMK No. 934/KMK.06/2019

#### Pengalaman Kerja | Professional Experience

- Anggota Dewan Direktur LPEI (2020-2021) | Member of LPEI's Board of Directors (2020-2021)
- Project Advisor of Business Process Reengineering Bank Mandiri (2019)
- SEVP Retail Risk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2019)
- SEVP Internal Audit, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2008-2015)
- Group Head Internal Audit, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2008)
- Group Head Corporate Credit Risk Management, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2005-2008)

#### Rangkap Jabatan | Concurrent Position

Tidak ada rangkap jabatan  
No concurrent position

#### Hubungan Afiliasi | Affiliations

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

She does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.

#### Pendidikan/Pelatihan | Workshop/Training

Loan Covid Restructuring After Implementation of POJK 48 2020, Bankers Association for Risk Management on 5 August 2021



# PROFIL DIREKTUR PELAKSANA

Managing Directors' Profile

Komposisi Dewan Direktur per 31 Desember 2021 |  
Board of Directors Composition as of 31 December 2021



## Dikdik Yustandi

Direktur Pelaksana I  
Managing Director I

59 Tahun | Years old  
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship  
Domisili | Domicile: Jakarta

### Riwayat Pendidikan | Educational Background

- Magister Manajemen, Universitas Satyagama, Jakarta (1997)
  - Sarjana Perikanan, Institut Pertanian Bogor (1987)
  - Master of Management, University of Satyagama, Jakarta (1997)
  - Bachelor degree, Fishery Faculty, Institute of Agriculture Bogor (1987)
- Dasar Hukum Pengangkatan | Appointment Basis**  
Menjabat sebagai Direktur Pelaksana sejak 1 September 2019 berdasarkan KDD No. 0010/ KDD/08/2019  
Serves as Managing Director since 1 September 2019 pursuant to KDD No. 0010/KDD/08/2019

### Pengalaman Kerja | Professional Experience

- Direktur Pelaksana LPEI (29 Maret 2019 - 31 Agustus 2019)
- Senior Executive Vice President Large Corporate Banking, Corporate Banking, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Maret 2018 - 28 Maret 2019)
- Komisaris, Bank Mandiri Syariah (15 Januari 2018 - 29 Maret 2019)
- Advisor, Bank Mandiri Syariah (Mei 2018 - 13 Desember 2018)
- Senior Vice President Corporate Banking 2, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Februari 2016 - 26 Maret 2018)
- Director Marketing and Distribution PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Oktober 2014 - Februari 2016)
- General Manager Bank Mandiri Group Hong Kong, Corporate Banking III, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Desember 2010 - Oktober 2014)
- Regional Manager VIII Surabaya, Regional Network Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Januari 2010 - November 2010)
- Managing Director LPEI (29 March 2019 - 31 August 2019)
- Senior Executive Vice President Large Corporate Banking, Corporate Banking, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (March 2018 - 28 March 2019)
- Komisaris, Bank Mandiri Syariah (15 January 2018 - 29 March 2019)
- Advisor, Bank Mandiri Syariah (May 2018 - 13 December 2018)
- Senior Vice President Corporate Banking 2, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Feb 2016 - 26 March 2018)
- Director Marketing and Distribution PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (October 2014 - February 2016)
- General Manager Bank Mandiri Group Hong Kong, Corporate Banking III, PT Bank Mandiri (Persero) Tb. (December 2010 - October 2014)
- Regional Manager VIII Surabaya, Regional Network Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (January 2010 - November 2010)

### Rangkap Jabatan | Concurrent Position

Tidak ada rangkap jabatan  
No concurrent position

### Hubungan Afiliasi | Affiliations

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

He does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.

## PROFIL DIREKTUR PELAKSANA

Managing Directors' Profile



### Maqin U. Norhadi

Direktur Pelaksana II  
Managing Director II

51 Tahun | Years old  
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship  
Domisili | Domicile: Jakarta

### Riwayat Pendidikan | Educational Background

Master of Management, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1999)  
Master of Management, University of Gajah Mada, Yogyakarta (1999)

### Dasar Hukum Pengangkatan | Appointment Basis

Menjabat sebagai Direktur Pelaksana sejak 12 April 2021 berdasarkan KDD No. 0004/KDD/04/2021  
Serves as Managing Director since 12 April 2021 pursuant to KDD No. 0004/KDD/04/2021

### Pengalaman Kerja | Professional Experience

- Direktur Niaga PT Kereta Api Indonesia (Persero) (Mei 2020 – Februari 2021)
- Ketua Komite Manajemen Risiko PT Kereta Commuter Indonesia (Juni 2020 – Februari 2021)
- Presiden Komisaris PT Kereta Commuter Indonesia (Juni 2020 – Februari 2021)
- Anggota Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Februari 2020 – Mei 2020)
- Direktur Regional PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (March 2016 – April 2020)
- Director of Commerce PT Kereta Api Indonesia (Persero) (May 2020 – February 2021)
- Chairman of Risk Management Committee PT Kereta Commuter Indonesia (June 2020 – February 2021)
- President Commissioner PT Kereta Commuter Indonesia (June 2020 – February 2021)
- Member of the Board of Commissioner PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (February 2020 – May 2020)
- Director of Regional PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (March 2016 – April 2020)

### Rangkap Jabatan | Concurrent Position

Tidak ada rangkap jabatan  
No concurrent position

### Hubungan Afiliasi | Affiliations

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

He does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.

## PROFIL DIREKTUR PELAKSANA

Managing Directors' Profile



### Agus Windiarto

Direktur Pelaksana III  
Managing Director III

58 Tahun | Years old  
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship  
Domisili | Domicile: Jakarta

#### Riwayat Pendidikan | Educational Background

- Master in Business Administration (MBA), Middlesex University, London, UK (1998)
- Sarjana Ekonomi dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta (1988)
- Master of Business Administration (MBA) from Middlesex University, London, UK (1998)
- Bachelor of Economics from Krisnadwipayana University, Jakarta (1988)

#### Dasar Hukum Pengangkatan | Appointment Basis

Menjabat sebagai Direktur Pelaksana sejak 1 September 2019 berdasarkan KDD No. 0012/KDD/08/2019  
Serves as Managing Director since 1 September 2019 pursuant to KDD No. 0012/KDD/08/2019

#### Pengalaman Kerja | Professional Experience

- Direktur Pelaksana LPEI (29 Maret-31 Agustus 2019)
- Plt. Direktur Pelaksana LPEI (Januari-9 Maret 2019)
- Kepala Divisi Corporate Planning and Finance LPEI (Januari 2018-Januari 2019)
- Kepala Divisi Akunting dan SIE (Mei 2013-Desember 2017)
- Plt. Kepala Divisi Tresuri (Februari 2013-April 2013)
- Kepala Divisi Manajemen Perencanaan dan Strategis (2011-2013)
- Kepala Divisi Perencanaan, Riset, dan Pengembangan (Februari 2010-Desember 2011)
- Managing Director III Indonesia Eximbank (29 March-31 August 2019)
- Acting Managing Director III Indonesia Eximbank (January-9 March 2019)
- Head of Corporate Planning and Finance of Indonesia Eximbank (January 2018-January 2019)
- Head of Accounting and SIE Division (May 2013-December 2017)
- Acting as Head of Treasury Division (February 2013-April 2013)
- Head of Planning and Strategic Division (2011-2013)
- Head of Planning, Research and Development Division (February 2010-December 2011)

#### Rangkap Jabatan | Concurrent Position

Merangkap jabatan sebagai Sekretaris Lembaga LPEI  
Concurrently act as Corporate Secretary

#### Hubungan Afiliasi | Affiliations

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

He does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.

## PROFIL DIREKTUR PELAKSANA

Managing Directors' Profile



### Henry Sihotang

Direktur Pelaksana IV  
Managing Director IV

61 Tahun | Years old

Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship

Domisili | Domicile: Jakarta

### Riwayat Pendidikan | Educational Background

Magister Manajemen Keuangan, Universitas Satyagama, Jakarta (1988)  
Master of Financial Management, Satyagama University, Jakarta (1988)

### Dasar Hukum Pengangkatan | Appointment Basis

Menjabat sebagai Direktur Pelaksana IV sejak 1 September 2019 berdasarkan KDD No. 0013/KDD/08/2019

Serves as Managing Director IV since 1 September 2019 pursuant to KDD No. 0013/KDD/08/2019

### Pengalaman Kerja | Professional Experience

- Direktur Utama, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (November 2017-Mei 2019)
- Direktur, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (Mei 2014-Agustus 2019)
- Komisaris Utama, PT PPA Kapital (Juli 2018 s/d Agustus 2019)
- Komisaris Utama, PT PPA Finance (Februari 2015-Juni 2018)
- Executive Vice President/Group Head - Corporate Credit Risk II Group PT Bank Mandiri (Persero) - (Februari 2010 s/d Mei 2014)
- Komisaris, (Rangkap Jabatan) PT Pengelola Investama Mandiri (Oktober 2009-Juli 2014)
- Non-Executive Director, (Rangkap Jabatan) Bank Mandiri European Ltd, London (Juni 2010-Desember 2012)
- Senior Vice President/Group Head - Credit Recovery II Group, PT Bank Mandiri (Persero) - (November 2008-Januari 2010)
- Vice President - Loan Workout Department, PT Bank Mandiri (Persero) (April 2006-Oktober 2008)
- Vice President - Commercial Risk Management Department, PT Bank Mandiri (Persero) - (Oktober 2004-April 2006)
- Vice President - Operational Risk Management Department, PT Bank Mandiri (Persero) (Juli 2003-Oktober 2004)
- Assistant Vice President, CRM - Corporate Credit & Financial Institution PT Bank Mandiri (Persero) (Agustus 1999-Juli 2003)

## **PROFIL DIREKTUR PELAKSANA**

Managing Directors' Profile

- President Director, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (Nov 2017-May 2019)
- Director, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (May 2014-August 2019)
- Commissioner, PT PPA Kapital (July 2018- August 2019)
- Commissioner, PT PPA Finance (Feb 2015-June 2018)
- Executive Vice President/Group Head – Corporate Credit Risk II Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Feb 2010- May 2014)
- Comissioner, (Multiple Position) PT Pengelola Investama Mandiri (Oct 2009-July 2014)
- Non-Executive Director, (Rangkap Jabatan) Bank Mandiri Eropean Ltd, London (June 2010-Dec 2012)
- Senior Vice President/Group Head - Credit Recovery II Group, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Nov 2008-Jan 2010)
- Vice President – Loan Workout Department, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (April 2006-Oct 2008)
- Vice President – Commercial Risk Management Department, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Oct 2004-April 2006)
- Vice President – Operational Risk Management Department, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (July 2003- Oct 2004)
- Assistant Vice President, CRM – Corporate Credit & Financial Institution PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (August 1999-July2003)

### **Rangkap Jabatan | Concurrent Position**

Tidak ada rangkap jabatan

No concurrent position

### **Hubungan Afiliasi | Affiliations**

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

He does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.

## PROFIL DIREKTUR PELAKSANA

Managing Directors' Profile



### Chesna F. Anwar

Direktur Pelaksana V  
Managing Director V

59 Tahun | Years old  
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship  
Domisili | Domicile: Jakarta

Riwayat Pendidikan | Educational Background  
Sarjana Ekonomi dari University of Maryland, Amerika Serikat (1983)  
Bachelor of Economics from University of Maryland, United State, 1983

Dasar Hukum Pengangkatan | Appointment Basis  
Menjabat sebagai Direktur Pelaksana V sejak 1 September 2019 berdasarkan KDD No. 0014/KDD/08/2019  
Serves as Managing Director V since 1 September 2019 pursuant to KDD No. 0014/KDD/08/2019

### Pengalaman Kerja | Professional Experience

- Direktur Pelaksana, LPEI(1 Mei 2019 – sekarang)
- Direktur Kepatuhan, Standard Chartered Bank Indonesia (2010-April 2019)
- Direktur Internal Affairs, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2006-2010)
- Direktur Kepatuhan, Citibank, N.A. (2004-2005)
- Senior Compliance Officer, Citibank, N.A (Juni 2001 – Desember 2004)
- Security Service Country Manager, Citibank, N.A (Januari 1997 – Mei 2001)
- Operation Head, Global Securities Service, Citibank, N.A (Juli 1994 – Desember 1996)
- Branch Manager Pondok Indah & Head Preferred Banking, Bank Universal (Desember 1992 – Juni 1994)
- Manager Priority Banking, Standard Chartered Bank (Mei 1991 – Juni 1992)
- Manager Custodial Services, Standard Chartered Bank (Mei 1990 – Februari 1991)
- Managing Banking Operation, Standard Chartered Bank (Oktober 1989 – Mei 1990)
- Managing Director LPEI (1 May 2019 – present)
- Compliance Director, Standard Chartered Bank Indonesia (2010-April 2019)
- Internal Affairs Director, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2006-2010)
- Compliance Director, Citibank, N.A. (2004-2005)
- Senior Compliance Officer, Citibank, N.A (June 2001 – December 2004)
- Security Service Country Manager, Citibank, N.A (January 1997 – May 2001)
- Operation Head, Global Securities Service, Citibank, N.A (July 1994 – December 1996)
- Branch Manager Pondok Indah & Head Preferred Banking, Bank Universal (December 1992 – June 1994)
- Manager Priority Banking, Standard Chartered Bank (May 1991 – June 1992)
- Manager Custodial Services, Standard Chartered Bank (May 1990 – February 1991)
- Managing Banking Operation, Standard Chartered Bank (October 1989 – May 1990)

### Rangkap Jabatan | Concurrent Position

Tidak ada rangkap jabatan  
No concurrent position

### Hubungan Afiliasi | Affiliations

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

She does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.



# MANAJEMEN SENIOR

## Senior Management

Komposisi SEVP per 31 Desember 2021 |  
SEVP Composition as of 31 December 2021



### Salomi Adriana

Plt. Head of Penjaminan  
Acting Head of Guarantee

50 Tahun | Years old  
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship  
Domisili | Domicile: Jakarta

#### Riwayat Pendidikan | Educational Background

- Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1997)
- Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1994)
- Master of Management from Gadjah Mada University, Yogyakarta (1997)
- Bachelor of Economics from Gadjah Mada University, Yogyakarta (1994)

#### Dasar Hukum Pengangkatan | Appointment Basis

KDE No.: 0017/KDE/02/2021 sejak 1 Maret 2021  
KDE No.: 0017/KDE/02/2021 since 1 March 2021

#### Pengalaman Kerja | Professional Experience

- Plt. Head of Penjaminan (2021)
- Kepala Divisi Asuransi (2021)
- Perangkapan: Plt. Senior Executive VP I (2020-2021)
- Kepala Divisi Penjaminan dan Asuransi (2019-2020)
- Pj. Kepala Divisi Pembiayaan Usaha Kecil, Menengah dan Komersial (Januari 2019-Maret 2019)
- Pj. Kepala Divisi Penjaminan dan Asuransi (2018-2019)
- Kepala Departemen Pengembangan Organisasi dan Sistem Prosedur (Januari 2018-Mei 2018)
- Kepala Departemen Pengembangan SDM (2013-2018)
- Kepala Departemen Hub. Kelembagaan & Pembiayaan FI (2010-2013)
- Pj. Kepala Departemen Pembiayaan Kembali & Hubungan Kelembagaan (2009-2010)
- Act. Head of Guarantee (2021)
- Head of Insurance Division (2021)
- Concurrently: Act. Senior Executive VP I (2020-2021)
- Head of Guarantee and Insurance Division (2019-2020)
- Acting Head of Small, Medium Enterprises and Commercial Financing Division (January 2019-March 2019)
- Acting Head of Guarantee and Insurance Division (2018-2019)
- Head of Organizational Development and Procedure System Department (January 2018-May 2018)
- Head of HR Development Department (2013-2018)
- Head of Institutional Relations & FI Financing Department (2010-2013)
- Acting Head of Refinancing & Institutional Relations Department (2009-2010)

## MANAJEMEN SENIOR

Senior Management

### Rangkap Jabatan | Concurrent Position

Tidak ada rangkap jabatan  
No concurrent position

### Hubungan Afiliasi | Affiliations

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

She does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.

### Pendidikan/Pelatihan | Workshop/Training

- Sosialisasi Manual Pembiayaan Batch 1: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia(LPEI) 27 - 28 Januari 2021
- Tata Cara Pengisian Aplikasi E-LHKPN: Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) 27 Januari 2021
- Kelas Persiapan dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 Batch 6: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia(LPEI) 12 November 2021
- Kelas Persiapan dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 Batch 7 : ARFAIDHAMS SECRET 19 November 2021
- Workshop 2021 dalam Pemaparan RKAT 2022: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia(LPEI) 09 - 11 Desember 2021
- Sharing Session Binis Syariah Manajemen LPEI: Adiwarman Azwar Karim 31 Agustus 2021
- Dissemination of Financing Manual Batch 1: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia(LPEI) 27 - 28 January 2021
- Procedures to Fill in E-LHKPN Application: Corruption Eradication Committee(KPK) 27 January 2021
- Class of Preparation and Test of Risk Management Certification Level 4 Batch 6: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia(LPEI) 12 November 2021
- Class of Preparation and Test of Risk Management Certification Level 4 Batch 7: ARFAIDHAMS SECRET 19 November 2021
- 2021 Workshop to Present RKAT 2022: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia(LPEI) 09 - 11 December 2021
- Sharing Session of LPEI Management Sharia Business: Adiwarman Azwar Karim 31 August 2021



### **Anwar Harsono**

Head of Finance & Strategic Planning

48 Tahun | Years old

Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship  
Domisili | Domicile: Jakarta

#### **Riwayat Pendidikan | Educational Background**

- Magister Finance dari Cleveland State University(2003)
- Sarjana Accounting dari Universitas Trisakti, Jakarta(1997)
- Master of Finance dari Cleveland State University(2003)
- Bachelor of Accounting from Trisakti University, Jakarta(1997)

#### **Dasar Hukum Pengangkatan | Appointment Basis**

KDE No. 0064/KDE/09/2020(1 Juli 2020 – sekarang)  
KDE No. 0064/KDE/09/2020(1 Juli 2020 – present)

#### **Pengalaman Kerja | Professional Experience**

- Country CFO/Finance Director, Standard Chartered Bank Indonesia (2018-2020)
- Head of Finance & Strategy, Bank CIMB Niaga Tbk (2013-2018)
- Board of Commisioner Member, CIMB Niaga Pension Funds (2015-2017)
- Bankwide Management Acct & Financial Acct Group Head, Bank CIMB Niaga Tbk (2010-2013)
- Bankwide Management Acct & Fin Analysis Div Head, Bank CIMB Niaga Tbk (2008-2010)
- Corporate Finance & Analysis Dept Head, Bank CIMB Niaga Tbk (2004-2008)
- Accounting, Budget & Financial Analyst, Astra Otoparts Tbk (1997-2000)

#### **Rangkap Jabatan | Concurrent Position**

Tidak ada rangkap jabatan  
No concurrent position

#### **Hubungan Afiliasi | Affiliations**

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

He does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.

#### **Pendidikan/Pelatihan | Workshop/Training**

- Tata Cara Pengisian Aplikasi E-LHKPN: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 27 Januari 2021
- Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Batch 2: Ikatan Bankir Indonesia (IBI) 7 April 2021
- BRF Loan COVID Restructuring After Implementation of POJK 48 2020: Bankers Association for Risk Management(BARa) 05 Agustus 2021
- Workshop 2021 dalam Pemaparan RKAT 2022: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia(LPEI) 09 - 11 Desember 2021
- Sharing Session Binis Syariah Manajemen LPEI: Adiwarman Azwar Karim 31 Agustus 2021
- Procedures to Fill in E-LHKPN Application: Corruption Eradication Committee(KPK) 27 January 2021
- Refreshment of Risk Management Certification Batch 2: Ikatan Bankir Indonesia (IBI) 7 April 2021
- BRF Loan COVID Restructuring After Implementation of POJK 48 2020: Bankers Association for Risk Management(BARa) 05 August 2021
- 2021 Workshop to Present RKAT 2022: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia(LPEI) 09 - 11 December 2021
- Sharing Session of LPEI Management Sharia Business: Adiwarman Azwar Karim 31 August 2021

## MANAJEMEN SENIOR

### Senior Management



#### **Wahyu P. Wibowo**

Head of Compliance, HR & TO

56 Tahun | Years old

Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship

Domisili | Domicile: Jakarta

#### Riwayat Pendidikan | Educational Background

- S2 Strategic Management dari Konstanz University(2004)
- S2 Manajemen dari Swiss German University(2004)
- S1 Social Philosophy dari STF Driyarkara Jakarta(1991)
- Master of Strategic Management from Konstanz University(2004)
- Master of Management from Swiss German University(2004)
- Bachelor of Social Philosophy from STF Driyarkara Jakarta(1991)

#### Dasar Hukum Pengangkatan | Appointment Basis

PJ No: PJ.0018/HRM/02/2020 sejak 17 Februari 2020

PJ No: PJ.0018/HRM/02/2020 since 17 February 2020

#### Pengalaman Kerja | Professional Experience

- Managing Director, Chief Learning & Development Officer, Prudential Life Assurance (2017-2020)
- EVP, Head of HRBP & Employee Engagement, CIMB Niaga (2012-2017)
- Director, Human Capital, Sinarmas Land (2010-2011)
- Director, HR & Corp. Affair, PAM Lyonnaise Jaya (2004-2010)
- Director, HR & Legal, Allianz Life Indonesia (2002-2004)
- General Manager, HR, Allianz Life Indonesia (2001-2002)
- Manager, HR, AXA Indonesia (2000-2001)
- Supervisor, HR & International Service Personnel Administrator, General Motors Indonesia (1997-2000)
- Officer, Industrial Relation, Excelcomindo Pratama (1995-1996)

#### Rangkap Jabatan | Concurrent Position

Tidak ada rangkap jabatan

No concurrent position

#### Hubungan Afiliasi | Affiliations

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali. He does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.

#### Pendidikan/Pelatihan | Workshop/Training

- Tata Cara Pengisian Aplikasi E-LHKPN: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 27 Januari 2021
- Transformasi Digital Bisnis Asuransi Berbasis Governance, Risk Management & Compliance (GRC): IRMAPA 30 Juni 2021
- Pengenalan Tipologi TPPU & TPPT pada Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) 17 Desember 2021
- Workshop 2021 dalam Pemaparan RKAT 2022: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) 09 - 11 Desember 2021
- Satukan Energi Membangun Kontribusi (Town hall Batch I Dirpel II): Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) 06 Mei 2021
- Extraordinary Year, Extra Ordinary Result (Town hall Batch II Dirpel II): Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) 25 Agustus 2021
- Meaningful Work (Town hall Batch III Dirpel II): Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) 03 Desember 2021
- Procedures to Fill in E-LHKPN Application: Corruption Eradication Committee (KPK) 27 January 2021
- Insurance Business Digital Transformation of Governance, Risk Management & Compliance (GRC) Based: IRMAPA 20 June 2021
- Introducing Typology of TPPU & TPPT at Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) 17 December 2021
- 2021 Workshop to Present RKAT 2022: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) 09 - 11 December 2021
- Unite the Energy to Build Contribution (Town Hall Batch I Dirpel II): Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) 06 May 2021
- Extraordinary Year, Extra Ordinary Result (Town hall Batch II Dirpel II): Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) 25 August 2021



## **Titiek Setiyowati**

Head of Credit Risk

58 Tahun | Years old  
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship  
Domisili | Domicile: Jakarta

### Riwayat Pendidikan | Educational Background

Sarjana Sosial Ekonomi Pertanian dari Universitas Jember, Jawa Timur (1989)  
Bachelor of Agriculture Economics Social from Jember University, East Java (1989)

### Dasar Hukum Pengangkatan | Appointment Basis

PJ No: PJ.0035/HRM/02/2020 (1 Maret 2020–28 Februari 2022)  
PJ No: PJ.0035/HRM/02/2020 (March 1, 2020–February 28, 2022)

### Pengalaman Kerja | Professional Experience

- Advisory, Coach, Trainer di Mandiri University Group, PT Bank Mandiri (2019-2020)
- Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun | Chairman of Pension Fund Supervisory Board, Bank Mandiri 2 (Eks. BDN) – (2016-2020)
- SVP, Group Head Commercial, PT Bank Mandiri (2017-2019)
- SVP, Group Head Policy & Procedure, PT Bank Mandiri (2015-2016)
- SVP, Chief Auditor, PT Bank Mandiri (2010-2014)
- VP, Dept. Head Corporate Risk, PT Bank Mandiri (2007-2010)
- VP, Pemegang Kewenangan Kredit Segmen Commercial Risk | Loan Authority Manager of Commercial Risk Segment, PT Bank Mandiri (2006)
- VP, Dept. Head Corporate Credit Risk, PT Bank Mandiri (2004-2005)
- AVP, Credit Risk Manager, PT Bank Mandiri (2002-2003)
- Sr. Credit Risk Manager, PT Bank Mandiri (1999-2001)
- ARM, Bank Dagang Negara (1995-1998)
- Credit Analyst, Bank Dagang Negara (1990-1994)

### Rangkap Jabatan | Concurrent Position

Tidak ada rangkap jabatan  
No concurrent position

### Hubungan Afiliasi | Affiliations

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

She does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.

### Pendidikan/Pelatihan | Workshop/Training

- Tata Cara Pengisian Aplikasi E-LHKPN: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 27 Januari 2021
- BRF Loan COVID Restructuring After Implementation of POJK 48 2020: Bankers Association for Risk Management (BARa) 05 Agustus 2021
- Sharing Session Binis Syariah Manajemen LPEI: Adiwarman Azwar Karim 31 Agustus 2021
- Procedures to Fill in E-LHKPN Application: Corruption Eradication Committee (KPK) 27 January 2021
- BRF Loan COVID Restructuring After Implementation of POJK 48 2020: Bankers Association for Risk Management (BARa) 05 August 2021
- Sharing Session of LPEI Management Sharia Business: Adiwarman Azwar Karim 31 August 2021

**MANAJEMEN SENIOR**  
Senior Management



**Agung Waluyo**

Head of Internal Audit

57 Tahun | Years old

Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship

Domisili | Domicile: Jakarta

**Riwayat Pendidikan | Educational Background**

- S2, Akuntansi, Universitas Indonesia (2010)
- D4, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta (1991)
- Master of Accounting, Universitas Indonesia (2010)
- Diploma IV, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta (1991)

**Dasar Hukum Pengangkatan | Appointment Basis**

PJ No: PJ.0057/HRB/11/2020 (23 November 2020–22 November 2022)

PJ No: PJ.0057/HRB/11/2020 (23 November 2020–22 November 2022)

**Pengalaman Kerja | Professional Experience**

- Direktur, PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia (2020)
- Kepala SPI & Kepatuhan, PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) (2017 – 2020)
- Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, PT Kliring Berkangka Indonesia (2015 – 2017)
- Deputi Direktur Finance & Accounting KIBIF Group, PT Estetika Tata Tiara (2015)
- Kepala Sub Bagian, Inspektorat Jenderal Kemenkeu (2002-2014)
- Auditor, Inspektorat Jenderal Kemenkeu (1985-2002)
- Director, PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia (2020)
- Head of ICS & Compliance, PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) (2017-2020)
- Head of Corporate Secretary Division, PT Kliring Berkangka Indonesia (2015 – 2017)
- Deputy Director of Finance & Accounting KIBIF Group, PT Estetika Tata Tiara (2015)
- Head of Sub Section, Inspectorate General of Ministry of Finance (2002 – 2014)
- Auditor, Inspectorate General of Ministry of Finance (1985 – 2002)

**Rangkap Jabatan | Concurrent Position**

Tidak ada rangkap jabatan

No concurrent position

**Hubungan Afiliasi | Affiliations**

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali. He does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.

**Pendidikan/Pelatihan | Workshop/Training**

- Internal Audit Back to The Future - Emerging From The Crisis Oktober 2021
- Sosialisasi Whistle Blowing System 2021
- BRF Loan COVID Restructuring After Implementation of POJK 48 2020 (2021)
- Ethics in Business - Big Chalenge 2021
- Penerapan Governance, Risk & Compliance di Era Digital Stategy dan Aksi (2021)
- Kelas Persiapan dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 (2021)
- Internal Audit Back to The Future - Emerging From The Crisis October 2021
- Sosialization Whistle Blowing System 2021
- BRF Loan COVID Restructuring After Implementation of POJK 48 2020 (2021)
- Ethics in Business - Big Chalenge 2021
- Application of Governance, Risk & Compliance in Digital Era(Strategy & Action)2021
- Preparation Class of Certification Bank Risk Management Level 4 (2021)



### **Paul Setiawan Hasjim**

Head of Operation & IT

57 Tahun | Years old

Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian Citizenship

Domisili | Domicile: Jakarta

#### **Riwayat Pendidikan | Educational Background**

- S2, Administrasi Bisnis, RMIT University(2002)
- S1, Manajemen Informatika, Sekolah Tinggi Informatika & Komputer, Jakarta(1986)
- Master of Business Administration, RMIT University(2002)
- Bachelor of Informatics Management, Sekolah Tinggi Informatika & Komputer(1986)

#### **Dasar Hukum Pengangkatan | Appointment Basis**

PJ.0005/SV4/03/2021(15 Maret 2021 sd 14 Maret 2023)

PJ.0005/SV4/03/2021(15 March 2021 to 14 March 2023)

#### **Pengalaman Kerja | Professional Experience**

- Head of IT & Operations, Rabobank International(2018-2021)
- IT Advisor to Director of IT, BPJS Ketenagakerjaan(2016 – 2017)
- Director of Operations & IT, Commonwealth Bank(2013-2016)
- Chief of Operations & IT, Commonwealth Bank(2012-2013)
- Executive IT Consultant, PT Jasa Cendikia(2012)
- Operations & IT Director, Bank CIMB Niaga(2008-2012)

#### **Rangkap Jabatan | Concurrent Position**

Tidak ada rangkap jabatan

No concurrent position

#### **Hubungan Afiliasi | Affiliations**

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

He does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.

#### **Pendidikan/Pelatihan | Workshop/Training**

Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko (2021)

Refreshment of Risk Management Certification (2021)

## MANAJEMEN SENIOR

### Senior Management

### Komposisi Manajemen Senior per 31 Desember 2021

#### Senior Management Composition as of 31 December 2021

No	Nama Name	Jabatan Position	Lokasi Location	Tanggal Lahir Date of Birth	Jenjang Pendidikan Education	Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis
1	Sumarno	Kepala Divisi <i>Transformation Office</i> Head of Transformation Office Division	JKT	24 May 1971	S2, Ilmu Manajemen Master Degree, Management Science	No. 0066/KDE/07/2021 Tanggal 2 Juli 2021 Dated 2 July 2021
2	Rudi Rinardi	Kepala Divisi Restrukturisasi Aset III Head of Assets Restructuring III Division	JKT	07 Dec 1972	S1, Administrasi Niaga Bachelor Degree, Commerce Administration	No. 0001/KDE/01/2020 Tanggal 17 Januari 2020 Dated 17 January 2020
3	T. Dyza Rovina Aziz Rochadi	Kepala Divisi <i>Office of The Board</i> Head of Office of The Board Division	JKT	01 Dec 1971	S2, Keuangan dan Perbankan Master Degree, Finance and Banking	No. 0038/KDE/07/2020 Tanggal 1 Juli 2020 Dated 1 July 2020
4	Sunu Widi Purwoko	Kepala Divisi Hukum Head of Legal Division	JKT	10 Apr 1971	S2, Ilmu Hukum Master Degree, Law Science	No. 0066/KDE/07/2021 Tanggal 2 Juli 2021 Dated 2 July 2021
5	Nugroho Kusumowibowo	Pj. Kepala Kantor Cabang Medan Acting Head of Branch Office Medan	MDN	15 Jul 1969	S2, Hukum Master Degree, Law	No. KDE 0017/KDE/02/2021 Tanggal 1 Maret 2021 Dated 1 March 2021
6	Yoseph Tri Purnomasidi	Kepala Divisi Restrukturisasi Aset II Head of Assets Restructuring II Division	JKT	13 Mar 1969	S2, Manajemen Master Degree, Management	No. KDE 0017/KDE/02/2021 Tanggal 1 Maret 2021 Dated 1 March 2021
7	Emalia Tisnamsistastra	Kepala Divisi <i>Middle Office Treasury</i> Head of Middle Office Treasury Division	JKT	21 Dec 1971	S1, Ekonomi Bachelor Degree, Economics	No. 0001/KDE/01/2020 Tanggal 17 Januari 2020 Dated 17 January 2020
8	M. Syafruddin	Pegawai Masa Persiapan Pensium Retirement Preparation Employee	JKT	10 Sep 1966	S1, Akuntansi Bachelor Degree, Accounting	No. KDE 0082/KDE/09/2021 Tanggal 22 September 2021 Dated 22 September 2021
9	Noviana Rahatmi	Kepala Divisi HR Services & People Development Head of HR Services & People Development	JKT	04 Nov 1970	S1, Keuangan Bachelor Degree, Finance	No. KDE 0017/KDE/02/2021 Tanggal 1 Maret 2021 Dated 1 March 2021
10	Eka Achdiatna Supriana	<i>Decision Support</i> Direktorat II <i>Decision Support</i> Directorate II	JKT	17 Apr 1979	S2, Keuangan Master Degree, Applied Finance	No. KDE 0017/KDE/02/2021 Tanggal 1 Maret 2021 Dated 1 March 2021
11	Ridha Farid Lesmana	Kepala Divisi Penugasan Khusus Head of Special Financing Division	JKT	12 Apr 1977	S1, Teknik Sipil Bachelor Degree, Civil Engineering	No. KDE 0017/KDE/02/2021 Tanggal 1 Maret 2021 Dated 1 March 2021
12	Budy Hartono	Pj. Kepala Divisi Restrukturisasi Aset Syariah Acting Head of Sharia Assets Restructuring Division	JKT	10 Jun 1967	S1, Biologi Bachelor Degree, Biology	No. 0066/KDE/07/2021 Tanggal 2 Juli 2021 Dated 2 July 2021
13	Ferry Sjaifoellah	Kepala Divisi Restrukturisasi Aset I Head of Assets Restructuring I Division	JKT	19 Sep 1971	S1, Teknik Elektro Bachelor Degree, Electronical Engineering	No. 0001/KDE/01/2020 Tanggal 17 Januari 2020 Dated 17 January 2020

## MANAJEMEN SENIOR

Senior Management

No	Nama Name	Jabatan Position	Lokasi Location	Tanggal Lahir Date of Birth	Jenjang Pendidikan Education	Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis
14	Maryani Saswidyanti	Kepala Divisi Product Development Head of Product Development Division	JKT	27 Feb 1971	S2, Manajemen Master Degree, Management	No. KDE 0017/KDE/02/2021 Tanggal 1 Maret 2021 Dated 1 March 2021
15	Hendi Wibawa	Pj. Kepala Divisi Pengadaan dan Umum Acting Head of Procurement & General Services	JKT	24 Jul 1981	S1, Akuntansi Bachelor Degree, Accounting	No. 0066/KDE/07/2021 Tanggal 2 Juli 2021 Dated 2 July 2021
16	Andri Setiawan	Pj. Kepala Divisi Penjaminan I Acting Head of Guarantee I Division	SLO	12 Jun 1976	S1, Akuntansi Bachelor Degree, Accounting	No. KDE 0017/KDE/02/2021 Tanggal 1 Maret 2021 Dated 1 March 2021
17	Raden Gerald Setiawan Grisanto	Kepala Divisi Jasa Konsultasi Head of Advisory Services Division	JKT	23 Jun 1983	S2, Akuntansi Bachelor Degree, Accounting	No. 0038/KDE/07/2020 Tanggal 1 Juli 2020 Dated 1 July 2020
18	Damianus Ledjo Hufat	Kepala Divisi Bisnis Korporasi II & Special Mention Head of Corporate Business II Division & Special Mention	JKT	12 Feb 1963	S1, Akuntansi Bachelor Degree, Accounting	No. KDE 0017/KDE/02/2021 Tanggal 1 Maret 2021 Dated 1 March 2021
19	Koerniawan Prijambodo	Kepala Kantor Wilayah III Head of Regional Office III	SBY	29 Jul 1967	S2, Manajemen Master Degree, Management	No. KDE 0017/KDE/02/2021 Tanggal 1 Maret 2021 Dated 1 March 2021
20	Yanti Sudjarwo	Kepala Divisi HRBP, OD & Recruitment Head of HRBP, OD & Recruitment Division	JKT	22 Nov 1972	S1, Teknik Industri Bachelor Degree, Industrial Engineering	No. KDE 0017/KDE/02/2021 Tanggal 1 Maret 2021 Dated 1 March 2021
21	Pretty Halim	Kepala Kantor Wilayah I Head of Regional Office I	JKT	09 Mar 1974	S2, Applied Finance Master Degree, Applied Finance	No. KDE 0017/KDE/02/2021 Tanggal 1 Maret 2021 Dated 1 March 2021
22	Farid Maruf	Kapala Divisi Credit Reviewer II Head of Credit Reviewer II Division	JKT	24 Feb 1963	S1, Pertanian Bachelor Degree, Agricultural	PJ.0045/HRM/03/2020
23	Rini Satriani	CT. Kepala Divisi IEB Institute Acting Head of IEB Institute Division	JKT	6 Feb 1983	S2, Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan Peraturan Master Degree, Economics Planning and Development Policy	No. 0066/KDE/07/2021 Tanggal 2 Juli 2021 Dated 2 July 2021
24	Haryo Parampara	Kepala Divisi Bisnis Korporasi I Head of Corporate Business I Division	JKT	01 Nov 1978	S1, Teknik Kimia Bachelor Degree, Chemical Engineering	PJ. 0006/SV4/03/2021
25	Tota Melanie L. Tobing	Kepala Divisi Credit Operation and Supervision Head of Credit Operation and Supervision Division	JKT	06 Oct 1967	S2, Finance Master Degree, Finance	No. 0048/KDE/03/2021 Tanggal 31 Maret 2021 Dated 31 March 2021
26	Rusdi Dahardin	Kepala Divisi Bisnis Syariah & Special Mention Head of Sharia Business & Special Mention Division	JKT	04 May 1965	S1, Akuntansi Bachelor Degree, Accounting	No. KDE 0017/KDE/02/2021 Tanggal 1 Maret 2021 Dated 1 March 2021
27	Rossiyana Amir	Kepala Divisi Policy & Procedure Head of Policy & Procedures Division	JKT	13 Feb 1969	S1, Akuntansi Bachelor Degree, Accounting	No. KDE 0017/KDE/02/2021 Tanggal 1 Maret 2021 Dated 1 March 2021

## MANAJEMEN SENIOR

Senior Management

No	Nama Name	Jabatan Position	Lokasi Location	Tanggal Lahir Date of Birth	Jenjang Pendidikan Education	Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis
28	Edi Winanto	Kepala Divisi Litigasi Head of Litigation Division	JKT	28 Dec 1963	S2, Hukum Master Degree, Law	PJ. 0066/HCH/09/2021
29	Thio Sucy	Kepala Divisi Kepatuhan Head of Compliance Division	JKT	14 May 1969	S1, Keuangan Bachelor Degree, Finance	No. KDE 0017/KDE/02/2021 Tanggal 1 Maret 2021 Dated 1 March 2021
30	Sigit Wicaksono Nugroho	Decision Support Direktorat I Decision Support Directorate I	JKT	18 Aug 1970	S2, Manajemen Master Degree, Management	No. KDE 0017/KDE/02/2021 Tanggal 1 Maret 2021 Dated 1 March 2021
31	Komarruzaman	Kepala Divisi Program Investasi Pemerintah Head of Governance Invest Program Division	JKT	27 Jul 1969	S3, Ekonomi Doctorate Degree, Economics	No. KDE 0017/KDE/02/2021 Tanggal 1 Maret 2021 Dated 1 March 2021
32	Saeful Hendra	PGS Kepala Divisi Special Audit Acting of Head of Special Audit Division	JKT	16 Jul 1979	S2, Bisnis Master Degree, Business	No. 0066/KDE/07/2021 Tanggal 2 Juli 2021 Dated 2 July 2021
33	Pandu Wiguno	Kepala Divisi Reviewer Penjaminan Acting Head of Guarantee Reviewer Division	JKT	10 Nov 1963	S2, Manajemen Master Degree, Management	PJ. 0057/HCH/07/2021
34	Didit Ardyanto	Kepala Divisi Operation Penjaminan Head of Guarantee Operation Division	JKT	2 Apr 1964	S1, Hukum Bachelor Degree of Legal	No. 0066/KDE/07/2021 Tanggal 2 Juli 2021 Dated 2 July 2021
35	Yoda Ditia	PGS. Kepala Divisi Strategic & Corporate Planning Acting Head of Strategic and Corporate Planning Division	JKT	10 Jul 1981	S2, Manajemen Master Degree, Management	No. 0044 IKDE/03/2021 Tanggal 29 Maret 2021 Dated 29 March 2021
36	Yudi Imandapurba	Kepala Divisi Teknologi Sistem Informasi Head of Information Technology Division	JKT	22 Nov 1966	S1, Teknologi Informasi Bachelor of Information Technology	PJ.0072/HRB/12/2020
37	Irwan Prasetyawan	Kepala Kantor Cabang Surakarta Head of Surakarta Branch Office	SLO	19 Oct 1978	S1, Manajemen Bachelor Degree, Management	No. 0051/KDE/04/2021 Tanggal 27 April 2021 Dated 27 April 2021
38	Abianti Riana	Kepala Divisi Bisnis Usaha Kecil, Menengah dan Komersial (UKMK) Head of SME and Commercial Business Division	JKT	22 Sep 1965	S1, Pertanian Bachelor Degree, Agriculture	PJ.0057/HRB/02/2021
39	Jenny Widjaja	Kepala Divisi Financial Institution and Treasury Head of Financial Institution and Treasury Division	JKT	26 Jan 1964	S1, Akuntansi Bachelor Degree, Accounting	No. KDE 0017/KDE/02/2021 Tanggal 1 Maret 2021 Dated 1 March 2021
40	Christiati E. Sianipar	Kepala Divisi Operasional Head of Operational Division	JKT	3 Apr 1968	S1, Akuntansi Bachelor Degree, Accounting	No. 0054/KDE/05/2021 Tanggal 28 Mei 2021 Dated 28 May 2021
41	Sidik Mahanda	Kepala Divisi Risk & Portfolio Management Head of Risk & Portofolio Management Division	JKT	25 Feb 1981	S2, Manajemen Master Degree, Management	No. 0055/KDE/05/2021 Tanggal 28 Mei 2021 Dated 28 May 2021
42	Sofyan Irianto N.	Kepala Divisi Bisnis BUMN Head of BUMN Business	JKT	15 Oct 1964	S2, Manajemen Master Degree, Management	PJ.0054/HRB/02/2021

**MANAJEMEN SENIOR**  
Senior Management

No	Nama Name	Jabatan Position	Lokasi Location	Tanggal Lahir Date of Birth	Jenjang Pendidikan Education	Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis
43	Rony Kuntadi	Kepala Divisi Penjaminan II Head of Guarantee II Division	JKT	7 Februari 1965	S2, Keuangan Master Degree, Finance	PJ.0055/HRB/02/2021
44	Andre Sucayha	Kepala Divisi MIS & Business Finance Head of MIS & Business Finance Division	JKT	24 Sep 1982	S1, Teknologi Informasi Bachelor Degree, Information Technology	No. 0068/KDE/07/2021 Tanggal 9 Juli 2021 Dated 9 July 2021
45	Ninik Martini	Kepala Kantor Wilayah II Head of Regional Office II	JKT	6 Apr 1966	S1, Akuntansi Bachelor Degree, Accountancy	PJ.0090/HRB/03/2021
46	Saur Maria Sidabutar	Kepala Divisi Communication & Stakeholder Engagement Head of Communication & Stakeholder Engagement Division	JKT	8 Des 1971	S2, Public Relations Master Degree, Public Relations	No. 0072/KDE/07/2021 Tanggal 29 Juli 2021 Dated 29 July 2021
47	Lianawaty Mihardja	Kepala Divisi Finance Head of Finance Division	JKT	1 Nov 1979	S1, Akuntansi Bachelor Degree, Accountancy	No. 0088/KDE/10/2021 Tanggal 26 Oktober 2021 Dated 26 October 2021
48	Marsinta Mutiara Marpaung	Kepala Divisi Asuransi Head of Insurance Division	JKT	6 Sep 1974	S1, Manajemen Bachelor Degree, Management	No. 0087/KDE/10/2021 Tanggal 21 Oktober 2021 Dated 21 October 2021
49	Joni Haryanto	Pemegang Limit Individu Individual Limit Holder	JKT	4 Jun 1970	S1, Manajemen Bachelor Degree, Management	PJ. 0067/HCH/09/2021
50	Firdaus Effendi	Kepala Divisi Credit Reviewer I Head of Credit Reviewer II Division	JKT	19 Des 1970	S1, Manajemen Bachelor Degree, Management	No. 0108/KDE/10/2021 Tanggal 28 Desember 2021 Dated 28 December 2021
51	Salem Assegaf	Pemegang Limit Individu Individual Limit Holder	JKT	20 Aug 1962	S1, Manajemen Bachelor Degree, Management	PJ. 0072/HCH/10/2021
52	Suharyanto	Kepala Divisi Trade Finance Head of Trade Finance	JKT	30 Mar 1965	S2, Manajemen Master Degree, Management	PJ. 0071/HCH/10/2021



# DEMOGRAFI PEGAWAI

## Employees Demography

### Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Employee Composition Based on Gender

Jenis Kelamin	2020 Orang   Person	2021 Orang   Person	Gender
Laki-laki	340	338	Male
Perempuan	216	229	Female
<b>Jumlah Pegawai</b>	<b>556</b>	<b>567</b>	<b>Total Employees</b>

### Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan Employee Composition Based on Position

Jabatan	2020 Orang   Person	2021 Orang   Person	Position
Senior Executive Vice President	7	6	Senior Executive Vice President
Kepala Divisi/Kepala Kantor Wilayah	42	51	Division Head
Kepala Departemen	113	119	Department Head
Eksekutif	208	223	Executives
Pelaksana	186	168	Executors
<b>Jumlah Pegawai</b>	<b>556</b>	<b>567</b>	<b>Total Employees</b>

### Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia Employee Composition Based on Age

Generasi	2020 Orang   Person	2021 Orang   Person	Generation
X & Baby Boomers	122	125	X & Baby Boomers
Millenials & Gen Z	434	442	Millenials & Gen Z
<b>Jumlah Pegawai</b>	<b>556</b>	<b>567</b>	<b>Total Employees</b>

### Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Employee Composition Based on Education

Tingkat Pendidikan	2020 Orang   Person	2021 Orang   Person	Education
Doktor	1	1	Doctorate
Master	124	140	Master Degree
Sarjana	430	425	Bachelor Degree
Diploma	1	1	Diploma
<b>Jumlah Pegawai</b>	<b>556</b>	<b>567</b>	<b>Total Employee</b>

### Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Ketenagakerjaan Employee Composition Based on Employment Status

Status Ketenagakerjaan	2020 Orang   Person	2021 Orang   Person	Employment Status
Tetap	463	531	Permanent
Probation	18	6	Probation
PKWT	75	30	PKWT
<b>Jumlah Pegawai</b>	<b>556</b>	<b>567</b>	<b>Total Employees</b>



# KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

## Shareholders Composition

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham Number of Shares	Kepemilikan Secara Langsung Direct Ownership (%)	Kepemilikan Secara Tidak Langsung Indirect Ownership (%)
<b>Pemegang Saham yang Memiliki 5% atau Lebih Saham</b>			
Shareholder Owns 5% or More Shares			
Pemerintah Republik Indonesia Government of RI	LPEI tidak terbagi atas saham No shares allocation	100%	
<b>Kelompok Pemegang Saham Masyarakat yang Memiliki Kurang Dari 5% Saham</b>			
Public Shareholders Who Have Less Than 5% Shares			
Masyarakat (di bawah 5%) Public (below 5%)	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
<b>Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang Memiliki Saham</b>			
Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners Owning Shares			
Dewan Direktur/fungsi Dewan Komisaris Board of Directors/Board of Commissioners	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Direktur Pelaksana/fungsi Direksi Managing Directors/Board of Directors function	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
<b>Total</b>		<b>100%</b>	

# ENTITAS ANAK & ENTITAS ASOSIASI

## Subsidiaries & Associates

Sampai dipublikasikannya Laporan Tahunan 2021 ini, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sudah memiliki satu entitas anak maupun entitas asosiasi.

Anak perusahaan LPEI dengan nama PT IEB Prima Aset didirikan pada tanggal 17 Desember 2021 berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT IEB Prima Aset disingkat PT IEBPA nomor 154 di Jakarta dan persetujuan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-0081370.Ah.01.01. Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT IEB Prima Aset pada tanggal 20 Desember 2021.

Penyertaan modal PT IEB Prima Aset telah disetujui Menteri Keuangan pada tanggal 6 Desember 2021 dengan surat keputusan Nomor S-1097/MK.06/2021 dengan nilai Rp50 miliar. Dana ini akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional PT IEB Prima Aset.

PT IEB Prima Aset bergerak dalam jasa konsultasi, termasuk konsultasi atas kegiatan yang berorientasi ekspor. Kepemilikan LPEI pada PT IEB Prima Aset adalah sebesar 99,98%. Sisa kepemilikan sebesar 0,02% dimiliki oleh Koperasi Konsumen Pegawai LPEI.

By the publication of this 2021 Annual Report, Indonesia Eximbank does have one subsidiary or associate.

The Indonesia Eximbank subsidiary under the name PT IEB Prima Aset was established on December 17, 2021 based on the deed of Establishment of a Limited Liability Company PT IEB Prima Aset abbreviated as PT IEBPA number 154 in Jakarta and the approval of the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number Ahu-0081370.Ah.01.01 . 2021 concerning the Ratification of the Establishment of a Limited Liability Company Legal Entity PT IEB Prima Asset on 20 December 2021.

PT IEB Prima Asset's capital injection has been approved by the Minister of Finance on 6 December 2021, No S-1097/MK.06/2021 amounted to Rp50 billion. This fund will be used to finance the PT IEB Asset's operational activities.

PT IEB Prima Asset is engaged in consulting services, including consulting on export-oriented activities. LPEI ownership in PT IEB Prima Asset is 99.98%. The remaining 0.02% ownership is owned by the LPEI Employee Consumer Cooperative.

## KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM Shareholders Composition

### Struktur Kepemilikan Perusahaan Shareholding Structure of the Company



## STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN Company Group Structure

Lembaga Penjamin Ekspor Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara di mana 100% (seratus persen) saham dimiliki oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, yang diwakili oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pemerintah Negara Republik Indonesia 100%  
Government of the Republic of Indonesia 100%

Indonesia Eximbank is a State-Owned Enterprise in which all Company shares are 100% fully owned by the Government of the Republic of Indonesia, which represented by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.





# KRONOLOGI PENERBITAN EFEK LAIN

## Other Stocks Listing Chronology

Selama tahun 2021, Indonesia Eximbank tidak melakukan penerbitan efek bersifat utang. Adapun outstanding efek Indonesia Eximbank per Tahun Buku 2021 adalah sebagai berikut:

During 2021, Indonesia Eximbank did not issue any debt securities. The following are securities outstanding of Indonesia Eximbank for Fiscal Year 2021:

No	Nama Efek Securities Names	Seri Series	Umlah yang Outstanding per 31 Des 2021 Total Outstanding as of 31 Dec 2021 (Rp Miliar/Billion)	Tingkat Bunga per Tahun Interest Rate Per Annum	Tanggal Penerbitan Issued Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
<b>A. Obligasi dalam mata uang Rupiah   Bonds denominated in Rupiah</b>								
1	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III Tahun 2016 Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering Bonds III - 2016	D	1,038	8.50%	22-Nov-16	22-Nov-23	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
2	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV Tahun 2017 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds III Phase IV of 2017	C	748	8.90%	23-Feb-17	23-Feb-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	1,007	9.20%	23-Feb-17	23-Feb-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		E	1,266	9.40%	23-Feb-17	23-Feb-27	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
3	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V Tahun 2017 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds III Phase V of 2017	B	436	7.90%	15-Aug-17	15-Aug-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	1,786	8.25%	15-Aug-17	15-Aug-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
4	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds III Phase VI of 2018	B	1,650	6.70%	14-Feb-18	14-Feb-23	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	206	6.90%	14-Feb-18	14-Feb-25	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
5	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase I of 2018	B	35	7.70%	06-Jun-18	6-Jun-23	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	1,756	8.30%	06-Jun-18	6-Jun-25	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
6	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase II of 2018	C	276	8.40%	05-Sep-18	5-Sep-23	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	1,324	8.75%	05-Sep-18	5-Sep-25	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
7	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase III of 2018	C	28	9.25%	08-Nov-18	8-Nov-23	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	380	9.75%	08-Nov-18	8-Nov-25	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)

## KRONOLOGI PENERBITAN EFEK LAIN

### Other Stocks Listing Chronology

No	Nama Efek Securities Names	Seri Series	umlah yang Outstanding per 31 Des 2021 Total Outstanding as of 31 Dec 2021 (Rp Miliar/Billion)	Tingkat Bunga per Tahun Interest Rate Per Annum	Tanggal Penerbitan Issued Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
8	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase IV of 2019	B	935	8.40%	23-Apr-19	23-Apr-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	1,523	8.90%	23-Apr-19	23-Apr-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	278	9.25%	23-Apr-19	23-Apr-26	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		E	349	9.50%	23-Apr-19	23-Apr-29	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		F	625	9.80%	23-Apr-19	23-Apr-34	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
9	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase V of 2019	B	621	8.45%	09-Jul-19	9-Jul-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	330	8.70%	09-Jul-19	9-Jul-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	737	9.20%	09-Jul-19	9-Jul-26	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
10	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase VI of 2019	B	15	7.80%	03-Sep-19	3-Sep-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	6	8.10%	03-Sep-19	3-Sep-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	714.5	8.50%	03-Sep-19	3-Sep-26	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
11	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase VII of 2019	B	101.3	7.80%	29-Oct-19	29-Oct-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	25.5	8.10%	29-Oct-19	29-Oct-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	112	8.50%	29-Oct-19	29-Oct-26	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		E	219.75	8.75%	29-Oct-19	29-Oct-29	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
12	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase VIII of 2019	A	88	7.50%	06-Dec-19	6-Dec-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		B	1,551	7.90%	06-Dec-19	6-Dec-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	22.5	8.20%	06-Dec-19	6-Dec-26	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
13	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I Tahun 2020 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds V Phase I of 2020		48	7.60%	08-Jul-20	8-Jul-23	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)

## KRONOLOGI PENERBITAN EFEK LAIN

Other Stocks Listing Chronology

No	Nama Efek Securities Names	Seri Series	jumlah yang Outstanding per 31 Des 2021 Total Outstanding as of 31 Dec 2021 (Rp Miliar/Billion)	Tingkat Bunga per Tahun Interest Rate Per Annum	Tanggal Penerbitan Issued Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
<b>Jumlah Obligasi   Total Bonds</b>			<b>20,237.25</b>					
<b>B. Sukuk dalam mata uang Rupiah   Sukuk denominated in Rupiah</b>								
1	Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank I Tahap II Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Sukuk Mudharabah I Phase II of 2018	C	14	9.25%	08-Nov-18	8-Nov-23	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	155	9.75%	08-Nov-18	8-Nov-25	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
2	Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank I Tahap III Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Sukuk Mudharabah I Phase III of 2019	B	145	8.40%	23-Apr-19	23-Apr-22	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	66	8.90%	23-Apr-19	23-Apr-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
<b>Jumlah Sukuk</b>			<b>380</b>					

## INFORMASI AKUNTAN PUBLIK (AP) DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)(FIN)

Public Accountant and Public Accountant Firm

### Nama dan Alamat | Name and Address

Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan  
Plaza Asia Lantai 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190

### Periode Penugasan | Assignment Period

28 Agustus 2020 sampai dengan 31 Juli 2022  
28 August 2020 to 31 July 2022

### Biaya Jasa | Fees

Biaya jasa audit untuk tahun buku 2021 sebesar Rp4.452.262.500  
Audit services fee for fiscal year 2021 of Rp4,452,262,500.

## KRONOLOGI PENERBITAN EFEK LAIN

### Other Stocks Listing Chronology

#### Jasa yang Diberikan

Melakukan audit umum LPEI tahun buku 2021 yang terdiri dari:

1. Melakukan audit atas laporan keuangan LPEI, yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.
2. Melakukan audit atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Melakukan Jasa pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2021 sebagai implementasi Standar Audit 600 dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2021 untuk LPEI oleh Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) RI.
4. Melakukan Audit atas saldo awal Laporan Keuangan IEB Prima Aset (anak perusahaan), yang terdiri dari Laporan posisi keuangan 31 Desember 2021, serta Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, Laporan perubahan ekuitas, dan Laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan catatan atas laporan keuangan.

#### Jasa Non-Audit

1. Melakukan penerapan prosedur yang disepakati untuk Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian(KPPK)Triwulan IV Tahun 2021 per 31 Desember 2021.
2. Melakukan perikatan asurans keyakinan terbatas (reviu) atas laporan pinjaman industrial efisiensi (IEPC) posisi per 31 Desember 2021.
3. Melakukan perikatan asurans keyakinan terbatas (reviu)atas Laporan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) posisi per 31 Desember 2021.
4. Melakukan perikatan asurans keyakinan terbatas (reviu)atas Internal Control Operation dan Information Technology(IT).
5. Melakukan perikatan asurans keyakinan terbatas (reviu) atas Laporan Penggunaan Pinjaman China Eximbank per 31 Oktober 2021.
6. Melakukan reviu Laporan Keuangan Syariah LPEI tahun 2021.
7. Melakukan reviu Laporan Keuangan Program Penugasan Khusus Ekspor LPEI Tahun 2021.
8. Melakukan assurans atas Laporan Pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) oleh LPEI Tahun 2021.

#### Services Rendered

General audit for Indonesia Eximbank for fiscal year 2021, consisted of:

1. Audit on financial statements of Indonesia Eximbank, which was drafted based on Financial Accounting Standard in Indonesia, which consisted of financial position statement dated 31 December 2021, statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes of equity and statement of cash flows for the years ended on the said date, and significant accounting policy summary and other explanation information.
2. Audit on the compliance with Laws and Regulations and Internal Control for the years ended on 31 December 2021.
3. Audit on Financial Statements Year 2021 as the 600 Audit Standard implementation in the context of auditing of Central Government Financial Report year 2021 for LPEI by the Audit Board of RI(BPK).
4. Audit on beginning balance of Financial Statements of IEB Prima Aset (subsidiary), which consisted of Statement of Financial Position 31 December 2021, as well as Statement of Profit or Loss and other comprehensive income, Statement of changes of equity, and Statement of cash flows for the years ended on the said date, and notes on financial statements.

#### Non-Audit Services

1. Carried out agreed procedures to the Prudential Principles Application Activity Report (KPPK) Quarter IV Year 2021 as of 31 December 2021.
2. Carried out limited assurance agreement (review) on efficiency industrial loans report(IEPC) position as of 31 December 2021.
3. Carried out limited assurance agreement (review) on Main Performance Indicators Realization Report (IKU) position as of 31 December 2021.
4. Carried out limited assurance agreement (review) on Internal Control Operation and Information Technology(IT).
5. Carried out limited assurance agreement (review) on Report on Use of Proceeds China Eximbank Borrowing Facility as of 31 Oktober 2021
6. Reviewed the LPEI Sharia Financial Statements year 2021.
7. Reviewed the Export National Interest Account Financial Statements year 2021.
8. Carried out assurance on Government Investment Implementation Report (PEN) to PT Perkebunan Nusantara III (Persero) by LPEI Year 2021.



# LEMBAGA PROFESI PENUNJANG

## Supporting Professional Institutions

Berikut ini lembaga dan profesi penunjang pasar modal untuk penerbitan Obligasi dan Sukuk Berkelanjutan LPEI.

The following are capital market supporting agencies and professions for the issuance of Indonesia Eximbank Shelf Bonds and Sukuk.

No	Nama Pihak Names	Alamat Address	Peran Assignments
a	PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)	Panin Tower Senayan City Lt.17, Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta 10270 Tel. (021) 7278 2380 Fax. (021) 7278 2370	Lembaga Pemeringkat Efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Rating Agency for Securities issued by Indonesia Eximbank
b	PT. Bursa Efek Indonesia	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Jakarta 12190 Tel. (021) 515 0515 Fax. (021) 515 0330	Lembaga Pencatatan Emisi Efek Indonesia Eximbank Listing Agency for Securities issued by Indonesia Eximbank
c	PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Jakarta 12190 Tel. (021) 515 2855 Fax. (021) 5299 1199	Lembaga Kustodi dan Penyelesaian di Pasar Modal atas efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Custodian Agency and Settlement in the Capital Market for Securities issued by Indonesia Eximbank
d	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	Plaza Mandiri, Lantai 22 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38. Jakarta 12190 Telp. (021) 527 5370 Fax. (021) 526 8201	Wali Amanat atas efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Trustee for Securities issued by Indonesia Eximbank
e	Konsultan Hukum Warens & Partners	Menara Taspen Lantai 3, Suite 301 & 302, Jl. Jend. Sudirman Kav.2, Jakarta Pusat 10220 Tel. (021) 2511 580 Fax. (021) 2511 579	Konsultan Hukum atas efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Law Firm for Securities issued by Indonesia Eximbank
f	Kantor Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH	JL. Panglima Polim V/11 Kebayoran Baru Jakarta 12160 Tel : (021) 724 4650 Fax : (021) 726 5090	Notaris Emisi atas efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Notary for Securities issued by Indonesia Eximbank
g	KAP "Doli, Bambang, Sulistiyo, Dadang & Ali"	Sentra Bisnis Harapan Indah Blok SS 11 No. 6-7 Jl. Harapan Indah Raya, Bekasi, 17132 Tel. (021) 88866199 Fax. (021) 88865750	Auditor Penjatahan atas efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Allocation Auditor for Securities issued by Indonesia Eximbank

Berikut ini lembaga dan profesi penunjang pasar modal untuk penerbitan EMTN LPEI.

The following are capital market supporting agencies and professions for the issuance of Indonesia Eximbank EMTN.

No	Nama Pihak Names	Alamat Address	Peran Assignments
1	HSBC Corporate Trust and loan Agency	Level 30, HSBC Main Building 1 Queen's Road Central Hong Kong Tel. (852) 2822 4443	Wali Amanat dan Agen Pembayar atas efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Trustee and Paying Agent for Securities issued by Indonesia Eximbank
2	Herbert Smith LLP	50 Raffles Place #24-01, Singapore Land Tower Singapore 048623 Tel. (65) 6868 8085	Konsultan Hukum Internasional atas efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank International legal council for Securities issued by Indonesia Eximbank

**LEMBAGA PROFESI PENUNJANG**  
Supporting Professional Institutions

No	Nama Pihak Names	Alamat Address	Peran Assignments
3	Hiswara Bunjamin & Tandjung	23rd Floor, Gedung BRI II Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210 Tel. (021) 5744 010	Konsultan Hukum Domestik atas efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Domestic legal council for Securities issued by Indonesia Eximbank
4	Ernst & Young(Purwantono, Suherman & Surja)	Indonesia Stock Exchange Building, Tower II, 7TH Floor Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 10290 Tel. (021) 5289 4171	Auditor atas efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Auditor for Securities issued by Indonesia Eximbank
5	Fitch Ratings Singapore Pte Ltd	One Raffles Quay, South Tower #22-11 Singapore 048583 Tel. (65) 6796 7200	Lembaga Pemeringkat Efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Rating Agency for Securities issued by Indonesia Eximbank
6	Moody's Investors Service Singapore Pte Ltd	50 Raffles Place 23-06 Singapore Land Tower Singapore 048623 Tel. (65) 6398 8300	Lembaga Pemeringkat Efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Rating Agency for Securities issued by Indonesia Eximbank
7	Singapore Exchange Securities Trading Limited	SGX Centre Office 2 Shenton Way, #02-02 SGX Centre 1 Singapore 068804 Tel. (65) 6236 8888	Lembaga Pencatatan Emisi Efek Indonesia Eximbank Listing Agency for Securities issued by Indonesia Eximbank

## PENGHARGAAN

Awards

First Best Brand all over BUMN dibawah Kementerian Keuangan RI pada ajang 11<sup>th</sup> Digital Brand Award yang digelar oleh Majalah Infobank.

First-Best Brand all over BUMN under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia at the 11th Digital Brand Awards event by Infobank Magazine.



# INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN

## Information On Company Website



Lembaga Pembangunan Ekspor Indonesia (LPEI) memiliki situs web resmi yang dapat diakses di [www.indonesiaeximbank.go.id](http://www.indonesiaeximbank.go.id), yang tersedia dalam dua pilihan bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Pada situs web Indonesia disajikan informasi dan data mengenai LPEI yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan, maupun masyarakat umum sesuai dengan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi.

Situs web LPEI telah memenuhi berbagai ketentuan yang relevan baik eksternal, maupun internal, termasuk:

- a. Undang-Undang RI No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Undang-Undang RI No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Meskipun bukan berstatus Perusahaan Publik, LPEI senantiasa berupaya menjaga standar transparansi dan keterbukaan informasi khususnya serta praktik-praktik tata kelola perusahaan pada umumnya, yang setara dengan perusahaan-perusahaan publik yang terbaik.

Oleh karenanya, komponen situs web LPEI juga telah memenuhi cakupan informasi yang wajib dimuat dalam situs web Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015, terkecuali untuk

Indonesia Eximbank has the official website accessible at [www.indonesiaeximbank.go.id](http://www.indonesiaeximbank.go.id), available in two languages, Bahasa Indonesia and English. The website presents information and data on Indonesia Eximbank that can be accessed by the stakeholders and public in general in accordance with the transparency and information disclosure principles.

Indonesia Eximbank website has met the relevant rules, both externally and internally, including:

- a. RI Act No. 14/2008 on the Public Information Disclosures.
- b. RI Act No. 11/2008 on the Electronic Information and Transaction.

Despite its status as a non-Public Company, Indonesia Eximbank strives to maintain its transparency and information disclosures standard in particular as well as corporate governance practices in general, which are equal with the best public companies

As such, Indonesia Eximbank website components has also met the mandatory information in accordance with the Financial Services Authority Regulation No.

## INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN

### Information On Company Website

item-item yang spesifik untuk sebuah Perusahaan Publik.

Secara garis besar, informasi pada situs web terdiri dari:

- Informasi umum tentang LPEI yang terdiri dari Profil Perusahaan, Visi dan Misi, Sejarah Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan, Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana, Jaringan Kantor dan Wilayah Kerja.
- Informasi terkait kegiatan bisnis, produk-produk, serta informasi seputar kegiatan pengadaan.
- Informasi seputar kegiatan LPEI dalam bentuk News Release, News update, sambutan/pidato manajemen, publikasi digital, event, serta pengumuman pengadaan lelang pengadaan produk jasa yang diselenggarakan oleh LPEI.
- Informasi terkait Hubungan Investor yang terdiri dari Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan Keberlanjutan, Informasi Efek, Peringkat Efek, dan Obligasi.
- Informasi terkait aktivitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dari waktu ke waktu, LPEI selalu berupaya untuk menyempurnakan situs web Lembaga agar menjadi lebih informatif, mudah diakses, mudah dinavigasi serta ramah bagi penggunanya.

8/ POJK.04/2015, except on specific elements for the Public Companies.

Broadly, Indonesia Eximbank's website includes the following information:

- General information on Indonesia Eximbank that consist of Company Profile, Vision and Mission, History, Corporate Governance, Board of Directors, Executive Directors, Office Networks and Operational Areas.
- Information on business activities, products, and procurement activity.
- Information on Indonesia Eximbank such as News Releases, News Update, management messages/speeches, digital publication, Events, and auction announcements of good and services procurement organized by Indonesia Eximbank.
- Information on Investor Relations, which consists of Annual Reports, Financial Statements, Sustainability Reports, Securities Information, Stock Rating, and Bonds.
- Information on Corporate Social Responsibility activities

Indonesia Eximbank frequently strives to refine its website to be more informative, accessible with easy navigation and users friendly.



# **ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN**

## Management Discussion & Analysis

Tahun 2021 adalah tahun yang penuh tantangan bagi LPEI, dimana kondisi ekonomi masih terdampak pandemi COVID-19 namun LPEI tetap menjalankan mandatnya dan penugasan khusus termasuk menyalurkan Penjaminan Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

2021 is a year full of challenges for Indonesia Eximbank, where economic conditions remained affected by the COVID-19 pandemic, however Indonesia Eximbank continued to perform its mandate and the national interest account including government guarantee disbursement for the National Economic Recovery (PEN).





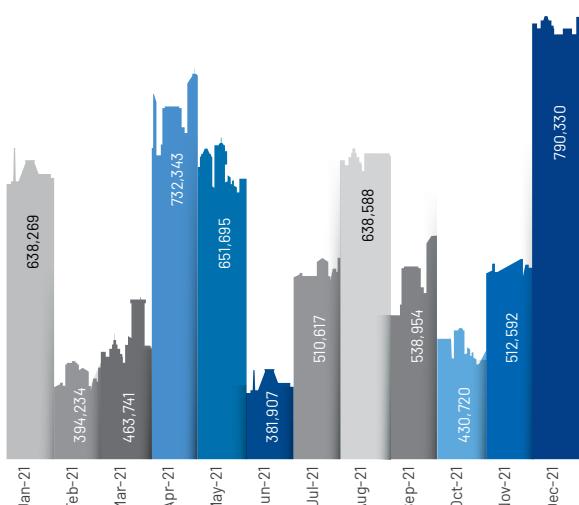


# TINJAUAN MAKRO EKONOMI

## Operational Review per Business Segment

### Perekonomian Global Global Economic

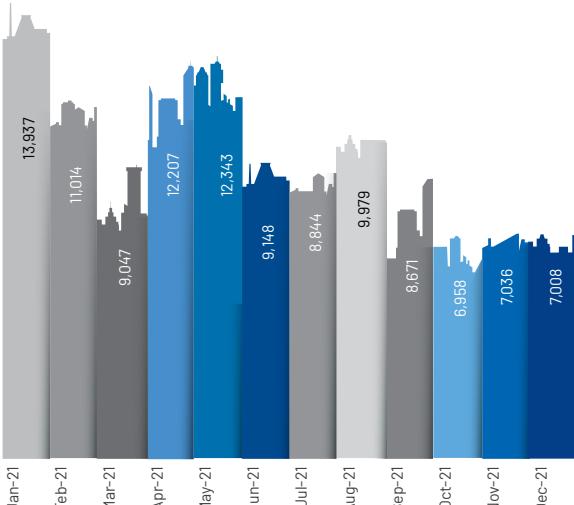
Rata-Rata Penambahan Kasus Per Bulan  
Average Additional Cases Per Month



Sumber: CEIC, diolah  
Source: CEIC, processed

Pemulihan ekonomi global pada 2021 terus berlanjut di tengah ketidakpastian seputar Pandemi COVID-19. Rata-rata penambahan kasus infeksi COVID-19 per bulan diawal tahun 2021 masih cukup tinggi akibat munculnya varian Alpha di akhir tahun 2020. Selanjutnya, penambahan kasus juga meningkat pada April 2021 seiring dengan merebaknya varian Delta di India. Di Kawasan Asia, penyebaran varian Delta mencapai puncaknya pada Mei, sedangkan puncak penyebaran di Amerika Serikat (AS) dan Kawasan Eropa terjadi pada Agustus 2021. Peningkatan kasus infeksi kembali terlihat di akhir tahun karena munculnya Omicron sebagai Variant of Concern (VOC) baru.

Rata-Rata Penambahan Kematian Per Bulan  
Average Additional Fatality Per Month



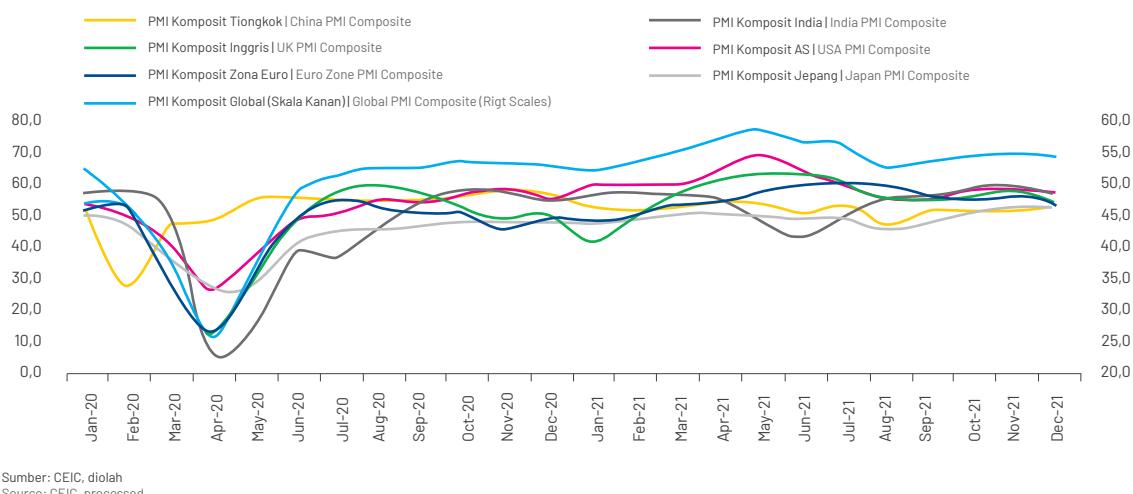
The global economic recovery in 2021 will continue amid the uncertainty due to the COVID-19 pandemic. The average addition of COVID-19 infection cases per month in early 2021 was still quite high because of the emergence of Alpha variant at the end of 2020. Subsequently, the addition of cases also increased in April 2021 in tandem with the outbreak of the Delta variant in India. In the Asian Region, the spread of Delta variant reached its peak in May, while the peak of the spread in the United States (US) and European Region was in August 2021. An increase in infection cases was again occurred at end of the year due to the emergence of Omicron as a new Variant of Concern (VOC).

## TINJAUAN MAKRO EKONOMI

### Operational Review per Business Segment

#### Purchasing Manager Index (PMI)

##### Purchasing Manager Index (PMI)



Aktivitas investasi yang diperwakilan dengan *Purchasing Manager Index* (PMI Komposit Global) menunjukkan kinerja yang solid sepanjang tahun lalu dengan tren ekspansi (PMI>50).

Dari sisi *supply*, perkembangan ini didorong pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas dan meluasnya program vaksinasi, sehingga aktivitas di sektor manufaktur maupun jasa dapat melakukan pembukaan bertahap (*gradual reopening*).

Dari sisi *demand*, ekspansi didukung oleh lonjakan pesanan baru seiring dengan permintaan perusahaan-perusahaan yang sedang melakukan *restocking* di tengah menurunnya persediaan *finished goods*, terutama menjelang akhir tahun.

Investment activity as proxied by Purchasing Manager Index (PMI Global Composite) indicated a solid performance throughout the previous year with an expansionary trend (PMI>50).

On supply side, this development was driven by the easing of mobility restrictions policy and vaccination program expansion so as to reopen activities gradually in the manufacturing and service sectors.

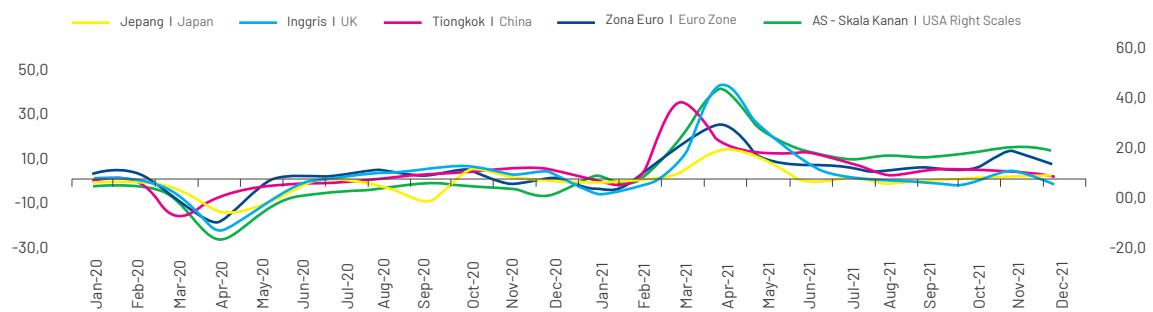
On demand side, the expansion was supported by a surge in new orders in line with the corporates' demand under restocking activities amid declining finished goods inventories particularly at end of the year.

## TINJAUAN MAKRO EKONOMI

### Operational Review per Business Segment

#### Penjualan Ritel (5 yoy)

Retail Sales (5 yoy)



Sumber: CEIC, diolah  
Source: CEIC, processed

Aktivitas konsumsi negara-negara utama dunia yang diproyksikan dengan tingkat penjualan ritel (*retail sales*), sebagian besar menunjukkan pertumbuhan positif, kecuali Inggris yang terkontraksi pada akhir tahun. Secara umum, perbaikan penjualan ritel tahun 2021 dipengaruhi sejumlah katalis, antara lain (a) pelaksanaan program vaksinasi yang cepat, (b) pencabutan *lockdown*, (c) *pent-up demand*, (d) tingkat *saving* yang tinggi seiring dengan gelontoran stimulus yang diberikan pemerintah kepada kelompok rumah tangga, serta (e) *seasonal effect* yang mendorong peningkatan konsumsi masing-masing negara pada periode tertentu.

Sementara itu, volume perdagangan barang dan jasa dunia tahun 2021 diestimasikan tumbuh di level 9,3% yoy (*World Economic Outlook*, IMF rilis Januari 2022), atau mengalami *rebound* signifikan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya (tahun 2020: -8,2% yoy). Berdasarkan jenis, pemulihan perdagangan barang mulai meluas, tidak hanya terkonsentrasi pada pembelian barang yang berkaitan dengan pandemi dan medical equipment. Sedangkan, pemulihan perdagangan di sektor jasa masih berjalan lambat karena masih terbatasnya aktivitas perjalanan lintas batas dan kegiatan di ruang publik.

The major world countries consumption as proxied by retail sales mostly indicated a positive growth, except for the UK which recorded a contraction at end of the year. Generally, the improvement in retail sales in 2021 was affected by a number of catalysts amongst others (a) the accelerating vaccination program, (b) lifting of the lockdown policy, (c) pent-up demand, (d) a high level of saving in line with the government's stimulus provided to household groups, as well as (e) seasonal effect driving increased consumption of each country in a certain period.

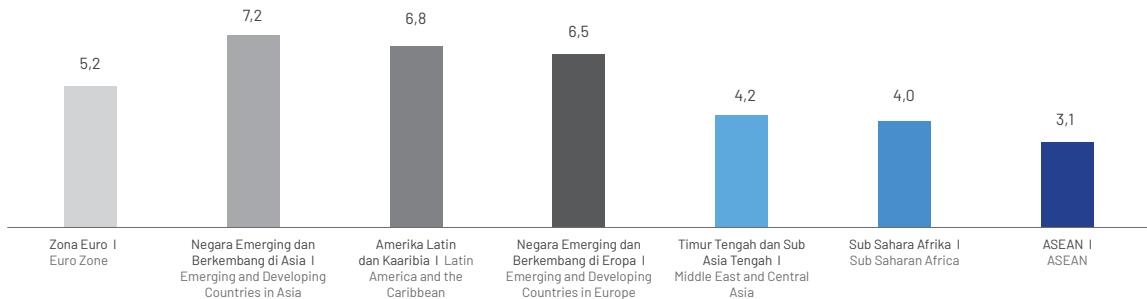
Meanwhile, the world trade volume in goods and services in 2021 is estimated to grow at 9.3% yoy (*World Economic Outlook*, IMF release January 2022), or experience a significant rebound compared to the previous year's growth (in 2020: -8.2% yoy). By type of goods, the recovery of trade in goods began to expand, not only concentrated on purchasing goods relating to the pandemic and medical equipment. Meanwhile, trade recovery in the services sector remains slow due to limitedness on cross-border travel and activities in public spaces.

## TINJAUAN MAKRO EKONOMI

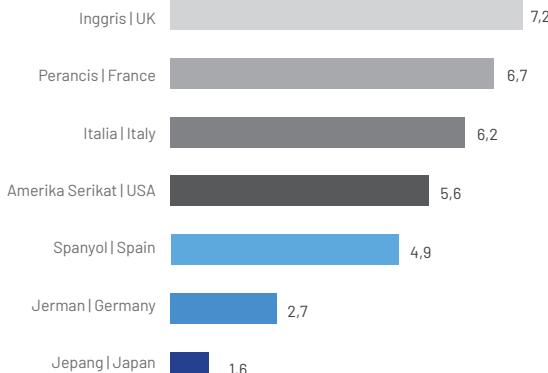
### Operational Review per Business Segment

#### Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Tahun 2021(%) |

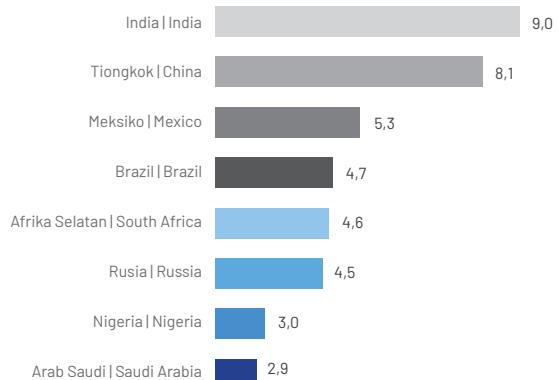
Regional Economic Growth Year 2021(%)



#### Pertumbuhan Ekonomi Negara Maju Tahun 2021 | Developed Countries Economic Growth Year 2021



#### Pertumbuhan Ekonomi Negara Emerging dan Berkembang Tahun 2021 | Emerging and Developing Countries Economic Growth Year 2021



Sumber: International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook (WEO) rilis bulan Januari 2022, diolah  
Source: International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook (WEO) released in January 2022, processed

Namun demikian, perbaikan ekonomi dunia belum berimbang karena terdapat perbedaan situasi yang cukup mencolok, di antara negara maju dan negara emerging dan berkembang yang disebabkan oleh: (i) kecepatan pelaksanaan vaksinasi yang berbeda, (ii) disparitas dukungan kebijakan moneter dan fiskal, (iii) munculnya varian baru, (iv) aftershocks berupa kelangkaan containers dan krisis energi, dan (v) *supply - demand mismatches*, dan (vi) tekanan inflasi global turut memperlebar divergensi outlook perekonomian. Sehingga, pemulihan ekonomi di negara maju, seperti Amerika Serikat (AS) terpantau berjalan lebih cepat. Di sisi lain, sebagian besar negara *emerging* dan berkembang, terus berupaya keluar dari zona kontraksi, kecuali Tiongkok yang sudah lebih awal mencatatkan pertumbuhan positif.

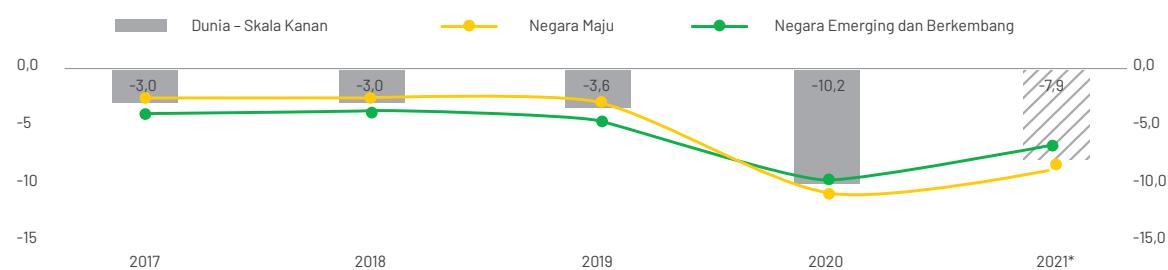
However, the improving global economy is not yet in balanced because there are quite striking differences situation between developed, emerging and developing countries due to: (i) different speed of vaccination, (ii) support disparity in the monetary and fiscal policy, (iii) the emergence of new variants, (iv) aftershocks in the form of containers scarcity and energy crisis, and (v) supply - demand mismatches, and (vi) global inflationary pressures widening the economic outlook divergence. Thus, the economic recovery in developed countries, such as the United States (US), is observed to be accelerated. On the other hand, most emerging and developing countries consistently strive to exit from the contraction zone, except for China, which has recorded a positive growth earlier.

## TINJAUAN MAKRO EKONOMI

### Operational Review per Business Segment

#### Defisit Fiskal (% dari PDB)

Fiscal Deficit (% of GDP)



Proyeksi. Sumber: International Monetary Fund (IMF), Fiscal Monitoring rilis bulan Oktober 2021, diolah  
Source: International Monetary Fund (IMF), Fiscal Monitoring released in October 2021, processed

Secara umum, defisit fiskal akan menurun mulai tahun 2021. Namun demikian, normalisasi kebijakan (*exit policy*) pasca pandemi antara negara maju serta negara emerging dan berkembang diperkirakan akan cukup berbeda akibat ketidakseimbangan pemulihan ekonomi global. *Exit policy* negara maju akan dilakukan lebih cepat, sedangkan, negara *emerging* dan berkembang akan melakukan normalisasi secara bertahap.

In general, fiscal deficit will decrease starting 2021. However, the exit policy post pandemic between developed, emerging and developing countries will sufficiently differ because of unbalance recovery of global economy. The developed countries will accelerate the exit policy, while emerging and developing countries will normalise in stages.

#### Pertumbuhan Ekonomi Global

Global Economic Growth



Sumber: International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook (WEO) rilis bulan Oktober 2021 dan Januari 2022, diolah  
Source: International Monetary Fund (IMF), Fiscal Monitoring released in October 2021 and January 2022, processed

Dengan perkembangan tersebut, International Monetary Fund (IMF) melalui *World Economic Outlook* (WEO) yang dirilis Januari 2022, mengestimasikan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2021 sebesar 5,9% yoy, tidak mengalami perubahan dari estimasi IMF yang dirilis pada WEO Oktober 2021. Sementara itu, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) melalui OECD Economic Outlook bulan Desember 2021

With these developments, the International Monetary Fund (IMF) through its *World Economic Outlook* (WEO) published in January 2022, estimated global economic growth in 2021 at 5.9% yoy, was unchanged from the IMF's estimation released in WEO October 2021. Meanwhile, the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) through the OECD Economic Outlook in December 2021 estimated that the global

## TINJAUAN MAKRO EKONOMI

Operational Review per Business Segment

mengestimasikan perekonomian dunia tumbuh 5,6% yoy. Sedangkan, *World Bank* dalam *Global Economic Prospects* Januari 2022 memproyeksikan ekonomi dunia tumbuh pada level yang lebih moderat yaitu 5,5%. Secara umum, perekonomian global mengalami *rebound* pasca terkontraksi -3,1% di tahun 2020.

Dari pasar keuangan global, ketidakpastian masih terus berlanjut seiring dengan antisipasi normalisasi kebijakan moneter yang dilakukan oleh negara maju, seperti tapering off yang dilakukan oleh Bank Sentral AS (*the Federal Reserve / the Fed*). Selain itu, Bank Sentral Inggris (*Bank of England / BOE*) memutuskan menaikkan suku bunga di akhir tahun 2021. Perkembangan ini didorong oleh tekanan inflasi yang berlangsung lebih lama dari perkiraan sebelumnya akibat disrupsi rantai pasok dan krisis energi.

economy would grow 5.6% yoy. Whereas, the World Bank in its January 2022 publication of *Global Economic Prospects* projected that the global economy would grow at a more moderate level of 5.5%. Generally, the global economy rebounded after contracting -3.1% in 2020.

On global financial markets, uncertainty still persists in line with the anticipation of monetary policy normalization by developed countries, such as the tapering off by US Federal Reserve (the Fed). In addition, the Central Bank of England (*Bank of England / BOE*) decided to raise interest rates at the end of 2021. This development was driven by inflationary pressures lasting longer than previously expected due to supply chain disruptions and energy crisis.

### Pertumbuhan Ekonomi Global |

#### Global Economic Growth

Energi Energy	Unit	Realisasi   Realisation			
		2018	2019	2020	2021
Minyak (Brent)   Oil	\$/bbl\$/	71,59	64,17	43,29	70,85
Gas Alam   Natural Gas	MMBTU\$	3,07	2,53	2,13	3,72
Batubara   Coal	MT	107,16	78,06	60,33	136,31

Logam Metal	Unit	Realisasi   Realisation			
		2018	2019	2020	2021
Tembaga   Copper	\$/MT	6.545	6.024	6.195	9.292
Aluminium   Aluminum	\$/MT	2.114	1.813	1.731	2.485
Bijih Besi   Iron Ore	\$/MT	69,02	93,00	108,4	159,4
Timah   Tin	\$/MT	20.071	18.585	17.107	31.145
Nikel   Nickel	\$/MT	13.178	13.943	13.862	18.452
Seng   Zinc	\$/MT	2.893	2.507	2.280	3.008
Timbal   Lead	\$/MT	2.248	2.004	1.837	2.188

## TINJAUAN MAKRO EKONOMI

Operational Review per Business Segment

Pertanian dan Bahan Makanan Agriculture and Food Material	Unit	Realisasi   Realisation			
		2018	2019	2020	2021
Gandum   Wheat	Cts/bu.	495,1	494,1	549,7	702,0
Jagung   Corn	Cts/bu.	368,1	383,3	363,7	581,7
Beras   Rice	\$/cwt	11,54	11,33	13,61	13,34
Kedelai   Soybean	Cts/bu.	932,0	889,6	953,7	1,375
Minyak Kedelai   Soybean Oil	Cts/lb	29,88	29,25	31,35	58,02
Minyak Sawit   Palm Oil	RM/MT	2.252	2.173	2.794	4.461
Gula   Sugar	Cts/lb	12,26	12,35	12,88	17,86
Kopi   Coffee	Cts/lb	112,7	101,3	111,2	168,7
Biji Kakao   Cacao Bean	\$/MT	2.307	2.387	2.519	2.493
Kapas   Cotton	Cts/lb	82,07	67,23	64,21	93,43

Sumber: Bloomberg, diolah | Source: Bloomberg, processed

Sementara itu, harga sejumlah komoditas global mengalami peningkatan sepanjang tahun 2021 seiring dengan pemulihan aktivitas perekonomian global. Pada kelompok komoditas energi, harga minyak dunia mulai merangkak naik (harga minyak jenis Brent telah mencapai USD70,85 per barrel), ditopang membaiknya permintaan terhadap bahan bakar. Selain itu, batu bara menjadi salah satu komoditas dengan kenaikan harga tertinggi sepanjang tahun lalu, dimana harga rata-ratanya sudah mencapai USD136,31 per MT, ditopang tingginya permintaan, khususnya dari Tiongkok guna memenuhi peningkatan permintaan listrik domestik. Secara umum, pergerakan harga batu bara masih dipengaruhi ketatnya pasokan akibat krisis energi yang melanda sejumlah negara di dunia.

Sedangkan, harga pada kelompok komoditas logam menunjukkan anomali, karena kenaikan yang sangat signifikan sudah terjadi sejak paruh kedua tahun 2020. Komoditas timah merupakan salah satu komoditas logam dasar dengan peningkatan harga yang tinggi sepanjang tahun lalu akibat berkurangnya pasokan dengan harga rata-rata mencapai sekitar USD31,145 per MT atau merupakan level harga tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Komoditas nikel juga merupakan kelompok logam yang mencatatkan tren kenaikan harga rata-rata, dimana mencapai USD18,452 per MT, terutama didorong meningkatnya permintaan sebagai bahan baku untuk pembuatan stainless steel (baja tahan karat) dan baterai mobil listrik.

Meanwhile, the prices of global commodities increased throughout 2021 in line with the recovery in the global economic activity. In the energy commodity category, world oil prices began to climb (Brent oil has reached USD70.85 per barrel), supported by improving demand for fuel. Moreover, coal became one of the commodities with the highest price increase over the last year with its average price reached USD136.31 per MT due to high demand especially from China to meet its increasing domestic electricity demand. Generally, the coal prices movement is still affected by tight supply due to the energy crisis hitting a number of countries in the world.

Meanwhile, the price of metal commodity group indicated an anomaly due to a very significant increase has occurred since the second half of 2020. Tin is one of the basic metal commodities recording a high price increase throughout last year due to declining supply with an average price of around USD31.145 per MT or the highest price level in the last three years. Nickel is also a metal group posting an upward trend in average prices, which reached USD18.452 per MT, mainly driven by rising demand as a raw material for the production of stainless steel and electric car batteries.

## TINJAUAN MAKRO EKONOMI

Operational Review per Business Segment

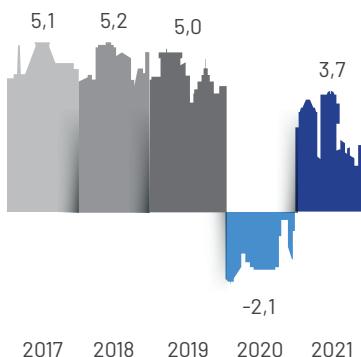
Pada kelompok komoditas pertanian, harga minyak sawit melonjak pesat sepanjang tahun 2021, dimana harga rata-rata komoditas andalan ekspor Indonesia ini sudah menembus level RM4.461 per MT atau level harga tertinggi dalam tiga tahun terakhir dipicu meningkatnya permintaan, namun produksi berkurang, khususnya dari Malaysia karena terbatasnya tenaga pekerja.

**Perekonomian Indonesia**

Seiring dengan kondisi perekonomian dunia, pemulihan di Indonesia juga masih dipengaruhi oleh perkembangan Pandemi COVID-19, kendati berhasil tumbuh positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,7% atau mengalami *rebound* pasca terkontraksi di tahun sebelumnya (2020: -2,1%). Perbaikan tersebut didukung oleh pembukaan sektor – sektor ekonomi yang lebih luas dan akselerasi pelaksanaan vaksinasi, sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat.

**Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**

| Indonesian Economic Growth



Sumber: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistikrilis bulan Februari 2022, diolah  
Source: Central Bureau of Statistics, Official Statistics News released in February 2022, processed

Dari sisi *demand*, seluruh komponen PDB menurut Pengeluaran tumbuh positif. Secara rinci, 85,23% PDB tahun 2021 berasal dari Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi. Konsumsi Pemerintah tumbuh menguat seiring dengan akselerasi belanja barang dan modal, khususnya terkait program Pemulihian Ekonomi Nasional (PEN), serta belanja pegawai. Peningkatan Konsumsi Rumah Tangga didukung fenomena *pent-up demand* dan program relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), sehingga mengerek penjualan, salah satunya kendaraan bermotor. Pada komponen Investasi,

In the agricultural commodity group, palm oil prices surged rapidly throughout 2021, of which the average price of this Indonesia's leading export commodity has touched the level of RM4,461 per MT on average or the highest price level in the last three years triggered by increasing demand, with current lower production particularly from Malaysia due to the limited workforce.

**Indonesian economy**

Along with global economic conditions, the recovery in Indonesia remained affected by the development of COVID-19 pandemic, although it has managed to grow positively. Based on data from the Central Statistics Agency (BPS), the Indonesian economy in 2021 grew by 3.7% or experienced a rebound after contracting in the previous year (2020: -2.1%). This improvement is supported by the opening of wider economic sectors and accelerating vaccination so as to increase increasing community mobility.

On the demand side, all GDP's components based on expenditure grew positively. In detail, 85.23% of GDP in 2021 derived from household consumption and investment. Government consumption grew stronger in line with the accelerating goods and capital expenditures, particularly related to the National Economic Recovery(PEN) program, as well as personnel spending. An increase in the household consumption was supported by the phenomenon of pent-up demand and the relaxation program of the Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM) hence lifting up sales such as

## TINJAUAN MAKRO EKONOMI

Operational Review per Business Segment

pertumbuhan didorong oleh meningkatnya realisasi belanja modal Pemerintah (32,46% yoy), produksi domestik (15,46% yoy), impor mesin (11,07% yoy), dan penjualan semen domestik (4,33% yoy). Sementara itu, kinerja ekspor yang tinggi didukung oleh permintaan mitra dagang utama yang kuat.

Dari sisi *supply*, seluruh komponen PDB menurut Lapangan Usaha (LU) juga mencatatkan pertumbuhan positif. Secara rinci, 64,92% PDB tahun 2021 berasal dari sektor Industri Pengolahan, Pertanian, Perdagangan, Konstruksi, dan Pertambangan. Peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan didukung industri berorientasi domestik seperti produksi mobil, motor, dan semen serta permintaan eksternal terutama ditopang minyak sawit dan logam dasar. Sedangkan, LU Pertambangan didukung oleh solidnya permintaan dan harga komoditas global, antara lain batu bara.

Nilai tukar Rupiah terpantau stabil. Untuk menjaga kestabilan pasar keuangan Indonesia, Bank Indonesia (BI) menerapkan kebijakan moneter dalam bentuk pemotongan suku bunga acuan dan injeksi likuiditas. Selain itu, stabilitas nilai tukar juga didukung kenaikan cadangan devisa, dimana salah satunya dipengaruhi alokasi *Special Drawing Right* (SDR) sebesar 4,46 miliar atau setara USD6,31 miliar yang diterima oleh Indonesia dari *International Monetary Fund* (IMF).

Sementara itu, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2021 tercatat sebesar 1,87% yoy, atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (inflasi IHK 2020: 1,68% yoy). Secara tahunan, inflasi IHK memang meningkat, namun tetap rendah dan berada di bawah kisaran sasaran yaitu  $3.0\pm1\%$ , seiring dengan permintaan domestik yang belum kuat akibat Pandemi COVID-19.

Dengan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang resilient serta ekspektasi terhadap efektivitas kebijakan fiskal dan moneter yang akan terus terjaga untuk menghadapi risiko tren kenaikan suku bunga global ke depan, Lembaga Pemeringkat Moody's mengafirmasi *Sovereign Credit Rating* Indonesia pada peringkat Baa2 atau layak investasi (*Investment Grade*) dengan *outlook* stabil pada 10 Februari 2022.

automotive sales. In the Investment component, growth was driven by increased realization of Government capital expenditures (32.46% yoy), domestic production (15.46% yoy), machine imports (11.07% yoy), and domestic cement sales (4.33% yoy). Meanwhile, a higher export performance was sustained by a sound demand from major trading partners.

On the supply side, all components of GDP based on industrial origin (LU) also recorded a positive growth. In detail, 64.92% of GDP in 2021 was contributed by Manufacturing, Agriculture, Trade, Construction, and Mining Industry sectors. An improved performance of the Manufacturing Industry LU was backed by a domestically oriented industries such as the production of cars, motorcycles and cement, as well as external demand, mainly supported by palm oil and base metals. Meanwhile, the Mining sector was supported by a solid demand and global commodity prices, including coal.

The Rupiah exchange rate was relatively stable. To maintain the stability of Indonesian financial market, Bank Indonesia (BI) implemented monetary policy by cutting interest rate benchmark and injection of liquidity. Moreover, an exchange rate stability was also backed by a higher foreign exchange reserves which was affected by Special Drawing Right (SDR) allocation of Rp4.46 billion or equivalent to USD6.31 billion received by Indonesia from the International Monetary Fund (IMF).

Meanwhile, the 2021 Consumer Price Index (CPI) inflation was recorded at 1.87% yoy, or higher than previous year inflation of 1.68% yoy. Annually, CPI inflation was increased, but remained low and lower the target range of  $3.0\pm1\%$ , in line with sluggish domestic demand due to the COVID-19 pandemic.

With a macroeconomic stability and a resilient financial system as well as expectations towards the effectiveness of fiscal and monetary policies that will be maintained continuously to deal with the risk of rising global interest rates going forward, Moody's Rating Agency affirmed Indonesia's Sovereign Credit Rating at Baa2 or investment grade with a stable outlook on 10 February 2022.

## TINJAUAN MAKRO EKONOMI

Operational Review per Business Segment

### Tinjauan Industri | Industry Overview

Keterangan Description	Nilai Ekspor (Juta USD)   Export Values (Million USD)					Perubahan   Changes (%)			Peran terhadap total nilai ekspor Role to total export value Jan-Des 2021 (%)
	Des-2020		Nov-2021		Des-2021	Jan-Des 2020	Jan-Des 2021	% mtm	% yoy
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(c-b)/(b)	(g)=(c-a)/(a)	(h)=(e-d)/(d)	(i)
Total Nilai Ekspor Total Export Value	16.539,6	22.844,4	22.377,8	163.191,8	231.540,8	● -2,04%	● 35,30%	● 41,88%	100,00%
Migas Oil & Gas	1.018,8	1.332,4	1.093,4	8.251,1	12.275,6	● -17,93%	● 7,33%	● 48,78%	5,30%
Nonmigas Non-Oil & Gas	15.520,8	21.512,0	21.284,4	154.940,7	219.265,2	● -1,06%	● 37,13%	● 41,52%	94,70%
<b>Berdasarkan Sektor Non-migas   Based on Non-oil &amp; gas Sector</b>									
Pertanian Agriculture	433,1	428,5	400,6	4.119,0	4.237,0	● -6,52%	● -7,51%	● 2,86%	1,83%
Industri Pengolahan Processing Industry	12.915,3	16.261,1	17.083,8	131.087,0	177.107,5	● 5,06%	● 32,28%	● 35,11%	76,49%
Pertambangan dan lainnya	2.172,4	4.822,4	3.800,0	19.734,7	37.920,7	● -21,20%	● 74,92%	● 92,15%	16,38%

Sumber: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik rilis bulan Januari 2022, diolah  
Source: Central Bureau of Statistics, Official News of Statistics released in January 2022, reprocessed

Total nilai ekspor Indonesia secara kumulatif (Januari hingga Desember) tahun 2021 tercatat sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah dengan valuasi sebesar USD231,54 miliar, atau mengalami *rebound* signifikan mencapai 41,88% yoy pasca terkontraksi di level -2,68% yoy pada tahun lalu (2020: USD163,19 miliar). Perkembangan tersebut ditopang oleh kenaikan ekspor migas dan non-migas, dimana masing-masing meningkat hingga double digit yaitu 48,78% yoy dan 41,52%, atau menjadi USD12,28 miliar dan USD219,27. Selain itu, peningkatan nilai juga diikuti kenaikan volume ekspor sebesar 7,38% yoy.

Berdasarkan sektor, ekspor migas dan non-migas berkontribusi 5,30% dan 94,70% dari total ekspor Indonesia di tahun 2021. Industri pengolahan masih menjadi penyumbang ekspor non-migas terbesar dengan porsi mencapai 76,49%, diikuti pertambangan dan lainnya (porsi: 16,38%) serta pertanian, kehutanan, dan perikanan (porsi: 1,83%).

The cumulative value of Indonesia's exports (January to December) in 2021 was recorded as the highest in history worth USD231.54 billion, or experienced a significant rebound reaching 41.88% yoy after contracting at -2.68% yoy in the previous year (2020: USD163.19 billion). This development was supported by an increase in oil and gas as well as non-oil and gas exports, which recorded double digits growth of 48.78% yoy and 41.52%, or to USD12.28 billion and USD219.27. In addition, the increase in value was also followed by a growth in export volume by 7.38% yoy.

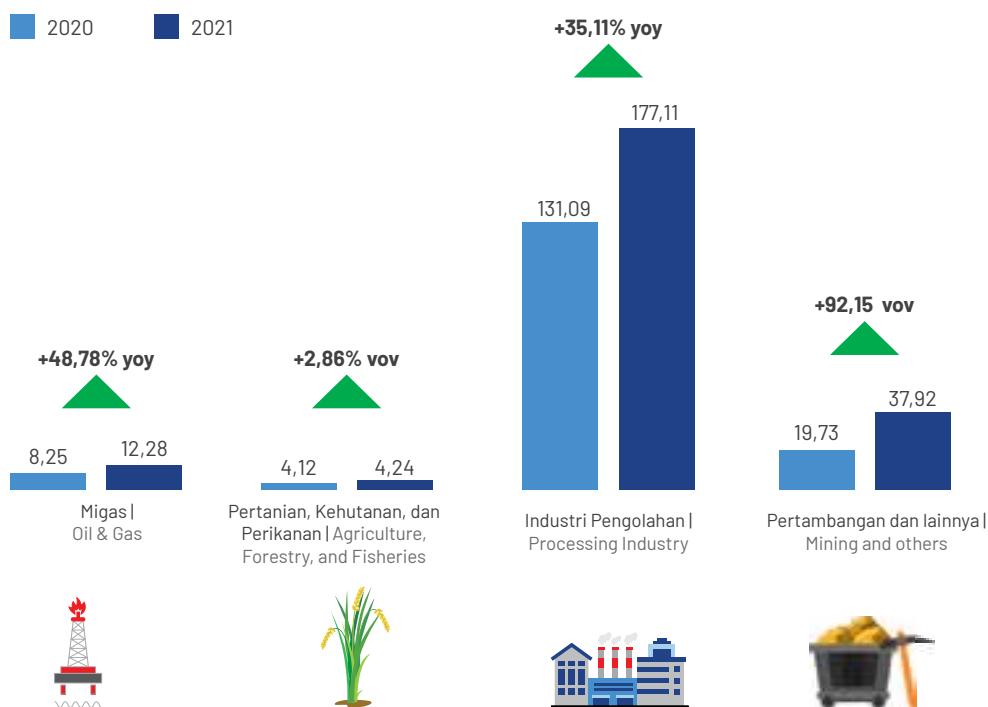
By sector, oil and gas as well as non-oil and gas exports contributed 5.30% and 94.70% of Indonesia's total exports in 2021. The manufacturing industry remains the largest contributor to non-oil and gas exports with a portion reaching 76.49%, followed by mining and others (16.38%) and agriculture, forestry, and fisheries (1.83%).

## TINJAUAN MAKRO EKONOMI

Operational Review per Business Segment

### Nilai Ekspor Indonesia Berdasarkan Sektor (USD Miliar) I

Indonesian Export Value Based on Sectors (USD Billion)



Sumber: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik rilis bulan Januari 2022, diolah

Source: Central Bureau of Statistics, Official News of Statistics released in January 2022, reprocessed

Secara tahunan, seluruh sektor berhasil mencatatkan pertumbuhan positif, ditopang oleh kenaikan penjualan ekspor batubara, minyak sawit, dan feronikel yang berkontribusi terhadap 35% dari total ekspor Indonesia. Realisasi ekspor batubara mengalami lonjakan mencapai 91,0% yoY, didorong permintaan yang tinggi akibat (a) krisis energi di sejumlah negara, (b) tingginya harga batubara global, dan (c) *low base effect* tahun 2020. Ekspor minyak sawit juga tumbuh double digit sebesar 53,6% yoY seiring dengan kenaikan harga global di tengah tingginya permintaan negara tujuan utama dan disrupsi pasokan. Sementara itu, ekspor feronikel meningkat ke level 50,2% yoY di tengah *demand* yang tinggi, khususnya dari Tiongkok, India, Taiwan, dan Korea Selatan.

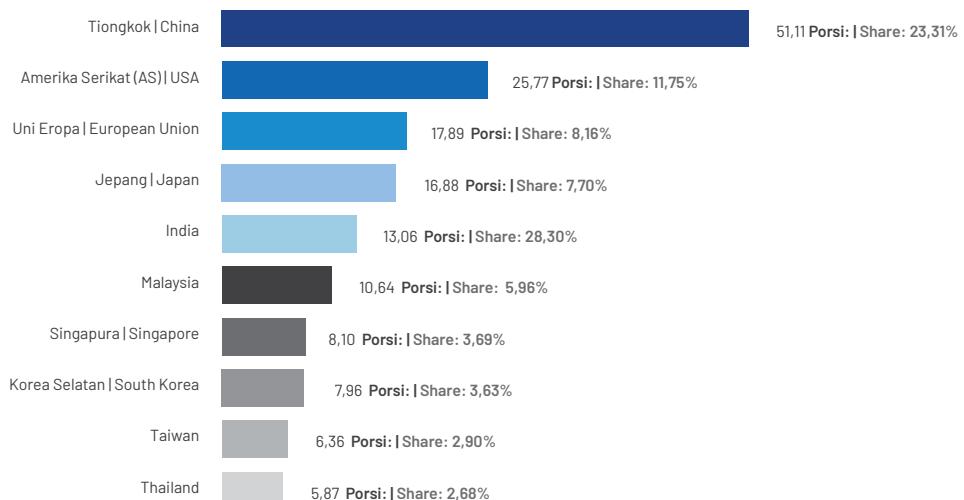
On yearly basis, all sectors successfully recorded a positive growth, supported by an increase in the export sales of coal, palm oil, and ferronickel which contributing 35% of Indonesia's total exports. The realization of coal exports soared 91.0% yoY, driven by a high demand due to (a) an energy crisis in a number of countries, (b) high global coal prices, and (c) the low base effect in 2020. Palm oil exports also grew double digits of 53.6% yoY in line with rising global prices amid high demand from major destination countries and supply disruptions. Meanwhile, ferronickel exports grew 50.2% yoY amid strong demand, particularly from China, India, Taiwan and South Korea.

## TINJAUAN MAKRO EKONOMI

### Operational Review per Business Segment

#### Pasar Ekspor Non-Migas Indonesia (USD Miliar)

##### Indonesian Non-Gas & Oil Export Market (USD Billion)



Sumber: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik rilis bulan Januari 2022, diolah  
Source: Statistics Indonesia, Official Statistics News released in January 2022, processed

Berdasarkan negara tujuan, Tiongkok masih mendominasi pangsa pasar ekspor non-migas Indonesia tahun 2021 dengan porsi sebesar 23,31% atau senilai USD51,11 miliar. Ekspor non-migas ke Tiongkok mencatatkan kenaikan yang solid mencapai 70,71% yoy dibandingkan tahun sebelumnya (2020: USD29,94 miliar), ditopang oleh penjualan batubara, feronikel, dan minyak sawit. Selanjutnya, Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa menjadi tujuan ekspor non-migas Indonesia terbesar lainnya dengan porsi masing-masing sebesar 11,75% dan 8,16% dan valuasi USD25,77 miliar dan USD17,89 miliar.

Secara spasial, tiga provinsi yang memberikan sumbangan terbesar terhadap total ekspor Indonesia yaitu Jawa Barat dengan porsi sebesar 14,62%, diikuti Kalimantan Timur (10,50%), dan Jawa Timur (9,94%). Secara kumulatif, ketiga provinsi tersebut berkontribusi terhadap 35,06% dari total ekspor nasional.

Secara kumulatif (Januari – Desember 2021), surplus pada sektor non-migas sebetulnya mencapai USD48,59 miliar, namun tereduksi oleh defisit pada sektor migas sebesar USD13,25 miliar. Dengan demikian, surplus perdagangan secara total tercatat sebesar USD35,34 miliar.

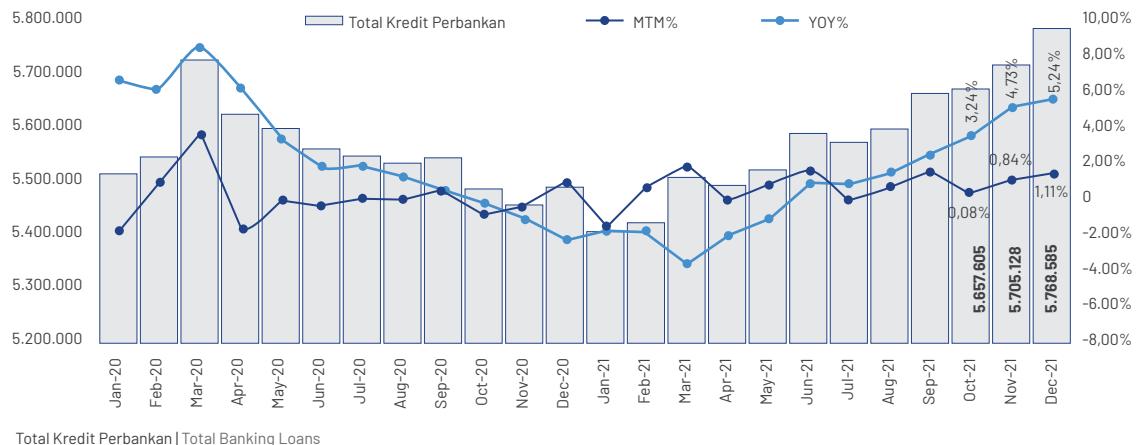
Based on destination countries, China still dominated Indonesia's non-oil and gas export market share in 2021 with a share of 23.31% or worth USD51.11 billion. Non-oil and gas exports to China posted a solid increase of 70.71% yoy compared to the previous year (2020: USD29.94 billion), supported by sales of coal, ferronickel and palm oil. United States and European Union are Indonesia's other largest non-oil and gas export destination with a share of 11.75% and 8.16% respectively and a valuation of USD25.77 billion and USD17.89 billion.

Spatially, three provinces providing the largest contribution to Indonesia's total exports were West Java with a portion of 14.62%, followed by East Kalimantan (10.50%) and East Java (9.94%). Cumulatively, the three provinces contributed 35.06% of the total national exports.

Cumulatively (January – December 2021), the surplus in the non-oil and gas sector actually stood at USD48.59 billion, but was reduced by a deficit in the oil and gas sector of USD13.25 billion. As such, the total trade surplus was recorded at USD35.34 billion.

## TINJAUAN MAKRO EKONOMI

Operational Review per Business Segment



Penyaluran kredit perbankan Indonesia pada Desember 2021 tumbuh positif di level 5,24% yoy (membaih dari bulan sebelumnya yaitu 4,73% yoy). Secara khusus Kredit Produktif (Kredit Modal Kerja / KMK dan Investasi / KI) bulan Desember 2021 tumbuh 5,46% yoy, naik dari pertumbuhan bulan sebelumnya (4,97% yoy). Hal ini didorong pertumbuhan KMK (6,32% yoy) dan Kredit Konsumsi (4,67%) di bulan Desember 2021. Sementara itu, Kredit Ekspor secara tahunan pada Desember 2021 tumbuh positif di level 40,04% yoy, didukung kinerja ekspor yang solid, terutama penyaluran ke sektor berkinerja baik seiring dengan kenaikan harga beberapa komoditas ekspor utama Indonesia.

Rasio Non-Performing Loan (NPL) bank umum di bulan Desember 2021 berada di level 3,00%, turun tipis dari bulan sebelumnya (3,19%). NPL terbesar bulan Desember 2021 berdasarkan jenis penggunaan berasal dari Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar 3,92%, diikuti Kredit Investasi (KI) sebesar 2,70%. Sehingga, menempatkan rasio NPL Kredit Produktif (KMK+KI) di level 3,47%. Sementara itu rasio NPL Kredit Konsumsi (KK) di level 1,69%. Meski rasio NPL masih terjaga, namun risiko gagal bayar kredit atau loan at risk (LAR) patut diwaspadai fluktuasinya di tengah berlangsungnya program restrukturisasi kredit. Sedangkan, likuiditas dan tingkat kesehatan per Desember 2021 masih terjaga dengan baik dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) di level 25,67 %.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas sektor jasa keuangan masih terjaga, seiring dengan fungsi intermediasi yang membaik. Perbaikan didorong terkendalinya pandemi, pulihnya mobilitas dan meningkatnya kegiatan perekonomian. Namun demikian, munculnya varian Omicron perlu diwaspadai, meski virulensi Omicron lebih rendah.

Indonesia's banking loan disbursement in December 2021 grew positively at the level of 5.24% yoy (improved from the previous month of 4.73% yoy). In particular, Productive Loans (Working Capital Loans / KMK and Investment / KI) in December 2021 grew 5.46% yoy, up from the previous month's growth (4.97% yoy). It was driven by a growth of working capital loans (6.32% yoy) and consumer loans (4.67%) in December 2021. Meanwhile, export loans on an annual basis in December 2021 grew positively at 40.04% yoy, supported by a solid export performance particularly disbursement to well-performing sectors in line with rising prices of Indonesia's main export commodities.

The Non-Performing Loan (NPL) ratio of commercial banks in December 2021 stood at 3.00%, slightly decrease from the previous month (3.19%). The largest NPL in December 2021 by type of use derived from Working Capital Loans (KMK) at 3.92%, followed by Investment Loans (KI) at 2.70%. Thus, placing the NPL ratio for Productive Loans (KMK+KI) at 3.47%. Meanwhile, the NPL ratio for Consumer Loans (KK) stood at 1.69%. Although the NPL ratio was maintained, the risk of loan default or loan at risk (LAR) should be watched out for fluctuations in the midst of the loan restructuring program. Meanwhile, liquidity and sound levels as of December 2021 remained well maintained with the Capital Adequacy Ratio (CAR) of 25.67%.

The Financial Services Authority (OJK) assesses that the stability of financial services sector remains well-maintained, in line with the improving intermediation function. The improvement was driven by a better handling of pandemic, recovery of mobility and enhanced economic activities. However, the emergence of Omicron variants needs to be watched out for, even though the virulence of Omicron is lower.



# PROSPEK USAHA

## Business Prospects

Dinamika akibat dampak COVID-19 di tahun 2022 diperkirakan masih terjadi di tengah optimisme yang semakin meningkat seiring dengan semakin baik dan meratanya penanggulangan pandemi, tingginya tingkat vaksinasi dan adaptasi sosial, ekonomi serta regulasi yang selama dua tahun sejak pandemi terus ditingkatkan. Seluruh faktor tersebut diharapkan mempercepat pemulihan ekonomi baik global maupun domestik di tahun 2022. LPEI memandang prospek usaha LPEI di tahun 2022 dengan optimis dengan mempertimbangkan potensi bisnis ekspor Indonesia masih besar termasuk potensi UKM yang berorientasi ekspor dan posisi yang strategis LPEI dalam berperan mendorong pertumbuhan ekspor nasional. Dalam menjalankan bisnis di tahun 2022, LPEI menetapkan strategi utama yang menjadi acuan dalam mengembangkan bisnis, antara lain:

- Pertumbuhan Mandat dan Bisnis yang berkelanjutan
- Perbaikan Kualitas Aset;
- Penguatan Internal;
- Penguatan SDM;
- Pengembangan Bisnis.

Selain memberikan dukungan aspek finansial melalui pembiayaan, penjaminan dan asuransi, LPEI juga senantiasa berusaha meningkatkan peran dalam mendorong dan meningkatkan kelas UKM Indonesia melalui program jasa konsultasi. Kedepan, LPEI akan terus meningkatkan kolaborasi dengan kementerian/lembaga ataupun stakeholder lain dalam rangka meningkatkan edukasi untuk para calon eksportir serta *community development* melalui program Desa Devisa yang bertujuan untuk terus mendorong kontribusi UKM Indonesia dalam rangka peningkatan ekspor.

Secara umum LPEI optimis atas prospek usaha di tahun 2022. Namun dengan masih adanya dampak pandemi dan kondisi ekonomi yang masih dalam masa pemulihan, LPEI akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan lebih cermat dalam memperhatikan prospek industri yang sesuai dengan *risk appetite* nya, serta memperhitungkan peluang bisnis negara tujuan ekspor maupun profil risiko dari calon debitur. Dalam hal ekspansi penyaluran pembiayaan, LPEI juga akan mengedepankan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) dan manajemen risiko untuk memitigasi kualitas dari pembiayaannya.

The dynamics due to the impacts of COVID-19 in 2022 are estimated to prolong despite of increasing optimism along with better and more equitable pandemic handling, high rates of vaccination as well as social, economic and regulatory adaptation which have been improving for two years since the pandemic. All of these factors are expected to accelerate economic recovery either globally or domestically in 2022. Indonesia Eximbank views its business prospects in 2022 with optimism considering the large potential of Indonesia's export business, including the export-oriented SMEs potential and Indonesia Eximbank's strategic position in driving the national export growth. To manage its business in 2022, Indonesia Eximbank will set the main strategies as a reference in developing the business, including:

- Sustainable Mandate and Business Growth
- Asset Quality Improvement;
- Internal Strengthening;
- Strengthening of human resources;
- Business development.

Apart from providing financial support through financing, guarantees and insurance, Indonesia Eximbank also consistently strives to increase its role in driving and improving the Indonesian SME class through advisory program. Going forward, Indonesia Eximbank will continue to increase collaboration with other ministries/institutions or stakeholders in order to improve education for potential exporters and community development through the Desa Devisa program which aims at continuously promoting the contribution of Indonesian SMEs in order to increase exports.

Generally, Indonesia Eximbank is optimistic on its business prospects in 2022. However, as the impacts of the pandemic and economic conditions remain under recovery, Indonesia Eximbank will continue to prioritize the principle of prudence and be more careful in considering industry prospects in accordance with its risk appetite, and taking into account the business opportunities of the export destination countries and risk profile of the prospective borrowers. On financing expansion, Indonesia Eximbank will also uphold Good Corporate Governance (GCG) implementation and risk management to mitigate the quality of its financing.



# ASPEK PEMASARAN

## Marketing Aspects



Strategi pemasaran LPEI dalam rangka menjalankan mandatnya untuk mendukung Pembiayaan Ekspor Nasional adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan penyaluran pembiayaan

Peningkatan penyaluran pembiayaan ekspor dilakukan antara lain melalui pembiayaan konvensional maupun prinsip syariah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. LPEI juga menyediakan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan ekspor serta membiayai segmen UKME dan pembiayaan korporasi dengan memperhatikan pengelolaan risiko secara sehat.

- Meningkatkan penyaluran penjaminan

Dalam upaya meningkatkan penyaluran penjaminan ekspor, LPEI senantiasa menjalankan prinsip kehati-hatian, berkoordinasi dengan regulator terutama dalam hal penyesuaian beberapa ketentuan peraturan untuk memperluas ruang gerak penjaminan yang diberikan. Selain itu, menyediakan penjaminan bagi UKME agar mudah memperoleh akses pembiayaan. Penjaminan meliputi penjaminan bagi eksportir

Indonesia Eximbank's marketing strategy in performing its mandate to support the National Export Financing is as follows:

- Increase financing disbursement

Improvement of the export financing disbursement is executed, among others, through conventional financing and sharia principles, either domestically or abroad, which is performed by considering the principle of prudence. Indonesia Eximbank also provides financing as needed to support export activities as well as financing the SME segment and corporate financing by taking into account sound risk management.

- Increase guarantees disbursement

To improve the export guarantee disbursement, Indonesia Eximbank always applies the prudence principle, coordinate with regulators, particularly on several regulatory provisions adjustment to expand the scope of movement of the guarantee provided. In addition, providing guarantees for SMEs to facilitate access to financing. These guarantees include guarantee for Indonesian exporters on payments

## ASPEK PEMASARAN Marketing Aspects

Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang/jasa di luar negeri, penjaminan bagi importir barang/jasa Indonesia di luar negeri atas pembayaran yang telah diberikan, penjaminan bagi bank yang menyediakan pembiayaan transaksi ekspor kepada eksportir Indonesia, serta penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang ekspor. Selain itu LPEI juga melaksanakan penyaluran Penjaminan Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional melalui program penjaminan korporasi padat karya (JAMINAH) untuk perbankan agar pemberian kredit dapat terus berjalan sehingga pemulihannya dapat lebih cepat.

- Meningkatkan penyaluran asuransi

Aktivitas peningkatan penyaluran asuransi ekspor dilakukan dengan berkoordinasi dengan regulator terutama dalam hal penyesuaian beberapa ketentuan peraturan untuk memperluas ruang gerak asuransi. LPEI juga menyediakan asuransi bagi UKME agar mudah memperoleh akses pembiayaan. Asuransi ekspor meliputi asuransi atas risiko kegagalan ekspor, asuransi atas risiko kegagalan bayar, asuransi atas investasi yang dilakukan perusahaan Indonesia di luar negeri, dan/atau asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor.

- Meningkatkan peran Jasa Konsultasi

Pelaksanaan Jasa Konsultasi difokuskan pada peningkatan kapasitas *business advisory* serta perluasan akses pasar baik secara konvensional maupun *digital commerce*. LPEI senantiasa meningkatkan kapasitas baik secara komprehensif maupun secara tematik yang dapat diaplikasikan melalui stakeholders eksternal. Bimbingan dan jasa konsultasi mencakup kepada bank, lembaga keuangan, eksportir, produsen barang ekspor, khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank/lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan/atau penting bagi perkembangan ekonomi Indonesia.

received from buyers of goods/services abroad, guarantee for importers of Indonesian goods/services abroad for payments that have been made, guarantee for banks providing export transaction financing to Indonesian exporters, as well as guarantee of tenders related to the implementation of projects which are wholly or partly an activity that supports exports. Moreover, Indonesia Eximbank also implements the disbursement of government guarantee for the National Economic Recovery through the labour-intensive corporate guarantee program (JAMINAH) for banks so as to fasten economic recovery.

- Increase insurance disbursement

Activities to increase the export insurance disbursement are executed by coordinating with regulators, particularly on adjusting several regulatory provisions for insurance expansion. Indonesia Eximbank also provides insurance for SMEs hence to facilitate access to financing. Export insurance includes insurance for the risk of export failure, insurance for the risk of default, insurance for investments made by Indonesian companies abroad, and/or insurance for political risks in a country that is the destination of exports.

- Enhance the role of Advisory

The implementation of Advisory is focused on improving business advisory capacity and expanding market access, either conventionally and digitally. Indonesia Eximbank continually improves its capacities both comprehensively and thematically that can be applied through external stakeholders. Guidance and advisory include services to the banks, financial institutions, exporters, producers of export goods, particularly micro, small, medium enterprises and cooperatives to help overcome obstacles faced by the banks/financial institutions in providing financing for exporters that are commercially potential and/or important for the development of the Indonesian economy.



# STRATEGI BISNIS

## Business Strategy

Dalam rangka memperbaiki kinerja yang berkelanjutan dan mencapai tujuan untuk menjadi *Export Agency* dengan kinerja tertinggi di ASEAN pada tahun 2025, LPEI menetapkan strategi 5 tahun ke depan yang terbagi menjadi 3 tahap yaitu:

1. *Regain our Footing* (periode implementasi 2020-2021)
2. *Grow a Strong Core for LPEI & the country* (periode implementasi 2022-2023)
3. *Become a Lighthouse Export Agency* (periode implementasi 2024-2025)

Tahun 2021 adalah tahun yang penuh tantangan bagi LPEI, dimana kondisi ekonomi masih terdampak pandemi COVID-19 namun LPEI tetap harus menjalankan mandatnya dan penugasan khusus termasuk menyalurkan Penjaminan Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dalam menanggapi tantangan tersebut, LPEI di tahun 2021 memiliki 8 prioritas yaitu:

1. Pengelolaan dan perbaikan kualitas aset  
LPEI terus berupaya memperbaiki kualitas asetnya dengan mengoptimalkan proses restrukturisasi, *recovery, collection, AYDA* dan penghapusan buku dalam rangka menurunkan NPL secara bertahap. Selain itu juga monitoring lebih ketat atas akun yang terindikasi mengalami pemburukan dilakukan lebih intensif untuk menjaga tidak terjadi perburukan kualitas aset dengan mengambil tindakan-tindakan lebih awal atas akun tersebut.
2. Peningkatan Penjaminan, Pembiayaan, *Trade Finance* dan Asuransi  
Sebagai bagian dari mandat untuk meningkatkan eksport nasional, LPEI terus meningkatkan perannya dalam hal tersebut antara lain dengan mendorong pembiayaan umum berupa pembiayaan *direct export tier 1*, peningkatan *Trade Finance*, pembiayaan melalui skema *supply chain financing* dengan melakukan mapping dalam hal orientasi eksport bisnis debitur, *product holding* dan *wallet size* melalui produk penjaminan dan asuransi.
3. Pelaksanaan PKE, PEN dan IP  
Dalam situasi ekonomi yang belum pulih akibat dari pandemi Covid-19 yang dimulai dari Tahun 2020, LPEI sebagai SMV Pemerintah mengemban tugas khusus dalam mengakselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional melalui pelaksanaan program PEN. Salah satu program utama yaitu dengan melaksanakan

To improve sustainable performance and achieve its goal to become the highest performing Export Agency in ASEAN by 2025, Indonesia Eximbank has set a strategy for the next 5 years which is divided into 3 stages as follows:

1. Regain our Footing (of 2020-2021)
2. Grow a Strong Core for LPEI & the country (2022-2023)
3. Become a Lighthouse Export Agency (2024-2025)

2021 is a year full of challenges for Indonesia Eximbank, where economic conditions remained affected by the COVID-19 pandemic, however Indonesia Eximbank must perform its mandate and the national interest account including government guarantee disbursement for the National Economic Recovery (PEN).

In responding to these challenges, Indonesia Eximbank has 8 priorities in 2021, namely:

1. Asset quality management and improvement  
Indonesia Eximbank continuously strives to improve the quality of its assets by optimizing the restructuring, recovery, collection, AYDA and write-off processes in order to gradually reduce NPLs. Moreover, stricter monitoring of accounts that are indicated as non-performing is carried out more intensively to prevent asset quality deterioration by taking early actions on these accounts.
2. Improve Guarantee, Financing, *Trade Finance* and Insurance  
As part of its mandate to improve national exports, Indonesia Eximbank continues to enhance its role in this regard, among others, by driving general financing through tier 1 direct export financing, improving *Trade Finance*, financing through supply chain financing schemes by mapping the debtor's business export orientation, product holding and wallet size through guarantee and insurance products.
3. Implementation of PKE, PEN and IP  
During the economic situation that has not yet recovered due to Covid-19 pandemic since 2020, Indonesia Eximbank as the Government's SMV has a special task in accelerating the National Economic Recovery through the implementation of PEN program. One of the main programs is implementing

program jaminan Pemerintah (JAMINAH) atas pembiayaan yang diberikan perbankan sehingga diharapkan penyaluran kredit perbankan tetap dapat terus bergulir dan mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional. Selain itu juga, LPEI juga menyalurkan pembiayaan khusus ekspor (PKE) sesuai dengan arahan pemerintah, antara lain PKE *Trade Finance*, PKE Pariwisata, PKE Penerangan, PKE Kawasan, PKE UKM, dan PKE Ketahanan Usaha. LPEI juga melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana investasi pemerintah kepada PTPN (PT Perkebunan Nusantara).

**4. Pengembangan Bisnis UMKM & UMBE**

Sektor UMKM diharapkan menjadi pendorong ekonomi padat karya dalam meningkatkan ekspor nasional menembus pasar global. Dalam kaitan dengan hal tersebut, LPEI senantiasa berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan sektor UMKM. Strategi LPEI untuk segmen UKM dilaksanakan melalui pembiayaan umum antara lain melalui *supply chain financing*, pembiayaan PKE, dan juga layanan jasa konsultasi untuk terus meningkatkan kelas UKM Indonesia melalui *Coaching Program for New Exporter* (CPNE), Pendampingan mitra binaan dan *Community Development* untuk menghasilkan Desa Devisa yang membawa nama Indonesia ke pasar global dan mendorong peningkatan ekspor nasional.

**5. Penguatan Operasional, Manajemen Risiko, dan Tata Kelola**

LPEI senantiasa terus melakukan penguatan internal antara lain dengan penguatan pada Operasional, Manajemen Risiko dan Tata Kelola. Salah satu yang telah dijalankan adalah mekanisme *Early Warning Detection* untuk mendeteksi lebih awal potensi pemburukan kualitas aset sehingga diharapkan langkah-langkah antisipasi dapat diambil lebih dulu untuk mencegah terjadinya pemburukan kualitas aset. Terkait dengan peningkatan monitoring covenant dilakukan dengan melakukan pengembangan mekanisme pemantauan *covenant* kredit dan pembenahan *credit file*. Selain itu pemenuhan tindak lanjut atas rekomendasi auditor eksternal dan internal akan terus dilakukan sebagai bentuk kepatuhan dan peningkatan kinerja lembaga. Selain itu juga LPEI melakukan peningkatan aspek tata kelola yang setiap tahunnya akan dinilai oleh konsultan independen. Penguatan tata kelola lembaga dilakukan secara berkelanjutan melalui sosialisasi pilar tata kelola lembaga kepada pegawai.

the Government guarantee program (JAMINAH) for financing provided by banks hence it is hoped that bank lending will continue to roll and accelerate the recovery of the national economy. In addition, Indonesia Eximbank also disburses export-specific financing (PKE) in accordance with the government directives, including PKE *Trade Finance*, PKE *Pariwisata*, PKE *Penerangan*, PKE *Kawasan*, PKE *UKM*, and PKE *Ketahanan Usaha*. Indonesia Eximbank also carries out its duties as executor of government investment in PTPN (PT Perkebunan Nusantara).

**4. MSME & UMBE Business Development**

The MSME sector is expected to be a driver of the labour-intensive economy in improving national exports to penetrate the global market. In this regard, Indonesia Eximbank continues to play an active role in driving the MSME sector growth. Indonesia Eximbank's strategy for the SME segment is implemented through general financing, including through supply chain financing, PKE financing, as well as advisory to continue to improve the Indonesian SME class through the Coaching Program for New Exporters (CPNE), Assistance of mentoring partners and Community Development to produce Desa Devisa. which brings Indonesia's name to the global market and promote national exports growth.

**5. Strengthening Operations, Risk Management, and Governance**

Indonesia Eximbank continues to conduct internal strengthening, among others by strengthening Operations, Risk Management, and Governance. An Early Warning Detection mechanism has been implemented to firstly detect potential deterioration in asset quality hence it is hoped that anticipatory measures can be taken to prevent non-performing asset quality. In relation to the improvement of covenant monitoring, the credit covenant monitoring mechanism was developed and the credit file was updated. Moreover, the fulfillment of follow-up on the recommendations of external and internal auditors will continue to be executed as a form of compliance and performance improvement. Moreover, Indonesia Eximbank also improves governance aspects which will be assessed annually by independent consultants. Strengthening institutional governance is implemented continuously through socialization of the pillars of institutional governance to employees.

**6. Efisiensi Biaya yang Berkelanjutan**

Strategi efisiensi menjadi salah satu bagian penting dalam menyeimbangkan penurunan pendapatan yang di saat kondisi ekonomi yang belum pulih dan masih terdampak oleh pandemi. Efisiensi tidak hanya mencakup biaya operasional namun juga efisiensi dalam hal beban bunga yang didapat dari optimalisasi likuiditas dan strategi pendanaan. Monitoring efisiensi biaya dilakukan secara rutin melalui *working group* yang membahas efisiensi, di mana di dalamnya selain membahas realisasi biaya namun juga membahas usulan mengenai inisiatif-inisiatif efisiensi lainnya. Selain itu untuk membangun *Cost Culture* yang kuat ke depannya, dilakukan juga sosialisasi dan himbauan penerapan *Internal Green Office* yang diharapkan dapat menurunkan biaya listrik, kertas dan lainnya yang akan berkontribusi juga terhadap efisiensi total biaya Lembaga.

**7. Transformasi MIS dan Pengembangan Teknologi**

Dukungan MIS dan Teknologi sangat penting untuk peningkatan layanan LPEI, dengan peningkatan kapabilitas MIS yang lebih baik dapat membantu analisa dan pengambilan keputusan manajemen yang lebih cepat dan lebih baik. Pengembangan MIS sesuai blueprint terus berproses secara bertahap. Dari sisi pengembangan teknologi juga diteruskan penguatan terkait IT security infrastruktur untuk menunjang bisnis.

**8. Pengembangan Kompetensi SDM, Pemberdayaan Budaya Kerja Lembaga dan Manajemen Kinerja yang terintegrasi**

SDM merupakan komponen utama dalam menggerakkan seluruh roda aktivitas Lembaga, oleh karena itu untuk mendukung semua rencana strategis yang akan dilakukan, tidak ketinggalan adalah pengembangan dari SDM yang dimiliki itu sendiri. Pengembangan SDM juga dibarengi dengan penguatan Budaya Lembaga yaitu TRUST (*Trustworthy, Reliable, Unique, Service Excellence and Team Work*) yang dilakukan melalui serangkaian Culture Transform Program yang diukur dengan survey engagement pegawai. Dalam hal eksekusi prioritas utama Lembaga, alignment indikator kinerja utama yang jelas dan terukur dari level Lembaga sampai dengan level unit kerja akan dilakukan sebagai bagian dari manajemen kinerja yang terintegrasi.

**6. Sustainable Cost Efficiency**

An efficiency strategy is an important part of balancing a decline of income during economic conditions that have not yet recovered and remained affected by the pandemic. Efficiency does not only cover operating costs however also efficiency in terms of interest expense derived from the optimization of liquidity and funding strategies. Cost efficiency monitoring is conducted regularly through a working group that discusses efficiency, of which apart from discussing cost realization, it also discusses proposals for other efficiency initiatives. Moreover, to build a strong Cost Culture in the future, socialization and appeals for the implementation of the Internal Green Office are also conducted which are expected to reduce electricity, paper and other costs which will also contribute to the total costs' efficiency.

**7. MIS Transformation and Technology Development**

MIS and Technology support is pivotal for the Indonesia Eximbank services improvement, as improved MIS capabilities can help make analysis and management decisions faster and better. The development of MIS according to the blueprint is gradually continued. In terms of technology development, IT security infrastructure was continued to be strengthened to support business progress.

**8. Development of HR Competencies, Empowerment of Work Culture and Integrated Performance Management**

HR is the key component in driving the entire activities of the Company, therefore to support all strategic plans that will be executed, the development of HR was also considered. HR development is also accompanied by strengthening the Institutional Culture, namely TRUST (*Trustworthy, Reliable, Unique, Service Excellence and Team Work*) which is performed through a series of Culture Transform Programs as measured by employee engagement surveys. In terms of the execution of the Company's main priorities, a clear and measurable alignment of key performance indicators from the Company level to the work unit level will be conducted as a part of integrated performance management.



# TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

## Operational Review Per Business Segment



.01  
**PENUGASAN KHUSUS**  
National Interest Account



.02  
**PEMBIAYAAN**  
Financing



.03  
**JASA KONSULTASI**  
Advisory Services



.04  
**TRESURI**  
Treasury



.05  
**PENJAMINAN**  
Guarantee



.06  
**ASURANSI**  
Insurance



.07  
**TRADE FINANCE**  
Trade Finance

# PENUGASAN KHUSUS

National Interest Account

.01



## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

### Operational Review Per Business Segment

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 183/PMK.08/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penugasan Khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Penugasan Khusus atau *National Interest Account* (NIA) adalah suatu penugasan khusus yang diberikan pemerintah kepada LPEI untuk menyediakan pembiayaan ekspor (*financing, insurance, guarantee*) atas transaksi atau proyek kepada pelaku ekspor yang sulit mendapat pembiayaan dari bank/lembaga keuangan yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi dianggap perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan ekspor nasional. Pembiayaan ekspor dalam program NIA ini dapat diberikan berdasarkan prinsip konvensional dan/atau prinsip syariah yang sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) untuk masing-masing program.

NIA memiliki tujuan dan fungsi, antara lain pembiayaan ekspor untuk mendorong penetrasi barang/jasa dari Indonesia ke pasar non-tradisional dan/atau memiliki *country risk* yang tinggi namun dianggap perlu oleh Pemerintah untuk menunjang ekspor nasional serta penugasan khusus terkait ekspor barang/jasa dan pengembangan sektor pariwisata, sektor UKM dan/atau industri tertentu yang memiliki peranan besar bagi perekonomian nasional, dan mendorong terciptanya eksportir baru yang berkelanjutan.

### Strategi dan Tantangan 2021

Dinamika yang terjadi pada seluruh sektor/industri di Indonesia sebagai dampak terjadinya pandemi COVID-19 masih menjadi tantangan utama yang dihadapi LPEI baik dalam konteks Penugasan Umum maupun Penugasan Khusus. Dalam melaksanakan Program NIA di tengah tantangan global ini, LPEI memiliki beberapa strategi antara lain:

- Melakukan koordinasi dengan Komite Penugasan Khusus Ekspor (PKE) dan stakeholder terkait dalam rangka percepatan implementasi atas pelaksanaan masing-masing program NIA yang diberikan Pemerintah kepada LPEI.
- Melakukan pendampingan kepada Komite PKE dalam proses penyusunan program NIA baru dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sedang dilakukan oleh Pemerintah.

Based on the Regulation of Minister of Finance (PMK) No. 183/PMK.08/2021 dated 14 December 2021 on the National Interest Account (NIA) to Indonesia Eximbank, NIA is mandated by the government to Indonesia Eximbank to provide export financing (*financing, insurance, guarantee*) for transactions or projects for exporters that find difficulties to obtain financing from commercial banks/financial institutions for transactions or projects that is commercially difficult to be implemented, but it's required by the government to support the national export policies. Export financing in NIA can be administered either through conventional or based on sharia principles in accordance with the Decree of the Minister of Finance(KMK)of each program.

NIA has the objectives and functions to provide export financing by promoting the penetration of goods/services from Indonesia into non-traditional markets and/or have a high country risk but are deemed necessary by the Government to support national exports, as well as special assignments related to the export of goods/services and the tourism sector development, SME sector and/or certain industries having a major role in the national economy, and boost the creation of new sustainable exporters.

### 2021 Strategy and Challenges

The dynamics occurring in all sectors/industries in Indonesia affected by the COVID-19 pandemic remained the key challenges faced by Indonesia Eximbank both in the context of General Assignments and NIA. In implementing NIA Program in the midst of these global challenges, Indonesia Eximbank has several strategies, amongst others:

- Coordinate with the Special Export Assignment Committee (PKE) and related stakeholders to accelerate the implementation of each NIA program provided by the Government to Indonesia Eximbank.
- Provide assistance to the PKE Committee in drafting a new NIA program in order to support the National Economic Recovery(PEN) program carried out by the Government.

## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

Operational Review Per Business Segment

- Melakukan pemantauan atas pelaksanaan Penugasan Khusus secara berkala bersama dengan Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait, pelaku ekspor, dan pihak terkait lainnya dalam rangka akselerasi pelaksanaan Program NIA dimaksud.
- Menyempurnakan infrastruktur yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Program NIA termasuk tata kelola dan penguatan manajemen risiko serta kajian untuk mengukur *developmental impact* atas pelaksanaan program NIA.
- Membangun *networking* dengan *Export Credit Agency* (ECA), *Development Bank* dan Lembaga Keuangan dalam rangka menambah kapasitas LPEI terkait dengan pelaksanaan Penugasan Khusus.
- Closely monitoring the implementation of Special Assignment periodically in coordination with related Ministries/ Institutions (K/L), exporters, and other related parties to accelerate the implementation of the aforementioned NIA Program.
- Improve the required infrastructure to implement NIA Program including governance and to strengthening risk management as well as studies to measure the developmental impact of the NIA program implementation.
- Build a networking with Export Credit Agency (ECA), Development Banks and Financial Institutions in order to increase Indonesia Eximbank's capacity related to NIA implementation.

Dalam rangka Pemulihan Ekspor Nasional (PEN), LPEI turut membantu melalui Program NIA yaitu secara spesifik melalui KMK No. 410/KMK.08/2021 tanggal 21 September 2021 perubahan atas KMK RI No. 526/KMK.08/2020 tentang Penugasan Khusus kepada Lembaga Pembangunan Ekspor Indonesia untuk menyediakan fasilitas *Trade Finance* dalam rangka mendukung pemulihan ekspor nasional. Penugasan Khusus ini difokuskan untuk mendukung sektor industri atau komoditas unggulan ekspor agar dapat tetap tumbuh di tengah tantangan global akibat pandemi COVID-19. Terdapat 13 komoditas/produk unggulan tersebut antara lain produk karet, produk kopi (termasuk kopi *specialty*), furnitur, produk alas kaki, makanan olahan (termasuk produk ikan, udang, *seafood*), tekstil dan produk tekstil, produk perhiasan/permata, produk teh dan rempah-rempah, produk kayu, produk kerajinan, produk elektronika, produk kimia dan produk otomotif (termasuk suku cadang kendaraan bermotor).

Penugasan Khusus dilaksanakan sejak tahun 2015 dengan menggunakan Dana Penugasan Khusus (DPK) yang berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN), yang mana total DPK per 31 Desember 2021 mencapai sebesar Rp8,7 triliun dengan pembagian alokasi untuk masing-masing Program NIA, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. DPK sebesar Rp6,2 triliun telah dialokasikan untuk 6 (enam) program yang sedang berjalan, yaitu PKE Kawasan Afrika, Timur Tengah dan Asia Selatan, PKE Pariwisata Mandalika, PKE Industri Penerbangan, PKE Usaha Kecil Menengah, PKE *Trade Finance* dan PKE Alat Transportasi.

In the context of the National Export Recovery (PEN), Indonesia Eximbank supports it through NIA Program, specifically through the KMK No. 410/KMK.08/2021 dated 21 September 2021 an amendment to the KMK No. 526/KMK.08/2020 regarding National Interest Account Assignment to Indonesia Eximbank to Provide Trade Finance Facilities in order to support National Economic Recovery. This Special Assignment is focused on supporting the industrial sector or key export commodities so as to keep growing in the midst of global challenges due to the COVID-19 pandemic. There are 13 superior commodities/products, including rubber products, coffee products (including specialty coffee), furniture, footwear products, processed foods (including fish products, shrimp, seafood), textiles and textile products, jewellery/gem products, tea products, and spices, wood products, handicraft products, electronic products, chemical products and automotive products (including auto parts).

NIA has been implemented since 2015 using a Special Assignment Fund (DPK) originating from Additional State Equity Participation of the Republic of Indonesia of Rp8.7 trillion as of 31 December 2021 with the allocation for each NIA Program as follows:

1. DPK of Rp6.2 trillion has been allocated for 6 (six) ongoing programs, namely PKE Kawasan Africa, Middle East and South Asia, PKE Pariwisata Mandalika, PKE Industri Penerbangan, PKE Usaha Kecil Menengah, PKE *Trade Finance* and PKE Alat Transportasi.

## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

### Operational Review Per Business Segment

- Sedangkan tambahan DPK sebesar Rp2,5 triliun telah diterima oleh LPEI pada tanggal 31 Desember 2021 yang akan dialokasikan untuk beberapa Program NIA baru, seperti tambahan untuk PKE Alat Transportasi, PKE Pariwisata dan PKE Substitusi Impor di tahun 2022.

Sejak tahun 2015, total *disbursement* program NIA telah mencapai Rp5,7 triliun dimana selama tahun 2021 terdapat tambahan *New Disbursement* sebesar Rp2,6 triliun. Adapun nilai *outstanding* pembiayaan program NIA per 31 Desember 2021 sebesar Rp2,92 triliun dengan seluruh portofolio dalam kolektibilitas 1(lancar).

Adapun ringkasan setiap program NIA yang masih berjalan hingga 31 Desember 2021, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- KMK No. 787/KMK.08/2017 tentang Pembentukan dalam Rangka Perluasan Pasar ke Negaranegara di Kawasan Afrika, Asia Selatan dan Timur Tengah sebagaimana diubah dengan KMK No. 01/ KMK.08/2019 tanggal 2 Januari 2019 – “PKE Kawasan”;  
Melalui KMK tersebut, pemerintah memberikan mandat kepada LPEI untuk menyalurkan pembiayaan kepada eksportir yang memiliki penjualan ekspor ke kawasan Afrika, Asia Selatan dan Timur Tengah. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp1,6 triliun dengan jangka waktu penugasan sampai dengan 31 Desember 2023. Total akumulasi *Disbursement* pembiayaan sejak tahun 2019 sampai dengan 31 Desember 2021 telah mencapai Rp747 miliar.
- KMK No. 685/KMK.08/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Eksport Indonesia dalam Rangka Pengembangan Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus – “PKE Pariwisata Mandalika”;  
Melalui KMK tersebut, pemerintah memberikan mandat kepada LPEI untuk menyalurkan pembiayaan kepada eksportir dalam rangka pengembangan pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp1,2 triliun dengan jangka waktu penugasan sampai dengan Desember 2023. Total realisasi *Disbursement* sejak tahun 2019 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.053 miliar.

- Meanwhile, an additional DPK of Rp2.5 trillion has been received by Indonesia Eximbank on 31 December 2021, which will be allocated for several new NIA Programs, such as additional PKE Alat Transportasi, PKE Pariwisata and PKE Substitusi Impor in 2022.

Since 2015, the total disbursement of NIA program has reached Rp5.7 trillion, of which was an additional New Disbursement of Rp2.6 trillion throughout 2021. The NIA program financing outstanding value as of 31 December 2021 was Rp2.92 trillion with the entire portfolio in collectability 1(current).

The summary of each ongoing NIA program until 31 December 2021 is as follows:

- KMK No. 787/KMK.08/2017 regarding Financing for Market Expansion to Countries in Africa, South Asia and the Middle East as amended by KMK No. 01/ KMK.08/2019 dated 2 January 2019 – “PKE Kawasan”;

Through this KMK, the government mandated Indonesia Eximbank to channel financing to exporters having export sales to Africa, South Asia and the Middle East. The funds allocated for this activity amounted to Rp1.6 trillion with an assignment period of up to 31 December 2023. The total accumulated disbursement of financing from 2019 to 31 December 2021 has reached Rp747 billion.

- KMK No. 685/KMK.08/2019 dated 27 August 2019 concerning NIA to Indonesia Eximbank in the Framework of Tourism Development for Special Economic Zones – “PKE Pariwisata Mandalika”;

Through this KMK, the government mandates Indonesia Eximbank to disburse financing to exporters in developing tourism in the Mandalika Special Economic Zone. The funds allocated for this activity amounted to Rp1.2 trillion with an assignment period of up to December 2023. The total realization of Disbursement from 2019 to 31 December 2021 was Rp1,053 billion.

## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

### Operational Review Per Business Segment

3. KMK No. 409/KMK.08/2021 tanggal 21 September 2021 perubahan atas KMK No. 372/KMK.08/2020 tentang Penugasan Khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam rangka mendukung Sektor Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Ekspor – “PKE UKM”;

Penugasan ini berfokus pada peningkatan kapasitas ekspor dari pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM). Melalui KMK ini dana PMN yang dialokasikan menjadi sebesar Rp1 triliun untuk seluruh sektor ekonomi/komoditas dengan maksimal imbalan pembiayaan sebesar 6%pa. Sejak tahun 2020 sampai dengan 31 Desember 2021, penugasan ini telah disalurkan kepada 64 debitur UKM dengan total akumulasi Disbursement sebesar Rp341 miliar.

4. KMK No. 428/KMK.08/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Untuk Mendukung Industri Penerbangan Indonesia – “PKE Industri Penerbangan”;

Berdasarkan KMK ini, dana PMN yang dialokasikan sebesar Rp1 triliun untuk penguatan sektor ekonomi transportasi dan pergudangan, khususnya jasa angkutan udara dengan kriteria pelaku ekspor sesuai dengan persyaratan dalam KMK.

5. KMK No. 410/KMK.08/2021 tanggal 21 September 2021 perubahan atas KMK No. 526/KMK.08/2020 tentang Penugasan Khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk menyediakan fasilitas Trade Finance dalam rangka mendukung pemulihan ekspor nasional – “PKE Trade Finance”;

Penugasan khusus ini difokuskan untuk mendukung sektor industri atau komoditas unggulan ekspor agar dapat tetap tumbuh di tengah tantangan global akibat pandemi COVID-19. Terdapat 13 komoditas/produk unggulan tersebut antara lain produk karet, produk kopi (termasuk kopi specialty), furnitur, produk alas kaki, makanan olahan (termasuk produk ikan, udang, seafood), tekstil dan produk tekstil, produk perhiasan/permata, produk teh dan rempah-rempah, produk kayu, produk kerajinan, produk elektronika, produk kimia dan produk otomotif (termasuk suku cadang kendaraan bermotor). Alokasi dana PMN untuk PKE Trade Finance sebesar Rp1 triliun dengan jangka waktu penugasan hingga 31

3. KMK No. 409/KMK.08/2021 dated 21 September 2021, amendments to the KMK No. 372/KMK.08/2020 on NIA to Indonesia Eximbank in order to support the Export-Oriented Small and Medium Enterprises Sector – “PKE UKM”;

This assignment focuses on increasing the export capacity of Small and Medium Enterprises (SMEs). Through this KMK, the allocated PMN funds was Rp1 trillion for all economic/commodity sectors with a maximum financing interest of 6% pa. From 2020 to 31 December 2021, this assignment has been distributed to 64 SME borrowers with a total accumulated disbursement of Rp341 billion.

4. KMK No. 428/KMK.08/2020 dated 23 September 2020 concerning NIA to Indonesia Eximbank to Support the Indonesian Aviation Industry – “PKE Industri Penerbangan”;

Based on this KMK, the allocated PMN fund of Rp1 trillion was allocated to strengthen the transportation and warehousing economic sector, particularly air transportation services with the criteria of exporters in accordance with the requirements in the KMK.

5. KMK No. 410/KMK.08/2021 dated 21 September 2021 an amendment to the KMK No. 526/KMK.08/2020 regarding the NIA to Indonesia Eximbank to provide Trade Finance facilities in order to support the recovery of national exports – “PKE Trade Finance”;

This NIA is focused on supporting the industrial sector or key export commodities so as to keep growing amidst of global challenges due to the COVID-19 pandemic. There are 13 superior commodities/products, including rubber products, coffee products (including specialty coffee), furniture, footwear products, processed foods (including fish products, shrimp, seafood), textiles and textile products, jewellery/gem products, tea products. and spices, wood products, handicraft products, electronic products, chemical products and automotive products (including auto parts). The allocation of PMN funds for PKE Trade Finance was Rp1 trillion with an assignment period of up to 31 December

## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

### Operational Review Per Business Segment

Desember 2022. Sampai dengan 31 Desember 2021, penugasan ini telah disalurkan kepada 16 eksportir, yaitu 12 eksportir segmen UMBE (Usaha Menengah Berorientasi Ekspor) dan 4 eksportir Korporasi Besar dengan total akumulasi *Disbursement* mencapai sebesar Rp1,13 triliun.

- KMK No. 406/KMK.08/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Untuk Menyediakan Pembiayaan Ekspor Dalam Rangka Mendukung Alat Transportasi – “PKE Alat Transportasi”;

Penugasan ini dimaksudkan untuk mendukung pengembangan industri manufaktur dengan produk/komoditas strategis antara lain perkapalan, perkeretaapian, kedirgantaraan, alat transportasi khusus, komponen alat transportasi dan/atau jasa pendukung alat transportasi. Alokasi dana PMN untuk PKE Alat Transportasi ini sebesar Rp400 miliar dengan jangka waktu penugasan 5 (lima) tahun hingga 31 Desember 2026. Sosialisasi PKE Alat Transportasi telah dilaksanakan pada akhir tahun 2021 yang dihadiri oleh beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor manufaktur alat transportasi. Pada tahun 2022, alokasi dana PMN untuk PKE Alat Transportasi akan ditambah sebesar Rp1,1 triliun, sehingga total alokasi dana menjadi Rp1,5 triliun.

#### Rencana Penugasan Khusus tahun 2022

Fokus strategi Penugasan Khusus pada tahun 2022 adalah “Proaktif dalam Bersinergi Menjalankan Mandat”, dengan mengoptimalkan fungsi *product specialist*, *business development* dan *stakeholder relationship*. Adapun ringkasan strategi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Meningkatkan pelaksanaan fungsi *Product Specialist* & *Business Development*
  - Meningkatkan *customer base* sesuai dengan target market sesuai dengan masing-masing program NIA;
  - Melakukan sosialisasi bulanan bersama Kementerian/Lembaga dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi/Kota dalam rangka menggali potensi pipeline;

2022. As of 31 December 2021, this assignment has been distributed to 16 exporters comprising of 12 exporters of the UMBE (Export-Oriented Medium Enterprise) segment and 4 large corporate exporters with a total accumulated Disbursement of Rp1.13 trillion.

- KMK No. 406/KMK.08/2021 dated 21 September 2021 concerning NIA to Indonesia Eximbank to Provide Export Financing in the Framework of Supporting Transportation Equipment – “PKE Alat Transportasi”;

This assignment is intended to support the development of manufacturing industry with strategic products/commodities including shipping, railways, aerospace, special means of transportation, components of transportation equipment and/or supporting services of transportation equipment. The allocation of PMN funds for PKE Alat Transportasi was Rp400 billion with an assignment period of 5(five) years until 31 December 2026. The socialization of PKE Alat Transportasi has been organized at the end of 2021 which was attended by several State-Owned Enterprises (SOEs) which engage actively in the transportation equipment manufacturing. In 2022, the PMN funds allocation of PKE Alat Transportasi will be increased by Rp1.1 trillion, bringing the total allocation of funds to Rp1.5 trillion.

#### National Interest Account Plan for 2022

The focus of NIA strategy in 2022 is to be “Proactive in Synergizing to Implement the Mandate”, by optimizing the functions of product specialists, business development and stakeholder relationships. The summary of the strategy can be explained as follows:

- Improve the implementation of the Product Specialist & Business Development function
  - Increase the customer base in accordance with the target market in accordance with each of NIA program;
  - Organize monthly socialization with Ministries/ Agencies and Provincial/City Industry and Trade Offices in order to explore the potential of the pipeline;

## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

Operational Review Per Business Segment

- c. Melakukan disiplin *pipeline-monitoring* secara *periodic* dan mengimplementasikan *Pipeline Monitoring Dashboard*;
  - d. Melakukan *joint-marketing* bersama dengan *business unit* dalam memasarkan program NIA;
  - e. Memastikan pelaksanaan program NIA telah sesuai dengan ketentuan PMK dan KMK NIA;
  - f. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal yang berkaitan dengan pelaksanaan program NIA.
2. Meningkatkan pelaksanaan fungsi *Stakeholder Relationship*
- a. Melakukan pendampingan kepada Kementerian/ Lembaga Pengusul dalam penyusunan usulan program INA baru;
  - b. Memberikan dukungan atas pelaksanaan kegiatan Komite PKE Kementerian/Lembaga yang menggunakan Dana Operasional PKE (antara lain Sosialisasi, FGD Renstra, Site Visit, dll);
  - c. Melakukan *monitoring-evaluation* dan pelaporan periodik atas pelaksanaan program PKE.
- c. Conduct periodical pipeline-monitoring discipline and implement Pipeline Monitoring Dashboard;
  - d. Carry out joint-marketing together with business units in marketing the NIA program;
  - e. Ensure that the NIA program implementation in accordance with the provisions of the PMK and KMK NIA;
  - f. Coordinate with external parties related to the NIA program implementation.
2. Improve the implementation of the Stakeholder Relationship function
- a. Provide assistance to the Proposing Ministries/ Agencies in the preparation of new PKE program proposals;
  - b. Provide support for the implementation of the activities of PKE Committee of Ministries/ Agencies using PKE Operational Funds (among others, Socialization, Strategic Plan FGD, Site Visits, etc.);
  - c. Conduct monitoring-evaluation and periodic reporting on the implementation of the PKE program.

## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

Operational Review Per Business Segment

### **PENUGASAN PROGRAM INVESTASI PEMERINTAH**

Government Investment Program Assignment

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.06/2020, Investasi Pemerintah PEN (IP PEN) adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagai bagian dari Program PEN yaitu rangkaian kegiatan untuk pemulihian perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK.06/2020, LPEI ditugaskan sebagai Pelaksana Investasi untuk melaksanakan IP PEN kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (PTPN) selaku Penerima Investasi.

Pemberian IP PEN kepada PTPN dengan limit investasi sebesar Rp4 triliun dengan masa penyaluran selama 3 tahun (2020 – 2023) dan jangka waktu investasi selama 10 tahun (2030) sebagaimana diatur di dalam Perjanjian sebagai berikut :

- Perjanjian Pelaksanaan Investasi antara Kementerian Keuangan dan LPEI tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional kepada PTPN III No. PRJ-16/KN/2020 – 595/PKS/12/2020 tanggal 28 Desember 2020.
- Akta Perjanjian Pemberian Dana Investasi Pemerintah Republik Indonesia kepada PTPN dalam Bentuk Pinjaman Subordinasi dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional No. 75 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dan antara LPEI dengan PTPN III di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

Dalam melaksanakan Investasi Pemerintah PEN, Pelaksana Investasi bertugas:

- a. Melakukan penilaian atas usulan dukungan Investasi Pemerintah PEN.

As regulated in the Minister of Finance Regulation No. 118/PMK.06/2020, Government Investment PEN (IP PEN) is the placement of a number of funds and/or financial assets in the long term investment in the form of shares, debt securities, and/or direct investment in order to obtain economic, social and/or benefits or other benefits as part of PEN Program. The PEN Program is consisting of a series of activities for the recovery of national economy as part of the state financial policy implemented by the Government to accelerate the mitigation of COVID-19 pandemic and/or to handle threats endangering the national economy and/or financial system stability, as well as to protect the national economy.

Through the Decree of the Minister of Finance No. 545/KMK.06/2020, Indonesia Eximbank is assigned as an Investment Executor to implement IP PEN to PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (PTPN) as the Investment Beneficiary.

The disbursement of IP PEN to PTPN with an investment limit of Rp4 trillion and a disbursement period of 3 years (2020 – 2023), as well as an investment period of 10 years (2030) as stipulated in the Agreement as follows:

- Investment Implementation Agreement between the Ministry of Finance and Indonesia Eximbank regarding the Implementation of Government Investment for the National Economic Recovery Program to PTPN III No. PRJ-16/KN/2020 – 595/PKS/12/2020 dated 28 December 2020.
- Deed of Agreement on Provision of Investment Funds by the Government of the Republic of Indonesia to PTPN through Subordinated Loan for the National Economic Recovery Program No. 75 dated 28 December 2020 signed by and between Indonesia Eximbank and PTPN III before Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta.

In implementing the Government Investment of PEN, the Investment Manager is tasked to:

- a. Assess the proposed support for PEN Government Investment.

## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

### Operational Review Per Business Segment

- b. Melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal atas rencana pemantauan.
- c. Mengelola dan menempatkan dana yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal atas Tindakan yang diperlukan dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN.
- e. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal atas Tindakan yang diperlukan dalam hal terjadi penyimpangan penggunaan dana dan/atau kegagalan Penerima Investasi dalam pemenuhan kewajibannya berdasarkan rencana pemantauan.
- f. Memberikan rekomendasi mengenai restrukturisasi dan/atau penyelesaian Investasi Pemerintah PEN, yaitu menetapkan restrukturisasi atas Investasi Pemerintah PEN dan melakukan penyelesaian Investasi PEN selain penyelesaian investasi yang telah diatur dalam perjanjian antara Pelaksana Investasi dan Penerima Investasi.
- g. Menyampaikan laporan atas pelaksanaan Investasi Pemerintah kepada Direktur Jenderal.

#### Strategi dan tantangan Tahun 2021

Strategi yang dilakukan dalam melaksanakan Investasi Pemerintah adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi baik secara offsite (penyampaian laporan baik secara bulanan, semesteran dan laporan Key Achievement Indicators) dan onsite (mengunjungi anak usaha PTPN yang mendapatkan dana IP PEN agar dapat mengetahui manfaat dari dana IP PEN secara langsung) serta rapat pemantauan pelaksanaan IP PEN bersama dengan Dirjen DJKN, Kementerian BUMN dan PTPN

#### Kegiatan dan Realisasi Program 2021

Selama tahun 2021 LPEI selaku Pelaksana Investasi IP PEN telah merealisasikan hal-hal sebagai berikut:

- Penyaluran IP PEN kepada Penerima Investasi sebesar Rp1,751 triliun atau 44% dari limit Investasi.
- Melakukan pengawasan secara onsite kepada beberapa lokasi perkebunan dan pabrik kelapa sawit dan tebu/gula di 12 grup usaha Penerima Investasi yang menerima dana IP PEN.
- Melakukan fungsi pengawasan offsite dan memberikan laporan hasil pengawasan kepada Pemberi Investasi, sebagai berikut :

- b. Conduct an assessment and provide recommendations to the Director General on the monitoring plan.
- c. Manage and place funds that have been set by the Minister of Finance for the implementation of PEN Government Investments.
- d. Provide recommendations to the Director General on the necessary actions in the event of a dispute in the implementation of PEN Government Investment.
- e. Provide recommendations to the Director General regarding the necessary actions in the event of irregularities in the use of funds and/or failure of the Investment Beneficiary in fulfilling its obligations based on the monitoring plan.
- f. Provide recommendations on restructuring and/or settlement of PEN Government Investments, namely determining the restructuring of PEN Government Investments and completing PEN Investments other than investment settlements that have been regulated in the agreement between the Investment Executor and the Investment Beneficiary.
- g. Submit a report on the implementation of Government Investment to the Director General.

#### Strategies and Challenges in 2021

The strategies executed in implementing Government Investment is to monitor and evaluate either offsite (submission of reports both monthly, semi-annually and Key Achievement Indicators reports) or onsite (visiting PTPN subsidiaries receiving IP PEN funds in order to find out the benefits of IP PEN funds directly) as well as monitoring meetings on the implementation of IP PEN together with the Director General of DJKN, Ministry of SOEs and PTPN.

#### 2021 Program Activities and Realization

During 2021, Indonesia Eximbank as the IP PEN Investment executor has realized the following:

- Disbursement of IP PEN to Investment Beneficiaries of Rp1.751 trillion or 44% of Investment limit.
- Conducted onsite supervision of several plantation locations and palm oil and sugar cane/sugar mills in the 12 investment recipient business groups that received IP PEN funds.
- Performed offsite supervisory functions and provided reports on the supervision results to the Investment Provider, as follows:

## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

### Operational Review Per Business Segment

- Laporan Pelaksanaan IP PEN periode bulan Januari – Desember 2021
- Laporan IP PEN periode Semester I dan II Tahun 2021
- Laporan Realisasi Pencapaian Key Achievement Indikator periode Juni dan September 2021

- Report on the Implementation of IP PEN for the period of January – December 2021
- IP PEN Report for Semester I and II 2021
- Report on the Realization of Key Achievement Indicators for the period of June and September 2021

#### Program Investasi Pemerintah tahun 2022

Program investasi Pemerintah pada tahun 2022 diantaranya adalah sebagai berikut:

- Melanjutkan penyaluran Investasi Pemerintah PEN kepada Penerima Investasi sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja periode tahun 2022.
- Melakukan fungsi penilaian atas permohonan Penerima Investasi untuk realokasi Investasi Pemerintah PEN sehubungan dengan divestasi salah satu bisnis Penerima Investasi serta melakukan monitoring dan pengawasan proses pelaksanaan divestasi tersebut.
- Melakukan fungsi pengawasan atas penggunaan dana Investasi Pemerintah PEN dan realisasi pencapaian indikator kinerja Penerima Investasi yang telah ditetapkan serta memberikan hasil pengawasan kepada Kementerian Keuangan RI selaku Pemberi Investasi sesuai secara berkala.

#### Government Investment Program in 2022

The Government investment program in 2022 among others are as follows:

- Continue the distribution of PEN Government Investment to Investment Recipients in accordance with the 2022 Budget Plan.
- Assessment on the application of Investment Beneficiary for the reallocation of the PEN Government's Investment in connection with the divestment of one of the Investment Beneficiary's businesses as well as monitor and supervise the divestment process.
- Conduct a supervisory function on the use of the Government's Investment Fund of PEN and the realization of performance indicators achievement of the Investment Beneficiary that have been set and regularly submit monitoring results to the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia as the Investment Provider.

# PEMBIAYAAN

Financing



.02

## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

### Operational Review Per Business Segment

Ekspor dan impor adalah salah satu komponen penting yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bahkan di saat pengeluaran konsumsi melemah akibat daya beli masyarakat yang lemah karena pandemi, ekspor barang mampu menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

Komitmen pemerintah dalam mendukung perdagangan luar negeri Indonesia diwujudkan diantaranya melalui pendirian LPEI berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2009. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa LPEI adalah lembaga pembiayaan independen yang dibentuk untuk mempercepat laju pertumbuhan perdagangan luar negeri Indonesia dan meningkatkan daya saing pelaku bisnis melalui fasilitas Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi dan Jasa lainnya.

LPEI memberikan Pembiayaan dalam bentuk pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada badan usaha, baik badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, termasuk perorangan yang melakukan kegiatan eksport atau kegiatan penunjang eksport yang berdomisili di dalam atau luar wilayah Negara Republik Indonesia. Pembiayaan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, antara lain pembiayaan untuk pengadaan bahan baku dan/atau bahan penolong, pembelian bahan baku dari luar negeri, penggantian dan/atau pemeliharaan komponen dan sarana produksi. Pembiayaan dalam bentuk pembiayaan investasi, antara lain pembiayaan untuk modernisasi mesin, ekspansi usaha termasuk pembangunan dan perluasan pabrik baru, pembiayaan proyek, misalnya pembangunan proyek konstruksi, infrastruktur, kegiatan eksplorasi dan eksloitasi, serta industri pendukung di dalam dan di luar negeri. Fasilitas pembiayaan modal kerja dan/atau investasi juga dapat diberikan kepada pembeli di luar negeri untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia (*buyer's credit*).

Export and import are one of the important components contributing to Indonesia's economic growth. Even in the time of weakening consumer expenditure amidst declining purchasing power of the people due to the pandemic, exports of goods were able to show a significant contribution to the Indonesian economy.

The government's commitment to supporting Indonesia's foreign trade is embodied through the establishment of Indonesia Eximbank based on Law No. 2 Year 2009. The law stipulates that Indonesia Eximbank is an independent financing institution established to accelerate Indonesia's foreign trade growth and increase the competitiveness of business practitioners through Financing, Guarantee, Insurance Facilities and Other Services.

Indonesia Eximbank provides financing such as working capital and/or investment financing to business entities, both business entities of legal entities or non-legal entities, including individuals who conduct export activities or export support activities that are domiciled within or outside the territory of the Republic of Indonesia. The working capital financing includes financing for the procurement of raw materials and/or auxiliary materials, purchase of raw materials from abroad, replacement and/or maintenance of components and production facilities. The investment financing consists of financing for machine modernization, business expansion including construction and expansion of new factories, project financing, for example development of construction projects, infrastructure, exploration and exploitation activities, as well as supporting industries at home and abroad. Working capital and/or investment financing facilities can also be provided to overseas buyers to purchase goods and services produced in Indonesia (*buyer's credit*).

## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

### Operational Review Per Business Segment

#### Strategi dan Tantangan Tahun 2021

Selama tahun 2021, LPEI menjalankan strategi dan program kerja sebagai berikut:

##### i. Pipeline Management

###### 1) Target Market

Pembiayaan UKM LPEI dilakukan dengan program target market untuk menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UKM yang lebih luas baik dari hulu ke hilir. Beberapa program dilakukan antara lain melalui pembentukan *linkage program* baik inti plasma maupun melalui rantai pasok. Selain itu, LPEI juga fokus pada komoditas unggulan wilayah untuk meningkatkan nilai ekspor dari berbagai wilayah di Indonesia. LPEI juga berkolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait untuk menyalurkan pembiayaan UKM dengan program sosialisasi pembiayaan ekspor untuk menjaring pelaku usaha UKM yang memiliki potensi ekspor. Untuk penyaluran pembiayaan UKM yang lebih luas LPEI juga bekerja sama dengan lembaga keuangan yang fokus pada pengembangan UKM.

###### 2) Screening

Seleksi pelaku usaha UKM juga dilakukan dengan beberapa cara antara lain *trade checking* eksportir, kesesuaian dengan *check list* program pembiayaan UKM dan *screening* lainnya untuk memastikan pelaku usaha UKM yang mendapatkan pembiayaan UKM LPEI telah sesuai dengan ketentuan.

###### 3) Disiplin weekly pipeline monitoring dan structuring facility

Monitoring hasil seleksi dimaksud kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan struktur fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan pelaku ekspor.

##### ii. Fokus pada program pemerintah yang dibutuhkan eksportir

Dalam menyalurkan pembiayaan UKM, LPEI fokus pada penyaluran program pemerintah antara lain:

- 1) PKE UKM
- 2) PKE TFC (*trade finance*)
- 3) PKE KWS (*kawasan*)

#### 2021 Strategy and Challenges

Throughout 2021, Indonesia Eximbank implemented the following strategies and work programs:

##### i. Pipeline Management

###### 1) Target Market

Indonesia Eximbank SME financing was carried out with a target market program for a wider range of end-to-end SME communities. Several programs were carried out, among others, through financing for linkage programs, both nucleus plasma and supply chains. Moreover, Indonesia Eximbank also focused on regional flagship commodities to increase the value of exports from various regions in Indonesia. Indonesia Eximbank also collaborated with relevant Ministries and Institutions to disburse SME financing with an export financing socialization program to attract SME business players with export potential. For a wider disbursement of SME financing, Indonesia Eximbank also cooperated with financial institutions focusing on SME development.

###### 2) Screening

The selection of SME business players was also conducted in several ways, including *trade checking* exporters, compliance with the SME financing program check list and other screenings to ensure that SME business players receiving Indonesia Eximbank SME financing are in compliance with the stipulations.

###### 3) Disciplined weekly pipeline monitoring and structuring facility

Monitoring the results of the selection was then followed up with the creation of a facility structure that is in accordance with the needs of export practitioners.

##### ii. Focused on government programs required by exporters

In disbursing SME financing, Indonesia Eximbank focused on the disbursement of government programs, such as:

- 1) SME PKE
- 2) PKE TFC (*trade finance*)
- 3) PKE KWS (*region*)

## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

### Operational Review Per Business Segment

#### iii. Process Management

Dalam rangka penyempurnaan proses pemberian pembiayaan UKM, maka dilakukan beberapa langkah untuk memastikan proses berjalan dengan prudent. Pertama adalah menentukan *Risk Acceptance Criteria* pembiayaan UKM. Yang kedua adalah penggunaan *Integrated Financing Origination System* (IFOS) agar proses pembiayaan dilakukan transparan dan sesuai dengan tata kelola yang baik. Yang ketiga adalah menyesuaikan proses analisa pembiayaan UKM yang khusus dan komprehensif mengingat pelaku usaha UKM mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pelaku usaha yang lebih besar. Selain itu dilakukan pula penyempurnaan *terms and conditions* sesuai UKM agar penyaluran tetap prudent dan sesuai dengan tata kelola yang baik.

#### iv. Approval Management

Penyempurnaan proses pembiayaan juga dilakukan pula pada tahap persetujuan pembiayaan. Proses persetujuan pembiayaan dilakukan melalui Komite Pembiayaan yang berjenjang. Untuk pembiayaan UKM dengan limit tertentu dilakukan melalui komite Pemutus Limit Individu (PLI). Adapun selain komite PLI, untuk nilai pembiayaan yang lebih besar dilakukan melalui komite Pembiayaan terpusat.

#### v. Monitoring and Maintenance Management

Penyaluran pembiayaan tentu memerlukan pemantauan (*monitoring*) yang baik agar kualitas pembiayaan tetap terjaga. LPEI telah melakukan monitoring debitur yang lebih ketat secara berkala sebagai langkah awal menjaga kualitas pembiayaan. Selanjutnya LPEI juga bekerja sama dengan lembaga keuangan lain untuk memonitor arus kas debitur serta pengembalian dana dari debitur melalui sistem cash management yang dapat dipantau real time. Selain itu untuk pembiayaan yang tidak berkinerja baik, LPEI melakukan joint effort antara unit bisnis dengan unit pembiayaan bermasalah untuk mengelola, memperbaiki serta meningkatkan kualitas pembiayaan.

#### vi. Penguatan SDM

Dalam mewujudkan layanan pembiayaan UKM yang lebih baik, maka LPEI melakukan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkesinambungan. Penguatan SDM dilakukan melalui peningkatan kapabilitas dengan *training* dan *coaching*. Selain itu

#### iii. Process Management

To improve the process of providing SME financing, several actions were performed to ensure the process runs prudently. The first was to determine the Risk Acceptance Criteria for SME financing. The second was the use of Integrated Financing Origination System (IFOS) hence the financing process is carried out transparently and in accordance with good governance. The third was to adjust the SME financing analysis processes that are specific and comprehensive considering that SME business players have different characteristics from larger business practitioners. Moreover, the terms and conditions were also improved according to SMEs, hence the distribution remains prudent and in accordance with good governance.

#### iv. Approval Management

Improvements on the financing process were also executed at the financing approval stage. The financing approval process was carried out through a tiered Financing Committee. Financing for SMEs with a certain limit was carried out through the Individual Limit Decision Committee (PLI). In addition to the PLI committee, the larger financing values was carried out through a centralized Financing committee.

#### v. Monitoring and Maintenance Management

Financing disbursement certainly requires a good monitoring so as to maintain financing quality. Indonesia Eximbank has conducted more stringent monitoring of borrowers regularly as a first step in maintaining the quality of financing. Furthermore, Indonesia Eximbank also cooperated with other financial institutions to monitor borrowers cash flows and refund funds from borrowers through a cash management system that can be monitored in real time. In addition to non-performing financing, Indonesia Eximbank conducted a joint effort between business units and non-performing financing units to manage, improve and enhance the financing quality.

#### vi. HR Strengthening

In realizing a better SME financing services, Indonesia Eximbank strengthened sustainable Human Resources (HR). Strengthening of human resources was executed through capacity building such as training and coaching. Moreover, strengthening of

## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

### Operational Review Per Business Segment

penguatan SDM juga dilakukan dengan program *joint effort* pembiayaan bermasalah untuk meningkatkan pemahaman pemberian pembiayaan yang lebih komprehensif.

Strategi yang ditetapkan tersebut berkontribusi dalam menghadapi tantangan di tahun 2021 berupa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Adanya pembatasan sosial berdampak pada distribusi ekonomi yang lebih luas. Pandemi juga telah menurunkan tingkat transaksi dan pada akhirnya menurunkan gerak perekonomian Indonesia. Hal ini juga menyebabkan percepatan Pemulihian Ekonomi Nasional yang tidak sesuai dengan rencana. Selanjutnya pandemi juga telah memberikan tantangan baru yaitu proses kerja yang dilakukan secara digital atau online. Proses kerja digital memerlukan kesiapan infrastruktur yang merata untuk menjalankannya secara optimal.

#### Kinerja Tahun 2021

##### • **Pembiayaan Korporasi**

Pembiayaan korporasi mencapai Rp54,4 triliun, turun 8% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp59,3 triliun. Penurunan tersebut antara lain selain masih terdampak adanya pandemi pada segmen korporasi, juga dilakukan *reprofiling* atau menata ulang atas mandat pada existing segmen Korporasi (penajaman mandat). Namun demikian pembiayaan korporasi masih menyumbang 64,8% dari total pembiayaan. Disisi lain, jumlah *run off* segmen korporasi yang sebesar Rp11,4 triliun harus dicarikan gantinya agar total *outstanding* dapat terjaga sehingga dapat berkontribusi dalam perhitungan *development impact* Pembiayaan LPEI terhadap ekspor barang. Di tahun 2021, pembiayaan korporasi juga berhasil menjaga tidak ada penambahan NPL baru di segmen korporasi.

##### • **Pembiayaan UKM Ekspor (UKME)**

Pembiayaan UKM LPEI tahun 2021 secara neto meningkat sebesar Rp248 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan ini dilakukan dengan strategi yang komprehensif dan fokus pada program pemerintah. Peningkatan debitur baru UKM mencapai 75 debitur di tahun 2021.

Selain itu, penyaluran pembiayaan UKM melalui program PKE mencapai Rp299 miliar di tahun 2021 dan untuk

human resources was also carried out with a joint effort program for non-performing financing to improve a more comprehensive understanding of financing provision.

The aforementioned strategies contributed in addressing the ongoing COVID-19 pandemic challenges in 2021. Social restrictions certainly have an impact on a wider economic distribution. The pandemic has also reduced the level of transactions and ultimately limited the movement of the Indonesian economy. This has also led to an acceleration of National Economic Recovery that was not in accordance with the plan. Furthermore, the pandemic also provides new challenges, such as digital or online work processes. Digital work processes require equitable infrastructure readiness to be performed optimally.

#### 2021 Performance

##### • **Corporate Financing**

Corporate financing reached Rp54.4 trillion, 8% decrease from the previous year of Rp59.3 trillion. The decrease occurred due to the sharpening of mandate carried out by the institution during 2021. However, corporate financing still accounted for 64.8% of total financing. On the other hand, the amount of run-off for the corporate segment amounted to Rp11.4 trillion must be replaced so as to maintain total outstanding, hence able to contribute in calculating the developmental impact of Indonesia Eximbank Financing to the export of goods. In 2021, corporate financing also managed to maintain no new NPL additions in the corporate segment.

##### • **Export SME Financing**

Indonesia Eximbank SME financing in 2021 in net increased by Rp248 billion when compared to 2020. This increase is attained with a comprehensive strategy and focus on government programs. The increase in new SME debtors reach 75 borrowers in 2021.

In addition, the disbursement of SME financing through the PKE program reached Rp299 billion in 2021 and the

## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

Operational Review Per Business Segment

program linkage (inti plasma dan supply chain financing) mencapai Rp585 miliar pada tahun 2021. Penyaluran pembiayaan linkage program telah memberikan manfaat kepada 2,851 petani melalui inti plasma, 1,300 petani melalui joint financing berkolaborasi dengan lembaga keuangan serta 28 petani melalui program kemitraan. Total penerima manfaat UKM melalui linkage program mencapai 4,179 petani yang mendukung kegiatan ekspor.

### • Pembiayaan Syariah

Outstanding pembiayaan tahun 2021 mencapai Rp12,4 triliun. Profil nasabah berdasarkan jenis industri terdiri dari 57,20% perkebunan, pengolahan, perdagangan Sawit & CPO; 16,20% Perkebunan dan pengolahan hasil perkebunan; 11,01% pertambangan; 5,35% Jasa angkutan laut dan galangan kapal; 10,26% lain-lain.

### Strategi Tahun 2022

#### • Pembiayaan Korporasi

Strategi segmen korporasi tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan akan disalurkan pada sektor-sektor industri potensial yang berorientasi ekspor yang menjadi unggulan pemerintah.
- b. Pembiayaan akan difokuskan menggunakan skema pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor (PKE). PKE ini adalah bagian dari program pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional yang dananya berasal dari pemerintah yang disalurkan melalui LPEI untuk para eksportir.
- c. Berdasarkan basis debitur korporasi yang dipunyai, LPEI berupaya menggali potensi dari debitur-debitur existing/Perusahaan di Grup usaha debitur yang belum menjadi debitur LPEI yang selama ini memiliki rekam jejak yang baik untuk dapat menjadi debitur LPEI.
- d. LPEI juga akan terus memberi perhatian besar pada komunitas para eksportir, seperti grup perusahaan yang berada dalam satu mata rantai bisnis, mulai dari pemasok hingga distributor (*supply chain financing*). LPEI akan menawarkan layanan serta solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan masing-masing komunitas diantaranya pembiayaan linkage program - *supply chain financing*.
- e. Membangun kolaborasi dengan para debitur dan calon debitur terus akan dilakukan LPEI,

linkage program (core plasma and supply chain financing) reached Rp585 billion in 2021. The disbursement of financing for the linkage program has benefited 2,851 farmers through plasma nucleus, 1,300 farmers through joint financing in collaboration with financial institutions and 28 farmers through a partnership program. The total beneficiaries of SMEs through the linkage program reached 4,179 farmers supporting export activities.

### • Sharia Financing

Outstanding financing in 2021 reached Rp12.4 trillion. Customer profile based on industry type consisting of 57.20% plantation, processing, palm oil & CPO trading; 16.20% Plantation and processing of plantation products; 11.01% mining; 5.35% Sea transportation and shipbuilding services; and 10.26% for others.

### 2022 Strategy

#### • Corporate Financing

The corporate segment strategy for 2022 is as follows:

- a. Growth will be channelled to potential export-oriented industrial sectors as the government's flagship.
- b. Financing will be focused on using the Export Special Assignment (PKE) financing scheme. This PKE is part of the government's program in the context of National Economic Recovery funded by the government which are disbursed through Indonesia Eximbank for exporters.
- c. Based on its corporate borrower base, Indonesia Eximbank seeks to explore the potential of existing borrowers/companies in their business group that have not yet become borrowers with a good track record that shall become Indonesia Eximbank borrowers.
- d. Indonesia Eximbank will also continue to pay great attention to the exporter community, such as group companies that are under one business chain, from suppliers to distributors (*supply chain financing*). Indonesia Eximbank will offer appropriate services and solutions based on the needs of each community, including linkage program financing - *supply chain financing*.
- e. Indonesia Eximbank will continue to collaborate with borrowers and prospective borrowers,

## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

### Operational Review Per Business Segment

diantaranya dengan menawarkan produk dan solusi yang lebih komprehensif bagi para eksportir. Produk yang ditawarkan, selain pembiayaan adalah produk asuransi, penjaminan dan *trade finance* baik menggunakan skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) atau non PKE dan juga layanan produk Jasa Konsultasi bagi para eksportir antara lain CPNE, *Trade Expo* dan lainnya.

#### • **Pembiayaan UKM**

Rencana kerja tahun 2022 untuk pembiayaan UKM difokuskan antara lain pada akselerasi pertumbuhan UKM dan memperkuat kualitas pembiayaan.

Untuk akselerasi pertumbuhan UKM akan melanjutkan strategi program target market untuk menyasar pelaku UKM yang lebih luas. Hal ini dilakukan dengan memberikan fasilitas pembiayaan linkage program baik inti plasma maupun melalui rantai pasok. Selanjutnya LPEI tetap fokus pada peningkatan ekspor untuk komoditas unggulan sesuai dengan wilayah dimana debitur berada. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai ekspor yang beragam dari berbagai wilayah di Indonesia.

Selain itu LPEI juga melanjutkan kolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait untuk menyalurkan pembiayaan ekspor terkait UKM. Sinergi dengan Kementerian dan Lembaga memberikan jangkauan pelayanan yang lebih luas dan dapat menjaring pelaku usaha UKM yang memiliki potensi ekspor. Untuk perluasan penyaluran pembiayaan UKM lainnya dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga keuangan yang fokus pada pengembangan UKM.

Selain strategi program di atas, LPEI juga tetap memfokuskan pada pelaksanaan mandat utamanya menjalankan program PKE dari Pemerintah. Beberapa program yang diamanatkan antara lain PKE UKM, PKE TFC dan PKE KWS.

Dalam rangka mempertahankan kualitas pembiayaan UKM, LPEI akan menggunakan *early warning system* pembiayaan UKM melalui disiplin monitoring pembiayaan serta kunjungan berkala untuk memantau kinerja debitur. Selanjutnya LPEI juga dapat memberikan pendampingan untuk memperbaiki kinerja debitur

including by offering more comprehensive products and solutions for exporters. The products offered, apart from financing, are insurance, guarantee and trade finance products using either the Export Special Assignment (PKE) or non-PKE schemes as well as Advisory for exporters, including CPNE, *Trade Expo* and others.

#### • **SME Financing**

The 2022 work plan for SME financing is focused, among others, on accelerating SME growth and strengthening the quality of financing.

To accelerate its growth, SME will continue the target market program strategy that aim at targeting a wider range of SME players, by providing linkage program financing facilities, both core plasma and through the supply chain. Furthermore, Indonesia Eximbank will continue to focus on increasing exports for flagship commodities according to the region where the borrower is located. This is intended to increase the value of various exports from various regions in Indonesia.

Moreover, Indonesia Eximbank also continues to collaborate with related Ministries and Institutions to disburse export financing related to SMEs. A synergy with Ministries and Institutions provides a wider range of services and can attract SME business communities with export potential. To expand the distribution of other SME financing, the collaboration is carried out with financial institutions that focus on SME development.

Apart from the above program strategies, Indonesia Eximbank also continues to focus on implementing its main mandate to carry out the PKE program from the Government. Some of the mandated programs are PKE UKM, PKE TFC and PKE KWS.

To maintain the quality of SME financing, Indonesia Eximbank use an early warning system for SME financing through a disciplined financing monitoring and periodic visits to monitor borrowers' performance. Furthermore, Indonesia Eximbank can also provide assistance to improve the non-performing borrowers by evaluating the

## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

### Operational Review Per Business Segment

yang kurang baik dengan mengevaluasi kinerja dan merestrukturisasi pembiayaan yang diperlukan guna menjaga kualitas aset.

#### • Pembiayaan Syariah

Strategi pembiayaan syariah tahun 2022 adalah penyusunan dan penyempurnaan infrastruktur & tata kelola diantaranya:

- PTO produk pembiayaan Syariah
- Standar dokumen akad pembiayaan *hawalah, wakalah bil ujrah & qardh*
- Revamp dokumen pembiayaan tahap 2
- Sistem *wakalah bil ujrah & qardh, IMBT, Kafalah bil ujrah*
- PTO PEN Syariah
- Pencatatan sinergi model
- Treasuri mudharabah
- Syariah treasury desk
- Standar format dokumen produk penjaminan Syariah
- Standar format dokumen produk asuransi Syariah
- System penjaminan & asuransi
- Mekanisme penggunaan dana untuk pembiayaan Syariah
- Pembukuan biaya pembiayaan Syariah di laporan keuangan
- *Hard income & balance sheet belongs to business unit & sharia shadowing*
- Pembentukan gugus tugas khusus Syariah
- Struktur Syariah as *product specialist*
- Pembaharuan piagam DPS
- Kebijakan kepatuhan Syariah
- Manual review kepatuhan Syariah
- Outstanding hawalah bil ujrah dan IMBT

performance and restructuring the necessary financing to maintain asset quality.

#### • Sharia Financing

The sharia financing strategy in 2022 focuses on the preparation and improvement of infrastructure & governance amongst others:

- PTO Sharia financing products
- Standard documents for hawalah, wakalah bill ujrah & qardh financing contracts
- Revamp stage 2 financing documents
- System of wakalah bill ujrah & qardh, IMBT, Kafalah bill ujrah
- PTO PEN Sharia
- Synergy model listing
- Mudharabah Treasury
- Sharia treasury desk
- Standard Sharia guarantee product document format
- Standard Sharia insurance product document format
- Guarantee & insurance system
- The mechanism for using funds for Sharia financing
- Bookkeeping of Sharia financing costs in the financial statements
- Hard income & balance sheet belongs to business unit & sharia shadowing
- Establishment of a special Sharia task force
- Sharia structure as product specialist
- DPS charter update
- Sharia compliance policy
- Sharia compliance manual review
- Outstanding hawalah bill ujrah and IMBT

# JASA KONSULTASI

Advisory

.03



## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

### Operational Review Per Business Segment

Jasa Konsultasi yang diberikan LPEI adalah kegiatan yang ditujukan kepada pihak terkait untuk memberi bantuan dan mengatasi hambatan dalam rangka Ekspor serta penyediaan Pembiayaan Ekspor Nasional. Menurut undang-undang No. 2 Tahun 2009 Tentang LPEI, LPEI berfungsi mendukung program ekspor nasional salah satunya melalui bimbingan dan jasa konsultasi kepada bank, lembaga keuangan, eksportir, produsen barang ekspor, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional (KD PEN), yang tertuang pada pasal 6 ayat (1) bahwa PEN mendorong pengembangan usaha pelaku ekspor yang ada dan menghasilkan pelaku ekspor yang baru.

Berdasarkan KD PEN pasal 22 ayat (1) menjelaskan bahwa jasa konsultasi diberikan dalam bentuk konsultasi, pemberdayaan, pengembangan kapasitas, advokasi, dan/atau jasa konsultasi lainnya yang termasuk didalamnya kegiatan dari pendampingan calon eksportir baru.

Value Proposition pelaksanaan Jasa Konsultasi oleh LPEI adalah sebagai berikut:

- Mempermudah Proses Ekspor (terutama UKM).
- Membuka Peluang pasar tujuan ekspor.
- Mendampingi eksportir yang tidak dapat menjangkau perbankan konvensional.
- Berkoordinasi dan bersinergi dengan K/L terkait, BUMN, Bank BUMN dalam mendorong ekspor nasional.
- Menjaga *Financial Sustainability* Lembaga dengan *Fiscal Responsibility*.

Adapun hasil yang diharapkan dari jasa konsultasi ini adalah pelaksanaan mandat dan penguatan persepsi lembaga, pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) yang berkelanjutan, dan meningkatkan *Developmental impact*.

#### Strategi Tahun 2021

Sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung berbagai kegiatan Jasa Konsultasi yang harusnya tatap muka (*offline*) dilakukan dengan cara daring (*online*), diantaranya:

- Pameran TEI dan IFEX dilakukan virtual.

Indonesia Eximbank's Advisory are activities aimed for related parties to provide assistance and overcome obstacles in the context of Exports and the provision of National Export Financing. According to Law No. 2 Year 2009 concerning Indonesia Eximbank, the Institution's function is to support the national export programs, one of which is through guidance and advisory services to the banks, financial institutions, exporters, producers of export goods, particularly micro, small and medium enterprises.

In accordance with Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 43 Year 2019 concerning the Basic Policy of National Export Financing (KD PEN), which is stated in article 6 paragraph (1) that PEN promotes business development of existing export players and develops new export players.

Based on KD PEN article 22 paragraph (1) advisory are provided through consultation, empowerment, capacity building, advocacy, and/or other advisory services which include activities from assisting new prospective exporters.

The Value Proposition for the implementation of Advisory by Indonesia Eximbank is as follows:

- Facilitate the Export Process (especially SMEs).
- Open Opportunities for export destination markets.
- Assist exporters who cannot reach conventional banking.
- Coordinate and synergize with related Ministries/ Agencies, SOEs, SOEs' Bank in promoting national exports.
- Maintain Institutional Financial Sustainability with Fiscal Responsibility.

The expected results from this advisory are the implementation of mandate and strengthening of institutional perceptions, sustainable National Export financing (PEN), and increasing Developmental impact.

#### 2021 Strategy

In connection with the ongoing COVID-19 pandemic, various Advisory activities that should be organized face to face (*offline*) were carried out online, such as:

- TEI and IFEX exhibitions were organized virtually.

## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

Operational Review Per Business Segment

- Pelatihan Ekspor (CPNE, Tematik, Alumni Gathering) menjadi *online*.
- Perluasan akses pasar melalui *Platform E-Commerce Global*.
- Pemetaan dan Pelatihan Desa Devisa dilakukan secara *online*.

- Export Trainings(CPNE, Thematic, Alumni Gathering) were carried out online.
- Market access expansion through the Global E-Commerce Platform.
- Mapping and Training of Foreign Exchange Villages were held online.

### Kinerja Tahun 2021

LPEI berhasil menyelenggarakan 26 pelatihan *capacity building*, dan 21 pelatihan *Coaching Program for New Exporter* (CPNE) sebagai berikut:

### 2021 Performance

Indonesia Eximbank successfully organized 26 capacity building trainings, and 20 trainings of Coaching Program for New Exporter(CPNE) as follows:

#### a. Capacity Building

No	CPNE	Waktu Pelaksanaan Date	Pemangku Kepentingan Stakeholders	Narasumber Interviewees	Jumlah Peserta Number of participants
<b>A. CPNE Solo</b>					
1	CPNE Solo 1( <i>offline</i> )	30-31 Maret/ March	DJBC Jawa Tengah	Nurlaila Fatimah(praktisi eksport)/ export practitioner	35 peserta participants
2	CPNE Solo 2 ( <i>online</i> )	08 Juli/July	DJBC Jawa Tengah	Bastian & Reza ( FTA Center & Export Center Surabaya)	35 peserta participants
3	CPNE Solo 3 ( <i>online</i> )	25-26 Agustus/ August	DJBC Jawa Tengah	Saidil Reza Muda ( Balina Digital)	35 peserta participants
4	CPNE Solo 4 ( <i>offline</i> )	28-29 Oktober/ October	DJBC Jawa Tengah	DJBC, DJP & Internal	35 peserta participants
<b>B. CPNE Denpasar</b>					
5	CPNE Denpasar 1( <i>offline</i> )	27-28 Mei/ May	DJBC Denpasar, DJKN Denpasar	Reza(Export Center Surabaya)	27 peserta participants
6	CPNE Denpasar 2 ( <i>online</i> )	08 Juli/ July	DJBC Denpasar, DJKN Denpasar	Bastian & Reza( FTA Center & Eksport Center Surabaya)	27 peserta participants
7	CPNE Denpasar 3 ( <i>online</i> )	25-26 Agustus/ August	DJBC Denpasar, DJKN Denpasar	Saidil Reza Muda ( Balina Digital)	27 peserta participants
8	CPNE Denpasar 3 ( <i>offline</i> )	17-18 November	DJBC Denpasar	DJBC	27 peserta participants
<b>C. CPNE Medan</b>					
9	CPNE Medan 1( <i>offline</i> )	10 -11 Juni/ June	Wakil Gubernur, Pemerintah Provinsi SUMUT, DJBC SUMUT	Nurlaila Fatimah(praktisi eksport)/ export practitioner	25 peserta participants
10	CPNE Medan 2 ( <i>online</i> )	08 Juli/ July	Pemerintah Provinsi SUMUT, DJBC SUMUT	Bastian & Reza( FTA Center & Eksport Center Surabaya)	25 peserta participants
11	CPNE Medan 3 ( <i>online</i> )	25-26 Agustus/ August	Pemerintah Provinsi SUMUT, DJBC SUMUT	Saidil Reza Muda ( Balina Digital)	25 peserta participants
12	CPNE Medan 4 ( <i>offline</i> )	21-22 Oktober/ October	Pemerintah Provinsi SUMUT, DJBC SUMUT	DJBC, Kemenperin, & Internal	25 peserta participants

## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

Operational Review Per Business Segment

No	CPNE	Waktu Pelaksanaan Date	Pemangku Kepentingan Stakeholders	Narasumber Interviewees	Jumlah Peserta Number of participants
<b>D. Tematik   Tematic</b>					
13	CPNE Tematik Kendal ( <i>online</i> )	22-23 Juni/ June	Pemkab Kendal	FTA Center Semarang	50 peserta participants
14	CPNE Tematik Demak ( <i>online</i> )	27-28 Juli/ July	Pemkab Demak	FTA Center Semarang	50 peserta participants
15	CPNE Tematik Bandung ( <i>online</i> )	16-17 September	Pemprov Jabar, FTA bandung	FTA Center Bandung	50 peserta participants
16	CPNE Tematik Manado ( <i>Offline</i> )	28-29 September	Pemprov Sulut, Export Center Surabaya	Export Center Surabaya	50 peserta participants
17	Pelatihan ke 2 CPNE Tematik Kendal	6-7 Oktober/ October	Pemkab Kendal	Sumhaji (praktisi ekspor)/ export practitioner	50 peserta participants
18	CPNE Tematik Demak ( <i>offline</i> )	27-28 Oktober/ October	Pemkab Demak	FTA Center Semarang	50 peserta participants
19	CPNE Tematik Manado ( <i>Offline</i> )	3-4 November	Pemprov Sulut	Rachmat Marpaung	50 peserta participants
20	CPNE Tematik Bandung ( <i>offline</i> )	1-2 Desember/ December	Pemprov Jabar, FTA bandung`	FTA Center Bandung	50 peserta participants
21	CPNE Tematik Semarang ( <i>offline</i> )	16-17 Desember/ December	KADIN Semarang, Pemkot Semarang	Export Center Surabaya	50 peserta participants
<b>Jumlah   Total</b>					<b>322 peserta participants</b>
<b>E. Lainnya   Others</b>					
1	CPNE Tematik Jakarta ( <i>online</i> )	04 Maret/ March	YDBA	Eloy Zalukhu (CAPSTONE)	120 peserta participants
2	CPNE Tematik Alumni Gathering ( <i>online</i> )	29 Juli/ July	Alumni CPNE	Happy Posey (Founder Etobai)	50 peserta participants
3	CPNE Tematik Alumni Gathering ( <i>online</i> )	27 Agustus/ August	Alumni CPNE	Rachmat Marpaung (Aspenku)	75 peserta participants
4	CPNE Tematik Alumni Gathering ( <i>online</i> )	30 November	Alumni CPNE	Adinda (Adisherleather)	52 peserta participants
5	CPNE Tematik Alumni Gathering ( <i>online</i> )	13 Desember/ December	Alumni CPNE	Tengku Irham Kelana (ID SEED	50 peserta participants
<b>Jumlah   Total</b>					<b>347 peserta participants</b>

## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

Operational Review Per Business Segment

### b. Coaching Program for New Exporter (CPNE)

No	Tanggal Date	Produk Products	Tujuan Eksport Export Destination	Volume	Volume
1	Februari February	Sapu Lidi Broom Sticks	India	2 Kontainer Container 40"	Rp217 juta/ million
2	Maret March	Wastafel Batu Sinks made of Stones	Serbia	1 Kontainer Container 40"	Rp260 juta/ million
3	Februari February	Lilin Aromatherapi Aromatherapy Candles	Australia	20 pcs	Rp10 juta/ million
4	Maret March	Lotus Lamp	UEA	1.015 pcs	Rp49 juta/ million
5	Februari February	Ubi Cilembu & Ubi Jepang Cilembu Sweet Potatos & Japanese Sweet Potatos	Singapura Singapore	1 Kontainer Container 20"	Rp170 juta/ million
6	Maret March	Kopi Coffee	Swiss	1kg	Rp5 juta/ million
7	Maret March	Sapu Lidi Broom Sticks	Pakistan	1 Kontainer Container 40"	Rp278 juta/ million
8	April	Betel Nut	Iran	349 Packages	Rp498 juta/ million
9	Mei May	Kopi Coffee	Korea Selatan South Korea	1 Kontainer Container 20"	Rp215 juta/ million
10	Juli July	Furniture	Norwegia	1 Kontainer/ Container	Rp200 juta/ million
11	Juni June	Bawang Goreng Fried Onions	Taiwan	192 pcs	Rp42 juta/ million
12	Mei May	Kopra Copra	Pakistan	1 Kontainer/ Container	Rp400 juta/ million
13	November	Craft	USA	14 pcs	Rp5 juta/ million
14	September	Makanan(Snack)	Vietnam	1 Kontainer/ Container	Rp150 juta/ million
15	November	Gula Semut Brown Sugar	USA	7500 kg	Rp315 juta/ million
16	November	Craf	US	2.5 kg	Rp2 juta/ million
17	Desember December	Furniture	USA	LCL	Rp23 juta/ million
18	Desember December	Pengolahan Ikan Fish Processing	Malaysia	157 kg	Rp17 juta/ million
19	Desember December	Batik	Thailand	25 pcs	Rp7 juta/ million
20	Desember December	Minuman Herbal Herbal Drinks	Singapura Singapore	1kg	Rp1 juta/ million
Jumlah   Total					<b>Rp2,8 miliar/ billion</b>

## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

Operational Review Per Business Segment

### C. Community Development (Desa Devisa)

No	Jenis Kegiatan Activities	Institusi Terkait Related Institutions	Lokasi Location	Jumlah Total
1.	Survei Potensi Program Pengembangan Desa Devisa Rumput Laut, Sidoarjo – Jawa Timur Survey for Potential Development Program of Desa Devisa Rumput Laut, Sidoarjo – East Java	Yayasan Passandra, Koperasi Sumber Mulyo, Dinas KKP Sidoarjo Passandra Foundation, Sumber Mulyo Cooperatives, KKP Office Sidoarjo	Sidoarjo, Jawa Timur/ East Java	1 Desa/ Village
2	Keikutsertaan dalam <i>Global CSR Awards 2021</i> – Kategori <i>Environmental Excellent</i> Participation in the <i>Global CSR Awards 2021</i> – Category of <i>Environmental Excellent</i>	KSU APIKRI, Yogyakarta (Desa Devisa Kerajinan LPEI), The Pinnacle Group Internasional KSU APIKRI, Yogyakarta (Desa Devisa of Art & Crafts LPEI), The Pinnacle Group Internasional	Hanoi, Vietnam	1 Kategori/ Category
3	<i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Pemetaan Indikator Desa Devisa <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Mapping of Desa Devisa Indicators	Institut Pertanian Bogor, DJKN Kemenkeu, DJPEN Kemendag, Kemenkop UKM, Kementan, Asosiasi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Institute of Agriculture Bogor, DJKN Ministry of Finance, DJPEN Ministry of Trade, Ministry of Cooperative SMEs, Ministry of Agriculture, Associations, and Non-Governmental Organisation	Zoom Meeting	11 Stakeholders Ekspor/ Export Stakeholders
4	Survei Potensi Program Pengembangan Desa Devisa Sarung Tenun Gresik, Jawa Timur Survey for Potential Development Program of Desa Devisa Sarung Tenun Gresik, East Java	Bea Cukai Gresik, Diskoperindag Gresik, Koperasi Produsen Wedani Giri Nata, Asosiasi Pengusaha GENK Customs Gresik, Trade & Industry Gresik, Wedani Giri Nata Producers Cooperative, GENK Businessmen Association	Gresik, Jawa Timur/ East Java	1 Desa/ Village
5	Survei Potensi Program Pengembangan Desa Devisa Kopi Subang, Jawa Barat Survey for Potential Development Program of Desa Devisa Coffee Subang, West Java	Kementerian Perdagangan, Koperasi Gunung Luhur Berkah Ministry of Trade, Gunung Luhur Berkah Cooperative	Subang, Jawa Barat/ West Java	6 Desa/ Villages
6	Peluncuran Program Pendampingan Pengembangan Potensi Ekspor Kawasan Agrowisata Ijen Banyuwangi Launch of Coaching Program for Export Potential Development at Agrotourism Area Ijen Banyuwangi	Pemkab. Banyuwangi, Bappeda, Dinas teknis terkait, Ijen Tourism Cluster, Koperasi Klaster Ijen Banyuwangi Puslitkoka dan Souvantara Regency Municipality of Banyuwangi, State Government Office (Bappeda), relevant technical officials, Ijen Tourism Cluster, Cluster Cooperative of Ijen Banyuwangi Puslitkoka and Souvantara	Banyuwangi, Jawa Timur/ East Java	5 Desa/ Villages
7	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pendampingan Desa Devisa Kopi Subang melalui peningkatan kapasitas budidaya dan produksi kepada petani binaan koperasi GLB	LPEI dan Koperasi Gunung Luhur Berkah Indonesia Eximbank and Gunung Luhur Berkah Cooperative	Jakarta	6 Desa/ Villages

## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

Operational Review Per Business Segment

No	Jenis Kegiatan Activities	Institusi Terkait Related Institutions	Lokasi Location	Jumlah Total
	yang berorientasi ekspor Signing of Cooperation Agreement of Coaching for Desa Village Coffee Subang through capacity improvement of cultivation and production to mentoring farmer of export-oriented GLB cooperative			
8	Workshop Peluang Pasar Gastronomi Beras & Kopi Jepang serta Manajemen Ekspor Workshop on Market Opportunities of Japanese Rice Gastronomy & Coffee as well as Export Management	Koperasi Klaster Ijen Banyuwangi, JETRO Cluster Cooperative of Ijen Banyuwangi, JETRO	Banyuwangi, Jawa Timur/ East Java	5 Desa/ Villages
9	Workshop Peningkatan Mutu Produk Pangan Organik Beras & Kopi Ijen melalui Japanese Agriculture Standard Workshop on Quality Improvement of Rice Organic Food Product & Coffee Ijen through Japanese Agriculture Standard	Koperasi Klaster Ijen Banyuwangi, Kementerian Pertanian, SDS Indonesia Cluster Cooperative of Ijen Banyuwangi, Ministry of Agriculture, SDS Indonesia	Banyuwangi, Jawa Timur/ East Java	5 Desa/ Villages
10	Pendampingan Perluasan Akses Pasar Ekspor Komoditas Kopi Coaching of Export Market Access Expansion for Coffee Commodity	Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah, Export Center Producer Cooperative of Gunung Luhur Berkah, Export Center	Zoom Meeting Subang, Jawa Barat/	1 Koperasi/ Cooperative
11	Pelatihan Teknik Budidaya & Pengolahan Kopi Coffee Cultivation Technique & Processing Training	Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah, Puslitkoka, Pemkab. Subang Producer Cooperative of Gunung Luhur Berkah, Puslitkoka, Regency Municipality of Subang	West Java Subang, Jawa Barat/ West Java	6 Desa/ Villages
12	Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan dan Penerapan Aplikasi Keuangan Financial Statements Development and Financial Application Trainings	Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah, PKN STAN Producer Cooperative of Gunung Luhur Berkah, PKN STAN	Zoom Meeting Subang, Jawa Barat/ West Java	1 Koperasi/ Cooperative
13	Workshop Inovasi Kreatif Gastronomi Sumiyaki Jepang Manajemen Pangan Organik Beras & Kopi Ijen Workshop of Japanese Sumiyaki Gastronomy Creative Innovation of Food Management for Rice Organic & Coffee Ijen	Koperasi Klaster Ijen Banyuwangi, JETRO Cluster Cooperative of Ijen Banyuwangi, JETRO	Banyuwangi, Jawa Timur/ East Java	5 Desa/ Villages
14	Ekspor Perdana Desa Devisa Kopi Subang ke Arab Saudi First Export of Desa Devisa Coffee Subang to Arab Saudi	Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah, Pemkab. Subang, Kemenkop UKM Producer Cooperative of Gunung Luhur Berkah, Regency Municipality of Subang, SME Ministry of Cooperative	Subang, Jawa Barat/ West Java	6 Desa/ Villages

## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

Operational Review Per Business Segment

No	Jenis Kegiatan Activities	Institusi Terkait Related Institutions	Lokasi Location	Jumlah Total
15	Peresmian Desa Devisa Tenun Gresik Inauguration of Desa Devisa Weaving Gresik	Koperasi Wedani Giri Nata, DJBC Gresik, Diskoperindag Gresik Wedani Giri Nata Cooperative, DJBC Gresik, Diskoperindag Gresik	Gresik, Jawa Timur/ East Java	1 Desa/ Village
16	Pelatihan Konsep Desain Produk dan Citra Branding Product Design Concept and Branding Image Training	Koperasi Wedani Giri Nata, Kekean Wastra Gallery Wedani Giri Nata Cooperative, Kekean Wastra Gallery	Gresik, Jawa Timur/ East Java	1 Desa/ Village
17	Pelatihan Peningkatan Kualitas Warna, Motif, dan Material Produk Quality Improvement of Colours, Motives, and Product Materials Training	Koperasi Wedani Giri Nata, Kekean Wastra Gallery Wedani Giri Nata Cooperative, Kekean Wastra Gallery	Gresik, Jawa Timur/ East Java	2 Desa/ Villages
18	Peresmian Desa Devisa Garam Kusamba Klungkung Inauguration of Desa Devisa Salt Kusamba Klungkung	Pemkab. Klungkung, DJKN Bali Nusra Regency Municipality of Klungkung, DJKN Bali Nusra	Klungkung, Bali	2 Desa/ Villages
19	Product & Branding Development Bali Sea Salt Rub	Koperasi LEPP Mina Segara Dana, Yayasan Nusa Gastronomi LEPP Mina Segara Dana Cooperative, Nusa Gastronomi Foundation	Sidoarjo, Jawa Timur/	1 Koperasi/ Cooperative
20	Pelatihan Penguatan Kualitas Manajemen Koperasi Cooperative Management Quality Solidification Training	Koperasi Sumber Mulyo 5758, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo Sumber Mulyo 5758 Cooperative, Cooperative Office and Micro Business Sidoarjo	East Java Sidoarjo, Jawa Timur/ East Java	1 Desa/ Village
21	Peresmian Desa Devisa Rumput Laut Sidoarjo Inauguration of Desa Devisa Seaweed Sidoarjo	Koperasi Sumber Mulyo 5758, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo, Dinas Perikanan Sidoarjo Sumber Mulyo 5758 Cooperative, Cooperative Office and Micro Business Sidoarjo, Fishery Department Sidoarjo	Sidoarjo, Jawa Timur/ East Java	1 Desa/ Village
22	Pelatihan Teknik Budidaya & Pengolahan Rumput Laut; serta Perizinan dan Dokumen Ekspor Rumput Laut Seaweed Cultivation Technique & Processing, including Seaweed License and Export Documents	Koperasi Sumber Mulyo 5758, Asosiasi Rumput Laut Indonesia, Dinas Kelautan & Perikanan Jawa Timur Sumber Mulyo 5758 Sumber Mulyo 5758 Cooperative, Indonesian Seaweed Association, Department of Marine Affairs & Fisheries East Java Sumber Mulyo 5758	Zoom Meeting	1 Desa/ Village
23	Business Matching Rumah Indonesia (Belanda)	Koperasi LEPP Mina Segara Dana, Yayasan Nusa Gastronomi LEPP Mina Segara Dana Cooperative, Nusa Gastronomi Foundation	Klungkung, Bali	

## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

Operational Review Per Business Segment

### Rencana Jasa Konsultasi Tahun 2022

LPEI menetapkan rencana jasa konsultasi pada tahun 2022 sebagai berikut:

### 2022 Advisory Services Plan

LPEI sets a plan for advisory in 2022 as follows:

Kegiatan   Activity	Rencana & Strategi	Plan & Strategy
Rumah Ekspor Export House	Fokus pada: 1. Utilisasi/kegiatan di dalam Rumah Ekspor 2. 12 Konten Podcast Rumah Ekspor 3. Pembuatan Aplikasi Rumah Ekspor	Focus on: 1. Utilization/activities in the Export Home 2. 12 Export Home Podcast Content 3. Making Export Home Applications
CPNE	Fokus pada: 1. Penciptaan 100 eksportir baru 2. 1000 UKM Mitra Binaan bekerjasama dengan Pemerintah daerah 3. dan Pameran berskala Internasional	Focus on: 1. Creation of 100 new exporters 2. 1000 SMEs' partners in cooperation with local governments 3. and International scale exhibitions
Marketing Handholding	Fokus pada: 1. 12 kali <i>business matching</i> bekerjasama dengan K/L dan asosiasi 2. 6 <i>E-commerce</i> global 3. 2 kali pameran Internasional	Focus on: 1. 12 times business matching in collaboration with K/L and associations 2. 6 global e-commerce 3. 2 times International exhibition
Desa Devisa	Fokus pada: 1. 100 Desa Devisa Klaster bekerjasama dengan K/L terkait 2. 10 Desa Devisa Reguler bekerjasama dengan K/L terkait	Focus on: 1. 100 Desa Devisa Cluster in collaboration with related Ministries/Agencies 2. 10 Desa Devisa in collaboration with related Ministries/Agencies
Program Kemitraan Partnership Program	Fokus pada: 1. Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Tahun 2021 2. Pengadaan sistem operasional program kemitraan 3. Pemindahan dana deposito Program kemitraan	Focus on: 1. Implementation of Audit for 2021 Financial Statements 2. Procurement of the operational system of partnership program 3. Deposits fund transfer of partnership program

## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

Operational Review Per Business Segment

### **Marketing Handholding**

#### a. Kegiatan | Activities

No	Waktu Pelaksanaan Date	Jenis Kegiatan Type of Activity	Lokasi Location	Jumlah Total
1	Februari February	Pendaftaran Calon Peserta <i>Marketing Handholding</i> produk makanan dan minuman Registration of Prospective Participants in Marketing Handholding for food and beverage products	Jakarta	39 UKM / SMEs
2	Februari February	Pendaftaran Calon Peserta <i>Marketing Handholding</i> produk kelapa dan turunannya Registration of Prospective Participants in Marketing Handholding of coconut products and their derivatives	Malang	23 UKM / SMEs
3	April	Sosialisasi <i>Marketing Handholding</i> produk kelapa dan turunannya Marketing Handholding socialization of coconut products and their derivatives	Jakarta	19 UKM / SMEs
4	April	Sosialisasi <i>Marketing Handholding</i> produk makanan dan minuman Marketing Handholding socialization for food and beverage products	Malang	22 UKM / SMEs
5	Juni June	Kurasi Calon Peserta <i>Marketing Handholding</i> produk produk kelapa dan turunannya Curation of Prospective Participants in Marketing Handholding for coconut products and their derivatives	Jakarta	19 UKM / SMEs
6	Juni June	Kurasi Calon Peserta <i>Marketing Handholding</i> produk makanan dan minuman Curation of Prospective Participants in Marketing Handholding for food and beverage products	Malang	22 UKM / SMEs
7	Juli July	Hasil kurasi peserta MH produk <i>craft &amp; furniture</i> The curated results of MH participants for craft & furniture products	Jepara	20 UKM / SMEs
8	Juli July	Hasil kurasi peserta MH Makanan & Minuman Results of curation of MH Food & Beverage participants	Malang	16 UKM / SMEs
9	Juli July	Hasil kurasi peserta MH Kelapa & turunannya The results of the curation of MH Kelapa participants & their derivatives	Jakarta	9 UKM / SMEs
10	Agustus August	Posting produk di Alibaba Craft & Furniture Post products on Alibaba Craft & Furniture	Jepara	250 posting
11	Agustus August	Posting produk di Alibaba Makanan & minuman Post products on Alibaba Food & beverage	Malang	64 posting
12	Agustus August	Kurasi Calon Peserta <i>Marketing Handholding</i> produk makanan dan minuman Curation of Product Marketing Handholding Candidates food and Drink	Jakarta	36 posting

## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

Operational Review Per Business Segment

### b. B2B

No	Tanggal Date	Produk Products	Tujuan Ekspor Export Destination	Volume	Nilai Value
1	Februari February	Lilin Aromatherapi Aromatherapy Candle	Australia	20 pcs 1 Kontainer/ Container	Rp10 juta/ million
2	Februari February	Furniture	Jepang	Container 20"	Rp83 juta/ million
3	Februari February	Coklat Chocolate	Jepang	303 kg	Rp21 juta/ million
4	Februari February	Charcoal Briquettes	Brazil	3 Kontainer/ Container 20"	Rp1,4 miliar/ billion
5	Maret March	Lotus Lamp	Brazil	1.015 pcs	Rp49 juta/ million
6	Maret March	Wall cladding	UEA	150 sqm	Rp54 juta/ million
7	Maret March	Wastafel batu Stone sink	UK	1 Kontainer/ Container 40"	Rp260 juta/ million
8	Maret March	Sapu lidi Broom stick	Serbia	1 Kontainer/ Container 40"	Rp278 juta/ million
9	April	Pinang Betel nut	Pakistan	1 Kontainer/ Container 20"	Rp215 juta/ million
10	Juli July	Pinang Betel nut	Bangladesh	3 Kontainer/ Container	Rp1,1 miliar/ billion
11	September	Gum Damar	Pakistan	LCL	Rp103 juta/ million
12	September	Charcoal	Bahrain	1 Kontainer/ Container	Rp327 juta/ million
13	September	Kapuk Fiber Kapok Fiber	India	1 Kontainer/ Container	Rp504 juta/ million
14	Oktober October	Charcoal	Dubai	1 Kontainer/ Container	Rp350 juta/ million
15	Oktober October	handicraft	USA	1 Kontainer/ Container	Rp200 juta/ million
16	November	Furniture	Italia	1 Kontainer/ Container	Rp210 juta/ million
17	November	Furniture	Taiwan	1 Kontainer/ Container	Rp175 juta/ million
18	Desember December	Furniture	Taiwan	1 Kontainer/ Container	Rp200 juta/ million



**IKHTISAR UTAMA**  
Performance Highlights

**01**

**LAPORAN MANAJEMEN**  
Management Report

**02**

**PROFIL PERUSAHAAN**  
Company Profile

**03**

**ANALISIS & PEMBAHASAN**  
Management Discussion & Analysis

**04**

**TATA KELOLA PERUSAHAAN**  
Corporate Governance

**05**

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL**  
Corporate Social Responsibility

**06**

**LAPORAN KEUANGAN**  
Financial Statement

**07**

# TRESURI

Treasury

.04



## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

Operational Review Per Business Segment

Pada tahun 2021, LPEI telah mendapatkan dukungan likuiditas valuta asing dari hasil pinjaman bilateral dan sindikasi sebesar USD510 juta serta termasuk didalamnya mendapatkan Stand By Facility sebesar USD175 juta. Selain itu LPEI juga mendapatkan dukungan likuiditas rupiah dengan total sebesar Rp12,83 triliun serta termasuk didalamnya berupa Stand By Facility sebesar Rp3 triliun. Penyertaan Modal Negara untuk meningkatkan Pembiayaan Ekspor Nasional dengan total sebesar Rp5 triliun.

### Peran dan Fungsi Pengelolaan Tresuri

Divisi *Financial Institution and Treasury* terbagi menjadi 3 (tiga) Departemen yaitu; (1) *Dealing Room* (2) *Financial Institution*, dan (3) Pendanaan. Adapun masing-masing Departemen tersebut memiliki TUPOKSI yang berbeda yaitu:

In 2021, Indonesia Eximbank has received foreign exchange liquidity support from bilateral and syndicated loans amounting to USD510 million including a Stand by Facility of USD175 million. Moreover, Indonesia Eximbank also received Rupiah liquidity support of Rp12.83 trillion, including a Stand by Facility of Rp3 trillion. Additional State Equity Participation of the Republic of Indonesia to increase National Export Financing stood at Rp5 trillion.

### Treasury Management Roles and Functions

The Financial Institution and Treasury Division is divided into 3 (three) departments, namely; (1) Dealing Room (2) Financial Institution, and (3) Funding. Each of these departments has a different Job Description as follows:

No	Departemen Department	TUPOKSI Duties
1	<i>Dealing Room</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengelola Likuiditas Lembaga, baik jangka pendek dan jangka panjang.</li> <li>Melakukan penempatan dana pada <i>instrument</i> yang memiliki risiko terkendali dan likuid.</li> <li>Melakukan transaksi jual beli valuta asing untuk mengakomodasi kebutuhan nasabah.</li> <li>Pengelolaan Rasio Posisi Devisa Neto (PDN) yang <i>prudent</i>.</li> <li>Melakukan transaksi derivatif dalam rangka lindung nilai.</li> <li>Manage the Liquidity of Institution, either short term or long term.</li> <li>Invest funds in instruments that have controlled and liquid risks.</li> <li>Conduct foreign exchange buying and selling transactions to accommodate customer needs.</li> <li>Manage Net Open Position Ratio (NOP) prudently.</li> <li>Conduct derivative transaction for hedging purpose.</li> </ul>
2	<i>Financial Institution</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fokus terhadap <i>Counterparty</i> Bank atau Lembaga Keuangan Non Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D).</li> <li>Bank Line; melakukan <i>set up &amp; annual review</i> interbank limit.</li> <li>Fund Borrowing; melakukan penggalangan dana melalui loan market bilateral (term loan, revolving loan, BA Financing), syndication/club deal dan capital market yaitu penerbitan obligasi valas.</li> <li>Hubungan korespondensi; Set Up &amp; Annual Review RMA, melakukan KYC/AML <i>Due Diligence</i> dan <i>Nostro Account maintaining</i>.</li> <li>Focus on Counterparty Banks or Financial Institutions Non-State/Regional Owned Enterprises(BUMN/D).</li> <li>Bank Lines; set up &amp; annual review of interbank limits.</li> <li>Fund Borrowing; conduct fundraising through bilateral loan markets (term loans, revolving loans, BA Financing), syndication/club deals and the capital market, namely the issuance of foreign currency bonds.</li> <li>Correspondence relationship; Set Up &amp; Annual Review RMA, perform KYC/AML Due Diligence and Nostro Account maintaining.</li> </ul>

## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

Operational Review Per Business Segment

No	Departemen Department	TUPOKSI Duties
3	Pendanaan Funding	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fokus terhadap Counterparty Bank atau Lembaga Keuangan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D).</li> <li>Bank Line; melakukan set up &amp; annual review interbank limit.</li> <li>Fund Borrowing; melakukan penggalangan dana melalui loan market bilateral (term loan, revolving loan, BA Financing, Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek), syndication/club deal dan capital market yaitu penerbitan obligasi rupiah.</li> <li>Hubungan korespondensi; Set Up &amp; Annual Review RMA, melakukan KYC/AML Due Diligence dan Nostro Account maintaining.</li> <li>Focus on Counterparty Banks or Financial Institutions Non-State/Regional Owned Enterprises(BUMN/D).</li> <li>Bank Lines; set up &amp; annual review of interbank limits.</li> <li>Fund Borrowing; conduct fundraising through bilateral loan markets (term loans, revolving loans, BA Financing, Short Term Loan Facility), syndication/club deals and the capital market, namely the issuance of local currency bonds.</li> <li>Correspondence relationship; Set Up &amp; Annual Review RMA, perform KYC/AML Due Diligence and Nostro Account maintaining.</li> </ul>

### Strategi dan Tantangan 2021

Belum pulihnya perekonomian dari pandemi COVID-19 menyebabkan utilisasi fasilitas pembiayaan oleh debitur belum maksimal yang berdampak pada turunnya kebutuhan pendanaan untuk ekspansi pembiayaan. Selama tahun 2021, pendanaan yang dilakukan lebih difokuskan untuk membayar kewajiban jatuh tempo serta mengganti dana berbiaya mahal dengan dana berbiaya lebih efisien.

Terdapat kewajiban jatuh tempo senilai Rp15,35 triliun yang terdiri atas valuta rupiah sebesar Rp10,46 triliun dan valuta asing sebesar USD335 juta atau ekuivalen Rp4,89 triliun pada tahun 2021. Strategi Pendanaan untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo dan ekspansi pembiayaan dilakukan melalui pinjaman baik dalam valuta IDR maupun USD. Opsi ini ditempuh mengingat biaya dana dari pinjaman lebih efisien dibandingkan dengan biaya dana dari penerbitan surat berharga. Realisasi total penggalangan dana tahun 2021 sebesar Rp6,10 triliun yang berasal dari pinjaman yang diterima rupiah sebesar Rp3,25 triliun dan pinjaman yang diterima valas sebesar USD200 juta atau ekuivalen Rp2,85 triliun.

### 2021 Strategy and Challenges

The economy has not yet recovered from the COVID-19 pandemic that affecting the utilization of financing facilities by borrowers which was not maximized, which reduce the funding's need for financing expansion. During 2021, the funding was focused more on paying maturing obligations and replacing high-cost funds with more efficient cost-effective funds.

In 2021, there were liabilities matured amounting to Rp15.35 trillion, which consist of Rp10.46 trillion denominated in the Rupiah currency and USD335 million in foreign currency or equivalent to Rp4.89 trillion. The Funding Strategy to meet maturing obligations and financing expansion was executed through loans either in Rupiah and USD denominations. This option was adopted considering the cost of funds from borrowing was more efficient than the cost of funds from the issuance of securities. The realization of total fundraising in 2021 amounted to Rp6.10 trillion, comprising of loans received in the Rupiah at Rp3.25 trillion and loans received in foreign currency worth USD200 million or equivalent to Rp2.85 trillion.

## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

Operational Review Per Business Segment

### **Program kerja, kegiatan dan realisasi program selama tahun 2021**

### **Work Programs, Activities and Program Realization in 2021**

<b>Program Kerja &amp; Kegiatan</b> <b>Work Programs &amp; Activities</b>	<b>Realisasi</b> <b>Realization</b>
Terpenuhinya kewajiban hutang jatuh tempo valas sebesar USD335 juta, Obligasi Jatuh Tempo sebesar Rp8,88 triliun serta jatuh tempo pinjaman rupiah sebesar Rp1,58 triliun.	Terpenuhinya kewajiban hutang jatuh tempo valas sebesar USD335 juta, Obligasi Jatuh Tempo sebesar Rp8,88 triliun serta jatuh tempo pinjaman rupiah sebesar Rp1,58 triliun, dengan: 1. Diperolehnya pinjaman bilateral valuta asing dari 6 Bank dengan total fasilitas sebesar USD510 juta. 2. Diperolehnya pinjaman bilateral rupiah dari 7 Bank dengan total fasilitas mencapai Rp12,83 triliun. 3. Pengelolaan Treasury Asset yang optimal untuk menjaga likuiditas yang efisien.
Fulfillment of debt obligations due in foreign currency worth USD335 million, bonds maturing in the Rupiah amounting to Rp8.88 trillion and matured the Rupiah loans standing at Rp1.58 trillion.	Fulfillment of debt obligations due in foreign currency amounting to USD335 million, Bonds Maturity OF Rp.8.88 trillion and matured Rupiah loans of Rp1.58 trillion by: 1. Obtaining bilateral foreign currency loans from 6 banks with a total facility of USD510 million. 2. Receiving bilateral rupiah loans from 7 banks with total facilities Rp12.83 trillion. 3. As well as optimally managed Treasury Asset to maintain efficient liquidity
Penurunan CoF Rupiah yang berasal dari pendanaan baru tahun 2021 sebesar 50bps dibandingkan pendanaan baru tahun 2020 (6,88%).	Terpenuhi dan terlampaunya target penurunan CoF Rupiah yang berasal dari pendanaan baru di tahun 2021 yaitu sebesar 4,27%.
The lowering Rupiah CoF obtained from new funding in 2021 by 50bps compared to new funding in 2020 (6.88%).	Fulfill and exceed the target of declining Rupiah CoF originating from new funding in 2021, which was 4.27%.
Penurunan CoF USD yang berasal dari pendanaan baru tahun 2021 sebesar 50 bps dibandingkan pendanaan baru di tahun 2020 (2,96%).	Terpenuhi dan terlampaunya target penurunan CoF USD yang berasal dari pendanaan baru di tahun 2021 yaitu sebesar 1,03%.
A decrease on CoF from new funding in 2021 by 50 bps compared to new funding in 2020 (2.96%).	Fulfill and exceed the target of lowering USD CoF originating from new funding in 2021, which was 1.03%.
Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) hingga 2022.	LPEI sudah memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank II dengan total plafond hingga sebesar Rp24 triliun per tanggal 30 Juni 2020 dengan tanggal berakhir program hingga 30 Juni 2022.
Shelf Registration Public Offering (PUB) until 2022	Indonesia Eximbank has obtained an effective statement from OJK for Shelf Registration bonds Indonesia Eximbank Phase V and Indonesia Shelf Registration Sukuk Mudharabah Eximbank Phase II with a total platform up to Rp24 trillion as of 30 June 2020 with the program ending date until 30 June 2022.
Tercapainya pendapatan dari transaksi valuta asing, Surat Berharga, serta pengelolaan dana.	Pendapatan treasury atas pengelolaan dana, surat berharga dan transaksi valuta asing mencapai Rp400 miliar sd 31 Desember 2021.
Income from foreign exchange transactions, Securities, and fund management.	Treasury income from management of funds, securities and foreign exchange transactions that reached Rp400 billion until 31 December 2021.

## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

Operational Review Per Business Segment

<b>Program Kerja &amp; Kegiatan</b> <b>Work Programs &amp; Activities</b>	<b>Realisasi</b> <b>Realization</b>
Pengelolaan Rasio PDN yang prudent (maksimal 8%).  Prudent PDN Ratio Management (maximum 8%).	Rasio PDN posisi 31 Desember 2021 terjaga pada level 7,40%.  NOP ratio as of 31 December 2021, PDN ratio was well-maintained at the level of 7.40%.
Terpenuhinya kewajiban hutang valas sebesar USD700 juta atau setara Rp10,15 triliun, efek-efek yang diterbitkan rupiah sebesar Rp3 triliun serta pinjaman rupiah sebesar Rp1,25 triliun.  Fulfillment of foreign currency debt obligations of USD700 million or equivalent with Rp10.15 trillion, securities issued in the Rupiah amounted to Rp3 trillion and Rupiah loans worth Rp1.25 trillion.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Memperluas sebaran kreditur untuk mendapatkan bauran sumber dana yang variatif, baik dari basis kreditur maupun produk pendanaan (tenor valuta, serta suku bunga).</li> <li>2. Pengelolaan Treasury Asset yang optimal untuk menjaga likuiditas yang efisien.</li>   <li>1. Diversify creditors to obtain a various funding source, both from the creditor base and funding products(tenors, currency and interest rates).</li> <li>2. Manage Treasury Asset optimally to maintain efficient liquidity.</li> </ul>
Terpenuhinya Majority Waiver Consent sebesar 66,67% atas setiap pinjaman Sindikasi Outstanding.  Fulfil the Majority Waiver Consent of 66.67% for each Outstanding Syndicated loan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Memperoleh <i>non-objection letter</i> dari OJK atas pelampaian NPL terkait POJK No. 40.</li> <li>2. Melakukan <i>creditors meeting</i> untuk memberikan penjelasan kepada Kreditur mengenai <i>update</i> kinerja keuangan tahun 2021 serta strategi perbaikan kualitas asset.</li> <li>3. Melakukan <i>voluntary prepayment</i> terhadap pinjaman sindikasi yang berpotensi tidak memenuhi Majority Waiver Consent.</li>   <li>1. Obtain a non-objection letter from OJK for exceeding NPL related to POJK No. 40.</li> <li>2. Conduct a creditor meeting to provide explanations to creditors regarding the 2021 financial performance update and asset quality improvement strategies.</li> <li>3. Conduct voluntary prepayments on syndicated loans that may potentially not able to meet the Majority Waiver Consent.</li> </ul>
Membuka Kerjasama dengan Lembaga Multilateral (Eximbank) lainnya.  Cooperate with other Multilateral Institutions (Eximbank).	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemetaan atas beberapa Eximbank lainnya yang memiliki potensi untuk bekerjasama dengan Indonesia Eximbank baik dalam hal MoU atau dukungan likuiditas.</li> <li>2. Melakukan koordinasi internal dengan Divisi Pembiayaan Korporasi, UKM dan <i>Trade Finance</i> serta Penjaminan untuk mengetahui historikal transaksi dan potensi bisnis menuju negara tujuan dari Eximbank tersebut.</li> <li>3. Membuka koordinasi dengan potensi Eximbank target tujuan dalam rangka menggali potensi minat terhadap Indonesia Eximbank.</li>   <li>1. Mapping several other Eximbanks having the possibility to cooperate with Indonesia Eximbank either in terms of MoUs or liquidity support.</li> <li>2. Conduct internal coordination with the Corporate Finance, SME and Trade Finance as well as Guarantee Divisions to seek historical transactions and business potential to the destination country of the Eximbank.</li> <li>3. Coordinate with potential Eximbanks in order to explore potential interest in Indonesia Eximbank.</li> </ul>



**IKHTISAR UTAMA**  
Performance Highlights

**01**

**LAPORAN MANAJEMEN**  
Management Report

**02**

**PROFIL PERUSAHAAN**  
Company Profile

**03**

**ANALISIS & PENBAHASAN**  
Management Discussion & Analysis

**04**

**TATA KELOLA PERUSAHAAN**  
Corporate Governance

**05**

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL**  
Corporate Social Responsibility

**06**

**LAPORAN KEUANGAN**  
Financial Statement

**07**

# PENJAMINAN

Guarantee

.05



## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

Operational Review Per Business Segment

Penjaminan merupakan salah satu pilar produk yang dijalankan oleh LPEI berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2009 Pasal 7 dan 13. Selanjutnya, melalui Peraturan Pemerintah No. 43/2020, Pemerintah menunjuk LPEI dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai *Special Mission Vehicles* untuk melaksanakan program Penjaminan Pemerintah (JAMINAH) dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional yang berakhir tanggal 17 Desember 2021. Penjaminan yang diberikan oleh LPEI terdiri dari:

a. Penjaminan Proyek

Merupakan Penjaminan terkait tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang eksport. Penjaminan yang diberikan dalam rangka penggerakan proyek, antara lain:

- Jaminan Penawaran

Penjaminan untuk menjamin dalam hal *Principal/ Contractor* tidak akan mengundurkan diri dan tidak bersedia menandatangani Kontrak setelah ditunjuk sebagai pemenang tender.

- Jaminan Pelaksanaan

Penjaminan untuk menjamin bahwa *Principal* akan melaksanakan kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai Kontrak antara *Principal* dengan *Obligee*.

- Jaminan Uang Muka

Penjaminan untuk menjamin pengembalian sebagian atau seluruh uang muka yang telah dibayarkan oleh *Obligee* kepada *Principal* sesuai Kontrak antara *Principal* dengan *Obligee*, apabila *Principal* wanprestasi.

- Jaminan Pembayaran

Penjaminan untuk menjamin bahwa *Obligee* akan melakukan pembayaran kepada *Principal/ Contractor* apabila *Principal/Contractor* telah menyelesaikan kewajiban sesuai Kontrak.

- Jaminan Pemeliharaan

Penjaminan untuk menjamin bahwa *Principal/ Contractor* akan melaksanakan pemeliharaan proyek yang telah diselesaikan.

b. Penjaminan Kepabeanan

Produk Penjaminan ini ditujukan untuk Dirjen Bea dan Cukai atas impor bahan baku yang akan diproses

Guarantee is one of the pillars of products provided by Indonesia Eximbank based on Law No. 2 Year 2009 Articles 7 and 13. Furthermore, through Government Regulation No. 43/2020, the Government appointed Indonesia Eximbank and PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) as Special Mission Vehicles to implement the Government Guarantee Program (JAMINAH) to support the National Economic Recovery which ended on 17 December 2021. The guarantees provided by Indonesia Eximbank consist of:

a. Project Guarantee

A guarantee on tenders related to the implementation of projects which are wholly or partly export-supporting activities. This guarantee is provided for project work, such as:

- Bid Bonds

Guarantee of assurance if the Principal/ Contractor will not resign and are not willing to sign the Contract following the appointment as the tender's winner.

- Performance bonds

Guarantee of assurance if the Principal will carry out the obligation to complete the works in accordance with the contract between the Principal and the Obligee.

- Advance Payment Guarantee

Guarantee of assurance for the return of part or all of the down payment that has been paid by the Obligee to the Principal in accordance with the contract between the Principal and the Obligee, if the Principal is in default.

- Payment Guarantee

Guarantee that the Obligee will make payments to the Principal/Contractor if the Principal/ Contractor has completed the obligations under the Contract.

- Maintenance Guarantee

Guarantee of assurance that the Principal/ Contractor will carry out the maintenance of the completed project.

b. Customs Guarantee

This guarantee product is intended for the Director General of Customs and Excise of the import of raw

## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

### Operational Review Per Business Segment

menjadi barang siap ekspor. Jaminan ini akan menangguhkan pembebatan bea masuk impor pada kondisi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Kawasan Berikat (KABER).

#### c. Penjaminan Kredit Bank

Penjaminan ini diberikan bagi Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan yang telah memberikan pembiayaan bagi para eksportir. Objek Penjaminan yang dimaksud adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank tersebut. Jenis Penjaminan Kredit Bank dibagi menjadi dua, antara lain:

- *Sovereignty Basis*

Penjaminan Kredit - Sovereignty Basis didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 40/POJK.03/2019 mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, POJK No. 15/POJK.03/2018 mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa, dan Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 11/SEOJK.03/2018 mengenai Perubahan atas SEOJK No. 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

Pengaturan dalam POJK maupun SEOJK tersebut mengatur bahwa dengan adanya Penjaminan Kredit dari LPEI maka atas porsi yang dijamin, Bank sebagai Penerima Jaminan dapat memperhitungkan pembebatan ATMR sebesar 0% serta mendapatkan pengecualian atas perhitungan BMPK atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) atas pembiayaan yang dijamin oleh Penjamin. Dalam penjaminan skema sovereign, LPEI tidak diperbolehkan untuk menjamin kembali porsi yang dijamin (*counter guarantee*).

- *Commercial Basis*

Skema Penjaminan Kredit - Commercial Basis secara prinsip tidak mengacu kepada POJK dan SEOJK yang digunakan pada sovereign basis. Skema penjaminan commercial digunakan oleh Bank yang membutuhkan fungsi *credit enhancer*, di mana dengan penjaminan LPEI maka rating Terjamin dapat mengikuti rating LPEI sehingga diharapkan akan meningkatkan *appetite* dari

materials that will be processed into ready-to-export goods. This guarantee will suspend the imposition of import duties on the conditions of the Ease of Import for Export Purpose (KITE) and Bonded Zone (KABER).

#### c. Bank Loans Guarantee

This guarantee is provided for Commercial Banks as referred to in the Law on Banking, which provides financing for exporters. The object of Guarantee is financing provided by the bank. Types of Bank Loans Guarantee are divided into two:

- *Sovereignty Base*

Loans Guarantee - Sovereignty Basis refers to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 40/POJK.03/2019 on Asset Quality Assessment for Commercial Banks, POJK No. 15/POJK.03/2018 on Legal Lending Limit or Bank Funding Limit for the Promotion of Tourism Sector Growth and Foreign Exchange Increment, and OJK Circular (SEOJK) No. 11/SEOJK.03/2018 on Amendments to SEOJK No. 42/SEOJK.03/2016 regarding Guidelines for Calculation of Credit Risk Weighted Assets (RWA) Using a Standardized Approach.

The POJK and SEOJK stipulate that with the Loans Guarantee from Indonesia Eximbank, the Bank as the Guarantee Recipient can calculate the 0% RWA charge and get an exemption from the calculation of LLL or the Maximum Legal Lending Limits for the financing guaranteed by Guarantor. In the guarantee of the sovereign scheme, Indonesia Eximbank is not allowed to counter guarantee the guaranteed portion.

- *Commercial Basis*

The Loans Guarantee Scheme - Commercial Basis in principle does not refer to the POJK and SEOJK which are used on a sovereign basis. The commercial guarantee scheme is used by banks that require a credit enhancer function, where with Indonesia Eximbank guarantee, the Guaranteed rating can follow the Indonesia Eximbank rating hence it is expected to increase the Bank's appetite

## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

### Operational Review Per Business Segment

Bank untuk memberikan kredit. Untuk skema penjaminan *commercial*, penentuan bobot ATMR adalah mengikuti pengaturan yang berlaku serta LPEI dapat melakukan mekanisme *counter guarantee* atau regaransi dalam upaya melakukan *risk sharing*.

#### Strategi Tahun 2021

Pandemi yang masih berlangsung hingga tahun 2021 berpengaruh terhadap bisnis segmen Penjaminan LPEI. Pandemi berdampak terhadap perlambatan pelaksanaan proyek baik di dalam maupun di luar negeri sehingga permintaan Penjaminan mengalami penurunan. Selain itu, pertumbuhan kredit perbankan yang masih terbatas akibat pandemi juga mempengaruhi performa dari bisnis segmen Penjaminan LPEI. Terkait dengan hal tersebut, strategi yang ditempuh oleh LPEI adalah sebagai berikut:

- Cross selling* dengan Penjaminan dalam rangka Pemulihian Ekonomi Nasional (PEN) untuk target market penjaminan kredit yang tidak dapat dilayani lewat program JAMINAH.
- Cross selling* dengan nasabah existing maupun baru di portofolio.
- Meminta dukungan OJK untuk dapat mendorong Bank menggunakan fasilitas penjaminan LPEI sehingga dapat mendorong penyaluran kredit
- Pembentukan tim komite Penjaminan dan struktur organisasi *monoline* untuk penjaminan.
- Meningkatkan jumlah kerjasama dengan Bank.

Pelaksanaan strategi tersebut juga dalam rangka menghadapi tantangan yang dihadapi LPEI di sepanjang tahun 2021 antara lain:

- Pandemi COVID-19 yang menyebabkan perbankan mengurangi ekspansi kreditnya sehingga target market untuk produk penjaminan kredit menurun.
- Bank/penerima jaminan untuk sektor horekabi menunggu kebijakan pemerintah untuk membuka *international border* sebagai syarat masuknya wisatawan mancanegara dan membuka sektor wisata bagi wisatawan dalam negeri.
- Terdapat penundaan proyek Pemerintah dan Swasta karena kondisi Pandemi COVID-19.

to provide loans. In determining the weight of RWA for commercial guarantee schemes, it follows the applicable regulations and implementation by Indonesia Eximbank for a counter guarantee or guarantee mechanism in an effort to carry out risk sharing.

#### 2021 Strategy

The ongoing pandemic until 2021 affect the Indonesia Eximbank Guarantee segment business. The pandemic affected a slowdown in the project implementation either in domestic and foreign countries hence reduced the Guarantees demand. Moreover, the limited growth in bank loans due to the pandemic also affected the performance of Indonesia Eximbank Guarantee segment business. In this regard, the strategies adopted by Indonesia Eximbank were as follows:

- Cross selling* with Guarantee to support National Economic Recovery (PEN) for the target market of credit guarantees that cannot be served through the JAMINAH program.
- Cross selling* with existing and new customers in the portfolio.
- Request OJK support to encourage banks to use Indonesia Eximbank guarantee facilities so as to encourage lending.
- Formation of the Guarantee committee team and monoline organizational structure for guarantees.
- Increase the number of collaborations with the Bank.

The implementation of this strategy was also in order to manage Indonesia Eximbank's challenges throughout 2021, among others:

- The COVID-19 pandemic that resulted in reduction of loans expansion by the banks hence the target market of loans guarantees products decreased.
- Banks/guarantees for the hospitality sector subject to the government's policy to open the international border as a condition for the entry of foreign tourists and open the tourism sector for domestic tourists.
- There have been delays in government and private projects due to COVID-19 pandemic.

## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

Operational Review Per Business Segment

### Kinerja Tahun 2021

LPEI mampu membukukan total *outstanding* penjaminan posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp13,13 triliun yang terdiri dari penjaminan proyek, penjaminan kredit bank, penjaminan kepada importir dan penjaminan kepabeanan. Nilai penjaminan tersebut tumbuh 32,57% dibandingkan dengan periode yang sama pada Desember Tahun 2020 yang sebesar Rp9,91 triliun. LPEI melakukan penjaminan terhadap total 202 debitur dengan rincian 139 debitur penjaminan komersial dan 63 debitur Penjaminan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

### 2021 Performance

As of 31 December 2021, Indonesia Eximbank was able to record a total guarantee outstanding of Rp13.13 trillion comprising of project guarantees, bank loans guarantee, guarantees to importers and customs guarantees. The guarantee value was up by 32.57% compared to Rp9.91 trillion in the same period in December 2020. Indonesia Eximbank provided guarantees for a total of 202 borrowers consisting of 139 commercial guarantee borrowers and 63 guarantee borrowers for the National Economic Recovery (PEN).

Jenis Penjaminan Type of Guarantee	Jumlah Terjamin Number of Guarantee	Nilai Penjaminan Value of Guarantee
a Penjaminan Importir Importer Guarantee <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konstruksi   Construction</li> <li>- Infrastruktur   Infrastructure</li> <li>- Transportasi   Transportation</li> </ul>	1	Rp 12.232.250.883
b Penjaminan Kredit Bank Bank Loans Guarantee	2	Rp 1.575.078.194.788
c Penjaminan Proyek Project Guarantee	136	Rp 6.707.519.794.314
d Penjaminan Kepabeanan Customs Guarantee	-	
e Penjaminan PEN/JAMINAH PEN Guarantee/JAMINAH	63	Rp 4.841.395.950.000
<b>Total Outstanding</b>	<b>202</b>	<b>Rp 13.136.226.189.984</b>

Jenis Penjaminan Financing Types	2020 (Rp)	2020 (Rp)
Kepabeanan Customs	31.831.615.000	-
Importir(7B) Importers	53.733.518.902	12.232.250.883
Kredit Bank (7C) Bank Loans	1.552.699.430.750	1.575.078.194.788
Proyek(7D) Projects	7.404.052.683.006	6.707.519.794.314
PEN	-	4.841.395.950.000
<b>Total</b>	<b>9.042.317.247.658,24</b>	<b>13.136.226.189.983,90</b>

## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

Operational Review Per Business Segment

### **Strategi Penjaminan Tahun 2022**

Sejalan dengan perbaikan ekonomi tahun 2021 dan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada tahun 2022, strategi LPEI adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan peranan LPEI sebagai *credit enhancer* bagi Penerima Jaminan melalui Penjaminan Kredit:
  - Manfaatkan keberadaan JAMINAH untuk melanjutkan Penjaminan Kredit dengan fokus pada bank-bank yang memiliki UMKM/SME Customer Base yang besar, bank dengan CAR dibawah 20%, bank yang memiliki keterbatasan BMPK/in-house limit atau Bank Asing/Lembaga keuangan/Exim Bank lain yang memerlukan *Credit Enhancer* untuk peningkatan rating dan perpanjangan tenor.
  - Meningkatkan kolaborasi dengan kantor wilayah/cabang untuk menangkap potensi penjaminan yang lebih banyak di wilayahnya.
- Optimalisasi existing business di Penjaminan Proyek melalui skema fasilitas dan skema Kontra Bank Garansi(KBG):
  - Mendukung kontraktor Indonesia yang mendapatkan proyek di luar negeri.
  - Meningkatkan sinergi dengan lembaga keuangan lain yang memerlukan dukungan Penjaminan Proyek untuk debiturnya.
- Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki keunggulan bersaing di bisnis penjaminan:
  - Memperkuat Tim Penjaminan komersial dengan mendayagunakan Ex-Tim JAMINAH.
  - Meningkatkan *Credit & Technical Skill* bagi Tim Penjaminan dan Reviewer.
  - Meningkatkan *technical skill* tim *Operation* dalam menangani operasional dan proses klaim penjaminan.
- Menyempurnakan sistem dan ketentuan operasional yang dapat diandalkan dalam mendukung perkembangan bisnis penjaminan:
  - Memiliki sistem Penjaminan yang handal dan komprehensif.
  - Menyempurnakan ketentuan operasional.

### **2022 Guarantee Strategy**

In line with the economic improvement in 2021 and a forecast of better economic growth in 2022, Indonesia Eximbank's strategy are as follows:

- Enhance the role of Indonesia Eximbank as a credit enhancer for Guarantee Beneficiaries through Loans Guarantee:
  - Utilize the existence of JAMINAH to continue Loans Guarantee with a focus on banks that have a large MSME/SME Customer Base, banks with CAR below 20%, banks with limited LLL/in-house limits or other foreign banks/financial institutions/Exim Banks that require a Credit Enhancer for rating upgrades and tenor extensions.
  - Enhance collaboration with regional/branch offices to capture more guarantee potential in their areas.
- Optimize the existing business in Project Guarantee through facility schemes and Counter Guarantee Scheme:
  - Support Indonesian contractors obtaining projects overseas.
  - Enhance a synergy with other financial institutions requiring Project Guarantee to support for their borrowers.
- Develop human resources that are professional and have a competitive advantage in the guarantee business:
  - Strengthen the Commercial Guarantee Team by leveraging JAMINAH Ex-Team.
  - Improve Loans & Technical Skills for the Guarantee Team and Reviewers.
  - Improve the technical skills of the Operations team in handling operations and the guarantee claim process.
- Refine the reliable operational systems and provisions to support the development of the guarantee business:
  - Have a reliable and comprehensive Guarantee system.
  - Improve operational conditions.

# ASURANSI

Insurance

.06



## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

Operational Review Per Business Segment

Pembiayaan ekspor nasional yang diberikan oleh LPEI sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 pasal 3 selain berbentuk pembiayaan dan penjaminan dapat juga berbentuk asuransi. Asuransi yang dimaksud dalam UU tersebut dapat diberikan dalam bentuk asuransi atas risiko kegagalan ekspor; asuransi atas risiko kegagalan bayar; asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri; dan/atau asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor.

Adapun layanan asuransi yang diberikan oleh LPEI hingga saat ini adalah sebagai berikut:

The national export financing provided by Indonesia Eximbank as governed by Law No. 2 Year 2009 article 3 apart from financing and guarantees, it can also be in the form of insurance. The insurance referred to in the law can be provided in the form of insurance against the risk of export failure; insurance against the risk of payment default; insurance on investments made by Indonesian companies overseas; and/or insurance against political risks in a country that is the exports destination.

The insurance services provided by Indonesia Eximbank to date are as follows:

### **Trade Credit Insurance**

Definisi Definition	Asuransi yang memberikan ganti rugi kepada Eksportir Indonesia terhadap kemungkinan risiko kerugian akibat tidak diterimanya pembayaran dari Importir/Buyer atau Bank pembuka L/C yang disebabkan oleh Risiko Komersial dan/atau Risiko Politik. Insurance that indemnifies Indonesian Exporters against possible loss due to non-payment by the Importer/Buyer or Bank issuing L/C caused by Commercial Risk and/or Political Risk
Manfaat Benefits	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan rasa aman kepada Eksportir Indonesia dalam menjalankan penjualan eksportnya.</li> <li>b. Membantu Eksportir Indonesia dalam melakukan manajemen risiko.</li> <li>c. Memberikan dukungan kepada Eksportir Indonesia untuk ekspansi ke pasar internasional Membantu Eksportir Indonesia untuk lebih kompetitif (dengan syarat pembayaran yang lebih <i>flexible</i>/non L/C).</li> <li>d. Memperbaiki neraca perusahaan.</li> <li>e. Strategi untuk meningkatkan loyalitas buyer(importir).</li> </ul> <p>Benefits:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Provide a sense of comfort to Indonesian exporters in conducting their export sales.</li> <li>b. Assist Indonesian Exporters in performing risk management.</li> <li>c. Providing support to Indonesian Exporters for expansion into international markets and supporting Indonesian Exporters to be more competitive (with more flexible payment terms/non-L/C).</li> <li>d. Protection for company balance sheet.</li> <li>e. A strategy to improve buyer's(importer's) loyalty</li> </ul>
Coverage	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Risiko Komersial <ul style="list-style-type: none"> <li>- Importir /Buyer Pailit (<i>insolvency</i>).</li> <li>- Importir/Buyer gagal untuk membayar sejumlah utang/ tagihan sesuai dengan kontrak (<i>default payment</i>).</li> </ul> </li> <li>b. Risiko Politik <ul style="list-style-type: none"> <li>- Moratorium Pemerintah (<i>Goverment Moratorium</i>).</li> <li>- Larangan transfer dari pemerintah importir (<i>present or delay payment</i>).</li> </ul> </li> </ul>

## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

Operational Review Per Business Segment

- 
- Penghapusan hutang dari pemerintah importir/buyer (*discharge of debt*).
  - Perang atau tindakan perrusuhan (*war*).
  - Wanprestasi *public buyer* (*public buyer default*).
  - Kegagalan kontrak akibat dari tindakan pemerintah importir/buyer (*contract frustration*).
- a. Commercial Risk
    - Importer / Buyer Bankruptcy (*insolvency*).
    - Importer/Buyer's failure to pay the amount of debt/bills in accordance with the contract (*default payment*).
  - b. Political Risk
    - Government Moratorium
    - Prohibition of transfers from the importing government (present or delay payment).
    - Discharge of debt from the importer/buyer government
    - War or acts of hostility
    - Public buyer default
    - Contract frustration as a result of the actions of the importer/buyer government

### **Marine Cargo Insurance**

Definisi Definition	Asuransi yang memberikan ganti rugi atas kerugian/ kerusakan/ kehilangan barang terhadap risiko yang mungkin terjadi selama pengangkutan, baik melalui laut, darat dan udara.  Insurance that provides indemnity against loss/damage/loss of goods against risks that may occur during transportation, by sea, in land or air freight.
Manfaat Benefits	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Memberikan kenyamanan kepada Eksportir Indonesia dalam menjalankan penjualan eksportnya.</li><li>b. Menghindari kebangkrutan dan kerugian atas risiko kerusakan/kehilangan barang selama proses pengangkutan.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Provide a sense of comfort to Indonesian exporters in conducting their export sales.</li><li>b. Preventing bankruptcy and loss against the risk of damage/loss of goods during the transportation process.</li></ul>
Coverage	<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Institute Cargo Clauses A</i> (ICC A)</li><li>- <i>Institute Cargo Clauses B</i> (ICC B)</li><li>- <i>Institute Cargo Clauses C</i> (ICC C)</li><li>- <i>Institute Cargo Clauses Air</i> (ICC Air/udara)</li></ul>

### **Overseas Investment Insurance**

Definisi Definition	Asuransi yang memberikan ganti rugi kepada Investor Indonesia terhadap kemungkinan risiko kerugian investasi karena risiko politik.  Insurance that provides indemnity to Indonesian investors against possible investment losses due to political risk.
Manfaat Benefits	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Memberikan kenyamanan kepada Eksportir Indonesia dalam menjalankan investasinya dari ketidakstabilan politik yang terjadi di negara investor Indonesia berinvestasi.</li><li>b. Memberikan dukungan kepada Investor Indonesia untuk ekspansi ke pasar internasional yang baru.</li></ul>

## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

Operational Review Per Business Segment

Manfaat Benefits	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Membantu investor Indonesia untuk mendapatkan terms &amp; conditions pendanaan dari Bank yang lebih baik.</li> <li>a. Providing a sense of comfort to Indonesian exporters in performing their investments from the political instability that occurs in the country where they invest.</li> <li>b. Providing support to Indonesian Investors for expansion into new international markets.</li> <li>c. Supporting Indonesian investors to obtain better financing terms &amp; conditions from banks.</li> </ul>
Coverage	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Risiko perampasan/pengambil-alihan</li> <li>b. Risiko pembatasan transfer</li> <li>c. Risiko perang dan gangguan sipil</li> <li>d. Risiko pelanggaran kontrak oleh otoritas pemerintah negara tujuan investasi</li> <li>a. Expropriation</li> <li>b. Transfer Restriction</li> <li>c. War and Civil disturbance</li> <li>d. Public Buyer Breach of contract</li> </ul>

### Strategi Tahun 2021

LPEI menjalankan beberapa strategi pada tahun 2021 dalam rangka penyediaan pembiayaan ekspor berupa asuransi meski di tengah kondisi pandemi sebagai berikut:

- Mempertahankan *credit limit/asuransi* yang telah diberikan kepada eksportir dengan melakukan monitoring secara berkala untuk transaksi buyer dan kondisi politik negara buyer.
- Melakukan penarikan *credit limit (freeze credit limit)* buyer apabila terdapat informasi politik yang sedang bergejolak baik dari media atau dari *partner international* LPEI di negara-negara buyer existing dan atas saran dari *partner internasional*, LPEI akan segera menyampaikan kepada tertanggung/eksportir untuk mengambil kebijakan penjualan dan menarik *credit limit buyer* dimaksud.
- Memperhatikan saran dari *partner internasional* terkait klasifikasi sektor usaha yang terdampak COVID-19, sehingga dalam melakukan upaya pengembangan bisnis asuransi LPEI fokus pada sektor usaha yang bukan merupakan kategori *high exposure (red category)*.
- Mempertimbangkan pertumbuhan tertanggung dengan adanya penerbitan polis pada masa pandemi dengan tetap memperhatikan proses *underwriting* yang prudent.

### Strategy for 2021

In the midst of pandemic, Indonesia Eximbank implemented several strategies in 2021 in order to facilitating export financing in the form of insurance, as follows:

- Maintaining the credit limit/insurance that has been prescribed to exporters by conducting regular monitoring of buyer transactions and the political conditions of the buyer's country.
- Carry out the mitigation process for countries that are experiencing political issues through temporary withdrawal of credit limits (freeze credit limits) so that Indonesia Eximbank immediately informs the insured/exporter to take sales policy and withdraw the credit limit of the buyer.
- Monitoring related business sectors that are affected by the COVID-19, so that efforts to develop the Indonesia Eximbank insurance business will be focusing on business sectors that are not in the high exposure category (red category).
- Reflection on the growth number of policyholders through the issuance of insurance policies during the pandemic while remain compliant with prudent underwriting process.

## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

### Operational Review Per Business Segment

#### Kinerja Tahun 2021

Produk asuransi LPEI khususnya asuransi Proteksi Piutang Dagang dan Asuransi *Marine Cargo Insurance* berkontribusi dalam mendukung kegiatan ekspor Indonesia dengan memberikan perlindungan pada transaksi ekspor mulai dari pengangkutan, selama pengiriman kepada *buyer* di luar negeri sampai dengan pembayaran kepada eksportir Indonesia. LPEI memberikan pelayanan terhadap 636 *buyer* yang tersebar di 73 negara. Selain itu, selama tahun 2021, LPEI berupaya membantu para eksportir dalam mendukung pertumbuhan volume ekspor melalui proteksi asuransi.

Seiring dengan peningkatan transaksi ekspor dan kenaikan permintaan produksi barang maupun jasa dari Indonesia, kinerja pembiayaan berupa asuransi LPEI juga mengalami perbaikan pada tahun 2021. Pendapatan premi (*gross*) secara kumulatif tumbuh 32,0% menjadi Rp10,67 miliar pada tahun 2021 dari posisi tahun sebelumnya sebesar Rp8,09 miliar. Dari jumlah tersebut, kontribusi dari sektor perindustrian mencapai 94,9% yang menunjukkan perbaikan transaksi ekspor dari Indonesia.

Selain itu, LPEI mampu membukukan nilai pertanggungan sebesar Rp10,94 triliun atau tumbuh 35,0% dari posisi tahun sebelumnya yang mencapai Rp8,11 triliun. Pencapaian tersebut terdiri dari Rp6,67 triliun untuk Asuransi *Marine Cargo* dan Rp4,25 triliun untuk Asuransi Proteksi Piutang Dagang. Pertumbuhan untuk kedua jenis asuransi tersebut masing-masing mencapai 42,0% dan 25,0%. Jumlah tertanggung asuransi pada tahun 2021 sebanyak 35 tertanggung yang berasal dari Asuransi Proteksi Piutang Dagang sejumlah 27 tertanggung dan asuransi gagal ekspor 8 tertanggung.

#### 2021 Performance

Indonesia Eximbank's insurance products, particularly Trade Credit and Marine Cargo Insurance, contributed supports to Indonesian export activities by providing protection for export transactions from transportation, during shipment to overseas buyers, to payments to Indonesian exporters. Indonesia Eximbank provides services to 636 buyers spreading across 73 countries. In addition, during 2021, Indonesia Eximbank strived to assist exporters in supporting export volume growth through insurance protection.

On the edge of increasing export transactions and demand for the production of goods and services from Indonesia, the insurance performance also improved in 2021. Cumulatively, premium income (*gross*) recorded a 32.0% increase to Rp10.67 billion in 2021 from previous year position of Rp8.09 billion. Of this amount, the contribution from the industrial sector reached 94.9%, indicating an improving export transaction from Indonesia.

Moreover, Indonesia Eximbank was able to book insurance limit of liability of Rp10.94 trillion or grew 35.0% from the previous year's position of Rp8.11 trillion. This achievement comprised of Marine Cargo Insurance of Rp6.67 trillion and Trade Credit Insurance standing at Rp4.25 trillion. These two types of insurance recorded a growth of 42.0% and 25.0%, respectively. Meanwhile, the total insureds in 2021 was 35 insureds consisting of Protection Insurance Trade Receivables of 27 insured and 8 insured from failed export insurance.

#### Pertumbuhan Pendapatan Premi Gross per Segmen

##### Gross Premium Revenue Growth per Segment

Industri   Industry	2020	%	2021	%
Konstruksi   Construction	5	0,07%	-	0,0%
Pengangkutan   Cargo	431	5,33%	29	0,3%
Perdagangan   Commerce	377	4,66%	208	2,0%
Perikanan   Fisheries	71	0,88%	-	0,0%
Perindustrian   Industrial	7.205	89,07%	10.118	94,9%
Perkebunan   Plantation	0	0,00%	310	2,9%
<b>Total</b>		<b>100,00%</b>	<b>10.666</b>	<b>100,0%</b>

## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

Operational Review Per Business Segment

### Pertumbuhan Pendapatan Premi Gross per Segmen

Gross Premium Revenue Growth per Segment

Asuransi   Insurance	Nama Produk   Product Name	2020	2021	%
Asuransi Gagal Bayar Default Insurance	Proteksi Piutang Dagang Account Receivables Protection	3.403.118	4.259.800	25%
Asuransi Gagal Eksport Export Default Insurance	Marine Cargo Insurance	4.705.608	6.678.800	42%
<b>Total</b>		<b>8.108.726</b>	<b>10.938.600</b>	<b>35%</b>

### Rencana Strategis Tahun 2022

LPEI telah menetapkan rencana strategis untuk tahun 2022 dalam rangka menunjang kegiatan usaha dan menjalankan mandat yang telah ditetapkan. Dalam rangka meningkatkan *customer base* Asuransi, kerja sama LPEI dengan Kementerian/Lembaga, Perbankan, asosiasi usaha dan institusi terkait lainnya akan diperkuat dan diperluas untuk merangkul lebih banyak eksportir yang melakukan penetrasi ke pasar-pasar baru. LPEI juga meningkatkan aktivitas *Product Holding* (asuransi) kepada nasabah yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan sehingga pertumbuhan asuransi akan lebih optimal.

LPEI senantiasa akan melakukan perbaikan dalam hal memperluas *coverage* pelayanan asuransi eksport untuk mendukung peningkatan nilai eksport nasional. Strategi ini terutama difokuskan untuk negara-negara tujuan eksport serta tujuan investasi yang potensial baik di negara-negara yang termasuk *low risk country* maupun *high risk country*.

Selain itu, LPEI melakukan pengembangan produk asuransi antara lain Buyers Credit Insurance (*Medium Long Term Insurance*) dan asuransi dengan skema syariah. Pengembangan produk ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan eksportir dalam memasuki pasar dan persaingan global terkait dengan pengelolaan risiko. LPEI juga mengoptimalkan kerja sama dengan perusahaan reasuransi lokal dan luar negeri dalam rangka mitigasi risiko untuk memenuhi prinsip prudent dan kehati-hatian.

### 2022 Strategic Plan

Indonesia Eximbank has set out strategic plans for 2022 to keep up its business activities and implementing the mandate that has been set. In a view to enhance its insurance customer base, Indonesia Eximbank will strengthen its cooperation with Ministries/Institutions, Banking, business associations and other related institutions and to embrace more exporters penetrating into new markets. Indonesia Eximbank as well as increasing its Product Holding (insurance) activities for debtors who have secured financing facilities hence optimizing the insurance growth.

Indonesia Eximbank will continuously be conducting improvements in terms of expanding its scope of export insurance services to support the national exports value enhancement.

Moreover, Indonesia Eximbank is developing new insurance products amongst others Buyers Credit Insurance(*Medium Long-Term Insurance*)and insurance with sharia schemes. These product developments aim at meeting the exporters' requirement in entering the market and global competition related to risk management. Indonesia Eximbank also optimizes cooperation with local and foreign reinsurance companies in order to mitigate risk and in compliant with prudent principles.

# **TRADE FINANCE**

## Trade Finance

.07



## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

### Operational Review Per Business Segment

LPEI menyediakan layanan *Trade Finance* terintegrasi yang merupakan sebuah *one stop solution services* dari *pre-shipment* hingga *post-shipment* yang dilengkapi dengan *technical assistance* dan *advisory* serta dukungan fasilitas *guarantee* maupun *insurance*. Selain itu, LPEI juga memperhatikan aspek pengelolaan risiko seperti risiko komersial dan operasional, risiko-risiko dalam transaksi *cross-border* serta memanfaatkan jaringan yang luas untuk memitigasi risiko dan optimasi pendanaan berbasis *Trade Finance* sehingga diharapkan diperoleh biaya dan *pricing* yang lebih efisien.

Sebagai sebuah lembaga keuangan khusus milik Pemerintah Republik Indonesia yang berperan meningkatkan kinerja ekspor nasional, LPEI meningkatkan layanan *Trade Finance* berupa penyediaan fasilitas kepada nasabah, pelaksanaan proses transaksi yang sesuai dengan standar ketentuan domestik dan internasional, *technical assistance* dan *advisory* oleh *certified and professional trade advisor*, penguatan manajemen risiko dan penerapan prinsip kepatuhan, serta kehati-hatian yang mengikuti isu-isu international *compliance*. Layanan *Trade Finance* yang terintegrasi tersebut diharapkan memberikan nilai tambah bagi eksportir dan pemasok sekaligus memberikan peluang perusahaan untuk berekspansi sehingga berdampak kepada peningkatan aktivitas ekonomi Indonesia terutama dari aktivitas ekspor.

#### Strategi Tahun 2021

Pandemi COVID-19 masih mempengaruhi kegiatan ekspor impor nasional di sepanjang tahun 2021. Namun demikian, volume *Trade Finance* LPEI mampu tumbuh dengan fokus strategi pada sektor Industri prioritas pemerintah melalui Penugasan Khusus *Eksport Trade Finance* (PKE TF) dimana terdapat produk-produk unggulan yang masih mempunyai *demand* tinggi di Luar Negeri di masa pandemi seperti Produk Karet, Kopi, Makanan Olahan, TPT, Alas Kaki dan Furniture.

LPEI memberikan fasilitas *Trade Finance* kepada pelaku usaha berupa *Pre Shipment Financing* untuk melakukan pembelian bahan baku dan *Post Shipment Financing* untuk percepatan perputaran piutang sehingga dapat cepat berproduksi kembali. Disamping hal tersebut penerapan *Service Level Agreement/SLA* yang terukur dalam setiap transaksi *Trade Finance* turut berperan

Indonesia Eximbank provides integrated Trade Finance services as a one stop solution service from pre-shipment to post-shipment equipped with technical assistance and advisory as well as support guarantee and insurance facilities. Moreover, Indonesia Eximbank also considers risk management aspects such as commercial and operational risks, risks in cross-border transactions and utilizes an extensive network to mitigate risks and optimizing Trade Finance based funding in order to obtain more efficient costs and pricing.

As a special financial institution owned by the Government of the Republic of Indonesia that has a key role in improving national export performance, Indonesia Eximbank improves Trade Finance services by providing facilities to customers, implementing transaction processes in accordance with domestic and international rules standard, technical assistance and advisory by certified and professional trade advisors, strengthening risk management and implementing compliance and prudent principles, as well as following international compliance issues. The integrated Trade Finance service is expected to provide added value for exporters and suppliers as well as provide opportunities for companies to expand so as to enhance Indonesia's economic activity particularly from export activities.

#### Strategy for 2021

The COVID-19 pandemic still affects national export import activities throughout 2021. However, Indonesia Eximbank Trade Finance volume was able to grow with a strategy focusing on the government's priority industrial sector through the Special Assignment for Export Trade Finance (Penugasan Khusus Eksport Trade Finance/ PKE TF) of which there are flagship products that still have high demand abroad during the pandemic, such as Rubber Products, Coffee, Processed Food, TPT, Footwear and Furniture.

Indonesia Eximbank provides Trade Finance facilities to business players in the form of Pre-Shipment Financing to purchase raw materials and Post Shipment Financing to accelerate receivables turnover so as to fasten production. Besides this, the implementation of a measurable Service Level Agreement/SLA in each Trade Finance transaction also plays an important role

## TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

### Operational Review Per Business Segment

penting dalam memberikan pelayanan yang baik kepada para eksportir sehingga dapat lebih produktif.

#### Kinerja Tahun 2021

Selama tahun 2021 volume *Trade Finance* mencapai Rp9,5 triliun atau tumbuh 51% dari tahun 2020 sebesar Rp6,3 triliun. Dari jumlah tersebut, nasabah segmen korporasi berkontribusi sebesar 80% dari pencapaian volume *Trade Finance* LPEI.

#### Strategi Tahun 2022

LPEI akan melakukan diversifikasi segmen untuk meningkatkan volume *Trade Finance* pada tahun 2022. Selain fokus pada industri prioritas Pemerintah melalui Penugasan khusus dan Penugasan Umum, pertumbuhan *Trade Finance* LPEI akan fokus pada:

- a. Sinergi antara debitur di Segmen Korporasi dengan segmen UMKM melalui *Supply Chain Financing*. Hal ini untuk menjaga rantai pasok bahan baku bagi eksportir besar sehingga menjaga performanya dalam memenuhi permintaan dari *Buyer* di Luar Negeri.
- b. UMKM Go Global, dengan skema *Business Matching* yaitu mempertemukan UMKM khususnya alumni CPNE LPEI (*Coaching Program for New Eksporter*) dengan pembeli potensial di luar negeri melalui sinergi dengan Kementerian Perdagangan/Kemendag, Kementerian Luar Negeri/Kemenlu, Kantor Dagang Industri/Kadin dan stakeholder terkait lainnya termasuk dengan *marketplace*. Program ini sekaligus juga memberikan dukungan pembiayaan kepada UMKM yang akan ekspor dalam bentuk *pre shipment financing* dan atau *post shipment financing*.
- c. Perluasan jaringan layanan *Trade Finance* untuk mempermudah eksportir mendapatkan layanan *Trade Finance* LPEI. Layanan ini dikembangkan dengan memaksimalkan fungsi kantor wilayah dan cabang LPEI serta kerjasama dengan bank devisa dalam negeri.

in providing good service to exporters and enhance their production level.

#### 2021 Performance

During 2021 the volume of *Trade Finance* reached Rp9.5 trillion or grew 51% from Rp6.3 trillion in 2020. Of this amount, corporate segment customers contributed 80% of Indonesia Eximbank *Trade Finance* volume achievement.

#### Strategy for 2022

Indonesia Eximbank will diversify its segments to increase the volume of *Trade Finance* in 2022. Apart from focusing on the Government's priority industry through NIA and general assignments, Indonesia Eximbank *Trade Finance* will focus its growth on:

- a. Synergy between borrowers in the Corporate Segment and the MSME segment through Supply Chain Financing. This is to maintain the supply chain of raw materials for large exporters so as to maintain their performance in fulfilling orders from overseas buyers.
- b. MSME Go Global, with a Business Matching scheme, which brings together MSMEs, particularly CPNE alumni (*Coaching Program for New Exporters*) with potential buyers abroad through synergies with the Ministry of Trade, Ministry of Foreign Affairs, Chambers of Commerce and Industry as well as other relevant stakeholders including the marketplace. This program also provides financing support to MSMEs that will export with pre-shipment financing and/or post-shipment financing.
- c. Expansion of the trade finance service network to facilitate the exporters to receive Indonesia Eximbank *Trade Finance* services. This service was developed by leveraging Indonesia Eximbank's regional offices and branches function as well as cooperation with domestic foreign exchange banks.



# TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

## Financial Performance Review

Tinjauan kinerja keuangan tahun fiskal 2021 disusun dengan mengacu kepada laporan keuangan audit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, a member firm of the RSM network, telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian LPEI yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Komponen Aset (Rp Juta)	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth (%)	Assets Components (Rp Million)
Kas	1,350	1,099	65	-94.09%	Cash
Giro pada Bank Indonesia	15,090	17,913	2,318	-87.06%	Current Account with Bank Indonesia
Giro pada Bank - Neto	335,734	5,520,843	674,106	-87.79%	Current Account with Banks - Net
Penempatan pada Bank - Neto	17,538,669	7,980,668	16,638,946	108.49%	Placements with Banks - Net
Efek-Efek	576,543	572,273	560,050	-2.14%	Securities
Tagihan Derivatif	1,410	-	6		Derivative Receivable
Pembiayaan dan Piutang	97,806,606	90,408,073	83,963,162	-7.13%	Financing and Receivables
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Pembiayaan dan Piutang	(11,281,176)	(17,672,164)	(17,948,183)	1.56%	Allowance for Impairment Losses - Financing and Receivables
Piutang Lainnya	290,587	303,054	298,034	-1.66%	Other receivables
CKPN - Piutang Lainnya	(2,989)	(7,242)	(40,159)	454.53%	Allowance for Impairment Losses - Other Receivables
Pajak Dibayar Dimuka	339,625	169,074	76,671	-54.65%	Prepaid Taxes
Biaya Dibayar Dimuka	14,582	12,068	15,782	30.78%	Prepaid Expenses
Piutang Asuransi dan Penjaminan - Neto	1,400	34,631	285,656	724.86%	Insurance and Guarantees Receivables - Net
Aset Reasuransi	4,853	1,284	2,615	103.66%	Reinsurance Assets
Tagihan Akseptasi - Neto	658,289	558,417	458,630	-17.87%	Acceptances Receivables- Net
Aset Tetap - Neto	1,253,355	1,166,348	1,103,425	-5.39%	Fixed Assets - Net
Aset Pajak Tangguhan - Neto	1,080,267	2,793,458	2,767,613	-0.93%	Deferred Tax Assets - Net
Aset Lain-Lain	67,530	224,763	182,184	-18.94%	Other Assets
<b>Jumlah Aset</b>	<b>108,701,725</b>	<b>92,084,560</b>	<b>89,040,921</b>	<b>-3.31%</b>	<b>Total Assets</b>

The financial performance review for the 2021 fiscal year is prepared by referring to the audited financial report of Indonesia Eximbank. Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, a member firm of the RSM network, has audited LPEI's financial statements comprising of consolidated statement of financial position as of December 31, 2021, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

### CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

## TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Financial Performance Review

### ASET

LPEI membukukan penurunan jumlah asset sebesar 3,31% dari Rp92,08 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp89,04 triliun pada tahun 2021. Penurunan asset ini terutama dipengaruhi oleh berkurangnya pembiayaan dan piutang sebesar 7,13% menjadi Rp83,96 triliun pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp90,41 triliun. Dari jumlah tersebut, pembiayaan dan piutang untuk penugasan umum (*gross*) mengalami penurunan sebesar 6,62% menjadi Rp68,58 triliun pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp73,45 triliun. Selain itu, pembiayaan dan piutang (*gross*) yang diberikan juga mengalami penurunan sebesar 19,08% menjadi Rp12,43 triliun. Namun demikian, pembiayaan dan piutang syariah (*gross*) untuk penugasan khusus tumbuh signifikan menjadi sebesar 84,59% menjadi Rp2,95 triliun. Penjelasan lebih rinci terkait pembiayaan dan piutang adalah sebagai berikut:

### ASSETS

The Company recorded a 3.31% decrease in total assets from Rp92.08 trillion in 2020 to Rp89.04 trillion in 2021. The decline in assets was mainly due to a 7.13% reduction in financing and receivables to Rp83.96 trillion in 2021 compared to the previous year of Rp90.41 trillion. Of the amount, financing and receivables for general assignment (gross) decreased by 6.62% to Rp68.58 trillion in 2021 compared to the previous year's position of Rp73.45 trillion. Moreover, financing and receivables (gross) also declined by 19.08% to Rp12.43 trillion. However, sharia financing and receivables (gross) for National Interest Account grew significantly by 84.59% to Rp2.95 trillion. A more detailed description about financing and receivables is as follows:

Uraian (Rp Juta)	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth (%)	Description (Rp Million)
Rupiah	57.867.646	53.655.180	49.410.430	-7,91%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	39.938.960	36.752.893	34.552.732	-5,99%	US Dollar
<b>Jumlah</b>	<b>97.806.606</b>	<b>90.408.073</b>	<b>83.963.162</b>	<b>-7,13%</b>	<b>Total</b>

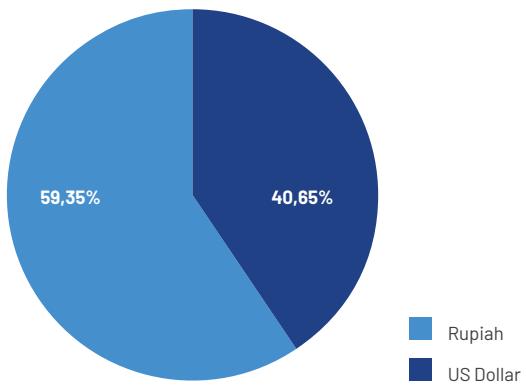
Pembiayaan dan piutang berdasarkan mata uang baik dalam Rupiah maupun Dolar Amerika Serikat mengalami penurunan pada tahun 2021. Pembiayaan dan piutang Rupiah maupun Dolar Amerika Serikat mencapai Rp49,41 triliun dan Rp34,55 triliun pada tahun 2021 dengan penurunan masing-masing sebesar 7,91% dan 5,99%. Komposisi pembiayaan dan piutang dalam mata uang Rupiah masih memiliki porsi dominan sebesar 58,85% dan 59,35% untuk tahun 2021 dan 2020 dibandingkan dalam Dolar Amerika Serikat dengan kontribusi sebesar 41,15% dan 40,65% untuk periode yang sama.

Financing and receivables by currencies either in Rupiah or United States Dollars decreased in 2021. Both the Rupiah and United States Dollar financing and receivables stood at Rp49.41 trillion and Rp34.55 trillion in 2021 with a decrease of 7.91% and 5.99%, respectively. The composition of financing and receivables denominated in Rupiah still had a dominant portion of 58.85% and 59.35% for 2021 and 2020 compared to the United States Dollar with a portion of 41.15% and 40.65% for the same period.

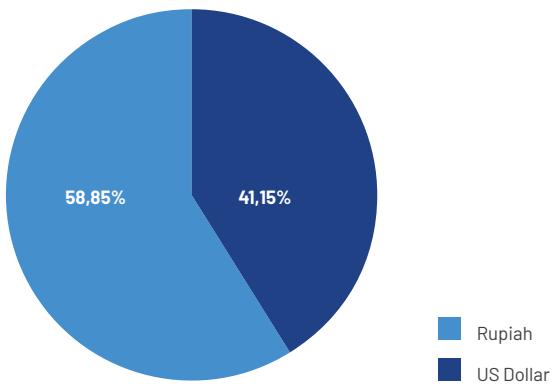
## TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Financial Performance Review

**Komposisi pembiayaan dan piutang 2020**  
Composition of financing and receivables in 2020



**Komposisi pembiayaan dan piutang 2021**  
Composition of financing and receivables in 2021



Berdasarkan sektor ekonomi, pembiayaan dan piutang untuk industri manufaktur mengalami penurunan sebesar 7,53% menjadi Rp39,02 triliun pada tahun 2021 dari Rp42,20 triliun. Industri lain yang mengalami penurunan dalam jumlah signifikan adalah industri pertanian, perburuan dan sarana pertanian serta perdagangan, restoran dan hotel dengan penurunan masing-masing sebesar 9,12% dan 22,98% menjadi Rp15,78 triliun dan Rp3,56 triliun pada tahun 2021.

Penurunan dari ketiga sektor ekonomi tersebut akibat dampak dari pandemi berpengaruh signifikan terhadap berkurangnya pembiayaan dan piutang pada tahun 2021 sebesar 7,13% menjadi Rp83,96 triliun.

By economic sector, financing and receivables for the manufacturing industry declined by 7.53% to Rp39.02 trillion in 2021 from Rp42.20 trillion. Other industries experiencing significant reductions were agriculture, hunting and agricultural services as well as trade, restaurants and hotels with a decline of 9.12% and 22.98%, respectively, to Rp15.78 trillion and Rp3.56 trillion in 2021.

A decline in the three economic sectors due to the impacts of pandemic affected significantly towards a 7.13% reduction in the financing and receivables in 2021 to Rp83.96 trillion.

Uraian (Rp Juta)	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth (%)	Description (Rp Million)
Perindustrian	47.290.229	42.197.515	39.018.849	-7,53%	Manufacturing
Pertanian, perburuan dan sarana pertanian	17.486.384	17.366.445	15.781.858	-9,12%	Agriculture, hunting and agriculture services
Konstruksi	5.884.400	4.948.571	4.007.886	-19,01%	Construction
Listrik, gas dan air	4.327.811	3.788.474	4.249.923	12,18%	Electricity, gas and water
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi	5.136.682	5.618.087	5.391.819	-4,03%	Transportation, warehousing and communication
Perdagangan, restoran dan hotel	4.712.918	4.624.359	3.561.710	-22,98%	Trading, restaurants and hotels
Jasa dunia usaha	3.180.162	4.165.079	4.470.373	7,33%	Business services
Pertambangan	9.160.751	7.185.469	6.539.449	-8,99%	Mining
Jasa-jasa sosial/masyarakat	67.293	69.697	814.898	1.069,20%	Social, services/society
Lain-lain	559.976	444.377	126.397	-71,56%	Others
<b>Jumlah</b>	<b>97.806.606</b>	<b>90.408.073</b>	<b>83.963.162</b>	<b>-7,13%</b>	<b>Total</b>

## TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Financial Performance Review

LPEI membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi ekonomi serta tren pembiayaan dan piutang tahun berjalan. Hal ini ditempuh untuk menjaga kualitas pembiayaan dan piutang serta sebagai bentuk langkah mitigasi risiko.

Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga tahun 2021 berdampak kepada perekonomian global dan Indonesia serta pembiayaan dan piutang LPEI. Dalam merespon kondisi serta adanya penerapan PSAK 71, LPEI harus meningkatkan CKPN pembiayaan dan piutang sebesar 1,56% atau dari Rp17,67 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp17,95 triliun pada tahun 2021.

The institution provided Allowance for Impairment Losses (CKPN) by considering the economic conditions as well as trends in financing and receivables for the current year. It is conducted to maintain the quality of financing and receivables as well as a form of risk mitigation measure.

The COVID-19 pandemic which prolonged until 2021 affected the global and Indonesian economies as well as the Company financing and receivables. In response to the conditions and the implementation of PSAK 71, the Company must increase the allowance for financing and receivables by 1.56% or from Rp17.67 trillion in 2020 to Rp17.95 trillion in 2021.

<b>Uraian (Rp Juta)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Pertumbuhan Growth (%)</b>	<b>Description (Rp Million)</b>
Saldo awal per 1 Januari	4,744,318	11,281,176	17,672,164	56.65%	Beginning balance as of January 1
Dampak penerapan awal PSAK 71	-	6,007,009	-	-100.00%	SFAS 71 first implementation impact
Saldo awal per 1 Januari -setelah penyesuaian	-	17,288,185	-	-100.00%	Balance January 1 (Current Year)
Pembentukan penyisihan tahun berjalan	6,671,355	446,425	222,000	-50.27%	Provision for impairment losses during the year
Penghapusbukan	(1,990)	-	(14,000)	(100.00%)	Written-off
Penyesuaian karena penjabaran mata uang asing	(132,507)	(62,446)	68,019	-208.92%	Foreign exchange translation adjustment
Saldo per 31 Desember	11,281,176	17,672,164	17,948,183	1.56%	Balance as of December 31

### Penempatan pada Bank - Neto

Di sisi lain, akun yang mengalami peningkatan signifikan dari aset LPEI adalah penempatan pada bank yang membukukan kenaikan 108,49% menjadi Rp16,64 triliun pada tahun 2021 dari hanya Rp7,98 triliun pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan deposito berjangka baik dalam Rupiah maupun Dollar Amerika Serikat.

### Placements with Banks - Net

On the other hand, accounts recording a significant increase in the Company assets were placements with banks which posted a 108.49% increase to Rp16.64 trillion in 2021 from only Rp7.98 trillion in the previous year. This increase was mainly due to an increase in time deposits either in Rupiah or United States Dollars.

## TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Financial Performance Review

### Piutang Asuransi dan Penjaminan

LPEI membukukan piutang asuransi dan penjaminan sebesar Rp285,66 miliar, naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp34,63 miliar. Selain itu, aset reasuransi naik menjadi Rp2,61 miliar pada tahun 2021 dari Rp1,28 miliar di tahun sebelumnya.

### LIABILITAS

Liabilitas LPEI mengalami penurunan sebesar 12,44% menjadi Rp58,92 triliun pada tahun 2021. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh berkurangnya efek utang yang diterbitkan sebesar 24,04% menjadi Rp27,71 triliun.

### Insurance and Guarantee Receivables

The Company booked insurance and guarantee receivables of Rp285.66 billion, a significant increase compared to the previous year of Rp34.63 billion. Moreover, reinsurance assets increased to Rp2.61 billion in 2021 from Rp1.28 billion in the previous year.

### LIABILITIES

The Company's liabilities decreased by 12.44% to Rp58.92 trillion in 2021. This reduction was mainly due to a 24.04% increase in debt securities issuance to Rp27.71 trillion.

Komponen Liabilitas (Rp Juta)	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth (%)	Liabilities Components (Rp Million)
Liabilitas Segera	35,030	37,936	32,570	-14.14%	Current liabilities
Liabilitas Akseptasi	658,289	562,727	460,540	-18.16%	Acceptances payable
Utang Pajak	45,929	11,664	12,950	11.03%	Taxes payable
Efek-Efek Utang yang Diterbitkan - Neto	45,146,915	36,481,044	27,712,389	-24.04%	Debt securities issued
Liabilitas Derivatif	2,258	-	-		Derivatives Payable
Pinjaman yang Diterima	41,492,912	28,599,773	28,799,571	0.70%	Fund borrowings
Utang Asuransi	2,150	2,563	4,055	58.21%	Insurance payable
Utang Penjaminan	497	560	62,363	11036.25%	Guarantee payable
Liabilitas Asuransi	6,515	3,230	6,390	97.83%	Insurance liabilities
Estimasi Klaim Penjaminan	6,848	41,129	392,559	854.46%	Estimated guarantee claim
Liabilitas Imbalan Kerja	292,329	182,553	157,675	-13.63%	Liability for employee benefits
Liabilitas Sewa	-	14,837	10,980	-26.00%	Lease liabilities
Liabilitas Lain-Lain	2,073,301	1,349,995	1,268,501	-6.04%	Other liabilities
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>89,762,973</b>	<b>67,288,011</b>	<b>58,920,543</b>	<b>-12.44%</b>	<b>Total Liabilities</b>

**TINJAUAN KINERJA KEUANGAN**  
Financial Performance Review

**Efek-Efek Utang yang Diterbitkan – Neto**

Penurunan efe-efek utang yang diterbitkan sebesar 24,04% pada tahun 2021 terutama disebabkan oleh beragam efek utang yang jatuh tempo di sepanjang tahun 2021. LPEI melakukan pelunasan senilai Rp8,77 triliun atas efek utang yang berupa obligasi korporasi, sukuk dan MTN yang jatuh tempo pada tahun 2021. Daftar efek utang yang jatuh tempo pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Debt securities issued – Net**

A 24.04% decline in debt securities issued in 2021 was mainly due to various debt securities maturing throughout 2021. The Company paid Rp8.77 trillion of debt securities in the form of corporate bonds, sukuk and MTN which had matured in 2021. List of debt securities maturing in 2021 is as follows:

No	Nama Efek Securities Names	Seri Series	Jumlah yang Jatuh Tempo per 31 Des 2021 Total Maturing Bond as of 31 Dec 2021 (Rp miliar   billion)	Tingkat Bunga per Tahun Interest Rate Per Year	Tanggal Penerbitan Issuance Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
<b>Obligasi Korporasi (Corporate Bonds)</b>								
1	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII Tahun 2016 Indonesia Eximbank Shelf Bonds II Phase VII of 2016	C	1.732	9,60%	19-Feb-16	19-Feb-21	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
2	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I Tahun 2016 Indonesia Eximbank Shelf Bonds III Phase I of 2016	C	2.252	8,70%	08-Jun-16	08-Jun-21	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
3	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II Tahun 2016 Indonesia Eximbank Shelf Bonds III Phase II of 2016	C	1.582	8,35%	15-Jul-16	25-Aug-21	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
4	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III Tahun 2016 Indonesia Eximbank Shelf Bonds III Phase III of 2016	C	282	8,20%	22-Nov-16	22-Nov-21	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
5	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Bonds III Phase VI of 2018	A	610	6,35%	14-Feb-18	14-Feb-21	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)

**TINJAUAN KINERJA KEUANGAN**  
Financial Performance Review

No	Nama Efek Securities Names	Seri Series	Jumlah yang Jatuh Tempo per 31 Des 2021 Total Maturing Bond as of 31 Dec 2021 (Rp miliar   billion)	Tingkat Bunga per Tahun Interest Rate Per Year	Tanggal Penerbitan Issuance Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
6	Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Bonds IV Phase I of 2018	A	938	7,50%	06-Jun-18	6-Jun-21	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
7	Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Bonds IV Phase II of 2018	B	190	7,50%	05-Sep-18	05-Sep-21	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
8	Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Bonds IV Phase III of 2018	B	81	8,75%	08-Nov-18	8-Nov-21	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
<b>Sukuk</b>								
1	Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank I Tahap I Tahun 2018 Indonesia Eximbank Sukuk Mudharabah II Phase I of 2018	B	365	7,50	06-Jun-18	06-Jun-21	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
2	Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2020 Indonesia Eximbank Sukuk Mudharabah II Phase I of 2020	B	100	6,75%	08-Jul-20	08-Jul-21	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
3	Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2020 Indonesia Eximbank Sukuk Mudharabah II Phase I of 2020	-	100	6,75%	08-Jul-20	18-Jul-21	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
<b>Medium Term Notes (MTN)</b>								
1	MTN I Indonesia Eximbank Tahun 2016 Indonesia Eximbank MTN I of 2016	-	500	8,65%	15-Jul-16	15-Jul-21	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)

## TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

### Financial Performance Review

#### Pinjaman yang Diterima

Di sisi lain, LPEI membukukan kenaikan pinjaman yang diterima sebesar 0,70% menjadi Rp28,80 triliun pada tahun 2021. Komposisi pinjaman yang diterima terdiri dari pinjaman sindikasi dan bilateral adalah sebesar 55,25% dan 44,75% untuk tahun 2021 dibandingkan 66,29% dan 33,71% untuk tahun sebelumnya.

#### Estimasi Klaim Penjaminan

LPEI melaporkan estimasi klaim penjaminan sebesar Rp392,56 miliar pada tahun 2021 dibandingkan hanya Rp41,13 miliar di tahun sebelumnya. Kenaikan signifikan ini terutama dipengaruhi oleh pembentukan tahun berjalan penjaminan - PEN dari Rp32,30 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp383,63 miliar pada tahun 2021.

#### EKUITAS

Pemerintah memberikan dukungan finansial secara berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU tentang LPEI. Setelah melakukan penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebanyak dua kali pada tahun 2020, Pemerintah kembali memberikan injeksi modal kepada LPEI pada tahun 2021. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 117 tahun 2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp5,0 triliun.

Penambahan penyertaan modal dimaksud terdiri dari Rp2,5 triliun digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI dan sebesar Rp2,5 triliun digunakan untuk melaksanakan Penugasan Khusus. Modal tersebut efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI pada tanggal 29 Desember 2021 dan tanggal 30 Desember 2021.

Dengan demikian, pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 kontribusi modal dari Pemerintah Negara Republik Indonesia pada LPEI adalah sebesar Rp37,34 triliun dan Rp32,15 triliun. Adapun uraian terkait ekuitas LPEI adalah sebagai berikut:

#### Fund Borrowings

On the other hand, the Company booked an increase in fund borrowings by 0.70% to Rp28.80 trillion in 2021. The Fund borrowings composition comprised of syndicated and bilateral loans of 55.25% and 44.75% for 2021 from 66.29% and 33.71% in the previous year.

#### Estimated Guarantee Claims

The Company reported an estimated guarantee claim worth Rp392.56 billion in 2021 compared to only Rp41.13 billion in the previous year. This significant increase was mainly affected by addition during the year of guarantee - PEN from Rp32.30 billion in 2020 to Rp383.63 billion in 2021.

#### EQUITY

The government provides sustainable financial support as mandated by the Law regarding Indonesia Eximbank. After increasing the Equity Participation of the Government of the Republic of Indonesia (PMN) 2 times in 2020, the Government injected capital again to LPEI in 2021. Based on Government Regulation No. 117 of 2021 dated 15 December 2021 regarding Government of Indonesia's capital contribution to Indonesia Eximbank stated that the Government of Indonesia increased its capital contribution by Rp5.0 trillion.

The aforementioned increase in capital is composed of Rp2.5 trillion to increase the Company's business capacity and Rp2.5 trillion to implement National Interest Account. The capital injection was received and recorded by Indonesia Eximbank effective as of 29 December 2021 and 30 December 2021.

As such, as of 31 December 2021 and 2020, the capital contribution from the Government of the Republic of Indonesia to Indonesia Eximbank was Rp37.34 trillion and Rp32.15 trillion, respectively. The description regarding the equity is as follows:

**TINJAUAN KINERJA KEUANGAN**  
Financial Performance Review

Komponen Ekuitas (Rp Juta)	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth (%)	Equity Components (Rp Million)
<b>Kontribusi modal Pemerintah</b>					
Penugasan Umum	16.946.276	20.946.276	23.640.939	12,86%	General Assignment
Penugasan Khusus	5.200.000	11.200.000	13.700.000	22,32%	National Interest Account
	22.146.276	32.146.276	37.340.939	16,16%	
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak tangguhan	13.245	39.456	26.462	-32,93%	Unrealized gain of financial assets at fair value through other comprehensive income, net of deferred tax
Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Pasti - Neto Setelah Pajak Tangguhan	8.019	91.645	119.529	30,43%	Remeasurement of defined benefit obligation, net of deferred tax
<b>Saldo Laba</b>					
Telah Ditentukan Penggunaanya					Appropriated:
Cadangan Umum	322.161	322.161	322.161	0,00%	General reserve
Cadangan Tujuan	758.235	758.235	758.235	0,00%	Specific reserve
	1.080.396	1.080.396	1.080.396	0,00%	
Belum Ditentukan Penggunaannya	(4.309.184)	(8.561.224)	(8.446.949)	-1,33%	Unappropriated
Kepentingan non-pengendali	-	-	1	-	Non-controlling interest
<b>Total Ekuitas</b>	<b>18.938.752</b>	<b>24.796.549</b>	<b>30.120.377</b>	<b>100%</b>	<b>Total Equity</b>

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**

**CONSOLIDATED PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME STATEMENTS**

Uraian (Rp juta)	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth (%)	Description (Rp Million)
<b>Pendapatan dan Beban Operasional</b>					
Pendapatan Bunga dan Usaha Syariah	7.061.466	5.102.881	4.263.520	-16,45%	Interest Income and Income from Sharia
Pendapatan Usaha dari Ujrah	-	-	-		Income from Ujrah
Beban Bunga	(5.646.218)	(4.262.993)	(3.057.215)	(28,28%)	Interest Expense

**TINJAUAN KINERJA KEUANGAN**  
Financial Performance Review

<b>Uraian (Rp juta)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Pertumbuhan Growth (%)</b>	<b>Description (Rp Million)</b>
Pendapatan Bunga dan Usaha Syariah - Neto	1.415.248	839.888	1.206.305	43,63%	Interest Income and Income from Sharia - Net
Pendapatan Dari Asuransi - Neto					
- Pendapatan dari Asuransi	8.018	9.843	12.357	25,54%	Income from Insurance -
- Premi Reasuransi	(4.698)	(5.739)	(7.568)	31,87%	Reinsurance Premiums -
(Kenaikan)/Penurunan pada Liabilitas Asuransi	(2.499)	2.979	(3.190)	-207,08%	(Increase)/Decrease in Insurance Liabilities
Kenaikan/(Penurunan) Pada Aset Reasuransi	1.166	(3.437)	1.348	-139,22%	Increase/(Decrease) In Reinsurance Assets
Beban Klaim Asuransi dan Lainnya	(952)	(1.395)	(1.074)	-23,01%	Claim Expense from Insurance and Other
Pendapatan Dari Penjaminan	99.222	80.194	79.353	-1,05%	Income from Guarantee
Keuntungan Transaksi Mata uang asing - neto	31.292	70.889	24.715	-65,14%	Gain on Foreign Exchange transactions - net
Provisi dan Komisi Selain dari Pembiayaan dan Piutang	82.898	86.861	71.443	-17,75%	Non financing and receivables related fees and commission
Lain-lain	80.032	77.400	38.036	-50,86%	Others
Pendapatan Operasional Lainnya - Net	294.479	317.595	215.420	-32,17%	Total Other Operating Income - Net
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan	(6.681.341)	(423.080)	(257.752)	-39,08%	Provision for impairment Losses on financial assets
Penyisihan Kerugian Estimasi Klaim Penjaminan	6.802	(1.946)	(114)	-94,14%	Provision for Impairment Losses on Estimated Guarantee Claim
Beban Operasional Lainnya					Other Operating Expenses
Gaji dan Tunjangan	(366.280)	(395.732)	(467.309)	18,09%	Salaries and benefits
Umum dan Administrasi	(300.391)	(235.346)	(269.077)	14,33%	General and administrative
Beban Lain-Lain	(24.563)	(45.809)	(22.377)	-51,15%	Others
(Rugi) Laba Operasional	(5.656.046)	55.570	405.096	628,98%	Total Other Operating Income - Net
Pendapatan Bukan Operasional - Neto	21.188	6.152	3.943	-35,91%	Non-Operating Income - Net
(Rugi) Laba Sebelum Beban Pajak	(5.634.858)	61.722	409.039	562,71%	(Loss) Income Before Tax Expense
Manfaat Pajak	924.009	226.666	(21.643)	-109,55%	Tax Benefit

## TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Financial Performance Review

Uraian (Rp juta)	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth (%)	Description (Rp Million)
(Rugi) Laba Tahun Berjalan	(4.710.849)	288.388	387.396	34,33%	(Loss) Income for The Year
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain - Neto Setelah Pajak	15.982	109.837	14.890	-86,44%	Other Comprehensive Income (Loss) - Net of Tax
Total (Rugi) Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	(4.694.867)	398.225	402.286	1,02%	Total Comprehensive (Loss) Income for the year

### Pendapatan Bunga dan Usaha Syariah

LPEI membukukan pendapatan bunga dan syariah sebesar Rp4,26 triliun pada tahun 2021 atau turun 16,45% dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya senilai Rp5,10 triliun. Penurunan ini dipengaruhi oleh berkurangnya pendapatan bunga dari penugasan umum menjadi Rp2,93 triliun dengan penurunan sebesar Rp1,02 triliun. Meski demikian, penugasan umum untuk usaha syariah mengalami kenaikan sebesar 10,92% menjadi Rp920,74 miliar.

Berbeda dengan penugasan umum, LPEI berhasil mencatatkan kenaikan pendapatan bunga dari penugasan khusus sebesar 30,41% dari Rp314,58 miliar menjadi Rp410,23 miliar. Penjelasan lebih rinci terkait pendapatan bunga dan usaha LPEI selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

### Interest Income and Income from Sharia

The Company posted interest income and sharia income of Rp4.26 trillion in 2021, a 16.45% decrease compared to the previous year's achievement of Rp5.10 trillion. This decrease was influenced by a decrease in interest income from general assignments to Rp2.93 trillion with a reduction of Rp1.02 trillion. However, general assignments for sharia businesses increased by 10.92% to Rp920.74 billion.

In contrast to general assignments, the Company successfully recorded an increase of interest income from national interest account by 30.41% from Rp314.58 billion to Rp410.23 billion. A more detailed explanation regarding interest income and business income for the last three years is as follows:

Uraian (Rp juta)	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth (%)	Description (Rp Million)
Pendapatan Bunga					Interest Income
Pembentukan dan piutang	5.222.653	3.767.277	2.967.729	-21,22%	Financing and Receivables
Penempatan pada bank	706.855	477.224	346.143	-27,47%	Placement with banks
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	33.620	-	-	-	Reverse repos
Giro pada bank	3.147	1.397	2.733	95,63%	Current account with bank
Efek-efek	16.641	26.914	26.176	-2,74%	Securities
Total pendapatan Bunga Pendapatan Usaha Syariah	5.982.916	4.272.812	3.342.781	-21,77%	Total Interest Income from Sharia

**TINJAUAN KINERJA KEUANGAN**  
Financial Performance Review

<b>Uraian (Rp juta)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Pertumbuhan Growth (%)</b>	<b>Description (Rp Million)</b>
Pembiayaan Musyarakah	835.747	681.746	807.499	18 45%	Musyarakah Financing
Marjin Piutang Murabahah	242.803	148.323	113.240	-23 65%	Murabahah Receivables Margin
Total Pendapatan Usaha Syariah	1.078.550	830.069	920.739	10 92%	Total Income from Sharia
Total Pendapatan Bunga dan Usaha Syariah	7.061.466	5.102.881	4.263.520	-16 45%	Total Interest Income and Income from Sharia

**Beban bunga**

LPEI mampu membukukan penurunan beban bunga sebesar 28,28% menjadi Rp3,06 triliun pada tahun 2021. Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya efek-efek utang yang diterbitkan karena telah jatuh tempo pada tahun tersebut. Beban bunga dari efek utang yang diterbitkan turun 22,90% dari Rp3,05 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp2,35 triliun pada tahun 2020. Sementara itu, beban bunga dari pinjaman yang diterima sebesar Rp703,43 miliar, turun 41,87% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,21 triliun.

**Interest Expense**

The Company was able to record a decrease of interest expense by 28.28% to Rp3.06 trillion in 2021. This declining profile was in line with the lowering debt securities issued because they matured in that year. Interest expense from debt securities issued decreased by 22.90% from Rp3.05 trillion in 2021 to Rp2.35 trillion in 2020. Meanwhile, interest expense from fund borrowings was Rp703.43 billion, decreased 41.87% from the previous year amounted to Rp1.21 trillion.

<b>Uraian (Rp juta)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Pertumbuhan Growth (%)</b>	<b>Description (Rp Million)</b>
Efek-efek utang yang diterbitkan	3.473.728	3.052.891	2.353.782	-22,90%	Debt securities issued
Pinjaman yang diterima	2.172.490	1.210.102	703.433	-41,87%	Fund borrowing
Jumlah	5.646.218	4.262.993	3.057.215	-28,28%	Total

**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**

Seiring dengan kenaikan pendapatan bunga dan usaha syariah – neto dan berkurangnya pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan, LPEI mampu membukukan laba sebelum pajak senilai Rp409,04 miliar pada tahun 2021. Pencapaian ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp61,72 miliar.

**Profit (Loss) Before Tax**

In line with an increase in the interest income and sharia - net business and a reduction in the provision for impairment losses on financial assets, the Company was able to book income before tax expense at Rp409.04 billion in 2021, much higher than the previous year of only Rp61.72 billion.

## TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

### Financial Performance Review

#### Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Sejalan dengan kenaikan signifikan atas laba sebelum pajak tersebut, laba tahun berjalan LPEI mampu tumbuh 34,33% menjadi Rp387,40 miliar pada tahun 2021.

#### LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Uraian (Rp juta)	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth (%)	Description (Rp Million)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	12.197.956	7.121.718	7.466.129	4,84%	Net Cash Provided By Operating Activities
Kas Neto Diperoleh dari/(Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(183.464)	35.135	(48.527)	-238,12%	Net Cash Provided By/(used In) Investing Activities
Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan	(4.890.494)	(11.579.733)	(3.663.516)	-68,36%	Net Cash Used In Financing Activities
Kenaikan/(Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas	7.155.290	(4.351.991)	3.778.801	-186,83%	Net Increase/(Decrease) In Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	10.735.553	17.890.843	13.538.852	-24,33%	Cash and Cash Equivalent at Beginning of Year
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	17.890.843	13.538.852	17.317.653	27,91%	Cash and Cash Equivalent at End of Year

#### Arus Kas dari Kegiatan Operasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi mengalami kenaikan sebesar 4,84% menjadi Rp7,47 triliun pada tahun 2021 dari Rp7,12 triliun pada tahun 2020. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan usaha syariah dari Rp830,07 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp920,74 miliar. Selain itu, LPEI juga membukukan penurunan pembayaran bunga dan pembiayaan lainnya menjadi Rp3,04 triliun pada tahun 2021 dari Rp4,06 triliun.

#### Arus Kas dari Kegiatan Investasi

LPEI membukukan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi senilai Rp48,53 miliar pada tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh perolehan aset tetap sebesar Rp44,74 miliar pada tahun tersebut. Sementara itu, pada tahun sebelumnya, LPEI melaporkan kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi senilai Rp35,13 miliar.

#### Income for The Year

In line with the significant increase in profit before tax, the Company's profit for the year was able to grow 34.33% to Rp387.40 billion in 2021.

#### CONSOLIDATED CASH FLOWS STATEMENTS

#### Cash Flows from Operating Activities

Net cash provided by operating activities increased by 4.84% to Rp7.47 trillion in 2021 from Rp7.12 trillion in 2020. This increase was mainly influenced by an increase in sharia operating income from Rp830.07 billion in 2020 to Rp920.74 billion. In addition, the Company also posted a decrease in interest payments and other financing to Rp3.04 trillion in 2021 from Rp4.06 trillion.

#### Cash Flows from Investing Activities

The Company booked net cash used in investing activities worth Rp48.53 billion in 2021. This was due to the acquisitions of premises and equipment of Rp44.74 billion in that year. Meanwhile, in the previous year, the Company reported net cash provided by investing activities standing at Rp35.13 billion.

### **Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan**

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan mengalami penurunan sebesar 68,36% menjadi Rp3,66 triliun pada tahun 2021. Hal ini terutama dipengaruhi oleh penurunan arus kas yang digunakan untuk melunasi pinjaman dimana di tahun 2020 tercatat penurunan pinjaman yang diterima sebesar Rp12,89 triliun sementara di tahun 2021 kenaikan pinjaman yang diterima sebesar Rp199,80 miliar.

### **ANALISA KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG SERTA RASIO KEUANGAN YANG RELEVAN**

#### **Kemampuan Membayar Utang**

Penilaian kemampuan LPEI dalam memenuhi seluruh kewajiban baik jangka panjang maupun jangka pendek dapat dilihat dari penilaian eksternal berupa peringkat (*rating*) yang ditetapkan oleh lembaga pemeringkat PT Pefindo. Pefindo telah memberikan peringkat AAA atau peringkat terbaik atas semua efek utang yang diterbitkan oleh LPEI baik berupa obligasi korporasi, sukuk dan MTN.

Menurut Pefindo, peringkat tersebut mencerminkan kemampuan superior LPEI untuk memenuhi semua kewajiban yang didukung oleh status LPEI sebagai sebuah lembaga pemerintah, profil permodalan yang kuat dan posisinya yang kuat dalam penyediaan pembiayaan ekspor meski dihadapkan tantangan atas kualitas aset dan profitabilitas yang masih lemah. Peringkat atas efek utang yang ditetapkan Pefindo dapat dilihat di bagian ikhtisar obligasi.

#### **Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan**

LPEI mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah sebagai pembiayaan dengan kolektabilitas Kurang lancar, Diragukan, dan Macet. Di tengah tantangan pandemi COVID-19 LPEI senantiasa mengendalikan kualitas pembiayaannya sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2021.

### **Cash Flows from Financing Activities**

Net cash used in financing activities decreased by 68.36% to Rp3.66 trillion in 2021. It was mainly affected by a decline in cash flows for payments of fund borrowings. By 2020, there was a decrease in proceeds from fund borrowings of Rp12.89 trillion while in 2021 an increase in the proceeds from fund borrowings worth Rp199.80 billion.

### **SOLVENCY AND RECEIVABLES COLLECTABILITY, AND RELEVANT FINANCIAL RATIOS**

#### **Solvency**

The assessment of the Company's ability to fulfill its all obligations either long-term or short-term can be seen from the external assessment in the form of a rating assigned by a rating agency, PT Pefindo. Pefindo has assigned an AAA rating or the best rating to all debt securities issued by Indonesia Eximbank either in corporate bonds, sukuk or MTN.

According to Pefindo, the rating reflects Indonesia Eximbank's excellent ability to meet all obligations supported by the Company status as a government institution, strong capitalization profile and strong position in the export financing segment despite challenges in weak asset quality and profitability. The ratings for debt securities assigned by Pefindo can be seen in the bond highlights.

#### **Financing Collectability Levels**

The Company classifies non-performing financing as financing with collectability Substandard, Doubtful, and Loss. In the midst of the COVID-19 pandemic challenges, the Company always controls the quality of its financing in accordance with the Financial Services Authority (OJK) regulations in 2021.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN  
Financial Performance Review

Uraian (Rp juta)	2019	2020	2021	Description (Rp Million)
<b>Pembiayaan Lancar</b>	<b>74.929.793</b>	<b>66.832.220</b>	<b>66.301.873</b>	<b>Current Financing</b>
Lancar	63.336.224	49.832.561	41.776.862	Current
Dalam Perhatian Khusus	11.593.569	16.999.659	24.525.011	Special Mention
<b>Pembiayaan Bermasalah</b>	<b>22.876.813</b>	<b>23.575.853</b>	<b>17.661.289</b>	<b>Non-Performing Financing</b>
Kurang Lancar	7.679.581	4.938.575	1.836.833	Substandard
Diragukan	3.700.435	15.060	653.922	Doubtful
Macet	11.496.797	18.622.218	15.170.534	Loss
<b>Total Pembiayaan</b>	<b>97.806.606</b>	<b>90.408.073</b>	<b>83.963.162</b>	<b>Total Financing</b>
CKPN NPL	(9.220.223)	(13.184.648)	(11.681.946)	CKPN NPL

**Rasio Kecukupan Permodalan**

Meski terpengaruh oleh dampak dari pandemi COVID-19, LPEI mampu mempertahankan rasio kecukupan permodalan yang kuat di sepanjang tahun 2021. Capital to Adequacy Ratio (CAR) LPEI sebesar 37,19% pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 28,07%, atau berada di atas persyaratan minimum sesuai profil risiko yang ditetapkan oleh regulator. Posisi permodalan yang kuat tersebut memberikan dukungan terhadap pengembangan portofolio pembiayaan LPEI secara berkelanjutan.

**Capital Adequacy Ratio**

Despite being affected by the impacts of COVID-19 pandemic, the Company was able to maintain a strong capital adequacy ratio throughout 2021. The Company Capital Adequacy Ratio (CAR) was 37.19% in 2021 compared to the previous year of 28.07%, or was above the minimum requirements according to the risk profile set by the regulator. This strong capital position provides support for the sustainable development of the Company financing portfolio.

Uraian (Rp juta)	2019	2020	2021	Description (Rp Million)
<b>Kecukupan Permodalan</b>				<b>Capital Adequacy</b>
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	17,32%	28,07%	37,19%	Capital to Adequacy Ratio (CAR)
<b>Kualitas Aset</b>				<b>Asset Quality</b>
Pembiayaan Bermasalah Terhadap Total Pembiayaan - gross	23,39%	26,08%	21,03%	Non-Performing Loans to Total Financing - gross (Gross NPL)
Pembiayaan Bermasalah Terhadap Total Pembiayaan - net	13,96%	11,49%	7,12%	Non-Performing Loans to Total Financing - net (Net NPL)
<b>Rentabilitas</b>				<b>Earnings</b>
Tingkat Pengembalian Atas Aset	-4,84%	0,06%	0,46%	Return on Assets (ROA)
Tingkat Pengembalian Atas Ekuitas	-21,63%	1,41%	1,54%	Return on Equity (ROE)
Marjin Bunga Bersih	1,18%	0,77%	1,17%	Net Interest Margin (NIM)
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	179,63%	98,86%	90,87%	Operating Expense to Operating Income (BOPO)

## TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Financial Performance Review

Uraian (Rp juta)	2019	2020	2021	Description (Rp Million)
<b>Rasio Kepatuhan</b>				<b>Compliance Ratio</b>
Posisi Devisa Neto (PDN)	9,70%	16,96%	7,07%	Net Open Position (NOP)
Utang terhadap Ekuitas(DER)- x	4,58	2,63	1,88	Debt to Equity Ratio - x

### Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPL)

Secara keseluruhan, hasil kinerja finansial LPEI tahun 2021 selaras dengan fokus yang ingin dicapai. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perbaikan kualitas aset yang tercermin dari penurunan rasio NPL gross dan net menjadi sebesar dibandingkan 21,03% dan 7,12% pada tahun 2021 dari posisi tahun sebelumnya 26,08% dan 11,49%.

### Rentabilitas

Laba tahun berjalan LPEI yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan aset dan ekuitas berdampak positif terhadap *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) pada tahun 2021. Rasio ROA dan ROE masing-masing sebesar 0,46% dan 1,54% dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,06% da 1,41%. Selain itu, pencapaian profitabilitas yang lebih baik ditunjukkan dengan kenaikan rasio marjin bunga bersih menjadi 1,17% pada tahun 2021 dari 0,77% pada tahun sebelumnya. Perbaikan rasio ini sejalan dengan penurunan rasio BOPO dari 98,86% pada tahun 2020 menjadi 90,87% pada tahun 2021.

### STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

#### Struktur Permodalan

LPEI membukukan peningkatan rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) LPEI tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Dengan demikian, permodalan LPEI tahun 2021 telah memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai relatif terhadap profil risikonya, disertai dengan pengelolaan permodalan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha LPEI.

### Non-performing Financing Ratio (NPL)

In general, the Company's 2021 financial performance is in line with the key objectives of Indonesia Eximbank. It is indicated by an improving asset quality as reflected in lower NPL gross and NPL net ratio to 21.03% and 7.12% in 2021 from previous year's position of 26.08% and 11.49%.

### Profitability

Indonesia Eximbank's income for year that grew higher than assets and equity affected positively towards *Return on Assets* (ROA) and *Return on Equity* (ROE) in 2021. ROA and ROE ratios were 0.46% and 1.54% compared to 0.06% and 1.41% in 2020, respectively. Moreover, an improved profitability profile was showed by an increase in net interest margin ratio to 1.17% in 2021 from 0.77% in the previous year. The improved ratio was in line with a decrease of BOPO ratio from 98.86% in 2020 to 90.87% in 2021.

### CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

#### Capital Structure

The Company posted an improving capital adequacy ratio (CAR) in 2021 compared to 2020. Henceforth, the Company's capital in 2021 has had the quality and adequacy toward its risk profile, which followed by strong capital management in accordance with the Company's business scale, and business complexities.

## TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Financial Performance Review

Rasio KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar tercatat naik signifikan dari sebelumnya 28,07% di tahun 2020 menjadi 37,19% di tahun 2021, atau jauh di atas ketentuan minimal yang sebesar 8%. Terjaganya rasio KPMM terutama disebabkan adanya PMN dari Pemerintah selama periode 2010-2021.

CAR ratio with credit risk and market risk was significantly increased from previously 28.07% in 2020 to 37.19% in 2021, or above minimum benchmark of 8%. The manageable CAR was mainly due to State Equity Participation (PMN) from the Government during the period of 2010-2021.

Uraian (Rp juta)	2019	2020	2021	Capital Structure (Rp Million)
<b>Modal</b>				Capital
Modal Inti	18.930.733	24.560.709	29.807.149	Core Capital
Modal Pelengkap	635.822	1.078.559	898.504	Supplementary Capital
Jumlah Modal Untuk Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar	19.566.555	25.639.268	30.705.653	Total Capital for Credit Risk, Operational Risk, and Market Risk
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Tanpa Memperhitungkan Risiko Pasar	111.064.412	87.000.665	80.400.905	Risk Weighted Assets (RWA) Without Market Risk Charge
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar	112.963.175	91.348.831	82.568.767	Risk Weighted Assets (RWA) With Market Risk Charge
Rasio KPMM Tanpa Memperhitungkan Risiko Pasar	17,62%	29,47%	38,19%	CAR Without Market Risk Charge
Rasio KPMM Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar	17,32%	28,07%	37,19%	CAR With Market Risk Charge
Rasio KPMM Minimum	8,00%	8,00%	8,00%	Minimum CAR

### Kebijakan Struktur Modal

LPEI menerima penambahan PMN dari Pemerintah sebesar Rp5,0 triliun selama tahun 2021. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 117 tahun 2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp5,0 triliun.

Penambahan penyertaan modal dimaksud terdiri dari Rp2,5 triliun digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI dan sebesar Rp2,5 triliun digunakan untuk melaksanakan Penugasan Khusus. Modal tersebut efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI pada tanggal 29 Desember 2021 dan tanggal 30 Desember 2021.

### Capital Structure Policy

The Company received additional PMN from the Government worth Rp5.0 trillion throughout 2021. Based on Government Regulation no. 117 Year 2021 dated 15 December 2021 regarding Additional State Equity Participation of the Republic of Indonesia into the Equity of the Indonesian Export Financing Institution, it is stated that the State of the Republic of Indonesia has made additional state equity participation of Rp5.0 trillion.

The additional capital participation in question consists of Rp. 2.5 trillion which is used to increase the Company's business capacity and Rp. 2.5 trillion is used to carry out Special Assignments. The capital is effectively received and recorded by Indonesia Eximbank on 29 December 2021 and 30 December 2021.

## TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Financial Performance Review

Terdapat kapitalisasi modal di tahun 2021 sebesar 194,66 miliar. Per 31 Desember 2021 dan 2020, kontribusi modal dari Pemerintah Negara Republik Indonesia pada LPEI masing-masing sebesar Rp37,34 triliun dan Rp32,15 triliun.

### **Dasar Penetapan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal**

Berdasarkan UU No. 2 tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang LPEI, modal awal LPEI ditetapkan minimal Rp4 triliun. Pemerintah menutup kekurangan tersebut dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan mekanisme yang berlaku jika modal LPEI berkurang dari Rp4 triliun. Penambahan modal LPEI untuk menutup kekurangan modal ditetapkan dengan PP.

LPEI telah beberapa kali menerima kontribusi modal dari Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam bentuk PMN sebagai perwujudan dukungan kuat Pemerintah RI kepada LPEI. PMN yang telah disetorkan kepada LPEI diantaranya sebesar Rp2 triliun pada tahun 2010; Rp1 triliun pada tahun 2014; Rp1 triliun pada tahun 2015; Rp4 triliun pada tahun 2016; Rp3,2 triliun pada tahun 2017; Rp2,5 triliun pada tahun 2019; Rp10 triliun pada tahun 2020; dan Rp5 triliun pada tahun 2021.

There is a capital capitalization in 2021 of 194.66 billion. Thus, as of 31 December 2021 and 2020, the capital contribution from the Government of the Republic of Indonesia to Indonesia Eximbank is Rp37.34 trillion each and Rp32.15 trillion.

### **Basis for Determining Management Policy on Capital Structure**

Based on Law no. 2 Year 2009 dated 12 January 2009 concerning Indonesia Eximbank, the initial capital of Indonesia Eximbank is set at a minimum of Rp4 trillion. The government covers the shortfall from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) based on the applicable mechanism if the Company's capital is reduced from Rp4 trillion. The addition of capital to cover the lack of capital is stipulated by PP.

Indonesia Eximbank has several times received capital contributions from the Government of the Republic of Indonesia in the form of PMN as a manifestation of the Government of Indonesia's strong support for Indonesia Eximbank. The PMN that have been deposited to Indonesia Eximbank were Rp2 trillion in 2010; Rp1 trillion in 2014; Rp1 trillion in 2015; Rp4 trillion in 2016; Rp3.2 trillion in 2017; Rp2.5 trillion in 2019; Rp10 trillion in 2020; and Rp5 trillion in 2021.

Tahun Year	PMN Peningkatan Kapasitas Usaha Business Capacity Enhancement	PMN Penugasan Khusus Special Assignment	PMN Dalam Rangka PEN PEN	Total PMN	Dasar Hukum Legal Basis
	(Rp miliar) (Rp billion)	(Rp miliar) (Rp billion)	(Rp miliar) (Rp billion)		
2010	2.000			2.000	Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 2010 Government Regulation No. 73 Year 2010
2014	1.000			1.000	Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2014 Government Regulation No. 86 Year 2014
2015	1.000			1.000	Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 2015 Government Regulation No. 67 Year 2015
2016	2.000	2.000		4.000	Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2016 Government Regulation No. 81 Year 2016
2017	1.000	2.200		3.200	Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2017 Government Regulation No. 55 Year 2017
2019	1.500	1.000		2.500	Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2019 Government Regulation No. 44 Year 2019

## TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Financial Performance Review

Tahun Year	PMN Peningkatan Kapasitas Usaha Business Capacity Enhancement	PMN Penugasan Khusus Special Assignment	PMN Dalam Rangka PEN PEN	Total PMN	Dasar Hukum Legal Basis
	(Rp miliar) (Rp billion)	(Rp miliar) (Rp billion)	(Rp miliar) (Rp billion)		
2020	4.000	1.000		5.000	Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2020 Government Regulation No. 40 Year 2020
2020			5.000	5.000	Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2020 Government Regulation No. 78 Year 2020
2021	2.500	2.500		5.000	Peraturan Pemerintah No.117 tahun 2021 Government Regulation No. 117 Year 2021
<b>Jumlah</b>	<b>15.000</b>	<b>8.700</b>	<b>5.000</b>	<b>28.700</b>	<b>Total</b>

### IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Di sepanjang tahun 2021, LPEI tidak memiliki ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, LPEI tidak menyajikan informasi terkait tujuan dari ikatan tersebut; sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; mata uang yang menjadi denominasi; dan langkah yang direncanakan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

### REALISASI INVESTASI/BELANJA BARANG MODAL

#### Jenis, Tujuan, dan Nilai Investasi Barang Modal

LPEI merealisasikan investasi barang modal sebesar Rp46,47 miliar atau dibandingkan tahun sebelumnya hanya sebesar Rp8,78 miliar. Investasi barang modal tersebut dimaksudkan untuk mendukung operasional bisnis berkelanjutan pada tahun 2021 berupa gedung, peralatan dan perlengkapan kantor, kendaraan bermotor, dan aset dalam penyelesaian. Dengan penambahan ini, maka jumlah aset tetap LPEI untuk tahun buku 2021 sebesar Rp1,53 triliun. Berikut informasi investasi belanja barang modal LPEI pada tahun 2021:

### MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT

Throughout 2021, Indonesia Eximbank did not have material commitments for capital goods investment with various parties. To that end, Indonesia Eximbank does not provide information regarding the purpose of the commitment; source of funds expected to fulfill the commitment; the currency being denominated; and measures planned to hedge the risk of associated foreign currency position.

### INVESTMENT REALIZATION/CAPITAL EXPENDITURE

#### Type, Purpose, and Value of Capital Goods Investment

Indonesia Eximbank realized capital goods investment worth Rp46.47 billion or compared to the previous year of only Rp8.78 billion. The investment in capital goods is intended to support sustainable business operations in 2021 in the form of buildings, office equipment and supplies, motor vehicles, and assets in progress. With this addition, the total fixed assets of Indonesia Eximbank for the 2021 financial year is Rp1.53 trillion. The following is information on investment for Indonesia Eximbank's capital expenditures in 2021:

**TINJAUAN KINERJA KEUANGAN**  
Financial Performance Review

<b>Investasi Barang Modal (Rp Juta)</b>	<b>2021</b>	<b>Capital Expenditure (Rp Millions)</b>
Gedung	1.727	Building
Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.620	Office Furniture and fixtures
Kendaraan Bermotor	7.200	Motor vehicles
Aset Dalam Penyelesaian	34.925	Construction in progress
<b>Total Investasi Barang Modal</b>	<b>46.472</b>	<b>Total Capital Expenditure</b>

**PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI  
2021 SERTA PROYEKSI 2022**

Secara keseluruhan LPEI dapat merealisasikan capaian sejalan dengan target dimana rata-rata di atas 80% dan bahkan ada yang melampaui target yaitu total asuransi di tengah tantangan pandemi COVID-19 yang masih berlanjut selama tahun 2021. Namun demikian, masih terdapat indikator yang realisasinya dibawah target yaitu penjaminan. Adapun rincian perbandingan antara target dan realisasi LPEI di tahun 2021 serta proyeksinya pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**COMPARISON OF 2020 TARGET AND REALIZATION AND  
2021 PROJECTION**

Cumulatively, Indonesia Eximbank can realize achievements in line with the target of which the average achievement is above 80% and some even exceed the target, namely total insurance in the midst of the challenges of the COVID-19 pandemic that will continue throughout 2021. However, there are still indicators whose realization is below the target, namely guarantee. A detailed comparison between targets and realization in 2021 and its projections in 2022 are as follows:

<b>Indikator (Rp Juta)</b>	<b>2021</b>			<b>Proyeksi 2022 2022 Projection</b>
	<b>Target</b>	<b>Realisasi Realization</b>	<b>Pencapaian Achievements</b>	
Total Aset Total Assets	97.812.051	89.040.921	91,09%	88.896.131
Total Pembiayaan Total Financing	94.276.128	83.963.162	89,07%	88.231.361
Total Penjaminan (termasuk PEN) Total Guarantee (including PEN)	76.810.221	13.136.226	17,10%	11.441.609
Total Asuransi (Plafond) Total Insurance	9.222.416	10.938.409	118,61%	12.100.241
Total Ekuitas Total Equity	30.238.364	30.120.377	99,82%	30.629.927
Laba Bersih Net Profit	554.348	387.396	81,20%	456.362

**INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI  
SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN**

Mengacu kepada penjelasan di catatan laporan keuangan audit LPEI no. 46, terdapat perubahan susunan Dewan Direktur LPEI setelah tanggal laporan akuntan sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

**SUBSEQUENT EVENTS**

Referring to the explanation of Indonesia Eximbank audit financial report notes no. 46, there is a change in the composition of Indonesia Eximbank's Board of Directors after the date of the accountant's report as described in the following table.

## TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Financial Performance Review

Selain itu, terdapat perubahan susunan Komite Audit LPEI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur No. 0004/KDE/01/2022 tanggal 7 Januari 2022 yang diketuai Arus Gunawan dengan 2 (dua) anggota yaitu Yulida S. Marbun dan Peter Umar Abdilla A.

LPEI juga melaporkan perubahan Ketua Satuan Kerja Audit Internal terkini oleh I Nyowan Gede Suarja dan perubahan Sekretaris LPEI yang saat ini dijabat oleh Chesna F Anwar berdasarkan Memorandum Prosedur No.MPO.0003/KDE/01/2022 tanggal 3 Januari 2022.

Furthermore, there was a change in the composition of the Audit Committee based on the Decree of Board of Directors No. 0004/KDE/01/2022 dated 7 January 2022, chaired by Arus Gunawan with 2 (two) members, namely Yulida S. Marbun and Peter Umar Abdilla A.

Indonesia Eximbank also reports a recent change in the Head of the Internal Audit Unit by I Nyowan Gede Suarja and the change in the Secretary, currently held by Chesna F Anwar based on the Memorandum of Procedure No.MPO.0003/KDE/01/2022 dated 3 January 2022.

Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif	Rijani Tirtoso	Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director
Anggota Dewan Direktur	Suminto	Member of the Board of Directors
Anggota Dewan Direktur	Kasan	Member of the Board of Directors
Anggota Dewan Direktur	Arus Gunawan	Member of the the Board of Directors
Anggota Dewan Direktur	Felia Salim	Member of Board of Directors
Anggota Dewan Direktur	D. James Rompas	Member of the Board of Directors

### DIVIDEN DAN KEBIJAKAN DIVIDEN

Mengacu kepada pasal 21 UU-RI No. 2 Tahun 2009 tentang LPEI dan PMK No. 260/PMK.06/2015, surplus yang diperoleh LPEI dalam kurun waktu satu tahun kegiatan digunakan untuk cadangan umum, cadangan tujuan, jasa produksi dan tantiem dan bagian laba Pemerintah. Persentase alokasi surplus ditetapkan sebagai cadangan umum dan cadangan tujuan sebesar 90% dari surplus dan jasa produksi dan tantiem serta bagian laba Pemerintah sebesar 10% dari surplus. Besarnya persentase untuk cadangan umum, cadangan tujuan, jasa produksi dan tantiem, serta bagian laba Pemerintah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Terdapat surplus di tahun 2021, namun penetapan alokasi surplus akan dilakukan di tahun 2022. Sementara penetapan alokasi surplus tahun 2020 berdasarkan KMK No.S-688/MK.06/ 2021 tanggal 3 Agustus 2021

### DIVIDEND AND DIVIDEND POLICY

According to article 21 of Republic of Indonesia Law No. 2 Year 2009 regarding Indonesia Eximbank and Regulation of the Ministry of Finance No. 260/PMK.06/2015, the surplus gained by Indonesia Eximbank in one year operation shall be used for general reserve, special purpose reserve, performance bonus and tantiem, and the Government's profit share. The surplus allocation percentage shall be determined as general reserve and special purpose reserve shall be 90% of the surplus and performance bonus and tantiem and the Government's profit share shall be 10% of the surplus. The percentage amount for general reserve, special purpose

There was a surplus in 2021. However, its surplus allocation assignment will be carried out in 2022. Meanwhile, the determination of 2020 surplus allocation was based on KMK No.S-688/MK.06/2021 dated 3 August 2021.

**PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)**

LPEI melaporkan tidak terdapat program kepemilikan saham oleh pegawai dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) mengingat kedudukan LPEI sebagai lembaga yang dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah.

**PENGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM**

LPEI tidak melakukan penerbitan efek bersifat utang di sepanjang tahun 2021. Oleh karena itu, LPEI tidak menyajikan informasi terkait penggunaan dana hasil penawaran umum.

**TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN & TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI**

**Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan**

LPEI menyatakan tidak melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun pelaporan yang berakhir akhir pada tanggal 31 Desember 2021.

**Transaksi dengan Pihak Afiliasi atau Berelasi**

LPEI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan dalam menjalankan kegiatan normal usaha. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi tersebut dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama. Penjelasan lengkap terkait transaksi material dengan pihak berelasi selama tahun 2021 terdapat pada Catatan No. 38 atas Laporan Keuangan Audited.

**INFORMASI TRANSAKSI TERKAIT INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, RESTRUKTURISASI**

Di sepanjang tahun 2021, LPEI tidak melakukan investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi dan restrukturisasi. Oleh karena itu, LPEI tidak menyajikan informasi terkait hal tersebut seperti tanggal, nilai, dan objek transaksi; nama pihak yang melakukan transaksi; sifat hubungan

**STOCK OPTION PROGRAMS FOR EMPLOYEES AND/OR MANAGEMENT (ESOP/MSOP)**

Indonesia Eximbank reported that there were no employee and/or management share ownership programs implemented by the company (ESOP/MSOP) considering LPEI's position as an institution wholly owned by the Government.

**USE OF PUBLIC OFFERING PROCEEDS**

Indonesia Eximbank did not issue debt securities throughout 2021. To that end, Indonesia Eximbank did not provide information regarding the use of proceeds from the public offering.

**MATERIAL TRANSACTIONS WITH CONFLICT OF INTERESTS & TRANSAKSI DENGAN AFFILIATES**

**Material Transactions with Conflict of Interests**

Indonesia Eximbank stated that it had not entered into transactions containing conflicts of interest during the reporting year ending on 31 December 2021.

**Transactions with Affiliated or Related Parties**

Indonesia Eximbank conducts transactions with related parties due to ownership and/or management relationships in conducting normal business activities. All transactions with related parties are performed under mutually agreed policies and terms. A complete explanation regarding material transactions with related parties during 2021 can be found in Note No. 38 on the Audited Financial Statements.

**TRANSAKSI INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, ACQUISITION, RESTRUCTURING**

Throughout 2021, Indonesia Eximbank did not exercise any investment, expansion, divestment, acquisition and restructuring. To that end, Indonesia Eximbank did not provide information related to this matter, such as the date, value, and object of the transaction; the

## TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Financial Performance Review

afiliasi (jika ada); penjelasan mengenai kewajaran transaksi; dan pemenuhan ketentuan terkait.

### PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN

Terdapat perubahan peraturan dan atau peraturan baru yang berkaitan dengan LPEI pada tahun 2021. Terkait dengan hal tersebut, LPEI senantiasa melakukan kajian terhadap peraturan baru maupun amendemen dari peraturan yang telah ada sebelumnya untuk mengidentifikasi dampak yang mungkin ditimbulkan dari perubahan ketentuan tersebut dan kepatuhan terhadap peraturan tersebut sebagai berikut:

name of the party conducting the transaction; nature of affiliation relationship (if any); explanation of the fairness of the transaction; and compliance with related provisions.

### REGULATORY CHANGES THAT SIGNIFICANTLY IMPACT THE COMPANY

There will be changes to regulations and/or new regulations related to Indonesia Eximbank in 2021. In this regard, Indonesia Eximbank always conducts studies on new regulations and amendments to existing regulations to identify the impacts that may result from changes to these provisions and compliance with these regulations as follows:

No	Regulasi   Regulations
1	Peraturan Menteri Keuangan No. 04/PMK.03.2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Regulation of the Minister of Finance No. 04/PMK.03.2021 concerning Payment of Stamp Duty, General Characteristics and Special Characteristics
2	Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Government Regulation No. 35 of 2021 concerning Certain Time Work Agreements, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment
3	Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.08/2021 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN Regulation of the Minister of Finance No. 32/PMK.08/2021 concerning Amendments to PMK Number 98/PMK.08/2020 concerning Government Guarantee Procedures for Corporate Business Entities Through Designated Guaranteed Enterprises in the implementation of the PEN Program
4	Surat Edaran PPATK No. 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Format Transaksi dan Format Aktivitas dalam Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme Bagi Penyedia Jasa Keuangan PPATK Circular No. 4 of 2021 concerning Guidelines for the Use of Transaction Formats and Activity Formats in the Submission of Suspicious Financial Transaction Reports and Suspicious Financial Transaction Reports Related to Terrorism Financing for Financial Service Providers
5	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Circular of the Financial Services Authority No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Format and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies
6	Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Government Regulation No. 36 of 2021 concerning Wages
7	Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Government Regulation No. 37 of 2021 concerning the Implementation of Job Loss Guarantee Program

**TINJAUAN KINERJA KEUANGAN**  
Financial Performance Review

No	Regulasi   Regulations
8	Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil Government Regulation No. 8 of 2021 of the Company's Authorized Capital as well as Registration of Establishment, Change, and Dissolution of the Company that Meets the Criteria for Micro and Small Businesses
9	Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Government Regulation No. 7 of 2021 concerning Facilitation, Protection, and Empowerment of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises
10	Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Government Regulation No. 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises
11	Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Government Regulation No. 40 of 2021 concerning the Implementation of Special Economic Zones
12	Peraturan Menteri Keuangan No. 30/PMK.08/2021 Tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional Regulation of the Minister of Finance No. 30/PMK.08/2021 concerning Procedures for Providing Central Government Guarantees for the Acceleration of the Implementation of National Strategy Projects
13	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Circular Letter of the Financial Services Authority No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Format and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies
14	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 22/SEOJK.05/2021 perihal Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa Keuangan Non bank Circular of the Financial Services Authority No. 22/SEOJK.05/2021 concerning the Application of Risk Management in the Use of Information Technology by Non-bank Financial Services Institutions
15	Peraturan PPATK No. 11 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme PPATK Regulation No. 11 of 2021 concerning Information Systems for Suspected Terrorism Financing
16	Peraturan PPATK No. 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi goAML bagi Pihak Pelapor PPATK Regulation No. 14 of 2021 concerning Technical Instructions for the Use of goAML Applications for Reporting Parties
17	Peraturan Menteri Keuangan No. 144/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Regulation of the Minister of Finance No. 144/PMK.06/2021 concerning Procedures for the Write-Off and Write-Off of Receivables of Indonesia Eximbank
18	Peraturan Menteri Keuangan No. 183/PMK.08/2021 tentang Penugasan Khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Regulation of the Minister of Finance No. 183/PMK.08/2021 concerning National Interest Account to Indonesia Eximbank
19	Peraturan Pemerintah No. 117 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Government Regulation No. 117 of 2021 concerning the Capital Participation Addition of the Republic of Indonesia into the Capital of Indonesia Eximbank

## TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Financial Performance Review

### PENERAPAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

LPEI dan entitas anaknya telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2021, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan konsolidasian, yaitu:

- PSAK 22 (Amendemen 2019): Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis;
- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, Amendemen PSAK 62 dan Amendemen PSAK 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2;
- PSAK 110 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Sukuk;
- PSAK 111 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Wa'd;
- PSAK 112: Akuntansi Wakaf;
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2021): Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK 13 (Penyesuaian Tahunan 2021): Properti Investasi;
- PSAK 48 (Penyesuaian Tahunan 2021): Penurunan Nilai Aset;
- PSAK 66 (Penyesuaian Tahunan 2021): Pengaturan Bersama; dan
- ISAK 16 (Penyesuaian Tahunan 2021): Perjanjian Konsesi Jasa.

Amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 April 2021 yaitu:

- Amendemen PSAK 73: Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19 Setelah 30 Juni 2021.

Penerapan standar akuntansi baru tersebut di atas tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

### KONTRIBUSI TERHADAP PENERIMAAN NEGARA

Selama tahun 2021, LPEI melakukan pembayaran kepada Pemerintah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp64,89 miliar yang telah disetorkan ke kas Negara. Pada tahun sebelumnya, tidak terdapat pembayaran ke Pemerintah sebagai PNBP yang diajukan oleh LPEI.

### INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

LPEI berkomitmen memperbaiki dan menguatkan kinerja keuangan agar usaha tetap tumbuh berkelanjutan. Hal

### IMPLEMENTATION OF ACCOUNTING POLICY CHANGES

As of 1 January 2021, Indonesia Eximbank and subsidiary have implemented revised accounting standards that are relevant to operations, which are as follows:

- PSAK 22 (Amendment 2019): Business Combinations regarding Definition of Business;
- Amendment PSAK 71, Amendment PSAK 55, Amendment PSAK 60, Amendment PSAK 62, and Amendment PSAK 73 regarding Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2;
- PSAK 110 (Improvement 2020): Accounting for Sukuk;
- PSAK 111 (Improvement 2020): Accounting for Wa'd; and
- PSAK 112: Accounting for Endowments;
- PSAK 1 (Annual Improvement 2021): Presentation of Financial Statements;
- PSAK 13 (Annual Improvement 2021): Investment Properties;
- PSAK 48 (Annual Improvement 2021): Impairment of Assets
- PSAK 66 (Annual Improvement 2021): Joint Arrangement; and
- ISAK 16 (Annual Improvement 2021): Service Concession Arrangements.

Amendments to the standard that are effective for periods beginning on or after 1 April 2021 are:

- PSAK 73: Leases regarding Covid-19-related Rent Concessions Beyond 30 June 2021.

Implementation of new accounting standards has no significant impact to the consolidated financial statements.

### CONTRIBUTION TO STATE REVENUE

During 2021, Indonesia Eximbank made payments to the Government in the form of Non-Tax State Revenue (PNBP) of Rp64.89 billion which had been deposited into the State treasury. In the previous year, there were no payments to the Government as PNBP made by Indonesia Eximbank.

### BUSINESS CONTINUITY INFORMATION

Indonesia Eximbank is committed to improving and strengthening financial performance so that the

ini dilakukan karena manajemen memiliki keyakinan atas sumber daya dan kemampuan yang dimiliki untuk menjalankan kegiatan usaha LPEI di masa mendatang secara berkelanjutan. Namun demikian, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan LPEI untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

#### **Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Lembaga**

Sebagai sebuah institusi pemerintah, LPEI hanya dapat dibubarkan dengan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU No.2/2009. Selain itu, LPEI juga tidak dapat dipailitkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Kepailitan. LPEI juga tidak sedang menghadapi hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha dengan mempertimbangkan kondisi kinerja operasional dan keuangan LPEI pada tahun 2021.

#### **Asesmen Manajemen atas Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Lembaga**

Manajemen telah melakukan kajian outlook ekonomi baik dalam jangka pendek maupun menengah dan pengaruhnya terhadap kondisi operasional dan keuangan LPEI di masa mendatang. Hal ini juga menjadi salah satu pembahasan dalam rencana kerja tahunan Lembaga. Meski demikian, Manajemen tidak mengetahui akan adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan Lembaga untuk melanjutkan usahanya.

business continues to grow sustainably. This is done because management has confidence in its resources and capabilities to perform Indonesia Eximbank's business activities going forward in a sustainable manner. However, management is not aware of any material uncertainties that could cast significant doubt on the Indonesia Eximbank's ability to continue as a going concern.

#### **Matters that Potentially Have Significant Impacts to the Company Business Continuity**

As a government institution, Indonesia Eximbank can only be dissolved by law as stipulated in Article 39 of Law No. 2/2009. Moreover, Indonesia Eximbank also cannot be bankrupt under the provisions of the Law on Bankruptcy. Indonesia Eximbank is also not facing matters that have a significant effect on business continuity by considering the condition of Indonesia Eximbank's operational and financial performance in 2021.

#### **Management Assessment on Matters that Potentially Have Significant Impacts to the Company Business Continuity**

Management has reviewed the economic outlook either in the short or medium term and its impact towards Indonesia Eximbank's operational and financial conditions in the future. This is also one of the discussions in the Institution's annual work plan. However, Management is not aware of any material uncertainty that could cast significant doubt on the institution's ability to continue its business.

## TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

### Financial Performance Review

#### Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan Asesmen

LPEI menggunakan berbagai indikator ekonomi dalam APBN 2021 diantaranya pertumbuhan ekonomi, inflasi, proyeksi ekspor, dan pergerakan kurs. Berbagai kajian ekonomi yang diterbitkan oleh lembaga internasional seperti IMF, World Bank dan OECD yang membahas berbagai aspek perekonomian dunia seperti pertumbuhan PDB negara-negara di dunia terutama yang merupakan tujuan ekspor Indonesia disamping perkembangan harga komoditas utama dan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan dunia.

Secara internal, dengan menggunakan pendekatan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT) LPEI menganalisis kinerja operasional dan kinerja keuangan Lembaga serta pelaksanaan tata kelola di internal Lembaga.

#### Assumptions Used by Management in Conducting Assessments

Indonesia Eximbank uses various economic indicators in the 2021 APBN including economic growth, inflation, export projections, and exchange rate movements. Various economic studies published by international institutions such as the IMF, World Bank and OECD discuss various aspects of the world economy such as GDP growth of countries in the world, particularly for Indonesia's export destinations, apart from updates in main commodity prices and factors affecting world trade.

Internally, using the Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) approach, Indonesia Eximbank will analyse the operational and financial performance of the Institution as well as the implementation of internal governance of the Institution.



# TEKNOLOGI INFORMASI

Information Technology



LPEI telah mendasari operasinya dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara luas dan telah melakukan investasi secara signifikan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Indonesia Eximbank has based its operations on the widespread information and communication technology application and has made significant investments in the information and communication technology.

Teknologi informasi adalah salah satu faktor kunci sukses yang berpengaruh dalam mendukung pencapaian sasaran Lembaga. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu alat bantu dalam mengembangkan usaha bagi seluruh unit kerja di LPEI. Teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak bagi perusahaan dalam hal:

- Produktivitas dan efisiensi
- Cara berkomunikasi secara internal dan eksternal
- Cara melayani nasabah
- Cara untuk memperoleh keunggulan komparatif
- Cara membuat perusahaan untuk terpandang
- Cara untuk eksis pada era informasi
- Bentuk, besar dan struktur organisasi

LPEI telah mendasari operasinya dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara luas dan telah melakukan investasi secara signifikan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

#### **Strategi Jangka Panjang atau Master Plan TI**

Dalam mendukung strategi bisnis LPEI untuk mencapai kebutuhan Teknologi Informasi, telah disusun peta jalan (*roadmap*) berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pemenuhan atas regulasi yang terkait
2. Keselarasan dengan rencana jangka panjang LPEI.
3. Kondisi terkini LPEI; dan
4. Perkembangan teknologi dan industri

Adapun *roadmap* pengembangan (*blue print*) TSI 2021-2024 yang telah disusun dan ditetapkan terbagi dalam 3 (tiga) besaran fase pengembangan dan implementasi, yaitu:

1. Fase-1: Penataan dan Penguatan TI (2021 - pertengahan 2022)
2. Fase-2: Peningkatan Berkelanjutan TI (pertengahan 2022 - 2023)
3. Fase-3: Pemberdayaan Strategis TI (2024)

Information technology is one of the key success factors influencing the Institution's goals achievement. Information and communication technology is one of the tools in developing business for Indonesia Eximbank's all work units. Information and communication technology affects the company in terms of:

- Productivity and efficiency
- How to communicate internally and externally
- How to serve customers
- How to achieve comparative advantage
- How to make a company stand out
- Ways to exist in the information age
- Form, size and organizational structure

Indonesia Eximbank has based its operations on the widespread information and communication technology application and has made significant investments in the information and communication technology.

#### **Long Term Strategy or IT Master Plan**

In supporting Indonesia Eximbank's business strategy to achieve Information Technology requirements, a roadmap has been prepared based on the following considerations:

1. Compliance with related regulations
2. Alignment with Indonesia Eximbank's long-term plan.
3. Indonesia Eximbank's current condition; and
4. Technological and industrial development

The 2021-2024 TSI development roadmap (*blue print*) that has been prepared and determined is classified into 3 (three) stages of development and implementation, namely:

1. Phase-1: IT Structuring and Strengthening (2021-mid 2022)
2. Phase-2: IT Continuous Improvement (mid 2022 - 2023)
3. Phase-3: Strategic IT Empowerment (2024)

## TEKNOLOGI INFORMASI

Information Technology



**TSI sebagai Strategic Enabler untuk mewujudkan LPEI sebagai Fasilitator, Akselerator, AGregator, dan Arranger dalam mendukung program ekspor nasional**

**TSI as a Strategic Enabler to realize LPEI as a Facilitator, Accelerator, Aggregator, and Arranger in supporting the national export program.**

Phase - 3 Pemberdayaan TI IT Strategy Empowerment (2024-2025)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peremajaan Core UBS</li> <li>Office 365</li> <li>Sunset Data Center LPEI</li> <li>UBS Core Revitalization</li> <li>Office 365</li> <li>LPEI Sunset Data Center</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upgrade Core UBS</li> <li>Integrated Customer Portal</li> <li>Sistem Integrasi</li> <li>Full Hosting di DC Kemenkeu</li> <li>UBS Core Upgrade</li> <li>Integrated Customer Portal</li> <li>System Integration</li> <li>Full Hosting at DC Ministry of Finance</li> </ul>	<b>Integrated Security Access and Monitoring</b> Integrated Security Access and Monitoring	Sertifikasi Lanjutan Advanced Certification	<b>Best Practice IT Governance</b> IT Governance Best Practice	
Phase - 2 Peningkatan Berkelaanjutan TI IT Continuous Improvement (mid 2022-2023)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peremajaan berkelanjutan</li> <li>Pemberdayaan DRC</li> <li>Continuous Revitalization</li> <li>DRC Empowerment</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upgrade Core Treasury</li> <li>Revamp Trade Finance, Syariah, Credit System, Aplikasi Pendukung</li> <li>MIS Tahap-2</li> <li>System untuk SPV</li> <li>Hosting di DC Kemenkeu</li> <li>Treasury Core Upgrade</li> <li>Revamp Trade Finance, Sharia, Credit System, Supporting Applications</li> <li>MIS Stage-2</li> <li>System for SPV</li> <li>Hosting at DC Ministry of Finance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dual Authentication</li> <li>Penutupan Temuan ITJEN lanjutan</li> <li>Improve Security Monitoring</li> <li>Dual Authentication</li> <li>Closing of continued ITJEN findings</li> <li>Improved Security Monitoring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikasi Lanjutan</li> <li>Pengembangan staff menjadi ITRM/Business Analyst</li> <li>Advanced Certification</li> <li>Staff development to become ITRM / Business Analyst</li> </ul>	Perbaikan Tata Kelola berkelanjutan: <ul style="list-style-type: none"> <li>Petunjuk Teknis Operasional</li> <li>IT Key Risk Indicator</li> <li>SLA Management</li> </ul> Continuous Governance Improvement: <ul style="list-style-type: none"> <li>Operational Technical Manual</li> <li>IT Key Risk Indicator</li> <li>SLA Management</li> </ul>	Sinergi dan Kolaborasi dengan PUSINTEK, ITJEN dan BSSN Synergy and Collaboration with PUSINTEK, ITJEN, and BSSN
Phase - 1 Penataan dan Pengutuhan TI IT Organization and Strengthening (2021 - mid 2022)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peremajaan dan Penambahan Capacity</li> <li>Relokasi DRC ke DC Kemenkeu</li> <li>Continuous Revitalization</li> <li>DRC Empowerment</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS Tahap-1</li> <li>Upgrade Core Asuransi</li> <li>Trade Finance</li> <li>Aplikasi Pendukung</li> <li>Hosting di DC Kemenkeu</li> <li>MIS Stage-1</li> <li>Insurance Core Upgrade</li> <li>Trade Finance</li> <li>Support Applications</li> <li>Hosting at DC Ministry of Finance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Device Access Control</li> <li>Internet &amp; Email Security</li> <li>Penutupan Temuan ITJEN</li> <li>Security information Monitoring</li> <li>Device Access Control</li> <li>Internet &amp; Email Security</li> <li>Closing of ITJEN's findings</li> <li>Security Information Event Monitoring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikasi</li> <li>IT Security Officer on Board</li> <li>Rekrutmen IT PMO</li> <li>Certification</li> <li>IT Security Officer On Board</li> <li>PMO IT Recruitment</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisi PDD Kebijakan &amp; Manual Operasional TSI</li> <li>Penerapan Tata Kelola</li> <li>Revised PDD Policy &amp; Operational Manual TSI</li> <li>Implementation of Governance</li> </ul>	
Infrastuktur Infrastructure	System	Security	People		Tata Kelola TI IT Governance	

## TEKNOLOGI INFORMASI

### Information Technology

#### Program kerja Divisi TSI Tahun 2021

Divisi TSI memiliki program kerja tahun 2021 yang terdiri dari:

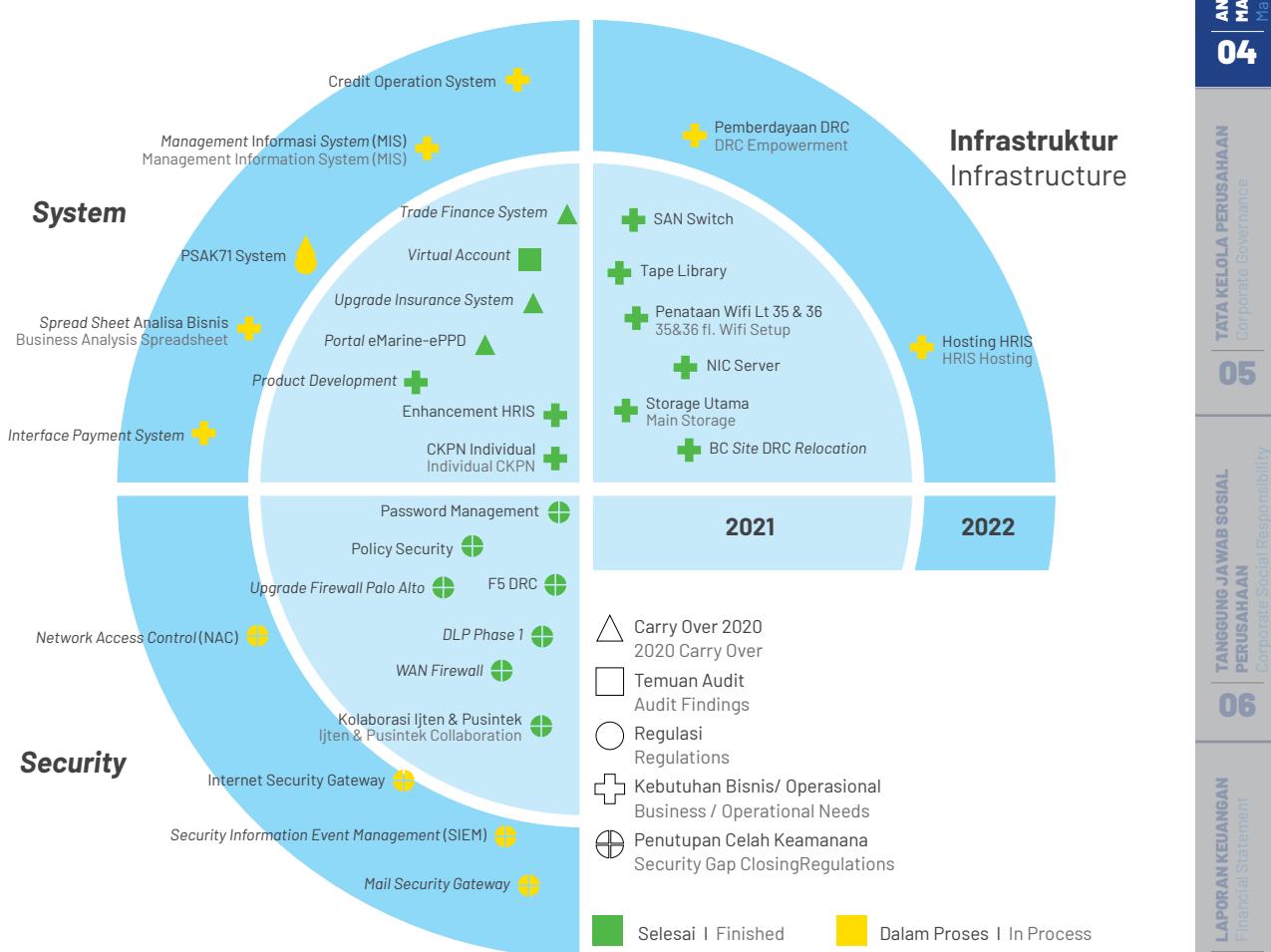
1. Implementasi MIS Project fase-1
2. *Implementasi Core System Trade Finance*
3. *Upgrade Core System Asuransi*
4. Stabilisasi dan pengembangan sistem pendukung (LOS, COS, PSAK, HR, dll)
5. Penguatan tata kelola TI dan BCM
6. Penguatan infrastruktur Data Center tahap 1: enable DRC untuk proses core business cycle
7. Implementasi tata kelola IT Security
8. Pemenuhan seluruh role/fungsi sumber daya TI dan transformasi IT Developer ke Business Analyst
9. Kolaborasi dengan PUSINTEK/ITJEN/BSSN, dll.

#### TSI Division work program 2021

The 2021 work program of TSI Division consisting of:

1. Implementation of MIS Project phase-1
2. Implementation of Trade Finance Core System
3. Upgrade Insurance Core System
4. Stabilization and development of support systems (LOS, COS, PSAK, HR, etc.)
5. Strengthening IT governance and BCM
6. Strengthening Data Centre infrastructure phase 1: enable DRC for core business cycle processes
7. Implementation of IT Security governance
8. Fulfillment of all roles/functions of IT resources and transformation of IT Developer to Business Analyst
9. Collaboration with PUSINTEK/ITJEN/BSSN, etc.

#### Realisasi IT Strategic Plan 2021 | 2021 IT Strategic Plan Realization



Dalam menjalankan program kerja tersebut LPEI menghadapi tantangan, antara lain sebagai berikut:

1. Inisiasi proyek tidak dapat dimulai pada awal tahun dikarenakan anggaran yang belum disetujui oleh Kementerian.
2. Penyusunan detail kebutuhan yang belum jelas sehingga kesulitan dalam proses *window shopping*.

Adapun pengawasan atas rencana dan realisasi investasi bidang IT dilakukan dalam forum Komite TSI yang dilakukan secara periodik 3 kali dalam setahun.

### Tata Kelola TI

Tata Kelola TI sangat penting sebagai pertimbangan utama dalam berjalannya rencana strategis TI. Tata Kelola TI dimaksudkan sebagai pola dari otoritas/kebijakan terhadap aktivitas TI. Aktivitas-aktivitas TI ini merupakan pola pekerjaan yang direpresentasikan dalam suatu hierarki peraturan TI (kebijakan yang diturunkan dalam manual operasional dan didetailkan dalam bentuk petunjuk teknis operasional), organisasi TI dan pengelolaan SDM TI.

Berdasarkan Tata Kelola TI telah disusun *baseline building block* yang memisahkan proses-proses strategi, perencanaan, pengembangan, operasional, serta pemantauan. Selanjutnya direpresentasikan ke struktur organisasi dalam menjalankan proses-proses yang diadopsi menjadi aktivitas-aktivitas TI.

In performing the work program, Indonesia Eximbank encounters the following challenges:

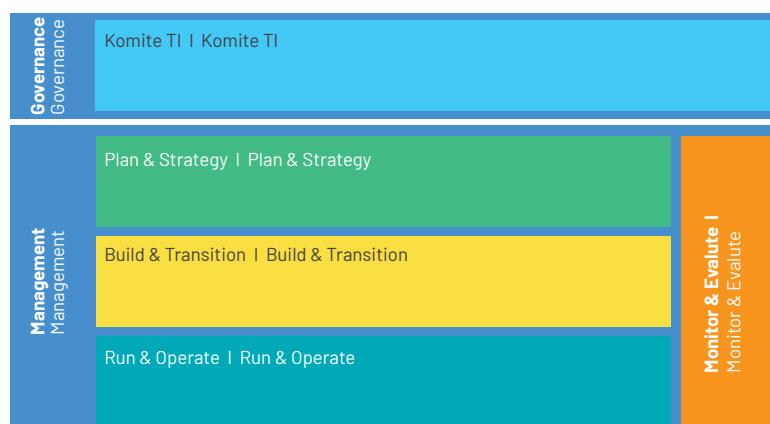
1. Project initiation cannot be started at the beginning of the year due to the budget that has not been approved by the Ministry.
2. Preparation of detailed requirements that are not yet clear hence it is difficult for the window-shopping process.

The supervision of investment plan and realization in the IT sector is performed in the TSI Committee forum which is organized periodically 3 times a year.

### IT Governance

IT Governance is pivotal as a key consideration in the implementation of IT strategic plan. IT Governance is intended as a pattern of authority/policy towards IT activities. These IT activities are work patterns that are represented in a hierarchy of IT regulations (policies derived in operational manuals and detailed in operational technical instructions), IT organization and HR management of IT.

Based on IT Governance, a baseline building block has been prepared that separates the processes of strategy, planning, development, operations, and monitoring. Furthermore, it is represented by an organizational structure that will conduct the processes to be adopted into IT activities.

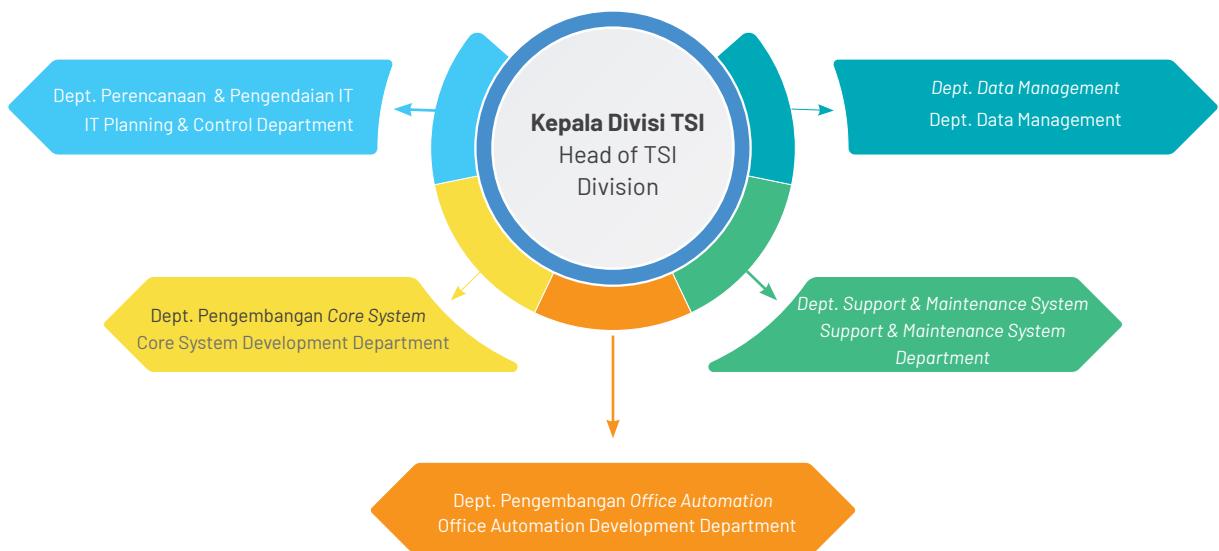


## TEKNOLOGI INFORMASI

### Information Technology

#### Struktur Organisasi TI

LPEI memiliki Struktur Organisasi TI dengan *mapping role* pada *building block* adalah sebagai berikut:



LPEI mempersiapkan kompetensi SDM internal maupun calon pengguna di luar Divisi agar dapat beradaptasi dengan fitur-fitur produk layanan berbasis TI terbaru yang dikembangkan dan diterapkan.

1. Pelaksanaan pelatihan penggunaan Sistem baru.
2. Pelaksanaan sosialisasi keamanan informasi melalui windows screensaver.

#### Rencana pengembangan TI tahun 2022

Rencana pengembangan TI tahun 2022 tetap mengacu kepada arahan pengembangan sesuai dalam IT Strategic Plan yang telah disepakati. Pengembangan TI masuk pada fase 1 dan fase 2 pengembangan yaitu terkait dengan peningkatan reliability IT infrastruktur, pemberdayaan DRC, Peningkatan IT Security, pengembangan sistem untuk dukungan terhadap core business dan operasional Lembaga, serta peningkatan Tata Kelola TI.

#### IT Organizational Structure

Indonesia Eximbank has an IT Organizational Structure with mapping roles in the building blocks as follows:

Indonesia Eximbank prepares internal HR competencies as well as potential users outside the Division so as to adapt to the latest IT-based service product features that are developed and implemented.

1. Implementation of training on the new system application.
2. Implementation of information security socialization through windows screensaver.

#### IT development plan 2022

2022 IT development plan refers to the development directions in accordance with the agreed IT Strategic Plan. IT development is included in phase 1 and phase 2 of development, which are related to improving the reliability of IT infrastructure, empowering DRC, enhancing IT security, developing systems to support the core business and operations of the institution, as well as improving IT governance.

**TEKNOLOGI INFORMASI**  
Information Technology

	01 - 02	03	04
Infrastruktur Infrastructure		Upgrade Perangkat Dealing System 2022 2022 Dealing System Equipment Upgrades	Peremajaan Server Wintel Wintel server revitalization
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Expense System</li> <li>• Daily Activity Monitoring System(DAMS)</li> <li>• Upgrade Internet &amp; Website</li> <li>• Data Center Operation(DCO) &amp; Data Backup Monitoring Tool</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplikasi Rekanan Bisnis Business Partner Application</li> <li>• Learning Management System</li> <li>• Aplikasi Penjaminan Guarantee Application</li> <li>• Upgrade SWIFT 7.7</li> <li>• LLD Report Application</li> <li>• Aplikasi Naskah Dinas Official Manuscript Application</li> <li>• Penyempurnaan E-monsheet E-monsheet Enhancement</li> <li>• Upgrade TDS versi 4.8 Upgrade TOS version 4.8</li> </ul>	<p><i>Enhancement UBS</i> Enhancement of UBS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unused Facility</li> <li>• Reversal Pendapatan bunga dan pinjaman atas debitur NPL Reversal of Interest Income and Penalty for NPL debtors</li> <li>• Product untuk Pembukuan BYDT TBYD Products for the manufacture of BYDT TBYD</li> <li>• Amendment Holiday Setup</li> <li>• Upload Cashflow for Cash Basis Product</li> <li>• Al Ijrah Al Muntahiya bit Tamlik(IMBT)</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplikasi Data Induk Versi 3.0 Master Data Application Version 3.0</li> <li>• Reconciliation Nostro Application</li> <li>• Funds Transfer Automation Report</li> <li>• Enhancement IFOS</li> <li>• Sistem Informasi Risiko Operasional Operational Risk Information System</li> <li>• Re-engineering Aplikasi OA Re-engineering OA Applications</li> <li>• Aplikasi Data Crawling Data Crawling Application</li> <li>• Program Kemitraan Partnership Programs</li> <li>• MIS Fase 2</li> <li>• Fund Transfer Pricing</li> <li>• New SMIFA &amp; AYDA</li> <li>• Enhancement Kredit Sistem System Credit Enhancement</li> <li>• Otomasi Risk Profile Lembaga Institutional Profile Risk Automation</li> <li>• Sistem SPV</li> <li>• Trade Finance Portal</li> <li>• Enhancement Trade Finance System</li> </ul>
<b>Security</b>	Two Factor Authentication(2FA) System   Two Factor Authentication(2FA) System		

4216,894 ▲ 4216,894  
1197,979 ▲ 1197,979  
899,966 ▲ 899,966  
698,947 ▲ 698,947





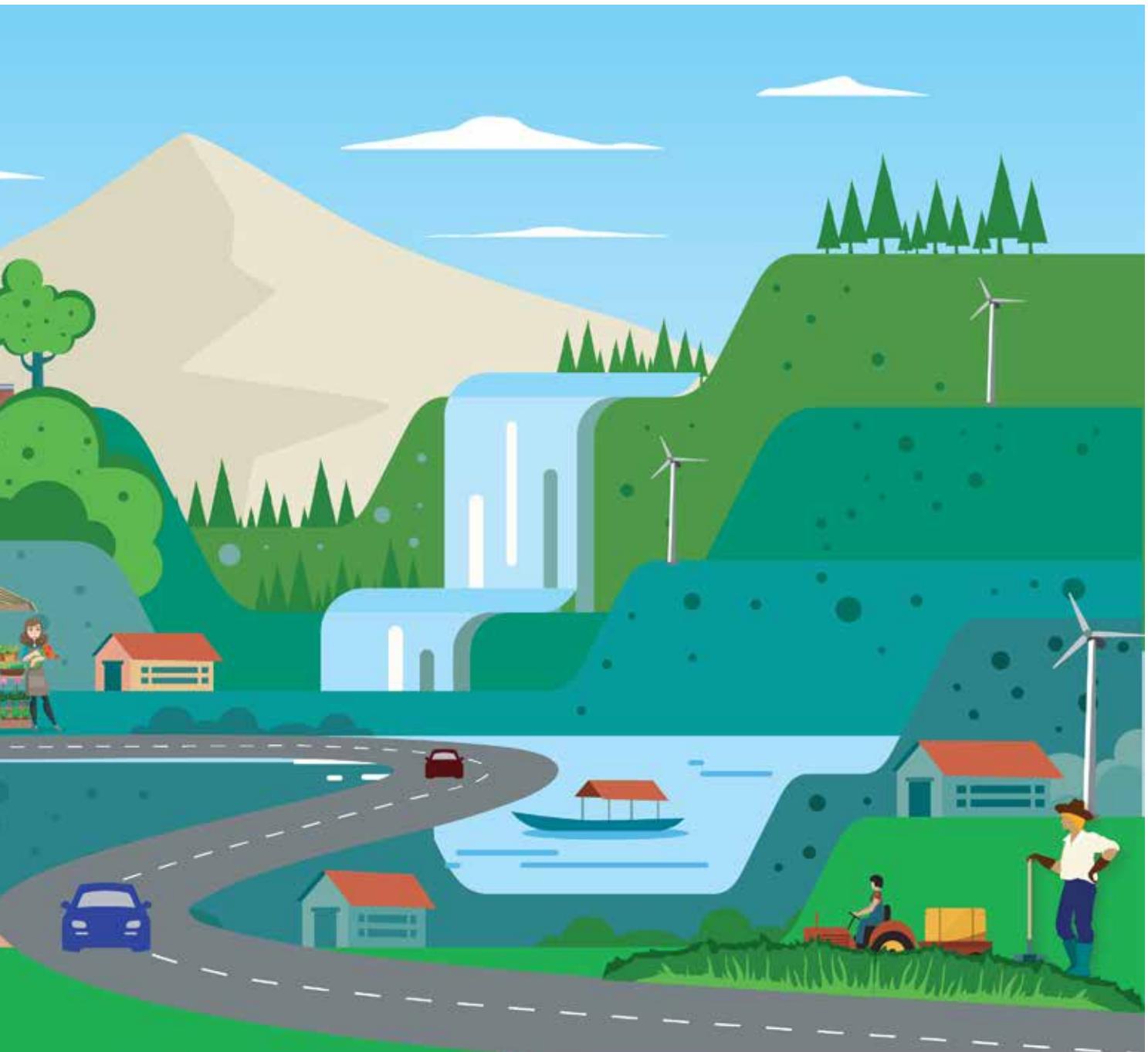
# TATA KELOLA PERUSAHAAN

## Corporate Governance

Dalam melaksanakan mandat untuk mendukung program ekspor nasional melalui Pembiayaan Ekspor Nasional, yang berperan penting dalam membangun aktivitas usaha lembaga yang berkualitas, LPEI berkomitmen untuk secara konsisten meningkatkan kualitas tata kelola berdasarkan prinsip-prinsip dan praktik terbaik.

In implementing its mandate to support the national export program through the National Export Financing, Indonesia Eximbank is committed to consistently enhancing GCG quality based on its principles and best practices.







# TATA KELOLA PERUSAHAAN

## Corporate Governance

### KOMITMEN PENERAPAN GCG

LPEI sebagai Lembaga Keuangan Khusus milik Pemerintah Republik Indonesia yang memiliki mandat memajukan ekspor nasional berkomitmen untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) dan secara konsisten mengedepankan etika dan integritas dalam pengelolaan Lembaga dengan tujuan untuk mendorong peningkatan kinerja, memberikan jaminan dipenuhinya hak-hak para pemangku kepentingan (*stakeholders*), mendukung tercapainya Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku umum pada Lembaga Jasa Keuangan.

Pengembangan GCG yang selaras dengan *best practices* secara berkesinambungan akan mendorong perusahaan untuk menyediakan sistem pengendalian dan manajemen risiko yang dapat menjamin akuntabilitas yang sepadan dengan risiko usaha yang dihadapi.

### DASAR-DASAR PELAKSANAAN GCG

Penerapan GCG pada LPEI berdasarkan pada:

1. Pasal 17 Undang-Undang No. 2/2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 208/PMK/06/2021 jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.010/2009

Dalam rangka mengoptimalkan dan memperkuat kualitas penerapan prinsip tata kelola yang baik, prinsip manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah LPEI, maka telah dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/PMK 010/2009, serta PMK No. 142/PMK.10/2009 tentang Manajemen Risiko LPEI, dan PMK No. 143/PMK.10/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. Atas penyempurnaan ini telah ditetapkan dalam PMK No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia pada 29 Desember 2021.

Berdasarkan PMK No. 208/PMK/06/2021 pada pasal 70, diketahui bahwa pada saat PMK 208/2021 mulai berlaku,

### COMMITMENT TO GCG IMPLEMENTATION

LPEI as a Special Financial Institution owned by the Government of the Republic of Indonesia mandated to promote national exports is committed to good governance and prudential principles as well as consistently prioritizing ethics and integrity in the management of the Institution with the aim of encouraging performance improvement, providing guarantee the fulfillment of the rights of stakeholders, support the achievement of the Vision, Mission and Corporate Values, as well as improve compliance with laws and regulations generally accepted in Financial Services Institutions.

The ongoing development of GCG in line with best practices will encourage the company to provide a risk management and control system to ensure accountability that matches the business risks faced.

### GCG LEGAL REFERENCES

The implementation of GCG at Indonesia Eximbank refers:

1. Article 17 of Law No. 2/2009 concerning the Indonesian Export Financing Agency (LPEI)
2. Regulation of the Minister of Finance No. 208/PMK/06/2021 jo. Minister of Finance Regulation No. 141/PMK.010/2009

To optimize and strengthen the application of good governance principles, risk management principles, and the Indonesia Eximbank's know your customer principles, improvements have been made to the Regulation of the Minister of Finance (PMK) No. 141/PMK 010/2009, with PMK No. 142/PMK.10/2009 concerning Indonesia Eximbank Risk Management, and PMK No. 143/PMK.10/2009 concerning Indonesia Eximbank's Know Your Customer Principles. The refinement has been stipulated in PMK No. 208/PMK.06/2021 concerning Indonesia Eximbank's Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles on 29 December 2021.

Based on PMK No. 208/PMK/06/2021 in article 70, when PMK 208/2021 comes into effect, the assessment

## TATA KELOLA PERUSAHAAN

### Corporate Governance

penilaian atas pelaksanaan prinsip Tata Kelola LPEI tahun 2021 (atas realisasi tahun 2020) tetap dilakukan dengan berpedoman pada PMK No.141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

### PRINSIP-PRINSIP GCG

LPEI menerapkan prinsip-prinsip GCG sebagaimana ditegaskan pada Pasal 17 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, LPEI wajib menerapkan prinsip tata kelola yang baik, prinsip penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah.

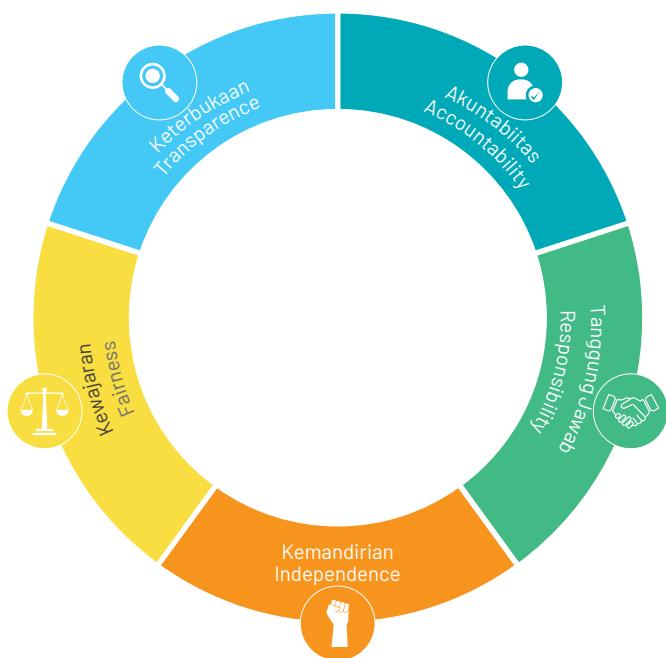
Prinsip tata kelola tersebut kembali ditegaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK 010/2009 yang mengatur tentang pelaksanaan tata kelola yang baik di LPEI. Sebagai perwujudan kepatuhan terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 dan untuk memastikan terlaksananya penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di LPEI, Dewan Direktur juga telah menyusun Board Manual sebagai pedoman bagi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana dalam menjalankan masing-masing fungsinya.

of the implementation of the Indonesia Eximbank's Governance principles in 2021 (on the realization of 2020) will still be carried out by referring to PMK No. 141/PMK.010 /2009 concerning Indonesia Eximbank's Governance Principles.

### GCG PRINCIPLES

Indonesia Eximbank applies the GCG principles as emphasized in Article 17 paragraphs 1 and 2 of the Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2009 which states that in carrying out its duties, Indonesia Eximbank shall apply good governance, risk management, and know your customer principles.

The governance principle has been reaffirmed through the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 141/PMK 010/2009 which regulates the implementation of good governance in Indonesia Eximbank. As a manifestation of compliance with Law No. 2 of 2009 and to ensure the implementation of good governance principles in Indonesia Eximbank, the Board of Directors has also prepared the Board Manual as the guidelines for the Board of Directors, Executive Directors and Managing Director in carrying out each of their functions.



LPEI menerapkan GCG dengan mengacu kepada prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:

**Keterbukaan**

Pelaksanaan kegiatan usaha LPEI yang menjamin keterbukaan dalam proses pembuatan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum.

**Akuntabilitas**

Kegiatan usaha LPEI yang dapat menjelaskan fungsi dari setiap pihak yang terkait dengan LPEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum.

**Tanggung Jawab**

Kegiatan usaha LPEI yang dapat menegaskan dan menjelaskan peranan dan status dari setiap pihak yang terkait dengan LPEI untuk setiap proses pembuatan dan penerapan kebijakan di LPEI.

**Kemandirian**

Kegiatan usaha LPEI dikelola secara profesional yang bebas dari benturan kepentingan dan/atau pengaruh atau tekanan dari setiap pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum.

**Kewajaran**

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak setiap pihak yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LPEI meyakini bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) akan mendorong terciptanya pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan melalui prinsip-prinsip berkeadilan dan taat hukum. Pemahaman ini mendasari komitmen untuk senantiasa menegakkan penerapan dalam setiap jenjang organisasi dan kegiatan operasional.

Indonesia Eximbank implements GCG by referring to the following GCG principles:

**Transparency**

Business activities of Indonesia Eximbank that ensures transparency in the decision-making processes related to the business activities of Indonesia Eximbank in accordance with prevailing regulations and common practices.

**Accountability**

Business activities of Indonesia Eximbank that describes the function of Indonesia Eximbank's related parties in accordance with prevailing regulations and common practices.

**Responsibility**

Business activities by Indonesia Eximbank that describes the roles and status of Indonesia Eximbank's related parties for every policy development and application in Indonesia Eximbank.

**Independence**

Business activities of Indonesia Eximbank that professionally managed without conflict of interest and/or influence or pressure from any parties that is not in compliance with the prevailing regulations and common practices.

**Fairness**

Fairness and equality in the fulfillment of the right of parties based on contractual agreements and prevailing regulations.

Indonesia Eximbank believes that the implementation of good corporate governance (GCG) will encourage the creation of sustainable business growth through the principles of justice and legal compliance. This understanding underlies the commitment to always enforce the implementation at every level of the organization and operational activities.

## TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

### PENERAPAN GCG TAHUN 2021

Sesuai dengan Pasal 70 Peraturan Menteri Keuangan No. 208/PMK.06/2021 Tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Pelaksanaan penilaian GCG di LPEI pada tahun 2021 dilakukan melalui self assessment berdasarkan Standar implementasi GCG yang diterapkan oleh LPEI mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dan pelaporan internal;
10. Pengadaan barang dan jasa; dan
11. Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).

### GCG IMPLEMENTATION IN 2021

In accordance with Article 70 of the Regulation of the Minister of Finance No. 208/PMK.06/2021 Regarding Indonesia Eximbank's Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles, the GCG assessment at Indonesia Eximbank in 2021 was carried out through self-assessment based on the implementation standards applied by the Institution referring to the Regulation of the Minister of Finance No. 141/PMK.010/2009 concerning Indonesia Eximbank's Governance Principles in 11 (eleven) assessment factors of good governance principles , which include:

1. Implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors;
2. Implementation of duties and responsibilities of the Executive Director and Managing Director;
3. Completeness and implementation of the Committee's duties;
4. Conflicts of interest Handling;
5. Implementation of compliance function;
6. Implementation of internal audit function;
7. Implementation of external audit function;
8. Implementation of risk management including internal control system;
9. Transparency of financial and non-financial conditions, reports on the implementation of good governance principles, and internal reporting;
10. Procurement of goods and services; and
11. Long Term Plan (RJP) and Annual Work Plan and Budget (RKAT).

No	Penerapan Prinsip Tata Kelola LPEI Implementation of LPEI Governance Principles	Telah Diatur Dalam Peraturan Internal Implementation of LPEI Governance Principles	Terkait Peraturan Eksternal Related To External Regulations
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana  Implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors, Executive Directors and Managing Directors	a. PDD No. 0007/PDD/12/2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur b. PDE No. 0041/PDE/11/2011 tentang Pedoman Tata Kerja Direktur Pelaksana  a. PDD No. 0007/PDD/12/2020 concerning the Working Code Guidelines of the Board of Directors. b. PDE No. 0041/PDE/11/2011 on The Working Procedures Guidelines of The Managing Director	a. UU No. 2 Tahun 2009 tentang LPEI b. Peraturan Menteri Keuangan RI No.143/PMK.06/2014 tentang Perubahan PMK No. 106/PMK.06/2009 Tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direktur LPEI c. Peraturan Menteri Keuangan RI No.141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

## TATA KELOLA PERUSAHAAN

### Corporate Governance

No	Penerapan Prinsip Tata Kelola LPEI Implementation of LPEI Governance Principles	Telah Diatur Dalam Peraturan Internal Implementation of LPEI Governance Principles	Terkait Peraturan Eksternal Related To External Regulations
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Law No. 2 of 2009 concerning Indonesia Eximbank</li> <li>b. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 143/PMK.06/2014 concerning Amendments to PMK No. 106/PMK.06/2009 concerning Procedures for the Proposal, Appointment and Dismissal of Indonesia Eximbank Board of Directors</li> <li>c. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 141/PMK.010/2009 concerning Governance Principles of Indonesia Eximbank</li> </ul>
2	<p>Komite-Komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal</p> <p>Completeness and implementation of the Committees and work units that carry out the internal control function</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. PDE No.0033/PDE/08/2019 tentang Komite Pembiayaan LPEI</li> <li>b. PDE No. 0034/PDE/08/2019 tentang Komite Pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor LPEI</li> <li>c. PDE No. 0008/PDE/02/2018 tentang Komite Personalia LPEI</li> <li>d. PDE No. 0027/PDE/05/2019 tentang Komite Teknologi Sistem Informasi dan MPO No. 0037/CEO/08/2020 tentang Komite Teknologi Sistem Informasi</li> <li>e. PDE No. 0026/PDE/05/2019 tentang Komite Asset dan Liabilities LPEI dan MPO No. 0006/CEO/02/2020 tentang Perubahan PDE tentang Komite Asset dan Liabilities LPEI.</li> <li>f. PDE No.0018/PDE/04/2018 tentang Komite Pengembangan Produk LPEI</li> <li>g. PDE No. 0025/PDE/05/2019 tentang Komite Kebijakan Bisnis LPEI</li> <li>h. PDE 0024/PDE/05/2019 tentang Komite Manajemen Risiko LPEI</li> <li>i. MPO.0028/CEO/04/2020 tentang Komite Efisiensi</li> <li>j. MPO.0027/CEO/04/2020 tentang Komite Pengadaan</li> <li>k. MPO.0086/KDE/12/2020 tentang Komite Etik dan Disiplin Pegawai LPEI</li> <li>l. KDE 0078/KDE/08/2021 - Komite Pembiayaan PKE UKM</li> <li>m. KDE 0079/KDE/08/2021 - Komite Pembiayaan SCF</li> <li>n. MPO 0018/CEO/08/2021 - Komite TSI LPEI</li> <li>o. MPO 0017/CEO/08/2021 Tentang Komite Pengadaan LPEI</li> <li>p. PDE 0026/PDE/09/2021 Tentang Komite ALMA LPEI</li> <li>r. KDE 0045/KDE/03/2021 - Komite Penjaminan PEN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 2 Tahun 2009 tentang LPEI</li> <li>b. Peraturan Menteri Keuangan RI No.141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)</li> <li>a. Law No. 2 of 2009 concerning Indonesia Eximbank</li> <li>b. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 141/PMK.010/2009 concerning Governance Principles of Indonesia Eximbank</li> </ul>

No	Penerapan Prinsip Tata Kelola LPEI Implementation of LPEI Governance Principles	Telah Diatur Dalam Peraturan Internal Implementation of LPEI Governance Principles	Terkait Peraturan Eksternal Related To External Regulations
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. PDE No.0033/PDE/08/2019 concerning Indonesia Eximbank Financing Committee</li> <li>b. PDE No. 0034/PDE/08/2019 regarding the Indonesia Eximbank Export Financing Committee</li> <li>c. PDE No. 0008/PDE/02/2018 regarding the Indonesia Eximbank Personnel Committee</li> <li>d. PDE No. 0027/PDE/05/2019 concerning Information Systems Technology Committee and MPO No. 0037/CEO/08/2020 regarding Information Systems Technology Committee</li> <li>e. PDE No. 0026/PDE/05/2019 concerning Indonesia Eximbank Assets and Liabilities Committee and MPO No. 0006/CEO/02/2020 concerning Amendments to the PDE regarding the Indonesia Eximbank Assets and Liabilities Committee.</li> <li>f. PDE No.0018/PDE/04/2018 concerning Indonesia Eximbank Product Development Committee</li> <li>g. PDE No. 0025/PDE/05/2019 concerning Indonesia Eximbank Business Policy Committee</li> <li>h. PDE 0024/PDE/05/2019 concerning Indonesia Eximbank Risk Management Committee</li> <li>i. MPO.0028/CEO/04/2020 on Efficiency Committee</li> <li>j. MPO.0027/CEO/04/2020 concerning Procurement Committee</li> <li>k. MPO.0086/KDE/12/2020 concerning Indonesia Eximbank Employee Ethics and Discipline Committee</li> <li>l. KDE 0078/KDE/08/2021 - SME Financing Committee</li> <li>m. KDE 0079/KDE/08/2021 - SCF Financing Committee</li> <li>n. MPO 0018/CEO/08/2021 - Indonesia Eximbank TSI Committee</li> <li>o. MPO 0017/CEO/08/2021 Regarding Indonesia Eximbank Procurement Committee</li> <li>p. PDE 0026/PDE/09/2021 Regarding Indonesia Eximbank ALMA Committee</li> <li>q. KDE 0089/CEO/10/2021 and KDE 0090/CEO/10/2021 PKE Committee and SCF Committee</li> <li>r. KDE 0045/KDE/03/2021 - PEN Assurance Committee</li> </ul>	

**TATA KELOLA PERUSAHAAN**  
Corporate Governance

No	Penerapan Prinsip Tata Kelola LPEI Implementation of LPEI Governance Principles	Telah Diatur Dalam Peraturan Internal Implementation of LPEI Governance Principles	Terkait Peraturan Eksternal Related To External Regulations
3	Fungsi Kepatuhan Compliance Function	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. PDD No. 0005/PDD/11/2019 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan LPEI,</li> <li>b. PDE No. 0059/PDE/11/2019 tentang Manual Operasional Piagam Kepatuhan (<i>Compliance Charter</i>) LPEI</li> <li>a. PDD No. 0005/PDD/11/2019 concerning the Implementation of the LPEI Compliance Function,</li> <li>b. PDE No. 0059/PDE/11/2019 concerning Indonesia Eximbank Compliance Charter Operational Manual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No.2 Tahun 2009 tentang LPEI</li> <li>b. PMK No. 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.</li> <li>c. PMK No. 141/PMK.010/2009 tentang Tata Kelola LPEI</li> <li>d. PMK No. 142/PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko LPEI</li> <li>e. PMK No. 143/PMK.010/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah LPEI</li> <li>f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.05/2015 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia</li> <li>a. Law No. 2 of 2009 concerning Indonesia Eximbank</li> <li>b. PMK No. 58/PMK.06/2020 concerning the Guidance and Supervision of Indonesian Export Financing Institutions.</li> <li>c. PMK No. 141/PMK.010/2009 concerning Indonesia Eximbank Governance</li> <li>d. PMK No. 142/PMK.010/2009 concerning Indonesia Eximbank Risk Management</li> <li>e. PMK No. 143/PMK.010/2009 concerning the Principles of Know Your Customer of Indonesia Eximbank</li> <li>f. Financial Services Authority Regulation No. 40/POJK.05/2015 of 2015 concerning the Guidance and Supervision of Indonesia Eximbank</li> </ul>
	3.1. LHKPN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. PDD No. 0001/PDD/07/2017 tentang Kewajiban Penyampaian LHKPN Bagi Pejabat LPEI</li> <li>b. PDE No. 0013/PDE/04/2013 Tentang Manual, Penyusunan LHKPN Bagi Pejabat LPEI</li> <li>a. PDD No. 0001/PDD/07/2017 concerning Obligations to Submit LHKPN for LPEI Officials</li> <li>b. PDE No. 0013/PDE/04/2013 Regarding Manual, Preparation of LHKPN for LPEI Officials</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN</li> <li>b. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</li> <li>c. PerKom KPK No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara</li> <li>d. Surat Edaran No. SE-08/01/10/2016 Tentang Petunjuk Tekhnis Penyampaian Dan Pegelolaan LHKPN</li> </ul>

**TATA KELOLA PERUSAHAAN**  
Corporate Governance

No	Penerapan Prinsip Tata Kelola LPEI Implementation of LPEI Governance Principles	Telah Diatur Dalam Peraturan Internal Implementation of LPEI Governance Principles	Terkait Peraturan Eksternal Related To External Regulations
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Law no. 28 of 1999 concerning State Administrators that are Clean and Free from KKN</li> <li>b. UU no. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission</li> <li>c. KPK Decree No. 7 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement, and Examination of State Administrators' Assets</li> <li>d. Circular No. SE-08/01/10/2016 Regarding Technical Instructions for Submission and Management of LHKN</li> </ul>
	3.2. Gratifikasi 3.2. Gratification	<p>PDE No. 0029/PDE/06/2019 tentang Manual Operasional Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan LPEI</p> <p>PDE No. 0029/PDE/06/2019 concerning Operational Manual of Gratification Control within the LPEI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan perubahannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</li> <li>b. Surat KPK No.B.1341/01-13/03/2017 tanggal 15 Maret 2015</li> <li>a. Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption with the amendment of Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes</li> <li>b. KPK Letter No.B.1341/01-13/03/2017 dated 15 March 2015</li> </ul>
	3.3. Whistleblowing System	<p>PDE No.0018/PDE/03/2012 tentang Manual Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing system)LPEI</p> <p>PDE No.0045/PDE/10/2019 tentang Manual Operasional Penerapan Strategi Anti Fraud LPEI</p> <p>PDE No.0018/PDE/03/2012 concerning LPEI Whistleblowing System Manual</p> <p>PDE No.0045/PDE/10/2019 concerning Operational Manual for the Implementation of the Indonesia Eximbank Anti-Fraud Strategy</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No.2 Tahun 2009 tentang LPEI</li> <li>b. PMK No. 141/PMK.010/2009 tentang Tata Kelola LPEI</li> <li>c. PMK No. 142/PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko LPEI</li> <li>a. Law No. 2 of 2009 concerning Indonesia Eximbank</li> <li>b. PMK No. 141/PMK.010/2009 concerning Indonesia Eximbank Governance</li> <li>c. PMK No. 142/PMK.010/2009 concerning Indonesia Eximbank Risk Management</li> </ul>
	3.4. Prinsip Mengenal Nasabah dalam rangka Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) 3.4.1. Internal: Know Your Employee 3.4.2. Eksternal: Nasabah & Rekanan 3.4.3. Laporan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. PDD No. 0002/PDD/03/2020 tentang Penerapan Program APU-PPT LPEI</li> <li>b. PDE No. 0013/PDE/03/2020 tentang Manual Pelaksanaan Penerapan Program APU-PPT LPEI Terorisme (APU &amp; PPT) LPEI</li> <li>c. PDE No. 0027/PDE/11/2020 Tentang Manual Operasional Penerapan Know Your Employee (KYE) LPEI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No.2 Tahun 2009 tentang LPEI</li> <li>b. PMK No. 143/PMK.010/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah LPEI</li> <li>c. Peraturan Kepala PPATK No. 02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.</li> </ul>

## TATA KELOLA PERUSAHAAN

### Corporate Governance

No	Penerapan Prinsip Tata Kelola LPEI Implementation of LPEI Governance Principles	Telah Diatur Dalam Peraturan Internal Implementation of LPEI Governance Principles	Terkait Peraturan Eksternal Related To External Regulations
	<p>3.4. Know Your Customer Principles in the Implementation of the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Program (AML CTF)</p> <p>3.4.1. Internal: Know Your Employee</p> <p>3.4.2. External: Customers &amp; Partners</p> <p>3.4.3. Suspicious Financial Transaction Report</p>	<p>a. PDD No. 0002/PDD/03/2020 concerning the Implementation of the Indonesia Eximbank AML-CTF Program</p> <p>b. PDE No. 0013/PDE/03/2020 concerning the Implementation Manual of the Indonesia Eximbank Terrorism AML-PPT Program (AML CTF)</p> <p>c. PDE No. 0027/PDE/11/2020 Regarding LPEI Know Your Employee (KYE) Implementation Operational Manual</p>	<p>d. POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.</p> <p>e. Surat Edaran OJK Nomor 37/ SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non Bank</p> <p>f. POJK Nomor 23 /POJK.01/2019 Tanggal 18 September 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/ POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan</p> <p>g. Peraturan Kepala PPATK No. PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p> <p>h. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2021 tentang TataCara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi GoAML Bagi Penyedia Jasa Keuangan</p> <p>i. POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.</p> <p>j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/ Pojk.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan</p> <p>a. Law No. 2 of 2009 concerning Indonesia Eximbank</p> <p>b. PMK No. 143/PMK.010/2009 concerning the Principles of Know Your Customer of Indonesia Eximbank</p> <p>c. Regulation of the Head of PPATK No. 02/1.02/PPATK/02/15 concerning Categories of Service Users With the Potential to Commit Money Laundering.</p>

**TATA KELOLA PERUSAHAAN**  
Corporate Governance

No	Penerapan Prinsip Tata Kelola LPEI Implementation of LPEI Governance Principles	Telah Diatur Dalam Peraturan Internal Implementation of LPEI Governance Principles	Terkait Peraturan Eksternal Related To External Regulations
			<p>d. POJK No. 12/POJK.01/2017 concerning the Implementation of the Anti-Money Laundering Program and the Prevention of the Financing of Terrorism in the Financial Services Sector.</p> <p>e. OJK Circular Letter Number 37/ SEOJK.05/2017 concerning Guidelines for the Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs in the Non-Bank Financial Industry Sector</p> <p>f. POJK Number 23 /POJK.01/2019 Dated 18 September 2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 12/ POJK.01/2017 concerning the Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs in the Financial Services Sector</p> <p>g. Regulation of the Head of PPATK No. PER-02/1.02/PPATK/02/15 concerning Categories of Service Users with the Potential to Commit Money Laundering.</p> <p>h. Regulation of the Center for Financial Transaction Reports and Analysis Number 1 of 2021 concerning Procedures for Submission of Suspicious Financial Transaction Reports, Cash Financial Transactions, and Financial Transactions Transfer of Funds To and From Overseas Through the GoAML Application for Financial Service Providers</p> <p>i. POJK No. 12/POJK.01/2017 concerning the Implementation of the Anti-Money Laundering Program and the Prevention of the Financing of Terrorism in the Financial Services Sector.</p> <p>j. Financial Services Authority Regulation Number 23/ POJK.01/2019 Year 2019 Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 12/Pojk.01/2017 concerning the Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs in the Financial Services Sector</p>

**TATA KELOLA PERUSAHAAN**  
Corporate Governance

No	Penerapan Prinsip Tata Kelola LPEI Implementation of LPEI Governance Principles	Telah Diatur Dalam Peraturan Internal Implementation of LPEI Governance Principles	Terkait Peraturan Eksternal Related To External Regulations
	<p>3.5. Kepatuhan pemenuhan pelaporan kepada eksternal termasuk kepada regulator</p> <p>3.5. Compliance with reporting to external parties including regulators</p>	<p>PDE No.0067/PDE/12/2019 tentang Manual Operasional Penetapan Unit Kerja Penanggungjawab Pelaporan LPEI</p> <p>PDE No.0067/PDE/12/2019 concerning Operational Manual for Determining the Work Unit Responsible for LPEI Reporting</p>	<p>a. Peraturan Menteri Keuangan RI No.141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)</p> <p>b. PMK No. 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia</p> <p>c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.05/2015 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia</p> <p>a. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 141/PMK.010/2009 concerning Governance Principles of Indonesia Eximbank</p> <p>b. PMK No. 58/PMK.06/2020 concerning the Guidance and Supervision of Indonesia Eximbank</p> <p>c. Financial Services Authority Regulation No. 40/POJK.05/2015 of 2015 concerning the Guidance and Supervision of Indonesia Eximbank</p>
4	<p>Audit Intern</p> <p>Internal Audit</p>	<p>a. PDE No. 0007/PDE/02/2019 tentang Piagam Audit Internal</p> <p>b. PDD nomor 0002/PDD/06/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal LPEI</p> <p>a. PDE No. 0007/PDE/02/2019 regarding Internal Audit Charter</p> <p>b. PDD number 0002/PDD/06/2019 concerning the Implementation of the Indonesia Eximbank Internal Audit Function</p>	<p>a. UU No. 2 Tahun 2009 tentang LPEI</p> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan RI No.141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)</p> <p>c. PMK No. 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia</p> <p>d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.05/2015 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia</p> <p>a. Law No. 2 of 2009 concerning Indonesia Eximbank</p> <p>b. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 141/PMK.010/2009 concerning Governance Principles of Indonesia Eximbank</p> <p>c. PMK No. 58/PMK.06/2020 concerning the Guidance and Supervision of Indonesia Eximbank</p> <p>d. Financial Services Authority Regulation No. 40/POJK.05/2015 of 2015 concerning the Guidance and Supervision of Indonesia Eximbank</p>

**TATA KELOLA PERUSAHAAN**  
Corporate Governance

No	Penerapan Prinsip Tata Kelola LPEI Implementation of LPEI Governance Principles	Telah Diatur Dalam Peraturan Internal Implementation of LPEI Governance Principles	Terkait Peraturan Eksternal Related To External Regulations
5	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern  Implementation of risk management including internal control system	Peraturan Direktur Eksekutif No.0006/PDE/02/2018 tentang Komite Manajemen Risiko LPEI  PDE No. 0032/PDE/09/2018 tentang Manual Operasional Manajemen Risiko (Enterprise Risk Management Manual) LPEI  Executive Director Regulation No.0006/PDE/02/2018 concerning Indonesia Eximbank Risk Management Committee  PDE No. 0032/PDE/09/2018 concerning Indonesia Eximbank Enterprise Risk Management Manual	a. Peraturan Menteri Keuangan RI No.141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) b. PMK No. 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.05/2015 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia  a. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 141/PMK.010/2009 concerning Governance Principles of Indonesia Eximbank b. PMK No. 58/PMK.06/2020 concerning the Guidance and Supervision of Indonesia Eximbank c. Financial Services Authority Regulation No. 40/POJK.05/2015 of 2015 concerning the Guidance and Supervision of Indonesia Eximbank
6	Pengadaan barang & jasa Procurement of goods & services	a. PDE No. 0041/PDE/09/2019 tentang Manual Operasional Pengadaan Barang/ Jasa LPEI b. MPO. 0019/CEO/08/2021  a. PDE No. 0041/PDE/09/2019 concerning Indonesia Eximbank Goods/Services Procurement Operational Manual b. MPO. 0019/CEO/08/2021	Peraturan Menteri Keuangan RI No.141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)  Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 141/PMK.010/2009 concerning Governance Principles of Indonesia Eximbank
7	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Transparency of financial and non-financial conditions	a. PDD No. 0014/PDD/12/2010 tentang Kebijakan Akuntansi LPEI b. PDE No.0007/PDE/01/2012 tentang Manual Pelaporan Keuangan LPEI  a. PDD No. 0014/PDD/12/2010 concerning LPEI Accounting Policies b. PDE No.0007/PDE/01/2012 concerning LPEI Financial Reporting Manual	POJK No.75/POJK.04/2017 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan  POJK No.75/POJK.04/2017 concerning Responsibilities of the Board of Directors on Financial Statements

## TATA KELOLA PERUSAHAAN

### Corporate Governance

Sepanjang tahun 2021, LPEI telah melaksanakan implementasi GCG sebagai berikut:

#### 1) Triwulan I - 2021

- a. Melaksanakan Stress Testing dengan posisi data Desember 2020;
- b. Penyampaian realisasi RKAT 2020 kepada Menteri Keuangan;
- c. Pelatihan Tata Cara Pengisian LHKPN dan Perubahan Peraturan KPK tentang LHKPN;
- d. Pelatihan New Hire Orientation (NHO) 2021;
- e. Penyempurnaan peraturan tentang Pedoman dan Tata Kerja Organisasi LPEI;
- f. Penerbitan peraturan tentang Penyesuaian Organisasi LPEI;
- g. Penetapan Anggota Komite Penjaminan Bagi Pelaku Usaha Korporasi Dalam Rangka Pelaksanaan PEN;
- h. Penerbitan Manual Produk Program Kemitraan LPEI;
- i. Penerbitan peraturan tentang Clean Desk Office Policy di lingkungan LPEI.

#### 2) Triwulan II - 2021

- a. Pelaksanaan Self-Assessment GCG posisi Tahun 2020;
- b. Melaksanakan Stress Testing dengan posisi data Maret 2021;
- c. Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI posisi Triwulan I 2021;
- d. Penyampaian Laporan Realisasi RKAT TW I - 2021 kepada Menteri Keuangan;
- e. Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan I - 2021 kepada Menteri Keuangan;
- f. Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan I - 2021 kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- g. Penerbitan manual Produk Program Penugasan Khusus dalam Rangka Mendukung Sektor Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Ekspor LPEI;
- h. Perubahan Susunan Manajemen LPEI – Pengangkatan Direktur Pelaksana II LPEI;
- i. Program Peningkatan Penerapan pengendalian Gratifikasi untuk pegawai LPEI;
- j. Pembahasan Strategic Planning Session Mid Year 2021.

Throughout 2021, Indonesia Eximbank has conducted the following GCG implementations:

#### 1) Quarter I - 2021

- a. Carry out Stress Testing with the position data as of December 2020;
- b. Submission of the realization of the 2020 RKAT to the Minister of Finance;
- c. Training on Procedures for Filling in LHKPN and Amendments to KPK Regulations concerning LHKPN;
- d. 2021 New Hire Orientation (NHO) Training;
- e. Completion of regulations concerning LPEI Organizational Guidelines and Work Procedures;
- f. Issuance of regulations regarding LPEI Organization Adjustments;
- g. Determination of Guarantee Committee Members for Corporate Business Actors for the Implementation of National Export Development;
- h. Issuance of the LPEI Partnership Program Product Manual;
- i. Issuance of regulations regarding the Clean Desk Office Policy within the LPEI environment.

#### 2) Quarter II - 2021

- a. Implementation of Self-Assessment of GCG position in 2020;
- b. Carrying out Stress Testing with the position data as of March 2021;
- c. Assessment of the LPEI Health Level for the position of Quarter I 2021;
- d. Submission of the TW I-2021 RKAT Realization Report to the Minister of Finance;
- e. Submission of Quarter I - 2021 Financial Reports to the Minister of Finance;
- f. Submission of Quarter I - 2021 Financial Reports to the Financial Services Authority;
- g. Issuance of manuals for the Special Assignment Program Products in the Framework of Supporting the Export-Oriented Small and Medium Enterprises Sector of LPEI;
- h. Changes in LPEI Management Composition – Appointment of LPEI Managing Director II;
- i. Gratification Control Implementation Improvement Program for LPEI employees;
- j. Discussion on Strategic Planning Session Mid Year 2021.

## TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

### **3) Triwulan III - 2021**

- a. Penyampaian Laporan Realisasi RKAT TW II - 2021 kepada Menteri Keuangan;
- b. Penyampaian Laporan Pengawasan RKAT Semester I - 2021 kepada Menteri Keuangan;
- c. Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan II - 2021 kepada Menteri Keuangan;
- d. Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan II - 2021 kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Penyampaian Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan APU-PPT kepada Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif;
- f. Melaksanakan Stress Testing dengan posisi data Juni dan Juli 2021;
- g. Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI posisi Triwulan II 2021;
- h. Pelaksanaan penilaian independen prinsip-prinsip tata kelola yang baik oleh PT. Sinergi Daya Prima. Hasil penilaian tingkat kecukupan menunjukkan peningkatan penilaian menjadi sebesar 83,75% (Predikat "Baik"), dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 82,45%;
- i. Pelatihan New Hire Orientation (NHO) 2021, Pelatihan Leaders for Tomorrow (LFT), dan Program Development DP II;
- j. Pembentukan dan peresmian Governance, Risk, Compliance (GRC) Champion LPEI;
- k. Penguatan sistem pengendalian internal dengan peluncuran Whistleblowing System (WBS) dan Pengendalian Gratifikasi;
- l. Sosialisasi berkelanjutan terkait WBS dan Gratifikasi kepada seluruh pegawai LPEI;
- m. Pelatihan Computer Based Training (CBT) Kode Etik dan Budaya Kerja Lembaga kepada seluruh pegawai LPEI;
- n. Penerbitan Standar Pedoman Operasional Penyusunan Peraturan Edisi 1;
- o. Penetapan anggota Komite Pembiayaan Program Penugasan Khusus Ekspor dalam Rangka Mendukung Sektor Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Ekspor;
- p. Penetapan anggota Komite Pembiayaan Supplier Chain Financing;
- q. Implementasi dan penunjukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) sistem pelaporan Gratifikasi Online (GOL) KPK.

### **3) Quarter III - 2021**

- a. Submission of the TW II-2021 RKAT Realization Report to the Minister of Finance;
- b. Submission of the RKAT Supervision Report Semester I - 2021 to the Minister of Finance;
- c. Submission of Quarter II - 2021 Financial Reports to the Minister of Finance;
- d. Submission of Quarter II - 2021 Financial Reports to the Financial Services Authority;
- e. Submission of the Compliance Function Implementation Report and APU-PPT to the Board of Directors and the Executive Director;
- f. Carry out Stress Testing with position data for June and July 2021;
- g. Assessment of LPEI Health Level for the position of Quarter II 2021;
- h. Implementation of an independent assessment of the principles of good governance by PT. Prime Power Synergy. The results of the adequacy level assessment show an increase in the rating to 83.75% ("Good" predicate), compared to the previous year of 82.45%;
- i. 2021 New Hire Orientation (NHO) Training, Leaders for Tomorrow (LFT) Training, and DP II Development Program;
- j. Establishment and inauguration of the LPEI Governance, Risk, Compliance (GRC) Champion;
- k. Strengthening the internal control system with the launch of the Whistleblowing System (WBS) and Gratification Control;
- l. Continuous socialization regarding WBS and Gratification to all LPEI employees;
- m. Computer Based Training(CBT)Code of Ethics and Institutional Work Culture for all LPEI employees;
- n. Issuance of Standard Operational Guidelines for Drafting Regulations Edition 1;
- o. Determination of members of the Financing Committee for the Special Export Assignment Program in the Framework of Supporting the Export-Oriented Small and Medium Enterprises Sector;
- p. Determination of members of the Supplier Chain Financing Committee;
- q. Implementation and appointment of the Gratification Control Unit (UPG) of the KPK Online Gratification Reporting System (GOL).

**4) Triwulan IV - 2021**

- a. Penyampaian Laporan Realisasi RKAT TW III – 2021 kepada Menteri Keuangan;
- b. Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI posisi Triwulan III 2021;
- c. Pelatihan New Hire Orientation (NHO) 2021;
- d. Sosialisasi Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) oleh konsultan independen kepada seluruh pegawai LPEI;
- e. Diseminasi Surat Edaran kepada Pegawai LPEI, Mitra/Rekanan, dan Nasabah/Debitur perihal larangan permintaan, penerimaan dan pemberian gratifikasi untuk/dari Pegawai LPEI serta kepada Rekanan, Penyedia Barang/Jasa (Vendor), Mitra, dan Nasabah;
- f. Pembekalan Tata Kelola yang Baik, Kode Etik, Budaya Kepatuhan, Pengendalian Gratifikasi, dan WBS bagi peserta sertifikasi Manajemen Risiko;
- g. Penerbitan ketentuan terkait penyempurnaan struktur organisasi
- h. Sosialisasi melalui *flyer* terkait larangan praktik Gratifikasi kepada seluruh pegawai LPEI;
- i. Pembentukan dan Peresmian *Special Purpose Vehicle* (SPV) LPEI;
- j. Penerapan Manajemen Risiko melalui sertifikasi kompetensi Manajemen Risiko dan sertifikasi kompetensi kerja pegawai LPEI;
- k. Penyempurnaan peraturan tentang Komite Pengadaan LPEI;
- l. Implementasi dan penunjukan *Person in Charge* (PIC) pada Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK;
- m. Penyampaian laporan gratifikasi kepada KPK melalui sistem pelaporan Gratifikasi *Online* (GOL);
- n. Penerbitan Manual Operasional Teknologi Sistem Informasi LPEI;
- o. Penetapan struktur dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko LPEI.

**2) Quarter IV - 2021**

- a. Submission of the TW III-2021 RKAT Realization Report to the Minister of Finance;
- b. LPEI Health Level Assessment for the third Quarter 2021 position;
- c. 2021 New Hire Orientation (NHO) Training;
- d. Socialization of Good Corporate Governance by independent consultants to all LPEI employees;
- e. Dissemination of Circular Letters to LPEI Employees, Partners/Partners, and Customers/ Debtors regarding the prohibition of requesting, receiving and granting gratuities to/from LPEI Employees as well as to Partners, Goods/Services Providers(Vendors), Partners, and Customers;
- f. Provision of Good Governance, Code of Ethics, Compliance Culture, Gratification Control, and WBS for Risk Management certification participants;
- g. Issuance of stipulation related to organization structure refinement
- h. Socialization through flyers regarding the prohibition of gratification practices to all LPEI employees;
- i. Establishment and Inauguration of the LPEI Special Purpose Vehicle (SPV);
- j. Implementation of Risk Management through Risk Management competency certification and LPEI employee work competency certification;
- k. Completion of regulations regarding the LPEI Procurement Committee;
- l. Implementation and appointment of Person in Charge (PIC) on the OJK Consumer Protection Portal Application(APPK);
- m. Submission of gratification reports to the KPK through the Online Gratification reporting system (GOL);
- n. Issuance of the LPEI Information System Technology Operational Manual;
- o. Determination of the structure and membership of the LPEI Risk Management Committee.

### **Fokus dan Penerapan GCG di tahun 2022**

Pelaksanaan GCG LPEI pada tahun 2022 akan difokuskan pada penyempurnaan Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*) dan Proses Tata Kelola (*Governance Process*).

Penyempurnaan Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*) dari sisi infrastruktur peraturan internal akan dilakukan dengan penyederhanaan dan harmonisasi seluruh peraturan internal LPEI, serta pembentukan Peraturan Penyusunan Peraturan (Kebijakan, Standar Pedoman Operasional dan Petunjuk Teknis) sebagai payung peraturan dan pedoman pembentukan aturan internal. Selain itu Penyempurnaan Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*) tentunya juga akan dilakukan terhadap penyempurnaan struktur organisasi yang lebih efektif sesuai kebutuhan lembaga serta pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM).

Untuk penyempurnaan Proses Tata Kelola (*Governance Process*) akan dilakukan dengan optimalisasi pelaksanaan fungsi masing-masing organ dan unit kerja lembaga khususnya Unit-unit dibidang pengendalian internal (*Risk, Compliance, dan Audit Internal*). Selain itu perbaikan penyempurnaan Proses Tata Kelola (*Governance Process*) juga akan difokuskan dengan melakukan perbaikan data dan reporting yang tentunya perlu ditunjang oleh sistem informasi yang memadai.

### **Focus and Implementation of GCG in 2022**

GCG implementation in 2022 will be focused on improving the Governance Structure and Governance Process.

The improvement of the Governance Structure in terms of internal regulatory infrastructure will be done by simplifying and harmonizing all internal regulations, as well as establishing Regulations (Policies, Standard Operating Guidelines and Technical Guidelines) as the umbrella regulations and guidelines for the formation of internal regulations. In addition, improvements to the Governance Structure will certainly be carried out to improve the organizational structure that is more effective according to the needs of the institution as well as the fulfillment of Human Resources (HR).

The improvement of the Governance Process will be done by optimizing the implementation of the functions of each organ and work unit of the institution, especially the units in the field of internal control (*Risk, Compliance, and Internal Audit*). In addition, improvements to the Governance Process will also be focused on improving data and reporting, which would certainly need to be supported by an adequate information system.

## TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

### GCG ROADMAP

Tahun Year	Kegiatan   Activities
2009	<ul style="list-style-type: none"><li>Pembentukan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009.</li><li>Penetapan Peraturan Menteri Keuangan tentang: Pembinaan dan Pengawasan; Prinsip Tata Kelola; Manajemen Risiko; dan Prinsip Mengenal Nasabah di LPEI.</li><li>Diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Direktur Pelaksana LPEI</li><li>Establishment of the Indonesian Export Financing Agency through Law Number 2 of 2009.</li><li>Stipulation of Regulation of the Minister of Finance concerning: Guidance and Supervision; Governance Principles; Risk management; and Know Your Customer Principles at Indonesia Eximbank.</li><li>Issuance of Regulation of the Minister of Finance concerning Procedures for the Proposal, Appointment, and Dismissal of the LPEI Managing Director</li></ul>
2010	<ul style="list-style-type: none"><li>Terbitnya regulasi tentang Diterbitkannya Kebijakan Akuntansi LPEI</li><li>Ditetapkannya regulasi internal mengenai Pedoman Kerja Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif (PDD)</li><li>Issuance of regulations concerning the issuance of Indonesia Eximbank Accounting Policies</li><li>Stipulation of internal regulations regarding the Work Guidelines for the Board of Directors and Executive Directors (PDD)</li></ul>
2011	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengembangan regulasi internal mengenai Pedoman Kerja Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif (PDE)</li><li>Penetapan tentang SOP Pengadaan Barang / Jasa LPEI</li><li>Development of internal regulations regarding the Work Guidelines for the Board of Directors and Executive Directors (PDE)</li><li>Determination of Indonesia Eximbank Goods/Services Procurement SOP</li></ul>
2012	<ul style="list-style-type: none"><li>Diterbitkannya peraturan internal mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) LPEI</li><li>Evaluasi terhadap implementasi Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan</li><li>Pelaksanaan Pelaporan Keuangan LPEI yang telah distandardisasi.</li><li>Issuance of internal regulations regarding the Whistleblowing System</li><li>Evaluation of the implementation of the Procedure for Submission of Suspicious Financial Transaction Reports and Cash Financial Transaction Reports for Financial Service Providers</li><li>Implementation of standardized Financial Reporting.</li></ul>
2013	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat LPEI sesuai dengan regulasi, dan ditetapkannya pedoman internal penyusunan LHKPN</li><li>Penyempurnaan Peraturan Internal tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Direktur Pelaksana LPEI</li><li>Compilation of State Administrators Wealth Reports (LHKPN) for Indonesia Eximbank Officials in accordance with regulations, and the establishment of internal guidelines for the preparation of LHKPN</li><li>Improvement of the Internal Regulations concerning Procedures for the Proposal, Appointment, and Dismissal of the Managing Director</li></ul>
2014	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyempurnaan Ketentuan dan Prosedur Pelaksanaan atas Pembagian Tugas dan Wewenang Kewajiban Pelaporan kepada Pihak Eksternal LPEI</li><li>Implementasi Pengendalian Internal Verifikasi Audit Pembiayaan Bermasalah LPEI</li><li>Ditetapkannya Ketentuan Internal Perihal Penilaian Efektifitas Sistem Pengendalian Intern LPEI</li><li>Completion of Provisions and Implementation Procedures on the Division of Duties and Authorities of Reporting Obligations to External Parties</li><li>Implementation of Internal Control Verification of Troubled Financing Audit</li><li>Stipulation of Internal Provisions Regarding Assessment of the Effectiveness of the Internal Control System</li></ul>

Tahun Year	Kegiatan   Activities
<b>2015</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Review Kebijakan Regulator (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Perihal Pembinaan dan Pengawasan LPEI</li> <li>Program Pelatihan dan Pengembangan Pegawai LPEI</li> <li>Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan LPEI berdasarkan Surat Himbauan dari KPK.</li> <li>Regulatory Policy Review (Financial Services Authority Regulations) Regarding LPEI Guidance and Supervision</li> <li>Indonesia Eximbank Employee Training and Development Program</li> <li>Gratuity Control within the Indonesia Eximbank Environment based on an Appeal Letter from the KPK.</li> </ul>
<b>2016</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan Regulasi Internal Perihal Disiplin Pegawai LPEI</li> <li>Penyempurnaan tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan</li> <li>Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara</li> <li>Sosialisasi teknis Penyampaian Dan Pegelolaan LHKPN</li> <li>Stipulation of Internal Regulations Regarding Discipline for Indonesia Eximbank Employees</li> <li>Improvements on Procedures for Registration, Announcement, and</li> <li>Examination of State Administrators' Assets</li> <li>Technical socialization of LHKPN Submission and Management</li> </ul>
<b>2017</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyempurnaan regulasi Kewajiban Penyampaian LHKPN Bagi Pejabat LPEI</li> <li>Pengisian peraturan internal tentang Program Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan Terorisme (APU &amp; PPT) LPEI.</li> <li>Ditetapkannya regulasi mengenai Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan</li> <li>Refinement of regulations on the Obligation to Submit LHKPN for Indonesia Eximbank Officials</li> <li>Completion of internal regulations regarding the Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs (APU &amp; PPT) of Indonesia Eximbank.</li> <li>Stipulation of regulations regarding the Board of Directors' Responsibilities for Financial Statements</li> </ul>
<b>2018</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diterbitkannya peraturan internal mengenai <i>Know Your Employee</i> di LPEI</li> <li>Ditetapkannya Limit Kewenangan Persetujuan Penggunaan Anggaran LPEI</li> <li>Penyempurnaan peraturan mengenai Komite Manajemen Risiko LPEI; Komite Pengembangan Produk LPEI; Komite Personalia LPEI</li> <li>Penyempurnaan Manual Operasional Pengadaan Barang / Jasa LPEI</li> <li>Penyempurnaan Regulasi Internal perihal Disiplin Pegawai LPEI</li> <li>Implementasi Program sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pegawai LPEI</li> <li>Issuance of internal regulations regarding Know Your Employee at Indonesia Eximbank</li> <li>Stipulation of Limit of Authority for Approval for Use of Indonesia Eximbank Budget</li> <li>Improvement of regulations regarding the Risk Management Committee; Product Development Committee; Personnel Committee</li> <li>Improvement of the Goods/Services Procurement Operational Manual</li> <li>Improvement of Internal Regulations regarding Employee Discipline</li> <li>Implementation of the Risk Management Certification Program for Employees</li> </ul>
<b>2019</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyempurnaan peraturan mengenai Komite Pembiayaan LPEI; Komite Pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor LPEI; Komite Teknologi Sistem Informasi; Komite Asset dan Liability LPEI; Komite Kebijakan Bisnis LPEI; &amp; Komite Manajemen Risiko LPEI</li> <li>Penyempurnaan mengenai peraturan internal Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan LPEI</li> <li>Sosialisasi dari Unsur Top Management (<i>Tone of The Top</i>) dengan tema Budaya Kerja; Kode Etik dan Anti Gratifikasi</li> <li>Pengisian peraturan internal tentang Program Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan Terorisme (APU &amp; PPT) LPEI</li> <li>Penyempurnaan Ketentuan dan Prosedur Pelaksanaan atas Pembagian Tugas dan Wewenang Kewajiban Pelaporan kepada Pihak Eksternal LPEI</li> <li>Ditetapkannya Peraturan Internal mengenai Strategi Anti-Fraud LPEI</li> </ul>

## TATA KELOLA PERUSAHAAN

### Corporate Governance

Tahun Year	Kegiatan   Activities
2020	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melanjutkan Program sertifikasi Manajemen Risiko bagi seluruh Pegawai di LPEI</li><li>• Diterbitkannya Piagam Audit Internal dan <i>Updating</i> peraturan internal mengenai Penerapan Fungsi Audit Internal LPEI</li><li>• Diterbitkannya Piagam Kepatuhan mengenai penerapan Fungsi Kepatuhan di LPEI</li><li>• Completion of regulations regarding the Financing Committee; Export Special Assignment Financing Committee; Information System Technology Committee; Asset and Liability Committee; Business Policy Committee; &amp; Risk Management Committee</li><li>• Improvement of the internal regulations for Gratification Control within the Indonesia Eximbank</li><li>• Socialization of Top Management Elements (Tone of The Top) with the theme of Work Culture; Code of Ethics and Anti-Gratification</li><li>• Completion of internal regulations regarding the Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs (APU &amp; PPT)</li><li>• Completion of Provisions and Implementation Procedures on the Division of Duties and Authorities of Reporting Obligations to External Parties</li><li>• Stipulation of Internal Regulations regarding Anti-Fraud Strategy</li><li>• Continuing the Risk Management certification program for all Employees at Indonesia Eximbank</li><li>• Issuance of the Internal Audit Charter and Updating of internal regulations regarding the Implementation of the Internal Audit Function</li><li>• Issuance of the Compliance Charter regarding the implementation of the Compliance Function at Indonesia Eximbank</li><li>• Penerbitan Peraturan Tata Tertib Kerja Dewan Direktur (<i>Board Manual</i>)</li><li>• Penyempurnaan / Perubahan Peraturan mengenai proses bisnis diantaranya Komite Manual Produk Penugasan Khusus LPEI; Komite Assets &amp; Liabilities Management LPEI; Manual Operasional Pembiayaan LPEI; <i>Standard Operating Procedure Credit File</i>; Komite Pembiayaan LPEI; Komite Pembiayaan Khusus LPEI; Limit</li><li>• Kewenangan Persetujuan Penggunaan Anggaran LPEI;</li><li>• Perpanjangan Sementara Fasilitas Pembiayaan; Tata Cara Pelaksanaan AYDA; Addendum Perpanjangan Fasilitas Sementara <i>Global Line</i>; Pencairan Fasilitas Debitur; Tindak Lanjut Pengelolaan Debitur terdampak COVID-19</li><li>• Penerbitan Kebijakan dan Prosedur mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan dilakukan sosialisasi kepada seluruh Unit Bisnis dan Support</li><li>• Penyempurnaan Peraturan mengenai Pedoman dan Tata Kerja Organisasi LPEI</li><li>• Penggunaan <i>New Employee Self Service System</i></li><li>• Perubahan susunan Dewan Direktur, dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Direktur LPEI</li><li>• Penerbitan Kebijakan Pengelolaan Dana Program Kemitraan Eks PT Lembaga Ekspor Indonesia (Persero)</li><li>• Penerapan dan penyempurnaan <i>Digital Signature</i></li><li>• Implementasi POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran COVID-19 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank</li><li>• Implementasi PMK Nomor 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI</li><li>• Sosialisasi mengenai Tata Kelola Pembiayaan kepada seluruh pegawai Unit Bisnis dan Support di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah</li><li>• Penyempurnaan Piagam Dewan Pengawas Syariah LPEI</li><li>• Penerbitan Kebijakan Kegiatan Ekspor, Penunjang Ekspor dan Kegiatan Lain terkait Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional LPEI</li><li>• Penerbitan Manual Produk Penjaminan Kredit Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional</li><li>• Penerbitan Manual Produk Penugasan Khusus dalam Rangka Mendukung Sektor Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Ekspor LPEI</li><li>• Penerbitan Manual Produk Penugasan Khusus <i>Trade Finance</i> dalam Rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional LPEI</li></ul>

Tahun Year	Kegiatan   Activities
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerbitan Manual Produk Penugasan Khusus <i>Trade Finance</i> dalam Rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional LPEI</li> <li>Penerbitan Manual Produk Investasi Pemerintah dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional LPEI</li> <li>Penerbitan Peraturan Mengenai Penerapan <i>Know Your Employee (KYE)</i> LPEI.</li> <li>Penerbitan Peraturan mengenai Penegakan Disiplin dan Penentuan Sanksi atas Pelanggaran LPEI</li> <li>Penerbitan Keputusan Direktur Eksekutif Perihal Komite Etik dan Disiplin Pegawai</li> <li>Pengembangan <i>Computer Based Training (CBT)</i> Kode Etik dan Budaya Kerja Lembaga</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Issuance of Work Rules for the Board of Directors (Board Manual)</li> <li>Improvements/Changes to Regulations regarding business processes including the Special Assignment Product Manual Committee; Assets &amp; Liabilities Management Committee; Financing Operational Manual; Standard Operating Procedures for Credit Files; Financing Committee; Special Financing Committee; Limit</li> <li>Authority to Approve the Use of Budget;</li> <li>Temporary Extension of Financing Facilities; AYDA Implementation Procedures; Global Line Temporary Facility Extension Addendum; Disbursement of Debtor Facilities; Follow-up on the Management of Debtors Affected by COVID-19</li> <li>Issuance of Policies and Procedures regarding the Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs and socialization to all Business and Support Units</li> <li>Completion of Regulations regarding the Guidelines and Work Procedures of the Organization</li> <li>Use of the New Employee Self Service System</li> <li>Changes in the composition of the Board of Directors, with the dismissal and appointment of members of the Board of Directors</li> <li>Issuance of Policy on Fund Management of the Ex-PT Indonesian Export Institute (Persero) Partnership Program</li> <li>Digital Signature implementation and enhancement</li> <li>Implementation of POJK Number 14/POJK.05/2020 concerning Countercyclical Policies on the Impact of the Spread of COVID-19 for Non-Bank Financial Services Institutions</li> <li>Implementation of PMK Number 58/PMK.06/2020 concerning LPEI Guidance and Supervision</li> <li>Dissemination of Financing Governance to all Business and Support Unit employees at the Head Office and Regional Offices</li> <li>Completion of the LPEI Sharia Supervisory Board Charter</li> <li>Issuance of Policy on Export Activities, Export Support and Other Activities related to Government Guarantees for Corporate Business Actors in the Framework of Implementing the LPEI National Economic Recovery Program</li> <li>Issuance of Government Credit Guarantee Product Manual for Corporate Business Actors in the Implementation of the National Economic Recovery Program</li> <li>Issuance of Special Assignment Product Manuals to Support the Export-Oriented Small and Medium Enterprises Sector LPEI</li> <li>Issuance of a Trade Finance Special Assignment Product Manual to Support National Economic Recovery</li> <li>Issuance of a Trade Finance Special Assignment Product Manual to Support National Economic Recovery</li> <li>Issuance of Government Investment Product Manual in the Context of National Economic Recovery</li> <li>Issuance of Regulations Regarding the Implementation of Indonesia Eximbank's <i>Know Your Employee (KYE)</i>.</li> <li>Issuance of Regulations regarding Discipline Enforcement and Determination of Sanctions for Violations</li> <li>Issuance of the Executive Director's Decision Regarding the Committee on Ethics and Employee Discipline</li> <li>Development of Computer Based Training (CBT) Code of Ethics and Institutional Work Culture</li> </ul>
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyempurnaan peraturan tentang Pedoman dan Tata Kerja Organisasi LPEI.</li> <li>Penerbitan peraturan tentang Penyesuaian Organisasi LPEI.</li> <li>Penetapan Anggota Komite Penjaminan Bagi Pelaku Usaha Korporasi Dalam Rangka Pelaksanaan PEN.</li> <li>Penerbitan manual Produk Program Penugasan Khusus dalam Rangka Mendukung Sektor Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Ekspor LPEI.</li> <li>Penerbitan manual produk terkait Program Kemitraan LPEI.</li> <li>Pembentukan dan peresmian <i>Governance, Risk, Compliance (GRC) Champion</i> LPEI.</li> </ul>

## TATA KELOLA PERUSAHAAN

### Corporate Governance

Tahun Year	Kegiatan   Activities
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan sistem pengendalian internal dengan peluncuran <i>Whistleblowing System</i> (WBS) dan Pengendalian Gratifikasi bekerjasama dengan Kementerian Keuangan.</li><li>• Sosialisasi berkelanjutan terkait WBS dan Gratifikasi kepada seluruh pegawai LPEI bersama Itjen Kemenkeu dan Pusintek Kemenkeu.</li><li>• Pelatihan Tata Cara Pengisian LHKPN dan Perubahan Peraturan KPK tentang LHKPN.</li><li>• Pelatihan Computer Based Training (CBT) Kode Etik dan Budaya Kerja Lembaga kepada seluruh pegawai LPEI.</li><li>• Penerbitan Standar Pedoman Operasional Penyusunan Peraturan Edisi 1.</li><li>• Penetapan anggota Komite Pembiayaan Program Penugasan Khusus Ekspor dalam Rangka Mendukung Sektor Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Ekspor.</li><li>• Penetapan anggota Komite Pembiayaan <i>Supplier Chain Financing</i>.</li><li>• Implementasi dan penunjukan <i>Person in Charge</i> (PIC) pada Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK.</li><li>• Penunjukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) sistem pelaporan Gratifikasi <i>Online</i> (GOL) KPK</li><li>• Pelaksanaan dan penyampaian laporan gratifikasi kepada KPK melalui sistem pelaporan Gratifikasi <i>Online</i> (GOL).</li><li>• Pelaksanaan penilaian independen prinsip-prinsip tata kelola yang baik oleh pihak eksternal.</li><li>• Sosialisasi Tata Kelola yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) oleh konsultan independen kepada seluruh pegawai LPEI.</li><li>• Diseminasi Surat Edaran kepada Pegawai LPEI, Mitra/Rekanan, dan Nasabah/Debitur perihal larangan permintaan, penerimaan dan pemberian gratifikasi untuk/dari Pegawai LPEI serta kepada Rekanan, Penyedia Barang/Jasa (<i>Vendor</i>), Mitra, dan Nasabah.</li><li>• Sosialisasi melalui flyer terkait larangan praktik Gratifikasi kepada seluruh pegawai LPEI</li><li>• Pembentukan dan Peresmian <i>Special Purpose Vehicle</i> (SPV) LPEI.</li><li>• Penerapan Manajemen Risiko melalui sertifikasi kompetensi Manajemen Risiko dan sertifikasi kompetensi kerja pegawai LPEI.</li><li>• Penerbitan peraturan tentang Komite Pengadaan LPEI.</li><li>• Penerbitan Manual Operasional Teknologi Sistem Informasi LPEI.</li><li>• Penetapan struktur dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko LPEI.</li><li>• Completion of regulations regarding the Organizational Guidelines and Work Procedures.</li><li>• Publication of regulations regarding Organization Adjustments.</li><li>• Determination of Guarantee Committee Members for Corporate Business Actors for the Implementation of PEN.</li><li>• Publication of a manual for the Special Assignment Program Product in Supporting the Export-Oriented Small and Medium Enterprises Sector of Indonesia Eximbank.</li><li>• Publication of product manuals related to the Partnership Program.</li><li>• Establishment and inauguration of the LPEI Governance, Risk, Compliance (GRC) Champion.</li><li>• Strengthening the internal control system by launching a Whistleblowing System (WBS) and Gratification Control in collaboration with the Ministry of Finance.</li><li>• Ongoing dissemination regarding WBS and Gratification to all employees together with the Inspector General of the Ministry of Finance and the Ministry of Finance's Pusintek.</li><li>• Training on Procedures for Filling in LHKPN and Amendment to KPK Regulations on LHKPN.</li><li>• Computer Based Training (CBT) Code of Ethics and Institutional Work Culture for all employees.</li><li>• Publication of Standard Operational Guidelines for Regulatory Preparation Edition 1.</li><li>• Appointment of members of the Financing Committee for the Special Export Assignment Program in the Framework of Supporting the Export-Oriented Small and Medium Enterprises Sector.</li><li>• Appointment of members of the Supplier Chain Financing Committee.</li><li>• Implementation and appointment of Person in Charge (PIC) on the OJK Consumer Protection Portal Application (APPK).</li><li>• Appointment of the Gratification Control Unit (UPG) for the KPK's Online Gratification Reporting System (GOL)</li><li>• Implementation and submission of gratification reports to the KPK through the Online Gratification reporting system(GOL).</li><li>• Implementation of an independent assessment of the principles of good governance by external parties.</li><li>• Dissemination of Good Corporate Governance by independent consultants to all employees.</li></ul>

## TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Tahun Year	Kegiatan   Activities
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dissemination of Circular Letters to Employees, Partners/Partners, and Customers/Debtors regarding the prohibition of requesting, receiving and granting gratuities to/from Employees as well as to Partners, Goods/ Services Providers(Vendors), Partners, and Customers.</li> <li>Socialization through flyers regarding the prohibition of gratification practices to all employees</li> <li>Establishment and Inauguration of the Special Purpose Vehicle (SPV).</li> <li>Implementation of Risk Management through Risk Management competency certification and employee competency certification.</li> <li>Issuance of regulations regarding the Procurement Committee.</li> <li>Issuance of the Information System Technology Operational Manual.</li> <li>Determination of the structure and membership of the Risk Management Committee.</li> </ul>

### SISTEM TATA KELOLA

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009, sistem Tata kelola LPEI adalah "One Board System". Dewan Direktur sebagai organ tunggal perusahaan mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk merumuskan, menetapkan kebijakan, dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LPEI. Pembagian tugas dan tata cara pelaksanaan tugas anggota Dewan Direktur ditetapkan oleh Dewan Direktur.

Dalam organisasi LPEI, paling banyak terdapat sepuluh (10)orang anggota Dewan Direktur sebagai organ tunggal LPEI yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Anggota Dewan Direktur berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi fiskal, instansi atau lembaga yang membidangi perdagangan, instansi atau lembaga yang membidangi perindustrian, dan dari instansi atau lembaga yang membidangi pertanian; dan orang/pihak dari luar dan/atau dalam LPEI.

Direktur Eksekutif melakukan kegiatan operasional LPEI termasuk mewakili LPEI, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Eksekutif dibantu oleh paling banyak 5 (lima) orang Direktur Pelaksana yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Direktur atas usul Direktur Eksekutif. Paling banyak 4 (empat) orang dari Direktur Pelaksana berasal dari dalam LPEI.

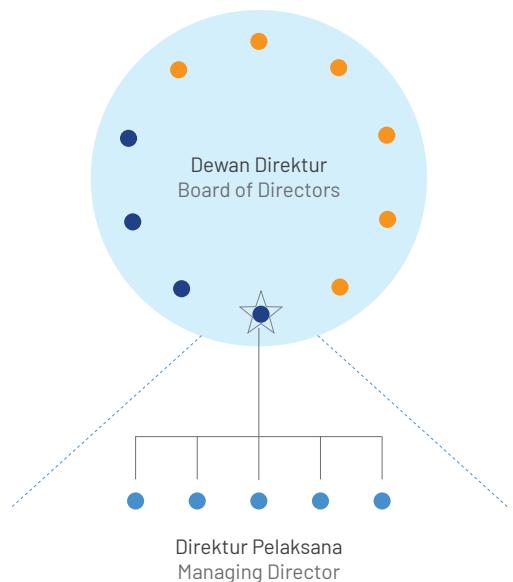
### GOVERNANCE SYSTEM

In accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2009, The Governance System of Indonesia Eximbank is a "One Board System". The Board of Directors is the company's sole organ with the principal duties and function to formulate, set the policies, and carries out oversight on the Company's operations. The segregation of duties and work ethics of members of the Board of Directors are stipulated by the Board of Directors.

In the Company's organization, the greatest number of members of the Board of Directors are ten(10)members as the Company's sole organ that are appointed and terminated by the Ministry. Members of the Board of Directors are assigned from institutions with expertise in fiscal, commerce, industrial, and agriculture; and person/ party from external sources and/or from the internal of the Company.

Executive Director is in charge of the Company's operations including to represent the Company, both in and or out of courts. In implementing its duties, the Executive Director is assisted maximum by 5 (five) members of Managing Director that are appointed and terminated by the Board of Directors following the proposal of the Executive Director. Maximum of 4 (four) members of Managing Director are from the Company.

## **ORGAN (One Board, One Star)**



- Ex Officio
    - Fiskal (3 orang) | Fiscal (3 persons)
    - Perdagangan (1 orang) | Trade (1 person)
    - Perindustrian (1 orang) | Industry (1 person)
    - Pertanian (1 orang) | Agriculture (1 person)
  - Profesional | Professional
    - Berasal dari luar LPEI paling banyak 3 Orang dan 1 orang dari dalam LPEI | Comes from outside the LPEI at most 3 people and 1 person from inside the LPEI
  -  Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director
  - Managing Director / Direktur Pelaksana yang terdiri dari para profesional dan membantu Direktur Eksekutif Managing Director consists of professionals and assists the Executive Director

## STRUKTUR DAN ARSITEKTUR GCG

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.010/2009, penerapan prinsip-prinsip GCG diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana serta pelaksanaan Rapat Pengesahan oleh Menteri Keuangan (sebagai fungsi RUPS).

Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut, Dewan Direktur wajib membentuk komite-komite, antara lain:

1. Komite Audit
  2. Komite Pemantau Risiko
  3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Sedangkan Direktur Eksekutif dalam mendukung pelaksanaan tugasnya juga membentuk komite-komite yaitu:

1. Komite Manajemen Risiko
  2. Komite Kebijakan dan Pedoman
  3. Komite Pembiayaan
  4. Komite Penjaminan PEN
  5. Komite Pengembangan Produk
  6. Komite Assets dan Liabilities
  7. Komite Personalia

## GCG STRUCTURE AND ARCHITECTURE

Based on the Regulation of the Minister of Finance No. 141/PMK.010/2009, the implementation of GCG principles is manifested in the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors, Executive Director, and Managing Director as well as the implementation of the Ratification Meeting by the Minister of Finance (as a function of the GMS).

In supporting the effective implementation of these duties and responsibilities, the Board of Directors is required to establish several committees, including:

1. Audit Committee
  2. Risk Monitoring Committee
  3. Remuneration and Nomination Committee

Meanwhile, the Executive Director in supporting the implementation of its duties also forms the following committees:

1. Risk Management Committee
  2. Policy and Guidelines Committee
  3. Financing Committee
  4. PEN Assurance Committee
  5. Product Development Committee
  6. Assets and Liabilities Committee
  7. Personnel Committee

8. Komite Etik dan Disiplin Pegawai
9. Komite Teknologi dan Sistem Informasi
10. Komite Pengadaan

Masing-masing Komite bekerja sesuai dengan ruang lingkup tugas dan kewajibannya yang ditetapkan oleh Keputusan Dewan Direktur (KDD) dan Keputusan Direktur Eksekutif (KDE).

#### **Arsitektur Kebijakan GCG**

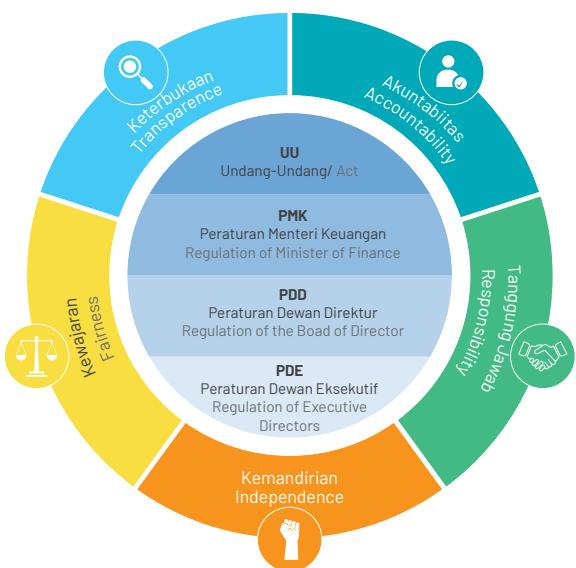
Arsitektur penyusunan kebijakan dan prosedur berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan mengamanatkan adanya Kebijakan dan Prosedur tertulis, sebagaimana skema berikut:

8. Employee Discipline and Ethics Committee
9. Technology and Information Systems Committee
10. Procurement Committee

Each Committee works in accordance with the scope of its duties and obligations as determined by the Decree of the Board of Directors (KDD) and Decree of the Executive Director (KDE).

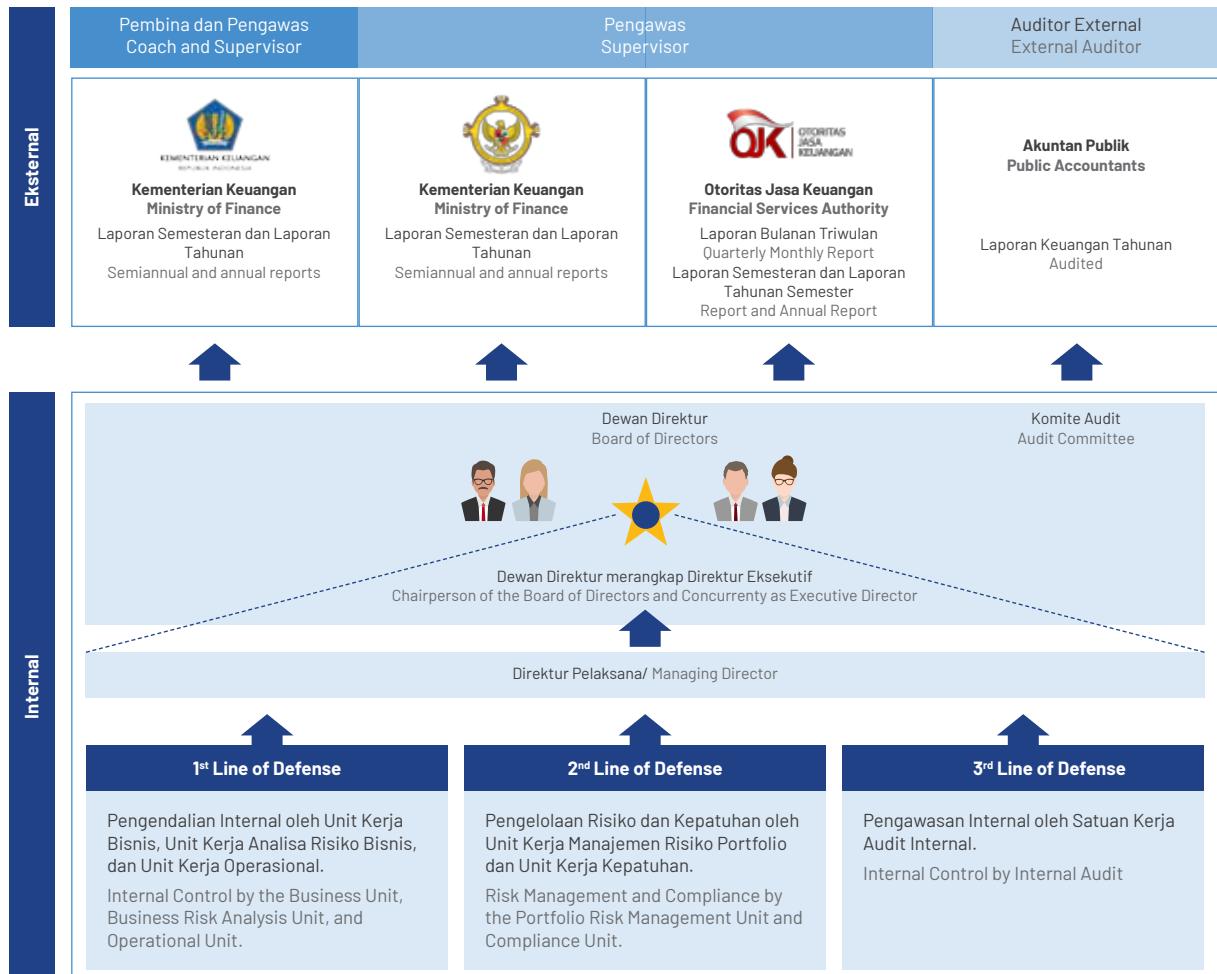
#### **GCG Policy Architecture**

The Company's policy development and procedures that are based on the principles of GCG are mandated through the following written schemes:



## TATA KELOLA PERUSAHAAN

### Corporate Governance





# RAPAT PENGESAHAN

## Ratification Meetings

Rapat Pengesahan oleh Menteri Keuangan di LPEI (Fungsi RUPS) adalah organ perusahaan dengan kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Direktur atau Direktur Pelaksana dalam batas yang ditentukan dalam UU Nomor 2/2009 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rapat Pengesahan merupakan forum bagi Kementerian Keuangan/Pemegang Saham untuk menggunakan haknya, menjalankan wewenang, mengemukakan pendapat, memberikan suara serta meminta informasi berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis ataupun pengelolaan Lembaga.

### Landasan Hukum dan Tahapan Pelaksanaan

Rapat Pengesahan Berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Bagian Keempat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan:

- Pasal 36: Tahun Buku dan Tahun Anggaran LPEI dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
- Pasal 37:
  - Direktur Eksekutif menyiapkan Rencana Jangka Panjang sebagai rencana strategis yang memuat sasaran yang hendak dicapai oleh LPEI dalam periode 5 (lima) tahunan.
  - Direktur Eksekutif menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang.
  - Tata cara penyusunan, penyampaian, dan pengubahan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.”

### Hak-hak Pemegang Saham

LPEI tidak terbagi atas saham dan 100% milik Pemerintah.

### Kesetaraan Perlakuan terhadap Pemegang Saham

LPEI 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia yang modalnya tidak terbagi atas saham.

### Pelaksanaan Rapat Pengesahan Tahun 2021

Laporan Rapat Pengesahan LPEI telah disetujui oleh Menteri Keuangan melalui surat surat No. S-688/MK.06/2022 tanggal 3 Agustus 2021 perihal Pertanggungjawaban Kinerja LPEI Tahun 2020 yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

The Ratification Meetings (GMS Function) in Indonesia Eximbank is a company organ with authorities not granted to the Board of Directors and the Executive Directors within threshold as set forth under the Articles of Association and prevailing regulations. The Ratification Meetings serves as a forum for the Shareholder to exercise rights, initiate authorities, and submission of opinions, voting, and request of information relating to the strategic decision-making or the Company's management

### Legal References and Stages of the Ratification Meetings

Pursuant to Law No. 2 of 2009 concerning the Indonesia Eximbank's Fourth Part Work Plan and Annual Budget:

- Article 36: Indonesia Eximbank Fiscal Year and Financial Year begin from 1 January to 31 December Annual Work Plan and Budget.
- Article 37:
  - The Executive Director prepares a Long-Term Plan as a strategic plan that contains the objectives to be achieved by the Company within a 5 (five) year period.
  - The Executive Director prepares an Annual Work Plan and Budget as an annual translation of the Long-Term Plan.
  - The procedures for the preparation, submission and amendment of the Long-Term Plan and Work Plan and Annual Budget are stipulated in a Ministerial Regulation.

### Shareholders Rights

Indonesia Eximbank is wholly owned (100%) by the Government and is not divided into shares.

### Equality in Treatment of the Shareholders

Indonesia Eximbank is 100% Government ownership and not divided into shares.

### Ratification Meetings in 2021

Indonesia Eximbank Ratification Meeting Report has been approved by the Minister of Finance through letter No. S-688/MK.06/2021 dated 3 August 2021 concerning the Accountability of Indonesia Eximbank Performance in 2020, which includes the following:

## **Hasil Keputusan Rapat Pengesahan** Ratification Meeting Resolutions

No	Hasil Keputusan Rapat Pengesahan   Ratification Meeting Resolutions
1	<p>Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &amp; Rekan (RSM Indonesia) sebagaimana disampaikan dalam laporan Nomor 00329/2.1030/AU.1/09/0645- 1/1/IV/2021 tanggal 12 April 2021 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</p> <p>Certifying the Annual Financial Statements of the Indonesia Eximbank for fiscal year 2020 which has been audited by the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &amp; Rekan (RSM Indonesia) as stated in the report No. 00329/2.1030/AU.1/09/0645-1/1/IV/2021 dated 12 April 2021 with an opinion of fairness in all material respects, the financial position and cash flows for the year ended on that date, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.</p>
2	<p>Menyetujui capaian Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Kontrak Manajemen Tahun Buku 2020, sebagaimana telah diperiksa dan disampaikan oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &amp; Rekan.</p> <p>Approved the achievement of Key Performance Indicators in accordance with the Management Contract for the Fiscal Year 2020, as audited and submitted by KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &amp; Rekan.</p>
3	<p>Memberikan pembebasan kepada Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020, dalam semua hal yang material atas Laporan Keuangan Tahun 2020 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Tahunan periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020.</p> <p>Granted exemptions to the Board of Directors and Executive Directors for supervisory and management actions that have been carried out during the period of 1 January 2020 to 31 December 2020, in all material aspects of the 2020 Financial Statements as long as the action is not a criminal offense and the action is reflected in the Annual Report including the Annual Financial Statements for the period of 1 January 2020 to 31 December 2020.</p>
4	<p><b>Hal-hal yang perlu mendapat perhatian:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berupaya menciptakan kerja nyata dalam segala aspek usahanya melalui berbagai langkah strategis, inovasi yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas SDM.</li> <li>b. Melakukan penguatan sistem tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan lembaga termasuk penegakan disiplin dan kode etik pegawai secara adil dan akuntabel.</li> <li>c. Akselerasi <i>New Core Competence</i> di segmen UKM berorientasi ekspor.</li> <li>d. Berupaya untuk memperbaiki kualitas pembiayaan secara agresif untuk mewujudkan penurunan <i>Non Performing Loan</i> yang signifikan.</li> <li>e. Berkontribusi terhadap fokus Pemerintah di tahun 2021 melalui capaian bisnis penjaminan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional serta meningkatkan pertumbuhan bisnis Penjaminan LPEI melebihi rata-rata pertumbuhan di tahun-tahun sebelumnya.</li> <li>f. Pengelolaan <i>Human Capital</i> melalui pengembangan dan pengelolaan sinergi antar Divisi dan engagement pegawai.</li> <li>g. Meningkatkan kualitas internal control dalam setiap aktivitas lembaga, termasuk pada konsistensi pelaksanaan rencana kerja tahun 2021, pengembangan lembaga, dan pelaksanaan kebijakan strategis lembaga.</li> <li>h. Monitoring secara berkala dan menciptakan penguatan yang berkesinambungan pada teknologi informasi, terutama terkait dengan <i>security</i> dan <i>data integrity</i> untuk meyakinkan keamanan dan kehandalan sistem yang dimiliki LPEI serta melaksanakan strategi pengembangan MIS sebagaimana direncanakan dalam RKAT 2021.</li> <li>i. Melakukan penataan organisasi yang berdasarkan pada kebutuhan bisnis khususnya yang mendukung RKAT 2021 dan RJP 2020-2024. Penataan organisasi dilakukan dengan fokus mendukung <i>new business strategy</i> dan <i>business process improvement</i>.</li> <li>j. Meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif di setiap level lembaga dalam rangka mendukung Sistem Pengendalian Internal.</li> <li>k. Menyusun sistem internalisasi mengenai mandat dan peran LPEI sebagai lembaga sui generis serta nilai-nilai kebangsaan sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh jajaran pejabat dan pegawai LPEI.</li> <li>l. Melakukan evaluasi atas tata kelola dan kendala-kendala yang dihadapi dalam program Penugasan Khusus Ekspor baik dari sisi regulasi maupun implementasi.</li> <li>m. Melaporkan upaya perbaikan dan tindak lanjut dari arahan di atas secara periodik kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.</li> </ul>

## RAPAT PENGESAHAN Ratification Meetings

No	Hasil Keputusan Rapat Pengesahan   Ratification Meeting Resolutions
	<p>n. Dewan Direktur agar melakukan komunikasi yang lebih intensif dengan Direktur Pelaksana untuk membahas isu-isu signifikan serta meningkatkan pengawasan terhadap kinerja operasional LPEI khususnya pelaksanaan tugas oleh Direktur Pelaksana dan pejabat struktural lainnya guna memitigasi risiko yang berdampak pada kinerja dan citra lembaga.</p> <p><b>Issues Requiring Attention:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Strive to create real work in all aspects of its business through various strategic steps, sustainable innovation and improving the quality of human resources.</li> <li>b. Strengthening the governance system, risk management and compliance of institution including discipline enforcement and employee code of ethics in a fair and accountable manner.</li> <li>c. Acceleration of New Core Competence in the export-oriented SME segment.</li> <li>d. Strive to aggressively improve the quality of financing to realize a significant reduction in Non-Performing Loans.</li> <li>e. Contributing to the Government's focus in 2021 through the achievement of the guarantee business for the National Economic Recovery and increasing the growth of the Institution's Guarantee business beyond the average growth in previous years.</li> <li>f. Human Capital Management through the development and management of synergy between divisions and employee engagement.</li> <li>g. Improving the quality of internal control in every activity of the institution, including the consistency of the implementation of the 2021 work plan, the development of institution, and the implementation of the institution's strategic policies.</li> <li>h. Monitoring periodically and creating continuous strengthening of information technology, especially related to security and data integrity to ensure the security and reliability of Indonesia Eximbank's systems and implement MIS development strategies as planned in the RKAT 2021.</li> <li>i. Conduct organizational arrangements based on business needs, especially those that support RKAT 2021 and RJP 2020-2024. Organizational structuring is carried out with a focus on supporting new business strategies and business process improvement.</li> <li>j. Enhance an effective risk-aware culture at every level of the institution in order to support the Internal Control System.</li> <li>k. Establishing an internalization system regarding the mandate and role of Indonesia Eximbank as a <i>sui generis</i> institution and national values, hence it can be understood and properly implemented by all Indonesia Eximbank executives and employees.</li> <li>l. Evaluate the governance and obstacles encountered in the NIA program both in terms of regulation and implementation.</li> <li>m. Report on the improvement and follow-up efforts of the above directives periodically to the Minister of Finance c.q. Directorate General of State Treasury.</li> <li>n. The Board of Directors to conduct more intensive communication with the Managing Director to discuss significant issues and increase supervision of Indonesia Eximbank's operational performance, particularly the implementation of duties by the Managing Director and other structural officials to mitigate risks that have an impact on the performance and image of the institution.</li> </ul>
	<p>Realisasi Realization</p> <p>Seluruh poin di atas telah dilaksanakan dengan surat Menteri Keuangan BS.0118/CEO/06/2020</p> <p>All points have been implemented in accordance with the Letter of Minister of Finance No. BS.0118/CEO/06/2020</p>
	<p>Status</p> <p>Selesai Completed</p>

### Hasil Keputusan Rapat Pengesahan Tahun Buku Sebelumnya 2020

Seluruh keputusan Rapat Pengesahan Tahun Buku 2020 telah selesai dan telah direalisasikan.

### Ratification Meetings Resolutions in the Previous Fiscal Year 2020

All resolutions from the fiscal year 2020 Ratification Meetings have been completed and fully realized.



# DEWAN DIREKTUR

## Board of Directors

Sesuai pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2009, Dewan Direktur (Fungsi Dewan Komisaris) merupakan organ dalam LPEI. Dewan Direktur memiliki tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LPEI.

### Dasar Hukum

Pembentukan Dewan Direktur LPEI berdasarkan pada peraturan-peraturan berikut:

#### Peraturan Internal

PDD No. 0007/PDD/12/2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur LPEI (*Board Manual*).

#### Peraturan Eksternal

- a. UU No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- b. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 58/PMK.06/2020 Tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI.
- c. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.05/2015 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

#### Komposisi Dewan Direktur

Sesuai ketentuan pasal 25 ayat(2)UU No. 2/2009, bahwa Anggota Dewan Direktur terdiri dari unsur:

- a. 3 (tiga) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi fiskal, 1(satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perdagangan, 1(satu)orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perindustrian, dan 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi pertanian.
- b. Paling banyak 3 (tiga) orang yang berasal dari luar LPEI dan 1(satu) orang dari dalam LPEI.

Sepanjang Tahun 2021, komposisi Dewan Direktur LPEI tidak mengalami perubahan.

Pursuant to the article 26 paragraph (1) of the Act No. 2/2009, the Board of Directors (Board of Commissioners' Function) serves as the single organ of Indonesia Eximbank. The Board of Directors is in charge to formulate and stipulate the policy, as well as conduct oversight on Indonesia Eximbank operations activity.

### Legal References

The establishment of Indonesia Eximbank's Board of Directors refers to:

#### Internal Regulations

BOD Decree No. 0007/PDD/12/2020 on the Indonesia Eximbank Board of Directors Charter (*Board Manual*).

#### External Regulations

- Law No. 2 of 2009 on Indonesia Export Financing Institution
- a. Minister of Finance Regulation (PMK) No. 58/PMK.06/2020 concerning Guidance and Supervision of the LPEI
  - b. Finance Ministry of RI Regulation No. 141/PMK.010/2009 on the Governance Principle of Indonesia Export Financing Institution.
  - c. Financial Services Authority Regulation No. 40/POJK.05/2015 regarding Development and Supervision of Indonesia Eximbank.

#### Board of Directors' Composition

Pursuant to the article 25 paragraph(2) Law No. 2/2009, Member of the Board of Directors consists of the following elements:

- a. 3 (three) officials from the institution or department in charge of fiscal, 1 (one) official from the institution or department in charge of commerce, 1 (one) official from the institution or department in charge of industry, and 1 (one) official from the institution or department in charge of agriculture.
- b. At the most 3 (three) members from the external Indonesia Eximbank and 1 (one) member from the internal Indonesia Eximbank.

During 2021 Indonesia Eximbank Board of Directors composition did not undergo any change.

## DEWAN DIREKTUR

Board of Directors

### Komposisi Periode 1 Januari – 31 Desember 2021

**Composition for the Period of 1 January – 31 December 2021**

Nama Name	Jabatan Position	Periode Period	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appintment
Daniel James Rompas	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director	1 Jan – 31 Des 21 1 Jan – 31 Dec 21	KMK 933/KMK.06/2019
Suminto	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	1 Jan – 31 Des 21 1 Jan – 31 Dec 21	KMK 554/KMK.06/2018
Kasan	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	1 Jan – 31 Des 21 1 Jan – 31 Dec 21	KMK 274/KMK.06/2020
Arus Gunawan	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	1 Jan – 31 Des 21 1 Jan – 31 Dec 21	KMK 530/KMK.06/2020
Felia Salim	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	1 Jan – 31 Des 21 1 Jan – 31 Dec 21	KMK 522/KMK.06/2018
Rijani Tirtoso	Anggo Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	1 Jan – 31 Des 21 1 Jan – 31 Dec 21	KMK 934/KMK.06/2019

KMK : Keputusan Menteri Keuangan | Decree of the Minister of Finance

### Tugas dan Tanggung Jawab

Sebagaimana tercantum pada PMK No. 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Bab III, Pasal 4 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direktur, Dewan Direktur wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen:

1. Dewan Direktur wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam setiap kegiatan usaha LPEI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Dewan Direktur wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Eksekutif, serta memberikan nasihat kepada Direktur Eksekutif.
3. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Direktur wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dasar dan strategis.
4. Dewan Direktur wajib memastikan bahwa Direktur Eksekutif telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern LPEI, auditor ekstern, hasil pengawasan Menteri, dan/atau hasil pengawasan tertentu oleh otoritas lain.

### Duties and Responsibilities

As stated in PMK No. 141/PMK.010/2009 concerning the Principles of Governance of the Indonesia Eximbank Chapter III, Article 4 on the Duties and Responsibilities of the Board of Directors, the Board of Directors shall independently carry out its duties and responsibilities:

1. As referred to in Article 2, the Board of Directors shall ensure the implementation of good governance principles in every Company's business activity at all organizational levels or elements.
2. The Board of Directors shall exercise oversight on the Executive Directors' duties and responsibilities implementation, and provide advisory to the Executive Director.
3. In carrying out its oversight duty as referred to in paragraph (2), the Board of Directors shall direct, monitor and evaluate the implementation of basic and strategic policies.
4. The Board of Directors shall ensure the Executive Director has followed up on audit findings and recommendations from the internal audit unit, external auditor, results of the Minister's supervision, and/or results of certain supervision by other authorities.

**Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur tahun 2021**

- Dewan Direktur bertanggung jawab merumuskan dan menetapkan serta melakukan pengawasan terhadap operasional LPEI. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan melalui pelaksanaan rapat Dewan Direktur yang diwajibkan dilaksanakan minimal satu kali dalam satu bulan. Rapat Dewan Direktur menjadi wadah untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan strategis manajemen di LPEI sekaligus memastikan ditindaklanjutinya hasil temuan audit.
- Adapun selama tahun 2021, Rapat Dewan Direktur telah diselenggarakan 33 kali atau secara rata-rata sekitar tiga kali per bulan. Rapat Dewan Direktur diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan/atau pengambilan keputusan. Arahan dan keputusan Dewan Direktur didokumentasikan dalam Risalah Rapat Dewan Direktur.

Ada pun persentase kehadiran Dewan Direktur dalam Rapat Dewan Direktur tahun 2021 sebagai berikut:

- a. D. James Rompas: 100%
- b. Suminto: 88%
- c. Kasan: 94%
- d. Arus Gunawan: 91%.
- e. Felia Salim: 100%
- f. Rijani Tirtoso: 100%

Pelaksanaan rapat dengan pencapaian lebih dari 75% bagi setiap anggota Dewan Direktur tersebut menunjukkan keseriusan Dewan Direktur dalam melakukan tugas pengawasan kepada LPEI.

- Komite dibawah Dewan Direktur melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik, serta untuk membantu pelaksanaan pengawasan, Direktur Eksekutif membentuk tiga komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Masing-masing komite diketuai oleh anggota Dewan Direktur. Koordinasi dilakukan melalui rapat berkala.

Ada pun pelaksanaan Rapat Komite Dewan Direktur selama tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Rapat susun Pemantau Risiko sebanyak 24 kali.
- b. Rapat Komite Audit sebanyak 29 kali.

**Implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors in 2021**

- The Board of Directors is responsible for formulating and determining as well as supervising Indonesia Eximbank operations. One form of supervision is carried out through the Board of Directors meeting which is required at least once a month. The Board of Directors meeting serves as a forum for monitoring and evaluating strategic management policies at Indonesia Eximbank while ensuring that audit findings are followed up.
- In 2021, the Board of Directors Meeting has been held 33 times or an average of about three times per month. The meetings of the Board of Directors are held for the purpose of supervision and/or decision making. The instructions and decisions of the Board of Directors are documented in the Minutes of Meeting of the Board of Directors.

The percentage of attendance of the Board of Directors at the 2021 Board of Directors Meeting was as follows:

- a. D. James Rompas: 100%
- b. Suminto: 88%
- c. Kasan: 94%
- d. Arus Gunawan: 91%.
- e. Felia Salim: 100%
- f. Rijani Tirtoso: 100%

The meetings with the attendance of more than 75% for each member of the Board of Directors indicates the seriousness of the Board of Directors in carrying out its supervisory duties to the Company.

- Committees under the Board of Directors carry out their duties and responsibilities well, and to assist in the implementation of supervision, the Executive Director has established three committees, the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration and Nomination Committee. Each committee is chaired by a member of the Board of Directors. Coordination is carried out through regular meetings.

The Board of Directors Committee Meeting during 2021 were as follows:

- a. Risk Monitoring Arrangement meeting as many as 24 times.
- b. The Audit Committee Meeting 29 times.

## DEWAN DIREKTUR

Board of Directors

- c. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 11 kali.

Pelaksanaan rapat komite dilakukan secara efektif dan selalu dihadiri oleh ketua maupun anggota komite (tingkat kehadiran 100%).

Disamping hal tersebut, RUPS di LPEI berbentuk Rapat Pengesahan untuk Rencana Jangka Panjang (RJP) yang dilakukan setiap lima tahun sekali dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) pada setiap tahunnya.

### **Pengungkapan Mengenai Board Charter**

Pedoman tata kerja Dewan Direktur diatur dalam Peraturan Dewan Direktur (PDD) Nomor 007/PDD/12/2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur LPEI yang merupakan Pengkinian atas Board Manual yang ditetapkan sebelumnya yaitu PDD Nomor 0016/PDD/12/2010. Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur dimaksud meliputi tugas, wewenang dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, etika dan waktu kerja, rapat Dewan Direktur, sekretariat komite-komite dan staf ahli Dewan Direktur, hubungan Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana serta tata kerja Direktur Eksekutif.

### **Independensi Dewan Direktur**

PMK Nomor 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola LPEI mengatur bahwa Dewan Direktur wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. Anggota Dewan Direktur wajib mengungkapkan kepemilikan sahamnya pada perusahaan lain, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Direktur lain. Sebagai implementasi penerapan hal-hal tersebut, anggota Dewan Direktur LPEI telah menandatangani surat pernyataan independensi dan pakta integritas yang didokumentasikan dengan baik oleh LPEI.

### **Penilaian Kinerja Komite Di Bawah Dewan Direktur**

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Direktur telah membentuk komite-komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite dan Nominasi dan Remunerasi.

- c. Remuneration and Nomination Committee Meeting 11 times.

Committee meetings are carried out effectively and are always attended by the chairman and committee members (100% attendance rate).

In addition, the GMS at Indonesia Eximbank takes the form of a Ratification Meeting for the Long-Term Plan (RJP) which is held every five years and the Annual Work Plan and Budget (RKAT) every year.

### **Disclosure of Board Charter**

The Board of Directors Charter is regulated in the Board of Directors Regulation (PDD) No. 007/PDD/12/2020 on Indonesia Eximbank Board of Directors Work Procedure Guidelines which is an update on the previously established Board Manual, PDD No. 0016/PDD/12/2010. The Board of Directors Charter include duties, authorities and responsibilities, rights and obligations, ethics and working hours, meetings of the Board of Directors, secretariat of the committees and expert staff of the Board of Directors, the relationship between the Board of Directors and the Executive Director and the Managing Directors as well as the work ethics of the Directors.

### **Board of Directors Independence**

PMK No. 141/PMK.010/2009 on Indonesia Eximbank Governance Principles stipulates that the Board of Directors is obliged to carry out its duties and responsibilities independently. Members of the Board of Directors must disclose their share ownership in other companies, both domiciled at home and abroad, as well as financial relationships and family relationships of other members of the Board of Directors. As the implementation of these matters, members of the Company's Board of Directors have signed a statement of independence and an integrity pact which is well documented by the Company.

### **Performance Assessment of the Board of Directors' Committees**

In assisting effectiveness of its duties and responsibilities, the Board of Directors has established the committees, which are the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee.

Pengangkatan anggota komite dilakukan oleh Direktur Eksekutif berdasarkan keputusan rapat Dewan Direktur. Dewan Direktur wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif. Komite juga wajib menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite.

Indikator yang digunakan dalam memberikan penilaian terhadap kinerja komite-komite meliputi kontribusi komite serta pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Dewan Direktur. Berikut adalah penilaian seluruh komite pada tahun 2020.

#### **Komite Audit**

Komite Audit telah melakukan supervisi, memberikan konsultasi, dan kolaborasi dalam menanggapi tindak lanjut temuan auditor eksternal. Selain itu, Komite Audit telah memfasilitasi peningkatan kapabilitas dan kapasitas fungsi Internal audit dan meningkatkan kerjasama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu). Rapat Komite Audit telah terlaksana sebanyak 41 kali dengan tingkat kehadiran 100%.

#### **Komite Pemantau Risiko**

Komite Pemantau Risiko melakukan pengawasan terhadap fungsi manajemen risiko untuk memastikan diterapkannya tata kelola yang baik dan pengendalian risiko yang memadai. Memantau kecukupan kebijakan dan prosedur, terutama terhadap 2 risiko utama yakni risiko pembiayaan dan operasional, seperti monitoring proses kredit, risiko integritas data serta optimalisasi alokasi resources. Rapat Komite Pemantau Risiko telah terlaksana 29 kali dengan tingkat kehadiran 100%.

#### **Komite Remunerasi dan Nominasi**

Komite Remunerasi dan Nominasi aktif mendukung penguatan organisasi termasuk di dalamnya perbaikan kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM). Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi telah terlaksana 7 kali dengan tingkat kehadiran 100%.

#### **Program Pengenalan Dewan Direktur Baru**

Dewan Direktur yang baru bergabung pada periode tahun berjalan telah dikenalkan kepada jajaran Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana pada Rapat Dewan Direktur.

The appointment of committee members is carried out by the Executive Director following the decision of the Board of Directors' meeting. The Board of Directors shall ensure effective implementation of duties by the appointed committees. The committees shall also develop the committee charter.

The performance assessment to the committees is carried out by using indicators of contributions to the Board of Directors as well as the implementation of assigned duties. The following is the assessment of all committees in 2020.

#### **Audit Committee**

The Audit Committee has supervised, consulted, and collaborated in responding to the follow-up to the external auditors' findings. In addition, the Audit Committee has facilitated increased capability and capacity of the Internal audit function and increased cooperation with the Inspectorate General of the Ministry of Finance. The Audit Committee meetings have been held 41 times with an attendance rate of 100%.

#### **Risk Monitoring Committee**

The Risk Monitoring Committee carried out oversight on risk management function to ensure the implementation of good governance and adequate risk control. Monitors the adequacy of policies and procedures, particularly on 2 main risks namely financing and operational risks, such as monitoring loan process, data integrity risk, including optimization of resources allocation. The Risk Monitoring Committee has held 29 meetings with 100% attendance level.

#### **Remuneration and Nomination Committee**

The Remuneration and Nomination Committee actively supports the organizational strengthening, including improvements to Human Resources (HR) policies. The Remuneration and Nomination Committee Meetings have been held 7 times with an attendance rate of 100%.

#### **New Board of Directors Introduction Program**

The new Board of Directors joining in the current year has been introduced to the Board of Directors and Managing Directors at the Board of Directors Meeting.

## DEWAN DIREKTUR Board of Directors

### Program Pengembangan Dewan Direktur

Rincian tentang program pengembangan Dewan Direktur disampaikan pada bab "Profil Perusahaan" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

### Board of Directors Development Program

Details of the Board of Directors' development program are presented in the Company Profile section in this Annual Report.

## KOMISARIS INDEPENDEN

LPEI merupakan lembaga keuangan khusus (*sui generis*) yang didirikan berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2009 yang mengatur bahwa Dewan Direktur merupakan organ tunggal LPEI. UU LPEI tidak menggunakan terminologi komisaris independen. Anggota Dewan Direktur LPEI berasal dari unsur pejabat dari instansi atau lembaga dan unsur dari dalam atau dari luar LPEI.

Syarat minimal untuk dapat diangkat menjadi Dewan Direktur LPEI sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2009 yaitu:

1. Warga negara Indonesia;
2. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Memiliki integritas, kepemimpinan, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi;
5. Tidak termasuk daftar tidak lulus, baik yang disusun oleh otoritas perbankan maupun otoritas pasar modal dan lembaga keuangan;
6. Tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan perekonomian;
7. Memiliki keahlian dan pengalaman di salah satu bidang yang menjadi ruang lingkup kegiatan LPEI; dan
8. Tidak pernah dinyatakan pailit.

## INDEPENDENT COMMISSIONER

Indonesia Eximbank is a special financial institution (*sui generis*) which was established based on Law No. 2 of 2009 which stipulates that the Board of Directors is the sole organ of the Company. The Law does not use the term independent commissioner. Members of the Company's Board of Directors come from elements of officials from agencies or institutions and elements from internal and external of the Company

The following are minimum requirements to be appointed as the Company's Board of Directors as stipulated in Law No. 2 of 2009:

1. Indonesian citizen;
2. Able to carry out legal actions;
3. Physically and mentally healthy;
4. Has integrity, leadership, good behaviour, and high dedication;
5. Not included in the list of failures, either compiled by the banking authority or the capital market authority and financial institutions;
6. Never committed a criminal act in the banking and economic sector;
7. Having expertise and experience in one of the fields that fall within the scope of the Company's activities; and
8. Have never been declared bankrupt.



# DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA

Executive Director and Managing Director

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, kegiatan operasional LPEI dilakukan oleh Direktur Eksekutif. Dalam menjalankan tugasnya, Direktur Eksekutif dibantu oleh Direktur Pelaksana.

Mengacu pada pasal 25 ayat (5) UU No. 2/2009, Direktur Eksekutif LPEI merupakan salah satu anggota Dewan Direktur yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif. Selanjutnya, pada Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1), Direktur Eksekutif melaksanakan kegiatan operasional dan mewakili LPEI baik di dalam, maupun di luar pengadilan.

## Dasar Hukum

Pembentukan Direktur Eksekutif – Direktur Pelaksana LPEI berdasarkan pada sejumlah regulasi, yaitu:

### Peraturan Internal

- a. Peraturan Dewan Direktur (PDD) No. 0007/PDD/12/2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur LPEI.
- b. PDE No. 0041/PDE/11/2011 tentang Pedoman Tata Kerja Direktur Pelaksana.

### Peraturan Eksternal

- a. Undang-Undang No. 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- b. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 58/PMK.06/2020 Tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI.
- c. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.05/2015 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

### Komposisi Direktur Eksekutif – Direktur Pelaksana

Berikut komposisi Direktur Eksekutif – Direktur Pelaksana per 31 Desember 2021:

Pursuant to Law No. 2 of 2009 regarding the Indonesia Eximbank, the Executive Director shall carry out Indonesia Eximbank's operational activity. In implementing its duties, the Executive Director is assisted by Managing Director.

Referring to Article 25 paragraph (5) of Law No. 2 of 2009, Indonesia Eximbank Executive Director is one of members of the Board of Directors determined by the Minister of Finance as Chairman of the Board of Directors concurrently as the Executive Director. Furthermore, in Article 29 paragraph (1) and Article 30 paragraph (1), the Executive Director carries out operational activities and represents Indonesia Eximbank both inside and outside the court.

## Legal References

The establishment of Indonesia Eximbank's Executive Director - Managing Directors refers to:

### Internal Regulations

- a. Board of Directors Regulation (PDD) No. 0007/PDD/12/2020 concerning Indonesia Eximbank Board of Directors Charter.
- b. PDE No. 0041/PDE/11/2011 concerning Managing Director Charter.

### External Regulations

- a. Law No. 2 of 2009 on Indonesia Eximbank.
- b. Minister of Finance Regulation (PMK) No. 58/PMK.06/2020 on Guidance and Supervision of Indonesia Eximbank.
- c. Finance Ministry of RI Regulation No. 141/PMK.010/2009 on the Governance Principle of Indonesia Eximbank.
- d. Financial Services Authority Regulation No. 40/POJK.05/2015 regarding Development and Supervision of Indonesia Eximbank.

### Executive Directors - Managing Directors Composition

The following are the composition of Executive Directors - Managing Directors as of 31 December 2021:

**DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA**  
Executive Director and Managing Director

<b>Nama</b> Name	<b>Jabatan</b> Position	<b>Tugas dan Tanggung Jawab</b> Duties and Responsibilities	
Dikdik Yustandi	Direktur Pelaksana I Managing Director I	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membidangi seluruh unit kerja yang berada dibawah SEVP II, Divisi Bisnis Korporasi, Divisi Bisnis BUMN, Divisi Trade Finance,</li> <li><i>Team Leader Corporate Desk Surabaya dan Decision Support.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In charge of all work units under SEVP II, Corporate Business Division, BUMN Business Division, Trade Finance Division.</li> <li>Team Leader Corporate Desk Surabaya and Decision Support</li> </ul>
Maqin U Norhadzi (Periode 12 April - 31 Des 2021) Period of 12 April - 31 Dec 2021)	Direktur Pelaksana II Managing Director II	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membidangi Unit Kerja Bisnis Usaha Kecil, Menengah dan Komersial (UKMK)</li> <li>Membidangi Unit Kerja Bisnis Syariah</li> <li>Membidangi Unit Kerja Jasa Konsultasi</li> <li>Membidangi Kantor Wilayah Jakarta</li> <li>Membidangi Kantor Wilayah Surabaya</li> <li>Membidangi Kantor Cabang Medan</li> <li>Membidangi Kantor Cabang Surakarta</li> <li>Membidangi Kantor Cabang Makassar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In charge of Small, Medium Enterprise and Commercial Business Units (SMEC)</li> <li>In charge of the Sharia Business Unit</li> <li>In charge of the Advisory Services Unit</li> <li>In charge of Jakarta Regional Office</li> <li>In charge of Surabaya Regional Office</li> <li>In charge of Medan Branch Office</li> <li>In charge of Surakarta Branch Office</li> <li>In charge of Makassar Branch Office</li> </ul>
Djoko Retnadi (Periode 01 Jan - 11 April 2021) Period of 01 Jan - 11 April 2021)	Direktur Pelaksana III dan Corporate Secretary Managing Director III and Corporate Secretary	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membidangi seluruh unit kerja yang berada di bawah SEVP III</li> <li>Membidangi Unit Kerja IEB Institute</li> <li>Membidangi Unit Kerja Communication &amp; Stakeholder Engagement</li> <li>Membidangi Unit Kerja <i>Office of The Board</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In charge of all units under the SEVP III</li> <li>In charge of the IEB Institute Unit</li> <li>In charge of the Communication &amp; Stakeholder Engagement Unit</li> <li>In charge of the Office of The Board Unit</li> </ul>
	Senior Executive Vice President III (SEVP III)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membidangi Unit Kerja Finance</li> <li>Membidangi Unit Kerja Strategic &amp; Corporate Planning</li> <li>Membidangi Unit Kerja Strategic Initiative Management Office</li> <li>Membidangi Unit Kerja Financial Institution &amp; Treasury</li> <li>Membidangi Unit Kerja Middle Office Treasury</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In charge of the Finance Unit</li> <li>In charge of the Strategic &amp; Corporate Planning Unit</li> <li>In charge of the Strategic Initiative Management Office Unit</li> <li>In charge of Financial Institution &amp; Treasury Unit</li> <li>In charge of the Middle Office Treasury Unit</li> </ul>
Henry Sihotang	Direktur Pelaksana IV Managing Director IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membidangi seluruh unit kerja yang berada di bawah SEVP VI</li> <li>Membidangi Unit Kerja Restrukturisasi Aset I</li> <li>Membidangi Unit Kerja Restrukturisasi Aset II</li> <li>Membidangi Unit Kerja Restrukturisasi Aset III</li> <li>Membidangi Unit Kerja Restrukturisasi Aset IV</li> <li>Membidangi Unit Kerja Restrukturisasi Aset Syariah</li> <li>Membidangi Unit Kerja Litigasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In charge of all units under the SEVP VI</li> <li>In charge of the Asset Restructuring Unit I</li> <li>In charge of the Asset Restructuring Unit II</li> <li>In charge of the Asset Restructuring Unit III</li> <li>In charge of the Asset Restructuring Unit IV</li> <li>In charge of the Sharia Asset Restructuring Unit</li> <li>In charge of the Litigation Unit</li> </ul>
	Senior Executive Vice President VI (SEVP VI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membidangi Unit Kerja Credit Reviewer I</li> <li>Membidangi Unit Kerja Credit Reviewer II</li> <li>Membidangi Unit Kerja Product Development &amp; Portofolio Management</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In charge of the Credit Reviewer Unit I</li> <li>In charge of the Credit Reviewer Unit II</li> <li>In charge of the Product Development &amp; Portofolio Management</li> </ul>
Chesna F. Anwar	Direktur Pelaksana V Managing Director V	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membidangi seluruh unit kerja yang berada di bawah SEVP II</li> <li>Membidangi Unit Kerja Manajemen Risiko</li> <li>Membidangi Unit Kerja Hukum dan Litigasi</li> <li>Membidangi Unit Kerja Credit Operation and Supervision</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In charge of all units under the SEVP II</li> <li>In charge of the Risk Management Unit</li> <li>In charge of the Legal Unit</li> <li>In charge of the Credit Operation and Supervision Unit</li> </ul>
	Senior Executive Vice President II (SEVP II)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membidangi Unit Kerja Teknologi Sistem Informasi</li> <li>Membidangi Unit Kerja Operasional</li> <li>Membidangi Unit Kerja Pengadaan dan Umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In charge of the Information System Technology Unit</li> <li>In charge of the Operational Unit</li> <li>In charge of the General &amp; Procurement Unit</li> </ul>

## DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA

### Executive Director and Managing Director

#### Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana tahun 2021

- Direktur Eksekutif dibantu oleh Direktur Pelaksana bertugas melakukan operasional LPEI. Koordinasi dilakukan secara intens dan sistematis. Rapat-rapat rutin yang dilaksanakan adalah rapat direksi satu kali dalam satu minggu, rapat ALCO satu kali dalam satu bulan, rapat bulanan kinerja satu kali dalam satu bulan. Selain itu, Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur melaksanakan rapat koordinasi lainnya untuk memastikan operasional LPEI berjalan dengan baik.
- Selama tahun 2021 telah dilakukan Rapat antara Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana sebanyak 50 kali.
- Direktur Eksekutif aktif melakukan komunikasi dengan Dewan Direktur sebagai organ pengawas di LPEI. Keputusan strategis diambil melalui mekanisme rapat dan didokumentasikan secara baik. Dalam pelaksanaan operasional, dibentuk pula komite di bawah Direktur Eksekutif.
- Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor ekstern, dan/atau hasil pengawasan Menteri Keuangan dan/atau hasil pengawasan tertentu oleh otoritas lain dengan dibantu monitoring oleh Komite Audit.

Disamping hal tersebut, RUPS di LPEI berbentuk Rapat Pengesahan untuk Rencana Jangka Panjang (RJP) yang dilakukan setiap lima tahun sekali dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) pada setiap tahunnya.

#### Board Charter

Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang diatur dalam Peraturan Dewan Direktur No. 0007/PDD/12/2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur. Pedoman dan tata tertib kerja tersebut menjelaskan antara lain mengenai tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, pembagian kerja, waktu kerja, etika kerja, tata tertib pelaksanaan rapat, dan pelaksanaan tugas berkaitan dengan Rapat Pengesahan.

#### Implementation of the duties and responsibilities of the Executive Director and Managing Director in 2021

- The Executive Director is assisted by the Managing Director in charge of conducting Indonesia Eximbank operations. Coordination is carried out intensely and systematically. Routine meetings held are board of directors meeting once a week, ALCO meeting once a month, monthly performance meeting once a month. In addition, the Executive Director and the Board of Directors hold other coordination meetings to ensure proper operations.
- During 2021, there have been 50 meetings between the Executive Director and the Managing Director.
- The Executive Director actively communicates with the Board of Directors as the supervisory organ at Indonesia Eximbank. Strategic decisions are taken through a meeting mechanism and are well documented. In operational implementation, a committee is also formed under the Executive Director.
- The Executive Director and Managing Director have followed up on audit findings and recommendations from SKAI, external auditors, and/or the results of supervision of the Minister of Finance and/or results of certain supervision by other authorities with the assistance of monitoring by the Audit Committee.

In addition to this, the GMS at LPEI takes the form of a Ratification Meeting for the Long-Term Plan (RJP) which is held every five years and the Annual Work Plan and Budget (RKAT) every year.

#### Board Charter

In performing its duties, the Chairman of Board of Directors, concurrently serves as Executive Director, has the charter as stipulated in the Board of Directors Regulation No. 0007/PDD/12/2020 regarding Board of Directors Charter. The Board Charter elaborates the duties, authorities, obligations, responsibilities, work divisions, work hours, work ethics, meeting procedures, and duties implementation related with the Ratification Meeting.

## DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA

Executive Director and Managing Director

### Penilaian Kinerja Komite Di Bawah Direktur Eksekutif

Pada tahun 2021, secara umum kinerja komite-komite di bawah Direktur Eksekutif telah sejalan dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Komite-komite dimaksud adalah:

1. Komite Manajemen Risiko
2. Komite Kebijakan dan Pedoman
3. Komite Pembiayaan
4. Komite Penjaminan PEN
5. Komite Pengembangan Produk
6. Komite Assets dan Liabilities
7. Komite Personalia
8. Komite Etik dan Disiplin Pegawai
9. Komite Teknologi dan Sistem Informasi
10. Komite Pengadaan

Berikut ini penilaian dari pelaksanaan tugas komite-komite pada tahun 2021:

#### Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko telah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif mengenai kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko serta perubahannya. Selain itu, Komite juga memberikan rekomendasi atas perbaikan Komite Kebijakan Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan, dan penetapan terhadap hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang belum cukup diatur dalam prosedur.

#### Komite Kebijakan dan Pedoman

Komite Kebijakaan dan Pedoman telah memberikan rekomendasi kepada manajemen LPEI terkait rancangan peraturan internal LPEI dan pengawasan atas pelaksanaan peraturan internal LPEI serta merumuskan solusi atas kendala yang dihadapi.

#### Komite Pembiayaan

Komite Pembiayaan telah memberikan Keputusan atas proposal Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi, serta *Credit Line* termasuk *Country Limit* dan penempatan dana Tresuri. Komite Pembiayaan juga telah mengambil keputusan atas proposal penanganan pembiayaan bermasalah, dan keputusan atas proposal penetapan tingkat kualitas aktiva produktif sesuai dengan limit masing-masing komite pembiayaan.

### Performance Assessment of the Committees Under Executive Director

In 2021, the performance of the committees under the Executive Director in general has met the assigned duties and responsibilities. The committees are:

1. Risk Management Committee
2. Policy and Guidelines Committee
3. Financing Committee
4. PEN Assurance Committee
5. Product Development Committee
6. Assets and Liabilities Committee
7. Personnel Committee
8. Employee Discipline and Ethics Committee
9. Technology and Information Systems Committee
10. Procurement Committee

The following are the assessment and implementation of duties during 2021:

#### Risk Management Committee

The Risk Management Committee has provided the recommendations to the Executive Director on the policies, strategies, and risk management guidelines as well as its changes. In addition, the Committee also provided recommendations on improvement or refinement of risk management periodically based on the implementation of evaluation, and stipulation on matters related to business decisions that are not yet sufficiently regulated within the procedures.

#### Policy and Guidelines Committee

The Guidelines and Policies Committee has offered recommendations to LPEI management regarding the draft of LPEI internal regulations and supervision of the internal regulations implementation as well as formulating the solutions to the obstacles.

#### Financing Committee

The Financing Committee has provided the Decisions on Financing, Guarantee, and Insurance proposals, as well as Credit Line including the Country Limit and placement of treasury funds. The Committee has also provided the decisions on the non-performing financing handling proposal, and decision on the stipulation of earnings assets quality level in accordance with the threshold of each financing committee.

## DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA

Executive Director and Managing Director

### Komite Penjaminan PEN

Komite Penjaminan terdiri dari anggota Komite Penjaminan Fungsi Bisnis dan anggota Komite Penjaminan Fungsi Risiko, untuk menjalankan fungsi 4 eyes principles serta untuk melakukan pemutusan penjaminan sebagai berikut:

1. Kewenangan melekat pada individu.
2. Bertanggung jawab kepada Direktur Pelaksana/Head of sesuai pembidangannya.
3. Penetapan nama anggota Komite Penjaminan diatur dalam Keputusan Direktur Eksekutif.

### Komite Pengembangan Produk

Komite Pengembangan Produk telah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam hal pengembangan dan penyempurnaan produk dan aktivitas/ kegiatan di LPEI serta pengembangan dan penyempurnaan atas manual produk, Standard Operating Procedure (SOP) dan ketentuan lain terkait produk dan aktivitas/kegiatan di LPEI.

### Komite Assets & Liabilities

Komite Assets & Liabilities telah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam hal penetapan kebijakan pengelolaan risiko, penetapan kebijakan, batasan-batasan dan pedoman strategi pengelolaan asset dan liabilities dengan mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.

### Komite Personalia

Komite Personalia telah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam hal penetapan arah, perubahan dan penyempurnaan kebijakan personalia dan pengembangan nilai-nilai lembaga (*corporate values*).

### Komite Etik dan Disiplin Pegawai

Tugas Komite Etik dan Disiplin Pegawai adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan Sanksi bagi pelaku pelanggaran sedang atau berat dan pihak-pihak yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memastikan bahwa Unit Kerja terkait memberikan sanksi sesuai keputusan yang diambil;
- c. Menentukan sanksi bagi atasan terkait yang memberikan sanksi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### PEN Assurance Committee

The Guarantee Committee consists of members of the Business Function Assurance Committee and members of the Risk Function Assurance Committee, to carry out the 4 eyes principles function as well as to terminate the guarantee as follows:

1. Authority is attached to the individual.
2. Responsible to the Managing Director/Head of according to their respective divisions.
3. The name of the members of the Guarantee Committee is regulated in the Decree of the Executive Director.

### Product Development Committee

The Product Development Committee has provided the recommendations to the Executive Director on the Company's product development and refinement and activities, as well as product manual development and refinement, Standard Operating Procedures (SOP) and other rules related to the Company's product and activities.

### Assets & Liabilities Committee

The Assets & Liabilities Committee has provided the recommendations to the Executive Director on the risk management policy stipulation, policy stipulation, assets and liabilities thresholds and management strategy guidelines, by taking into account the external and internal conditions.

### Personnel Committee

The Personnel Committee has provided the recommendations to the Executive Director on the direction, changes, and refinement of personnel policies, and corporate values development.

### Employee Discipline and Ethics Committee

The duties of the Employee Ethics and Discipline Committee are as follows:

- a. Determine Sanctions for moderate or severe violations and related parties in accordance with applicable regulations;
- b. Ensure that the relevant Workforce Unit provides sanctions according to the decisions taken;
- c. Determine sanctions for related superiors who provide sanctions that are not in accordance with applicable regulations;

## DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA

Executive Director and Managing Director

- d. Merekendasikan pelaku Pelanggaran berat (khususnya *fraud*) akan dilaporkan kepada pihak kepolisian sena menentukan unit kerja dan memonitor penyelesaian kasus yang dilaporkan kepada pihak Kepolisian;
- e. Memastikan telah dilakukan pemeriksaan yang mendukung;
- f. Mereviu dan memastikan telah dilakukan analisa pencarian akar permasalahan (*root cause analysis*) dan pembelajaran (*lesson learn*) secara benar atas kasus yang ada;
- g. Melakukan *monitoring* atas pemberian sanksi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta evaluasi dan rekomendasi sanksi atas Pelanggaran sedang maupun berat;
- h. Melakukan tindakan-tindakan lain terkait yang mendukung terselesaikannya Pemeriksaan dan Klarifikasi tersebut

### Komite Teknologi Sistem Informasi

Komite Teknologi Sistem Informasi telah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam hal kebijakan pengembangan teknologi sistem informasi jangka menengah dan jangka panjang, rencana kegiatan investasi teknologi sistem informasi, dan pengawasan dan evaluasi atas pengembangan dan penerapan teknologi sistem informasi yang telah dilakukan.

### Komite Pengadaan

Komite Pengadaan telah memberikan rekomendasi kepada manajemen dalam hal proses pengadaan yang efektif dan efisien serta sesuai ketentuan yang berlaku.

### Program Pengenalan Direktur Eksekutif & Direktur Pelaksana Baru

Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana yang baru bergabung pada periode tahun berjalan telah diberikan program pengenalan.

### Program Pengembangan Direktur Eksekutif & Direktur Pelaksana

Rincian tentang program pengembangan Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana disampaikan pada bab Profil Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

### Pernyataan Independensi

Seluruh anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana, telah menandatangani Surat

- d. Recommend that the perpetrators of serious violations (especially fraud) will be reported to the police, so that they determine the work unit and monitor the settlement of cases reported to the police;
- e. Ensuring that an adequate inspection has been carried out;
- f. Reviewing and ensuring that root cause analysis and learning(*lesson learn*)have been carried out correctly on existing cases;
- g. Monitoring the imposition of sanctions that have been determined in accordance with applicable regulations as well as evaluating and recommending sanctions for moderate or severe violations;
- h. Take other related actions that support the completion of the Examination and Clarification

### Information Technology System Committee

The Information Technology System Committee has provided the recommendations to the Executive Director on the medium- and long-term information technology system development policies, information technology system investment plans, and oversight and evaluation on the applied information technology system development and implementation.

### Procurement Committee

The Procurement Committee has offered recommendations to management on the effective and efficient procurement process according to the applicable regulations.

### Introduction Program for New Executive Director & Managing Director

The new Executive Director and Managing Director joining in the current year has received the induction program.

### Executive Director & Managing Director Development Program

Details of the Executive Director and Managing Director development program are presented in the Company Profile section in this Annual Report.

### Declaration of Independence

All members of the Board of Directors, Executive Director, and Managing Director, have signed a

## DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA

Executive Director and Managing Director

Pernyataan Independensi yang mengungkapkan diantaranya:

1. Tidak mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (untuk Dewan Direktur) dan berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri (untuk Direktur Pelaksana).
2. Tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Tidak akan memanfaatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau ketentuan lainnya yang berlaku.
5. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksu atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan dan/atau lembaga lain (untuk Direktur Pelaksana).

Dewan Direktur / Board of Directors

**Indonesia Eximbank**  
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Surat Pernyataan

Wajibnya Tanda Tangan :  
Name : James Rompis  
Position : Ketua Dewan Direktur/Managing Director  
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : James Rompis  
Jabatan : Ketua Dewan Direktur/Managing Director  
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Dengan ini menyatakan:

1. Tidak mempunyai kepentingan saham pada perusahaan lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Tidak akan memanfaatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau ketentuan lainnya yang berlaku.

Dengan Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana jemiatnya.

Jakarta, 31 Desember 2021  
Yang Membuat Pernyataan

  
James Rompis

Declaration of Independence which states, among others:

1. Do not have share ownership in other companies that have the potential to cause a conflict of interest (for the Board of Directors) and are domiciled both at home and abroad (for the Managing Director).
2. Has no financial relationship and family relationship with the Board of Directors and the Managing Director, either directly or indirectly.
3. Will not use the Indonesian Export Financing Agency for personal, family or party interests that can harm or reduce the profits of the Indonesian Export Financing Agency, either directly or indirectly.
4. Not taking and/or receiving personal benefits from the Indonesian Export Financing Agency other than remuneration and other facilities that have been determined by the Minister of Finance or other applicable provisions.
5. Not holding concurrent positions as members of the Board of Commissioners, Directors or Executive Officers in other companies and/or institutions (for the Managing Director).

Dewan Direktur / Board of Directors

**Indonesia Eximbank**  
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Surat Pernyataan

Wajibnya Tanda Tangan :  
Name : James Rompis  
Position : Dewan Direktur/Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Name : James Rompis  
Position : Dewan Direktur/Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Dengan ini menyatakan:

1. Tidak mempunyai kepentingan saham pada perusahaan lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Tidak akan memanfaatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau ketentuan lainnya yang berlaku.

Dengan Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana jemiatnya.

Jakarta, 31 Desember 2021  
Yang Membuat Pernyataan

  
James Rompis

## DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA

### Executive Director and Managing Director

**Dewan Direktor / Board of Directors**

**Indonesia Eximbank**  
Lembaga Pembilaman Ekspor Indonesia (LPEI)

**Surat Pernyataan**

Possibility Tower, Jl. Jendral Sudirman No. 28  
Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan 12190  
Telp. +62 21 551 0000  
Fax. +62 21 551 0009  
[www.indonesiaeximbank.com](http://www.indonesiaeximbank.com)

Yang bertanda tangan di bawah ini : --

Nama : **Kasun**  
Jabatan : **Dewan Direktor Lembaga Pembilaman Ekspor Indonesia**  
Alamat : **-**

Dengan ini menyatakan :

1. Tidak mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan ketua dengan Dewan Direktor dan Direktur Pelaksana baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Tidak akan memperbaiki Lembaga Pembilaman Ekspor Indonesia untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak yang dapat mengklaim atau menganggap keuntungan Lembaga Pembilaman Ekspor Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Pembilaman Ekspor Indonesia selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau ketentuan lainnya yang berlaku.

Diketahui Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sesuai dengan perintahnya --

Jakarta, 31 Desember 2021  
Yang Membuat Pernyataan

  
Kasun

**Dewan Direktor / Board of Directors**

**Indonesia Eximbank**  
Lembaga Pembilaman Ekspor Indonesia (LPEI)

**Surat Pernyataan**

Possibility Tower, Jl. Jendral Sudirman No. 28  
Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan 12190  
Telp. +62 21 551 0000  
Fax. +62 21 551 0009  
[www.indonesiaeximbank.com](http://www.indonesiaeximbank.com)

Yang bertanda tangan di bawah ini : --

Nama : **Ariez Bintoro**  
Jabatan : **Dewan Direktor Lembaga Pembilaman Ekspor Indonesia**  
Alamat : **-**

Dengan ini menyatakan :

1. Tidak mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan ketua dengan Dewan Direktor dan Direktur Pelaksana baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Tidak akan memperbaiki Lembaga Pembilaman Ekspor Indonesia untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak yang dapat mengklaim atau menganggap keuntungan Lembaga Pembilaman Ekspor Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Pembilaman Ekspor Indonesia selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau ketentuan lainnya yang berlaku.

Diketahui Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sesuai dengan perintahnya --

Jakarta, 31 Desember 2021  
Yang Membuat Pernyataan

  
Ariez Bintoro

**Dewan Direktor / Board of Directors**

**Indonesia Eximbank**  
Lembaga Pembilaman Ekspor Indonesia (LPEI)

**Surat Pernyataan**

Possibility Tower, Jl. Jendral Sudirman No. 28  
Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan 12190  
Telp. +62 21 551 0000  
Fax. +62 21 551 0009  
[www.indonesiaeximbank.com](http://www.indonesiaeximbank.com)

Yang bertanda tangan di bawah ini : --

Nama : **Felix Salim**  
Jabatan : **Dewan Direktor Lembaga Pembilaman Ekspor Indonesia**  
Alamat : **-**

Dengan ini menyatakan :

1. Tidak mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan lain yang berpotensi membedakan konflik kepentingan dalam hubudungan sebagai Anggota Dewan Direktor Lembaga Pembilaman Ekspor Indonesia.
2. Tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan ketua dengan Dewan Direktor dan Direktur Pelaksana baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Tidak akan memperbaiki Lembaga Pembilaman Ekspor Indonesia untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak yang dapat mengklaim atau menganggap keuntungan Lembaga Pembilaman Ekspor Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Pembilaman Ekspor Indonesia selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau ketentuan lainnya yang berlaku.

Diketahui Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sesuai dengan perintahnya --

Jakarta, 31 Desember 2021  
Yang Membuat Pernyataan

  
Felix Salim

**Dewan Direktor / Board of Directors**

**Indonesia Eximbank**  
Lembaga Pembilaman Ekspor Indonesia (LPEI)

**Surat Pernyataan**

Possibility Tower, Jl. Jendral Sudirman No. 28  
Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan 12190  
Telp. +62 21 551 0000  
Fax. +62 21 551 0009  
[www.indonesiaeximbank.com](http://www.indonesiaeximbank.com)

Yang bertanda tangan di bawah ini : --

Nama : **Rajen Triwiro**  
Jabatan : **Dewan Direktor Lembaga Pembilaman Ekspor Indonesia**  
Alamat : **-**

Dengan ini menyatakan :

1. Tidak mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan ketua dengan Dewan Direktor dan Direktur Pelaksana baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Tidak akan memperbaiki Lembaga Pembilaman Ekspor Indonesia untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak yang dapat mengklaim atau menganggap keuntungan Lembaga Pembilaman Ekspor Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Pembilaman Ekspor Indonesia selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau ketentuan lainnya yang berlaku.

Diketahui Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sesuai dengan perintahnya --

Jakarta, 31 Desember 2021  
Yang Membuat Pernyataan

  
Rajen Triwiro

## DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA

### Executive Director and Managing Director

<p><b>Indonesia Eximbank</b> Lembaga Pembilangan Ekspor Indonesia (LPEI)</p> <p>Surat Perintasat</p> <p>Yang berlaku tangan di bawah ini :</p> <p>Nama : <input type="checkbox"/> Direktur Pelaksana Jabatan : <input type="checkbox"/> Direktur Pelaksana Lembaga Pembilangan Ekspor Indonesia Alamat : <input type="checkbox"/></p> <p>Berang ini menyatakan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tidak mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan lain yang berkantor pusat di dalam negeri.</li><li>2. Tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Dewan Direktor dan Direktor Pelaksana bank secara langsung maupun tidak langsung.</li><li>3. Tidak akan meminta Lembaga Pembilangan Ekspor Indonesia untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak yang dapat merugikan atau mengancam keuangan Lembaga Pembilangan Ekspor Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.</li><li>4. Tidak mengambil dan/atau meminta keuntungan pribadi dari Lembaga Pembilangan Ekspor Indonesia selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau ketentuan lainnya yang berlaku.</li><li>5. Tidak memanggil dan/atau meminta keuntungan pribadi dari Lembaga Pembilangan Ekspor Indonesia selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau ketentuan lainnya yang berlaku.</li></ol> <p>Diketahui Surat Perintasat ini dibuat dengan setenarnya dan untuk dipergunakan sebagai berikut :</p> <p>Jakarta, 31 Desember 2021 Yang Membuat Perintasat:</p> <p> Agus Widarto</p>	<p><b>Indonesia Eximbank</b> Lembaga Pembilangan Ekspor Indonesia (LPEI)</p> <p>Surat Perintasat</p> <p>Yang berlaku tangan di bawah ini :</p> <p>Nama : <input type="checkbox"/> Mayor Ustik Norhadli Jabatan : <input type="checkbox"/> Direktur Pelaksana Lembaga Pembilangan Ekspor Indonesia Alamat : <input type="checkbox"/></p> <p>Berang ini menyatakan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tidak mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan lain yang berkantor pusat di dalam negeri.</li><li>2. Tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Dewan Direktor dan Direktor Pelaksana bank secara langsung maupun tidak langsung.</li><li>3. Tidak akan meminta Lembaga Pembilangan Ekspor Indonesia untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak yang dapat merugikan atau mengancam keuangan Lembaga Pembilangan Ekspor Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.</li><li>4. Tidak mengambil dan/atau meminta keuntungan pribadi dari Lembaga Pembilangan Ekspor Indonesia selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau ketentuan lainnya yang berlaku.</li><li>5. Tidak memanggil dan/atau meminta keuntungan pribadi dari Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan dan/atau lembaga lain.</li></ol> <p>Diketahui Surat Perintasat ini dibuat dengan setenarnya dan untuk dipergunakan sebagai berikut :</p> <p>Jakarta, 31 Desember 2021 Yang Membuat Perintasat:</p> <p> Major Ustik Norhadli</p>
<p><b>Indonesia Eximbank</b> Lembaga Pembilangan Ekspor Indonesia (LPEI)</p> <p>Surat Perintasat</p> <p>Yang berlaku tangan di bawah ini :</p> <p>Nama : <input type="checkbox"/> Agus Widarto Jabatan : <input type="checkbox"/> Direktur Pelaksana Lembaga Pembilangan Ekspor Indonesia Alamat : <input type="checkbox"/></p> <p>Berang ini menyatakan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tidak mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan lain yang berkantor pusat di dalam negeri.</li><li>2. Tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Dewan Direktor dan Direktor Pelaksana bank secara langsung maupun tidak langsung.</li><li>3. Tidak akan meminta Lembaga Pembilangan Ekspor Indonesia untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak yang dapat merugikan atau mengancam keuangan Lembaga Pembilangan Ekspor Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.</li><li>4. Tidak mengambil dan/atau meminta keuntungan pribadi dari Lembaga Pembilangan Ekspor Indonesia selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau ketentuan lainnya yang berlaku.</li><li>5. Tidak memanggil dan/atau meminta keuntungan pribadi dari Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan dan/atau lembaga lain.</li></ol> <p>Diketahui Surat Perintasat ini dibuat dengan setenarnya dan untuk dipergunakan sebagai berikut :</p> <p>Jakarta, 31 Desember 2021 Yang Membuat Perintasat:</p> <p> Agus Widarto</p>	<p><b>Indonesia Eximbank</b> Lembaga Pembilangan Ekspor Indonesia (LPEI)</p> <p>Surat Perintasat</p> <p>Yang berlaku tangan di bawah ini :</p> <p>Nama : <input type="checkbox"/> Henry Situmorang Jabatan : <input type="checkbox"/> Direktur Pelaksana Lembaga Pembilangan Ekspor Indonesia Alamat : <input type="checkbox"/></p> <p>Berang ini menyatakan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tidak mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan lain yang berkantor pusat di dalam negeri.</li><li>2. Tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Dewan Direktor dan Direktor Pelaksana bank secara langsung maupun tidak langsung.</li><li>3. Tidak akan meminta Lembaga Pembilangan Ekspor Indonesia untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak yang dapat merugikan atau mengancam keuangan Lembaga Pembilangan Ekspor Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.</li><li>4. Tidak mengambil dan/atau meminta keuntungan pribadi dari Lembaga Pembilangan Ekspor Indonesia selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau ketentuan lainnya yang berlaku.</li><li>5. Tidak memanggil dan/atau meminta keuntungan pribadi dari Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan dan/atau lembaga lain.</li></ol> <p>Diketahui Surat Perintasat ini dibuat dengan setenarnya dan untuk dipergunakan sebagai berikut :</p> <p>Jakarta, 31 Desember 2021 Yang Membuat Perintasat:</p> <p> Henry Situmorang</p>

## DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA

### Executive Director and Managing Director

 <b>Indonesia Eximbank</b> Lembaga Pembangunan Ekspor Indonesia (LPEI)	Pemohon: Chrissa Fenny Anevar Nomor: 6.2019.LPEI.29 Alamat: Jl. Mampang Prapatan No. 12, RT. 01/RW. 01 Telp: +62 21 594 6966 Fax: +62 21 594 6966 chrissa.fenny@eximbank.co.id
<b>Surat Pernyataan</b>	
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini :</p> <p>Nama : Chrissa Fenny Anevar          jabatan : Direktur Pelaksana          Lemba...          Alamat : ...</p> <p>Bengak ini menyatakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak mempunyai kepentingan pribadi pada perusahaan lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.</li> <li>2. Tidak mempunyai hubungan kesanggupan dan hubungan istrianya dengan Dewan Direksi dan Direktor Pelaksana baik secara langsung maupun tidak langsung.</li> <li>3. Tidak atau memandaskan Lembaga Pembangunan Ekspor Indonesia untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak yang dapat memberikan atau mengungkap informasi Lembaga Pembangunan Ekspor Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.</li> <li>4. Tidak mengandalkan jawatan sebagai anggota Dewan Komisi, Direksi atau Pejabat Efektif pada perusahaan lain/lalu meninggalkan.</li> <li>5. Tidak mengikuti jabatan sebagai anggota Dewan Komisi, Direksi atau Pejabat Efektif pada perusahaan lain/lalu meninggalkan.</li> </ol> <p>Jemukan Surat Pernyataan ini dibuat dengan telitiannya dan untuk dipergunakan sebagai alat bukti.</p> <p>Jakarta, 01 Desember 2021          Yang Membuat Pernyataan</p> <p>          Chrissa Fenny Anevar</p>	



# RAPAT DEWAN DIREKTUR, DAN RAPAT DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

Board of Directors Meetings, and Executive Director & Managing Director Meetings

Frekuensi rapat Dewan Direktur LPEI diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/PMK.010/2009. Rapat Dewan Direktur wajib dilaksanakan secara berkala paling kurang 1(satu) kali dalam sebulan dan rapat wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Direktur secara fisik paling kurang 4(empat) kali dalam setahun. Rapat Dewan Direktur dipimpin oleh Ketua Dewan Direktur.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Direktur dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, maka keputusan dapat diambil dengan pemungutan suara terbanyak. Segala keputusan Dewan Direktur bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Direktur.

Demi menjaga tertib administrasi dan dokumentasi yang baik, semua hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat, termasuk jika terjadi perbedaan pendapat beserta alasannya.

The frequency of Indonesia Eximbank's Board of Directors' meeting is stipulated in the Minister of Finance Regulation No. 141/PMK.010/2009 Article 11. The Board of Directors' meeting shall be carried out periodically at least once a month and shall be physically attended by all members of the Board of Directors at least 4(four) times in a year. Chairman of the Board of Directors leads the Meeting.

Decision making in the Board of Directors' meeting is carried out based on deliberation and consensus. If an agreement is not achieved, the decision can be taken through voting. All decisions of the Board of Directors are binding for all members of the Board of Directors.

To maintain orderly administration and good documentation, all meeting resolutions then shall be recorded in the meeting minutes, including dissenting opinions with its reasons.



# RAPAT DEWAN DIREKTUR

## Board of Directors Meetings

### Rapat Dewan Direktur (Fungsi Komisaris)

Rapat Dewan Direktur dipimpin oleh Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif dan selalu melibatkan Anggota Dewan Direktur lainnya. Selain itu juga dilakukan rapat gabungan antara Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana.

Per 31 Desember 2021 Dewan Direktur telah mengadakan 33 kali rapat dengan agenda, frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Frequency	Jumlah Total	Persentase Percentage
D. James Rompas	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of the Board of Directors and Executive Director	33	33	100%
Suminto	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	33	29	88%
Kasan	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	33	31	94%
Arus Gunawan	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	33	30	91%
Felia Salim	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	33	33	100%
Rijani Tirtoso	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	33	33	100%

**Tabel Rapat dan Agenda Rapat Dewan Komisaris**  
Board of Commissioners Meetings and the Agenda

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participants
1	8-Jan-21	1. Pemaparan Strategi Komunikasi LPEI 2. Ratifikasi Rapat Dewan Direktur 3. Laporan Kinerja Keuangan per 31 Desember 2020 (unaudited) 4. Keputusan Pembentukan SPV  1. Presentation of Indonesia Eximbank Communication Strategy 2. Ratification of the Board of Directors Meeting 3. Financial Performance Report as of 31 December 2020 (unaudited) 4. SPV Establishment Decision	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim 6. Rijani Tirtoso
2	22-Jan-21	Rapat Terbatas Dewan Direktur  Board of Directors Limited Meeting	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim 6. Rijani Tirtoso

**RAPAT DEWAN DIREKTUR**  
Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participants
3	22-Jan-21	1. Ratifikasi Risalah RDD 8 Januari 2021 2. Laporan Komite Program Penugasan Khusus  1. Ratification of Minutes of RDD January 8, 2021 2. Special Assignment Program Committee Report	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim 6. Rijani Tirtoso
4	5-Feb-21	1. Pemaparan Sustainable Economy and Finance 2. Ratifikasi RDD 3. Lap. Progress Audit Lap Keu 20 & Profil Kinerja Keuangan 4. Lap. Kesiapan LPEI Pelaksanaan Penugasan dalam rangka PEN catatan Pengawasan SKAI 5. Pengajuan agenda KRN  1. Presentation on Sustainable Economy and Finance 2. Ratification of RDD 3. Report on the Progress of Financial Report 20 Audit & Financial Performance Profile 4. Report on LPEI's Readiness to Implement Assignments in the context of PEN SKAI supervision records 5. Submission of the KRN agenda	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim 6. Rijani Tirtoso
5	12-Feb-21	Rapat Terbatas Dewan Direktur (RDD Terbatas membahas: agenda PT RII dan Agenda KRN)  Limited Meeting of the Board of Directors (Limited RDD discussing: PT RII agenda and KRN agenda)	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim 6. Rijani Tirtoso
6	16-Feb-21	Rapat Terbatas Dewan Direktur Board of Directors Limited Meeting	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim 6. Rijani Tirtoso
7	19-Feb-21	1. Ratifikasi Rapat Dewan Direktur tanggal 5 dan 12 Februari 2021 2. Laporan Komite-Komite Dewan Direktur: a. Komite Audit b. Komite Pemantau Risiko 3. Laporan Progres Penyelesaian Daftar Monitoring Tindak Lanjut (DMTL) 4. Laporan Kepatuhan Semester II tahun 2020  1. Ratification of the Board of Directors Meeting on 5 and 12 February 2021 2. Reports of the Committees of the Board of Directors: a. Audit Committee b. Risk Monitoring Committee 3. Progress Report on Completion of Follow Up Monitoring List (DMTL) 4. Compliance Report Semester II of 2020	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim 6. Rijani Tirtoso
8	1-Mar-21	Rapat Terbatas Dewan Direktur Board of Directors Limited Meeting	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim 6. Rijani Tirtoso
9	5-Mar-21	1. Incident Report IT 2. Penyampaian Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020	1. D. James Rompas 2. Suminto

**RAPAT DEWAN DIREKTUR**  
Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participants
		3. Ratifikasi Rapat Dewan Direktur 19 dan 22 Februari 2021 4. Agenda Lain-lain 1. IT Incident Report 2. Submission of 2020 Sharia Supervisory Board Supervision Results 3. Ratification of the Board of Directors Meeting 19 and 22 February 2021 4. Other Agenda	3. Kasan 4. Felia Salim 5. Rijani Tirtoso
10	10-Mar-21	Rapat Terbatas Dewan Direktur Board of Directors Limited Meeting	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim 6. Rijani Tirtoso
11	19-Mar-21	1. Hasil Audit Laporan Keuangan Tahun 2020 2. Persiapan Panja DPR RI: Tambahan PMN Kepada LPEI Tahun 2021 3. Daftar Monitoring dan Tindak Lanjut Temuan Audit 4. <i>Financial Highlights</i> Februari 2021 5. Ratifikasi Rapat Dewan Direktur (RDD) 5 Maret 2021  1. Financial Report Audit Results for 2020 2. Preparation of the Indonesian House of Representatives Committee: Additional PMN to LPEI in 2021 3. List of Monitoring and Follow Up on Audit Findings 4. Financial Highlights February 2021 5. Ratification of the Board of Directors Meeting (RDD) March 5, 2021	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim 6. Rijani Tirtoso
12	19-Mar-21	Rapat Terbatas Dewan Direktur Board of Directors Limited Meeting	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim 6. Rijani Tirtoso
13	12-Apr-21	1. Hasil Final Audit Lap. Keu th.2020 - KAP RSM 2. Ratifikasi Rapat DD 3. Kinerja Keuangan Maret 2021 4. Lain-lain: a. Laporan Progress Penyampaian Usulan dalam Rancangan <i>Omnibus Law</i> Sektor Keuangan - DP3  1. Year 2020 Financial Report Final Audit Result - KAP RSM 2. Ratification of DD Meeting 3. Financial Performance March 2021 4. Others: a. Progress Report on Submission of Proposals in the Draft Omnibus Law for the Financial Sector - DP3	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim 6. Rijani Tirtoso
14	12-Apr-21	Rapat Terbatas Dewan Direktur Board of Directors Limited Meeting	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim 6. Rijani Tirtoso
15	23-Apr-21	1. Ratifikasi RDD 2. Laporan Keuangan Audited 2020 dan TW I 2021 3. Pencapaian IKU 2021	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan

**RAPAT DEWAN DIREKTUR**  
Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participants
		4. Fitch Rating LPEI 5. Pemaparan Daftar Monitoring & Tindak Lanjut Audit Eksternal 6. Agenda lainnya: a. Persetujuan Penyewaan Ruang Kantor b. Laporan Progres Penguatan Sistem IT c. Laporan Kejagung  1. Ratification of RDD 2. Audited Financial Report 2020 and Q1 2021 3. Achievement of KPI 2021 4. Indonesia Eximbank Fitch Rating 5. Presentation of External Audit Monitoring & Follow-up List 6. Other agendas: a. Office Space Rental Approval b. IT System Strengthening Progress Report c. Attorney General's Report	4. Arus Gunawan 5. Felia Salim 6. Rijani Tirtoso
16	7-Mei-21 7-May-21	1. Ratifikasi Rapat Dewan Direktur 23 April 2021 2. Management Letter Laporan Keuangan Audited 2020 3. Laporan Komite Pemantau Risiko Triwulan I 2021 4. Laporan Hasil Employee Engagement Survey 5. Lain-lain a. Perubahan Susunan Anggota Komite Program Penugasan Khusus b. Laporan Progres Kejaksaan Agung  1. Ratification of the Board of Directors Meeting 23 April 2021 2. Management Letter Audited Financial Report 2020 3. Report of the Risk Monitoring Committee Quarter I 2021 4. Employee Engagement Survey Results Report 5. Others a. Changes in the Composition of Special Assignment Program Committee Members b. Attorney General's Progress Report	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim 6. Rijani Tirtoso
17	28-Mei-21 28-May-21	1. Ratifikasi Rapat Dewan Direktur 7 Mei 2021 2. Laporan Komite Audit Triwulan I 2021 3. Laporan Kinerja Keuangan 4. Laporan Daftar Monitoring Tindak Lanjut Audit 5. Agenda Lain-lain  1. Ratification of the Board of Directors Meeting 7 May 2021 2. Report of the Audit Committee Quarter I 2021 3. Financial Performance Report 4. Audit Follow-up Monitoring List Report 5. Other Agenda	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim 6. Rijani Tirtoso
18	9-Jun-21	1. Ratifikasi Rapat Dewan Direktur 28 Mei 2021 2. Laporan Kinerja Keuangan Mei 2021 3. Agenda Lain-lain  1. Ratification of Board of Directors Meeting 28 May 2021 2. Financial Performance Report May 2021 3. Other Agenda	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan 4. Felia Salim 5. Rijani Tirtoso
19	25-Jun-21	1. Rancangan Annual Report LPEI Tahun 2020 2. Ratifikasi RDD 9 Juni 2021 3. Pemaparan Konsep Rumah Ekspor dan Desa Devisa	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan

**RAPAT DEWAN DIREKTUR**  
Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participants
		4. Laporan Daftar Monitoring dan Tindak Lanjut Audit 1. Draft LPEI Annual Report 2020 2. Ratification of RDD 9 June 2021 3. Presentation of the Concept of Export House and Foreign Exchange Village 4. Monitoring List Report and Audit Follow-up	4. Felia Salim 5. Rijani Tirtoso
20	14-Jul-21	1. Ratifikasi RDD 25 Juni 2021 2. Laporan Keuangan Semester I 2021 3. Usulan Perubahan PDD Kebijakan Pembiayaan – Penghapusbukuan Piutang LPEI  1. Ratification of RDD 25 June 2021 2. Financial Report Semester I 2021 3. Proposal for Amendment to PDD Financing Policy – Write-off of LPEI Receivables	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim 6. Rijani Tirtoso
21	23-Jul-21	Pembahasan Usulan Penyesuaian PDD Kebijakan Pembiayaan – Bagian Hapus Buku  Discussion on the Proposal for Adjusting the PDD Financing Policy – Delete Book Section	1. D. James Rompas 2. Arus Gunawan 3. Felia Salim 4. Rijani Tirtoso
22	30-Jul-21	1. Ratifikasi RDD 14 dan 13 Juli 2021 2. Laporan Pencapaian Project Management Initiatives Semester I 2021 – HoCH 3. Laporan Head of Finance & Strategic Planning: a. Laporan Pencapaian IKU Semester I 2021 b. Permohonan Persetujuan dan Pengesahan Laporan Pengawasan Dewan Direktur atas Rencana Bisnis dan RKAT Semester I 2021 4. Permohonan Persetujuan dan Pengesahan Perubahan PDD Kebijakan Pembiayaan – Penghapusbukuan Piutang LPEI – DP5 5. Laporan Hasil Evaluasi KAP Tahun 2020 6. Laporan Daftar Monitoring Tindak Lanjut Audit – SKAI 7. Agenda lain lain: a. Laporan Kepatuhan Semester I 2021 – HoCH b. Informasi Permohonan Usulan Penghapusbukuan Piutang – DP3 c. Agenda terbatas  1. Ratification of RDD 14 and 13 July 2021 2. Report on the Achievement of Project Management Initiatives Semester I 2021 – HOCH 3. Head of Finance & Strategic Planning Report: a. First Semester KPI Achievement Report 2021 b. Application for Approval and Ratification of the Supervisory Report of the Board of Directors on the Business Plan and RKAT Semester I 2021 4. Application for Approval and Ratification of Changes in PDD Financing Policy – LPEI Receivable Write-off – DP5 5. KAP Evaluation Results Report 2020 6. Audit Follow-up Monitoring List Report – SKAI 7. Other agendas: a. Compliance Report Semester I 2021 – HoCH b. Information on Proposal for Write-Off of Receivables – DP3 c. Limited agenda	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim 6. Rijani Tirtoso

**RAPAT DEWAN DIREKTUR**  
Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participants
23	9-Agt-21 9-Aug-21	Pembahasan Kinerja Keuangan LPEI dan Rapat Terbatas LPEI Financial Performance Discussion and Limited Meeting	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim 6. Rijani Tirtoso
24	20-Agt-21 20-Aug-21	1. Persetujuan Penyetoran PNBP Surplus LPEI Tahun Buku 2020 – Surat DJKN S-169/KN.3/2021 2. Ratifikasi RDD 30 Juli 2021 dan 9 Agustus 2021 3. Pemaparan Pembiayaan Segmen UKM  1. Approval for Deposit of LPEI Surplus PNBP for Fiscal Year 2020 – DJKN Letter S-169/KN.3/2021 2. Ratification of RDD 30 July 2021 and 9 August 2021 3. Presentation of SME Segment Financing	1. D. James Rompas 2. Kasan (Piminan rapat) 3. Arus Gunawan 4. Felia Salim 5. Rijani Tirtoso
25	6-Sep-21	1. Ratifikasi Rapat Dewan Direktur tanggal 20 Agustus 2021 2. Laporan Pemindahan <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC)LPEI 3. Kinerja Keuangan per 31 Agustus 2021 4. Arahan Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara 5. Pemaparan Asumsi RKAT 2022 6. Laporan Komite Triwulan II 2021: Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko  1. Ratification of the Board of Directors Meeting on 20 August 2021 2. LPEI Disaster Recovery Center (DRC) Transfer Report 3. Financial Performance as of 31 August 2021 4. Directions from the Minister of Finance and the Director General of State Assets 5. Presentation of the 2022 RKAT Assumptions 6. Committee Report Quarter II 2021: Audit Committee and Risk Monitoring Committee	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim 6. Rijani Tirtoso 7. Direktur Pelaksana 8. Group Head
26	24-Sep	1. Ratifikasi Rapat Dewan Direktur tanggal 6 September 2021 2. Penyertaan Modal SPV 3. Pemaparan Struktur Permodalan LPEI 4. Laporan Daftar <i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Audit 5. Lain-lain: Jadwal FGD Penyusunan RKAT 2022  1. Ratification of the Board of Directors Meeting on 6 September 2021 2. SPV Equity Participation 3. Explanation of LPEI Capital Structure 4. Audit Follow-up Monitoring List Report 5. Others: FGD schedule for the preparation of the 2022 RKAT	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim 6. Rijani Tirtoso 7. Direktur Pelaksana 8. Group Head
27	6-Okt-21 6-Oct-21	1. Persetujuan Penghapusbukuan Aktiva Tetap LPEI 2. Kinerja Keuangan per 30 September 2021 3. Agenda <i>Strategic Discussion</i> dan Asumsi RKAT 2022  1. Approval of LPEI Write-Off Fixed Assets 2. Financial Performance as of September 30, 2021 3. Agenda for Strategic Discussion and Assumptions of the 2022 RKAT	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim 6. Rijani Tirtoso 7. Direktur Pelaksana 8. Group Head
28	25-Okt-21 25-Oct-21	1. Ratifikasi RDD 24 September dan 6 Oktober 2021 2. Permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan LPEI 2022 3. Permohonan Persetujuan Penghapusbukuan Aktiva Tetap	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim

## RAPAT DEWAN DIREKTUR

Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participants
		<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Permohonan Persetujuan Penghapusbukan Piutang dengan Kewenangan Dewan Direktur</li> <li>5. Agenda lain-lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Update Progress Perumusan RPMK Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI</li> <li>b. Informasi terkait Penerapan <i>Environment, Social and Governance</i> (ESG) dan Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)</li> <li>c. Laporan Progress Special Purpose Vehicle(SPV)</li> </ul> </li> <li>1. Ratification of RDD 24 September and 6 October 2021</li> <li>2. Application for Approval of LPEI 2022 Annual Work Plan and Budget</li> <li>3. Application for Approval for Write-off of Fixed Assets</li> <li>4. Application for Approval of Write-Off of Accounts Receivable with the Authority of the Board of Directors</li> <li>5. Other agendas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Update on the Progress of the Formulation of the RPMK of Governance Principles, Risk Management Principles and LPEI's Know Your Customer Principles</li> <li>b. Information related to the Implementation of Environment, Social and Governance (ESG) and the Preparation of the Sustainable Finance Action Plan (RAKB)</li> <li>c. Special Purpose Vehicle (SPV) Progress Report</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Rijani Tirtoso</li> <li>7. Direktur Pelaksana</li> <li>8. Group Head</li> </ul>
29	25-Okt-21 25-Oct-21	Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Membership of the Risk Monitoring Committee	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. D. James Rompas</li> <li>2. Suminto</li> <li>3. Kasan</li> <li>4. Arus Gunawan</li> <li>5. Felia Salim</li> <li>6. Rijani Tirtoso</li> </ul>
30	8-Nov-21	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ratifikasi Rapat Dewan Direktur 25 Oktober 2021</li> <li>2. Pemaparan PMK 144/PMK.06/2021 tentang Penghapusbukan dan Penghapustagihan Piutang LPEI dan Usulan Rancangan PDD Kebijakan Pembiayaan</li> <li>3. Permohonan Persetujuan Kinerja Keuangan per 31 Oktober 2021</li> <li>4. Laporan Project Management Initiatives (PMI)</li> <li>1. Ratification of the Board of Directors Meeting 25 October 2021</li> <li>2. Exposure of PMK 144/PMK.06/2021 concerning Write-off and Collection of LPEI Receivables and Proposed PDD Draft Financing Policy</li> <li>3. Application for Financial Performance Approval as of 31 October 2021</li> <li>4. Project Management Initiatives (PMI) Report</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. D. James Rompas</li> <li>2. Suminto</li> <li>3. Kasan</li> <li>4. Arus Gunawan</li> <li>5. Felia Salim</li> <li>6. Rijani Tirtoso</li> <li>7. Direktur Pelaksana</li> <li>8. Group Head</li> </ul>
31	29-Nov-21	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ratifikasi RDD 8 November 2021</li> <li>2. Pemaparan Progress Perbaikan Administrasi Kredit</li> <li>3. Persetujuan Dewan Direktur atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyempurnaan RPDD Kebijakan Pembiayaan (Penghapusbukan dan Penghapustagihan Piutang Macet)</li> <li>b. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan(RAKB) LPEI Tahun 2022</li> <li>c. Rancangan PDD Satuan Pengendalian Internal</li> </ul> </li> <li>4. Tindak Lanjut Exit Meeting OJK</li> <li>1. Ratification of RDD November 8, 2021</li> <li>2. Presentation of Credit Administration Improvement Progress</li> <li>3. Board of Directors approval of: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Completion of the RPDD Financing Policy (Writing Off and Write-off of Bad Receivables)</li> <li>b. LPEI Sustainable Finance Action Plan (RAKB) 2022</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. D. James Rompas</li> <li>2. Suminto</li> <li>3. Arus Gunawan</li> <li>4. Felia Salim</li> <li>5. Rijani Tirtoso</li> <li>6. Direktur Pelaksana</li> <li>7. Group Head</li> </ul>

**RAPAT DEWAN DIREKTUR**  
Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participants
		c. Internal Control Unit PDD Design 4. Follow-up to OJK Exit Meeting	
32	10-Des-21 10-Dec-21	1. Kinerja Keuangan per 30 November 2021 2. Pengajuan Persetujuan Usulan AD/ART SPV 3. Update Progres Verifikasi Internal Audit dalam rangka Hapus Buku dan Pemeriksaan BPK  1. Financial Performance as of 30 November 2021 2. Submission of Approval of Proposed AD/ART SPV 3. Update the Progress of Internal Audit Verification in order to write-off and BPK audit	1. D. James Rompas 2. Kasan 3. Arus Gunawan 4. Felia Salim 5. Rijani Tirtoso 6. Direktur Pelaksana 7. Group Head
33	28-Des-21 28-Dec-21	1. Ratifikasi RDD 10 Desember 2021 2. Persetujuan atas Usulan Hapus Buku yang Diajukan Dalam RKAT LPEI 2022 3. Materi Rapat Pengesahan RKAT LPEI 2022 4. Agenda Lain-lain: a. Summary PMK 183/PMK.08/2021 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI b. Rencana Launching PT IEB Prima Aset  1. Ratification of RDD 10 December 2021 2. Approval of the Proposed Delete Books in the LPEI 2022 RKAT 3. Materials for the LPEI 2022 RKAT Ratification Meeting 4. Other Agenda: a. Summary of PMK 183/PMK.08/2021 concerning Special Assignments to LPEI b. Plan to Launch PT IEB Prima Asset	1. D. James Rompas 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim 6. Rijani Tirtoso 7. Direktur Pelaksana 8. Group Head

**Rapat Board of Management**

Direktur Eksekutif dibantu oleh Direktur Pelaksana bertugas melakukan operasional LPEI. Koordinasi dilakukan secara intens dan sistematis. Rapat-rapat rutin yang dilaksanakan adalah rapat Direksi satu kali dalam satu minggu, rapat ALCO satu kali dalam satu bulan, rapat bulanan kinerja satu kali dalam satu bulan. Selain itu, Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur melaksanakan rapat koordinasi lainnya untuk memastikan operasional LPEI berjalan dengan baik.

Selama tahun 2021 telah dilakukan Rapat antara Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana sebanyak 53 kali. Dengan agenda sebagai berikut:

**Board of Management Meetings**

The Executive Director assisted by the Managing Director is in charge of conducting the Company operations with intense and systematic coordination. Routine meetings that are held are Board of Directors meetings once a week, ALCO meetings once a month, and monthly performance meetings. In addition, the Executive Director and the Board of Directors hold other coordination meetings to ensure operations are performed well.

During 2021, 53 meetings were held between the Executive Director and the Managing Director, with the following agenda:

**RAPAT DEWAN DIREKTUR**  
Board of Directors Meetings

No	No Risalah Minutes No	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
1	MR.0001/ OTB/01/2021	06 Jan 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ratifikasi Risalah Rapat <i>Board of Management</i></li> <li>2. Laporan Posisi Keuangan Desember 2020 (<i>Unaudited</i>)</li> <li>3. Agenda Lain-Lain</li>   <li>1. Board of Management Meeting Minutes Ratification</li> <li>2. Financial Position Report December 2020 (<i>Unaudited</i>)</li> <li>3. Other Agenda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Daniel James Rompas</li> <li>2. Djoko Retnadi</li> <li>3. Agus Windarto</li> <li>4. Henry Slihotang</li> <li>5. Chesna F Anwar</li> <li>6. Salomi Adriana</li> <li>7. Anwar Harsono</li> <li>8. Wahyu Wibowo</li> <li>9. Titiek Setyowati</li> <li>10. Agung Waluyo</li> </ul>
2	MR.0002/ OTB/01/2021	11 Jan 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ratifikasi Risalah Rapat <i>Board of Management</i></li> <li>2. Update PDO Posisi 08 Januari 2021</li> <li>3. Timeline Hapus Buku 2021</li> <li>4. Agenda Lain-Lain</li>   <li>1. Board of Management Meeting Minutes Ratification</li> <li>2. Update PDO Position 08 January 2021</li> <li>3. Timeline for 2021 Write-Off</li> <li>4. Other Agenda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Daniel James Rompas</li> <li>2. Dikdik Yustandi</li> <li>3. Djoko Retnadi</li> <li>4. Agus Windarto</li> <li>5. Henry Slihotang</li> <li>6. Chesna F Anwar</li> <li>7. Salomi Adriana</li> <li>8. Anwar Harsono</li> <li>9. Wahyu Wibowo</li> <li>10. Titiek Setyowati</li> <li>11. Agung Waluyo</li> </ul>
3	MR.0003/ OTB/01/2021	19 Jan 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ratifikasi Risalah Rapat <i>Board of Management</i></li> <li>2. Update PDO posisi 15 Januari 2021</li> <li>3. Rancangan Project Management Initiative (PMI) 2021</li> <li>4. Strategi Komunikasi 2021</li> <li>5. Realisasi Audit dan Investigasi Tahun 2020 dan Rencana Audit dan Investigasi Tahun 2021</li> <li>6. Laporan Hasil Survey Employee Engagement</li> <li>7. Agenda Lain-Lain.</li>   <li>1. Board of Management Meeting Minutes Ratification</li> <li>2. Update PDO position 15 January 2021</li> <li>3. Draft Project Management Initiative (PMI) 2021</li> <li>4. Communication Strategy 2021</li> <li>5. Realization of Audit and Investigation in 2020 and Plan of Audit and Investigation in 2021</li> <li>6. Employee Engagement Survey Results Report</li> <li>7. Other Agenda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Daniel James Rompas</li> <li>2. Dikdik Yustandi</li> <li>3. Djoko Retnadi</li> <li>4. Agus Windarto</li> <li>5. Henry Slihotang</li> <li>6. Chesna F Anwar</li> <li>7. Salomi Adriana</li> <li>8. Anwar Harsono</li> <li>9. Wahyu Wibowo</li> <li>10. Titiek Setyowati</li> <li>11. Agung Waluyo</li> </ul>
4	MR.0004/ OTB/01/2021	25 Jan 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Arahan Menteri Keuangan atas Rapimtas tanggal 21 Januari 2021</li> <li>2. Update PDO posisi 22 Januari 2021</li> <li>3. Ratifikasi Risalah Rapat <i>Board of Management</i></li> <li>4. Benchmarking Penerapan GCG pada Exim Banks</li> <li>5. Agenda Lain-Lain.</li>   <li>1. Direction of the Minister of Finance on Rapimtas dated January 21, 2021</li> <li>2. Update PDO position 22 January 2021</li> <li>3. Board of Management Minutes of Meeting Ratification</li> <li>4. Benchmarking of GCG Implementation on Exim Banks</li> <li>5. Other Agenda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Daniel James Rompas</li> <li>2. Dikdik Yustandi</li> <li>3. Djoko Retnadi</li> <li>4. Agus Windarto</li> <li>5. Henry Slihotang</li> <li>6. Chesna F Anwar</li> <li>7. Salomi Adriana</li> <li>8. Anwar Harsono</li> <li>9. Wahyu Wibowo</li> <li>10. Titiek Setyowati</li> <li>11. Agung Waluyo</li> </ul>

**RAPAT DEWAN DIREKTUR**  
Board of Directors Meetings

No	No Risalah Minutes No	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
5	MR.0005/ OTB/02/2021	02 Feb 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan dan Proyeksi Makro Ekonomi</li> <li>2. Ratifikasi Risalah Rapat <i>Board of Management</i></li> <li>3. <i>Financial Highlight</i> posisi 31 Januari 2021 (<i>Unaudited</i>)</li> <li>4. <i>Strategy Business Penjaminan Pemerintah PEN</i></li> <li>5. Pembentukan Rumah Ekspor (RumOr)</li> <li>6. Agenda Lain-Lain.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Macroeconomic Developments and Projections</li> <li>2. Board of Management Minutes of Meeting Ratification</li> <li>3. Financial Highlight position 31 January 2021 (<i>Unaudited</i>)</li> <li>4. Government Guarantee Business Strategy PEN</li> <li>5. Establishment of Export Houses (RumOr)</li> <li>6. Other Agenda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Daniel James Rompas</li> <li>2. Dikdik Yustandi</li> <li>3. Djoko Retnadi</li> <li>4. Agus Windiarto</li> <li>5. Henry Slihotang</li> <li>6. Chesna F Anwar</li> <li>7. Salomi Adriana</li> <li>8. Anwar Harsono</li> <li>9. Wahyu Wibowo</li> <li>10. Titiek Setyowati</li> <li>11. Agung Waluyo</li> </ul>
6	MR.0006/ OTB/02/2021	08 Feb 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ratifikasi Risalah Rapat <i>Board of Management</i></li> <li>2. Laporan Progress MIS Project</li> <li>3. Progress Audit Laporan Keuangan 2020</li> <li>4. PDO Update per posisi 05 Februari 2021</li> <li>5. Agenda Lain-Lain.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Board of Management Minutes of Meeting Ratification</li> <li>2. MIS Project Progress Report</li> <li>3. Progress of 2020 Financial Report Audit</li> <li>4. PDO Update per position 05 February 2021</li> <li>5. Other Agenda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Daniel James Rompas</li> <li>2. Dikdik Yustandi</li> <li>3. Djoko Retnadi</li> <li>4. Agus Windiarto</li> <li>5. Henry Slihotang</li> <li>6. Chesna F Anwar</li> <li>7. Salomi Adriana</li> <li>8. Anwar Harsono</li> <li>9. Wahyu Wibowo</li> <li>10. Titiek Setyowati</li> <li>11. Agung Waluyo</li> </ul>
7	MR.0007/ OTB/02/2021	15 Feb 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. PDO Update per Posisi 11 Februari 2021</li> <li>2. Ratifikasi Risalah Rapat <i>Board of Management</i></li> <li>3. IEB Green Office Frame Work</li> <li>4. Agenda Lain-Lain.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. PDO Update as of February 11, 2021</li> <li>2. Board of Management Ratification</li> <li>3. IEB Green Office Framework Minutes of Meeting</li> <li>4. Other Agenda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Daniel James Rompas</li> <li>2. Dikdik Yustandi</li> <li>3. Djoko Retnadi</li> <li>4. Agus Windiarto</li> <li>5. Henry Slihotang</li> <li>6. Chesna F Anwar</li> <li>7. Salomi Adriana</li> <li>8. Anwar Harsono</li> <li>9. Wahyu Wibowo</li> <li>10. Titiek Setyowati</li> <li>11. Agung Waluyo</li> </ul>
8	MR.0008/ OTB/02/2021	23 Feb 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ratifikasi Risalah Rapat <i>Board of Management</i></li> <li>2. PDO Update per Posisi 19 Februari 2021</li> <li>3. <i>Calender of Event</i> dan Usulan Protokol <i>Joint Committee Meeting</i></li> <li>4. Pembentukan <i>Task Force</i> untuk Penyusunan Kajian <i>Omnibus Law</i> Penguatan Sektor Keuangan</li> <li>5. Agenda Lain-Lain.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Board of Management Minutes of Meeting Ratification</li> <li>2. PDO Update per Position 19 February 2021</li> <li>3. Calendar of Events and Proposed Joint Committee Meeting Protocol</li> <li>4. Establishment of a Task Force for the Preparation of an Omnibus Law Study on Financial Sector Strengthening</li> <li>5. Other Agenda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Daniel James Rompas</li> <li>2. Dikdik Yustandi</li> <li>3. Djoko Retnadi</li> <li>4. Agus Windiarto</li> <li>5. Henry Slihotang</li> <li>6. Chesna F Anwar</li> <li>7. Salomi Adriana</li> <li>8. Anwar Harsono</li> <li>9. Wahyu Wibowo</li> <li>10. Titiek Setyowati</li> <li>11. Agung Waluyo</li> </ul>

**RAPAT DEWAN DIREKTUR**  
Board of Directors Meetings

No	No Risalah Minutes No	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
9	MR.0009/ OTB/03/2021	01 Mar 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ratifikasi Risalah Rapat Board of Management</li> <li>2. Review Pengelolaan Kearsipan LPEI</li> <li>3. Integrated IKU 2021</li> <li>4. Incident Report IT</li> <li>5. Presentasi Direktorat II;</li> <li>6. Agenda Lain-Lain.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Board of Management Minutes of Meeting Ratification</li> <li>2. LPEI Archive Management Review</li> <li>3. Integrated KPI 2021</li> <li>4. IT Incident Report</li> <li>5. Presentation of Directorate II;</li> <li>6. Other Agenda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Daniel James Rompas</li> <li>2. Dikdik Yustandi</li> <li>3. Djoko Retnadi</li> <li>4. Agus Windarto</li> <li>5. Henry Slihotang</li> <li>6. Chesna F Anwar</li> <li>7. Salomi Adriana</li> <li>8. Anwar Harsono</li> <li>9. Wahyu Wibowo</li> <li>10. Titiek Setyowati</li> <li>11. Agung Waluyo</li> </ul>
10	MR.0010/ OTB/03/2021	08 Mar 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan dan Proyeksi Makroekonomi</li> <li>2. Ratifikasi Risalah Rapat Board of Management</li> <li>3. Annual Report LPEI 2020</li> <li>4. Incident Report IT</li> <li>5. Persetujuan Asuransi Kesehatan</li> <li>6. Update PDO</li> <li>7. Lain-lain.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Macroeconomic Developments and Projections</li> <li>2. Board of Management Minutes of Meeting Ratification</li> <li>3. LPEI 2020 Annual Report</li> <li>4. IT Incident Report</li> <li>5. Health Insurance Approval</li> <li>6. Update PDO</li> <li>7. Others.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Daniel James Rompas</li> <li>2. Dikdik Yustandi</li> <li>3. Agus Windarto</li> <li>4. Henry Slihotang</li> <li>5. Chesna F Anwar</li> <li>6. Salomi Adriana</li> <li>7. Anwar Harsono</li> <li>8. Wahyu Wibowo</li> <li>9. Titiek Setyowati</li> <li>10. Agung Waluyo</li> </ul>
11	MR.0011/ OTB/03/2021	15 Mar 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ratifikasi Risalah Rapat Board of Management</li> <li>2. Financial Highlight</li> <li>3. Presentasi Direktorat I</li> <li>4. Update Penunjukan Tenaga Ahli di Bidang Cyber Crime</li> <li>5. Agenda Lain-Lain.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Board of Management Minutes of Meetings Ratification</li> <li>2. Financial Highlights</li> <li>3. Directorate I Presentation</li> <li>4. Update on Appointment of Experts in Cyber Crime</li> <li>5. Other Agenda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Daniel James Rompas</li> <li>2. Dikdik Yustandi</li> <li>3. Agus Windarto</li> <li>4. Henry Slihotang</li> <li>5. Chesna F Anwar</li> <li>6. Salomi Adriana</li> <li>7. Anwar Harsono</li> <li>8. Wahyu Wibowo</li> <li>9. Titiek Setyowati</li> <li>10. Paul S Hasjim</li> <li>11. Agung Waluyo</li> <li>12. Djoko Retnadi</li> <li>13. Maqin Norhadi</li> </ul>
12	MR.0012/ OTB/03/2021	22 Mar 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ratifikasi Risalah Rapat Board of Management</li> <li>2. Laporan Keuangan 28 Feb 2021</li> <li>3. Usulan Konsep Annual Report LPEI Tahun 2020</li> <li>4. Update Agenda Korporasi Minggu ke IV Bulan Maret</li> <li>5. Agenda Lain-Lain.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Board of Management Minutes of Meeting Ratification</li> <li>2. Financial Report 28 Feb 2021</li> <li>3. Proposed LPEI Annual Report 2020 Concept</li> <li>4. Update on the Corporate Agenda for the Fourth Week of March</li> <li>5. Other Agenda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Daniel James Rompas</li> <li>2. Dikdik Yustandi</li> <li>3. Agus Windarto</li> <li>4. Henry Slihotang</li> <li>5. Chesna F Anwar</li> <li>6. Salomi Adriana</li> <li>7. Anwar Harsono</li> <li>8. Wahyu Wibowo</li> <li>9. Titiek Setyowati</li> <li>10. Paul S Hasjim</li> <li>11. Agung Waluyo</li> <li>12. Djoko Retnadi</li> <li>13. Maqin Norhadi</li> </ul>

**RAPAT DEWAN DIREKTUR**  
Board of Directors Meetings

No	No Risalah Minutes No	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
13	MR.0013/ OTB/03/2021	29 Mar 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ratifikasi Risalah Rapat <i>Board of Management</i></li> <li>2. PDO, <i>Working Group – EWD</i> dan FS Audited Update</li> <li>3. Tindak Lanjut Panja dan Laporan kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Kendal dan Demak</li> <li>4. Rencana Pembentukan <i>Virtual Office / Desk Semarang</i></li> <li>5. Tindak Lanjut Pembentukan POJK 42021 atas Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan IT.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Board of Management Minutes of Meeting Ratification</li> <li>2. PDO, Working Group – EWD and FS Audited Update</li> <li>3. Follow-up of the Working Committee and Report on the Working Visit of Commission XI DPR RI to Kendal and Demak</li> <li>4. Plans for Establishing Virtual Office / Desk Semarang</li> <li>5. Follow-up to the establishment of POJK 42021 on the Implementation of Risk Management in the Use of IT.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Daniel James Rompas</li> <li>2. Dikdik Yustandi</li> <li>3. Agus Windiarto</li> <li>4. Henry Slihotang</li> <li>5. Chesna F Anwar</li> <li>6. Salomi Adriana</li> <li>7. Anwar Harsono</li> <li>8. Wahyu Wibowo</li> <li>9. Titiek Setyowati</li> <li>10. Paul S Hasjim</li> <li>11. Agung Waluyo</li> <li>12. Djoko Retnadi</li> <li>13. Maqin Norhadi</li> <li>14. Dyah Hindraswarini</li> </ul>
14	MR.0014/ OTB/04/2021	06 Apr 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ratifikasi Risalah Rapat <i>Board of Management</i></li> <li>2. <i>Financial Highlights</i></li> <li>3. Program Kerja 2021 &amp; Update Progress Divisi Jasa Konsultasi</li> <li>4. Agenda Lain-lain</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Board of Management Minutes of Meeting Ratification</li> <li>2. Financial Highlights</li> <li>3. 2021 Work Program &amp; Consultation Services Division Progress Update</li> <li>4. Other Agenda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Daniel James Rompas</li> <li>2. Dikdik Yustandi</li> <li>3. Agus Windiarto</li> <li>4. Henry Slihotang</li> <li>5. Chesna F Anwar</li> <li>6. Salomi Adriana</li> <li>7. Anwar Harsono</li> <li>8. Wahyu Wibowo</li> <li>9. Titiek Setyowati</li> <li>10. Paul S Hasjim</li> <li>11. Agung Waluyo</li> <li>12. Djoko Retnadi</li> <li>13. Maqin Norhadi</li> <li>14. Dyah Hindraswarini</li> </ul>
15	MR.0015/ OTB/04/2021	13 Apr 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan dan Proyeksi Makroekonomi</li> <li>2. Ratifikasi Risalah Rapat <i>Board of Management</i>;</li> <li>3. Rencana Strategis TI (<i>IT Strategic Plan</i>)</li> <li>4. <i>Whistleblowing System</i> (WBS 021)</li> <li>5. PDO Update</li> <li>6. Safari Ramadhan</li> <li>7. Agenda Lain-Lain</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Macroeconomic Developments and Projections</li> <li>2. Board of Management Minutes of Meetings Ratification;</li> <li>3. IT Strategic Plan</li> <li>4. Whistleblowing System (WBS 021)</li> <li>5. PDO Update</li> <li>6. Ramadhan Safari</li> <li>7. Miscellaneous Agenda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Daniel James Rompas</li> <li>2. Dikdik Yustandi</li> <li>3. Agus Windiarto</li> <li>4. Henry Slihotang</li> <li>5. Chesna F Anwar</li> <li>6. Salomi Adriana</li> <li>7. Anwar Harsono</li> <li>8. Wahyu Wibowo</li> <li>9. Titiek Setyowati</li> <li>10. Paul S Hasjim</li> <li>11. Agung Waluyo</li> <li>12. Djoko Retnadi</li> <li>13. Maqin Norhadi</li> <li>14. Dyah Hindraswarini</li> </ul>
16	MR.0016/ OTB/04/2021	19 Apr 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ratifikasi Risalah Rapat <i>Board of Management</i>;</li> <li>2. <i>Head of Finance &amp; Strategic Planning</i>;</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PDO Update</li> <li>• SPV Update - Asset Sale dengan PPA</li> <li>• IKU 10 2021</li> </ul> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Daniel James Rompas</li> <li>2. Dikdik Yustandi</li> <li>3. Agus Windiarto</li> <li>4. Henry Slihotang</li> <li>5. Chesna F Anwar</li> </ul>

**RAPAT DEWAN DIREKTUR**  
Board of Directors Meetings

No	No Risalah Minutes No	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
		27 Apr 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Board of Management Minutes of Meeting Ratification</li> <li>2. Head of Finance &amp; Strategic Planning; <ul style="list-style-type: none"> <li>• PDO Updates</li> <li>• SPV Update - Asset Sale with PPA</li> <li>• KPI IQ 2021</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Salomi Adriana</li> <li>7. Anwar Harsono</li> <li>8. Wahyu Wibowo</li> <li>9. Titiek Setyowati</li> <li>10. Paul S Hasjim</li> <li>11. Agung Waluyo</li> <li>12. Djoko Retnadi</li> <li>13. Maqin Norhadi</li> <li>14. Dyah Hindraswarini</li> </ul>
17	MR.0017/ OTB/04/2021	27 Apr 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ratifikasi Risalah Rapat Board of Management;</li> <li>2. Head of Finance &amp; Strategic Planning; <ul style="list-style-type: none"> <li>• PDO Update</li> <li>• MIS Project Workstream update</li> </ul> </li> <li>1. Ratification of the Minutes of Meeting of the Board of Management;</li> <li>2. Head of Finance &amp; Strategic Planning; <ul style="list-style-type: none"> <li>• PDO Updates</li> <li>• MIS Project Workstream updates</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Daniel James Rompas</li> <li>2. Dikdik Yustandi</li> <li>3. Maqin Norhadi</li> <li>4. Agus Windiarto</li> <li>5. Henry Slhotang</li> <li>6. Chesna F Anwar</li> <li>7. Salomi Adriana</li> <li>8. Anwar Harsono</li> <li>9. Wahyu Wibowo</li> <li>10. Titiek Setyowati</li> <li>11. Paul S Hasjim</li> <li>12. Agung Waluyo</li> <li>13. Djoko Retnadi</li> <li>14. Dyah Hindraswarini</li> </ul>
18	MR.0018/ OTB/05/2021	03 Mei 2021 03 May 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Management Letter</li> <li>2. Ratifikasi Risalah Rapat Board of Management</li> <li>3. PDO Report Update</li> <li>4. Rencana Sentralisasi Fungsi Operasional di Kanwil/Cabang ke OPS</li> <li>5. Agenda Lain-lain</li> <li>1. Management Letter</li> <li>2. Ratification of the Minutes of Meeting of the Board of Management</li> <li>3. PDO Report Update</li> <li>4. Plan for Centralization of Operational Functions in Regional Offices/Branches to OPS</li> <li>5. Other Agenda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Daniel James Rompas</li> <li>2. Dikdik Yustandi</li> <li>3. Maqin Norhadi</li> <li>4. Agus Windiarto</li> <li>5. Henry Slhotang</li> <li>6. Chesna F Anwar</li> <li>7. Salomi Adriana</li> <li>8. Anwar Harsono</li> <li>9. Wahyu Wibowo</li> <li>10. Titiek Setyowati</li> <li>11. Paul S Hasjim</li> <li>12. Agung Waluyo</li> <li>13. Djoko Retnadi</li> <li>14. Dyah Hindraswarini</li> </ul>
19	MR.0019/ OTB/05/2021	10 Mei 2021 10 May 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ratifikasi Risalah Rapat Board of Management</li> <li>2. PDO Report Update</li> <li>3. Stress Test Exercise</li> <li>4. Project Management Initiative 2021</li> <li>5. Agenda Lain-lain.</li> <li>1. Ratification of Minutes of Board of Management Meeting</li> <li>2. PDO Report Update</li> <li>3. Stress Test Exercise</li> <li>4. Project Management Initiative 2021</li> <li>5. Other Agenda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Daniel James Rompas</li> <li>2. Dikdik Yustandi</li> <li>3. Maqin Norhadi</li> <li>4. Agus Windiarto</li> <li>5. Henry Slhotang</li> <li>6. Chesna F Anwar</li> <li>7. Salomi Adriana</li> <li>8. Anwar Harsono</li> <li>9. Wahyu Wibowo</li> <li>10. Titiek Setyowati</li> <li>11. Paul S Hasjim</li> <li>12. Agung Waluyo</li> <li>13. Djoko Retnadi</li> <li>14. Dyah Hindraswarini</li> </ul>
20	MR.0020/ OTB/05/2021	19 Mei 2021 19 May 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ratifikasi Risalah Rapat Board of Management;</li> <li>2. PDO Report Update</li> <li>3. Kick off Covenant Day</li> <li>4. Agenda Lain-lain.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Suminto</li> <li>2. Dikdik Yustandi</li> <li>3. Maqin Norhadi</li> <li>4. Agus Windiarto</li> </ul>

**RAPAT DEWAN DIREKTUR**  
Board of Directors Meetings

No	No Risalah Minutes No	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
			1. Ratification of the Minutes of Meeting of the Board of Management; 2. PDO Report Update 3. Kick off Covenant Day 4. Other Agenda.	5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Salomi Adriana 8. Anwar Harsono 9. Wahyu Wibowo 10. Titiek Setyowati 11. Paul S Hasjim 12. Agung Waluyo 13. Djoko Retnadi
21	MR.0021/ OTB/05/2021	24 Mei 2021 24 May 2021	1. Ratifikasi Risalah Rapat <i>Board of Management</i> 2. PDO Report Update 3. Strategic Planning Session Mid Year 4. Usulan Proses Flow Pengadaan Barang & Jasa, <i>Travel Advance &amp; Travel Lumpsum</i> 5. Agenda Lain-lain.  1. Ratification of the Minutes of Meeting of the Board of Management 2. PDO Report Update 3. Strategic Planning Session Mid Year 4. Proposed Process for Procurement of Goods & Services, <i>Travel Advance &amp; Travel Lumpsum</i> 5. Other Agenda.	1. Suminto 2. Dikdik Yustandi 3. Maqin Norhadi 4. Agus Windiarto 5. Chesna F Anwar 6. Anwar Harsono 7. Wahyu Wibowo 8. Titiek Setyowati 9. Paul S Hasjim 10. Agung Waluyo 11. Djoko Retnadi 12. Dyah Hindraswarini
22	MR.0022/ OTB/05/2021	31 Mei 2021 31 May 2021	1. Ratifikasi Risalah Rapat <i>Board of Management</i> 2. PDO Report Update 3. Pembahasan Kolektibilitas LPEI 4. Usulan Proses Flow Pengadaan Barang & Jasa, <i>Travel Advance &amp; Travel Lumpsum</i> 5. Agenda Lain-lain.  1. Ratification of Minutes of Meeting of the Board of Management 2. PDO Report Update 3. LPEI Collectibility Discussion 4. Proposed Process for Procurement of Goods & Services, <i>Travel Advance &amp; Travel Lumpsum</i> 5. Other Agenda.	1. Daniel James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Maqin Norhadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Salomi Adriana 7. Paul S Hasjim 8. Anwar Harsono 9. Titiek Setyowati 10. Agung Waluyo 11. Djoko Retnadi
23	MR.0023/ OTB/06/2021	07 Jun 2021	1. Perkembangan dan Proyeksi Makroekonomi – DP III; 2. Ratifikasi Risalah Rapat <i>Board of Management</i> ; 3. PDO Report Update - Head of Finance & Strategic Planning; 4. Penyesuaian Strategi Pengembangan Data Center 2021 – 2024 – Head of Operation & TI; 5. Agenda Lain-lain  1. Macroeconomic Developments and Projections – DP III; 2. Ratification of the Minutes of Meeting of the Board of Management; 3. PDO Report Update - Head of Finance & Strategic Planning; 4. Adjustment of Data Center Development Strategy 2021 – 2024 – Head of Operation & IT; 5. Other Agenda	1. Daniel James Rompas 2. Maqin Norhadi 3. Agus Windiarto 4. Henry Sihotang 5. Chesna F Anwar 6. Salomi Adriana 7. Paul S Hasjim 8. Anwar Harsono 9. Wahyu Wibowo 10. Titiek Setyowati 11. Agung Waluyo 12. Djoko Retnadi

**RAPAT DEWAN DIREKTUR**  
Board of Directors Meetings

No	No Risalah Minutes No	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
24	MR.0024/ OTB/06/2021	14 Jun 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ratifikasi Risalah Rapat Board of Management;</li> <li>2. <i>PDO Report Update - Head of Finance &amp; Strategic Planning;</i></li> <li>3. <i>Strategic Initiative Trade Finance – DP I;</i></li> <li>4. Agenda Lain-Lain.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ratification of the Minutes of Meeting of the Board of Management;</li> <li>2. PDO Report Update - Head of Finance &amp; Strategic Planning;</li> <li>3. Strategic Initiative Trade Finance – DP I;</li> <li>4. Other Agenda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Daniel James Rompas</li> <li>2. Dikdik Yustandi</li> <li>3. Maqin Norhadi</li> <li>4. Agus Windiarto</li> <li>5. Henry Sihotang</li> <li>6. Chesna F Anwar</li> <li>7. Salomi Adriana</li> <li>8. Paul S Hasjim</li> <li>9. Anwar Harsono</li> <li>10. Wahyu Wibowo</li> <li>11. Titiek Setyowati</li> <li>12. Agung Waluyo</li> <li>13. Djoko Retnadi</li> </ul>
25	MR.0025/ OTB/06/2021	21 Jun 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ratifikasi Risalah Rapat Board of Management;</li> <li>2. <i>Self Assessment Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Tata Kelola LPEI - Head of Compliance, HR &amp; TO;</i></li> <li>3. <i>Annual Report LPEI 2020 – Head of Finance &amp; Strategic Planning;</i></li> <li>4. <i>LPEI as The Preferred Partner "A Reputation Building Proposal" – DP III;</i></li> <li>5. <i>PDO Report Update - Head of Finance &amp; Strategic Planning;</i></li> <li>6. Catatan Rapat Koordinasi Persiapan Rapimtas dan Jadwal Pengesahan L/K LPEI tahun 2020 – Kepala Divisi OTB;</li> <li>7. Laporan Gugus Tugas Covid-19 – Head of Compliance, HR &amp; TO;</li> <li>8. Usulan Nama Meeting Room Indonesia Eximbank – Head of Compliance, HR &amp; TO;</li> <li>9. Penyelenggaraan Mid Year Strategy – Head of Finance &amp; Strategic Planning;</li> <li>10. Agenda Lain-Lain</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ratification of the Minutes of Meeting of the Board of Management;</li> <li>2. Self Assessment Implementation of LPEI Governance Principles - Head of Compliance, HR &amp; TO;</li> <li>3. LPEI 2020 Annual Report - Head of Finance &amp; Strategic Planning;</li> <li>4. LPEI as The Preferred Partner "A Reputation Building Proposal" – DP III;</li> <li>5. PDO Report Update - Head of Finance &amp; Strategic Planning;</li> <li>6. Record the Coordination Meeting for the Preparation of Rapimtas and the Schedule for Ratification of the LPEI L/K for 2020 – Head of the OTB Division;</li> <li>7. Covid-19 Task Force Report – Head of Compliance, HR &amp; TO;</li> <li>8. Proposed Name of Meeting Room Indonesia Eximbank – Head of Compliance, HR &amp; TO;</li> <li>9. Implementation of Mid Year Strategy – Head of Finance &amp; Strategic Planning;</li> <li>10. Other Agenda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Daniel James Rompas</li> <li>2. Dikdik Yustandi</li> <li>3. Maqin Norhadi</li> <li>4. Agus Windiarto</li> <li>5. Henry Sihotang</li> <li>6. Chesna F Anwar</li> <li>7. Salomi Adriana</li> <li>8. Paul S Hasjim</li> <li>9. Anwar Harsono</li> <li>10. Wahyu Wibowo</li> <li>11. Titiek Setyowati</li> <li>12. Agung Waluyo</li> <li>13. Djoko Retnadi</li> </ul>

**RAPAT DEWAN DIREKTUR**  
Board of Directors Meetings

No	No Risalah Minutes No	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
26	MR.0026/ OTB/06/2021	28 Jun 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ratifikasi Risalah Rapat <i>Board of Management</i>;</li> <li>2. PDO Report Update - Head of Finance &amp; Strategic Planning</li> <li>3. Evaluasi (KAP) atas Audit 2020 – Head of Finance &amp; Strategic Planning;</li> <li>4. Project Management Initiative (PMI) 2021 – Head of Compliance, HR &amp; TO;</li> <li>5. Capaian IKU YTD Mei 2021 – Head of Finance &amp; Strategic Planning;</li> <li>6. Laporan Progres SPV – Head of Finance &amp; Strategic Planning;</li> <li>7. Floor Stacking – Head of Finance &amp; Strategic Planning;</li> <li>8. Materi Usulan Rancangan Revisi PDD Sistem Pengendalian Internal LPEI – SKAI;</li> <li>9. Webinar Internal LPEI "Memahami GRC Secara Holistik" – Head of Compliance, HR &amp; TO;</li> <li>10. Daftar Aset AYDA dan Agunan Debitur LPEI di Solo dan Semarang – DP IV;</li> <li>11. Agenda Lain-Lain.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ratification of the Minutes of Meeting of the Board of Management;</li> <li>2. PDO Report Update – Head of Finance &amp; Strategic Planning</li> <li>3. Evaluation (KAP) of the 2020 Audit – Head of Finance &amp; Strategic Planning;</li> <li>4. Project Management Initiative (PMI) 2021 – Head of Compliance, HR &amp; TO;</li> <li>5. Achievement of YTD KPI May 2021 – Head of Finance &amp; Strategic Planning;</li> <li>6. SPV Progress Report – Head of Finance &amp; Strategic Planning;</li> <li>7. Floor Stacking – Head of Finance &amp; Strategic Planning;</li> <li>8. Proposed Material for Revision of PDD Internal Control System LPEI – SKAI;</li> <li>9. LPEI Internal Webinar "Understanding GRC Holistically" – Head of Compliance, HR &amp; TO;</li> <li>10. List of AYDA Assets and LPEI Debtor Collateral in Solo and Semarang – DP IV;</li> <li>11. Other Agenda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Daniel James Rompas</li> <li>2. Dikdik Yustandi</li> <li>3. Maqin Norhadi</li> <li>4. Agus Windiarto</li> <li>5. Henry Sihotang</li> <li>6. Chesna F Anwar</li> <li>7. Salomi Adriana</li> <li>8. Paul S Hasjim</li> <li>9. Anwar Harsono</li> <li>10. Wahyu Wibowo</li> <li>11. Titiek Setyowati</li> <li>12. Agung Waluyo</li> <li>13. Djoko Retnadi</li> </ul>
27	MR.0027/ OTB/07/2021	01 Jul 2021	Strategi komunikasi atas Kasus Kejagung Communication strategy for the Attorney General's Office Case	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Daniel James Rompas</li> <li>2. Maqin Norhadi</li> <li>3. Agus Windiarto</li> <li>4. Henry Sihotang</li> <li>5. Chesna F Anwar</li> <li>6. Salomi Adriana</li> <li>7. Paul S Hasjim</li> <li>8. Anwar Harsono</li> <li>9. Wahyu Wibowo</li> <li>10. Titiek Setyowati</li> <li>11. Agung Waluyo</li> <li>12. Djoko Retnadi</li> </ul>
28	MR.0028/ OTB/07/2021	05 Jul 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ratifikasi Risalah Rapat <i>Board of Management</i>;</li> <li>2. PDO Report Update - Head of Finance &amp; Strategic Planning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Daniel James Rompas</li> <li>2. Dikdik Yustandi</li> <li>3. Maqin Norhadi</li> </ul>

**RAPAT DEWAN DIREKTUR**  
Board of Directors Meetings

No	No Risalah Minutes No	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
			<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Laporan dan Usulan Pengelolaan Arsip – DP V;</li> <li>4. Laporan Gugus Tugas Covid-19 – Head of Compliance, HR &amp; TO;</li> <li>1. Ratification of the Minutes of Meeting of the Board of Management;</li> <li>2. PDO Report Update - Head of Finance &amp; Strategic Planning</li> <li>3. Reports and Proposals for Archive Management – DP V;</li> <li>4. Covid-19 Task Force Report – Head of Compliance, HR &amp; TO;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Agus Windiarto</li> <li>5. Henry Sihotang</li> <li>6. Chesna F Anwar</li> <li>7. Salomi Adriana</li> <li>8. Paul S Hasjim</li> <li>9. Anwar Harsono</li> <li>10. Wahyu Wibowo</li> <li>11. Titiek Setyowati</li> <li>12. Agung Waluyo</li> <li>13. Djoko Retnadi</li> </ul>
29	MR.0029/ OTB/07/2021	07 Jul 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Financial Statement Juni 2021 - Head of Finance &amp; Strategic Planning;</i></li> <li>2. <i>Evaluasi KAP RSM atas Audit 2020 - Head of Finance &amp; Strategic Planning;</i></li> <li>3. <i>Pengelolaan dan Pencegahan Covid-19 di Lingkungan LPEI - Gugus Tugas Covid-19.</i></li> <li>1. <i>Financial Statement June 2021 - Head of Finance &amp; Strategic Planning;</i></li> <li>2. <i>KAP RSM evaluation of the 2020 Audit - Head of Finance &amp; Strategic Planning;</i></li> <li>3. <i>Management and Prevention of Covid-19 in the LPEI Environment - Covid-19 Task Force.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Daniel James Rompas</li> <li>2. Dikdik Yustandi</li> <li>3. Maqin Norhadi</li> <li>4. Agus Windiarto</li> <li>5. Chesna F Anwar</li> <li>6. Salomi Adriana</li> <li>7. Paul S Hasjim</li> <li>8. Anwar Harsono</li> <li>9. Wahyu Wibowo</li> <li>10. Titiek Setyowati</li> <li>11. Agung Waluyo</li> </ul>
30	MR.0030/ OTB/07/2021	12 Jul 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan dan Proyeksi Makro Ekonomi - INS;</li> <li>2. Ratifikasi Rapat Board of Management;</li> <li>3. PDO Report Update &amp; Financial Statement - Head of Finance &amp; Strategic Planning;</li> <li>4. Penghapusbukuan Piutang LPEI - DP III;</li> <li>5. Lain-Lain.</li> <li>1. Macroeconomic Developments and Projections - INS;</li> <li>2. Ratification of the Board of Management Meeting;</li> <li>3. PDO Report Update &amp; Financial Statement - Head of Finance &amp; Strategic Planning;</li> <li>4. Write-off of LPEI Receivables - DP III;</li> <li>5. Others.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Daniel James Rompas</li> <li>2. Dikdik Yustandi</li> <li>3. Maqin Norhadi</li> <li>4. Agus Windiarto</li> <li>5. Salomi Adriana</li> <li>6. Paul S Hasjim</li> <li>7. Anwar Harsono</li> <li>8. Wahyu Wibowo</li> <li>9. Titiek Setyowati</li> <li>10. Agung Waluyo</li> <li>11. Djoko Retnadi</li> </ul>
31	MR.0031/ OTB/07/2021	19 Jul 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ratifikasi Rapat Board of Management;</li> <li>2. PDO Report Update - DP III;</li> <li>3. Capaian IKU YTD Juni 2021 - DP III;</li> <li>4. Penghapusbukuan Piutang LPEI(Revisi PDD Kebijakan Pembiayaan) - DP V;</li> <li>5. Penguantan IT Security System - Head of Operation &amp; IT;</li> <li>6. Whistleblowing System(WBS)- Head of Compliance, HR &amp; TO;</li> <li>7. Lain-Lain.</li> <li>1. Ratification of the Board of Management Meeting;</li> <li>2. PDO Report Update - DP III;</li> <li>3. Achievement of KPI YTD June 2021 - DP III;</li> <li>4. Write-off of LPEI Receivables (Revised PDD Financing Policy) - DP V;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Daniel James Rompas</li> <li>2. Dikdik Yustandi</li> <li>3. Maqin Norhadi</li> <li>4. Agus Windiarto</li> <li>5. Henry Sihotang</li> <li>6. Chesna F Anwar</li> <li>7. Salomi Adriana</li> <li>8. Paul S Hasjim</li> <li>9. Anwar Harsono</li> <li>10. Wahyu Wibowo</li> <li>11. Titiek Setyowati</li> <li>12. Agung Waluyo</li> <li>13. Djoko Retnadi</li> </ul>

**RAPAT DEWAN DIREKTUR**  
Board of Directors Meetings

No	No Risalah Minutes No	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
			5. Strengthening IT Security System – Head of Operation & IT; 6. Whistleblowing System (WBS) – Head of Compliance, HR & TO; 7. Others.	
32	MR.0032/ OTB/07/2021	26 Jul 2021	1. Ratifikasi Rapat Board of Management; 2. PDO Report Update – Head of Finance & Strategic Planning; 3. Lain-lain  1. Ratification of the Board of Management Meeting; 2. PDO Report Update – Head of Finance & Strategic Planning; 3. Others	1. Daniel James Rompas 2. Maqin Norhadi 3. Agus Windiarto 4. Henry Sihotang 5. Chesna F Anwar 6. Salomi Adriana 7. Paul S Hasjim 8. Anwar Harsono 9. Wahyu Wibowo 10. Titiek Setyowati 11. Agung Waluyo 12. Djoko Retnadi
33	MR.0033/ OTB/08/2021	2 Aug 2021	1. Ratifikasi Risalah Rapat Board of Management; 2. Usulan Memorandum Prosedur Manual Proteksi Piutang Dagang; DP VV 3. PDO Report Update – Head of Finance & Strategic Planning; 4. Agenda Lain-Lain  1. Ratification of the Minutes of Meeting of the Board of Management; 2. Proposed Memorandum of Procedure for Accounts Receivable Protection Manual; DP VV 3. PDO Report Update – Head of Finance & Strategic Planning; 4. Other Agenda	1. Daniel James Rompas 2. Maqin Norhadi 3. Agus Windiarto 4. Henry Sihotang 5. Chesna F Anwar 6. Salomi Adriana 7. Paul S Hasjim 8. Anwar Harsono 9. Wahyu Wibowo 10. Titiek Setyowati 11. Agung Waluyo 12. Djoko Retnadi
34	MR.0034/ OTB/08/2021	6 Aug 2021	<i>Financial Highlight per 31 July 2021</i> Financial Highlights as of 31 July 2021	1. Daniel James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Maqin Norhadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Salomi Adriana 8. Paul S Hasjim 9. Anwar Harsono 10. Wahyu Wibowo 11. Titiek Setyowati 12. Agung Waluyo
35	MR.0035/ OTB/08/2021	9 Aug 2021	1. Laporan Profil Risiko LPEI Triwulan 1 & 2 2021 – Head of Credit Risk; 2. Ratifikasi Rapat Board of Management; 3. PDO Report Update – Head of Finance & Strategic Planning; 4. Surat Pengesahan Pertanggungjawaban LPEI 2021 – Head of Finance & Strategic Planning; 5. Corporate Agenda; 6. Lain-Lain  1. LPEI Risk Profile Report Quarter 1 & 2 2021 – Head of Credit Risk; 2. Ratification of the Board of Management Meeting;	1. Daniel James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Maqin Norhadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Salomi Adriana 8. Paul S Hasjim 9. Anwar Harsono 10. Wahyu Wibowo 11. Titiek Setyowati 12. Agung Waluyo 13. Djoko Retnadi

**RAPAT DEWAN DIREKTUR**  
Board of Directors Meetings

No	No Risalah Minutes No	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
			3. PDO Report Update – Head of Finance & Strategic Planning; 4. Letter of Endorsement of LPEI 2021 Accountability – Head of Finance & Strategic Planning; 5. Corporate Agenda; 6. Others	
36	MR.0036/ OTB/08/2021	18 Aug 2021	1. Perkembangan dan Proyeksi Makroekonomi – INS; 2. Ratifikasi Rapat Board of Management – OTB 3. PDO Report Update – Head of Finance & Strategic Planning; 4. <i>Strategic Initiatives and Road Map Trade Finance LPEI – DP I;</i> 5. Pembukaan Desk dan Relokasi Kantor / AYDA – DPII 6. RPMK Penghapusbukuan LPEI – DPIII 7. Lain-Lain.  1. Macroeconomic Developments and Projections – INS; 2. Ratification of the Board of Management Meeting – OTB 3. PDO Report Update – Head of Finance & Strategic Planning; 4. Strategic Initiatives and Road Map of LPEI Trade Finance – DP I; 5. Desk Opening and Office Relocation / AYDA – DPII 6. RPMK LPEI – DPIII write-offs 7. Others.	1. Daniel James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Maqin Norhadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Salomi Adriana 8. Paul S Hasjim 9. Anwar Harsono 10. Wahyu Wibowo 11. Titiek Setyowati 12. Agung Waluyo 13. Djoko Retnadi
37	MR.0037/ OTB/08/2021	23 Aug 2021	1. Ratifikasi Rapat Board of Management; 2. PDO Report Update – HOFP; 3. Keputusan, Arahan dan Catatan RDD tanggal 20 Agustus 2021 – DP III; 4. <i>Disaster Recovery Center (DRC) Relocation Milestone – HOIT;</i> 5. Lain-Lain.  1. Ratification of the Board of Management Meeting; 2. PDO Report Update – HOFP; 3. Decision, Direction and Notes of RDD dated 20 August 2021 – DP III; 4. Disaster Recovery Center (DRC) Relocation Milestone – HOIT; 5. Others.	1. Daniel James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Maqin Norhadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Salomi Adriana 8. Paul S Hasjim 9. Anwar Harsono 10. Wahyu Wibowo 11. Titiek Setyowati 12. Agung Waluyo 13. Djoko Retnadi
38	MR.0038/ OTB/08/2021	30 Aug 2021	1. Ratifikasi Rapat Board of Management; 2. PDO Report Update – HOFP; 3. Usulan Syarat dan Kondisi Penjaminan Kredit Program “Fast Trex” Bank BNI – HOG; 4. Simulasi IKU Lembaga Full Year – HOFP; 5. Persiapan RKAT 2022 – HOFP; 6. Laporan Hasil Pemantauan BPK Semestaer I Tahun 2021 – SKAI; 7. Lain-Lain.  1. Ratification of the Board of Management Meeting; 2. PDO Report Update – HOFP; 3. Proposed Terms and Conditions of Credit Guarantee for Bank BNI – HOG “Fast Trex” Program;	1. Daniel James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Maqin Norhadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Salomi Adriana 8. Paul S Hasjim 9. Anwar Harsono 10. Wahyu Wibowo 11. Titiek Setyowati 12. Agung Waluyo 13. Djoko Retnadi

## RAPAT DEWAN DIREKTUR

Board of Directors Meetings

No	No Risalah Minutes No	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
			4. Full Year Institute KPI Simulation - HOFP; 5. Preparation of RKAT 2022 - HOFP; 6. Report on the results of the first semester of 2021 BPK monitoring – SKAI; 7. Others.	
39	MR.0039/ OTB/09/2021	4 Sept 2021	1. <i>Financial Highlight</i> – HOFP; 2. Persiapan RKAT 2022 – HOFP; 3. Transformasi Bisnis Berbasis Digital – HOFP;  1. Financial Highlights – HOFP; 2. Preparation of RKAT 2022 – HOFP; 3. Digital-Based Business Transformation – HOFP;	1. Daniel James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Maqin Norhadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Salomi Adriana 8. Paul S Hasjim 9. Anwar Harsono 10. Wahyu Wibowo 11. Titiek Setyowati 12. Agung Waluyo
40	MR.0040/ OTB/09/2021	8 Sept 2021	1. RPMK Penghapusbukuan Piutang LPEI – SKAI; 2. Progres Penanganan Kasus Kejagung – DP III; 3. Laporan Fasilitas Debitur.  1. RPMK Write-off of LPEI – SKAI Receivables; 2. Progress of Case Handling AGO – DP III; 3. Debtor Facility Report.	1. Daniel James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Maqin Norhadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Salomi Adriana 8. Paul S Hasjim 9. Anwar Harsono 10. Wahyu Wibowo 11. Titiek Setyowati 12. Agung Waluyo
41	MR.0041/ OTB/09/2021	13 Sept 2021	1. Ratifikasi Rapat <i>Board of Management</i> ; 2. PDO Report Update – HOFP; 3. Update SPV – HOFP; 4. Laporan Program Cost Efficiency – HOFP; 5. Penyampaian Arahan Menteri Keuangan dalam Rangka Penyusunan RKAT LPEI Tahun 2022 – HOFP; 6. Update Kinerja Agustus 2021 kepada Dirjen Kekayaan Negara – HOFP; 7. Lain-Lain  1. Ratification of the Board of Management Meeting; 2. PDO Report Update – HOFP; 3. Update SPV – HOFP; 4. Cost Efficiency Program Report – HOFP; 5. Submission of Directions to the Minister of Finance for the Preparation of the 2022 LPEI RKAT – HOFP; 6. August 2021 Performance Update to the Director General of State Assets – HOFP; 7. Miscellaneous	1. Daniel James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Maqin Norhadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Salomi Adriana 8. Paul S Hasjim 9. Anwar Harsono 10. Wahyu Wibowo 11. Titiek Setyowati 12. Agung Waluyo 13. Djoko Retnadi
42	MR.0042/ OTB/09/2021	20 Sept 2021	1. Ratifikasi Rapat <i>Board of Management</i> ; 2. PDO Report Update; 3. Ratifikasi Rekomendasi KA dan KPR TW II 2021; 4. Corporate Agenda; 5. Lain-Lain.	1. Daniel James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Maqin Norhadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Salomi Adriana

**RAPAT DEWAN DIREKTUR**  
Board of Directors Meetings

No	No Risalah Minutes No	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
			1. Ratification of the Board of Management Meeting; 2. PDO Report Updates; 3. Ratification of TW II 2021 KA and KPR Recommendations; 4. Corporate Agenda; 5. Others.	8. Paul S Hasjim 9. Anwar Harsono 10. Wahyu Wibowo 11. Titiek Setyowati 12. Agung Waluyo 13. Djoko Retnadi
43	MR.0043/ OTB/10/2021	04 Okt 2021 04 Oct 2021	1. <i>Economy Outlook</i> ; 2. Pemaparan <i>Independent Assessor GCG</i> ; 3. Ratifikasi Rapat Board of Management; 4. PDO Report Update dan Kinerja Keuangan 30 September 2021; 5. <i>Conditional Automatic Cover Jaminah</i> ; 6. Pemaparan Proposal Program Kementerian Keuangan Mengajar; 7. Usulan Penyesuaian Penugasan Konsultan pada RAIT 2021; 8. Usulan Penyelenggaraan Offsite Meeting RKAT 2022; 9. Lain-Lain.  1. <i>Economy Outlook</i> ; 2. GCG Independent Assessor Exposure; 3. Ratification of the Board of Management Meeting; 4. PDO Report Update and Financial Performance 30 September 2021; 5. Conditional Automatic Cover Jaminah; 6. Presentation of the Ministry of Finance Teaching Program Proposal; 7. Proposal for Adjustment of Consultant Assignment at RAIT 2021; 8. Proposal for the 2022 RKAT Offsite Meeting; 9. Others.	1. Daniel James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Maqin Norhadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Salomi Adriana 8. Paul S Hasjim 9. Anwar Harsono 10. Wahyu Wibowo 11. Titiek Setyowati 12. Agung Waluyo 13. Djoko Retnadi
44	MR.0044/ OTB/10/2021	11 Okt 2021 11 Oct 2021	1. Ratifikasi Rapat Board of Management; 2. PDO Report Update; 3. Catatan Surat OJK; 4. Update Offsite Meeting; 5. Lain-Lain.  1. Ratification of the Board of Management Meeting; 2. PDO Report Updates; 3. OJK Letter Notes; 4. Update Offsite Meeting; 5. Others.	1. Daniel James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Maqin Norhadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Salomi Adriana 8. Paul S Hasjim 9. Anwar Harsono 10. Wahyu Wibowo 11. Titiek Setyowati 12. Agung Waluyo 13. Djoko Retnadi
45	MR.0045/ OTB/10/2021	22 Okt 2021 22 Oct 2021	1. Ratifikasi Rapat Board of Management; 2. PDO Report Update; 3. Usulan RKAT dan IKU 2022; 4. Tindak Lanjut Trade Expo Indonesia (TEI); 5. Tindak Lanjut Pembentukan SPV; 6. Status Pegajuan PMN LPEI 2021; 7. Lain-Lain.  1. Ratification of the Board of Management Meeting; 2. PDO Report Updates; 3. Proposed RKAT and IKU 2022;	1. Daniel James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Maqin Norhadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Salomi Adriana 8. Paul S Hasjim 9. Anwar Harsono 10. Wahyu Wibowo 11. Titiek Setyowati

**RAPAT DEWAN DIREKTUR**  
Board of Directors Meetings

No	No Risalah Minutes No	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
			4. Follow-up of Trade Expo Indonesia (TEI); 5. Follow-up for SPV formation; 6. LPEI PMN 2021 Application Status; 7. Others	12. Agung Waluyo 13. Djoko Retnadi
46	MR.0046/ OTB/10/2021	29 Okt 2021 29 Oct 2021	1. Ratifikasi Rapat Board of Management; 2. PDO Report Update; 3. Update Corporate Agenda; 4. Lain-Lain  1. Ratification of the Board of Management Meeting; 2. PDO Report Updates; 3. Update the Corporate Agenda; 4. Others	1. Daniel James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Maqin Norhadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Salomi Adriana 7. Paul S Hasjim 8. Anwar Harsono 9. Wahyu Wibowo 10. Titiek Setyowati 11. Agung Waluyo 12. Djoko Retnadi
47	MR.0047/ OTB/11/2021	8 Nov 2021	1. PDO Report Update and Financial Statement; 2. Project Management Initiative (PMI) 2021; 3. Penghapusbukuan Piutang LPEI (Revisi PDD Kebijakan Pembiayaan LPEI); 4. Economy Outlook; 5. Lain-Lain.  1. PDO Report Update and Financial Statement; 2. Project Management Initiative (PMI) 2021; 3. Write-off of LPEI Receivables (Revised PDD LPEI Financing Policy); 4. Economy Outlook; 5. Others.	1. Daniel James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Maqin Norhadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Salomi Adriana 8. Paul S Hasjim 9. Anwar Harsono 10. Wahyu Wibowo 11. Titiek Setyowati 12. Agung Waluyo 13. Djoko Retnadi
48	MR.0048/ OTB/11/2021	15 Nov 2021	1. Ratifikasi Rapat Board of Management; 2. PDO Report Update; 3. Dashboard Ratifikasi Rabom; 4. Corporate Agenda; 5. Lain-Lain.  1. Ratification of the Board of Management Meeting; 2. PDO Report Updates; 3. Rabom Ratification Dashboard; 4. Corporate Agenda; 5. Others.	1. Daniel James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Maqin Norhadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Salomi Adriana 8. Paul S Hasjim 9. Anwar Harsono 10. Wahyu Wibowo 11. Titiek Setyowati 12. Agung Waluyo 13. Djoko Retnadi
49	MR.0049/ OTB/11/2021	22 Nov 2021	1. Ratifikasi Rapat Board of Management; 2. PDO Report Update; 3. Usulan Revisi PDD Kebijakan Sistem Pengendalian Internal (Internal Control System) LPEI; 4. MIS Update 5. Update Pemeriksaan OJK; 6. Corporate Agenda; 7. Lain-Lain.  1. Ratification of the Board of Management Meeting; 2. PDO Report Updates; 3. Proposed PDD Revision of LPEI's Internal Control System Policy; 4. MIS Update	1. Daniel James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Maqin Norhadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Salomi Adriana 8. Paul S Hasjim 9. Anwar Harsono 10. Wahyu Wibowo 11. Titiek Setyowati 12. Agung Waluyo 13. Djoko Retnadi

**RAPAT DEWAN DIREKTUR**  
Board of Directors Meetings

No	No Risalah Minutes No	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
			5. Update on OJK Audit; 6. Corporate Agenda; 7. Others.	
50	MR.0050/ OTB/11/2021	30 Nov 2021	1. Ratifikasi Rapat Board of Management; 2. PDO Report Update; 3. Pemaparan Bisnis Model Syariah; 4. Tindak Lanjut Exit Meeting OJK; 5. Lain-Lain a. Update Rencana Pelaksanaan Offsite Meeting; b. Corporate Agenda.  1. Ratification of the Board of Management Meeting; 2. PDO Report Updates; 3. Presentation of the Sharia Business Model; 4. Follow-up to the OJK Exit Meeting; 5. Others a. Update the Offsite Meeting Implementation Plan; b. Corporate Agenda.	1. Daniel James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Maqin Norhadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Salomi Adriana 8. Paul S Hasjim 9. Anwar Harsono 10. Wahyu Wibowo 11. Titiek Setyowati 12. Agung Waluyo 13. Djoko Retnadi
51	MR.0051/ OTB/12/2021	6 Dec 2021	1. Economic Outlook; 2. Ratifikasi Rapat Board of Management; 3. PDO Report Update dan Financial Statement; 4. Lain-Lain: Corporate Agenda.  1. Economic Outlook; 2. Ratification of the Board of Management Meeting; 3. PDO Report Update and Financial Statement; 4. Others: Corporate Agenda.	1. Suminto 2. Dikdik Yustandi 3. Henry Sihotang 4. Chesna F Anwar 5. Salomi Adriana 6. Paul S Hasjim 7. Anwar Harsono 8. Wahyu Wibowo 9. Titiek Setyowati 10. Agung Waluyo 11. Djoko Retnadi
52	MR.0052/ OTB/12/2021	22 Dec 2022	1. Ratifikasi Rapat Board of Management; 2. PDO Report Update dan Prognosa Keuangan Desember 2021; 3. Laporan Status Hapus Buku pada Pengajuan RKAT 2022; 4. Check Point Jaminah; 5. Summary PMK No.183 Tahun 2021 tentang Penugasan Khusus LPEI; 6. Update terkait RPP PMN untuk LPEI; 7. Lain-Lain a. Pencapaian IKU tahun 2021. b. Corporate Agenda.  1. Ratification of the Board of Management Meeting; 2. PDO Report Update and Financial Prognosis December 2021; 3. Report on Write-Off Status on Submission of RKAT 2022; 4. Check Point Jaminah; 5. Summary of PMK No. 183 of 2021 concerning LPEI Special Assignments; 6. Update on PMN RPP for LPEI; 7. Others a. KPI achievement in 2021. b. Corporate Agenda.	1. Suminto 2. Dikdik Yustandi 3. Maqin Norhadi 4. Agus Windiarto 5. Chesna F Anwar 6. Anwar Harsono 7. Wahyu Wibowo 8. Titiek Setyowati 9. Agung Waluyo 10. Djoko Retnadi

**RAPAT DEWAN DIREKTUR**  
Board of Directors Meetings

No	No Risalah Minutes No	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
53	MR.0053/ OTB/12/2021	30 Dec 2021	1. Prognosa Keuangan Desember 2021; 2. Arahan dan Catatan Dirjen KN pada Rapat Pengesahan RKAT 2022; 3. Lain-Lain a. Corporate Agenda; b. Townhall Meeting 2022 dan Peresmian IEB Prima Aset.  1. Financial Prognosis December 2021; 2. Directions and Notes of the Director General of KN at the 2022 RKAT Ratification Meeting; 3. Others a. Corporate Agenda; b. Townhall Meeting 2022 and Inauguration of IEB Prima Asset.	1. Daniel James Rompas 2. Dikdik Yustandi 3. Maqin Norhadi 4. Agus Windiarto 5. Henry Sihotang 6. Chesna F Anwar 7. Salomi Adriana 8. Paul S Hasjim 9. Anwar Harsono 10. Wahyu Wibowo 11. Titiek Setyowati 12. Agung Waluyo 13. Djoko Retnadi



# INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Information on Ultimate and Controlling Shareholders

Lembaga Penjamin Ekspor Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara di mana 100% (seratus persen) saham dimiliki oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, yang diwakili oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

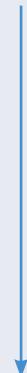
Indonesia Eximbank is a State-Owned Enterprise in which all Company shares are 100% fully owned by the Government of the Republic of Indonesia, which represented by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.



**Pemerintah Negara Republik Indonesia**

Government of the Republic of Indonesia

100%



**Indonesia Eximbank**  
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)



# KEBIJAKAN MENGENAI KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN DIREKTUR, DIREKTUR EKSEKUTIF, DAN DIREKTUR PELAKSANA

Policy on The Diversity Of The Compositionof The Board of Directors, Executive Director, and Managing Director

Keberagaman komposisi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana LPEI diatur dalam Pasal 25 UU No. 2/2009.

Anggota Dewan Direktur berjumlah paling banyak 10 orang dan paling sedikit 4 orang. Komposisi Dewan Direktur LPEI terdiri dari unsur *Ex-Officio* instansi atau lembaga dan unsur profesional.

Komposisi anggota Dewan Direktur dari unsur *Ex-Officio* instansi atau lembaga yaitu 3 orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi fiskal, 1 orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perdagangan, 1 orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perindustrian, 1 orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi pertanian.

Komposisi anggota Dewan Direktur dari unsur profesional yaitu paling banyak 3 orang yang berasal dari luar LPEI dan 1 orang dari dalam LPEI. PMK Nomor 58/PMK.06/2020 mengatur bahwa calon anggota Dewan Direktur wajib memiliki paling sedikit keahlian dan pengalaman di salah satu bidang yang diperlukan oleh LPEI, yaitu keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, penjaminan, asuransi, perdagangan internasional dan/ atau hukum.

The diversity of the composition of the Company's Board of Directors, Executive Directors and Managing Directors is regulated in Article 25 of Law No 2/2009.

The total number of members of the Board of Directors is 10 people and at least 4 people. The composition of the Company's Board of Directors consists of Ex-Officio elements from agencies or institutions and professional elements.

The composition of the members of the Board of Directors is from the Ex-Officio agency or institution, namely 3 officials from an agency or institution in charge of fiscal affairs, 1 official from an agency or institution in charge of commerce, 1 official from an agency or institution in charge of industry, 1 official from the agency or institution in agriculture.

The composition of members of the Board of Directors from the professional element is a maximum of 3 people from external of the Company and 1 person from internal. PMK No. 58/PMK.06/2020 stipulates that prospective member of the Board of Directors must have at least the expertise and experience in one of the fields required by the Company, namely expertise and experience in economics, finance, banking, underwriting, insurance, international trade and/ or law.

Komposisi Composition	Kebijakan Keberagaman Policy of Diversity
Dewan Direktur Board of Directors	Anggota Dewan Direktur LPEI berjumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari pejabat yang membidangi fiskal, perdagangan, perindustrian, pertanian, dan kalangan profesional. Salah seorang dari anggota Dewan Direktur ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif.  Total members of the Board of Directors of Indonesia Eximbank are the most consisted of 10(ten) members that include the executives in charge of fiscal, trade, industry, agriculture, and professionals. One of members of the Board of Directors is stipulated by the Finance Minister as the Chairman of the Board of Directors and Executive Director.
Direktur Eksekutif Executive Director	Salah seorang dari anggota Dewan Direktur ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif. Dalam melaksanakan kegiatan operasional Direktur Eksekutif dibantu oleh Direktur Pelaksana.  One of members of the Board of Directors is stipulated by the Finance Minister as the Chairman of the Board of Directors and Executive Director. In implementing operational activity, the Executive Director is assisted by the Managing Directors.
Direktur Pelaksana Managing Director	Direktur Pelaksana LPEI paling banyak berjumlah 5 (lima) orang dan paling banyak 4 (empat) orang berasal dari dalam Lembaga.  Total members of the Managing Directors of Indonesia Eximbank are the most consisted of 5(five) members and at the most 4 (four) members from internal Institution.



# HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN DIREKTUR DENGAN ANGGOTA DEWAN DIREKTUR LAIN DAN DIREKTUR PELAKSANA

Financial Relationships and Family Relationship of The Board of Directors Members With Other Members of The Board of Directors and The Managing Directors

Berdasarkan keadaan saat ini yang ada di LPEI bahwa Dewan Direktur dengan Anggota Dewan Direktur lain dan Direktur Pelaksana tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan anggota Dewan Direktur, dan Direktur Pelaksana.

Based on the current situation in the Company, the Board of Directors with other Members of the Board of Directors and the Managing Director do not have financial and family relations up to the second degree or in-laws with members of the Board of Directors and the Managing Director.

Nama Name	Hubungan Afiliasi dengan:   Affiliation with:							
	Dewan Direktur Board of Directors		Direktur Eksekutif Executive Directors		Direktur Pelaksana Managing Directors		Pemegang Saham Utama Ultimate Shareholders	
	Ya   Yes	Tidak   No	Ya   Yes	Tidak   No	Ya   Yes	Tidak   No	Ya   Yes	Tidak   No
D. James Rompas Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director	✓		✓		✓		✓	
Suminto Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	✓		✓		✓		✓	
Kasan Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	✓		✓		✓		✓	
Arus Gunawan Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	✓		✓		✓		✓	
Felia Salim Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	✓		✓		✓		✓	
Rijani Tirtoso Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	✓		✓		✓		✓	
Dikdik Yustandi Direktur Pelaksana I Managing Director I	✓		✓		✓		✓	
Djoko Retnadi Direktur Pelaksana II Managing Director II	✓		✓		✓		✓	
Agus Windiarto Direktur Pelaksana III Managing Director III	✓		✓		✓		✓	
Henry Sihotang Direktur Pelaksana IV Managing Director IV	✓		✓		✓		✓	
Chesna F. Anwar Direktur Pelaksana V Managing Director V	✓		✓		✓		✓	



# PENILAIAN PENERAPAN GCG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF- DIREKTUR PELAKSANA

GCG Assessment For The Board of Directors and Executive

Secara umum dasar kebijakan penilaian kinerja dari Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif - Direktur Pelaksana mengacu kepada mandat LPEI sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 2 tahun 2009. Setiap tahun, Menteri Keuangan menetapkan Kontrak Manajemen yang memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut target yang hendak dicapai oleh Dewan Direktur termasuk Direktur Eksekutif- Direktur Pelaksana.

## Pelaksanaan Penilaian

Penilaian kinerja Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif dilakukan oleh Menteri Keuangan pada Rapat Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).

## Proses Pelaksanaan Asesmen Kinerja

Atas capaian kinerja pada tahun berjalan, Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana diberikan tantiem. Hal ini sesuai Pasal 21 UU No. 2/2009 surplus yang diperoleh LPEI dalam kurun waktu 1(satu) tahun kegiatan digunakan untuk:

- Cadangan umum;
- Cadangan tujuan;
- Jasa produksi dan tantiem; dan
- Bagian laba pemerintah.

Ketentuan mengenai penetapan remunerasi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana berupa pemberian tantiem dilakukan berdasarkan:

- Ketentuan besaran gaji pokok Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan KMK No. 621/KMK.06/2018.
- Sedangkan ketentuan penetapan tunjangan dan penghasilan lainnya diatur melalui KMK No. 322/KMK.06/2018 tentang Penetapan Penghasilan dan Tunjangan Lainnya Bagi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI.

Penetapan Jasa Produksi dan Tantiem dilakukan dengan mempertimbangkan:

- Surplus;
- Capaian Indikator Kinerja Utama;
- Pelaksanaan penugasan Pemerintah; dan
- Faktor-faktor lain yang relevan

## Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana

Penilaian Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang meliputi:

In general, the basis of performance assessment policy for the Board of Directors and Executive Director - Managing Director refers to the Company mandate as stated in Law No. 2 of 2009. The Minister of Finance sets out the Management Contract every year that contains the Key Performance Indicators (KPI) and targets to be achieved by the Board of Directors and the Executive Director-Managing Director.

## Assessments

The Minister of Finance carries out the performance assessment of the Board of Directors and Executive Directors at the Annual Work Plan and Budget (RKAT) Ratification Meeting.

## Performance Assessment Procedures

The tantiem is granted to the Board of Directors, Executive Director and Managing Directors for the achievements in the current year, which is based on the article 21 Law No. 2/2009 that the surplus achieved by Indonesia Eximbank in 1(one)year can be allocated for:

- General reserves;
- Specific reserves;
- Performance bonus and tantiem; and
- Government profit share.

The determination of tantiem for the Board of Directors, Executive Director, and Managing Directors remuneration refers to:

- Basic salary for the Board of Directors and Managing Director is stipulated through Minister of Finance Decree KMK No. 621/KMK.06/2018.
- While the stipulations on benefits and other income are regulated through KMK No. 322/KMK.06/2018 concerning the Determination of Income and Other Benefits for the Board of Directors and Managing Director of LPEI.

The determination of Performance Bonus and Tantiem is considered by:

- Surplus;
- Key Performance Indicators Achievement;
- National interest account implementation; and
- Other relevant factors.

## Performance Assessment Criteria of the Board of Directors, Executive Director, and Managing Directors

The performance assessment of the Board of Directors, Executive Director, and Managing Directors uses the KPI which includes:

**PENILAIAN PENERAPAN GCG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF- DIREKTUR PELAKSANA**  
GCG Assessment For The Board of Directors and Executive

<b>SASARAN STRATEGIS</b> STRATEGIC TARGET	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b> MAIN PERFORMANCE INDICATORS		<b>Bobot (%)</b> Weight (%)
	<b>Ukuran</b> Measurement	<b>Target</b>	
<b>PERSPEKTIF MANDAT DAN KEUANGAN</b> MANDATE AND FINANCIAL PERSPECTIVE			37,5
1. Penugasan Umum   General Assignment	1. Penyaluran Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) berupa   Distribution of National Export Financing (PEN) in the form of:  a. Outstanding Pembiayaan   Outstanding Financing b. Outstanding Penjaminan   Outstanding Guarantee c. Outstanding Asuransi   Insurance Outstanding d. Volume Trade Finance e. Pertumbuhan Pembiayaan UMKM & UMBe   UMKM & UMBe Financing Growth	100%  Rp94.276 Miliar Rp94,276 Billion  Rp10.810 Miliar Rp10,810 Billion  Rp9.222 Miliar Rp9,222 Billion  Rp8.000 Miliar Rp8,000 Billion  Rp1.431 Miliar Rp1,431 Billion	15,0  5,0  2,5  2,5  2,5
2. Penugasan Khusus   Special Assignment	2. Efektivitas Pelaksanaan Penugasan Khusus berupa   The effectiveness of the implementation of special assignments in the form of:  a. New Disbursement Penugasan Khusus (NIA)   New Special Assignment Disbursement (NIA) b. Jumlah proposal pelaku UKM yang disetujui   Number of approved SME proposals c. Kajian Developmental Impact atas program PKE   Developmental Impact Study on the PKE program	100%  Rp2.500 Miliar Rp2,500 Billion  30  2	7,5  2,5  2,5
3. Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional   Implementation of National Economic Recovery	3. Outstanding PKE Penjaminan Korporasi PEN   Outstanding PKE Corporate Guarantee PEN	Rp66.000 Miliar Rp66,000 Billion	5,0
4. Perbaikan Kinerja Keuangan yang berkelanjutan   Continuous Improvement of Financial Performance	4. Tercapainya perbaikan kinerja keuangan Lembaga yang sehat dihasilkan dari Net Profit (NP)   Achievement of the improvements in financial performance of healthy institutions resulting from Net Profit (NP)	Rp554 Miliar Rp554 Billion	10,0
<b>PERSPEKTIF STAKEHOLDER DAN CUSTOMER</b> STAKEHOLDER AND CUSTOMER PERSPECTIVE			10,0
5. Building up new UMKM & UMBe Model	5. Peningkatan peran LPEI dalam mengembangkan UMKM & UMBe melalui   Increasing the role of LPEI in developing UMKM & UMBe through:  a. Penciptaan eksportir baru (tidak termasuk eksportir Desa Devisa)   Creation of new exporters(excluding Foreign Exchange Village exporters) b. Peningkatan jumlah Desa Devisa   Increase in the number of Foreign Exchange Villages	100%  15  3	5,0  2,5  2,5

**PENILAIAN PENERAPAN GCG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF- DIREKTUR PELAKSANA**

GCG Assessment For The Board of Directors and Executive

<b>SASARAN STRATEGIS</b> STRATEGIC TARGET	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b> MAIN PERFORMANCE INDICATORS		<b>Bobot (%)</b> Weight (%)
	<b>Ukuran</b> Measurement	<b>Target</b>	
6. Daya Ungkit kepada eksport Nasional   Leverage to National Exports	6. Peningkatan Daya Ungkit kepada Ekspor Nasional   Increasing Leverage to National Exports	100%	5,0
	a. <i>Developmental impact</i> Pembiayaan LPEI terhadap Ekspor barang   Developmental impact of LPEI Financing on goods exports	3,55 x	2,5
	b. Kontribusi pembiayaan LPEI terhadap Ekspor Barang Indonesia   LPEI financing contribution to Indonesian Goods Exports	13,5%	2,5
<b>PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL</b> INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE			
7. Perbaikan Kualitas Aset   Asset Quality Improvement	7. Terlaksananya perbaikan Kualitas Aset Lembaga berupa   Implemented improvements to the Quality of Institutional Assets in the form of:	100%	25,0
	a. Jumlah maksimal Non Performing Loan (NPL)   Maximum amount of Non Performing Loans (NPL)	Rp18.158 Miliar Rp18.158 Billion	7,5
	b. Rasio NPL Netto   Net NPL Ratio	9,50%	10,0
	a. Pelaksanaan strategi penurunan NPL   Implementation of the NPL reduction strategy	100%	7,5
	i) Penghapusan/write off pembiayaan bermasalah   Elimination/write off of non-performing financing	Rp1.000 Miliar Rp1,000 Billion	2,5
	ii) Recovery, Collection & AYDA	Rp1.000 Miliar Rp1,000 Billion	2,5
	iii) Design sistem & organisasi Early Warning System   Early Warning System & Organization Design	100%	2,5
8. Penyempurnaan Risk Awareness/GRC/ 3LD   Improved Risk Awareness/GRC/3LD	8. Terlaksananya Risk Awareness lembaga melalui   Implementation of institutional Risk Awareness through:	100%	7,5
	a. Hasil penilaian pelaksanaan tata kelola lembaga sebesar 85%   The results of the assessment of the implementation of institutional governance are 85%	100%	2,5
	b. Penyempurnaan Manual/SOP terkait pelaksanaan Penugasan Khusus Ekspor   Completion of Manuals/SOPs related to the implementation of Export Special Assignments	100%	5,0
9. Pemenuhan tindak lanjut temuan audit   Fulfillment of follow-up audit findings	9. Pemenuhan tindak lanjut temuan audit eksternal dan internal   Fulfillment of follow-up on external and internal audit findings	100%	5,0

**PENILAIAN PENERAPAN GCG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF- DIREKTUR PELAKSANA**  
GCG Assessment For The Board of Directors and Executive

<b>SASARAN STRATEGIS</b> STRATEGIC TARGET	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b> MAIN PERFORMANCE INDICATORS			<b>Bobot (%)</b> Weight (%)
	<b>Ukuran</b> Measurement	<b>Target</b>		
10. Penguatan Management Information System (MIS) dan Teknologi   Strengthening Management Information System (MIS) and Technology	10. <i>Implementasi Management Information System (MIS) dan teknologi</i> Implementation of Management Information System (MIS) and technology	100%	5,0	
<b>PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN</b> LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE				10,0
11. Penguatan Struktur Organisasi Lembaga dan <i>Special Purpose Vehicle</i> (SPV)   Strengthening Institutional Organizational Structure and Special Purpose Vehicle (SPV)	11. Penataan Struktur Organisasi dan SPV sesuai kebutuhan Lembaga   Structuring the Organizational Structure and SPV according to the needs of the Institution	100%	5,0	
12. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten yang berkinerja tinggi   Competent Human Resources (HR) with high performance	12. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM   Capacity building and HR capability	100%	2,5	
13. Penguatan Budaya Lembaga dan <i>Performance Management</i>   Strengthening The Institutional Culture and Performance Management	13. Penguatan budaya Lembaga "TRUST" dan Integrated IKU   Strengthening the culture of "TRUST" and Integrated IKU Lembaga Institutions	100%	2,5	

**Pelaksanaan Asesmen**

Pelaksanaan Asesmen kinerja Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana dilakukan dalam Rapat Pengesahan oleh Menteri Keuangan.

**Assessment**

The Minister of Finance carries out the performance assessment of the Board of Directors, Executive Director, and Managing Directors in the Ratification Meeting.

# REMUNERASI DEWAN DIREKTUR, DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

Remuneration Policy of The Board of Directors,  
Executive Director & Managing Directors

## Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 2/2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Pasal 26 ayat (3) yang menyatakan: gaji, penghasilan, dan tunjangan lainnya Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Kebijakan besaran gaji pokok Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana diatur melalui KMK No. 621/KMK.06/2018 tentang Penetapan Gaji Pokok Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI (ketentuan besaran gaji) dan KMK No. 322/KMK.06/2018 tentang Penetapan Penghasilan dan Tunjangan Lainnya bagi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI (ketentuan tunjangan dan penghasilan lainnya).

Sebagaimana telah uraikan pada bagian Direktur Eksekutif pada buku laporan tahunan ini, bahwa Direktur Eksekutif LPEI merupakan salah satu anggota Dewan Direktur yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Ketua Dewan Direktur. Dengan demikian prosedur penetapan remunerasi Direktur Eksekutif sama dengan penetapan remunerasi Dewan Direktur.

## Prosedur Penetapan Remunerasi

Usulan remunerasi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite Remunerasi dan Nominasi berkoordinasi dengan unit kerja Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Organisasi untuk melakukan benchmarking terhadap penghasilan *Top Management* baik dari industri perbankan, maupun lembaga keuangan non-bank.

Hasil tersebut akan disampaikan kepada Dewan Direktur melalui Komite Remunerasi dan Nominasi. Selanjutnya, Dewan Direktur akan diajukan kepada Menteri Keuangan RI.

Prosedur penetapan Remunerasi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana, sebagai berikut:

## Remuneration Policy

Remuneration policy refers to Law No. 2/2009 on Indonesian Export Financing Agency, Article 26 paragraph (3) stating that the Finance Minister of the Republic of Indonesia stipulates the salary, income, and other benefits of the Board of Directors and Managing Directors.

The policy on basic salary amount for the Board of Directors and Managing Directors refers to KMK No. 621/KMK.06/2018 on the Basic Salary of the Board of Directors and Managing Director of Indonesia Eximbank (stipulations on salary amounts) and KMK No.322/KMK.06/2018 on Income and Other Benefits for the Board of Directors and Managing Director of Indonesia Eximbank (stipulations on benefits and other income).

As elaborated in the Executive Director section in this annual report, the Executive Director of Indonesia Eximbank is one of members of the Board of Directors assigned by the Finance Minister as Chairman of the Board of Directors. As such, the procedure of remuneration for the Executive Director is the same as for the Board of Directors

## Remuneration Procedures

The remuneration for the Board of Directors and Managing Directors is proposed by the Remuneration and Nomination Committee coordinating with Human Resources and General Affairs Unit, to carry out benchmarking for the Top Managements income either from banking or non-banking financial institution.

The result will be provided to the Board of Directors through the Remuneration and Nomination Committee, and further the Board of Directors will propose to the Minister of Finance.

The remuneration procedures for the Board of Directors and Managing Directors, are as follows:

## REMUNERASI DEWAN DIREKTUR, DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

Remuneration Policy of The Board of Directors, Executive Director & Managing Directors

### Komite Remunerasi & Nominasi Remuneration & Nomination Committee

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur

Provide recommendation for the Board of Directors

### Dewan Direktur Board of Directors

Mengajukan usulan remunerasi kepada Menteri Keuangan

Submit the proposal of Remuneration to the Minister of Finance

### Komite Remunerasi & Nominasi Minister of Finance

- Melakukan evaluasi atas usulan remunerasi
- Melakukan proses persetujuan
- Menerbitkan putusan melalui Keputusan Menteri Keuangan
- Evaluate the proposal of remuneration
- Perform the approval process
- Issued the decision through the Minister of Finance Decision

### Struktur Remunerasi dan Fasilitas

Struktur remunerasi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek dan panjang atau pasca kerja setiap anggota Dewan Direktur, maupun Direktur Pelaksana, berdasarkan KMK No. 621/KMK.06/2018 tentang Penetapan Gaji Pokok Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI (ketentuan besaran gaji) dan KMK No. 322/KMK.06/2018 tentang Penetapan Penghasilan dan Tunjangan Lainnya bagi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI (ketentuan tunjangan dan penghasilan lainnya) adalah sebagai berikut:

### Remuneration Structure and Facility

The remuneration structure of the Board of Directors and Managing Directors includes the types and amount of short term and long term incentives or post tenure of each member of the Board of Directors or Managing Directors based on KMK No. 621/KMK.06/2018 concerning the Basic Salary of the Board of Directors and Managing Director of Indonesia Eximbank (stipulations on salary amounts) and KMK No. 322/KMK.06/2018 on Income and Other Benefits for the Board of Directors and Managing Director of Indonesia Eximbank (stipulations on benefits and other income) are as follows

**REMUNERASI DEWAN DIREKTUR,  
DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA**

Remuneration Policy of The Board of Directors, Executive Director & Managing Directors

**Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Direktur Eksekutif Merangkap Ketua Dewan Direktur  
Remuneration Structure and other Facilities for Executive Director and Chairman of the Board of Director**

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Keterangan Description
1	Gaji/Honorarium   Salary	Direktur Eksekutif merangkap Ketua Dewan Direktur 100% Executive Director concurrently as Chairman of the Board of Directors 100%
2	Tunjangan   Allowance	
	Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance	Maksimal 1x gaji Maximum 1x salary
	Santunan Purna jabatan Compensation after Tenure	Skema asuransi dengan premi maksimal 25% dari gaji/honorarium Insurance scheme with maximum premium of 25% of salary/honorarium
	Tunjangan Komunikasi Communication Allowance	Diberikan sebesar biaya pemakaian (at cost) Provided at cost
	Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Diberikan <i>lumpsum</i> , maksimal 30% dari gaji per bulan. Diberikan apabila tidak diberikan fasilitas rumah jabatan Provided lumpsum, maximum 30% of salary per month. Provided if there is no housing allowance
3	Fasilitas   Facility	
	Kendaraan Dinas Transportation Allowance	Disediakan 1(satu)unit kendaraan, volume maksimal 2.500 cc dengan skema <i>operational lease</i> Provided 1(one)unit of vehicle, maximum volume 2500 cc with operational lease scheme
	Kesehatan Health	Diberikan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan dengan skema asuransi, penggantian kacamata, pemeriksaan kesehatan untuk pasangan dan maksimal 3 anak Provided in the form of reimbursement of medical expenses with insurance schemes, optician replacement, medical examination for couples and a maximum of 3 children
	Perkumpulan Profesi Professional Club	Maksimal 3(tiga) perkumpulan Maximum of 3(three) associations
	Bantuan Hukum Legal Aid	Dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan LPEI In the event of any acts/actions for and on behalf of his/her occupation relating to the intent and purpose of Indonesia Eximbank activities
	Club Membership Club Membership	Maksimal pada 2(dua) club Maximum at 2(two) clubs
	Biaya Representasi Representation Cost Facility	Diberikan dalam bentuk <i>Corporate Credit Card</i> Provided in the form of Corporate Credit Card
4	Ketentuan Perjalanan Dinas Business Trip Policy	Diberikan fasilitas uang saku, transportasi dan akomodasi untuk perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri Provided pocket money, transportation and accommodation facilities for domestic and overseas official travel
5	Pajak PPh atas Gaji/Honorarium dan Tunjangan Income Tax on Salary/Honorarium and Allowances	Pajak Penghasilan (PPh 21) atas Gaji dan Tunjangan yang diterima oleh Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana dan Anggota Dewan Direktur ditanggung seluruhnya oleh LPEI Income Tax (PPh 21) on Salaries and Benefits received by the Executive Director, Managing Director and Member of the Board of Directors are borne entirely by Indonesia Eximbank
6	Tantiem	Ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Stipulated through Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia

## REMUNERASI DEWAN DIREKTUR, DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

Remuneration Policy of The Board of Directors, Executive Director & Managing Directors

### **Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Dewan Direktur** Remuneration Structure and Facilities for the Board of Directors

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Keterangan Description
1	Gaji/Honorarium   Salary	Direktur Eksekutif merangkap Ketua Dewan Direktur 50% Executive Director concurrently as Chairman of the Board of Directors 50%
2	Tunjangan   Allowance	
	Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance	Maksimal 1x gaji Maximum 1x salary
	Santunan Purna jabatan Compensation after Tenure	Skema asuransi dengan premi maksimal 25% dari gaji/honorarium Insurance scheme with maximum premium of 25% of salary/honorarium
	Tunjangan Komunikasi Communication Allowance	Diberikan sebesar biaya pemakaian (at cost) Provided at cost
	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	20% dari honorarium per bulan 20% of honorarium per month
3	Fasilitas   Facility	
	Kesehatan Health	Diberikan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan dengan skema asuransi, penggantian kacamata, pemeriksaan indakan untuk pasangan dan maksimal 3 anak Provided in the form of reimbursement of medical expenses with insurance schemes, optician replacement, medical examination for couples and a maximum of 3 children
	Perkumpulan Profesi Professional Club	Maksimal 3(tiga) perkumpulan Maximum of 3(three) associations
	Bantuan Hukum Legal Aid	Dalam hal terjadi indakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan LPEI In the event of any acts/actions for and on behalf of his/her occupation relating to the intent and purpose of Indonesia Eximbank activities
4	Ketentuan Perjalanan Dinas Business Trip Policy	Diberikan fasilitas uang saku, transportasi dan akomodasi untuk perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri Provided pocket money, transportation and accommodation facilities for domestic and overseas official travel
5	Pajak PPh atas Gaji/Honorarium dan Tunjangan Income Tax on Salary/Honorarium and Allowances	Pajak Penghasilan (PPh 21) atas Gaji dan Tunjangan yang diterima oleh Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana dan Anggota Dewan Direktur ditanggung seluruhnya oleh LPEI Income Tax (PPh 21) on Salaries and Benefits received by the Executive Director, Managing Director and Member of the Board of Directors are borne entirely by Indonesia Eximbank
6	Tantiem	Ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Stipulated through Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia

**REMUNERASI DEWAN DIREKTUR,  
DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA**

Remuneration Policy of The Board of Directors, Executive Director & Managing Directors

**Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Direktur Pelaksana**

Remuneration Structure and Facilities for Managing Directors

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Keterangan Description
1	Gaji/Honorarium   Salary	Direktur Eksekutif merangkap Ketua Dewan Direktur 90% Executive Director concurrently as Chairman of the Board of Directors 90%
2	Tunjangan   Allowance	
	Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance	Maksimal 1x gaji Maximum 1x salary
	Santunan Purna jabatan Compensation after Tenure	Skema asuransi dengan premi maksimal 25% dari gaji/honorarium Insurance scheme with maximum premium of 25% of salary/honorarium
	Tunjangan Komunikasi Communication Allowance	Diberikan sebesar biaya pemakaian ( <i>at cost</i> ) Provided at cost
	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	20% dari honorarium per bulan 20% of honorarium per month
3	Fasilitas   Facility	
	Kendaraan Dinas Transportation Allowance	Disediakan 1(satu)unit kendaraan, volume maksimal 2.500 cc dengan skema <i>operational lease</i> Provided 1(one)unit of vehicle, maximum volume 2500 cc with operational lease scheme
	Kesehatan Health	Diberikan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan dengan skema asuransi, penggantian kacamata, pemeriksaan kesehatan untuk pasangan dan maksimal 3 anak Provided in the form of reimbursement of medical expenses with insurance schemes, optician replacement, medical examination for couples and a maximum of 3 children
	Bantuan Hukum Legal Aid	Dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan LPEI In the event of any acts/actions for and on behalf of his/her occupation relating to the intent and purpose of Indonesia Eximbank activities
4	Ketentuan Perjalanan Dinas Business Trip Policy	Diberikan fasilitas uang saku, transportasi dan akomodasi untuk perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri Provided pocket money, transportation and accommodation facilities for domestic and overseas official travel
5	Pajak PPh atas Gaji/Honorarium dan Tunjangan Income Tax on Salary/Honorarium and Allowances	Pajak Penghasilan (PPh 21) atas Gaji dan Tunjangan yang diterima oleh Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana dan Anggota Dewan Direktur ditanggung seluruhnya oleh LPEI Income Tax (PPh 21) on Salaries and Benefits received by the Executive Director, Managing Director and Member of the Board of Directors are borne entirely by Indonesia Eximbank
6	Tantiem	Ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Stipulated through Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia

**REMUNERASI DEWAN DIREKTUR,  
DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA**

Remuneration Policy of The Board of Directors, Executive Director & Managing Directors

**Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Dewan Direktur**

Remuneration Structure and Facilities for the Board of Directors

<b>Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya</b> Types of Remuneration and Other Facilities	<b>Jumlah yang Diterima Direktur Eksekutif &amp; Direktur Pelaksana dalam 1 tahun</b> Amount Received by Executive Director & Managing Director in 1 year	
	<b>Orang   Person</b>	<b>Jumlah   Amount</b>
Gaji dan Tunjangan Salaries and Allowances	6	Rp20.988.969.891
Tantiem	6	Rp4.133.745.168
Fasilitas lain dalam bentuk natura Other facilities in kind	6	Rp3.056.567.277
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>Rp28.179.282.336</b>

**Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Anggota Dewan Direktur**

Remuneration Structure and Facilities for the Board of Directors

<b>Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya</b> Types of Remuneration and Other Facilities	<b>Jumlah yang Diterima Direktur Eksekutif &amp; Direktur Pelaksana dalam 1 tahun</b> Amount Received by Executive Director & Managing Director in 1 year	
	<b>Orang   Person</b>	<b>Jumlah   Amount</b>
Gaji dan Tunjangan Salaries and Allowances	4	Rp10.177.744.514
Tantiem	4	Rp1.563.044.149
Fasilitas lain dalam bentuk natura Other facilities in kind	4	Rp1.637.613.300
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>Rp12.397.770.541</b>

**Kelompok Jumlah Remunerasi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana**

Group of Remuneration for Executive Director and Managing Directors

<b>Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya</b>	<b>Jumlah Orang</b> Total Personnel	<b>Type of Remuneration and Other Facilities</b>
Di atas Rp2 miliar	6	Above Rp2 billion
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar	0	Between Rp1 billion to Rp2 billion
Di atas Rp500 juta s/d Rp1miliar	0	Between Rp500 million to Rp1 billion
Rp500 juta ke bawah	0	Below Rp500 million

**Kelompok Jumlah Remunerasi Dewan Direktur**

Group of Remuneration for Members of the Board of Directors

<b>Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya</b>	<b>Jumlah Orang</b> Total Personnel	<b>Type of Remuneration and Other Facilities</b>
Di atas Rp2 miliar	3	Above Rp2 billion
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar	1	Between Rp1 billion to Rp2 billion
Di atas Rp500 juta s/d Rp1miliar	0	Between Rp500 million to Rp1 billion
Rp500 juta ke bawah	1	Below Rp500 million

**REMUNERASI DEWAN DIREKTUR,  
DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA**

Remuneration Policy of The Board of Directors, Executive Director & Managing Directors

**Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah**

LPEI senantiasa memperhatikan rasio gaji tertinggi dan terendah di lingkungan Lembaga, sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Pada tahun 2020, rasio ini meliputi :

**Highest and Lowest Salary Ratio**

Indonesia Eximbank monitors the highest and lowest salary ratio within the Company as part of GCG practices. The ratio in 2020 is as follows:

No.	Rasio Gaji Ratio of Salary	Kali   Times	
		Gaji Pokok   Basic Salary	Take Home Pay   (THP)
1.	Gaji pegawai terendah dibanding tertinggi Ratio of highest to lowest employee salary	21,2	15,76
2.	Gaji Direktur Pelaksana terendah dibanding tertinggi Ratio of highest to lowest Managing Directors Salary	1	1
3.	Gaji Dewan Direktur terendah dibanding tertinggi Ratio of highest to lowest the Board of Directors Salary	1	1
4.	Gaji Direktur Pelaksana terhadap pegawai tertinggi Highest salary ratio for Managing Directors vs employee	1,21	1,21

**Indikator Kinerja Direktur Eksekutif & Direktur Pelaksana untuk Penetapan Remunerasi**

Penetapan Indikator Kinerja Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana dilakukan di awal tahun melalui mekanisme rapat pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang dituangkan dalam Kontrak manajemen antara Dewan Direktur dengan Menteri Keuangan c.q. Direktur jenderal Kekayaan Negara. Selanjutnya kontrak manajemen tersebut diturunkan (*Cascading*) antara Direktur Pelaksana dengan Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif.

Penilaian Kinerja Direksi tercermin dari realisasi atas capaian indikator kinerja pada kontrak manajemen yang merupakan bagian dari target-target yang terdapat pada RKAT antara lain sebagai berikut

**Executive Director & Managing Directors Performance Indicators for Remuneration Stipulation**

The performance indicators of the Executive Director and Managing Directors are stipulated in the beginning of the year through the ratification meeting of Annual Work & Budget Plan as stated in the management Contract between the Board of Directors and Minister of Finance c.q. Director General of State Treasury. Furthermore, the management contract cascades between the Managing Directors and Chairman of the Board of Directors concurrently as Executive Director.

The Director's performance assessment is reflected from the realization of performance indicators achievements in the management contract which is part of the targets set forth in the Annual Work & Budget Plan, among others are:

**REMUNERASI DEWAN DIREKTUR,  
DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA**

Remuneration Policy of The Board of Directors, Executive Director & Managing Directors

**Capaian Indikator Kinerja Utama Lembaga 2021**

2021 Key Performance Indicators Achievement

<b>Sasaran Strategis</b> Strategic Targets		<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b> Key Performance Indicators	<b>Bobot</b> Weights (%)	<b>Realisasi</b> Realization	<b>Target</b> Targets	<b>Capaian</b> Achievements
Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicators				40,0%			95,3%
IEB-1	Pelaksanaan kegiatan menghasilkan dan/ atau menghemat devisa serta peningkatan kapasitas usaha	1	Penyaluran Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) berupa Outstanding Pembiayaan, Outstanding Penjaminan, Outstanding Asuransi dan Volume Trade Finance  Disbursement of National Export Financing (NEF) such as Outstanding Financing, Outstanding Guarantee, Outstanding Insurance and Trade Finance Volume	7,5%	63%	100%	63,5%
		a.	<i>Outstanding</i> Pembiayaan Outstanding Financing	90.408	96.065	94,1%	
		b.	<i>Outstanding</i> Penjaminan Outstanding Guarantee	9.909	40.073	24,7%	
		c.	<i>Outstanding</i> Asuransi Outstanding Insurance	8.109	8.356	97,0%	
		d.	<i>Volume Trade Finance</i>	6.107	16.046	38,1%	
		2	Peningkatan Penjaminan Kredit Bank (Bank Guarantee)  Bank Loan Guarantee Increase	5,0%	1.553	3.000	51,8%
		3	Reprofiling Pembiayaan dengan fokus pada segmen UKME, UMKM dan UMBE  Financing Reprofiling with a focus on the SME, MSME and UMBE segments	5,0%	15,64%	16,13%	97,0%
		4	Jumlah pelaku usaha segmen mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang melakukan ekspor perdana di kawasan Indonesia Timur  Number of micro, small, medium enterprises and cooperative segments that carry out initial exports in the Eastern Indonesia region	2,5%	4	3	120,0%

**REMUNERASI DEWAN DIREKTUR,  
DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA**

Remuneration Policy of The Board of Directors, Executive Director & Managing Directors

<b>Sasaran Strategis</b> Strategic Targets		No	<b>Indikator Kinerja Utama</b> Key Performance Indicators	Bobot Weights (%)	Realisasi Realization	Target Targets	Capaian Achievements
IEB-2	Optimalisasi pelaksanaan Penugasan Khusus Ekspor (PKE)  Optimization of the National Interest Account (NIA) implementation	5	Percentase Pelaksanaan dan Penyaluran Dana PKE  Percentage of Implementation and Disbursement of NIA Funds	5,0%			98,1%
			a. Jumlah new disbursement di 2020 Total new disbursements in 2020		1.523	2.000	76,2%
			b. Jumlah proposal UKM PKE yang disetujui Number of approved NIA SME proposals		25	10	120,0%
IEB-3	Pengelolaan keuangan yang optimal dan berkelanjutan  Optimal and sustainable financial management	6	Pemenuhan rasio Net Interest Margin (NIM)  Fulfilment of Net Interest Margin (NIM) ratio	7,5%	0,77%	0,56%	120,0%
		7	Cost Efficiency Ratio (CER)	7,5%	61,86%	78,28%	120,0%
Perspektif Stakeholder dan Customer Stakeholders and Customers Perspective				5,0%	120,0%		
IEB-4	Peningkatan peran LPEI sebagai Special Mission Vehicle (SMV)  Increasing the role of Indonesia Eximbank as a Special Mission Vehicle (SMV)	8	Jumlah kontrak atau transaksi baru ekspor yang dihasilkan hari kegiatan Business to Business (B2B) Matchmaking  Number of new export contracts or transactions generated on the day of Business to Business (B2B) Matchmaking	2,5%	13	10	120,0%
		9	Pelaksanaan kegiatan sinergi antar Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan  Implementation of synergy activities between the Ministry of Finance's Special Mission Vehicle (SMV)	2,5%	7	3	120,0%
Perspektif Proses Bisnis Internal Internal Business Process Perspective				45,0%	75,7%		

**REMUNERASI DEWAN DIREKTUR,  
DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA**

Remuneration Policy of The Board of Directors, Executive Director & Managing Directors

<b>Sasaran Strategis</b> Strategic Targets		<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b> Key Performance Indicators	<b>Bobot</b> Weights (%)	<b>Realisasi</b> Realization	<b>Target</b> Targets	<b>Capaian</b> Achievements
IEB-5	Penguatan Manajemen Risiko dan Tata Kelola Lembaga yang baik  Strengthening Risk Management and Good Governance	10	Implementasi Kebijakan Manajemen Risiko bagi kegiatan Bisnis Lembaga (Portfolio Guideline dan Industries Risk Acceptance Criteria)  Implementation of Risk Management Policy for Institutional Business activities(Portfolio Guideline and Industries Risk Acceptance Criteria)	5,0%	100%	100%	100,0%
			<i>Portfolio Guideline</i>		100%	100%	100,0%
			<i>Industries Risk Acceptance Criteria</i>		100%	100%	100,0%
		11	Profil risiko Lembaga dan Framework <i>sui generis</i>  Institution risk profile and <i>sui generis</i> Framework	5,0%	63%	100%	63,3%
		12	Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Lembaga  Results of GCG Assessment of Institution	5,0%	82,45%	85%	97,0%
		13	Penyempurnaan Manual / SOP terkait pelaksanaan PKE  Completion of Manuals / SOPs on NIA implementation	2,5%	33%	100%	33,3%
IEB-6	Penguatan riset untuk mendukung Daya Saing  Strengthening the research to support competitiveness	14	Tersedianya riset untuk mendukung daya saing ekspor dari sisi potensi dan risiko  Availability of research to support export competitiveness in terms of potential and risk	2,5%	4	4	100,0%
IEB-7	Perbaikan Kualitas Pembiayaan  Financing Quality Improvement	15	Rasio Non-Performing Loan (NPL) Netto  Net Non-Performing Loans Ratio(NPL)	15,0%	11,49%	14,01%	118,0%

**REMUNERASI DEWAN DIREKTUR,  
DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA**

Remuneration Policy of The Board of Directors, Executive Director & Managing Directors

<b>Sasaran Strategis</b> Strategic Targets		No	<b>Indikator Kinerja Utama</b> Key Performance Indicators	<b>Bobot</b> Weights (%)	<b>Realisasi</b> Realization	<b>Target</b> Targets	<b>Capaian</b> Achievements
		16	Perbaikan kualitas aset pembiayaan netto  Improvement of net financing asset quality	10,0%	(699)	465	0,0%
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Learning and Growing Perspective				10,0%	107,1%		
IEB-8	Organisasi yang <i>agile</i>  Agile organization	17	Penataan Struktur Organisasi sesuai kebutuhan Lembaga  Structuring the Organizational Structure according to the needs of the Institution	2,5%	120%	100%	120,0%
IEB-9	Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan berkinerja tinggi  Competent and high- performing Human Resources (HR)	18	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM  HR Capability and Capacity Building	2,5%	109%	100%	108,6%
IEB-10	Sistem Manajemen Informasi yang andal  Reliable Information Management System	19	Integrasi Sistem dan Teknologi System and Technology Integration	5,0%	100%	100%	100,0%
<b>Total</b>				<b>100%</b>	<b>88,8%</b>		



# DEWAN PENGAWAS SYARIAH

## Sharia Supervisory Board

Sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tersebut, LPEI wajib menunjuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna membantu Direktur Eksekutif dalam memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam setiap proses pengambilan keputusan.

### Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Sebagaimana tertuang di dalam Piagam Dewan Pengawas (DPS) Syariah LPEI, DPS memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan nasihat dan saran (*advisory*) kepada Direktur Eksekutif serta mengawasi seluruh kegiatan usaha syariah LPEI agar sesuai dengan prinsip Syariah.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS antara lain meliputi:
  - a. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas seluruh kebijakan, pedoman operasional, produk, transaksi dan laporan keuangan syariah yang dikeluarkan LPEI.
  - b. Mengawasi, memberikan masukan dan nasehat atas pengembangan produk syariah baru agar sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.
  - c. Merekomendasikan kepada LPEI untuk mengajukan fatwa kepada DSN-MUI untuk produk syariah baru LPEI yang belum ada fatwanya.
  - d. Melakukan review secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan atas pemenuhan prinsip Syariah terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Syariah LPEI.
  - e. Melakukan pengawasan, pemeriksaan dan assessment kepatuhan syariah di kantor-kantor wilayah LPEI, termasuk melakukan edukasi dan pembinaan kepada staf-staf kanwil dan nasabah-nasabah yang direkomendasikan oleh kantor pusat atau kanwil.
  - f. Menyusun Laporan Hasil Pengawasan DPS kepada Direktur Eksekutif dan DSN-MUI secara semesteran sesuai dengan format yang ditetapkan oleh LPEI. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ini wajib disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.
3. Anggota DPS wajib menyediakan waktu yang cukup bagi LPEI untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Pursuant to Law No. 2/2009, Indonesia Eximbank can conduct Sharia-based business activities. In performing business activities based on Sharia principles, and implementing the principles of GCG, the Sharia Supervisory Board (SSB) shall support the Executive Director.

### Duties and Responsibilities

The Charter of Sharia Supervisory Board (DPS) stated that DPS has the following duties and responsibilities:

1. Provide advisory and recommendations to the Executive Director and supervise the Company's activities to comply with sharia principles.
2. The implementation of SSB's duties and responsibilities includes:
  - a. Assess and ensure compliance with sharia principles for all policies, operational guidelines, products, transactions and Islamic financial reports issued by Indonesia Eximbank.
  - b. Supervise, provide input and advice on the development of new sharia products to comply with the DSN-MUI Fatwa.
  - c. Recommending the Indonesia Eximbank to submit a fatwa to the DSN-MUI for Indonesia Eximbank's new sharia products for which there is no fatwa.
  - d. Conduct periodic reviews at least once in three months on the fulfillment of Sharia principles on the implementation of Indonesia Eximbank Sharia business activities.
  - e. Supervising, inspecting and assessing sharia compliance in Indonesia Eximbank regional offices, including providing education and coaching to regional office staff and customers recommended by the head office or regional offices.
  - f. Prepare DPS Supervisory Report by semester to the Executive Director and DSN-MUI according to the format stipulated by Indonesia Eximbank. The report as referred to in this paragraph must be submitted no later than 2 (two) months after the end of the semester period
3. SSB members shall provide sufficient time for Indonesia Eximbank to carry out their duties and responsibilities optimally.

## DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sharia Supervisory Board

### Keanggotaan

Per 31 Desember 2021, anggota Dewan Pengawas Syariah LPEI adalah sebagai berikut:

Ketua | Chairman : Kanny Hidaya, SE., MA  
Anggota Tetap | Permanent Member : Dr. Yulizar D. Sanrego, MEC

### Membership

As of 31 December 2021, membership of Sharia Supervisory Board is as follows:

## Profil Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Board Member Profile



**Kanny Hidaya, SE., MA**

Ketua Dewan Pengawas Syariah  
Chairman of Sharia Supervisory Board

54 Tahun | Years old  
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian  
Citizenship  
Domicili | Domicile: Jakarta

Tempat / Tanggal Lahir Place / Date of Birth	Jakarta, 8 Juni 1966 Jakarta, 8 June 1966
Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0044/KDE/07/2020 Executive Director Decree No. 0044/KDE/07/2020
Periode Jabatan Position Period	1 Agustus 2020 – 31 Juli 2023 1 August 2020 – 31 July 2023
Pengalaman Kerja Professional Experience	<ul style="list-style-type: none"><li>Assistant Vice President, Asset Management and Product Development</li><li>PT Danareksa (Persero) (Maret 1994 – Oktober 2001)</li><li>Senior Consultant, Financial Information Technology Supervisor, PT Sumarno Pabottingi Management and Business Consulting (Oktober 1990 – Februari 1994)</li><li>Deputy Secretary of Executive Committee of National Sharia Board, Indonesia Council of Ulama (Badan Pelaksana Harian-DSNMUI) (2005 – sekarang)</li><li>Member of Sharia Supervisory Board of PT Bank Mega Syariah (2003 – sekarang)</li><li>Member of Sharia Supervisory Board of PT Bank DKI Syariah, Sharia Unit (2003 – sekarang)</li><li>Member of Sharia Supervisory Board of PT AXA Insurance, Sharia Unit (2009 – sekarang)</li><li>Member of Sharia Supervisory Board of PT bahana Artha Ventura, Sharia Unit (2009 – sekarang)</li><li>Assistant Vice President, Asset Management and Product Development</li><li>PT Danareksa (Persero) (March 1994 – October 2001)</li><li>Senior Consultant, Financial Information Technology Supervisor, PT Sumarno Pabottingi Management and Business Consulting (October 1990 – February 1994)</li><li>Deputy Secretary of Executive Committee of National Sharia Board, Indonesia Council of Ulama (Badan Pelaksana Harian-DSNMUI) (2005 – present)</li><li>Member of Sharia Supervisory Board of PT Bank Mega Syariah (2003 – present)</li><li>Member of Sharia Supervisory Board of PT Bank DKI Syariah, Sharia Unit (2003 – present)</li><li>Member of Sharia Supervisory Board of PT AXA Insurance, Sharia Unit (2009 – present)</li><li>Member of Sharia Supervisory Board of PT bahana Artha Ventura, Sharia Unit (2009 – present)</li><li>Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia (1993)</li><li>Magister Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, tahun 2004</li></ul>
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"><li>Bachelor of Economy, Universitas Indonesia (1993)</li><li>Magister Islamic Economy, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta in 2004</li></ul>

**DEWAN PENGAWAS SYARIAH**  
Sharia Supervisory Board



**Dr. Yulizar D. Sanrego MSc**

Anggota Dewan Pengawas Syariah  
Member of Sharia Supervisory Board

47 Tahun | Years old  
Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian  
Citizenship  
Domisili | Domicile: Jakarta

Tempat / Tanggal Lahir Place / Date of Birth	Bogor, 4 Juli 1973 Bogor, 4 July 1973
Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0044/KDE/07/2020 Executive Director Decree No. 0044/KDE/07/2020
Periode Jabatan Position Period	21 Mei 2013 – sekarang 21 May 2013 – present
Pengalaman Kerja Professional Experience	Kepala Institut Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat STEI Tazkia Head of Research and Community Empowerment Institute of STEI Tazkia
Sertifikasi Certification	Dewan Pengawas Syariah(DPS) - BPRS. DSN-MUI & Bank Indonesia, Jakarta (2010) Sharia Supervisory Board certificate - BPRS. DSN-MUI & Bank Indonesia, Jakarta (2010)
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Ekonomi Islam / Muamalah dari Universitas Djuanda, Indonesia.</li> <li>• Master Ekonomi dan Pembiayaan Islam dari International Islamic University Malaysia</li> <li>• Doktor Ekonomi Islam dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta</li> <li>• Bachelor Degree in Islamic Economy / Muamalah from Universitas Djuanda, Indonesia</li> <li>• Master's Degree in Islamic Economy &amp; Finance from International Islamic University Malaysia</li> <li>• Doctorate degree in Islamic Economy from Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta</li> </ul>

### **Mekanisme Pemberian Nasihat dan Saran serta Pengawasan**

Frekuensi dan cara pemberian nasihat dari DPS dapat dilakukan melalui rapat DPS yang dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:

1. Diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau lebih bilamana dianggap perlu oleh Ketua DPS.
2. Wajib dihadiri oleh seluruh anggota DPS secara fisik paling kurang 12 (dua belas) kali dalam setahun.
3. Pemanggilan Rapat disampaikan oleh Unit Kerja Bisnis Syariah kepada setiap anggota DPS sekurang-kurangnya 5 hari sebelum rapat diadakan.
4. Pemanggilan rapat dimaksud pada butir 3 harus telah mencantumkan agenda, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat diadakan di tempat kedudukan LPEI atau tempat lain yang disetujui DPS dan LPEI.
6. DPS dan/atau LPEI dapat meminta kehadiran pejabat-pejabat tertentu di dalam Rapat DPS untuk memaparkan usulan yang membutuhkan opini dan persetujuan DPS.
7. Rapat DPS dipimpin oleh Ketua DPS.
8. Rapat DPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh 100% dari jumlah anggota DPS yang sedang jabatan.
9. Keputusan Rapat DPS harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. DPS dapat menetapkan keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat DPS, dengan ketentuan semua anggota DPS telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota DPS memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
10. Berita acara opini dan persetujuan DPS harus dibuat oleh Unit Kerja Bisnis Syariah dan diberi nomor registrasi dan tanggal serta ditandatangani oleh Ketua dan anggota DPS.
11. Dalam hal DPS memandang perlu melakukan kajian untuk dapat memberikan opini dan persetujuan atas suatu usulan, wajib dicantumkan di dalam Berita Acara Opini dan persetujuan DPS dan mencantumkan batas penyampaian hasil kajiannya kepada LPEI
12. Dalam hal DPS menilai usulan unit kerja untuk mendapatkan Opini dan Persetujuan DPS tidak sesuai dengan Prinsip Syariah, DPS harus memberikan solusi dan advisory agar usulan unit kerja menjadi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### **Mechanism for Provision of Advice and Supervision**

The frequency and method of SSB advisory can be implemented through SSB meetings held in accordance with the following stipulations:

1. Held at least 1 (one) time in 1 (one) month or more if deemed necessary by SSB Chairman.
2. Shall be attended by all SSB members physically at least 12 (twelve) times a year.
3. Invitation to the Meeting shall be conveyed by the Sharia Business Unit to each DPS member at least 5 days before the meeting is held.
4. Invitation to the meeting referred to in point 3 must include the agenda, date, time and venue of the meeting.
5. Meetings are held at the domicile of Indonesia Eximbank or other places approved by SSB and the Company.
6. SSB and/or Indonesia Eximbank may request the attendance of certain officials at the SSB Meeting to present proposals that require SSB opinion and approval.
7. The SSB meeting is chaired by the Chairman of the SSB.
8. SSB meetings are valid and have the right to adopt binding decisions if attended by 100% of the current DPS members currently serving.
9. The decision of the SSB Meeting must be made based on deliberation to reach a consensus. SSB can make a valid decision without holding a SSB Meeting, provided that all SSB members have been notified in writing of the proposed decision and all SSB members give their approval of the proposal submitted in writing and sign the agreement.
10. Minutes of opinion and approval of SSB must be made by the Sharia Business Unit and given a registration number and date and signed by the Chairman and members of SSB.
11. In the event that SSB deems it necessary to conduct a study to be able to provide an opinion and approval on a proposal, it must be included in the Minutes of Opinion and SSB approval and state the limit for submitting the results of the study to LPEI.
12. In the event that SSB considers that the proposed work unit to obtain SSB Opinion and Approval is not in accordance with Sharia Principles, SSB must provide solutions and advisories so that the proposed work unit is in accordance with sharia principles

## DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sharia Supervisory Board

- 13. Berita acara opini dan persetujuan DPS merupakan bukti sah, baik untuk para anggota DPS maupun pihak lain mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat DPS yang bersangkutan.
- 14. Berita acara opini dan persetujuan DPS wajib diadministrasikan dengan baik oleh unit Kerja Bisnis Syariah dan Unit Kerja Kepatuhan.
- 15. Wajib dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) anggota DPS secara fisik paling kurang 12 (dua belas) kali dalam setahun.
- 13. Minutes of opinion and approval of SSB are valid evidence, both for SSB members and for other parties regarding decisions taken at the SSB Meeting concerned.
- 14. Minutes of opinion and approval by DPS must be properly administered by the Sharia Business Unit and the Compliance Unit.
- 15. Must be physically attended by at least 2 (two) DPS members at least 12(twelve) times a year.

### Rapat Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2021, Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan rapat sebanyak 30 kali yang dilakukan secara online dan tatap muka, dengan tingkat kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

### Sharia Supervisory Board Meetings

During 2021, the Sharia Supervisory Board has held 30 online and offsite meetings, with attendance levels and meeting agendas as follows:

### Kehadiran Rapat Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Board Meetings Attendance

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Frekuensi Kehadiran Attendance	Presentase Kehadiran Attendance Percentage
Kanny Hidaya, SE., MA	Ketua   Chairman	30	30	100%
Dr. Yulizar D. Sanrego, MEc	Anggota   Member	30	30	100%

### Agenda Rapat Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Board Meetings Agenda

No	Tanggal Date	Agenda
1	20-Jan-21	<ol style="list-style-type: none"> <li>Refresh Hasil Rapat DPS Desember 2020</li> <li>Program Penjaminan PEN</li> <li>Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)</li> <li>Kewenangan Review Syariah</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Refresh the Results of the December 2020 DPS Meeting</li> <li>PEN Guarantee Program</li> <li>Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Financing</li> <li>Sharia Review Authority</li> </ol>
2	23-Feb-21	<ol style="list-style-type: none"> <li>Refresh Hasil Rapat DPS Januari 2021</li> <li>Struktur Pembiayaan Murabahah</li> <li>Struktur Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)</li> <li>Struktur Pembiayaan Musyarakah</li> <li>Informasi Laporan Pengawasan DPS tahun 2020</li> </ol>

**DEWAN PENGAWAS SYARIAH**  
Sharia Supervisory Board

No	Tanggal Date	Agenda
		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Refresh the Results of the January 2021 DPS Meeting</li> <li>2. Murabaha Financing Structure</li> <li>3. Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) Financing Structure</li> <li>4. Musyarakah Financing Structure</li> <li>5. Information on the 2020 DPS Supervision Report</li> </ul>
3	23-Feb-21	<p>Exit Meeting Review Kepatuhan Syariah PT XXXXa xXs Lxxxxx &amp; PT Lxxxx Xxxxri dalam rangka sosialisasi aspek Syariah</p> <p>Exit Meeting Sharia Compliance Review PT XXXXa xXs Lxxxxx &amp; PT Lxxxx Xxxxri to disseminate the Sharia aspect</p>
4	05-Mar-21	Pemaparan Laporan Pengawasan DPS di Rapat Dewan Direktur Presentation of the DPS Supervision Report at the Board of Directors Meeting
5	24-Mar-21	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pembacaan Hasil Rapat DPS Februari 2021</li> <li>2. Skema Penjaminan Syariah</li> <li>3. Ratifikasi Skema Akad <i>Trade Finance</i> Syariah</li> <li>4. Rencana Review Kepatuhan Syariah Q1 2021</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Reading the Results of the February 2021 DPS Meeting</li> <li>2. Sharia Guarantee Scheme</li> <li>3. Ratification of the Sharia Trade Finance Contract Scheme</li> <li>4. Q1 2021 Sharia Compliance Review Plan</li> </ul>
6	18-Apr-21	Safari Ramadhan Ramadan Safari
7	26-Apr-21	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pembacaan Keputusan Risalah Rapat DPS bulan Maret 2021</li> <li>2. Struktur Wakalah bil Ujrah + Qardh dan Hawalah bil Ujrah.</li> <li>3. Dokumentasi Legal Akad MMQ.</li> <li>4. Standarisasi Jadwal Pembayaran Akad Pembiayaan.</li> <li>5. Lain-lain dan Penetapan Rapat DPS bulan Mei 2021</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Reading of the Minutes of the DPS Meeting in March 2021</li> <li>2. Structure of Wakalah bil Ujrah + Qardh and Hawalah bil Ujrah.</li> <li>3. MMQ Contract Legal Documentation.</li> <li>4. Standardization of Financing Contract Payment Schedule.</li> <li>5. Other and Stipulation of DPS Meeting in May 2021</li> </ul>
8	21-May-21	Hasil Review/Uji Petik Kepatuhan Syariah PT XXXXXni XXXai dan PT XXXXXindo Result of Review/Test of Sharia Compliance of PT XXXXXni XXXai and PT XXXXXindo
9	25-May-21	Konsultasi Homologasi PT Xxbo XXXx dan PT XXXxma Xxro Homologation Consultation for PT Xxbo XXXx and PT XXXxma Xxro
10	31-May-21	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Refresh Hasil Keputusan Rapat DPS tanggal 26 April 2021</li> <li>2. Pembahasan Mengenai Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah</li> <li>3. Permohonan Ulang Opini DPS Terkait Ta'zir/Denda dalam pembiayaan Syariah</li> <li>4. Pembahasan Mengenai Penuangan Besaran Potongan Harga dalam Murabahah</li> <li>5. Pembahasan Sektor Usaha Nasabah Progam Penjaminan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)</li> <li>6. Pembahasan Mengenai Sektor Usaha Nasabah</li> <li>7. Rencana Review Kepatuhan Syariah Q2 2021</li> <li>8. Lain - Lain dan Penetapan Rapat DPS Bulan Juni 2021</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Refresh the Resolutions of the DPS Meeting on April 26, 2021</li> <li>2. Discussion on Wakalah in Murabaha Financing</li> </ul>

No	Tanggal Date	Agenda
		3. Reapplication of DPS Opinion Regarding Ta'zir/Fine in Sharia financing 4. Discussion regarding the Pouring of the Amount of Discounts in Murabaha 5. Discussion of the Customer Business Sector of the National Economic Recovery Guarantee Program (PEN) 6. Discussion on the Customer's Business Sector 7. Q2 2021 Sharia Compliance Review Plan 8. Other and Stipulation of DPS Meeting in June 2021
11	10-Jun-21	Review standar dokumen hukum Syariah Sharia legal document standard review
12	17-Jun-21	1. Review Dokumentasi Legal Syariah 2. Restrukturisasi PT Xxxtan Xxxxxnis XXXXteria  1. Sharia Legal Documentation Review 2. Restructuring of PT Xxxtan Xxxxxnis XXXXteria
13	23-Jun-21	1. Review Dokumentasi Legal Syariah – MMQ 2. Restrukturisasi PT Xxxtan Xxxxxnis XXXXteria  1. Sharia Legal Documentation Review – MMQ 2. Restructuring of PT Xxxtan Xxxxxnis XXXXteria
14	28-Jun-21	Diskusi dengan Nasabah Xxx - Penyelesaian Utang Discussion with Xxx Customers - Debt Settlement
15	05-Jul-21	1. Update Tindak Lanjut Penyelesaian Utang Xxx 2. Review Template Dokumen Pembiayaan Murabahah  1. Follow-up Update on Debt Settlement Xxx 2. Review of the Murabahah Financing Document Template
16	12-Jul-21	1. Struktur Syariah atas Homologasi Nasabah Pxxxxxxxx 2. Alternatif Skema Murabahah  1. Sharia Structure of Customer Homologation Pxxxxxxxx 2. Alternative Murabaha Scheme
17	03-Aug-21	1. Permohonan Review dan Tanda tangan Draft Opini dan Risalah Rapat DPS 2. Review standar dokumen akad IMBT  1. Request for Review and Signature of Draft Opinion and Minutes of DPS Meeting 2. Review IMBT contract document standards
18	10-Aug-21	Review standar dokumen IMBT IMBT document standard review
19	23-Aug-21	Profil Risiko Syariah Sharia Risk Profile
20	02-Sep-21	1. Konsultasi Penggunaan Akad Syariah atas transaksi antara Divisi Syariah dengan Treasury Kantor Pusat 2. Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Murabahah atas Nama PT. Cxxxxxxni xxxai XXXXteria  1. Consultation on the Use of Sharia Contracts for transactions between the Sharia Division and the Head Office Treasury 2. Extension of Murabahah Working Capital Financing Facility on behalf of PT. Cxxxxxxni xxxai XXXXteria

**DEWAN PENGAWAS SYARIAH**  
Sharia Supervisory Board

No	Tanggal Date	Agenda
21	08-Sep-21	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Restrukturisasi Pembiayaan PT Noxxx Xxxxxtries</li> <li>2. Review Kepatuhan Syariah Q3 - 2021</li> <li>3. Review Draft Standar Dokumen Akad IMBT</li> </ul> <p>1. Financing restructuring of PT Noxxx Xxxxxtries      2. Sharia Compliance Review Q3 - 2021      3. Review the Draft IMBT Contract Document Standard</p>
22	24-Sep-21	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Konversi Kredit Konvensional menjadi Pembiayaan Syariah - Penerapan Qonun Aceh</li> <li>2. Review Draft standar dokumen akad IMBT</li> </ul> <p>1. Conversion of Conventional Credit into Sharia Financing - Implementation of Aceh Qonun      2. Review the draft IMBT contract document standard</p>
23	01-Oct-21	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan Akad Syariah Dalam Rangka Pendanaan/Pinjaman Dana Bisnis Syariah Dari Tresuri Kantor Pusat</li> <li>2. Hak Regres Penjaminan PEN oleh Pemerintah kepada Nasabah/Terjamin</li> </ul> <p>1. Use of Sharia Contracts for Funding/Lending of Sharia Business Funds from the Treasury of the Head Office      2. Right of Regression of PEN Guarantee by the Government to Customers/Guaranteed</p>
24	06-Oct-21	Penjaminan PEN Syariah - Penggantian Klaim Hak Regres Sharia PEN Guarantee - Replacement of Regression Rights Claims
25	29-Oct-21	Review draft standar dokumen akad Musyarakah Review of the standard draft of Musyarakah contract documents
26	01-Nov-21	Permohonan concern DPS atas isu-isu pembiayaan MMQ DPS concern application for MMQ financing issues
27	15-Nov-21	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Review Kepatuhan Syariah Q4 2021</li> <li>2. Lanjutan Review Draft Standar dokumen akad Musyarakah</li> <li>3. Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah</li> </ul> <p>1. Q4 2021 Sharia Compliance Review Plan      2. Continued Review of the Standard Draft of Musyarakah contract documents      3. Wakalah in Murabaha Financing</p>
28	13-Dec-21	Roadmap Syariah 2021 Sharia Roadmap 2021
29	23-Dec-21	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya Ta'widh/Servicing Fee Restrukturisasi PT MXX &amp; PT AXX</li> <li>2. Lanjutan Review Standar Draft Dokumen Legal Syariah - SKU</li> </ul> <p>1. Ta'widh Fee/Service Restructuring Fee for PT MXX &amp; PT AXX      2. Continuation of Standard Review of Draft Sharia Legal Documents - SKU</p>
30	30-Dec-21	Lanjutan review standar draft dokumen legal syariah - Syarat dan Ketentuan Umum Continued review of the standard draft of sharia legal documents - General Terms and Conditions

## DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sharia Supervisory Board

### Laporan Dewan Pengawas Syariah

Setiap semester, Dewan Pengawas Syariah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan kepada Direktur Eksekutif.

### Sharia Supervisory Board Reports

Every semester, the Sharia Supervisory Board submits a Supervisory Report to the Executive Director.

No	Item	Tanggal Pelaporan Reporting Date
1	Laporan DPS semester 2 2020 DPS 2nd semester 2020 report	23 Februari   February 2021
2	Laporan DPS semester 1 2021 DPS 1st semester 2021 report	20 Agustus   August 2021

Selama periode tahun 2021, DPS telah melakukan realisasi program kerja antara lain:

1. Melakukan 30 kali rapat yang mayoritas dilakukan secara daring untuk membahas mengenai fitur produk dan skema akad pembiayaan dan penjaminan Syariah, standar dokumen akad pembiayaan syariah, restrukturisasi pembiayaan syariah, profil risiko Syariah, dan lain sebagainya.
2. Menghadiri Pra Ijtima' Sanawi dan Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Syariah yang diselenggarakan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia
3. Melakukan review kepatuhan Syariah melalui metode uji petik sample pembiayaan Syariah sebanyak 7 sample Nasabah.
4. Menyampaikan Laporan Pengawasan DPS kepada Direktur Eksekutif periode:
  - a. Laporan DPS semester 2 tahun 2020
  - b. Laporan DPS semester 1 tahun 2021

During the 2021 period, DPS has realized work programs, including:

1. Conducted 30 meetings, the majority of which were conducted online to discuss product features and sharia financing and guarantee contract schemes, sharia financing contract document standards, sharia financing restructuring, Sharia risk profile, and so forth.
2. Attending Pre Ijtima' Sanawi and Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Sharia Supervisory Board of Sharia Financial Institutions organized by the National Sharia Council - Indonesian Ulema Council
3. Conduct a Sharia compliance review through the sampling test method of Sharia financing as many as 7 samples of customers.
4. Submitting the DPS Supervision Report to the Executive Director for the following period:
  - a. DPS 2nd semester 2020 report
  - b. DPS 1st semester 2021 report



# ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF

Supporting Organ of The Board of Directors and Executive Director

## KOMITE AUDIT

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Direktur dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Direktur dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor ekstern dan intern, dimana tugas dan fungsinya diatur dalam Piagam Komite Audit.

### Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit serta tugas dan fungsinya telah disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Peraturan-peraturan yang menjadi landasan pembentukan Komite Audit, antara lain:

1. Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
3. POJK No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017, tentang Penggunaan Jasa Akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

### Piagam Komite Audit

Piagam Komite Audit disusun dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Dewan Direktur nomor 0003/PDD/04/2018 tanggal 6 April 2018. Piagam Komite Audit berfungsi sebagai pedoman dan tata tertib kerja bagi anggota Komite dalam menjalankan peran, tugas, dan tanggung jawabnya membantu Dewan Direktur.

### Komposisi dan Profil Komite Audit

Sepanjang tahun 2021, terjadi beberapa kali perubahan susunan Komite Audit. Berdasarkan Keputusan Direktur Eksekutif (KDE) No. 0044/KDE/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Keanggotaan Komite Audit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, susunan Komite Audit LPEI adalah sebagai berikut:

## AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is established by the Board of Directors to support the implementation of duties and function of the Board of Directors in ensuring effectiveness of internal control system and effectiveness of duties implementation of external and internal auditors, whereby the duties and functions are stipulated in the Audit Committee Charter.

### Legal References

The establishment of the Audit Committee and its duties and functions refers to the prevailing regulations, among others:

1. Minister of Finance Regulation No. 141/PMK.010/2009 concerning Good Corporate Governance of Indonesian Export Financing Agency.
2. Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Work Guidelines of the Audit Committee.
3. POJK No. 13/POJK.03/2017 dated 27 March 2017, concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accountant Offices in Financial Services Activities.

### Audit Committee Charter

The Audit Committee Charter has been prepared and determined based on the Board of Directors Decree No. 0003/PDD/04/2018 dated 6 April 2018. The Audit Committee Charter serves as a guideline for the Committee's members in performing their roles, duties, and responsibilities to assist the Board of Directors.

### Composition and Profile of the Audit Committee

There were several changes in the composition of the Audit Committee throughout 2021. Based on the Decree of the Executive Directors (KDE) No. 0004/KDE/07/2020 dated 27 July 2020 concerning the Membership of the Audit Committee of Indonesia Eximbank, the composition of the Audit Committee is as follows:

**ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF**  
Supporting Organ of The Board of Directors and Executive Director

Nama   Name	Jabatan   Position
Rijani Tirtoso	Ketua Komite Audit   Chairman of the Audit Committee
Untung Dwiyono	Anggota   Member
Yulida S Marbun	Anggota   Member

Selanjutnya, sesuai Keputusan Direktur Eksekutif nomor 0077/KDE/08/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Keanggotaan Komite Audit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, komposisi anggota Komite Audit hingga berakhirnya tahun buku 2021 adalah sebagai berikut:

Furthermore, according to the Decree of the Executive Director (KDE) No. 0077/KDE/08/2021 dated 24 August 2021 concerning Audit Committee Memberships, the composition of the members of the Audit Committee until the end of the 2021 fiscal year is as follows:

Nama   Name	Jabatan   Position
Rijani Tirtoso	Ketua Komite Audit   Chairman of the Audit Committee
Peter Umar Abdilla	Anggota   Member
Yulida S Marbun	Anggota   Member

## Profil Komite Audit 2021

### Audit Committee Profile 2021

#### Rijani Tirtoso

Ketua Komite Audit Merangkap Anggota Dewan Direktur  
Chairman of the Audit Committee concurrently Member of the Board of Directors

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Direktur Eksekutif (KDE) No. 0077/KDE/08/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Keanggotaan Komite Audit Executive Director (KDE) Decree No. 0077/KDE/08/2021 dated 24 August 2021 regarding Audit Committee Membership
Profil Profile	Profil dapat dilihat pada Sub Bab Profil Dewan Direktur di Bab 3 Laporan Tahunan ini. Profile can be viewed on Sub Chapter of the Board of Directors Profile in Chapter 3 of this Annual Report

**ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF**  
Supporting Organ of The Board of Directors and Executive Director

**Peter Umar Abdilla**

Anggota Komite Audit

Audit Committee Member

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Direktur Eksekutif (KDE) No. 0077/KDE/08/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Keanggotaan Komite Audit Executive Director (KDE) Decree No. 0077/KDE/08/2021 dated 24 August 2021 regarding Audit Committee Membership
Periode Jabatan Term of Office	9 Agustus 2021 – sekarang 9 August 2021 – present
Umur Age	50 tahun 50 years old
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
Pendidikan Education	<ul style="list-style-type: none"><li>• DIII Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1992</li><li>• Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1998</li><li>• Magister Sains jurusan Ekonomi Syariah dari Universitas Indonesia tahun 2007</li> <li>• DIII Accounting at the State College of Accountancy (STAN) in 1992</li><li>• Bachelor of Economics majoring in Accounting from the University of Indonesia in 1998</li><li>• Master of Science majoring in Islamic Economics from the University of Indonesia in 2007</li></ul>
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none"><li>• Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (2021 – sekarang)</li><li>• Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan RI (1992 – 2021)</li><li>• Anggota Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia (2021)</li><li>• Anggota Komite Audit PT BNI Syariah (2019 – 2021)</li><li>• Forensic Accountant pada INT World Bank (2011 – 2012)</li> <li>• Inspector II Inspectorate General of the Ministry of Finance (2021 – present)</li><li>• Auditor General Inspectorate of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (1992 – 2021)</li><li>• Member of the Audit Committee of PT Bank Syariah Indonesia (2021)</li><li>• Member of the Audit Committee of PT BNI Syariah (2019 – 2021)</li><li>• Forensic Accountant at INT World Bank (2011 – 2012)</li></ul>

**ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF**  
Supporting Organ of The Board of Directors and Executive Director

**Yulida S Marbun**

Anggota Komite Audit  
Member of the Audit Committee

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Direktur Eksekutif (KDE) No. 0044/KDE/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Keanggotaan Komite Audit Executive Director Decree (KDE) No. 0044/KDE/07/2020 dated July 27, 2020 concerning the Membership of the Audit Committee
Periode Jabatan Term of Office	18 Februari 2020 – sekarang 18 February 2020 – present
Usia Age	57 tahun 57 years old
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
Pendidikan Education	Menyelesaikan pendidikan Sarjana di bidang Pertanian di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987 dan Magister di bidang Ekonomi Manajemen di STIE IBEK pada tahun 2000. Obtained a Bachelor Degree in Agriculture from the Institute of Agriculture Bogor in 1987 and Master of Economic Management at STIE IBEK in 2000.
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit Manager/Department Head di KP Direktorat Internal Audit 2008 – 2014 (Vice President)</li> <li>• LF Risk Management di Mandiri University – Bank Mandiri 2014-2015 (Vice President)</li> <li>• Regional Business Control Head – Region III Jakarta 1 Bank Mandiri 2015-2019 (Vice President)</li> <li>• Audit Manager/Department Head at Head Office Internal Audit Directorate 2008 - 2014 (Vice President)</li> <li>• LF Risk Management at Mandiri University – Bank Mandiri 2014-2015 (Vice President)</li> <li>• Regional Business Control Head – Region III Jakarta 1 Bank Mandiri 2015-2019 (Vice President)</li> </ul>

## **ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF**

Supporting Organ of The Board of Directors and Executive Director

### **Periode dan Masa Jabatan**

Pengaturan masa jabatan Komite Audit mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit serta Piagam Komite Audit. Regulasi dan pedoman kerja tersebut menetapkan bahwa masa jabatan Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Direktur. Komite Audit dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Dewan Direktur dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Direktur jika yang bersangkutan dinilai tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya yang telah dinyatakan dalam Surat Keputusan Pengangkatan. Apabila dipandang perlu, Dewan Direktur dapat mengangkat kembali anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Direktur setelah masa kerjanya habis.

### **Independensi Anggota Komite**

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun.

Seluruh anggota Komite Audit juga tidak memiliki hubungan afiliasi. Hubungan dimaksud, terkait dengan keuangan, kepengurusan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan/atau Pemegang Saham.

### **Tugas dan Tanggung Jawab**

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit, yaitu:

1. Memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
  - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
  - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
  - c. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku; dan
  - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direktur Eksekutif atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern dan Kantor Akuntan Publik

### **Period and Terms of Office**

The tenure of the Audit Committee refers to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Work Guidelines of the Audit Committee and the Audit Committee Charter. The regulations and guidelines stipulate the Audit Committee's tenure cannot exceed the Board of Directors' term. The Audit Committee may be re-elected only for the next period.

The Board of Directors may terminate member of the Audit Committee who is not a member of the Board of Directors if the concerned member is deemed to not properly perform as stated in the Appointment Decree. If deemed necessary, the Board of Directors may reappoint members of the Audit Committee who are not members of the Board of Directors after their tenure has ended.

### **Committee Members Independence**

All members of the Audit Committee have met all the independence criteria and are able to carry out their duties independently. In carrying out its duties, the Audit Committee cannot be influenced by any party.

All members of the Audit Committee also have no affiliation relationships. The relationships in question are the ones related to finance, stock management and/or family relationship with the Board of Directors, Executive Director, Managing Director, and/or Shareholders.

### **Duties and Responsibilities**

The Audit Committee duties and responsibilities are as follows:

1. Ensuring the effectiveness of internal control system and the effectiveness of external and internal auditor duties.
2. Monitoring and evaluation on:
  - a. Duty implementation of the Internal Audit Unit (IAU);
  - b. Appropriateness of audit by Public Accounting Firm with the prevailing audit standards;
  - c. Appropriateness of Financial Statements with the prevailing accounting standards; and
  - d. Following up the IAU and Public Accountant Firm findings by the Executive Director

## ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF

Supporting Organ of The Board of Directors and Executive Director

3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Direktur.

3. Providing recommendation to the Board of Directors on the appointment of Public Accounting Firm

### Program Pengembangan Komite

Selama tahun 2021, anggota Komite Audit ikut berpartisipasi dalam program pengembangan sebagai berikut:

### Committee Development Program

During 2021, members of the Audit Committee participated in the following development programs:

Nama Name	Jenis Pelatihan/Seminar Training/Seminar Type	Penyelenggara Organizer	Tanggal & Lokasi Penyelenggaraan Organizatin Date & Location
Rijani Tirtoso	Loan Covid Restructuring After Implementation of POJK 48 2020	Bankers Association for Risk Management	Jakarta, 5 August 2021
Yulida S. Marbun	Loan Covid Restructuring After Implementation of POJK 48 2020	Bankers Association for Risk Management	Jakarta, 5 August 2021

### Rapat Komite Audit

Piagam Komite Audit mengatur bahwa Komite Audit wajib menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan untuk menyelesaikan program kerja Komite Audit. Selama tahun 2021 Komite Audit melangsungkan rapat sebanyak 29 kali, antara lain rapat internal Komite Audit serta rapat gabungan Komite Audit dengan internal audit dan eksternal audit. Selain itu Komite Audit juga berpartisipasi dalam 11 (sebelas) kali penyelenggaraan rapat gabungan antar Komite Dewan Direktur (*joint committee*), membahas hal-hal strategis yang perlu dibahas secara lintas Komite.

Berikut ini rincian kegiatan rapat Komite Audit tahun 2021:

### Audit Committee Meetings

The Audit Committee Charter stipulates that the Audit Committee must hold a meeting at least 1(one) time in 2 (two) months to complete the work program of the Audit Committee. During 2021 the Audit Committee held 29 meetings, including internal audit committee meetings and joint audit committee meetings with internal audit and external audit. In addition, the Audit Committee also participated in 11 (eleven) joint meetings between the Committees of the Board of Directors (*joint committee*), discussing strategic matters that need to be discussed across the committees.

The following are the details of the Audit Committee meeting activities in 2021:

### Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Meeting Frequency and Attendance

Nama Name	Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran   Meeting Frequency and Attendance Level		
	Jumlah Rapat Number of Meeting	Kehadiran Attendance	% Kehadiran % of Attendance
1. Rijani Tirtoso	29	29	100%
2. Yulida S. Marbun	29	29	100%
3. Untung S. Dwiyono*	16	16	100%
4. Peter Umar Abdillah**	11	10	90%

Keterangan | Information:

\*) Masa jabatan berakhir pada tanggal 25 Juli 2021 | Term of office ends on July 25, 2021

\*\*) Efektif sejak tanggal 9 Agustus 2021 | Effective from August 9, 2021

**ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF**  
 Supporting Organ of The Board of Directors and Executive Director

**Tabel Agenda Rapat Komite**

Committee Meeting Agenda

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
Rapat Komite Audit I Audit Committee Meeting			
1	4 Januari   January 2021	Penyampaian Hasil Audit Pengadaan, Audit IT, <i>Continuous Audit</i> , dan Investigasi tahun 2020 oleh Direktorat Internal Audit - LPEI Submission of Procurement Audit Results, IT Audits, Continuous Audits, and Investigations in 2020 by the Internal Audit Directorate - LPEI	1. Rijani Tirtoso 2. Untung Dwiyono 3. Yulida S. Marbun
2	2 Februari   February 2021	Progress Kegiatan Audit, Konsultasi, CACM oleh Divisi RAM LPEI Progress of Audit, Consultation, CACM Activities by LPEI's RAM Division	1. Rijani Tirtoso 2. Untung Dwiyono 3. Yulida S. Marbun
3	10 Februari   February 2021	Rencana & Progres Audit Khusus Debitur/Kredit Bermasalah Special Audit Plans & Progress for Troubled Debtors/Credits	1. Rijani Tirtoso 2. Untung Dwiyono 3. Yulida S. Marbun
4	11 Februari   February 2021	Pemaparan Informasi dan strategi penyelesaian debitur bermasalah Information disclosure and problem-solving strategies for debtors	1. Rijani Tirtoso 2. Untung Dwiyono 3. Yulida S. Marbun
5	16 Februari   February 2021	Update dan Diskusi Rutin Divisi Kepatuhan dengan Komite Audit Regular Updates and Discussions of the Compliance Division with the Audit Committee	1. Rijani Tirtoso 2. Untung Dwiyono 3. Yulida S. Marbun
6	18 Februari   February 2021	Pemaparan Informasi dan strategi penyelesaian debitur bermasalah Information disclosure and problem-solving strategies for debtors	1. Rijani Tirtoso 2. Untung Dwiyono 3. Yulida S. Marbun
7	26 Februari   February 2021	Pemaparan Informasi dan strategi penyelesaian debitur bermasalah Information disclosure and problem-solving strategies for debtors	1. Rijani Tirtoso 2. Untung Dwiyono 3. Yulida S. Marbun
8	4 Maret   March 2021	Pemaparan Informasi dan strategi penyelesaian debitur bermasalah Information disclosure and problem-solving strategies for debtors	1. Rijani Tirtoso 2. Untung Dwiyono 3. Yulida S. Marbun
9	18 Maret   March 2021	Pemaparan Informasi dan strategi penyelesaian debitur bermasalah Information disclosure and problem-solving strategies for debtors	1. Rijani Tirtoso 2. Untung Dwiyono 3. Yulida S. Marbun
10	24 Maret   March 2021	Progress Audit (Tata Kelola PEN & Audit BI RTGS), Konsultasi (IP – PEN, PEN & MIS Project) dan CACM  Progress Audit (PEN Governance & BI RTGS Audit), Consultation (IP – PEN, PEN & MIS Project) and CACM	1. Rijani Tirtoso 2. Untung Dwiyono 3. Yulida S. Marbun
11	28 April 2021	1. Pemaparan Hasil Audit Khusus terkait Insiden IT. 2. Progres Pelaksanaan Audit Divisi SPA.  1. Presentation of Special Audit Results related to IT Incidents. 2. Progress of SPA Division Audit Implementation.	1. Rijani Tirtoso 2. Untung Dwiyono 3. Yulida S. Marbun
12	4 Mei   May 2021	Review pelaksanaan kegiatan Komite Audit Review of the implementation of the activities of the Audit Committee	1. Rijani Tirtoso 2. Untung Dwiyono 3. Yulida S. Marbun
13	27 Mei   May 2021	1. Pemaparan Divisi <i>Compliance</i> 2. Pemaparan Divisi Regular Audit Monitoring  1. Compliance Division Description 2. Exposure of the Regular Audit Monitoring Division	1. Rijani Tirtoso 2. Untung Dwiyono 3. Yulida S. Marbun

**ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF**  
Supporting Organ of The Board of Directors and Executive Director

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
14	22 Juni   June 2021	Update Tata Kelola NIA NIA Governance Update	1. Rijani Tirtoso 2. Untung Dwiyono 3. Yulida S. Marbun
15	23 Juni   June 2021	Evaluasi Hasil KAP RSM Evaluation of KAP RSM Results	1. Rijani Tirtoso 2. Untung Dwiyono 3. Yulida S. Marbun
16	27 Juli   July 2021	1. Penyelesaian masa tugas Bp Untung Dwiyono sebagai anggota KA 2. Laporan Pengawasan DD Semester I 2021 3. Laporan Komite Audit Triwulan II 2021  1. Completion of Mr Untung Dwiyono's term of office as a member of KA 2. DD Supervisory Report Semester I 2021 3. Report of the Audit Committee Quarter II 2021	1. Rijani Tirtoso 2. Untung Dwiyono 3. Yulida S. Marbun
17	30 Juli   July 2021	Rapat Evaluasi / Penilaian KAP 2020 KAP Evaluation / Assessment Meeting 2020	1. Rijani Tirtoso 2. Yulida S. Marbun
18	5 Agustus   August 2021	1. IT Security Assessment 2. Case EoD & EoM	1. Rijani Tirtoso 2. Yulida S. Marbun
19	16 Agustus   August 21	Rencana, Realisasi dan Pembagian Tugas Anggota Komite Audit LPEI sampai Desember 2021  Plan, Realization and Division of Duties of LPEI Audit Committee Members until December 2021	1. Rijani Tirtoso 2. Yulida S. Marbun 3. Peter Umar
20	17 September 2021	1. Proses Pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung 2. Hasil Investigasi Internal dan Verifikasi Hapus Buku  1. Examination Process by the Attorney Generals Office 2. Results of Internal Investigations and Verification of Delete Books	1. Rijani Tirtoso 2. Yulida S. Marbun 3. Peter Umar
21	23 September 2021	Funding & Permodalan Funding & Capital	1. Rijani Tirtoso 2. Yulida S. Marbun 3. Peter Umar
22	28 September 2021	1. Hasil Uji Kepatuhan – s.d. Juni Tahun 2021(Tw - II) 2. Hasil Assessment GCG LPEI Tahun 2020 3. Perkembangan RPMK Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah 4. Agenda dengan OJK dan Regulasi Baru yang Berdampak pada LPEI 5. Hal-hal lain dari Komite Audit kepada Anggota Komite Audit  1. Compliance Test Results – s.d. June 2021(Tw - II) 2. LPEI GCG Assessment Results for 2020 3. Development of RPMK Governance, Risk Management, and Know Your Customer Principles 4. Agenda with OJK and New Regulations that have an Impact on LPEI 5. Other matters from the Audit Committee to Members of the Audit Committee	1. Rijani Tirtoso 2. Yulida S. Marbun 3. Peter Umar
23	11 Oktober 2021	Konsultasi dan Update progress perumusan RPMK tentang Prinsip Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI  Consultation and Update on the progress of the formulation of the RPMK on the Principles of Governance, Risk Management and Know Your Customer Principles LPEI	1. Rijani Tirtoso 2. Yulida S. Marbun 3. Peter Umar
24	28 Oktober 2021	Review Laporan Komite Audit Triwulan III Tahun 2021 Review of the Quarter III Audit Committee Report 2021	1. Rijani Tirtoso 2. Yulida S. Marbun 3. Peter Umar

**ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF**  
 Supporting Organ of The Board of Directors and Executive Director

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
25	24 November 2021	Pembahasan Program Investasi Pemerintah (PIP) Discussion of the Government Investment Program (PIP)	1. Rijani Tirtoso 2. Yulida S. Marbun
26	26 November 2021	Update DMTL DMTL update	1. Rijani Tirtoso 2. Yulida S. Marbun 3. Peter Umar
27	23 Desember   December 2021	1. Rencana Audit Tahunan(RAT)2022. 2. Daftar Monitoring Tindak Lanjut(DMTL) Audit Eksternal.  1. Annual Audit Plan(RAT)2022. 2. Follow-up Monitoring List(DMTL)External Audit.	1. Rijani Tirtoso 2. Yulida S. Marbun 3. Peter Umar
Rapat Komite Audit dengan KAP RSM Audit Committee Meeting with KAP RSM			
1	12 Oktober   October 2021	Kick off Meeting dengan Komite Audit atas Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.  Kick off Meeting with the Audit Committee on Financial Statements for the Year ended December 31, 2021.	1. Rijani Tirtoso 2. Yulida S. Marbun 3. Peter Umar
2	18 November 2021	Project Management Meeting KAP RSM Project Management Meeting KAP RSM	1. Rijani Tirtoso 2. Yulida S. Marbun 3. Peter Umar
Rapat Gabungan Komite Audit dengan KPR dan KRN Joint Meeting of the Audit Committee with KPR and KRN			
1	7 Januari   January 2021	1. Tindak lanjut pembahasan mengenai Studi Kelayakan atas Pembentukan <i>Special Purpose Vehicle</i> (SPV) LPEI 2. Pemaparan Sub Segmentasi UKM <i>Business Model</i> dan <i>Operating Model</i>  1. Follow-up discussion regarding the Feasibility Study on the Establishment of the LPEI Special Purpose Vehicle (SPV) 2. Presentation of the SME Business Model and Operating Model Sub	1. Rijani Tirtoso 2. Felia Salim 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Herwan NG 6. Rubi Pertama 7. Untung S Dwiyono 8. Yulida S Marbun
2	1 Februari   February 2021	1. ERM Framework 2. Laporan Hasil Audit Pengadaan dan IT Tahun 2020  1. ERM Framework 2. Procurement and IT Audit Report 2020	1. Rijani Tirtoso 2. Felia Salim 3. Herwan NG 4. Rubi Pertama 5. Untung S Dwiyono 6. Yulida S Marbun
3	17 Februari   February 2021	1. Progress KAP RSM untuk hasil audit tahun 2020 2. PDD SPI dan Audit Charter  1. Progress of KAP RSM for 2020 audit results 2. PDD SPI and Audit Charter	1. Rijani Tirtoso 2. Felia Salim 3. Arus Gunawan 4. Herwan NG 5. Untung S Dwiyono 6. Yulida S Marbun
4	15 Maret   March 2021	Trade Finance - Lesson Learned Tahun 2020 dan Rencana Kerja Tahun 2021 Trade Finance - Lesson Learned for 2020 and Work Plan for 2021	1. Rijani Tirtoso 2. Felia Salim 3. Arus Gunawan 4. Herwan NG
			5. Untung S Dwiyono 6. Yulida S Marbun

**ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF**  
Supporting Organ of The Board of Directors and Executive Director

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
5	17 Maret   March 2021	1. IKU Alignment 2021 2. MIS Project - FTP & Cost Allocation 3. Early Warning Detection on Asset Quality 4. Perkembangan terakhir Audit 2020 oleh KAP RSM  1. KPI Alignment 2021 2. MIS Project - FTP & Cost Allocation 3. Early Warning Detection on Asset Quality 4. Latest developments on Audit 2020 by KAP RSM	1. Felia Salim 2. Rijani Tirtoso 3. Kasan 4. Herwan NG 5. Untung Dwiyono 6. Yulida S Marbun
6	30 April 2021	Pembahasan Management Letter Hasil Audit Laporan Keuangan tahun 2020 Discussion of Management Letter on Financial Statement Audit Results for 2020	1. Rijani Tirtoso 2. Felia Salim 3. M. Rahman 4. Rubi Pertama 5. Herwan Ng 6. Untung Dwiyono 7. Yulida S. Marbun
7	8 Juni   June 2021	1. Update Progress Penyusunan Governance NIA (EY) 2. Update Progree MIS Project (HoFP) 3. Review Strategy RJP(HoFP)  1. Update on NIA (EY) Governance Preparation Progress 2. Update MIS Project (HoFP) Program 3. Review of RJP Strategy (HoFP)	1. Kasan 2. Arus Gunawan 3. Rijani Tirtoso 4. Felia Salim 5. Herwan Ng 6. Rubi Pertama 7. Untung Dwiyono 8. Yulida S. Marbun
8	16 Juni   June 2021	1. GRC 2. Arsitektur Kebijakan  1. GRC 2. Policy Architecture	1. Rijani Tirtoso 2. Felia Salim 3. Kasan 4. Herwan Ng 5. Untung Dwiyono 6. Yulida S. Marbun
9	29 Juli   July 2021	Laporan Pengawasan DD LPEI Semester I tahun 2021 LPEI DD Supervision Report Semester I 2021	1. Rijani Tirtoso 2. Felia Salim 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Rubi Pertama 6. Yulida S. Marbun
10	31 Agustus   August 2021	1. Pembahasan Restrukturisasi Skema Investor Baru dan AYDA 2. Konsultasi Usulan Hapus Buku dengan Limit Kewenangan DD  1. Discussion on Restructuring of New Investor Scheme and AYDA 2. Consultation on Proposed Delete Books with DD Authority Limits	1. Rijani Tirtoso 2. Felia Salim 3. Kasan 4. Suminto 5. Rubi Pertama 6. Herwan Ng 7. Peter Umar 8. Yulida S. Marbun
11	17 September 2021	1. Program Kerja Komite Terintegrasi 2. Penyusunan RKAT Tahun 2022  1. Integrated Committee Work Program 2. Preparation of the 2022 RKAT	1. Kasan 2. Arus Gunawan 3. Felia Salim 4. Rijani Tirtoso

**ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF**  
 Supporting Organ of The Board of Directors and Executive Director

**Program kerja tahun 2021**

Penjelasan tentang program serta obyek dan sasaran pada tahun 2021, dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

**Work Programs in 2021**

The programs as well as the objects and targets in 2021 are described in the table below:

No	Program Kerja Tahun 2021 Year 2021 Programs	Obyek Object	Sasaran Targets
1	Melakukan Supervisi, Memberikan Konsultasi, dan Melaksanakan Review atas RKAT dan IKU 2020 LPEI, Internal Audit, dan Compliance  Supervise, provide consultation, and carry out a review of the LPEI 2020 RKAT and IKU, Internal Audit, and Compliance	<ul style="list-style-type: none"> <li>RKAT dan IKU 2020 LPEI</li> <li>RKAT dan IKU 2020 Internal Audit</li> <li>RKAT dan IKU 2020 Compliance</li> <li>LPEI 2020 RKAT and KPI</li> <li>RKAT and KPI 2020 Internal Audit</li> <li>RKAT and KPI 2020 Compliance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk memenuhi kebutuhan LPEI.</li> <li>Untuk memastikan seluruh Rencana Audit sudah tercakup dalam RAT.</li> <li>Untuk memastikan bahwa pelaksanaan GCG telah dilaksanakan sesuai Best Practices.</li> <li>To meet the needs of LPEI.</li> <li>To ensure that the entire Audit Plan is included in the RAT.</li> <li>To ensure that the implementation of GCG has been carried out in accordance with Best Practices.</li> </ul>
2	Melakukan Supervisi dan Koordinasi dengan pihak terkait secara detil dalam pemenuhan kebutuhan LPEI dan strategi pencapaiannya  Supervise and coordinate with related parties in detail in meeting the needs of LPEI and its strategy for achieving it	Kolaborasi dengan stakeholder utama Komite Audit a.l. BPK, OJK.  Collaboration with the main stakeholders of the Audit Committee a.l. BPK, OJK.	Memenuhi kebutuhan LPEI Meeting the needs of LPEI
3	Melakukan Supervisi, Memberikan Konsultasi, dan Melaksanakan Kolaborasi dengan pihak terkait secara detil step-step secara berurutan mulai dari yang paling penting dan urgent ( <i>critical milestones</i> ) yang harus dipenuhi beserta timeline atau target waktu masing-masing <i>milestones</i> dan strategi pencapaiannya  Supervise, provide consultation, and carry out collaboration with related parties in detail, sequentially, starting from the most important and urgent ( <i>critical milestones</i> ) that must be met along with the timeline or target time for each milestone and the strategy for achieving it)	Tanggapan dan tindak lanjut temuan Auditor Eksternal (BPK, OJK), Kantor Akuntan Publik, dan Divisi Internal Audit  Responses and follow-up to the findings of External Auditors (BPK, OJK), Public Accounting Firms, and Internal Audit Division	Untuk memastikan seluruh temuan audit telah ditindaklanjuti dan sesuai komitmen  To ensure that all audit findings have been followed up and according to commitments
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Review dan Memberikan Konsultasi Konsep GRC &amp; Three Lines of Defense</li> <li>- Melakukan Review dan Memberikan Konsultasi Metodologi Risk Based Audit</li> <li>- Reviewing and Providing Consultation on the Concept of GRC &amp; Three Lines of Defense</li> <li>- Reviewing and Providing Consultation on Risk Based Audit Methodology</li> </ul>	Penguatan Penerapan Fungsi Audit Internal Strengthening the Implementation of the Internal Audit Function	Pemantauan terhadap pengembangan Fungsi Audit Internal sesuai konsep GRC & 3-Lines of Defense dan Risk Based Audit yang dilakukan oleh Divisi Internal Audit  Monitoring the development of the Internal Audit Function in accordance with the GRC & 3-Lines of Defense and Risk Based Audit concepts carried out by the Internal Audit Division

**ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF**  
Supporting Organ of The Board of Directors and Executive Director

No	Program Kerja Tahun 2021 Year 2021 Programs	Obyek Object	Sasaran Targets
5	Melakukan Koordinasi Asistensi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tentang sistem Pencegahan dan Penindakan ( <i>profiling, whistle blowing</i> )  Coordinate the Inspectorate General Assistance of the Ministry of Finance regarding the Prevention and Enforcement system( <i>profile, whistle blowing</i> )	Kolaborasi dengan Inspektorat Jenderal Kemenkeu tentang sistem Pencegahan dan Penindakan.  Collaboration with the Inspectorate General of the Ministry of Finance on the Prevention and Enforcement system.	Memenuhi Kebutuhan LPEI Fulfilling LPEI's Needs
6	Melakukan Review dan Memberikan Konsultasi dalam rangka Implementasi Kebijakan Manajemen Risiko LPEI.  Reviewing and Providing Consultation for the Implementation of LPEI Risk Management Policies   Melakukan Review dan Memberikan Konsultasi kepada Unit Kepatuhan dalam rangka Implementasi Kebijakan Tata Kelola LPEI  Reviewing and Providing Consultation to the Compliance Unit for the Implementation of LPEI Governance Policy	Peran Konsultansi Komite Audit untuk Pengembangan Manajemen Risiko dan Tata Kelola LPEI  Role of Audit Committee Consultancy for LPEI Risk Management and Governance Development	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Risk Appetite Statement (RAS)</li> <li>- Risk Profile LPEI</li> <li>- Implementasi kerangka kerja GRC termasuk ERM yang memadai</li> <li>- Fungsi Organisasi Manajemen Risiko yang efektif dan kapabilitas &amp; kapasitas SDM yang memadai</li> <li>- Risk Appetite Statement (RAS)</li> <li>- LPEI Risk Profile</li> <li>- Implementation of the GRC framework including adequate ERM</li> <li>- Effective Risk Management Organization function and adequate HR capability &amp; capacity</li> </ul> Kebijakan Tata Kelola LPEI yang komprehensif, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>- TARIF</li> <li>- Implementasi Whistle Blower System</li> <li>- Sistem pengendalian dan pengawasan intern (termasuk Sistem/mekanisme monitoring penyaluran fasilitas pembiayaan dalam rangka mendorong ekspor nasional)</li> <li>- Pedoman perilaku etika</li> </ul> Comprehensive LPEI Governance Policies, including: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rates</li> <li>- Implementation of the Whistle Blower System</li> <li>- Internal control and supervision system (including monitoring system/mechanism for the distribution of financing facilities in the context of encouraging national exports)</li> <li>- Code of ethical conduct</li> </ul>
	Melakukan Review dan Memberikan Konsultasi kepada unit TSI dalam rangka Implementasi Kebijakan TSI - LPEI  Review and provide consultation to the TSI unit in the context of implementing the TSI Policy - LPEI		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi Network dan Infrastruktur Teknologi Informasi , Application Architecture, Main Issue Data Resume, yang memenuhi standard Best Practices</li> <li>- Implementasi Financial Reporting - PSAK 71</li> <li>- Implementasi MIS dan Data Governance yang memenuhi standard Best Practices</li> </ul>

**ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF**  
 Supporting Organ of The Board of Directors and Executive Director

No	Program Kerja Tahun 2021 Year 2021 Programs	Obyek Object	Sasaran Targets
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementation of Information Technology Network and Infrastructure, Application Architecture, Main Issue Data Resume, which meet Best Practices standards</li> <li>- Implementation of Financial Reporting- PSAK 71</li> <li>- Implementation of MIS and Data Governance that meets Best Practices standards</li> </ul>
7	Melakukan Review & Memberikan Konsultasi atas penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Divisi Internal Audit dan Special Audit tahun 2021  Reviewing & Providing Consultation on the preparation of the 2021 Internal Audit and Special Audit Division's Annual Audit Work Program	Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Divisi Internal Audit dan Divisi Special Audit tahun 2021  The Annual Audit Work Program of the Internal Audit Division and the Special Audit Division in 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk memastikan seluruh Rencana Audit telah tercakup dalam RAT dan pelaksanaan investigasi berjalan sesuai ketentuan dan kebijakan.</li> <li>- Audit Charter &amp; Audit Rating, Manual &amp; Prosedur Audit &amp; Special Audit</li> <li>- To ensure that the entire Audit Plan has been included in the RAT and that the investigation is carried out in accordance with the provisions and policies.</li> <li>- Audit Charter &amp; Audit Rating, Manual &amp; Audit Procedure &amp; Special Audit</li> </ul>
8	Mengkoordinasikan kajian dan Penyempurnaan Laporan Pengawasan RKAT Semester II 2020 dan Semester I 2021 (Review & Consulting)  Coordinate the study and improvement of the RKAT Supervision Reports for Semester II 2020 and Semester I 2021 (Review & Consulting)	Laporan Pengawasan RKAT Semester II 2020 Laporan Pengawasan RKAT Semester I 2021 2020 Semester II RKAT Supervision Report 2020 Semester I RKAT Supervision Report	<p>Laporan Pengawasan RKAT telah sesuai dan tepat waktu</p> <p>The RKAT Supervision Report is suitable and on time</p>
9	Melakukan Review dan Memberikan Konsultasi secara detil step-step secara berurutan mulai dari yang paling penting dan urgent (critical milestones yang harus dipenuhi beserta timeline atau target waktu masing-masing milestones dan strategi pencapaiannya)  Reviewing and providing detailed consultation steps sequentially starting from the most important and urgent (critical milestones that must be met along with the timeline or target time for each milestone and the strategy for achieving it)	Asuransi atas akuntabilitas terhadap pihak - pihak internal LPEI yang terlibat dalam keputusan kredit kepada debitur masalah (post-mortem review)  Assurance of accountability to LPEI internal parties involved in credit decisions to problem debtors (post-mortem review)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Review investigasi untuk menentukan akuntabilitas dari semua pihak yang terlibat mulai dari Proses inisiasi, Proses analisa kredit, Proses Komite dan keputusannya, Proses sebelum disbursement termasuk proses pemenuhan covenant dan proses pengikatan agunan, Proses post-disbursement dan monitoring.</li> <li>- Tercapainya Skenario Relaksasi Pembiayaan PL dan Restukturisasi Pembiayaan NPL</li> <li>- Tercapainya Skenario Pembiayaan NIA, Penjaminan, Asuransi dan Trade Finance</li> <li>- Investigation review to determine the accountability of all parties involved starting from the initiation process, credit analysis process, committee process and its decisions, the pre-disbursement process including the covenant fulfillment process and collateral binding process, post-disbursement process and monitoring.</li> </ul>

**ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF**  
Supporting Organ of The Board of Directors and Executive Director

No	Program Kerja Tahun 2021 Year 2021 Programs	Obyek Object	Sasaran Targets
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Achievement of PL Financing Relaxation Scenario and NPL Financing Restructuring</li> <li>- Achievement of NIA Financing Scenario, Guarantee, Insurance and Trade Finance</li> </ul>
10	Evaluasi Kinerja KAP – RSM tahun buku 2020 KAP – RSM Performance Evaluation for fiscal year 2020	Kinerja KAP – RSM tahun buku 2020 Performance of KAP – RSM for fiscal year 2020	Memberi evaluasi kinerja KAP – RSM tahun buku 2020 Provide an evaluation of the performance of KAP – RSM for the financial year 2020
11	Supervisi & Review :Penyusunan Laporan Pokok-Pokok Kegiatan Komite Audit kepada Dewan Direktur Supervision & Review :Preparing a Report on the Main Activities of the Audit Committee to the Board of Directors	Laporan Triwulanan Pokok-Pokok Kegiatan Komite Audit Quarterly Report of the Main Activities of the Audit Committee	Penyusunan kegiatan Komite Audit untuk setiap 3 bulanan kepada Dewan Direktur Preparation of the activities of the Audit Committee for every 3 months to the Board of Directors
12	Supervisi & Review : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat Internal Komite Audit</li> <li>Pemantauan dan Pengawasan yang bersifat periodik dan <i>ad hoc</i> terkait pelaksanaan Audit Plan Divisi Internal Audit dan Divisi Special Audit /Laporan Kasus Fraud, dan Compliance</li> <li>- Rapat Joint Committee (KPR, KRN)</li> <li>Pemantauan dan Pengawasan pelaksanaan Action Plan yang sudah disepakati.</li> </ul> Supervision & Review : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Internal Audit Committee Meeting</li> <li>Periodic and ad hoc monitoring and supervision related to the implementation of the Internal Audit Division Audit Plan and Special Audit Division / Fraud Case Reports, and Compliance</li> <li>- Joint Committee Meetings (KPR, KRN)</li> <li>Monitoring and Supervision of the implementation of the agreed Action Plan.</li> </ul>	Pengaturan Agenda Rapat dari Komite Audit kepada Rapat Dewan Direktur Setting the Meeting Agenda from the Audit Committee to the Board of Directors Meeting	Rapat menghasilkan rekomendasi perbaikan, dalam hal ini terhadap hasil audit dan tindak lanjut perbaikan sehingga terhindar temuan berulang The meeting resulted in recommendations for improvement, in this case the audit results and follow-up improvements so as to avoid repeated findings
13	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan fungsi Supervisi dan pelaksanaan Konsultasi lainnya sesuai penugasan dari Dewan Direktur</li> <li>- Memberikan masukan kepada Dewan Direktur</li> <li>- Performing Supervision and other Consultation functions as assigned by the Board of Directors</li> <li>- Provide input to the Board of Directors</li> </ul>	Tugas-tugas lainnya dari Dewan Direktur sesuai bidang tugas Komite Other duties of the Board of Directors in accordance with the Committee's line of duty	Memenuhi Kebutuhan LPEI Fulfilling LPEI's Needs
14	Mengikuti pelatihan, workshop dan sertifikasi lainnya Participate in training, workshops and other certifications	Peningkatan Profesionalisme anggota Komite Increasing the Professionalism of Committee members	Meningkatkan kemampuan profesional Improve professional skills



# KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

## Remuneration and Nomination Committee

Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Direktur dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Direktur dalam menentukan kebijakan remunerasi dan nominasi, dimana tugas dan fungsinya diatur dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi.

### Dasar Hukum

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (PMK 141/2009). Sebagaimana tertuang pada Pasal 37 PMK 141/2009 Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan remunerasi dan nominasi, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan remunerasi dan nominasi.

### Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi (Komite Charter)

Komite Remunerasi dan Nominasi LPEI memiliki committee charter sebagai pedoman dan tata tertib kerja Komite yang ditetapkan melalui Peraturan Dewan Direktur nomor 0008/PDD/12/2020 tentang Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

### Komposisi dan Profil Komite

Selama tahun 2021 Komposisi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak mengalami perubahan. Berdasarkan Keputusan Direktur Eksekutif (KDE) nomor 0035/KDE/06/2020, susunan Komite Remunerasi dan Nominasi LPEI adalah sebagai berikut:

### Periode Januari – Desember 2021

January – December 2021 Period

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Basis
Suminto	Ketua   Chairman	0035/KDE/06/2020
Kasan	Anggota   Member	0035/KDE/06/2020
Wahyu P Wibowo	Anggota   Member	0035/KDE/06/2020

The Remuneration and Nomination Committee was established by the Board of Directors to assist the duties implementation and function of the Board of Directors in determining the remuneration and nomination policy, whereby its duties and functions are stipulated in the Remuneration and Nomination Committee Charter.

### Legal References

The Remuneration and Nomination Committee was established based on Article 8 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Finance Number 141/PMK.010/2009 concerning Governance Principles of Indonesian Export Financing Institutions (PMK 141/2009). As stated in Article 37 of PMK 141/2009, the Remuneration and Nomination Committee has the duties and responsibilities of compiling and providing recommendations to the Board of Directors regarding remuneration and nomination policies, as well as evaluating the implementation of remuneration and nomination policies.

### Remuneration and Nomination Committee Charter

The LPEI Remuneration and Nomination Committee has a charter committee as a guideline and working order of the Committee which is stipulated through the Board of Directors Regulation number 0008/PDD/12/2020 concerning the Charter of the Remuneration and Nomination Committee of the Indonesian Export Financing Agency.

### Composition and Profile of the Committee

During 2021 the composition of the Remuneration and Nomination Committee members did not change. Based on the Decree of the Executive Director (KDE) number 0035/KDE/06/2020, the composition of the LPEI Remuneration and Nomination Committee is as follows:

## KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Remuneration and Nomination Committee

### Profil Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Remuneration and Nomination Committee Member Profile

#### **Suminto**

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi merangkap Anggota Dewan Direktur

Chairman of the Nomination and Remuneration Committee Concurrently Member of the Board of Directors

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Menjabat sebagai Anggota Komite sejak 2020 sampai dengan saat ini berdasarkan 0035/KDE/06/2020. Serve as a Member of the Committee from 2020 to the present based on 0035/KDD/12/2020.
Profil Profile	Profil dapat dilihat pada Sub Bab Profil Dewan Direktur di Bab 3 Laporan Tahunan ini. Profile can be viewed on Sub Chapter of the Board of Directors Profile in Chapter 3 of this Annual Report

#### **Kasan**

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Member of the Nomination and Remuneration Committee

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Menjabat sebagai Anggota sejak tanggal 8 Juni 2020 berdasarkan 0035/KDD/12/2020 Served as Member since June 8, 2020 based on 0035/KDD/12/2020
Domisili Domicile	Jakarta
Usia / Tempat Tanggal Lahir Age / Place Date of Birth	55 tahun per 31 Desember 2021 , Sumedang, 27 Juli 1966 55 years as of December 31, 2021, Sumedang, July 27, 1966
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doktor Ilmu Pertanian, Jurusan Ilmu Ekonomi Pertanian, Institute Pertanian Bogor (2012)</li> <li>• Magister Manajemen, Jurusan Manajemen Internasional, Universitas Indonesia (1997)</li> <li>• Sarjana Pertanian, Jurusan Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya, Institut Pertanian Bogor (1989)</li> <li>• Doctor of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Economics, Bogor Agricultural Institute (2012)</li> <li>• Master of Management, Department of International Management, University of Indonesia (1997)</li> <li>• Bachelor of Agriculture, Department of Agricultural Economics and Resources, Bogor Agricultural University (1989)</li> </ul>

## KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Remuneration and Nomination Committee

Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none"><li>• Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN), Kementerian Perdagangan RI (2020-2021)</li><li>• Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, (2019 – 2020)</li><li>• Anggota <i>Board of Director International Rubber Consortium Limited (IRco) – The International Tripartite Rubber Council (ITRC)</i>, (2018 – 2020)</li><li>• Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan, (2017 – 2020)</li><li>• Staf Ahli Hubungan Internasional, Kementerian Perdagangan RI, (2016 – 2017)</li><li>• Director General of National Export Development (PEN), Ministry of Trade of the Republic of Indonesia (2020-2021)</li><li>• Member of the Supervisory Board of the Palm Oil Plantation Fund Management Agency, (2019 – 2020)</li><li>• Member of the Board of Director International Rubber Consortium Limited (IRco) – The International Tripartite Rubber Council (ITRC), (2018 – 2020)</li><li>• Head of Trade Assessment and Development Agency, Ministry of Trade, (2017 – 2020)</li><li>• Expert Staff of International Relations, Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, (2016 – 2017)</li></ul>
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Rangkap jabatan sebagai Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan RI ( Mei 2021 – sekarang) Concurrent position as Head of the Trade Assessment and Development Agency, Ministry of Trade of the Republic of Indonesia (May 2021 – present)
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, maupun Pemegang Saham. Has no affiliation relationship, either with the Board of Directors, Managing Director, or Shareholders

## KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Remuneration and Nomination Committee

### **Wahyu P Wibowo**

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi  
Member of the Nomination and Remuneration Committee

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Menjabat sebagai Anggota sejak tanggal 19 Juni 2020 berdasarkan KDE No. 0035/KDE/06/2020 Served as Member since 19 June 2020 based on KDE No. 0035/KDE/06/2020
Domisili Domicile	Jakarta
Usia / Tempat Tanggal Lahir Age / Place Date of Birth	56 tahun per 31 Desember 2021 , Semarang 15 Agustus 1965 56 years as of 31 December 2021, Semarang 15 August 1965
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Magister Management dari SwissGerman University</li> <li>• MBA dari Konstanz University of Applied Science Swiss</li> <li>• Program Kepemimpinan INSEAD (Mei 2016 - Januari 2017)</li> <li>• Sarjana Sosial Filsafat STF Driyakara Jakarta</li> <li>• Master in Management from SwissGerman University</li> <li>• MBA from Konstanz University of Applied Science Switzerland</li> <li>• INSEAD Leadership Program (May 2016 - January 2017)</li> <li>• Bachelor of Social Philosophy STF Driyakara Jakarta</li> </ul>
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Managing Director, Chief Learning and Development Officer Prudential Life Assurance (2017 - 2019)</i></li> <li>• <i>Executive Vice President, Head of Human Resources Business Partner and Employee Engagement CIMB Niaga, (2012 - 2017)</i></li> <li>• Direktur Human Capital, Sinarmas Land (2010 - 2011)</li> <li>• Direktur Human Capital dan Corporate Affairs, Pam Lyonnaise Jaya (2004 - 2010)</li> <li>• Direktur Human Resources dan Legal, Allianz Life Indonesia (2001 - 2004)</li> <li>• <i>Human Resources Manager, Asuransi AXA Indonesia (2000 - 2001)</i></li> <li>• Managing Director, Chief Learning and Development Officer of Prudential Life Assurance (2017 - 2019)</li> <li>• Executive Vice President, Head of Human Resources Business Partner and Employee Engagement CIMB Niaga, (2012 - 2017)</li> <li>• Director of Human Capital, Sinarmas Land (2010 - 2011)</li> <li>• Director of Human Capital and Corporate Affairs, Pam Lyonnaise Jaya (2004 - 2010)</li> <li>• Director of Human Resources and Legal, Allianz Life Indonesia (2001 - 2004)</li> <li>• Human Resources Manager, Asuransi AXA Indonesia (2000 - 2001)</li> </ul>
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak Memiliki rangkap jabatan Do not have concurrent positions
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, maupun Pemegang Saham. Has no affiliation relationship, either with the Board of Directors, Managing Director, or Shareholders.

## KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Remuneration and Nomination Committee

### Periode dan Masa Jabatan

jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi disesuaikan dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengangkatan Dewan Direktur. Dengan demikian, masa jabatannya adalah 5 tahun, sesuai dengan masa jabatan sebagai anggota Dewan Direktur.

### Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah diatur dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain:

1. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan/ atau jasa konsultan lain kepada LPEI dalam 6 bulan terakhir sebelum diangkat menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Dewan Direktur LPEI.
3. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha LPEI.

### Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi, yaitu:

1. Merekomendasikan kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan remunerasi pegawai untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif, antara lain sistem penggajian, pemberian tunjangan, dan kesinambungan penghasilan pada hari tua;
2. Merekomendasikan kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan nominasi pegawai untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif, antara lain memberikan usulan kriteria seleksi dan prosedur nominasi, serta menyusun sistem penilaian;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana untuk disampaikan kepada Menteri;

### Period and Tenure

The tenure of the Remuneration and Nomination Committee members refers to the Minister of Finance Decree concerning the Appointment of the Board of Directors. As such, the term of office is 5 years, according to the term as a member of the Board of Directors.

### Independence of the Remuneration and Nomination Committee

The independence of members of the Remuneration and Nomination Committee has been regulated in the Remuneration and Nomination Committee Charter, including:

1. Not a person in a public accountant firm, legal consulting firm or any other party providing audit services, non-audit services and/or other consulting services to the Company in the last 6 months prior to being appointed as a member of the Remuneration and Nomination Committee.
2. Has no family relationship due to marriage and descent to the second degree, either horizontally or vertically with the Company's Board of Directors.
3. Does not have a business relationship, either directly or indirectly, related to the Company's business activities.

### Duties and Responsibilities

Pursuant to the Regulation of the Minister of Finance No. 141/PMK.010/2009 concerning Governance Principles of Indonesian Export Financing Institutions, the duties and responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee are:

1. Provide recommendations to the Board of Directors regarding employee remuneration policies to be submitted to the Executive Director, including, among others, the payroll system, allowances, and continuity of income during retirement;
2. Provide recommendations to the Board of Directors regarding employee nomination policies to be submitted to the Executive Director, among others by suggesting the selection criteria and nomination procedures, as well as developing an assessment system;
3. Provide recommendations to the Board of Directors on the remuneration policy for the Board of Directors, Executive Directors and Managing Directors to be submitted to the Minister;

## KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Remuneration and Nomination Committee

4. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Direktur Pelaksana dan pejabat eksekutif LPEI untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif;
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Dewan Direktur; dan
6. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan remunerasi dan nominasi.

### Suksesi Direksi

Sebagai wujud regenerasi dan kelangsungan bisnis lembaga, LPEI memiliki kebijakan suksesi Direktur Pelaksana yang diatur dalam Peraturan Dewan Direktur No. 0008/PDD/12/2018 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia diselaraskan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2/2009 tentang LPEI

Kebijakan itu juga mengatur komposisi Direktur Pelaksana yaitu paling banyak 5 (lima) orang dan paling banyak 4 (empat) di antaranya berasal dari internal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dalam aturan itu juga ditetapkan bahwa Direktur Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Direktur atas usul Direktur Eksekutif.

Secara rinci, alur suksesi Direksi dapat dilihat dalam simulasi berikut ini.

4. Compile and provide recommendations to the Board of Directors on the system and procedure for selecting and/or replacing the Executive Director and executive officers of the Company to be submitted to the Executive Director;
5. Provide recommendations to the Board of Directors regarding independent parties who will become members of the Committee of the Board of Directors;
6. Evaluating the implementation of the remuneration and nomination policies.

### Board of Directors Succession

As a regeneration and continuity of the Company's business, Indonesia Eximbank has in place a succession policy for Managing Directors, as set out in the Board of Directors Regulation No. 0008/PDD/12/2018 on the Procedures for Proposals, Appointment and Termination of the Managing Directors of Indonesia Eximbank aligned with Article 29 of Law No. 2/2009 on Indonesia Eximbank.

The policy also regulates the composition of the Managing Director, namely a maximum of 5 (five) people and a maximum of 4 (four) of whom come from internal of the Company. The regulation also stipulates that the Managing Director is appointed and dismissed by the Board of Directors at the recommendation of the Executive Director.

In details, the Board of Directors' succession flow is illustrated in the following simulation.

## KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Remuneration and Nomination Committee

### Usulan Tertulis Kandidat Direktur Pelaksana

Written Proposal for Executive Director Candidates

Dewan Direktur meminta usulan tertulis kandidat Direktur Pelaksana dari Direktur Eksekutif.

The Board of Directors requests a written proposal on candidates for Managing Director from the Chief Executive Officer.

### Direktur Eksekutif meminta pertimbangan Komite Remunerasi dan Nominasi

Chief Executive Officer asks for considerations of Remuneration & Nomination Committee

- Direktur Eksekutif wajib meminta pertimbangan Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Dalam hal Komite belum terbentuk, maka Direktur Eksekutif dapat meminta pejabat Divisi Sumber Daya Manusia, kecuali menyangkut diri pejabat yang dimaksud.
- The Chief Executive Officer is obligated to ask the considerations of the Remuneration and Nomination Committee.
- In the event that the Remuneration and Nomination Committee is not yet established, the Executive Director shall refer to the Executive in charge of Human Resources, unless the Officer is also the candidate proposed.

### Pengecekan Persyaratan

Candidate Requirements Check

Kandidat Direktur Pelaksana wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

The proposed candidates should fulfil the prevailing requirements.

### Uji Kemampuan dan Kepatuhan

Fit and Proper Test

Uji Kemampuan dan Kepatuhan dilakukan oleh Tim dengan materi uji mencakup penilaian administratif dan wawancara

Fit and Proper Test by a Team, Involving administrative evaluation and interviews

### Hasil akhir Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatuhan

Final Result of Fit and Proper Test

Berdasarkan hasil akhir, Tim menyampaikan 2 orang calon tertinggi kepada Dewan Direktur

Based on the final result of the Fit and Proper Test, the Team proposed 2(two) highest-scoring candidates to the Board of Directors.

### Keputusan Dewan Direktur

Board of Directors' Decision

Dewan Direktur menetapkan Direktur Pelaksana terpilih berdasarkan keputusan Dewan Direktur.

The Board of Directors assigns the selected Managing Directors by a Decree of the Board of Directors.

## KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Remuneration and Nomination Committee

### Program Pengembangan Komite

tahun 2021, Bapak Kasan selaku anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengikuti pelatihan sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pelatihan *Loan Covid Restructuring After Implementation of POJK 48 2020 online short course* yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus tahun 2021.

### Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2021, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali, dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

### Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Meeting Frequency and Attendance

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	% Kehadiran % Attendance
Suminto	Ketua   Chairman	11	100%
Kasan	Anggota   Member	11	100%
Wahyu P Wibowo	Anggota   Member	11	100%

### Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Remuneration and Nomination Committee Meeting Agenda

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
16 January   January 2021	1. Review Organisasi dalam rangka PEN, Penguatan UKM dan pemenuhan keputusan DD untuk memisahkan badbank dengan <i>credit review</i> 2. Usulan Perubahan Nama Kelompok Jabatan  1. Organization review in the context of PEN, Strengthening SMEs and fulfilling DD's decision to separate bad banks from credit review 2. Proposed Change of Name of Position Group	1. Suminto 2. Kasan 3. Wahyu P Wibowo
29 January   January 2021	1. <i>Manpower Planning</i> dan Biaya Tenaga Kerja 2021 2. Usulan Perubahan Struktur Organisasi  1. Manpower Planning and Labor Cost 2021 2. Proposed Changes in Organizational Structure	1. Suminto 2. Kasan 3. Wahyu P Wibowo
5 Februari   February 2021	Usulan Perubahan Struktur Organisasi (lanjutan) Proposed Changes in Organizational Structure (continued)	1. Suminto 2. Kasan 3. Wahyu P Wibowo
10 Maret   March 2021	Pembahasan Calon SEVP / <i>Head of Operation</i> dan IT Discussion of Candidates for SEVP / Head of Operations and IT	1. Suminto 2. Kasan 3. Wahyu P Wibowo
12 Maret   March 2021	Pembahasan tentang usulan kepada DD tentang Panitia Seleksi Calon Direktur Pelaksana II	1. Suminto 2. Kasan

**KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI**  
Remuneration and Nomination Committee

<b>Tanggal Date</b>	<b>Agenda Rapat Meeting Agenda</b>	<b>Peserta Participants</b>
	Discussion of the proposal to the DD regarding the Selection Committee for Candidates for the Managing Director II	3. Wahyu P Wibowo
20 Mei   May 2021	1. Proposal Penggunaan Surplus Anggaran 2020 2. Proposal Peninjauan Remunerasi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana  1. Proposal for the Use of 2020 Budget Surplus 2. Remuneration Review Proposal for Board of Directors, Executive Director and Managing Director	1. Suminto 2. Kasan 3. Wahyu P Wibowo
31 Juli   July 2021	Penyampaian Penunjukkan Anggota Komite Audit LPEI dari Inspektorat Jenderal Kemenkeu  Submission of Appointment of LPEI Audit Committee Members from the Inspectorate General of the Ministry of Finance	1. Suminto 2. Kasan 3. Wahyu P Wibowo
8 Agustus   August 2021	Pembahasan usulan distribusi Tantiem dan Jasa Produksi Tahun 2021 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan no. S-688/MK.06/2021  Discussion of the proposed distribution of Tantiem and Production Services in 2021 in accordance with the Letter of the Minister of Finance no. S-688/MK.06/2021	1. Suminto 2. Kasan 3. Wahyu P Wibowo
23 Oktober   October 2021	1. Interview Kandidat Anggota KPR 2. Rapat KRN dengan Ketua KPR 3. Rapat KRN dengan Direktur Eksekutif  1. Interview Candidates for KPR Members 2. KRN meeting with the Head of KPR 3. KRN meeting with the Executive Director	1. Suminto 2. Kasan 3. Wahyu P Wibowo
23 November 2021	1. Usulan Struktur Organisasi dan susunan pengurus Special Purpose Vehicle (SPV) LPEI 2. Mekanisme secondment pegawai yang terdampak dari pembentukan SPV LPEI 3. Pembahasan Struktur Organisasi LPEI 2022  1. Proposed Organizational Structure and composition of the LPEI Special Purpose Vehicle (SPV) management 2. The secondment mechanism for employees affected by the formation of the LPEI SPV 3. Discussion on LPEI 2022 Organizational Structure	1. Suminto 2. Kasan 3. Wahyu P Wibowo
23 Desember   December 2021	Usulan pergantian Ketua SKAI SKAI Head replacement proposal	1. Suminto 2. Kasan 3. Wahyu P Wibowo

**Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2021**

Pada tahun 2021, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menindaklanjuti keputusan yang ditetapkan dalam rapat Dewan Direktur dengan Direktur Eksekutif, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hasilnya telah direkomendasikan kepada Dewan Direktur.

**Remuneration and Nomination Committee Activities in 2021**

In 2021, the Remuneration and Nomination Committee has followed up the decisions made in the Board of Directors meeting with the Executive Directors, in accordance with their duties and functions. The results have been recommended to the Board of Directors.



# KOMITE PEMANTAU RISIKO

## Risk Monitoring Committee

Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Direktur dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Direktur dalam melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko dalam hubungannya dengan pembiayaan ekspor nasional, dimana tugas dan fungsinya diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko

### **Dasar Hukum**

Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (PMK 141/2009). Sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 36 PMK 141/2009, Komite Pemantau Risiko bertugas untuk membantu Dewan Direktur dalam melakukan penilaian independen secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dalam hubungannya dengan Pembiayaan Ekspor Nasional yang diberikan oleh LPEI.

### **Piagam Komite Pemantau Risiko**

Sebagai pedoman dan tata tertib kerja komite, terdapat Piagam Komite Pemantau Risiko yang ditetapkan melalui Peraturan Dewan Direktur No. 0009/PDD/12/2020 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan mengacu pada dasar hukum PMK 141/2009.

### **Komposisi dan Profil Komite Pemantau Risiko**

Sepanjang tahun 2021, terdapat perubahan susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko. Berdasarkan Keputusan Direktur Eksekutif (KDE) 0071/KDE/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, susunan Komite Pemantau Risiko LPEI adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position
Felia Salim	Ketua   Chairman
Rubi Pertama	Anggota   Member
Herwan Ng	Anggota   Member

The Risk Monitoring Committee was established by the Board of Directors to assist the implementation of duties and function of the Board of Directors in carrying out periodical assessment and providing recommendations on risk in relations with national export financing, where by its duties and functions are stipulated in the Risk Monitoring Charter.

### **Legal References**

The Risk Monitoring Committee was established based on Article 8 paragraph(1) of the Regulation of the Minister of Finance (PMK) No. 141/PMK.010/2009 concerning Governance Principles of Indonesia Eximbank (PMK 141/2009). As stated in the provisions of Article 36 PMK 141/2009, the Risk Monitoring Committee is tasked with assisting the Board of Directors in conducting periodic independent assessments and providing recommendations on business risks in relation to the National Export Financing provided by the Indonesia Eximbank.

### **Risk Monitoring Committee Charter**

As a guideline and working order of the committee, there is a Risk Monitoring Committee Charter established through Board of Directors Regulation No. 0009/PDD/12/2020 concerning the Risk Monitoring Committee Charter of Indonesia Eximbank with reference to the legal basis of PMK 141/2009.

### **Composition and Profile of Risk Management**

In 2021, there was a change in the membership composition of the Risk Monitoring Committee. Based on Executive Director Decree (KDE) 0071/KDE/10/2020 dated October 26, 2020 regarding Membership of the Risk Monitoring Committee of Indonesia Eximbank, the composition of the Risk Monitoring Committee is as follows:

**KOMITE PEMANTAU RISIKO**  
Risk Monitoring Committee

Per 31 Desember 2021, berdasarkan Keputusan Direktur Eksekutif (KDE) 0092/KDE/11/2021 tanggal 1 November 2021 tentang Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, susunan Komite Pemantau Risiko LPEI adalah sebagai berikut:

As of 31 December 2021, based on Executive Director Decree (KDE) 0092/KDE/11/2021 dated 1 November 2021 regarding Membership of the Risk Monitoring Committee of Indonesia Eximbank, the composition of the Risk Monitoring Committee is as follows:

<b>Nama</b> Name	<b>Jabatan</b> Position
Felia Salim	Ketua   Chairman
Putu Rahwidhiyasa	Anggota   Member

**Profil Komite Pemantau Risiko**  
Risk Monitoring Committee Profile

**Felia Salim**

Ketua Komite Pemantau Risiko merangkap Anggota Dewan Direktur  
Chairman of the Risk Monitoring Committee Concurrently Member of the Board of Directors

Dasar Hukum Pengangkatan 0092/KDE/11/2021  
Legal Basis of Appointment

Profil  
Profile Profil dapat dilihat pada Sub Bab Profil Dewan Direktur di Bab 3 Laporan Tahunan ini.  
Profile can be viewed on Sub Chapter of the Board of Directors Profile in Chapter 3 of  
this Annual Report

## KOMITE PEMANTAU RISIKO

Risk Monitoring Committee

### Putu Rahwidhiyasa

Anggota Komite Pemantau Risiko  
Member Risk Monitoring Committee

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	0092/KDE/11/2021
Periode Jabatan Position Period	1 November 2021 - sekarang 1 November 2021 - present
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta
Usia / Tempat Tanggal Lahir Age / Place Date of Birth	57 tahun per 31 Desember 2021, Jakarta, 13 September 1964 57 years as of 31 December 2021, Jakarta, 13 September 1964
Riwayat Pendidikan Educationa Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana di Institute Pertanian Bogor pada tahun 1986</li> <li>Magister di the University of Illinois, USA tahun 1995</li> </ul>
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bachelor degree at Bogor Agricultural Institute in 1986</li> <li>Masters at the University of Illinois, USA in 1995</li> <li>Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)(Agustus 2020 s.d. sekarang).</li> <li>Berbagai jabatan dan terakhir sebagai Direktur Risk Management &amp; Compliance, Bank Syariah Mandiri (2008 – 2020)</li> <li>Berbagai jabatan di Bank Mandiri (Februari 1999 – Juli 2020)</li> <li>Komisaris Rumah Sakit Puri Cinere (2003 s.d. 2006).</li> <li>Komisaris PT Merincorp Securities Indonesia (2001)</li> <li>Berbagai jabatan di Bank Ekspor Impor Indonesia dan terakhir sebagai Manager di Initial Public Offering (IPO) Team (Oktober 1987 sd Januari 1999).</li> <li>Director of Sharia Business and Entrepreneurship, National Committee for Sharia Economy and Finance (KNEKS)(August 2020 to present).</li> <li>Various positions and most recently as Director of Risk Management &amp; Compliance, Bank Syariah Mandiri (2008 – 2020)</li> <li>Various positions at Bank Mandiri (February 1999 – July 2020)</li> <li>Commissioner of Puri Cinere Hospital (2003 to 2006).</li> <li>Commissioner of PT Merincorp Securities Indonesia (2001)</li> <li>Various positions in the Export Import Bank of Indonesia and most recently as Manager in the Initial Public Offering (IPO) Team (October 1987 to January 1999).</li> </ul>

**KOMITE PEMANTAU RISIKO**  
Risk Monitoring Committee

**Periode dan Masa Jabatan**

Menunjuk Kputusan Direktur Eksekutif Nomor 0092/KDE/11/2021 tanggal 1 November 2021 tentang Keanggotaan Komite Pemantau Risiko LPEI, masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko adalah selama 3 (tiga) tahun sejak 1 November 2021 sampai dengan 31 Oktober 2024, serta dapat diperpanjang selama 1(satu) kali apabila menunjukkan kinerja yang baik.

**Independensi komite**

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko berasal dari pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan/atau anggota komite lainnya.

**Tugas dan Tanggung Jawab**

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko berdasarkan Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan Peraturan Dewan Direktur Nomor 0009/PDD/12/2020 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko untuk melakukan penilaian secara berkala dalam rangka membantu Dewan Direktur untuk memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dalam hubungannya dengan Pembiayaan Ekspor Nasional yang diberikan oleh LPEI, paling kurang dilaksanakan dengan melakukan:

1. Evaluasi tentang kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaku tersebut;
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko; dan
3. Tugas-tugas lain yang sesuai dengan fungsi Komite Pemantau Risiko atas permintaan Dewan Direktur

**Program Pengembangan Komite**

Selama tahun 2021, anggota Komite Pemantau Risiko ikut berpartisipasi dalam program pengembangan sebagai berikut:

**Period and Tenure**

Referring to the Decree of the Executive Director Number 0092/KDE/11/2021 dated 1 November 1, 2021 regarding Membership of the Risk Monitoring Committee, the term of office of members of the Risk Monitoring Committee is for 3 (three) years from 1 November 2021 to 31 October 2024, and can be extended for as long as 1 (one) time if it shows good performance.

**Independence of the committee**

All members of the Risk Monitoring Committee come from independent parties who have no financial, stock management and/or family relationship with the Board of Directors, Executive Director, Managing Director, and/or other committee members.

**Duties and responsibilities**

The duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee are based on Article 36 of the Regulation of the Minister of Finance No. 141/PMK.010/2009 on Governance Principles of Indonesia Eximbank and Regulation of the Board of Directors No. 0009/PDD/12/2020 on the Risk Monitoring Committee Charter to carry out periodic assessments in order to assist the Board of Directors in providing recommendations on business risks in relation to the National Export Financing provided by the Company, at the least carried out by:

1. Evaluation of the suitability between the Risk Management Policy and the implementation of the policy;
2. Monitoring and evaluating the implementation of duties of the Risk Management Work Unit; and
3. Other duties in accordance with the functions of the Risk Monitoring Committee at the request of the Board of Directors.

**Committee Development Program**

During 2021, members of the Risk Monitoring Committee participated in the following development programs:

## KOMITE PEMANTAU RISIKO

Risk Monitoring Committee

Nama Name	Jenis Pelatihan/Seminar Training/Seminar Type	Penyelenggara Organizer	Tanggal & Lokasi Penyelenggaraan Organizatin Date & Location
Felia Salim	Loan Covid Restructuring After Implementation of POJK 48 2020	Bankers Association for Risk Management	Jakarta, 5 Agustus   August 2021
Rubi Pertama*	Loan Covid Restructuring After Implementation of POJK 48 2020	Bankers Association for Risk Management	Jakarta, 5 Agustus   August 2021
Herwan Ng*	Loan Covid Restructuring After Implementation of POJK 48 2020	Bankers Association for Risk Management	Jakarta, 5 Agustus   August 2021

(\*) Masa jabatan berakhir pada 31 Oktober 2021 | Term ends on 31 October 2021

### Rapat Komite, Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Selama tahun 2021, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 24 (dua puluh empat) kali rapat dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

### Committee Meetings, Frequency and Attendance

During 2021, the Risk Monitoring Committee has held 24 (twenty-four) meetings with the following frequency and level of attendance:

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Frequency	Jumlah Number	Percentase Percentage
Felia Salim	Ketua   Chairman	24	24	100%
Rubi Pertama*	Anggota   Member	19	19	100%
Herwan Ng*	Anggota   Member	19	19	100%
Putu Rahwidhiyasa**	Anggota   Member	5	5	100%

(\*) Masa jabatan berakhir pada 31 Oktober 2021 | Term ends on 31 October 2021  
 (\*\*\*) Efektif per tanggal 1 November 2021 | Effective as of 1 November 2021

### Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee Meeting Agenda

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1	20 Januari   January 2021	Pembahasan Laporan Bulanan Portfolio Quality Posisi Desember 2020 Discussion of the Monthly Portfolio Quality Report as of December 2020	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama 3. Herwan Ng 4. Chesna F Anwar 5. Rossiyana Amir
2	10 Februari   February 2021	Pembahasan Laporan Tahunan KPR 2020 Discussion of the 2020 KPR Annual Report	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama 3. Herwan Ng
3	2 Maret   March 2021	1. Laporan Tingkat Kesehatan LPEI Triwulan IV/2020 2. Laporan Bulanan Portfolio Quality posisi Januari 2021 3. Laporan IT Incident 1. LPEI Health Level Report Quarter IV/2020	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama 3. Herwan Ng 4. Chesna F Anwar

**KOMITE PEMANTAU RISIKO**  
Risk Monitoring Committee

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
		2. Monthly Portfolio Quality Report for January 2021 3. IT Incident Report	5. Rossiyana Amir 6. Yudi Imandapurba
4	3 Maret   March 2021	1. Kinerja Keuangan Desember 2020 dan Januari 2021 2. Update Progress Audit 2020 3. Kualitas Aset (Loan at Risk) Februari 2021  1. Financial Performance December 2020 and January 2021 2. Update Audit Progress 2020 3. Asset Quality (Loan at Risk) February 2021	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama 3. Herwan Ng 4. Hendi Wibawa
5	8 Maret   March 2021	1. Risiko Operasional terkait Sumber Daya Manusia 2. Employee Engagement Survey (EES)  1. Operational Risks related to Human Resources 2. Employee Engagement Survey (EES)	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama 3. Herwan Ng 4. Wahyu P Wibowo 5. Sumarno 6. Rossiyana Amir 7. Thio Sucy 8. Novi Rahmati 9. Sidik Mahanda
6	8 Maret   March 2021	1. Stress Testing 2. MIS Project: FTP & Cost Allocation 3. Dampak Insiden serangan virus/ransomware terhadap sistem laporan keuangan  1. Stress Testing 2. MIS Project: FTP & Cost Allocation 3. Impact of the incident of virus/ransomware attacks on the financial reporting system	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama 3. Herwan Ng 4. Anwar Harsono 5. Rini Satriani 6. Rossiyana Amir
7	29 Maret   March 2021	Laporan Portfolio Quality posisi Februari 2021 Portfolio Quality Report position February 2021	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama 3. Herwan Ng 4. Titiek Setiowati 5. Sidik Mahanda
8	26 April 2021	Pembahasan Laporan Komite Pemantau Risiko Triwulan I th 2021 Discussion on the Report of the Risk Monitoring Committee for the first quarter of 2021	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama 3. Herwan Ng
9	5 Mei   May 2021	1. Laporan Profil Risiko Triwulan I/2021 2. Laporan Portfolio Quality posisi Maret 2021  1. Risk Profile Report Quarter I/2021 2. Portfolio Quality Report position March 2021	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama 3. Herwan Ng 4. Titiek Setiowati 5. Sidik Mahanda
10	4 Juni   June 2021	Laporan Portfolio Quality posisi April 2021 Portfolio Quality Report position April 2021	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama 3. Herwan Ng 4. Henry Sihotang 5. Titiek Setiowati 6. Sidik Mahanda

**KOMITE PEMANTAU RISIKO**  
Risk Monitoring Committee

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
11	28 Juni   June 2021	Pembahasan Laporan Komite Pemantau Risiko Periode Triwulan II/2021 Discussion on the Report of the Risk Monitoring Committee for Quarter II/2021	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama 3. Herwan Ng
12	30 Juni   June 2021	1. Laporan <i>Portfolio Quality</i> posisi Mei 2021 2. Update Program Kerja Prioritas Risk Management Tahun 2021  1. Portfolio Quality Report position May 2021 2. Update on the 2021 Risk Management Priority Work Program	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama 3. Herwan Ng 4. Henry Sihotang 5. Titiek Setiyowati 6. Sidik Mahanda
13	8 Juli   July 2021	Pemaparan rencana penerapan ESMS di LPEI oleh konsultan Hatfield Presentation of the ESMS implementation plan at LPEI by consultant Hatfield	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama 3. Herwan Ng 4. Chesna F. Anwar 5. Wahyu P. Wibowo 6. Sumarno 7. Rossiana Amir
14	21 Juli   July 2021	1. Kinerja Keuangan Semester I/2021 2. Stress Test Kualitas Asset Q2 2021  1. Financial Performance Semester I/2021 2. Asset Quality Stress Test Q2 2021	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama 3. Herwan Ng 4. Anwar Harsono 5. Titiek Setiyowati 6. Sidik Mahanda 7. Rini Satriani
15	30 Juli   July 2021	1. Laporan Tingkat Kesehatan TW II/2021 2. Laporan Portfolio Quality posisi Juni 2021 3. Laporan Pelaksanaan <i>Early Warning Detection</i> 4. Progress Penyusunan Profil Risiko per Unit Kerja  1. TW II/2021 Health Level Report 2. Portfolio Quality Report position June 2021 3. Early Warning Detection Implementation Report 4. Progress of Risk Profile Preparation per Work Unit	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama 3. Herwan Ng 4. Titiek Setiyowati 5. Sidik Mahanda
16	18 Agustus   August 2021	Pembahasan draft Kebijakan Sertifikasi Manajemen Risiko Discussion of the Risk Management Certification Policy draft	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama 3. Herwan Ng 4. Wahyu P Wibowo 5. Novi Rahatmi
17	1 September 2021	1. <i>Portfolio Quality Report</i> Juli 2021 2. Deep Dive Eksposur 3 Sektor Industri Terbesar 3. Update Review Parameter Profil Risiko terkait Syariah 4. Progress Update Kebijakan Manajemen Risiko (ERM) 5. Progress Penyusunan Profil Risiko per Unit Kerja  1. Portfolio Quality Report July 2021 2. Deep Dive Exposure 3 Largest Industrial Sectors 3. Update Review of Risk Profile Parameters related to Sharia 4. Progress Update of Risk Management Policy (ERM) 5. Progress of Risk Profile Preparation per Work Unit	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama 3. Herwan Ng 4. Titiek Setiyowati 5. Sidik Mahanda

**KOMITE PEMANTAU RISIKO**  
Risk Monitoring Committee

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
18	27 September 2021	1. Portfolio Quality Report Agustus 2021 2. Progress Penyusunan Profil Risiko per Unit Kerja  1. Portfolio Quality Report August 2021 2. Progress of Risk Profile Preparation per Work Unit	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama 3. Herwan Ng 4. Titiek Setyowati 5. Sidik Mahanda
19	7 October   October 2021	Prioritas dan RKAT 2022 Priorities and RKAT 2022	1. Felia Salim 2. Rubi Pertama 3. Herwan Ng 4. Titiek Setyowati 5. Sidik Mahanda
20	11 November 2021	Update kinerja keuangan, kualitas aset ( <i>Loan at Risk</i> ), penjaminan, asuransi dan permodalan  Update on financial performance, asset quality ( <i>Loan at Risk</i> ), guarantee, insurance and capital	1. Felia Salim 2. Putu Rahwidhiyasa 3. Titiek Setyowati 4. Sidik Mahanda
21	17 November 2021	<i>Induction KPR</i> dengan Manajemen Risiko KPR Induction with Risk Management	1. Felia Salim 2. Putu Rahwidhiyasa 3. Titiek Setyowati 4. Sidik Mahanda
22	1 Desember   December 2021	1. Perencanaan dan Keuangan 2. MIS Data Project 3. Treasury dan Tata Kelola ALCO  1. Planning and Finance 2. MIS Data Project 3. Treasury and ALCO Governance	1. Felia Salim 2. Putu Rahwidhiyasa 3. Benny K. Yudiaatmaja 4. Anwar Harsono 5. Paul H. 6. Emilia Tisnamisastra
23	10 Desember   December 2021	1. Segmen Bisnis Syariah 2. <i>Operating model</i> dan proses persetujuan shariah <i>financing</i> 3. Kualitas Asset Syariah 4. SDM Syariah 5. Peran Dewan Pengawas Syariah  1. Sharia Business Segment 2. Operating model and approval process for shariah financing 2. Sharia Asset Quality 3. Sharia HR 4. 5. The Role of the Sharia Supervisory Board	1. Felia Salim 2. Putu Rahwidhiyasa 3. Benny K. Yudiaatmaja
24	16 Desember   December 2021	1. Pemaparan Divisi IEB Institute 2. Pemaparan Divisi Kepatuhan dan Audit  1. IEB Institute Division Presentation 2. Presentation of the Compliance and Audit Division	1. Felia Salim 2. Putu Rahwidhiyasa 3. Benny K. Yudiaatmaja 4. Agung Waluyo 5. Wahyu P. Wibowo 6. Rini Satriani 7. Thio Sucy

## KOMITE PEMANTAU RISIKO

Risk Monitoring Committee

### Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2021

Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu:

1. Melakukan review dan evaluasi atas target rencana bisnis LPEI tahun 2021 yang dituangkan dalam RKAT dan Indikator Kinerja Utama (IKU) lembaga dari perspektif manajemen risiko yang mencakup antara lain:
  - a. Pemantauan dan pengawasan periodik pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko
  - b. Kerangka dan Tata Kelola Manajemen Risiko atau *Risk Management Framework & Governance*
  - c. Pelaksanaan Mandat dan Kesesuaian Manajemen Risiko Bisnis termasuk review program National Interest Account (NIA)
  - d. Kecukupan Manajemen Risiko Kredit terutama dalam masa pandemi COVID-19
  - e. Kecukupan Manajemen Risiko Operasional
  - f. Kecukupan Manajemen Risiko Likuiditas
  - g. Kecukupan Fungsi-fungsi Infrastruktur
  - h. Memfasilitasi Pelaporan Dewan Direktur ke DJKN
2. Mengkaji laporan-laporan rutin seperti:
  - a. Laporan Pengawasan RKAT LPEI oleh Dewan Direktur
  - b. Laporan Perbaikan Kualitas Pembiayaan
  - c. Laporan Profil Risiko dan laporan rutin manajemen risiko
3. Melakukan rapat berkala dengan Ketua Komite Pemantau Risiko
4. Melakukan rapat berkala dengan unit kerja Manajemen Risiko & Perencanaan Strategis/Keuangan serta unit kerja lainnya untuk memperoleh klarifikasi dan tambahan informasi atas laporan-laporan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas Komite Pemantau Risiko.
5. Melakukan evaluasi kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan, seperti:
  - a. Memonitor dan memfasilitasi desain GRC termasuk ERM

### Implementation of Risk Monitoring Committee Activities in 2021

The Risk Monitoring Committee has carried out various activities in accordance with its duties and responsibilities, namely:

1. Review and evaluate the Company's business plan targets for 2021 as outlined in the RKAT and Key Performance Indicators(IKU)from a risk management perspective which includes, among others:
  - a. Periodic monitoring and supervision of the implementation of the tasks of the Risk Management Unit
  - b. Risk Management Framework and Governance
  - c. Implementation of the Mandate and Conformity of Business Risk Management including review of the National Interest Account (NIA) program
  - d. Adequacy of Credit Risk Management, especially during the COVID-19 pandemic
  - e. Adequacy of Operational Risk Management
  - f. Adequacy of Liquidity Risk Management
  - g. Adequacy of Infrastructure Functions
  - h. Facilitating the Reporting of the Board of Directors to DJKN
2. Reviewing routine reports such as:
  - a. RKAT Supervision Report by the Board of Directors
  - b. Financing Quality Improvement Report
  - c. Risk Profile Reports and routine risk management reports
3. Conduct regular meetings with the Chair of the Risk Monitoring Committee
4. Conduct regular meetings with the Risk Management & Strategic/Financial Planning work unit and other work units to obtain clarification and additional information on reports and other matters related to the duties of the Risk Monitoring Committee.
5. Evaluating the conformity between the Risk Management Policy and the implementation of policies, such as:
  - a. Monitor and facilitate GRC design including ERM

- b. Memfasilitasi penyusunan (a) *Risk Appetite* dan penyetarasannya dengan RKAT; memberikan masukan mengenai (b) *Risk Capacity, Risk Tolerance, Risk Acceptance Criteria, Industry Risk Rating* dan parameter-parameternya
  - c. Memastikan kesesuaian struktur fungsi manajemen risiko dan merekomendasikan pengisian secepatnya beberapa posisi kosong MRO; juga melengkapi anggota KPR
  - d. Terkait *Board Governance*, mereview dan memastikan efektivitas *Board Engagement* dalam kerangka *One Board* dan efektivitas proses pengambilan keputusan.
6. Pemantauan dan pengawasan periodik pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko, seperti:
- a. Mempelajari efektivitas laporan-laporan Manajemen Risiko
  - b. Merekendasikan perbaikan terkait 2 (dua) faktor risiko terbesar yaitu risiko kredit dan risiko operasional
  - c. Memastikan kecukupan kebijakan terkait faktor-faktor risiko utama lainnya.
7. Melakukan pemantauan hal-hal strategis lembaga lainnya, seperti:
- a. Pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan terkait *Environmental, Social, and Corporate Governance* (ESG)
  - b. Kecukupan Manajemen Risiko Bisnis Syariah dan Asuransi
  - c. Kecukupan Manajemen Risiko Operasional termasuk Teknologi Informasi(TI) dan *Management Information System* (MIS).
- b. Facilitate the preparation of (a) Risk Appetite and its alignment with the RKAT; provide input regarding (b) Risk Capacity, Risk Tolerance, Risk Acceptance Criteria, Industry Risk Rating and its parameters
  - c. Ensuring the appropriateness of the structure of the risk management function and recommending the immediate filling of several vacant MRO positions; also equip KPR members
  - d. Regarding Board Governance, reviewing and ensuring the effectiveness of Board Engagement within the One Board framework and the effectiveness of the decision-making process.
6. Periodic monitoring and supervision of the implementation of the tasks of the Risk Management Work Unit, such as:
- a. Studying the effectiveness of Risk Management reports
  - b. Recommend improvements related to the 2 (two) biggest risk factors, namely credit risk and operational risk
  - c. Ensure the adequacy of policies related to other key risk factors.
7. Monitoring strategic matters of other institutions, such as:
- a. Implementation of the Sustainable Finance Action Plan related to Environmental, Social, and Corporate Governance (ESG)
  - b. Adequacy of Sharia and Insurance Business Risk Management
  - c. Adequacy of Operational Risk Management including Information Technology (IT) and Management Information System (MIS).

**KOMITE PEMANTAU RISIKO**  
Risk Monitoring Committee

**Program Kerja Tahun 2021**  
**2021 Work Program**

<b>RENCANA KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO 2021</b> Risk Monitoring Committee Work Plan 2021								
No	Work Plan	Work in Progress	Unit / PIC	Priority	Mapping Relationship with IKU & 9 Initiatives Project 2020	Ref#	Expected Output	Target Date
1	Pemantauan dan pengawasan periodik pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko  Periodic monitoring and supervision of the implementation of the tasks of the Risk Management Work Unit	Mempelajari efektifitas laporan-laporan Manajemen Risiko  Studying the effectiveness of Risk Management reports	CRO (DP V)	HIGH	IKU #5	KPR1.1	Laporan-laporan Manajemen Risiko yang lebih baik dari segi kualitas  Better Risk Management Reports in terms of quality	02/20
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merekomendasikan perbaikan terkait 2 (dua) faktor risiko terbesar yaitu risiko kredit dan risiko operasional</li> <li>• Memastikan kecukupan kebijakan terkait faktor-faktor risiko utama lainnya</li> <li>• Recommend improvements related to the 2 (two) biggest risk factors, namely credit risk and operational risk</li> <li>• Ensure the adequacy of policies related to other key risk factors</li> </ul>			IKU #5 9 initiatives project	KPR1.2	Kerangka kerja dan kebijakan Manajemen Risiko Kredit dan Operasional dan risiko utama lainnya yang memenuhi standar best practices  Credit and Operational Risk Management framework and policies and other key risks that meet the best practice standards	04/20
2	Kerangka dan Tata Kelola Manajemen Risiko  Risk Management Framework & Governance	Memonitor dan memfasilitasi disain GRC termasuk ERM  Monitor and facilitate GRC design including ERM	CRO (DP V)	MEDIUM	IKU #5 9 initiatives project	KPR3.1	Implementasi kerangka kerja GRC termasuk ERM yang memadai  Implementation of the GRC framework including adequate ERM	04/20
		Memfasilitasi penyusunan <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Risk Appetite dan penyealarasannya dengan RKAT; memberikan masukan mengenai</li> <li>b) Risk Capacity, Risk Tolerance, Risk Acceptance Criteria, Industry Risk Rating dan parameter-parameternya</li> </ul> Facilitating the preparation of <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Risk Appetite and its alignment with RKAT; provide input regarding</li> </ul>	CFO (DP III) / CRO (DP V)	HIGH	IKU #5 9 initiatives project	KPR3.2	a) Penerapan Risk Appetite Statement dalam rencana strategis Lembaga  a) Implementation of the Risk Appetite Statement in the Institution's strategic plan	02/20

**KOMITE PEMANTAU RISIKO**  
Risk Monitoring Committee

<b>RENCANA KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO 2021</b> Risk Monitoring Committee Work Plan 2021								
No	Work Plan	Work in Progress	Unit / PIC	Priority	Mapping Relationship with IKU & 9 Initiatives Project 2020	Ref#	Expected Output	Target Date
3	<p>b) Risk Capacity, Risk Tolerance, Risk Acceptance Criteria, Industry Risk Rating and its parameters</p> <p>Memastikan kesesuaian struktur fungsi manajemen risiko dan merekomendasikan pengisian secepatnya beberapa posisi kosong MRO; juga melengkapi anggota KPR</p> <p>Ensuring the appropriateness of the risk management function structure and recommending the immediate filling of several vacant MRO positions; also equip KPR members</p> <p>Terkait Board Governance: Mereview dan memastikan efektifitas Board Engagement dalam kerangka One Board dan efektifitas proses pengambilan keputusan</p> <p>Regarding Board Governance: Review and ensure the effectiveness of Board Engagement within the One Board framework and the effectiveness of the decision-making process</p>	<p>IKU #5 9 initiatives project</p> <p>IKU #5 9 initiatives project</p> <p>IKU #5 9 initiatives project</p>	<p>KPR3.3</p> <p>KPR3.4</p> <p>KPR3.5</p>	<p>Fungsi organisasi manajemen risiko yang efektif serta ketersediaan SDM yang memadai untuk mengisi posisi kosong MRO dan anggota KPR</p> <p>Effective risk management organizational functions and the availability of adequate human resources to fill the vacant positions of MRO and KPR members</p> <p>Pelaksanaan Board Engagement yang efektif dan memadai dalam kerangka One Board system</p> <p>Effective and adequate implementation of Board Engagement within the framework of the One Board system</p>	<p>b) Serta turunannya Risk parameters lainnya</p> <p>b) And its derivatives other Risk parameters</p>	<p>02/20</p> <p>02/20</p> <p>02/20</p>		
3	Penguatan Balance Sheet dan Proses Bisnis Internal  Strengthening Balance Sheet and Internal Business Process	a)Manajemen harus mereview business profile yang tidak sesuai dengan mandat serta menyiapkan design phase out secara hati-hati dan bertahap; b)kinerja usaha sesuai IKU;	DE / SEVP1	HIGH	IKU #1 IKU #4	KPR4.1	a) Business profile yang sesuai dengan mandat LPEI(PEN)  a) Business profile in accordance with the LPEI (PEN) mandate	03/20

**KOMITE PEMANTAU RISIKO**  
Risk Monitoring Committee

<b>RENCANA KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO 2021</b> Risk Monitoring Committee Work Plan 2021								
No	Work Plan	Work in Progress	Unit / PIC	Priority	Mapping Relationship with IKU & 9 Initiatives Project 2020	Ref#	Expected Output	Target Date
		c)review semua produk/ layanan dan efektifitas manual produk  a)Management must review business profiles that are not in accordance with the mandate and prepare a design phase out carefully and gradually; b)business performance according to KPI; c)review of all products/ services and the effectiveness of the product manual			IKU #1 IKU #4 IKU #6	KPR4.2	b)kinerja bisnis termasuk menjalankan mandat SMV; PKE; peningkatan UKM; melakukan riset competition analysis dan market insight untuk UKM Indonesia Timur b)business performance including carrying out SMV's mandate; PKE; improvement of SMEs; conducting research on competition analysis and market insight for Eastern Indonesian SMEs	Triwulan
					IKU #1	KPR4.3	c)Semua produk dan layanan LPEI telah sesuai dengan mandat SMV yang didukung dengan manual produk yang memadai dan efektif sehingga risiko reputasi dapat diminimasi  c>All LPEI products and services are in accordance with the SMV mandate supported by adequate and effective product manuals so that reputational risk can be minimized	03/20
		Perlu dilakukannya review terhadap <i>Loan Pricing Model</i> (memantau NIM)  It is necessary to review the <i>Loan Pricing Model</i> (monitor NIM)	CFO (DP III) / CRO (DP V)	MEDIUM	IKU #3	KPR4.4	Penerapan <i>Loan Pricing Model</i> yang tepat dan efektif; (NIM lebih baik)  Appropriate and effective application of <i>Loan Pricing Model</i> ; (NIM is better)	04/20
		Mereview program NIA dan memastikan penerapan kerangka manajemen risiko yang tepat dan efektif	SEVP 1	MEDIUM	IKU #2	KPR4.5	Kecukupan manajemen risiko dalam implementasi program NIA	03/20

**KOMITE PEMANTAU RISIKO**  
Risk Monitoring Committee

<b>RENCANA KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO 2021</b> Risk Monitoring Committee Work Plan 2021								
No	Work Plan	Work in Progress	Unit / PIC	Priority	Mapping Relationship with IKU & 9 Initiatives Project 2020	Ref#	Expected Output	Target Date
		Review the NIA program and ensure proper and effective implementation of the risk management framework					Adequacy of risk management in the implementation of the NIA program	
4	Kecukupan Manajemen Risiko Kredit terutama dalam masa pandemi Covid-19 dan pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)  Adequacy of Credit Risk Management, especially during the Covid-19 pandemic and the implementation of the National Economic Recovery (PEN) program	Memonitor penerapan kebijakan relaksasi karena Covid-19 terhadap kualitas asset dengan tetap memperhatikan cashflow basis  Monitor the implementation of the relaxation policy due to Covid-19 on asset quality while still paying attention to the cash flow basis	DP IV	HIGH	IKU #1	KPR5.1	Penerapan kebijakan relaksasi yang tepat dan efektif terkait COVID-19  Appropriate and effective relaxation policies related to COVID-19	02/20
		Memberikan masukan mengenai skenario dan parameter perhitungan Stress Testing terhadap portofolio pembiayaan terkait pandemi COVID-19  Provide input regarding scenarios and parameters for calculating Stress Testing for financing portfolios related to the COVID-19 pandemic	CFO (DP III) / CRO (DP V)	HIGH	IKU #7	KPR5.2	Perhitungan Stress Testing yang tepat dan akurat terkait COVID-19  Calculation of precise and accurate Stress Testing related to COVID-19	02/20
		Mereview revisi action plan resolusi NPL utk OJK yg tidak dapat dihindari akibat COVID-19  Reviewing the revision of the NPL resolution action plan for OJK which was unavoidable due to COVID-19	DP IV	HIGH	IKU #7	KPR5.3	Revisi action plan resolusi NPL yang dapat diterima terkait Covid-19 (pantau rasio NPL)  Revision of acceptable NPL resolution action plan related to Covid-19 (monitor NPL ratio)	02/20
		Memberikan masukan mengenai penanganan NPL agar supaya lebih fokus  Provide input regarding the handling of NPLs so that they are more focused	DP IV	HIGH	IKU #7	KPR5.4	Terobosan dalam pemisahan pengelolaan NPL melalui 'sandbox' bad bank (pantau rasio NPL)  Breakthrough in separating NPL management through bad bank 'sandbox' (monitor NPL ratio)	02/20

**KOMITE PEMANTAU RISIKO**  
Risk Monitoring Committee

<b>RENCANA KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO 2021</b> Risk Monitoring Committee Work Plan 2021								
No	Work Plan	Work in Progress	Unit / PIC	Priority	Mapping Relationship with IKU & 9 Initiatives Project 2020	Ref#	Expected Output	Target Date
5	Kecukupan Manajemen Risiko Operasional termasuk Teknologi Informasi (TI) dan Management Information System (MIS)  Adequacy of Operational Risk Management including Information Technology (IT) and Management Information System (MIS)	Memastikan kecukupan BCP dan/atau Crisis Management karena munculnya tantangan Covid-19; dan mereview apakah akan terjadi perubahan proses secara permanen ke depan  Ensuring the adequacy of BCP and/or Crisis Management due to the emerging challenges of Covid-19; and reviewing whether there will be permanent process changes going forward	CRO (DP V) / SEVP 2 / SEVP 4	HIGH	IKU #8	KPR6.1	Tersedianya BCP yang baku dan memadai terkait COVID-19  Availability of standard and adequate BCP related to COVID-19	03/20
		Merekomendasikan peningkatan efektifitas berbagai proses/operasional melalui migrasi pemrosesan manual ke otomasi / digitalisasi (terutama untuk pembiayaan UKM, Monitoring PDO)  Recommend increasing the effectiveness of various processes/ operations through manual processing migration to automation/ digitization (especially for SME financing, PDO monitoring)	SEVP 2 / DP II	HIGH	IKU #3	KPR6.2	Pelaksanaan migrasi pemrosesan manual ke otomasi / digitalisasi untuk pembiayaan UKM dan monitoring PDO; (pantau perbaikan CER)  Implementation of manual processing migration to automation / digitization for SME financing and PDO monitoring; (monitor CER repair)	03/20
		Memantau penataan Struktur Organisasi sesuai kebutuhan lembaga  Monitor the arrangement of the Organizational Structure according to the needs of the institution	SEVP 4	MEDIUM	IKU #8	KPR6.3	Organisasi yang agile; CER lebih baik  Agile organization; CER is better	03/20
		Peningkatan kapasitas dan Kapabilitas SDM  HR Capacity and Capability building	SEVP 4	HIGH	IKU #9	KPR6.4	SDM yang berkompeten dan berkinerja tinggi  Competent and high-performing HR	04/20

**KOMITE PEMANTAU RISIKO**  
Risk Monitoring Committee

<b>RENCANA KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO 2021</b> Risk Monitoring Committee Work Plan 2021								
No	Work Plan	Work in Progress	Unit / PIC	Priority	Mapping Relationship with IKU & 9 Initiatives Project 2020	Ref#	Expected Output	Target Date
6	Pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan terkait <i>Environmental, Social, and Corporate Governance</i> (ESG)  Implementation of the Sustainable Finance Action Plan related to Environmental, Social, and Corporate Governance (ESG)	Mereview Kebijakan ALM dan pemantauan eksposur risiko likuiditas melalui parameter dan metrics yang sesuai dan efektif  Reviewing ALM Policy and monitoring liquidity risk exposure through appropriate and effective parameters and metrics	CFO (DP III) / CRO (DP V)	MEDIUM	IKU #3	KPR7.1	Penerapan Kebijakan ALM dan pemantauan risiko likuiditas yang tepat dan efektif (NIM lebih baik)  Appropriate and effective implementation of ALM Policy and monitoring of liquidity risk (better NIM)	03/20
		Mereview Kebijakan efektifitas pengelolaan dana PMN  Reviewing PMN fund management effectiveness policy	CFO (DP III)	MEDIUM	IKU #1 IKU #2	KPR7.2	Penerapan Kebijakan pengelolaan dana PMN yang efektif  Implementation of an effective PMN fund management policy	03/20
7	Kecukupan Manajemen Risiko Bisnis Shariah dan Asuransi  Adequacy of Sharia and Insurance Business Risk Management	Mereview IT architecture dan IT Risk Governance  Reviewing IT architecture and IT Risk Governance	SEVP 2 / CRO (DP V)	MEDIUM	IKU #10	KPR8.1	Tersedianya IT architecture dan IT Risk Governance yang memenuhi standar best practices  Availability of IT architecture and IT Risk Governance that meet best practice standards	03/20
		Memonitor peningkatan kemampuan mengembangkan MIS dan Data Governance  Monitoring the capacity building to develop MIS and Data Governance	SEVP 2 / CRO (DP V)	MEDIUM	IKU #10	KPR8.2	Tersedianya MIS dan Data Governance yang memenuhi standar best practices  Availability of MIS and Data Governance that meet best practice standards	03/20
		Mereview kapasitas dan kapabilitas SDM termasuk sistem SDM seperti talent management; compensation and benefit yang kompetitif (koordinasi dengan KRN)  Reviewing the capacity and capability of HR, including HR systems such as talent management; competitive compensation and benefits (coordination with KRN)	SEVP 4	HIGH	IKU #3 IKU #9	KPR8.3	Tersedianya SDM yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai; (produktifitas, dan CER)  Availability of human resources with adequate capacity and capability; (productivity, and CER)	04/20



# ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF

## Executive Director Supporting Organs

Guna mendukung tugas dan fungsinya, Direktur Eksekutif membentuk komite-komite yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Eksekutif. Peraturan Direktur Eksekutif mengatur struktur dan keanggotaan komite, tugas dan tata cara pengambilan keputusan. Penunjukan keanggotaan bersifat *ex-officio* sehingga kewenangan pengambilan keputusan melekat kepada jabatan.

Berikut komite-komite di bawah Direktur Eksekutif:

1. Komite Manajemen Risiko
2. Komite Kebijakan dan Pedoman
3. Komite Pembiayaan
4. Komite Penjaminan PEN
5. Komite Pengembangan Produk
6. Komite Assets dan Liabilities
7. Komite Personalia
8. Komite Etik dan Disiplin Pegawai
9. Komite Teknologi dan Sistem Informasi
10. Komite Pengadaan

In performing its duties and functions, the Executive Director establishes the committees stipulated in the Executive Director Regulations. The Executive Director Regulation stipulates the committee's structure and membership, duties and decision-making procedures. Members' appointments are *ex-officio* hence the authority of decision-making is embedded into the position.

Below are the Committees of the Executive Director:

1. Risk Management Committee
2. Policy and Guidelines Committee
3. Financing Committee
4. PEN Assurance Committee
5. Product Development Committee
6. Assets and Liabilities Committee
7. Personnel Committee
8. Employee Discipline and Ethics Committee
9. Technology and Information Systems Committee
10. Procurement Committee

## KOMITE MANAJEMEN RISIKO

### Risk Management Committee

Struktur dan kewenangan Komite Manajemen Risiko ditetapkan dalam Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0024/PDE/05/2019 tanggal 23 Mei 2019 Tentang Komite Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Dengan adanya perubahan struktur organisasi, maka dilakukan penyesuaian dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0031/PDE/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 Tentang Komite Manajemen Risiko.

#### Status Keanggotaan dan Status Hak Suara Membership and Voting Rights Status

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman and Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi fungsi Manajemen Risiko Managing Director in charge of the Risk Management function
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice-Chairman and Permanent Member	Head of yang membidangi Manajemen Risiko Head of in charge of Risk Management

The structure and authority of the Risk Management Committee is stipulated in Executive Director Regulation Number 0024/PDE/05/2019 dated 23 May 2019 concerning the Risk Management Committee of the Indonesian Export Financing Agency.

With the change in the organizational structure, adjustments were made to the issuance of Executive Director Regulation Number 0031/PDE/12/2021 dated 13 December 2021 concerning the Risk Management Committee.

## ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF

### Executive Director Supporting Organs

Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary and Permanent Member	Kepala Divisi dari unit kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Head of Division of the work unit that carries out the Risk Management function
Anggota Members	Anggota Tetap   Permanent Members: 1. Direktur Pelaksana selain Ketua 2. Head of yang membidangi Kepatuhan 3. Head of yang membidangi Internal Audit 1. Managing Director other than the Chairman 2. Head of Compliance 3. Head of Internal Audit
	Anggota Tidak Tetap   Non-permanent Members : 1. Head of selain anggota tetap; 2. Kepala Divisi/ pejabat setingkat Kepala Divisi selain anggota tetap yang terkait dengan materi pembahasan. 1. Head of other than permanent members; 2. Head of Division/officer at the level of Division Head other than permanent members related to the discussion material.

#### Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif antara lain mengenai:

- Penyusunan strategi dan program penerapan Manajemen Risiko.
- Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
- Penetapan (*justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).

#### Kebijakan Pengambilan Keputusan

Pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko dapat bersifat rutin maupun *incidental* dengan memperhatikan tingkat urgensi permasalahan yang perlu diangkat (*matters arriving*) maupun hak *prerogative* dari ketua Komite. Tata cara pengambilan keputusan Komite, yaitu:

- Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau secara sirkuler.
- Pengambilan keputusan Komite dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh:
  - Ketua atau Wakil Ketua;
  - Sekretaris;
  - Anggota tetap selain Ketua/ Wakil Ketua dan sekretaris dengan kehadiran lebih dari setengah anggota tetap;

#### Duties and Authorities

The duties and authorities of the Risk Management Committee are to provide recommendations to the Executive Director, among others:

- Formulation of strategies and programs for the implementation of Risk Management.
- Improvement of Risk Management based on the results of the evaluation.
- Determination (*justification*) of matters related to business decisions that deviate from normal procedures (*irregularities*).

#### Decision Making Policy

The implementation of the Risk Management Committee meeting can be routine or incidental by taking into account the level of urgency of the issues that need to be raised (*matters arriving*) and the prerogative of the Committee chairman. Procedures for decision-making of the Committee is as follows:

- The Committee decisions can be made through face-to-face meetings or in a circular manner.
- The Committee's decision-making is considered a quorum if it is attended by at least:
  - Chairman or Deputy Chairperson;
  - Secretary;
  - Permanent members other than the Chairman/Vice-Chairman and secretary with the presence of more than half of the permanent members;

## ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF

Executive Director Supporting Organs

- c. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- d. Seluruh keputusan Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditatausahakan secara lengkap dan tertib.

### **Agenda dan Frekuensi Kehadiran Rapat**

Komite Manajemen Risiko menyelenggarakan rapat Komite Manajemen Risiko sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali atau setiap saat apabila dipandang perlu. Sepanjang tahun 2021, Komite Manajemen Risiko telah melakukan 2 (dua) kali rapat dengan agenda sebagai berikut:

- c. Meeting decisions must be made based on deliberation for consensus.
- d. All decisions of the Committee must be stated in the Minutes of Meeting and administered in a complete and orderly manner.

### **Meeting Agenda and Attendance Frequency**

The Risk Management Committee holds a Risk Management Committee meeting at least once every 6 (six) months or whenever deemed necessary. Throughout 2021, the Risk Management Committee has held 2 (two) meetings with the following agenda:

**Tabel Frekuensi & Kehadiran Komite Manajemen Risiko 2021**  
**Risk Management Committee 2021 Meeting Frequency and Attendance**

Nama Name	Jabatan Position	Frequency Frequency	Kehadiran Attendance	(%)
Direktur Pelaksana I Managing Director I	Anggota Tetap Permanent Member	2	1	50
Direktur Pelaksana II Managing Director II	Anggota Tetap Permanent Member	2	2	100
Direktur Pelaksana III Managing Director III	Anggota Tetap Permanent Member	2	2	100
Direktur Pelaksana IV Managing Director IV	Ketua Chairman	2	2	100
Direktur Pelaksana V Managing Director V	Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	2	2	100

**Tabel Agenda Rapat Komite Manajemen Risiko 2021**  
**Risk Management Committee 2021 Meeting Agenda**

No	Bulan / Month	Agenda
1	Jul-21	Tingkat Kesehatan LPEI TW II 2021, Portfolio Quality Report Juni 2021, Program Kerja Divisi RPM 2021 LPEI Quarter II 2021 Health Level, Portfolio Quality Report June 2021, RPM Division Work Program 2021
2	Oct-21	Tingkat Kesehatan LPEI TW III 2021, Penyesuaian Parameter Profil Risiko TW III 2021, Risk Register LPEI (RCSA), dan Portfolio Quality Report September 2021 LPEI Quarter III 2021 Health Level, Adjustment of Risk Profile Parameters for TW III 2021, LPEI Risk Register (RCSA), and Portfolio Quality Report September 2021

## **KOMITE KEBIJAKAN DAN PEDOMAN** Policy And Guidelines Committee

Komite Kebijakan dan Pedoman dibentuk berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif No. 0032/PDE/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Komite Kebijakan dan Pedoman Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

The Policy and Guidelines Committee was established based on the Executive Director Regulation No. 0032/PDE/12/2021 dated 13 December 2021 regarding the Policy and Guidelines Committee for Indonesia Eximbank.

### **Struktur dan Keanggotaan Komite Kebijakan dan Pedoman** Structure and Membership of the Policy and Guidelines Committee

#### **Komite Kebijakan dan Pedoman Kategori A**

#### **Policy and Guidelines Committee Category A**

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman and Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi fungsi kebijakan dan pedoman Managing Director in charge of policy and guideline functions
Sekretaris, merangkap Anggota Tetap Secretary and Permanent Member	Kepala Divisi dari unit kerja yang melaksankan fungsi kebijakan dan pedoman Head of Division of the work unit that carries out the function of policies and guidelines
Anggota Members	<p>Anggota Tetap:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Direktur Pelaksana selain Ketua;</li><li>2. Head of yang membidangi fungsi kepatuhan;</li><li>3. Head of yang membidangi fungsi Internal Audit;</li></ol> <p>Anggota Tidak Tetap:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Head of selain anggota tetap;</li><li>2. Kepala Divisi/ pejabat setingkat Kepala Divisi selain anggota tetap; yang terkait dengan materi pembahasan.</li></ol> <p>Permanent member:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Managing Director other than the Chairman;</li><li>2. Head of compliance function;</li><li>3. Head of Internal Audit function;</li></ol> <p>Non-Permanent Members:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Head of other than permanent members;</li><li>2. Head of Division/officer at the level of Division Head other than permanent members; related to the topic of discussion.</li></ol>

#### **Komite Kebijakan dan Pedoman Kategori B**

#### **Policy and Guidelines Committee Category B**

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman and Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi fungsi kebijakan dan pedoman Managing Director in charge of policy and guideline functions
Sekretaris, merangkap Anggota Tetap Secretary and Permanent Member	Kepala Divisi dari unit kerja yang melaksankan fungsi kebijakan dan pedoman Managing Director in charge of policy and guideline functions

## ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF

Executive Director Supporting Organs

<p>Anggota Member</p>	<p>Anggota Tetap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Divisi dari Unit Kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko;</li> <li>2. Kepala Divisi dari Unit Kerja yang melaksanakan fungsi Kepatuhan;</li> <li>3. Kepala Divisi dari Unit Kerja yang melaksanakan fungsi Hukum;</li> <li>4. Kepala Divisi dari Unit Kerja yang melaksanakan fungsi Internal Audit;</li> </ol> <p>Anggota Tidak Tetap:</p> <p>Kepala Divisi/ pejabat setingkat Kepala Divisi selain anggota tetap yang terkait dengan materi pembahasan.</p> <p>Permanent member:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Head of Division of the Work Unit that carries out the Risk Management function;</li> <li>2. Head of Division of the Work Unit that carries out the Compliance function;</li> <li>3. Head of Division of the Work Unit that carries out the Legal function;</li> <li>4. Head of Division of the Work Unit that carries out the Internal Audit function;</li> </ol> <p>Non-Permanent Members:</p> <p>Head of Division/officer at the level of Division Head other than permanent members related to the discussion material.</p>
-----------------------	---

### **Tugas dan Tanggung Jawab**

Tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan dan Pedoman antara lain:

- a. Menyetujui rancangan peraturan internal LPEI dan disampaikan kepada Direktur Eksekutif untuk dilakukan penetapannya oleh Direktur Eksekutif atau Dewan Direktur;
- b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan internal LPEI serta merumuskan solusi atas kendala yang dihadapi dalam bentuk *periodic meeting* atau pembahasan temuan audit terkait peraturan.

### **Tata Cara Pengambilan Keputusan**

Tata cara pengambilan keputusan Komite Kebijakan dan Pedoman adalah sebagai berikut:

- a. Pengambilan keputusan Komite dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh:
  - Ketua;
  - Sekretaris;
  - Anggota tetap selain Ketua dan Sekretaris dengan kehadiran lebih dari setengah anggota tetap; dan
  - 1(satu) anggota tidak tetap.
- b. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

### **Duties and Responsibilities**

Duties and responsibilities of the Policy and Guidelines Committee include:

- a. Approve the draft of Indonesia Eximbank internal regulations and submit it to the Executive Director for stipulation by the Executive Director or the Board of Directors;
- b. Supervise the implementation of Indonesia Eximbank internal regulations and formulate solutions to issues through periodic meetings or discussion of audit findings related to regulations.

### **Decision Making Procedures**

The procedure for decision-making by the Policy and Guidelines Committee is as follows:

- a. The Committee's decision-making is considered a quorum if it is attended by at least:
  - Chairman;
  - Secretary;
  - Permanent members other than the Chairman and Secretary with the presence of more than half of the permanent members; and
  - 1(one) non-permanent member.
- b. Meeting decisions must be made based on deliberation for consensus.

## ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF

### Executive Director Supporting Organs

#### Agenda dan Frekuensi Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2021, Komite Kebijakan dan Pedoman telah melakukan 3 (tiga) kali rapat dengan agenda sebagai berikut:

#### Meeting Agenda and Attendance Frequency

Throughout 2021, the Policy and Guidelines Committee has held 3(three) meetings with the following agenda:

**Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Kebijakan dan Pedoman 2021**  
**Policy and Guidelines Committee 2021 Meeting Frequency and Attendance**

Nama Name	Jabatan Position	Frequency Frequency	Kehadiran Attendance	(%)
Direktur Pelaksana I Managing Director I	Anggota Tetap Permanent Member	3	3	100
Direktur Pelaksana II Managing Director II	Anggota Tetap Permanent Member	3	3	100
Direktur Pelaksana III Managing Director III	Anggota Tetap Permanent Member	3	3	100
Direktur Pelaksana IV Managing Director IV	Anggota Tetap Permanent Member	3	3	100
Direktur Pelaksana V Managing Director V	Ketua Chairman	3	3	100
<i>Head Of Compliance, HR, and TO</i>	Anggota Tetap Permanent Member	3	3	100
<i>Head of Internal Audit</i>	Anggota Tetap Permanent Member	3	3	100
Kepala Divisi Policy & Prosedur Policy & Procedure Division Head	Sekretaris Secretary	3	3	100

**ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF**  
Executive Director Supporting Organs

## KOMITE PEMBIAYAAN

### Financing Committee

Struktur dan kewenangan Komite Pembiayaan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Komite Pembiayaan dan Komite Spesial Asset Management sektor Komersial merujuk pada
  - Lampiran Peraturan Direktur Eksekutif No. 0029/PDE/12/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Manual Operasional Pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
  - Memorandum Prosedur No. MPO.0009/CEO/04/2021 tanggal 28 April 2021 tentang Perubahan PDE No. 0029/PDE/12/2020.
  - Memorandum Prosedur No. MPO.0015/CEO/07/2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang Perubahan Peraturan Direktur Eksekutif No. 0029/PDE/12/2020 dan Memorandum Prosedur No. MPO.0009/CEO/04/2021.
- b. Komite Pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor sektor UKM berorientasi ekspor merujuk pada Keputusan Direktur Eksekutif No. 0089/KDE/10/2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Anggota Komite Pembiayaan Program Penugasan Khusus Ekspor Dalam Rangka Mendukung Sektor UKM Berorientasi Ekspor.
- c. Komite Pembiayaan Supply Chain Financing merujuk pada Keputusan Direktur Eksekutif No. 0090/KDE/10/2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Anggota Komite Pembiayaan Supply Chain Financing.

#### Struktur Keanggotaan Komite Pembiayaan

#### Financing Committee Membership Structure

##### 1. Komite Pembiayaan (Sektor Komersial)

Financing Committee (Commercial Sector)

Fungsi Bisnis

- 1) Direktur Pelaksana I
- 2) Direktur Pelaksana III
- 3) Direktur Pelaksana III
- 4) Head of Guarantee

The structure and authority of the Financing Committee is determined as follows:

- a. The Financing Committee and the Asset Management Special Committee for the Commercial sector refer to
  - Attachment of Executive Director Regulation No. 0029/PDE/12/2020 dated December 23, 2020 regarding the Operational Manual of Financing Indonesian Export Financing Institutions.
  - Memorandum of Procedure No. MPO.0009/CEO/04/2021 dated 28 April 2021 regarding Amendment to PDE No. 0029/PDE/12/2020.
  - Memorandum of Procedure No. MPO.0015/CEO/07/2021 dated 19 July 2021 regarding Amendment to Executive Director Regulation No. 0029/PDE/12/2020 and Memorandum of Procedure No. MPO.0009/CEO/04/2021.
- b. The Committee for Financing the Special Assignment of Exports for the export-oriented SME sector refers to Executive Director Decree No. 0089/KDE/10/2021 dated October 26, 2021 concerning Members of the Financing Committee for the Special Export Assignment Program in the Framework of Supporting the Export-Oriented SME Sector.
- c. The Supply Chain Financing Committee refers to Executive Director Decree No. 0090/KDE/10/2021 dated October 26, 2021 regarding Members of the Supply Chain Financing Committee.

Fungsi Risiko

- 1) Direktur Eksekutif
- 2) Direktur Pelaksana IV
- 3) Direktur Pelaksana V
- 4) Head of Credit & Risk
- 5) Kepala Divisi Credit Reviewer I / II

**ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF**  
Executive Director Supporting Organs

Business Function 1) Managing Director I 2) Managing Director III 3) Managing Director III 4) Head of Guarantee	Risk Function 1) Executive Director 2) Managing Director IV 3) Managing Director V 4) Head of Credit & Risk 5) Credit Reviewer Division Head I/II
---	--

**2. Komite Special Asset Management (Sektor Komersial)**

Special Asset Management Committee (Commercial Sector)

Fungsi Bisnis 1) Direktur Pelaksana I/ II 2) Direktur Pelaksana IV 3) Head of Guarantee	Fungsi Risiko 1) Direktur Eksekutif 2) Direktur Pelaksana III 3) Direktur Pelaksana V 4) Head of Credit & Risk 5) Kepala Divisi Credit Reviewer I/II
Business Function 1) Managing Director I/II 2) Managing Director IV 3) Head of Guarantee	Risk Function 1) Executive Director 2) Managing Director III 3) Managing Director V 4) Head of Credit & Risk 5) Credit Reviewer Division Head I/II

**3. Komite Pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor Sektor UKM Berorientasi Ekspor**

Special Assignment Financing Committee for Export-Oriented SME Sector

Fungsi Bisnis   Business Function 1) Maqin U. Norhadi 2) Pretty Halim 3) Koerniawan Prijambodo 4) Abianti Riana 5) Ninik Martini 6) Joni Haryanto	Fungsi Risiko   Risk Function 1) Titiek Setiyowati 2) Ade Achdiat 3) Farid Maruf 4) Pandu Wiguno 5) Firdaus Effendi 6) Salem Assagaf
---	--

**4. Komite Pembiayaan Supply Chain Financing** | Supply Chain Financing Committee

Fungsi Bisnis   Business Function 1) Maqin U. Norhadi 2) Pretty Halim 3) Koerniawan Prijambodo 4) Abianti Riana 5) Ninik Martini	Fungsi Risiko   Risk Function 1) Titiek Setiyowati 2) Ade Achdiat 3) Farid Maruf 4) Pandu Wiguno
---	--

**Tugas dan Wewenang**

1. Komite Pembiayaan (sektor komersial)
  - a. Melakukan pengambilan keputusan atas proposal Pembiayaan, penjaminan, asuransi, pembayaran klaim serta *global line* dan *bank line* (lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank), *country limit*, dan Fasilitas Penugasan Khusus.

**Duties and Authorities**

1. Financing Committee (commercial sector)
  - a. Making decisions on proposals for financing, guarantees, insurance, claim payments as well as global lines and bank lines (bank financial institutions and non-bank financial institutions), country limits, and special assignment facilities.

## ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF

Executive Director Supporting Organs

- b. Melakukan penetapan *account strategy* dan memantau pelaksanaan *account strategy* atas nasabah.
  - c. Melakukan pengambilan keputusan atas proposal penetapan tingkat kualitas aktiva produktif (kolektibilitas), dalam hal penetapan dilakukan secara manual.
  - d. Melakukan pengambilan keputusan atas imbalan Pembiayaan terkait Fasilitas Penugasan Khusus apabila tidak ditetapkan melalui Keputusan Menteri.
2. Komite Special Asset Management (sektor komersial)
- a. Melakukan pengambilan keputusan atas proposal penanganan pembiayaan bermasalah meliputi pembinaan pembiayaan berpotensi bermasalah, penyelamatan pembiayaan bermasalah, dan penyelesaian perniagaan bermasalah termasuk untuk Penugasan Khusus. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan atas Nasabah kelolaan Unit Kerja Pembiayaan, Unit Kerja Pembiayaan yang Ditunjuk dan Unit Kerja yang menangani Pembiayaan Bermasalah.
  - b. Melakukan pengambilan keputusan atas proposal penetapan tingkat kualitas aktiva (dalam hal dilakukan secara manual) dan menetapkan nilai CKPN Individual.
  - c. Melakukan pengambilan keputusan atas *account strategy* dan *action plan* terhadap Nasabah Pembiayaan Berpotensi Bermasalah dan Nasabah Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*).
  - d. Memantau pelaksanaan *account strategy* dan *action plan* atas nasabah-nasabah sebagaimana ditetapkan pada butir c di atas.
3. Komite Pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor sektor UKM berorientasi ekspor
- a. Melakukan pengambilan keputusan pembiayaan program PKE UKM;
  - b. Menetapkan *pipeline* program PKE UKM yang diusulkan oleh unit kerja pengusul/pengelola pembiayaan program PKE UKM;
  - c. Mensupervisi proses pengusulan dan perkembangan kualitas pembiayaan.
- b. Determine the account strategy and monitor the implementation of the account strategy for customers.
  - c. Making decisions on the proposal for determining the quality level of earning assets (collectibility), in the case that the determination is done manually.
  - d. Make a decision on the Financing fee related to the Special Assignment Facility if it is not stipulated through a Ministerial Decree.
2. Special Asset Management Committee (commercial sector)
- a. Making decisions on proposals for handling non-performing financing including fostering potentially problematic financing, rescuing non-performing financing, and resolving problematic financing, including for Special Assignments. The decision is made on the Customer managed by the Financing Work Unit, the Designated Financing Work Unit and the Work Unit that handles Problem Financing.
  - b. Make decisions on the proposal for determining the level of asset quality (in the case that it is done manually) and determine the value of Individual CKPN.
  - c. Making decisions on account strategy and action plans for Potentially Problematic Financing Customers and Non-Performing Financing Customers.
  - d. Monitor the implementation of account strategy and action plans for customers as stipulated in point c above.
3. The Committee for Financing for the Export-oriented SME sector
- a. Making decisions on financing the SME PKE program;
  - b. Determine the SME PKE program pipeline proposed by the work unit proposing/managing the SME PKE program financing;
  - c. Supervise the process of proposing and developing the quality of financing.

**ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF**  
Executive Director Supporting Organs

4. Komite Pembiayaan *Supply Chain Financing*
- Melakukan pengambilan keputusan terkait dengan pembiayaan SCF dengan limit sampai dengan Rp25 miliar.
  - Mensupervisi proses pengusulan dan perkembangan kualitas pembiayaan SCF.
4. Supply Chain Financing Committee
- Make decisions related to SCF financing with a limit of up to Rp25 billion.
  - Supervise the process of proposing and developing the quality of SCF financing.

**Kebijakan Pengambilan Keputusan**

**A. Tata Kerja Pengambilan Keputusan Komite Pembiayaan dan Komite Special Asset Management**

- Pengambilan keputusan Komite Pembiayaan dilakukan melalui rapat tatap muka, baik secara langsung maupun melalui teleconference atau video conference. Keputusan (disposisi dan tanda tangan) dapat diberikan secara langsung melalui dokumen *hardcopy* atau melalui persetujuan by system(*online*).
- Ketentuan Pengambilan Keputusan oleh Komite Pembiayaan:
  - Pengambilan keputusan dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh:
    - 2 (dua) orang anggota yang mewakili Fungsi Bisnis, dan
    - 3 (tiga) orang anggota yang mewakili Fungsi Risiko, dimana salah satu anggotanya merupakan Direktur Pelaksana.
  - Kepala Divisi yang membidangi Analisis Risiko Pembiayaan yang melakukan *review* atas (calon) Nasabah yang diajukan tidak menjadi anggota Komite Pembiayaan.
  - Dalam hal pengambilan keputusan untuk:
    - Nasabah baru dan/atau tambahan fasilitas dengan plafon group (*one obligor*) > ekuivalen Rp 1 triliun dan plafon individu > ekuivalen Rp 500 miliar, selain bank line dan/atau *global line*;
    - Nasabah dengan skema *clean basis & negative pledge* dan/atau;
    - Terdapat ketentuan-ketentuan yang menggunakan kondisi khusus sebagaimana diatur pada Manual Operasional Pembiayaan; maka salah satu anggota dari Fungsi Risiko adalah Direktur Eksekutif.
  - Dewan Direktur dalam rapat Komite Pembiayaan bertindak sebagai Observer.

**Decision Making Policy**

**A. Procedures for Decision Making of the Financing Committee and the Special Asset Management Committee**

- Financing Committee decisions are made through face-to-face meetings, either in person or via teleconference or video conference. Decisions (disposition and signature) can be given directly through hardcopy documents or through approval by system(*online*).
- Provisions for Decision Making by the Financing Committee:
  - Decision making is considered a quorum if it is attended by at least:
    - 2 (two) members representing the Business Function, and
    - 3 (three) members representing the Risk Function, one of which is the Managing Director.
  - The Division Head in charge of Financing Risk Analysis who reviews the proposed (prospective) Customers is not a member of the Financing Committee.
  - In terms of making a decision to:
    - New customers and/or additional facilities with group ceiling (*one obligor*) > equivalent to Rp 1 trillion and individual ceiling > equivalent to Rp 500 billion, other than bank line and/or *global line*;
    - Customers with a clean basis & negative pledge scheme and/or;
    - There are provisions that use special conditions as regulated in the Financing Operations Manual;  
then one of the members of the Risk Function is the Executive Director.
  - The Board of Directors in the meeting of the Financing Committee acts as an Observer.

## ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF

Executive Director Supporting Organs

- e. Pengambilan keputusan oleh Komite Pembiayaan untuk menyetujui atau menolak proposal Pembiayaan didasarkan atas persetujuan seluruh anggota komite yang hadir (kuorum).
  - f. Apabila ada pemutus dari sisi Fungsi Risiko yang menolak, maka keputusan akhir atas proposal yang diajukan ditolak.
3. Ketentuan Pengambilan Keputusan oleh Komite *Special Asset Management*:
- a. Pengambilan keputusan dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh:
    - i. 2 (dua) orang anggota yang mewakili Fungsi Bisnis, dan
    - ii. 3 (tiga) orang anggota yang mewakili Fungsi Risiko, dimana salah satu anggotanya merupakan Direktur Pelaksana/Senior Executive Vice President (*Head of*).
  - b. Direktur Pelaksana dari Unit Kerja Pengusul/Pengelola awal tidak menjadi anggota Komite *Special Asset Management*.
  - c. Kepala Divisi yang membidangi Analisis Risiko Pembiayaan yang melakukan review atas (calon) Nasabah yang diajukan tidak menjadi anggota Komite *Special Asset Management*.
  - d. Dalam hal pengambilan keputusan untuk, antara lain:
    - i. Nasabah dengan plafon > ekuivalen Rp 500 miliar, selain *bank line* dan/atau *global line*
    - ii. Nasabah dengan skema *clean basis & negative pledge*, dan/atau
    - iii. Terdapat ketentuan-ketentuan yang menggunakan kondisi khusus sebagaimana diatur pada Manual Operasional Pembiayaan maka salah satu anggota dari Fungsi Risiko adalah Direktur Eksekutif.
  - e. Dewan Direktur dalam rapat Komite *Special Asset Management* bertindak sebagai Observer.
  - f. Pengambilan keputusan oleh Komite *Special Asset Management* untuk menyetujui atau menolak proposal Pembiayaan didasarkan atas persetujuan seluruh anggota komite yang hadir (kuorum).
  - g. Apabila ada pemutus dari sisi Fungsi Risiko yang menolak, maka keputusan akhir atas proposal yang diajukan ditolak.
- e. Decision making by the Financing Committee to approve or reject the Financing proposal is based on the approval of all committee members present (quorum).
  - f. If there is a decision maker from the Risk Function side who refuses, then the final decision on the proposal submitted is rejected.
3. Provisions for Decision Making by the Special Asset Management Committee:
- a. Decision making is considered a quorum if it is attended by at least:
    - i. 2 (two) members representing the Business Function, and
    - ii. 3 (three) members representing the Risk Function, one of which is the Managing Director/Senior Executive Vice President (*Head of*).
  - b. The Managing Director of the Initial Proposing/Managing Work Unit is not a member of the Special Asset Management Committee.
  - c. The Division Head in charge of Financing Risk Analysis who reviews the proposed (prospective) Customers is not a member of the Special Asset Management Committee.
  - d. In terms of making decisions for, among others:
    - i. Customers with a ceiling > equivalent to Rp 500 billion, other than bank line and/or global line
    - ii. Customers with a clean basis & negative pledge scheme, and/or
    - iii. There are provisions that use special conditions as regulated in the Financing Operations Manual  
then one of the members of the Risk Function is the Executive Director.
  - e. The Board of Directors in the meeting of the Special Asset Management Committee acts as Observer.
  - f. Decision-making by the Special Asset Management Committee to approve or reject the Financing proposal is based on the approval of all committee members present (quorum).
  - g. If there is a decision maker from the Risk Function side who refuses, then the final decision on the proposal submitted is rejected.

**ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF**  
Executive Director Supporting Organs

4. Masing-masing anggota Komite Pembiayaan/Komite *Special Asset Management* saling independen dan mempunyai kewenangan yang sama dalam memutus atau menolak suatu proposal Pembiayaan.
5. Pemutusan pembiayaan mengacu pada prinsip *one obligor*
6. Dalam hal terdapat anggota Nasabah grup mengajukan fasilitas baru/tambahan, maka pemutusan Pembiayaan dilakukan sebagai berikut:
  - a. Tidak mendapat konfirmasi *negative* dari *Global Account Manager*(divisi koordinator *account group* atau divisi yang memiliki pengelolaan *account group* terbesar).
  - b. Dikonsolidasikan dalam *total exposure* grup Nasabah saat *annual review*.
7. Setiap pemutusan Pembiayaan yang dilakukan oleh Komite Pembiayaan/Komite *Special Asset Management* dituangkan dalam Memorandum Keputusan Pembiayaan (MKP).
8. Putusan Pembiayaan dituangkan secara tertulis, tegas, dan jelas dalam MKP yang sekurang-kurangnya mencantumkan:
  - a. Waktu dan tempat pelaksanaan rapat;
  - b. Daftar nama anggota Komite Pembiayaan/Komite *Special Asset Management*,
  - c. Keputusan rapat, yang meliputi namun tidak terbatas pada: data informasi Nasabah, total eksposur, rekapitulasi jaminan, rekomendasi struktur pembiayaan yang diberikan, dan sebagainya.
9. Penandatanganan MKP dilakukan oleh seluruh anggota Komite Pembiayaan/ Komite *Special Asset Management* yang hadir(kuorum).
10. Dalam hal terdapat penolakan suatu permohonan Pembiayaan, maka penolakan tersebut diberitahukan kepada (calon) Nasabah oleh Unit Kerja Pengusul/Pengelola dan harus dilaporkan kepada pejabat pemegang kewenangan memutus di Unit Kerja Pengusul/Pengelola serta didokumentasikan dalam sistem.
4. Each member of the Financing Committee/Special Asset Management Committee is independent of each other and has the same authority in deciding or rejecting a Financing proposal.
5. Termination of financing refers to the principle of one obligor
6. In the event that a member of the Group Customer proposes a new/additional facility, the termination of the Financing shall be carried out as follows:
  - a. Did not receive negative confirmation from the Global Account Manager (the division of the account group coordinator or the division that has the largest account group management).
  - b. Consolidated in the total exposure of the Customer group during the annual review.
7. Every Financing decision made by the Financing Committee/Special Asset Management Committee is stated in the Financing Decision Memorandum (MKP).
8. The Financing Decision shall be stated in writing, firmly, and clearly in the MKP which at least includes:
  - a. The time and place of the meeting;
  - b. List of names of members of the Financing Committee/Special Asset Management Committee,
  - c. Meeting decisions, which include but are not limited to: customer information data, total exposure, recapitulation of guarantees, recommendations for the financing structure provided, and so on.
9. The MKP is signed by all members of the Financing Committee/Special Asset Management Committee present (quorum).
10. In the event that there is a rejection of a Financing application, the refusal is notified to the (prospective) Customer by the Proposing/Managing Work Unit and must be reported to the official with the decision-making authority in the Proposing/Managing Work Unit and documented in the system.

## ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF

Executive Director Supporting Organs

- 11. Pada dasarnya, keputusan penolakan yang diambil oleh Komite yang telah dituangkan dalam Memorandum Keputusan Pembiayaan tidak wajib diinformasikan secara tertulis kepada pemohon dan tidak dapat dilakukan banding. Namun demikian, apabila terdapat data atau informasi baru yang positif, maka dimungkinkan untuk dilakukan peninjauan kembali terhadap keputusan terdahulu dengan mengikuti tahapan proses pemutusan Pembiayaan.
- 12. Dalam proses pemutusan pembiayaan, Komite juga memiliki wewenang untuk memutus pembebanan biaya-biaya (dana talangan/tagihan lain-lain) yang tidak dapat dipenuhi Nasabah pada waktunya, seperti biaya penutupan asuransi barang agunan, biaya Notaris/ PPAT dan/atau Konsultan Hukum (antara lain yang terkait dengan pengikatan agunan), biaya penilaian agunan; yang akan dibebankan pada rekening pinjaman Nasabah (dalam rangka pengamanan LPEI). Biaya-biaya tersebut dapat dibebankan sepaih oleh LPEI pada pos biaya dan ongkos dan selanjutnya Unit Kerja Pengusul/ Pengelola dimaksud harus melakukan penagihan dan penyelesaian kewajiban tersebut kepada Nasabah.
- 13. Dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan sumber pendanaan dan suku bunga/margin/ bagi hasil/fee (*ujrah*) (*pricing*), harus merujuk pada keputusan Assets & Liabilities Management Committee (ALCO).
- 14. Unit Kerja yang membidangi Manajemen Risiko menyusun rekapitulasi pelaksanaan Komite Pembiayaan/Komite Special Asset Management kepada Dewan Direktur secara bulanan bersama dalam Laporan Bulanan Manajemen Risiko.
- B. Tata Kerja Pengambilan Keputusan Komite Pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor sektor UKM berorientasi ekspor**
- 1. Pemutusan Program PKE UKM terdiri dari 2 (dua) orang anggota komite dengan ketentuan 1 (satu) anggota Komite Fungsi Bisnis dan 1 (satu) anggota Komite Fungsi Risiko.
- 11. Basically, the rejection decision taken by the Committee which has been stated in the Memorandum of Financing Decisions does not have to be informed in writing to the applicant and cannot be appealed. However, if there are new positive data or information, it is possible to review the previous decisions by following the stages of the Financing termination process.
- 12. In the process of deciding on financing, the Committee also has the authority to decide on the imposition of costs (bridging funds/other invoices) that cannot be fulfilled by the Customer on time, such as the cost of closing insurance for collateral goods, fees for Notary/PPAT and/or Legal Consultants (among other things related to the binding of collateral), the cost of valuation of the collateral; which will be charged to the customer's loan account (in order to secure LPEI). These costs may be imposed unilaterally by LPEI on the post of fees and costs and then the Proposing/ Managing Work Unit concerned must collect and settle these obligations to the Customer.
- 13. In making decisions regarding sources of funding and interest rates/margins/profit sharing/fees (*ujrah*) (*pricing*), the Assets & Liabilities Management Committee (ALCO) must refer to decisions.
- 14. The Work Unit in charge of Risk Management prepares a summary of the implementation of the Financing Committee/Special Asset Management Committee to the Board of Directors on a monthly basis together in the Risk Management Monthly Report.
- B. Work Procedures for Decision Making of the Special Assignment Financing Committee for Export-Oriented SME Sector**
- 1. Termination of the SME PKE Program consists of 2 (two) committee members with the provisions of 1 (one) member of the Business Function Committee and 1 (one) member of the Risk Function Committee.

**ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF**  
Executive Director Supporting Organs

2. Pengambilan keputusan Komite Pembiayaan Program PKE UKM dapat dilakukan melalui rapat (tatap muka), sirkuler atau media lainnya, antara lain melalui teleconference, video conference atau sarana komunikasi lainnya.
3. Dalam hal penyelenggaran rapat Komite Pembiayaan Program PKE UKM dilakukan secara sirkuler, maka proses persetujuan harus diserahkan secara berurutan kepada anggota Pembiayaan Program PKE UKM Fungsi Bisnis untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya kepada Komite Pembiayaan Program PKE UKM Fungsi Risiko.
4. Pengambilan keputusan oleh Komite Pembiayaan Program PKE UKM untuk menyetujui atau menolak Memorandum Analisa Pembiayaan didasarkan atas persetujuan seluruh Anggota Komite Pembiayaan Program PKE UKM sesuai struktur dan keanggotaan yang berlaku.

**C. Tata Kerja Pengambilan Keputusan Komite Supply Chain Financing**

1. Pemutusan Pembiayaan SCF terdiri dari 2 (dua) orang anggota komite dengan ketentuan 1 (satu) anggota Komite Fungsi Bisnis dan 1 (satu) anggota Komite Fungsi Risiko
2. Pengambilan keputusan Komite Pembiayaan SCF dapat dilakukan melalui rapat (tatap muka), sirkuler atau media lainnya, antara lain melalui teleconference, video conference atau sarana komunikasi lainnya.
3. Dalam hal penyelenggaran rapat Komite Pembiayaan SCF dilakukan secara sirkuler, maka proses persetujuan harus diserahkan secara berurutan kepada anggota Pembiayaan SCF Fungsi Bisnis untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya kepada Komite Pembiayaan SCF Fungsi Risiko.
4. Pengambilan keputusan oleh Komite Pembiayaan SCF untuk menyetujui atau menolak Memorandum Analisa Pembiayaan didasarkan atas persetujuan seluruh Anggota Komite Pembiayaan SCF sesuai struktur dan keanggotaan yang berlaku.

2. Decision-making for the SME PKE Program Financing Committee can be made through meetings (face to face), circulars or other media, including through teleconference, video conference or other means of communication.
3. In the event that the SME PKE Program Financing Committee meeting is conducted in a circular manner, then the approval process must be submitted sequentially to the Business Function SME PKE Program Financing members for approval and then to the Risk Function SME PKE Program Financing Committee.
4. The decision-making by the SME PKE Program Financing Committee to approve or reject the Financing Analysis Memorandum is based on the approval of all members of the SME PKE Program Financing Committee in accordance with the applicable structure and membership.

**C. Procedure for Decision Making of the Supply Chain Financing Committee**

1. Termination of SCF Financing consists of 2 (two) committee members with the provision that 1 (one) member of the Business Function Committee and 1 (one) member of the Risk Function Committee
2. Decision-making of the SCF Financing Committee can be made through meetings (face to face), circulars or other media, including through teleconference, video conference or other means of communication.
3. In the event that the SCF Financing Committee meeting is held in a circular manner, then the approval process must be submitted sequentially to the SCF Financing Business Function members for approval and then to the Risk Function SCF Financing Committee.
4. The decision by the SCF Financing Committee to approve or reject the Financing Analysis Memorandum is based on the approval of all SCF Financing Committee Members in accordance with the applicable structure and membership.

**ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF**  
Executive Director Supporting Organs

## Frekuensi dan Kehadiran Rapat

### Meeting Frequency and Attendance

**Tabel Frekuensi Rapat Komite Pembiayaan Segmen UKM**  
**MSME Segment Financing Committee Frequency Table**

Keterangan Description	Frekuensi Rapat Meeting Frequency
Komite Pembiayaan Financing Committee	179
Komite Special Asset Management Special Asset Management Committee	61
Komite PKE UKM PKE UKM Committee	60
Komite Supply Chain Financing Supply Chain Financing Committee	5
<b>Total</b>	<b>305</b>

Berdasarkan penjelasan diatas terkait kehadiran anggota Komite, maka tidak semua pejabat yang memiliki kewenangan memutus akan dilibatkan dalam komite. Hal tersebut memperhatikan ketersediaan waktu dari masing-masing dari Pemutus Kredit dan memperhatikan beberapa kondisi seperti sebagai berikut:

Based on the above explanation regarding the presence of Committee members, not all officials who have the authority to decide will be involved in the committee. This takes into account the time availability of each of the credit decision maker and takes into account several conditions such as:

<b>Kondisi khusus melibatkan Direktur Eksekutif</b> <b>Special conditions involving the Executive Director</b>	
<b>Komite Pembiayaan I</b> Financing Committee	<b>Komite Special Asset Management</b> Special Asset Management Committee
1) Nasabah baru dan/atau tambahan fasilitas dengan <i>plafon group (one obligor)</i> > ekuivalen Rp 1 triliun dan <i>plafon individu</i> > ekuivalen Rp 500 miliar, selain <i>bank line</i> dan/atau <i>global line</i>   New customers and/or additional facilities with group ceiling (one obligor) > equivalent to Rp 1 trillion and individual ceiling > equivalent to Rp 500 billion, other than bank line and/or global line 2) Nasabah dengan skema <i>clean basis &amp; negative pledge</i>   Customers with a clean basis and negative pledge scheme 3) Terdapat ketentuan-ketentuan yang menggunakan kondisi khusus sebagaimana diatur pada Manual Operasional Pembiayaan   There are provisions that use special conditions as regulated in the Financing Operations Manual	1) Nasabah dengan <i>plafon</i> > ekuivalen Rp 500 miliar, selain <i>bank line</i> dan/atau <i>global line</i>   Customers with a ceiling > equivalent to IDR 500 billion, other than bank line and/or global line

**ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF**  
Executive Director Supporting Organs

Kepala Divisi yang membidangi Analisis Risiko Pembiayaan yang melakukan review atas (calon) Nasabah yang diajukan tidak menjadi anggota Komite Pembiayaan / Special Asset Management.

**Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat**

Tingkat kehadiran Pemutus Kredit yang telah dilaksanakan pada rapat periode tahun 2021.

The Division Head in charge of Financing Risk Analysis who reviews the proposed (prospective) Customers are not members of the Financing / Special Asset Management Committee.

**Meeting Frequency and Attendance Level**

The level of attendance of the credit breaker that has been carried out at the 2021 meeting period.

<b>Anggota Komite Pembiayaan</b> Financing Committee Member	<b>Frekuensi Rapat</b> Meeting Frequency	<b>Jumlah Kehadiran</b> Attendance	<b>Persentase (%)</b> Percentage (%)
Direktur Eksekutif I Executive Director	2	2	100%
Direktur Pelaksana I I Managing Director I	153	153	100%
Direktur Pelaksana II I Managing Director II	144	144	100%
Direktur Pelaksana III I Managing Director III	58	58	100%
Direktur Pelaksana IV I Managing Director IV	122	122	100%
Direktur Pelaksana V I Managing Director V	173	173	100%
Head of Guarantee (SEVP I)	6	6	100%
Head of Credit & Risk (SEVP VI)	168	168	100%
Kepala Divisi Credit Reviewer I Credit Reviewer Division Head I	171	71	100%

<b>Anggota Komite Special Asset Management</b> Special Assets Management Committee Member	<b>Frekuensi Rapat</b> Meeting Frequency	<b>Jumlah Kehadiran</b> Attendance	<b>Persentase (%)</b> Percentage (%)
Direktur Eksekutif I Executive Director	4	4	100%
Direktur Pelaksana I I Managing Director I	47	47	100%
Direktur Pelaksana II I Managing Director II	2	2	100%
Direktur Pelaksana III I Managing Director III	54	54	100%
Direktur Pelaksana IV I Managing Director IV	59	59	100%
Direktur Pelaksana V I Managing Director V	59	59	100%
Head of Guarantee (SEVP I)	15	15	100%
Head of Credit & Risk (SEVP VI)	58	58	100%
Kepala Divisi Credit Reviewer I Credit Reviewer Division Head I	11	11	100%

**ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF**  
Executive Director Supporting Organs

<b>Anggota Komite PKE UKM</b> PKE UKM Committee Member	<b>Frekuensi Rapat</b> Meeting Frequency	<b>Jumlah Kehadiran</b> Attendance	<b>Percentase (%)</b> Percentage (%)
Pretty Halim	5	5	100%
Koerniawan Prijambodo	7	7	100%
Abianti Riana	9	9	100%
Ninik Martini	2	2	100%
Joni Haryanto	8	8	100%
Didit Ardyanto	29	29	100%
Ade Achdiat	30	30	100%
Pandu Wiguno	22	22	100%
Salem Assagaf	8	8	100%

<b>Anggota Komite SCF</b> SCF Committee	<b>Frekuensi Rapat</b> Meeting Frequency	<b>Jumlah Kehadiran</b> Attendance	<b>Percentase (%)</b> Percentage (%)
Didit Ardyanto	4	4	100%
Ninik Martini	1	1	100%
Ade Achdiat	3	3	100%
Pandu Wiguno	2	2	100%

Keterangan :  
Sesuai data pada tabel tersebut diatas, pelaksanaan pada setiap Komite pada periode tahun 20221 di segmen UKM baik pada Komite Pembiayaan, Komite Special Asset Management, Komite PKE UKM, Komite Supplai Chain Financing telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di LPEI.

Information :  
According to the data in the table above, the implementation of each Committee for the period 20221 in the SME segment, both the Financing Committee, Special Asset Management Committee, SME PKE Committee, Supply Chain Financing Committee has complied with the applicable regulations at LPEI.

**Tabel Frekuensi Rapat Komite Pembayaran Non-UKM**  
Non-SME Payment Committee Meeting Frequency Table

<b>Keterangan</b> Description	<b>Frekuensi Rapat</b> Meeting Frequency
Pembiayaan Segmen Korporasi I Corporation Segment Financing	163
Special Asset Management (Restrukturisasi) I Special Asset Management (Restructurization)	56
Credit Line Counterparty (Bank Line)	93
Global Line Counterparty (Asuransi) I Global Line Counterparty (Insurance)	12
Penjaminan I Guarantee	4
Penugasan Khusus Ekspor (NIA) I Export Special Assignment (NIA)	10
<b>Total</b>	<b>338</b>

**ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF**  
Executive Director Supporting Organs

**Total Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Pembiayaan (Korporasi, UKMK & Kanwil, Credit Line Counterparty, Global Line Counterparty, Penjaminan, SAM)**

**Total Frequency and Attendance of Financing Committee Meetings (Corporations, UKMK & Regional Offices, Credit Line Counterparty, Global Line Counterparty, Guarantee, SAM)**

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Attendance	(%)
Direktur Eksekutif Executive Director	Fungsi Risiko Risk Function	63	63	100%
Direktur Pelaksana I Managing Director I	Fungsi Bisnis Business Function	247	247	100%
Direktur Pelaksana II Managing Director II	Fungsi Bisnis Business Function	211	211	100%
Direktur Pelaksana III Managing Director III	Fungsi Bisnis Business Function	199	199	100%
Direktur Pelaksana IV Managing Director IV	Fungsi Risiko Risk Function	288	288	100%
Direktur Pelaksana V Managing Director V	Fungsi Risiko Risk Function	324	324	100%
SEVP I	Fungsi Bisnis Business Function	28	28	100%
SEVP VI	Fungsi Risiko Risk Function	311	311	100%
Kepala Divisi Credit Reviewer II Credit Reviewer Division Head II	Fungsi Risiko Risk Function	89	89	100%

**Keterangan Peserta Rapat Komite Pembiayaan Korporasi**  
**Corporate Financing Committee Meeting Participant Information**

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Attendance	(%)
Direktur Eksekutif Executive Director	Fungsi Risiko Risk Function	16	16	100%
Direktur Pelaksana I Managing Director I	Fungsi Bisnis Business Function	156	156	100%
Direktur Pelaksana II Managing Director II	Fungsi Bisnis Business Function	126	126	100%
Direktur Pelaksana III Managing Director III	Fungsi Bisnis Business Function	52	52	100%
Direktur Pelaksana IV Managing Director IV	Fungsi Risiko Risk Function	134	134	100%

## ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF

Executive Director Supporting Organs

<b>Nama</b> Name	<b>Jabatan</b> Position	<b>Frekuensi Rapat</b> Meeting Frequency	<b>Jumlah Kehadiran</b> Attendance	<b>(%)</b>
Direktur Pelaksana V Managing Director V	Fungsi Risiko Risk Function	154	154	100%
SEVP I	Fungsi Bisnis Business Function	6	6	100%
SEVP VI	Fungsi Risiko Risk Function	151	151	100%
Kepala Divisi Credit Reviewer II Credit Reviewer Division Head II	Fungsi Risiko Risk Function	48	48	100%

### Keterangan Peserta Rapat Komite Pembiayaan Penjaminan Guarantee Finance Committee Meeting Participant Information

<b>Nama</b> Name	<b>Jabatan</b> Position	<b>Frekuensi Rapat</b> Meeting Frequency	<b>Jumlah Kehadiran</b> Attendance	<b>(%)</b>
Direktur Eksekutif Executive Director	Fungsi Risiko Risk Function	3	3	100%
Direktur Pelaksana I Managing Director I	Fungsi Bisnis Business Function	4	4	100%
Direktur Pelaksana II Managing Director II	Fungsi Bisnis Business Function	4	4	100%
Direktur Pelaksana III Managing Director III	Fungsi Bisnis Business Function	0	0	100%
Direktur Pelaksana IV Managing Director IV	Fungsi Risiko Risk Function	4	4	100%
Direktur Pelaksana V Managing Director V	Fungsi Risiko Risk Function	4	4	100%
SEVP I	Fungsi Bisnis Business Function	0	0	100%
SEVP VI	Fungsi Risiko Risk Function	4	4	100%
Kepala Divisi Credit Reviewer II Credit Reviewer Division Head II	Fungsi Risiko Risk Function	0	0	100%

**ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF**  
Executive Director Supporting Organs

**Keterangan Peserta Rapat Komite Special Asset Management**  
**Special Assets Management Committee Meeting Participant Information**

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Attendance	(%)
Direktur Eksekutif Executive Director	Fungsi Risiko Risk Function	36	36	100%
Direktur Pelaksana I Managing Director I	Fungsi Bisnis Business Function	0	0	100%
Direktur Pelaksana II Managing Director II	Fungsi Bisnis Business Function	40	40	100%
Direktur Pelaksana III Managing Director III	Fungsi Bisnis Business Function	54	54	100%
Direktur Pelaksana IV Managing Director IV	Fungsi Risiko Risk Function	54	54	100%
Direktur Pelaksana V Managing Director V	Fungsi Risiko Risk Function	55	55	100%
SEVP I	Fungsi Bisnis Business Function	13	13	100%
SEVP VI	Fungsi Risiko Risk Function	54	54	100%
Kepala Divisi Credit Reviewer II Credit Reviewer Division Head II	Fungsi Risiko Risk Function	5	5	100%

**Keterangan Peserta Rapat Komite Pembiayaan Credit Line (Bank Line)**  
**Credit Line (Bank Line) Financing Committee Meeting Participant Information**

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Attendance	(%)
Direktur Eksekutif Executive Director	Fungsi Risiko Risk Function	0	0	100%
Direktur Pelaksana I Managing Director I	Fungsi Bisnis Business Function	65	65	100%
Direktur Pelaksana II Managing Director II	Fungsi Bisnis Business Function	25	25	100%
Direktur Pelaksana III Managing Director III	Fungsi Bisnis Business Function	87	87	100%
Direktur Pelaksana IV Managing Director IV	Fungsi Risiko Risk Function	75	75	100%
Direktur Pelaksana V Managing Director V	Fungsi Risiko Risk Function	93	93	100%
SEVP I	Fungsi Bisnis Business Function	9	9	100%
SEVP VI	Fungsi Risiko Risk Function	81	81	100%
Kepala Divisi Credit Reviewer II Credit Reviewer Division Head II	Fungsi Risiko Risk Function	30	30	100%

**ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF**  
Executive Director Supporting Organs

**Keterangan Peserta Rapat Komite Pembiayaan Global Line (Asuransi)**  
**Global Line (Insurance) Financing Committee Meeting Participant Information**

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Attendance	(%)
Direktur Eksekutif Executive Director	Fungsi Risiko Risk Function	0	0	100%
Direktur Pelaksana I Managing Director I	Fungsi Bisnis Business Function	12	12	100%
Direktur Pelaksana II Managing Director II	Fungsi Bisnis Business Function	6	6	100%
Direktur Pelaksana III Managing Director III	Fungsi Bisnis Business Function	6	6	100%
Direktur Pelaksana IV Managing Director IV	Fungsi Risiko Risk Function	11	11	100%
Direktur Pelaksana V Managing Director V	Fungsi Risiko Risk Function	8	8	100%
SEVP I	Fungsi Bisnis Business Function	9	9	100%
SEVP VI	Fungsi Risiko Risk Function	11	11	100%
Kepala Divisi Credit Reviewer II Credit Reviewer Division Head II	Fungsi Risiko Risk Function	6	6	100%

**Keterangan Peserta Rapat Komite NIA**  
**NIA Committee Meeting Participants Information**

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Attendance	(%)
Direktur Eksekutif Executive Director	Fungsi Risiko Risk Function	8	8	100%
Direktur Pelaksana I Managing Director I	Fungsi Bisnis Business Function	10	10	100%
Direktur Pelaksana II Managing Director II	Fungsi Bisnis Business Function	10	10	100%
Direktur Pelaksana III Managing Director III	Fungsi Bisnis Business Function	0	0	100%
Direktur Pelaksana IV Managing Director IV	Fungsi Risiko Risk Function	10	10	100%
Direktur Pelaksana V Managing Director V	Fungsi Risiko Risk Function	10	10	100%
SEVP I	Fungsi Bisnis Business Function	0	0	100%
SEVP VI	Fungsi Risiko Risk Function	10	10	100%
Kepala Divisi Credit Reviewer II Credit Reviewer Division Head II	Fungsi Risiko Risk Function	0	0	100%

## **KOMITE PENJAMINAN PEN** **PEN Guarantee Committee**

Komite Penjaminan PEN dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Eksekutif nomor 0100/KDE/11/2021 tentang Anggota Komite Penjaminan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Korporasi Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

### **Struktur Keanggotaan dan Status Hak Suara**

Struktur keanggotaan Komite Penjaminan PEN sesuai dengan KDE Nomor 0100/KDE/11/2021 tentang Anggota Komite Penjaminan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Korporasi Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional adalah sebagai berikut:

#### 1. Komite Penjaminan Fungsi Risiko

- a. Daniel James Rompas\*
- b. Henry Sihotang
- c. Titiek Setiyowati
- d. Pandu Wiguno
- e. Farid Ma'ruf
- f. Firdaus Effendi
- g. Salem Assegaf

\* Kehadiran Direktur eksekutif diperlukan apabila terdapat kondisi yang tidak sesuai dengan Manual dan PTO terkait Penjaminan PEN

#### 2. Komite Penjaminan Fungsi Bisnis

- a. Dikdik Yustandi
- b. Maqin Uddin Norhadi
- c. Salomi Adriana
- d. Damianus Ledjo Hufat
- e. Rusdi Dahardin
- f. Sofyan Irianto N
- g. Rony Kuntadi
- h. Andri Setiawan
- i. Joni Haryanto

#### 3. Narasumber dan Non Voting Member

- a. Dyah Hindraswarini
- b. Ratih D. Item

The PEN Guarantee Committee was formed based on the Executive Director's Decree number 0100/KDE/11/2021 concerning Members of the Government Guarantee Committee for Corporate Business Owners in the Framework of Implementing the National Economic Recovery Program.

### **Membership Structure and Voting Status**

The membership structure of the PEN Guarantee Committee in accordance with KDE Number 0100/KDE/11/2021 concerning Members of the Government Guarantee Committee for Corporate Business Owners for the Implementation of the National Economic Recovery Program is as follows:

#### 1. Risk Function Assurance Committee

- a. Daniel James Rompas\*
- b. Henry Sihotang
- c. Titiek Setiyowati
- d. Pandu Wiguno
- e. Farid Ma'ruf
- f. Firdaus Effendi
- g. Salem Assegaf

\* The presence of the Executive Director is required if there are conditions that are not in accordance with the Manual and PTO related to PEN Guarantee

#### 2. Business Function Assurance Committee

- a. Dikdik Yustandi
- b. Maqin Uddin Norhadi
- c. Salomi Adriana
- d. Damianus Ledjo Hufat
- e. Rusdi Dahardin
- f. Sofyan Irianto N
- g. Rony Kuntadi
- h. Andri Setiawan
- i. Joni Haryanto

#### 3. Speakers and Non-Voting Members

- a. Dyah Hindraswarini
- b. Ratih D. Item

## ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF

Executive Director Supporting Organs

### **Tugas dan Tanggung Jawab**

Berdasarkan PDP.0001/MDI/09/2021 tentang Petunjuk Teknis Operasional Produk Penjaminan Kredit Pemerintah Untuk Pelaku Usaha Korporasi Dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN LPEI, Komite Penjaminan terdiri dari anggota Komite Penjaminan Fungsi Bisnis dan anggota Komite Penjaminan Fungsi Risiko, untuk menjalankan fungsi *4 eyes principles* serta untuk melakukan pemutusan penjaminan sebagai berikut:

1. Kewenangan melekat pada individu.
2. Bertanggung jawab kepada Direktur Pelaksana/Head of sesuai pembidangannya.
3. Penetapan nama anggota Komite Penjaminan diatur dalam Keputusan Direktur Eksekutif.

### **Tata Cara Pengambilan Keputusan**

Berdasarkan Keputusan Direktur Eksekutif nomor 0100/KDE/11/2021 tentang Anggota Komite Penjaminan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Korporasi Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional mengatur tata cara pengambilan keputusan Komite, yaitu:

- a. Pengambilan keputusan Komite Penjaminan dapat dilakukan melalui rapat (tatap muka), sirkuler atau media lainnya, antara lain melalui *teleconference*, *video conference* atau sarana komunikasi lainnya.
- b. Dalam hal penyelenggaran rapat Komite Penjaminan dilakukan secara sirkuler, maka proses persetujuan harus diserahkan secara berurutan kepada anggota Komite Penjaminan Fungsi Bisnis untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya kepada anggota Komite Penjaminan Fungsi Risiko.
- c. Pengambilan keputusan oleh anggota Komite Penjaminan harus berdasarkan struktur dan keanggotaan Komite Penjaminan dalam pemutusan Penjaminan Kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Eksekutif dan Peraturan Direktur Pelaksana yang mengatur tentang Penjaminan Kredit Pemerintah Untuk Pelaku Usaha Korporasi Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- d. Pengambilan keputusan oleh Komite Penjaminan untuk menyetujui atau menolak Memorandum Evaluasi Penjaminan didasarkan atas persetujuan seluruh anggota Komite Penjaminan sesuatu struktur dan keanggotaan yang berlaku.

### **Duties and responsibilities**

Based on PDP.0001/MDI/09/2021 concerning Technical Guidelines for Operational Government Credit Guarantee Products for Corporate Business Owners in the Implementation of the LPEI PEN Program, the Guarantee Committee consists of members of the Business Function Guarantee Committee and members of the Risk Function Guarantee Committee, to carry out the 4 eyes function. principles as well as to terminate the guarantee as follows:

1. Authority is attached to the individual.
2. Responsible to the Managing Director/Head of according to their respective divisions.
3. The name of the members of the Guarantee Committee is regulated in the Decree of the Executive Director.

### **Decision Making Procedures**

Based on the Executive Director's Decree number 0100/KDE/11/2021 concerning Members of the Government Guarantee Committee for Corporate Business Owners in the Context of Implementing the National Economic Recovery Program, the Committee's decision-making procedures are set, namely:

- a. Guarantee Committee decisions can be made through meetings (face to face), circulars or other media, including teleconference, video conference or other means of communication.
- b. In the event that the Assurance Committee meeting is conducted in a circular manner, the approval process must be submitted sequentially to the members of the Business Function Assurance Committee for approval and subsequently to the members of the Risk Assurance Committee.
- c. Decision-making by members of the Guarantee Committee must be based on the structure and membership of the Guarantee Committee in deciding Credit Guarantee as regulated in the Executive Director Regulation and the Managing Director Regulation which regulates Government Credit Guarantee for Corporate Business Actors in the Framework of Implementing the National Economic Recovery Program of the Indonesian Export Financing Agency.
- d. The decision-making by the Guarantee Committee to approve or reject the Guarantee Evaluation Memorandum is based on the approval of all members of the Guarantee Committee on the applicable structure and membership.

**ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF**  
Executive Director Supporting Organs

**Frekuensi dan Kehadiran Rapat**

Sepanjang tahun 2021, Komite Penjaminan PEN telah melakukan 43 kali rapat dengan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

No	Anggota Member	Frequency Frequency	Kehadiran Attendance	(%)
1	Pandu Wiguno	43	43	100%
2	Rony Kuntadi	43	43	100%
3	Farid Maruf	12	12	100%
4	Ade Achdiat	5	5	100%
5	Salem Assegaf	3	3	100%
6	Firdaus Effendi	3	3	100%

Berdasarkan tabel dan penjelasan diatas, maka tidak semua pejabat yang memiliki kewenangan memutus akan dilibatkan dalam komite untuk penjaminan PEN karena jumlah anggota komite (*Quorum*) akan disesuaikan dengan limit penjaminan dan *Risk Profile External Assesor*(Pefindo Biro Kredit).

**Agenda, Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat**

Berdasarkan PDE No. 0012.02/PDE/04/2021 tanggal 14 April 2021 dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Penjaminan PEN No. PDP.0001/MDI/09/2021, untuk Komite memutus penjaminan PEN memiliki struktur dan keanggotaan Komite penjaminan sbb:

**Meeting Frequency and Attendance**

Throughout 2021, the PEN Assurance Committee has held 43 meetings with the following frequency of attendance:

Based on the table and explanation above, not all officials who have the authority to decide will be involved in the committee for PEN guarantee because the number of committee members (*Quorum*) will be adjusted to the guarantee limit and *Risk Profile External Assessor* (Pefindo Credit Bureau).

**Agenda, Frequency and Attendance of Meetings**

Based on PDE No. 0012.02/PDE/04/2021 dated April 14, 2021 and the Technical Operational Manual (PTO) of PEN Guarantee No. PDP.0001/MDI/09/2021, for the Committee to decide on the PEN guarantee, the structure and membership of the guarantee committee is as follows:

Nilai Penjaminan Guarantee Value	Risk Profile External Assesor (Pefindo Biro Kredit) Risk Profile External Assessor (Pefindo Credit Bureau)	Komite Committee
> Rp.5 Miliar < Rp.10 Miliar ( <i>Conditional Automatic Cover</i> ) > IDR5 Billion < IDR10 Billion ( <i>Conditional Automatic Cover</i> )	Non Rating	Komite Penjaminan Tingkat B • 1 Anggota Komite Penjaminan Fungsi Bisnis • 1 Anggota Komite Penjaminan Fungsi Risiko.
> Rp.5 Miliar < Rp.50 Miliar ( <i>Cluster A</i> ) > IDR5 billion < IDR50 billion ( <i>Cluster A</i> )	Hasil Rating 1-3 Rating Results 1-3	Assurance Committee Level B • 1 Member of the Business Function Assurance Committee • 1 Member of the Risk Function Assurance Committee.

**ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF**  
Executive Director Supporting Organs

<b>Nilai Penjaminan</b> Guarantee Value	<b>Risk Profile External Assesor</b> (Pefindo Biro Kredit) Risk Profile External Assessor (Pefindo Credit Bureau)	<b>Komite</b> Committee
	Hasil Rating 4 Rating Results 4	Komite Pembiayaan merujuk pada Peraturan Direktur Eksekutif tentang Komite Pembiayaan The Financing Committee refers to the Executive Director's Regulation on the Financing Committee
> Rp50 Miliar ≤ Rp300 Miliar (Cluster B) > IDR50 Billion IDR 300 Billion (Cluster B)	Hasil Rating 1-3 Rating Results 1-3	Komite Penjaminan Tingkat A <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Anggota Komite Penjaminan Fungsi Bisnis</li> <li>• 2 Anggota Komite Penjaminan Fungsi Risiko</li> </ul> Assurance Committee Level A <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Member of the Business Function Assurance Committee</li> <li>• 2 Members of the Risk Function Assurance Committee</li> </ul>
	Hasil Rating 4 Rating Result 4	Komite Pembiayaan merujuk pada Peraturan Direktur Eksekutif tentang Komite Pembiayaan The Financing Committee refers to the Executive Director's Regulation on the Financing Committee
> Rp300 Miliar (Cluster C) > IDR300 Billion (Cluster C)		Komite Pembiayaan merujuk pada Peraturan Direktur Eksekutif tentang Komite Pembiayaan The Financing Committee refers to the Executive Director's Regulation on the Financing Committee

Catatan: Kehadiran Direktur eksekutif diperlukan apabila terdapat kondisi yang tidak sesuai dengan Manual dan PTO terkait Penjaminan PEN  
 Notes: The presence of an executive Director is required if there are conditions that are not in accordance with the Manual and PTO related to PEN Guarantee

Berdasarkan tabel dan penjelasan diatas, maka tidak semua pejabat yang memiliki kewenangan memutus akan dilibatkan dalam komite untuk penjaminan PEN karena jumlah anggota komite (*Quorum*) akan disesuaikan dengan limit penjaminan dan *Risk Profile External Assesor*(Pefindo Biro Kredit)

Berikut koreksi atas tingkat kehadiran dalam komite penjaminan / komite pembiayaan yang telah disesuaikan dengan ketentuan diatas:

Based on the table and explanation above, not all officials who have the authority to decide will be involved in the committee for PEN guarantee because the number of committee members (*Quorum*) will be adjusted to the guarantee limit and *Risk Profile External Assessor* (Pefindo Credit Bureau)

The following is a correction to the attendance level in the guarantee committee / financing committee that has been adjusted to the above provisions:

**ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF**  
 Executive Director Supporting Organs

**Komite Penjaminan (Cluster A dan B dengan Rating PBK : 1-3)**  
**Guarantee Committee (Cluster A and B with PBK Rating : 1-3)**

No	Anggota Member	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Attendance	Persentase % Percentage %
1	Pandu Wiguno	43	43	100.00%
2	Rony Kuntadi	43	43	100.00%
3	Farid Maruf	12	12	100.00%
4	Ade Achdiat	5	5	100.00%
5	Salem Assegaf	3	3	100.00%
6	Firdaus Effendi	3	3	100.00%

**Komite Pembiayaan (Cluster C dan seluruh Limit penjaminan dengan Rating PBK : 4)**  
**Financing Committee (Cluster C and all Guarantee Limits with PBK Rating: 4)**

No	Anggota Member	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Attendance	Persentase % Percentage %
1	Daniel James Rompas	1	1	100.00%
2	Dikdik Yustandi	29	29	100.00%
3	Maqin U Norhadi	22	22	100.00%
3	Agus Windiarto	7	7	100.00%
4	Henry Sihotang	25	25	100.00%
5	Titiek Setiyowati	29	29	100.00%
6	Chesna F Anwar	28	28	100.00%
7	Farid Maruf	10	10	100.00%

**ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF**  
Executive Director Supporting Organs

## Komite Pengembangan Produk

### Product Development Committee

Komite Pengembangan Produk dibentuk berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif No. 0033/PDE/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Komite Pengembangan Produk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

The Product Development Committee was established based on Executive Director Regulation No. 0033/PDE/12/2021 dated 13 December 2021 concerning the Product Development Committee of Indonesia Eximbank.

#### Struktur dan Keanggotaan Komite Pengembangan Produk

#### Product Development Committee Structure and Membership

##### Kategori A

##### Category A

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman and Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi fungsi pengembangan produk Managing Director in charge of product development function
Sekretaris, merangkap Anggota Tetap Secretary and Permanent Member	Kepala Divisi dari unit kerja yang melaksanakan fungsi pengembangan produk Head of Division of the work unit that carries out the product development function
Anggota Members	<p>Anggota Tetap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Direktur Pelaksana selain Ketua</li> <li>2) Head of Credit and Risk</li> </ol> <p>Permanent member:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Managing Director other than the Chairman</li> <li>2) Head of Credit and Risk</li> </ol> <p>Anggota Tidak Tetap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Head of selain anggota tetap;</li> <li>2) Kepala Divisi/ pejabat setingkat Kepala Divisi selain anggota tetap; yang terkait dengan materi pembahasan.</li> </ol> <p>Non-Permanent Members:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Head of other than permanent members;</li> <li>2) Division Heads/officers at the level of Division Heads other than permanent members related to the discussion material.</li> </ol>

##### Kategori B

##### Category B

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman and Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi pengembangan produk Managing Director in charge of product development
Sekretaris, merangkap Anggota Tetap Secretary and Permanent Member	Kepala Divisi dari unit kerja yang melaksanakan fungsi pengembangan produk Head of Division of the work unit that carries out the product development function

## ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF

### Executive Director Supporting Organs

Anggota Member	<p>Anggota Tetap:</p> <p>1) Kepala unit kerja yang melaksanakan fungsi kebijakan dan pedoman;</p> <p>2) Kepala unit kerja yang melaksanakan fungsi Internal Audit;</p> <p>3) Kepala unit kerja yang melaksanakan fungsi Hukum;</p> <p>4) Kepala unit kerja yang melaksanakan fungsi Kepatuhan;</p> <p>Anggota Tidak Tetap:</p> <p>Kepala Divisi/ pejabat setingkat Kepala Divisi selain anggota tetap yang terkait dengan materi pembahasan</p> <p>Permanent member:</p> <p>1) Head of work unit that carries out the policies and guidelines function;</p> <p>2) The head of the work unit that carries out the Internal Audit function;</p> <p>3) Head of work unit carrying out Legal functions;</p> <p>4) Head of work unit carrying out the Compliance function;</p> <p>Non-Permanent Members:</p> <p>Head of Division/officer at the level of Division Head other than permanent members related to the discussion material</p>
----------------	---

#### Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Pengembangan Produk adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif antara lain mengenai:

- Menyetujui rancangan peraturan terkait produk dan aktivitas/kegiatan LPEI untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Direktur dan/atau Direktur Eksekutif.
- Pengembangan produk dan aktivitas/kegiatan baru.
- Penyempurnaan produk dan aktivitas/kegiatan.

#### Duties and responsibilities

The duties and responsibilities of the Product Development Committee are to provide recommendations to the Executive Director, among others regarding:

- Approval of regulations draft related to products and activities to be further stipulated by the Board of Directors and/or Executive Director.
- Development of new products and activities.
- Improvement of products and activities.

#### Tata Cara Pengambilan Keputusan

Tata cara pengambilan keputusan Komite Pengembangan Produk, yaitu:

- Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau secara sirkuler.
- Pengambilan keputusan Komite dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh:
  - Ketua;
  - Sekretaris;
  - Anggota tetap selain Ketua dan Sekretaris dengan kehadiran lebih dari setengah anggota tetap; dan
  - 1(satu) anggota tidak tetap.
- Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

#### Decision Making Procedures

The procedure for decision-making of the Product Development Committee is as follows:

- The Committee decisions can be made through face-to-face meetings or with circular.
- The Committee's decision-making is considered a quorum if it is attended by at least:
  - Chairman;
  - Secretary;
  - Permanent members other than the Chairman and Secretary with the presence of more than half of the permanent members; and
  - 1(one) non-permanent member.
- Meeting decisions must be made based on deliberation for consensus.

## ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF

Executive Director Supporting Organs

- d. Seluruh keputusan Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditatausahakan secara lengkap dan tertib.

- d. All decisions of the Committee must be stated in the Minutes of Meeting and administered in a complete and orderly manner.

### **Agenda dan Frekuensi Kehadiran Rapat**

Agenda rapat dapat bersifat rutin maupun *incidental* dengan memperhatikan tingkat urgensi permasalahan yang perlu diangkat (*matters arriving*) maupun hak prerogative dari Ketua Komite. Sepanjang tahun 2021, Komite Pengembangan Produk telah melakukan 14 (*empat belas*) kali rapat (tatap muka dan sirkuler) dengan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

### **Meeting Agenda and Frequency of Attendance**

Meeting agendas can be routine or incidental by taking into account the level of urgency of the issues that need to be raised (*matters arriving*) and the prerogatives of the Committee Chairman. Throughout 2021, the Product Development Committee has held 14 (fourteen) meetings (face-to-face and circular with the following attendance frequency:

#### **Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Pengembangan Produk 2021** **Product Development Committee 2021 Meeting Frequency and Attendance**

Jabatan Position	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Attendance	(%)
Direktur Pelaksana I Managing Director I	14	7	100%
Direktur Pelaksana II Managing Director II	14	10	100%
Direktur Pelaksana III Managing Director III	14	2	100%
Direktur Pelaksana IV Managing Director IV	14	11	100%
Direktur Pelaksana V Managing Director V	14	13	100%

Catatan: Persentase jumlah kehadiran Direktur Pelaksana 100% atau telah sesuai dengan ketetapan kuorum dalam Komite Pengembangan Produk  
Note: The percentage of attendance of the Managing Director is 100% or in accordance with the provisions of the quorum in the Product Development Committee

## **KOMITE ASSETS AND LIABILITIES**

### Assets And Liabilities Committee

Komite Assets & Liabilities Management Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dibentuk berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif nomor 0026/PDE/05/2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Komite Assets & Liabilities Management Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang selanjutnya dilakukan perubahan sbb:

- a) Memorandum Prosedur Nomor: MPO.0006/CEO/02/2020 perihal Perubahan Peraturan Direktur Eksekutif Tentang Komite Assets & Liabilities Management Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan Nomor: MPO.0036.01/CEO/08/2020 perihal Perpanjangan Memorandum Prosedur Nomor 0006/CEO/02/2020 perihal Perubahan Peraturan Direktur Eksekutif Tentang Komite Assets & Liabilities Management Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan
- b) Peraturan Direktur Eksekutif Nomor: 0026/PDE/09/2021 tentang Komite Assets & Liabilities Management Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 7 September 2021 dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 8 Februari 2021.

#### **Struktur Keanggotaan dan Status Hak Suara**

Struktur dan Keanggotaan Komite Assets & Liabilities Management adalah sebagai berikut:

#### **Periode 1 Januari 2021 s.d 7 Februari 2021**

Sesuai Memorandum Prosedur Nomor MPO.0036.01/CEO/08/2020 perihal Perpanjangan Memorandum Prosedur Nomor 0006/CEO/02/2020 perihal Perubahan Peraturan Direktur Eksekutif Tentang Komite Assets & Liabilities Management Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, struktur dan keanggotaan adalah sebagai berikut:

The Assets & Liabilities Management Committee of the Indonesian Export Financing Agency was formed based on Executive Director Regulation number 0026/PDE/05/2019 dated 23 May 2019 concerning the Assets & Liabilities Management Committee of the Indonesian Export Financing Agency, which was subsequently amended as follows:

- a) Procedure Memorandum Number: MPO.0006/CEO/02/2020 regarding Amendment to Executive Director Regulation Regarding Assets & Liabilities Management Committee of the Indonesian Export Financing Agency and Number: MPO.0036.01/CEO/08/2020 regarding Extension of Procedure Memorandum Number 0006/CEO/02/2020 regarding the Amendment to the Executive Director's Regulation Regarding the Assets & Liabilities Management Committee of the Indonesian Export Financing Agency; and
- b) Executive Director Regulation Number: 0026/PDE/09/2021 concerning the Assets & Liabilities Management Committee of the Indonesian Export Financing Agency which was stipulated on 7 September 2021 and has retroactive effect as of 8 February 2021.

#### **Membership Structure and Voting Rights**

The structure and membership of the Assets & Liabilities Management Committee are as follows:

#### **1 January 2021 to 7 February Period**

In accordance with the Memorandum of Procedure Number MPO.0036.01/CEO/08/2020 regarding the Extension of the Memorandum of Procedure Number 0006/CEO/02/2020 regarding the Amendment to the Executive Director Regulation Regarding the Assets & Liabilities Management Committee of the Indonesian Export Financing Agency, the structure and membership are as follows:

Ketua merangkap Anggota Dengan Hak Suara Chairman concurrently member with voting rights	Direktur Eksekutif Executive Director
Sekretaris merangkap Anggota Dengan Hak Suara Secretary concurrently Member with Voting Rights	Kepala Divisi Middle Office Treasury Middle Office Treasurt Division Head

## ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF

Executive Director Supporting Organs

Anggota  
Members

Anggota Dengan Hak suara (*Voting Member*):  
 1. Direktur Pelaksana  
 2. Senior Executive Vice President

Anggota Tanpa Hak suara (*Non-Voting Member*):  
 1. Kepala Divisi Financial Institution & Treasury  
 2. Kepala Divisi Finance  
 3. Kepala Divisi Manajemen Risiko.

Invitee Member:  
 Kepala Divisi/ pejabat setingkat kepala Divisi dari unit bisnis.

Voting Members:  
 1. Managing Director  
 2. Senior Executive Vice President

Non-Voting Members:  
 1. Head of Financial Institution & Treasury Division  
 2. Head of Finance Division  
 3. Head of Risk Management Division.

Invitee Members:  
 Head of Division / officer at the level of the Division head of the business unit.

### **Periode 7 Februari 2021 s.d 31 Desember 2021**

Sesuai Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0026/PDE/09/2021 tentang Komite Assets & Liabilities Management Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, struktur dan keanggotaan adalah sebagai berikut:

### **7 February 2021 to 31 December 2021 Period**

In accordance with Executive Director Regulation Number 0026/PDE/09/2021 concerning the Assets & Liabilities Management Committee of the Indonesian Export Financing Agency, the structure and membership are as follows:

Ketua merangkap Anggota Dengan Hak Suara Chairman concurrently member with voting rights	Direktur Pelaksana yang membidangi <i>Finance</i> Managing Director in charge of Finance
Wakil Ketua merangkap Anggota dengan Hak Suara Chairman concurrently member with voting rights	Head of Finance & Strategic Planning
Sekretaris merangkap Anggota Dengan Hak Suara Secretary concurrently Member with Voting Rights	Kepala Divisi <i>Middle Office Treasury</i> <i>Middle Office Treasury Division Head</i>
Anggota Member	Anggota Dengan Hak suara ( <i>Voting Member</i> ): 1. Direktur Eksekutif 2. Seluruh Direktur Pelaksana selain Ketua 3. <i>Head of Credit &amp; Risk</i>
	Anggota Tanpa Hak suara ( <i>Non-Voting Member</i> ): 1. Head of Penjaminan 2. Kepala Divisi <i>Financial Institution &amp; Treasury</i>

**ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF**  
Executive Director Supporting Organs

*Invitee Member:*  
1. *Head of Kepatuhan*  
2. *Head of Internal Audit*  
3. *Head of Operation & IT*  
4. Kepala Divisi / pejabat setingkat kepala Divisi dari unit kerja yang terundang.

*Anggota Dengan Hak suara (Voting Member):*  
1. Direktur Eksekutif  
2. Seluruh Direktur Pelaksana selain Ketua  
3. *Head of Credit & Risk*

*Anggota Tanpa Hak suara (Non-Voting Member):*  
1. *Head of Penjaminan*  
2. Kepala Divisi *Financial Institution & Treasury*

*Invitee Member:*  
1. *Head of Kepatuhan*  
2. *Head of Internal Audit*  
3. *Head of Operation & IT*  
4. Kepala Divisi / pejabat setingkat kepala Divisi dari unit kerja yang terundang.

**Tugas dan Tanggung Jawab**

Tugas Komite Assets dan *Liabilities Management* (ALMA) antara lain:

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, sebagai berikut:
  1. Mengembangkan, mengkaji ulang serta memodifikasi strategi ALMA;
  2. Mengkaji ulang penetapan suku bunga (*pricing*) aktiva dan pasiva untuk memastikan bahwa *pricing* tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca sesuai dengan strategi ALMA;
  3. Menyampaikan informasi mengenai setiap perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA;
  4. Memutuskan strategi pendanaan dan penempatan dana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan
  5. Menetapkan pemberian suku bunga (*pricing*) kepada debitur yang besarnya dibawah *Base Lending Rate*(BLR).

- b. Menetapkan kebijakan, batasan-batasan dan pedoman strategi pengelolaan assets dan *liabilities* dengan meimpertimbangkan kondisi internal dan eksternal meliputi:

**Duties and Responsibilities**

The duties of the Assets and Liabilities Management Committee (ALMA) include:

- a. To determine the risk management policy of the Indonesian Export Financing Agency, as follows:
  1. Develop, review and modify the ALMA strategy;
  2. Reviewing the pricing of assets and liabilities to ensure that the pricing can optimize the return on investment, minimize the cost of funds, and maintain the balance sheet structure in accordance with the ALMA strategy;
  3. Delivering information regarding any developments in related provisions and regulations that affect ALMA's strategy and policies;
  4. Decide on the funding strategy and placement of funds from the Indonesian Export Financing Agency; and
  5. Determine the provision of interest rates (*pricing*) to debtors whose amount is below the *Base Lending Rate*(BLR).
- b. Establish policies, boundaries and strategic guidelines for managing assets and liabilities by considering internal and external conditions including:

## ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF

Executive Director Supporting Organs

### 1. Manajemen Likuiditas

Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan manajemen likuiditas dan limit sesuai dengan kebijakan dan strategi ALMA meliputi:

- Pengelolaan sumber dana yang likuid dengan tujuan untuk dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo (*cash flow*) dan kebutuhan dana tidak terduga lainnya;
- Meminimalkan *idle funds* serta menjaga posisi likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 2. Manajemen Gap

Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan kesenjangan posisi (*mismatch*) antara *assets* dan *liabilities* pada neraca khususnya pos-pos pada neraca yang sensitif terhadap tingkat bunga dengan tujuan mengoptimalkan pendapatan bunga bersih (*net interest income*) sesuai dengan antisipasi arah perubahan tingkat bunga dengan tingkat risiko yang ditetapkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

### 3. Manajemen Pricing

Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan portofolio antara lain melalui kebijakan pricing *assets* dan *liabilities* dengan tujuan mengoptimalkan *interest margin (spread)* dengan mempertimbangkan biaya modal, *overhead cost* dan risiko.

### 4. Manajemen Forex

Menetapkan kebijakan dan pengelolaan kesenjangan posisi (*forex gap*) antara *assets* dan *liabilities* dengan tujuan untuk menjaga tingkat risiko forex sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### c. Menyelenggarakan rapat Komite Assets & Liabilities Management sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau setiap saat apabila dipandang perlu.

#### **Tata Cara Pengambilan Keputusan**

Tata cara pengambilan keputusan dalam Komite Assets & Liabilities Management adalah sebagai berikut:

- a. Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka, daring (*online*) atau secara sirkuler.
- b. Pengambilan keputusan Komite dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh:
  - i. Ketua dan/atau Wakil Ketua,
  - ii. 2 (dua) orang Anggota dengan hak suara yang terdiri dari:

### 1. Liquidity Management

Establish and evaluate liquidity and limit management policies in accordance with ALMA policies and strategies including:

- Management of liquid sources of funds with the aim of being able to meet maturing obligations (*cash flow*) and other unexpected funding needs;
- Minimizing idle funds and maintaining liquidity position in accordance with applicable regulations.

### 2. Gap Management

Establish and evaluate policies and strategies for managing the mismatch between assets and liabilities on the balance sheet, especially items on the balance sheet that are sensitive to interest rates with the aim of optimizing net interest income in accordance with the anticipated direction of changes in interest rates with the level of risk determined by the Indonesian Export Financing Agency.

### 3. Pricing Management

Establish and evaluate portfolio management policies, among others, through policies on pricing assets and liabilities with the aim of optimizing interest margin (*spread*) by considering the cost of capital, overhead cost and risk.

### 4. Forex Management

Establishing policies and managing the forex gap between assets and liabilities with the aim of maintaining the level of forex risk in accordance with applicable regulations.

### c. Holding Assets & Liabilities Management Committee meeting at least once a month or at any time if deemed necessary.

#### **Decision-Making Procedure**

The procedure for making decisions in the Assets & Liabilities Management Committee is as follows:

- a. Committee decisions can be made through face-to-face meetings, online or in a circular manner.
- b. Committee decision making is considered a quorum if it is attended by at least:
  - i. Chairman and/or Deputy Chairperson,
  - ii. 2 (two) Members with voting rights consisting of:

**ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF**  
Executive Director Supporting Organs

- 1(satu)orang Anggota yang membidangi Bisnis.
  - 1 (satu) orang Anggota yang membidangi Risk Management.
- c. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- d. Seluruh keputusan Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditatausahakan secara lengkap dan tertib.
- 1(one) Member in charge of Business
  - 1(one) Member in charge of Risk Management.
- c. Meeting decisions must be made based on deliberation for consensus.
- d. All decisions of the Committee must be stated in the Minutes of Meeting and administered in a complete and orderly manner.

**Frekuensi dan Kehadiran Rapat**

Sepanjang tahun 2021, Komite Assets dan Liabilities Management telah melakukan 25 kali rapat dengan agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

**Meeting Attendance and Frequency**

Throughout 2021, the Assets and Liabilities Management Committee has held 25 meetings with the following agenda and attendance frequency:

Jabatan Position	Nama Name	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Attendance	(%)
Ketua merangkap Anggota Dengan Hak Suara Chairman concurrently member with Voting Right	Direktur Pelaksana yang membidangi Finance Managing Director in charge of Finance	25	25	100%
Wakil Ketua merangkap Anggota dengan Hak Suara Vice Chairman concurrently member with voting right	Head of Finance & Strategic Planning	25	25	100%
Sekretaris merangkap Anggota Tanpa Hak Suara Secretary concurrently member with votig right	Kepala Divisi Middle Office Treasury Middle Office Treasury Division Head	25	25	100%
Anggota Members	Anggota Dengan Hak suara   Voting Member :			
	1. Direktur Eksekutif   Executive Director	25	25	100%
	2. Direktur Pelaksana I   Managing Director I	25	23	92%
	3. Direktor Pelaksana II   Managing Director II	25	25	100%
	4. Direktur Pelaksana IV   Managing Director IV	25	22	88%
	5. Direktur Pelaksana V   Managing Director V	25	25	100%
	6. Head of Credit & Risk	25	24	96%
	Anggota Tanpa Hak suara   Non-Voting Member:			
	1. Head of Penjaminan   Head of Guarantee	24	25	96%
	2. Kepala Divisi Financial Institution & Treasury   Financial Institution & Treasury Division Head	25	25	100%
	Anggota Undangan   Invitee Member :			
	1. Head of Kepatuhan   Head of Compliance	25	25	100%
	2. Head of Internal Audit	24	25	96%
	3. Head of Operation & IT	18	19	96%
	4. Kepala Divisi / pejabat setingkat kepala Divisi dari unit kerja yang terundang   Division Head / Officers equivalent to Invited Division Head's Unit	-	-	-

**ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF**  
Executive Director Supporting Organs

**Agenda Rapat Komite Asset dan Liabilitas**  
**Assets and Liabilities Committee Meeting Agenda**

No	Bulan   Month	Agenda   Agenda	
1	11 Januari 2021 11 January 2011	a. Kondisi Likuiditas dan Sumber Dana b. Penggalangan Dana c. Pengelolaan Rasio PDN d. Rencana Pencairan & Pelunasan Pembiayaan e. Suku Bunga Pembiayaan	a. Liquidity Condition and Source of Funds b. Fundraising c. NOP Ratio Management d. Disbursement Plan & Repayment of Financing e. Financing Interest Rate
2	25 Januari 2021 25 January 2011	a. Kondisi Likuiditas dan Sumber Dana b. Penggalangan Dana c. Penempatan Dana d. Rencana Pencairan & Pelunasan Pembiayaan e. Suku Bunga Pembiayaan	a. Liquidity Condition and Source of Funds b. Fundraising c. Fund Placement d. Funding Disbursement & Repayment Plan e. Financing Interest Rate
3	8 Februari 2021 8 February 2021	a. Kondisi Likuiditas dan Sumber Dana. b. Optimalisasi Treasury Asset USD. c. Penggalangan Dana. d. Rencana Pencairan & Pelunasan Pembiayaan e. Usulan Suku Bunga Pembiayaan	a. Liquidity Conditions and Sources of Funds. b. Optimization of USD Treasury Assets. c. Fundraising. d. Disbursement Plan & Repayment of Financing e. Proposed Financing Interest Rate
4	22 Februari 2021 22 February 2021	a. Kondisi Likuiditas dan Sumber Dana. b. Penggalangan Dana. c. Penempatan Dana d. Rencana Pencairan & Pelunasan Pembiayaan e. Usulan Suku Bunga Pembiayaan	a. Liquidity Conditions and Sources of Funds. b. Fundraising. c. Fund Placement d. Funding Disbursement & Repayment Plan e. Proposed Financing Interest Rate
5	8 Maret 2021 8 March 2021	a. Kondisi Likuiditas dan Sumber Dana, b. Penggalangan Dana. c. Rencana Pencairan & Pelunasan Pembiayaan	a. Liquidity Conditions and Sources of Funds, b. Fundraising. c. Funding Disbursement & Repayment Plan
6	22 Maret 2021 22 March 2021	a. Kondisi Likuiditas dan Sumber Dana. b. Penggalangan Dana & Penempatan Dana. c. Rencana Pencairan & Pelunasan Pembiayaan d. Usulan Suku Bunga Pembiayaan e. Update Progress MIS Project FTP Concept.	a. Liquidity Conditions and Sources of Funds. b. Fundraising & Funding. c. Funding Disbursement & Repayment Plan d. Proposed Financing Interest Rate e. Update Progress MIS Project FTP Concept.
7	7 April 2021 7 April 2021	a. Kondisi Likuiditas dan Sumber Dana.	a. Liquidity Conditions and Sources of Funds.

**ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF**  
Executive Director Supporting Organs

No	Bulan   Month	Agenda   Agenda	
		b. Simulasi Pelunasan Pinjaman Sindikasi USD335 Juta c. Penggalangan Dana & Penempatan Dana. d. Rencana Pencairan & Pelunasan Pembiayaan e. Usulan Suku Bunga Pembiayaan.	b. USD335 Million Syndicated Loan Repayment Simulation c. Fundraising & Funding. d. Disbursement Plan & Repayment of Financing e. Proposed Financing Interest Rate.
8	20 April 2021 20 April 2021	a. Tindak Lanjut Rapat ALCO 7 April 2021 b. Kondisi Likuiditas dan Sumber Dana. c. Penggalangan Dana & Penempatan Dana. d. Rencana Pencairan & Pelunasan Pembiayaan e. Usulan Suku Bunga Pembiayaan.	a. Follow-up to ALCO Meeting 7 April 2021 b. Liquidity Conditions and Sources of Funds. c. Fundraising & Funding. d. Funding Disbursement & Repayment Plan e. Proposed Financing Interest Rate.
9	3 Mei 2021 May 2021	a. Tindak Lanjut Rapat ALCO 20 April 2021 b. Kondisi Likuiditas dan Sumber Dana. c. Penggalangan Dana. d. Rencana Pencairan & Pelunasan Pembiayaan e. Usulan Suku Bunga Pembiayaan.	a. Follow-up to ALCO Meeting 20 April 2021 b. Liquidity Conditions and Sources of Funds. c. Fundraising. d. Disbursement Plan & Repayment of Financing e. Proposed Financing Interest Rate.
10	19 Mei 2021 19 May 2021	a. Tindak Lanjut Rapat ALCO 3 Mei 2021 b. Kondisi Likuiditas dan Sumber Dana. c. Penggalangan Dana. d. Rencana Pencairan & Pelunasan Pembiayaan.	a. Follow-up to ALCO Meeting May 3, 2021 b. Liquidity Conditions and Sources of Funds. c. Fundraising. d. Disbursement Plan & Financing Repayment.
11	2 Juni 2021 2 June 2021	a. Tindak Lanjut Rapat ALCO 3 Mei 2021 b. Kondisi Likuiditas dan Sumber Dana. c. Penggalangan Dana dan Penempatan Dana. d. Rencana Pencairan & Pelunasan Pembiayaan e. Usulan Suku Bunga Pembiayaan.	a. Follow-up to ALCO Meeting 3 May 2021 b. Liquidity Conditions and Sources of Funds. c. Fundraising and Funding. d. Disbursement Plan & Repayment of Financing e. Proposed Financing Interest Rate.

**ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF**  
Executive Director Supporting Organs

No	Bulan   Month	Agenda   Agenda	
12	14 Juni 2021 14 June 2021	a. Tindak Lanjut Rapat ALCO 2 Juni 2021 b. Kondisi Likuiditas dan Sumber Dana. c. Penggalangan Dana dan Penempatan Dana. d. Rencana Pencairan & Pelunasan Pembiayaan e. Usulan Suku Bunga Pembiayaan.	a. Follow-up to ALCO Meeting June 2, 2021 b. Liquidity Conditions and Sources of Funds. c. Fundraising and Funding. d. Disbursement Plan & Repayment of Financing e. Proposed Financing Interest Rate.
13	28 Juni 2021 28 June 2021	a. Tindak Lanjut Rapat ALCO 14 Juni 2021 b. Kondisi Likuiditas dan Sumber Dana. c. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Likuiditas & Return. d. Penempatan Dana & Pinjaman Money Market. e. Rencana Pencairan & Pelunasan Pembiayaan f. Usulan Suku Bunga Pembiayaan.	a. Follow-up to ALCO Meeting 14 June 2021 b. Liquidity Conditions and Sources of Funds. c. Liquidity & Return Management Optimization Strategy. d. Placement of Funds & Money Market Loans. e. Funding Disbursement & Repayment Plan f. Proposed Financing Interest Rate.
14	13 Juli 2021 13 July 2021	a. Tindak Lanjut Rapat ALCO 28 Juni 2021 b. Kondisi Likuiditas dan Sumber Dana. c. Penempatan Dana. d. Rencana Pencairan & Pelunasan Pembiayaan. e. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Perbankan. f. Usulan Suku Bunga Pembiayaan. g. Kondisi Yield Pembiayaan - Mei 2021.	a. Follow-up to ALCO Meeting 28 June 2021 b. Liquidity Conditions and Sources of Funds. c. Fund Placement. d. Disbursement Plan & Financing Repayment. e. Basic Credit Interest Rate (SBDK) Banking. f. Proposed Financing Interest Rate. g. Financing Yield Condition - May 2021.
15	26 Juli 2021 26 July 2021	a. Tindak Lanjut Rapat ALCO 13 Juli 2021 b. Kondisi Likuiditas dan Sumber Dana. c. Penempatan Dana. d. Rencana Pencairan & Pelunasan Pembiayaan. e. Kondisi Yield Pembiayaan - Juni 2021.	a. Follow-up to ALCO Meeting 13 July 2021 b. Liquidity Conditions and Sources of Funds. c. Fund Placement. d. Disbursement Plan & Financing Repayment. e. Financing Yield Condition - June 2021.

**ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF**  
Executive Director Supporting Organs

No	Bulan   Month	Agenda   Agenda	
16	10 Agustus 2021 10 August 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tindak Lanjut Rapat ALCO 26 Juli 2021</li> <li>b. Kondisi Likuiditas dan Sumber Dana.</li> <li>c. Kajian Optimalisasi Treasury Asset USD</li> <li>d. Penempatan Dana.</li> <li>e. Rencana Pencairan &amp; Pelunasan Pembiayaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Follow-up to ALCO Meeting 26 July 2021</li> <li>b. Liquidity Conditions and Sources of Funds.</li> <li>c. USD Treasury Asset Optimization Study</li> <li>d. Fund Placement.</li> <li>e. Disbursement Plan &amp; Financing Repayment.</li> </ul>
17	23 Agustus 2021 23 August 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tindak Lanjut Rapat ALCO 10 Agustus 2021</li> <li>b. Kondisi Likuiditas dan Sumber Dana.</li> <li>c. Penempatan Dana</li> <li>d. Rencana Pencairan &amp; Pelunasan Pembiayaan.</li> <li>e. Kondisi Yield Pembiayaan 31 Juli 2021</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Follow-up to ALCO Meeting August 10, 2021</li> <li>b. Liquidity Conditions and Sources of Funds.</li> <li>c. Fund Placement</li> <li>d. Disbursement Plan &amp; Financing Repayment.</li> <li>e. Financing Yield Conditions July 31, 2021</li> </ul>
18	6 September 2021 6 September 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tindak Lanjut Rapat ALCO 23 Agustus 2021</li> <li>b. Kondisi Likuiditas dan Sumber Dana.</li> <li>c. Tindak Lanjut Arahan ALCO: Optimalisasi dan Penempatan USD dan Efisiensi Biaya Bunga.</li> <li>d. Profil Suku Bunga Aset (Pembiayaan) dan Sumber Dana per Valuta – 31 Juli 2021.</li> <li>e. Rencana Pencairan &amp; Pelunasan Pembiayaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Follow-up to ALCO Meeting 23 August 2021</li> <li>b. Liquidity Conditions and Sources of Funds.</li> <li>c. ALCO Directive Follow-up: Optimization and Placement of USD and Interest Cost Efficiency.</li> <li>d. Profile of Interest Rates on Assets (Financing) and Sources of Funds per Currency – 31 July 2021.</li> <li>e. Disbursement Plan &amp; Financing Repayment.</li> </ul>
19	20 September 2021 20 September 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tindak Lanjut Rapat ALCO 06 September 2021.</li> <li>b. Kondisi Likuiditas dan Sumber Dana.</li> <li>c. Strategi Pengelolaan Likuiditas yang Optimal.</li> <li>d. Penempatan Dana.</li> <li>e. Rencana Pencairan &amp; Pelunasan Pembiayaan.</li> <li>f. Usulan Suku Bunga Pembiayaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Follow-up to the ALCO Meeting 06 September 2021.</li> <li>b. Liquidity Conditions and Sources of Funds.</li> <li>c. Optimal Liquidity Management Strategy.</li> <li>d. Fund Placement.</li> <li>e. Disbursement Plan &amp; Repayment of Financing.</li> <li>f. Proposed Financing Interest Rate.</li> </ul>

**ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF**  
Executive Director Supporting Organs

No	Bulan   Month	Agenda   Agenda	
20	4 Oktober 2021 4 October 2021	a. Tindak Lanjut Rapat ALCO 20 September 2021. b. Kondisi Likuiditas dan Sumber Dana. c. Simulasi Perhitungan Alternatif Pengelolaan Efek-Efek yang dimiliki. d. List Potensi Debitur KJP & Special Pool Rate. e. Rencana Pencairan & Pelunasan Pembiayaan.	a. Follow-up to the ALCO Meeting 20 September 2021. b. Liquidity Conditions and Sources of Funds. c. Simulation of Calculation of Alternative Management of Owned Securities. d. List of Potential KJP Debtors & Special Pool Rate. e. Disbursement Plan & Financing Repayment.
21	22 Oktober 2021 22 October 2021	a. Kondisi Likuiditas dan Sumber Dana. b. Pendanaan dan Informasi Suku Bunga Penempatan. c. Rencana Pencairan & Pelunasan Pembiayaan d. Usulan Suku Bunga Pembiayaan.	a. Liquidity Conditions and Sources of Funds. b. Funding and Placement Interest Rate Information. c. Funding Disbursement & Repayment Plan d. Proposed Financing Interest Rate.
22	10 November 2021 10 November 2021	a. Kondisi Likuiditas dan Sumber Dana. b. Pendanaan dan Informasi Suku Bunga Penempatan. c. Rencana Pencairan & Pelunasan Pembiayaan. d. Usulan Suku Bunga Pembiayaan.	a. Liquidity Conditions and Sources of Funds. b. Funding and Placement Interest Rate Information. c. Disbursement Plan & Financing Repayment. d. Proposed Financing Interest Rate.
23	23 November 2021 23 November 2021	a. Kondisi Likuiditas dan Sumber Dana. b. Pendanaan dan Informasi Suku Bunga Penempatan. c. Rencana Pencairan & Pelunasan Pembiayaan. d. Usulan Suku Bunga Pembiayaan.	a. Liquidity Conditions and Sources of Funds. b. Funding and Placement Interest Rate Information. c. Disbursement Plan & Financing Repayment. d. Proposed Financing Interest Rate.
24	6 Desember 2021 6 December 2021	a. Kondisi Likuiditas dan Sumber Dana. b. Rencana Pencairan & Pelunasan Pembiayaan. c. Usulan Suku Bunga Pembiayaan.	a. Liquidity Conditions and Sources of Funds. b. Disbursement Plan & Repayment of Financing. c. Proposed Financing Interest Rate.
25	30 Desember 2021 30 December 2021	a. Kondisi Likuiditas dan Sumber Dana. b. Proyeksi Aset Pembiayaan per 31 Des 2021	a. Liquidity Conditions and Sources of Funds. b. Projected Financing Assets as of 31 Dec 2021

## **KOMITE PERSONALIA**

### Personnel Committee

Komite Personalia dibentuk berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif No. 0008/PDE/02/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Komite Personalia. Komite ini dibentuk untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam merumuskan kebijakan dan penyempurnaan terkait pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) serta strategi penerapan kebijakan SDM sesuai dengan sasaran dan strategi LPEI.

The Personnel Committee was established based on Executive Director Regulation No. 0008/PDE/02/2018 dated 7 February 2018. The Committee was formed to provide recommendations to the Executive Director in formulating policies and improvements related to the development and management of human resources (HR), as well as strategies for implementing HR policies in accordance with Indonesia Eximbank's goals and strategies.

#### **Struktur dan Keanggotaan Komite Personalia** Personnel Committee Structure and Membership

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman and Permanent Member	Direktur Eksekutif Executive Director
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice-Chairman and Permanent Member	Direktur Pelaksana IV Managing Director IV
Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary and Permanent Member	Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Organisasi Head of Human Resources and Organizational Development Division
Anggota Members	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Direktur Pelaksana I</li><li>2. Direktur Pelaksana II</li><li>3. Direktur Pelaksana III</li><li>4. Direktur Pelaksana V</li> <li>1. Managing Director I</li><li>2. Managing Director II</li><li>3. Managing Director III</li><li>4. Managing Director V</li></ol>

#### **Tugas dan Tanggung Jawab**

Tugas Komite Personalia adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan arah, perubahan dan penyempurnaan kebijakan personalia Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- b. Memastikan kebijakan personalia dilaksanakan dengan memperhatikan antara lain:
  - Kondisi keuangan dan anggaran sebagaimana diatur di dalam ketentuan yang berlaku.
  - Kewajaran dengan peers group
  - Sasaran dan strategi jangka panjang lembaga.

#### **Duties and Responsibilities**

The duties of the Personnel Committee are as follows:

- a. Determine the direction, changes and improvements to the personnel policies of Indonesia Eximbank.
- b. Ensuring that personnel policies are implemented by taking into account, among others:
  - Financial and budgetary conditions as stipulated in the applicable provisions.
  - Fairness with peer groups
  - The Institution's long-term goals and strategies.

## ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF

### Executive Director Supporting Organs

- c. Menentukan pengembangan nilai-nilai lembaga (*corporate values*) sebagai pedoman dalam membentuk budaya lembaga (*corporate culture*) untuk mencapai visi dan misi Lembaga Pembangunan Ekspor Indonesia.

- c. Determine the development of corporate values as a guide in shaping the corporate culture to achieve the vision and mission of Indonesia Eximbank.

#### Tata Cara Pengambilan Keputusan

Tata cara pengambilan keputusan Komite Personalia adalah sebagai berikut:

- a. Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau secara sirkuler.
- b. Pengambilan keputusan Komite dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh:
  - Ketua dan/atau wakil ketua;
  - Anggota tetap lain dengan kehadiran lebih dari setengah anggota tetap.
- c. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- d. Seluruh keputusan Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditatausahakan secara lengkap dan tertib.

#### Decision Making Procedures

The decision-making procedure in the Personnel Committee is as follows:

- a. The Committee decisions can be made through face-to-face meetings or with circular.
- b. The Committee's decision-making is considered a quorum if it is attended by at least:
  - The chairman and/or vice chairman;
  - Other permanent members with the presence of more than half of the permanent members.
- c. Meeting decisions must be made based on deliberation for consensus.
- d. All decisions of the Committee must be stated in the Minutes of Meeting and administered in a complete and orderly manner.

## **KOMITE ETIK DAN DISIPLIN PEGAWAI** Employee Ethics and Discipline Committee

Komite Etik dan Disiplin Pegawai dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Eksekutif No. 0086/KDE/12/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Komite Etik dan Disiplin Pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

The Employee Ethics and Discipline Committee was formed based on the Executive Director's Decree No. 0086/KDE/12/2020 dated 17 December 2020 regarding the Committee on Ethics and Discipline for Employees of the Indonesia Eximbank.

### **Struktur dan Keanggotaan Komite Etik dan Disiplin Pegawai** Employee Ethics and Discipline Committee Structure and Membership

#### **Komite Etik dan Disiplin Level I** Ethics and Discipline Committee Level I

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman and Permanent Member	Direktur Pelaksana/SEVP/settingkat yang membidangi fungsi SDM Managing Director/SEVP/equivalent in charge of HC function
Anggota Members	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Direktur Pelaksana/ SEVP/ settingkat yang membidangi fungsi Manajemen Risiko;</li><li>2. Direktur Pelaksana/ SEVP/ settingkat yang membidangi fungsi Hukum;</li><li>3. Direktur Pelaksana/ SEVP/ settingkat yang membidangi fungsi Operasional;</li><li>4. Direktur Pelaksana/ SEVP/ settingkat yang membidangi fungsi Audit;</li><li>5. Direktur Pelaksana/ SEVP/ settingkat yang membidangi fungsi Kepatuhan;</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Managing Director/ SEVP/ equivalent in charge of the Risk Management function;</li><li>2. Managing Director/ SEVP/ equivalent in charge of Legal functions;</li><li>3. Managing Director/ SEVP/ equivalent in charge of Operational functions;</li><li>4. Managing Director/ SEVP/ equivalent in charge of the Audit function;</li><li>5. Managing Director/ SEVP/ equivalent in charge of the Compliance function;</li></ol>
Sekretaris, merangkap Anggota Secretary and Member	Kepala Divisi SDM dan fungsi Hubungan Industrial HR Division Head and Industrial Relations function
Anggota tidak tetap Non permanent Member	Direktur Pelaksana/SEVP/settingkat yang diundang Managing Director/SEVP/equivalent who were invited

#### **Komite Etik dan Disiplin Level II** Ethics and Discipline Committee Level II

Ketua merangkap Anggota Chairman and Member	Kepala Divisi SDM dengan fungsi Hubungan Industrial Head of HR Division with Industrial Relations function
--	---

## ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF

Executive Director Supporting Organs

Anggota Member	1. Kepala Divisi dengan fungsi Special Audit; 2. Kepala Divisi dengan fungsi Hukum; 3. Kepala Divisi dengan fungsi Operasional; 4. Kepala Divisi dengan fungsi Kepatuhan;  1. Head of Division with Special Audit function; 2. Head of Division with Legal function; 3. Head of Division with Operational function; 4. Head of Division with Compliance function;
Sekretaris, merangkap Anggota Secretary and Member	Kepala Divisi dengan fungsi Manajemen Risiko; Division Head with Risk Management function;
Anggota tidak tetap Non permanent Member	Kepala Divisi yang diundang Invited Division Head

### Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Etik dan Disiplin Pegawai antara lain:

- a. Menentukan Sanksi bagi pelaku pelanggaran sedang atau berat dan pihak-pihak yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memastikan bahwa Unit Kerja terkait memberikan sanksi sesuai keputusan yang diambil;
- c. Menentukan sanksi bagi atasan terkait yang memberikan sanksi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Merekendasikan pelaku Pelanggaran berat (khususnya *fraud*) akan dilaporkan kepada pihak Kepolisian serta menentukan unit kerja dan memonitor penyelesaian kasus yang dilaporkan kepada pihak Kepolisian;
- e. Memastikan telah dilakukan pemeriksaan yang memadai;
- f. Me-review dan memastikan telah dilakukan analisa pencarian akar permasalahan (*root cause analysis*) dan pembelajaran (*lesson learned*) secara benar atas kasus yang ada;
- g. Melakukan monitoring atas pemberian sanksi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta evaluasi dan rekomendasi sanksi atas Pelanggaran sedang maupun berat;
- h. Melakukan Tindakan-tindakan lain terkait yang mendukung terselesaikannya Pemeriksaan dan Klarifikasi tersebut.

### Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of the Employee Ethics and Discipline Committee include:

- a. Determine Sanctions for perpetrators of moderate or severe violations and related parties in accordance with applicable regulations;
- b. Ensure that the relevant Work Units provide sanctions according to the decisions taken;
- c. Determine sanctions for related supervisors who provide sanctions that are not in accordance with applicable regulations;
- d. Recommend that perpetrators of serious violations (especially fraud) will be reported to the Police and determine work units and monitor the settlement of cases reported to the Police;
- e. Ensure that adequate inspections have been carried out;
- f. Reviewing and ensuring that root cause analysis and lesson learned have been carried out correctly on existing cases;
- g. Monitoring the imposition of sanctions that have been determined in accordance with applicable regulations as well as evaluating and recommending sanctions for moderate or severe violations;
- h. Take other related actions that support the completion of the Audit and Clarification.

## **KOMITE TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI**

### Technology And Information Systems Committee

Komite Teknologi dan Sistem Informasi dibentuk berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif No. 0029.01/PDE/11/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Komite Teknologi Sistem Informasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

The Technology and Information Systems Committee was established based on Executive Director Regulation number 0029.01/PDE/11/2021 dated 29 November 2021 regarding the Information System Technology Committee of the Indonesian Export Financing Agency.

#### **Struktur dan Keanggotaan Komite Teknologi dan Sistem Informasi** Technology and System Information Committee Structure and Membership

Ketua merangkap Anggota Tetap Dengan Hak Suara Chairman and Voting Permanent Member	Direktur Pelaksana V Managing Director V
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Dengan Hak Suara Vice Chairman and Voting Permanent Member	Head of Operation & IT
Sekretaris Komite Committee Secretary	Kepala Divisi Teknologi Sistem Informasi Information System Technology Division Head
Anggota lainnya Other Members	Anggota Tetap Dengan Hak Suara: 1. Direktur Pelaksana III 2. Head of Finance & Strategic Planning 3. Head of Credit & Risk
	Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara: Direktur Pelaksana dan/atau Head of yang terkait dengan materi
	Anggota Tetap Tanpa Hak Suara: 1. Head of Compliance, HR, & TO 2. Head of Internal Audit
	Invitee: 1. Ketua Komite Audit 2. Ketua Komite Pemantau Risiko
	Kontribusi Tetap Tanpa Hak Suara: 1. Sekretaris Komite 2. Kepala Divisi/ Pejabat setingkat Kepala Divisi dari Unit Kerja terkait
	Voting Permanent Members: 1. Managing Director III 2. Head of Finance & Strategic Planning 3. Head of Credit & Risk
	Voting Non-Permanent Members: Managing Director and/or Head of related material

## ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF

Executive Director Supporting Organs

Non-Voting Permanent Members:

1. Head of Compliance, HR & TO
2. Head of Internal Audit

invitee:

1. Chairman of the Audit Committee
2. Chairman of the Risk Monitoring Committee

Non-Voting Permanent Contributors:

1. Committee Secretary
2. Head of Division/Officer at the level of Division Head from the relevant Work Unit

### **Tugas dan Tanggung Jawab**

Tugas dan tanggung jawab Komite Teknologi Sistem Informasi antara lain:

- a. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif arah dan kebijakan pengembangan teknologi sistem informasi jangka menengah dan jangka panjang.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif rencana kegiatan investasi teknologi sistem informasi.
- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas pengembangan dan penerapan teknologi sistem informasi yang telah dilakukan.

### **Tata Cara Pengambilan Keputusan**

Tata cara pengambilan keputusan Komite Teknologi dan Sistem Informasi adalah sebagai berikut:

- a. Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau secara sirkuler.
- b. Pengambilan keputusan Komite dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh:
  - Ketua dan/atau wakil ketua;
  - Anggota tetap lain dengan kehadiran lebih dari setengah anggota tetap; dan
  - 1(satu) anggota tidak tetap.
- c. Keanggotaan peserta disesuaikan dengan materi yang dicakup dalam agenda Komite Teknologi Sistem Informasi dimaksud.
- d. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- e. Seluruh keputusan Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditatausahakan secara lengkap dan tertib.

### **Duties and Responsibilities**

The duties and responsibilities of the Information Systems Technology Committee include:

- a. Provide recommendations to the Executive Director on the direction and policy of developing medium and long-term information system technology.
- b. Provide recommendations to the Executive Director on the information system technology investment plan.
- c. Supervise and evaluate the development and application of information system technology that has been carried out.

### **Decision Making Procedures**

The procedure for decision-making by the Information Technology and Systems Committee is as follows:

- a. The Committee decisions can be made through face-to-face meetings or with circular.
- b. The Committee's decision-making is considered a quorum if it is attended by at least:
  - The chairman and/or deputy chairman;
  - Other permanent members with the presence of more than half of the permanent members; and
  - 1(one) non-permanent member.
- c. Membership of participants is adjusted to the material covered in the said Information System Technology Committee agenda.
- d. Meeting decisions must be made based on deliberation to reach consensus.
- e. All decisions of the Committee must be stated in the Minutes of Meeting and administered in a complete and orderly manner.

## ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF

Executive Director Supporting Organs

### Agenda dan Frekuensi Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2021 Komite Teknologi Sistem Informasi telah melakukan 3 (tiga) kali rapat dengan agenda sebagai berikut:

### Meeting Agenda and Frequency of Attendance

Throughout 2021, the Information System Technology Committee held 3 (three meetings with the following agenda:

**Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Teknologi Sistem Informasi 2021**

**Information System Technology Committee 2021 Meeting Frequency and Attendance Table**

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Frequency	Kehadiran Attendance	(%)
Direktur Pelaksana V Managing Director V	Ketua merangkat anggota tetap Chairman concurrently permanent member	3	3	100%
Direktur Pelaksana III Managing Director III	Anggota Tetap dengan Hak Suara Permanent member with voting rights	3	3	100%
Head of Operation & IT	Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap dengan Hak Suara Vice Chairman concurrently permanent member with voting rights	3	3	100%
Head of Finance & Strategic Planning	Anggota Tetap dengan Hak Suara Permanent member with voting rights	3	3	100%
Head of Credit & Risk	Anggota Tetap dengan Hak Suara Permanent member with voting rights	3	3	100%
Head of Compliance, HR & TO	Anggota Tetap tanpa Hak Suara Permanent member without voting rights	3	3	100%
Head of Internal Audit	Anggota Tetap tanpa Hak Suara Permanent member without voting rights	3	3	100%

**ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF**  
Executive Director Supporting Organs

## KOMITE PENGADAAN

### Procurement Committee

Komite Pengadaan dibentuk berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif No. 0029/PDE/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Komite Pengadaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

The Procurement Committee was established based on Executive Director Regulation No. 0029/PDE/10/2021 dated 27 October 2021 concerning the Procurement Committee of the Indonesia Eximbank.

#### Struktur dan Keanggotaan Komite Pengadaan

Procurement Committee Structure and Membership

Komite Committee	Limit Pengadaan Procurement Limit	Anggota Members
Komite Pengadaan I Procurement Committee I	> Rp1.000.000.000,00	1. Direktur Pelaksana III (Ketua merangkap Anggota) 2. Direktur Eksekutif 3. Direktur Pelaksana V 4. Head of Finance & Strategic Planning 5. Head of Operation & IT 6. Direktur Pelaksana/ Head of dari unit pengusul (bila ada)  1. Managing Director III (Chairman and Member) 2. Executive Director 3. Managing Director V 4. Head of Finance & Strategic Planning 5. Head of Operations & IT 6. Managing Director/Head of the proposing unit (if any)
Komite Pengadaan II Procurement Committee II	> Rp500.000.000,00 s.d. ≤ Rp1.000.000.000,00  > Rp500.000.000,00 to ≤ Rp1.000.000.000,00	1. Direktur Pelaksana III (Ketua merangkap Anggota) 2. Direktur Pelaksana V 3. Head of Finance & Strategic Planning 4. Head of Operation & IT 5. Direktur Pelaksana/ Head of dari unit pengusul (bila ada)  1. Managing Director III (Chairman and Member) 2. Managing Director V 3. Head of Finance & Strategic Planning 4. Head of Operations & IT 5. Managing Director/Head of the proposing unit (if any)
Komite Pengadaan III Procurement Committee III	> Rp20.000.000,00 s.d. ≤ Rp500.000.000,00  > Rp20.000.000,00 to ≤ Rp500.000.000,00	1. Head of Finance & Strategic Planning (Ketua merangkap Anggota) 2. Head of Operation & IT 3. Direktur Pelaksana/ Head of dari unit pengusul (bila ada)  1. Head of Finance & Strategic Planning (Chairman and Member) 2. Head of Operations & IT 3. Managing Director/Head of the proposing unit (if any)

Untuk Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp20.000.000,00 tidak termasuk ke dalam kewenangan Komite Pengadaan dan merupakan kewenangan Kepala Divisi/ Kepala Kantor Wilayah/ Pejabat setingkat Kepala Divisi dari unit pengusul.

For Procurement with a value of up to Rp20,000,000.00 is not included in the authority of the Procurement Committee and is the authority of the Head of Division/ Head of Regional Office/ Officer at the level of Division Head of the proposing unit.

## ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF

### Executive Director Supporting Organs

#### Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Pengadaan antara lain:

- a. Memberikan persetujuan prinsip untuk Pengadaan Barang/Jasa pada tahun berjalan sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Lembaga Pembangunan Ekspor Indonesia dengan mempertimbangkan biaya dan anggaran;
- b. Menyetujui Pengadaan Barang/Jasa pada tahun berjalan yang belum dianggarkan dalam RKAT LPEI, termasuk untuk Pengadaan Mendesak dan/atau Pengadaan Keadaan Darurat;
- c. Menetapkan susunan Panitia Pengadaan Barang/Jasa melalui Keputusan Komite Pengadaan;
- d. Menyetujui dan menetapkan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp250.000.000,00 berikut perubahannya dan nilai Rencana Anggaran Biaya untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui metode Swakelola;
- e. Menyetujui dan menetapkan pemenang Pengadaan Barang/Jasa yang diusulkan oleh Unit Kerja Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa LPEI atau Panitia Pengadaan Barang/Jasa LPEI.

#### Tata Cara Pengambilan Keputusan

Tata cara pengambilan keputusan Komite Pengadaan adalah sebagai berikut:

- a. Bertindak sebagai Sekretaris Komite adalah Kepala Unit Kerja yang melaksanakan fungsi Pengadaan. Fungsi Sekretaris Komite tersebut berlaku efektif pada saat proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa telah dimulai;
- b. Persetujuan izin prinsip Pengadaan Barang/Jasa dapat diajukan oleh unit kerja pengusul Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau secara sirkuler;
- d. Pengambilan keputusan Komite dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh:
  - Untuk Komite I, dihadiri oleh lebih dari setengah anggota Komite I, dengan kehadiran wajib Direktur Eksekutif dan Ketua;
  - Untuk Komite II, dihadiri oleh lebih dari setengah anggota Komite II, dengan kehadiran wajib Ketua;
  - Untuk Komite III, dihadiri oleh seluruh anggota Komite III.
- e. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- f. Seluruh keputusan Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditatausahakan secara lengkap dan tertib.

#### Duties and Responsibilities

Duties and responsibilities of the Procurement Committee include:

- a. Provide principal approval for the Procurement of Goods/Services in the current year as stipulated in the Annual Work Plan and Budget (RKAT) of the Indonesia Eximbank by considering costs and budget;
- b. Approve the procurement of goods/services in the current year that has not been budgeted for in the RKAT, including for Urgent Procurement and/or Emergency Procurement;
- c. Determine the composition of the Committee for the Procurement of Goods/Services through the Decree of the Procurement Committee;
- d. Approve and determine the value of the Self-Estimated Price(HPS)for the Procurement of Goods/ Services with a value above Rp250,000,000.00 and the amendments thereto and the value of the Budget Plan for the Procurement of Goods/Services carried out through the self-management method;
- e. Approve and determine the winner of the Procurement of Goods/Services proposed by the Goods/Services Procurement Unit or the Goods/ Services Procurement Committee.

#### Decision Making Procedures

The procedure for decision-making by the Procurement Committee is as follows:

- a. Acting as Committee Secretary is the Head of Work Unit in charge of Procurement function. The function of the Committee Secretary is effective when the process of implementing the Procurement of Goods/ Services has begun;
- b. Approval of the principal permit for the Procurement of Goods/Services can be submitted by the work unit proposing the Procurement of Goods/Services;
- c. Decision making can be done through face-to-face meetings or with circular;
- d. The Committee's decision-making is considered a quorum if it is attended by at least:
  - For Committee I, attended by more than half of the members of Committee I, with the mandatory attendance of the Executive Director and Chairman;
  - For Committee II, attended by more than half of the members of Committee II, with the mandatory presence of the Chairman;
  - For Committee III, attended by all members of Committee III.
- e. Meeting decisions must be made based on deliberation for consensus.
- f. All decisions of the Committee must be stated in the Minutes of Meeting and administered in a complete and orderly manner.



# SEKRETARIS DEWAN DIREKTUR

## Secretary to The Board of Directors

Sekretaris Dewan Direktur berfungsi untuk membantu kelancaran tugas Dewan Direktur, yang meliputi penyusunan dan penetapan kebijakan serta melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pengurusan Lembaga oleh Direktur Eksekutif dan segenap jajarannya.

The Secretary of the Board of Directors has the function to assist the effectiveness of the Board of Directors' duties, including the development and establishment of policies as well as oversight on the Company's management by Executive Director and all elements.

### Profil Sekretaris Dewan Direktur

#### Profile of Secretary of the Board of Directors



**T. Dyza R. A. Rochadi**

Sekretaris Dewan Direktur  
Secretary to the Board of Directors

49 Tahun | Years old

Kewarganegaraan Indonesia | Indonesian  
Citizenship Domisili | Domicile: Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan  
Appointment Basis

PDD No. 007/PDD/12/2020

Rangkap Jabatan  
Concurrent Position

Merangkap sebagai Kepala Divisi *Communication and Stakeholders Engagement*  
Concurrently serving as Head of the Communication and Stakeholders Engagement Division

Pengalaman Kerja  
Professional Experience

LPEI

- Kepala Divisi *Office of the Board* (Juli 2020 - masa pelaporan)
- Kepala Divisi *Trade Finance* (April 2019 – Juni 2020)
- Kepala Divisi *Executive Office* (Januari 2018 – April 2019)
- Kepala Divisi Internasional (Agustus 2014 – Januari 2018)
- Pj. Kepala Divisi Manajemen Risiko & Perencanaan Strategis (Agustus 2013 – Juli 2014)
- Kepala Departemen MSDM (Januari 2011 – Juli 2013)
- Kepala Departemen SDM (September 2009 – Desember 2011)

PT Bank Ekspor Indonesia (Persero)

- Sr. Manager SDM dan Umum (September 2006 – Agustus 2009)
- Kepala Departemen Hubungan Kelembagaan (November 2003 – September 2006)
- RM Koresponden Bank – International (Juni 2000 – November 2003)
- RM Koresponden Bank (September 1999 – Juni 2000)

PT Bank Nusa International

- Unit Head of Business Development Unit (April 1999 – Agustus 1999)
- Dept. Head Overseas Correspondent Banking (Januari 1999 – April 1999)
- RM of Overseas Correspondent Banking Dept (Mei 1998 – Januari 1999)
- Unit Head of International Banking Unit (Desember 1997 – Mei 1998)
- Asst. Manager of International Banking Unit (September 1996 – Desember 1997)
- Chief Assistant of Overseas Correspondent Banking & Trade Finance Unit (September 1995 – September 1996)

## **SEKRETARIS DEWAN DIREKTUR**

Secretary to The Board of Directors

### Indonesia Eximbank

- Head of Division Office of the Board (July 2020 – reporting period)
- Head of the Trade Finance Division (Apr 2019 – June 2020)
- Head of Executive Office Division (January 2018 – April 2019)
- Head of International Division (August 2014 – January 2018)
- Acting Head of Risk Management & Strategic Planning Division (August 2013 – July 2014)
- Head of the Department of HRM (January 2011 – July 2013)
- Head of the HR Department (September 2009 – December 2011)

### PT Indonesian Export Bank (Persero)

- Sr. HR and General Manager (September 2006 – August 2009)
- Head of the Department of Institutional Relations (November 2003 – September 2006)
- RM Koresponden Bank - International (June 2000 – November 2003)
- Bank Correspondent RM (September 1999 – June 2000)

### PT Bank Nusa International

- Unit Head of Business Development Unit (April 1999 – August 1999)
- Dept. Head Overseas Correspondent Banking (January 1999 – April 1999)
- RM of Overseas Correspondent Banking Dept (May 1998 – January 1999)
- Unit Head of International Banking Unit (December 1997 – May 1998)
- Asst. Manager of International Banking Unit (September 1996 – December 1997)
- Chief Assistant of Overseas Correspondent Banking & Trade Finance Unit (September 1995 – September 1996)

Riwayat Pendidikan  
Education

- S2 Keuangan dan Perbankan, Universitas Indonesia, Jakarta – Indonesia, Tahun 1999
- S1 Manajemen Keuangan, Universitas Trisakti, Jakarta – Indonesia, Tahun 1995
- Master's Degree in Finance and Banking, University of Indonesia, Jakarta – Indonesia, 1999
- Bachelor of Financial Management, Trisakti University, Jakarta – Indonesia, 1995

## SEKRETARIS DEWAN DIREKTUR

Secretary to The Board of Directors

### **Tugas dan Tanggung Jawab**

Sekretaris Dewan Direktur memimpin Unit Kerja *Office of The Board* yang melaksanakan fungsi sekretariat Dewan Direktur dengan tugas dan tanggung jawab:

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung fungsi dan kegiatan Dewan Direktur;
2. Mencatat dan mengadministrasikan rapat Dewan Direktur;
3. Mengadministrasikan korespondensi dan laporan-laporan Dewan Direktur serta komite-komite yang berada di bawah Dewan Direktur;
4. Menjalankan fungsi penghubung (*liaison*) antara Dewan Direktur dengan fungsi-fungsi eksekutif LPEI;
5. Memastikan tata kelola Dewan Direktur sesuai dengan prinsip tata kelola kelembagaan dan memenuhi aturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Direktur.

### **Laporan Pelaksanaan Tugas**

Pada tahun 2021, Sekretaris Dewan Direktur telah melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Mengelola agenda Dewan Direktur dalam bentuk pengaturan penjadwalan, penyediaan materi serta penyusunan dan pendokumentasian risalah rapat;
2. Memastikan tindak lanjut atas setiap arahan Dewan Direktur;
3. Melaksanakan fungsi keprotokoleran dalam agenda Dewan Direktur;
4. Menyusun dan menyampaikan laporan-laporan Dewan Direktur secara tepat waktu;
5. Mengusulkan penyempurnaan regulasi internal terkait tata kerja Dewan Direktur dan tata naskah dinas lembaga;
6. Menjalin hubungan dan mewujudkan sinergi antar *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan dan lembaga lainnya.

### **Duties and Responsibilities**

The Secretary of the Board of Directors leads the Office of the Board Unit which carries out the secretariat functions of the Board of Directors with duties and responsibilities:

1. To carry out activities to support the functions and activities of the Board of Directors;
2. To record and administer the Board of Directors meeting;
3. Administration of the correspondence and reports of the Board of Directors as well as the committees under the Board of Directors;
4. To carry out the liaison function (*liaison*) between the Board of Directors and the executive functions of Indonesia Eximbank;
5. Ensure that the governance of the Board of Directors is in accordance with the principles of institutional governance and complies with statutory regulations; and
6. Carry out other duties as determined by the Board of Directors.

### **Duties Implementation Report**

In 2021, the Secretary to the Board of Directors has carried out the following duties:

1. Manage the agenda of the Board of Directors such as scheduling arrangements, provision of materials and preparation and documentation of minutes of meetings;
2. Ensuring follow-up on every direction of the Board of Directors;
3. Carry out protocol functions in the agenda of the Board of Directors;
4. Prepare and submit reports of the Board of Directors in a timely manner;
5. Propose improvements to internal regulations related to the work procedures of the Board of Directors and institutional service manuscripts;
6. Establishing relationships and creating synergies between the Ministry of Finance's Special Mission Vehicle (SMV) and other institutions.



# SEKRETARIS LEMBAGA

## Corporate Secretary

LPEI memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan yang berperan sebagai penghubung antara organ perusahaan dengan pihak eksternal termasuk lembaga pemerintah dan non-pemerintah, pemegang saham, serta pelaku pasar modal lainnya. Peran ini melekat pada Sekretaris Lembaga LPEI yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direktur Eksekutif serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif.

Sebagai aspek penting dalam penerapan GCG, Sekretaris Lembaga dibentuk untuk memberi dukungan bagi Manajemen dalam mencapai dan memastikan kepatuhan atas persyaratan peraturan dan perundangan serta dalam implementasi keputusan-keputusan Direksi.

### Dasar Hukum

LPEI mengangkat Agus Windiarto sebagai Sekretaris Lembaga yang telah disahkan berdasarkan Memorandum Prosedur Nomor MPO.0035/CEO/07/2020.

### Profil Sekretaris Lembaga

#### Corporate Secretary Profile



**AGUS WINDIARTO**

Direktur Pelaksana III merangkap Corporate Secretary  
Managing Director III Concurrently Acting Corporate Secretary

Dasar Hukum Pengangkatan  
Appointment Basis

Memorandum Prosedur No. MPO.0035/CEO/07/2020 tanggal 1 Juli 2020  
Procedure Memorandum No. MPO.0035/CEO/07/2020 dated 1 July 2020

Profil  
Profile

Profil dapat dilihat pada Sub Bab Profil Direktur Pelaksana di Bab 3 Laporan Tahunan ini.  
Profile can be viewed on Sub Chapter of the Managing Directors Profile in Chapter 3 of this Annual Report

### Struktur Organisasi Sekretariat Lembaga

Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif.

Indonesia Eximbank has in place a corporate secretary function that serves as a link between the company's organ with the external parties including government and non-government institutions, shareholders, as well as other capital market players. The Company's Corporate Secretary is appointed and dismissed based on the Decree of Executive Director, and is directly responsible to the Executive Director.

As an important aspect of GCG implementation, Corporate Secretary is established to assist the Management to achieve and ensure compliance with the statutory and regulatory requirements and in the implementation of the Board of Directors' decisions.

### Legal References

Indonesia Eximbank has appointed Agus Windiarto as the Corporate Secretary, which has been ratified by MPO.0035/ CEO/07/2020.

### Organization Structure of Corporate Secretary

The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the Executive Director and is directly responsible to the Executive Director.

## SEKRETARIS LEMBAGA

Corporate Secretary

**Direktur Pelaksana III merangkap  
Corporate Secretary**  
Managing Director III Concurrently  
Acting Corporate Secretary

**Divisi Office of The Board**  
Office of The Board Division

**Divisi Communication & Stakeholder  
Engagement**  
Communication & Stakeholder  
Engagement Division

### Tugas dan Tanggung Jawab

Secara khusus, Sekretaris Lembaga memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Memberikan masukan kepada Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif dalam hal kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Membantu Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan antara lain:
  - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web LPEI;
  - Penyampaian laporan kepada pemangku kepentingan dan regulator secara tepat waktu;
  - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Pengesahan; dan
  - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Dewan Direktur dan/atau Direktur Eksekutif.
- Menjalin komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan utama seperti Kementerian Keuangan RI, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Wali Amanat, Kreditur, Debitur dan publik secara luas.

### Pelaksanaan Tugas 2021

Sepanjang tahun 2021 Sekretaris Lembaga melaksanakan berbagai kegiatan, sebagai berikut:

### Duties and Responsibilities

In particular, the Corporate Secretary has the following duties and responsibilities:

- To provide input to the Board of Directors and Executive Directors in compliance with the laws and regulations;
- To assist the Board of Directors and Executive Directors in the implementation of GCG, among others:
  - Information transparency to the public, including disclosure in Indonesia Eximbank website;
  - Timely report submission to the ministry of finance and other regulators;
  - Organization and documentation of the Endorsement Meeting/GMS; and
  - Organization and documentation of the Board of Directors and Executive Directors meetings.
- To establish an effective communication with the primary stakeholders such as ministry of finance, Financial Services Authority, Indonesia Stock Exchange, The Trustee, Creditors, Debtors and Public in general.

### Duties Implementation in 2021

During 2021, the Corporate Secretary carried out various activities, as follows:

**SEKRETARIS LEMBAGA**  
Corporate Secretary

**1. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalin komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan, sebagai berikut:**

**Activities to carry out effective communication with stakeholder, as follows:**

No	Acara Event	Waktu Period	Wilayah Region
1	Signed PKS dalam rangka Penjaminan Korporasi Pemerintah dengan Bank BTN Signing of Cooperation Agreement with Bank BTN for the Government Corporate Guarantee	TW 1	Jakarta
2	Signed PKS antara LPEI dan PII untuk Penjaminan bersama Penjaminan Pemerintah Signing of Cooperation Agreement between Indonesia Eximbank and PII for the Government Joint Guarantee	TW 1	Jakarta
3	Kick off Meeting Secondment antara SMV dan Kemenkeu RI Kick off Meeting Secondment between SMV and Ministry of Finance of RI	TW 1	Jakarta
4	Webinar "Dukungan Pemerintah bagi UMKM dalam rangka PEN" Webinar of "Government Support for MSME regarding PEN"	TW 1	Jakarta
5	Signed Kontrak Manajemen LPEI 2021 Signing of Indonesia Eximbank Management Contract 2021	TW 1	Jakarta
6	Signed PKS dalam rangka Penjaminan Korporasi Pemerintah dengan BCA Signing of Cooperation Agreement with BCA for Government Corporate Guarantee	TW 1	Jakarta
7	Sinergi SMV memberikan bantuan bagi Masyarakat terdampak bencana Gempa Bumi di Kab Majene, Sulawesi Barat SMV Synergy provides assistance for the Community impacted by Earthquake in Majene Regency, West Sulawesi	TW 1	Majene
8	Ferry Flight Pesawat CN 235-220 MPA PT Dirgantara Indonesia ke Senegal dengan NIA Ferry Flight of CN 235-220 MPA Airplane of PT Dirgantara Indonesia to Senegal with NIA	TW 1	Bandung
9	Talkshow "Mendorong Potensi Wisata dengan Pembiayaan Homestay" Talkshow of "Fostering the Tourism Potential with Homestay Financing"	TW 2	Jawa Barat
10	Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI bersama Kemenkeu RI dan LPEI ke Kendal dan Demak Work Visit of XI Commission of DPR RI with Ministry of Finance of RI and Indonesia Eximbank to Kendal and Demak	TW 2	Jawa Tengah
11	Mitra binaan LPEI berpartisipasi pada talkshow Peringatan Hari Kartini di Kemenkeu RI Indonesia Eximbank mentoring partner participates at the talkshow of the Commemoration of Kartini Day at the Ministry of Finance of RI	TW 2	Jakarta
12	Signed Penjaminan Pemerintah Korporasi MAP, LPEI dan PII kepada Standard Chartered Bank Signing of Corporate Government Guarantee between MAP, Indonesia Eximbank, and PII to Standard Chartered Bank	TW 2	Jakarta
13	Giling Tebu perdana dengan PTPN First Sugarcane Mill with PTPN	TW 2	Jawa Tengah
14	Signed PKS Penjaminan Pemerintah Korporasi dengan Bank Shinhan Indonesia Signing of Cooperation Agreement with Bank Shinhan Indonesia for Corporate Government Guarantee	TW 2	Jakarta
15	Signed Pendanaan senilai Rp3 Triliun dengan BCA Signing of Funding worth Rp3 Trillion with BCA	TW 2	Jakarta
16	Sosialisasi Desa Devisa Subang Dissemination of Subang Desa Devisa	TW 3	Jawa Barat

**SEKRETARIS LEMBAGA**  
Corporate Secretary

No	Acara Event	Waktu Period	Wilayah Region
17	Webinar UMKM naik kelas dengan Ekspor berkelas bersama Pemangku Kepentingan Webinar of MSME upgrades with qualified Export jointly with the Stakeholders	TW 3	Jakarta
18	Penandatanganan Nota Kesepahaman LPEI dan PLN terkait Penelitian Ketenagalistrikan Signing of Memorandum of Understanding of Indonesia Eximbank and PLN regarding Electrical Research	TW 3	Jakarta
19	Signing LPEI dan PT Garuda Indonesia tentang Sinergi Kelembagaan dalam rangka Peningkatan Jasa Layanan Penerbangan dan Penerimaan Devisa Negara Signing of between Indonesia Eximbank and PT Garuda Indonesia on the Institutional Synergy to Improve Flight Services and State Revenue Acquisition	TW 3	Jakarta
20	Signing LPEI dan BPPK Kementerian Keuangan RI tentang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia untuk menunjang Peningkatan Ekspor Nasional Signing of between Indonesia Eximbank and BPPK Ministry of Finance of RI on the Development of Human Resource Capacity to foster the National Export Enhancement	TW 3	Jakarta
21	Webinar Jaminah "Solusi Perbankan untuk mendukung Pelaku Usaha Korporasi terdampak Covid-19" Jaminah Webinar "Banking Solution to foster Corporate Entities impacted by the Covid-19"	TW 3	Jakarta
22	Kegiatan Vaksinasi LPEI Peduli di Jakarta LPEI Peduli Vaccination activity in Jakarta	TW 3	Jakarta
23	Kegiatan Ekspor Perdana Desa Devisa Kopi Subang First Export of Subang Coffee Desa Devisa	TW 3	Jawa Barat
24	Kegiatan Vaksinasi LPEI Peduli di Toba, Samosir Sumatera Utara LPEI Peduli Vaccination activity in Toba, Samosir North Sumatra	TW 3	Sumatera Utara
25	Talkshow Ekspor Nasional "Sulawesi Utara sebagai Gerbang UKM Ekspor di Wilayah Indonesia Timur" National Export Talkshow "North Sulawesi as the Export SME Gate at the Eastern Indonesia Region"	TW 3	Manado
26	Pembangunan KEK Mandalika dengan NIA untuk Tingkatkan Devisa Development of KEK Mandalika with NIA to Increase Foreign Exchange	TW 4	Mandalika
27	Trade Expo Indonesia 2021	TW 4	Jakarta
28	Peresmian Desa Devisa Wedani Inauguration of Wedani Desa Devisa	TW 4	Jawa Timur
29	Peresmian Desa Devisa Kusamba Inauguration of Kusamba Desa Devisa	TW 4	Bali
30	Anjangsana Dukungan Penjaminan Pemerintah terhadap Percepatan Pemulihan HOREKA di Bali Government Guarantee Support to the Acceleration of Recovery of HOREKA in Bali	TW 4	Bali
31	Peresmian Rumah Ekspor Solo Inauguration of Solo Export House	TW 4	Solo
32	Peresmian Desa Devisa Sidoarjo Inauguration of Sidoarjo Desa Devisa	TW 4	Jawa Timur

**2. Penyusunan Siaran Pers dalam rangka Keterbukaan informasi kepada media dan publik, sebagai berikut:**  
**Drafting of Press Releases for information disclosure to the media and public, as follows:**

No	No. Siaran Pers Press Release No.	Judul Siaran Pers Press Release Subject	Tanggal Date
1	SP0001	LPEI Optimis Kinerja Akan Makin Baik di 2021 Indonesia Eximbank Optimistic on Improved Performance in 2021	1/19/21
2	SP0002	Peti Mati Ramah Lingkungan Asal Gunung Kidul, Yogyakarta Tembus Ekspor Eco-Friendly Coffin from Gunung Kidul, Yogyakarta Go Exports	1/18/21
3	SP0003	DPR RI Optimistis Kinerja LPEI Akan Semakin Baik The House of Representatives of RI Optimistic on Indonesia Eximbank Improved Performance in 2021	1/21/21
4	SP0004	Sukses Tingkatkan Kinerja di Tengah Pandemi, Komisi XI DPR RI Apresiasi LPEI Successfully Improve Performance in the Midst of a Pandemic, Commission XI of the House of Representatives appreciates Indonesia Eximbank	1/27/21
5	SP0005	Dukung Pemulihan Ekonomi, LPEI Tandatangani Kerja sama Penjaminan dengan Bank BTN Fostering the Economic Recovery, Indonesia Eximbank Signs Guarantee Cooperation with Bank BTN	2/4/21
6	SP0006	Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional, LPEI dan PT PII Sebagai SMV Kementerian Keuangan RI Lakukan Penjaminan Bersama Fostering the National Economic Recovery, Indonesia Eximbank and PT PII as SMV Ministry of Finance of the Republic of Indonesia Conduct Joint Assurance	2/15/21
7	SP0007	Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional, SMV Kementerian Keuangan RI Lakukan Penjaminan Bersama Fostering the National Economic Recovery, SMV of the Ministry of Finance of RI Conducts Joint Guarantees	2/15/21
8	SP0008	LPEI Buka Kelas Gratis untuk Cetak Ekspor Baru di Tahun 2021 Indonesia Eximbank Opens Free Class to Create New Exporters in 2021	2/23/21
9	SP0009	Pulihkan Ekonomi, LPEI Bantu UMKM Masuki Marketplace Global Restore the Economy, Indonesia Eximbank Helps MSMEs Enter the Global Marketplace	2/25/21
10	SP0010	Peran LPEI Dukung Pemerintah bagi UMKM dalam Rangka PEN The Role of Indonesia Eximbank to Support the Government for MSMEs for PEN	3/5/21
11	SP0011	Jurus-jurus LPEI Dukung Pemerintah Majukan UMKM Ekspor Indonesia Eximbank Strategies to Support the Government to Advance Export for MSMEs	3/8/21
12	SP0013	Akselerasi Ekonomi, LPEI dan BCA Tanda Tangani Kerja Sama Perjanjian Penjaminan Pemerintah (JAMINAH) Bagi Pelaku Usaha Korporasi Economic Acceleration, Indonesia Eximbank and BCA Sign Government Guarantee Agreement (JAMINAH) Cooperation for Corporate Entities	3/8/21
13	SP Bersama	PTDI EKSPORT PESAWAT CN235-220 MPA KE SENEGAL (Siaran Pers Bersama) PTDI EXPORTS CN235-220 MPA AIRCRAFT TO SENEGAL (Joint Press Release)	3/19/21
14	SP0012	LPEI Biayai Ekspor Pesawat senilai Rp354 Miliar Indonesia Eximbank Funds for Aircraft Exports worth Rp354 Billion	3/23/21
15	SP0014-1	Kembangkan Kapasitas IKM & UMKM Jawa Tengah, LPEI Gandeng Pemda Kendal dan Demak Develop the Capacity of IKM & MSMEs of Central Java, Indonesia Eximbank Collaborates with Kendal and Demak Regional Governments	3/25/21
16	SP0014	LPEI Luncurkan Buku Kajian "Kendal Goes Global" Indonesia Eximbank Launches Study Book "Kendal Goes Global"	3/31/21

No	No. Siaran Pers Press Release No.	Judul Siaran Pers Press Release Subject	Tanggal Date
17	SP0015	LPEI Dukung Ekspor Asal Kendal Indonesia Eximbank Supports Kendal Exporters	4/6/21
18	SP0016	Ekspor Batik Sukoharjo ke AS & Kanada, LPEI dukung UMKM saat Pandemi Export of Sukoharjo Batik to the US & Canada, Indonesia Eximbank supports MSMEs during the Pandemic	5/2/21
19	SP0017	Bangun Ketahanan Petani Tebu Dengan Investasi Pemerintah Build Sugarcane Farmer Resilience With Government Investment	5/24/21
20	SP0018	Kolaborasi LPEI dengan Pemkab Banyuwangi Majukan Agrobisnis Kawasan Ijen Indonesia Eximbank Collaboration with Banyuwangi Regency Government to Advance Ijen Agrobusiness	5/25/21
21	SP0020	Dorong Keberlangsungan Ekspor, LPEI Mulai Pelatihan UMKM di Bali Promote Export Sustainability, Indonesia Eximbank Starts MSME Training in Bali	5/28/21
22	SP0019	LPEI Beri Pelatihan Sertifikasi Bagi Petani di Kawasan Agrowisata Ijen Banyuwangi Indonesia Eximbank Provides Certification Training for Farmers in Agrotourism Ijen Banyuwangi	5/31/21
23	SP0021	Program Pelatihan Ekspor LPEI Dorong Keberhasilan Ekspor UMKM Indonesia Eximbank Export Training Program Delivers the Success of MSME Export	6/11/21
24	SP0024	Pengusaha Kopi Sumut Optimis Mampu Tembus Pasar Ekspor North Sumatra Coffee Entrepreneurs Optimistic to Penetrate export market	6/15/21
25	SP Bersama	LPEI dan BCA Jalin Kerja Sama Pendanaan Senilai Rp3 Triliun untuk Akselerasi Ekspor Indonesia Eximbank and BCA Establish Rp3 Trillion Funding Cooperation for Export Acceleration	6/22/21
26	SP0022	Program PEN JAMINAH Menopang Permodalan Usaha Terdampak Pandemi Covid-19 PEN JAMINAH Program Supports Business Capital Affected by the Covid-19 Pandemic	6/28/21
27	SP0023	Perbankan Indonesia Mengucurkan Kredit Modal Kerja melalui Program PEN Jaminah Indonesian Banking Disburses Working Capital Loans through PEN Jaminah Program	6/28/21
28	SP0025	Cetak Ekspor Handal Melalui Program CPNE Create Reliable Exporters Through CPNE Program	7/2/21
29	SP0026	Mau Ekspor Produk, Pahami Dulu Aturan dan Mekanismenya Plan for Products Export, First to Understand the Rules and Mechanisms	7/2/21
30	SP0028	Siap Cetak Ekspor Baru, LPEI Gelar Pelatihan Ekspor Tingkat Lanjutan Ready to Create New Exporters, Indonesia Eximbank Holds Advanced Export Training	7/8/21
31	SP0029	Membangun UMKM dan Ekspor Berkualitas Global, LPEI Gelar Pelatihan Ekspor Serentak di Tiga Kota Besar di Indonesia Building MSMEs and Exporters of Global Quality, Indonesia Eximbank Holds Simultaneous Export Training in Three Major Cities in Indonesia	7/8/21
32	SP0027	Desa Devisa Mendorong Kolaborasi Membangun Masyarakat dan Komoditas Unggulan Desa Devisa Promotes Collaboration to Develop Excellent Communities and Commodities	7/9/21
33	SP0030	Membangun Kapasitas Petani Kopi Subang dengan Desa Devisa Building the Capacity of Subang Coffee Farmers with Desa Devisa	7/12/21

**SEKRETARIS LEMBAGA**  
Corporate Secretary

No	No. Siaran Pers Press Release No.	Judul Siaran Pers Press Release Subject	Tanggal Date
34	SP0031	Secerah Harapan Petani Kopi di Desa Devisa Subang Hopes for Coffee Farmers in Subang Desa Devisa	8/2/21
35	SP0033	Aromaterapi jadi Primadona, Minyak Atsiri Indonesia Mendunia Aromatherapy becomes Prima donna, Minyak Atsiri Indonesia go global	8/6/21
36	SP0034	DJKN Kementerian Keuangan RI dan LPEI Komit Tingkatkan Kelas UKM Indonesia DJKN Ministry of Finance of RI and Indonesia Eximbank Commit to Increase the Class of Indonesian SMEs	8/12/21
37	SP0035	Bangun Kapasitas UKM Indonesia bersama LPEI Build Capacity of Indonesian SMEs with Indonesia Eximbank	8/16/21
38	SP0036	Bertahan Saat Pandemi, UKM Tekstil Solo Manfaatkan Program Penugasan Khusus Ekspor Surviving the Pandemic, Solo Textile SMEs Take Advantage of Export-NIA Programs	8/18/21
39	SP0037	Asuransi Ekspor Beri Kepastian Pembayaran bagi Pelaku Usaha di Era Pandemi Export Insurance Provides Payment Certainty for Business Entities in the Pandemic Era	8/21/21
40	SP0038	Topang Pelaku Usaha, Program Jaminah LPEI Salurkan Volume Pembiayaan Rp2,25 Triliun Per Agustus 2021 Fosters Business Entities, Indonesia Eximbank Guarantee Program Distributes Financing Volume of Rp2.25 Trillion As of August 2021	9/3/21
41	SP0040	LPEI Dukung Percepatan Vaksinasi Nasional di Jakarta Indonesia Eximbank Supports the Acceleration of National Vaccination in Jakarta	9/6/21
42	SP0041	Bertahan di Tengah Pandemi, Eksportir Pakaian Jadi Indonesia Berangsur Bangkit Surviving the Pandemic, Indonesian Apparel Exporters Gradually Recover	9/15/21
43	SP0042	Desa Devisa Subang Hadirkan Kopi Berkualitas Bagi Konsumen Arab Saudi Subang Desa Devisa Presents Quality Coffee for Saudi Arabian Consumers	9/17/21
44	SP0043	Dukung Program Pemerintah, LPEI dan Pemkab Toba Vaksinasi Warga Balige Support government programs, Indonesia Eximbank and Toba Government Organize Vaccination for Balige Residents	9/20/21
45	SP0045	Antisipasi Kunjungan Wisatawan Mancanegara, LPEI Dukung Vaksinasi Pemkab Samosir Anticipating Foreign Tourist Visits, Indonesia Eximbank Supports Samosir Government Vaccination	9/21/21
46	SP Bersama	Dukung Ekspor UMKM, LPEI Biayai PT Sarinah (Persero) Senilai Rp50 Miliar Supporting MSME Exports, Indonesia Eximbank Provides Funding for PT Sarinah (Persero) Worth Rp50 Billion	9/22/21
47	SP0046	LPEI Salurkan Tabung Oksigen untuk Rumah Sakit DKT Yogyakarta Indonesia Eximbank Distributes Oxygen Cylinders to Yogyakarta DKT Hospital	9/25/21
48	SP0049	Sinergi LPEI dengan Pemerintah Daerah untuk Menggerakkan UMKM Silawesi Utara Go Global Synergy of Indonesia Eximbank with Local Governments to Foster North Sulawesi MSMEs to Go Global	9/28/21
49	SP0050	Dorong Ekspor dari Indonesia Bagian Timur, LPEI Gelar Pelatihan UMKM Berorientasi Ekspor di Sulawesi Utara Promote Exports from Eastern Indonesia, Indonesia Eximbank Holds Export-Oriented MSME Training in North Sulawesi	9/30/21

No	No. Siaran Pers Press Release No.	Judul Siaran Pers Press Release Subject	Tanggal Date
50	SP0051	Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional, LPEI Fasilitasi UKM di Indonesia Timur dengan Pembiayaan Khusus Ekspor Fostering the National Economic Growth, Indonesia Eximbank Facilitates SMEs in Eastern Indonesia with Export-Specific Financing	10/4/21
51	SP0052	Persiapan UKM Kendal untuk Ekspor, LPEI Bekali dengan Digital Marketing dan Akses Pembiayaan Kendal SME Preparation for Export, Indonesia Eximbank Provides Digital Marketing and Access to Financing	10/13/21
52	SP0054	Gotong Royong Tingkatkan Ekspor UKM Jawa Tengah Work Together to Increase Central Java SME Exports	10/15/21
53	SP0053	Dorong UKM Berorientasi Ekspor di Surakarta, LPEI Berkolaborasi Bangun National Export Dashboard Fostering the Export-Oriented SMEs in Surakarta, Indonesia Eximbank Collaborates to Build a National Export Dashboard	10/21/21
54	SP0039	Peningkatan Ekspor Nasional Dengan Program Rintisan Ekspor Baru (TEI) Enhance National Exports With New Export Startup Program (TEI)	10/28/21
55	SP0058	Membangun Kapasitas Pelaku Usaha dengan Program Desa Devisa Building The Capacity of Business Entities with the Desa Devisa Program	11/1/21
56	SP0044	Memberikan Kenyamanan Berbisnis Ekspor Dengan Fasilitas Penjaminan dan Asuransi LPEI Providing Comfort of Export Business With Indonesia Eximbank Guarantee and Insurance Facilities	11/1/21
57	SP0059	Sinergi Kelembagaan Membangun Desa Devisa Tenun Gresik Institutional Synergy to Build Gresik Weaving Desa Devisa	11/2/21
58	SP0062	Dukung Percepatan Pemulihan Sektor Pariwisata, LPEI Salurkan Penjaminan Pemerintah kepada HOREKA di Bali Supporting the Acceleration of Tourism Sector Recovery, Indonesia Eximbank Distributes Government Guarantees to HOREKA in Bali	11/8/21
59	SP0060	Tingkatkan Devisa Bali dengan Garam Kusamba Increase Bali's Foreign Exchange with Kusamba Salt	11/9/21
60	SP0063	Diresmikan Presiden Jokowi, LPEI Biayai Pembangunan KEK Mandalika Inaugurated by President Jokowi, Indonesia Eximbank Provides Funding for the Development of KEK Mandalika	11/16/21
61	SP0064	LPEI Bahas Penguatan Ekspor dan Pemulihian Ekonomi dalam Asian Exim Bank Forum Indonesia Eximbank Discusses on the Strengthening of Exports and Economic Recovery at Asian Exim Bank Forum	11/24/21
62	SP0061	Cetak Ekspor Baru, LPEI Gelar Pelatihan dan Pendampingan CPNE Create New Exporter, Indonesia Eximbank Organizes the CPNE Training and Mentoring	11/29/21
63	SP0066	Tingkatkan Daya Saing Ekspor Indonesia dengan Skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) Increase Indonesia's Export Competitiveness with Export NIA Scheme	12/6/21
64	SP0067	Aksi LPEI Peduli Salurkan Bantuan bagi Korban Erupsi Gunung Semeru LPEI Peduli Distributes Aid to Victims of Mount Semeru Eruption	12/7/21

**SEKRETARIS LEMBAGA**  
Corporate Secretary

No	No. Siaran Pers Press Release No.	Judul Siaran Pers Press Release Subject	Tanggal Date
65	SP0065	Semakin Berdaya Saing, Ekspor Mie Instan Indonesia Menembus Pasar Non-Tradisional Increasingly Competitive, Indonesia's Instant Noodle Exports Penetrate the Non-Traditional Market	12/9/21
66	SP0069	Strategi Jitu LPEI Bantu UKM Naik Kelas dan Mendunia Indonesia Eximbank's Excellent Strategy Helps SMEs to Upgrade and Go Global	12/15/21
67	SP0070	LPEI Bantu Perluas Akses Pasar UKM Makanan Minuman ke Singapura dan Malaysia Indonesia Eximbank Helps Expand SME Food & Beverage Market Access to Singapore and Malaysia	12/16/21
68	SP Bersama	Tingkatkan Potensi Perdagangan Kemenkeu Gelar Talkshow Mengungkap Peluang Ekspor Pasar Timur Tengah Improve Trade Potential, the Ministry of Finance holds Talkshow on Middle East Market Export Opportunities	12/17/21
69	SP0068	Dukung Rumput Laut Indonesia Mendunia, LPEI Resmikan Program Desa Devisa di Sidoarjo Supporting Indonesian Seaweed Worldwide, Indonesia Eximbank Inaugurates Desa Devisa Program in Sidoarjo	12/20/21
70	SP0071	Tingkatkan Kapasitas Petani Garam di Desa Devisa Kusamba, LPEI Gandeng Nusa Gastromy Foundation Improve The Capacity of Salt Farmers in Kusamba Desa Devisa, Indonesia Eximbank Collaborates with Nusa Gastromy Foundation	12/22/21
71	SP0076	Dukung UMKM Untuk Ekspor, Tiga Institusi Resmikan Rumah Ekspor Solo Foster the MSMEs for Export, Three Institutions Inaugurate Solo Export Houses	12/23/21
72	SP0072	Tingkatkan Potensi Perdagangan RI, LPEI Bawa UKM Indonesia ke Dubai Expo 2020 Dubai Improve Indonesia's Trade Potential, Indonesia Eximbank Brings Indonesian SMEs to Dubai Expo 2020 in Dubai	12/24/21
73	SP0073	Ekspor Rumput Laut Indonesia Meningkat di Tengah Pandemi Indonesia's Seaweed Exports Increase Amid the Pandemic	12/27/21
74	SP0074	Ekspor Tanaman Hias Indonesia Naik 69,7% Selama Pandemi Indonesia's Ornamental Plant Exports Increase 69.7% During the Pandemic	12/28/21
75	SP0075	LPEI Gandeng KADIN Beri Pelatihan Ekspor Menggarap Pasar Global Indonesia Eximbank Collaborates with KADIN to Provide Export Training to Develop on Global Market	12/29/21
76	SP Bersama	Bank Mandiri dan LPEI Jalin Kerja Sama Layanan Transaction Banking untuk Mendukung Ekspor Nasional Bank Mandiri and Indonesia Eximbank Establish Transaction Banking Service Cooperation to Foster the National Exports	12/29/21
77	SP0032	Desa Devisa Bangun Masyarakat dan Komoditas Desa Berkualitas Desa Devisa Builds Quality Village Communities and Commodities	12/30/21
78	SP0077	Rahasia Sukses Biji Kakao Jembrana yang Mendunia Secrets of Jembrana Cocoa Bean Success that go global	12/31/21

**3. Melakukan korespondensi dengan sejumlah pihak diantaranya adalah:**

**Correspondences with several parties, among others are:**

<b>Tanggal Surat</b> Date	<b>Nomor Surat</b> Letter No.	<b>Tujuan</b> Address To	<b>Perihal</b> Subject
1/26/21	BS.0001/CSC/01/2021	Direktur Eksekutif Departemen Statistik Executive Director Statistics Department	Permohonan Data Ekspor Indonesia Terkini (2019 atau 2020) dalam rangka Pelaksanaan Penugasan Khusus Latest Indonesian Exporter Data Application (2019 or 2020) for National Account Interest Implementation
1/26/21	BS.0002/CSC/01/2021	Direktur Jenderal Bea dan Cukai Director General of Custom and Duty	Permohonan Data Ekspor Indonesia Terkini (2019 atau 2020) dalam rangka Pelaksanaan Penugasan Khusus Latest Indonesian Exporter Data Application (2019 or 2020) for National Account Interest Implementation
1/29/21	BS.0003/CSC/01/2021	PT Bank OCBC NISP, Tbk	Percepatan Ekspor Nasional National Export Acceleration
4/14/21	BS.0004/ CSC/04/2021	OJK, Bursa, Pasmod dan Wali Amanat OJK, Exchange, Capital Market and Trustee	Penyampaian Susunan Manajemen Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank Efektif tanggal 13 April 2021 Submission of Management Structure of Indonesia Eximbank Effective as of April 13, 2021
5/29/21	BS.0005/ CSC/05/2021	Komisi XI XI Commission	Penyampaian Jawaban atas Pertanyaan Submission of Responds to Queries
6/11/21	BS.0006/ CSC/06/2021	Komisi XI XI Commission	Penyampaian Jawaban atas pertanyaan dalam rangka kunjungan kerja Komisi XI ke Jawa Timur dan Kalimantan Timur Submission of Responds to queries during the Commission XI's working visit to East Java and East Kalimantan
6/25/21	BS.0007/CSC/06/2021	Kemenkeu / Ministry of Finance, OJK, IDX, Bank Mandiri	Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan (Un-Audited) Posisi 31 Maret 2021 Submission of Quarterly Financial Statements (Un-Audited) of 31 March 2021 Position
6/29/21	BS.0008/ CSC/06/2021	OJK, IDX, Bank Mandiri, Kemenkeu / Ministry of Finance	Penyampaian Laporan Tahunan (Annual Report) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) Tahun 2020 Submission of Annual Report of Indonesia Eximbank Year 2020
7/9/21	BS.0009/CSC/07/2021	Kementerian Ministry	Undangan Peluncuran Desa Devisa Subang Invitation to the Launch of Subang Desa Devisa
7/13/21	BS.0010/CSC/07/2021	PUSHAKA	Ucapan Terima kasih Submission of Gratitude
8/27/21	BS.0011/CSC/08/2021	DD Staf Ahli Dir KND BOD Expert Staff KND DIR	Undangan Menghadiri Tasyakuran HUT LPEI Ke 12 Invitation to Attend Celebration of Indonesia Eximbank 12th Anniversary
8/27/21	BS.0012/CSC/08/2021	DD Staf Ahli Dir KND BOD Expert Staff KND DIR	Undangan Menghadiri Tasyakuran HUT LPEI Ke 12 Invitation to Attend Celebration of Indonesia Eximbank 12th Anniversary

**SEKRETARIS LEMBAGA**  
Corporate Secretary

<b>Tanggal Surat Date</b>	<b>Nomor Surat Letter No.</b>	<b>Tujuan Address To</b>	<b>Perihal Subject</b>
8/31/21	BS.0013/CSC/08/2021	Dewan Direktur Board of Directors	Undangan dialog bisnis Invitation to business dialogue
9/6/21	BS.0014/CSC/09/2021	Stakeholder, Perbankan, dan Debitur LPEI Stakeholders, Banking and Borrowers of Indonesia Eximbank	Ucapan Terima kasih atas HUT LPEI Delivery of Gratitude on Indonesia Eximbank Anniversary
9/8/21	BS.0015/CSC/09/2021	Irfan Junaidi	Audiensi dan perkenalan LPEI dengan Republika Audience and introduction of Indonesia Eximbank with Republika
9/8/21	BS.0016/CSC/09/2021	Irfan Junaidi	Audiensi dan perkenalan LPEI dengan Republika Audience and introduction of Indonesia Eximbank with Republika
9/8/21	BS.0017/CSC/09/2021	Irfan Junaidi	Audiensi dan perkenalan LPEI dengan Republika Audience and introduction of Indonesia Eximbank with Republika
9/8/21	BS.0018/CSC/09/2021	Irfan Junaidi	Audiensi dan perkenalan LPEI dengan Republika Audience and introduction of Indonesia Eximbank with Republika
9/10/21	BS.0019/CSC/09/2021	PT Bank ICBC Indonesia	Indonesia Eximbank's Recent Update Audience and introduction of Indonesia Eximbank with Republika
9/13/21	BS.0020/ CSC/09/2021	Bupati Toba Regent of Toba	Undangan Kegiatan CSR Di Toba Invitation of CSR Activity in Toba
9/14/21	BS.0021/CSC/09/2021	Bupati Medan Regent of Medan	Undangan menghadiri vaksinasi Invitation to attend vaccination
9/24/21	BS.0022/ CSC/09/2021	DJKN Jawa Tengah DJKN Central Java	Undangan menghadiri vaksinasi Invitation to attend vaccination
10/4/21	BS.0023/CSC/10/2021	Yayasan Teras Hijau Indonesia	Proposal Kegiatan Diskusi Yayasan Teras Hijau Indonesia Proposal for Discussion Activities of Yayasan Teras Hijau Indonesia
10/4/21	BS.0024/CSC/10/2021	Yayasan Teras Hijau Indonesia	Proposal Kegiatan Diskusi Yayasan Teras Hijau Indonesia Proposal for Discussion Activities of Yayasan Teras Hijau Indonesia

**SEKRETARIS LEMBAGA**  
Corporate Secretary

<b>Tanggal Surat</b> Date	<b>Nomor Surat</b> Letter No.	<b>Tujuan</b> Address To	<b>Perihal</b> Subject
10/8/21	BS.0025/CSC/10/2021	Kepala Kanwil Head of Regional Office	Undangan Kunjungan ke Rumah Ekspor Surakarta dan Temu Wicara Pemangku Kepentingan Ekosistem Ekspor Surakarta Invitation to Visit Surakarta Export House and Conversation Meeting of Surakarta Export Ecosystem Stakeholders
10/11/21	BS.0026/CSC/10/2021	Ibu/Mrs. Titik Anas	Undangan Nara Sumber Temu Wicara Solo Invitation as Spokesperson for Solo Meeting
10/12/21	BS.0029/CSC/10/2021	Staf Ahli DD BOD Expert Staff	Undangan Invitation
10/13/21	BS.0030/CSC/10/2021	Ibu Titik Anas Staff Ahli Dewan Direktur Mrs. Titik Anas, Expert Staff of the Board of Directors	Undangan untuk memberikan Overview Ekonomi Makro dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Tahun 2022 - OCHA Invitation to give a Macroeconomic Overview in the context of Preparation of Work Plans and Budgets Annual (RKAT) Indonesian Export Financing Agency (LPEI) 2022 - OCHA
10/13/21	BS.0031/CSC/10/2021	Para Pelaku Usaha Business Practitioners	Undangan menghadiri Temu Wicara Pemangku Kepentingan Ekosistem Ekspor Surakarta di Rumah Ekspor Invitation to attend the Surakarta Export Ecosystem Stakeholder Meeting at the Export House
10/13/21	BS.0032/CSC/10/2021	Anggota Dewan Direktur Members of the Board of Directors	Undangan Kunjungan ke Rumah Ekspor Surakarta, Dialog Bersama Pemangku Kepentingan dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Tahun 2022 Invitation to Visit Surakarta Export House, Dialogue with Stakeholders and Preparation of Work Plan and Annual Budget (RKAT) of Indonesia Eximbank (LPEI) in 2022
10/18/21	BS.0033/CSC/10/2021	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Directorate General of Foreign Trade Affairs	Penyampaian tanggapan LPEI terhadap deficiency letter terkait penyelidikan anti-subsidi produk sscr oleh uni europa Submission of Indonesia Eximbank response to deficiency letter related to anti-subsidy investigation of sscr products by the European Union
10/19/21	BS.0034/CSC/10/2021	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan (Un-Audited) Posisi 30 September 2021 Submission of Quarterly Financial Statements (Un-Audited) of 31 September 2021 Position
10/19/21	BS.0035/CSC/10/2021	Capital Market Services	Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan (Un-Audited) Posisi 30 September 2021 Submission of Quarterly Financial Statements (Un-Audited) of 31 September 2021 Position

**SEKRETARIS LEMBAGA**  
Corporate Secretary

<b>Tanggal Surat Date</b>	<b>Nomor Surat Letter No.</b>	<b>Tujuan Address To</b>	<b>Perihal Subject</b>
10/19/21	BS.0036/CSC/10/2021	Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan Chief Executive of Non-Bank Financial Industry Supervisor (IKNB) Financial Services Authority	Penyampaian Laporan Keuangan Triwulanan (Un-Audited) Posisi 30 September 2021 Submission of Quarterly Financial Statements (Un-Audited) of 31 September 2021 Position
10/19/21	BS.0037/CSC/10/2021	Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Chief Executive of capital market watchdog Financial Services Authority	Penyampaian Laporan Keuangan Triwulanan (Un-Audited) Posisi 30 September 2021 Submission of Quarterly Financial Statements (Un-Audited) of 31 September 2021 Position
10/19/21	BS.0038/CSC/10/2021	LNSW dan/and DJBC	Ucapan Terima Kasih Submission of Gratitude
10/28/21	BS.0039/CSC/10/2021	Kepala Desa/Village Chief Wedani dll/etc	Undangan Peresmian Desa Devisa Sarung Tenun Gresik Invitation to Inauguration of Sarung Tenun Gresik Desa Devisa
10/28/21	BS.0040/CSC/10/2021	Direktur KND KND Director	Undangan Peresmian Desa Devisa Sarung Tenun Gresik Invitation to Inauguration of Sarung Tenun Gresik Desa Devisa
10/28/21	BS.0041/CSC/10/2021	Direktur KND KND Director	Monitoring dan Evaluasi PMN 2021 Monitoring and Evaluation of 2021 PMN
10/28/21	BS.0042/CSC/10/2021	DJKN	Monitoring dan Evaluasi PMN 2021 Monitoring and Evaluation of 2021 PMN
10/28/21	BS.0043/CSC/10/2021	Kasan , Arus Gunawan	Monitoring dan Evaluasi PMN 2021 Monitoring and Evaluation of 2021 PMN
10/29/21	BS.0044/CSC/10/2021	BI, OJK, GIPI	Undangan acara anjangsana mendukung percepatan pemulihan horeka: penyerahan sertifikat Penjaminan Pemerintah Invitation to event to foster the acceleration of horeka recovery: submission of government guarantee certificate
11/1/21	BS.0045/CSC/11/2021	Undangan Invitation	Undangan Peresmian Desa Kusamba Invitation of the Inauguration of Kusamba Village
11/3/21	BS.0046/CSC/11/2021	Kepala Biro KLI Kemenkeu Head of KLI Bureau of the Ministry of Finance	Peresmian Desa Devisa Garam Kusamba Inauguration of Kusamba – Salt – Desa Devisa
11/11/21	BS.0047/CSC/11/2021	Dewan Direktur Board of Directors	Penyampaian risalah rapat dan hapus buku Submission of meeting minutes and write-off

**SEKRETARIS LEMBAGA**  
Corporate Secretary

<b>Tanggal Surat</b> Date	<b>Nomor Surat</b> Letter No.	<b>Tujuan</b> Address To	<b>Perihal</b> Subject
11/16/21	BS.0048/CSC/11/2021	DJKN	Undangan FGD FGD Invitation
11/17/21	BS.0049/CSC/11/2021	Kanwil DJKN Bali Nusra DJKN Regional Office Bali Nusra	Ucapan Terima Kasih Submission of Gratitude
11/19/21	BS.0050/CSC/11/2021	DJKN	Penyampaian Rencana Perjalanan Dinas Luar Negeri Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tahun 2022 Submission of Foreign Service Itinerary for Executive Director and Managing Director of Indonesia Eximbank in 2022
11/24/21	BS.0051/CSC/11/2021	Universitas Indonesia (UI)	Undangan Sebagai Juri Naskah Call for Paper LPEI 2021 Invitation as Judge for Call for Paper Manuscript 2021
11/24/21	BS.0052/CSC/11/2021	Institut Pertanian Bogor (IPB)	Undangan Sebagai Juri Naskah Call for Paper LPEI 2021 Invitation as Judge for Call for Paper Manuscript 2021
11/24/21	BS.0053/CSC/11/2021	UNDIP	Undangan Juri Naskah Call for Paper LPEI 2021 Invitation as Judge for Call for Paper Manuscript 2021
11/25/21	BS.0054/CSC/11/2021	DJKN	Undangan rangkaian penyusunan RKAT Bandung 9 - 11 Desember Invitation for the RKAT development Bandung 9 - 11 December
12/16/21	BS.0055/CSC/12/2021	PT Bank ICBC Indonesia	Follow-Up on the Establishment of SPV

**Pengembangan Kompetensi Sekretaris Lembaga**

Terdapat surplus di tahun 2021, namun penetapan alokasi surplus akan dilakukan di tahun 2022.

Sementara penetapan alokasi surplus tahun 2020 berdasarkan KMK No.S-688/MK.06/ 2021 tanggal 3 Agustus 2021.

Selama tahun 2021, Sekretaris Lembaga tidak mengikuti Pelatihan.

**Corporate Secretary Competencies Development**

There is a surplus in 2021, but the determination of surplus allocation will be carried out in 2022.

Meanwhile, the determination of surplus allocation in 2020 was based on KMK No. S-688/MK.06/2021 dated August 3, 2021

During 2021, the Corporate Secretary did not participate in any Training.



# UNIT AUDIT INTERNAL

## Internal Audit Unit

Fungsi audit intern di LPEI dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang dikepalai oleh Kepala SKAI (*Senior Executive Vice President 5*) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif, mengacu pada MPO.0038/CEO/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Penyempurnaan Keenam Peraturan Direktur Eksekutif No. 0065/PDE/11/2019 tentang Pedoman dan Tata Kerja Organisasi LPEI. Satuan kerja tersebut membawahi Divisi Regular Audit & Methodology yang melakukan tugas pelaksanaan audit dan penugasan non-Audit sesuai RAT, dan Divisi Special Audit yang melaksanakan investigasi dan verifikasi untuk keperluan hapus buku, yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Divisi.

Dalam hal pelaksanaan pengawasan internal, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) secara konsisten menggunakan pendekatan *Risk Based Audit* yang menjadi rujukan pelaksanaan fungsi Audit Internal oleh *Committee of Sponsoring organizations of the Treadway Commission (COSO)* serta turut mengacu pada Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal yang disusun oleh *Institute of Internal Auditor (IIA)*.

### Piagam Audit Internal

LPEI telah memiliki Piagam Audit Internal sebagai pedoman yang memuat tentang tujuan, wewenang, tanggung jawab, dan ruang lingkup pekerjaan fungsi Internal Audit dalam organisasi, sehingga dapat menempatkan fungsi Internal Audit secara independen.

Piagam Audit Internal sedang dalam proses pembaharuan seiring dengan adanya perubahan organisasi pada unit Satuan Kerja Audit Internal, menyempurnakan pengaturan sebelumnya yang ditetapkan dalam Peraturan Dewan Direktur Nomor 07/PDE/02/2019, dengan rincian sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Kerja Audit Internal yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Kerja Audit Internal menyampaikan laporan kepada Direktur Eksekutif.
3. Setiap pengangkatan, pengantian, atau pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal oleh Direktur Eksekutif harus mendapat persetujuan dari Dewan Direktur dengan mempertimbangkan rekomendasi Ketua Komite Audit.

The internal audit function in the Company is carried out by the Internal Audit Unit (IAU) that led by the Head of IAU (*Senior Executive Vice President 5*) and directly responsible to the Executive Director, as referring to the MPO.0038/ CEO/08/2020 dated 31 August 2020 on the Amendment of the Sixth Regulations of Executive Director No. 0065/ PDE/11/2019 on the Company's Organizational Guidelines and Work Procedures. The unit is in charge of Regular Audit & Methodology Division to implement audit and non- audit according to the Annual Audit Plan, and Special Audit Division duties to investigate and verify write-off, with each being led by a Division Head.

On internal supervision, IAU is consistently using the Risk Based Audit approach that become a reference in carrying out internal audit function by the Committee of Sponsoring organizations of the Treadway Commission (COSO), as well as referring to the Internal Audit Professional Practices of International Standard developed by the Institute of Internal Auditor (IIA).

### Internal Audit Charter

The Company has an Internal Audit Charter as a guideline of the objectives, authorities, responsibilities, and scope of work of the Internal Audit function within the organization, hence to be able to operate independently.

The Internal Audit Charter is under the updating process in line with Internal Audit Unit organizational changes, which updated the previous arrangements stipulated in the Board of Directors Regulation No. 07/PDE/02/2019, with the following details:

1. The Internal Audit Unit is led by the Internal Audit Unit Head, who reports directly to the Executive Director.
2. In carrying out its duties, the Internal Audit Unit submits reports to the Executive Director.
3. Every appointment, replacement or dismissal of the Internal Audit Unit Head by the Executive Director must be approved by the Board of Directors by considering Chairman of the Audit Committee recommendation.

4. Ruang lingkup penugasan Satuan Kerja Audit Internal meliputi jasa Asurans yang memberikan penilaian yang independen atas pelaksanaan pengendalian internal dan tata kelola LPEI, dan jasa Konsultasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan tata kelola LPEI.

4. The scope of Internal Audit Unit assignment includes Assurance services that provide an independent assessment on the implementation of the Company internal control and governance, and consulting services aimed at improving its effectiveness.

## Profil Kepala Audit Internal

### Profile of Head of Internal Audit



**Agung Waluyo\***  
Kepala Audit Internal  
Head of Internal Audit

Usia	57 Tahun
Age	57 Years old
Kewarganegaraan	Indonesia
Citizenship	Indonesian
Domisili	Jakarta
Domicile	
Dasar Hukum Pengangkatan	Perjanjian Kerja No. PJ. 0057/HRB/11/2020
Appointment Basis	Work Agreement No. PJ. 0057/HRB/11/2020
Periode Jabatan	1 Januari 2020 – 1 Januari 2022
Position Period	1 January 2020 – 1 January 2022
Pengalaman Kerja	Chief Audit Executive Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Work Experiences	Chief Audit Executive of Indonesia Eximbank's
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S2 Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.</li> <li>• D4 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, 1991.</li> <li>• Master Degree University of Indonesia, Jakarta 2010.</li> <li>• D4 State Accounting Academy, Jakarta, 1991.</li> </ul>

\* ) Per 1 Januari 2022 LPEI memiliki Kepala SKAI yang baru yaitu I Nyoman Gede Suarja | As of January 1, 2022, LPEI had a new Head of SKAI, namely I Nyoman Gede Suarja

## UNIT AUDIT INTERNAL

Internal Audit Unit

### Jumlah Pegawai Satuan Kerja Internal Audit

Satuan Kerja Audit Internal dipimpin oleh Kepala SKAI dengan jabatan setara *Head Of*, yang membawahi dua Divisi yaitu Divisi Reguler Audit, Divisi Special Audit dan Departemen *Quality Assurance, Follow Up & Methodology*.

A. Divisi Reguler Audit dikepalai oleh seorang Kepala Divisi yang membawahi tiga unit kerja setara departemen, yaitu Departemen Audit Bisnis dan Departemen Audit IT & Support yang bertugas melakukan pengawasan berupa:

1. Fungsi asurans (*assurance*) dilaksanakan melalui pelaksanaan audit untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas internal control dan risk management, serta menilai kualitas pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Audit yang telah disetujui oleh Direktur Eksekutif.
2. Konsultasi dilakukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas proses bisnis, khususnya dalam hal *risk management, internal control* dan *governance process*.
3. Divisi RAM juga melakukan proses *early warning* atas proses operasional lembaga melalui pelaksanaan *Continous Auditing*, yang saat ini difokuskan pada proses terkait kegiatan pembiayaan.
4. Bersama dengan Departemen *Quality Assurance, Follow Up, and Methodology*:
  - a. Melakukan penyusunan Rencana Audit Tahunan unit kerja Satuan Kerja Audit Internal.
  - b. Melakukan koordinasi dan supervisi dalam pengembangan metodologi dan pengaturan berupa Piagam Audit, Manual Dan Prosedur Operasional, serta penggunaan sistem informasi manajemen audit, merujuk pada standar internasional profesi internal audit dan peraturan eksternal atau *best practice* yang berlaku.

B. Divisi Spesial Audit (SPA) mempunyai fungsi melaksanakan audit investigasi dan verifikasi dalam rangka hapus buku sesuai permintaan dari internal maupun eksternal antara lain:

1. Menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk memastikan permasalahan terkait Debitur disebabkan unsur kelalaian atau kesengajaan (non kerugian bisnis).

### Number of Employees of Internal Audit Unit

The Internal Audit Unit is led by the Head of SKAI with the position equivalent to Head Of, which oversees two Divisions, the Regular Audit Division, the Special Audit Division and the Quality Assurance, Follow Up & Methodology Department.

A. The Regular Audit Division is headed by a Division Head in charge of three work units equivalent to departments, the Business Audit Department and the IT & Support Audit Department, which are in charge of supervising the following:

1. The assurance function is carried out through audits to evaluate the adequacy and effectiveness of internal control and risk management, as well as assessing the quality of performance achievement in accordance with the Audit Plan approved by the Executive Director.
2. Consultancy is carried out to improve the efficiency and effectiveness of business processes, particularly risk management, internal control and governance processes.
3. The RAM Division also carries out an early warning process for the institution's operations through the implementation of Continuous Auditing, currently focusing on processes related to financing activities.
4. Together with the Department of Quality Assurance, Follow Up, and Methodology:
  - a. Performing the preparation of the Annual Audit Plan of the Internal Audit Unit.
  - b. Coordinate and supervise the development of methodologies and arrangements in the form of an Audit Charter, Manuals and Operational Procedures, as well as the use of an audit management information system, referring to internal audit profession international standards and external regulations or best practices that apply.

B. The Special Audit Division (SPA) functions to carry out investigative and verification audits to write-off according to requests from internal and external, including:

1. Following up on BPK's recommendations to ensure that problems related to debtors are caused by negligence or intentional elements (non-business loss).

UNIT AUDIT INTERNAL  
Internal Audit Unit

2. Menyediakan bukti yang cukup dan memadai untuk keperluan proses hukum, jika ditemukan adanya unsur fraud terkait tidak tertagihnya pinjaman Debitur dengan mempertimbangkan kajian hukum dari Tim Legal.
3. Melakukan verifikasi dalam rangka penghapusbukuan fasilitas macet Debitur sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
4. Menindaklanjuti aduan terkait indikasi *fraud* yang dilakukan oleh unsur internal LPEI.
5. Menyusun *lesson learned* (buku putih) untuk pembelajaran dan pengetahuan akar permasalahan sebagai landasan perbaikan secara ketentuan maupun proses bisnis (operasional).
- C. Departemen Quality Assurance, Follow Up & Methodology (QAM) mempunyai fungsi menyiapkan infrastruktur operasional unit kerja Internal Audit sesuai dengan tipe pelaksanaan tugasnya, antara lain:
1. Melakukan penyusunan Rencana Audit Tahunan unit kerja Satuan Kerja Audit Internal.
  2. Melakukan koordinasi dan supervisi dalam pengembangan metodologi dan pengaturan berupa Piagam Audit, Manual Dan Prosedur Operasional, serta penggunaan sistem informasi manajemen audit, merujuk pada standar internasional profesi internal audit dan peraturan eksternal atau *best practice* yang berlaku.
  3. Melakukan kajian atas penerbitan pengaturan baru berupa Standar Pedoman baik berupa pengaturan Produk dan Operasional serta Petunjuk Teknis Operasional
  4. Melakukan supervisi sebagai proses pengendalian kualitas pekerjaan Divisi Regular Audit dan Divisi Special Audit disesuaikan dengan pengaturan yang berlaku antara lain Piagam Audit dan Prosedur Internal.
  5. Melakukan koordinasi pelaksanaan pemenuhan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan auditor internal dan eksternal dan mengkomunikasikan secara berkala kepada manajemen.
  6. Melaksanakan fungsi sebagai Liaison sebagai *counterpart* dalam kegiatan pemeriksaan eksternal.
2. Provide sufficient and adequate evidence for the purposes of the legal process, if an element of fraud is found related to the uncollectible Debtor's loan by considering the legal review of the Legal Team.
3. Verification in order to write-off the debtor default facility in accordance with the regulation of the Minister of Finance (PMK).
4. Follow up on complaints related to indications of fraud committed by LPEI internal elements.
5. Prepare lessons learned (white paper) for learning and root cause knowledge as a basis for improvement in terms of provisions and business processes (operational).
- C. The Quality Assurance, Follow Up & Methodology (QAM) department has the function of preparing the operational infrastructure of the Internal Audit unit in accordance with the type of implementation of its duties, including:
1. Preparing the Annual Audit Plan of the Internal Audit Unit.
  2. Coordinating and supervising the development of methodologies and arrangements in the form of the Audit Charter, Manuals and Operational Procedures, as well as the use of audit management information systems, referring to international standards of the internal audit profession and external regulations or best practices that apply.
  3. Conducting a study on the issuance of new regulations in the form of Guiding Standards in the form of Product and Operational arrangements as well as Operational Technical Instructions
  4. Conducting Supervision as a process of controlling the quality of work of the Regular Audit Division and the Special Audit Division in accordance with applicable regulations, including the Audit Charter and Internal Procedures.
  5. Coordinating the implementation of follow-up on the results of internal and external auditors' examinations and communicate regularly to management.
  6. Carrying out the function as Liaison as a counterpart in external audit activities.

## UNIT AUDIT INTERNAL

Internal Audit Unit

Jabatan Position	Jumlah Pegawai Number of Staff
Kepala Satuan Kerja Audit Internal   Head of Internal Audit Unit	1
Kepala Divisi   Division Head	1
Kepala Departemen   Department Head	5
Auditor	9
<b>Total</b>	<b>16</b>

### Kualifikasi/Sertifikasi Profesi Internal Audit

Hingga akhir tahun 2020, sebagian Kepala Departemen dan staf telah memiliki kualifikasi QIA (*Qualified Internal Auditor*) telah memegang sertifikasi QIA, selebihnya sedang dalam proses sertifikasi QIA dengan target waktu pemenuhan tahun 2021 ataupun sertifikasi lain dibidang Internal Audit yang relevan dengan bidang pekerjaan. Berikut adalah komposisi staf dalam proses pemenuhan sertifikasi QIA.

### Internal Audit Qualifications/ Professional

Certification As of the end of 2020, some of Department Heads and staffs have achieved the QIA(Qualified Internal Auditors)qualifications, while the rest are in the process of obtaining the QIA certification with fulfillment target in 2021 or other certifications of Internal Audit that relevant with work fields. The following are composition of staffs that still under the QIA certification fulfilment process.

Nama Sertifikat Certification	Jumlah Total
QIA Lanjutan   QIA Advance Level I	5
QIA Manajerial   QIA Managerial Level	8
QIA Dasar   QIA Basic	2

### Kedudukan Direktorat Internal Audit dalam Struktur Organisasi

Struktur dan kedudukan unit Audit Internal mengacu pada MPO.0038/CEO/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Penyempurnaan Keenam Tata Kerja LPEI. Peraturan ini menyatakan bahwa struktur Direktorat Internal Audit berada di bawah supervisi Direktur Eksekutif.

Dengan demikian, Direktorat Internal Audit berada langsung di bawah Direktur Eksekutif. Kendati demikian, Direktorat ini memiliki independensi dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Piagam Audit Internal.

### Internal Audit Directorate Composition in the Organization Structure

The Internal Audit unit structure and position refer to MPO.0038/CEO/08/2020 dated 31 August 2020 on the Refinement of the Sixth Work Procedures of Indonesia Eximbank. This regulation states that the structure of Internal Audit Directorate is under the supervision of Executive Director.

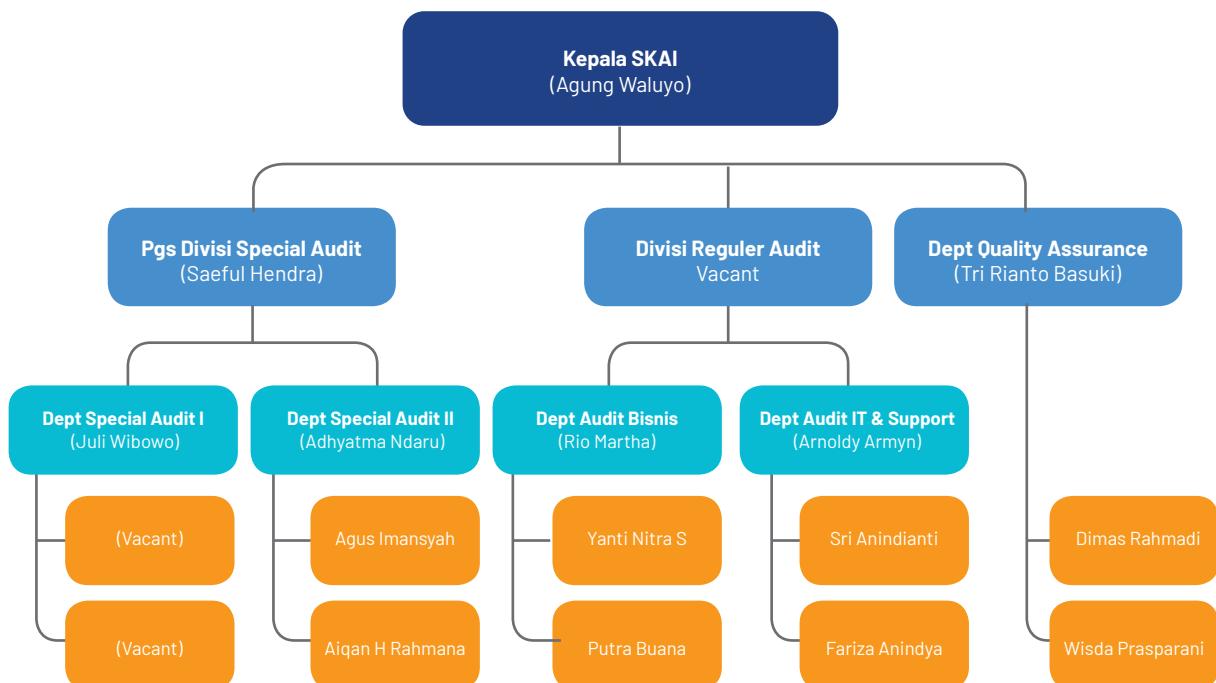
As such, the Internal Audit Directorate is directly under the Executive Director. Nevertheless, this Directorate has the independency in carrying out its duties in accordance with the Internal Audit Charter.

## UNIT AUDIT INTERNAL

Internal Audit Unit

### Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Internal posisi 31 Desember 2021

Internal Audit Directorate Organization Structure position 31 December 2021



#### Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan Piagam Audit Internal, Satuan Kerja Internal Audit berfungsi Memberikan jasa *assurance*, konsultasi dan investigasi secara independen dan obyektif yang memberikan nilai tambah bagi Lembaga, melalui penggunaan metode yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga melalui:

- Pemberian jasa *assurance*, konsultasi dan investigasi yang bernilai tambah secara independen dan objektif.
- Menjaga efektivitas pengendalian internal/ manajemen risiko dan *good corporate governance*.
- Pelaksanaan aktivitas audit internal secara efektif dan efisien.
- Pengembangan kompetensi audit internal dan mengembangkan audit berbasis teknologi informasi.
- Meningkatkan sinergi antara fungsi audit internal dan pengawas eksternal.

#### Duties and Responsibilities

In accordance with the Internal Audit Charter, the Internal Audit Unit functions to provide independent and objective assurance, consulting and investigative services that provide added value to the Institution, through the use of systematic methods in evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal control and governance in carrying out duties. and functions of the Institution through:

- Providing value-added assurance, consulting and investigative services independently and objectively.
- Maintain the effectiveness of internal control/risk management and good corporate governance.
- Implementation of internal audit activities effectively and efficiently.
- Development of internal audit competencies and developing information technology-based audits.
- Increase the synergy between the internal audit function and external supervisors

## UNIT AUDIT INTERNAL

Internal Audit Unit

### Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Audit Internal

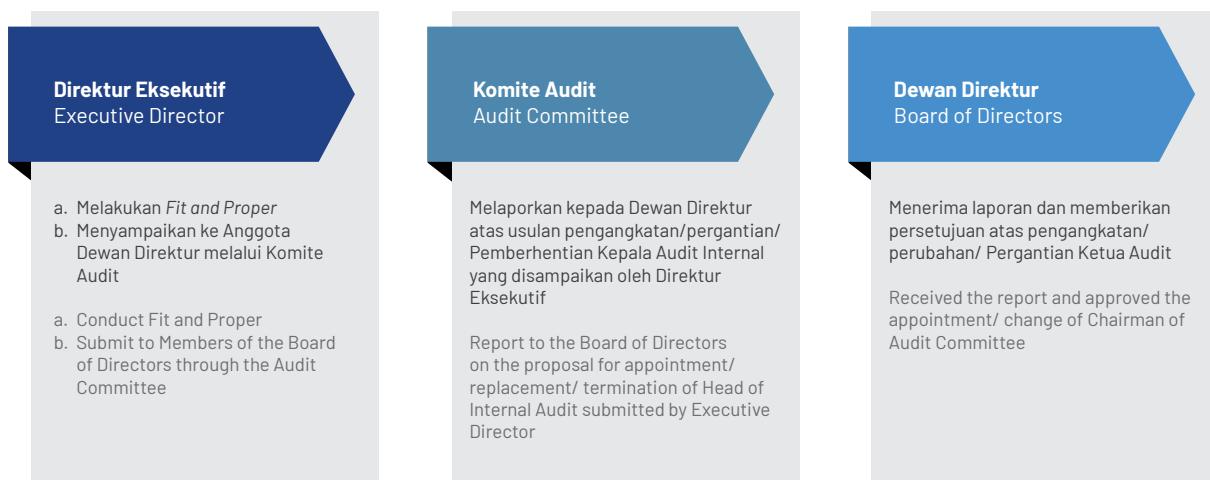
Sesuai dengan Pasal 31 UU No. 2 Tahun 2009 Tentang LPEI, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal merupakan kewenangan Direktur Eksekutif.

### Appointment & Termination of Head of Internal Audit

In accordance with the Article 31 Law No. 2 of 2009 on Indonesia Eximbank, the appointment and termination of Head of Internal Audit Division is the authority of the Executive Director.

### Bagan Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Chart of Appointment and Dissmissal



### Persyaratan Auditor Internal, baik secara individu, maupun kelompok

Auditor yang profesional memiliki pengetahuan dan kemahiran profesional yang diperoleh baik melalui pendidikan maupun melalui pengalaman dalam bidang operasional lembaga pembiayaan dan senantiasa bekerja berdasarkan suatu sikap mental dan kode etik yang telah ditetapkan.

### Requirements for Internal Auditors, both individually and in groups

Professional auditors have professional knowledge and skills obtained through education and experience in the financial institutions operational and always work based on a mental attitude and established code of ethics.

### Pengembangan Kompetensi

Dalam meningkatkan kompetensi pegawai pada Satuan Kerja Audit Internal, telah dilakukan serangkaian kegiatan berupa pelatihan, seminar dan konferensi taraf nasional dan internasional terkait bidang Internal Audit yang diadakan oleh IAIB (Ikatan Auditor Intern Bank), IIA (Institute of Internal Auditors), YPIA (Yayasan Pengembangan Internal Audit), LPFA (Lembaga Pengembangan Fraud Auditing) maupun lembaga lain yang memberikan pelatihan di bidang teknis seperti

### Competency Development

To enhance its staffs competencies, the Internal Audit Unit has participated in trainings, national and international seminars and conferences held by IAIB (Auditor Intern Bank Association), IIA (Institute of Internal Auditors), YPIA (Internal Audit Development Foundation), LPFA (Fraud Auditing Development Institution) and other training institutions that provide technical trainings such as risk management by the Banker Association for Risk Management (BARA), or

## UNIT AUDIT INTERNAL

Internal Audit Unit

Manajemen Risiko oleh Banker Association for Risk Management (BARA), maupun keahlian teknis lainnya terkait analisa laporan keuangan dan pelaksanaan APU PPT. Pelaksanaan pengembangan kompetensi berkelanjutan tersebut akan meningkatkan kemampuan, wawasan dan teknik Auditor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Internal Auditor.

other technical skills regarding financial statements and implementation of AML CTF. The continuous competency development will improve the capabilities, insights and techniques of the Auditors in conducting duties and responsibilities as the Internal Auditor.

### Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Competence Development

Nama Peserta Participants	Tanggal Date	Pelatihan/Seminar/Workshop Training/Seminar/Workshop	Penyelenggara Organizer
Agung Waluyo	1. 22 Jan 2021 2. 03 Jun 2021 3. 07 – 08 Jul 2021 4. 05 Ags 2021 5. 19 Ags 2021 6. 27 – 29 Okt 2021   27 – 29 Oct 2021	1. Persiapan & Ujian BSMR level 4   Level 4 Preparation & Exam BSMR 2. Penerapan GRC di Era Digital Strategy   GRC Implementation in Digital Stategy Era 3. Ethics in Business - Big Challenge 4. Loan Vovid Restructuring after Implementation of POJK No.48 5. Sosialisasi Whistle Blowing System 6. Internal Audit Back to The Future	1. BARA 2. GRC 3. LPEI 4. OJK 5. ItJen Kemenkeu   Inspectorate General of the Ministry of Finance 6. IIA
Rio Martha	1. 3 – 4 Feb 2021 2. 26 Ags 2021 3. 12 – 13 Okt 2021   12- 13 Oct 2021 4. 17 Nov 2021	1. Manual Operasional Dan PetunjukTeknis Operasional Pembiayaan   Operational Manual and Technical Instructions for Financing Operations 2. Sosialisasi Whistle Blowing System   Whistle Blowing System Dissemination 3. Think on Your Feet 4. Pengenalan Tipologi TPPU & TPPTPada Lembaga Keuangan   Introduction to the Typology of TPPU and TPPT in Financial Institutions	1. LPEI 2. LPEI 3. LPEI 4. LPEI
Arnoldy Armyn	1. 27 – 28 Jan 2021 2. 23 – 26 Feb 2021 3. 26 Ags 2021 4. 18 – 19 Okt 2021   18 – 19 Oct 2021	1. Manual Operasional Dan PetunjukTeknis Operasional Pembiayaan   Operational Manual and Technical Instructions for Financing Operations 2. Leader As a Coach 3. Sosialisasi Whistle Blowing System   Whistle Blowing System Dissemination 4. Trade Finance & Risk Management	1. LPEI 2. LPEI 3. LPEI 4. LPEI
Tri Rianto Basuki	1. 18 – 19 Jan 2021 2. 27 – 28 Jan 2021	1. Kelas Persiapan dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3   Risk Management Certification Level 3 Preparation and Test Class 2. Manual Operasional Dan PetunjukTeknis Operasional Pembiayaan   Operational Manual and Technical Instructions for Financing Operations	1. BARA 2. LPEI

## UNIT AUDIT INTERNAL

Internal Audit Unit

Nama Peserta Participants	Tanggal Date	Pelatihan/Seminar/Workshop Training/Seminar/Workshop	Penyelenggara Organizer
	3. 3 Mar 2021 4. 26 - 27 Ags 2021 5. 7 - 8 Sep 2021 6. 27 - 29 Okt 2021   27 - 29 Oct 2021 7. 15 Des 2021   15 Dec 2021	3. Penerapan Governance, Risk & Compliance di Era Digital Stategy dan Aksi   Implementation of Governance, Risk & Compliance in the Era of Digital Strategy and Action 4. GRC Summit 2021 - Agility Amid a chaotic world 5. Quality Assurance for Internal Audit Batch 1 6. Internal Audit Back to The Future - Emerging from The Crisis 7. Implementing Governance, Risk Management & Compliance	3. IIA 4. IIA 5. Finansia 6. IIA 7. IIA
Saeful Hendra	1. 03 - 04 Feb 2021 2. 08 - 11 Jun 2021 3. 13 - 17 Jul 2021 4. 26 - 27 Ags 2021	1. Manual Operasional Dan Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan   Operational Manual and Technical Instructions for Financing Operations 2. Fraud Auditing 3. Fraud Auditing 4. Kelas Persiapan dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3   Level 3 Risk Management Certification Preparation and Test Class	1. LPEI 2. LPFA 3. LPFA 4. BARA
Adhyatma Ndaru Suhardono	1. 03 - 04 Feb 2021 2. 15 - 22 Mar 20201 3. 26 Ags 2021 4. 13 - 22 Sep 2021 5. 01 - 02 Nov 2021	1. Manual Operasional Dan Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan   Operational Manual and Technical Instructions for Financing 2. Team Mate Analytics Sosialisasi   Teammate Analytics Dissemination 3. Whistle Blowing System 4. Program Sertifikasi Qualified Internal Audit (QIA Managerial)   Qualified Internal Audit (QIA Managerial) Certification Program 5. Workshop Internal Control COSO-2013   COSO-2013 Internal Control Workshop	1. LPEI 2. Wolter Kluwer 3. ItJen Kemenkeu   Inspectorate General of the Ministry of Finance 4. YPIA 5. IIA
Yanti Nitra Sianipar	1. 26 Ags 2021 2. 13 - 22 Sep 2021 3. 01 - 02 Nov 2021 4. 02 - 03 Sep 2021 5. 26 Ags 2021 6. 17 Des 2021   17 Dec 2021	1. Manual Operasional Dan Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan   Operational Manual and Technical Instructions for Financing 2. TeamMate Analytics Sosialisasi   Teammate Analytics Dissemination 3. Trade Credit Insurance 4. Kelas Persiapan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Lvl 2   Level 2 Risk Management Preparation and Certification Class 5. Whistle Blowing System 6. Pengenalan Tipologi TPPU & TPPT   Introduction to the Typology of TPPU and TPPT	1. Finans 2. Wolter Kluwer 3. LPEI 4. BARA 5. LPEI 6. ItJen Kemenkeu   Inspectorate General of the Ministry of Finance

**UNIT AUDIT INTERNAL**  
Internal Audit Unit

<b>Nama Peserta</b> Participants	<b>Tanggal</b> Date	<b>Pelatihan/Seminar/Workshop</b> Training/Seminar/Workshop	<b>Penyelenggara</b> Organizer
Sri Anindianti	1. 26 Ags 2021 2. 27 – 28 Mar 2021 3. 26 Ags 2021 4. 20 Sept 2021	1. Manual Operasional Dan Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan   Operational Manual and Technical Instructions for Financing 2. Kelas Persiapan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Lvl 2   Level 2 Risk Management Preparation and Certification Class 3. Whistle Blowing System 4. Penerapan AML dan KYC   Implementation of AML and KYC	1. LPEI 2. BARA 3. ItJen Kemenkeu   Inspectorate General of the Ministry of Finance 4. LPEI
Fariza Anindya	1. 27 – 28 Mar 2021 2. 20 Sept 2021 3. 08 – 17 Nov 2021	1. Manual Operasional Dan Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan   Operational Manual and Technical Instructions for Financing 2. Whistle Blowing System 3. QIA Tingkat Manajerial   Managerial Level QIA	1. LPEI 2. ItJen Kemenkeu   Inspectorate General of the Ministry of Finance 3. YPIA
Dimas Rachmadi S	1. 26 Ags 2021 2. 04 – 06 Ags 2021 3. 13 – 25 Sep 2021 4. 26 Ags 2021 5. 21-22 Okt 2021   21 – 22 Oct 2021 6. 27 – 29 Okt 2021   27 – 29 Oct 2021	1. Manual Operasional Dan Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan   Operational Manual and Technical Instructions for Financing 2. Enhance personal Effectiveness 3. QIA tingkat Lanjutan   Advanced QIA 4. Whistle Blowing System 5. Teammate + analytics 6. Internal Audit Back to The Future	1. PT. Centria Integrity Advisory 2. PT. Centria Integrity Advisory 3. LPEI 4. LPEI 5. PT Centria Integrity Advisory 6. Pasar Trainer
Waida Prasparani	1. 03 – 4 Feb 2021 2. 26 Ags 2021 3. 7 – 8 Sep 2021 4. 21 – 22 Okt 2021 5. 27 – 29 Okt 2021   27 – 29 Oct 2021 6. 15 Des 2021   15 Dec 2021	1. Manual Operasional Dan Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan   Operational Manual and Technical Instructions for Financing 2. Whistle Blowing System 3. Quality Assurances 4. Teammate+ analytics 5. Internal Audit Back to The Future 6. Implementing GRC	1. LPEI 2. ItJen Kemenkeu   Inspectorate General of the Ministry of Finance 3. Finansia 4. Wolter Kluwer 5. IIA 6. GRC
Agus Imansyah	1. 03 – 04 Feb 2021 2. 08 – 11 Jun 2021 3. 13 – 17 Jul 2021	1. Manual Operasional Dan Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan   Operational Manual and Technical Instructions for Financing 2. Fraud Auditing 3. Fraud Auditing	1. LPEI 2. LPFA 3. LPFA
Juli Wibowo	1. 03 – 04 Feb 2021 2. 15 – 22 Mar 2021 3. 08 – 11 Jun 2021 4. 13 – 17 Jul 2021	1. Manual Operasional Dan Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan   Operational Manual and Technical Instructions for Financing 2. Teammate Analytics 3. Fraud Auditing 4. Fraud Auditing	1. LPEI 2. Wolter Kluwer 3. LPFA 4. LPFA

## UNIT AUDIT INTERNAL

Internal Audit Unit

Nama Peserta Participants	Tanggal Date	Pelatihan/Seminar/Workshop Training/Seminar/Workshop	Penyelenggara Organizer
	5. 26 Ags 2021 6. 17 Des 2021  17 Dec 2021	5. Whistle Blowing System 6. Pengenalan tipologi TPPU & TPPT   <i>Introduction to the Typology of TPPU and TPPT</i>	5. ItJen Kemenkeu   Inspectorate General of the Ministry of Finance 6. ItJen Kemenkeu   Inspectorate General of the Ministry of Finance
Aiqan H Rahmania	1. 03 – 04 Feb 2021 2. 15 – 22 Mar 2021 3. 08 – 11 Jun 2021 4. 12 -13 Juli 2021 5. 13 – 17 Jul 2021 6. 26 Ags 2021 7. 20 Sept 2021 8. 17 Des 2021  17 Dec 2021	1. Manual Operasional Dan PetunjukTeknis Operasional Pembiayaan   Operational Manual and Technical Instructions for Financing 2. Teammate Analytics 3. Fraud Auditing 1 4. Basic Trade Finance 5. Fraud Auditing 6. Whistle Blowing System 7. Penerapan AML dan prinsip KYC   Application of AML and KYC principles 8. Pengenalan tipologi TPPU & TPPT   <i>Introduction to TPPU and TPPT typologies</i>	1. LPEI 2. Wolter Kluwer 3. LPFA 4. LPEI 5. LPFA 6. ItJen Kemenkeu   Inspectorate General of the Ministry of Finance 7. ItJen Kemenkeu   Inspectorate General of Ministry of Finance 8. ItJen Kemenkeu   Inspectorate General of the Ministry of Finance
Putra Buana	1. 17 Des 2021  17 Dec 2021	1. Pengenalan tipologi TPPU & TPPT   <i>Introduction to TPPU and TPPT typologies</i>	1. ItJen Kemenkeu   Inspectorate General of the Ministry of Finance

Catatan:

Bpk I Nyoman Gede Suarja dan Ibu Titiek Litasari selaku Kepala Satuan Audit Internal dan Kepala Divisi Reguler Audit, dan sdr Anggata Mahendra selaku auditor (penugasan dari ItJen Kemenkeu) pada 1 Januari 2021, sehingga tidak terdapat data pelatihan.

Notes:

Mr. I Nyoman Gede Suarja and Ms. Titiek Litasari as Head of the Internal Audit Unit and Head of the Regular Audit Division, and Mr. Anggata Mahendra as auditor (assigned from the Inspectorate General from the Ministry of Finance) on January 1, 2021, so there is no training data.

### Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Audit Internal Tahun 2021

Sesuai dengan Rencana Audit Tahun 2021 dan Revisi Rencana Audit Tahun 2021, realisasi kegiatan Divisi Regular Audit adalah sebagai berikut:

#### A. Pelaksanaan Audit sesuai RAT

Rencana audit dalam RAT 2021 sebanyak 7 (tujuh) penugasan, telah direalisasikan sebanyak 4 (empat) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Audit Mandatory - Sistem Pembayaran BI Real Time Gross Settlement (RTGS) sesuai target pada Triwulan I tahun 2021. Laporan hasil audit telah disampaikan kepada Divisi TSI dan OPS melalui Laporan Hasil Audit No. 0001/RAM/04/2021 tanggal 01 April 2021.

### Implementation of Internal Audit Unit Activities in 2021

In accordance with the 2021 Audit Plan and the 2021 Audit Plan Revision, the realization of the Regular Audit Division's activities is as follows:

#### A. Audit implementation according to RAT

There were 7 (seven) assignments in the 2021 RAT audit plan with 4 (four) of them have been realized with the following explanation:

1. Mandatory Audit - BI Real Time Gross Settlement (RTGS) Payment System according to the target in Quarter I 2021. The audit report has been submitted to the TSI and OPS Division through Audit Result Report No. 0001/RAM/04/2021 dated 01 April 2021.

## UNIT AUDIT INTERNAL

Internal Audit Unit

2. Audit atas proses penerapan Enterprise Risk Management lembaga diubah pelaksanaannya menjadi Penugasan konsultasi, telah disampaikan hasilnya melalui IM No. 0021/HIA/08/2021 tanggal 31 Agustus 2021.
3. Audit atas proses Pembiayaan Korporasi (termasuk Kantor Wilayah Jakarta dan Surabaya) yang dilaksanakan pada 7 Agustus 2021 – 6 Oktober 2021 dengan laporan LHA No. 0003/RAM/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021
4. Audit atas proses Restrukturisasi dan Litigasi yang dilaksanakan pada 26 Juli 2021 – 12 November 2021, saat ini sedang dalam proses finalisasi laporan.
5. Audit atas proses operasional unit kerja Financial Institution dan Treasury yang dilaksanakan pada 26 Juli 2021 – 12 November 2021 saat ini sedang dalam proses finalisasi laporan.
6. Audit atas proses pembiayaan Syariah dan UKM diusulkan untuk dijadwalkan pada RAT tahun 2022 melalui IM No. 0043/HIA/11/2021 tanggal 11 November 2021
7. Audit atas proses Penjaminan diusulkan untuk dijadwalkan ulang pada RAT tahun 2022 melalui IM No. 0043/HIA/11/2021 tanggal 11 November 2021. Berdasarkan pertimbangan Kepala SKAI mengingat atas unit kerja Penjaminan telah dilakukan oleh OJK pada periode 18 Oktober s.d. 26 November 2021, maka pelaksanaan audit atas unit kerja Penjaminan pada tahun 2022 dibatalkan.
8. Audit atas Reviu Permasalahan *End of Day* dan *End of Month* pada UBS (Penugasan non-RAT) telah selesai dilaksanakan dengan IM No. 0021/HIA/08/2021 tanggal 31 Agustus 2021

### B. Pelaksanaan Penugasan Konsultasi

Rencana kegiatan konsultasi dalam RAT 2021 sebanyak 11 (sebelas), telah direalisasikan sebanyak 14 (empat belas) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penugasan konsultasi atas Penjaminan Kredit Korporasi dalam rangka PEN, dengan nomor laporan IM No.0022/RAM/02/2021 tanggal 26 Februari 2021.
2. Pelaksanaan Pendampingan Penugasan Investasi Pemerintah program PEN (IP PEN) pada PTPN III, yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan IM No.0022/RAM/02/2021

2. The implementation of the audit on the institution's Enterprise Risk Management implementation process has been changed to a consulting assignment, the results have been submitted via IM No. 0021/HIA/08/2021 dated 31 August 2021.
3. Audit of the Corporate Financing process (including the Jakarta and Surabaya Regional Offices) which was carried out on 7 August 2021 – 6 October 2021 with LHA report No. 0003/RAM/10/2021 dated 29 October 2021.
4. The audit of the Restructuring and Litigation process which was carried out on 26 July 2021 – 12 November 2021, is currently in the process of finalizing the report.
5. An audit of the operational processes of the Financial Institution and Treasury work units which was conducted on 26 July 2021 – 12 November 2021, is currently in the process of finalizing the report.
6. An audit of the Sharia and SME financing process is proposed to be scheduled for the 2022 RAT through IM No.0043/HIA/11/2021 dated 11 November 2021.
7. The audit of the Guarantee process is proposed to be rescheduled at the RAT 2022 through IM No. 0043/HIA/11/2021 dated 11 November 2021. Based on the consideration of the Head of SKAI considering that the Guarantee work unit has been carried out by OJK for the period from 18 October to 26 November 2021, the audit of the Guarantee unit in 2022 will be cancelled.
8. Audit of End of Day and End of Month Issues Review at UBS (non-RAT Assignment) has been completed with IM No. 0021/HIA/08/2021 dated 31 August 2021.

### B. Implementation of Consultation Assignments

There were 11(eleven) planned consultation activities in the 2021 RAT with 14 (fourteen) have been realized with the following explanation:

1. Implementation of consulting assignments on Corporate Credit Guarantee within the framework of PEN, with report number IM No.0022/RAM/02/2021 dated 26 February 2021.
2. Implementation of Government Investment Assignment Assistance program PEN (IP PEN) at PTPN III, which is carried out on an ongoing basis with IM No.0022/RAM/02/2021.

## UNIT AUDIT INTERNAL

Internal Audit Unit

3. Pelaksanaan penugasan konsultasi atas MIS Project, dengan nomor laporan IM No.0051/RAM/05/2021 tanggal 21 Mei 2021.
4. Pelaksanaan penugasan konsultasi atas penyempurnaan SPI, ERM dan GRC dan LPEI dengan nomor laporan IM No.0021/HIA/08/2021 tanggal 31 Agustus 2021.
5. Validasi Urgensi dan Justifikasi Pengadaan IT dengan nomor laporan IM No. 0022/HIA/09/2021 tanggal 3 September 2021.
6. Pelaksanaan Penugasan konsultasi atas penghapusan piutang premi asuransi dengan nomor laporan IM No. 0026/HIA/09/2021 tanggal 17 September 2021.
7. Pelaksanaan penugasan konsultasi atas reviu operasional unit kerja Trade Finance (non-RAT), dengan nomor laporan IM No.0027/HIA/09/2021 tanggal 27 September 2021.
8. Pelaksanaan penugasan konsultasi atas reviu operasional sentralisasi pada transaksi Kantor Wilayah/Cabang ke kantor pusat (non-RAT), dengan nomor laporan IM No.0029/HIA/10/2021 tanggal 12 Oktober 2021.
9. Pelaksanaan Penugasan konsultasi atas Pendampingan Colocation DRC (Selesai Proses Colocation DRC) (non-RAT) bersama dengan unit kerja Teknologi dan Sistem Informasi.
10. Pelaksanaan penugasan konsultasi atas user ID Upload Data Nilai Pasar dan Rate Harian (non-RAT), dengan laporan IM No.0030/HIA/10/2021 tanggal 14 Oktober 2021.
11. Perbaikan Laporan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan, yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
12. Pelaksanaan konsultasi atas pemenuhan DMTL eksternal melalui pelaksanaan Champion Audit yang dilakukan secara reguler.
13. Pelaksanaan pendampingan atas pemeriksaan dari pihak eksternal (OJK dan BPK) yang dilaksanakan berdasarkan penugasan.
14. Pelaksanaan penugasan konsultasi atas Analisa atas Pemisahan lap Keuangan PKE (non-RAT). Saat ini masih dalam proses penyelesaian laporan.
3. Implementation of consulting assignments on the MIS Project, with report number IM No.0051/RAM/05/2021 dated 21 May 2021.
4. Implementation of consulting assignments on the improvement of SPI, ERM and GRC and LPEI with report number IM No.0021/HIA/08/2021 dated 31 August 2021.
5. Validation of Urgency and Justification of IT Procurement with report number IM No. 0022/HIA/09/2021 dated 3 September 2021.
6. Implementation of consulting assignments on the write-off of insurance premium receivables with report number IM No. 0026/HIA/09/2021 on 17 September 2021.
7. Implementation of consulting assignments on the operational review of the Trade Finance work unit (non-RAT), with report number IM No.0027/HIA/09/2021 dated 27 September 2021.
8. Implementation of consulting assignments on centralized operational reviews on Regional/ Branch Office transactions to head office (non-RAT), with report number IM No.0029/HIA/10/2021 dated 12 October 2021.
9. Implementation of consultation assignments on Colocation DRC Assistance (Completed Process Colocation DRC) (non-RAT) together with the Information Technology and Systems work unit.
10. Implementation of consultation assignments for LD users Upload Market Value and Daily Rate Data (non-RAT), with IM report No.0030/HIA/10/2021 dated 14 October 2021.
11. Improvement of the Risk Profile and Health Level Report, which is carried out continuously.
12. Implementation of consultation on the fulfillment of external DMTL through the implementation of Champion Audit which is conducted on a regular basis.
13. Implementation of assistance on examinations from external parties (OJK and BPK) carried out based on assignments.
14. Implementation of consulting assignments on Analysis of Separation of PKE Financial Statements (non-RAT). Currently still in the process of finalizing the report.

## UNIT AUDIT INTERNAL

Internal Audit Unit

### **C. Pelaksanaan Penugasan Continuous Audit and Continuous Monitoring (CACM)**

Rencana kegiatan CACM dalam RAT 2021 sebanyak 20, telah direalisasikan sebanyak 20 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Continuous Audit and Continuous Monitoring* dengan tema Pencapaian NIA per periode yang dilaksanakan setiap 4 bulan.
2. Pelaksanaan *Continuous Audit and Continuous Monitoring* dengan tema progres proposal UKM yang dilaksanakan setiap 4 bulan.
3. Pelaksanaan *Continuous Audit and Continuous Monitoring* dengan tema Analisa Cost of Fund dan CAR yang dilaksanakan setiap 4 bulan.
4. Pelaksanaan *Continuous Audit and Continuous Monitoring* dengan tema Analisa Jangka Waktu antara Booking Date - NPL yang dilaksanakan setiap 2 bulan.
5. Pelaksanaan *Continuous Audit and Continuous Monitoring* dengan tema Pemantauan PDO Days-Collectability yang dilaksanakan setiap 2 bulan.

Hasil kegiatan CACM telah dimanfaatkan dalam kegiatan Early Warning Detection pada Divisi RPM dan Divisi FIN yang digunakan dalam rapat Board of Management setiap hari Senin. Hasil kegiatan CACM disampaikan lewat email kepada Kepala Divisi RPM sesuai permintaan.

### **Rencana Kerja Tahun 2022**

Dengan mempertimbangkan Rencana Jangka Panjang LPEI 2020-2024, RKAT dan IKU 2021, profil risiko LPEI TW III serta mandatory audit sesuai dengan regulasi, maka tema yang akan diajukan dalam Rencana Audit pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- A. Audit Reguler (3 tematis dan 4 mandatory) dengan perincian
  1. Pelaksanaan Penugasan Audit Regular
 

Sebagai bagian mitigasi atas risiko lembaga kami mengusulkan tema pelaksanaan audit dengan pendekatan tematik sebagai berikut:

    - a. Audit proses operasional unit kerja Asuransi tahun 2020 dan 2021, dengan waktu pelaksanaan pada TW I s.d. TW II oleh Departemen Audit Bisnis.

### **C. Implementation of Continuous Audit and Continuous Monitoring (CACM) Assignment**

There are 20 CACM activity plans in the 2021 RAT, 20 have been realized with the following explanation:

1. Implementation of *Continuous Audit and Continuous Monitoring*, themed as NIA Achievement per period, held every 4 months.
2. Implementation of *Continuous Audit and Continuous Monitoring*, themed as SME proposal progress, held every 4 months.
3. Implementation of *Continuous Audit and Continuous Monitoring*, themed as Cost of Fund and CAR Analysis, held every 4 months.
4. Implementation of *Continuous Audit and Continuous Monitoring*, themed as Time Period Analysis between Booking Date - NPL, held every 2 months.
5. Implementation of *Continuous Audit and Continuous monitoring*, themed PDO Days-Collectability Monitoring, held every 2 months

The results of CACM activities have been used in Early Warning Detection activities in the RPM Division and FIN Division which are used in the Board of Management meeting every Monday. The results of CACM activities are sent via email to the Head of the RPM Division upon request.

### **2022 Work Plan**

Taking into account the LPEI 2020-2024 Long Term Plan, 2021 RKAT and IKU, LPEI TW III risk profile and mandatory audit in accordance with regulations, the themes to be proposed in the 2021 Audit Plan are as follows:

- A. Regular Audit (3 thematic and 4 mandatory) with following details
  1. Implementation of Regular Audit Assignments
 

As part of mitigating institutional risk, we propose the theme of audit implementation with the following thematic approaches:

    - a. Audit of the operational process of the Insurance work unit in 2020 and 2021, with implementation time in TW I to TW. TW II by Business Audit Department.

## UNIT AUDIT INTERNAL

Internal Audit Unit

- b. Pelaksanaan Pembiayaan pada segmen Syariah dengan fokus pada kesesuaian dengan prinsip Syariah dan proses pembiayaan yang prudent, dengan waktu pelaksanaan pada TW II s.d. TW III oleh Departemen Audit Bisnis.
  - c. Audit atas proses pembiayaan pada segmen UKM yang diinisiasi oleh Kantor Pusat dan Kantor Wilayah dengan waktu pelaksanaan pada TW II s.d. TW III oleh Departemen Audit Bisnis.
2. Dan audit mandatory berupa:
- a. Security audit terhadap kepatuhan pelaksanaan BI RTGS merujuk pada pasal 61 huruf b dan Pasal 63 pada PADG No.20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Settlement Dana Seketika Melalui Sistem BI RTGS.
  - b. Audit terhadap pelaporan SLIK merujuk kepada pasal 29 A pada P.OJK No.64/P.OJK.03/2020 tentang Peraturan OJK tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.
  - c. Security audit pelaksanaan SWIFT mengacu pada poin 2.3 pada SWIFT Customer Security Controls Policy perihal Key Policy Activities.
  - d. Security audit IT terhadap mengacu pada P.OJK No.4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan TI oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
3. Pelaksanaan non audit berupa:
- a. Pelaksanaan Konsultatif dengan tema Pendampingan pelaksanaan IP PEN.
  - b. Pelaksanaan Pemeriksaan Investigasi dalam rangka pemenuhan rekomendasi BPK dan concern manajemen sebanyak 10 penugasan.
  - c. Pelaksanaan Review atas debitur yang akan dihapus buku pada tahun berikut sebanyak 25 penugasan.
  - d. Pemberian opini atas Profil Risiko Lembaga.
  - e. Berpartisipasi aktif dalam proses perbaikan operasional berupa penyempurnaan GRC.
  - f. Sebagai narasumber dalam penyusunan peraturan internal (Standar Pedoman Operasional dan Kebijakan) maupun eksternal (PMK dan P.OJK).
  - b. Implementation of Financing in the Sharia segment with a focus on compliance with Sharia principles and a prudent financing process, with implementation time in TW II s.d. TW III by Business Audit Department.
  - c. Audit of the financing process in the SME segment initiated by the Head Office and Regional Offices with implementation time in TW II s.d. TW III by Business Audit Department.
2. And mandatory audits in the form of:
- a. Security audit on compliance with BI RTGS implementation refers to Article 61 letter b and Article 63 of PADG No.20/15/PADG/2018 concerning Implementation of Instant Fund Settlement Through the BI RTGS System.
  - b. The audit of SLIK reporting refers to article 29 A of P.OJK No.64/P.OJK.03/2020 concerning OJK Regulations concerning Reporting and Requests for Debtor Information through the Financial Information Service System.
  - c. The security audit for the implementation of SWIFT refers to point 2.3 in the SWIFT Customer Security Controls Policy regarding Key Policy Activities.
  - d. The IT security audit refers to P.OJK No.4/POJK.05/2021 concerning the Implementation of Risk Management in the Use of IT by Non-Bank Financial Services Institutions.
3. Implementation of non-audit in the form of:
- a. Consultative Implementation with the theme Assistance in the implementation of IP PEN
  - b. 10 assignments of the Implementation of Investigation Examination in order to fulfill BPK recommendations and management concerns.
  - c. 25 assignments of the Implementation of a review of debtors who will be written off in the following year.
  - d. Offering opinion on the Institution's Risk Profile.
  - e. Actively participate in the operational improvement process in the form of improving the GRC
  - f. As a resource in the preparation of internal regulations (Standard Operational Guidelines and Policies) and externally (PMK and P.OJK).

- g. Verifikasi atas pemenuhan rekomendasi pemeriksa eksternal dari Unit Kerja LPEI.

- g. Verification of the fulfillment of the recommendation of the external examiner from the Work Unit.

#### **Penerapan Fungsi Pendampingan Audit Eksternal**

Pelaksanaan fungsi audit eksternal telah dilakukan terhadap pemeriksaan/monitoring yang dilakukan oleh pihak regulator yaitu:

1. Pemeriksaan tahunan oleh OJK dengan tema pemeriksaan adalah operasional unit kerja Penjaminan dalam rangka Komersial dan PEN.
2. Kegiatan pemeriksaan oleh ItJen Kemenkeu dengan tema IT Assesment.
3. Kegiatan monitoring pelaksanaan program PEN oleh BPKP.

Kegiatan pendampingan untuk auditor eksternal dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Audited oleh KAP, telah diserahterimakan kepada Divisi *Finance* berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tanggung Jawab dan Pendampingan Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan LPEI No. BA.0002/IAD/02/2020 tanggal 26 Februari 2020.

#### **External Audit Assistance Function**

The implementation of the external audit function has been carried out on the inspection/monitoring done by the regulator:

1. Annual inspection by OJK theme as the operation of the Guarantee unit in the context of Commercial and PEN.
2. Inspection activities by the Inspectorate General of the Ministry of Finance theme as IT Assessment.
3. Monitoring on the implementation of the PEN program by BPKP.

Assistance for external auditors in preparing the Audited Financial Statements by KAP, have been handed over to the Finance Division based on the Minutes of Handover of Responsibilities and Assistance in the Implementation of Audit for the Company's Financial Statements No. BA.0002/IAD/02/2020 dated 26 February 2020.



# AKUNTAN PUBLIK

## Public Accountant

### Prosedur Penunjukan Kantor Akuntan Publik

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembinaan Ekspor Indonesia, penunjukan audit eksternal dan penentuan biaya dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Dewan Direktur. Penunjukan Kantor Akuntan Publik melalui mekanisme Pengadaan Jasa reviu Audit 2020 dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

Untuk tahun 2021, LPEI telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi, Jusuf Aryanto, Mawar dan Rekan untuk melakukan audit atas laporan keuangan LPEI.

### Public Accountant Firm Appointment Procedures

With reference to the Minister of Finance Regulation No. 141/PMK.010/2009 on the Governance Principles of Indonesia Eximbank, the appointment of an external audit and determination of fees are carried out by the Executive Director with the approval of the Board of Directors. The appointment of Public Accountant Firm is carried out through the mechanism of Services Procurement of Audit review 2020 by taking into account the recommendations of the Audit Committee.

In 2021, Indonesia Eximbank has appointed Public Accountant Firm Amir Abadi, Jusuf Aryanto, Mawar dan Rekan to audit the Company's financial statements.

### Informasi Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik

#### Information on Public Accountants (AP) and Public Accounting Firms

Nama dan Alamat Name and Address	Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Alamat : Plaza Asia Lantai 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners Address : Plaza Asia 10th fl., Jl. General Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190
Periode Penugasan Assignment Period	28 Agustus 2020 sampai dengan 31 Juli 2022 28 August 2020 until 31 July 2022
Informasi Jasa Audit Dan/ Atau Non-Audit Yang Diberikan  Audit And/Or Non-Audit Service Information	Melakukan audit umum Indonesia Eximbank tahun buku 2021 yang terdiri dari: 1. Melakukan audit atas laporan keuangan Indonesia Eximbank, yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. 2. Melakukan audit atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 3. Melakukan penerapan prosedur yang disepakati untuk Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPK) Triwulan IV Tahun 2021 per 31 Desember 2021. 4. Melakukan perikatan asurans keyakinan terbatas (reviu) atas laporan pinjaman industrial efisiensi (IEPC) posisi per 31 Desember 2021. 5. Melakukan perikatan asurans keyakinan terbatas (reviu) atas Laporan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) posisi per 31 Desember 2021. 6. Melakukan perikatan asurans keyakinan terbatas (reviu) atas Internal Control Operation and Information Technology (IT). 7. Melakukan Jasa pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2021 sebagai implementasi Standar Audit 600 dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2021 untuk LPEI oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 8. Melakukan reviu Laporan Keuangan Syariah LPEI tahun 2021. 9. Melakukan reviu Laporan Keuangan Program Penugasan Khusus Ekspor LPEI Tahun 2021. 10. Melakukan assurans atas Laporan Pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) oleh LPEI Tahun 2021.

	<p>11. Melakukan Audit atas saldo awal Laporan Keuangan IEB Prima Aset (anak perusahaan), yang terdiri dari Laporan posisi keuangan 31 Desember 2021, serta Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, Laporan perubahan ekuitas, dan Laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan catatan atas laporan keuangan.</p> <p>Conduct a general audit of Indonesia Eximbank for the 2021 financial year which consists of:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conduct an audit of Indonesia Eximbank's financial statements, which are prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which consist of a statement of financial position as of 31 December 2021, a statement of profit or loss and other comprehensive income, a statement of changes in equity and a statement of cash flows for the years ended on that date, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.</li> <li>2. Conduct an audit of compliance with the Legislation and Internal Control for the years ended 31 December 2021</li> <li>3. Implementing the agreed procedures for the Quarter IV 2021 Prudential Principle Implementation Activity Report as of 31 December 2021.</li> <li>4. Conducted a limited assurance engagement (review) on the industrial efficiency loan report (IEPC) position as of 31 December 2021.</li> <li>5. Conducted a limited assurance engagement (review) on the Report on the Realization of Key Performance Indicators (KPI) position as of 31 December 2021.</li> <li>6. Conducting limited assurance engagement (review) on Internal Control Operation and Information Technology (IT).</li> <li>7. Performing 2021 Financial Statement inspection services as the implementation of Audit Standard 600 in the context of examining the 2021 Central Government Financial Statements for LPEI by the Indonesian Supreme Audit Agency (BPK).</li> <li>8. Reviewing the 2021 LPEI Sharia Financial Report.</li> <li>9. Reviewing the Financial Statements for the 2021 LPEI Export Special Assignment Program.</li> <li>10. Provide assurance on the Report on the Implementation of the Government's Investment in National Export Development to PT Perkebunan Nusantara III (Persero) by LPEI 2021.</li> <li>11. Auditing the opening balance of the Financial Statements of IEB Prima Aset (subsidiary), which consists of a statement of financial position on 31 December 2021, as well as a statement of profit or loss and other comprehensive income, a statement of changes in equity, and a statement of cash flows for the years ended at that date, and the notes to the financial statements.</li> </ol>
Biaya jasa (fee) audit dan/ atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku;  audit and non/audit fees for the fiscal year	<p>Biaya jasa audit untuk tahun buku 2021 sebesar Rp4.382.262.500 (empat miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah)</p> <p>The audit fee for the 2021 financial year is Rp4,382,262,500 (four billion three hundred eighty two million two hundred sixty two thousand five hundred Rupiah)</p>

**KAP dan Nama Akuntan Publik yang melakukan Audit Laporan Keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir**

Public Accounting Firm and Name of Public Accountant who audited the annual Financial Statements for the last 5 years

No	Tahun Year	Nama KAP Public Accounting Firm	Biaya Jasa (Juta Rp) Fee (in Million Rp)
1	2017	Purwanto, Sungkoro & Surja	3.402
2	2018	Purwanto, Sungkoro & Surja	3.400
3	2019	Purwanto, Sungkoro & Surja	4.400
4	2020	Amir Abadi, Jusuf Aryanto, Mawar dan Rekan	3.589
5	2021	Amir Abadi, Jusuf Aryanto, Mawar dan Rekan	3.832

**Jasa lain yang diberikan KAP dan Akuntan Publik selain Jasa Audit Laporan Keuangan Tahunan pada tahun buku terakhir**

Lingkup pekerjaan tahun 2021 selain Jasa Audit Laporan Keuangan Tahunan meliputi:

1. Review mendalam sesuai dengan prosedur audit umum atas saldo dari seluruh rekening dan komponen-komponen lain yang mempengaruhi laporan keuangan Indonesia Eximbank, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (termasuk penerapan PSAK 71), Pedoman Akuntansi Syariah, Standar Audit yang relevan dengan Indonesia Eximbank, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan-peraturan lainnya.
2. Review mengenai asumsi-asumsi yang digunakan, data-data yang disiapkan dan digunakan Indonesia Eximbank untuk menentukan nilai *discounted future cashflow* dalam rangka penentuan cadangan kerugian penurunan nilai secara individual.
3. Melakukan audit atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern Posisi per 31 Desember 2020.
4. Review atas penerapan prosedur untuk laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) posisi 31 Desember 2020.
5. Melakukan *assurance* terbatas atas laporan pinjaman industrial efisiensi (IEPC) posisi 31 Desember 2020.

**Other services provided by Public Accounting Firm and Public Accountants other than Audit Services for Annual Financial Statements in the last financial year**

The scope of work in 2021 apart from Annual Financial Report Audit Services includes:

1. In-depth review in accordance with general audit procedures on balances of all accounts and other components that affect Indonesia Eximbank's financial statements, based on Financial Accounting Standards, Guidelines for Financial Accounting Standards (including the application of PSAK 71), Sharia Accounting Guidelines, relevant Auditing Standards with Indonesia Eximbank, Regulation of the Minister of Finance, Regulation of the Financial Services Authority and other regulations.
2. Review of the assumptions used, the data prepared and used by Indonesia Eximbank to determine the discounted future cashflow value in order to determine the allowance for impairment losses individually.
3. Conducting an audit of compliance with Legislation and Internal Control Position as of 31 December 2020.
4. Review on the application of procedures for the report on the Implementation of the Precautionary Principles (KPPK) for the position of 31 December 2020.
5. Perform limited assurance on the industrial efficiency loan report (IEPC) as of 31 December 2020.

6. Review atas penerapan prosedur untuk Laporan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) posisi 31 Desember 2020.
7. Melakukan review atas Internal Kontrol Operation dan IT.
8. Melakukan Prosedur yang Disepakati Bersama (*Agreed-Upon Procedures*) atas laporan penggunaan pinjaman China Eximbank posisi 31 Oktober 2021.

#### **Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal dan Kepatuhan Perusahaan Terhadap Ketentuan**

Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan tahunan oleh AP dan/atau KAP dilakukan paling sedikit melalui:

1. Kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit yang berlaku;
2. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
3. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
4. Rekomendasi perbaikan yang diberikan.

6. Review on the implementation of procedures for the Report on the Realization of Key Performance Indicators (KPI) as of 31 December 2020.
7. Conducting a review on Internal Control Operations and IT.
8. Carry out Agreed-Upon Procedures on the report on the use of China Eximbank loans as of 31 October 2021.

#### **The effectiveness of the external audit implementation and the Company's compliance with the provisions**

Evaluation of audit services on annual financial information by AP and/or KAP is carried out at least through:

1. Compliance with audit implementation with applicable audit standards;
2. Sufficiency of time for field work;
3. Assessment of the scope of services provided and the adequacy of the sampling test; and
4. Recommendations for improvement offered.



# FUNGSI KEPUTUHAN

## Compliance Function

Seiring perkembangan dan cakupan bisnis LPEI yang semakin besar, merupakan tantangan untuk mewaspadai risiko kepatuhan. Untuk itu diperlukan suatu tindakan pencegahan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran atas peraturan internal maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan risiko kepatuhan yang baik dan tepat waktu serta sejalan dengan penerapan manajemen risiko terkini, diharapkan dapat meminimalisir dampak risiko sedini mungkin.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka telah dibentuk suatu piagam kepatuhan (*compliance charter*) yang memuat ketentuan dan komitmen penerapan fungsi kepatuhan sehingga diharapkan dapat terbangun budaya patuh pada ketentuan di lingkungan LPEI.

Divisi Kepatuhan memiliki Visi dan Misi dalam menjalankan fungsinya di LPEI, yaitu dengan Visi "Menjadi mitra kerja bagi seluruh komponen secara harmonis dan berbudaya kepatuhan Lembaga dalam melaksanakan mandat Undang-Undang", dan Misi "Berperan lebih strategis dalam mendukung kinerja Lembaga yang lebih baik dengan menjaga harmonisasi antara pelaksanaan kegiatan usaha Lembaga dan kepatuhan atau ketataan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia".

Fungsi Kepatuhan harus memiliki pemisahan yang jelas dengan fungsi lainnya agar dapat fokus dan profesional dalam melaksanakan tugas utamanya.

Fungsi Kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat ex-ante (preventif) untuk memastikan:

- 1) Kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur, serta kegiatan usaha dan kegiatan operasional yang dilakukan oleh LPEI telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku; dan
- 2) Kepatuhan LPEI terhadap komitmen yang dibuat oleh LPEI kepada regulator dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang

In line with the Company's business development and scope that increasingly grows, it is a challenge to be prudent of compliance risk. To that end, prevention action is required to minimize possibility of fraud on internal rules as well as prevailing laws and regulations.

Good and timely compliance risk management and in line with the latest risk management practices is expected to minimize risk impact as early as possible.

As such, the compliance charter has been established that states the stipulations and commitment in implementing compliance function, thereby it is expected to build compliance culture on the Company's rules.

Compliance Division has in place the Vision and Mission in implementing its functions in the Company, which Vision is to "Become partner for all components harmoniously and has the compliance culture minded in implementing the Law mandate", and the Mission "To have a strategic role in supporting better performance for the Company by maintaining harmonization between the business activities and compliance or adherence to prevailing laws and regulations for Indonesia Eximbank".

The Compliance function must have a clear separation from other functions in order to be focused and professional in carrying out its main duties.

The Compliance Function is a series of actions or steps that are ex-ante (preventive) to ensure:

- 1) Policies, provisions, systems, procedures, as well as business activities and operational activities carried out by LPEI are in accordance with the prevailing laws and regulations; and
- 2) LPEI compliance with commitments made by LPEI to regulators and/or other competent supervisory authorities

## FUNGSI KEPATUHAN

### Compliance Function

#### Prinsip-prinsip Dasar Fungsi Kepatuhan

Prinsip-prinsip dasar Fungsi Kepatuhan LPEI adalah bahwa Unit Kerja Kepatuhan LPEI harus:

1. Independen terhadap kegiatan usaha dan kegiatan operasional LPEI, dimana pegawai pada Unit Kerja Kepatuhan tidak boleh ditempatkan pada posisi dimana kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara tanggung jawab kepatuhan dengan tanggung jawab lainnya.
2. Memiliki kedudukan dan wewenang yang sesuai dengan tanggung jawabnya.
3. Memiliki akses yang tidak terbatas untuk mendapatkan informasi dari semua pihak yang relevan dan sesuai dengan kewenangannya.
4. Berhak untuk mengambil inisiatif melakukan investigasi terhadap pelanggaran ketentuan regulator dan ketidakpatuhan atas sesuatu hal yang bukan bersifat kecurangan (penipuan).
5. Berhak untuk mengemukakan dan membuka temuan hasil investigasi pelanggaran ketentuan kepada Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan/atau Dewan Direktur (jika dipertimbangkan perlu).
6. Memiliki hak akses langsung kepada Direktur Eksekutif.
7. Berhak untuk meminta pendapat kepada pihak eksternal (pakar/ahli) atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian secara teknis.
8. Diberikan anggaran yang memadai dan sumber daya yang cukup untuk melakukan tugas dan fungsinya.

#### Basic Principles of Compliance Function

As the basic principles of Compliance Function, the Company's Compliance Unit shall:

1. Be independent to the Company's business and operational activities, where the Compliance Unit's staff may not be placed in a position where there may be a conflict of interest between compliance and other responsibilities.
2. Have a position and authority in accordance with his responsibilities.
3. Have unlimited access to obtain information from all relevant parties and in accordance with their authority.
4. Have the rights to take the initiative to investigate violations of regulatory stipulations and incompliance with non-fraudulent issues.
5. Have the rights to convey and inform the findings of investigations on violations of stipulations to the Executive Director, Managing Director, and/or Board of Directors (if considered necessary).
6. Have a direct access rights to the Executive Director.
7. Have the rights to request opinions from external parties (experts) or third parties with technical expertise.
8. Be provided with adequate budget and sufficient resources to carry out its tasks and functions.



## **Profil Kepala Divisi Kepatuhan** Profile of Head of Compliance Division

Nama Name	Thio Sucy
Usia Age	53 tahun 53 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	KDE No.0038/KDE/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 efektif sejak tanggal 01 Maret 2021 KDE No.0038/KDE/03/2021 dated 10 March 2021 effective from 1 March 2021
Pengalaman Kerja Work Experience	Memiliki pengalaman dan rekam jejak selama 26 tahun di industri perbankan, karier profesional beliau dimulai di Citibank Indonesia(1994-2009), mengawali karir sebagai <i>Asia Pasific Management Associate</i> di Citibank Indonesia dan meniti karir memimpin beberapa divisi dengan jabatan terakhir sebagai <i>Vice President AMLCO, Compliance</i> . Kemudian, beliau melanjutkan karier dengan bergabung bersama PT Bank Barclays Indonesia dengan menduduki jabatan sebagai <i>Senior Vice President, Kepala Satuan Unit Kerja APU-PPT (2009-2010); Kepala SKAI (2010-2011)</i> .  Karier beliau berlanjut dengan menjabat sebagai <i>Audit Director, Kepala SKAI</i> di PT Bank ANZ Indonesia (2011-2017), kemudian bergabung dengan PT Bank Commonwealth sebagai <i>Executive Vice President, Head of Enterprise Risk Management</i> (2017-2018), <i>Chief of Compliance</i> (2018) dan Direktur Kepatuhan (2018-2020), sebelum bergabung dengan LPEI dan menjabat di posisi sekarang.  Has 26 years of experience and track record in the banking industry, started her professional career in Citibank Indonesia(1994-2009) serving in various positions with the last position as Vice President, Head of AML and Financial Crime Division (2005-2009) then joined PT Bank Barclays Indonesia as Senior Vice President, Head of AML and Financial Crime (2009-2010); Head of Internal Audit (2010- 2011).  Next at PT Bank ANZ Indonesia as Audit Director, Head of Internal Audit (2011-2017), then joined PT Bank Commonwealth as Executive Vice President, Head of Enterprise Risk Management (2017-2018), Chief of Compliance (2018) and Director of Compliance (2018-2020), before joining LPEI and serving in the current position.
Riwayat Pendidikan Education	Meraih gelar Bachelor of Business dari University of Technology, Sydney - Australia pada tahun 1994.  Bachelor of Business dari University of Technology, Sydney-Australia pada tahun 1994.
Sertifikasi Certification	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Certificate of Competence of Bank Risk Management Level 5 from Banking Professional Certification Body (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan-LSPP)</i></li><li>• <i>International Certificate in Banking Risk and Regulation from Global Association of Risk Professionals (GARP)</i></li><li>• <i>Certificate of Competence of Bank Risk Management Level 5 from Banking Professional Certification Body (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan-LSPP)</i></li><li>• <i>International Certificate in Banking Risk and Regulation from Global Association of Risk Professionals (GARP)</i></li></ul>

## Program Kerja Divisi Kepatuhan Compliance Division Work Programs

No	Rencana Kerja Tahun 2021 2021 Work Plan	Realisasi Tahun 2021 2021 Realization
1	<p>Peningkatan Budaya Kepatuhan melalui sosialisasi/pelatihan mengenai fungsi kepatuhan, tata kelola, APU-PPT kepada seluruh pegawai.</p> <p>Increasing the Compliance Culture through dissemination / training on compliance function, governance, AML-CTF to all employees.</p>	<p>Selama tahun 2021, Divisi Kepatuhan telah melaksanakan sosialisasi dan pelatihan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi LHKPN kepada Wajib Lapor LPEI</li> <li>2. Pelatihan untuk Leader for Tomorrow (LFT)</li> <li>3. New Hire Orientation 2021</li> <li>4. Pelatihan APU&amp;PPT bersama Divisi Hukum terkait Identifikasi dan Verifikasi Nasabah dalam Hubungannya dengan Pengecekan Anggaran Dasar Nasabah</li> <li>5. Sosialisasi Formulir CIF terbaru hasil penggabungan Form Data Nasabah (CDD) dan Form Pendaftaran CIF bersama Divisi Operasi</li> <li>6. Sosialisasi PP No. 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)</li> <li>7. Penguatan sistem pengendalian internal dengan peluncuran Whistleblowing System (WBS) dan Pengendalian Gratifikasi yang bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal Kemenkeu (Itjen) dan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Kemenkeu (Pusintek)</li> <li>8. Sosialisasi berkelanjutan untuk WBS dan Gratifikasi kepada seluruh pegawai LPEI, yang dilakukan melalui 3 batch sosialisasi</li> <li>9. Sosialisasi Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance) kepada seluruh pegawai LPEI dengan narasumber dari PT Sinergi Daya Prima (PT SDP)</li> <li>10. Pelatihan Computer Based Training (CBT) Kode Etik dan Budaya Kerja Lembaga kepada seluruh pegawai LPEI</li> <li>11. Pelatihan Program Development DP II, kepada Relationship Manager (<i>front liners</i>)</li> <li>12. Pelatihan pembekalan kepada kepala divisi peserta Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 terkait modul Good Corporate Governance. Penerapan Fungsi Kepatuhan LPEI, Kode Etik, Pengendalian Gratifikasi, dan Whistle Blowing System.</li> </ol> <p>During 2021, the Compliance Division has carried out dissemination and training as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dissemination of LHKPN to LPEI Customary Reports</li> <li>2. Training for Leaders for Tomorrow (LFT)</li> <li>3. New Hire Orientation 2021</li> <li>4. APU&amp;PPT training with the Legal Division regarding Customer Identification and Verification in Relation to Checking the Customer Articles of Association</li> <li>5. Socialization of the latest CIF Form as a result of merging the Customer Data Form (CDD) and the CIF Registration Form with the Operations Division</li> <li>6. Socialization of PP No. 40 of 2021 concerning the Implementation of Special Economic Zones (SEZ)</li> <li>7. Strengthening the internal control system with the launch of the Whistleblowing System (WBS) and Gratification Control in collaboration with the Inspectorate General of the Ministry of Finance (Itjen) and the Center for Information Systems and Financial Technology of the Ministry of Finance (Pusintek)</li> <li>8. Continuous socialization for WBS and Gratification to all LPEI employees, which was carried out through 3 batches of socialization</li> <li>9. Socialization of Good Corporate Governance to all LPEI employees with resource persons from PT Synergy Daya Prima (PT SDP)</li> <li>10. Computer Based Training (CBT) Code of Ethics and Institutional Work Culture for all LPEI employees</li> <li>11. DP II Development Program Training, to Relationship Managers (<i>front liners</i>)</li> <li>12. Debriefing training for division heads participating in Level 4 Risk Management Certification related to the Good Corporate Governance module. Implementation of Compliance Function, Code of Ethics, Gratification Control, and Whistle Blowing System.</li> </ol>

**FUNGSI KEPATUHAN**  
Compliance Function

No	Rencana Kerja Tahun 2021 2021 Work Plan	Realisasi Tahun 2021 2021 Realization
2	Melakukan kajian kepatuhan atas peraturan Regulator dan berkoordinasi dengan <i>Compliance Champion</i> dalam menyampaikan kajian peraturan Regulator termasuk sosialisasi dan tindaklanjutnya.  Compliance review on Regulator's regulations and coordinate with the Compliance Champion in submitting a review of Regulator's regulations including socialization and follow-up.	<p>1. Divisi Kepatuhan melalui IM. 0094/KTP/06/2020 tanggal 22 Juni 2020 telah membuat program compliance champion yaitu dengan penunjukan PIC pada masing-masing Divisi sebagai <i>compliance champion</i> (duta kepatuhan)</p> <p>2. Pelaksanaan program <i>compliance champion</i> diwujudkan dengan penyampaian dan sosialisasi hasil Kajian Regulasi dari Divisi Kepatuhan kepada <i>compliance champion</i>.</p> <p>3. Selama tahun 2021, telah dilakukan kajian terhadap 145 peraturan regulator dimana sebanyak 28 regulasi berdampak langsung kepada LPEI.</p> <p>1. Compliance Division through IM. 0094/KTP/06/2020 dated 22 June 2020 has made a compliance champion program, namely by appointing a PIC in each Division as a compliance champion (compliance ambassador)</p> <p>2. Implementation of the compliance champion program is realized by submitting and disseminating the results of the Regulatory Study from the Compliance Division to the compliance champion.</p> <p>3. During 2021, a review of 145 regulatory regulations has been carried out, of which 28 regulations have a direct impact on LPEI.</p>
3	Memberikan konsultasi, opini dan/atau kajian kepatuhan dalam Penyusunan Kebijakan/Prosedur LPEI  Providing advice, opinions and/or compliance studies in the Preparation of the Company Policies/Procedures	<p>Selama tahun 2021, Divisi Kepatuhan telah:</p> <p>1. Berkontribusi dalam pembentukan atau penyusunan peraturan baik peraturan internal maupun eksternal yang dilakukan melalui keterlibatan dalam rapat/diskusi atau pemberian opini/masukan.</p> <p>2. Pemberian jasa konsultatif (<i>advisory</i>) dengan memberikan opini atau rekomendasi terkait produk/ jasa dan proses tentang kesesuaian penerapannya dengan regulasi eksternal yang berlaku.</p> <p>During 2021, the Compliance Division has:</p> <p>1. Contribute to the formation or preparation of regulations, both internal and external, which are carried out through involvement in meetings/discussions or providing opinions/inputs.</p> <p>2. Providing consultative services (<i>advisory</i>) by providing opinions or recommendations related to products/services and processes regarding the suitability of their application with applicable external regulations</p>
4	Optimalisasi pemantauan kewajiban pelaporan kepada pihak eksternal  Optimization of monitoring of reporting obligations to external parties	<p>1. Divisi Kepatuhan secara berkelanjutan melakukan pemantauan terhadap kewajiban pelaporan LPEI kepada pihak eksternal (regulator) dan secara rutin melakukan reminder kepada masing-masing PIC Pelaporan baik itu pelaporan bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan dan incidental untuk memastikan ketepatan waktu pelaporan</p> <p>2. Selama tahun 2021, tidak terdapat pelanggaran atas keterlambatan penyampaian kewajiban laporan LPEI kepada regulator yang menyebabkan timbulnya teguran ataupun sanksi dari regulator kepada LPEI.</p> <p>1. The Compliance Division continuously monitors LPEI reporting obligations to external parties (regulators) and routinely provides reminders to each Reporting PIC whether it is monthly, quarterly, semi-annual, annual and incidental reporting to ensure timely reporting</p> <p>2. During 2021, there were no violations of late submission of LPEI report obligations to the regulator which caused a warning or sanction from the regulator to the Company.</p>
5	Pelaksanaan uji kepatuhan dan pemeriksaan KYC/ APU PPT atas Proposal Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi, <i>Trade Finance</i> , Bank Line, dan Global Line, termasuk Program	<p>1. Divisi Kepatuhan secara konsisten telah membantu bisnis dalam melaksanakan uji kepatuhan dan pemeriksaan KYC/ APU PPT atas Proses Pembiayaan, Asuransi, Penjaminan, <i>Trade Finance</i> termasuk Program PEN dan PKE, serta Bank Line dan Global Line (Financial Institution) yang diberikan secara tepat waktu.</p> <p>2. Selama tahun 2021 Divisi Kepatuhan telah melakukan Uji Kepatuhan sebanyak total 516 Proposal Pengajuan.</p>

No	Rencana Kerja Tahun 2021 2021 Work Plan	Realisasi Tahun 2021 2021 Realization
	PEN(Penyelamatan Ekonomi Nasional) dan Program Penugasan Khusus Ekspor (PKE)  Compliance tests and KYC/AML CTF inspections on Proposals for Financing, Guarantee, Insurance, Trade Finance, Bank Line, and Global Line, including the PEN (National Economic Recovery) Program and the Export Special Assignment Program (PKE)	1. The Compliance Division has consistently assisted the business in carried out compliance tests and KYC/AML CTF inspections on the Process of Financing, Insurance, Guarantee, Trade Finance including PEN and PKE Programs, as well as Bank Line and Global Line(Financial Institution)which are provided in a timely manner. 2. During 2021 the Compliance Division has conducted a total of 516 Compliance Testing Proposals.
6	Compliance Assessment (Uji Petik) terhadap Debitur di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah  Compliance Assessment (Pick Test) on Debtors at the Head Office and Regional Offices	Divisi Kepatuhan telah melaksanakan Uji Petik terhadap 17 Debitur baru maupun existing dari unit kerja Divisi Bisnis UKMK, Kanwil I, II dan III dengan hasil pengujian adalah "Baik" dengan tingkat efektivitas 89,22%.  The Compliance Division has carried out a Pick Test on 17 new and existing debtors from the MSME Business Division unit, Regional Offices I, II and III with "Good" test results with an effectiveness level of 89.22%.
7	Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Lembaga  Assessment of Institutional Governance Implementation	Telah dilakukan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Lembaga oleh Pihak Independen (SDP) dimana LPEI memperoleh Predikat "Baik" dengan Tingkat Kecukupan 83,75%.  An Independent Party (SDP) Assessment of Institutional Governance Implementation has been carried out where the Company has obtained the "Good" Predicate with an Sufficiency Level of 83.75%.
8	Efektivitas pelaksanaan Screening, verifikasi dan penilaian profil risiko nasabah pada saat pengajuan baru maupun pengkinian  Effectiveness of Screening, verification and assessment of customer risk profiles at the time of new submissions and updates	Selama tahun 2021, Divisi Kepatuhan telah melakukan screening Nasabah sejumlah 454 Nasabah/Calon Nasabah baru maupun pengkinian  During 2021, the Compliance Division has screened a total of 454 new and updated customers/potential customers.
9	Implementasi SWIFT Sanction Screening System  Implementation of SWIFT Sanction Screening System	Selama 2021, pemantauan dan identifikasi transaksi dilakukan menggunakan SWIFT dimana jika terdapat transaksi dari dan/atau ke <i>sanction country</i> , tidak akan diteruskan.  During 2021, transaction monitoring and identification will be done using SWIFT where a transaction from and/or to a sanction country will not be forwarded.
10	Penyusunan dan penyempurnaan ketentuan internal • Kebijakan & Prosedur APU-PPT • Manual SWIFT Sanction Screening • Manual Kewajiban Pelaporan LHKPN Pejabat LPEI • Kebijakan Tata Kelola LPEI	Divisi Kepatuhan telah berperan aktif dalam penyusunan draft PMK 208 yang baru disahkan pada tanggal 29 Desember 2021, selanjutnya akan dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan internal lainnya.

**FUNGSI KEPUTUHAN**  
Compliance Function

No	Rencana Kerja Tahun 2021 2021 Work Plan	Realisasi Tahun 2021 2021 Realization
	<p>Preparation and improvement of internal regulations</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AML-CTF Policies &amp; Procedures</li> <li>• Manual SWIFT Sanction Screening</li> <li>• LPEI Official LHKPN Reporting Obligation Manual</li> <li>• LPEI Governance Policy</li> </ul>	The Compliance Division has played an active role in the preparation of the draft PMK 208 which was only ratified on 29 December 2021, further adjustments will be made to other internal provisions.
11	<p>Pelaporan APU &amp; PPT (SIPESAT, DTTOT, LTkm, Laporan Rencana &amp; Realisasi Pengkinian Data Nasabah, serta Laporan Penerapan APU PPT kepada Manajemen)</p> <p>AML &amp; CTF Reporting (SIPESAT, DTTOT, LTkm, Reports on Plans &amp; Realization of Customer Data Updates, and Reports on the Implementation of AML CTF to Management)</p>	<p>Melakukan kewajiban pelaporan yang berhubungan dengan penerapan program APU-PPT, selama periode 2021, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTkm) – NIHIL</li> <li>• Laporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) – 4 kali Laporan.</li> <li>• Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data Nasabah.</li> <li>• Laporan Realisasi Kegiatan Pengkinian Data Nasabah.</li> <li>• Laporan Nihil/Pemblokiran Daftar Terduga Teroris / Organisasi Teroris (DTOT) – 3 Laporan.</li> <li>• Laporan Semester Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan Penerapan Program APU-PPT kepada Manajemen</li> </ul> <p>Carry out reporting obligations related to the implementation of the AML-CTF program during the 2021 period, as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suspicious Financial Transaction Report (LTkm) – Nil</li> <li>• Integrated Service User Information System Report (SIPESAT) – 4 reports.</li> <li>• Report on Customer Data Update Activity Plan.</li> <li>• Report on the Realization of Customer Data Update Activities.</li> <li>• Zero Report/Block List of Suspected Terrorists / Terrorist Organizations (DTOT) – 3 Reports.</li> <li>• Semester Report on Implementation of Compliance Function and Implementation of AML-CTF Program to Management</li> </ul>
12	<p>Internalisasi dan penguatan penerapan Whistleblowing System(WBS) LPEI</p> <p>Internalization and strengthening of the Whistleblowing System(WBS) implementation</p>	<p>a. Penguatan sistem pengendalian internal dengan peluncuran Whistleblowing System (WBS) dan Pengendalian Gratifikasi yang bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal Kemenkeu (Itjen) dan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Kemenkeu (Pusintek).</p> <p>b. Sosialisasi berkelanjutan untuk WBS dan Gratifikasi kepada seluruh pegawai LPEI, yang dilakukan melalui 3 batch sosialisasi. Dalam hal ini Divisi Kepatuhan sebagai koordinator bekerjasama dengan Itjen Kemenkeu dan Pusintek Kemenkeu sebagai narasumber</p> <p>a. Strengthening the internal control system with the launch of the Whistleblowing System (WBS) and Gratification Control in collaboration with the Inspectorate General of the Ministry of Finance (Itjen) and the Center for Information Systems and Financial Technology of the Ministry of Finance (Pusintek).</p> <p>b. Continuous dissemination for WBS and Gratification to all LPEI employees, which was carried out through 3 batches of socialization. In this case, the Compliance Division as the coordinator cooperates with the Inspectorate General of the Ministry of Finance and the Ministry of Finance's Pusintek as resource persons.</p>

No	Rencana Kerja Tahun 2021 2021 Work Plan	Realisasi Tahun 2021 2021 Realization
13	Peningkatan kompetensi pegawai Divisi Kepatuhan  Improving Compliance Division employee competence	Seluruh personel kepatuhan telah mengikuti Sertifikasi, Pelatihan, E-learning, Seminar atau workshop.  All compliance personnel have attended Certification, Training, E-learning, Seminar or workshop.
14	Pelaksanaan coaching (internal meeting/sharing session) kepada pegawai di Divisi Kepatuhan  Implementation of coaching (internal meeting/sharing session) for employees in the Compliance Division	Divisi Kepatuhan secara rutin melakukan internal meeting dengan satu divisi, masing-masing departemen, maupun masing-masing individu.  The Compliance Division regularly conducts internal meetings with one division, each department, and each individual.
15	Pengembangan/ Penyempurnaan Sistem Informasi (Web Reminder System, Sistem APU & PPT, Search Engine Regulation, dan Computer Based Training)  Information System Development/Improvement (Web Reminder System, AML & CTF System, Search Engine Regulation, and Computer Based Training)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Divisi Kepatuhan telah membangun dan mengelola suatu sistem <i>Search Engine Regulation</i> untuk mempermudah akses peraturan bagi seluruh pegawai LPEI.</li> <li>2. Terhadap sistem <i>Search Engine Regulation</i> ini, Divisi Kepatuhan secara berkala mengelola dengan melakukan updating Peraturan. Pada Tahun 2021 Divisi Kepatuhan telah melakukan updating sebanyak 49 peraturan.</li> <li>3. Pelatihan <i>Computer Based Training</i>(CBT) Kode Etik dan Budaya Kerja Lembaga kepada seluruh pegawai LPEI</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. The Compliance Division has developed and managed a Search Engine Regulation system to facilitate access to regulations for all LPEI employees.</li> <li>2. Regarding this Search Engine Regulation system, the Compliance Division periodically manages it by updating the Regulations. In 2021 the Compliance Division has updated 49 regulations.</li> <li>3. Code of Ethics and Institutional Work Culture Computer Based Training (CBT) for all LPEI Employees.</li> </ul>
16	Menindaklanjuti komitmen/ temuan hasil pemeriksaan Regulator/Otoritas yang berwenang (Kementerian Keuangan, OJK, BPK, PPATK) dan Auditor Eksternal  Following up on the commitments / findings of the examination results of the competent Regulators / Authorities (Ministry of Finance, OJK, BPK, PPATK) and External Auditors	Divisi Kepatuhan telah menindaklanjuti 100% seluruh komitmen/temuan hasil pemeriksaan Auditor Eksternal pada tahun 2021.  The Compliance Division has followed up 100% of all commitments/findings on the results of the External Auditor's examination in 2021.

## FUNGSI KEPATUHAN

Compliance Function

### Program Kerja Divisi Kepatuhan Tahun 2022

- a. Implementasi PMK.208/2021 tentang prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, termasuk Penilaian Self Assessment Tata Kelola oleh Pihak Independent dan Penyesuaian kebijakan internal LPEI terkait Tata Kelola.
- b. Implementasi dan penerapan Governance, Risk, & Compliance (GRC)
- c. Pemenuhan komitmen kepada Regulator dan pelaporan kepada Regulator.
- d. Pelaksanaan dan evaluasi Uji Kepatuhan
- e. Pelaksanaan Uji Petik.
- f. Pengembangan dan Ketersediaan database informasi secara periodik dalam rangka efektivitas penerapan Program APU PPT
- g. Sosialisasi berkelanjutan dalam rangka penguatan Budaya Kepatuhan dan Peningkatan awareness terhadap budaya dan risiko kepatuhan.

### Peningkatan Kompetensi SDM Divisi Kepatuhan

Penguatan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan pengendalian internal perlu ditunjang dengan kompetensi yang baik. Oleh karena itu Personil Divisi Kepatuhan selama Semeseter Tahun 2021 telah mengikuti pelatihan, seminar maupun sosialisasi yaitu:

### Compliance Division 2022 Program

- a. Implementation of PMK.208/2021 regarding Governance principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles for Indonesian Export Financing Institutions, including Self-Assessment of Governance by Independent Parties and Adjustment of the Company's internal policies related to Governance.
- b. Implementation and implementation of Governance, Risk, & Compliance (GRC)
- c. Fulfillment of commitments to Regulators and reporting to Regulators.
- d. Implementation and evaluation of Compliance Test
- e. Implementation of Compliance Assessment.
- f. Periodic development and availability of information databases in order to effectively implement the AML CFT Program
- g. Continuous socialization in order to strengthen Compliance Culture and increase awareness of compliance culture and risks.

### Compliance Division HR Competency Improvement

Strengthening the implementation of the compliance function and internal control needs to be supported by good competence. Therefore, the Compliance Division Personnel during the 2021 Semester have attended training, seminars and socialization, namely:

No	Pelatihan / Sosialisasi/ Sertifikasi Training / Dissemination / Certification	Tanggal Date
1	Sosialisasi Perubahan Ketentuan SLIK OJK oleh OJK Dissemination of Changes to OJK SLIK Provisions by OJK	21 Januari 2021 21 Januari 2021
2	Kelas USMR Level 1 USMR Class Level 1	25-26 Januari 2021 25-26 January 2021
3	Manual Operasional dan Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Operational Manual and Technical Guidelines for Financing Operations	03-04 Februari 2021 03-04 February 2021
4	Swift Sanction Filters Assurance	04 Februari 2021 04 February 2021
5	Rational Problem Solving	15-19 Februari 2021 15-19 February 2021
6	Sosialisasi dan Workshop Green Office Project LPEI oleh Green Building Console Indonesia LPEI Green Office Project Dissemination and Workshop by Green Building Console Indonesia	31 Maret 2021 31 March 2021
7	Sosialisasi DHE & DPI oleh Divisi TFC DHE & DPI dissemination by TFC Divisi Division	07 April 2021
8	Training LHKPN LHKPN Training	15 April 2021
9	Refreshment Sertifikasi Kepatuhan Level 1 Level 1 Compliance Certification Refreshment	28 Mei 2021 28 May 2021
10	Penerapan GRC di Era Digital (Oleh OJK) GRC Implementation in the Digital Age (By OJK)	03 Juni 2021 03 June 2021
11	Sosialisasi Security Awareness oleh Tim Pusintek Kemenkeu Socialization of Security Awareness by the Ministry of Finance's Pusintek Team	03 Juni 2021 03 June 2021
12	Balancing Leader & Manager	10 Juni 2021 10 June 2021
13	Understanding Anti-Subsidy Investigation Under the WTO Agreement on Subsidy and Countercailing	17 Juni 2021 17 June 2021
14	Seminar Memaknai Semangat Nasionalisme di Sektor Jasa Keuangan Seminar on the Meaning of Nationalism in the Financial Services Sector	17 Juni 2021 17 June 2021
15	Pelatihan terkait Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Penyedia Jasa Keuangan Training related to the Prevention of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction for Financial Service Providers	22 - 24 Juni 2021 22 - 24 June 2021
16	Webinar Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) Webinar on Prevention of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction (WMD)	29 Juni 2021 29 June 2021
17	Dasar-Dasar Produk & Operasional Perbankan Fundamentals of Banking Products & Operations	15-17 Juni 2021 15-17 June 2021

**FUNGSI KEPATUHAN**  
Compliance Function

No	Pelatihan / Sosialisasi/ Sertifikasi Training / Dissemination / Certification	Tanggal Date
18	Data Management Excel 2016	08-09 Juli 2021 08-09 July 2021
19	Fundamental International Trade Finance	12-13 Juli 2021 12-13 July 2021
20	Sharing Session "Memahami GRC secara Holistik" Sharing Session "Understanding GRC Holistically"	16 Juli 2021 16 July 2021
21	Peningkatan awareness dan pemahaman terkait implementasi GRC Increased awareness and understanding regarding GRC implementation	23 Juli 2021 23 July 2021
22	Sosialisasi (Webinar) SWIFT Indonesia Business Community Updates SWIFT Indonesia Business Community Updates Dissemination (Webinars)	27 – 28 Juli 2021 27 – 28 July 2021
23	Product Refreshment Program Development DP II	30 Juli 2021 30 July 2021
24	E-Learning Information Security Awareness (ISA) bagi Pegawai SMV (Special Mission Vehicle) E-Learning Information Security Awareness (ISA) for SMV (Special Mission Vehicle) Employees	23 Agustus 2021 23 August 2021
25	GRC Summit 2021	26 – 27 Agustus 2021 26 – 27 August 2021
26	Penguatan dan peningkatan pemahaman akan produk-produk LPEI Strengthening and increasing understanding of LPEI products	26 & 31 Agustus, 7 & 29 September 2021 26 & 31 August, 7 & 29 September 2021
27	Webinar Ancaman Siber dan Mata Uang Kripto, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Webinar on Cyber Threats and Cryptocurrencies, Money Laundering and Terrorism Financing	07 September 2021
28	Trade Credit Insurance, Surety Bond & Bank Guarantee	7 – 8 September 2021
29	Pelatihan berbasis Computer (CBT) dengan Modul Kode Etik Pegawai dan Budaya Kerja LPEI Computer-based training (CBT) with the LPEI Code of Conduct and Work Culture Module	18 September 2021
30	Penerapan Anti Money Laundering dan Prinsip Know Your Customer dalam Mendukung Good Corporate Governance Application of Anti Money Laundering and Know Your Customer Principles in Supporting Good Corporate Governance	20 September 2021
31	ASWIFTINDO Sharing & Networking Forum 2021 - Risk, Compliance and the New Normal	06 Oktober 2021 06 October 2021

No	Pelatihan / Sosialisasi/ Sertifikasi Training / Dissemination / Certification	Tanggal Date
32	Webinar GCG : Membangun Budaya Kepatuhan dan Etika Bisnis dan Kepatuhan ( <i>Ethics and Compliance</i> ) GCG Webinar : Building a Culture of Compliance and Business Ethics and Compliance ( <i>Ethics and Compliance</i> )	08 Oktober 2021 08 October 2021
33	Sertifikasi Kepatuhan Level 1 Level 1 Compliance Certification	11-13 Oktober 2021 11-13 October 2021
34	<i>Trade Finance &amp; Risk Management</i>	18-19 Oktober 2021 18-19 October 2021
35	<i>Think on Your Feet (Communication Skill)</i>	15-16 November 2021
36	Webinar : Launching SRA Sektor Jasa Keuangan Tahun 2021 Webinar : Launching of Financial Services Sector SRA in 2021	07 Desember 2021 07 December 2021
37	Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Kemenkeu Thn 2021 Commemoration of World Anti-Corruption Day (Hakordia) Ministry of Finance in 2021	08 Desember 2021 08 December 2021
38	Sosialisasi Pelaporan Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) Sistem Pembayaran dan Financial Market Infrastructure Bank Indonesia serta Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (SP dan FMI BI sefrta KPDHN) Tahun 2021 Socialization of the Report on the Compliance Assessment Report (LHPK) of the Payment System and Financial Market Infrastructure of Bank Indonesia and the Office for Managing the National Black List (SP and FMI BI and KPDHN) in 2021	09 Desember 2021 09 December 2021
39	Workshop Penanganan Pengaduan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan Workshop on Complaint Handling by Financial Services Businesses	10 Desember 2021 10 December 2021
40	<i>Implementing Governance, Risk Management &amp; Compliance</i>	15 Desember 2021 15 December 2021



# MANAJEMEN RISIKO

## Risk Management

Berdasarkan PMK No.208/PMK.016/2021 tentang Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI dengan bentuk penerapan Manajemen Risiko LPEI paling kurang mencakup aspek:

- Pengawasan aktif Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif;
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko;
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
- Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Penerapan manajemen risiko tersebut bertujuan untuk menjaga LPEI tetap berada dalam koridor profil Risiko lembaga yang terkendali, terarah, terintegrasi dan berkesinambungan melalui sistem manajemen risiko yang berfungsi sebagai penyaring dan memberi peringatan dini (*early warning system*). Penerapan manajemen risiko juga dimaksudkan agar dapat terbangun budaya sadar risiko (*risk culture*) yang kuat yang didukung dengan adanya komunikasi yang efektif kepada seluruh tataran organisasi, pengembangan lingkungan/tata kelola yang kondusif dalam kerangka pengelolaan risiko yang efisien dan efektif; dan setiap kepala unit kerja bertanggung jawab untuk memahami dan menerapkan manajemen risiko secara terbuka, proaktif, serta mampu melakukan internalisasi secara efisien dan efektif di unit kerja masing-masing.

Memperhatikan dinamika global yang semakin berkembang, memiliki *enterprise risk management framework sui generis* yang *robust* merupakan bagian penting untuk mempertahankan kinerja dan tingkat profitabilitas. Penerapan *enterprise risk management* sendiri memerlukan usaha, waktu, dan komitmen dari seluruh unit terkait sehingga hasil yang diperoleh akan membawa pengaruh yang baik pada kinerja lembaga.

LPEI menerapkan manajemen risiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan mengelola risiko kegiatan usahanya. Penerapan manajemen risiko yang baik diharapkan tidak hanya meningkatkan *stakeholder value*, tetapi juga memberikan gambaran mengenai potensi kerugian yang mungkin akan dihadapi di masa mendatang, memelihara tingkat *risk adjusted return*

Based on PMK No.208/PMK.016/2021 concerning Governance, Risk Management and Know Your Customer Principles, the implementation of Risk Management shall at least cover the following aspects:

- Active oversight of the Board of Directors and the Executive Director;
- Adequacy of policies, procedures and establishment of risk limits;
- Adequacy of risk identification, measurement, monitoring and control processes, as well as risk management information systems; and
- Comprehensive internal control system.

The application of risk management aims at keeping Indonesia Eximbank in the corridor of a controlled, directed, integrated and sustainable risk profile of the institution through a risk management system that functions as a mitigating and early warning system. The implementation of risk management is also intended to build a strong risk culture supported by effective communication to all levels of the organization, development of a conducive environment/governance within the framework of efficient and effective risk management; and each work unit head is responsible for understanding and implementing risk management in an open, proactive manner, and being able to internalize efficiently and effectively in their respective work units.

Taking into account the growing global dynamics, having a robust *sui generis* enterprise risk management framework is an important part of maintaining performance and profitability levels. The implementation of enterprise risk management itself requires effort, time, and commitment from all related units so that the results obtained will have a good influence on the performance of the institution.

Indonesia Eximbank implements effective risk management that is adjusted to the objectives, policies, size and complexity as well as the ability to manage the risks of its business activities. The implementation of good risk management is expected not only to increase stakeholder value, but also to provide an overview of the potential losses that may be faced in the future, maintain

yang optimal dan membantu dalam proses pengambilan keputusan usaha secara tepat.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usaha, risiko yang dihadapi LPEI juga berkembang mencakup risiko kredit, risiko asuransi, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko investasi terkait portofolio Syariah. Risiko kredit merupakan risiko yang paling signifikan di LPEI dibanding jenis risiko lainnya. Risiko kredit adalah risiko yang terjadi karena kegagalan debitur, yang menyebabkan tak terpenuhinya kewajiban untuk membayar hutang.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2021 LPEI mulai menata kembali penerapan kerangka manajemen risiko, khususnya pada jenis-jenis risiko, *risk appetite*, alat pengukuran, metodologi pengukuran, menyusun *Early Warning Detection* pembiayaan bermasalah, penyusunan *blue print* dan *road map* penerapan *three lines of defense*, penyusunan *industry limit* dan *guideline*, *risk awareness survey* ataupun internalisasi budaya risiko sebagai satu kesatuan dalam penerapan *Enterprise Risk Management Framework*.

### Kebijakan dan Implementasi tahun 2021

LPEI menerapkan sistem manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh regulator serta peraturan internal sebagai dasar implementasi. Berikut ini dasar kebijakan yang dijadikan acuan:

- Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia  
Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, LPEI wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, prinsip penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah. Penerapan prinsip manajemen risiko sebagaimana tersebut mencakup pemenuhan kecukupan modal minimum, pengawasan aktif, dan pemenuhan disiplin pasar terhadap risiko yang melekat.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 208/PMK.016/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko dan Prinsip Mengenal

an optimal level of risk adjusted return and assist in the appropriate business decision-making process.

In line with the development of business activities, the risks faced by the Institution are also growing, including credit risk, insurance risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, compliance risk, and investment risk related to the Sharia portfolio. Credit risk is the most significant risk at the Company compared to other types of risk. Credit risk is the risk that occurs due to the failure of the borrower, which causes the non-fulfillment of obligations to pay debts.

In this regard, in 2021 the Institution begins to reorganize the application of the risk management framework, particularly related to the types of risk, risk appetite, measurement tools, measurement methodologies, establishing the Early Warning Detection of non-performing financing, development of blue print and road map for the implementation of the three lines of defense, preparation of industry limits and guidelines, risk awareness surveys as well as internalization of risk culture as an integral part of implementing the Enterprise Risk Management Framework.

### Policy and Implementation in 2021

The Institution implements a risk management system in accordance with the guidances set by the regulator as well as internal regulations as the basis for implementation. The following is the policy basis for reference:

- Article 17 of Law No. 2 of 2009 concerning Indonesia Eximbank  
The article explains that in carrying out its duties, Indonesia Eximbank is obligated to apply the principles of good corporate governance, the principles of risk management, and the principles of know your customer. The application of risk management principles as mentioned above includes the fulfillment of minimum capital adequacy, active supervision, and compliance with market discipline against inherent risks.
- Regulation of the Minister of Finance No. 208/PMK.016/2021 dated 29 December 2021 regarding Indonesia Eximbank Governance, Risk Management

Nasabah LPEI. Kebijakan penerapan manajemen risiko di LPEI setidaknya mencakup:

- a. Pengawasan aktif Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif.
  - b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
  - c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
  - d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
3. Peraturan Dewan Direktur (PDD) No. 0006/PDD/07/2018 tentang Kebijakan Manajemen Risiko (*Enterprise Risk Management*) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. PDD tersebut berisi ketentuan manajemen risiko secara umum mencakup kerangka penerapan Manajemen Risiko.
4. Peraturan Direktur Eksekutif (PDE) nomor 0032/PDE/09/2018 tentang *Manual Operasional Enterprise Risk Management Manual* Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. PDE tersebut berisi pedoman teknis pelaksanaan manajemen risiko.

#### **Dasar Hukum**

Berikut dasar kebijakan dan peraturan yang dijadikan acuan dalam penerapan manajemen risiko LPEI:

1. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 208/PMK.016/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI.
3. Peraturan Dewan Direktur (PDD) No. 0006/PDD/07/2018 tentang Kebijakan Manajemen Risiko (*Enterprise Risk Management*) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
4. Peraturan Direktur Eksekutif (PDE) No. 0032/PDE/09/2018 tentang *Manual Operasional Enterprise Risk Management Manual* Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

#### **Sistem Manajemen Risiko**

Penerapan Sistem manajemen risiko di LPEI bertujuan untuk mengelola kegiatan usaha untuk tetap berada dalam koridor profil risiko yang terkendali, terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Sistem manajemen risiko LPEI berfungsi sebagai penyaring atau pemberi

and Know-Your-Customer Principles. Risk management implementation policies at Indonesia Eximbank at least include:

- a. Active oversight of the Board of Directors and the Executive Director.
  - b. Adequacy of policies, procedures and determination of risk limits.
  - c. Adequacy of risk identification, measurement, monitoring and control processes as well as risk management information systems.
  - d. Comprehensive internal control system.
3. Board of Directors Regulation (PDD) No. 0006/PDD/07/2018 regarding the Risk Management Framework (*Enterprise Risk Management*) of Indonesia Eximbank. The PDD contains general risk management principles including the framework for implementing Risk Management.
4. Executive Director Regulation (PDE) No. 0032/PDE/09/2018 concerning the Operational Manual of Indonesia Eximbank Enterprise Risk Management Manual. The PDE contains technical guidelines for the implementation of risk management.

#### **Legal References**

The following are the basic policies and regulatory applied as references in implementing risk management:

1. Article 17 of Law No. 2 of 2009 concerning the Indonesia Eximbank.
2. Regulation of the Minister of Finance No. 208/PMK.016/2021 dated 29 December 2021 regarding Indonesia Eximbank Governance, Risk Management and Know-Your-Customer Principles.
3. Regulation of the Board of Directors (PDD) No. 0006/PDD/07/2018 on Enterprise Risk Management Policy of Indonesia Eximbank.
4. Executive Director Regulation (PDE) No. 0032/PDE/09/2018 on the Enterprise Risk Management Manual of Indonesia Eximbank.

#### **Risk Management System**

The implementation of risk management system in Indonesia Eximbank aims to manage business activities while remaining within the corridor of a controlled, directed, integrated and sustainable risk profile. Indonesia Eximbank risk management system functions

## MANAJEMEN RISIKO

### Risk Management

peringatan dini (*early warning system*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, meliputi tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang didukung infrastruktur sistem yang dapat mengumpulkan dan mengolah data risiko pada seluruh kegiatan usaha Lembaga.

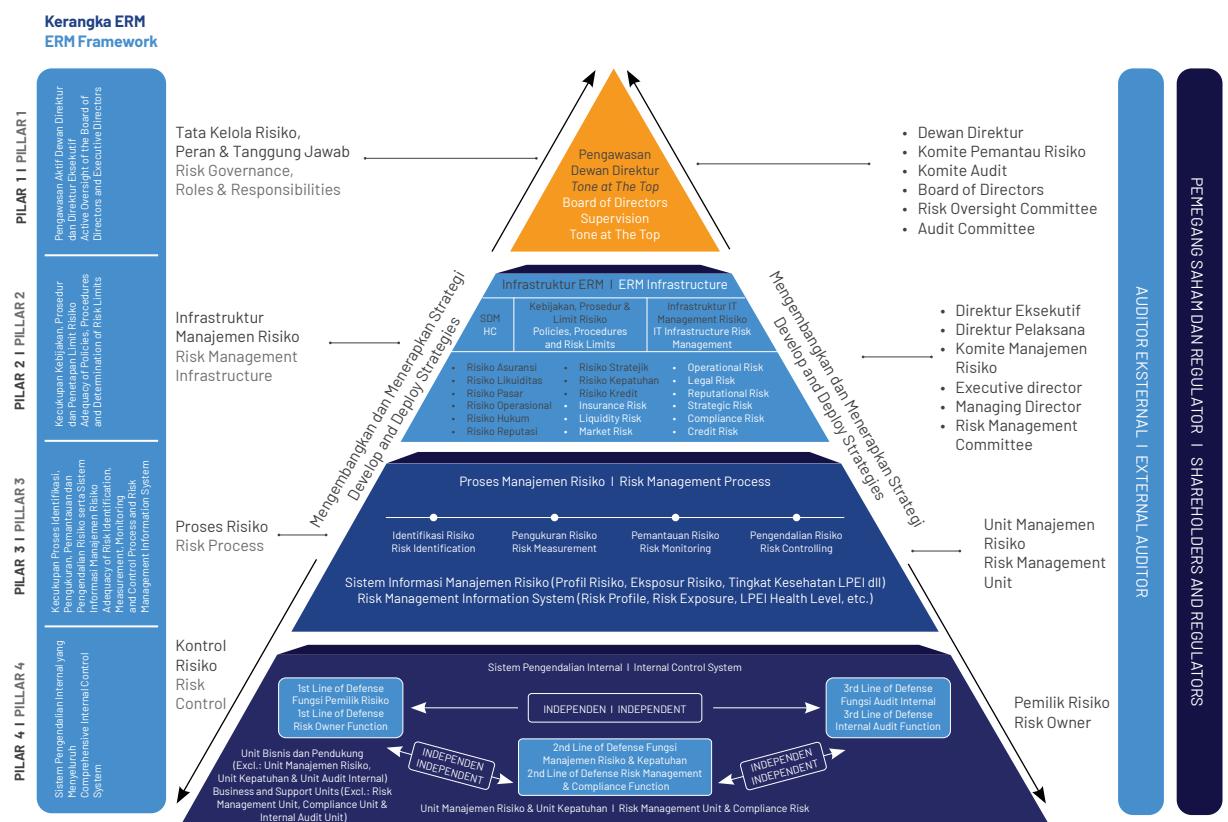
#### Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Penerapan serta pemahaman tentang Manajemen Risiko LPEI secara *enterprise risk* (ERM) dipetakan dalam sebuah kerangka kerja sehingga dapat memperkuat kaitan terhadap *internalisasi risk culture* di LPEI. Adapun ERM framework yang telah disusun sebagai berikut:

as a screening or an early warning system carried out thoroughly, encompasses the stages of identification, measurement, monitoring and risk control fostered by a system infrastructure that can collect and process risk data in all of Institution's business activities.

#### Risk Management Framework

Implementation on Indonesia Eximbank Risk Management in terms of enterprise risk (ERM) is mapped in a framework to strengthen the link to risk culture internalization at Indonesia Eximbank. The ERM framework is as follows:



Kerangka ERM dibagi menjadi 4 (empat) pilar, dengan penjelasan sebagai berikut:

ERM framework is divided into 4 (four) pillars, with the following explanation:

### **Pilar 1: Pengawasan aktif Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif**

#### Pillar 1: Active Supervision of the Board of Directors and Executive Director



Pengawasan aktif Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif berfungsi oversight board dalam membangun *risk governance* di LPEI. Pengawasan aktif Dewan Direktur dilakukan melalui pemberian persetujuan dan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko yang disusun oleh Direktur Eksekutif. Secara berkala Dewan Direktur juga melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dalam bidang pengawasan, Dewan Direktur secara berkala melakukan Rapat Dewan Direktur. Pengawasan Dewan Direktur di bidang manajemen risiko di bantu oleh Komite Pemantau Risiko. Tugas-tugas Komite Pemantau Risiko tersebut melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dalam hubungannya dengan Pembiayaan Ekspor Nasional LPEI.

Pengawasan Aktif Dewan Direktur yang dibantu oleh Komite Pemantau Risiko dilakukan paling kurang meliputi:

- Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko.
- Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.

Sedangkan pengawasan aktif Direktur Eksekutif dilakukan paling kurang meliputi:

- Merumuskan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif.

Active supervision by the Board of Directors and Executive Director is an oversight board function in building risk governance at Indonesia Eximbank. The active oversight of the Board of Directors is carried out through the approval and evaluation of risk management policies prepared by the Executive Director. Periodically the Board of Directors also evaluates the implementation of risk management policies.

In carrying out oversight duties, the Board of Directors periodically holds Board of Directors Meeting. The Board of Directors oversight in risk management is assisted by the Risk Monitoring Committee, in which duties include to carry out regular assessments and provide recommendations on business risks in relation to Indonesia Eximbank National Export Financing.

Active supervision of the Board of Directors assisted by the Risk Monitoring Committee, consists of at the very least:

- Approving and evaluating risk management policies.
- Evaluating risk management policies implementation.

Active supervision by the Executive Director consists of at the very least:

- Formulating written and comprehensive Risk Management policies and strategy.

- b. Melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh LPEI secara keseluruhan.
- c. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direktur Eksekutif
- d. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi
- e. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko.
- f. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen.
- g. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
  - Keakuratan metodologi penilaian risiko.
  - Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko.
  - Ketepatan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.

Adapun tataran pelaksanaan pengawasan aktif telah dilakukan melalui berbagai laporan dan rapat rutin sebagai berikut:

- Rapat rutin terkait eksposur risiko kredit, pasar dan likuiditas.
- Penyampaian sistem informasi manajemen risiko secara bulanan.
- Penyampaian profil risiko secara triwulan.
- Penyampaian penilaian tingkat kesehatan risiko secara triwulan.
- Rapat secara berkala dengan Dewan Pengawas Syariah.
- Pengungkapan manajemen risiko secara triwulan.

- b. Implementing Risk Management policies and overall risk exposure taken by the Company.
- c. Evaluating and deciding on transactions that require the approval of Executive Director
- d. Developing Risk Management culture at all levels of organization.
- e. Ensuring competency improvement of personnel related to risk management.
- f. Ensuring independent operation of Risk Management function.
- g. Implementing regular reviews to ensure:
  - Accuracy of risk assessment methodology.
  - Adequacy of risk management information system implementation.
  - Accuracy of risk threshold policies, procedures and determination.

Active supervision has been carried out through various reports and routine meetings as follows:

- Regular meetings on credit risk, market risk and liquidity risk exposure.
- Submission of monthly risk management information system.
- Submission of quarterly risk profile.
- Submission of quarterly risk soundness assessment result.
- Regular meetings with the Sharia Supervisory Board.
- Disclosure of risk management on quarterly basis.

## **Pilar 2: Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Limit Risiko** Pillar 2: Adequacy of Policies, Procedures and Risk Limits



Prinsip-prinsip pengelolaan risiko terpadu dan sistematis dituangkan dalam beberapa kebijakan, prosedur dan limit risiko, antara lain Kebijakan Manajemen Risiko yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Dewan Direktur, dimulai dari kebijakan umum manajemen risiko, strategi, organisasi, sistem informasi manajemen risiko dan proses manajemen risiko.

Selanjutnya Kebijakan Manajemen Risiko tersebut dirumuskan secara lebih terperinci dalam manual operasional yang ditetapkan dalam PDD.

Integrated and systematic risk management principles are stipulated in the policies, procedures and risk limits, such as Risk Management Policy defined in Regulation of the Board of Directors, from risk management general policy, strategy, organization, risk management information system and risk management process.

Furthermore, the Risk Management Policy is formulated in more detail in the operational manual specified in the PDD followed by the operational manual.

## MANAJEMEN RISIKO

### Risk Management

### Pilar 3: Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pillar 3: Adequacy of Risk Identification, Measurement, Monitoring and Control Processes and Risk Management Information Systems



Identifikasi risiko dilakukan dengan cara menggabungkan dan menganalisis informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia dengan memperhatikan probabilitas timbulnya risiko beserta konsekuensinya. Implementasi kecukupan proses identifikasi risiko antara lain melalui analisis risiko bisnis dalam kegiatan Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi, kajian risiko Negara dan kajian pemetaan potensi risiko bisnis melalui riset komoditas, sektor industri atau perkembangan ekonomi wilayah tertentu. Selain itu, LPEI juga melakukan kajian risiko pendanaan yang akan dilakukan.

Pengukuran risiko ditujukan untuk mengetahui besaran risiko yang melekat pada kegiatan usaha untuk dibandingkan dengan *risk appetite* LPEI, sehingga dapat dilakukan mitigasi risiko dan ditetapkan kecukupan modal atas risiko residualnya. Besaran risiko dapat diukur secara individual, maupun portofolio. Selain itu LPEI juga melakukan *stress testing* untuk mengantisipasi kondisi yang bersifat ekstrem. Pemantauan risiko dilakukan berdasarkan perbandingan antara limit risiko yang ditetapkan dengan eksposur risiko yang dikelola. Pelaksanaan pemantauan risiko dilakukan oleh *risk taking unit*, *risk owner* dan *risk control unit* berdasarkan jenis risiko. Hasil penilaian risiko tersebut secara berkala dilaporkan kepada pemangku kepentingan.

Pengembangan sistem manajemen risiko berbasis teknologi juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur penerapan manajemen risiko termasuk tersedianya kebijakan, prosedur dan limit risiko.

Risk identification is conducted by combining and analyzing the risk information from all available sources of information by taking into account the probability of risk and consequences. Adequacy of risk identification process, among others, is carried out through business risk analysis in Financing, Guarantee and Insurance, Country risk assessment and study of potential business risk mapping through commodity research, industrial sector or economic development of certain regions. Moreover, Indonesia Eximbank also reviews the financing risk.

Risk measurement is aimed to determine the amount of risk inherent in business activity to be compared with risk appetite of Indonesia Eximbank, hence risk mitigation can be performed and capital adequacy is determined for its residual risk. The risk amount can be measured individually as well as in portfolio. In addition, LPEI also conducts stress testing to anticipate extreme conditions. Risk monitoring and control is performed on the basis of comparison between specified risk thresholds and risk exposures. Risk monitoring is conducted by risk taking unit, risk owner and risk control unit based on the type of risk. The results of the risk assessment are regularly reported to stakeholders.

A technology-based risk management system is also developed to improve the quality of risk management infrastructure including the availability of policies, procedures and risk thresholds.

## Pilar 4: Sistem Pengendalian Internal

### Pillar 4: Internal Control System



Sistem pengendalian intern LPEI dikembangkan dan diimplementasikan dengan menggunakan model *Three Lines of Defense* yang terdiri atas:

- *First line of defense* merupakan *business function* yang terdiri dari unit kerja bisnis dengan aktivitas fungsional sebagai unit kerja yang memasarkan dan memproses Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi dengan merujuk pada kebijakan, prosedur dan limit yang telah ditetapkan dan dikaji secara *joint memo* oleh unit kerja Analisa Risiko Bisnis yang bertindak sebagai *dynamic partner* dari unit bisnis serta unit kerja pendukung yang mendukung pelaksanaan kegiatan usaha LPEI.
- *Second line of defense* merupakan *risk management and compliance function* yang terdiri unit kerja Manajemen Risiko dan unit kerja yang melakukan fungsi kepatuhan. Unit-unit tersebut bersifat independen dalam memantau penerapan manajemen risiko secara keseluruhan di LPEI termasuk dalam pelaksanaan kegiatan kepatuhan.
- *Third line of defense* merupakan *internal audit function* yang terdiri dari unit kerja Audit Internal yang berfungsi melakukan pengendalian melalui evaluasi kepada *first and second lines of defense* serta memberikan laporan kepada Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana secara independen.

#### Prinsip-Prinsip Penerapan Manajemen Risiko

LPEI wajib menerapkan manajemen risiko yang efektif melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko, yang meliputi:

1. Kecukupan modal, yaitu bahwa LPEI harus mampu mengalokasikan permodalannya sesuai Risiko yang ditanggung dan senantiasa mampu memelihara tingkat kecukupan permodalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Internal control system in Indonesia Eximbank is developed and implemented using Three Lines of Defense model consisting of:

- First line of defense is business function consisting of business units with functional activities as work units which markets and processes financing, guarantee and insurance with reference to the policy, procedures and limits determined and reviewed as a joint memo by Business Risk Analysis Unit that acts as a dynamic partner of business unit and supporting units that fosters business activities.
- The Second line of defense is a risk management and compliance function consisting of Risk Management units and other units in charge of compliance functions. These units are independent in monitoring the implementation of overall risk management at Indonesia Eximbank, including in the implementation of compliance activities.
- Third line of defense is Internal Audit Unit function which consists of an Internal Audit unit that functions to control the evaluation of the first and second lines of defense and provide reports to the Executive Director and Managing Director independently.

#### Risk Management Principles

Indonesia Eximbank shall implement effective risk management by applying the following risk management principles:

1. Capital adequacy, Indonesia Eximbank shall be able to allocate its capital in accordance with its risks appetite and strives to maintain the level of capital adequacy in accordance with applicable regulations.

2. Transparansi, yaitu bahwa LPEI secara terbuka harus menyampaikan informasi yang relevan dalam proses pengambilan Risiko.
3. Independensi, yaitu bahwa manajemen LPEI harus bertindak secara profesional dan terbebas dari tekanan dan pengaruh dari pihak lain.
4. Konsolidasi, yaitu bahwa pengelolaan Risiko dilakukan secara kelembagaan dan terintegrasi serta terkonsolidasi diantara semua jenis Risiko, unit kerja dan dilakukan secara menyeluruh.
5. Proses berkelanjutan, yaitu bahwa pengelolaan Risiko harus dilakukan secara terus menerus dan senantiasa selalu dikembangkan agar lebih baik sesuai dengan kondisi bisnis dan *best practices* yang ada.
6. Akuntabilitas, yaitu suatu keadaan penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI yang dapat menjelaskan fungsi dari setiap pihak yang terkait dengan LPEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum.
7. Responsibilitas, yaitu suatu keadaan penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI yang dapat menegaskan dan menjelaskan peranan dan status dari setiap pihak yang terkait dengan LPEI untuk setiap proses pembuatan dan penerapan kebijakan di LPEI.
8. Kewajaran, yaitu bahwa LPEI harus menjaga keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak setiap pihak yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Obyektif, yaitu bahwa LPEI harus menerapkan Manajemen Risiko dengan menggunakan kriteria Risiko standar yang baku dan dianalisa secara obyektif.
10. Relevan, yaitu bahwa LPEI harus menganalisa Risiko dengan menggunakan metodologi yang relevan terhadap jenis Risiko yang dihadapi.
11. Komprehensif, yaitu bahwa LPEI harus menerapkan manajemen Risiko secara menyeluruh terhadap seluruh potensi Risiko yang ada dan tidak bersifat parsial untuk jenis-jenis Risiko tertentu.

### Struktur Manajemen Risiko

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif, organisasi dan fungsi manajemen risiko dilaksanakan melalui:

1. Kewenangan dan Tugas Dewan Direktur  
Pelaksanaan Tugas-tugas Dewan Direktur yang berkaitan dengan manajemen risiko dibantu oleh komite di bawah Dewan Direktur, yaitu Komite Pemantau Risiko.

### Risk Management Structure

For effective Risk Management process and system, the organization and function of risk management are carried out through the following:

1. Authority and duties of the Board of Directors  
The implementation of duties of the Board of Directors relating to risk management are assisted by committee under the Board of Directors, namely Risk Monitoring Committee.

2. Kewenangan dan Tugas Direktur Eksekutif  
Komite Manajemen Risiko bertugas memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif.
3. Satuan Kerja Manajemen Risiko  
Satuan ini harus independen terhadap satuan kerja operasional (*risk taking unit*) dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern. Satuan kerja Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif atau kepada Direktur Pelaksana yang ditugaskan secara khusus.

#### **Risiko-risiko yang Dihadapi dan Upaya Mitigasi**

Sebagai Lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan, LPEI terekspos pada risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, termasuk juga risiko asuransi dan risiko investasi terkait Syariah. Eksposur risiko dan upaya untuk mengelola risiko yang dilakukan antara lain:

#### **Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko ketidakmampuan nasabah atau *counterparties* melakukan pembayaran kembali kepada LPEI. Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko kredit, mitigasi risiko yang dikembangkan dan dilaksanakan LPEI antara lain:

- Pengelolaan kredit dilakukan secara 3 Pilar independen (*business unit, credit risk reviewer, and credit operation*)
- *Pre-Credit Process/ Pipeline Management*  
Pemilihan target pasar telah melalui manajemen pipeline dengan menggunakan *pre screening tools* melalui Portfolio/ Sector Guideline dan Industry Financing Reference(IFR).
- *Credit Process/ Inisiasi*  
Proses analisis kredit dilakukan secara 4-eyes principle dengan menggunakan Credit Rating dan Scoring System untuk melakukan pengukuran terhadap risiko kredit. Potensi risiko secara individual dapat diindikasikan melalui hasil peringkat (*rating*) yang digunakan sebagai alat bantu dalam mengukur kinerja keuangan debitur serta sebagai peringatan dini (*early warning*) terhadap penurunan kinerja keuangan debitur. Selain itu, proses Keputusan Kredit dilakukan dalam Komite kredit yang melibatkan fungsi bisnis dan risiko yang dilakukan secara independen oleh masing-masing anggota komite.

2. Authority and Duties of the Executive Director  
Risk Management Committee is tasked to provide recommendations to Executive Director.
3. Risk Management Unit  
This unit shall be independent from the risk taking unit and internal control function. The Risk Management unit is responsible directly to the Executive Director or to a specially assigned Managing Director.

#### **Risks and Risk Mitigation**

As an institution engaged in financial services, Indonesia Eximbank is exposed to credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, compliance risk, as well as insurance risk and investment risk related to Sharia. Risk exposures and the efforts to manage the risks include:

#### **Credit Risk**

Credit risk is the risk of borrowers or counterparties inability to make repayments to Indonesia Eximbank. To anticipate and control credit risk, the mitigation developed and implemented include:

- Credit management is carried out by 3 independent pillars (*business unit, credit risk reviewer, and credit operation*)
- *Pre-Credit Process/ Pipeline Management*  
The selection of the target market has been done through pipeline management using pre screening tools through the Portfolio/ Sector Guideline and Industry Financing Reference(IFR).
- *Credit Process/ Initiation*  
The credit analysis process is carried out through the 4-eyes principle using the Credit Rating and Scoring System to measure credit risk. The potential risk individually can be indicated through the results of the rating which is used as a tool in measuring the financial performance of the debtor and as an early warning of a decline in the debtor's financial performance. In addition, the Credit Decision process is carried out within the credit committee which involves business functions and risks that are carried out independently by each committee member.

## MANAJEMEN RISIKO

### Risk Management

- *On Disbursement*

Keputusan Komite dilaksanakan melalui verifikasi dan implementasi/ pencairan pembiayaan oleh Unit Kerja yang independen dari bisnis dan risiko (*Credit Operation*) serta pengelolaan dokumen terpisah oleh Credit Admin.

- *Post Disbursement*

Setelah pencairan, monitoring portofolio pembiayaan melalui Laporan *Portfolio Quality Report*(PQR)bulanan, melakukan EWD (*Early Warning Detection*) untuk debitur yang berpotensi mengalami pemburukan serta monitoring *Past Due Obligation* secara intensif serta pemutakhiran MIS dengan *update data core* dan *dashboard*. Monitoring juga dilakukan terhadap debitur yang mengalami penurunan rating menjadi *non investment grade*, agar tidak mengarah menjadi *Non-Performing Loan*.

- *Credit Recovery*

Untuk penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan oleh unit terpisah dan diputuskan dalam Komite Restrukturisasi, diperkuat dengan terbitnya PMK 144 terkait hapus buku pada tahun 2021.

Dengan proses yang dilakukan sejak pemilihan calon debitur hingga penyelesaian kredit bermasalah, kualitas penerapan manajemen risiko dalam risiko kredit dinilai memadai.

- Secara operasional peraturan/ kebijakan terkait kredit telah dilengkapi dengan ketentuan internal tentang Kebijakan Pembiayaan, Peraturan Direktur Eksekutif tentang Manual Pembiayaan, Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan, dan Komite Pembiayaan. Kebijakan, Manual dan Petunjuk Teknis merupakan penyempurnaan dari Kebijakan dan Manual sebelumnya sebagai salah satu upaya untuk terus meningkatkan kualitas portofolio LPEI.

- Sebagai tools tambahan dalam memitigasi risiko kredit ditetapkan Batas Minimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) yang merupakan batas maksimum pembiayaan untuk setiap individu dan grup, disamping itu BMPP digunakan sebagai salah satu upaya mengelola risiko konsentrasi pembiayaan.

- LPEI juga memiliki batas *limit inhouse* sebagai salah satu strategi pengendalian risiko konsentrasi dan menjaga tingkat konsentrasi pembiayaan

- On Disbursement

Committee decisions are carried out through verification and implementation/disbursement of financing by a work unit that is independent from business and risk (*Credit Operation*) and separate document management by Credit Admin.

- Post Disbursement

After disbursement, monitoring the financing portfolio through the monthly Portfolio Quality Report (PQR), conducting EWD (*Early Warning Detection*) for debtors who have the potential to experience deterioration as well as intensive *Past Due Obligation* monitoring and updating MIS with updated core data and dashboards. Monitoring is also carried out on borrowers who have decreased their rating to *non-investment grade*, so that they do not lead to non-performing loans.

- Credit Recovery

The handling of non-performing financing is carried out by a separate unit and decided in the Restructuring Committee, strengthened by the issuance of PMK 144 related to write-offs in 2021.

With the process carried out from the selection of prospective debtors to the settlement of non-performing loans, the risk management implementation in credit risk is considered adequate.

- Operationally, regulations/policies related to credit have been complemented by internal guidelines on Financing Policies, Executive Director Regulations on Financing Manuals, Technical Guidelines for Financing Operations, and Financing Committees. The Policies, Manuals and Technical Guidelines are improvements to the previous Policies and Manuals as an effort to continuously improve the quality of the Indonesia Eximbank portfolio.

- As an additional tool in mitigating credit risk, a Legal Financing Limit (BMPP) is set which is the maximum financing limit for each individual and group, besides that BMPP is used as an effort to manage financing concentration risk.

- Indonesia Eximbank also has an in-house limit as a strategy to control concentration risk and maintain the concentration level of financing which has been

yang selama ini telah terdiversifikasi cukup baik. Perhitungan *inhouse limit* merupakan gabungan pembiayaan, retensi sendiri penjaminan, dan retensi sendiri asuransi. Pemberian fasilitas pembiayaan dilarang melebihi *inhouse limit* (pelanggaran), namun pelampauan *inhouse limit* akibat perubahan kurs dan/atau perubahan modal LPEI akan dilakukan penurunan *outstanding* secara bertahap.

- Terkait pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), LPEI telah mengimplementasikan PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan yang merupakan adopsi dari IFRS 9 yang dikeluarkan oleh International Accounting Standard Board (IASB). PSAK 71 mengatur perubahan persyaratan terkait instrumen keuangan seperti klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai dan akuntansi lindung nilai. LPEI secara berkala melakukan evaluasi penurunan nilai atas seluruh aset keuangan kecuali aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang nilai wajarnya diukur melalui laporan laba rugi (*fair value through profit and loss*).
- Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, LPEI wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola tagihan dan/atau kewajiban yang timbul dari transaksi derivatif. Transaksi derivatif yang dilakukan hanya dapat dilaksanakan dalam rangka lindung nilai (*hedging*). Bentuk transaksi derivatif yang dilakukan LPEI umumnya dalam bentuk transaksi *spot*, *forward*, *futures*, dan *swap*. Dalam melakukan transaksi derivatif, LPEI ditetapkan memiliki maksimum transaksi untuk setiap pihak lawan sebesar 10% dari modal.

### Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko kerugian yang timbul karena adanya pergerakan faktor pasar yang meliputi suku bunga dan nilai tukar yang berlawanan dengan posisi yang dimiliki LPEI. Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko pasar antara lain dilakukan melalui:

- Pengelolaan risiko pasar di LPEI dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu *front office*, *middle office*, dan *back office*.
- Eksposur risiko pasar pada LPEI hanya pada *banking book* hal ini dikarenakan LPEI tidak melakukan transaksional pada *trading book*, sedangkan *trading*

well diversified. The calculation of the inhouse limit is a combination of financing, self-retention of guarantee, and self-retention of insurance. The provision of financing facilities is prohibited from exceeding the inhouse limit (violations), but excess of the inhouse limit due to changes in exchange rates and/or changes in Indonesia Eximbank capital will result in a gradual decrease in outstanding.

- Regarding the establishment of Allowance for Impairment Losses (CKPN), Indonesia Eximbank has implemented PSAK 71 on Financial Instruments which is an adoption of IFRS 9 issued by the International Accounting Standard Board (IASB). PSAK 71 regulates changes to requirements related to financial instruments such as classification and measurement, impairment and hedge accounting. LPEI periodically evaluates for impairment of all financial assets except for financial assets classified in the group whose fair value is measured through profit and loss.
- As stipulated in the Regulation of the Minister of Finance, Indonesia Eximbank must apply the prudential principle in managing claims and/or liabilities arising from derivative transactions. Derivative transactions can only be carried out in the context of hedging. The forms of derivative transactions carried out by Indonesia Eximbank are generally in the form of spot, forward, futures and swap transactions. In conducting derivative transactions, Indonesia Eximbank is stipulated to have a maximum transaction for each counterparty of 10% of the capital.

### Market Risk

Market risk is the risk of loss arising from movements in market factors which include interest rates and exchange rates that are contrary to the position held by Indonesia Eximbank. To anticipate and control market risk, among others, through:

- Market risk management at LPEI is divided into 3 (three) parts, namely front office, middle office, and back office.
- Market risk exposure at Indonesia Eximbank is only in the banking book, this is because LPEI does not carry out transactions in the trading book, while trading

hanya dilaksanakan dalam rangka lindung nilai (*hedging*) dan bersifat *natural hedge*.

- Dalam memitigasi eksposur risiko pasar dilakukan dengan pemantauan Posisi Devisa Neto (PDN) sesuai Limit PDN dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yaitu sebesar 20%. Pemantauan/*monitoring* eksposur risiko pasar senantiasa dipantau secara harian.
- Untuk melengkapi pemantauan risiko, dilakukan juga *gap management* dan analisa sensitivitas dengan tujuan mengelola risiko pasar sebagai akibat perubahan tingkat bunga dan nilai tukar.
- Selain hal tersebut, LPEI juga menetapkan batas transaksi (limit) khusus untuk transaksi *trading* yang mencakup *limit counterparty*, *limit currency*, *limit posisi*, *cut loss limit*, *stop loss limit*, dan *limit dealer*.
- Dalam mendukung infrastruktur pengelolaan risiko pasar, LPEI telah memiliki *Treasury Dealing System* (TDS) dan market *risk management tools*. Sedangkan untuk memperoleh data pasar diperoleh dari *Reuters*, *Bloomberg* dan sumber independen lainnya.
- Secara operasional peraturan/ kebijakan terkait pasar telah dilengkapi dengan Peraturan Dewan Direktur tentang Kebijakan Umum Tresuri LPEI, Peraturan Direktur Eksekutif terkait Limit Transaksi Tresuri dan Manual Produk Tresuri.
- Sebagai *tools* tambahan dalam pengendalian risiko pasar juga dilakukan *stress testing* risiko pasar untuk menilai ketahanan LPEI dalam menghadapi perubahan nilai tukar dan suku bunga yang ekstrem.

#### Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko ketidakmampuan memenuhi liabilitas pembayaran pada saat jatuh tempo dalam keadaan normal ataupun tertekan (*distress*). LPEI mengelola risiko likuiditas agar dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, serta dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal.

is only carried out in the context of hedging and is natural hedge.

- Mitigating market risk exposure is carried out by monitoring the Net Open Position(NOP)in accordance with the NOP Limit in the Regulation of the Minister of Finance, which is 20%. monitoring of market risk exposure is monitored on a daily basis.
- To complement risk monitoring, gap management and sensitivity analysis are also carried out with the aim of managing market risk as a result of changes in interest rates and exchange rates.
- In addition to this, Indonesia Eximbank also stipulates special transaction limits (limits) for trading transactions which include counterparty limits, currency limits, position limits, cut loss limits, stop loss limits, and dealer limits.
- In supporting market risk management infrastructure, Indonesia Eximbank has a Treasury Dealing System (TDS) and market risk management tools. Meanwhile, market data are obtained from Reuters, Bloomberg and other independent sources.
- Operationally, regulations/policies related to the market have been complemented by the Board of Directors' Regulation on the Indonesia Eximbank Treasury General Policy, the Executive Director's Regulation on Treasury Transaction Limits and the Treasury Product Manual.
- As additional tools in controlling market risk, market risk stress testing is also carried out to assess Indonesia Eximbank resilience in the face of extreme changes in exchange rates and interest rates.

#### Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk of not being able to meet payment obligations at maturity under normal conditions or under stress. Indonesia Eximbank manages liquidity risk in order to fulfill every agreed financial obligation in a timely manner, as well as to maintain an adequate and optimal level of liquidity.

Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko likuiditas antara lain dilakukan melalui:

- Pengelolaan risiko Likuiditas melalui Assets and Liabilities Committee (ALCO) untuk ketersediaan atas keseluruhan reserves yang dipantau secara harian, mingguan, dan bulanan.
- Penetapan dan pemantauan limit dilakukan secara berkala oleh Unit Kerja Tresuri.
- Unit Kerja Tresuri melakukan pengelolaan aset yang aman, likuid dan menguntungkan dalam jumlah yang cukup dan dalam komposisi yang disesuaikan dengan karakteristik bisnis dan profil risiko likuiditas.
- Selain melalui ALCO, LPEI juga menyusun skenario likuiditas berdasarkan kondisi yang berbeda (normal, tidak normal, ekstrem) dan proyeksi arus kas harian serta profil maturitas bulanan sehingga dapat ditetapkan *contingency funding plan* untuk mengantisipasi terjadinya kondisi ekstrem dan menetapkan strategi yang sesuai dan akurat dalam mengantisipasi kondisi likuiditas di masa mendatang.
- LPEI dapat melakukan penempatan dana dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan Pemerintah; Sertifikat Bank Indonesia; surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah negara donor; surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan multilateral; simpanan dalam bentuk rupiah atau valuta asing pada Bank Indonesia; simpanan pada bank dalam negeri dan/atau bank luar negeri; dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara dengan predikat AAA.
- Selain mitigasi risiko likuiditas yang dilakukan, LPEI juga memiliki sovereign status yang membuat risiko inheren LPEI lebih rendah dibandingkan perbankan umumnya.

#### **Risiko Operasional**

Risiko operasional antara lain disebabkan ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsi proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kendala eksternal. Risiko operasional sangat berhubungan dengan kelengkapan dan tingkat efektivitas dari sistem, prosedur dan kontrol dalam lingkungan kegiatan usaha serta kemampuan sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi kinerja

Anticipating and controlling liquidity risk, among others, is carried out through:

- Liquidity risk management through the Assets and Liabilities Committee (ALCO) for the availability of all reserves that are monitored on a daily, weekly and monthly basis.
- Limit setting and monitoring is carried out periodically by the Treasury Unit.
- The Treasury Working Unit manages assets that are safe, liquid and profitable in sufficient quantities and in a composition that is adjusted to the business characteristics and liquidity risk profile.
- Apart from ALCO, Indonesia Eximbank also prepares liquidity scenarios based on different conditions (normal, abnormal, extreme) and daily cash flow projections and monthly maturity profiles so that a contingency funding plan can be established to anticipate extreme conditions and determine appropriate and accurate strategies in anticipate future liquidity conditions.
- Indonesia Eximbank may place funds in the form of securities issued by the Government; Bank Indonesia Certificate; securities issued by the government of the donor country; securities issued by multilateral financial institutions; deposits in rupiah or foreign currency with Bank Indonesia; deposits with domestic banks and/or foreign banks; and/or securities issued by State-Owned Enterprises with AAA rating.
- In addition to mitigating liquidity risk, Indonesia Eximbank also has a sovereign status which makes the Institution's inherent risk lower compared to commercial banks.

#### **Operational Risk**

Operational risk is caused by, among others, inadequate and/or malfunctioning internal processes, human error, system failure, or external events. Operational risk is closely related to the completeness and level of effectiveness of the systems, procedures and controls in the business environment as well as the capabilities of human resources that may affect Indonesia Eximbank's business performance. The implementation

usaha LPEI. Penerapan manajemen risiko operasional dilakukan terhadap setiap aktivitas yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko yang akurat serta komprehensif.

Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko operasional antara lain dilakukan melalui:

- Saat ini *Risk & Control Self Assessment* (RCSA) digunakan sebagai alat pengendalian risiko operasional. Implementasi RCSA dilakukan secara bertahap yang dimulai dari identifikasi risiko agar mendapatkan *risk register* yang terkini dan komprehensif. Pengendalian risiko operasional dilakukan terhadap faktor-faktor penyebab risiko operasional yang mencakup organisasi, sumber daya manusia, data dan informasi, teknologi informasi, proses bisnis, dan faktor eksternal.
- Pengukuran risiko operasional juga dilakukan dalam Profil Risiko Operasional.
- Salah satu tools dalam meminimalisir risiko operasional dalam kondisi darurat atau bencana yang diakibatkan oleh faktor alam atau perbuatan manusia yang mengganggu kegiatan usaha yaitu dengan implementasi *Business Continuity Plan/BCP*.
- Saat ini LPEI terus menyempurnakan pendekatan dan framework yang digunakan dalam manajemen risiko operasional, salah satunya adalah dengan pendekatan menggunakan metode *workshop* secara periodik dalam mengidentifikasi risiko.

#### **Risiko Hukum**

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena adanya ketidadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai.

Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko hukum antara lain dilakukan melalui:

- Eksposur Risiko Hukum terkait kelemahan atas perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian bagi LPEI dikendalikan dengan *review* atas perjanjian dengan pihak ketiga yang dilakukan secara berkala.

of operational risk management is carried out on every activity in an integrated manner within an accurate and comprehensive risk management system and process.

To anticipate and control operational risk, among others, through:

- Currently, Risk & Control Self Assessment (RCSA) is used as a tool for controlling operational risk. The implementation of RCSA is carried out in stages, starting with risk identification in order to obtain an up-to-date and comprehensive risk register. Operational risk control is carried out on the factors causing operational risk which include organization, human resources, data and information, information technology, business processes, and external factors.
- Operational risk measurement is also carried out in the Operational Risk Profile.
- One of the tools to minimize operational risk in emergency or disaster conditions caused by natural factors or human actions that interfere with business activities is the implementation of the Business Continuity Plan/BCP.
- Currently Indonesia Eximbank continues to refine the approach and framework used in operational risk management, one of which is the approach using the periodic workshop method in identifying risks.

#### **Legal Risk**

Legal risk is the risk that arises as a result of lawsuits and/or the weakness of the juridical aspect. This risk arises, among others, due to the absence of supporting laws and regulations or the weakness of the engagement, such as non-fulfillment of the conditions of a valid contract or inadequate collateral.

To anticipate and control legal risks, among others, through:

- Legal Risk Exposure related to weaknesses in agreements that may cause losses to Indonesia Eximbank is controlled by periodic reviews of agreements with third parties.

- Pengendalian risiko hukum sudah ditata dengan baik dimana setiap aktivitas bisnis bila dipandang perlu bisa meminta pendapat/ opini hukum. Pemberian opini hukum atas perjanjian kerja sama antara LPEI dengan pihak lain untuk melindungi kepentingan hukum Lembaga.
- Selain hal tersebut, pembentukan Divisi Hukum guna mengendalikan permasalahan hukum secara corporate wide dan pembentukan Divisi Litigasi guna mengendalikan permasalahan hukum debitur.
- Pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan didukung oleh dokumen hukum yang memadai dan dalam hal penanganan perkara-perkara hukum serta pemantauan proses penanganannya dilakukan secara langsung ataupun bekerja sama dengan konsultan hukum.
- Legal risk control has been well laid out where every business activity if deemed necessary can request legal opinion. Providing legal opinion on the agreement between Indonesia Eximbank and other parties to protect the legal interests of the Institution.
- In addition to this, the establishment of a Legal Division to control legal issues on a corporate wide basis and the establishment of a Litigation Division to control debtor's legal problems.
- Implementation of business activities in accordance with the provisions of the applicable laws and supported by adequate legal documents and in terms of handling legal cases and monitoring the handling process is carried out directly or in collaboration with legal consultants.

### Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* (antara lain: regulator, nasabah, masyarakat, manajemen dan pegawai) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap LPEI. Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko reputasi antara lain dilakukan melalui:

- Adanya unit kerja khusus yang menangani hubungan dengan stakeholder melalui *Corporate Secretary*.
- Pengelolaan risiko reputasi akibat keluhan nasabah telah didukung dengan adanya kebijakan dan SOP Penanganan Keluhan Nasabah beserta unit yang berwenang untuk menangani keluhan nasabah.
- LPEI melakukan pengukuran dan pemantauan atas jumlah komplain dan tingkat penyelesaian *complain* secara berkala.
- LPEI juga bekerjasama dengan media baik cetak dan elektronik untuk menginformasikan kepada masyarakat sebagai sosialisasi akan kegiatan usaha LPEI serta melakukan media monitoring sebagai bentuk *early warning system* terhadap pemberitaan dengan tonasi negatif, netral dan positif dengan menggunakan kata kunci tertentu. Semua pemberitaan mengenai LPEI diinventarisasi dan disampaikan kepada pimpinan secara harian. Monitoring dilakukan dengan Analisa Pemberitaan

### Reputation Risk

Reputation risk is the risk due to a decrease in the level of stakeholder trust (among others: regulators, customers, the public, management and employees) originating from negative perceptions towards Indonesia Eximbank. To anticipate and control reputation risk, among others, through:

- There is a special work unit that handles relations with stakeholders through the Corporate Secretary.
- Management of reputation risk due to customer complaints has been supported by the existence of policies and SOPs for Handling Customer Complaints and the units authorized to handle customer complaints.
- Indonesia Eximbank conducts measurement and monitoring of the number of complaints and the level of complaint resolution on a regular basis.
- Indonesia Eximbank also cooperates with both print and electronic media to inform the public as a socialization of Indonesia Eximbank's business activities and conduct media monitoring as a form of early warning system for news with negative, neutral and positive tones using certain keywords. All news regarding Indonesia Eximbank are inventoried and submitted to the leadership on a daily basis. Monitoring is carried out by means of Media Reporting Analysis, namely by statistically summarizing the

Media, yaitu dengan merangkum secara statistik pemberitaan mengenai LPEI yang bersumber dari media cetak maupun portal berita *online*.

- Selain hal tersebut LPEI melaksanakan prinsip tata kelola yang baik seperti transparansi pelaporan dan koordinasi dengan Pemerintah maupun Dewan Legislatif dan pelaksanaan program-program sosialisasi serta pelatihan kepada pelaku ekspor untuk meningkatkan awareness dan reputasi LPEI.
- Disamping itu LPEI juga telah memiliki konsep Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebagai kontrol. LPEI memastikan kecukupan kebijakan, sistem, dan prosedur dengan melakukan kaji ulang yang dilakukan oleh unit kerja independen berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada unit kerja *operasional/bisnis/support*. Manajemen merespons setiap hasil pemeriksaan audit dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan skala prioritas.

#### Risiko Stratejik

Risiko Stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Pembuatan perencanaan kerja LPEI dalam bentuk rencana kerja tahunan dan menengah lima tahunan.

Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko strategis antara lain dilakukan melalui:

- Eksposur risiko stratejik LPEI terdiri dari proses perumusan stratejik dan pelaksanaan stratejik.
- Dalam hal perumusan strategis, pengendalian risiko dilakukan dengan menggunakan metode *Balence Scorecard* dengan pendekatan campuran antara bottom up dan top down serta penetapan target dan strategi dipastikan telah mempertimbangkan seluruh risiko.
- Pengukuran risiko dilakukan melalui penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi salah satu alat ukur dalam pelaksanaan mandat LPEI. Pelaksanaan pengukuran risiko strategis tersebut melalui analisa pencapaian target dibandingkan dengan realisasi secara periodik dan hal tersebut news about Indonesia Eximbank originated from print media as well as online news portals.
- In addition to this, Indonesia Eximbank implements good governance principles such as transparency in reporting and coordination with the Government and the Legislative Council and the implementation of outreach programs and training for export actors to increase Indonesia Eximbank's awareness and reputation.
- Besides that, Indonesia Eximbank also has the concept of an Internal Control System (SPI) as a control. LPEI ensures the adequacy of policies, systems and procedures by conducting a review conducted by an independent work unit based on the results of an examination conducted by the operational/ business/ support unit. Management responds to each audit examination result and follows up on the results of the examination according to a priority scale.

#### Strategic Risk

Strategic risk is the risk due to inaccuracy in decision making and/or implementation of a strategic decision and failure to anticipate changes in the business environment. Preparation of Indonesia Eximbank business plans in the form of annual and intermediate five-year plans.

To anticipate and control strategic risk, among others, through:

- Indonesia Eximbank's strategic risk exposure consists of the process of strategic formulation and strategic implementation.
- In terms of strategic formulation, risk control is carried out using the Balanced Scorecard method with a mixed bottom up and top-down approach and ensure that targets and strategies setting have considered all risks.
- Risk measurement is carried out through the assessment of Key Performance Indicators (KPI) which is one of the measuring tools in the implementation of the Indonesia Eximbank mandate. The implementation of the strategic risk measurement is carried out through an analysis of the

di monitor melalui Laporan Realisasi Kinerja secara triwulan.

- Terkait risiko dalam penyusunan rencana pengembangan produk dan atau aktivitas baru, penetapan pasar baru, serta kegiatan usaha di kelola dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.

#### **Risiko Kepatuhan**

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat LPEI tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko kepatuhan antara lain dilakukan melalui:

- Eksposur risiko kepatuhan terdapat dalam pemenuhan aspek kepatuhan dalam proses bisnis yang dikendalikan melalui pemberian opini kepatuhan atas rancangan kebijakan atau ketentuan atas pengembangan produk dan/atau aktivitas baru.
- Pemantauan risiko kepatuhan melalui implementasi Pakta Integritas dan pengelolaan dan sosialisasi kebijakan Whistle Blowing System (WBS).
- Untuk melengkapi pengendalian risiko juga dilakukan penerapan Uji Kepatuhan (melalui prosedur secara berkala), Program APU & PPT, dan pengendalian produk baru dan pelaporan serta monitoring penyampaian laporan-laporan secara berkala kepada pihak internal dan eksternal dilakukan tepat waktu.
- Selain itu kajian terhadap kebijakan regulator yang terdampak kepada LPEI dan adanya koordinasi antar unit dalam rangka memastikan kebijakan internal LPEI telah sesuai dengan peraturan regulator.
- Secara operasional telah tersedianya Kebijakan dan Prosedur tentang Fungsi Kepatuhan di LPEI.

#### **Risiko Asuransi**

Potensi kegagalan yang dihadapi LPEI dalam memenuhi kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi dana/ penanganan klaim.

achievement of targets compared to the realization on a periodic basis and this is monitored through a quarterly Performance Realization Report.

- Related to risks in the preparation of plans for developing new products and or activities, establishing new markets, and managing business activities taking into account the available resources.

#### **Compliance Risk**

Compliance risk is the risk that arises as a result of Indonesia Eximbank not complying with and/or not implementing applicable laws and regulations.

To anticipate and control compliance risk, among others, through:

- Exposure to compliance risk is in the fulfillment of compliance aspects in controlled business processes through the provision of compliance opinions on the draft policies or provisions for the development of new products and/or activities.
- Monitoring compliance risk through the implementation of the Integrity Pact and the management and dissemination of the Whistle Blowing System (WBS) policy.
- To complement risk control, Compliance Testing is also carried out (through periodic procedures), APU & PPT Program, and control of new products and reporting as well as monitoring the submission of periodic reports to internal and external parties carried out on time.
- In addition, a review of the affected regulatory policies to LPEI and coordination between units in order to ensure that LPEI's internal policies are in accordance with regulatory regulations.
- Operationally, there are Policies and Procedures on the Compliance Function at Indonesia Eximbank.

#### **Insurance Risk**

The potential failure faced by Indonesia Eximbank in fulfilling obligations to the insured and policy holders as a result of the inadequacy of the risk selection process (*underwriting*), premium setting (*pricing*), use of reinsurance funds/claim handling.

Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko asuransi antara lain dilakukan melalui:

- Pada tataran eksposur risiko secara portofolio, eksposur risiko asuransi senantiasa dipantau dan dilaporkan secara berkala kepada Manajemen antara lain melalui penyampaian laporan manajemen atas eksposur risiko utama, *Portfolio Quality Report* dan pembahasan melalui forum secara berkala.
- Dalam mendukung infrastruktur pengelolaan risiko asuransi, LPEI telah memiliki *Sistem Internal Credit Risk Rating* dan CARE System sebagai *early warning system*.
- Secara operasional peraturan/ kebijakan terkait risiko asuransi telah memiliki ketentuan internal tentang Kebijakan Asuransi, Peraturan Direktur Eksekutif tentang Manual Asuransi, dan Komite.
- Sebagai tambahan dalam pengendalian risiko asuransi yaitu dengan menjaga komposisi tingkat konsentrasi pertanggungan asuransi pada level sesuai limit yang telah ditentukan dan Kecukupan pencadangan klaim kegiatan asuransi sesuai dengan pembentukan Retensi Sendiri tidak melebihi 2x modal disetor.

#### RISIKO-RISIKO PENTING YANG DIHADAPI LEMBAGA SELAMA TAHUN 2021

Selama tahun 2021, risiko penting yang dihadapi Lembaga terutama adalah risiko kredit, dimana *Non Performing Loan* relatif masih tinggi, di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang secara langsung dan tidak langsung juga berdampak pada kegiatan usaha debitur LPEI. Namun demikian pada tahun 2021 LPEI berhasil menurunkan NPL cukup signifikan melalui upaya-upaya restrukturisasi dan penyelamatan kredit yang didukung oleh pelaksanaan monitoring ketat atas kondisi debitur secara periodik. Disamping hal tersebut risiko hukum menjadi perhatian dengan adanya kasus hukum di Kejaksaan dan tingginya kasus PKPU dan Kepailitan terhadap debitur LPEI, namun kasus hukum dapat termitigasi dengan baik melalui pembentukan tim untuk pendampingan dan komunikasi intensif dengan Kejaksaan, sedangkan kasus PKPU ditangani secara intensif oleh Divisi Litigasi.

To anticipate and control insurance risk, among others, was done through:

- At the level of risk exposure on a portfolio basis, insurance risk exposure is regularly monitored and reported to Management, among others through the submission of management reports on major risk exposures, Portfolio Quality Reports and discussions through periodic forums.
- In supporting the insurance risk management infrastructure, LPEI has an Internal Credit Risk Rating System and a CARE System as an early warning system.
- Operationally, regulations/policies related to insurance risk have internal provisions regarding Insurance Policies, Executive Director Regulations on Insurance Manuals, and Committees.
- In addition to controlling insurance risk, including by maintaining the composition of the concentration level of insurance coverage at the level according to the predetermined limit and Sufficient reserve for insurance claims in accordance with the formation of Self Retention does not exceed 2x paid-in capital.

#### IMPORTANT RISKS FACED BY THE COMPANY IN 2021

During 2021, the important risk faced by the Institution is credit risk, where Non-Performing Loans are still relatively high, amidst the COVID-19 pandemic, which directly and indirectly also impacts the business activities of Indonesia Eximbank borrowers. However, in 2021 Indonesia Eximbank succeeded in reducing the NPL quite significantly through restructuring and credit rescue efforts supported by strict monitoring of the condition of debtors on a regular basis. Additionally, legal risks are a concern with the existence of legal cases at the Prosecutor's Office and the high number of PKPU and Bankruptcy cases against Indonesia Eximbank borrowers, however legal cases can be properly mitigated through the formation of a team for intensive assistance and communication with the Prosecutor's Office, while PKPU cases are handled intensively by the Litigation Division.

## **LANGKAH-LANGKAH DAN MITIGASI RISIKO SEHUBUNGAN PANDEMI COVID-19**

Sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang berdampak pada kondisi perekonomian baik global maupun lokal yang secara langsung juga berdampak pada aktivitas bisnis Lembaga, maka manajemen memfokuskan kegiatan yang merupakan mandat LPEI dengan tetap memperhatikan mitigasi risiko-risiko utama sehingga potensi kerugian yang dihadapi sedapat mungkin dapat diminimalisasi demi kelangsungan usaha Lembaga, mencakup antara lain sebagai berikut:

- a. Stress Testing untuk mengantisipasi kondisi terburuk, dilakukan untuk mengetahui kekuatan *balance sheet* dan *cash flow* dengan memperhatikan beberapa faktor diantaranya epidemiologi COVID-19, makro ekonomi, kondisi sektoral, kondisi debitur baik bagi debitur pembiayaan konvensional maupun syariah serta tekanan terhadap *balance sheet*; analisa berdasarkan segmen korporasi dan UKM secara bottom up untuk mengetahui kekuatan *cash flow* masing-masing debitur guna menghindari potensi *moral hazard*. Stress Testing terkait pandemi dilakukan pada Bulan Desember 2020, Maret, Juni, dan Juli 2021.
- b. Penyesuaian kebijakan manajemen risiko dengan kondisi pandemi COVID-19 seperti kebijakan restrukturisasi debitur terdampak COVID-19 yang sejalan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, kebijakan perpanjangan jangka waktu sementara dan kebijakan review pencairan fasilitas.
- c. Rapid Test/ PCR Test dan pemberian vitamin bagi karyawan.
- d. Penyemprotan disinfektan di ruangan kerja karyawan
- e. Pengaturan ketentuan *Work from Home* serta kelangsungan operasional sistem teknologi dan informasi.
- f. Menjalankan *Business Continuity Plan* atau BCP yang dilengkapi dengan *Person In Charge* atau (PIC) dari masing-masing fungsi yang terkait. BCP merupakan bagian dari implementasi crisis management yang dilaporkan kepada Dewan Direktur yang mana pada akhirnya menjadi bagian dari laporan Dewan Direktur ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

## **STEPS AND RISK MITIGATION IN RELATION WITH THE COVID-19 PANDEMIC**

Concerning with the COVID-19 pandemic impacting both global and local economic conditions which also directly impact the Institution's business activities, management focuses on activities that are mandated by Indonesia Eximbank while closely paying attention to mitigating the main risks so that the potential losses faced can be minimized as much as possible for the continuity of the Institution's business, including among others the following:

- a. Stress Testing to anticipate the worst conditions, is carried out to determine the strength of the balance sheet and cash flow by taking into account several factors including the epidemiology of COVID-19, macroeconomic conditions, sectoral conditions, debtor conditions for both conventional and sharia financing debtors and pressure on the balance sheet; analysis based on the corporate and SME segments on a bottom-up basis to determine the cash flow strength of each debtor in order to avoid potential moral hazard. Stress testing related to the pandemic was carried out in December 2020, March, June, and July 2021.
- b. Adjustment of risk management policies to the conditions of the COVID-19 pandemic, such as restructuring policies for debtors affected by COVID-19 in line with Financial Services Authority regulations, policy for extension of temporary period and policy for reviewing facility disbursement.
- c. Rapid Test/ PCR Test and administration of vitamins for employees.
- d. Disinfectant spraying in the employee's work area
- e. Setting the provisions of Work from Home as well as the continuity of the operation of technology and information systems.
- f. Performing a Business Continuity Plan or BCP equipped with Person in Charge or (PIC) from each related function. BCP is part of the implementation of crisis management which is reported to the Board of Directors which in turn becomes part of the report of the Board of Directors to the Directorate General of State Assets (DJKN).

## MANAJEMEN RISIKO Risk Management

### PERNYATAAN KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO DI LPEI

Pernyataan Direktur Eksekutif dan/atau Dewan Direksi atau Komite Audit atas kecukupan sistem manajemen risiko di LPEI telah tercermin dan merupakan bagian dari Laporan Profil Risiko lembaga yang disampaikan secara berkala oleh Direktur Eksekutif kepada Otoritas Jasa Keuangan, khususnya terkait penilaian atas Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yang meliputi 4 aspek sebagai berikut:

1. Aspek I, Tata Kelola Risiko;
2. Aspek II, Kerangka Manajemen Risiko;
3. Aspek III, Proses Manajemen Risiko, Kecukupan Sumber Daya Manusia, dan Kecukupan Sistem Informasi Manajemen; dan
4. Aspek IV, Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko, dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha LPEI.

Adapun hasil penilaian atas Kualitas Penerapan Manajemen Risiko secara komposit berada pada tingkat "Fair" yaitu Kualitas Penerapan Manajemen Risiko secara komposit cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, masih terdapat hal yang membutuhkan perbaikan dan perhatian manajemen.

Analisis penilaian yang dilakukan tidak hanya secara individual tetapi juga secara keseluruhan dengan memperhatikan faktor penyebab (*root cause analysis*), keterkaitan antar rasio (*linkage analysis*) dan dampak suatu rasio terhadap rasio lain atau kinerja LPEI (*impact analysis*) dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas risiko yang dinilai dalam menentukan peringkat profil risiko. Selain hal tersebut, penilaian rasio juga dilakukan dengan memperhatikan *benchmark* pada industri / peer group.

### STATEMENT OF ADEQUACY OF RISK MANAGEMENT SYSTEM AT INDONESIA EXIMBANK

Statements by the Executive Director and/or the Board of Directors or the Audit Committee on the adequacy of risk management system at Indonesia Eximbank are reflected and as part of the institution's Risk Profile Report submitted periodically by the Executive Director to the Financial Services Authority, particularly regarding the assessment of the Quality of Risk Management Implementation (KPMR) which includes the following 4 aspects:

1. Aspect I, Risk Governance;
2. Aspect II, Risk Management Framework;
3. Aspect III, Risk Management Process, Adequacy of Human Resources, and Adequacy of Management Information Systems; and
4. Aspect IV, Adequacy of Risk Control System, taking into account the characteristics and complexity of the Indonesia Eximbank business.

The results the Risk Management Implementation Quality composite assessment are at the "Fair" level, which in a composite manner is adequate. Even though the minimum requirements are met, there are still subjects that need improvement and management attention.

Assessment analysis is carried out not only individually but also as a whole by taking into account the root cause analysis, linkage analysis and the impact of a ratio on other ratios or LPEI performance (*impact analysis*) taking into account the significance and materiality of the risks involved assessed in determining the risk profile rating. In addition to this, the ratio assessment is also carried out by taking into account the benchmarks in the industry / peer group.



# SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

## Internal Control System

Sistem Pengendalian Internal di LPEI bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan kinerja Lembaga, meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan dan menjamin efektivitas dan efisiensi operasional, kehandalan pelaporan keuangan, kelayakan pengendalian operasional, maupun finansial serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

### Kerangka Sistem Pengendalian Internal

Kajian atas efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal dilakukan secara berkala setiap tahun, dengan menggunakan parameter yang diadopsi dari *Framework Pengendalian Internal* dari organisasi COSO (*Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission*) yaitu:

- a. Lingkungan Pengendalian;
- b. Penilaian Risiko;
- c. Aktivitas Pengendalian;
- d. Informasi dan Komunikasi;
- e. Pemantauan.

### Pengendalian Keuangan dan Operasional, serta Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan lainnya

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan rencana, metode, prosedur, dan kebijakan yang didesain oleh manajemen sebagai mekanisme pengawasan yang berkesinambungan untuk memberikan jaminan yang memadai atas terlaksananya:

- a. Kegiatan operasional yang efisien dan efektif dalam setiap kegiatan,
- b. Laporan keuangan yang handal, dan
- c. Kepatuhan terhadap undang-undang, kebijakan dan peraturan yang berlaku.
- d. Budaya Risiko (*Risk Culture*) pada organisasi LPEI secara menyeluruh.

Sebagai salah satu pelaksanaan pilar penerapan manajemen risiko, LPEI telah menjalankan SPI secara efektif dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi LPEI, serta memastikan terdapatnya:

1. Kegiatan usaha LPEI yang berjalan secara efisien dan efektif dalam penggunaan aset, maupun sumber daya lainnya dalam rangka melindungi LPEI dari risiko kerugian.

The Internal Control System in Indonesia Eximbank aims to support the achievement of the Company's performance objectives, improve value to the stakeholders and assure effectiveness and efficiency of operation, reliability of financial reports, sufficiency of financial and operational controls, and compliance with prevailing laws and regulations.

### Internal Control System Framework

Review on the Internal Control System effectiveness is carried out regularly every year, using parameters adopted from the Internal Control Framework of COSO (*Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission*) organization, which include:

- a. Control Environment;
- b. Risk Assessment;
- c. Control Activities;
- d. Information and Communication;
- e. Monitoring.

### Financial and operational control, as well as compliance with other laws and regulations

The Internal Control System (ICS) is a plan, method, procedure, and policy designed by management as a continuous monitoring mechanism to provide adequate guarantee for the implementation of:

- a. Efficient and effective operational activities in every activity,
- b. Reliable financial statements, and
- c. Compliance with applicable laws, policies and regulations.
- d. Comprehensive Risk Culture in Indonesia Eximbank.

As one of the pillars of risk management implementation, Indonesia Eximbank has implemented effective ICS in carrying out business and operational activities at all levels of the Indonesia Eximbank organization, and ensuring that:

1. Indonesia Eximbank's efficient and effective business activities in the use of assets, and other resources in order to protect Indonesia Eximbank from risk of losses.

## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control System

- 2. Informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap, tepat waktu, dan relevan, yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3. Kesesuaian pelaksanaan atas seluruh kegiatan usaha LPEI dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, otoritas pengawas, maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur internal; dan
- 4. Budaya risiko yang efektif pada organisasi secara menyeluruhan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di LPEI secara berkesinambungan.

### Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

LPEI melalui Internal Audit melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal. Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka terlaksananya kegiatan pemantauan yang efektif sekurang-kurangnya adalah:

- a. Memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik dalam organisasi LPEI;
- b. Menetapkan satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk memantau efektivitas pengendalian internal;
- c. Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan yang didasarkan pada risiko yang melekat pada LPEI dan sifat/frekuensi perubahan yang terjadi dalam kegiatan operasional;
- d. Mengintegrasikan Sistem Pengendalian Internal ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan rutin seperti jurnal pembukuan, *management review* dan laporan mengenai persetujuan atas eksepsi/penyimpangan dari kebijakan dan prosedur yang ditetapkan (*justifikasi* dan *irregularities*) yang selanjutnya dilakukan kajian ulang;
- e. Melakukan kajian ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi dari satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan;
- f. Menetapkan informasi/feedback dalam suatu format dan frekuensi yang tepat.

Tahap prosedur pelaksanaan penilaian atas efektivitas sistem Pengendalian Internal meliputi kegiatan:

- 2. Financial, management information that is accurate, complete, timely, and relevant, required to make the right decisions and can be accounted for.
- 3. Compliance with the implementation of all Indonesia Eximbank's business activities with the stipulations and prevailing laws and regulations, both issued by the Government, the supervisory authority, as well as internal policies, regulations and procedures; and
- 4. An effective risk culture in the organization as a whole to identify weaknesses and assess deviations early and reassess the fairness of existing policies and procedures in Indonesia Eximbank.

### Overview of the Internal Control System Effectiveness

Indonesia Eximbank through Internal Audit conducts continuous monitoring of the overall effectiveness of internal control. The steps taken to carry out effective monitoring activities include:

- a. Ensuring that the monitoring function has been clearly defined and well-structured within Indonesia Eximbank organization;
- b. Establish work units/employees assigned to monitor the effectiveness of internal control;
- c. Determine the appropriate frequency for monitoring activities based on the risks inherent in Indonesia Eximbank and the nature/frequency of changes that occur in operational activities;
- d. Integrating the Internal Control System into operational activities and providing routine reports such as bookkeeping journals, management reviews and reports on approval of exceptions/ deviations from established policies and procedures (*justifications* and *irregularities*) which will then be reviewed;
- e. Reviewing the documentation and evaluation results of the work unit/employee assigned to carry out monitoring;
- f. Establish information/feedback in an appropriate format and frequency.

The stages of the procedure for carrying out an assessment of the effectiveness of the Internal Control system include the following activities:

## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control System

1. Proses Self Assesment yang dilakukan melalui media web based, dimana kuesioner harus diisi seluruhnya. Kepala Divisi bertanggung jawab atas pengisian kuesioner tersebut dengan melakukan otorisasi atas finalisasi pengisian kuesioner.
2. Proses Review dilakukan oleh Divisi Audit Internal.
3. Prosedur kompilasi dan dokumentasi hasil Penilaian Efektivitas Sistem Pengendalian Internal.
4. Evaluasi atas *framework* penilaian atas sistem pengendalian internal

Berdasarkan hasil penilaian penerapan Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan secara self assesment, LPEI mendapatkan nilai "4,11" yang menunjukkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal di LPEI termasuk dalam kategori "Baik".

- 1 The Self-Assessment process is carried out through web-based media, where the questionnaire must be filled incompletely. The Head of Division is responsible for filling out the questionnaire by authorizing the finalization of filling out the questionnaire.
- 2 The review process is carried out by the Internal Audit Division.
- 3 Procedure for compiling and documenting the results of the Internal Control System Effectiveness Assessment.
- 4 Evaluation of the assessment framework for the internal control system

Based on the results of the self-assessment of the implementation of the Internal Control System, Indonesia Eximbank received a score of "4.11" which indicates that the implementation of the Internal Control System at Indonesia Eximbank is in the "Good" category.

## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control System

No	Para Pihak The parties	Nomor Perkara Case Number	Pokok perkara/ gugatan Subject matter / lawsuit	Tingkat Perkara Case Stage	Status penyelesaian perkara / gugatan Status of settlement of cases / lawsuits	Pengaruhnya terhadap kondisi LPEI The effect on LPEI condition
1	Penggugat: Johanes Irwanto Putro Penggugat Intervensi: LPEI Tergugat I: Newin Nugroho Tergugat II: PT Petro Energy Tergugat III: Merry Susanti Sirail, SH. Tergugat IV: Irma Bonita, SH. Turut Tergugat: BPN Jakarta Pusat  Plaintiff: Johanes Irwanto Putro Plaintiff for Intervention: LPEI Defendant I: Newin Nugroho Defendant II: PT Petro Energy Defendant III: Merry Susanti Sirail, SH. Defendant IV: Irma Bonita, SH. Co-Defendant: Central Jakarta BPN	Perkara No.129/pdt.G/2020/Pn.Jkt.Pst  Case No.129/pdt.G/2020/Pn.Jkt.Pst	Pembatalan balik nama sebagai konsekuensi hukum atas jual beli atas asset yang menjadi jaminan PT Petro Energy di LPEI  Cancellation of title transfer as a legal consequence of the sale and purchase of assets that are guaranteed by PT Petro Energy at LPEI	Pengadilan Tingkat Pertama (PN Jakarta Pusat)  First degree court (Central Jakarta District Court)	Gugatan ditolak (belum ada pernyataan banding dari Penggugat)  The lawsuit is rejected (there has been no statement of appeal from the Plaintiff)	Mengamankan kepentingan LPEI atas asset jaminan  Securing LPEI's interests on collateral assets
2	Penggugat: Aris Munandar Tergugat I: PT Bank KB Bukopin, Tbk Tergugat II: LPEI Tergugat III: PT Tunas Muda Jaya (dalam Pailit) Tergugat IV: Febby Farial Tergugat V: Chairil Nurisky Tjaja  Plaintiff: Aris Munandar Defendant I: PT Bank KB Bukopin, Tbk Defendant II: LPEI Defendant III: PT Tunas Muda Jaya (in Bankruptcy) Defendant IV: Febby Farial Defendant V: Chairil Nurisky Tjaja	Perkara No.734/pdt.G/2020/Pn.Jkt.Sel  Case No. 734/pdt.G/2020/Pn.Jkt.Sel	Roya atau Penghapusan Hak Tanggungan atas asset milik Aris Munandar yang menjadi jaminan PT Tunas Muda Jaya di LPEI dan Bukopin  Roya or Elimination of Mortgage on assets owned by Aris Munandar which are guaranteed by PT Tunas Muda Jaya at LPEI and Bukopin	Pengadilan Tingkat Pertama (PN Jakarta Selatan)  First degree court (South Jakarta District Court)	Gugatan ditolak (belum ada pernyataan banding dari Penggugat)  The lawsuit is rejected (there has been no statement of appeal from the Plaintiff)	Mengamankan kepentingan LPEI atas asset jaminan  Securing LPEI's interests on collateral assets
3	Penggugat: PT Jeje Furniture Tergugat I: LPEI Tergugat II: BPN Klaten  Plaintiff: PT Jeje Furniture Defendant I: LPEI Defendant II: BPN Klaten	Perkara No.100/Pdt.G/2021/PN.Kln  Case No. 100/Pdt.G/2021/PN.Kln	Pembatalan Perjanjian Kredit dan Pembatalan Hak Tanggungan  Cancellation of Credit Agreement and Cancellation of Mortgage	Pengadilan Tingkat Pertama (PN Klaten)  First degree court (PN Klaten)	Dalam proses persidangan  In the trial process	Mengamankan kepentingan LPEI atas asset jaminan dan perjanjian kredit  Securing LPEI's interests in collateral assets and credit agreements

## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control System

No	Para Pihak The parties	Nomor Perkara Case Number	Pokok perkara/ gugatan Subject matter / lawsuit	Tingkat Perkara Case Stage	Status penyelesaian perkara / gugatan Status of settlement of cases / lawsuits	Pengaruhnya terhadap kondisi LPEI The effect on LPEI condition
4	Penggugat I: Agustiar, S.H Penggugat II: Farhan Jafar, S.H., SPN., CLI Penggugat Intervensi: LPEI Tergugat I: PT Bank Mandiri Cabang Pare Tergugat I: Ratri Utama  Plaintiff I: Agustiar, S.H Plaintiff II: Farhan Jafar, S.H., SPN., CLI Plaintiff for Intervention: LPEI Defendant I: PT Bank Mandiri Pare Branch Defendant I: Ratri Utama	Perkara No.8/ Pdt.Sus-Gugatan lain-lain/2021/ PN.Niaga.Sby jo. No.30/Pdt. Sus-PKPU/2020/ PN.Niaga.Sby  Case No. 8/ Pdt.Sus-Law Lawsuit/2021/ PN.Niaga.Sby jo. No.30/Pdt. Sus-PKPU/2020/ PN.Niaga.Sby	Kurator meminta agar jaminan deposito dimasukkan ke dalam boedel pailit dan dapat dicairkan ke rekening kurator  The curator requests that the deposit guarantee be placed in the bankrupt account and can be disbursed to the curator's account	Kasasi (Mahkamah Agung)  Cassation (Supreme Court)	LPEI mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung  LPEI filed an appeal to the Supreme Court	Mengamankan kepentingan LPEI atas asset jaminan dan perjanjian kredit  Securing LPEI's interests in collateral assets and credit agreements
5	Penggugat: PT Borneo Walet Indonesia (BWI) Tergugat I: LPEI Tergugat II: KPKNL Semarang Tergugat III: Gilang A. Dharmawan Tergugat IV: BPN Kota Semarang Turut Tergugat: PT Balai Lelang Casa  Plaintiff: PT Borneo Walet Indonesia (BWI) Defendant I: LPEI Defendant II: KPKNL Semarang Defendant III: Gilang A. Dharmawan Defendant IV: BPN Semarang City Co-Defendant: PT Balai Lelang Casa	Perkara No. 29/ Pdt.G/2021 PN Smg  Case No. 29/ Pdt.G/2021 PN Smg	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Pembatalan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan  Lawsuit for Unlawful Acts and Cancellation of Mortgage Execution Auction	Pengadilan Tinggi (PT Semarang)  High Court (PT Semarang)	Telah didaftarkan Kontra Memori Banding  Telah didaftarkan Kontra Memori Banding	Mengamankan kepentingan LPEI atas asset jaminan dan perjanjian kredit  Securing LPEI's interests in collateral assets and credit agreements
6	Penggugat: PT Mulia Walet Indonesia (MWI) Tergugat I: LPEI Tergugat II: KPKNL Semarang Tergugat III: Gilang A. Dharmawan Tergugat IV: Agus Saryoko Tergugat V: BPN Kota Semarang Turut Tergugat: PT Balai Lelang Casa  Defendant I: LPEI Defendant II: KPKNL Semarang Defendant III: Gilang A. Dharmawan Defendant IV: Agus Saryoko Defendant V: BPN Semarang City Co-Defendant: PT Balai Lelang Casa	Perkara No. No. 30/Pdt.G/2021 PN Smg  Case No. No. 30/ Pdt.G/2021 PN SMG	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Pembatalan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan  Lawsuit for Unlawful Acts and Cancellation of Mortgage Execution Auction	Pengadilan Tinggi (PT Semarang)  High Court (PT Semarang)	Telah didaftarkan Kontra Memori Banding  Telah didaftarkan Kontra Memori Banding	Mengamankan kepentingan LPEI atas asset jaminan dan perjanjian kredit  Securing LPEI's interests in collateral assets and credit agreements

## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control System

No	Para Pihak The parties	Nomor Perkara Case Number	Pokok perkara/ gugatan Subject matter / lawsuit	Tingkat Perkara Case Stage	Status penyelesaian perkara / gugatan Status of settlement of cases / lawsuits	Pengaruhnya terhadap kondisi LPEI The effect on LPEI condition
7	Penggugat: PT Jasa Mulia Indonesia (JMI) Tergugat I: LPEI Tergugat II: KPKNL Semarang  Tergugat III: Gilang A. Dharmawan Tergugat IV: Agus Saryoko Tergugat V: BPN Kota Semarang Turut Tergugat: PT Balai Lelang Casa  Plaintiff: PT Jasa Mulia Indonesia (JMI) Defendant I: LPEI Defendant II: KPKNL Semarang Defendant III: Gilang A. Dharmawan Defendant IV: Agus Saryoko Defendant V: BPN Semarang City Co-Defendant: PT Balai Lelang Casa	Perkara No. No. 31/Pdt.G/2021 PN Smg Case No. No. 31/Pdt.G/2021 PN SMG	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Pembatalan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan  Lawsuit for Unlawful Acts and Cancellation of Mortgage Execution Auction	Pengadilan Tinggi (PT Semarang)  High Court (PT Semarang)	Telah didaftarkan Kontra Memori Banding  Registered Counter Memory Appeal	Mengamankan kepentingan LPEI atas asset jaminan dan perjanjian kredit  Securing LPEI's interests in collateral assets and credit agreements
8	Penggugat: PT Mulia Walet Indonesia (MWI) Tergugat I: LPEI Tergugat II: KPKNL Semarang Tergugat III: Gilang A. Dharmawan Tergugat IV: Agus Saryoko Tergugat V: BPN Kota Semarang Turut Tergugat: PT Balai Lelang Casa  Plaintiff: PT Mulia Walet Indonesia (MWI) Defendant I: LPEI Defendant II: KPKNL Semarang Defendant III: Gilang A. Dharmawan Defendant IV: Agus Saryoko Defendant V: BPN Semarang City Co-Defendant: PT Balai Lelang Casa	Perkara No. No. 115/Pdt.G/2021 PN Smg  Case No. No. 115/Pdt.G/2021 PN SMG	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Pembatalan Lelang Eksekusi HT  Lawsuit for Unlawful Acts and Cancellation of HT . Execution Auction	Pengadilan Tingkat Pertama (PN Semarang)  First degree court (PN Semarang)	Telah diputus NO (Niet Ontvankelijke)  Has been decided NO (Niet Ontvankelijke)	Mengamankan kepentingan LPEI atas asset jaminan dan perjanjian kredit  Securing LPEI's interests in collateral assets and credit agreements

## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control System

No	Para Pihak The parties	Nomor Perkara Case Number	Pokok perkara/ gugatan Subject matter / lawsuit	Tingkat Perkara Case Stage	Status penyelesaian perkara / gugatan Status of settlement of cases / lawsuits	Pengaruhnya terhadap kondisi LPEI The effect on LPEI condition
9	Penggugat I: Imawan Mashuri Penggugat II: Desiree Sumakud Mashuri Penggugat Intervensi: LPEI Tergugat I : Ir. Mudji Laksono, M.M Tergugat II : Edhi Susanto, S.H Turut Tergugat: BPN Semarang Plaintiff I: Imawan Mashuri Plaintiff II: Desiree Sumakud Mashuri Plaintiff for Intervention: LPEI Defendant I : Ir. Mudji Laksono, M.M Defendant II : Edhi Susanto, S.H Co-Defendant: BPN Semarang	Perkara No. No. 301/Pdt.G/2021 PN Smg  Case No. No. 301/Pdt.G/2021 PN SMG	Permohonan Intervensi (Tussenkomst)  Request for Intervention (Tussenkomst)	Pengadilan Tingkat Pertama (PN Semarang)  First degree court (PN Semarang)	Dalam proses persidangan  In the trial process	Mengamankan kepentingan LPEI atas asset jaminan  Securing LPEI's interests on collateral assets
10	Penggugat: Silvie Soejarwo Leksosodojo Terlawan: Agus Saryoko Turut Terlawan I: LPEI Turut Terlawan II: KJPP Damianus Ambrur & Rekan Turut Terlawan III: KJPP Romulo Charlie dan Rekan Turut Terlawan IV: KPKLN Semarang Turut Terlawan V: BPN Kota Semarang  Plaintiff: Silvie Soejarwo Leksosodojo Opponent: Agus Saryoko Against I: LPEI Second Opponent: KJPP Damianus Collapses & Partners Also Against III: KJPP Romulo Charlie and Partners Fourth Opponent: KPKLN Semarang Also Opponent V: Semarang City National Land Agency	Perkara No. No. 427/Pdt.G/2021 PN Smg  Case No. No. 427/Pdt.G/2021 PN SMG	Gugatan Pelawanan Debitur Terhadap Eksekusi Pengosongan (Partij Verzet)  Lawsuit Against Debtors Against Eviction Execution (Partij Verzet)	Pengadilan Tingkat Pertama (PN Semarang)  First degree court (PN Semarang)	Gugatan Dicabut  Lawsuit Withdrawn	Mengamankan kepentingan LPEI atas asset yang telah terjual  Securing LPEI's interests on assets that have been sold
11	Pelawan: PT Mulia Walet Indonesia Terlawan I: Agus Saryoko Terlawan II : LPEI  Turut Terlawan I: KJPP Damianus Ambur & Rekan Turut Terlawan II: KJPP Romulo Charlie & Rekan Turut Terlawan III: PT Balai Lelang Casa Turut Tergugat: KPKNL Semarang	Perkara No. No. 429/Pdt.G/2021 PN Smg	Gugatan Pelawanan Debitur Terhadap Eksekusi Pengosongan (Partij Verzet)	Pengadilan Tingkat Pertama (PN Semarang)	Dalam proses persidangan	Mengamankan kepentingan LPEI atas asset yang telah terjual

## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control System

No	Para Pihak The parties	Nomor Perkara Case Number	Pokok perkara/ gugatan Subject matter / lawsuit	Tingkat Perkara Case Stage	Status penyelesaian perkara / gugatan Status of settlement of cases / lawsuits	Pengaruhnya terhadap kondisi LPEI The effect on LPEI condition
	Opponent: PT Mulia Walet Indonesia Against I: Agus Saryoko Against II : LPEI Also Against I: KJPP Damianus Ambur & Partners Second Opponent: KJPP Romulo Charlie & Partners Co-Opponent III: PT Balai Lelang Casa Co-Defendant: KPKNL Semarang	Case No. No. 429/Pdt.G/2021 PN SMG	Lawsuit Against Debtors Against Eviction Execution (Partij Verzet)	First degree court (PN Semarang)	In the trial process	Securing LPEI's interests on assets that have been sold
12	Penggugat I: PT Jasa Mulia Indonesia Penggugat II: PT Mulia Walet Indonesia Penggugat III: PT Borneo Walet Indonesia Tergugat I: Agus Saryoko Tergugat II: Michael Tergugat III: Agus Susanto Tergugat IV: Gilang Arif Dharmawan Tergugat V: LPEI Tergugat VI: KJPP Damianus Ambur & Rekan Tergugat VII: KJPP Romulo Charlie & Rekan Tergugat VIII: KPKNL Semarang Turut Tergugat I: BPN Kota Semarang Turut Tergugat II: BPN Kota Waringin Barat, Kalitung Turut Tergugat III: Kantor OJK Pusat  Plaintiff I: PT Jasa Mulia Indonesia Plaintiff II: PT Mulia Walet Indonesia Plaintiff III: PT Borneo Walet Indonesia Defendant I: Agus Saryoko Defendant II: Michael Defendant III: Agus Susanto Defendant IV: Gilang Arif Dharmawan Defendant V: LPEI Defendant VI: KJPP Damianus Ambur & Partners Defendant VII: KJPP Romulo Charlie & Partners Defendant VIII: KPKNL Semarang Co-Defendant I: BPN Semarang City Co-Defendant II: BPN Kota Waringin Barat, Central Kalimantan Co-Defendant III: Central OJK Office	Perkara No. No. 485/Pdt.G/2021 PN Smg  Case No. No. 485/Pdt.G/2021 PN SMG	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Pembatalan Lelang Eksekusi HT  Lawsuit for Unlawful Acts and Cancellation of HT . Execution Auction	Pengadilan Tingkat Pertama (PN Semarang)  First degree court (PN Semarang)	Dalam proses persidangan  In the trial process	Mengamankan kepentingan LPEI atas asset jaminan dan perjanjian kredit  Securing LPEI's interests in collateral assets and credit agreements

## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control System

No	Para Pihak The parties	Nomor Perkara Case Number	Pokok perkara/ gugatan Subject matter / lawsuit	Tingkat Perkara Case Stage	Status penyelesaian perkara / gugatan Status of settlement of cases / lawsuits	Pengaruhnya terhadap kondisi LPEI The effect on LPEI condition
13	Penggugat I: PT Jasa Mulia Indonesia Penggugat II: PT Mulia Walet Indonesia Penggugat III: PT Borneo Walet Indonesia Tergugat I: LPEI Tergugat II: Ferry Saifoellah Tergugat III: Asep Budiharto Tergugat IV: Notaris Dewantari Handayani, S.H, MPA Tergugat V: Prima Yuddy Febrida Venti, SH Tergugat VI: Yus Suwandari Susilowati Tergugat VII: Ny. Andi Haryati Ardi, S.H Tergugat VIII: Rifka Ramadani Tergugat IX: Ny. Pratiwi Supra Dini, S.H Turut Tergugat I: BPN Kota Semarang Turut Tergugat II: BPN Kotawaringin Barat  Plaintiff I: PT Jasa Mulia Indonesia Plaintiff II: PT Mulia Walet Indonesia Plaintiff III: PT Borneo Walet Indonesia Defendant I: LPEI Defendant II: Ferry Saifoellah\\ Defendant III: Asep Budiharto Defendant IV: Notary Dewantari Handayani, S.H, MPA Defendant V: Prima Yuddy Febrida Venti, SH Defendant VI: Yus Suwandari Susilowati Defendant VII: Ny. Andi Haryati Ardi, S.H Defendant VIII: Rifka Ramadani Defendant IX: Mrs. Pratiwi Supra Dini, S.H Co-Defendant I: BPN Semarang City Co-Defendant II: West Kotawaringin BPN	No. 916/ Pdt.G/2021 PN Jkt. Sel  No. 916/ Pdt.G/2021 PN Jkt. Cell	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum  Lawsuit for Unlawful Acts	Pengadilan Tingkat Pertama (PN Jakarta Selatan)  First degree court (South Jakarta PN)	Dalam proses persidangan  In the trial process	Mengamankan kepentingan LPEI atas asset jaminan dan perjanjian kredit  Securing LPEI's interests in collateral assets and credit agreements

**SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL**  
Internal Control System

No	Para Pihak The parties	Nomor Perkara Case Number	Pokok perkara/ gugatan Subject matter / lawsuit	Tingkat Perkara Case Stage	Status penyelesaian perkara / gugatan Status of settlement of cases / lawsuits	Pengaruhnya terhadap kondisi LPEI The effect on LPEI condition
14	Penggugat I: PT Jasa Mulia Indonesia Penggugat II: PT Mulia Walet Indonesia Penggugat III: PT Borneo Walet Indonesia Tergugat I: LPEI Tergugat II: Agus Susanto Tergugat III: Gilang Arif Dharmawan Tergugat IV: KJPP Damianus Ambur & Rekan Tergugat V: KJPP Romulo Charlie & Rekan Turut Tergugat I: KPKNL Semarang  Plaintiff I: PT Jasa Mulia Indonesia Plaintiff II: PT Mulia Swallow Indonesia Plaintiff III: PT Borneo Swallow Indonesia Defendant I: LPEI Defendant II: Agus Susanto Defendant III: Gilang Arif Dharmawan Defendant IV: KJPP Damianus Ambur & Partners Defendant V: KJPP Romulo Charlie & Partners Co-Defendant I: KPKNL Semarang	No. 901/Pdt.G/2021 PN Jkt Sel  No. 901/Pdt.G/2021 PN Jkt Sel	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum  Lawsuit for Unlawful Acts	Pengadilan Tingkat Pertama (PN Jakarta Selatan)  First degree court (South Jakarta PN)	Dalam proses persidangan  In the trial process	Mengamankan kepentingan LPEI atas asset jaminan dan perjanjian kredit  Securing LPEI's interests in collateral assets and credit agreements
15	Penggugat: Tim Kurator Tergugat: LPEI Turut Tergugat I: KPKNL Jakarta V Turut Tergugat II: KPKNL Bogor  Plaintiff: Curator Team Defendant: LPEI Co-Defendant I: KPKNL Jakarta V Co-Defendant II: KPKNL Bogor	No. 48/Pdt.Sus-Pailit-GLL/2021/PN.Niaga  No. 48/Pdt.Sus-Pailit-GLL/2021/PN.Niaga	Pembatalan Lelang Jaminan LPEI  LPEI Guarantee Auction Cancellation	Pengadilan Tingkat Pertama (PN Jakarta Selatan)  First degree court (South Jakarta PN)	Dalam proses persidangan  In the trial process	Mengamankan kepentingan LPEI atas asset jaminan dan perjanjian kredit  Securing LPEI's interests in collateral assets and credit agreements

## DATA PERKARA LPEI

### Indonesia Eximbank's Legal Cases

#### 1. PERKARA ON PROGRESS DI 2021 | Cases in Progress in 2021

No	Para Pihak The parties	Pokok perkara / gugatan Subject matter / lawsuit	Tingkat Perkara Case Stage	Status penyelesaian perkara / gugatan Status of case settlements / lawsuits	Pengaruhnya terhadap kondisi LPEI Impacts on Indonesia Eximbank
1	LPEI (Termohon) dan Direktur Jenderal Pajak (Pemohon)  LPEI (Respondent) and Director General of Taxes (Applicant)	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.38602/PP/M.I/13/2012 tanggal 11 Juni 2012  Tax Court Decision No. Put.38602/PP/M.I/13/2012 dated 11 June 2012	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI  Judicial Review (PK) to the Supreme Court of the Republic of Indonesia	Masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia.  Still in the process of judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia.	Terdapat 2 (dua) kemungkinan: • LPEI memperoleh kembali nilai pajak yang diperkarakan pada masing-masing perkara tersebut; atau, • LPEI tidak dapat memperoleh kembali nilai pajak yang diperkarakan pada masing-masing perkara tersebut.
2	LPEI (Termohon) dan Direktur Jenderal Pajak (Pemohon)  LPEI (Respondent) and Director General of Taxes (Applicant)	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.38603/PP/M.I/13/2012 tanggal 11 Juni 2012  Tax Court Decision No. Put.38603/PP/M.I/13/2012 dated 11 June 2012	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI  Judicial Review (PK) to the Supreme Court of the Republic of Indonesia	Masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia.  Still in the process of judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia	There are 2 (two) possibilities: • LPEI (EximBank) recovers the value of the tax litigated in each of these cases; or, • LPEI cannot recover the value of the tax litigated in each of these cases.
3	LPEI (Termohon) dan Direktur Jenderal Pajak (Pemohon)  LPEI (Respondent) and Director General of Taxes (Applicant)	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.38606/PP/M.I/13/2012 tanggal 11 Juni 2012  Tax Court Decision No. Put.38606/PP/M.I/13/2012 dated June 11, 2012	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI  Judicial Review (PK) to the Supreme Court of the Republic of Indonesia	Masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia.  Still in the process of judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia.	
4	LPEI (Termohon) dan Direktur Jenderal Pajak (Pemohon)  LPEI (Respondent) and Director General of Taxes (Applicant)	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.38607/PP/M.I/13/2012 tanggal 11 Juni 2012  Tax Court Decision No. Put.38607/PP/M.I/13/2012 dated June 11, 2012	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI  Judicial Review (PK) to the Supreme Court of the Republic of Indonesia	Masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia.  Still in the process of judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia.	
5	LPEI (Termohon) dan Direktur Jenderal Pajak (Pemohon)  LPEI (Respondent) and Director General of Taxes (Applicant)	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.38612/PP/M.I/13/2012 tanggal 11 Juni 2012  Tax Court Decision No. Put.38612/PP/M.I/13/2012 dated June 11, 2012	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI  Judicial Review (PK) to the Supreme Court of the Republic of Indonesia	Masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia.  Still in the process of judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia.	
6	LPEI (Termohon) dan Direktur Jenderal Pajak (Pemohon)  LPEI (Respondent) and Director General of Taxes (Applicant)	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.57515/PP/M.IVB/16/2014 tanggal 20 November 2014  Tax Court Decision No. Put.57515/PP/M.IVB/16/2014 dated 20 November 2014	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI  Judicial Review (PK) to the Supreme Court of the Republic of Indonesia	Masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia.  Still in the process of judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia.	

## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control System

No	Para Pihak The parties	Pokok perkara / gugatan Subject matter / lawsuit	Tingkat Perkara Case Stage	Status penyelesaian perkara / gugatan Status of case settlements / lawsuits	Pengaruhnya terhadap kondisi LPEI Impacts on Indonesia Eximbank
7	LPEI (Termohon) dan Direktur Jenderal Pajak (Pemohon)  LPEI (Respondent) and Director General of Taxes (Applicant)	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.57516/PP/M.IVB/16/2014 tanggal 20 November 2014  Tax Court Decision No. Put.57516/PP/M.IVB/16/2014 dated 20 November 2014	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI  Judicial Review (PK) to the Supreme Court of the Republic of Indonesia	Masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia.  Still in the process of judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia.	
8	LPEI (Termohon) dan Direktur Jenderal Pajak (Pemohon)  LPEI (Respondent) and Director General of Taxes (Applicant)	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.57518/PP/M.IVB/16/2014 tanggal 20 November 2014  Tax Court Decision No. Put.57518/PP/M.IVB/16/2014 dated 20 November 2014	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI  Judicial Review (PK) to the Supreme Court of the Republic of Indonesia	Masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia.  Still in the process of judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia.	
9	LPEI (Termohon) dan Direktur Jenderal Pajak (Pemohon)  LPEI (Respondent) and Director General of Taxes (Applicant)	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.59987/PP/M.IVB/15/2015 tanggal 5 Maret 2015  Tax Court Decision No. Put.59987/PP/M.IVB/15/2015 dated March 5, 2015	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI  Judicial Review (PK) to the Supreme Court of the Republic of Indonesia	Masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia.  Still in the process of judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia	
10	LPEI (Termohon) dan Direktur Jenderal Pajak (Pemohon)  LPEI (Respondent) and Director General of Taxes (Applicant)	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.59988/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 5 Maret 2015  Tax Court Decision No. Put.59988/PP/M.IVB/16/2015 dated March 5, 2015	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI  Judicial Review (PK) to the Supreme Court of the Republic of Indonesia	Masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia.  Still in the process of judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia.	
11	LPEI (Termohon) dan Direktur Jenderal Pajak (Pemohon)  LPEI (Respondent) and Director General of Taxes (Applicant)	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.59990/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 5 Maret 2015  Tax Court Decision No. Put.59990/PP/M.IVB/16/2015 dated March 5, 2015	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI  Judicial Review (PK) to the Supreme Court of the Republic of Indonesia	Masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia.  Still in the process of judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia.	
12	LPEI dan Kejagung RI (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus)  LPEI and the Indonesian Attorney General's Office (Deputy Attorney General for Special Crimes)	Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan-Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus No. Print-13/F.2/Fd.2/06/2021 tanggal 24 Juni 2021  Order of Investigation Director-Deputy Attorney General for Special Crimes No. Print-13/F.2/Fd.2/06/2021 dated June 24, 2021	Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung RI  Directorate of Investigation at the Deputy Attorney General for Special Crimes at the Indonesian Attorney General's Office	Masih dalam proses Penyidikan di Kejagung RI.  Still in the process of investigation at the Indonesian Attorney General's Office	Menunggu hasil dari proses penyidikan dan persidangan.  Waiting for the results of the investigation and trial process.

**SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL**  
Internal Control System

**2. PERKARA TELAH PUTUS DI 2021 | Cases That Has Been Resolved in 2021**

No	Para Pihak The parties	Pokok perkara / gugatan Subject matter / lawsuit	Tingkat Perkara Case Stage	Status penyelesaian perkara / gugatan Status of case settlements / lawsuits	Pengaruhnya terhadap kondisi LPEI The Effect on LPEI's condition
1	LPEI(Termohon) dan Direktur Jenderal Pajak (Pemohon)  LPEI(Respondent) and Director General of Taxes (Applicant)	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.59989/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 5 Maret 2015  Tax Court Decision No. Put.59989/PP/M.IVB/16/2015 dated March 5, 2015	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI  Judicial Review (PK) to the Supreme Court of the Republic of Indonesia	LPEI menang atas Dirjen Pajak melalui Putusan MA Reg. Nomor 477/B/PK/Pjk/2021 tanggal 18 Maret 2021  LPEI won over the Director General of Taxes through the Supreme Court Decision Reg. Number 477/B/PK/Pjk/2021 dated March 18, 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>LPEI memperoleh kembali nilai pajak yang diperkarakan pada perkara tersebut.</li> <li>LPEI recovers the value of the tax litigated in the case.</li> </ul>

**SANKSI ADMINISTRATIF**

Selama tahun 2021, LPEI tidak mendapat sanksi administratif baik oleh pihak regulator, maupun pihak berwenang lainnya.

**ADMINISTRATIVE SANCTIONS**

During 2021, the Company was not subjected to any administrative sanctions either by the regulators or other relevant authorities.



# AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

## Information Access and Corporate Data

LPEI menjunjung tinggi prinsip transparansi dan keterbukaan informasi, oleh karena itu, LPEI menyediakan sarana dan fasilitas yang memudahkan para pemangku kepentingan mendapatkan informasi secara tepat waktu dan akurat menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Selain itu, sebagai bentuk kepatuhan kepada regulasi, LPEI juga melakukan pelaporan informasi melalui media surat- menyurat dan e-reporting kepada pihak regulator, serta situs Lembaga. Seluruh Informasi dan laporan Lembaga dapat diperoleh melalui sarana yang mudah diakses, diantaranya:

### 1. Siaran Pers

LPEI secara berkala menerbitkan Siaran Pers sebagai transparansi informasi kepada publik mengenai aksi korporasi penting dan strategik yang dilakukan LPEI.

### 2. Media Sosial

LPEI juga aktif memberikan informasi kepada publik melalui akun:



indonesiaeximbank



Indonesia Eximbank



indonesiaeximbank



EximbankID



indonesia-eximbank

### 3. Intranet

LPEI memiliki portal informasi internal yaitu intranet. Intranet dapat diakses oleh seluruh pegawai untuk membantu menjalankan aktivitas.

Indonesia Eximbank upholds the principle of transparency and information disclosure, as such, the Company provides means and facilities that enable the stakeholders to obtain timely and accurate information in accordance with the prevailing rules and regulations.

In addition, as its compliance to the regulations, the Company also submits information through correspondence and e-reporting to the regulators, as well as the Company's website. All information and reports of the Institution can be obtained through easily accessible means, among others are:

### 1. Press Release

Indonesia Eximbank periodically publishes Press Releases as information transparencies to public on the Institution key and strategic corporate actions.

### 2. Social Media

Indonesia Eximbank also actively provides information to the public through social media accounts of:

### 3. Intranet

Indonesia Eximbank has an internal information portal, the intranet. To carry out their activities, all employees can access the intranet.



Alamat | Address:

Prosperity Tower Lantai 1 District 8, SCBD Lot 28  
Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53,  
Jakarta 12191, Indonesia



Tel. (62 21) 395 03600



Fax. (62 21) 395 03699



Email: corpsec@indonesiaeximbank.go.id



Situs Web: www.indonesiaeximbank.go.id



# KODE ETIK

## Code of Conduct

LPEI menanamkan nilai-nilai inti dan membangun budaya yang kokoh melalui Pedoman Kode Etik sebagai komitmen untuk meningkatkan integritas karyawan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pedoman Kode Etik LPEI mengatur hal-hal yang menjadi tanggung jawab Perseroan, setiap individu di lingkungan Perseroan maupun pihak lain yang berbisnis dengan Perseroan, baik dalam kaitannya dengan etika berbisnis, etika kerja maupun perilaku keseharian. Setiap karyawan dituntut untuk berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai Perseroan dalam mewujudkan visi dan misinya.

Indonesia Eximbank instills its core values and builds a strong culture through Code of Conduct as a form of the Company's commitment to enhancing the integrity of each of its employees in applying good corporate governance.

The Company's Code of Conduct governs the matters that are the responsibility of the Company, every individual within the Company as well as other parties who have business relations with the Company, whether in relation to the business ethics, work ethics or daily behaviour. Every employee is required to behave in reflection of the Company's values in realizing its vision and mission.

### Dasar Hukum Kode Etik LPEI

Code of Conduct Legal Basis



- Kebijakan Sistem Kepegawaian | Employment System Policy (PDE No. 0005/PDE/01/2018)
- Manual Sistem Pelaporan Pelanggaran LPEI | Whistleblowing System (PDE No. 0018/PDE/0/2021)
- Budaya Kerja LPEI | Work Culture (PDE No. 00001/PDE/01/2014)
- Manual Pakta Integritas | Integrity Pact Manual (PDE No. 0017/PDE/0/2012)
- Penegakan Disiplin Pegawai dan Penentuan Sanksi atas Pelanggaran LPEI | Employee Disciplinary Enforcement and Sanction for Frauds (PDE No. 0028/PDE/12/2020)

### Tujuan Pengaturan Standar Kode Etik Pegawai:

- a. Menjaga citra, martabat, integritas, kredibilitas dan independensi Pegawai dalam menjalankan tugas.
- b. Pedoman perilaku kepada Pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional.
- c. Melindungi Pegawai dari risiko hukum dan/atau risiko reputasi yang mungkin timbul.
- d. Mekanisme penanganan informasi dan proses penyelesaian dugaan pelanggaran.

### Standar Kode Etik Pegawai

- Pegawai adalah setiap orang yang bekerja atau terikat dalam hubungan kerja dengan LPEI dan oleh karenanya menerima gaji dan penghasilan atau imbalan dalam bentuk lain dari LPEI dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) LPEI.
- Standar Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, nilai dan norma yang mengikat seluruh Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pegawai LPEI maupun dalam pergaulan sehari-hari dengan masyarakat sekitarnya.

### Pokok-Pokok Kode Etik

Dalam menjalankan kegiatan operasional LPEI, seluruh elemen Lembaga wajib menjalankan Kode Etik yang meliputi:

1. Patuh dan taat pada semua ketentuan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.
2. Melaksanakan pencatatan dengan benar.
3. Menghindarkan diri dari persaingan tidak sehat.
4. Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi.
5. Menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan untuk menghindari konflik kepentingan.
6. Menjaga kerahasiaan para nasabah LPEI.
7. Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan LPEI terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
8. Tidak menerima gratifikasi, hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi, maupun keluarga.
9. Tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan citra profesinya.

### Purpose of Setting Standards of Employee Code of Conducts:

- a. Maintain the image, dignity, integrity, credibility and independence of employees in carrying out their duties.
- b. Code of conducts for employees in carrying out their duties and responsibilities in a professional manner.
- c. Protect employees from legal and/or reputational risks that may arise.
- d. Information handling mechanism and process for resolving alleged violations.

### Employee Code of Conduct Standards

- Employee is every person that works or binds in work relations with Indonesia Eximbank and as such receive salary and income or remuneration in other forms from the Company and has the Employee Main Number (NIP).
- Code of Conduct Standards is a guideline for behavior, conduct, action, values and norms that are binding all Employees in implementing their duties and functions as the Company's Employee or in daily interactions with the surrounding communities.

### Code of Conduct Principles

In carrying out its operational activities, all elements of the Company shall implement Code of Conduct, which includes:

1. Compliance with and adhere to prevailing laws and regulations.
2. Carrying out proper listing.
3. Avoiding unfair competitions.
4. Not abusing authority for personal interests.
5. Avoiding involvement in decision making to avoid conflicts of interest.
6. Maintaining confidentiality of the Institution's customers.
7. Taking into account adverse impacts of each policy set by the Company on economic, social and environmental conditions.
8. Not accepting gratifications, gifts or rewards that enrich his/her personally or family.
9. Not performing actions that can harm the image of his/her profession.

## KODE ETIK

Code of Conduct

### **Etika Manajemen LPEI:**

1. Mengikuti peraturan yang berlaku.
2. Memenuhi tanggung jawab sebagai Dewan Direktur/ Direktur Pelaksana.
3. Tidak memandang rendah perlunya kepemimpinan/ menghargai kepemimpinan.
4. Tanggap menyiapkan masalah jangka panjang dan tidak menunggu sampai kinerja keuangan memburuk.
5. Menggunakan akal sehat.
6. Menghargai setiap pemangku kepentingan (Stakeholder) dalam setiap tindakan.
7. Audit budaya tata kelola institusi yang baik.
8. Tidak menempatkan kepentingan pribadi sebagai fokus utama dalam melakukan tugasnya.
9. Melakukan evaluasi kinerja secara objektif.
10. Tidak terlibat kegiatan operasional LPEI yang berada di luar ketentuan.

### **Pemberlakuan Kode Etik Di Seluruh Level Organisasi**

1. Standar kode etik berisi nilai-nilai dasar etika, kewajiban dan larangan dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan fungsi selaku pegawai dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan operasional LPEI, maupun dalam pergaulan dengan lingkungan masyarakat.
2. Standar kode etik berlaku mengikat untuk seluruh pegawai LPEI, termasuk di dalamnya Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana.
3. Standar kode etik dilaksanakan tanpa toleransi dan pengecualian atas penyimpangannya dan mengandung sanksi bagi yang melanggarinya.

### **Sosialisasi Kode Etik dan Upaya Penegakannya**

Sosialisasi di bidang kode etik telah dilaksanakan sepanjang tahun 2021 oleh Divisi Kepatuhan bersama Divisi Sumber Daya Manusia. Sosialisasi dilakukan kepada seluruh pegawai di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah LPEI yang meliputi / melalui:

1. Terlaksananya CBT Kode Etik dan Budaya Kerja Lembaga untuk Pegawai dan Manajemen pada Triwulan I 2021; dan
2. Terlaksananya Enhancement CBT Kode Etik, Budaya Kerja Lembaga, dan Whistle Blowing System untuk Pegawai dan Manajemen pada Triwulan II 2021, yaitu pada tanggal 27-31 Desember 2021.

### **Indonesia Eximbank Management Ethics:**

1. Follow the applicable regulations.
2. Fulfilling responsibilities as a Board of Directors/ Managing Director.
3. Not looking down on the need for leadership/ appreciating leadership.
4. Respond to long-term problems and do not wait until financial performance deteriorates.
5. Use common sense.
6. Respect every stakeholder in every action.
7. Good institutional governance culture audit.
8. Not putting personal interests as the main focus in carrying out their duties.
9. Conduct an objective performance evaluation.
10. Not involved in LPEI operational activities that are outside the provisions.

### **Code of Conducts Enforcement in Organization**

1. Code of Conduct standards contains basic ethical values, obligations and prohibitions in carrying out duties, obligations and functions as employees in relation to the Company's operational activities and in association with the community.
2. Code of Conduct standards is binding for all employees, including the Board of Directors, Executive Directors, and Managing Directors.
3. Code of Conduct standards is carried out without tolerance and exceptions for irregularities and carries sanctions for those who violate them.

### **Dissemination and Efforts to Enforce the Code of Conduct**

Socialization in the field of code of ethics has been carried out throughout 2021 by the Compliance Division together with the Human Resources Division. Socialization is carried out to all employees at the LPEI Head Office and Regional Offices which include / through:

1. Implementation of the CBT Code of Ethics and Institutional Work Culture for Employees and Management in Quarter I 2021; and
2. Implementation of Enhancement of CBT Code of Ethics, Institutional Work Culture, and Whistle Blowing System for Employees and Management in Quarter II 2021, which is on 27-31 December 2021.

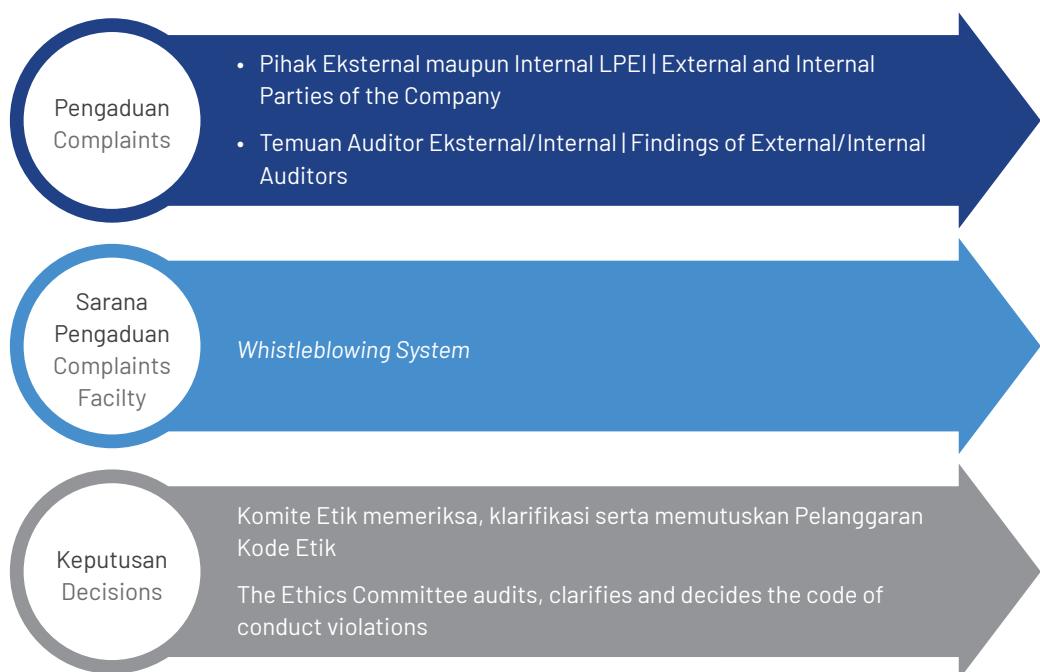
- Pelatihan New Hire Orientation (NHO) 2021, Pelatihan Leaders for Tomorrow (LFT) dan Program Development DP II

Penerapan dan penegakan kode etik menjadi tanggung jawab unit kerja SDM dan disosialisasikan oleh unit kerja Kepatuhan melalui email kepada seluruh Pegawai.

- New Hire Orientation (NHO) 2021 Training, Leaders for Tomorrow (LFT) Training and DP II Development Program

The implementation and enforcement of the code of ethics is the responsibility of the HR work unit and is socialized by the Compliance work unit via email to all employees.

### Mekanisme Laporan Pelanggaran Kode Etik Mechanism of Code of Conduct Violations Report



### **Jenis Sanksi untuk Setiap Pelanggaran Kode Etik**

Segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai yang melanggar pokok-pokok Kode Etik sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Eksekutif mengenai Kode Etik merupakan Pelanggaran Kode Etik. Mekanisme pengaduan Pelanggaran Kode Etik baik dari pihak eksternal, maupun internal LPEI mengacu kepada mekanisme sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*).

Direktur Eksekutif berwenang mengenakan sanksi untuk semua tingkat kepada pegawai, namun dalam pelaksanaannya sebagian wewenang dapat didelegasikan tanpa hak substitusi kepada pejabat sebagai berikut:

- Pegawai pada Kelompok jabatan Kepala Departemen berwenang untuk mengenakan Sanksi Ringan berupa Surat Peringatan Lisan terbatas kepada Pegawai yang merupakan bawahan langsungnya.
- Pegawai pada Kelompok jabatan Kepala Divisi berwenang untuk mengenakan Sanksi Ringan berupa Surat Peringatan Pertama hingga Surat Peringatan Ketiga terbatas kepada Pegawai yang berada pada Unit Kerjanya.
- Kepala Divisi SDM berwenang untuk mengenakan semua Sanksi Ringan serta Sanksi Sedang berupa Peringatan Keras Tertulis kepada seluruh Pegawai

### **Pelanggaran Kode Etik dan Sanksi Tahun 2021**

Sepanjang tahun 2021 tidak ada pelanggaran kode etik, dengan demikian tidak ada sanksi yang diberikan.

### **Sanctions for Every Code Violation**

All employee's remarks, writings or actions that violate code of conduct principles as regulated in the Executive Director's Regulation regarding the Code of Conduct constitute a Violation of the Code of Conduct. The Code of Conduct complaint mechanism from both external and internal parties of Indonesia Eximbank refers to the whistleblowing mechanism.

The Executive Director has the authority to impose sanctions on all levels of employees, but in practice some authority can be delegated without substitution rights to the following executives:

- Employee in the Department Head position group has the authority to impose Minor Sanctions through a limited Oral Warning to Employees under direct subordinates.
- Employee in the Division Head position group has the authority to impose Minor Sanctions through the First Warning Letter up to the Third Warning Letter limited to Employees under his/her Units.
- Head of HR Division has the authority to impose Minor Sanctions and Medium Sanctions through Written Strong Warnings to all Employees.

### **Code of Conduct Violations and Sanctions in 2021**

Throughout 2021 there were no violations of the code of ethics, thus no sanctions were given.



# SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

## Whistleblowing System

Salah satu aspek penting dalam prinsip tata kelola yang baik adalah mewujudkan partisipasi dari unsur internal maupun eksternal LPEI. Salah satunya adalah penyampaian informasi tentang pelanggaran dan perbuatan yang berpotensi dan/atau bersifat merugikan LPEI.

Berdasarkan informasi tersebut, Direktur Eksekutif dapat segera melakukan tindakan pencegahan (preventif) atau pemulihan secara cepat atas kerugian yang timbul ataupun tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direktur Eksekutif. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka diperlukan penguatan sistem pengendalian internal yang salah satunya melalui penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau Whistleblowing System (WBS) LPEI.

### Definisi Whistleblowing

Pengungkapan tindakan Pelanggaran atau pengungkapan perbuatan Pelanggaran yang dapat merugikan LPEI yang umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*).

### Fungsi Whistleblowing System

1. Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) adalah pengungkapan yang umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*) atas tindakan atau perbuatan pelanggaran yang terindikasi dapat merugikan LPEI baik secara finansial maupun non-finansial.
2. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) LPEI adalah suatu sistem yang dapat dijadikan media bagi Pelapor Pelanggaran untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan penyimpangan yang diindikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terjadi di LPEI.
3. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) LPEI ini berfungsi sebagai salah satu alat kontrol dan monitoring mengenai potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai LPEI.

### Tujuan Whistleblowing System

1. Menciptakan Pegawai LPEI yang memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi.
2. Memperkuat penerapan prinsip tata kelola LPEI.
3. Memperkuat sistem pengendalian internal LPEI.

One of the important aspects in good governance principles is realizing the participation of internal and external elements of Indonesia Eximbank. One of them is the delivery of information regarding violations and actions with the potential and/or are detrimental to Indonesia Eximbank.

On this information, the Executive Director can immediately take preventive action or speedy recovery for the losses incurred or other actions deemed necessary by the Executive Director. To realize this condition, it is necessary to strengthen the internal control system, including through the implementation of the Indonesia Eximbank Whistleblowing System (WBS).

### Whistleblowing Definition

Disclosure of Frauds or Violations that may be detrimental to the Company that generally carried out confidentially.

### Whistleblowing System Function

1. Whistleblowing is a disclosure that is generally carried out in a confidential manner for actions or violations indicated to be detrimental to LPEI financially and non-financially.
2. The LPEI Whistleblowing System can be used as a medium for Whistleblowers to relay information regarding irregularities indicated as a violation that occurred at LPEI.
3. The LPEI Whistleblowing System functions as a means of controlling and monitoring potential violations committed by LPEI employees.

### Purpose of Whistleblowing System

1. Building Indonesia Eximbank Employees with high integrity and professionalism.
2. Strengthen the implementation of Indonesia Eximbank governance principles.
3. Strengthening the Indonesia Eximbank internal control system.

## SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

### Whistleblowing System

#### Dasar Peraturan

- UU No. 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
- PMK No. 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan ketentuan perubahan-perubahannya;
- PMK No. 142/PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan ketentuan perubahan-perubahannya;
- PDD No. 0006/PDD/07/2018 tentang Kebijakan Manajemen Risiko (Enterprise Risk Management) LPEI dan ketentuan perubahan-perubahannya;
- PDE No. 0045/PDE/10/2019 Tentang Manual Operasional Penerapan Strategi Anti Fraud LPEI.
- PDE No.0018/PDE/03/2012 tentang Manual Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing system) LPEI.

#### Penerapan di LPEI

Sistem pelaporan pelanggaran atau Whistleblowing System merupakan bagian dari upaya pengendalian internal di lingkungan LPEI.

LPEI secara rutin telah melakukan Pelaporan Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan melakukan penilaian pelaksanaan tata kelola Lembaga. Dewan Direktur mengharapkan agar mekanisme *whistleblowing system* yang telah ada dapat berjalan secara optimal dan saling melengkapi fungsi yang dijalankan internal audit.

#### Jenis-Jenis Pelanggaran

- Pelanggaran peraturan perundang-undangan, antara lain pemalsuan tanda tangan, korupsi, penggelapan, mark-up, penggunaan narkoba, perusakan barang;
- Pelanggaran kode etik LPEI, antara lain benturan kepentingan, pelecehan, terlibat dalam kegiatan masyarakat yang terlarang;
- Pelanggaran prinsip akuntansi yang berlaku umum;
- Kecurangan (*fraud*) dalam kegiatan usaha pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi termasuk kegiatan penyediaan sumber dana bagi LPEI, kegiatan penempatan dana, kegiatan pengadaan barang dan jasa serta kegiatan operasional lainnya;
- Tindakan kecurangan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian finansial ataupun non finansial bagi LPEI;

#### Regulation References

- Law No. 2 of 2009 on Indonesia Eximbank;
- PMK No. 141/PMK.010/2009 on Indonesia Eximbank Governance Principles and its amendments;
- PMK No. 142/PMK.010/2009 concerning Indonesia Eximbank Risk Management and its amendments;
- PDD No. 0006/PDD/07/2018 on Indonesia Eximbank Enterprise Risk Management Policies and its amendments;
- PDE No. 0045/PDE/10/2019 on Operating Manual of Indonesia Eximbank Anti-Fraud Strategy Practices.
- PDE No.0018/PDE/03/2012 concerning LPEI Whistleblowing System Manual.

#### Implementation in Indonesia Eximbank

Whistleblowing System is a part of internal control efforts in the Indonesia Eximbank environment.

The Company regularly conducted Reporting on the Good Governance Principles Implementation and conducted an assessment of the institutional governance. The Board of Directors hopes that the existing whistleblowing system mechanism can perform optimally and complement the functions carried out by internal audit.

#### Violation Types

- Violation of laws and regulations, such as falsification of signatures, corruption, embezzlement, mark-ups, drug use, destruction of goods;
- Violation of Indonesia Eximbank code of conduct, such as conflicts of interest, harassment, involvement in prohibited community activities;
- Violation of generally accepted accounting principles;
- Fraud in financing, underwriting, insurance and consulting services business activities including activities of providing sources of funds for the Company, fund placement activities, procurement of goods and services and other operational activities;
- Other fraudulent acts that may cause financial or non-financial losses to the Company;

## SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

### Whistleblowing System

6. Tindakan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja LPEI.

6. Actions that endanger occupational health and safety of the Company.

#### Pelapor Pelanggaran

- 1. Pegawai LPEI
- 2. Rekanan LPEI
- 3. Nasabah LPEI
- 4. Pihak Terafiliasi LPEI,
- 5. Mitra LPEI

#### The Whistleblowers

- 1. Employees;
- 2. Vendors;
- 3. Customers;
- 4. Affiliated Parties, and;
- 5. Partners.

#### Unsur Pokok Whistleblowing System

- Terlapor Pelanggaran;
- Pelapor Pelanggaran;
- Direktur Eksekutif;
- Direktur Pelaksana;
- Laporan Pelanggaran;
- Verifikator;
- Investigator.

#### Principal Elements of Whistleblowing System

- Reported Violators
- Whistleblowers
- Executive Director
- Managing Director
- Whistleblowing Reports
- Verificators
- Investigators

#### Mekanisme Pelaporan

1. Pelapor Pelanggaran dapat menyampaikan Pelaporan Pelanggaran melalui sarana yang telah disediakan oleh LPEI.
2. Pelaporan Pelanggaran sekurang-kurangnya mencantumkan informasi sebagai berikut:
  - a. Nama Pegawai LPEI dan Unit Kerja yang terlibat;
  - b. Jenis perbuatan yang terindikasi adanya Pelanggaran;
  - c. Waktu terjadinya Pelanggaran;
  - d. Lokasi terjadinya Pelanggaran.
3. Pelaporan Pelanggaran harus dilampirkan bukti awal yang dapat mendukung atau menjelaskan adanya Pelanggaran yang dilakukan. Bukti awal dimaksud antara lain:
  - a. Dokumen-dokumen informasi Pelanggaran;
  - b. Foto-foto kejadian Pelanggaran;
  - c. Rekaman (audio/video);
  - d. Saksi (apabila ada), dan;
  - e. Data sumber informasi untuk pendalaman lebih lanjut.

#### Reporting Mechanisms

1. The Whistleblowers can submit the Whistleblowing Report through facilities provided by the Company.
2. The Whistleblowing Report at least contains the following information:
  - a. Name of involved Employee and Work Unit;
  - b. Type of actions that indicate as Violations;
  - c. Time of Violations;
  - d. Location of Violations.
3. The Whistleblowing Report shall be completed with initial evidence that support or explain the possibility of Frauds. The initial evidences are among others:
  - a. Violation information documents;
  - b. Pictures of Violation events;
  - c. Recording (audio/video);
  - d. Witnesses (if any), and;
  - e. Data of information sources for further investigation.

#### Kebijakan Perlindungan Bagi Pelapor Pelanggaran

LPEI berkomitmen untuk melindungi Pelapor Pelanggaran yang beritikad baik dan LPEI akan patuh terhadap segala peraturan perundang-undangan yang terkait serta best practices yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem pelaporan pelanggaran. Perlindungan bagi pelapor pelanggaran dalam sistem

#### Protection Policy for the Whistleblowers

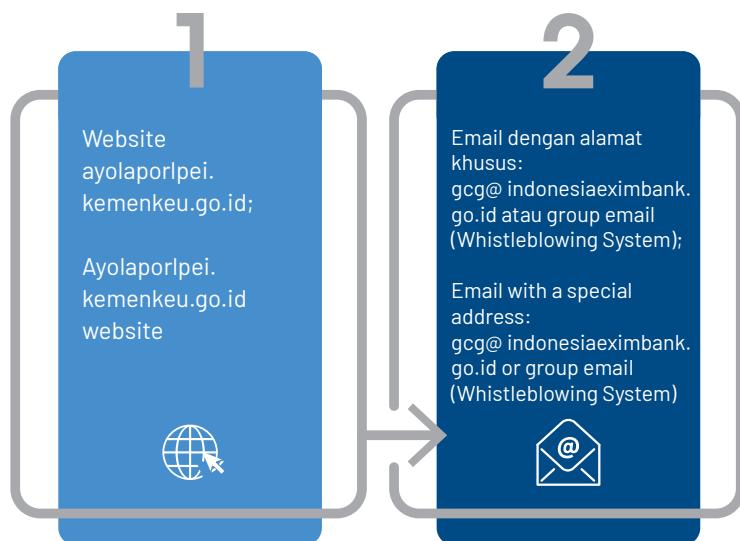
Indonesia Eximbank is committed to protecting Whistleblowers with good intentions and LPEI will comply with all relevant laws and regulations as well as applicable best practices in the implementation of the violation reporting system. The protection for whistleblowers in the violation reporting system

## SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Whistleblowing System

### Sarana Pelaporan Pelanggaran

LPEI telah menyediakan sarana penyampaian pelaporan, baik bagi pihak eksternal, maupun internal. Media atau saluran yang digunakan adalah:



pelaporan pelanggaran antara lain sebagai berikut:

1. LPEI menyediakan sarana Pelaporan Pelanggaran yang independen, bebas dan rahasia;
2. LPEI memberikan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor pelanggaran;
3. LPEI memberikan perlindungan atas tindakan balasan dari Terlapor. Perlindungan ini mencakup antara lain dalam bentuk perlindungan dari tekanan fisik maupun non fisik, perlindungan penurunan jabatan atau pangkat, pemecatan yang tidak adil, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya; catatan yang merugikan dalam file data pribadinya hingga perlindungan atas gugatan hukum dan harta benda.

### Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran

1. Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran dilaksanakan oleh Verifikator, dengan supervisi langsung oleh Kepala Unit Kerja Kepatuhan.
2. Untuk menghindari adanya tujuan yang tidak baik dari Laporan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor Pelanggaran, maka Verifikator harus melakukan seleksi awal terhadap Laporan Pelanggaran yang diterima.

### Violation Reporting Media

Indonesia Eximbank has provided a means of submitting reports, both for external and internal parties. The media or channels used are:

includes the following:

1. Indonesia Eximbank provides an independent, free and confidential means of Reporting Violations;
2. Indonesia Eximbank provides protection for the confidentiality of the identity of the whistleblower;
3. Indonesia Eximbank provides protection against retaliation from the Reported Party. This protection includes, among others, in the form of protection from physical or non-physical pressure, protection from demotion or rank, unfair dismissal, harassment or discrimination in all its forms; detrimental records in his personal data file to the protection of lawsuits and property.

### Whistleblowing System Management

1. The Whistleblowing Report is carried out by Verificators, with direct supervision by the Compliance Unit Head.
2. To prevent any indecent purpose from the Whistleblowing Report submitted by the Whistleblowers, then the Verificators shall carry out initial selection on the received Whistleblowing Report.

## SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

### Whistleblowing System

3. Apabila Pelaporan Pelanggaran tidak dilengkapi dengan bukti awal atau bukti awal yang diberikan tidak berkaitan secara langsung dengan Pelaporan Pelanggaran, maka Pelaporan Pelanggaran tersebut tidak layak untuk diproses lebih lanjut.
4. Tugas dan tanggung jawab Verifikator adalah:
  - a. Mengelola sarana Pelaporan Pelanggaran LPEI.
  - b. Menerima Pelaporan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor Pelanggaran.
  - c. Meminta bukti awal dari Pelapor Pelanggaran melalui sarana yang tersedia.
  - d. Melakukan analisa awal terhadap Pelaporan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor Pelanggaran.
  - e. Mengajukan izin prinsip tindak lanjut pemrosesan Pelaporan Pelanggaran kepada Direktur Pelaksana Bidang.
  - f. Melakukan proses verifikasi Pelaporan Pelanggaran sesuai izin prinsip tindak-lanjut pemrosesan yang di setujui oleh Direktur Pelaksana Bidang.
  - g. Menatausahakan Pelaporan Pelanggaran secara tertib dan aman sehingga aspek kerahasiaan dapat terjaga dengan baik.
3. If the Whistleblowing Report is not submitted with initial evidence or such initial evidence is not directly related with the Whistleblowing Report, then the Report is not feasible for further process.
4. The duties and responsibilities of Verificators are:
  - a. Manage the Company Whistleblowing System.
  - b. Receive the Whistleblowing Report submitted by the Whistleblowers.
  - c. Request initial evidence from the Whistleblowers through available facility.
  - d. Carry out initial analysis on the Whistleblowing Report submitted by the Whistleblowers.
  - e. Propose permission in principle to follow up the Whistleblowing Report process to the Field Managing Director.
  - f. Carry out verification of Whistleblowing Report according to permission in principle of process follow up approved by the Field Managing Director.
  - g. Administer the Whistleblowing Report properly and safely thereby to properly maintain its confidentiality aspect.

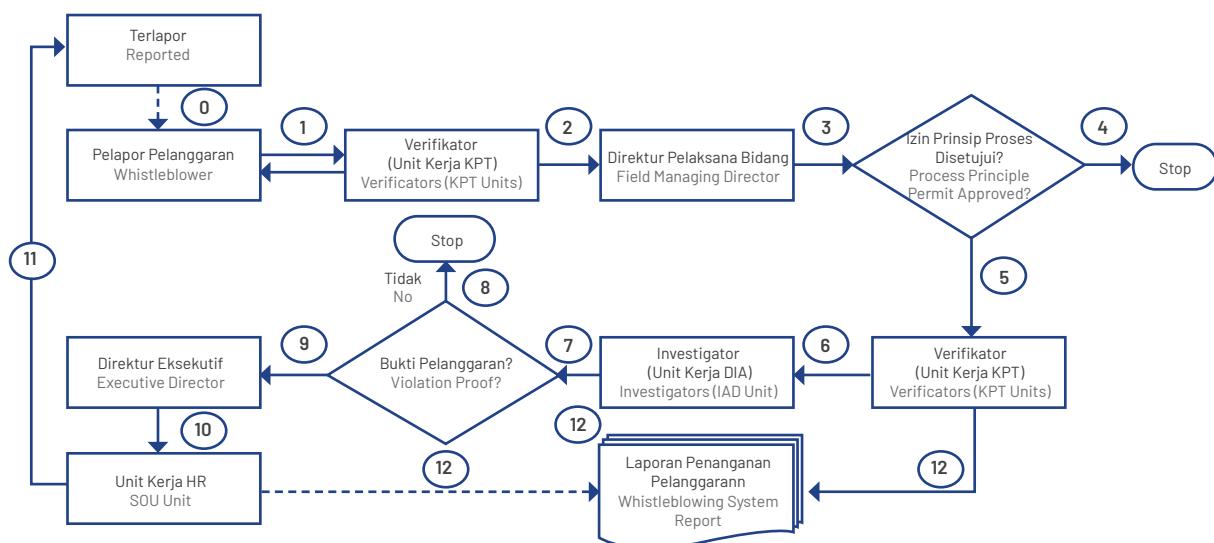
Whistleblowing System Report Handling Mechanism  
The mechanism and flow of reporting and handling complaints can be seen from the Flow Chart of Whistleblowing Submission and Complaints Handling below:

## SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Whistleblowing System

### Bagan Penanganan Pengaduan

Whistleblowing System Diagram



#### Keterangan:

0. Pelapor Pelanggaran mendapat informasi Pelanggaran yang di duga dilakukan oleh Terlapor.
1. Pelapor Pelanggaran membuat Pelaporan Pelanggaran menggunakan sarana yang telah ditetapkan.
2. a. Verifikator menerima Laporan Pelanggaran dari Pelapor Pelanggaran.  
b. Verifikator menerima bukti awal atas Pelapor Pelanggaran.  
c. Verifikator melakukan telaah awal dengan supervisi Kepala Unit Kerja Kepatuhan (KPT) dan mengajukan ijin prinsip pemrosesan lebih lanjut atas Pelaporan Pelanggaran kepada Direktur Pelaksana Bidang;
3. Direktur Pelaksana Bidang memberikan keputusan atas ijin prinsip pemrosesan lebih lanjut atas Pelaporan Pelanggaran;
4. Dalam hal Direktur Pelaksana Bidang tidak menyetujui ijin prinsip untuk pemrosesan lebih lanjut atas Laporan Pelanggaran, maka proses dihentikan;
5. Dalam hal ini Direktur Pelaksana Bidang menyetujui secara tertulis ijin prinsip untuk pemrosesan lebih lanjut atas Laporan Pelanggaran, maka proses dilanjutkan oleh Verifikator.
6. a. Verifikator melakukan verifikasi secara lengkap atas Laporan Pelanggaran.  
b. Hasil verifikasi disampaikan kepada Unit Kerja Audit Internal (DIA) LPEI selaku Investigator melalui sarana internal memo dan bersifat sangat rahasia.

#### Description:

- 0 Whistleblower receives alleged Violation information by the Reported.
- 1 Whistleblower prepares Whistleblowing Report using set forth facilities.
- 2 a. Verifier receives Whistleblowing Report from the Whistleblower.  
b. Verifier requests for initial proof on the Whistleblowing Report.  
c. Verifier carries out initial analysis with the supervision of Compliance Unit Head and propose principal permit for further process on the Whistleblowing Report to the Field Managing Director.
3. Field Managing Director provides decision on principal permit for further process on the Whistleblowing Report.
- 4 In the event that Field Managing Director does not approve on principal permit for further process on the Whistleblowing Report, the process shall be terminated.
- 5 In the event that Field Managing Director approved in writing on principal permit for further process on the Whistleblowing Report, the process shall be progressed by the Verifier.
- 6 a. The Verifier to comprehensively verify the Fraud Reports.  
b. The verification results are submitted to the Company's Internal Audit Unit (IAU) as the Investigator through internal memo and strictly confidential.

## SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Whistleblowing System

7. a. Unit Kerja Audit Internal LPEI melakukan audit Investigasi terhadap Pegawai LPEI yang diduga melakukan Pelanggaran sesuai Laporan Pelanggaran dimaksud.  
b. Ketentuan audit Investigasi yang dilakukan oleh Unit Kerja Audit Internal (DIA) LPEI merujuk pada terjadinya Pelanggaran, maka proses dihentikan.
8. a. Dalam hal hasil audit Investigasi tidak diketemukan bukti yang kuat yang mengarah pada terjadinya Pelanggaran, maka proses dihentikan.  
b. Proses penghentian tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Terlapor dan selanjutnya kepada Terlapor diberikan rehabilitasi nama baiknya yang dinyatakan secara tertulis pada saat surat pemberitahuan tersebut.
9. a. Dalam hal hasil audit Investigasi diketemukan bukti yang kuat dan telah terbukti telah terjadi Pelanggaran, maka Unit Kerja Audit Internal menyusun rekomendasi kepada Direktur Eksekutif mengenai berbagai jenis sanksi yang akan diberikan kepada Terlapor sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku  
b. Apabila menurut Investigator terdapat indikasi perbuatan pidana yang merugikan LPEI secara finansial, maka dapat diberikan rekomendasi untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk penanganannya.
10. a. Direktur Eksekutif memberikan keputusan atas rekomendasi hasil audit Investigasi yang dilakukan oleh Unit Kerja Audit Internal.  
b. Keputusan Direktur Eksekutif untuk pemberian sanksi Pelanggaran diserahkan kepada Unit Kerja Sumber Daya Manusia dan Umum (SDU) untuk dilaksanakan sesuai ketentuan kepegawaian LPEI.
11. a. Unit Kerja Sumber Daya Manusia dan Umum melaksanakan pemberian sanksi kepegawaian kepada Terlapor.  
b. Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor terdapat indikasi pidana yang merugikan LPEI secara finansial, maka Unit Kerja Sumber Daya Manusia dan Umum melaksanakan penyerahan Terlapor kepada pihak yang berwajib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Unit Kerja Kepatuhan (KPT) dengan berkoordinasi dengan Unit Kerja Sumber Daya Manusia dan Umum dan Unit Kerja Audit Internal melakukan pemantauan dan menyusun Laporan Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) kepada Direktur Eksekutif.
7. a. The Company's IAU carries out investigation audit to the Company's employee that are suspected to commit Fraud according to Fraud Report.  
b. The investigation audit rules carried out by IAU refers to the occurrence of Fraud, then the process is terminated.
- 8 a. In the event that there is no finding of strong evidence of Fraud on Investigation audit results, then the process is terminated  
b. The termination process is notified in writing to the Reported Party and subsequently given the rehabilitation of good name in writing in the notification letter.
- 9 a. In the event that there is finding of strong evidence and has been proven of the occurrence of Fraud, then the IAU prepares recommendation to the Executive Director on various sanctions that will be given to the Reported Party according to applicable employment rules.  
b. If the Investigators find the indication of criminal act that may be financially detrimental to the Company, then a recommendation can be given to the authorities for further handling.
- 10 a. The Executive Director takes decision on the recommendation of investigation audit results by the IAU.  
b. The decision of Executive Director on Fraud sanctions is submitted to the Human Resources and General Affairs Unit for implementation according to the Company's employment rules.
- 11 a. The Human Resources and General Affairs Unit carries out the provision of employment sanctions to the Reported Party.  
b. If the fraud carried out by the Reported Party is found to have an indication of criminal act that may be financially detrimental to the Company, then the Human Resources and General Affairs Unit shall carry out submission of Reported Party to the authorities in accordance with prevailing regulations.
- 12 The Compliance Unit coordinates with Human Resources and General Affairs Unit and IAU to monitor and develop Whistleblowing System Report to the Executive Director.

### Hasil Penanganan Pengaduan

Selama tahun 2021, tidak terdapat pengaduan yang masuk dan perlu ditindak lanjuti.

### Complaint Handling Results

During 2021, no complaints were received and needed to be followed up.



# PENERAPAN PEDOMAN GCG

## GCG Guidelines Application

No.	Implementasi GCG LPEI Indonesia Eximbank's GCG Implementation	Peraturan Internal Internal Regulations	Peraturan Eksternal External Regulations
1	<p>Pelaksana tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana.</p> <p>Implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors, Executive Directors and Managing Directors.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>PDD No. 0016/PDD/12/2010 tentang Pedoman Kerja Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif</li><li>PDE No. 0041/PDE/11/2011 tentang Pedoman Tata Kerja Direktur Pelaksana</li><li>PDD No. 0016/PDD/12/2010 concerning the Working Guidelines for the Board of Directors and Executive Directors</li><li>PDE No. 0041/PDE/11/2011 concerning the Working Guidelines for the Managing Director</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. UU No. 2 Tahun 2009 tentang LPEI.</li><li>b. Peraturan Menteri Keuangan RI No.141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).</li><li>c. Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2009 Tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direktur LPEI.</li><li>d. Peraturan Menteri Keuangan RI No.143/PMK.06/2014 tentang Perubahan PMK No. 106/ PMK.06/2009 Tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direktur LPEI.</li><li>e. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 2/PMK.06/2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 106/PMK.06/2009 Tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direktur LPEI.</li><li>f. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 105/PMK.06/2017 tentang Perubahan PMK No. 106/PMK.06/2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Tata Cara Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direktur LPEI.</li><li>a. Law No. 2 of 2009 concerning Indonesia Eximbank.</li><li>b. RI Minister of Finance Regulation No. 141/PMK.010/2009 concerning the Governance Principles of Indonesia Eximbank.</li><li>c. Minister of Finance Regulation No. 106/PMK.06/2009 on Procedures of Proposal, Appointment and Termination of Indonesia Eximbank Board of Directors.</li><li>d. RI Minister of Finance Regulation No. 143/PMK.06/2014 concerning Amendments to PMK No. 106/PMK.06/2009 concerning the Procedures for Proposing, Appointment and Dismissal of Indonesia Eximbank Board of Directors.</li><li>e. RI Minister of Finance Regulation No. 2/PMK.06/2017 on Second Amendment of PMK No. 106/PMK.06/2009 on Procedures of Proposal, Appointment and Termination of Indonesia Eximbank Board of Directors.RI Minister of Finance Regulation No. 105/PMK.06/2017 on Amendment of PMK No. 106/PMK.06/2009 on Procedures of Proposal, Appointment and Termination of Indonesia Eximbank Board of Directors.</li><li>f. RI Minister of Finance Regulation No. 106/PMK.06/2009 on Procedures of Proposal, Appointment and Termination of Indonesia Eximbank Board of Directors.</li></ul>

**PENERAPAN PEDOMAN GCG**  
GCG Guidelines Application

No.	Implementasi GCG LPEI Indonesia Eximbank's GCG Implementation	Peraturan Internal Internal Regulations	Peraturan Eksternal External Regulations
2	<p>Kelengkapan dan pelaksanaaan Komite-Komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern.</p> <p>The completeness and implementation of Committees and units carrying out internal control functions</p>	<p>Komite Dibawah Dewan Direktur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PDD 0008/PDD/12/2020 tentang Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi LPEI</li> <li>b. PDD 0009/PDD/12/2020 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko LPEI</li> </ul> <p>Komite Dibawah Direktur Eksekutif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PDE No.0033/PDE/08/2019 tentang Komite Pembinaan LPEI</li> <li>b. PDE No. 0034/PDE/08/2019 tentang Komite Pembinaan Penugasan Khusus Ekspor LPEI</li> <li>c. PDE No. 0008/PDE/02/2018 tentang Komite Personalia LPEI</li> <li>d. PDE No. 0027/PDE/05/2019 tentang Komite Teknologi Sistem Informasi dan MPO No. 0037/CEO/08/2020 tentang Komite Teknologi Sistem Informasi</li> <li>e. PDE No. 0026/PDE/05/2019 tentang Komite Asset dan Liabilities LPEI dan MPO No. 0006/CEO/02/2020 tentang Perubahan PDE tentang Komite Asset dan Liabilities LPEI.</li> <li>f. PDE No.0018/PDE/04/2018 tentang Komite Pengembangan Produk LPEI</li> <li>g. PDE No. 0025/PDE/05/2019 tentang Komite Kebijakan Bisnis LPEI</li> <li>h. PDE 0024/PDE/05/2019 tentang Komite Manajemen Risiko LPEI</li> <li>i. MPO.0028/CEO/04/2020 tentang Komite Efisiensi</li> <li>j. MPO.0027/CEO/04/2020 tentang Komite Pengadaan</li> <li>k. MPO.0086/KDE/12/2020 tentang Komite Etik dan Disiplin Pegawai LPEI</li> </ul> <p>Committees Under the Board of Directors:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PDD 0008/PDD/12/2020 on Indonesia Eximbank NRC Charter</li> <li>b. PDD 0009/PDD/12/2020 on Indonesia Eximbank Risk Monitoring Committee Charter</li> </ul> <p>Committees Under the Executive Director:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PDE No.0033/PDE/08/2019 on Indonesia Eximbank Financing Committee</li> <li>b. PDE No. 0034/PDE/08/2019 on Indonesia Eximbank NIA Financing Committee</li> <li>c. PDE No. 0008/PDE/02/2018 on Indonesia Eximbank Personnel Committee</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 2 Tahun 2009 tentang LPEI</li> <li>b. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 141/ PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Eksport Indonesia (LPEI)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. The Act No.2 of 2009 concerning Indonesia Eximbank</li> <li>b. RI Minister of Finance Regulation No. 141/ PMK.010/2009 concerning the Governance Principles of the Indonesian Export Financing Institution (Indonesia Eximbank)</li> </ul>

**PENERAPAN PEDOMAN GCG**  
GCG Guidelines Application

No.	Implementasi GCG LPEI Indonesia Eximbank's GCG Implementation	Peraturan Internal Internal Regulations	Peraturan Eksternal External Regulations
		d. PDE No. 0027/PDE/05/2019 on Information System Technology Committee and MPO No. 0037/CEO/08/2020 on Information System Technology Committee e. PDE No. 0026/PDE/05/2019 on Indonesia Eximbank Asset & Liabilities Committee and MPO No. 0006/CEO/02/2020 on Amendment of PDE regarding Indonesia Eximbank Asset & Liabilities Committee. f. PDE No.0018/PDE/04/2018 on Indonesia Eximbank Product Development Committee g. PDE No. 0025/PDE/05/2019 on Indonesia Eximbank Business Policy Committee h. PDE 0024/PDE/05/2019 on Indonesia Eximbank Risk Management Committee i. MPO.0028/CEO/04/2020 on Efficiency Committee j. MPO.0027/CEO/04/2020 on Procurement Committee k. MPO.0086/KDE/12/2020 on Indonesia Eximbank Ethics and Employee Disciplinary Committee	
3	Fungsi Kepatuhan Compliance Function	a. PDD No. 0017/PDD/09/2009 tentang Kebijakan Kepatuhan LPEI b. PDE No. 0059/PDE/11/2019 tentang Manual Operasional Piagam Kepatuhan ( <i>Compliance Charter</i> ) LPEI  a. PDD No. 0017/PDD/09/2009 on Indonesia Eximbank Compliance Policy b. PDE No. 0059/PDE/11/2019 concerning the Indonesia Eximbank Compliance Charter Operating Manual	a. UU No.2 Tahun 2009 tentang LPEI b. PMK No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI c. PMK No. 141/PMK.010/2009 tentang Tata Kelola LPEI d. PMK No. 142/PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko LPEI e. PMK No. 143/PMK.010/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah LPEI  a. Law No.2 of 2009 concerning Indonesia Eximbank b. PMK No. 140/PMK.010/2009 concerning Development and Supervision of Indonesia Eximbank c. PMK No. 141/PMK.010/2009 concerning Indonesia Eximbank Governance d. PMK No. 142/PMK.010/2009 concerning Indonesia Eximbank Risk Management e. PMK No. 143/PMK.010/2009 concerning Indonesia Eximbank Know Your Customer Principles
3.1	LHKPN	a. PDD No. 0001/PDD/07/2017 tentang Kewajiban Penyampaian LHKPN Bagi Pejabat LPEI	a. UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN

**PENERAPAN PEDOMAN GCG**  
GCG Guidelines Application

No.	Implementasi GCG LPEI Indonesia Eximbank's GCG Implementation	Peraturan Internal Internal Regulations	Peraturan Eksternal External Regulations
		b. PDE No. 0013/PDE/04/2013 Tentang Manual, Penyusunan LHKPN Bagi Pejabat LPEI  a. PDD No. 0001/PDD/07/2017 concerning LHKPN Submission Requirements for Indonesia Eximbank Executives b. PDE No. 0013/PDE/04/2013 Regarding Manual, Preparation of LHKPN for Indonesia Eximbank Executives	b. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi c. PerKom KPK No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara d. Surat Edaran No. SE-08/01/10/2016 Tentang Petunjuk Tekhnis Penyampaian Dan Pengelolaan LHKPN  a. Law No. 28 of 1999 concerning State Administrators that are Clean and Free of Collusion- Corruption-Nepotism b. Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission c. KPK PerKom No. 7 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement, and Examination of State Assets e. Circular No. SE-08/01/10/2016 concerning Technical Instructions for Submission and Management of LHKPN
3.2	Gratifikasi Gratification	PDE No. 0029/PDE/06/2019 tentang Manual Operasional Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan LPEI  PDE No. 0029/PD/06/2019 concerning the Operating Manual for Gratification Control in Indonesia Eximbank Environment	a. UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan perubahannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi b. Surat KPK No.B.1341/01- 13/03/2017 tanggal 15 Maret 2015  a. Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes with amendments to Law No. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. b. KPK Letter No. B.1341/01- 13/03/2017 dated March 15, 2015
3.3	Whistleblowing System	PDE No. 0018/PDE/03/2012 tentang Manual Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing system) LPEI  PDE No. 0018/PDE/03/2012 concerning Indonesia Eximbank Whistleblowing System Manual	a. UU No.2 Tahun 2009 tentang LPEI b. PMK No. 141/PMK.010/2009 tentang Tata Kelola LPEI c. PMK No. 142/PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko LPEI  a. Law No.2 of 2009 concerning Indonesia Eximbank b. PMK No. 141/PMK.010/2009 concerning Indonesia Eximbank Governance c. PMK No. 142/PMK.010/2009 concerning Indonesia Eximbank Riak Management
3.4	Prinsip Mengenal Nasabah dalam rangka Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)	a. PDD No. 0002/PDD/03/2020 Tentang Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) LPEI.	a. UU No.2 Tahun 2009 tentang LPEI b. PMK No. 143/PMK.010/2009 tentang Prinsi Mengenal Nasabah LPEI

**PENERAPAN PEDOMAN GCG**  
GCG Guidelines Application

No.	Implementasi GCG LPEI Indonesia Eximbank's GCG Implementation	Peraturan Internal Internal Regulations	Peraturan Eksternal External Regulations
3.4	Know Your Customer Principles in the framework of Implementing the Anti-Money Laundering and Preventing Terrorism Funding Program (APU PPT)	<p>b. PDE No. 0013/PDE/03/2020 Tentang Manual Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU &amp; PPT) LPEI.</p> <p>c. PDE No. 0006/PDE/03/2017 tentang SOP Program Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan Terorisme (APU &amp; PPT) LPEI.</p> <p>d. PDE No. 0027/PDE/11/2020 tentang Manual Penerapan Know Your Employee Practice Manual</p> <p>a. PDD No. 0002/PDD/03/2020 regarding Anti Money Laundering and Counter Terrorism Funding Policy (AML &amp; CTF) of Indonesia Eximbank.</p> <p>b. PDE No. 0013/PDE/03/2020 regarding Anti Money Laundering and Counter Terrorism Funding Manual(AML &amp; CTF) of Indonesia Eximbank.</p> <p>c. PDE No. 0006/PDE/03/2017 regarding Anti Money Laundering and Counter Terrorism Funding SOP (AML &amp; CTF) of Indonesia Eximbank.</p> <p>d. PDE No. 0027/PDE/11/2020 on Know Your Employee Practice Manual</p>	<p>c. POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.</p> <p>d. POJK Nomor 23/POJK.01/2019 Tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan</p> <p>e. Surat Edaran OJK Nomor 37/ SEOJK.05/2017 tentang Pedoma Penerapan Program Anti pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank</p> <p>f. Peraturan Kepala PPATK No. 02/1.02/ PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p> <p>g. Peraturan Kepala PPATK No. PER-02/1.02/ PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang</p> <p>a. Law No.2 of 2009 concerning Indonesia Eximbank</p> <p>b. PMK No. 143/PMK.010/2009 concerning Indonesia Eximbank Know Your Customer Principles</p> <p>c. POJ K No. 12/POJ K.01/2017 concerning the Implementation of Anti Money Laundering and Counter Terrorism Funding Programs in the Financial Services Sector.</p> <p>d. POJK No. 23/POJK.01/2019 dated 18 September 2019 on Amendment of OJK Regulation No. 12/POJK.01/2017 regarding Anti Money Laundry and Counter Terrorism financing Implementation in Financial Services Sector</p> <p>e. OJ K Circular Letter No. 37/ SEOJK.05/2017 concerning Guidelines for Implementing Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing Programs in the Non-Bank Financial Industry Sector</p> <p>f. Head of PPAT K Regulation No. 02/1.02/ PPAT K/02/15 concerning the category of service users who have the potential to commit money laundering crimes.</p> <p>g. Head of PPAT K Regulation No. PER-02/1.02/PPAT K/02/15 concerning th Category of Service Users who Potentially Commits Criminal Acts of Money Laundering.</p>

**PENERAPAN PEDOMAN GCG**  
GCG Guidelines Application

No.	Implementasi GCG LPEI Indonesia Eximbank's GCG Implementation	Peraturan Internal Internal Regulations	Peraturan Eksternal External Regulations
3,5	Kepatuhan penuhan pelaporan kepada eksternal termasuk kepada regulator  Compliance with external reporting, including to regulators	PDE No. 0067/PDE/12/2019 tentang Manual Operasional Penetapan Unit Kerja Penanggungjawab Pelaporan LPEI  PDE No. 0067/PDE/12/2019 concerning the Operating Manual for Establishing Indonesia Eximbank Reporting Responsible Units	a. Peraturan Menteri Keuangan RI No.141/ PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Eksport Indonesia (LPEI) b. PMK No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan  a. RI Minister of Finance Regulation No. 141/ PMK.010/2009 concerning the Governance Principles of Indonesia Eximbank b. PMK No. 140/PMK.010/2009 concerning Development and Supervision
3,6	Kepatuhan penyelesaian advance pegawai  Compliance with advance employee settlement	PDE No.0036/PDE/10/2018 tentang Limit Kewenangan Persetujuan Penggunaan Anggaran LPEI  PDE No.0036/PDE/10/2018 concerning the Authority Limits for Approval of the Use of Indonesia Eximbank Budget	a. Peraturan Menteri Keuangan RI No.141/ PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Eksport Indonesia (LPEI) b. PMK No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan  a. RI Minister of Finance Regulation No.141/ PMK.010/2009 concerning the Governance Principles of the Indonesian Export Financing Institution (LPEI) b. PMK No. 140/PMK.010/2009 concerning Development and Supervision
	a. Anti Fraud  b. Penerapan Kode Etik dan Pakta Integritas  b. Implementation of the Code of Ethics and Integrity Pact	PDE No.0045/PDE/10/2019 tentang Manual Operasional Strategi Anti Fraud LPEI  PDE No. 0045/PDE/10/2019 concerning Indonesia Eximbank Anti Fraud Strategy Operating Manual	a. Peraturan Menteri Keuangan RI No.141/ PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Eksport Indonesia (LPEI) b. PMK No. 142/PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko LPEI  a. RI Finance Minister Regulation No.141/ PMK.010/2009 on Indonesia Eximbank Governance Principles b. PMK No. 142/PMK.010/2009 on Indonesia Eximbank Risk Management
		a. PDE No. 0030/PDE/12/2016 tentang Standar Kode Etik Pegawai b. PDE No. 0005/PDE/01/2018 tentang Kebijakan Sistem Kepegawaian c. PDE No. 0042/PDE/09/2019 tentang Manual Pakta Integritas LPEI d. SE No. 0018/CEO/12/2020 tentang Penerapan Pakta Integritas Pegawai LPEI  a. PDE No. 0030/PDE/12/2016 concerning Employee Code of Conduct Standards b. PDE No. 0005/PDE/01/2018 concerning Staffing System Policy c. PDE No. 0042/PDE/09/2019 concerning the LPEI Integrity Pact Manual	

**PENERAPAN PEDOMAN GCG**  
GCG Guidelines Application

No.	Implementasi GCG LPEI Indonesia Eximbank's GCG Implementation	Peraturan Internal Internal Regulations	Peraturan Eksternal External Regulations
		d. SE No. 0018/CEO/12/2020 concerning the Implementation of the LPEI Employee Integrity Pact	
4	Audit Intern  Internal Audit	a. PDE No. 0007/PDE/02/2019 tentang Piagam Audit Internal b. PDD nomor 0002/PDD/06/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal LPEI c. PDE No.0014/PDE/06/2014 tentang Manual Pengendalian Internal Verifikasi Audit Pembiayaan Bermasalah LPEI d. PDE. No.0006/PDE/09/2009 Pedoman Menanggapi Laporan Hasil Audit Divisi Internal Audit LPEI  a. PDE No. 0007/PDE/02/2019 on Internal Audit Charter b. PDD No. 0002/PDD/06/2019 on Indonesia Eximbank Internal Audit Function Practices c. PDE No.0014/PDE/06/2014 on Internal Control Manual on Audit Verification of Non- Performing Financing of Indonesia Eximbank d. PDE. No.0006/PDE/09/2009 on Guidelines to Responding Audit Results Reports of Indonesia Eximbank Internal Audit Division	a. UU No. 2 Tahun 2009 tentang LPEI b. Peraturan Menteri Keuangan RI No.141/ PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) b. PMK No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan  a. Law No. 2 of 2009 on Indonesia Eximbank b. RI Finance Minister Regulation No.141/ PMK.010/2009 on Indonesia Eximbank Governance Principles c. PMK No. 140/PMK.010/2009 on Mentoring and Oversight
5	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern  Risk management implementation including internal control systems	a. PDE No.0024/PDE/05/2018 tentang Komite Manajemen Risiko LPEI a. PDE No. 0032/PDE/09/2018 tentang Manual Operasional Manajemen Risiko ( <i>Enterprise Risk Management Manual</i> ) LPEI  a. PDE No.0024/PDE/05/2018 regarding Indonesia Eximbank Risk Management Committee b. PDE No. 0032/PDE/09/2018 regarding Indonesia Eximbank Risk Management Operating Manual ( <i>Enterprise Risk Management Manual</i> )	a. Peraturan Menteri Keuangan RI No.141/ PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) b. PMK No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan  a. RI Minister of Finance Regulation No. 141/ PMK.010/2009 concerning Indonesia Eximbank Governance Principles b. PMK No. 140/PMK.010/2009 concerning Mentoring and Oversight
	Pengadaan barang & jasa  Procurement of goods & services	a. PDE No. 0041/PDE09/2019 tentang Manual Operasional Pengadaan Barang/ Jasa LPEI a. PDD No. 0004/PDD/04/2018 tentang Kebijaka Pengadaan Barang/Jasa LPEI b. PDE No. 0033/PDE/10/2018 tentang Manual Operasional Pengadaan Barang/ Jasa LPEI c. PDE No. 0034/PDE/10/2011 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Pengadaan Barang/ Jasa LPEI	Peraturan Menteri Keuangan RI No. 141/ PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)  RI Minister of Finance Regulation No. 141/ PMK.010/2009 concerning Indonesia Eximbank Governance Principles

**PENERAPAN PEDOMAN GCG**  
GCG Guidelines Application

No.	Implementasi GCG LPEI Indonesia Eximbank's GCG Implementation	Peraturan Internal Internal Regulations	Peraturan Eksternal External Regulations
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. PDE No. 0041/PDE09/2019 concerning Indonesia Eximbank Goods/Services Procurement Operating Manual</li> <li>b. PDD No. 0004/PDD/04/2018 concerning Indonesia Eximbank Goods/ Services Policies</li> <li>c. PDE No. 0033/PDE/10/2018 concerning Indonesia Eximbank Goods/Services Procurement Operating Manual</li> <li>d. PDE No. 0034/PDE/10/2011 concerning Indonesia Eximbank Procurement of Goods or Services Standard Operating Procedures (SOP)</li> </ul>	
	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan  Transparency of financial and nonfinancial conditions	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. PDD No. 0014/PDD/12/2010 tentang Kebijakan Akuntansi LPEI</li> <li>a. PDE No.0007/PDE/01/2012 tentang Manual Pelaporan Keuangan LPEI</li> <li>a. PDD No. 0014/PDD/12/2010 concerning Indonesia Eximbank Accounting Policies</li> <li>b. PDE No.0007/PDE/01/2012 concerning Indonesia Eximbank Financial Reporting Manual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. PDD No. 0014/PDD/12/2010 concerning LPEI Accounting Policies</li> <li>b. PDE No. 0007/PDE/01/2012 concerning the LPEI Financial Reporting Manual</li> <li>a. PDD No. 0014/PDD/12/2010 concerning Indonesia Eximbank Accounting Policies</li> <li>b. PDE No. 0007/PDE/01/2012 concerning Indonesia Eximbank Financial Reporting Manual</li> </ul>

Nilai Komposit	Predikat Komposit Composite Predicate	Composite Scores
Nilai Komposit < 1.5	Sangat Baik   Excellent	Composite Score < 1.5
1.5 ≤ Nilai komposit < 2.5	Baik   Good	1.5 ≤ Composite Score < 2.5
2.5 ≤ Nilai Komposit < 3.5	Cukup Baik   Fair	2.5 ≤ Composite Score < 3.5
3.5 ≤ Nilai Komposit < 4.5	Kurang Baik   Less than Fair	3.5 ≤ Composite Score < 4.5
4.5 ≤ Nilai Komposit < 5	Tidak Baik   Poor	4.5 ≤ Composite Score < 5

## Kesimpulan Nilai Hasil Self Assessment

### Self Assessment Result Score Conclusion

Nilai Komposit Composite Score	Predikat Komposit Composite Predicate	Keterangan Description
1,581	BAIK GOOD	<p>Mencerminkan manajemen LPEI telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen.</p> <p>This reflects that in general, the implementation of the Company Governance practice is good. It is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Governance. Weaknesses in the application of Governance principles are generally not very significant and can be resolved using normal actions by the management.</p>



# PENGADAAN BARANG DAN JASA

## Goods & Services Procurement

### Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa mengacu pada Peraturan Dewan Direktur(PDD) No. 0004/PDD/04/2018 tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa LPEI, serta Peraturan Direktur Eksekutif (PDE) No. 0041/PDE/09/2019 tentang Manual Operasional Pengadaan Barang dan Jasa.

### Prinsip Dalam Pengadaan Barang & Jasa

Prinsip dalam pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut:

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang dan Jasa LPEI harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimal.
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa LPEI harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa LPEI bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang dan Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga dapat diperoleh barang dan jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang dan Jasa.
- f. Adil dan tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan Jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan/atau alasan apapun, dengan tetap memperhatikan kepentingan LPEI.
- g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan.
- h. Kemandirian berarti suatu keadaan dimana keadaan barang dan jasa dikelola secara profesional dan

### Goods & Services Procurement

Goods and Services Procurement Policy refers to the Board of Directors Regulation (PDD) No. 0004/PDD/04/2018 concerning Indonesia Eximbank Goods and Services Procurement Policy, and Executive Director's Regulation (PDE) No. 0041/PDE/09/2019 concerning Goods & Services Procurement Operating Manuals.

### Goods and Services Procurement Principles

The principles in the procurement of goods and services are as follows:

- a. Efficient, which means Indonesia Eximbank Procurement of Goods and Services must be attained using minimum funds and power to achieve quality and targets within the stipulated time or using funds that have been determined to achieve results and targets with maximum quality.
- b. Effective, which means Indonesia Eximbank Procurement of Goods and Services must be in accordance with the specified needs and targets and provide maximum benefits.
- c. Transparent, which means that all provisions and information regarding Indonesia Eximbank Procurement of Goods and Services are clear and can be widely known by interested Goods and Services Providers and the general public.
- d. Open, which means that all interested suppliers of goods and services as well as the general public can participate in the procurement of goods and services.
- e. Competitive, which means that the procurement of goods and services must be done through fair competition among as many providers of equal goods and services and meet the specified requirements hence goods and services can be offered competitively and there are no interventions that interfere with the creation of market mechanisms in the procurement of goods and services.
- f. Fair and non-discriminatory, which means providing equal treatment to all prospective Goods and Services Providers and does not lead to benefit certain parties in any way and or reason, with due observance to the interests of Indonesia Eximbank.
- g. Accountable, which means must be in accordance with the rules and regulations related to the Procurement of Goods and Services for accountability.
- h. Independence, which is a situation where the condition of goods and services is managed

tidak ada benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

- i. Kehati-hatian berarti senantiasa memperhatikan langkah antisipasi untuk menghindari kerugian terhadap lembaga selama proses Pengadaan Barang dan Jasa.
- j. Independen berarti dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa harus dilakukan dengan integritas yang tinggi dan terhindar dari *conflict of interest*.

#### **Metode pengadaan**

- a. Metode pemilihan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dilaksanakan sebagai berikut:
  1. Pelelangan Umum;
  2. Pemilihan Langsung;
  3. Pengadaan Langsung;
  4. Penunjukan Langsung; atau
  5. Kontes/Sayembara.
- b. Metode pemilihan untuk pengadaan Jasa Konsultasi dilaksanakan dengan:
  1. Seleksi Umum;
  2. Seleksi Langsung;
  3. Pengadaan Langsung;
  4. Penunjukan Langsung; atau
  5. Sayembara.

#### **Ketentuan Dalam Pengelolaan Vendor**

Ketentuan pengelolaan vendor diatur dalam Peraturan Direktur Eksekutif (PDE) Nomor No. 0041/PDE/09/2019 tentang Manual Operasional Pengadaan Barang/Jasa.

#### **Kode Etik Di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa**

Sesuai Peraturan Dewan Direktur (PDD) No.0004/PDD/04/2018 tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa LPEI, Pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa LPEI harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang dan Jasa.
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri serta menjaga kerahasiaan dokumen yang terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

professionally and there is no conflict of interest and influence or pressure from any party.

- i. Prudent, which means to always regard the anticipatory steps to prevent losses to the Company during the process of Goods and Services Procurement.
- j. Independent, which means that the implementation of Goods and Services Procurement shall be carried out with high integrity and free from conflict of interest.

#### **Procurement methods**

- a. The selection method for Other Goods and Services Providers can be implemented by:
  1. General Auction;
  2. Direct Selection;
  3. Direct Procurement;
  4. Direct Appointment; or
  5. Contest/Competition.
- b. Selection method for Consultancy Services can be implemented by:
  1. General Selection;
  2. Direct Selection;
  3. Direct Procurement;
  4. Direct Appointment; or
  5. Contest.

#### **Vendor Management Stipulations**

Vendor management is stipulated in the Executive Director Regulation (PDE) No. 0041/PDE/09/2019 concerning the Goods & Services Procurement Operating Manual.

#### **Procurement of Goods and Services Code of Conduct**

Pursuant to the Board of Directors (PDD) Regulation No. 0004/PDD/04/2018 regarding Indonesia Eximbank Good and Services Procurement Policy, the Parties engage in Goods and Services Procurement must comply with the following ethics:

- a. Carry out the tasks in an orderly manner accompanied by a sense of responsibility to achieve the goals, efficiency, and accuracy of the achievement of Procurement of Goods and Services objectives.
- b. Work professionally and independently and maintain the confidentiality of documents related to the Procurement of Goods and Services, which by their nature must be kept confidential to prevent irregularities in the Procurement of Goods and Services.

## PENGADAAN BARANG DAN JASA

### Goods & Services Procurement

- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung, maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis para pihak.
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan semua pihak yang terkait baik secara langsung, maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa.
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan LPEI dalam Pengadaan Barang dan Jasa.
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, unit kerja atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan LPEI.
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan dan tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat atau berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.
- c. Not influencing each other directly or indirectly resulting in unfair competition.
- d. Accept and be responsible for all decisions made in accordance with the written agreement of the parties.
- e. Avoid and prevent conflicts of interest of all parties involved either directly or indirectly in the process of procurement of goods and services.
- f. Avoid and prevent financial squander and leaks in the procurement of goods and services.
- g. Avoid and prevent the abuse of authority and/ or collusion for the purpose of personal gain, work units or other parties, which can directly or indirectly harm the Company.
- h. Do not accept, not offer and do not promise to give or receive gifts, rewards, commissions, rebates or any form from or to anyone who is known or reasonably suspected in connection with the Procurement of Goods and Services.

### Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai Peraturan Dewan Direktur (PDD) No. 0004/PDD/04/2018 tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa LPEI, Para Pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di LPEI terdiri dari:

- a. Unit Kerja Pengusul Pengadaan;
- b. Unit Kerja Pelaksana Pengadaan;
- c. Panitia Pengadaan; dan
- d. Unit Kerja Pelaksana Pengendalian Biaya.

### Sistem Pengawasan

Sesuai Pasal 18 (1) Peraturan Dewan Direktur (PDD) No. 0004/PDD/04/2018 tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa LPEI dinyatakan bahwa:

"Direktur Eksekutif wajib melakukan pengawasan terhadap Unit Kerja Pelaksana Pengadaan dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa serta menugaskan Unit Kerja yang membidangi Internal Audit untuk melakukan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku".

### Activity Implementations

In accordance with the Board of Directors (PDD) Regulation No. 0004/PDD/04/2018 concerning Indonesia Eximbank Goods and Services Procurement Policy, the Parties engage in Goods and Services Procurement in Indonesia Eximbank consist of:

- a. Procurement Proposing Unit;
- b. Procurement Implementation Unit;
- c. Procurement Committee; and
- d. Cost Control Implementing Unit.

### Supervision System

In accordance with Article 18(1) Board of Directors Regulation (PDD) No. 0004/PDD/04/2018 concerning Indonesia Eximbank Goods and Services Procurement Policy states that:

"The Executive Director shall supervise the Procurement Executing Unit and the Goods and Services Procurement Committee in carrying out the Procurement of Goods and Services and assign the Unit in charge of Internal Audit to conduct supervision in accordance with prevailing regulations".



# PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)

Implementation Of Anti Money Laundering (AML) and Counter Terrorism Financing (CTF)

## Penerapan Program APU & PPT

Secara umum Divisi Kepatuhan adalah unit kerja yang bertanggung jawab dalam memastikan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) di LPEI. Penerapan program APU PPT berbasis risiko (*risk-based approach*) yang efektif harus diimplementasikan dalam pengendalian intern dan diinternalisasikan dalam budaya LPEI. Pejabat senior bertanggung jawab untuk memastikan bahwa LPEI memiliki struktur pengendalian internal yang efektif antara lain dibuktikan dengan:

1. Dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai;
2. Adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU dan PPT; dan
3. Dilakukannya pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT.

Pejabat senior harus menciptakan budaya manajemen risiko dan kepatuhan, memastikan bahwa pegawai taat terhadap kebijakan dan prosedur yang ditujukan untuk membatasi dan mengontrol risiko.

## Dasar Kebijakan

Undang-Undang No. 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

- a. Undang-Undang No. 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- b. Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- c. Undang-Undang No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- d. Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- e. Peraturan OJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- f. Peraturan Menteri Keuangan No. 143/PMK.010/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. h. Peraturan Kepala PPATK No. PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang

## Implementation of AML & CTF Program

Compliance Division in general is a working unit responsible in ensuring the practice of Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing (AML & CTF) in Indonesia Eximbank. The effective risk-based approach of AML CTF shall be implemented in internal control and internalized within the Company's culture. The senior executives are responsible in ensuring effective internal control structure in Indonesia Eximbank, among others by:

1. Establishing adequate internal policies, procedures and monitoring;
2. Limitation of authority and responsibilities of relevant unit with the AML and CTF program practices; and
3. Independent audit to ensure the effectiveness of AML and CTF programs.

Senior executives shall create a culture of risk management and compliance, ensuring that employees adhere to policies and procedures intended to limit and control risk.

## Policy Base

Law No. 2 of 2009 concerning the Indonesian Export Financing Agency.

- a. Law No. 2 of 2009 concerning the Indonesian Export Financing Agency.
- b. Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering.
- c. Law No. 9 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Terrorism Financing Crimes.
- d. Government Regulation No. 61 of 2021 concerning Amendments to Government Regulation Number 43 of 2015 concerning Reporting Parties in the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering.
- e. OJK Regulation No. 23/POJK.01/2019 concerning Amendments to OJK Regulation No. 12/POJK.01/2017 concerning the Implementation of the Anti-Money Laundering and Prevention of the Financing of Terrorism Programs in the Financial Services Sector.
- f. Minister of Finance Regulation No. 143/PMK.010/2009 concerning LPEI Know Your Customer Principles. h. Regulation of the Head of PPATK No. PER-02/1.02/

## PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)

Implementation of Anti Money Laundering (AML) and Counter Terrorism Financing (CTF)

Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- g. Peraturan PPATK No.1 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi GOAML Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
- h. Peraturan Kepala PPATK No. PER-02/1.02/ PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu.
- i. Surat Edaran OJK No. 37/SEOJK.05/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank.
- j. Surat Edaran OJK No. 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah Di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris sebagaimana telah diubah melalui SEOJK No. 29/SEOJK.01/2019.

### **Tugas dan Tanggung Jawab**

- a. Menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*);
- b. Menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan Direktur Eksekutif;
- c. Memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah;
- d. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha PJK, volume transaksi PJK, dan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;

PPATK/02/15 concerning Categories of Service Users with the Potential to Conduct Money Laundering Crimes.

- g. PPATK Regulation No.1 of 2021 concerning Procedures for Submission of Reports on Suspicious Financial Transactions, Cash Financial Transactions, and Financial Transactions for Transfers of Funds to and From Overseas Through the GOAML Application for Financial Service Providers.
- h. Regulation of the Head of PPATK No. PER-02/1.02/ PPATK/02/2014 concerning Integrated Service User Information System.
- i. OJK Circular Letter No. 37/SEOJK.05/2017 concerning the Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs in the Non-Bank Financial Industry Sector.
- j. OJK Circular Letter No. 38/SEOJK.01/2017 concerning Guidelines for the Immediate Blocking of Customer Funds in the Financial Services Sector whose identities are listed in the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations as amended through SEOJK No. 29/SEOJK.01/2019.

### **Duties and Responsibilities**

- a. Regular analysis on risk evaluation of Money Laundering criminal act and/or Terrorism Financing criminal act related to the Customer, state or geographical areas, products, services, transaction or delivery channels;
- b. Develop, update, and propose the AML and CTF policies and procedures that have been developed to manage and mitigate risks based on risk evaluation as stated in point a, for the consideration and approval of Executive Directors;
- c. Ensure systems that can identify, analyze, monitor and provide effective reports on transaction characteristics by Customers;
- d. Ensure the policies and procedures as stated in point b have met the changes and development of among others products, services, and technology in financial services sector, business activity and complexity, transaction volume of financial services companies, and mode of Money Laundering and/or Terrorism Financing;

## PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU)

## DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)

Implementation of Anti Money Laundering (AML) and Counter Terrorism Financing (CTF)

- e. Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU dan PPT;
- f. Memantau pelaksanaan transaksi Nasabah;
- g. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- h. Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi;
- i. Memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah
- j. Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur PJK serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJ K mengenai penerapan APU & PPT;
- k. Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti tipping-off;
- l. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT terhadap satuan kerja terkait;
- m. Memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai;
- n. Menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang disampaikan oleh satuan kerja;
- o. Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan laporan-laporan lain terkait dengan penerapan APU & PPT;
- p. Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU dan PPT terlaksana dengan baik; dan
- q. Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU dan PPT bagi pejabat dan/atau pegawai PJK.
- e. Ensure the Customers' form has accommodated required data in implementing AML and CTF program;
- f. Monirotting Customer's transactions;
- g. Evaluate Customer monitoring results and transaction analysis to ensure the existence or nonexistence of Suspicious Financial Transaction;
- h. Administer monitoring and evaluation results;
- i. Ensure Customer data and profile update as well as Customer transaction data and profile;
- j. Ensure effective identification of high-risk business activities toward criminal acts of Money Laundering and/or Terrorism Financing in accordance with Financial Services Companies policies and procedures as well as rules as stated in OJ K Regulation concerning the AML & CTF practices;
- k. Ensure good communication mechanism from each relevant unit to specific unit or responsible executives on AML and CTF practices by maintaining information confidentiality and taking into account the anti-tipping-off rules;
- l. Oversight on AML and CTF program practices in relevant unit;
- m. Ensure high-risk area identification related to AML and CTF program practices by referring to the laws and regulatory as well as adequate information sources;
- n. Accept, analyse and develop Suspicious Financial Transaction report submitted by work unit;
- o. Develop Suspicious Financial Transaction report and other reports related to AML and CTF program practices;
- p. Ensure good implementation of activities related to AML and CTF program practices; and
- q. Monitor, analyze, and recommend training requirements on AML and CTF program practices for executives and/or employees of Financial Services Companies.



# TRANSPARANSI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN LEMBAGA

## Transparency of Institution's Financial and Non-Financial

Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan tercermin dari pelaporan yang dilakukan Indonesia Eximbank kepada pemangku kepentingan sesuai dengan aturan dan tepat waktu. Melampirkan seluruh jenis pelaporan berdasarkan PDE No. 0019/PDE/07/2014 tanggal 8 Juli 2014 tentang Kewajiban Pelaporan Kepada Pihak Eksternal.

The financial and non-financial condition transparency are reflected from the reporting by Indonesia Eximbank to the stakeholders in accordance with the rules and timely manner. The following is all types of reporting based on the Executive Director Regulation No. 0019/PDE/07/2014 dated 8 July 2014 on the Mandatory of Reporting to the External Parties.

No	Jenis Laporan Report Types	Periode Period	Tujuan Laporan Report Destination
1	Laporan Bulanan Monthly Report	Bulanan Monthly	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
2	Laporan Posisi Devisa Neto (PDN) Report on the Net Open Position (NOP)	Bulanan Monthly	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
3	Laporan Hutang Valas Foreign Exchange Payable Report	Bulanan Monthly	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
4	Laporan Pembayaran SSP PPh Pasal 22 Article 22 SSP PPh Payment Report	Bulanan Monthly	Kas Negara melalui Bank Persepsi State Treasury through Perception Bank
5	Laporan Pembayaran SSP PPh Pasal 23/26 Article 23/26 SSP PPh Payment Report	Bulanan Monthly	Kas Negara melalui Bank Persepsi State Treasury through Perception Bank
6	Laporan Pembayaran SSP PPh Pasal 4 ayat (2) Article 4 paragraph (2) SSP PPh Payment Report	Bulanan Monthly	Kas Negara melalui Bank Persepsi State Treasury through Perception Bank
7	Laporan Pembayaran SSP PPh Pasal 15 Article 15 SSP PPh Payment Report	Bulanan Monthly	Kas Negara melalui Bank Persepsi State Treasury through Perception Bank
8	Laporan Pembayaran SSP PPWAPU WAPU VAT SSP Payment Report	Bulanan Monthly	Kas Negara melalui Bank Persepsi State Treasury through Perception Bank
9	Laporan Pembayaran SSP PPWAPU DN & LN Domestic and Foreign SSP VAT Payment Reports	Bulanan Monthly	Kas Negara melalui Bank Persepsi State Treasury through Perception Bank
10	Laporan Pembayaran SSP PPh Pasal 25 Article 25 SSP PPh Payment Report	Bulanan Monthly	Kas Negara melalui Bank Persepsi State Treasury through Perception Bank
11	Laporan SPT PPh Pasal 4 ayat (2) Article 4 paragraph (2) SPT PPh report	Bulanan Monthly	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) / Dirjen Pajak Tax Service Office (KPP) / Director General of Taxes
12	Laporan SPT PPh Pasal 15 Article 15 SPT PPh Report	Bulanan Monthly	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) / Dirjen Pajak Tax Service Office (KPP) / Director General of Taxes
13	Laporan SPT PPh Pasal 22 Article 22 SPT PPh Report	Bulanan Monthly	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) / Dirjen Pajak Tax Service Office (KPP) / Director General of Taxes
14	Laporan SPT PPh Pasal 23/26 Article 23/26 SPT PPh Report	Bulanan Monthly	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) / Dirjen Pajak Tax Service Office (KPP) / Director General of Taxes
15	Laporan SPT PPWAPU WAPU VAT SPT Report	Bulanan Monthly	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) / Dirjen Pajak Tax Service Office (KPP) / Director General of Taxes
16	Laporan SPT PPWAPU DN & LN Domestic and Foreign VAT SPT Reports	Bulanan Monthly	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) / Dirjen Pajak Tax Service Office (KPP) / Director General of Taxes
17	Laporan Penjaminan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) LPEI	Bulanan	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DJKN Kemenkeu (tembusan)

## TRANSPARANSI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN LEMBAGA

Transparency of Institution's Financial and Non-Financial

No	Jenis Laporan Report Types	Periode Period	Tujuan Laporan Report Destination
	LPEI National Economic Recovery Guarantee Report (PEN)	Monthly	Financial Services Authority (OJK) DJKN Ministry of Finance (copy)
18	Pinjaman Pegawai SLIK *dikirimkan bersama dengan pelaporan SLIK via COS SLIK Employee Loans *sent together with SLIK reporting via COS	Bulanan Monthly	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
19	Pembayaran SSP PPh 21 SSP PPh 21 Payment	Bulanan Monthly	Kas Negara melalui Bank Persepsi State Treasury through Perception Bank
20	Laporan SPT Masa PPh 21 SPT Report Period PPh 21	Bulanan Monthly	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) / Dirjen Pajak Tax Service Office (KPP) / Director General of Taxes
21	Laporan Upah Jamsostek dan Kesehatan Jamsostek and Health Wage Report	Bulanan Monthly	BPJS
22	Kontribusi Pensiun(DPLK) Pension Contribution (DPLK)	Bulanan Monthly	DPLK Manulife
23	Laporan Lalu Lintas Devisa(LLD) Foreign Exchange Traffic Report (LLD)	Bulanan Monthly	Bank Indonesia
24	Laporan Pembayaran SSP PPh Pasal 22 Article 22 SSP PPh Payment Report	Bulanan Monthly	Kas Negara melalui Bank Persepsi State Treasury through Perception Bank
25	Laporan Pembayaran SSP PPh Pasal 23/26 Article 23/26 SSP PPh Payment Report	Bulanan Monthly	Kas Negara melalui Bank Persepsi State Treasury through Perception Bank
26	Laporan Pembayaran SSP PPh Pasal 4 ayat (2) Article 4 paragraph(2) SSP PPh Payment Report	Bulanan Monthly	Kas Negara melalui Bank Persepsi State Treasury through Perception Bank
27	Laporan Pembayaran SSP PPWAPU WAPU VAT SSP Payment Report	Bulanan Monthly	Kas Negara melalui Bank Persepsi State Treasury through Perception Bank
28	Laporan SPT PPh Pasal 4 ayat(2) Article 4 paragraph(2) SPT PPh report	Bulanan Monthly	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) / Dirjen Pajak Tax Service Office (KPP) / Director General of Taxes
29	Laporan SPT PPh Pasal 22 Article 22 SPT PPh Report	Bulanan Monthly	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) / Dirjen Pajak Tax Service Office (KPP) / Director General of Taxes
30	Laporan SPT PPh Pasal 23/26 Article 23/26 SPT PPh Report	Bulanan Monthly	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) / Dirjen Pajak Tax Service Office (KPP) / Director General of Taxes
31	Laporan BMPP BMPP Report	Bulanan Monthly	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
32	Laporan Debitur melalui SLIK Debtor Report via SLIK	Bulanan Monthly	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
33	Laporan Penyaluran Pembiayaan Kepada Debitur yang Terkena Dampak Penyebaran Covid-19, Dinilai Berdasarkan Ketepatan Pembayaran Report on Financing Distribution to Debtors Affected by the Spread of Covid-19, Assessed Based on Accuracy of Payments	Bulanan Monthly	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
34	Laporan Restrukturisasi Pembiayaan kepada Debitur yang Terkena Dampak Penyebaran Covid-19 Report on Financing Restructuring to Debtors Affected by the Spread of Covid-19	Bulanan Monthly	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)

## TRANSPARANSI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN LEMBAGA

Transparency of Institution's Financial and Non-Financial

No	Jenis Laporan Report Types	Periode Period	Tujuan Laporan Report Destination
35	Laporan Pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN Government Investment Implementation Report PEN	Bulanan Monthly	DJKN
36	Laporan Utang Luar Negeri Foreign Debt Report	Bulanan Monthly	Bank Indonesia
37	Laporan Pelanggaran atau Pelampaunan Posisi Devisa Neto (PDN) Report on Violation or Exceeding the Net Open Position (NOP)	Insidental Incidental	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
38	Usulan Perubahan Penggunaan Tambahan PMN Proposed Changes to the Use of Additional PMN	Insidental Incidental	Kementerian Keuangan Ministry of Finance
39	Perubahan Rencana Bisnis Business Plan Change	Insidental Incidental	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
40	Self Assessment Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh LPEI Self Assessment of Risk Management Implementation in the Use of Information Technology by LPEI	Insidental Incidental	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
41	Laporan Penunjukan AP dan/atau KAP, (disertai rekomendasi Komite Audit) Report on Appointment of AP and/or KAP, (with the recommendation of the Audit Committee)	Insidental Incidenta	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
42	Laporan Pengangkatan, Penggantian, atau Pemberhentian Kepala Unit Audit Internal Report on the Appointment, Replacement, or Dismissal of the Head of the Internal Audit Unit	Insidental Incidenta	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
43	Laporan Revisi Utang Luar Negeri Foreign Debt Revision Report	Insidental Incidenta	Bank Indonesia
44	Pelaporan Susunan Manajemen Management Structure Reporting	Insidental Incidenta	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bursa Efek Indonesia (BEI) Wali Amanat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. - Capital Market Services Financial Services Authority (OJK) Indonesia Stock Exchange (IDX) Trustee of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. - Capital Market Services
45	Pelaporan Pergantian Corporate Secretary Corporate Secretary Change Report	Insidental Incidenta	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bursa Efek Indonesia (BEI) Wali Amanat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. - Capital Market Services Financial Services Authority (OJK) Indonesia Stock Exchange (IDX) Trustee of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. - Capital Market Services
46	Laporan Pengangkatan Dan Pemberitahuan Komite Audit Audit Committee Appointment And Notification Report	Insidental Incidenta	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)

## TRANSPARANSI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN LEMBAGA

Transparency of Institution's Financial and Non-Financial

No	Jenis Laporan Report Types	Periode Period	Tujuan Laporan Report Destination
47	Rencana Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Efek bersifat utang atau Sukuk Plan for Changes in Use of Proceeds from Public Offering of Debt Securities or Sukuk	Insidental Incidental	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
48	Hasil Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk The results of the General Meeting of Securities Holders are debt or Sukuk	Insidental Incidental	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
49	Usulan Perubahan RKAT Proposed Changes to RKAT	Insidental Incidental	Kementerian Keuangan Ministry of Finance
50	Usulan Perubahan RJP Proposed RJP Change	Insidental Incidental	Kementerian Keuangan Ministry of Finance
51	Penyesuaian Rancangan RJP RJP Plan Adjustments	Insidental Incidental	Kementerian Keuangan Ministry of Finance
52	Koreksi Laporan Debitur Debtor Report Correction	Insidental Incidental	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
53	Laporan Perubahan Rencana Utang Luar Negeri (RULN) Report on Changes in Foreign Debt Plan (RULN)	Insidental Incidental	Bank Indonesia
54	Penyesuaian Perubahan RJP RJP Change Adjustment	Insidental Incidental	Kementerian Keuangan Ministry of Finance
55	Penyesuaian Rancangan RKAT RKAT Design Adjustment	Insidental Incidental	Kementerian Keuangan Ministry of Finance
56	Laporan Kegiatan Prinsip Kehati-hatian (KPK) dalam pengelolaan ULN Terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (<i>Credit Rating</i>) Prudential Principle Activity Report (KPK) in external debt management</li> </ul> Consist of: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Information regarding compliance with Credit Ratings</li> </ul>	Insidental Incidental	Bank Indonesia
57	Penyesuaian Rencana Bisnis Business Plan Adjustment	Insidental Incidental	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
58	Laporan Perubahan Rencana Kegiatan Pengkinian Data Nasabah Report on Changes in Customer Data Update Activity Plans	Insidental Incidental	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
59	Laporan Keadaan atau Perkiraan Keadaan yang Dapat Mempengaruhi Kegiatan Usaha atau Keadaan Keuangan LPEI Report on Conditions or Estimated Circumstances That May Affect LPEI's Business Activities or Financial Condition	Insidental Incidental	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)

**TRANSPARANSI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN LEMBAGA**  
Transparency of Institution's Financial and Non-Financial

No	Jenis Laporan Report Types	Periode Period	Tujuan Laporan Report Destination
60	Perubahan action plan, kebijakan dan prosedur penerapan APU PPT Changes in action plans, policies and procedures for the application of APU PPT	Insidental Incidental	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
61	Laporan Daftar Terduga Teroris / Organisasi Teroris (DTTOT), dapat berupa: a. Berita Acara dan Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta, atau b. Laporan Nihil Report on the List of Suspected Terrorists / Terrorist Organizations (DTTOT), can be in the form of: a. Minutes of Events and Blocking Reports Immediately, or b. b. Zero Report	Insidental Incidental	Kepolisian Negara Republik Indonesia; Tembusan: Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Atau melalui Aplikasi SIGAP National Police of the Republic of Indonesia; Copy: Financial Services Authority (OJK); Or via the SIGAP Application
62	Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) Suspicious Financial Transaction Report (LTKM)	Insidental Incidental	PPATK
63	Laporan Pelanggaran terhadap UU LPEI dan Peraturan lainnya (Insidental) Reports on Violations of the LPEI Law and other Regulations (Incidental)	Insidental Incidental	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
64	Rancangan Rencana Jangka Panjang (RJP) Long Term Plan (RJP) Design	Lima tahunan Five years	Kementerian Keuangan Ministry of Finance
65	Laporan Pengawasan RKAT RKAT Supervision Report	Semesteran Semester	Kementerian Keuangan Ministry of Finance
66	Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Business Plan Oversight Report	Semesteran Semester	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
67	Laporan Realisasi Rencana Bisnis Business Plan Realization Report	Semesteran Semester	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
68	Laporan Pelaksanaan Penugasan (Untuk Anggota Dewan Direktur yang berasal dari Instansi atau Lembaga) Assignment Implementation Report (For Members of the Board of Directors from Agencies or Institutions)	Semesteran Semester	Kementerian Keuangan dan Menteri Sektoral Ministry of Finance and Sector Minister
69	Laporan Kegiatan Usaha Semesteran By-Semester Business Activity Report	Semesteran Semester	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
70	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering	Semesteran Semester	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wali Amanat (dengan tembusan ke OJK) Financial Services Authority (OJK) Trustee (with a copy to OJK)
71	Laporan Pengawasan RKAT RKAT Supervision Report	Semesteran Semester	Kementerian Keuangan Ministry of Finance
72	Laporan Keuangan *Laporan Keuangan ini terpisah dari Laporan Keuangan LPEI Financial statements *This Financial Statement is separate from the LPEI Financial Report	Semesteran & Tahunan Semester and Annually	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Budget User Authority (KPA)

## TRANSPARANSI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN LEMBAGA

Transparency of Institution's Financial and Non-Financial

No	Jenis Laporan Report Types	Periode Period	Tujuan Laporan Report Destination
73	Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan(LKTP) Company Annual Financial Report (LKTP)	Tahunan Annually	Kementerian Perdagangan - Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Ministry of Trade - Directorate of Business Development and Company Registration
74	Laporan Pembayaran SSP PPh Pasal 29 Article 29 SSP PPh Payment Report	Tahunan Annually	Kas Negara melalui Bank Persepsi State Treasury through Perception
75	Laporan Pembayaran SPT 1771 Badan(Tahunan) SPT 1771 Agency Payment Report (Annual)	Tahunan Annually	Kantor Pelayanan Pajak(KPP) / Dirjen Pajak Tax Service Office (KPP) / Director General of Taxes
76	Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Draft of Annual Work Plan and Budget (RKAT)	Tahunan Annually	Kementerian Keuangan Ministry of Finance
77	Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Depnaker) Mandatory Employment Report of the Company (Depnaker)	Tahunan Annually	Kementerian Tenaga Kerja Ministry of Labor
78	Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data Nasabah Report on Customer Data Update Activity Plan	Tahunan Annually	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
79	Laporan Realisasi Kegiatan Pengkinian Data Nasabah	Tahunan Annually	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
80	Laporan Pelaksanaan Prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik LPEI Report on the Realization of Customer Data Updating Activities	Tahunan Annually	Menteri perdagangan, Menteri perindustrian, Menteri pertanian, Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pemangku kepentingan lainnya
81	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) State Administrator Wealth Report (LHKPN)	Tahunan Annually	Komisi Pemberantasan Korupsi – KPK Corruption Eradication Commission – KPK
82	Penyampaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Submission of the Sustainable Finance Action Plan (RAKB)	Tahunan Annually	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
83	Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian Jasa Audit atas informasi Keuangan Historis oleh AP dan/atau KAP Report on the Evaluation by the Audit Committee on the implementation of Audit Services on Historical Financial information by AP and/or KAP	Tahunan Annually	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
84	Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan(audited) Announcement of Annual Financial Report (audited)	Tahunan Annually	Website LPEI LPEI Website
85	Bukti pengumuman Publikasi Laporan Keuangan Tahunan Proof of the announcement of the publication of the Annual Financial Report	Tahunan Annually	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
86	Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan(audited) Announcement of Annual Financial Report (audited)	Tahunan Annually	2 media massa cetak nasional 2 national print media

## TRANSPARANSI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN LEMBAGA

Transparency of Institution's Financial and Non-Financial

No	Jenis Laporan Report Types	Periode Period	Tujuan Laporan Report Destination
87	Bukti Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan Proof of Announcement of Annual Financial Statements	Tahunan Annually	Bursa Efek Indonesia(BEI) Indonesia Stock Exchange (IDX)
88	Pengumuman Laporan Tahunan ( <i>Annual Report</i> ) Announcement of the Annual Report ( <i>Annual Report</i> )	Tahunan Annually	Website LPEI LPEI Website
89	Laporan Keuangan Tengah Tahunan Semi-Annual Financial Report	Tahunan Annually	Kementerian Keuangan Ministry of Finance
90	Pengumuman Laporan Keuangan Tengah Tahunan Announcement of Mid-Annual Financial Report	Tahunan Annually	paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional
91	Bukti Pengumuman Laporan Keuangan Tengah Tahunan Proof of Announcement of Mid-Annual Financial Statements	Tahunan Annually	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
92	Bukti Pengumuman Laporan Keuangan Tengah Tahunan Proof of Announcement of Mid-Annual Financial Statements	Tahunan Annually	Bursa Efek Indonesia(BEI) Indonesia Stock Exchange (IDX)
93	Laporan Keuangan Interim berupa laporan keuangan tengah tahunan (menggunakan format <i>Extensible Business Reporting Language</i> (XBRL)). Interim Financial Report in the form of semi-annual financial reports (using the Extensible Business Reporting Language (XBRL) format).	Tahunan Annually	Bursa Efek Indonesia(BEI) Dilaporkan melalui IDXnet Indonesia Stock Exchange (IDX) Reported via IDXnet
94	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rating Tahunan → hasil PUB</li> <li>• Laporan Hasil PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk</li> <li>• Laporan Hasil Pemeringkatan Tahunan</li> <li>• Annual Rating → PUB results</li> <li>• Report on PUB Results of Debt Securities and/or Sukuk</li> <li>• Annual Rating Results Report</li> </ul>	Tahunan Annually	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bursa Efek Indonesia(BEI) Wali Amanat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. - Capital Market Services Financial Services Authority (OJK) Indonesia Stock Exchange (IDX) Trustee of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. - Capital Market Services
95	Laporan Rencana Utang Luar Negeri (RULN) Foreign Debt Plan Report (RULN)	Tahunan Annually	Bank Indonesia
96	Laporan Kegiatan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) dalam pengelolaan ULN Terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Attestasi,</li> <li>- Laporan Keuangan Tahunan Audited</li> </ul> Prudential Principle Activity Report (KPPK) in external debt management Consist of: <ul style="list-style-type: none"> <li>- KPPK reports that have gone through the Attestation Procedure,</li> <li>- Audited Annual Financial Report</li> </ul>	Tahunan Annually	Bank Indonesia

## TRANSPARANSI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN LEMBAGA

Transparency of Institution's Financial and Non-Financial

No	Jenis Laporan Report Types	Periode Period	Tujuan Laporan Report Destination
97	- Laporan Realisasi RAKB/ (Sustainability Report/ Keberlanjutan) - Laporan Penilaian Penerima Investasi (LPPI) - RAKB Realization Report (Sustainability Report) - Investment Beneficiary Assessment Report (LPPI)	Tahunan Annually	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Direktur Jenderal yang membidangi pengelolaan kekayaan negara Kementerian Keuangan Financial Services Authority (OJK) Director General in charge of managing state assets of the Ministry of Finance
98	Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan LPEI(RKA) LPEI Partnership Program Work Plan and Budget (RKA)	Tahunan Annually	Kementerian Keuangan Ministry of Finance
99	Laporan Keuangan Tahunan Program Kemitraan yang Diaudit Audited Partnership Program Annual Financial Report	Tahunan Annually	Kementerian Keuangan Ministry of Finance
100	Laporan Self Assessment Edukasi dan Perlindungan Konsumen Self-Assessment Report on Consumer Education and Protection	Tahunan Annually	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
101	Laporan Rencana Literasi Keuangan Financial Literacy Plan Report	Tahunan Annually	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
102	Laporan Rencana Edukasi Education Plan Report	Tahunan Annually	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
103	Laporan Pelaksanaan Edukasi Education Implementation Report	Tahunan Annually	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
104	Rencana Bisnis Business plan	Tahunan Annually	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
105	Laporan Pelaksanaan Penugasan Penjaminan dan Penugasan Dukungan Loss Limit Report on the Implementation of Guarantee and Support Assignment Loss Limit	Tahunan Annually	Kementerian Keuangan, ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Ministry of Finance, copied to the Director General of Financing and Risk Management, the Director General of State Assets, and the Head of the Fiscal Policy Agency
106	Progress pemenuhan DMTL OJK OJK DMTL fulfillment progress	Triwulan Quarterly	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
107	Laporan Penggunaan Tambahan PMN PMN Additional Usage Report	Triwulan Quarterly	Kementerian Keuangan Ministry of Finance
108	Pungutan OJK OJK Fees	Triwulan Quarterly	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
109	Laporan Realisasi RKAT RKAT Realization Report	Triwulan Quarterly	Kementerian Keuangan, tembusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Ministry of Finance, copy of the Director General of State Assets

## TRANSPARANSI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN LEMBAGA

Transparency of Institution's Financial and Non-Financial

No	Jenis Laporan Report Types	Periode Period	Tujuan Laporan Report Destination
110	Laporan Pelaksanaan Penugasan Penjaminan dan Penugasan Dukungan <i>Loss Limit</i> Report on the Implementation of Guarantee and Support Assignment Loss Limit	Triwulan Quarterly	Kementerian Keuangan tembusan: * DJKN kemenkeu * DJPPR Kemenkeu * Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Ministry of Finance copy: * DJKN Ministry of Finance * DJPPR Ministry of Finance * Head of the Ministry of Finance's Fiscal Policy Agency
111	Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) Integrated Service User Information System (SIPESAT)	Triwulan Quarterly	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Financial Transaction Report and Analysis Center
112	Laporan Kegiatan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) dalam pengelolaan ULN Terdiri dari: - Laporan KPPK, - Laporan Keuangan triwulan Un-audited Prudential Principle Activity Report (KPPK) in external debt management Consist of: - KPPK report, - Un-audited quarterly Financial Report	Triwulan Quarterly	Bank Indonesia Central Bank Indonesia
113	Laporan Keuangan Modul Aplikasi Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan (MKND) <i>Online</i> Financial statements Application Module of the Separate State Wealth Directorate (MKND) Online	Triwulan Quarterly	Kementerian Keuangan Ministry of Finance
114	Laporan Keuangan Financial statements	Triwulan Quarterly	Kementerian Keuangan Ministry of Finance
115	Laporan Keuangan Financial statements	Triwulan Quarterly	Bursa Efek Indonesia (BEI) Dilaporkan melalui IDXnet
116	Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Service and Complaint Resolution Report	Triwulan Quarterly	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
117	Laporan Pelaksanaan Penghapusbukan dan / Penghapustagihan Piutang LPEI Report on the Implementation of Indonesia Eximbank's Write-offs and/or Collections of Receivables	Triwulan Quarterly	Kementerian Keuangan Ministry of Finance
118	Laporan Hasil Pemantauan Perkembangan Pembiayaan Bermasalah LPEI Indonesia Eximbank's Non-Problematic Financing Monitoring Results Report	Triwulan Quarterly	Kementerian Keuangan Ministry of Finance
119	Laporan Profil Risiko Risk Profile Report	Triwulan Quarterly	Kementerian Keuangan Ministry of Finance



# KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ANTI KORUPSI

## Anti Corruption Policy & Procedures

LPEI telah memiliki beberapa kebijakan terkait pencegahan korupsi, antara lain kebijakan mengenai:

### LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

#### Dasar Peraturan

- Eksternal
  - 1. UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
  - 2. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - 3. PerKom KPK No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
  - 4. Surat Edaran No. SE-08/01/10/2016 Tentang Petunjuk Tekhnis Penyampaian dan Pengelolaan LHKPN.
- Internal
  - 1. Peraturan internal yang dikeluarkan oleh Dewan Direktur, yaitu nomor 0001/PDD/07/2017 tentang Kewajiban Penyampaian LHKPN Bagi Pejabat LPEI.
  - 2. Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0013/PDE/04/2013 Tentang Manual, Penyusunan LHKPN Bagi Pejabat LPEI.

#### Penerapan di LPEI

- a. Pelaporan e-LHKPN tahun 2021 telah dilakukan 100% oleh seluruh pejabat dan manajemen LPEI.
- b. Divisi Kepatuhan, dengan pemateri dari tim LHKPN KPK, telah melakukan pelatihan Tata Cara Pengisian LHKPN dan Perubahan Peraturan KPK tentang LHKPN yang diikuti oleh 37 Wajib Lapor LHKPN Pada tanggal 27 Januari 2021.

### PELATIHAN / SOSIALISASI ANTI KORUPSI

Dalam hal Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada pegawai, LPEI telah melakukan upaya sebagai berikut:

1. Mengadakan sosialisasi peluncuran Whistleblowing System (WBS) dan Pengendalian Gratifikasi bekerjasama dengan Itjen dan Pusintek Kemenkeu.

There are several policies regarding corruption prevention in Indonesia Eximbank:

### REPORT OF STATE OF OFFICIALS WEALTH (LHKPN)

#### Regulatory References

- External
  - 1. Act No. 28 of 1999 concerning Clean and KKN Free State Administrators.
  - 2. Act No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission.
  - 3. KPK PerKom No. 7 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement, and Examination of State Organizer's Assets.
  - 4. Circular No. SE-08/01/10/2016 concerning Technical Instructions for Submission and Management of LHKPN.

#### Internal

- 1. Internal regulations issued by the Board of Directors, No. 0001/PDD/07/2 17 concerning LHKPN Submission Requirements for Indonesia Eximbank Executives.
- 2. Executive Director Regulation Number 0013/PDE/04/2013 Regarding Manual, LHKPN Preparation for Indonesia Eximbank Executives.

#### Implementation in Indonesia Eximbank

- a. The 2021 e-LHKPN reporting has been carried out 100% by all the Company officials and management.
- b. The Compliance Division, with speakers from the KPK LHKPN team, has conducted training on Procedures for Filling LHKPN and Amendments to KPK Regulations regarding LHKPN which were attended by 37 LHKPN Reporting Obligations On January 27, 2021.

### ANTI CORRUPTION TRAINING / DISSEMINATION

In terms of anti-corruption training/socialization to the Company's employees, Indonesia Eximbank has made the following efforts:

1. Conduct dissemination on the launch of the Whistleblowing System (WBS) and Gratification Control in collaboration with the Inspectorate General and the Ministry of Finance's Pusintek.

## KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ANTI KORUPSI

Anti Corruption Policy & Procedures

2. Mengadakan sosialisasi berkelanjutan Whistleblowing System (WBS) dan Pengendalian Gratifikasi bekerjasama dengan Itjen dan Pusintek Kemenkeu.
3. Mengadakan sosialisasi pengisian LHKPN oleh Pejabat LPEI bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
4. Sosialisasi melalui flyer kepada seluruh pegawai LPEI yang bekerjasama dengan Divisi TFO terkait larangan praktik Gratifikasi.
5. Diseminasi Surat Edaran kepada Pegawai LPEI, Mitra/ Rekanan, dan Nasabah/Debitur perihal larangan permintaan, penerimaan dan pemberian gratifikasi untuk/dari Pegawai LPEI serta kepada Rekanan, Penyedia Barang/Jasa (Vendor, Mitra, dan Nasabah LPEI terutama terkait hari raya keagamaan berupa bingkisan/hampers.
2. Conduct ongoing dissemination of the Whistleblowing System (WBS) and Gratification Control in collaboration with the Inspectorate General and the Ministry of Finance's Pusintek.
3. Conducting dissemination on filling out LHKPN by LPEI Officials in collaboration with the Corruption Eradication Commission (KPK).
4. Dissemination through flyers to all employees who cooperate with the TFO Division regarding the prohibition of the practice of Gratification.
5. Dissemination of Circular Letters to Employees, Partners/Partners, and Customers/Debtors regarding the prohibition of requesting, receiving and granting gratuities to/from Employees as well as to Partners, Goods/Services Providers (Vendro), Partners, and Customers, especially related to the day religious in the form of gifts/hampers.

### PENGENDALIAN GRATIFIKASI

#### Dasar Peraturan

- Eksternal
  1. UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan perubahannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  2. Surat KPK No.B.1341/01-13/03/2017 tanggal 15 Maret 2015.
  3. Peraturan KPK no. 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi
- Internal
  1. PDE No. 0029/PDE/06/2019 tentang Manual Operasional Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan LPEI.
  2. PDE No. 0024/PDE/09/2019 tentang Pakta Integritas LPEI.

#### Penerapan di LPEI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, LPEI senantiasa berupaya untuk melaksanakan tata kelola yang baik sebagai salah satu upaya untuk mendukung penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. LPEI telah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yaitu Unit Kerja Kepatuhan

Penerapan pengendalian Gratifikasi secara berkesinambungan dalam rangka pelaksanaan tata kelola yang baik diatur sebagai berikut:

### GRATIFICATION CONTROL

#### Regulatory References

- External
  1. Act No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes with amendments to Law No. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes
  2. KPK Letter No. B.1341/01-13/03/2017 dated March 15, 2015.
  3. KPK Regulation no. 2 of 2019 concerning Gratification Reporting
- Internal
  1. PDE No. 0029/PDE/06/2019 concerning the Operating Manual for Gratification Control in Indonesia Eximbank Environment.
  2. PDE No. 0024/PDE/09/2019 concerning Indonesia Eximbank Integrity Pact.

#### Implementation in Indonesia Eximbank

Indonesia Eximbank strives to implement good corporate governance to foster a clean and free of corruption, collusion and nepotism country. Indonesia Eximbank has established the Gratification Control Unit (UPG), which is the Compliance Unit.

Sustainable gratification control in implementing good corporate governance is regulated as follows:

## KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ANTI KORUPSI

### Anti Corruption Policy & Procedures

#### 1. Sosialisasi Berkelanjutan

Sosialisasi dilakukan oleh Unit Pengendali Gratifikasi kepada seluruh pegawai LPEI baik di Kantor Pusat, maupun Kantor Wilayah. Sosialisasi dilakukan dengan tatap muka maupun daring, *email blast*, dan *screen saver*.

#### 2. Penandatanganan Pakta Integritas

Pakta Integritas merupakan pernyataan seluruh jajaran LPEI untuk berkomitmen menjunjung tinggi moral dan integritas, melindungi dan menjaga citra, kredibilitas serta kepentingan LPEI dengan cara tidak meminta atau menerima gratifikasi dari pihak yang memiliki benturan kepentingan. Pakta Integritas ditandatangani oleh Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana pada saat ditetapkan dan dilakukan penandatanganan ulang setiap setahun sekali. Selain itu, Pakta Integritas juga ditandatangani oleh seluruh pegawai LPEI (selain Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana) pada saat pertama kali bekerja di LPEI.

#### 3. Diseminasi Surat Edaran kepada Pegawai LPEI, Mitra/ Rekanan, dan Nasabah/Debitur perihal larangan permintaan, penerimaan dan pemberian gratifikasi untuk/dari Pegawai LPEI serta kepada Rekanan, Penyedia Barang/Jasa (Vendor), Mitra, dan Nasabah LPEI terutama terkait hari raya keagamaan berupa bingkisan/hampers pada Desember 2021.

#### 4. Pelaporan Gratifikasi tahun 2021

Pelaporan gratifikasi di LPEI dilakukan oleh Pegawai LPEI dengan 2(dua) mekanisme yaitu:

- Pelaporan melalui Unit Pengendali Gratifikasi
- Pelaporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### 5. Penerapan Berkesinambungan

- Menyusun dan/atau mengevaluasi secara berkala ketentuan Internal terkait gratifikasi dengan mengikuti aturan eksternal.
- Menerima laporan gratifikasi berikut kelengkapan dokumennya dari pelapor gratifikasi.
- Melaksanakan dan menyampaikan laporan gratifikasi kepada KPK melalui sistem pelaporan Gratifikasi Online (GOL)
- Menyampaikan laporan gratifikasi secara berkala kepada Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan.
- Mengadministrasikan laporan gratifikasi secara tertib.
- Sosialisasi berkelanjutan terkait Gratifikasi kepada seluruh pegawai LPEI.

#### 1. Sustainable Dissemination

Dissemination conducted by the Gratification Control Unit to all Indonesia Eximbank employees both at the Head Office and Regional Offices. The socialization is done through face to face and online, email blast, and screen saver.

#### 2. Integrity Pact Signing

Integrity Pact is a statement from all Indonesia Eximbank employees on the commitment to upholding morals and integrity, safeguarding and protecting Indonesia Eximbank image, credibility and interests by not asking for or accepting gratifications from parties who have conflicts of interest. The Integrity Pact is signed by the Board of Directors and Managing Director at a determined time and resigned every year. In addition, all Indonesia Eximbank employees also signed the Integrity Pact (other than the Board of Directors and Managing Directors) when they first joined the Company.

#### 3. Dissemination of Circular Letters to LPEI Employees, Partners/Partners, and Customers/Debtors

regarding the prohibition of requesting, receiving and granting gratuities to/from LPEI Employees as well as to Partners, Goods/Services Providers (Vendors), Partners, and LPEI Customers, especially related to the day religious in the form of gifts/hampers in December 2021.

#### 4. Gratification Reporting in 2021

Reporting gratification in Indonesia Eximbank is carried out by Employees with 2(two) mechanisms:

- Reporting through the Gratification Control Unit
- The report submission to the Corruption Eradication Commission.

#### 5. Sustainable Implementation

- Periodically develop and/or evaluate from time to time the internal rules on gratification by following external rules.
- Receive gratifications reports with complete documents from gratification whistleblower.
- Implement and submit gratification reports to the KPK through the Online Gratification Reporting System (GOL)
- Regular gratification reports to the Director in charge of the Compliance function.
- Administrating gratification report in an orderly manner.
- Continuous socialization regarding Gratification to all Indonesia Eximbank's employees.

## KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ANTI KORUPSI

Anti Corruption Policy & Procedures

### PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD LPEI

#### Dasar Peraturan

- Eksternal
  - a. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
  - b. PMK No. 142/PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko LPEI.
- Internal
  - PDE No. 0045/PDE/10/2019 tentang Manual Operasional Strategi Anti-Fraud LPEI.

#### Penerapan di LPEI

LPEI telah menerapkan Strategi Anti-Fraud yang diatur dalam PDE No. 0045/PDE/10/2019 tentang Manual Operasional Penerapan Strategi Anti-Fraud LPEI. Implementasi strategi Anti-Fraud LPEI melibatkan seluruh unit kerja dengan fungsi sesuai dengan kewenangannya, yaitu:

##### a. Fungsi Koordinasi

Fungsi Koordinasi dalam penerapan strategi anti-fraud dijalankan oleh Unit Pengendali Fraud, dalam hal ini adalah Unit Kerja Internal Audit.

##### b. Fungsi Pencegahan

Fungsi Pencegahan terdiri dari 3 hal sub fungsi sebagai berikut:

- *Anti-fraud awareness*, dilakukan oleh seluruh unit kerja LPEI.
- Identifikasi kerawanan, dilakukan oleh seluruh unit kerja LPEI.
- *Know Your Employee*, dilakukan oleh seluruh kepala divisi dan pejabat setingkat kepala kantor wilayah di LPEI.

##### c. Fungsi Deteksi

Fungsi Deteksi terdiri dari 3 hal sub fungsi sebagai berikut:

- *Whistle blowing*, dilakukan oleh Unit Kerja Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Organisasi.
- Surprise Audit, dilakukan oleh Unit Kerja Internal Audit.
- *Surveillance System*, dilakukan oleh Unit Kerja Internal Audit.

### INDONESIA EXIMBANK ANTI-FRAUD STRATEGY

#### Regulatory References

- External
  - a. RI Minister of Finance Regulation No. 141/PMK.010/2009 concerning Indonesia Eximbank Governance Principles.
  - b. PMK No. 142/PMK.010/2009 concerning Indonesia Eximbank Risk Management.
- Internal
  - PDE No. 0045/PDE/10/2019 concerning Indonesia Eximbank Anti-Fraud Strategy Operating Manual.

#### Implementation in Indonesia Eximbank

Indonesia Eximbank has implemented the Anti-Fraud Strategy set out in PDE No. 0045/PDE/10/2019 concerning the Operating Manual of Indonesia Eximbank Anti-Fraud Strategy. Indonesia Eximbank anti-fraud strategy involves all units with functions in accordance with their authorities, which are:

##### a. Coordination function

The Coordination Function in implementing anti-fraud strategy is carried out by Fraud Control Unit, in this case the Internal Audit Unit.

##### b. Prevention Function

The Prevention Function consists of 3 sub-functions as follows :

- Anti-fraud awareness, carried out by all Indonesia Eximbank units.
- Identification of vulnerability, carried out by all Indonesia Eximbank units.
- Know Your Employee, carried out by all division heads and executives at the regional office level in Indonesia Eximbank.

##### c. Detection function

The Detection Function consists of 3 terms of sub functions as follows:

- Whistleblowing, conducted by Human Resources and Organizational Development Unit.
- Surprise Audit, conducted by Internal Audit Unit.
- Surveillance System, conducted by Internal Audit Unit.

## KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ANTI KORUPSI

### Anti Corruption Policy & Procedures

#### d. Fungsi Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

Fungsi Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi dilakukan oleh Unit Kerja yaitu:

- Fungsi Investigasi dan Pelaporan, dilakukan oleh Unit Kerja Internal Audit.
- Fungsi Pemberian Sanksi, dilakukan oleh Unit Kerja Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Organisasi.

#### d. Investigation, Reporting and Sanction Functions

The Investigation, Reporting and Sanction Functions are carried out by the following Units:

- Investigation and Reporting Functions, carried out by Internal Audit Unit.
- Sanction Function, carried out by Human Resources and Organizational Development Unit.

#### e. Fungsi Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

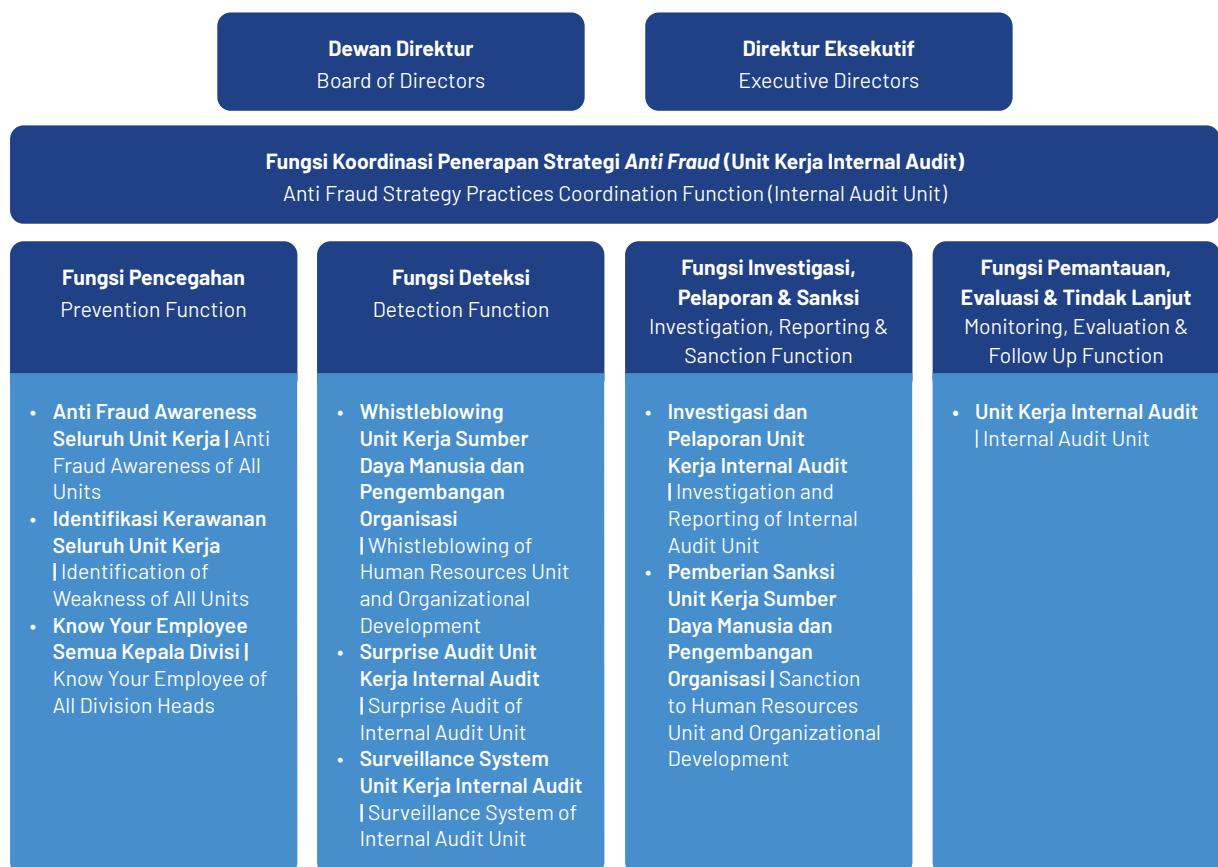
Fungsi ini dilakukan langsung oleh Unit Kerja Internal Audit.

#### e. Monitoring, Evaluation and Follow-up Functions

This function is carried out directly by Internal Audit Unit.

Berikut adalah bagan organisasi, fungsi, dan tanggung jawab dalam penerapan strategi anti-fraud LPEI:

Diagram of organization, functions, and responsibilities in Indonesia Eximbank anti-fraud strategy implementation:



## KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ANTI KORUPSI

### Anti Corruption Policy & Procedures

Penerapan Manajemen Risiko dalam rangka pengendalian risiko terjadinya *fraud*, wajib dilakukan dengan penguatan pada beberapa aspek, antara lain sebagai berikut:

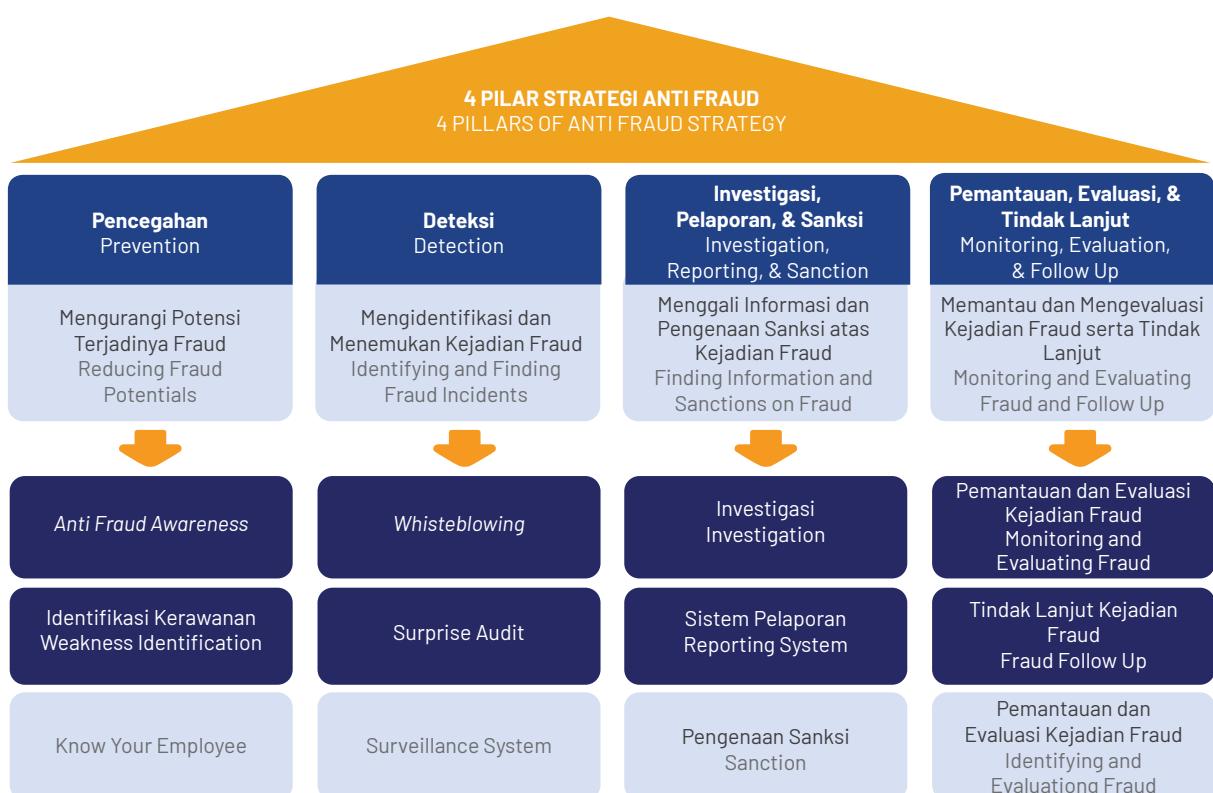
1. Pengawasan Aktif Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif
2. Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban
3. Pengendalian dan Pemantauan

Penerapan strategi anti fraud dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) pilar yang tercermin dalam *framework* di bawah ini:

Implementation of Risk Management in the context of controlling the risk of fraud, must be carried out by strengthening several aspects, including the following:

1. Active Oversight of the Board of Directors and Executive Directors
2. Organizational Structure and Accountability
3. Control and Monitoring

The implementation of the anti-fraud strategy is carried out based on 4 (four) pillars which are reflected in the framework below:



Sumber: PDE No.0045/PDE/10/2019 tentang Manual Operasional Penerapan Strategi Anti Fraud LPEI.  
Source: PDE No.0045/PDE/10/2019 concerning Operational Manual for the Implementation of the LPEI Anti-Fraud Strategy:

## BUY BACK SAHAM DAN BUY BACK OBLIGASI

### Share Buy Back and Bond Buy Back

Hingga berakhirnya tahun buku 2021, LPEI tidak melakukan kegiatan *buy back* obligasi. Sedangkan *buy back* saham, Lembaga bukan merupakan perusahaan publik dan seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Indonesia Eximbank did not exercise any bond buyback as of the end of fiscal year 2021, while on share buyback, the Company is not a publicly listed company and all of its shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia.

## RENCANA STRATEGIS LEMBAGA

### Institution's Strategic Plan

Dalam usahanya untuk memperbaiki kinerja yang berkelanjutan dan mencapai tujuan untuk menjadi Export Agency dengan kinerja tertinggi di ASEAN pada tahun 2025, LPEI menetapkan strategi 5 tahun ke depan yang terbagi menjadi 3 tahap yaitu:

1. Regain our Footing (periode implementasi 2020 – 2021)
2. Grow a Strong Core for LPEI & the country (periode implementasi 2022-2023)
3. Become a Lighthouse Export Agency (periode implementasi 2024-2025)

Tahun 2021 adalah tahun yang penuh tantangan bagi LPEI, dimana kondisi ekonomi masih terdampak pandemi COVID-19 namun LPEI tetap harus menjalankan mandatnya dan penugasan khusus termasuk menyalurkan Penjaminan Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam menanggapi tantangan tersebut, LPEI di tahun 2021 memiliki 8 prioritas yaitu:

1. Pengelolaan dan perbaikan kualitas aset.
2. Peningkatan Penjaminan, Pembiayaan, *Trade Finance* dan Asuransi.
3. Pelaksanaan PKE, PEN dan IP.
4. Pengembangan Bisnis UMKM & UMBE.
5. Penguatan Operasional, Risk Management, dan Tata Kelola.
6. Efisiensi Biaya yang Berkelanjutan.
7. Transformasi MIS dan Pengembangan Teknologi.
8. Pengembangan Kompetensi SDM, Pemberdayaan Budaya Kerja Lembaga dan Manajemen Kinerja yang terintegrasi.

To sustainably improve its performance and be the best performing export agency in ASEAN by 2025, Indonesia Eximbank has identified a five-year strategy that is divided into three phases:

1. Regain our Footing (implemented 2020 – 2021)
2. Grow a Strong Core for Indonesia Eximbank & the country (implemented 2022-2023)
3. Become a Lighthouse Export Agency (implemented 2024-2025)

The year 2020 was a challenging year for Indonesia Eximbank, in which the economic conditions remained impacted by the COVID-19 pandemic. Nevertheless, Indonesia Eximbank shall continue its mandates and NIA including government guarantee for the recovery of national economy (PEN). In responding to these challenges. Indonesia Eximbank has 8 priorities in 2021:

1. Assets quality management and improvement.
2. Improvements on Guarantee, Financing, Trade Finance, and Insurance.
3. Implementation of PKE, PEN and IP.
4. Business development for MSMEs & SME-Export.
5. Strengthening of Operations, Risk Management, and Governance.
6. Sustainable Cost Efficiency.
7. MIS Transformation and Technology Development.
8. Development of HR Competence, Empowerment of Work Culture, and an integrated Performance Management.



# PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

## Distribution of Fund To Related Parties and Large Exposures

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, LPEI tidak memiliki transaksi dengan pihak terkait. Namun LPEI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi yaitu pihak yang mempunyai hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Selama tahun 2019, LPEI tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP). Laporan BMPP secara berkala telah dilaporkan kepada regulator sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 140/PMK.010/2009 dan POJK 040/POJK.05/2015.

In its business activity implementation, Indonesia Eximbank does not render any transaction with relevant parties. However, Indonesia Eximbank performs transaction with related parties namely parties under the ownership and/ or management relations. All transactions with related parties have been implemented in accordance with the prevailing policies. During 2019, Indonesia Eximbank did not violate or exceed the Legal Lending Limit (LLL). The Legal Lending Limit report is periodically submitted to the regulators according to the Finance Minister Regulation No. 140/PMK.010/2009 and POJ K 040/ POJK.05/2015.



# PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEPENTINGAN POLITIK

## Funding For Social Activities and Political Interests

### Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial

Pemberian dana untuk kegiatan sosial di LPEI dilakukan dalam bentuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dipaparkan pada bagian CSR di Laporan Tahunan ini.

### Pemberian Dana Untuk Kepentingan Politik

Selama tahun 2021, LPEI tidak memberikan dana untuk kegiatan politik.

### Funding for Social Activities

Funding for Social Activities in Indonesia Eximbank is acted in the form of Corporate Social Responsibility (CSR) which is presented in the CSR section of this Annual Report.

### Funding for Political Purposes

Indonesia Eximbank did not fund any political activities in 2021.



# LAPORAN KEBERLANJUTAN

## Sustainability Report

LPEI mewujudkan komitmen pemberian fasilitas pembiayaan, penjaminan dan penutupan asuransi ramah lingkungan melalui penerapan kebijakan ketentuan internal dan komitmen pengelolaan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) yang telah diintegrasikan ke dalam proses penyediaan produk dan layanan keuangan yang disediakan.

To realize sustainability goals, Indonesia Eximbank has been exercising green financing, guarantee, and insurance services through its internal policies and commitment to incorporate environmental, social, and governance (ESG) principles in its financial services and products.





# IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN

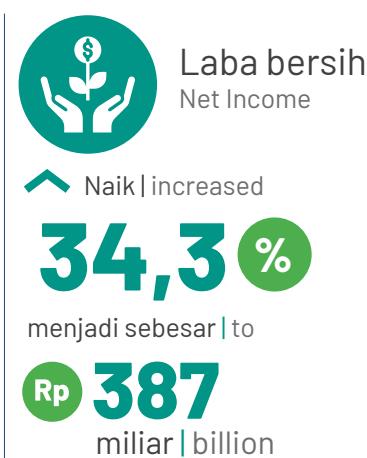
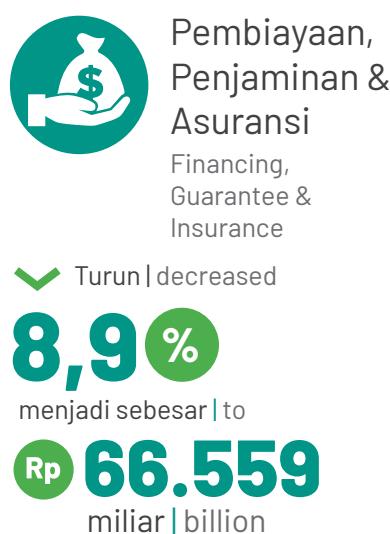
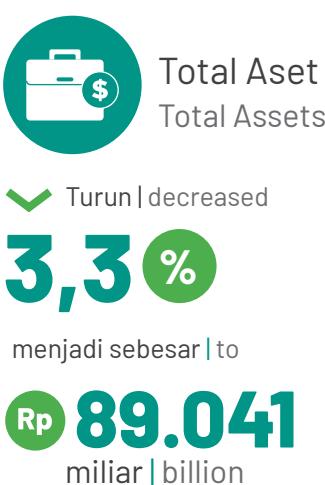
Sustainable Performance Highlights

## ASPEK EKONOMI

Economic Aspect

LPEI mencatatkan kinerja ekonomi yang selaras dengan kondisi usaha.

Indonesia Eximbank recorded economic performance in line with business conditions.



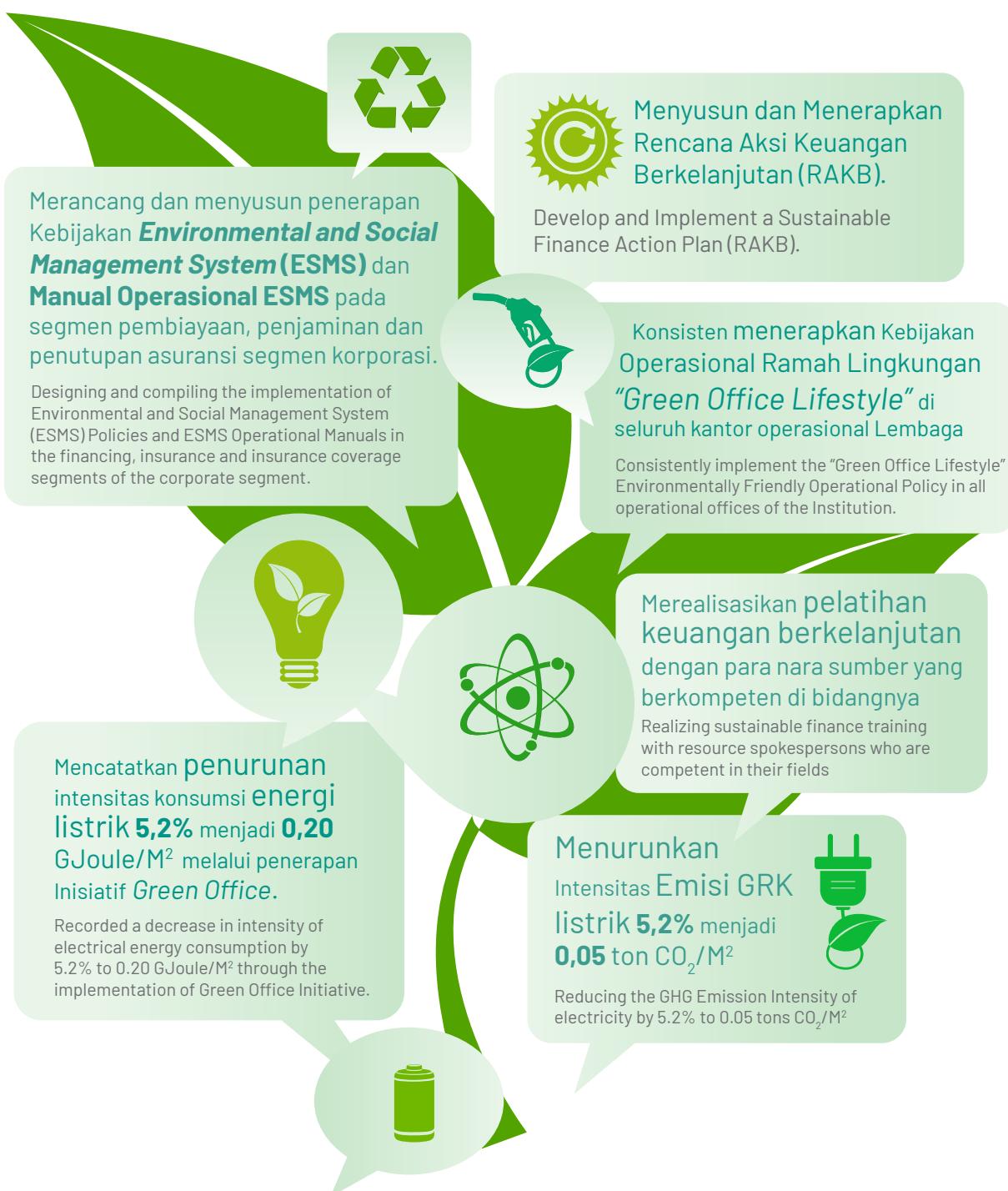
Distribusi Perolehan  
Nilai Ekonomi  
Distribution of Economic  
Value Acquisition

✓ Turun | Decreased  
**17,4 %**  
menjadi | to  
**Rp 3.876**  
miliar | billion

IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN  
Sustainable Performance Highlights

## ASPEK LINGKUNGAN

## Environmental Aspect



## ASPEK TANGGUNG JAWAB PRODUK

### Product Responsibility Aspect



## ASPEK PEMBERDAYAAN KOMUNITAS

### Community Empowerment Aspect





## ASPEK PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

### Human Resources Management Aspects

Merekrut **56** orang pegawai baru, dan memproses pemutusan hubungan kerja terhadap **45** orang pegawai karena berbagai sebab.

Recruited 56 new employees, and processed the termination of 45 employees due to various reasons.

Mengelola total pegawai di tahun 2021 adalah **567** orang.

Managing a total of 567 employees in 2021.

Menyelenggarakan **8** kelompok program pelatihan dan pengembangan pegawai.

Organized 8 groups of employee training and development programs.



Rata-rata *man-days* pelatihan per tahun adalah **4,28** *man-days* pelatihan/karyawan.

- The average man-days of training per year was 4.28 man-days of training/ employee.





# KERANGKA DAN STRATEGI KEBERLANJUTAN LPEI

Sustainability Framework and Strategy



LPEI Meluncurkan  
2 produk inovasi,  
yakni  
**Piutang Dagang**  
yaitu *Discretionary  
Limit (DCL)* dan  
**produk berdasarkan  
prinsip Syariah**

Indonesia Eximbank Launched 2 products innovation, namely Trade Receivables such as Discretionary Limit (DCL) and products based on Sharia principles

## KOMITMEN [103-1]

Sebagai lembaga penerima mandat untuk melakukan kegiatan pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi kegiatan ekspor sesuai Undang-Undang No. 2 tahun 2009, dalam menjalankan aktivitasnya LPEI berkomitmen penuh untuk memperhatikan kinerja aspek sosial dan lingkungan, selain aspek ekonomi. LPEI menyadari bahwa risiko pembiayaan dan reputasi dapat timbul dari aktivitas proyek yang mengancam kelestarian lingkungan. Kegiatan LPEI berupa penyaluran

## COMMITMENT [103-1]

As an institution receiving the mandate to carry out financing, guarantee, insurance and advisory services for export activities governed by the Law No. 2 of 2009, Indonesia Eximbank is fully committed to take into account the performance of social and environmental aspects apart from the economic aspects. Indonesia Eximbank realizes that financing and reputational risks may arise from project activities that threaten environmental sustainability. Indonesia Eximbank's

## KERANGKA DAN STRATEGI KEBERLANJUTAN LPEI

### Sustainability Framework and Strategy

pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi yang ramah lingkungan tentu dapat membantu LPEI menurunkan risiko pada pelaku ekspor dan membantu memastikan keberlangsungan usaha dengan baik sehingga akan berdampak pada perkembangan ekspor Indonesia di masa mendatang.

Komitmen LPEI tersebut selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan skala global dalam *Sustainable Development Goals*(SDGs), dimana program-program yang dijalankan senantiasa mengutamakan terciptanya keseimbangan manfaat yang sebesar-besarnya pada aspek sosial, terjaganya lingkungan dan terjaminnya pertumbuhan usaha.

Pencapaian keseimbangan kinerja pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan diupayakan melalui pemenuhan harapan para pemangku kepentingan sesuai sumber daya yang tersedia. Untuk itu, LPEI juga memperhatikan dengan cermat harapan para pemangku kepentingan melalui pengelolaan hubungan yang bermartabat dan berkualitas.

#### **Komitmen Terhadap SDGs**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, LPEI selalu fokus dan sejalan dengan mandat yang tertuang dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2009, yaitu mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah serta Koperasi dalam mengembangkan produknya melalui kegiatan bimbingan/jasa konsultasi untuk meningkatkan kapasitas baik dari sisi penguatan Sumber Daya Manusia serta produknya. Dalam pelaksanaannya LPEI bersinergi baik di tingkat nasional, tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan melibatkan filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pakar yang sesuai dibidangnya.

Hal ini sejalan dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan serta pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat.

#### **Komitmen Terhadap ESG**

Sebagai salah satu Lembaga yang dibentuk pemerintah RI dalam upaya mendukung dan menciptakan pelaku-pelaku usaha baru yang berdaya saing tinggi, LPEI melakukan kegiatan pelatihan/capacity building bagi pelaku usaha baik yang baru merintis usaha, yang sudah berjalan namun tidak berkelanjutan, untuk dapat menjadi pelaku-pelaku usaha baru yang bertanggung jawab dan berkesinambungan yang sejalan dengan isu

activities that encompass financing, guarantee, insurance and environmentally friendly advisory services can certainly help the Institution to reduce risk to exporters and help ensure good business continuity, hence it will have an impact on the development of Indonesia's exports in the future.

Indonesia Eximbank's commitment is in line with the concept of global-scale sustainable development in the Sustainable Development Goals (SDGs), where the programs prioritize the creation of ample balance of benefits in social aspects, environmental conservation and guarantee business growth.

Achieving performance balance in economic, social and environmental aspects is pursued through fulfilling the expectations of stakeholders according to available resources. To that end, Indonesia Eximbank also takes into account the expectations of stakeholders through dignified and quality relationship management.

#### **Commitment to SDGs**

Indonesia Eximbank has always been focused in carrying out its business activities and in line with the mandate stated in Law No. 2 of 2009, which encourages the development of micro, small, and medium enterprises and Cooperatives in developing their products through advisory guidance activities to increase capacity in terms of strengthening Human Resources and their products. In its implementation, the Institution synergizes at the national, provincial and district/city levels by engaging philanthropists, business players, academics and experts in their fields.

This is in line with the Sustainable Development Goals (SDGs), a development that maintains the continuous improvement of the community economic welfare and maintains the sustainability of the community social life.

#### **Commitment to ESG**

As one of the institutions established by the Indonesian government in an effort to foster and create a new and highly competitive business community the Institution conducts training/capacity building activities for business practitioners, for business start-ups, business that are already running however are not sustainable, to become responsible and sustainable new business entities, in line with environmental, social and corporate

## KERANGKA DAN STRATEGI KEBERLANJUTAN LPEI

### Sustainability Framework and Strategy

lingkungan, sosial, dan tata Kelola perusahaan melalui kegiatan CPNE, rumah ekspor serta *business matching*.

#### PENDEKATAN KEBERLANJUTAN [103-2]

Landasan pencapaian tujuan keberlanjutan adalah terpenuhinya harapan para pemangku kepentingan. Untuk itu, LPEI mengidentifikasi para pemangku kepentingan dan menganalisis seberapa penting topik-topik keberlanjutan yang akan dikembangkan. Identifikasi pemangku kepentingan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, termasuk diantaranya dampak potensial yang mungkin dialami dan ditimbulkan oleh kegiatan operasional, juga *benefit* yang ditimbulkannya, selain mempertimbangkan kemampuan pemangku kepentingan dalam mempengaruhi pencapaian target kerja LPEI.

Mengingat bidang usaha LPEI adalah memberikan fasilitas pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi untuk meningkatkan ekspor nasional, maka dukungan pencapaian tujuan keberlanjutan secara nyata yang dapat dilakukan adalah kemampuan LPEI dalam merancang, menerapkan dan mengawasi implementasi kebijakan pemberian jasa-jasa dimaksud yang ramah lingkungan. Dalam artian, kemampuan LPEI untuk menyeleksi dan mengawasi para nasabah agar senantiasa mematuhi peraturan perundangan di bidang lingkungan dan sosial. Kemampuan dimaksud direpresentasikan pada dokumen Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang disusun, diterapkan dan dievaluasi secara berkala.

#### SASARAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN [103-3]

Saat ini, hampir seluruh negara yang bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyepakati untuk menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan SDGs dalam merancang program-program pembangunan di masing-masing negaranya. SDGs terdiri atas 17 rumusan tujuan pembangunan berkelanjutan skala global yang akan diterapkan dalam kurun waktu 2016-2030, sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut.

governance issues through CPNE activities. export house and business matching.

#### SUSTAINABILITY APPROACH [103-2]

Fulfilling stakeholders' expectations becomes the foundation to achieve sustainability goals. To that end, the Institution identifies stakeholders and analyses the importance of sustainability topics for further development. Stakeholders' identification is carried out by considering several aspects, including the potential impacts that may be experienced and caused by operational activities, as well as the benefits that arise, apart from considering the ability of stakeholders to influence the achievement of the Institution work targets.

Considering that the Institution's line of business is to provide financing, guarantee, insurance and advisory to foster the national exports, the tangible support to achieve sustainability goals is the Institution's ability to design, implement and supervise the implementation of policies on services provided that are environmentally friendly. In a sense, the Institution's ability to select and supervise its customers to always comply with the laws and regulations in the environmental and social fields. This capability is represented in the Sustainable Finance Action Plan document which is prepared, implemented and evaluated periodically.

#### TARGETS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS [103-3]

Currently, almost all members of the United Nations have agreed to apply the concept of SDGs sustainable development in designing development programs in their respective countries. The SDGs consist of 17 formulations of global scale sustainable development goals that will be implemented in the 2016-2030 period, as illustrated in the following illustration.

## KERANGKA DAN STRATEGI KEBERLANJUTAN LPEI

### Sustainability Framework and Strategy



Sebagai bentuk komitmen terhadap pencapaian tujuan tersebut Pemerintah Indonesia telah mencanangkan Rencana Aksi Nasional(GRK), di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), untuk memastikan keberhasilan program penurunan emisi GRK hingga sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% jika mendapatkan dukungan masyarakat global, di akhir tahun 2030 mendatang, dibandingkan dengan kondisi bisnis seperti biasanya. Terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik (POJK 51/2017) merupakan salah satu upaya yang ditempuh untuk memastikan pencapaian target tersebut.

## STRATEGI KEBERLANJUTAN LPEI

Sebagai sebuah entitas yang dimiliki oleh Pemerintah LPEI mendukung penuh komitmen Pemerintah Indonesia dalam Paris Agreement tersebut, dengan berupaya keras menerapkan berbagai aturan agar nasabah menaati dan menjalankan ketentuan dalam pemberian fasilitas pembiayaan, penjaminan, asuransi maupun konsultasi kegiatan ekspor, yang ditetapkan LPEI dengan mempertimbangkan pemenuhan aspek-aspek lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) yang selaras dengan pencapaian tujuan keberlanjutan dalam SDGs tersebut. LPEI juga berupaya menerapkan prinsip-prinsip kegiatan operasional ramah lingkungan.

As a form of commitment to the achievement of these goals, the Government of Indonesia has launched a National Action Plan (GRK), under the coordination of the National Development Planning Agency (Bappenas), to ensure the success of the GHG emission reduction by up to 29% with its own efforts, and by the end of 2030 to reach 41% with the global community support, compared to business as usual. The issuance of the Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies (POJK 51/2017) is one of the efforts taken to ensure the achievement of these targets.

## SUSTAINABILITY STRATEGY

As an entity under the Government's ownership, the Institution fully supports the Government of Indonesia's commitment to the Paris Agreement, by applying various rules that aims to ensure its customers to comply and implement the rules on Financing, guarantee, insurance and advisory on export activities, which are determined by the Institution by taking into account the fulfillment of environmental, social and governance (ESG) aspects that are in line with the achievement of sustainable goals in the SDGs. The Institution also strives to apply the principles of environmentally friendly operational activities.

## KERANGKA DAN STRATEGI KEBERLANJUTAN LPEI

### Sustainability Framework and Strategy

Untuk memastikan maksimalnya dukungan LPEI terhadap pencapaian tujuan keberlanjutan tersebut, sesuai bidang usahanya, Lembaga menyusun strategi dukungan pencapaian keberlanjutan dalam bentuk penerapan Keuangan Berkelanjutan, sebagaimana diuraikan pada bahasan berikut.

#### Prioritas Implementasi Keuangan Berkelanjutan

LPEI menetapkan prioritas implementasi keuangan berkelanjutan sesuai dengan pedoman teknis POJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emitter, dan Perusahaan Publik dan memperhatikan faktor-faktor eksternal dan internal Lembaga. Dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan, yang tercantum dalam *Road Map Aksi Keuangan Berkelanjutan LPEI* tahun 2021-2025. Untuk tahun 2021 LPEI melanjutkan program persiapan penerapan aksi keuangan berkelanjutan dengan mensosialisasikan pedoman atau regulasi di LPEI mengenai penerapan keuangan berkelanjutan.

#### Uraian Aktivitas Implementasi Keuangan Berkelanjutan

Aktivitas dari implementasi program keuangan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

##### 1. Pembentukan unit khusus pengelola keuangan berkelanjutan

Dalam rangka penyesuaian struktur organisasi dapat dilakukan dengan menambah tupoksi keuangan berkelanjutan pada unit yang sudah ada atau menambah unit khusus yang menjalankan program-program keuangan berkelanjutan. LPEI membentuk unit khusus dimaksud guna memastikan efektivitas dan efisiensi penerapan keuangan berkelanjutan di LPEI.

##### 2. Penyusunan pedoman keuangan berkelanjutan

LPEI menyusun pedoman Keuangan Berkelanjutan sebagai pegangan dalam melaksanakan program dan aktivitas keuangan berkelanjutan.

##### 3. Pelaksanaan edukasi internal bekerjasama dengan berbagai pihak eksternal untuk meningkatkan kompetensi LPEI terhadap Aksi Keuangan Berkelanjutan, dibutuhkan edukasi internal secara menyeluruh.

Adapun edukasi internal yang akan dilaksanakan mencakup sebagai berikut:

To ensure maximum support for the achievement of these goals according to their line of business, the Institution has developed a strategy to foster the achievement of sustainability by implementing Sustainable Finance, as described in the following discussion.

#### Priorities for Sustainable Finance Implementation

Indonesia Eximbank sets the priorities for sustainable finance implementation in accordance with POJK technical guidelines No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies and takes into account the Institution's external and internal factors in implementing sustainable finance, which stated in the Sustainable Finance Action Road Map for 2021-2025. For 2021, the Institution will continue the preparation program to carry out sustainable finance actions by disseminating guidelines or regulations regarding the application of sustainable finance.

#### Sustainable Finance Implementation Activities

The activities of sustainable finance programs are as follows:

##### 1. Establishment of a special unit for sustainable finance management

The adjustment of organizational structure can be done by adding the mainstay of sustainable finance to the existing units or adding a special unit that performs sustainable finance programs. Indonesia Eximbank establishes a special unit to ensure the effectiveness and efficiency of implementing sustainable finance at the Institution.

##### 2. Preparation of sustainable finance guidelines

Indonesia Eximbank prepares Sustainable Finance guidelines as a guide in implementing sustainable finance programs and activities.

##### 3. Implementation of internal education in collaboration with various external parties to improve Indonesia Eximbank's competence towards Sustainable Finance Action, requires comprehensive internal education.

The internal education that will be carried out includes the following:

## KERANGKA DAN STRATEGI KEBERLANJUTAN LPEI

Sustainability Framework and Strategy

- Peningkatan kompetensi pegawai Satuan Aksi Keuangan Berkelanjutan
  - Melakukan pelatihan keuangan berkelanjutan kepada pegawai; dan
  - Pelatihan penyusunan laporan keberlanjutan kepada para pegawai.
- 4. Implementasi target dan alokasi dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSLS)**
- LPEI menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang menekankan kepada Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola.
- 5. Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan LPEI tahun 2021.**
- LPEI melakukan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dengan berpedoman pada POJK No. 51/POJK.03/2017.
- Enhance the employees' competence of the Sustainable Finance Action Unit
  - Conduct continuous financial training for employees; and
  - Training on preparing sustainability reports for employees.
- 4. Implementation of targets and allocation of Social and Environmental Responsibility (TJSLS) funds**
- Indonesia Eximbank manages the Social and Environmental Responsibility program that emphasizes on Environmental, Social, and Governance.
- 5. Preparation of the Sustainable Finance Action Plan for 2021**
- Indonesia Eximbank prepares the Sustainable Finance Action plan based on POJK No. 51/POJK.03/2017.

### RAKB LPEI 2021 - 2025

Sebagai perwujudan rangkaian aktivitas Implementasi Keuangan Berkelanjutan tersebut, LPEI telah menyelesaikan RAKB 2021-2025 sebagai acuan dalam menjalankan berbagai program dukungan pencapaian tujuan keberlanjutan, melalui ruang lingkup kelembagaan dan kegiatan usaha yang dijalankan LPEI sebagaimana diatur dalam amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009.

#### Visi dan Misi Keberlanjutan LPEI

LPEI telah menetapkan Visi dan Misi Keberlanjutan, sebagai berikut:

##### Visi Vision

Menjadi Eximbank yang unggul dan kredibel dalam mendorong eksport nasional yang berdaya saing tinggi pada tataran global

To become an Eximbank that is credible and excels in fostering the national exports of highly competitive at the global level.

### 2021 – 2025 Indonesia Eximbank's RAKB

As a manifestation of the series of Sustainable Finance Implementation activities, Indonesia Eximbank has completed the 2021-2025 RAKB as a reference in carrying out various programs to support the achievement of sustainability goals in the scope of the institution and business activities carried out by LPEI as stipulated by Law Number 2 of 2009.

#### Sustainability Vision and Mission

Indonesia Eximbank has established the Sustainability Vision and Mission, as follows:

## KERANGKA DAN STRATEGI KEBERLANJUTAN LPEI

Sustainability Framework and Strategy

<b>Misi</b>	1. Mendorong kesinambungan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekspor nasional yang berkelanjutan
<b>Mission</b>	2. Memberikan layanan pembiayaan ekspor nasional dan jasa konsultasi yang berkualitas sebagai solusi terhadap kebutuhan ekspor Indonesia.
	3. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha, termasuk usaha kecil dan menengah, untuk menghasilkan produk berorientasi ekspor yang unggul dan berdaya saing.
	1. Promote the continuity of business climate favourable to sustainable growth of the national exports.
	2. Provide the quality financing services and advisory for the national exports as a solution to Indonesia's export needs.
	3. Improve the ability of business practitioners, including the small and medium enterprises, to produce excellent and competitive export-oriented products.

### Tujuan RAKB LPEI

Tujuan program penerapan aksi keuangan berkelanjutan untuk lingkup lembaga dijabarkan sebagai berikut:

- a. LPEI memiliki dokumen *Environmental and Social Management System* (ESMS) yang disusun secara partisipatif dan menjadi langkah awal dalam program penerapan keuangan berkelanjutan;
- b. LPEI memiliki personel yang mempunyai kapasitas dan kepedulian terhadap aspek lingkungan dan sosial;
- c. Merancang dan menetapkan kerangka kebijakan lingkungan hidup dan sosial untuk Lembaga serta internalisasi ESMS dalam struktur organisasi LPEI;
- d. Integrasi dan adopsi peraturan Nasional dan Internasional dalam ESMS secara bertahap; dan
- e. Merancang dan menerapkan program pengukuran, pelaporan dan verifikasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan penerapan keuangan berkelanjutan.

Sedangkan tujuan program penerapan keuangan berkelanjutan untuk lingkup Kegiatan Usaha LPEI adalah:

- a. LPEI memiliki dokumen *Environmental and Social Management System* (ESMS) untuk lingkup Kegiatan Usaha;
- b. Adopsi aspek lingkungan hidup dan Sosial dalam proses pembiayaan LPEI untuk Kegiatan Usaha;
- c. LPEI memiliki personel yang berkompeten dalam menilai aspek perlindungan lingkungan dan sosial;

### The Purpose of RAKB

The objectives of the sustainable finance actions program in the scope of the institution are described as follows:

- a. Indonesia Eximbank has an Environmental and Social Management System (ESMS) document that prepared in a participatory manner and is the first step in implementing sustainable finance;
- b. Indonesia Eximbank has personnel with the capacity and concern for environmental and social aspects;
- c. Designing and establishing an environmental and social policy framework for the Institution as well as internalizing ESMS within the Institution's organizational structure;
- d. Gradual integration and adoption of National and International regulations in the ESMS; and
- e. Designing and implementing a program for measuring, reporting and verifying the success of sustainable finance activities.

The objectives of sustainable finance program for the scope of Institution's Business Activities are as follows:

- a. Indonesia Eximbank has an Environmental and Social Management System (ESMS) document for the scope of Business Activities;
- b. Adoption of environmental and social aspects in the financing process for business activities;
- c. Indonesia Eximbank has personnel who are competent in assessing aspects of environmental and social preservation;

## KERANGKA DAN STRATEGI KEBERLANJUTAN LPEI

### Sustainability Framework and Strategy

- d. Merancang dan menetapkan kerangka kebijakan lingkungan hidup dan sosial untuk Kegiatan Usaha serta Sosialisasi ESMS untuk para debitur dan calon debitur;
- e. Integrasi dan adopsi peraturan Nasional dan Internasional dan menyepakati program lingkungan hidup dan sosial di lingkup Kegiatan Usaha pada periode berikutnya; dan
- f. Merancang dan menerapkan program pengukuran, pelaporan dan verifikasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan penerapan keuangan berkelanjutan di lingkup Kegiatan Usaha.
- d. Designing and establishing an environmental and social policy framework for Business Activities as well as ESMS socialization for borrowers and prospective borrowers;
- e. Integration and adoption of National and International regulations and agreeing on environmental and social programs in the scope of Business Activities in the next period; and
- f. Designing and implementing a program for measuring, reporting and verifying the success of sustainable finance activities in the scope of Business Activities.

Strategi yang dijalankan untuk mencapai tujuan rencana aksi keuangan berkelanjutan tersebut adalah:

- a. Penyusunan kebijakan, manual, sistem dan prosedur terkait penerapan rencana aksi keuangan berkelanjutan;
- b. Penyesuaian struktur organisasi dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia terkait pengelolaan rencana aksi keuangan berkelanjutan;
- c. Pelaksanaan integrasi aspek sosial dan lingkungan hidup ke dalam pengelolaan risiko serta peningkatan pertumbuhan portofolio pembiayaan dan/atau pada kegiatan usaha berwawasan lingkungan.

#### Prioritas Program Keuangan Berkelanjutan

Sesuai rujukan dalam POJK 51, LPEI telah menetapkan 3(tiga) prioritas implementasi Keuangan Berkelanjutan, yakni:

- a. Pengembangan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan, termasuk peningkatan portofolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan;
- b. Pengembangan kapasitas intern; atau
- c. Penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/atau standar prosedur operasional (*standard operating procedure*) yang sesuai dengan prinsip penerapan Keuangan Berkelanjutan.

#### Kegiatan Prioritas Di Tahun 2021

LPEI telah memetakan serangkaian Kegiatan Prioritas yang akan dijalankan dalam kurun waktu 5 tahun, dalam roadmap RAKB 2021-2025, sebagai kelanjutan dan pembaharuan dari Roadmap RAKB 2020-2024.

The following are strategies implemented to achieve the objectives of sustainable finance action plan:

- a. Formulation of policies, manuals, systems and procedures related to the implementation of sustainable finance action plans;
- b. Adjustment of organizational structure and fulfillment of human resource needs related to sustainable finance action plan management;
- c. Implementation of the integration of social and environmental aspects into risk management as well as increasing the growth of financing portfolio and/or in environmentally sound business activities.

#### Sustainable Finance Program Priorities

In referring to POJK 51, Indonesia Eximbank has determined 3(three) priorities for the implementation of Sustainable Finance, which are:

- a. Development of Sustainable Finance products and/or services, including to increasing the portfolio of financing, investments or placements in financial instruments or projects that are in line with Sustainable Finance;
- b. Internal capacity development; or
- c. Adjustment of organization, risk management, governance, and/or standard operating procedures in accordance with the principles of Sustainable Finance.

#### Priority Activities in 2021

Indonesia Eximbank has mapped out a series of Priority Activities that will be carried out within a period of 5 years in the 2021-2025 RAKB roadmap, as a continuation and renewal of the 2020-2024 RAKB Roadmap.

## KERANGKA DAN STRATEGI KEBERLANJUTAN LPEI

Sustainability Framework and Strategy

Adapun untuk tahun 2021, Kegiatan Prioritas akan dilaksanakan, adalah:

1. Penyusunan kebijakan, manual, dan *standard operating procedure* (SOP) atas penerapan RAKB;
2. Peningkatan kapasitas SDM untuk aksi keuangan berkelanjutan.

Adapun penanggung jawab pelaksanaan RAKB adalah: Direktur Eksekutif LPEI; Direktur Pelaksana yang membidangi ESMS; Unit Kerja Manajemen Risiko; Unit Kerja Sumber Daya Manusia; dan Task Force hingga terbentuknya satuan kerja/unit kerja yang mendukung implementasi kebijakan ESMS.

### Kondisi Saat Ini

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, saat ini LPEI telah memiliki kebijakan, peraturan dan manual yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dan beberapa hal sudah memenuhi dan mengadopsi peraturan yang berlaku tentang lingkungan dan sosial, antara lain terdapat pada:

- Hierarki Peraturan dalam LPEI.
- Standar Pengelolaan Kepegawaian.
- Kebijakan Efisiensi Energi dan Sumber Daya.
- Prinsip Kehati-hatian dan Prinsip Pembiayaan yang Sehat.
- *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- Aspek Lingkungan dan Sosial.

Di dalam Manual Operasional Pembiayaan, LPEI telah mempunyai mekanisme analisis pembiayaan yang tertuang dalam Memorandum Analisa Pembiayaan yang menganalisis kualitas dan kuantitas dari calon debitur.

Di dalam analisis kualitas dijelaskan bahwa LPEI perlu menghindari pemberian pembiayaan untuk proyek atau usaha yang secara nyata membahayakan lingkungan. Aspek-aspek yang dipertimbangkan antara lain:

- Pendirian, perizinan, kewenangan dan *track record* perusahaan/debitur;
- Industri dan usaha debitur;
- Karakter manajemen;
- Pemasaran;
- Teknis Produksi; dan
- Aspek sosial dan AMDAL.

As for 2021, the Priority Activities that will be carried out are:

1. Formulation of policies, manuals, and standard operating procedures (SOP) for the implementation of RAKB;
2. Capacity building of human resources for sustainable financial action.

The following are organs in charge of implementing the RAKB: Executive Director; Managing Director in charge of ESMS; Risk Management Unit; Human Resources Unit; and the Task Force until the formation of a unit that supports the implementation of ESMS policy.

### Present Conditions

Indonesia Eximbank currently has in place policies, regulations and manuals used as guidelines in conducting its operational activities and several things that have complied with and adopted the applicable environmental and social regulations, including:

- Regulatory Hierarchy within the Institution.
- Personnel Management Standards.
- Energy and Resource Efficiency Policy.
- Prudential Principles and Sound Financing Principles.
- Corporate Social Responsibility (CSR).
- Environmental and Social Aspects.

In the Financing Operations Manual, Indonesia Eximbank has in place a financing analysis mechanism contained in the Memorandum of Financing Analysis which analyses the quality and quantity of prospective borrowers.

The quality analysis explained the prevention for Indonesia Eximbank in providing financing for projects or businesses that actually endanger the environment. The aspects considered include:

- Establishment, licensing, authority and track record of the company/borrower;
- Industry and business of the borrower;
- Management character;
- Marketing;
- Production Technical; and
- Social aspects and AMDAL.

## KERANGKA DAN STRATEGI KEBERLANJUTAN LPEI

### Sustainability Framework and Strategy

Di dalam mekanisme pembiayaan, aspek AMDAL juga menjadi bahan pertimbangan di dalam analisis proses bisnis. Aspek AMDAL yang tercantum di dalam analisis bisnis tersebut antara lain izin dari instansi berwenang dan hal-hal lain yang dipandang perlu terkait aspek AMDAL.

Melalui implementasi langkah-langkah strategis dalam RAKB tersebut, LPEI mendukung terwujudnya manfaat jangka panjang berupa terjadinya perbaikan kondisi lingkungan dan kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan dari kegiatan usaha pembiayaan, penjaminan, asuransi maupun konsultasi kegiatan ekspor yang dijalankannya. [102-40, 102-42, 102-43, 102-44]

In the financing mechanism, the AMDAL aspect is also considered in the business process analysis. AMDAL aspects listed in the business analysis include permits from authorized agencies and other matters deemed necessary related to AMDAL aspects.

Through the implementation of the strategic measures in the RAKB, Indonesia Eximbank supports the realization of long-term benefits by improving environmental conditions and the welfare of all stakeholders from its financing, guarantee, insurance and advisory for its export activities. [102-40, 102-42, 102-43, 102-44]



# KINERJA EKONOMI

Economics Performance



Distribusi  
Perolehan Nilai  
Ekonomi Turun  
**17,4%**  
menjadi  
**Rp 3.876**  
miliar

Distribution of Economic  
Value Acquisition  
decreased by 17.4% to  
Rp3,876 billion

## KOMITMEN DAN KEBIJAKAN [103-1, 103-2, 103-3]

LPEI berkomitmen penuh untuk mewujudkan dan menjalankan Visi dan Misi Lembaga dengan menyusun strategi pengembangan usaha, termasuk strategi pencapaian tujuan keberlanjutan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RAKT) dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Tujuan dari pelaksanaan Visi dan Misi serta penyusunan strategi tersebut adalah optimalnya kinerja pada aspek sosial, ekonomi dan lingkungan secara berimbang.

## COMMITMENTS AND POLICIES [103-1, 103-2, 103-3]

LPEI is fully committed to realizing and implementing the Vision and Mission of the Institution by formulating a business development strategy, including a strategy to achieve sustainability goals as in the Annual Business Plan and Budget (RAKT) and Sustainable Finance Action Plan (RAKB) documents. By implementing the Vision and Mission as well as the formulation of strategy, the Institution's optimizes the performance on social, economic and environmental aspects in a balanced manner.

## KINERJA EKONOMI

### Economics Performance

LPEI menjalankan upaya-upaya antisipatif guna memastikan tercapainya Visi dan Misi Lembaga, selain tercapainya pertumbuhan skala usaha yang sehat sekaligus berkesinambungan dengan menerapkan:

1. Pengelolaan dan Perbaikan Pembiayaan NPL.
2. Pelaksanaan Relaksasi Pembiayaan Terdampak COVID-19.
3. Pengelolaan Likuiditas LPEI yang Sustainable dan Efisien.
4. Penerapan *Cost Efficiency* secara Optimal.
5. Peningkatan Pembiayaan NIA, Penjaminan, Asuransi, dan *Trade Finance*.
6. Penguatan Organisasi Kelembagaan.
7. Penguatan Komunikasi kepada Stakeholders.
8. Pemenuhan Rekomendasi Auditor Eksternal.
9. Penguatan Operasional, Tata Kelola, dan Manajemen Risiko.

Upaya-upaya tersebut merupakan bagian dari tiga fokus sasaran strategis LPEI di tahun 2021, yakni:

1. Restrukturisasi dan efisiensi,
2. Menjalankan mandat dan bisnis secara selektif, dan
3. Penguatan Proses Internal

Uraian lengkap mengenai inisiatif dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada Bab "Diskusi dan Analisis Manajemen".

### RINGKASAN KINERJA ASPEK EKONOMI LPEI TAHUN 2021

Di tahun 2021, total aset LPEI turun 3,3% menjadi Rp89,04 triliun dari Rp92,09 triliun di tahun 2020, diantaranya karena adanya penurunan *outstanding Total Pembiayaan, Piutang Asuransi dan Penjaminan* sebesar 8,9% menjadi sebesar Rp66,56 miliar dari Rp73,07 miliar di tahun sebelumnya.

Komitmen LPEI untuk melaksanakan manajemen risiko pembiayaan dengan baik, serta tetap menerapkan penerapan prinsip kehati-hatian dan pelaksanaan prinsip GCG membawa hasil, sebagaimana tercermin pada rasio NPF-gross (*Non-Performing Financing/NPF-gross*) secara konsolidasi di tahun 2021 yang membaik menjadi sebesar 21,0% dari 26,1% di tahun 2020. Kemudian NPL-net secara konsolidasi di tahun 2021 membaik menjadi sebesar 7,1% dari posisi sebesar 11,5% di tahun 2020.

LPEI mencatatkan total pendapatan pada tahun pelaporan mencapai nilai sebesar Rp4,26 triliun, turun 16,4% dari tahun 2020 yang sebesar Rp5,10 triliun. Namun

Indonesia Eximbank carries out anticipatory efforts to achieve its Vision and Mission, in addition to achieving sound and sustainable business growth by implementing:

1. Management and Improvement of NPL Financing.
2. Implementation of the Relaxation of Financing Affected by the COVID-19.
3. Sustainable and Efficient Liquidity Management.
4. Optimal Implementation of Cost Efficiency.
5. Increasing NIA Financing, Guarantee, Insurance, and Trade Finance.
6. Strengthening Institutional Organizations.
7. Strengthening Communication to Stakeholders.
8. Fulfillment of External Auditor Recommendations.
9. Strengthening Operations, Governance, and Risk Management.

These efforts are part of three focuses of Indonesia Eximbank strategic targets in 2021, which are:

1. Restructuring and efficiency,
2. Execute mandates and business selectively, and
3. Strengthening Internal Process

A complete description of these strategic initiatives and targets is presented in the Chapter of "Management Discussion and Analysis".

### SUMMARY OF LPEI ECONOMIC ASPECT PERFORMANCE IN 2021

Indonesia Eximbank's total assets decreased by 3.3% to Rp89.04 trillion in 2021 from Rp92.09 trillion in 2020, partly due to a decrease in the outstanding Total Financing, Insurance Receivables and Guarantees by 8.9% to Rp66.56 billion from Rp73.07 billion in the previous year.

Indonesia Eximbank's commitment to carry out proper financing risk management, as well as continue to apply prudential principles and the implementation of GCG principles has yielded results, as reflected in the consolidated gross NPL (*Non-Performing Loan/NPL-gross*) ratio in 2021 which improved to 21.0% from 26.1% in 2020. The consolidated net NPL in 2021 improved to 7.1% from 11.5% in 2020.

Indonesia Eximbank recorded total revenue in the reporting year of Rp4.26 trillion, decreased by 16.4% from Rp5.10 trillion in 2020. However, Indonesia

## KINERJA EKONOMI

Economics Performance

demikian LPEI berhasil menurunkan beban bunga, dan beban pembentukan CKPN dengan persentase yang lebih besar dari penurunan pendapatan.

Pada akhirnya secara keseluruhan, LPEI mencatatkan kenaikan laba bersih tahun berjalan 2021 sebesar 34,3% menjadi sebesar Rp387 miliar dari tahun 2020 yang sebesar Rp288 miliar.

Pembahasan lebih rinci mengenai kinerja keuangan tersebut dapat dilihat pada uraian Bab Diskusi dan Analisis Manajemen pada Laporan Tahunan ini.

Adapun ringkasan perubahan posisi neraca dan tabel rugi laba LPEI di tahun 2020 & 2021 adalah sebagai berikut.

### Ringkasan Kinerja Ekonomi LPEI 2020-2021

2020-2021 Economic Performance Summary

Uraian Description	2021	2020	Perubahan Change	
			Nilai Value	%
<strong>Ringkasan Neraca (Rp Miliar)</strong> <strong>Summary of Balance Sheet (Rp Billion)</strong>				
<strong>Total Aset Total Assets</strong>	<strong>89.041</strong>	<strong>92.085</strong>	<strong>(3.044)</strong>	<strong>-3,3%</strong>
Total Pembiayaan, Piutang Asuransi dan Penjaminan Total Financing, Insurance Receivables and Guarantees	66.559	73.066	(6.508)	-8,9%
Total Efek yang Diterbitkan – Net Total Issued Securities – Net	27.702	36.481	(8.779)	-24,1%
Total Pinjaman Diterima Total Loans Received	28.800	28.600	200	0,7%
<strong>Total Liabilitas Total Liabilities</strong>	<strong>58.921</strong>	<strong>67.288</strong>	<strong>(8.367)</strong>	<strong>-12,4%</strong>
<strong>Jumlah Ekuitas Total Equity</strong>	<strong>30.120</strong>	<strong>24.797</strong>	<strong>5.324</strong>	<strong>21,5%</strong>
<strong>Ringkasan Laba Rugi (Rp Juta)</strong> <strong>Summary of Profit and Loss (Rp Million)</strong>				
Total Pendapatan Bunga dan Usaha Syariah Total Interest Income and Sharia Business	4.264	5.103	(839)	-16,4%
Beban Bunga Interest expense	(3.057)	(4.263)	(1.206)	-28,3%

## KINERJA EKONOMI

Economics Performance

### Ringkasan Kinerja Ekonomi LPEI 2020-2021

2020-2021 Economic Performance Summary

Uraian Description	2021	2020	Perubahan Change	
			Nilai Value	%
Total Pendapatan Operasional Lainnya Total Other Operating Income	215	318	(102)	-32,2%
Total Beban Operasional Lainnya Total Other Operating Expenses	(759)	(677)	82	12,1%
Pembentukan CKPN Establishment of CKPN	(258)	(423)	(165)	-39,1%
Laba Operasional <i>Operating Income</i>	405	56	350	629,0%
Laba Sebelum Pajak Profit before tax	409	62	347	562,7%
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for the Year	387	288	99	34,3%
<b>Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan</b> <b>Total Comprehensive Income for The Year</b>	<b>402</b>	<b>398</b>	<b>4</b>	<b>1,0%</b>

### KEGIATAN OPERASIONAL MENURUT SEGMENT USAHA

Secara umum kegiatan usaha LPEI terbagi kedalam 3 Segmen Usaha, yakni: Segmen Pembiayaan, Segmen Penjaminan dan Segmen Asuransi. Segmen Pembiayaan merupakan segmen usaha dengan kontribusi terbesar, baik terhadap total asset maupun terhadap total pendapatan.

Namun demikian, sebagaimana telah disinggung pada uraian Bab - Analisa dan Pembahasan Manajemen, berdasarkan kegiatan operasional spesifik yang dijalankan, kegiatan usaha LPEI dapat dibagi lagi kedalam 7 kelompok besar, yakni:

- Penugasan Khusus
- Pembiayaan
- Penjaminan
- Asuransi
- Jasa Konsultasi
- Pengelolaan Tresuri
- *Trade Finance*

### OPERATIONAL ACTIVITIES BY BUSINESS SEGMENT

In general, Indonesia Eximbank's business activities are divided into 3 business segments, namely: the Financing Segment, the Guarantee Segment and the Insurance Segment. The Financing segment is the business segment with the largest contribution, both to total assets and to total revenue.

As mentioned in the Management Discussion and Analysis Chapter, based on the specific operational activities, Indonesia Eximbank's business activities can be further divided into 7 major groups, which are:

- National Interest Account
- Financing
- Guarantee
- Insurance
- Advisory
- Treasury
- Trade Finance

### **Penugasan Khusus [201-4]**

Kegiatan Penugasan Khusus atau *National Interest Account* (NIA) merupakan program strategis bagi LPEI, yang dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya peningkatan ekspor nasional dan perolehan devisa. Sehubungan dengan mulai merebaknya pandemi COVID-19, di tahun 2020, LPEI menjalankan program tiga program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) baru, selain PKE yang sebelumnya telah dijalankan, yakni: PKE untuk mendukung sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berorientasi ekspor, PKE Industri Penerangan, dan PKE Trade Finance.

Berlanjutnya pandemi COVID-19 di tahun 2021 membuat LPEI ditugaskan untuk melanjutkan berbagai program PKE dimaksud.

Untuk menjalankan program PKE, LPEI mendapatkan dukungan dana dari Pemerintah Indonesia, dalam bentuk Kontribusi Modal Pemerintah (KPM). Jumlah KPM untuk penugasan Khusus PKE yang diterima LPEI untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp2.500 miliar, sedangkan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp6.000 miliar.

Selain dukungan KPM untuk menjalankan program PKE, di tahun 2021 LPEI juga mendapatkan dukungan dana KPM untuk merealisasikan Program Umum, sejumlah Rp2.500 miliar. Di tahun 2020, LPEI juga mendapatkan dukungan KPM untuk Program Umum sejumlah Rp4.000 miliar.

Seluruh dana dukungan dari Pemerintah Indonesia tersebut telah disalurkan sebagaimana ditetapkan pada surat keputusan Menteri Keuangan dalam pemberian KPM dimaksud. Penjelasan lengkap mengenai Program Penugasan Khusus PKE maupun Penugasan Umum dimaksud dapat dilihat pada uraian "Analisa dan Pembahasan Manajemen".

### **Pembiasayaan [FS6]**

LPEI sebagai *Special Mission Vehicle* dapat memberikan pembiasayaan yang tidak dimiliki oleh perbankan atau lembaga keuangan komersial lainnya (*fill the market gap*) maupun bekerja sama dengan perbankan maupun lembaga keuangan untuk melakukan pembiasayaan sindikasi terhadap proyek-proyek berorientasi ekspor. Selain pembiasayaan dalam bentuk kredit modal kerja maupun kredit investasi kepada eksportir, LPEI dapat

### **National Interest Account [201-4]**

The National Interest Account (NIA) is a strategic program for Indonesia Eximbank, to foster the efforts to increase the national exports and acquisition of foreign exchange. In connection with the outbreak of the COVID-19 pandemic, in 2020, Indonesia Eximbank implemented three new Export NIA programs, in addition to the previously implemented programs, namely: NIA to support the export-oriented Small and Medium Enterprises (SME) sector, PKE Industri Penerangan, and PKE Trade Finance.

The ongoing COVID-19 pandemic in 2021 has entrusted Indonesia Eximbank with assignment to continue the various NIA programs.

To perform the NIA programs, Indonesia Eximbank receives financial support from the Government of Indonesia through the State Equity Participation (KPM). Total KPM for NIA Programs received by Indonesia Eximbank for 2021 was Rp2,500 billion, while for 2020 it was Rp6,000 billion.

Apart from KPM to perform the NIA programs, Indonesia Eximbank also received KPM funding support in 2021 to realize the General Programs at Rp2,500 billion. Indonesia Eximbank also received KPM support for the General Program in 2020 at Rp4,000 billion.

The funding from the Government of Indonesia has been disbursed as stipulated in the Decree of the Minister of Finance in granting the said KPMs. A complete explanation of the NIA Program and the General Assignments referred to is presented in the "Management Analysis and Discussion".

### **Financing [FS6]**

As a Special Mission Vehicle, Indonesia Eximbank can provide financing to fill the market gap, which is not fulfilled by banks or other commercial financial institutions or collaborate with banks and financial institutions to carry out syndicated financing for export-oriented projects. In addition to financing in the form of working capital loans and investment loans to exporters, Indonesia Eximbank can also provide financing or

## KINERJA EKONOMI

Economics Performance

pula memberikan pembiayaan kepada pihak pembeli di luar negeri dalam rangka mengimpor barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia (*Buyer's Credit*).

Sebagai wujud kontribusi terhadap pembangunan nasional dan pembangunan industri berorientasi ekspor, LPEI merealisasikan dukungan pembiayaan pada berbagai sektor ekonomi. Secara umum LPEI memberikan dukungan pembiayaan terhadap tidak kurang dari 10 sektor ekonomi. Namun demikian, LPEI lebih memfokuskan pemberian pembiayaan pada sektor-sektor berorientasi ekspor yang memiliki *multiplier effect* yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional pada umumnya, dan khususnya, menghasilkan devisa bagi ketahanan neraca pembayaran nasional.

Sektor-sektor ekonomi dimaksud adalah:

- Perindustrian
- Jasa-jasa Dunia Usaha
- Perdagangan, Restoran dan Hotel
- Pertanian, Perburuan dan Sarana Pertanian
- Pertambangan
- Pengangkutan, Pergudangan, Telekomunikasi
- Konstruksi
- Listrik, Gas dan Air
- Jasa-jasa sosial/masyarakat
- Lain-lain

Disamping menurut sektor ekonomi, Segmen Pembiayaan LPEI dapat dibagi menurut kelompok usaha, yakni: Korporasi dan UMKM. Juga dibagi menurut jenis fasilitas pembiayaan, yakni: Pembiayaan Konvensional dan Pembiayaan Syariah. Hampir seluruh Pembiayaan Syariah tertuju pada pembiayaan korporasi, khususnya untuk mendukung kegiatan perkebunan kelapa sawit.

Adapun pembiayaan menurut sektor ekonomi, kelompok usaha maupun fasilitas pembiayaan telah disampaikan pada uraian "Diskusi dan Analisis Manajemen - Segmen Usaha"

- **Dukungan Pembiayaan Ramah Lingkungan [FS1, FS3, FS5, FS8]**

LPEI menyadari bahwa seiring dengan semakin meningkatnya keprihatinan masyarakat global akan gejala perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca (GRK), sebagai salah satu lembaga pembiayaan khusus bagi kegiatan ekspor dan impor, Lembaga memiliki kewajiban untuk

buyer's credit to overseas buyers to import goods and services produced in Indonesia.

As a contribution to national development and the development of export-oriented industries, Indonesia Eximbank realizes financial support in various economic sectors. In general, Indonesia Eximbank provides financial support to no less than 10 economic sectors. However, Indonesia Eximbank focuses more on providing financing to export-oriented sectors with large multiplier effect on national economic growth in general, and in particular, generates foreign exchange for the resilience of the national balance of payments. The economic sectors are as follows:

- Industry
- Business Services
- Trade, Restaurant and Hotel
- Agriculture, Hunting and Agricultural Facilities
- Mining
- Transportation, Warehousing, Telecommunications
- Construction
- Electricity, Gas and Water
- Social/community services
- Etc

Aside from the economic sector, the Financing Segment can also be divided according to business groups, namely: Corporations and MSMEs. Also divided according to the type of financing facility, namely: Conventional Financing and Sharia Financing. Almost all Sharia financing is focused on corporate financing, especially to support oil palm plantation activities.

On financing by economic sector, business group and financing facilities are presented in the "Management Discussion and Analysis – Business Segments"

- **Eco Financing Support [FS1, FS3, FS5, FS8]**

Indonesia Eximbank realizes that in line with the increasing concern of the global community on the symptoms of climate change due to greenhouse gas (GHG) emissions, as a special financing institution for export and import activities, the Institution has an obligation to support efforts

## KINERJA EKONOMI

### Economics Performance

mendukung upaya perbaikan kondisi lingkungan. Dalam merealisasikan hal tersebut, LPEI selalu memperhatikan izin lingkungan, AMDAL dan hal-hal lainnya terkait dengan lingkungan.

Selain itu, LPEI juga mengimbau para calon nasabah maupun nasabah berorientasi ekspor untuk dapat memenuhi ketentuan kepatuhan dimaksud, yakni mereka yang mampu menunjukkan bahwa kegiatan usahanya justru memberi manfaat positif bagi perbaikan lingkungan, industri dimaksud seperti misalnya: industri energi terbarukan seperti produksi panel surya, baterai listrik dan sejenisnya; bio solar; transportasi ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik; dan lain sebagainya.

LPEI sendiri telah memiliki ketentuan internal dan komitmen pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) yang telah diintegrasikan ke dalam proses penyediaan produk dan layanan keuangan yang disediakan. Pelaksanaan kebijakan tersebut mencakup:

1. Integrasi pertimbangan pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam aktivitas pembiayaan untuk mengelola risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola secara efektif.
2. Keterlibatan dan dialog dengan nasabah/calon nasabah dengan bekerja bersama dalam perbaikan pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola untuk nasabah/calon nasabah.
3. Upaya terus menerus terhadap peluang untuk meminimalkan dampak dari pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola terhadap operasi, produk, dan layanan LPEI.
4. Pengecualian nasabah/calon nasabah yang kegiatan bisnisnya sesuai dengan *Black List Activities*. LPEI telah membuat kriteria sebagai bagian dari pedoman Pembiayaan yang Bertanggung Jawab dalam mengelola risiko-risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola. Pedoman ini menjadi referensi dan pertimbangan dalam proses pemberian keputusan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip utama pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola.

to improve environmental conditions. In realizing this, Indonesia Eximbank takes into account the environmental permits, AMDAL and other matters related to the environment.

Indonesia Eximbank also encourages prospective customers and export-oriented customers who meet or even exceed the compliance requirements, namely those who are able to ensure that their business activities actually provide positive benefits for environmental improvement. Examples of such industries are: renewable energy industries such as solar panels production, electric batteries and the like; bio-diesel; environmentally friendly transportation, such as electric vehicles; and so forth.

Indonesia Eximbank already has in place internal regulations and commitments for environmental, social and governance (ESG) management integrated into the process of providing financial products and services. The implementation of the policy includes:

1. Integration of environmental, social and governance considerations into financing activities to effectively manage environmental, social and governance risks.
2. Involvement and dialogue with customers/prospective customers by working together in improving environmental, social, and governance management for customers/prospective customers.
3. Continuous efforts towards opportunities to minimize the impact of environmental, social and governance management on Indonesia Eximbank operations, products and services.
4. Exemption of customers/prospective customers whose business activities are in accordance with the *Black List Activities*. Indonesia Eximbank has established criteria as part of the Responsible Financing guidelines in managing environmental, social and governance risks. This guideline becomes a reference and consideration in the process of providing financing decisions based on the main principles of environmental, social and governance management.

## KINERJA EKONOMI

Economics Performance

LPEI juga telah menerapkan penyaluran pembiayaan pada organisasi ramah lingkungan, seperti pelaku industri berorientasi ekspor yang bergerak dalam energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, serta organisasi yang melakukan konsep berkelanjutan.

Dalam rangka memperkuat implementasi kebijakan LST tersebut, di tahun pelaporan LPEI tengah menyusun rancangan Kebijakan tentang *Environmental and Social Management System* (ESMS) dan rancangan Manual Operasional ESMS. Penyusunan Kebijakan ESMS menjadi prioritas pertama bagi terlaksananya RAKB Lembaga. Kebijakan ESMS dimaksud kelak akan didukung oleh ketersediaan SDM yang berkompeten dan memahami konsep pembangunan berkelanjutan, keberadaan unit penanggung jawab penerapan dan pelaporan Kebijakan ESMS termasuk penerbitan laporan penerapan ESMS secara berkala baik secara internal maupun dalam Laporan Keberlanjutan.

**Pembiayaan Korporasi**

Total nilai portofolio pembiayaan korporasi LPEI per akhir tahun 2021 adalah sebesar Rp54,4 triliun atau turun sebesar 64,8% dari tahun 2020 yang senilai Rp59,3 triliun.

Sebagian dari portofolio pembiayaan korporasi tersebut adalah untuk mendukung pengembangan perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit, yang sejak beberapa tahun terakhir mendapatkan sorotan dari negara-negara kawasan Eropa terkait dengan isu kelestarian lingkungan. Oleh karenanya dalam proses *due-diligent* pembiayaan industri pengolahan kelapa sawit, LPEI mensyaratkan kepatuhan terhadap ketentuan *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan/atau *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO).

LPEI juga menerapkan ketentuan untuk dapat melakukan inspeksi ketataan nasabah terhadap ketentuan klausul pinjaman yang mencakup berbagai peraturan perundungan di bidang lingkungan terkait. Manakala terdapat praktik yang belum memenuhi ketentuan dimaksud, LPEI membuka kerjasama dengan debitur untuk mencari jalan agar berbagai ketentuan pada aspek sosial-lingkungan tersebut akhirnya dapat dipenuhi dan ditaati. [FS5]

Indonesia Eximbank has also implemented financing disbursement to environmentally friendly organizations, such as export-oriented industry players engaged in renewable energy, environmentally friendly transportation, as well as organizations implementing sustainable concepts.

To strengthen the implementation of the ESG policy, in the reporting year Indonesia Eximbank is preparing a draft Policy on Environmental and Social Management System (ESMS) and a draft of ESMS Operational Manual. The formulation of the ESMS Policy is the first priority for the implementation of the Institution's RAKB. The said ESMS policy will later be supported by the availability of competent human resources who understand the concept of sustainable development, the existence of a unit responsible for the implementation and reporting of the ESMS Policy, including the issuance of reports on the implementation of ESMS periodically, both internally and within the Sustainability Report.

**Corporate Financing**

The total value of Indonesia Eximbank's corporate financing portfolio as of the end of 2021 was Rp54.4 trillion, a decrease of 64.8% from Rp59.3 trillion in 2020.

Part of the corporate financing portfolio is to support the development of plantations and the palm oil processing industry, which in recent years have received attention from European countries related to environmental sustainability issues. As such, in the due-diligent process of financing to the palm oil processing industry, Indonesia Eximbank requires compliance with the provisions of *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) and/or the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Indonesia Eximbank also applies rules to be able to carry out inspections on borrower's compliance with the financing rules which cover various laws and regulations in the related environmental sector. When there are practices that do not meet the provisions referred to, Indonesia Eximbank opens cooperation with borrowers to find ways, hence the provisions on the socio-environmental aspects can be fulfilled and adhered to. [FS5]

- Pembiayaan Segmen UKM Berorientasi Ekspor (UKME)**

Portofolio LPEI pada segmen UKME di tahun 2021 naik sebesar Rp248 miliar atau menjadi sebesar Rp14,3 triliun dari posisi tahun 2020 yang senilai Rp14,1 triliun. Pada dasarnya LPEI menerapkan ketentuan pembiayaan untuk bagi pelaku industri yang telah masuk kelompok usaha menengah mengacu pada ketentuan yang diterapkan pada pembiayaan segmen korporasi.

Namun demikian pada proses penilaian kelayakan pembiayaan kelompok ini, LPEI lebih aktif bertindak sebagai *agent of development*, agar para debitur dapat memenuhi seluruh regulasi di bidang lingkungan yang berlaku, sehingga produknya dapat diterima di negara-negara tujuan ekspor. [FS5, FS7]

Dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi dari para pelaku usaha dari kelompok UKM, LPEI meluncurkan program Desa Devisa. Suatu program pemberdayaan masyarakat di berbagai daerah, yang memiliki sumber daya alam maupun potensi lainnya, yang memiliki nilai jual tinggi di pasar ekspor. Untuk tahun 2021, LPEI mendukung pengembangan Desa Devisa di lima daerah potensial, sebagai berikut.

- Financing for Export-Oriented SME Segment (SMEE)**

Indonesia Eximbank's portfolio in the SMEE segment in 2021 increased by Rp248 billion or to Rp14.3 trillion from the 2020 position of Rp14.1 trillion. Basically, Indonesia Eximbank applies financing rules for industries who have entered the medium-sized business group referring to the provisions applied to financing the corporate segment.

However, in the assessment process of financing feasibility of this group, Indonesia Eximbank is more active in acting as an agent of development for borrowers to comply with all applicable environmental regulations, so that their products can be accepted in export destination countries. [FS5, FS7]

To develop the economic potential of the SME communities, Indonesia Eximbank launched the Desa Devisa program. A community empowerment program in various regions with natural resources and other potentials, which have a high selling value in the export market. For 2021, Indonesia Eximbank supports the development of Desa Devisa in five potential areas, as follows.

**Tabel Pemberdayaan UMKM – Program Desa Devisa – 2021**  
MSME Empowerment – Desa Devisa Program – 2021

Jenis kegiatan Activities	Jumlah UKM Yang Diberdayakan Number of Empowered SMEs	Nilai Ekonomi Economic Value
Desa Devisa Agrowisata Ijen	Cakupan 5 desa dengan melibatkan 257 petani 5 villages involving 257 farmers	Adanya Permintaan dari Jepang sebanyak 18 ton atau senilai Rp3,3 miliar. Order from Japan for 18 tons or Rp3.3 billion.
Desa Devisa Kopi Subang	Cakupan 6 desa dengan melibatkan 208 petani 6 villages involving 208 farmers	Ekspor ke Arab Saudi sebanyak 150 ton atau senilai Rp15 miliar. Exports to Saudi Arabia for 150 tons or Rp15 billion.
Desa Devisa Tenun Gresik	1.500 Penenun yang tergabung dalam 22 anggota koperasi 1,500 Weavers who are members of 22 cooperative members	Indirect export ke Timur Tengah, Afrika, dan Malaysia sebanyak 1.250Pcs atau senilai Rp500 juta/tahun. Indirect export to the Middle East, Africa, and Malaysia for 1,250 Pcs or Rp500 million/year.
Desa Devisa Garam Klungkung	Cakupan 2 desa dengan melibatkan 40 petani serta 120 orang tenaga kerja pengolahan 2 villages involving 40 farmers and 120 processing workers	Target Ekspor ke Eropa melalui Rumah Indonesia Belanda sebanyak 450kg atau senilai Rp400 juta. The export target to Europe through the Dutch Indonesia House for 450 kg or Rp400 million.

Jenis kegiatan Activities	Jumlah UKM Yang Diberdayakan Number of Empowered SMEs	Nilai Ekonomi Economic Value
Desa Devisa Rumput Laut Sidoarjo	59 petani rumput laut yang tergabung dalam Kelompok Budidaya Rumput Laut 59 seaweed farmers who are members of the Seaweed Cultivation Group	<i>Indirect Ekspor produk olahan rumput laut ke Asia Timur sebanyak 120ton atau senilai Rp1,2 miliar/tahun.</i> <i>Indirect Export of processed seaweed products to East Asia for 120 tons or worth Rp1.2 billion/year</i>

#### Penjaminan dan Asuransi

Total nilai portofolio LPEI pada segmen bisnis Penjaminan untuk tahun 2021 adalah senilai Rp13,3 triliun atau tumbuh 32,6% dari total portofolio Penjaminan sebesar Rp9,91 triliun di tahun 2020.

Sementara nilai portofolio pertanggungan pada segmen Asuransi LPEI di tahun 2021 adalah sebesar Rp10,9 triliun atau meningkat 35,0% dari Rp8,11 triliun di tahun 2020.

Nasabah penjaminan maupun asuransi pada umumnya adalah korporasi, baik bergerak di bidang industri pengolahan, perdagangan, pengangkutan, konstruksi maupun perbankan/keuangan. Oleh karenanya pada umumnya pelaksanaan *due-diligent* terhadap penjaminan maupun asuransi pertanggungan yang diajukan telah dilakukan dengan menerapkan kebijakan manajemen risiko LST, sekalipun pengelolaan portofolionya belum menerapkan sistem ESMS yang masih dalam tahap penyusunan.

#### Trade Finance

Selama tahun 2021 volume *Trade Finance* mencapai Rp9,5 triliun atau tumbuh 51% dari tahun 2020 sebesar Rp6,3 triliun. Dari jumlah tersebut, nasabah segmen korporasi berkontribusi sebesar 80% dari pencapaian volume *Trade Finance* LPEI. LPEI memberikan fasilitas *Trade Finance* kepada pelaku usaha berupa *Pre Shipment Financing* untuk melakukan pembelian bahan baku dan *post shipment financing* untuk percepatan perputaran piutang sehingga dapat cepat berproduksi kembali.

Uraian selengkapnya mengenai perkembangan pengelolaan, strategi pengembangan maupun kinerja segmen bisnis Penjaminan, bisnis Asuransi, bersama dengan segmen Jasa Konsultasi, Pengelolaan Treasuri, dan *Trade Finance*, dapat dilihat pada Bab "Diskusi dan Analisis Manajemen – Sub Bab Segmen Bisnis".

#### Guarantee and Insurance

The total value of Indonesia Eximbank portfolio in the Guarantee business segment for 2021 was Rp13.3 trillion or a growth of 32.6% from the total Guarantee portfolio of Rp9.91 trillion in 2020.

The value of the insurance portfolio in the Indonesia Eximbank Insurance segment in 2021 was Rp10.9 trillion or an increase of 35.0% from Rp8.11 trillion in 2020.

In general, guarantee and insurance customers are corporations, engaged in the manufacturing, trading, transportation, construction and banking/finance industries. As such, in general, the implementation of a due-diligent to the proposed guarantee or insurance coverage has been carried out by implementing an ESG risk management policy, even though the portfolio management has not yet implemented the ESMS system which is under the drafting stage.

#### Trade Finance

During 2021 the volume of Trade Finance was Rp9.5 trillion or grew 51% from Rp6.3 trillion in 2020. Of this amount, corporate segment customers contributed 80% of the Indonesia Eximbank Trade Finance volume achievement. Indonesia Eximbank provides Trade Finance facilities to businesses through Pre-Shipment Financing to purchase raw materials and post shipment financing to accelerate receivables turnover hence production can resume quickly.

A complete description of the management development, development strategy and performance of the Guarantee business segment, Insurance business, and Advisory, Treasury Management and Trade Finance segments, is presented in the "Management Discussion and Analysis – Sub-Chapter Business Segment".

**Portofolio Terkait Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola [FS10, FS11]**

LPEI belum menjalankan peninjauan pemenuhan mitigasi risiko LST terhadap seluruh eksposur portofolio segmen Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi yang dikelola secara berkala, mengingat sistem dan kebijakan ESMS sebagai landasan pengelolaan mitigasi risiko LST dimaksud masih dalam proses penyusunan dan pengembangan. Namun demikian, sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, LPEI telah menjalankan kriteria mitigasi dimaksud terhadap nasabah yang bergerak pada sektor industri yang memiliki risiko tinggi terhadap aspek LST. Sektor industri dimaksud diantaranya adalah sektor perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, sektor industri pengolahan hasil tambang, sektor kehutanan dan sektor pengolahan lainnya.

Sebagai langkah mitigasi, dalam pelaksanaan due-diligence pemberian fasilitas pembiayaan maupun penjaminan ekspor, LPEI menerapkan kelengkapan perizinan termasuk ketentuan AMDAL nasabah atau calon nasabah dimaksud. Bagi pembiayaan dan/atau penjaminan dari nasabah yang bergerak di sektor perkebunan sawit dan sejenisnya, LPEI mensyaratkan kepemilikan sertifikat ISPO dan/atau RSPO agar pengelolaan perkebunan maupun produksi kelapa sawit yang dijalankan dapat memenuhi kriteria manajemen kebun yang *sustainable*.

Sebagaimana disampaikan dalam RAKB 2021-2025, untuk tahun 2021, LPEI menjalankan dua kegiatan Prioritas Pertama berkaitan dengan kelengkapan pedoman pengelolaan keuangan berkelanjutan, yang dikoordinasikan oleh Tim Task Force, yakni:

1. Penyusunan pedoman atau regulasi di LPEI mengenai pengelolaan keuangan berkelanjutan.
2. Tersusunnya rencana pemenuhan peraturan lingkungan dan sosial menurut standar nasional dan internasional dalam hierarki peraturan LPEI.

**Environmental, Social and Governance Related Portfolio [FS10, FS11]**

Indonesia Eximbank has not carried out a review of the fulfillment of ESG risk mitigation on all portfolio exposures of the Financing, Guarantee and Insurance segments which are managed periodically, considering that the ESMS system and policy as the basis for managing ESG risk mitigation is under the drafting and development process. However, as previously stated, Indonesia Eximbank has implemented the mitigation criteria referred to for customers operating in the industrial sector that has a high risk of ESG aspects. The industrial sectors referred to include the plantation and palm oil processing sector, the mining product processing industry sector, the forestry sector and other processing sectors.

As a mitigation measure, on the due-diligence in providing financing and export guarantee, Indonesia Eximbank implements complete licensing requirements including the AMDAL provisions for the customer or prospective customer. For financing and/or guarantees from customers engaged in the oil palm plantation sector and equivalent, Indonesia Eximbank requires ownership of ISPO and/or RSPO certificates so that the plantation management and oil palm production can meet the criteria for sustainable plantation management.

As stated in the 2021-2025 RAKB, Indonesia Eximbank will carry out two First Priority activities for 2021 that related to the completeness of guidelines for sustainable financial management, which are coordinated by the Task Force Team, namely:

1. Preparation of guidelines or regulations regarding sustainable financial management.
2. Formulation of a plan for compliance with environmental and social regulations according to national and international standards in the regulatory hierarchy.

**DISTRIBUSI NILAI EKONOMI [201-1]**

Selaras dengan upaya penyehatan portofolio yang dijalankan di tahun 2021, sehubungan masih berlanjutnya kondisi pandemi COVID-19 LPEI mencatatkan penurunan

**ECONOMIC VALUE DISTRIBUTION [201-1]**

In line with portfolio restructuring efforts carried out in 2021, due to the ongoing COVID-19 pandemic, Indonesia Eximbank recorded a decrease in total economic value

KINERJA EKONOMI  
Economics Performance

total nilai ekonomi yang diterima, menjadi sebesar Rp4,48 triliun, turun 17,4% dari nilai sebesar Rp5,43 triliun di tahun sebelumnya.

Penurunan total nilai perolehan ekonomi tersebut, membuat LPEI juga mencatatkan penurunan jumlah distribusi perolehan nilai ekonomi. Total nilai ekonomi yang kami distribusikan di tahun 2021 adalah sebesar Rp3,88 triliun, turun 22,5% dari nilai sebesar Rp5,00 triliun di tahun sebelumnya.

LPEI mendistribusikan perolehan pendapatan operasional kepada pemilik properti yang disewa, penyedia jasa *leasing* kendaraan, fee untuk sistem TI yang digunakan dan berbagai biaya operasional lain, dengan total senilai Rp178,92 miliar di tahun 2021, naik 5,3% dari sebesar Rp169,85 miliar di tahun 2020.

LPEI juga mendistribusikan biaya dana kepada pemangku kepentingan lain, yakni para penyandang dana, yang menempatkan dana dalam bentuk efek-efek yang diterbitkan maupun pinjaman lainnya sebesar Rp3,06 triliun untuk tahun 2021, turun 28,3% dari Rp4.26 triliun di tahun 2020.

LPEI membagikan nilai perolehan sebesar Rp467,31 miliar, naik 18,1% dari Rp395,73 miliar kepada para pegawai sebagai wujud komitmen untuk menyehatkan serta menghargai kerja keras mereka.

LPEI tetap konsisten merealisasikan kewajiban pembayaran pajak penghasilan, pajak badan maupun penerimaan bukan pajak kepada negara. Pada tahun 2021, nilai pembayaran tersebut adalah sebesar Rp156,53 miliar, turun 8,2% dari tahun 2020 yang sebesar Rp170,55 miliar. LPEI juga membayar bagian laba Pemerintah di tahun 2021 sebesar Rp13,57 miliar.

Secara keseluruhan, di tahun 2021 LPEI mencatatkan penurunan distribusi nilai perolehan ekonomi sebesar Rp1,12 triliun kepada para pemangku kepentingan. Namun demikian, LPEI masih dapat menyisihkan sejumlah nilai perolehan ekonomi yang ditahan untuk mendukung pengembangan usaha dimasa mendatang, sebesar Rp608,22 miliar, naik 42,5% dari sebesar Rp426,91 miliar di tahun sebelumnya, sebagaimana tampak pada tabel berikut.

generated at Rp4.48 trillion, decreased by 17.4% from Rp5.43 trillion in the previous year.

The decrease in total economic value generated has also decreased the distribution of economic value acquisition. The total economic value distributed in 2021 was Rp3.88 trillion, decreased by 22.5% from the value of Rp5.00 trillion in the previous year.

Indonesia Eximbank distributes operating income to owners of leased properties, vehicle leasing service providers, fees for IT systems and various other operating costs amounted to Rp178.92 billion in 2021, up 5.3% from Rp169.85 billion in 2020.

Indonesia Eximbank also distributes cost of funds to other stakeholders, namely funders, who place funds in the form of issued securities or other loans amounted to Rp3.06 trillion in 2021, decreased by 28.3% from Rp4.26 trillion in 2020.

Indonesia Eximbank distributed the acquisition value of Rp467.31 billion, an increase of 18.1% from Rp395.73 billion to employees as a form of commitment to the welfare and appreciation of their hard work.

Indonesia Eximbank remains consistent in realizing the obligation to pay income tax, corporate tax and non-tax revenues to the state. In 2021, the value of these payments was Rp156.53 billion, decreased by 8.2% from 2020 figure of Rp170.55 billion. Indonesia Eximbank also paid a share of the Government's profit in 2021 amounting to Rp13.57 billion.

Overall, Indonesia Eximbank recorded a decrease in the distribution of economic acquisition to stakeholders in 2021 that amounted to Rp1.12 trillion. However, Indonesia Eximbank was still able to set aside total retained economic earnings to support future business development amounted to Rp608.22 billion, an increase of 42.5% from Rp426.91 billion in the previous year, as shown in the following table.

## KINERJA EKONOMI

Economics Performance

**Tabel Distribusi Perolehan Nilai Ekonomi [201-1]**

Distribution of Economic Value Acquisition

Uraian Description	2021	2020	Perubahan Change	
	Rp Miliar Rp Billion		Nilai Value	%
<b>Nilai Ekonomi Langsung yang Diterima</b> Direct Economic Value Generated				
<b>Pendapatan Bunga</b> Interest income	<b>3.342,78</b>	<b>4.272,81</b>	<b>-930,03</b>	<b>-21,8%</b>
Penugasan Umum General Assignment	2.932,55	3.958,23	-1.025,68	-25,9%
Penugasan Khusus National Interest Account	410,23	314,58	95,65	30,4%
<b>Pendapatan Syariah</b> - Penugasan Umum <i>Sharia Income</i> - General Assignments	<b>920,74</b>	<b>830,07</b>	<b>90,67</b>	<b>10,9%</b>
Pendapatan operasional lainnya – bersih Other operating income – net	215,42	317,60	-102,18	-32,2%
Pendapatan Bukan Operasional Non-Operating Income	3,94	6,15	-2,21	-35,9%
Hasil penjualan aset tetap Proceeds from the sale of fixed assets	0,88	0,00	0,88	
<b>Jumlah Nilai Ekonomi Langsung Diterima</b> Total Direct Economic Value Generated	<b>4.483,76</b>	<b>5.426,63</b>	<b>-942,87</b>	<b>-17,4%</b>
<b>Nilai Ekonomi Langsung yang Didistribusikan</b> Distributed Direct Economic Value				
Beban Umum, Administrasi dan Beban Lain-lain General, Administrative and Other Expenses	178,92	169,85	9,08	5,3%
Gaji dan Tunjangan Salaries and allowances	467,31	395,73	71,58	18,1%
Biaya Bunga Interest Expense	3.057,22	4.262,99	-1.205,78	-28,3%
Pembayaran Bagian Laba Pemerintah Payment of Government's Profit Share	13,57	0,00	13,57	0,0%
Pembayaran kepada Pemerintah (PPh, PPn dan PnPB) Payments to the Government (PPh, VAT and PnPB)	<b>156,52</b>	<b>170,55</b>	-14,03	-8,2%
Penyaluran dana CSR bagi masyarakat Distribution of CSR funds for the community	<b>2,01</b>	<b>0,60</b>	1,41	234,0%
<b>Jumlah Nilai Ekonomi Langsung Didistribusikan</b> Total Direct Economic Value Distributed	<b>3.875,54</b>	<b>4.999,72</b>	<b>-1.122,03</b>	<b>-22,5%</b>
<b>Jumlah Nilai Ekonomi Ditahan</b> Total Retained Economic Value	<b>608,22</b>	<b>426,91</b>	<b>179,16</b>	<b>42,5%</b>

## MENDUKUNG KETAHANAN PEREKONOMIAN NASIONAL BERSAMA PARA MITRA KERJA [204-1, 308-1]

Terjaminnya kualitas layanan yang diberikan kepada nasabah bergantung juga pada kualitas barang dan jasa dari para mitra kerja. Oleh karenanya LPEI melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh mitra pemasok atau para vendor, baik untuk vendor barang, produk teknologi informasi maupun vendor jasa, seperti jasa sistem operasi.

Evaluasi dilakukan terhadap aspek kemampuan keuangan, ketenagakerjaan, maupun aspek kualitas barang dan jasa yang diberikan selama periode tertentu. LPEI memiliki daftar rekanan vendor dan pemasok barang maupun jasa yang telah terbukti memiliki rekam jejak yang baik dan yang terbukti memiliki rekam jejak kurang memuaskan. Dalam menjalin kerjasama dengan para vendor tersebut, LPEI mensyaratkan pernyataan tidak ada benturan kepentingan dan larangan memberi/menjanjikan untuk memberi sesuatu kepada manajemen dan pegawai yang terkait maupun tidak terkait.

Selain itu, dalam kaitannya dengan komitmen pelestarian lingkungan, LPEI juga mengimbau seluruh suplier rekanan untuk memiliki kemampuan mengelola dan minimalisir dampak lingkungan di dalam kegiatan masing-masing mitra suplier. LPEI berencana menerapkan sistem ESMS dalam seleksi maupun penilaian/pengelolaan kinerja para suplier atau pemasok/vendor

### Kebijakan Pengadaan

Dalam melaksanakan hubungan dengan para Penyedia Barang/Jasa, LPEI menerapkan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, mengacu pada Peraturan Dewan Direktur(PDD)No. 0004/PDD/04/2018 tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa LPEI, serta Peraturan Direktur Eksekutif(PDE) No. 0041/PDE/09/2019 tentang Manual Operasional Pengadaan Barang dan Jasa.

Seluruh jajaran karyawan LPEI berpegang teguh pada 10 prinsip dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa dari para pemasok, yakni:

1. Efisien
2. Efektif

## FOSTERING THE RESILIENCE OF THE NATIONAL ECONOMY WITH BUSINESS PARTNERS [204-1, 308-1]

Guaranteed quality of service provided to customers also depends on the quality of goods and services from partners. As such, Indonesia Eximbank conducts periodic evaluations of all supplier partners or vendors, both for goods, information technology products and services vendors, such as operating system services.

Evaluation is carried out on financial capability, employment, as well as the quality of goods and services provided during a certain period. Indonesia Eximbank has a list of vendor partners and suppliers of goods and services that have been proven to have a good track record and those who are proven to have an unsatisfactory track record. In establishing cooperation with these vendors, Indonesia Eximbank requires a statement of no conflict of interest and prohibition of giving/promising to give something to the management and employees who are related or unrelated.

Moreover, in relation to the commitment to environmental preservation, Indonesia Eximbank also urges all supplier partners to have the ability to manage and minimize environmental impacts in the activities of each supplier. Indonesia Eximbank plans to implement the ESMS system in the selection and assessment/management of the performance of suppliers or suppliers/vendors.

### Procurement Policy

In carrying out relations with the goods/services vendors, Indonesia Eximbank implements the Procurement of Goods and Services Policy, referring to the Board of Directors Regulation (PDD) No. 0004/PDD/04/2018 on Indonesia Eximbank Goods and Services Procurement Policy, and Executive Director Regulation (PDE) No. 0041/PDE/09/2019 on the Operational Manual for the Procurement of Goods and Services.

All levels of Indonesia Eximbank employees adhere to 10 principles in meeting the needs of goods and services from suppliers, which are:

1. Efficient
2. Effective

- 3. Transparan
- 4. Terbuka
- 5. Bersaing
- 6. Tidak Diskriminatif
- 7. Akuntabel
- 8. Kemandirian
- 9. Kehati-hatian, dan
- 10. Independen.

Penjelasan selengkapnya mengenai Kebijakan, Prinsip Pengadaan maupun Metode Pengadaan, tersebut diuraikan pada Bab "Tata Kelola Perusahaan – Pengadaan Barang dan Jasa".

- 3. Transparent
- 4. Open
- 5. Compete
- 6. Non-Discriminatory
- 7. Accountable
- 8. Independence
- 9. Caution, and
- 10. Independent.

A full explanation of the Policies, Procurement Principles and Procurement Methods is described in the Chapter of "Corporate Governance – Procurement of Goods and Services".

## **KONTRIBUSI UNTUK NEGARA**

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh LPEI pada umumnya menghasilkan 2 jenis kontribusi untuk negara, yakni kontribusi finansial langsung maupun tidak langsung, dan kontribusi non-finansial.

Kontribusi finansial langsung disampaikan dalam bentuk pembayaran pajak pendapatan badan, pungutan pajak penghasilan, penghasilan bukan pajak maupun pembayaran bagian laba bagi Pemerintah, yang untuk tahun operasional 2021 nilainya mencapai Rp156,53 miliar, dalam bentuk Pajak Badan maupun Pajak Penghasilan (2020: Rp170,55 miliar), sementara sejumlah Rp13,57 miliar lainnya merupakan bagian laba Pemerintah (2020: Rp nihil).

Adapun kontribusi finansial tidak langsung adalah berupa terealisasinya fungsi intermediari dukungan kegiatan ekspor impor yang LPEI jalankan. Sehingga para nasabah pelaku usaha dari segmen korporasi maupun UKM yang sebelumnya belum mendapatkan akses bantuan pembiayaan, penjaminan, konsultasi maupun asuransi terhadap risiko gagal bayar dari kegiatan ekspor – impor yang dijalankan, kini dan seterusnya mendapatkan dukungan beragam jasa dukungan eksport dimaksud dalam mengembangkan usahanya agar produknya mendapatkan akses di pasar global. Berkembangnya skala ekonomi para pelaku bisnis tersebut pada akhirnya akan meningkatkan pembayaran pajak kepada negara.

## **CONTRIBUTION TO THE NATION**

Indonesia Eximbank's business activities generally generate 2 types of contributions to the state, the direct and indirect financial contributions, and non-financial contributions.

Direct financial contributions are delivered through payment of corporate income tax, income tax levy, non-tax income and payment of a share of profits for the Government, which for the 2021 operating year the value was Rp156.53 billion in the form of Corporate Tax and Income Tax (2020: Rp170,55 billion), while another Rp13.57 billion is part of the Government's profit (2020: Rp nil).

The indirect financial contribution is through the realization of intermediary function of supporting export-import activities. Hence business customers from the corporate and SME segments that previously do not have access to financing assistance, guarantee, advisory or insurance against the risk of payment default from export-import activities, are currently and in the future received the support of various export services to develop businesses for their products to gain access to the global market. The developed economic scale of these business players eventually will improve tax payments to the state.

Khusus pada peran intermediari dalam mendukung kegiatan ekspor ini, LPEI berpegang pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009, tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang menegaskan bahwa dengan dicabutnya izin usaha PT Bank Ekspor Indonesia(Persero), maka seluruh aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) beralih kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Sebagai salah satu implementasi amanat yang ditegaskan dalam Undang-Undang No. 2/2009 tersebut, LPEI menjalankan peran intermediari dalam mendorong meningkatnya aktivitas ekspor dari para pelaku usaha di Indonesia, baik dari segmen korporasi maupun UKM, baik dilakukan secara mandiri maupun dalam kerangka sindikasi/kerjasama dengan lembaga keuangan perbankan lain di dalam negeri maupun di luar negeri.

Sementara kontribusi non-finansial yang dihadirkan adalah berupa tersedianya berbagai infrastruktur dasar sebagai realisasi pelaksanaan program tanggung jawab perusahaan yang dijalankan oleh LPEI, selain kehadiran berbagai infrastruktur pendukung kegiatan ekspor, seperti kantor cabang, infrastruktur ekspor berbasis digital dan sebagainya.

Specifically on the intermediary role in supporting export activities, Indonesia Eximbank adheres to the provisions of Law No. 2 of 2009 dated 12 January 2009, concerning the Indonesia Eximbank, which confirms that with the revocation of the business license of PT Bank Export Indonesia(Persero), all assets and liabilities and legal rights and obligations of PT Bank Export Indonesia (Persero) are transferred to the Indonesia Eximbank.

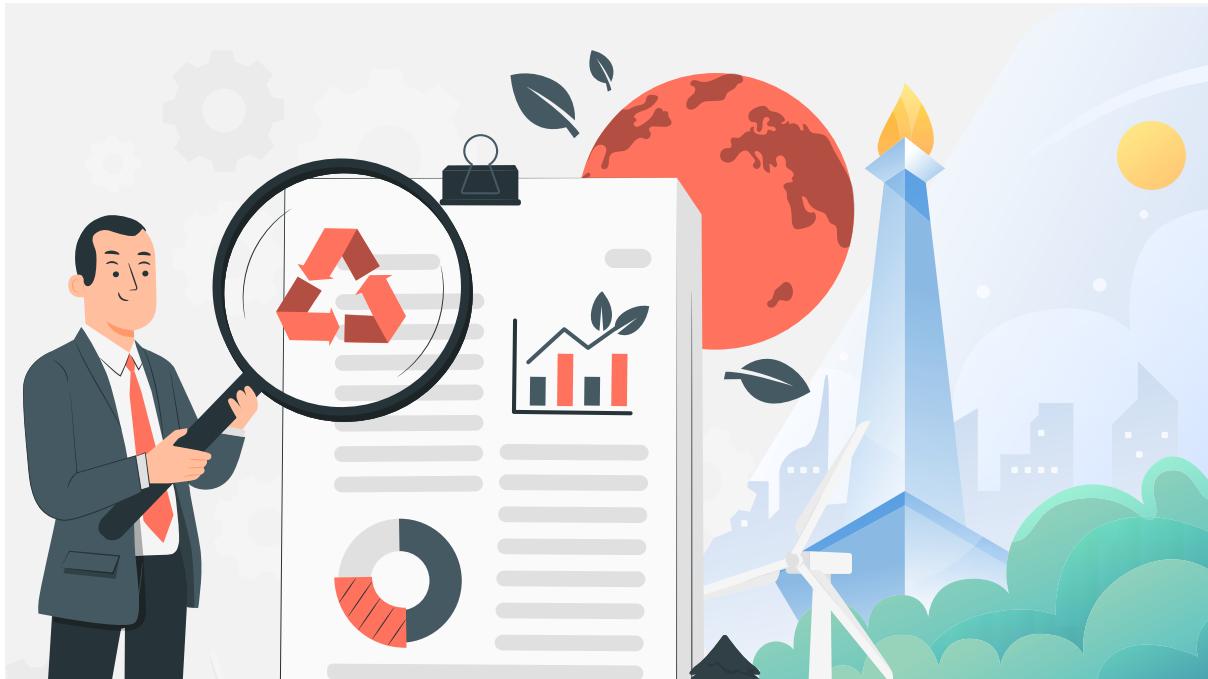
As one of the implementations of the mandate affirmed in Law No. 2/2009, Indonesia Eximbank performs an intermediary role in promoting export activities from business entities in Indonesia, both from the corporate and SME segments, both independently and within the framework of syndication/cooperation with other domestic and international banking financial institutions.

Meanwhile, the non-financial contribution is through the availability of various basic infrastructures as a realization of corporate responsibility programs performed by Indonesia Eximbank, in addition to the various supporting infrastructure for export activities, such as branch offices, digital-based export infrastructure and so forth.



# TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK, LAYANAN DAN NASABAH

Responsibility Towards Products, Services and Customers



LPEI  
menerima  
**6** aduan  
dari pelanggan,  
**menyelesaikan**  
dan **memproses**  
**seluruh aduan.**

Indonesia Eximbank received 6 complaints from customers, resolves and processes all complaints

## KOMITMEN DAN KEBIJAKAN [103-1, 103-2]

### Komitmen [103-1, 103-2]

LPEI berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh nasabah lebih dari sekedar menjalankan kewajiban pemenuhan tanggung jawabnya terhadap nasabah. LPEI menjadikan kepuasan nasabah terhadap produk dan layanan Lembaga sebagai indikator keberhasilan dalam melayani nasabah secara profesional dan sepenuh hati.

## COMMITMENTS AND POLICIES [103-1, 103-2]

### Commitment [103-1, 103-2]

Indonesia Eximbank is fully committed to providing the best service for all customers, more than just carrying out its obligations to fulfill its responsibilities to customers. Indonesia Eximbank places customer satisfaction on its products and services as an indicator of success in serving customers professionally and wholeheartedly.

## TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK, LAYANAN DAN NASABAH

Responsibility Towards Products, Services and Customers

LPEI menjadikan kepuasan nasabah sebagai parameter utama dalam mengukur kualitas layanan, mengingat nasabah merupakan salah satu pemangku kepentingan yang sangat signifikan perannya dalam menentukan keberlangsungan dan kemajuan bisnis Lembaga. Oleh karenanya, LPEI senantiasa mengerahkan seluruh jajaran karyawan mulai level Manajemen hingga jajaran pegawai di seluruh cabang Lembaga untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik saat berinteraksi dengan nasabah.

Selain memberikan layanan terbaik kepada para nasabah, LPEI juga berkomitmen untuk menyediakan produk-produk layanan pembiayaan, penjaminan maupun asuransi ekspor yang lengkap, memadai dan didukung teknologi informasi terkini demi memastikan akurasi eksekusi maupun pencatatan transaksi.

LPEI juga menyediakan mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah yang efektif dan efisien sesuai prinsip-prinsip penerapan *Good Corporate Governance* yang tertuang dalam Tata cara penanganan pengaduan nasabah yang ditetapkan LPEI mengacu kepada Peraturan Direktur Eksekutif No. 0070/PDE/12/2012 tentang *Standard Operating Procedure (SOP) Penyelesaian Pengaduan Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*, serta disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK No. 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

### Kebijakan Umum [103-3]

Secara umum LPEI mengacu pada kebijakan dan regulasi yang berlaku di Indonesia dalam menjalankan tanggung jawab perusahaan kepada nasabah, mencakup:

- Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

### Kebijakan Penyelesaian Pengaduan Nasabah [103-3]

Penyelesaian pengaduan nasabah diselesaikan melalui penerapan langkah-langkah sebagai berikut:

- Kebijakan atas Penerimaan Pengaduan  
Unit kerja yang berwenang wajib menerima setiap pengaduan secara tertulis maupun lisan yang diajukan oleh Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah, dan meneruskan pengaduan tersebut kepada unit terkait;
- Kebijakan atas Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan

Indonesia Eximbank makes customer satisfaction the main parameter in measuring service quality, considering that customers are one of the stakeholders with a significant role in determining the sustainability and progress of the Institution's business. As such, Indonesia Eximbank mobilizes all levels of employees from the Management to employees in all branches to provide the best service.

Apart from providing the best service to customers, Indonesia Eximbank is also committed to providing comprehensive, adequate financing, guarantee and export insurance services and supported by the latest information technology to ensure the accuracy of execution and recording of transactions.

Indonesia Eximbank also provides effective and efficient mechanism to resolved customer complaints in accordance with the principles of Good Corporate Governance as stipulated in the customer complaints handling procedures set by Indonesia Eximbank referring to Executive Director Regulation No. 0070/PDE/12/2012 on Standard Operating Procedures (SOP) for Settlement of Customer Complaints for Indonesia Eximbank, and adjusted to OJK Regulation No. 18/POJK.07/2018 on Consumer Complaint Services in the Financial Services Sector and OJK Circular No. 17/SEOJK.07/2018 on Guidelines for the Implementation of Consumer Complaint Services in the Financial Services Sector.

### General Policy [103-3]

In carrying out corporate responsibilities to customers, Indonesia Eximbank generally refers to policies and regulations that apply in Indonesia, such as:

- OJK Regulation No. 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector.

### Customer Complaint Resolution Policy [103-3]

Settlement of customer complaints is resolved through the implementation of the following steps:

- Policy on Acceptance of Complaints
- The authorized unit is required to receive every written or verbal complaint submitted by the Customer and/or Customer Representative, and forward the complaint to the relevant unit;
- Policy on Complaint Handling and Resolution

## TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK, LAYANAN DAN NASABAH

Responsibility Towards Products, Services and Customers

Jangka waktu penyelesaian pengaduan baik secara lisan maupun tertulis akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Kebijakan atas Pemantauan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan  
Unit kerja yang berwenang dan unit terkait wajib mengadministrasikan seluruh dokumen yang terkait dengan penerimaan, penanganan dan penyelesaian Pengaduan Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah.

Sejak tahun 2009, LPEI telah memiliki ketentuan penyelesaian pengaduan nasabah yang tertuang dalam Peraturan Dewan Direktur No. 0008/ PDD/09/2009.

### Kebijakan Terkait Produk [103-3]

- Kebijakan/ketentuan terkait produk diatur dalam Peraturan Direktur Eksekutif (PDE), dimana saat ini terdapat 32 PDE terkait produk LPEI dan 1 Standar Pedoman Produk Pembiayaan Ekspor Nasional.

The period for resolving complaints both verbally and in writing will be resolved in accordance with applicable regulations;

- Policy on Monitoring Complaint Handling and Resolution

The authorized unit and related units are required to administer all documents related to the receipt, handling and settlement of Customer Complaints and/or Customer Representatives.

Since 2009, Indonesia Eximbank has the provisions for customer complaints settlement as stipulated in the Board of Directors Regulation No. 0008/ PDD/09/2009.

### Product Related Policies [103-3]

- Product-related policies/stipulations are regulated in the Executive Director's Regulation (PDE), where currently there are 32 PDEs related to Indonesia Eximbank products and 1 National Export Financing Product Guidance Standard.

## INISIATIF STRATEGIS DI TAHUN 2021

### Inisiatif Strategis Terkait Produk

Di Tahun 2021, sebagai bagian dari realisasi RAKB, LPEI menjalankan berbagai inisiatif strategis menyangkut produk dalam rangka memastikan keamanan produk, meliputi: [FS15]

- Penyusunan Standar Pedoman Produk Pembiayaan Ekspor Nasional
- Trade Finance Revamp
- Penyusunan produk sesuai kebutuhan bisnis seperti Manual Produk Plasma Perkebunan, Program Kemitraan, Supply Chain Financing dll
- Penyusunan Manual Produk terkait Penugasan Khusus dan Penugasan Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional, serta penugasan Pemerintah lainnya.
- Penyusunan produk pembiayaan, penjaminan berdasarkan prinsip syariah

Di tahun 2021 LPEI juga meluncurkan produk inovasi lainnya, yakni:

- Penambahan Fitur produk Asuransi Piutang Dagang yaitu Discretionary Limit (DCL)
- Produk Berdasarkan prinsip Syariah.

## STRATEGIC INITIATIVES IN 2021

### Product-Related Strategic Initiatives

In 2021, as part of the realization of the RAKB, Indonesia Eximbank carries out various strategic initiatives regarding products in order to ensure product safety, including: [FS15]

- Preparation of Standard Guidelines for National Export Financing Products
- Trade Finance Revamp
- Preparation of products according to business needs such as Manual of Plantation Plasma Products, Partnership Programs, Supply Chain Financing etc
- Preparation of Product Manuals related to NIA and Government Assignments for the National Economic Recovery, as well as other Government assignments.
- Preparation of financing products, guarantees based on sharia principles

In 2021, Indonesia Eximbank also launches other innovative products, namely:

- Addition of Account Receivable Insurance product feature, namely Discretionary Limit (DCL)
- Products Based on Sharia principles.

## TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK, LAYANAN DAN NASABAH

### Responsibility Towards Products, Services and Customers

Penentuan nama produk disesuaikan dengan kegiatan usaha yang ditetapkan dalam UU No. 2 tahun 2009, antara lain produk pembiayaan, penjaminan, asuransi, jasa konsultasi, dan treasury. Selain itu juga disesuaikan dengan jenis bisnisnya.

#### Inisiatif Strategis Terkait Layanan

Selama tahun 2021, LPEI melaksanakan berbagai inisiatif strategis dalam rangka meningkatkan kualitas layanan sesuai ekspektasi nasabah. Inisiatif dimaksud mencakup:

1. Melaksanakan penilaian kualitas fisik kantor layanan, antara lain: toilet dan musholla yang meliputi kebersihan, kerapihan, serta fungsinya.
2. Penilaian kualitas layanan berdasarkan parameter standar industri, di kantor layanan.
3. LPEI menetapkan suatu ukuran *Service Level Arrangement* (SLA) tertentu yang harus dipenuhi seluruh jajaran dalam memberikan layanan kepada para nasabah maupun calon nasabah.

#### Informasi dan Keamanan Produk

Sesuai dengan SPO Penyusunan Peraturan, LPEI menetapkan bahwa dalam rangka memastikan keamanan suatu produk, terdapat tahapan-tahapan yang melibatkan unit kerja Bisnis, Risk, Reviewer dan unit kerja terkait serta diusulkan ke Komite Pengembangan Produk untuk selanjutnya mendapatkan penetapan dari Direktur Eksekutif.

LPEI menjalankan seluruh tahapan kebijakan peluncuran produk/jasa tersebut untuk menunjukkan komitmen dalam memenuhi seluruh aturan perundungan yang berlaku. Sehingga dalam tahun pelaporan, LPEI tidak pernah mencatatkan adanya insiden pelanggaran terhadap peraturan dan perundungan yang disampaikan regulator, baik terkait pengembangan produk maupun terkait aspek sosial dan lingkungan. [419-1]

Untuk menginformasikan peran dan fungsi LPEI beserta produk dan layanan secara lengkap, LPEI menjalankan berbagai kegiatan, meliputi:

1. Publikasi melalui media sosial yang dimiliki LPEI, antara lain website, *instagram*, *twitter*, *facebook*, dan *youtube* yang dilakukan secara berkesinambungan.
2. Publikasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik.

Determination of product names is adjusted to the business activities stipulated in Law No. 2 of 2009, including financing products, guarantees, insurance, advisory, and treasury. In addition, it is also adjusted to the type of business.

#### Strategic Initiatives Related to Services

During 2021, Indonesia Eximbank will carry out various strategic initiatives to improve service quality according to customer expectations. These initiatives include:

1. Assessment of the physical quality of service offices, including: toilet and prayer room which includes cleanliness, tidiness, and functions.
2. Assessment of service quality based on industry standard parameters, in the service office.
3. Stipulates a certain size of Service Level Arrangement (SLA) that must be met by all levels in providing services to customers and prospective customers.

#### Product Information and Security

In accordance with the SPO Preparation of Regulations, Indonesia Eximbank ensures the safety of product, with stages involving the Business, Risk, Reviewer and related units and are proposed to the Product Development Committee for further approval by the Executive Director.

Indonesia Eximbank carries out all stages of the product/service launch policy to demonstrate its commitment to complying with all applicable laws and regulations. As such, Indonesia Eximbank has not recorded any incidents of violations of the rules and regulations submitted by the regulator, both related to product development and to social and environmental aspects. [419-1]

To fully inform its role and function, as well as its products and services, Indonesia Eximbank carries out various activities, including:

1. Periodical publications of its social media, including websites, Instagram, Twitter, Facebook, and YouTube.
2. Publication through mass media, both print and electronic.

## TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK, LAYANAN DAN NASABAH

Responsibility Towards Products, Services and Customers

3. Sosialisasi kepada pelaku usaha melalui corporate event yang dilakukan oleh LPEI.
4. Pameran-pameran yang diikuti oleh LPEI.

### Penyusunan dan Sosialisasi Kebijakan Khusus

Sebagai bagian dari realisasi Program Prioritas dalam RAKB, dimana LPEI bertekad menyusun, menerapkan dan melengkapi sistem ESMS terkait dengan aspek LST dalam pemberian layanan pembiayaan, penjaminan maupun permohonan penutupan asuransi risiko kegiatan ekspor, Lembaga berencana mensosialisasikan berbagai kebijakan khusus dimaksud dimasa mendatang.

### Edukasi Produk dan Jasa Layanan LPEI [FS16]

Sebagai bentuk tanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan, di tahun 2021 LPEI kembali memberikan edukasi mengenai produk dan jasa yang diberikan melalui berbagai kegiatan. Beberapa kegiatan yang dijalankan di tahun 2021, mencakup diantaranya:

- Pameran *Trade Expo Indonesia*(TEI) secara *online*.
- Pelatihan ekspor (*Coaching Program for New Exporter*, Tematik, Alumni Gathering, IWAPI) secara *online*.
- Perluasan akses pasar melalui *platform e-commerce* global.
- Pemetaan dan pelatihan Desa Devisa secara *online*.

## PENGEMBANGAN PRODUK/AKTIVITAS BARU

Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Pembiayaan Ekspor Nasional berdasarkan UU No. 2 tahun 2009 tentang LPEI, pengembangan Produk dan/ atau Aktivitas Baru yang semakin kompleks dapat meningkatkan eksposur risiko yang dihadapi LPEI. Untuk itu, atas setiap inisiatif Produk dan/atau Aktivitas Baru termasuk penghentian Produk dan/atau Aktivitas Baru perlu dilakukan analisis yang meliputi aspek-aspek bisnis, strategik, legal, kepatuhan, teknis, risiko, serta sarana dan prasarana pendukung operasional lainnya. Proses analisis tersebut meliputi proses identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko yang melekat pada setiap Produk dan/atau Aktivitas Baru. Selain itu perlu diperhatikan adanya edukasi Nasabah, sumber daya manusia dan kesesuaianya dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Dissemination to business entities through corporate events held by Indonesia Eximbank.
4. Exhibitions participated by Indonesia Eximbank.

### Specific Policy Formulation and Socialization

As part of the realization of the Priority Program in the RAKB, in which Indonesia Eximbank is determined to develop, implement, and to complete the ESMS system related to ESG aspects in providing financing services, guarantees and applications for export risk insurance closures, the Institution plans to disseminate the various special policies referred to in the future.

### Product and Service Education [FS16]

As a responsibility to all stakeholders, Indonesia Eximbank again provided products and services education in 2021 through various activities, among others were as follows:

- Trade Expo Indonesia(TEI) exhibition online.
- Online export training (*Coaching Program for New Exporter*, Thematic, Alumni Gathering, IWAPI).
- 
- Expanding market access through global e-commerce platforms.
- Mapping and online foreign exchange village training.

## NEW PRODUCT/ACTIVITY DEVELOPMENT

To foster the National Export Financing activities based on Law No. 2 of 2009 on Indonesia Eximbank, the development of new products and/or activities that are progressively complex can increase the risk exposure encountered by the Institution. To that end, for every New Product and/or Activity initiative including discontinuation of New Product and/or Activity, it is necessary to conduct an analysis covering business, strategic, legal, compliance, technical, risk aspects, as well as other operational supporting facilities and infrastructure. The analysis process includes the process of identifying, assessing, and mitigating the risks inherent in each New Product and/or Activity. In addition, it is necessary to take into account the existence of customer education, human resources and compliance with laws and regulations.

## TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK, LAYANAN DAN NASABAH

### Responsibility Towards Products, Services and Customers

Prinsip umum dalam pengelolaan Produk dan/atau Aktivitas Baru yang mencakup penerbitan Produk dan/atau Aktivitas Baru, evaluasi, dan penghentian Produk dan/atau Aktivitas yang telah diluncurkan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dukungan atas Pembiayaan Ekspor Nasional
2. Efisien dan Efektif
3. Prinsip Kehati-hatian
4. Manajemen Risiko dan *Risk Self-Assessment*
5. Keterbukaan
6. Pelaporan
7. Sistem Informasi Akuntansi

Pengembangan Produk dan/atau Aktivitas Baru terdiri dari 5 (lima) tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan
2. Tahap pengembangan
3. Tahap *Risk Acceptance*
4. Tahap Persetujuan Penerbitan
5. Tahap Peluncuran

The general principles in the management of New Products and/or Activities which include issuance, evaluation, and termination are carried out based on the following principles:

1. Support for National Export Financing
2. Efficient and Effective
3. Precautionary Principle
4. Risk Management and Risk Self-Assessment
5. Transparency
6. Reporting
7. Accounting Information System

New Product and/or Activity Development consists of 5 (five) stages as follows:

1. Planning Stage
2. Development stage
3. Stage of Risk Acceptance
4. Issuance Approval Stage
5. Launch Stage



Sehingga, prosedur umum pengelolaan Produk dan/atau Aktivitas Baru adalah sebagai berikut:

The following are procedures for New Product and/or Activity:

## TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK, LAYANAN DAN NASABAH

Responsibility Towards Products, Services and Customers

### 1. PENERBITAN PAB | PAB ISSUANCE



Sedangkan Komite-komite yang terlibat dalam pengelolaan Produk dan/atau Aktivitas Baru, antara lain:

1. Komite Pengembangan Produk (KPP)
2. Komite Manajemen Risiko (KMR)

Meanwhile, the committees involved in the management of New Products and/or Activities include:

1. Product Development Committee (KPP)
2. Risk Management Committee (KMR)

### PRIVASI NASABAH [418-1]

LPEI menempatkan privasi nasabah sebagai salah satu prioritas layanannya. Sebagai bagian dari pelaku industri keuangan/perbankan nasional, LPEI tunduk terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia maupun oleh Pemerintah melalui Kementerian dan Lembaga lainnya dalam melindungi privasi data nasabah.

### CUSTOMER PRIVACY [418-1]

Indonesia Eximbank places customer privacy as a priority. As part of the national financial/banking industry, Indonesia Eximbank is subject to the prevailing laws and regulations in Indonesia, whether issued by the Financial Services Authority, Bank Indonesia or by the Government through other Ministries and Institutions in protecting customer data privacy.

## TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK, LAYANAN DAN NASABAH

Responsibility Towards Products, Services and Customers

### PENANGANAN PENGADUAN NASABAH

Dalam rangka menampung dan menangani pengaduan nasabah terhadap kualitas layanan maupun produk yang disediakan, LPEI menyediakan saluran untuk menyampaikan keluhan yang dapat ditujukan kepada Sekretaris Lembaga melalui:



Email : [corpsec@indonesiaeximbank.go.id](mailto:corpsec@indonesiaeximbank.go.id)



Telephone : (021) 3950-3600



Corporate Secretary:  
 Prosperity Tower, Lantai 1 District 8, SCBD Lot 28  
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
 Senayan, Kebayoran Baru  
 Jakarta Selatan, Indonesia  
 Kode Pos 12190

Penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah dilakukan bersama-sama dengan unit-unit terkait, baik dalam langkah penyelesaian pengaduan maupun perbaikan dari sisi proses, prosedur maupun produk dan layanan yang diberikan.

#### Jumlah Pengaduan Nasabah dan Tahapan Penanganan [417-2, 417-3, 418-1]

Dalam hal upaya memitigasi adanya ketidakpuasan nasabah yang berujung ke pengaduan, LPEI memberikan edukasi dan menyampaikan informasi mengenai produk dan layanan melalui sarana komunikasi resmi yang tersedia, antara lain: informasi langsung oleh *relationship manager*, telpon, surat, email, website, brosur, media sosial, dan media massa. Nasabah dapat melakukan komunikasi dengan LPEI untuk menyampaikan informasi, permohonan, hingga aduan melalui media komunikasi tersebut.

Mengikuti aturan OJK, nasabah juga dapat menyampaikan pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) yang dikelola oleh OJK.

### CUSTOMER COMPLAINTS HANDLING

To accommodate and handle customer complaints regarding the quality of services and products provided, Indonesia Eximbank provides channels for complaints submission to be addressed to the Corporate Secretary through:

Handling and settlement of customer complaints is carried out together with related units, in resolving the complaints and in improving the processes, procedures as well as products and services provided.

#### Number of Customer Complaints and Stages of Handling [417-2, 417-3, 418-1]

In terms of efforts to mitigate customer dissatisfaction which leads to complaints, Indonesia Eximbank provides education and conveys information about products and services through available official communication facilities, including: direct information by relationship managers, telephone, letters, emails, websites, brochures, social media, and the mass media. Customers can communicate with Indonesia Eximbank to convey information, requests, and complaints through the communication media.

Following OJK regulations, customers can also submit complaints through the Consumer Protection Portal Application (APPK) managed by OJK.

## TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK, LAYANAN DAN NASABAH

Responsibility Towards Products, Services and Customers

Tahapan penanganan pengaduan nasabah:



Stages of handling customer complaints:

### Keterangan

1. Nasabah menyampaikan pengaduan kepada LPEI melalui saluran yang disediakan yaitu surat, telepon, email, media sosial, media massa atau datang secara langsung. Pengaduan yang masuk dikelola oleh Unit Kerja yang memiliki fungsi sebagai Koordinator Penanganan Pengaduan.
2. Aduan yang masuk disampaikan kepada unit kerja terkait apabila memerlukan penyelesaian lebih lanjut yang akan melibatkan unit kerja terkait.
3. Penyampaian solusi penyelesaian kepada Nasabah. Pengaduan akan ditutup apabila nasabah menerima solusi yang ditawarkan. Apabila nasabah tidak menerima solusi yang ditawarkan, nasabah dapat menggunakan mediator untuk penyelesaian pengaduan (*external dispute resolution*).
4. Penyampaian progres penyelesaian kepada OJK selaku regulator

### Description

1. The customer submits a complaint to LPEI through the channels, such as letter, telephone, email, social media, mass media or in person. Incoming complaints are managed by the Work Unit which has a function as the Complaint Handling Coordinator.
2. Incoming complaints are submitted to the relevant work unit if it requires further settlement which will involve the relevant work unit.
3. Submission of settlement solutions to the Customer. Complaints will be closed if the customer accepts the solution offered. If the customer does not accept the solution offered, the customer can use a mediator to resolve the complaint (*external dispute resolution*).
4. Submission of settlement progress to OJK as the regulator

### Jumlah pengaduan

Sepanjang tahun 2021, berdasarkan catatan dari pengaduan yang masuk melalui Aplikasi Portal Pengaduan Konsumen(APPK), terdapat enam surat yang ditujukan kepada LPEI: tiga di antaranya merupakan surat permohonan atas fasilitas yang dimiliki LPEI, sementara tiga lainnya merupakan penyampaian informasi terkait kejadian penting konsumen, seperti perubahan pengurus.

### Number of Complaints

Based on records from complaints submitted through the Consumer Complaints Portal Application (APPK), there were six letters addressed to Indonesia Eximbank in 2021: three of them were requests for facilities owned by Indonesia Eximbank, the other three were submissions of information related to important consumer events, such as a change of management.

Keterangan   Description	2021
Pengaduan yang masuk Incoming complaints	6
Status	
Terselesaikan Resolved	5
Sedang dalam proses In process	1*

\*Pengaduan diterima pada akhir tahun | \*Complaints received

## TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK, LAYANAN DAN NASABAH

### Responsibility Towards Products, Services and Customers

Sepanjang periode pelaporan di tahun 2021, juga tidak ditemukan pengaduan berkaitan dengan kebocoran kerahasiaan pelanggan dan hilangnya data nasabah/pelanggan.

#### KETERBUKAAN INFORMASI PRODUK DAN JASA [417-1]

LPEI menjamin kelayakan berbagai produk dan layanan yang disediakan dan bahwa seluruh produk telah mematuhi seluruh perundang-undangan serta peraturan yang ditentukan oleh pihak regulator terkait.

LPEI senantiasa berupaya untuk selalu memberikan informasi yang jelas, akurat, transparan, dan lengkap melalui pemberian label di tiap produk dan layanan LPEI yang disediakan. Selain itu, seluruh kegiatan operasi dan usaha yang dijalankan diawasi oleh OJK dan patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan baik oleh OJK; termasuk persyaratan pelabelan dan informasi produk dan jasa yang dimiliki.

Informasi rinci mengenai produk dan layanan LPEI dapat diakses melalui situs LPEI (<https://www.indonesiaeximbank.go.id/>)

Sepanjang periode pelaporan di tahun 2021, tidak ditemukan pelanggaran terkait informasi produk dan jasa maupun komunikasi pemasaran, baik yang menimbulkan kerugian bagi nasabah maupun pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. [417-2, 417-3]

#### KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN [419-1]

LPEI tunduk terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia maupun oleh Pemerintah melalui Kementerian dan Lembaga lainnya.

Beberapa aspek kepatuhan Kami yang menjadi prioritas adalah sebagai berikut:

- **Prinsip Kehati-hatian** [102-11]

Sebagai salah satu pelaku industri jasa keuangan non bank, LPEI menetapkan dan menerapkan kebijakan dalam penerapan prinsip kehati-

Throughout the reporting period in 2021, there were also no complaints related to leakage of customer confidentiality and loss of customer/customer data.

#### DISCLOSURE OF PRODUCT AND SERVICE INFORMATION [417-1]

Indonesia Eximbank guarantees the feasibility of the various products and services provided and that all products comply with all laws and regulations determined by the relevant regulators.

Indonesia Eximbank strives to provide clear, accurate, transparent, and complete information through labelling of each of its products and services. In addition, all operational and business activities carried out are supervised by the OJK and comply with the regulations issued by the OJK; including labelling requirements and product and service information.

Detailed information on Indonesia Eximbank products and services can be accessed through the website (<https://www.indonesiaeximbank.go.id/>)

Throughout the reporting period in 2021, there were no violations related to product and service information or marketing communications, both those that caused losses to customers and violations of applicable laws and regulations. [417-2, 417-3]

#### COMPLIANCE WITH REGULATIONS AND LAW [419-1]

Indonesia Eximbank is subject to the prevailing laws and regulations in Indonesia, whether issued by the Financial Services Authority, Bank Indonesia or by the Government through other Ministries and Institutions.

Some of our priority aspects of compliance are as follows:

- **Prudential Principle** [102-11]

As one of the players in the non-bank financial services industry, Indonesia Eximbank stipulates and implements policies in the application of the

## TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK, LAYANAN DAN NASABAH

Responsibility Towards Products, Services and Customers

hatian dalam kegiatan usahanya dan program-program pelaksanaannya. Termasuk dalam hal ini adalah Kode Etik dan Budaya Kerja Lembaga, Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), Penerapan Strategi Anti-Fraud, Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) dan peraturan pendukungnya.

- **Perkara yang Melibatkan Dewan Direktur maupun Direktur Pelaksana**  
Sepanjang tahun 2021 tidak ada perkara hukum yang melibatkan Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI.
- **Sanksi Regulator**  
Selama tahun 2021 LPEI tidak mendapatkan sanksi dari Regulator.

## SURVEI KEPUASAN NASABAH

Pada tahun pelaporan LPEI tidak melakukan survei kepuasan nasabah.

precautionary principle in its business activities and implementation programs. Included in this are the Code of Ethics and Institutional Work Culture, the Anti-Money Laundering and Counter of Terrorism Financing Program (AML CTF), the Implementation of Anti-Fraud Strategies, the Whistleblowing System and its supporting regulations.

- **Cases Involving the Board of Directors and the Managing Directors**  
Throughout 2021 there were no legal cases involving the Board of Directors and the Executive Director of Indonesia Eximbank.
- **Regulatory Sanctions**  
During 2021 Indonesia Eximbank did not receive any sanctions from the Regulator.

## CUSTOMER SATISFACTION SURVEY

In the reporting year, Indonesia Eximbank did not conduct a customer satisfaction survey.



# KINERJA ASPEK LINGKUNGAN

## Environmental Performance



LPEI berfokus pada empat program, yakni:  
**save paper, save energy, reduce waste, buy green, save water, reduce carbon footprint, green the event.**

Indonesia Eximbank focuses on four programs, namely: save paper, save energy, reduce waste, buy green, save water, reduce carbon footprint, green the event

Saat ini hampir seluruh negara di dunia menempatkan isu pelestarian dan perbaikan kondisi lingkungan menjadi salah satu topik untuk diselesaikan dengan segera. Isu lingkungan menjadi bagian penting dari rumusan pembangunan berkelanjutan skala global - Sustainable Development Goals (SDGs). Indonesia menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi kesepakatan negara-negara di seluruh dunia tersebut dalam Paris Cop 21 yang dilaksanakan pada tahun 2015. Pemerintah Indonesia menegaskan tekadnya untuk mengurangi emisi CO<sub>2</sub> dalam pengelolaan pembangunan ekonominya hingga sebesar 29% dengan upaya sendiri, atau hingga 41% jika mendapatkan bantuan internasional di tahun 2030 mendatang.

Currently almost all countries in the world place the issue of preservation and improvement of environmental conditions as one of the topics to be resolved immediately. Environmental issues are an important part of the formulation of global scale Sustainable Development Goals (SDGs). Indonesia is one of the countries that have ratified the agreement of countries around the world in Paris Cop 21 which was carried out in 2015. The Indonesian government affirms its determination to reduce CO<sub>2</sub> emissions while managing its economic development by 29% with its own efforts, or up to 41% by 2030 through international assistance.

## KINERJA ASPEK LINGKUNGAN

Environmental Performance

Oleh karena penanganan isu lingkungan dan cuaca ekstrem ini memerlukan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, LPEI sebagai salah satu Lembaga Keuangan yang memiliki cabang di beberapa wilayah Indonesia dengan nasabahnya adalah korporasi maupun pelaku usaha UKM berorientasi ekspor yang harus dapat mengikuti dinamika masyarakat global, menunjukkan tekadnya untuk turut berpartisipasi mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan tersebut.

### KOMITMEN [103-1]

Sebagai sebuah lembaga intermediari, kegiatan usaha LPEI sebenarnya relatif tidak membawa dampak lingkungan yang signifikan. Kendati demikian, LPEI berkomitmen penuh untuk bersama-sama dengan warga korporasi dunia lainnya, mendukung pencapaian berbagai tujuan keberlanjutan di bidang lingkungan dalam SDGs.

Terdapat tiga pendekatan utama yang kami jalankan untuk mendukung pencapaian beragam tujuan keberlanjutan di bidang lingkungan. Pertama, melalui pemberlakuan kebijakan pembiayaan, penjaminan dan penutupan pertanggungan risiko kegiatan ekspor yang ramah lingkungan; kedua melalui implementasi pendanaan ramah lingkungan; dan ketiga, melalui implementasi kebijakan operasional ramah lingkungan, yakni Green Office LPEI.

Dalam rangka mewujudkan dukungan pencapaian tujuan keberlanjutan tersebut LPEI telah menyusun dokumen Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 2021-2025, yang disusun sebagai perwujudan tingginya komitmen Lembaga dalam mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan.

### Kebijakan [103-2, 103-3]

LPEI mewujudkan komitmen pemberian fasilitas pembiayaan, penjaminan dan penutupan asuransi ramah lingkungan melalui penerapan kebijakan ketentuan internal dan komitmen pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) yang telah diintegrasikan ke dalam proses penyediaan produk dan layanan keuangan yang disediakan. Dalam rangka melengkapi kebijakan dimaksud, LPEI kini tengah menyusun rancangan Kebijakan Environmental and Social Management System (ESMS) dan rancangan Manual Operasional ESMS.

As the handling of environmental issues and extreme weather requires the involvement of all components of society, the Institution as one of the Financial Institutions with branches in several parts of Indonesia, whose customers are corporations and export-oriented SME entities that shall follow the dynamics of global society, shows its determination to participate in fostering the achievement of these sustainability goals.

### COMMITMENT [103-1]

As an intermediary institution, Indonesia Eximbank business activities actually do not have a significant environmental impact. Nevertheless, Indonesia Eximbank is fully committed to, jointly with other global corporate citizens, foster the achievement of various environmental sustainability goals in the SDGs.

Three main approaches are performed to support the achievement of various sustainability goals in the environmental aspect. First, through the implementation of environmentally friendly financing, guarantee and risk coverage policies for export activities; second, through the implementation of environmentally friendly funding; and third, through the implementation of environmentally friendly operational policies, or the Institution's Green Office.

To realize the achievement of these sustainability goals, Indonesia Eximbank has prepared a Sustainable Finance Action Plan for 2021-2025 as a manifestation of the Institution's high commitment in fostering the achievement of sustainability goals.

### Policy [103-2, 103-3]

Indonesia Eximbank realizes the commitment to provide environmentally friendly financing facilities, guarantees and closures of insurance through the implementation of internal regulatory policies and environmental, social and governance (ESG) management commitments that have been integrated into the process of providing financial products and services. To complete the policy, Indonesia Eximbank is currently preparing a draft of Environmental and Social Management System (ESMS) Policy and a draft ESMS Operational Manual. The

## KINERJA ASPEK LINGKUNGAN

### Environmental Performance

Penyusunan Kebijakan ESMS menjadi prioritas pertama bagi terlaksananya RAKB Lembaga.

Sementara untuk mewujudkan komitmen penyelenggaraan kegiatan operasional yang ramah lingkungan, LPEI menerapkan Program *Green Office* LPEI. Program *Green Office* telah dilaksanakan sejak tahun 2012, merupakan implementasi atas Peraturan Direktur Eksekutif (PDE) No.0024/PDE/04/2012 tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai. Dalam pelaksanaannya, unit kerja *Transformation Office* bertindak sebagai unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan program *green office*. Untuk mewujudkan *green office*, unit kerja tersebut akan melakukan himbauan secara berkala untuk menerapkan program ini.

LPEI menjalankan program *green office* pada setiap kegiatan operasional di lingkungan kerja. Efektivitas dan efisiensi penggunaan energi dan material merupakan fokus dari program *green office* tersebut.

## SUSTAINABLE FINANCING DAN SUSTAINABLE FUNDING

LPEI bertekad menerapkan konsep Keuangan Berkelaanjutan secara utuh guna menunjukkan komitmen dukungannya terhadap upaya pencapaian tujuan keberlanjutan dalam SDGs, baik pada aspek lingkungan maupun pada aspek sosial dengan memperkuat integrasi lingkungan, sosial dan tata kelola yang telah dirintis selama ini dalam mempertimbangkan permohonan pembiayaan, penjaminan maupun penutupan asuransi risiko kegiatan ekspor impor produk dan jasa para nasabah.

Oleh karenanya, dalam dokumen RAKB yang telah disampaikan kepada OJK, LPEI menegaskan prioritas penyusunan, sosialisasi dan implementasi sistem dan kebijakan ESMS dan rancangan Manual Operasional ESMS. Melalui penerapan ESMS yang menyatu dengan ketentuan internal serta komitmen pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) yang telah diintegrasikan ke dalam proses penyediaan produk dan layanan keuangan yang disediakan selama ini, LPEI akan dapat:

formulation of the ESMS Policy is the first priority for the implementation of the Institution's RAKB.

To realize the commitment to the environmentally friendly operational activities, Indonesia Eximbank implements the Green Office Program that has been running since 2012, as an implementation of the Executive Director's Regulation (PDE) No.0024/PDE/04/2012 on the Management of Facilities and Infrastructure of Indonesia Eximbank to serve as a guide for all employees. In practice, the Transformation Office Unit acts as the unit responsible to managing the green office program. To realize a green office, the unit would make periodic calls to apply this program.

Indonesia Eximbank carries out the green office program in every operational activity in its work environment. The effectiveness and efficiency of the use of energy and materials is the focus of the green office program.

## SUSTAINABLE FINANCING AND SUSTAINABLE FUNDING

Indonesia Eximbank is determined to fully implement the Sustainable Finance to demonstrate its commitment to achieve the SDGs, both on the environmental and social aspects by strengthening the environmental, social and governance integration that has been initiated in considering the applications for financing, guarantees and insurance coverage for the risk of export-import activities of customers' products and services.

As such, in the RAKB document submitted to OJK, Indonesia Eximbank emphasized the priorities for the preparation, dissemination and implementation of ESMS policies and systems and the draft ESMS Operational Manual. Through the ESMS that is included in internal regulations as well as environmental, social and governance (ESG) management commitments that have been integrated into the process of providing financial products and services, Indonesia Eximbank will be able to:

## KINERJA ASPEK LINGKUNGAN

Environmental Performance

1. Memiliki Kebijakan Khusus Penerapan Aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola dalam Kegiatan Usaha.
2. Menetapkan klausul dan covenant aspek-aspek lingkungan, sosial dan tata kelola dalam proses asesmen atau *due diligent* maupun dalam perjanjian pemiyaana, penjaminan dan penutupan asuransi ekspor – impor para nasabah.
3. Menerapkan proses *monitoring* ketiaatan dan kepatuhan nasabah korporasi terhadap ketentuan dan covenant aspek lingkungan dan sosial.
4. Memiliki dan mengelola portofolio “Hijau dan Sustainable” yang selaras dengan tujuan keberlanjutan SDGs pada aspek lingkungan maupun sosial.

Dengan merintis proses portofolio “Hijau dan Sustainable” LPEI mencita-citakan penerbitan “Obligasi Hijau atau *Green Bond* guna mendukung tekad Lembaga untuk menjadi lembaga keuangan pendukung kegiatan ekspor dan impor yang beroperasi dengan menjunjung tinggi pencapaian tujuan keberlanjutan, yang juga berarti mendukung komitmen Pemerintah RI memenuhi target-targetnya sebagaimana disampaikan dalam *Paris Agreement*.

Saat ini, LPEI telah memiliki portofolio syariah yang juga didukung dengan penerbitan Obligasi Syariah, dengan sasaran nasabah korporasi maupun nasabah UKM yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Kepemilikan dan pengelolaan portofolio “Hijau dan Sustainable” yang diproses melalui penerapan ketentuan pemenuhan aspek LST, didukung dengan penerapan *Green Office*, merupakan wujud dari *Sustainable Financing* dan *Sustainable Funding* yang dituju LPEI. Kondisi tersebut juga merupakan wujud dari penerapan konsep LST. LPEI senantiasa berpedoman pada 8 prinsip keuangan berkelanjutan dari OJK, yakni: prinsip investasi yang bertanggung jawab, prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan, prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup, prinsip tata Kelola, prinsip komunikasi yang informatif, prinsip inklusif, prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas serta prinsip koordinasi dan kolaborasi.

1. Stipulate Special Policy for the Implementation of Environmental, Social and Governance Aspects in Business Activities.
2. Establish clauses and covenants on environmental, social and governance aspects in the assessment process or due diligence as well as in financing agreements, guarantees and closing of export-import insurance for customers.
3. Implement a process of monitoring the obedience and compliance of corporate customers with environmental and social provisions and covenants.
4. Own and manage a “Green and Sustainable” portfolio that is in line with the SDGs sustainability goals on environmental and social aspects.

By pioneering the process of and having a “Green and Sustainable” portfolio, Indonesia Eximbank aspires to execute the issuance of “Green Bonds” to support the Institution’s determination to become a financial institution supporting export and import activities that operates by upholding the achievement of sustainability goals, which also means supporting the commitment of the Government of Indonesia to fulfill its targets as stated in the Paris Agreement.

Currently, Indonesia Eximbank has a sharia portfolio which is also supported by the issuance of Sharia bonds, targeting corporate customers and SME customers who apply sharia principles in carrying out their business activities.

Ownership and management of the “Green and Sustainable” portfolio processed through the implementation of ESG aspect fulfillment provisions, supported by the implementation of *Green Office*, is a manifestation of *Sustainable Financing* and *Sustainable Funding* intended by Indonesia Eximbank, which is also the application of ESG concept. Indonesia Eximbank is guided by 8 principles of sustainable finance from OJK, namely: responsible investment, sustainable business strategies and practices, social and environmental risk management, governance, informative communication, inclusive, developing priority flagship sectors, and coordination and collaboration.

## KINERJA ASPEK LINGKUNGAN

### Environmental Performance

#### Pengelolaan Risiko LST Pada Produk Pembiayaan [FS3]

LPEI memastikan pengelolaan risiko sosial dan lingkungan yang dapat ditimbulkan dari kegiatan usaha oleh nasabah yang memanfaatkan pembiayaan dari LPEI, sebagai bagian dari risiko LST, dilakukan sesuai dengan kebijakan, standar, dan pelaksanaan prosedur pembiayaan.

LPEI memegang teguh peraturan yang berlaku, termasuk dalam bidang pembiayaan. LPEI tidak menyediakan pembiayaan bagi usaha atau kegiatan yang masuk dalam kategori dilarang atas dasar terbukti melanggar hukum lingkungan.

Perlakuan yang sama juga diterapkan bagi perusahaan yang mendapatkan peringkat merah atau hitam dalam daftar Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

#### PENGEMBANGAN BUDAYA KEBERLANJUTAN [FS4]

Sebagai bagian dari dukungan pencapaian tujuan keberlanjutan, LPEI berupaya membangun budaya keberlanjutan, yakni budaya untuk senantiasa peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar bagi seluruh jajaran karyawan. Dalam rangka mengembangkan budaya keberlanjutan tersebut, LPEI telah mengidentifikasi dan menetapkan langkah-langkah implementasi, sebagai berikut.

1. Fokus Upaya Pengembangan Budaya Keberlanjutan. Merubah perilaku pegawai untuk mengambil peran sederhana namun efektif guna menumbuhkan kedulian terhadap lingkungan yang akan memberikan dampak positif terhadap perusahaan
2. Wujud Komitmen Memberlakukan penerapan Green Office Lifestyle Culture melalui surat edaran SE.0008/CEO/05/2021, di lingkungan area perkantoran Lembaga, melingkupi seluruh jajaran manajemen dan pegawai dan lingkungan LPEI, untuk bersama-sama melaksanakan save energy, save paper, reduce waste, buy green, save water, reduce carbon footprint, green the event.

#### ESG Risk Management in Financing Products [FS3]

Indonesia Eximbank ensures that the management of social and environmental risks that may arise from customers business activities financed by Indonesia Eximbank, as part of ESG risks, is carried out in accordance with policies, standards, and implementation of financing procedures.

Indonesia Eximbank upholds the applicable regulations, including in the financing field. Indonesia Eximbank does not provide financing for businesses or activities that fall into the prohibited category on the basis of being proven to violate environmental law.

The same treatment is also applied to companies that get a red or black rating in the list of the Company Performance Rating Program (PROPER) released by the Ministry of Environment.

#### DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE CULTURE [FS4]

To support the achievement of sustainability goals, Indonesia Eximbank strives to build a culture of sustainability, a culture to always care about the surrounding environment for all levels of employees. To develop the sustainability culture, Indonesia Eximbank has identified and determined the implementation steps, as follows.

1. Focus on Efforts to Develop a Culture of Sustainability. Changing employee behavior to take on simple but effective roles in order to foster environmental awareness that will have a positive impact on the company.
2. Form of Commitment Implement the Green Office Lifestyle Culture through circular SE.0008/CEO/05/2021, in the Institution's office area, covering all levels of management and employees and its environment, to jointly implement save energy, save paper, reduce waste, buy green, save water, reduce carbon footprint, green the event.

## KINERJA ASPEK LINGKUNGAN

Environmental Performance

Surat Edaran tersebut juga melengkapi program eksternal yaitu Green Financing yang bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat pada lingkungan bisnis di LPEI, yang dikemudian hari diharapkan dapat menjadi keuntungan kembali bagi LPEI dan memiliki tanggung jawab sosial atas lingkungan hidup.

3. Dasar Pedoman  
Pelaksanaan *Green Office Lifestyle Culture*.
4. Identifikasi Tantangan yang Dihadapi
  - Beberapa pegawai masih belum menyadari pentingnya program *green office*.
  - Perlunya sosialisasi dan dorongan untuk menyukkseskan kegiatan *green office*.
  - Kondisi pandemi yang membuat *green office* terutama terkait dengan aspek *reduce carbon* belum bisa maksimal karena organisasi cenderung untuk menggunakan kendaraan pribadi saat *commute*.
  - Perlunya ditingkatkan komitmen baik dari pimpinan maupun seluruh insan LPEI dalam menjalankan *green office lifestyle* sebagai budaya dan nilai dari organisasi.
  - LPEI belum menganggarkan biaya investasi awal untuk *green office* seperti lampu hemat energi, investasi pelatihan, dll.
5. Progres Pelaksanaan
  - LPEI telah melaksanakan seluruh program yang dicanangkan selama tahun 2021, dan akan terus dilanjutkan kembali pada tahun 2022.
  - LPEI juga berkomitmen untuk menambah program baru yang belum dilaksanakan pada tahun 2021.
6. Kaitan dengan SDGs
  - *Good health and well-being*
  - *Climate Action*
3. Basic Guidelines  
*Implementation of Green Office Lifestyle Culture*.
4. Identify the Challenges
  - Some employees still do not realize the importance of green office programs.
  - The need for dissemination and encouragement for the success of green office activities.
  - The pandemic conditions that made the green office especially related to reduce carbon aspects unable to be maximized because organizations tend to use private vehicles when commuting.
  - The need to improve commitment from both the leadership and all personnel in implementing a green office lifestyle as the culture and values of the organization.
  - Indonesia Eximbank has not budgeted the initial investment costs for green offices such as energy-saving lamps, investment in training, etc.
5. Implementation Progress
  - Indonesia Eximbank has implemented all programs planned for 2021, and will continue to do so in 2022.
  - Indonesia Eximbank is also committed to adding new programs that have not been implemented in 2021.
6. Relations to the SDGs
  - *Good health and well-being*
  - *Climate Action*

### Realisasi Program *Green Office Lifestyle Culture*

Inisiatif *Green Office lifestyle culture* berfokus pada upaya merubah perilaku pegawai agar mereka mengambil peran sederhana namun efektif guna menumbuhkan tingkat kepedulian terhadap lingkungan yang akan memberikan dampak positif terhadap perusahaan. Inisiatif ini dijalankan LPEI pada lingkup internal maupun eksternal.

The Circular also covers an external program, such as Green Financing, which aims at creating a healthy business climate in the Institution's business environment, which in the future is expected to return as profit for Indonesia Eximbank and a social responsibility for the environment.

### Realization of *Green Office Lifestyle Culture Program*

The *Green Office lifestyle culture* initiative focuses on changing employee behavior so that they take on simple but effective roles to raise a level of concern for the environment that will have a positive impact on the company. This initiative is carried out by Indonesia Eximbank on an internal and external scope.

## KINERJA ASPEK LINGKUNGAN

Environmental Performance

Pada lingkup internal, untuk tahun 2021, LPEI berfokus pada empat program, yakni: *save paper, save energy, reduce waste, buy green, save water, reduce carbon footprint, green the event.*

Sementara inisiatif eksternal yang dijalankan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan meliputi kegiatan berikut:

Internally, Indonesia Eximbank focused on four programs in 2021: *save paper, save energy, reduce waste, buy green, save water, reduce carbon footprint, green the event.*

External initiatives carried out to support the achievement of sustainability goals include the following activities:

Pedoman / Charter Guidelines / Charters	Tanggal Pengesahan / Keterangan Validation Date / Description
Penyusunan surat edaran terkait <i>Green Office Lifestyle Culture</i> Preparation of circulars related to Green Office Lifestyle Culture	28 Mei 2021 28 May 2021
Penyusunan media sosialisasi ( <i>email blast, infografis, mini seri</i> ) Preparation of socialization media (email blasts, infographics, mini series)	Telah disusun dan dipublikasikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mini seri <i>green office</i> via <i>email blast</i>.</li> <li>• Infografis dan <i>design campaign</i> <i>save paper, water, &amp; energy</i>.</li> </ul> Compiled and published: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mini green office series via email blast.</li> <li>• Infographics and campaign design save paper, water, &amp; energy.</li> </ul>
Pelaksanaan workshop/FGD/sharing session terkait <i>Green Office Lifestyle Culture</i> Implementation of workshops/FGDs/sharing sessions related to Green Office Lifestyle Culture	Telah dilaksanakan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Sharing session</i> dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) pada tanggal 19 Feb 2021.</li> <li>• <i>Workshop why green building</i> dengan GBCI pada tanggal 31 Mar 2021.</li> <li>• <i>Inspirational session "waste management"</i> dengan waste4change pada tanggal 16 Juni 2021</li> </ul> Already conducted: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sharing session with PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) on 19 Feb 2021.</li> <li>• Workshop on why green building with GBCI on 31 Mar 2021.</li> <li>• Inspirational session "waste management" with waste4change on June 16, 2021</li> </ul>
Kompetisi <i>Green up your workplace</i> <i>Green up your workplace Competition</i>	30 Juni 2021 30 June 2021
Kompetisi <i>Zero Waste Office</i> <i>Zero Waste Office Competition</i>	31 Juli 2021 31 July 2021
Penunjukan dan <i>kick off green champion</i> Appointment and kick off green champion	30 Juni 2021 Telah disusun surat tugas (STG) untuk seluruh perwakilan <i>green champion</i> . Telah dilakukan <i>kick off</i> dan <i>briefing</i> kepada <i>green champion</i> pada 8 Juni 2021 30 June 2021 A letter of assignment (STG) has been prepared for all representatives of green champions. Kick off and briefing for green champion has been done on 8 June 2021

## KINERJA ASPEK LINGKUNGAN

Environmental Performance

### PROGRAM GREEN OFFICE LPEI

Komitmen Lembaga untuk senantiasa menerapkan kegiatan operasional yang ramah lingkungan diwujudkan melalui penyusunan dan penerapan Program Green Office LPEI, mencakup:

1. Efisiensi penggunaan kertas dilakukan dengan cara pemanfaatan kertas bekas namun tetap memperhatikan aspek fungsi, peruntukan dan kerahasiaan dokumen.
2. Efisiensi penggunaan listrik dilakukan dengan mematikan perangkat dan peralatan listrik seperti membatasi penggunaan peralatan listrik, komputer, printer dan alat elektronik lainnya apabila telah selesai bekerja/meninggalkan kantor, mematikan lampu di ruangan yang tidak digunakan.
3. Efisiensi penggunaan air dilakukan dengan memastikan keran air dalam kondisi mati apabila telah selesai digunakan.

Konsistensi dalam menjalankan kegiatan operasional ramah lingkungan tersebut membawa hasil, dimana sepanjang tahun 2021, LPEI tidak menerima satupun pengaduan terkait isu lingkungan dan tidak menerima denda dan sanksi non-moneter karena ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang dan Peraturan terkait lingkungan. [307-1]

#### Digitalisasi Untuk Mengurangi Dampak Lingkungan

Sebagai bagian dari penerapan Program Green Office, LPEI menjalankan inisiatif digitalisasi untuk mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas operasional Lembaga, baik dalam rangka menyediakan produk dan layanan keuangan maupun pada proses bisnis internal. LPEI menerapkan pemanfaatan platform digital untuk layanan sumber daya manusia dengan HRIS (*Human Resource Information System*), aplikasi GreatDay, CBT (*Computer Based Training*) Kode Etik untuk e-learning dan lain-lain, guna mengurangi dampak lingkungan dari penggunaan energi, air, dan kertas karena pegawai tidak perlu lagi menggunakan kertas untuk aplikasi kepersonaliaan. LPEI secara berkala juga akan meningkatkan kapabilitas layanan dengan melaksanakan pemrosesan end-to-end transaksi secara paperless sesuai dengan kebutuhan nasabah.

### INDONESIA EXIMBANK'S GREEN OFFICE PROGRAM

The Institution's commitment to always apply environmentally friendly operational activities is realized through the preparation and application of the Green Office Program, including:

1. Efficient use of paper, by utilizing used paper but still paying attention to aspects of function, designation and document confidentiality.
2. Efficiency in the use of electricity, by turning off electrical devices and equipment such as limiting the use of electrical equipment, computers, printers and other electronic devices when finished working/leaving the office, turning off lights in unused rooms.
3. Efficiency of water use, by ensuring that the water faucet is turned off when it is unused.

Consistency in carrying out environmentally friendly operational activities has paid off, where throughout 2021, Indonesia Eximbank did not receive any complaint related to environmental issues and did not receive fines and non-monetary sanctions for non-compliance with laws and regulations related to the environment. [307-1]

#### Digitalization To Reduce Environmental Impact

As part of the application of the Green Office Program, Indonesia Eximbank carries out digitalization initiatives to reduce the environmental impact of the Institution's operational activities, both in terms of providing financial products and services as well as in internal business processes. Indonesia Eximbank uses the digital platforms for human resource services with HRIS(*Human Resource Information System*), GreatDay application, CBT (*Computer Based Training*) Code of Ethics for e-learning and others, to reduce the environmental impact of the consumption of energy, water, and paper because employees no longer need to use paper for personnel applications. Indonesia Eximbank will also periodically improve service capabilities by carrying out end-to-end paperless transaction processing in accordance with customer needs.

## KINERJA ASPEK LINGKUNGAN

Environmental Performance

### Penghematan Energi [302-1, 302-2, 302-4]

LPEI hanya menggunakan dua jenis sumber energi untuk mendukung kegiatan operasional, yakni tenaga listrik yang seluruhnya dipasok oleh PLN, dan BBM untuk kendaraan operasional dalam rangka mendukung mobilitas pegawai dalam menjalin interaksi tatap muka dengan para nasabah, maupun calon nasabah.

Sebagai bagian dari penerapan inisiatif Green Office, LPEI berupaya mengelola konsumsi listrik dari PLN dengan menerapkan berbagai upaya, mencakup:

- Memberikan himbauan agar seluruh karyawan mematikan dan melepas peralatan elektronik pribadi saat pulang kantor.
- Mengimbau kepada karyawan yang terakhir pulang untuk mematikan lampu dan AC saat mereka telah selesai bertugas di Kantor.
- Menginstruksikan karyawan *outsourcing* (*Office Boy/Office Girl* dan *Security*) untuk mematikan Lampu dan AC untuk area kerja yang sudah kosong.
- Penggunaan fasilitas rapat dengan video conference yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- Penggunaan fasilitas webinar untuk pelatihan/sosialisasi, dan lain sebagainya.

Berbagai inisiatif yang diterapkan tersebut membuat konsumsi listrik menurun, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

### Tabel Konsumsi Energi [302-1, 302-3, 302-4]

Energy Consumption

Uraian Description	Satuan Units	2021	2020	Selisih Difference
Konsumsi Listrik Electricity Consumption	KWh	1,074,823	1,133,728	- 58,905
Konsumsi Listrik Electricity Consumption	G Joule	3,869	4,081	- 212
<b>Total Konsumsi Energi</b> <b>Total Energy Consumption</b>	<b>G Joule</b>	<b>3,869</b>	<b>4,081</b>	- 212
Luas Ruangan Room Area	M2	19,484	19,484	-
Intensitas Konsumsi Energi Listrik Electricity Energy Consumption Intensity	GJoule/M2	0.20	0.21	- 0.01

Catatan: Hanya menampilkan konsumsi Listrik Kantor Pusat.  
Note: Only displays the Central Office Electricity consumption.

### Energy Saving [302-1, 302-2, 302-4]

Indonesia Eximbank only uses two types of energy sources to support operational activities, the power plant which is entirely supplied by PLN, and fuel for operational vehicles to support employee mobility in establishing hybrid interactions with customers and prospective customers.

As part of the Green Office initiative, Indonesia Eximbank seeks to manage electricity consumption from PLN by implementing various efforts, including:

- Urging all employees to turn off and remove personal electronic equipment when returning from work.
- Asking the employees who are the last to leave to turn off the lights and air conditioning when they have finished their duties at the office.
- Instruct outsourced employees (*Office Boy/Office Girl* and *Security*) to turn off lights and air conditioners for vacant work areas.
- Use of meeting facilities with video conferencing which is carried out effectively and efficiently.
- Use of webinar facilities for training/socialization, and so on.

The initiatives have reduced electricity consumption, as shown in the following table.

## KINERJA ASPEK LINGKUNGAN

Environmental Performance

### Pengelolaan Emisi Gas Rumah Kaca

LPEI berupaya berpartisipasi untuk mengurangi emisi CO<sub>2</sub> atau Karbon dioksida atau Gas Rumah Kaca (GRK), yang berasal dari pembakaran langsung bahan bakar fosil untuk BBM transportasi dan dari penggunaan listrik. Caranya adalah dengan melakukan upaya penghematan atau efisiensi penggunaan energi seperti disebutkan sebelumnya.

Berdasarkan data pengelolaan atau konsumsi energi tersebut diatas, LPEI mencatatkan besaran emisi CO<sub>2</sub> yang dihasilkan, sebagaimana ditampilkan dalam tabel-tabel berikut.

**Tabel Emisi CO2** [305-1, 305-2, 305-4, 305-5]

CO2 Emissions

Uraian Description	Satuan Units	2021	2020	Selisih Difference
Emisi Tak Langsung dari Listrik Indirect Emission from Electricity	Ton CO2eq	931.48	982.53	- 51
Luas Ruangan Room Area	M2	19,484	19,484	-
<b>Intensitas Emisi Konsumsi Listrik</b> <b>Electricity Consumption Emisi Intensity</b>	<b>Ton CO2eq/M2</b>	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>	<b>- 0.00</b>

Catatan: Hanya menampilkan emisi dari konsumsi Listrik Kantor Pusat.

Note: Only displays emissions from Central Office Electricity consumption.

### Pengelolaan Konsumsi Air

LPEI berupaya menjalankan gerakan “gunakan air secukupnya” untuk pemakaian air di toilet, mushalla, kantin, untuk mesin pendingin udara dan beberapa aktivitas lainnya. LPEI bahkan berupaya menghemat konsumsi air minum, sekaligus mengurangi sampah plastik dengan menerapkan inisiatif:

- Menggunakan alat makan dan/atau minum pribadi dan menghindari penggunaan alat makan dan/atau minum sekali pakai, khususnya untuk yang berbahan tidak ramah lingkungan.
- Menyediakan Pitcher dan gelas minum untuk kegiatan meeting, atau karyawan diminta membawa botol minum (tumbler) sendiri dalam setiap rapat dan kegiatan kantor.

### Greenhouse Gas Emission Management

Indonesia Eximbank seeks to participate in reducing CO<sub>2</sub> or Carbon dioxide or Greenhouse Gas (GHG) emissions, which come from the direct burning of fossil fuels for transportation fuel and from the use of electricity. The efforts are through saving or energy consumption efficiency as previously mentioned.

Based on the energy consumption or management data as stated above, Indonesia Eximbank recorded the CO<sub>2</sub> emissions produced, as follows.

### Water Consumption Management

Indonesia Eximbank strives to carry out the “use just enough water” movement for water consumption in toilets, prayer rooms, canteens, for air conditioning machines and several other activities. Indonesia Eximbank also seek to save drinking water consumption, while reducing plastic waste by implementing the following initiatives:

- Using personal cutlery and/or drinking and avoiding the use of cutlery and/or disposable drinking, especially for those made from environmentally unfriendly material.
- Provide pitchers and drinking glasses for meeting activities, or employees are asked to bring their own drinking bottles (tumblers) in every meeting and office activity.

## KINERJA ASPEK LINGKUNGAN

### Environmental Performance

LPEI tidak menampilkan data jumlah galon AMDK yang dikonsumsi, namun menampilkan total biaya pengadaan air minum dimaksud. Untuk tahun 2021 total biaya pengadaan air minum galon adalah sebesar Rp57,2 juta, menurun dari sebesar Rp65,6 juta ditahun sebelumnya.

#### Pengurangan Konsumsi Kertas

Guna mengurangi penggunaan kertas, LPEI mendorong pemanfaatan perangkat elektronik untuk menggantikan penggunaan kertas. LPEI juga mendorong dilakukannya kegiatan tanpa kertas (*paperless*) dalam mempersiapkan proposal-proposal pembiayaan, penjaminan maupun penutupan asuransi.

LPEI mendukung gerakan melindungi hutan dengan meningkatkan kesadaran para karyawan untuk tidak menggunakan kertas secara berlebihan melalui intensifikasi program digitalisasi dan perluasan inisiatif *paperless*. Selain itu, inisiatif operasional sederhana juga tetap diterapkan, seperti:

- Memilah kertas yang masih layak pakai dan menyiapkan kotak penyimpanan di area mesin printer.
- Memberikan himbauan di area mesin printer untuk se bisa mungkin menggunakan kertas bekas layak pakai untuk mencetak dokumen draft.
- Memberikan himbauan untuk menggunakan dokumen digital, seperti pengiriman surat/undangan melalui surel/media daring.

Berbagai inisiatif tersebut berhasil mengurangi volume konsumsi kertas. Penggunaan kertas untuk Kantor Pusat selama tahun 2021 dan perbandingannya dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel Volume Penggunaan Kertas**

Paper Consumption Volume

Uraian Description	Satuan Unit	2021	2020
Volume Penggunaan Kertas Paper Consumption Volume	Lembar Sheets	1.541.183	1.920.652

Sementara itu, untuk mengurangi limbah toner dari penggunaan printer, LPEI menerapkan kebijakan pembaharuan terhadap sistem printer yang digunakan dengan teknologi yang terkini, yang memungkinkan penggunaan tinta toner menjadi lebih berkualitas.

Indonesia Eximbank does not display data on the number of gallons of bottled drinking water consumed, but displays the total cost of procuring drinking water. For 2021 the total cost of procuring gallon drinking water was Rp57.2 million, a decrease from Rp65.6 million in the previous year.

#### Reducing Paper Consumption

To reduce paper consumption, Indonesia Eximbank encourages the use of electronic devices to replace the paper. Indonesia Eximbank also encourages paperless activities in preparing proposals for financing, guarantees and insurance closures.

Indonesia Eximbank supports the movement to protect forests by increasing employees awareness to not to use paper excessively through digital program and the expansion of paperless initiatives. In addition, simple operational initiatives are also implemented, such as:

- Sorting usable papers and prepare a storage box in the printer machine area.
- Provide posters in the printer area to use as much as possible used paper suitable for printing draft documents.
- Provide advice to use digital documents, such as sending letters/invitations via email/online media.

These various initiatives have succeeded in reducing the volume of paper consumption. The use of paper for the Head Office during 2021 and its comparison with 2020 can be seen in the following table:

Meanwhile, to reduce toner waste from the use of printers, Indonesia Eximbank implements an update policy on the printer system with the latest technology, which allows the use of toner ink to be more qualified.

## KINERJA ASPEK LINGKUNGAN

Environmental Performance

### Biaya Pemeliharaan Lingkungan

Sampai akhir tahun 2021, LPEI belum melakukan perhitungan dan dokumentasi penggunaan dana operasional untuk program-program partisipasi pelestarian lingkungan yang dijalankan mengingat kegiatan bisnis LPEI dibidang keuangan yang tidak secara langsung berdampak pada pencemaran lingkungan.

### Environmental Conservation Cost

Until the end of 2021, Indonesia Eximbank has not yet calculated and documented the use of operational funds for environmental conservation participation programs in view of its business activities in the financial sector that do not directly impact environmental pollution.



# KINERJA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Community Development and Empowerment Performance



Total investasi  
sosial 2021

Rp **2,76**

Miliar

untuk pelaksanaan  
program-program CSR  
**Pengembangan Sosial  
Kemasyarakatan**

Total social investment throughout  
2021 for the implementation of CSR  
programs for Community Social  
Development was Rp2.76 billion.

## KOMITMEN, DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN [103-1, 103-2, 103-3]

LPEI secara konsisten menunjukkan komitmen penuh untuk melaksanakan CSR dalam rangka menyebalang kegiatan usaha dan pengembangan masyarakat. Komitmen ini diwujudkan sebagai bentuk tekad LPEI untuk menyebalang kinerja keberlanjutan pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, serta sebagai bentuk pelaksanaan mandat yang diemban oleh LPEI.

## COMMITMENT, LEGAL BASIS AND POLICY [103-1, 103-2, 103-3]

Indonesia Eximbank continuously delivers full commitment to implementing CSR to balance business activities and community development. This commitment is manifested as a form of Indonesia Eximbank's determination to balance sustainability performance in economic, social and environmental aspects, as well as in implementing its mandates.

## KINERJA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Community Development and Empowerment Performance

Sebagai Lembaga yang terus bertumbuh dan beroperasi di Indonesia, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) berkomitmen penuh dan terus berupaya agar keberadaannya memberikan pengaruh positif dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat Indonesia. Hal tersebut dilakukan oleh LPEI melalui implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau CSR).

### Dasar Hukum

Kami menjalankan kegiatan CSR – Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada beberapa peraturan perundungan yang berlaku, sebagai berikut:

1. POJK No. 8/POJK.04/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 6 poin d dan Pasal 5 mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/ SEOJK.04/2016.

### Kebijakan

Adapun landasan Kebijakan Internal yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan program-program CSR-Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut.

1. Peraturan Dewan Direktur No. 0024/PDD/09/2009 tentang mekanisme pelaksanaan CSR yang efektif, efisien, terencana, dan berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi LPEI.

## VISI DAN MISI CSR LPEI

### Visi CSR LPEI | CSR Vision

**Turut berperan aktif dalam memajukan Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fundamental ekonomi berbasis ekspor sesuai dengan visi dan misi Lembaga.**

To take an active role in advancing Indonesia through community empowerment and export-based economic fundamentals development in accordance with the vision and mission of the Institution.

### Misi CSR LPEI | CSR Mission

1. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan melalui capacity building guna menyejahterakan masyarakat Indonesia.
  2. Meningkatkan sinergi antar Lembaga dalam memajukan ekonomi berbasis UKM berorientasi ekspor.
  3. Mengantar pelaku UKM untuk melakukan ekspor.
- 
1. To enhance skills and knowledge through capacity building in order to improve the welfare of Indonesians.
  2. To increase inter-institution synergy in advancing an export-oriented SME economy.
  3. To mentor SMEs in exporting activities.

As an institution that continues to grow and operate in Indonesia, Indonesia Eximbank is fully committed and continues to contribute in a positive and beneficial influence on stakeholders, particularly the Indonesian society. This is carried out through the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR).

### Legal basis

CSR activities - Community Development and Empowerment are carried out with reference to several prevailing laws and regulations, as follows:

1. POJK No. 8/POJK.04/2015 dated 26 June 2015 on Websites of Issuers or Public Companies, Article 6 point d and Article 5 regarding Corporate Social Responsibility.
2. Financial Services Authority Circular No. 30/ SEOJK.04/2016.

### Policies

The Internal Policies that are used as the basis for implementing CSR programs - Community Development and Empowerment is as follows.

1. Board of Directors Regulation No. 0024/ PDD/09/2009 on implementation mechanism of effective, efficient, planned and sustainable CSR in accordance with the Institution's vision and mission.

## CSR VISION AND MISSION

## KINERJA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

### Community Development and Empowerment Performance

LPEI menetapkan pengelolaan CSR berada di bawah unit kerja Divisi Advisory Services.

### PENYUSUNAN PROGRAM

LPEI merancang program CSR dengan terlebih dahulu menjalin komunikasi intensif dengan para pemangku kepentingan, agar mengerti dan memahami apa yang dibutuhkan, sekaligus untuk menggali potensi yang dapat dioptimalkan. [413-1]

Sesuai dengan moto (*tagline*) program CSR LPEI yaitu "Sahabat Eksport", program CSR ini diharapkan dapat mendukung strategi bisnis LPEI yaitu mampu menyiapkan pelaku usaha UKM menjadi eksportir yang tangguh dan beretika, serta senantiasa menjaga keseimbangan lingkungan melalui kepedulian terhadap pelestarian alam.

LPEI juga memperhatikan situasi dan kondisi terkini yang dihadapi seluruh komponen masyarakat, dan pemerintah, yakni merebaknya Covid-19, dan bersama seluruh pemangku kepentingan sepakat untuk menjadikan program penanggulangan dampak dan pencegahan penyebarannya menjadi salah satu program utama yang harus dijalankan di tahun 2021.

#### Tujuan Pelaksanaan Program CSR LPEI

Penyelenggaraan Program CSR - LPEI bertujuan untuk memberikan dampak positif guna memajukan kondisi sosial komunitas dan masyarakat dengan pelaksanaan program tepat guna dan berdampak jangka panjang dengan mengembangkan program yang berkesinambungan. Hal ini juga sejalan dengan komitmen Lembaga untuk senantiasa berada di tengah komunitas serta tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Realisasi Program CSR - LPEI adalah wujud komitmen Lembaga untuk membangun hubungan yang harmonis dan berkelanjutan dengan komunitas, lingkungan, dan pemangku kepentingan yang terhubung baik secara lokal, nasional maupun global, selain sebagai perwujudan misi korporasi LPEI.

### REALISASI PROGRAM

Dalam merancang dan menjalankan CSR terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, LPEI selalu

Indonesia Eximbank sets the CSR management under the unit Advisory Services Division.

### PROGRAM DEVELOPMENT

Indonesia Eximbank designs CSR programs by first establishing intensive communication with stakeholders to understand and comprehend the needs, as well as to explore potential to be optimized. [413-1]

In accordance with the motto (*tagline*) of Indonesia Eximbank CSR program, "Friends Exports", this CSR program is expected to support Indonesia Eximbank's business strategy, which is being able to prepare SME communities to be strong and ethical exporters, and always maintain environmental balance through concern for nature conservation.

Indonesia Eximbank also takes into account the current situation and conditions faced by all components of society, and the government, namely the outbreak of Covid-19, and together with all stakeholders agree to make the impact mitigation program and prevention of its spread as one of the main programs that must be carried out in 2021.

#### CSR Program Implementation Objectives

The CSR Program aims at providing a positive impact in order to advance social conditions of the community and society by implementing effective programs and having a long-term impact by developing sustainable programs. This is also in line with the company's commitment to be with the community and grow and develop with the community. The realization of Indonesia Eximbank CSR Program is a manifestation of the Company's commitment to build harmonious and sustainable relationships with the communities, the environment, and stakeholders that are connected locally, nationally and globally, while realizing the Indonesia Eximbank corporate mission.

### PROGRAM IMPLEMENTATION

In designing and implementing CSR related to social and community development, Indonesia Eximbank takes

## KINERJA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Community Development and Empowerment Performance

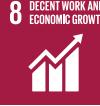
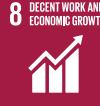
memperhatikan kebutuhan masyarakat agar tepat sasaran dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya.

Sebagaimana dijalankan di tahun-tahun sebelumnya, selama tahun 2021, LPEI terus melanjutkan program pengembangan Desa Devisa yang merupakan rangkaian kegiatan berbasis *community development*. Tujuan strategis dari program tersebut adalah untuk memperbesar akses masyarakat mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik, dibandingkan sebelum adanya kegiatan serta dapat menghasilkan devisa.

Secara keseluruhan terdapat tiga kelompok kegiatan CSR yang dijalankan oleh LPEI, sebagai berikut.

1. Kegiatan berbasis *community development* yang berkaitan erat dengan dukungan pencapaian SDGs selama tahun 2021, sebagai berikut:

### Program CSR Yang Mendukung Pencapaian Tujuan SDGs

Jenis kegiatan Activities	SDGs		Penjelasan Description	Capaian Achievements
Desa Devisa Agrowisata Ijen Ijen Agrotourism Desa Devisa	 <b>8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH</b>  <b>9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE</b>		Cakupan 5 desa dengan melibatkan 257 petani dengan waktu Pelaksanaan pendampingan dimulai pada 7 Mei 2021  5 villages involving 257 farmers with the mentoring starting on 7 May 2021.	Adanya Permintaan dari Jepang sebanyak 18 ton atau senilai Rp3,3 miliar, rencana pengiriman pada bulan Maret 2022  A demand from Japan as much as 18 tons or worth Rp. 3.3 billion, the delivery plan is in March 2022.
Desa Devisa Kopi Subang Subang Coffee Desa Devisa	 <b>8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH</b>  <b>9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE</b>		Cakupan 6 desa dengan melibatkan 208 petani dengan waktu pelaksanaan pendampingan dimulai pada 12 Juli 2021  6 villages involving 208 farmers with the mentoring starting on 12 July 2021.	Ekspor ke Arab Saudi sebanyak 150 ton atau senilai Rp15 miliar (Telah Ekspor Perdana pada Sep 2021)  Exports to Saudi Arabia of 150 tons or Rp15 billion (Initial Exports in Sep 2021).

into account the needs of the community, hence to meet the targets and provides maximum benefit.

As carried out in previous years, Indonesia Eximbank continued the Desa Devisa development program in 2021, which is a series of community development-based activities. The strategic objective of the program is to increase public access to better socio-economic-cultural conditions, compared its presence and to generate foreign exchange.

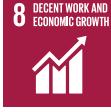
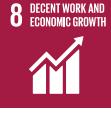
Overall, there are three groups of CSR activities carried out by Indonesia Eximbank, as follows.

1. Community development-based activities that are closely related to supporting the achievement of the SDGs during 2021, as follows:

### CSR Programs That Support the Achievement of the SDGs

## KINERJA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

### Community Development and Empowerment Performance

Jenis kegiatan Activities	SDGs		Penjelasan Description	Capaian Achievements
Desa Devisa Tenun Gresik	 		1.500 Penenun yang tergabung dalam 22 anggota koperasi dengan waktu pelaksanaan pendampingan dimulai pada 2 November 2021	Indirect export ke Timur Tengah, Afrika, dan Malaysia sebanyak 1.250Pcs atau senilai Rp500 juta/tahun
			1,500 Weavers who are members of 22 cooperative members with the mentoring starting on 2 November 2021.	Indirect exports to the Middle East, Africa, and Malaysia are 1,250 Pcs or Rp500 million/year.
Desa Devisa Garam Klungkung	 		Cakupan 2 desa dengan melibatkan 40 petani serta 120 orang tenaga kerja pengolahan pelaksanaan pendampingan dimulai pada 6 November 2021  2 villages involving 40 farmers and 120 workers processing the assistance starting on 6 November 2021.	Target Ekspor ke Eropa melalui Rumah Indonesia Belanda sebanyak 450kg atau senilai Rp400 juta rencana pengiriman pada April 2022  The export target to Europe through the Dutch Indonesia House is 450 kg or Rp400 million, with a planned delivery in April 2022.
Desa Devisa Rumput Laut Sidoarjo			59 petani rumput laut yang tergabung dalam Kelompok Budidaya Rumput Laut pelaksanaan pendampingan dimulai pada 7 Desember 2021  59 seaweed farmers who are members of the Seaweed Cultivation Group, the implementation of mentoring begins on 7 December 2021.	Indirect Ekspor produk olahan rumput laut ke Asia Timur sebanyak 120ton atau senilai Rp1,2 miliar/tahun.  Indirect Exports of processed seaweed products to East Asia are 120 tons or worth Rp1.2 billion/year.

## 2. Program CSR Yang Mendukung ESG

## 2. CSR Programs Supporting ESG

Jenis kegiatan Activities	ESG	Pelaksanaan Time	Capaian Peserta Number of Participants
CPNE Solo	ESG	Mar - Okt 2021 Mar - Oct 2021	35 peserta 35 participants
CPNE Denpasar	ESG	Mei - Nov 2021 May - Nov 2021	35 peserta 35 participants
CPNE Medan	ESG	Jun - Okt 2021 Jun - Oct 2021	25 peserta 25 participants
CPNE Kendal	ESG	Jun 2021	50 Peserta 50 participants

## KINERJA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Community Development and Empowerment Performance

Jenis kegiatan Activities	ESG	Pelaksanaan Time	Capaian Peserta Number of Participants
CPNE Demak	ESG	Jul 2021	50 Peserta 50 participants
CPNE Bandung	ESG	September 2021	50 Peserta 50 participants
CPNE Manado	ESG	September 2021	50 Peserta 50 participants

3. Program CSR dalam bentuk pemberian dukungan dan bantuan sosial, bekerjasama dengan yayasan/ mitra lembaga dan dikoordinasikan oleh Divisi *Communication and Stakeholder Engagement*. Kegiatan CSR bantuan sosial dimaksud terdiri atas 16 kegiatan, sebagai berikut.
3. CSR program that provides social support and assistance, in collaboration with foundations/ institutional partners and coordinated by the *Communication and Stakeholder Engagement* Division. The social assistance CSR activities consist of 16 activities, as follows.

**Tabel Program CSR – Dukungan dan Bantuan Sosial**

CSR Program- Social Support and Assistance

No	Waktu Pelaksanaan Time	Yayasan/Mitra Lembaga Foundations/ Institutional Partners	Jenis Kegiatan Activities	Nominal (Rp)	Lokasi Location
	Juni June	Yayasan Caritas Caritas Foundation	Bantuan Bencana ke NTT-Lembata (Tahap Pertama) Disaster Aids to NTT-Lembata (First Phase)	50.000.000	Lembata, NTT
	Agustus August	Yayasan Asy-Syuhada Tasikmalaya Asy-Syuhada Foundation Tasikmalaya	Bantuan Paket Sembako kepada Masyarakat terdampak Covid-19 se-Kota Tasikmalaya Food Package Assistance to Communities Affected by Covid-19 in Tasikmalaya City	50.000.000	Tasikmalaya
	September	Yayasan Safa Mandiri Safa Mandiri Foundation	Bantuan Paket Sembako kepada Masyarakat terdampak Covid-19 di Kab. Musi Rawas Food Package Assistance to Communities Affected by Covid-19 in Musi Rawas Regency	50.000.000	Musi Rawas
	September	Yayasan Loro Blonyo Loro Blonyo Foundation	Dukungan Kegiatan Vaksinasi kepada Masyarakat Yogyakarta Support for Vaccination Activities for the Community of Yogyakarta	75.750.000	Yogyakarta
	Oktober October	Perkumpulan Mitra Nusantara Sejati Mitra Nusantara Sejati Association	Bantuan Paket Sembako kepada Masyarakat terdampak Covid-19 di Kab. Banyumas Food Package Assistance to Communities Affected by Covid-19 in Banyumas Regency	50.000.000	Banyumas

**KINERJA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
Community Development and Empowerment Performance

No	Waktu Pelaksanaan Time	Yayasan/Mitra Lembaga Foundations/ Institutional Partners	Jenis Kegiatan Activities	Nominal (Rp)	Lokasi Location
	Oktober October	Perkumpulan Mitra Nusantara Sejati Mitra Nusantara Sejati Association	Bantuan Paket Sembako kepada Masyarakat terdampak Covid-19 di Kab. Cilacap Food Package Assistance to Communities Affected by Covid-19 in Cilacap Regency	50.000.000	Cilacap
	Oktober October	Yayasan Manuk Dadali Sukabumi Manuk Dadali Sukabumi Foundation	Pemberian Hewan Qurban berupa satu ekor sapi Handover of Sacrificial Animals in the form of a calf	44.289.000	Sukabumi
	Oktober October	Yayasan Guna Semesta Persada Guna Semesta Persada Foundation	Pemberian Hewan Qurban berupa satu ekor sapi Handover of Sacrificial Animals in the form of a calf	44.289.000	Sukabumi
	Oktober October	Yayasan LAZIS NU Demak LAZIS NU Demak Foundation	Bantuan Paket Sembako kepada Masyarakat terdampak Covid-19 di Kec. Bonang, Kab. Demak Food Package Assistance to Communities Affected by Covid-19 in Bonang District, Demak Regency	50.000.000	Kec. Bonang, Demak Bonang District, Demak Regency
	Oktober October	Yayasan LAZIS NU Demak LAZIS NU Demak Foundation	Bantuan Paket Sembako kepada PKL terdampak Covid-19 di Kec. Demak, Kab. Demak Food Package assistance to street vendors affected by Covid-19 in Demak District, Demak Regency	50.000.000	Kec. Demak, Demak Demak District, Demak Regency
	Oktober October	Yayasan Safa Mandiri Safa Mandiri Foundation	Bantuan Paket Sembako kepada Masyarakat terdampak Covid-19 di Kab. Musi Rawas Utara Food Package Assistance to Communities Affected by Covid-19 in North Musi Rawas Regency	50.000.000	Musi Rawas Utara North Musi Rawas
	Oktober October	Yayasan Caritas Caritas Foundation	Bantuan Bencana ke NTT-Lembata (Tahap Kedua) Disaster Aids to NTT-Lembata (Second Phase)	50.000.000	Lembata, NTT
	Desember December	BBM Way Jepara Creativ	Bantuan Paket Sembako kepada Masyarakat terdampak Covid-19 di Kab. Lampung Timur Food Package Assistance to Communities Affected by Covid-19 in East Lampung Regency	50.000.000	Lampung Timur

## KINERJA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Community Development and Empowerment Performance

No	Waktu Pelaksanaan Time	Yayasan/Mitra Lembaga Foundations/ Institutional Partners	Jenis Kegiatan Activities	Nominal (Rp)	Lokasi Location
	Desember December	Bank Sampah IAS Toba IAS Toba Garbage Bank	Bantuan Kendaraan Pengangkut Sampah di Wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba, Sumut Waste Transport Vehicle Assistance in the National Tourism Strategic Area of Lake Toba, North Sumatra	37.000.000	Sumatera Utara
	Desember December	Yayasan Indonesia Optimis Indonesia Optimis Foundation	Dukungan Kegiatan Vaksinasi untuk Pelajar di Wonosobo Support for Vaccination Activities for Students in Wonosobo	25.000.000	Wonosobo
	Desember December	Kantor Wilayah Surabaya Surabaya Regional Office	Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Erupsi Gunung Semeru di Lumajang Social Assistance to Victims of the Mount Semeru Eruption Disaster in Lumajang	77.751.037	Surabaya

### 4. Perbaikan Sarana dan Prasarana Sosial [203-1]

Salah satu wujud penyaluran program CSR bidang sosial dan kemasyarakatan yang LPEI realisasikan adalah berupa perbaikan sarana dan prasarana sosial dalam bentuk antara lain: Perbaikan sarana dan prasarana maupun pengadaan fasilitas umum lainnya.

Perbaikan sarana dan prasarana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk satu paket dengan pelaksanaan Program Desa Devisa. Tujuannya selain meningkatkan produktivitas masyarakat, juga membuat wisatawan yang berkunjung ke kawasan pelaksanaan Program Desa Devisa, mendapatkan akomodasi yang memadai dan mendapatkan kondisi sarana dan prasarana setempat yang nyaman,

### 4. Improvement of Social Facilities and Infrastructure [203-1]

One of the CSR programs distribution in the social and community sector that has been realized was by improving social facilities and infrastructure through Improvement of facilities and infrastructure as well as procurement of other public facilities.

The improvement of facilities is carried out within a package of the *Desa Devisa* Program. The aim is not only to increase community productivity, but also for tourists who visit the *Desa Devisa* Program shall obtain adequate accommodation and comfort of local facilities and infrastructure.

## INVESTASI SOSIAL CSR

Adapun total investasi sosial sepanjang 2021 yang direalisasikan untuk pelaksanaan program-program CSR Pengembangan Sosial Kemasyarakatan adalah sebesar Rp2.76 miliar. Adapun rincian jumlah investasi Sosial CSR Pengembangan Sosial Kemasyarakatan menurut kelompok program adalah sebagai berikut:

## CSR SOCIAL INVESTMENT

Throughout 2021, total social investment realized for CSR programs of Community Social Development was Rp2.76 billion. The details of the amount of Social CSR investment in Community Social Development according to program groups are as follows:)

## KINERJA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Community Development and Empowerment Performance

**Tabel Realisasi Investasi Sosial**

Social Investment Realization

<b>Kelompok Kegiatan</b> Activity Group	<b>Frekuensi Kegiatan</b> Frequency	<b>Dana Investasi Sosial (Rp Juta)</b> Social Investment Funds (Rp Million)
Pelatihan Community Development - Yang Mendukung SDGs Community Development Training - Supporting the SDGs	5	1150.10
Pelatihan CSR dalam Rangka Mendukung ESG CSR Training to Support ESG	8	802.80
Program CSR Dukungan dan Bantuan Sosial Social Assistance and Support CSR Program	16	804.08
Program Community Development - Pengembangan Infrastruktur Community Development Program - Infrastructure Development	-	-
<b>Total Dana Investasi Sosial</b> <b>Total Social Investment Fund</b>		2756.98



# MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Managing and Developing Human Resources Competency



Rata-rata man-days pelatihan per tahun adalah  
**4,28**  
man-days  
**pelatihan/pegawai**

The average man-days of training per year was 4.28 man-days of training/employee

## KOMITMEN DAN KEBIJAKAN [103-1, 103-3]

LPEI memandang sumber daya manusia (SDM) atau para pegawai sebagai aset yang paling berharga dengan peran sentralnya dalam mendukung keberhasilan meraih nilai tambah untuk para pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Para pegawai merupakan salah satu pemangku kepentingan dan partner usaha yang strategis dengan kedudukan sentral sebagai ujung tombak dan penentu keberhasilan perusahaan mewujudkan visi dan melaksanakan

## COMMITMENTS AND POLICIES [103-1, 103-3]

Indonesia Eximbank views human resources (HR) or employees as the most valuable asset with a central role in supporting the achievement of added value for shareholders, customers and other stakeholders. Employees are one of the stakeholders and strategic business partners with a central position as the spearhead and determinant of the company's success in realizing its vision and carrying out its mission. As such, Indonesia Eximbank is fully committed to providing a

## MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Managing and Developing Human Resources Competency

misinya. Oleh karenanya, LPEI berkomitmen penuh menghadirkan lingkungan kerja yang kondusif dan menyenangkan, remunerasi yang kompetitif, serta kesempatan untuk pengembangan pribadi dan karir bagi para pegawai.

Tujuan utama pengelolaan SDM adalah memberi kesempatan bagi para pegawai untuk berkembang sesuai potensi terbaik yang dimiliki, memberi ruang kepada mereka untuk mencatatkan kinerja terbaik untuk mendukung pengembangan skala usaha yang berkualitas.

### KEBIJAKAN UMUM [103-2]

Kebijakan umum pengelolaan SDM Lembaga adalah persamaan hak dan kesetaraan kesempatan dalam mengembangkan kompetensi, menjalani penilaian kinerja dan peningkatan jenjang karir dan dalam menerima paket remunerasi sesuai kinerjanya.

#### Kebijakan Khusus [103-2]

LPEI memiliki dan memberlakukan berbagai kebijakan khusus di bidang pengelolaan SDM yang diterapkan dalam rangka mengatur hal-hal yang spesifik berkaitan dengan SDM, sebagai berikut:

- a. PDE No. 0005/PDE/01/2018 mengatur tentang Kebijakan Sistem Kepegawaian LPEI
- b. PDE No. 0028/PDE/05/2019 mengatur tentang Penerimaan Pegawai LPEI
- c. PDE No. 0054/PDE/11/2019 mengatur tentang Mutasi Pegawai LPEI
- d. PDE No. 0023/PDE/07/2021 mengatur tentang Program Magang/Praktik Kerja, Detasering (Secondment) dan Pertukaran Pegawai LPEI
- e. PDE No. 0042/PDE/09/2019 mengatur tentang Manual Operasional Pakta Integritas
- f. PDE No. 0013/PDE/03/2018 mengatur tentang Waktu Kerja Pegawai LPEI
- g. PDE No. 0052/PDE/11/2019 mengatur tentang Golongan Jabatan
- h. PDE No. 0055/PDE/11/2019 mengatur tentang Remunerasi Pegawai LPEI dan KDE No. 0158/KDE/11/2019 mengatur tentang Penetapan Remunerasi Pegawai LPEI
- i. PDE No. 0024/PDE/07/2021 mengatur tentang Perjalanan Dinas Pegawai LPEI

favourable and pleasant work environment, competitive remuneration, and opportunities for personal and career development of its employees.

The main objective of HR management is to provide opportunities for employees to develop according to their best potential, to provide rooms for them to deliver best performance to support the development of a quality business scale.

### GENERAL POLICY [103-2]

The general policy in managing the Institution's HR is equal rights and equal opportunity in developing competence, undergoing performance assessments and enhancing career paths, and in receiving remuneration packages according to their performance.

#### Specific Policies [103-2]

Indonesia Eximbank has and enforces various specific policies in HR management aspect which are implemented to regulate specific matters relating to HR, as follows:

- a. PDE No. 0005/PDE/01/2018 regulates the Indonesia Eximbank Personnel System Policy
- b. PDE No. 0028/PDE/05/2019 regulates Indonesia Eximbank Employee Admission
- c. PDE No. 0054/PDE/11/2019 regulates Indonesia Eximbank Employee Transfers
- d. PDE No. 0023/PDE/07/2021 regulates the Internship Program/Work Practices, Secondment and Employee Exchange
- e. PDE No. 0042/PDE/09/2019 regulates the Integrity Pact of Operational Manual
- f. PDE No. 0013/PDE/03/2018 regulates the Working Time of Employees
- g. PDE No. 0052/PDE/11/2019 regulates Position Group
- h. PDE No. 0055/PDE/11/2019 regulates Indonesia Eximbank Employee Remuneration and KDE No. 0158/KDE/11/2019 regulates Indonesia Eximbank Employee Remuneration
- i. PDE No. 0024/PDE/07/2021 regulates the Official Travel of Employees

## MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Managing and Developing Human Resources Competency

- j. PDE No. 0014/PDE/05/2015 mengatur tentang Program Pelatihan dan Pengembangan Pegawai LPEI
- k. PDE No. 0028/PDE/12/2020 mengatur tentang Penegakan Disiplin dan Penentuan Sanksi Atas Pelanggaran
- l. PDE No. 0058.01/PDE/11/2019 mengatur tentang Pensiun Pegawai LPEI
- j. PDE No. 0014/PDE/05/2015 regulates the Indonesia Eximbank Employee Training and Development Program
- k. PDE No. 0028/PDE/12/2020 regulates Discipline Enforcement and Determination of Sanctions for Violations
- l. PDE No. 0058.01/PDE/11/2019 regulates Indonesia Eximbank Employee Pension

### Kesetaraan Dalam Pengelolaan SDM [405-1]

LPEI menerapkan prinsip non-diskriminasi dalam segala hal, termasuk memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan (*gender equity and equality*) untuk mendapatkan pekerjaan di lingkup Lembaga, sejauh memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Prinsip-prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan ini juga diwujudkan dalam penetapan karir struktural, operasional maupun fungsional bahkan sampai jenjang tertinggi dalam struktur organisasi.

LPEI menghormati dan menghargai keberagaman suku bangsa, gender, kewarganegaraan, etnis dan agama, serta juga keragaman pendapat, pengalaman, talenta dan gagasan. Kami berupaya memberdayakan seluruh individu agar dapat meraih prestasi kerja dan mengeluarkan seluruh potensinya, serta memberi penghargaan berdasarkan kinerja dan pencapaiannya.

Komitmen LPEI dalam membangun lingkungan kerja yang beragam dan inklusif terefleksi pada komposisi pegawai. Per akhir tahun 2021, total pegawai Lembaga adalah 567 orang terdiri dari 338(59,9%)pegawai laki-laki dan 229(40%)pegawai perempuan. Pengisian beberapa jenjang jabatan juga menunjukkan pemberlakuan konsep kesetaraan kesempatan, yakni dengan relatif terjadinya proporsi pegawai perempuan dan pegawai laki-laki.

Hal tersebut tampak pada komposisi jajaran manajemen puncak, dan komposisi pegawai menurut jenjang jabatan berikut. Sementara data demografi pegawai menurut usia, tingkat pendidikan, status ketenagakerjaan, lokasi kerja, masa kerja dan sebagainya dapat dilihat pada bagian "Profil Perusahaan [405-1]

### Equality in HR Management [405-1]

Indonesia Eximbank applies the principle of non-discrimination in all respects, including providing equal opportunities for women (gender equity and equality) to find jobs within the Institution, as long as they meet the stipulated requirements. The principles of non-discrimination and equality are also manifested in the determination of structural, operational and functional careers, even to the highest level in the organizational structure.

Indonesia Eximbank respects and appreciates the diversity of ethnic groups, gender, citizenship, ethnicity and religion, as well as the diversity of opinions, experiences, talents and ideas. We strive to empower all individuals to achieve work performance and bring out their full potential, as well as give rewards based on performance and achievements.

Indonesia Eximbank commitment to build a diverse and inclusive work environment is reflected in the composition of its employees. As of the end of 2021, the Institution's total employees were 567, consisting of 338 (59.9%) male employees and 229 (40%) female employees. The filling of several levels of office also shows the implementation of the concept of equality of opportunity, shown by the relatively maintained proportion of female employees and male employees.

This can be seen in the composition of the top management ranks, and the composition of employees according to the following positions. Meanwhile, employee demographic data by age, education level, employment status, work location, years of service and others are presented in the "Company Profile" section [405-1].

**MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**  
Managing and Developing Human Resources Competency

**Demografi Pegawai Berdasarkan Gender (orang) [102-8, 405-1]**

Employee Demographics by Gender (person)

Jenis Kelamin Gender	2020		2021	
	Jumlah Total	Komposisi Composition	Jumlah Total	Komposisi Composition
Laki-laki Male	340	61,2%	338	59,6%
Perempuan Female	216	38,8%	229	40,4%
<b>Jumlah Total</b>	<b>556</b>	<b>100,0%</b>	<b>567</b>	<b>100,0%</b>

**Komposisi Jabatan Manajemen Puncak Berdasarkan Umur Gender [405-1]**

Composition of Top Management Positions by Age Gender

Usia Age	2020				2021			
	L Male	P Female	Jumlah Total	Komposisi Composition	L Male	P Female	Jumlah Total	Komposisi Composition
31 hingga 40 Tahun 31 to 40 Years Old	-	-	-	%	-	-	-	-
Diatas 40 Tahun 40 Years Old and Older	8	3	11	100 %	8	3	11	100%
<b>Jumlah Total</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>100 %</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>100 %</b>

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan dan Gender [102-8, 405-1]**

Employee Composition by Position and Gender

Level	2020				2021			
	L Male	P Female	Jumlah Total	Komposisi Composition	L Male	P Female	Jumlah Total	Komposisi Composition
Senior Executive Vice President	4	3	7	1,26 %	4	2	6	1,06 %
Kepala Divisi/Kepala Kantor Wilayah Head of Division/Head of Regional Office	30	11	41	7,37 %	34	17	51	8,99 %
Kepala Departemen Head of Department	81	31	112	20,14 %	83	35	118	20,81 %
Eksekutif Executive	139	69	208	37,41 %	144	81	225	39,68 %
Pelaksana Operations	84	102	186	33,45 %	73	93	166	29,28 %
Pegawai MPP Pre-retirement Employees	2	0	2	0,36%	1	0	1	0,18%
<b>Jumlah Total</b>	<b>340</b>	<b>216</b>	<b>556</b>	<b>100,0%</b>	<b>339</b>	<b>228</b>	<b>567</b>	<b>100,0%</b>

## **HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HAROMIS DAN BERMARTABAT [102-41]**

LPEI senantiasa menunjukkan komitmennya untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan para pegawai. Hubungan industrial di LPEI dilandasi oleh semangat para pihak untuk memberikan yang terbaik bagi pegawai maupun Lembaga. LPEI membina hubungan industrial yang efektif melalui pemahaman mendalam terhadap harapan para pegawai dan menunjukkan komitmen penuh terhadap penerapan berbagai kesepakatan yang melandasi hubungan kerjasama dengan jajaran insan Lembaga. Dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis tersebut, LPEI menjamin hak pegawai untuk menyampaikan pendapat secara transparan.

Hubungan industrial di LPEI dilaksanakan mengacu pada prinsip kesetaraan, kewajaran, rasa keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip-prinsip tersebut diwujudkan di dalam Peraturan Perusahaan LPEI (secara internal disebut Peraturan Direktur Eksekutif tentang Kebijakan Sistem Kepegawaian) yang terdaftar dan disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep. 284/PHIJSK-PK/PP/II/2020 tanggal 20 Februari 2020.

Seluruh (100%) pegawai LPEI terjamin hak dan kewajibannya dalam Peraturan Perusahaan dimaksud. [102-41]

Peraturan Perusahaan tersebut, LPEI mengatur secara lengkap hak dan kewajiban pegawai dan Manajemen Lembaga, termasuk apabila terjadi perselisihan atau sengketa hubungan kerja diantara kedua pihak. Sesuai dengan Peraturan Perusahaan tersebut, jika terdapat kasus-kasus terkait dengan ketenagakerjaan, penyelesaiannya dilakukan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan mengutamakan penyelesaian secara bipartit/internal perusahaan tanpa melibatkan pihak ketiga.

### **Pengembangan Lingkungan Kerja Yang Kondusif [407-1]**

LPEI terus berupaya untuk mengembangkan lingkungan kerja yang kondusif, yang salah satunya diwujudkan melalui komunikasi imbal balik yang efektif bersama para pegawai, juga melalui penerapan hubungan industrial

## **HARMONIOUS AND DIGNIFY INDUSTRIAL RELATIONS [102-41]**

Indonesia Eximbank delivers its commitment to establish a harmonious relationship with employees. Industrial relations at Indonesia Eximbank are based on the spirit of all parties to provide the best for employees and institutions. Indonesia Eximbank fosters effective industrial relations through a deep understanding of employees' expectations and demonstrates full commitment to the implementation of various agreements that underlie cooperative relationships with the Institution's personnel. In realizing such harmonious industrial relations, Indonesia Eximbank guarantees the rights of employees to express opinions in a transparent manner.

Industrial relations at Indonesia Eximbank are carried out according to the principles of equality, fairness, a sense of justice and human values. These principles are embodied in the Company Regulation (internally referred to as the Executive Director's Regulation on Employment System Policy) which is registered and ratified by the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia through the Decree of the Director General of Industrial Relations and Labour Social Security No. Kep. 284/PHIJSK-PK/PP/II/2020 dated 20 February 2020.

All (100%) Indonesia Eximbank employees are guaranteed their rights and obligations in the said Company Regulations. [102-41]

In the Company Regulation, Indonesia Eximbank stipulates in full the rights and obligations of employees and Institutional Management, including in the event of a dispute or issues between the two parties. In accordance with the Company Regulations, for cases related to employment, the settlement is carried out through a process in compliance with the law by prioritizing bipartite/internal settlements without involving third parties.

### **Development of a Favourable Work Environment [407-1]**

Indonesia Eximbank strives to develop a favourable work environment, one of which is realized through effective mutual communication with employees, as well as through the implementation of dignified industrial

## MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

### Managing and Developing Human Resources Competency

yang bermartabat. Berbagai sarana komunikasi yang disediakan dalam rangka mengembangkan lingkungan kerja yang kondusif, juga penerapan berbagai kebijakan dalam rangka membangun hubungan industrial yang bermartabat dalam kerangka *social co-creation*, mencakup diantaranya:

1. Menerapkan proses seleksi sesuai dengan budaya kerja LPEI, standar kompetensi, standar kesehatan dan standar remunerasi.
2. Welcoming Pegawai Baru melalui email dan memberikan informasi awal mengenai LPEI, bisnis LPEI, Buddy dan HRBP-nya.
3. Menginformasikan Pegawai Baru melalui email HR Information.
4. Menyambut Pegawai Baru pada hari pertama *on-board* dan memastikan yang bersangkutan mendapatkan layanan pemeriksaan antigen sebelum beraktivitas di Kantor.
5. Memastikan ketersediaan fasilitas kerja di hari pertama.
6. Memberikan HR Briefing session agar Pegawai Baru memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai proses dan prosedur Kepegawaian serta bagaimana proses penilaian kinerja selama masa percobaan dan masa kontrak (bila ada) termasuk tips-tips selama masa transisi.
7. Memastikan handover Pegawai Baru kepada Buddy dan Atasannya berjalan dengan baik termasuk mengingatkan agar dapat membantu Pegawai Baru selama masa transisi.
8. Memastikan Pegawai Baru memiliki nomor kontak HRBP sebagai first solution atas masalah Kepegawaian.
9. Mendorong *Community Minded at Work* dengan memperkenalkan Pegawai Baru pada lingkungan kantor dan fasilitas kantor (termasuk Gym Room dan Komunitas Hobby Pegawai) serta memperkenalkan Pegawai Baru kepada Pegawai-pegawai yang ada.
10. Memastikan seluruh Pegawai telah menyelesaikan New Hire Orientation Program, menerima certificate Pakta Integritas dan Budaya Kerja yang dikelola oleh Tim HRD.
11. Memastikan Pegawai mengetahui Whistle Blower System yang dikelola oleh Tim KPT.
12. Menyebarluaskan keterbukaan atas segala informasi terkait dengan Kepegawaian pada kanal-kanal informasi internal seperti email, internal portal, Great Day dan WhatsApp Group.

relations. Various means of communication are provided to develop a favourable work environment, as well as the implementation of various policies in order to build dignified industrial relations within the framework of social co-creation, including among others:

1. Implement the selection process in accordance with the Indonesia Eximbank work culture, competency standards, health standards and remuneration standards.
2. Welcoming New Employees via email and providing initial information about Indonesia Eximbank, its business, Buddy and its HRBP.
3. Inform new employees via HR Information email.
4. Welcoming new employees on the first day of on-boarding and ensuring that they receive antigen examination services prior to their activities in the office.
5. Ensure the availability of work facilities on the first day.
6. Provide HR Briefing sessions for new employees to have knowledge and understanding of the staffing process and procedures as well as the performance assessment process during the probationary period and contract period (if any) including tips during the transition period.
7. Ensure the proper handover of New Employees to Buddy and his superiors, including reminder to help New Employees during the transition period.
8. Ensure new employees know the HRBP contact numbers as the first solution for staffing problems.
9. Promote Community Minded at Work by introducing new employees to the office environment and office facilities (including the Gym Room and Employee Hobby Community) and introducing new employees to existing employees.
10. Ensure that all employees have completed the New Hire Orientation Program, received a certificate of Integrity Pact and Work Culture managed by the HRD Team.
11. Ensure that employees are aware of the Whistle Blower System managed by the KPT Team.
12. Disseminate disclosure of all information related to Employment on internal information channels such as email, internal portal, Great Day and WhatsApp Group.

## MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Managing and Developing Human Resources Competency

13. Memastikan kesempatan terbuka bagi seluruh Pegawai untuk mendapatkan *self development* melalui program terstruktur (pelatihan dan pengembangan serta *Mentoring*) dan juga tidak terstruktur melalui program *webinar*.
14. Memastikan Pegawai telah melengkapi Rencana Kinerja Individu-nya melalui metode 1 on 1 session atau diskusi dengan Atasannya sehingga membangun keterbukaan dan komitmen kedua belah pihak.
15. Menyediakan retensi program terutama bagi Pegawai bertalenta atau yang berada di *Position At Risk(critical)*.
16. Memberikan kesempatan terbuka bagi Pegawai-pegawai yang ingin meningkatkan kinerjanya melalui program *Performance Improvement Plan* dan *Mentoring* yang dikelola oleh Tim HRD. Dalam program ini, Pegawai memiliki kesempatan untuk *Speak Up* mengenai karir dan aspirasinya.
17. Memberikan kesempatan jalur karir melalui skema *promotion from within* (*promotion* dan *internal job posting*).
18. Mendorong terjadi *Collaboration at Work* melalui pembentukan *Task Force* dalam beberapa *project* lintas Divisi.
19. Selama pandemi, menerapkan *hybrid working arrangement* dimana Pegawai tetap bisa melakukan kerja produktif dari Rumah dan dari Kantor dengan pengaturan jadwal hari kerja sehingga Pegawai merasa aman dan nyaman dalam beraktivitas.
20. Memberikan perhatian khusus bagi Pegawai yang terkonfirmasi *positive Covid*, yang sedang sakit atau yang sedang berduka.
21. Mendorong Pegawai untuk berpartisipasi dalam penerapan *Green Office* seperti membawa tanaman di tempat kerja dan mengikuti lomba-lomba yang ada.
22. Menyelenggarakan *Employee Engagement Survey* agar bisa menangkap isu-isu sosial di lingkungan kerja, termasuk memperkuat peran HRBP sebagai partner bisnis dan Pegawai.
13. Ensure open opportunities for all employees to get self-development through structured programs (training and development as well as Mentoring) and also unstructured through webinar programs.
14. Ensure employees to complete Individual Performance Plans through the 1 on 1 session method or discussions with supervisors to build transparency and commitment from both parties.
15. Provide program retention, especially for talented employees or those in Position at Risk(critical).
16. Provide open opportunities for employees to improve performance through the Performance Improvement Plan and Mentoring programs managed by the HRD Team. In this program, employees have the opportunity to speak up about their careers and aspirations.
17. Provide career path opportunities through promotion from internal(*promotion* and *internal job posting*) schemes.
18. Promote Collaboration at Work through the establishment of a Task Force in several cross-division projects.
19. During the pandemic, implement a hybrid working arrangement where employees can still do productive work from home and from the office by setting a work day schedule for employees to feel safe and comfortable in their activities.
20. Provide special attention to Employees who are confirmed positive for Covid, who are sick or who are grieving.
21. Promote employees to participate in implementing the Green Office such as bringing plants to the workplace and participating in competitions.
22. Organize Employee Engagement Surveys to capture social issues in the work environment, including strengthening HRBP's role as business partners and employees.

## FOKUS PENGEMBANGAN SDM DI TAHUN 2021

Untuk tahun 2021, pengembangan SDM LPEI difokuskan pada 3 area yang berbeda, didasarkan pada siklus

## FOCUS OF HR DEVELOPMENT IN 2021

HR development in 2021 was focused on 3 different areas, founded upon the performance management

## MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Managing and Developing Human Resources Competency

manajemen kinerja, yang diselaraskan dengan rencana kerja dan target LPEI di tahun 2021, yakni:

1. Penguatan organisasi yang meliputi penyusunan Struktur Organisasi yang *Agile* diselaraskan dengan dinamika Lembaga, pemenuhan kebutuhan pegawai melalui perencanaan yang matang dan pengembangan karir bagi pegawai.
2. Pengembangan kapabilitas dan kompetensi SDM baik kompetensi teknis (*technical competency*) dan kompetensi non teknis (*soft competency*) yang dilaksanakan sesuai dengan standarisasi kompetensi jabatan yang telah ada.
3. Peningkatan kesadaran budaya kinerja melalui perbaikan sistem manajemen kinerja individu pegawai, sistem imbalan (*Total Reward*), manajemen talenta, serta suksesi sebagaimana yang tercermin di dalam *Performance Management Cycle*.

### REKRUTMEN & TURNOVER PEGAWAI [401-1]

LPEI menjalankan program rekrutmen secara terbuka untuk mendapatkan sumber daya manusia terbaik, berkompeten dan sesuai kebutuhan. Rekrutmen dilakukan LPEI dengan mengacu pada rencana kebutuhan tenaga kerja dan didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan. Prinsip ini direalisasikan melalui proses seleksi yang transparan, non-diskriminatif dan berdasarkan kompetensi yang dimiliki setiap individu.

Proses rekrutmen pegawai yang dilakukan LPEI bertujuan untuk memastikan regenerasi pegawai dapat berlangsung secara berkesinambungan dan selaras dengan rencana pengembangan bisnis. Tujuan proses rekrutmen tersebut menjadi faktor utama LPEI dalam menetapkan tambahan pegawai baru.

Melalui proses seleksi tersebut, selama tahun 2021, LPEI melakukan rekrutmen calon pegawai yang telah memiliki pengalaman di bidangnya dan menerapkan program *Leader For Tomorrow* (LFT). Program LFT ini khusus dirancang sesuai kebutuhan dalam rangka mempersiapkan putra putri terbaik bangsa sebagai penerus pemimpin yang tangguh dan mempunyai nilai-nilai budaya LPEI.

cycle that aligned with work plan and targets in 2021, as follows:

1. Organizational strengthening, including the preparation of an Agile Organizational Structure that aligned with the dynamics of the Institution, fulfilling employee needs through careful planning and career development for employees.
2. Development of HR capabilities and competencies, both technical competencies and soft competencies which are carried out in accordance with existing job competency standards.
3. Enhancing awareness of performance culture through improvements to the individual employee performance management system, total reward system, talent management, and succession as reflected in the Performance Management Cycle.

### EMPLOYEE RECRUITMENT & TURNOVER [401-1]

Indonesia Eximbank manages an open recruitment program to obtain the best, competent and appropriate human resources according to the requirements. The recruitment is carried out by referring to the manpower requirement plan and based on the principles of justice and equality. The principle is realized through a selection process of transparent, non-discriminatory and based on the competence of each individual.

Indonesia Eximbanks employee recruitment process aims to ensure employee regeneration to take place continuously and in line with business development plan. The purpose of recruitment process is the main factor in determining new employees recruitment.

Through this selection process, Indonesia Eximbank recruited prospective employees in 2021 with experience in their field and implement the Leader For Tomorrow (LFT) program. This LFT program is specifically designed according to the needs in order to prepare the nation's best generations as successors to be strong leaders and uphold Indonesia Eximbank's cultural values.

## MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Managing and Developing Human Resources Competency

Rekrutmen pegawai pada tahun 2021 sejumlah 56 orang, untuk mencapai target jumlah pegawai tahun 2021 sebesar 579 pegawai atau naik 5% dari jumlah pegawai pada tahun sebelumnya. Selain reguler rekrutmen, pada tahun 2021 LPEI telah merekrut peserta *Leaders for Tommorow (LFT)* angkatan 1 (15 orang) pada Januari 2021 dan angkatan 2 (20 orang) pada Juli 2021. Jumlah peserta LFT tersebut ditargetkan untuk menjadi *headcount* pegawai LPEI pada Juli 2022 (LFT 1) dan Januari 2023 (LFT 2).

A total of 56 employees were recruited in 2021, to achieve the target of 579 employees in 2021 or an increase of 5% from the previous year. In addition to the regular recruitment, Indonesia Eximbank has recruited Leaders for Tommorow (LFT) participants of batch 1 (15 people) in January 2021 and batch 2 (20 people) in July 2021. The number of LFT participants is targeted to become the headcount of Indonesia Eximbank employees in July 2022 (LFT 1) and January 2023 (LFT 2).

### Rekrutmen Menurut Usia dan Gender [401-1]

Recruitment by Age and Gender

Kelompok Usia Age	2020		2021	
	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female
< 30 Tahun < 30 Years Old	8	13	9	2
30 - 50 Tahun 30 - 50 Years Old	20	13	15	16
> 50 Tahun > 50 Years Old	14	8	9	5
<b>Jumlah Total</b>	<b>76</b>		<b>56</b>	

Selain menjalankan proses rekrutmen, di tahun 2021, LPEI juga memproses keluarnya sejumlah pegawai dengan berbagai sebab. Terdapat 45 pegawai yang memutuskan untuk keluar dari LPEI.

In addition to carrying out the recruitment process, Indonesia Eximbank also processed the termination of employees in 2021 for various reasons. There were 45 employees who has resigned from the Institution.

Alasan berhentinya hubungan kerja dari para pegawai tersebut beragam. Usia pegawai umumnya juga masih dalam usia produktif pada saat mengajukan pengunduran diri untuk mengakhiri hubungan kerja dengan Lembaga, sebagaimana tampak pada tabel-tabel berikut.

The reasons for employment relationship termination of employees vary. Employees are generally of productive age at the time of submitting resignation to terminate their employment relationship with the Institution, as shown in the following tables.

### Turn-over menurut Usia dan Jenis Kelamin – 2020 dan 2021 [401-1]

Turn-over by Age and Gender – 2020 and 2021

Kelompok Usia Age	2020		2021	
	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female
<25 tahun <25 years old	0	1	0	0
25-30 tahun 25-30 years old	0	1	4	2

## MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Managing and Developing Human Resources Competency

Kelompok Usia Age	2020		2021	
	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female
31-35 tahun 31-35 years old	5	8	8	2
36-40 tahun 36-40 years old	8	2	4	2
41-45 tahun 41-45 years old	1	1	5	2
46-50 tahun 46-50 years old	3	0	3	1
≥ 51 tahun ≥ 51 years old	7	2	9	3
<b>Total</b>	<b>39</b>		<b>45</b>	

### Jumlah dan Alasan Pengunduran Diri [401-1]

Number and Reason for Resignation

Alasan Reason	2020	2021
Diberhentikan Terminated	0	0
Efisiensi Efficiency	0	0
Kontrak Berakhir End of Contract	2	3
Mengundurkan Diri Resigning	30	25
Meninggal Dunia Passing away	0	0
Pensiun Karir Career Retirement	7	17
Resign	0	0
<b>Total</b>	<b>39</b>	<b>45</b>

### PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI [404-1, 404-2]

LPEI menegaskan bahwa setiap pegawai berhak untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya, baik dibidang *soft skill* maupun *technical skill* dalam rangka memastikan diperolehnya sumber daya manusia yang unggul dan mumpuni di bidangnya.

### EMPLOYEE TRAINING AND DEVELOPMENT [404-1, 404-2]

Indonesia Eximbank emphasizes that every employee has the right to receive education and training to improve and develop their competences, in soft skills and technical skills to ensure the availability of excellent and qualified human resources in their fields.

## MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

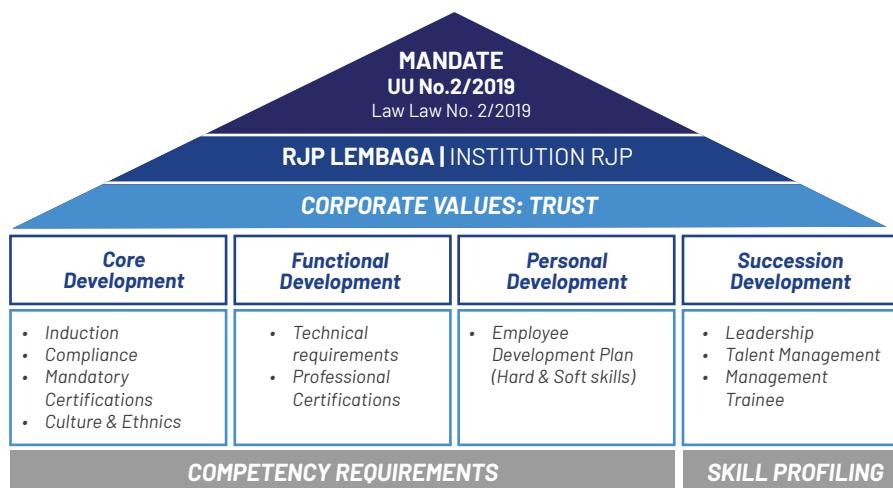
Managing and Developing Human Resources Competency

Program-program yang dilaksanakan fokus dalam membangun kesadaran akan manajemen risiko dan tata kelola yang baik, penguatan pemahaman terhadap bisnis dan proses bisnis Lembaga, serta peningkatan kompetensi baik teknis maupun non-teknis yang sesuai dengan kebutuhan Lembaga. Kegiatan pelatihan dan pengembangan selama tahun 2021 dilakukan dengan cara *in-class* (baik *online* maupun *offline*), belajar mandiri (*self-paced learning/e-learning*), ataupun bimbingan (*coaching/mentoring*).

Program Pelatihan dan Pengembangan Pegawai LPEI dilaksanakan berlandaskan model sebagai berikut:

The programs focus on building awareness of risk management and good governance, strengthening understanding of the Institution's business and business processes, as well as enhancing technical and non-technical competencies according to the needs of the Institution. Training and development activities during 2021 were carried out through in-class (both online and offline), self-paced learning/e-learning, or mentoring (coaching/mentoring).

The Indonesia Eximbank Employee Training and Development Program is implemented based on the following model:



Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 580 orang pegawai telah mengikuti kegiatan pelatihan. Dengan demikian, di luar dari pegawai yang *on-board* pada akhir tahun 2021, dapat dikatakan seluruh pegawai telah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan. *Training mandays* pada tahun 2021 adalah 4,28, yang artinya rata-rata waktu yang dihabiskan satu orang pegawai untuk mengikuti kegiatan pelatihan adalah selama 4,28 hari.

Rata-rata mandays pelatihan per pegawai adalah sebagai berikut. [404-1]

In 2021, 580 employees participated in training activities. As such, apart from employees who are on-board at the end of 2021, it can be said that all employees have had the opportunity to attend training. Training man-days in 2021 were 4.28, which means that the average time spent by one employee to participate in training activities was 4.28 days.

The average training man-days per employee is as follows. [404-1]

Keterangan	2020	2021
Rata-rata Mandays Pelatihan per Tahun per Pegawai Average Training Mandays per Year per Employee	8,40	4,28

## MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Managing and Developing Human Resources Competency

Selama tahun 2021, kegiatan pengembangan yang diberikan kepada pegawai dapat berupa *mandatory*, *technical*, maupun *soft skill training*.

- Pelatihan yang bersifat *mandatory* mencakup program yang memberikan dampak strategis dalam keberhasilan bisnis Lembaga, program/sertifikasi yang diprasyaratkan oleh regulator, dan pelatihan kemampuan teknis yang wajib diperlukan oleh jabatan/kelompok jabatan tertentu.
- Pelatihan yang bersifat *technical* mencakup pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi teknis yang diperlukan di suatu jabatan/ kelompok jabatan tertentu, termasuk diantaranya sertifikasi profesi.
- Selain pembekalan kemampuan teknis, pegawai juga dibekali dengan pelatihan *soft skill* yang bertujuan untuk mengembangkan kapabilitas dan tingkah laku personal Pegawai agar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Organisasi berdasarkan penilaian kinerja dan kebutuhan pegawai.

Adapun realisasi kegiatan pelatihan dan pengembangan pegawai selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

During 2021, development activities provided to employees could be in the form of mandatory, technical, and soft skill training.

- Mandatory training included programs with strategic impact on the success of the Institution's business, programs/certifications required by regulators, and technical skills training that must be required by certain positions/groups of positions.
- Technical training included training aimed at developing the technical competencies required in a particular position/group of positions, including professional certification.
- In addition to providing technical skills, employees were also provided with soft skills training aimed at developing the capabilities and personal behaviour of employees to match those required by the organization based on performance appraisals and employee needs.

The realization of employee training and development activities during 2021 was as follows:

Pilar Pillar	Program	Frekuensi Frequency	Jumlah Peserta Participants
Mandatory	Induction Program (New Hire Orientation)	4	77
	Kepatuhan Compliance	2	1.054
	Corporate Culture	4	77
	<b>Certification</b>		
	Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification	28	177
	Credit Skill	1	203
	SPPUR	2	8
	Treasury	1	2
	Sertifikasi SDM BNSP BNSP HR Certification	8	14
	<b>Technical Mandatory</b>	18	286
Technical	<b>Professional Certification</b>	21	48
	Program Development DP II	19	809
	Employee Development Plan	102	2.647
Soft	Leadership	7	42
	Employee Development Plan	19	227

## MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Managing and Developing Human Resources Competency

### A. Induction Program (New Hire Orientation)

Selama tahun 2021, program orientasi pegawai baru telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali. Adapun modul yang diberikan dalam kegiatan orientasi adalah sebagai berikut:

1. Profil Umum LPEI
2. Pilar Bisnis LPEI
3. Indeks Kinerja Utama (IKU) Lembaga
4. Performance Management System
5. Penjelasan Fungsi Kepatuhan dan APU-PPT

### B. Manajemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan

Untuk mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, pegawai diberikan pembekalan pengetahuan terkait Kepatuhan dan Manajemen Risiko melalui program penyegaran Budaya Lembaga dan Kode Etik, program peningkatan kesadaran risiko (*risk awareness*), serta pelaksanaan Sertifikasi Manajemen Risiko.

Selama tahun 2021 pelaksanaan Kelas Persiapan dan Ujian serta Program Penyegaran (*refreshment*) Sertifikasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

### A. Induction Program (New Hire Orientation)

During 2021, the new employee orientation program has been conducted 4 (four) times. The modules given in the orientation activities were as follows:

General Profile of Indonesia Eximbank

1. General Profile of Indonesia Eximbank
2. Business Pillar of Indonesia Eximbank
3. Institutional Key Performance Index (KPI)
4. Performance Management System
5. Explanation of the Compliance Function and AML-CTF

### B. To support the implementation of Good Corporate Governance, employees are provided with knowledge related to Compliance and Risk Management through a refresher program for Institutional Culture and Code of Ethics, a risk awareness program, and the implementation of Risk Management Certification.

During 2021 the implementation of Preparatory Classes and Examinations as well as the Risk Management Certification Refreshment Program were as follows:

	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	Total
Sertifikasi dan Ujian Certification and Exam	33	41	27	19	-	120
Program Penyegaran Refresher Program	4	5	10	9	4	32

### C. Sertifikasi Profesional

Tahun 2021, beberapa pegawai diikutsertakan dalam sertifikasi profesi guna meningkatkan daya saing pegawai. Adapun sertifikasi profesi yang sudah dilaksanakan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

### C. Professional Certification

In 2021, employees were included in professional certification to increase employee competitiveness. The professional certifications implemented in 2021 were as follows:

Program	Frekuensi Frequency	Jumlah Peserta Total Participants
Organization Development Practitioner Program	1	1
Certified Strategy Execution Professional (CESP)	1	1
Kelas Persiapan dan Ujian Sertifikasi Kepatuhan Level 1 Level 1 Compliance Certification Exam and Preparation Class	1	3
Kelas Persiapan dan Ujian CGI CGI Prep Classes and Exams	1	3

## MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Managing and Developing Human Resources Competency

<b>Program</b>	<b>Frekuensi</b> Frequency	<b>Jumlah Peserta</b> Total Participants
<i>Certified Human Resources Program Executive 4.0</i>	1	1
<i>Fraud Auditing 1 &amp; 2</i>	4	9
<i>Sertifikasi IT (ITIL, CISM, DLL)</i> <i>IT Certification (ITIL, CISM, ETC)</i>	6	12
<i>Certified Professional Talent Management</i>	1	1
<i>CITF</i>	1	11
<i>Pendidikan Khusus Profesi Advokat 2021(PKPA)</i> <i>Advocate Profession Special Education 2021(PKPA)</i>	1	3
<i>QIA Tingkat Manajerial &amp; QIA Tingkat Lanjutan</i> <i>Managerial Level QIA &amp; Advanced QIA</i>	3	3

- D. Peningkatan Kompetensi Dalam Rangka Pertumbuhan Bisnis
1. Sertifikasi Credit Skill
 

Program Sertifikasi Credit Skill merupakan program berkelanjutan dari tahun 2020. Dalam Sertifikasi Credit Skill terdapat 4 (empat) level yang harus diselesaikan peserta, yaitu Business Lending Fundamental (Level 1), Financial Accounting for Lenders (Level 2), Commercial Loans to Business/Small Business (Level 3) dan Minimizing Problem Loans (Level 4).

Realisasi pelaksanaan Credit Skill Training pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- D. Competency Improvement in the Context of Business Growth

1. Credit Skill Certification
 

The Credit Skill Certification Program is an ongoing program from 2020. There are 4(four) levels that must be completed by participants: Business Lending Fundamentals (Level 1), Financial Accounting for Lenders (Level 2), Commercial Loans to Business/Small Business (Level 3) and Minimizing Problem Loans (Level 4).

The realization of the Credit Skill Training implementation in 2021 is as follows:

<b>Level</b>	<b>Modul</b>	<b>Peserta</b> Participants	<b>Lulus</b> Passed	<b>Persentase (%)</b>
1	<i>Business Lending Fundamental</i>	203	203	100%
2	<i>Financial Accounting for Lenders</i>	203	202	99%
3	<i>Commercial Loans to Business/Small Business</i>	203	202	99%
4	<i>Minimizing Problem Loans</i>	203	202	99%

1 orang Pegawai yang belum menyelesaikan Sertifikasi Credit Skill saat ini sedang menjalani Unpaid Leave yang terjadwal hingga September 2022. Pegawai tersebut dapat melanjutkan kembali pembelajarannya ketika kembali bertugas.

One employee who has not completed the Credit Skill Certification is currently undergoing Unpaid Leave which is scheduled until September 2022. The employee can resume his studies when he returns to duty.

2. Program Development DP II
 

Program Development pada Direktorat DP II ditujukan untuk meningkatkan produktivitas

2. DP II Development Program
 

The Development Program at the DP II Directorate is aimed at increasing the

## MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Managing and Developing Human Resources Competency

Team Leader (TL) dan Relationship Manager (RM) melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan *salesmanship*. Kegiatan pengembangan untuk Direktorat DP II yang telah dilakukan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

productivity of Team Leader (TL) and Relationship Manager (RM) through increasing salesmanship knowledge and skills. The development activities for the DP II Directorate during 2021 were as follows:

Pilar Pillar	Program	Topik Topic
Core	Mandatory	Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification
		<i>Credit Skill</i>
	Product	Pembiayaan Financing
		Penjaminan Guarantee
		Asuransi Insurance
		Jasa Konsultasi Consulting Services
		<i>Trade Finance</i>
	Operasional Operational	Manual Operasional Pembiayaan dan PTO Pembiayaan Financing Operational Manual and Financing PTO
		<i>Credit Review</i>
		Legal
		<i>Credit Operation &amp; Supervision</i>
		Proses Operasional Operational Process
Business Knowledge	Kepatuhan Compliance	Audit
		Standar Kepatuhan Compliance Standard
		<i>Good Corporate Governance</i>
		AML: KYC/CDD
		Kode Etik Code of Conducts
	Technical Skill	<i>Writing Effective Credit Proposal</i>
		<i>Sales Management</i>
	Selling Skill	<i>Sales Coaching: Team Performance &amp; Monitoring</i>
		<i>Effective Communication</i>
		<i>Impactful Presentation</i>
Sales Advisory	Coaching	<i>Sales Coaching/Mentoring Session</i>

## MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Managing and Developing Human Resources Competency

### E. Program Pengembangan Manajemen Talenta dan Suksesi

#### 1. Manajemen Talenta

Pada tahun 2021, telah dilakukan *talent mapping* yang dikelompokkan berdasarkan aspek Kinerja dan Kompetensi.

- Kinerja dinilai berdasarkan hasil Penilaian Kinerja dimana nilai yang digunakan adalah rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir. Namun jika Pegawai belum memiliki nilai selama 3 tahun, maka yang digunakan adalah nilai rata-rata penilaian yang dimiliki. Nilai rata-rata ini kemudian dibagi menjadi 3 kategori, yaitu *High*, *Medium*, dan *Low*.
- Kompetensi adalah perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu. Adapun kompetensi yang perlu dimiliki oleh pegawai LPEI adalah sebagai berikut:

### E. Talent and Succession Management Development Program

#### 1. Talent Management

In 2021, talent mapping has been carried out which is grouped based on aspects of Performance and Competence.

- Performance is assessed based on the results of the Performance Assessment where the value used is the average of the last 3 (three) years. However, if the employee has not had a score for 3 years, then the average value of the assessment that is owned is used. This average value is then divided into 3 categories, namely *High*, *Medium*, and *Low*.
- Competence is a combination of knowledge, skills, and behaviours that must be attained by the personnel who occupies a certain position. The required competencies are as follows:

Kompetensi Inti <b>Core Competence</b>	Kompetensi Fungsional <b>Functional Competence</b>	Kompetensi Teknis <b>Technical Competence</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Organizational Commitment</i></li> <li>• <i>Integrity</i></li> <li>• <i>Customer Oriented</i></li> <li>• <i>Professionalism</i></li> <li>• <i>Teamwork</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Analytical &amp; Conceptual Thinking</i></li> <li>• <i>Achievement Orientation</i></li> <li>• <i>Relationship Building</i></li> <li>• <i>Information Seeking</i></li> <li>• <i>Organizational Awareness</i></li> <li>• <i>Developing Others</i></li> <li>• <i>Detail Orientation</i></li> <li>• <i>Communication Skill</i></li> <li>• <i>Conflict Management</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Strategic Management</i></li> <li>• <i>Marketing &amp; Customer Service</i></li> <li>• <i>Financing, Accounting &amp; Investment</i></li> <li>• <i>Insurance &amp; Actuary</i></li> <li>• <i>Legal, Compliance, Audit &amp; Risk Management</i></li> <li>• <i>Human Capital</i></li> <li>• <i>Business Support</i></li> <li>• <i>Information Technology</i></li> </ul>

Untuk aspek Kompetensi dinilai berdasarkan hasil assessment terakhir yang dimiliki oleh pegawai. Hasil assessment ini dibagi menjadi 3, yaitu *High*, *Medium*, dan *Low*.

Hasil *talent mapping* yang dilakukan pada tahun 2021, pegawai yang termasuk kedalam kategori *Talent* adalah sebanyak 81 orang, baik dari kelompok jabatan Kepala Divisi, Kepala Departemen, Eksekutif dan Pelaksana.

Pengembangan yang telah diberikan kepada *Talent* selama tahun 2021 diantaranya adalah *Leadership*, *Communication Skill*, *Presentation*

The Competency aspect is assessed based on the results of the latest assessment held by the employee. The results of this assessment are divided into 3, namely *High*, *Medium*, and *Low*.

The results of the talent mapping carried out in 2021 were 81 employees included in the *Talent* category, from the group of Division Head positions, Department Heads, Executives and Implementers.

Developments that have been given to *Talent* during 2021 include *Leadership*, *Communication Skills*, *Presentation Skills*,

## MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

### Managing and Developing Human Resources Competency

Skill, serta penguatan keterampilan teknis. Selain kepada Talent, program pengembangan juga diberikan kepada pegawai yang masuk dalam kategori *Under Performer*, dalam bentuk *coaching* dan/atau *mentoring*.

#### 2. Management Trainee: Leader For Tomorrow (LFT)

- Jumlah peserta *Leader for Tomorrow* (LFT) Angkatan I adalah 15 orang. Program pendidikan untuk LFT I dimulai pada bulan Januari 2021. Program *in-class* dilakukan secara *online* dari bulan Januari hingga Maret 2021. Setelah itu dilanjutkan dengan *On the Job Training* (OJT) pada beberapa unit kerja sampai dengan akhir Januari 2022.
- Jumlah peserta *Leader for Tomorrow* (LFT) Angkatan II adalah 20 orang. Program pendidikan untuk LFT I dimulai pada bulan Juli 2021. Program *in-class* dilakukan secara *online* dari bulan Juli hingga September 2021. Setelah itu dilanjutkan dengan *On the Job Training* (OJT) pada beberapa unit kerja yang dijadwalkan sampai dengan Juli 2022.

#### F. Pelatihan Keuangan Berkelanjutan [FS4]

Selain pengembangan kompetensi tersebut diatas, LPEI juga merealisasikan pengembangan kompetensi jajaran pegawai untuk mendukung implementasi program aksi keuangan berkelanjutan. Beberapa program yang telah direalisasikan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM pada aspek keuangan berkelanjutan, adalah:

- Pelaksanaan edukasi internal bekerjasama dengan berbagai pihak eksternal;
- Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM terkait penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan;
- Pelatihan penyusunan laporan keberlanjutan kepada pegawai.
- Pelatihan dan sosialisasi ketentuan terkait implementasi ESMS.
- Workshop dan Sosialisasi serta pelatihan ESMS untuk lingkup kelembagaan (berkelanjutan)

as well as strengthening technical skills. In addition to Talent, development programs are also provided to employees who are in the Under Performer category, in the form of coaching and/or mentoring.

#### 2. Management Trainee: Leader For Tomorrow (LFT)

- The number of participants for Leader for Tomorrow (LFT) Batch I is 15 people. The education program for LFT I begins in January 2021. The in-class program was conducted online from January to March 2021. After that, continued with On-the-Job Training (OJT) in several work units until the end of January 2022.
- The number of participants for Leader for Tomorrow (LFT) Batch II was 20 people. The education program for LFT I begins in July 2021. The in-class program was conducted online from July to September 2021. After that, followed by On the Job Training (OJT) in several work units which is scheduled until July 2022.

#### F. Sustainable Finance Training [FS4]

In addition to the competence development above, Indonesia Eximbank also realizes competence development for employees to support the implementation of the sustainable finance action program. Several programs realized to improve the HR competence in sustainable finance aspect, are:

- Implementation of internal education in collaboration with various external parties;
- Capacity building and HR competencies related to the implementation of Sustainable Finance Actions;
- Training on the preparation of sustainability reports for employees.
- Training and dissemination of provisions related to ESMS implementation.
- Workshop and socialization and ESMS training for institutional scope (ongoing)

## MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Managing and Developing Human Resources Competency

### Biaya Program Pelatihan dan Pengembangan SDM

Anggaran tahun 2021 yang disediakan untuk kegiatan pelatihan dan pengembangan adalah sebesar Rp18,00 miliar. Hingga akhir tahun 2021, penyerapan anggaran adalah 91% atau senilai Rp16,49 miliar. Anggaran tahun 2021 tidak terserap habis dikarenakan kegiatan pelatihan mayoritas masih dilakukan secara *online* dimana biaya pelaksanaan tidak sebesar kegiatan *training offline*, banyak menggunakan SME (Subject Matter Expert) internal untuk membawakan materi-materi tertentu, serta adanya arahan efisiensi.

## PENILAIAN KINERJA DAN PENGEMBANGAN KARIR

### Penilaian Kinerja

LPEI menjalankan penilaian kinerja pegawai menggunakan sistem *Balance Score Card*. Dalam hal ini, Rencana Kerja Individu (RKI) yang merupakan hasil cascading dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Unit Kerja dan IKU Lembaga. Penilaian kinerja pegawai dilakukan dengan mengedepankan prinsip terukur, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Aspek penilaian kinerja pegawai meliputi pencapaian sasaran individu, perilaku kerja dan kompetensi, serta faktor penambah dan faktor pengurang.

Penilaian atas pencapaian sasaran individu pegawai dilakukan dengan mengukur tingkat realisasi pencapaian sasaran yang tercantum dalam RKI yang telah disahkan. Penilaian perilaku kerja dan kompetensi pegawai dilakukan terhadap Budaya Kerja beserta level kompetensinya.

Dengan memperhatikan faktor penilaian kinerja dan mekanisme penilaian kinerja yang dilaksanakan secara berjenjang, setiap pegawai akan memperoleh predikat kinerja dengan pencapaian kinerja Istimewa, Memuaskan, Baik, Cukup, dan Kurang. Selanjutnya, hasil penilaian kinerja digunakan sebagai acuan untuk menetapkan jenjang karir dan pemberian paket remunerasi.

Selama tahun 2021, seluruh pegawai (100%) telah dinilai kinerjanya dengan dukungan implementasi *Human Resources Information System*. [404-3]

### Cost of HR Training and Development Program

The 2021 budget provided for training and development activities was Rp18.00 billion. Until the end of 2021, the absorption of the budget was 91% or Rp16.49 billion. The 2021 budget was not completely absorbed because the majority of training activities were still carried out online where the implementation costs were not as large as offline training activities, many use internal SME (Subject Matter Expert) to bring certain materials, and there were efficiency instructions.

## PERFORMANCE ASSESSMENT AND CAREER DEVELOPMENT

### Performance assessment

Indonesia Eximbank conducts employee performance assessment with the Balance Score Card system. To this end, the Individual Work Plan (RKI) which is the cascading result of the Main Performance Indicators (IKU) of the Work Unit and the Institutional KPI. Employee performance assessment is carried out by prioritizing measurable, objective and accountable principles. Aspects of employee performance assessment include the achievement of individual goals, work behaviour and competencies, as well as adding and subtracting factors.

The assessment of individual employee targets achievement is carried out by measuring the level of realization of the target's achievement stated in the approved RKI. Assessment of employee conduct and competence is carried out to the Work Culture and its level of competence.

By taking into account the performance assessment factors and mechanism which is carried out in stages, each employee will receive a performance predicate with the achievement of Exceptional, Satisfactory, Good, Adequate, and Poor performance. Furthermore, the performance assessment results are used as a reference to determine career paths and provide remuneration packages.

During 2021, all employees (100%) have taken the performance assessment with the support of Human Resources Information System. [404-3]

## MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Managing and Developing Human Resources Competency

### Pengembangan Jenjang Karir

LPEI memberi kesempatan yang sama bagi setiap pegawai untuk mengembangkan karir dalam bidang masing-masing berdasarkan kompetensi yang dimiliki melalui sistem *Talent Management* yang telah diimplementasikan di seluruh organisasi untuk posisi-posisi struktural, dimana para pimpinan unit kerja mengidentifikasi talenta dari tiap pegawai di unit kerja masing-masing. Dalam pengembangan karir pegawai, LPEI juga secara konsisten menerapkan kebijakan yang adil (*fair*), memberikan kesempatan yang sama bagi pegawai laki-laki maupun perempuan.

Pada dasarnya, pergerakan karir Pegawai LPEI memperhatikan beberapa hal berikut ini:

1. Berdasarkan kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan kinerja dan pencapaian sasaran LPEI.
2. Memperhatikan kinerja Pegawai.
3. Mempersyaratkan pemenuhan kualifikasi jabatan yang mencakup pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, Golongan Pegawai, dan pendidikan khusus (sertifikasi), termasuk keahlian khusus atau spesialisasi jabatan.
4. Mempersyaratkan pemenuhan kompetensi Pegawai, baik *soft competency* dan *technical competency* melalui proses *assessment* pegawai.
5. Memperhatikan masa jabatan Pegawai. Pegawai yang menduduki jabatan yang sama selama lebih dari empat tahun adalah Pegawai yang perlu diprioritaskan untuk memperoleh penyegaran dan pengembangan.
6. Merupakan penerapan manajemen talenta (*talent management*) melalui kebijakan rekrutmen internal untuk pengisian jabatan strategis dan struktural.
7. Merupakan penerapan manajemen perencanaan karir Pegawai.

Pergerakan karir Pegawai LPEI diantaranya ditentukan oleh hasil penilaian kinerja tersebut diatas, dapat berupa:

- a. Promosi, yaitu perubahan jabatan Pegawai dari Kelompok Jabatan yang lebih rendah ke Kelompok Jabatan yang lebih tinggi.
- b. Progresi, yaitu perubahan Golongan Pegawai (*Personal Grading*) dari Golongan Pegawai yang lebih rendah ke Golongan Pegawai yang lebih tinggi.
- c. Rotasi atau pengalihan tugas yaitu perubahan jabatan Pegawai dalam Kelompok Jabatan yang sama.

### Career Development

Indonesia Eximbank provides equal opportunities for every employee to develop a career in their respective fields based on their competencies through the Talent Management system that has been implemented throughout the organization for structural positions, where the heads of work units identify the talents of each employee in their respective work units. In employee career development, Indonesia Eximbank also consistently applies fair policies, providing equal opportunities for male and female employees.

Basically, the career movement of Indonesia Eximbank Employees considers the following:

1. Based on the needs of the organization to improve performance and achieve targets.
2. Take into account the employee performance.
3. Requires the fulfillment of position qualifications which include work experience, educational background, employee class, and special education (certification), including special skills or position specialization.
4. Require the fulfillment of employee competencies, both soft competency and technical competency through the employee assessment process.
5. Take into account the term of office of employee. Employees who hold the same position for more than four years are prioritized for refreshment and development.
6. Implementation of talent management through internal recruitment policies to fill strategic and structural positions.
7. Implementation of employee career planning management.

The career movements of Indonesia Eximbank employees are determined by the performance assessment results above, which are through:

- a. Promotion, a change in the position of an employee from a lower position group to a higher position group.
- b. Progression, a change in the Employee Class (*Personal Grading*) from a lower Employee Class to a higher Employee Class.
- c. Rotation or assignment transfer, a change in the position of an employee in the same position group.

## MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Managing and Developing Human Resources Competency

- d. Demosi, yaitu perubahan jabatan Pegawai dari Kelompok Jabatan ke Kelompok Jabatan yang lebih rendah atau penempatan Pegawai menjadi Staf Khusus Tanpa Penugasan.
- e. Regresi yaitu perubahan Golongan Pegawai dari Golongan Pegawai yang lebih tinggi ke Golongan Pegawai yang lebih rendah.
- d. Demotion, a change in the position of an employee from a position group to a lower position group or the placement of an employee into a special staff without assignment.
- e. Regression, a change in the Employee Class from a higher Employee Class to a lower Employee Class.

## REMUNERASI DAN KESEJAHTERAAN [401-2]

LPEI memberikan remunerasi kepada para pegawai berdasarkan peran dan tanggung jawab, masa kerja dan penilaian kinerja berupa gaji pokok, tunjangan, dan fasilitas lainnya. Adapun prinsip dasar pemberian remunerasi pegawai di LPEI adalah:

1. Merit Based and Performance Based System yaitu berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, Golongan Pegawai (*Personal Grading*), Kelompok Jabatan (*Job Group*), Golongan Jabatan (*Job Grading*), Masa Kerja Pegawai dan/atau masa memangku Jabatan secara adil (*internally fair*), serta wajar tanpa membedakan latar belakang politik, agama, ras, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, usia dan kondisi kesehatan.
2. Kompetitif (*externally competitive*), yaitu mengacu pada industri/institusi yang dijadikan acuan/*benchmark*, dan mengarahkan posisi total remunerasi Pegawai pada posisi *Upper Percentile* (P75) nilai remunerasi pasar (industri/institusi *benchmark*).
3. Terstruktur dan sistematis.
4. Tidak terjadi pengurangan Gaji Pokok Pegawai kecuali dalam hal:
  - a. Pengenaan sanksi indisipliner.
  - b. Kondisi keuangan LPEI yang menuntut penetapan kebijakan remunerasi yang berbeda untuk tujuan kelangsungan operasional LPEI.
5. Memperhatikan kemampuan keuangan LPEI.

Struktur remunerasi pegawai LPEI dikaji ulang setiap tahun untuk disesuaikan dengan situasi di pasar sehingga dapat terus bersaing dan memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku. Struktur remunerasi LPEI juga senantiasa mematuhi peraturan terkait Upah

## REMUNERATION AND WELFARE [401-2]

Indonesia Eximbank provides remuneration to employees based on roles and responsibilities, tenure and performance assessment such as basic salary, allowances, and other facilities. The basic principles of remuneration for employees are as follows:

1. Merit Based and Performance Based System, based on qualifications, competence, performance, Employee Class (*Personal Grading*), Position Group (*Job Group*), Position Group (*Job Grading*), Employee Service Period and/or tenure fairly (internally) fair, and reasonable regardless of political background, religion, race, origin, gender, marital status, age and health condition.
2. Competitive (*externally competitive*), which refers to the industry/institution that is used as a reference/benchmark, and directs the position of total employee remuneration at the Upper Percentile (P75) position of market remuneration value (industry/institutional benchmark).
3. Structured and systematic.
4. No reduction in the Employee's Basic Salary except in the case of:
  - a. Imposition of disciplinary sanctions.
  - b. Indonesia Eximbank's financial condition which requires the establishment of a different remuneration policy for the purpose of operational continuity.
5. Taking into account the Indonesia Eximbank financial capacity.

The remuneration structure of Indonesia Eximbank's employees is reviewed annually to suit the situation in the market in order to continue to compete and comply with applicable regulations. Indonesia Eximbank's remuneration structure complies with regulations of the

## MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Managing and Developing Human Resources Competency

Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Regional (UMR).

LPEI juga menerapkan kesamaan dalam menetapkan struktur remunerasi, tanpa membedakan gender, sehingga tidak ada perbedaan signifikan pada gaji pokok antara pegawai laki-laki dengan pegawai perempuan pada level jabatan yang sama. [405-2]

Provincial Minimum Wage (UMP) and Regional Minimum Wage (UMR).

Indonesia Eximbank also applies equality in determining the remuneration structure regardless of gender, hence no significant difference in basic salary between male employees and female employees at the same level of position. [405-2]

**Tabel Perbandingan Standar Upah Pegawai Terendah Terhadap UMR [202-1]**

Comparison of Lowest Employee Wage Standards Against UMR

Area Operasional Operational Area	Provinsi/Daerah Province/Region	Upah Minimum Provinsi/ Regional Provincial/Regional Minimum Wage	Imbal Jasa Karyawan Tingkat Terendah Lowest Level of Employee Fee	Perbandingan Ratio
Jakarta	DKI Jakarta North Sumatra	4.453.935	9.850.000	2,21
Medan	Sumatera Utara East Java	2.552.609	13.483.083	5,28
Surabaya	Jawa Timur	1.891.567	12.904.713	6,82
Makassar	Sulawesi Selatan South Sulawesi	3.165.876	12.267.194	3,90
Surakarta	Jawa Tengah Central Java	1.813.011	12.992.062	7,17
Balikpapan	Kalimantan Timur	3.014.497	13.228.576	4,39
Batam	Kepulauan Riau	3.144.466	12.804.140	4,07
Denpasar	Bali	2.516.971	12.374.986	4,92

Berikut adalah komponen remunerasi dan fasilitas yang LPEI sediakan:

1. Kompensasi Tetap;
2. Penghasilan lainnya;
3. Manfaat; dan
4. Fasilitas.

The following are the remuneration components and facilities provided by Indonesia Eximbank:

1. Fixed Compensation;
2. Other income;
3. Benefits; and
4. Facilities.

Secara umum LPEI telah menerapkan kebijakan *Performance Rewards* dalam memberikan remunerasi pegawai. Namun demikian LPEI juga menyediakan skema remunerasi dan *benefit* lain yang berbentuk *variable pay* untuk mendukung pencapaian bisnis bagi pegawai tetap dan pegawai kontrak sebagaimana diilustrasikan dalam tabel berikut: [401-2]

In general, Indonesia Eximbank has implemented a *Performance Rewards* policy in providing employee remuneration. However, Indonesia Eximbank also provides remuneration schemes and other benefits in the form of variable pay to support business achievements for permanent employees and contract employees as illustrated in the following table: [401-2]

**MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**  
Managing and Developing Human Resources Competency

**Paket Remunerasi LPEI [401-2]**

LPEI Remuneration Package

<b>Remunerasi dan Manfaat bagi Karyawan</b> Remuneration and Benefits for Employees	<b>Karyawan Tetap</b> Permanent employees	<b>Karyawan Kontrak</b> Contract employees
Upah & Gaji Wages & Salaries	✓	✓
Tunjangan Frontline Frontline Allowance	✓	✓
Tunjangan Cuti Leave Allowance	✓	✓
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance	✓	✓
Penghargaan Loyalitas Loyalty Reward	✓	✗
Upah Lembur & Makan Lembur Overtime Wages and Overtime Meals	✓	✓
Program Insentif Incentive Program	✓	✓
Tunjangan Haji dan Umrah Hajj and Umrah Allowances	✓	✓
Tunjangan daerah & penugasan Regional allowances & assignments	✓	✓
Santunan Pernikahan / Kelahiran / Kematian Marriage / Birth / Death Compensation	✓	✓
Bantuan Biaya Pendidikan Anak Children's Education Cost Assistance	✓	✓
Kecelakaan Kerja Work Accident	✓	✓
Asuransi Kematian di Tempat Kerja & Luar Tempat Kerja Death Insurance at Work & Outside the Workplace	✓	✓
Asuransi Kesehatan Bagi Karyawan Health Insurance for Employees	✓	✓
Asuransi Kesehatan bagi Pasangan Karyawan Health Insurance for Employees' Spouses	✓	✓
Asuransi Kesehatan bagi Anak Karyawan Health Insurance for Employees' Children	✓	✓
Hak Cuti Leave Entitlements	✓	✓
Cuti Melahirkan Maternity Leave	✓	✓
Cuti Haid Menstruation Leave	✓	✓
Cuti karena Keguguran untuk Wanita Miscarriage Leave for Women	✓	✓
Cuti untuk Pria karena Kelahiran Anak Paternal Leave	✓	✓

## MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Managing and Developing Human Resources Competency

Remunerasi dan Manfaat bagi Karyawan Remuneration and Benefits for Employees	Karyawan Tetap Permanent employees	Karyawan Kontrak Contract employees
Cuti Ibadah Worship Leave	✓	✓
izin Meninggalkan Pekerjaan Tanpa Gaji Unpaid Leave	✓	X
Program Pembiayaan Karyawan untuk Rumah dan atau Kendaraan Employee Financing Program for Housing and or Vehicles	✓	X
Dana Pensiun Pension fund	✓	X
Pesangon Severance pay	✓	X

Sebagai wujud penerapan kebijakan *Performance Reward*, pada tahun 2021 LPEI melakukan penyesuaian Gaji Pokok pegawai dengan rata-rata kenaikan sebesar 3%. Penyesuaian Gaji Pokok diberikan kepada 501 pegawai yang *eligible*, yaitu yang telah memiliki *performance appraisal* (PA) tahun 2020. Penyesuaian dilakukan pada bulan Maret 2021 dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021.

Formulasi kenaikan Gaji Pokok tersebut dilakukan berdasarkan matriks antara nilai PA tahun 2020 dan posisi *percentile* Gaji Pokok pegawai secara internal. Perincian pegawai yang memperoleh kenaikan Gaji Pokok tahun 2021 yaitu:

- 242 pegawai memperoleh kenaikan Gaji Pokok di atas rata-rata.
- 103 pegawai memperoleh kenaikan Gaji Pokok sesuai rata-rata.
- 142 pegawai memperoleh kenaikan Gaji Pokok di bawah rata-rata.
- 14 pegawai tidak memperoleh kenaikan Gaji Pokok karena hasil PA di kategori 'Kurang' atau karena posisi *percentile* Gaji Pokok secara internal sudah berada di posisi P-100 (maksimal).

Pada tahun 2021 LPEI membagikan Jasa Produksi Tahun 2020, yang diputuskan oleh Komite Personalia melalui Risalah Rapat *Board of Management* LPEI Nomor MR.0021/CEO/08/2021 pada tanggal 9 Agustus 2021. LPEI juga memberikan *rewards* dalam Program Peningkatan Produktivitas Direktorat II kepada RM yang *outstanding* di sektor UKM, yang diberikan pada Semester I dan Kuartal 3 – 2021.

In implementing the Performance Rewards policy, in 2021 Indonesia Eximbank will adjust the Basic Salary of employees with an average increase of 3%. Adjustment of Basic Salary is given to 501 eligible employees, namely those who have had a performance appraisal (PA) in 2020. The adjustment was made in March 2021 and is effective from 1 January 2021.

The formulation of the increase in Basic Salary is based on a matrix between the 2020 PA value and the position of the employee's Basic Salary percentile internally. The details of employees who receive an increase in Basic Salary in 2021 are:

- 242 employees received an increase in Basic Salary above the average.
- 103 employees received an increase in Basic Salary according to the average.
- 142 employees received an increase in Basic Salary below the average.
- 14 employees did not get an increase in Basic Salary because the PA results were in the 'Less' category or because the internal Basic Salary percentile position was already in the P-100 position (maximum).

In 2021, Indonesia Eximbank distributed the 2020 Production Services, which is decided by the Personnel Committee through the Minutes of the Board of Management Meeting No. MR.0021/CEO/08/2021 on 9 August 2021. Indonesia Eximbank also provides rewards in the Directorate II Productivity Improvement Program to RM outstanding in the SME sector, which was awarded in Semester I and Quarter 3 – 2021.

## MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

### Managing and Developing Human Resources Competency

#### Cuti Melahirkan [401-3]

LPEI memberikan hak cuti melahirkan bagi pegawai perempuan selama 3 (tiga) bulan dan memberikan keleluasaan kepada mereka untuk kembali bekerja dan menempati posisi kerja sebelumnya. Cuti yang diambil pegawai tersebut tidak memengaruhi posisi dan remunerasinya setelah kembali bekerja.

Selama tahun 2021, pegawai perempuan yang mengajukan cuti melahirkan ada 22 orang dan seluruhnya sudah dapat kembali bekerja, setelah menyelesaikan periode cutinya. Artinya 100% pegawai bekerja kembali setelah pelaksanaan cuti.

LPEI belum menerapkan cuti parental atau cuti ayah untuk pegawai laki-laki.

#### PENSIUN DAN PERSIAPAN PENSIUN

LPEI menyelenggarakan pelatihan berwirausaha serta Program Masa Persiapan Pensiun sebagai bentuk apresiasi dan kepedulian terhadap pegawai yang akan memasuki masa pensiun. Kegiatan pelatihan berwirausaha tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesiapan mental pegawai dalam menghadapi perubahan yang terjadi pada saat pensiun serta memberikan motivasi untuk tetap optimis, memiliki paradigma yang positif sebagai pensiunan serta dapat mengelola waktu yang tersedia untuk tetap hidup dengan semangat.

Program Masa Persiapan merupakan program yang tidak wajibkan pegawai untuk berada di lingkungan kerja namun tetap mendapatkan upah dan benefit sebagai pegawai, yang dapat diambil oleh pegawai yang menginginkannya. Program tersebut diberikan untuk jangka waktu minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 6 (enam) bulan sebelum usia pensiun.

Selama tahun 2021, tidak terdapat pegawai yang mengikuti program persiapan masa pensiun. Adapun program pelatihan telah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut. [201-3, 404-2]

#### Maternity Leave [401-3]

Indonesia Eximbank provides maternity leave rights for female employees for 3 (three) months and gives the flexibility to return to work and occupy their previous work positions. The leave taken by the employee does not affect the position and remuneration after returning to work.

During 2021, there were 22 female employees who applied for maternity leave and all of them were able to return to work, after completing their leave period. This means that 100% of employees return to work after the implementation of the leave.

Indonesia Eximbank has not implemented parental leave for male employees.

#### RETIREMENT AND RETIREMENT PREPARATION

Indonesia Eximbank organizes entrepreneurship training as well as the Retirement Preparation Period Program as a form of appreciation and concern for employees who are about to retire. The entrepreneurship training activities are aimed at increasing the mental readiness of employees to face the changes that occur at the time of retirement as well as providing motivation to remain optimistic, have a positive paradigm as retirees and be able to manage the available time to stay alive with enthusiasm.

The Preparation Period Program is a program that does not require employees to be in the work environment but still gets wages and benefits as employees, which can be taken by employees who want it. The program is provided for a minimum period of 3(three) months and a maximum of 6(six) months before retirement age.

During 2021, there were no employees who participated in the retirement preparation program. The training programs that have been implemented in the last few years are as follows. [201-3, 404-2]

## MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Managing and Developing Human Resources Competency

### Realisasi Pelatihan Persiapan Pensiun

Realization of Retirement Preparation Training

No	Nama Peserta Participant Name	Judul Program Program Title	Penyelengara Organizer	Waktu Time	Tahun Year
1	Achdiat Harry Subagyo	Masa Persiapan Pensiun (MPP): Bahagia dan Sejahtera di Masa Pensiun Retirement Preparation Period (MPP): Happy and Prosperous in Retirement	QM Financial	24-Mar	2014
2	Alan Yazid	Masa Persiapan Pensiun (MPP): Bahagia dan Sejahtera di Masa Pensiun Retirement Preparation Period (MPP): Happy and Prosperous in Retirement	QM Financial	24-Mar	2014
3	Anton Happy Nugroho	Masa Persiapan Pensiun (MPP): Bahagia dan Sejahtera di Masa Pensiun Retirement Preparation Period (MPP): Happy and Prosperous in Retirement	QM Financial	24-Mar	2014
4	Arif Setiawan	Masa Persiapan Pensiun (MPP): Bahagia dan Sejahtera di Masa Pensiun Retirement Preparation Period (MPP): Happy and Prosperous in Retirement	QM Financial	24-Mar	2014
5	Budy Hartono	Masa Persiapan Pensiun (MPP): Bahagia dan Sejahtera di Masa Pensiun Retirement Preparation Period (MPP): Happy and Prosperous in Retirement	QM Financial	24-Mar	2014
6	Dendy Wahyu Kusuma W.	Masa Persiapan Pensiun (MPP): Bahagia dan Sejahtera di Masa Pensiun Retirement Preparation Period (MPP): Happy and Prosperous in Retirement	QM Financial	24-Mar	2014
7	Dessy Suryanaputra	Masa Persiapan Pensiun (MPP): Bahagia dan Sejahtera di Masa Pensiun Retirement Preparation Period (MPP): Happy and Prosperous in Retirement	QM Financial	24-Mar	2014
8	Dilan Sawalius Batuparan	Masa Persiapan Pensiun (MPP): Bahagia dan Sejahtera di Masa Pensiun Retirement Preparation Period (MPP): Happy and Prosperous in Retirement	QM Financial	24-Mar	2014
9	Eddy Suswadi	Masa Persiapan Pensiun (MPP): Bahagia dan Sejahtera di Masa Pensiun Retirement Preparation Period (MPP): Happy and Prosperous in Retirement	QM Financial	24-Mar	2014
10	Fadilla Hoesin	Masa Persiapan Pensiun (MPP): Bahagia dan Sejahtera di Masa Pensiun Retirement Preparation Period (MPP): Happy and Prosperous in Retirement	QM Financial	24-Mar	2014
11	Frans Jembise	Masa Persiapan Pensiun (MPP): Bahagia dan Sejahtera di Masa Pensiun Retirement Preparation Period (MPP): Happy and Prosperous in Retirement	QM Financial	24-Mar	2014

**MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**  
Managing and Developing Human Resources Competency

No	Nama Peserta Participant Name	Judul Program Program Title	Penyelengara Organizer	Waktu Time	Tahun Year
12	Heryanto Eko Purnomo	Masa Persiapan Pensiu (MPP): Bahagia dan Sejahtera di Masa Pensiu Retirement Preparation Period (MPP): Happy and Prosperous in Retirement	QM Financial	24-Mar	2014
13	Maryani Saswidiyanti	Masa Persiapan Pensiu (MPP): Bahagia dan Sejahtera di Masa Pensiu Retirement Preparation Period (MPP): Happy and Prosperous in Retirement	QM Financial	24-Mar	2014
14	Meidy Lufty	Masa Persiapan Pensiu (MPP): Bahagia dan Sejahtera di Masa Pensiu Retirement Preparation Period (MPP): Happy and Prosperous in Retirement	QM Financial	24-Mar	2014
15	Priyo Basuki	Masa Persiapan Pensiu (MPP): Bahagia dan Sejahtera di Masa Pensiu Retirement Preparation Period (MPP): Happy and Prosperous in Retirement	QM Financial	24-Mar	2014
16	Sofyan	Masa Persiapan Pensiu (MPP): Bahagia dan Sejahtera di Masa Pensiu Retirement Preparation Period (MPP): Happy and Prosperous in Retirement	QM Financial	24-Mar	2014
17	Soni Agus Basarianto	Masa Persiapan Pensiu (MPP): Bahagia dan Sejahtera di Masa Pensiu Retirement Preparation Period (MPP): Happy and Prosperous in Retirement	QM Financial	24-Mar	2014
18	Sulis Heriwanto	Masa Persiapan Pensiu (MPP): Bahagia dan Sejahtera di Masa Pensiu Retirement Preparation Period (MPP): Happy and Prosperous in Retirement	QM Financial	24-Mar	2014
19	Sulistianto	Masa Persiapan Pensiu (MPP): Bahagia dan Sejahtera di Masa Pensiu Retirement Preparation Period (MPP): Happy and Prosperous in Retirement	QM Financial	24-Mar	2014
20	Susiyanti	Masa Persiapan Pensiu (MPP): Bahagia dan Sejahtera di Masa Pensiu Retirement Preparation Period (MPP): Happy and Prosperous in Retirement	QM Financial	24-Mar	2014
21	Taufiqur Rahman	Masa Persiapan Pensiu (MPP): Bahagia dan Sejahtera di Masa Pensiu Retirement Preparation Period (MPP): Happy and Prosperous in Retirement	QM Financial	24-Mar	2014
22	Zulfan	Masa Persiapan Pensiu (MPP): Bahagia dan Sejahtera di Masa Pensiu Retirement Preparation Period (MPP): Happy and Prosperous in Retirement	QM Financial	24-Mar	2014
23	Arief Tjahjono	Masa Persiapan Pensiu (MPP): Bahagia dan Sejahtera di Masa Pensiu Retirement Preparation Period (MPP): Happy and Prosperous in Retirement	Lutan Edukasi	25 -27 Okt 25-27 Oct	2017

## MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Managing and Developing Human Resources Competency

No	Nama Peserta Participant Name	Judul Program Program Title	Penyelengara Organizer	Waktu Time	Tahun Year
24	Dilan Sawalius Batuparan	Masa Persiapan Pensiun (MPP): Bahagia dan Sejahtera di Masa Pensiun Retirement Preparation Period (MPP): Happy and Prosperous in Retirement	Lutan Edukasi	25 -27 Okt 25-27 Oct	2017
25	Meidy Lufty	Masa Persiapan Pensiun (MPP): Bahagia dan Sejahtera di Masa Pensiun Retirement Preparation Period (MPP): Happy and Prosperous in Retirement	Fresh Consultant	25 - 28 Apr	2017
26	Soni Agus Basarianto	Masa Persiapan Pensiun (MPP): Bahagia dan Sejahtera di Masa Pensiun Retirement Preparation Period (MPP): Happy and Prosperous in Retirement	Fresh Consultant	25 - 28 Apr	2017
27	Achmad Fauzi	Masa Persiapan Pensiun (MPP): Bahagia dan Sejahtera di Masa Pensiun Retirement Preparation Period (MPP): Happy and Prosperous in Retirement	Fresh Consultant	22 - 25 Jul	2019
28	Zulfan	Masa Persiapan Pensiun (MPP): Bahagia dan Sejahtera di Masa Pensiun Retirement Preparation Period (MPP): Happy and Prosperous in Retirement	Lutan Edukasi	27 - 29 Nov	2019

Selain pelatihan menjelang pensiun, sebagai persiapan pensiun, LPEI juga mengikutsertakan pegawai dalam program pensiun yaitu program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan Program Jaminan Pensiun (JP) BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, setiap pegawai akan mendapat manfaat (dana) pensiun pada saat memasuki usia purna bakti yang dapat mereka gunakan sebagai modal berwirausaha maupun melakukan kegiatan produktif lainnya di masa pensiunnya.

Seluruh pegawai tetap didaftarkan program pensiun antara lain :

- Dana Pensiun yang dikelola DPLK
- BPJS Pensiun oleh BPJS Ketenagakerjaan

LPEI berkontribusi bagi pembayaran premi iuran program pensiun tersebut, dengan besaran sebagai berikut. [201-3]

In addition to training prior to retirement as a preparation, Indonesia Eximbank also enrolls employees in pension programs, namely the Financial Institution Pension Fund (DPLK) program and the BPJS Employment Pension Guarantee Program (JP). As such, every employee will receive a pension benefit(fund) at the time of retirement which they can use as entrepreneurial capital or carry out other productive activities in retirement.

All permanent employees are registered with the pension program, including:

- Pension Fund managed by DPLK
- BPJS Pension by BPJS Employment

Indonesia Eximbank contributes to the payment of the premium for the pension plan, in the following amounts. [201-3]

Program Pensiun   Retirement Program	Iuran Bank   Bank Fees	Iuran pegawai   Employee Fees
BPJS Jaminan Pensiun BPJS Pension Benefits	3% Gaji	0% Gaji
Iuran Dana Pensiun Pension Fund Fees	6% Gaji	4% Gaji

## MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Managing and Developing Human Resources Competency

### DIGITALISASI PENGELOLAAN SDM

Sebagai respons terhadap berkembangnya wacana era Industri 4.0, LPEI secara bertahap telah melakukan pembaharuan pada sistem kerja SDM menuju ke arah digitalisasi. LPEI menerapkan pembaharuan dan pengalihan fungsi tugas manual menjadi digital dengan memaksimalkan fungsi Employee Self Service, beberapa diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan absensi digital dengan menggunakan aplikasi *Employee Self Service*. Hal ini dilakukan untuk mendukung fleksibilitas kerja pegawai di era pandemi COVID-19 dalam rangka menunjang efektivitas dan produktivitas pegawai. Absensi secara digital juga mampu melakukan perekaman lokasi secara otomatis.
2. Pembaharuan database kepegawaian menjadi digital pada *Employee Self Service*. Data umum kepegawaian LPEI saat ini dapat diakses secara real time dan dapat diakses dari mana saja, sehingga proses pelaporan kepegawaian yang dibutuhkan menjadi lebih mudah, cepat dan akurat.
3. Pelaksanaan pelatihan daring. LPEI juga telah mengaplikasikan kemudahan yang ditawarkan oleh digitalisasi dengan memberikan pelatihan daring kepada pegawai. Laporan keikutsertaan pegawai pada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan juga dapat diakomodir secara otomatis pada website *Employee Self Service*, sehingga memberikan kemudahan dan keakuratan secara bersamaan.
4. Pelaksanaan proses klaim pegawai secara digital. Pembaharuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan fleksibilitas pegawai saat melakukan pengajuan klaim fasilitas pegawai. Pegawai dapat melakukan pengajuan klaim secara mandiri serta dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan mengakses website maupun aplikasi *Employee Self Service*.

#### Pengembangan Human Resources Information System (HRIS)

Sepanjang tahun 2021, LPEI melakukan *enhancement* HRIS sebagai kelanjutan pembangunan otomasi sistem kepegawaian yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. *Enhancement* HRIS ini dilakukan karena adanya kebutuhan *improvement* dari Divisi HR Services & People Development dan Divisi HRBP & Recruitment pada Aplikasi HRIS guna keperluan otomasi HR

### DIGITALIZATION OF HR MANAGEMENT

In response to the development of the Industry 4.0 era discourse, Indonesia Eximbank has gradually updated the HR work system towards digitalization. Indonesia Eximbank implements renewal and transfer of manual task functions to digital by maximizing the Employee Self Service function, some of which are:

1. Implementation of digital attendance record using the Employee Self Service application. This is done to support employee work flexibility in the era of the COVID-19 pandemic to support employee effectiveness and productivity. Digital attendance is also capable of recording the location automatically.
2. Updating the employee database to digital for Employee Self Service. Indonesia Eximbank's general staffing data can now be accessed in real time and can be accessed from anywhere, so that the required staffing reporting process becomes easier, faster and more accurate.
3. Implementation of online training. Indonesia Eximbank has also applied the convenience offered by digitalization by providing online training to employees. Reports on employee participation in the trainings held can also be accommodated automatically on the Employee Self Service website, thereby providing convenience and accuracy at the same time.
4. Implementation of the employee claim process digitally. This update is intended to increase employee flexibility when submitting employee facility claims. Employees can submit claims independently and can be done anywhere and anytime by accessing the website or the Employee Self Service application.

#### Development of Human Resources Information System (HRIS)

Throughout 2021, Indonesia Eximbank enhanced the HRIS as a continuation of the development of the automation of the personnel system from the previous year. This was carried out due to the need for improvement from the HR Services & People Development Division and HRBP & Recruitment Division on the HRIS Application for the purposes of automation

## MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Managing and Developing Human Resources Competency

Processes termasuk korespondensi kepegawaian, pinjaman, pembukuan dan lainnya, serta keperluan dalam penyempurnaan terhadap HR Reports termasuk HR Dashboards, Salary Reports, hasil survey, serta penyempurnaan data Employee Informations. Adapun enhancement HRIS dimulai pada Juni 2021 dan go live pada bulan September 2021. Ruang lingkup enhancement HRIS tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan interface dari Payroll Journal HRIS ke Core Banking (UBS).
2. Pembuatan custom Loan Request.
3. Enhancement Monthly Salary Report.
4. Kustomisasi menu Career Transition sebagai drafting surat KDE Mutasi Pegawai.
5. Kustomisasi menu Employee Resume.
6. Enhancemet pengajuan cuti pegawai yang dikoneksikan dengan klaim tunjangan cuti tahunan.
7. Enhancement employee search dengan penambahan nama Divisi dan Departemen.
8. Pembuatan Letter Template dalam rangka otomasi korespondensi di HR.
9. Enhancemet modul Employee Information dengan penambahan Job Description.
10. Enhancemet hasil Survey dan digunakan untuk pelaksanaan Exit Interview Form bagi pegawai yang keluar dari LPEI.
11. Dashboard Divisi HR Services & People Development.

Sejak diselesaikannya enhancement HRIS dimaksud, dirasakan manfaat langsung oleh user/admin user karena memberikan percepatan terhadap service level agreement (SLA) proses HR, antara lain:

1. Perbaikan service level agreement (SLA) penyelesaian input jurnal pembukuan pada UBS.
2. Perbaikan SLA penyelesaian administrasi pinjaman.
3. Perbaikan SLA untuk pemenuhan resume kepegawaian untuk pelaporan internal/eksternal.
4. Perbaikan SLA untuk permintaan job description posisi pegawai.
5. Perbaikan proses bisnis pengajuan tunjangan cuti pegawai, yang diintegrasikan dengan jumlah cuti yang akan diambil.
6. Perbaikan SLA permohonan informasi detail kepegawaian, dibagi berdasarkan divisi dan departemen

of HR Processes including personnel correspondence, loans, bookkeeping and others, as well as the need for improvements to HR Reports including HR Dashboards, Salary Reports, survey results, and improvement of Employee Information data. The HRIS enhancement was started in June 2021 and go live in September 2021. The scope of the 2021 HRIS enhancement is as follows:

1. Interface from Payroll Journal HRIS to Core Banking (UBS).
2. Custom Loan Requests.
3. Enhancement of Monthly Salary Report.
4. Customize Career Transition menu as a drafting of the KDE Employee Mutation letter.
5. Customize the Employee Resume menu.
6. Enhancement of employee leave application which is connected with annual leave allowance claim.
7. Enhancement of employee search by adding the names of Divisions and Departments.
8. Letter Templates in order to automate correspondence in HR.
9. Enhancement of Employee Information module with the addition of a Job Description.
10. Enhancement of Survey results and used for the implementation of the Exit Interview Form for employees who leave the LPEI.
11. HR Services & People Development Division Dashboard.

Since the completion of the enhancement, the user/admin user has experienced direct benefits as it provides acceleration to the service level agreement (SLA) in HR process, including:

1. Improvement of service level agreement (SLA) for the completion of bookkeeping entries at UBS.
2. Improvement of SLA for loan administration settlement.
3. Improvement of SLA for fulfillment of staffing resume for internal/external reporting.
4. Improvement of SLA to request job description for employee positions.
5. Improvement of business process for submitting employee leave allowances, which is integrated with the number of leave to be taken.
6. Improvements to the SLA for requesting detailed staffing information, divided by division and department

## MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Managing and Developing Human Resources Competency

7. Perbaikan SLA pelaporan jumlah partisipan pelatihan.
8. Perbaikan SLA pelaporan progres pengisian *Performance Appraisal* dan hasil final *Performance Appraisal* yang ditampilkan berdasarkan Divisi maupun lembaga.
9. Perbaikan SLA pemenuhan kebutuhan surat-surat kepegawaian.

7. Improvements to SLA reporting on the number of training participants.
8. Improvements to SLA reporting on the progress of filling out Performance Appraisals and the final results of Performance Appraisals displayed by division or institution.
9. Improvement of the SLA for the fulfillment of the need for employment documents.

## ASPEK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Occupational Safety and Health Aspects

### Komitmen dan Kebijakan [103-1, 103-2, 103-3]

LPEI berkomitmen penuh untuk memenuhi ketentuan Pemerintah melalui Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja bagi para pegawai. LPEI juga berkomitmen penuh untuk memenuhi ketentuan Pemerintah mengenai kesehatan kerja pegawai pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) melalui Undang-Undang No.24 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang mengatur kewajiban setiap entitas usaha dalam menyelenggarakan kegiatan operasional usaha berbasis K3 bagi pegawai.

LPEI menempatkan aspek K3 sebagai bagian penting dari pengelolaan ketenagakerjaan sebagai wujud mitigasi risiko yang mungkin muncul dari ketenagakerjaan. LPEI menerapkan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku bagi seluruh pegawai di lingkungan LPEI guna memberikan perlindungan bagi setiap Pegawai guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.

Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pegawai akan mengikuti secara penuh upaya pencegahan kecelakaan yang ditetapkan oleh LPEI guna mencegah potensi timbulnya kecelakaan kerja pada saat bekerja sehingga tercipta keselamatan kerja yang aman dan kondusif di lingkungan kerja baik terhadap proses produksi maupun hubungan kerja sama terhadap rekan sekerja serta perlindungan terhadap peralatan kerja.

Landasan pelaksanaan kegiatan CSR di bidang ketenagakerjaan & K3 mengacu pada Peraturan Dewan

### Commitments and Policies [103-1, 103-2, 103-3]

Indonesia Eximbank is fully committed to complying with the Government's provisions through Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, and Law No. 1 of 1970 concerning Occupational Safety for employees. Indonesia Eximbank is also fully committed to complying with the Government's provisions regarding the occupational health of employees in the Social Security Administering Agency (BPJS) program through Law No. 50 of 2012 on the Implementation of Occupational Health and Safety Management System that regulates for every business entity to carry out OHS-based business operations for employees.

Indonesia Eximbank places OSH aspects as an important part of manpower management to mitigate risks that may arise from employment. Indonesia Eximbank applies the principles of Occupational Safety and Health (OHHS) to all employees in its environment as a protection for every employee to realize optimal work productivity.

In conducting their work, employees shall fully follow the accident prevention efforts set by Indonesia Eximbank to prevent potential workplace accidents at work so as to create safe and conducive work safety in the work environment, both in the production process and cooperative relationships with co-workers as well as protection against work equipment.

The basis for implementing CSR activities in manpower & OHS refers to the Board of Directors Regulation 0024/

## MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Managing and Developing Human Resources Competency

Direktur 0024/PDD/09/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Corporate Social Responsibility LPEI.

### Pembentukan P2K3 [403-1]

LPEI belum memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja(P2K3)sebagai wadah kerjasama antara manajemen dan pegawai untuk mengembangkan saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan K3. Aspek K3 di LPEI menjadi tanggung jawab Divisi Sumber Daya Manusia, yang menjalankan tugas pengelolaan dan pemenuhan aspek K3 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja.

### Program dan Kegiatan Terkait Aspek K3 [403-5]

Sarana dan prasarana penunjang serta kebijakan yang disediakan dan disiapkan dalam praktik kesehatan dan keselamatan di LPEI, antara lain:

- Memperkuat *Disaster Recovery Center* (DRC) guna mengantisipasi jika terjadi bencana atau kondisi yang dapat menyebabkan terganggunya kegiatan operasional bisnis, sehingga keberlangsungan bisnis LPEI tetap terjaga.
- Melakukan kegiatan latihan evakuasi secara berkala bersama-sama dengan *building management* guna mengantisipasi kondisi darurat/bencana, sehingga dapat meminimalisir risiko kecelakaan kerja.
- Menyediakan fasilitas ruangan khusus laktasi/*nursery room* diperuntukkan bagi kenyamanan pegawai perempuan yang menyusui.
- Menyediakan fasilitas perangkat medis antara lain kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan(P3K), tabung oksigen, kursi roda dan obat-obatan umum untuk mengantisipasi kondisi darurat pegawai di lingkungan kerja LPEI.
- Menerapkan langkah pencegahan bahaya kebakaran di lingkungan kerja termasuk larangan merokok di tempat-tempat yang dilarang untuk merokok yang ditentukan oleh LPEI dan *building management*.
- Memberikan dukungan kepada pegawai dalam meningkatkan kesehatan dengan memfasilitasi kegiatan olah raga.
- Memberikan istirahat sakit tanpa mengurangi hak-hak pegawai.
- Melakukan pelatihan rutin:
  1. Pelatihan tim tanggap darurat bencana.
  2. Simulasi tim tanggap darurat.

PDD/09/2009 dated 2 September 2009 concerning Indonesia Eximbank's Corporate Social Responsibility.

### Formation of P2K3 [403-1]

Indonesia Eximbank has not yet established the Occupational Health and Safety Committee (P2K3) as a forum for collaboration between management and employees to develop mutual understanding and effective participation in OHS implementation. The Human Resources Division is in charge of OHS in the Institution, which carries out the task of managing and fulfilling OHS by referring to the Minister of Manpower Regulation No. PER.04/MEN/1987 on the Occupational Health and Safety Committee and the Procedure for Appointing Occupational Safety Experts.

### Programs and Activities Related to OHS Aspects [403-5]

Supporting facilities and infrastructure as well as policies provided and prepared for health and safety practices at Indonesia Eximbank include:

- Strengthening the Disaster Recovery Center (DRC) to anticipate any disaster or conditions that may disrupt business operations, hence to maintain business continuity.
- Conduct regular evacuation drills with building management to anticipate emergency/disaster conditions, to minimize the risk of work accidents.
- Provide special lactation/nursery room facilities for the comfort of female employees who are breastfeeding.
- Provide medical device facilities including First Aid Kits for Accidents (P3K), oxygen cylinders, wheelchairs and general medicines to anticipate emergency conditions for employees in the Institution's work environment.
- Implement fire prevention measures in the work environment, including smoking bans in places where smoking is prohibited as determined by Indonesia Eximbank and building management.
- Provide support to employees in improving health by facilitating sports activities.
- Provide sick leaves without compromising employee rights.
- Conduct regular training:
  1. Disaster emergency response team training.
  2. Simulation of the emergency response team.

## MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Managing and Developing Human Resources Competency

3. Kampanye sadar dan siap melaksanakan *Business Continuity Plan* pada kondisi darurat bencana.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi mitigasi risiko operasional dan risiko reputasi yang terdampak dari faktor internal dan eksternal dengan tujuan agar aspek keselamatan dan kesehatan kerja dapat dikelola dengan baik dan tepat.

### Kesehatan Kerja [403-8]

Pegawai memperoleh perlindungan kesehatan melalui program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan kepada seluruh pegawai dan keluarganya. Selain program jaminan kesehatan dimaksud, LPEI juga memberikan manfaat kesehatan sesuai dengan kebutuhan terkini pegawai melalui penyedia jasa asuransi kesehatan yang ditunjuk LPEI. Pada tahun 2021, LPEI menunjuk PT Asuransi Allianz Indonesia sebagai penyedia jasa asuransi kesehatan LPEI. Dengan asuransi kesehatan dimaksud, setiap pegawai berhak atas penggantian biaya perawatan dan pengobatan atas penyakit yang diderita sesuai tingkat manfaat asuransi. Dalam rangka meringankan beban pegawai, premi asuransi kesehatan menjadi sepenuhnya tanggungan Lembaga.

Secara umum aspek kesehatan kerja dipenuhi melalui pelaksanaan beragam program, seperti:

1. Pemeriksaan kesehatan kerja, mencakup:
  - a. Pemeriksaan kesehatan awal.
  - b. Pemeriksaan kesehatan berkala, dan
  - c. Pemeriksaan kesehatan khusus
2. Pelayanan kesehatan kerja.
3. Pertolongan pertama pada kecelakaan.
4. Rekaman data kesehatan kerja.
5. Setiap pegawai terdaftar asuransi kesehatan yang ditetapkan oleh Lembaga, termasuk BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan lainnya.

3. Awareness campaign and ready to implement the Business Continuity Plan in a disaster emergency.

This activity is part of the implementation of operational risk mitigation and reputation risk that is affected by internal and external factors with the aim that occupational safety and health aspects can be managed properly and appropriately.

### Occupational Health [403-8]

Employees receive health protection through the health insurance program organized by BPJS Healthcare for all employees and their families. In addition to the health insurance program referred to, Indonesia Eximbank also provides health benefits in accordance with the latest needs of employees through health insurance service providers appointed by the Institution. In 2021, Indonesia Eximbank appointed PT Asuransi Allianz Indonesia as a provider of health insurance services. With this health insurance, every employee is entitled to reimbursement for the cost of care and treatment for the illness according to the level of insurance benefit. In order to ease the burden on employees, health insurance premiums are fully borne by the Institute.

In general, occupational health are met through the implementation of various programs, such as:

1. Occupational health examination, including:
  - a. Initial health check.
  - b. Periodic health check-ups, and
  - c. Special health check
2. Occupational health services.
3. First aid for accidents.
4. Records of occupational health data.
5. Every employee is registered with health insurance determined by the Institution, including BPJS Health and other health insurance.

**MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**  
Managing and Developing Human Resources Competency

**Mitigasi dan Penanganan Kondisi Pandemi COVID-19 Di LPEI**

Mempertimbangkan pandemi COVID-19 yang mulai merebak di tahun 2020, masih berlangsung di tahun 2021 akibat adanya varian-varian virus baru, LPEI masih menjalankan Kebijakan *Business Continuity Plan* (BCP) pada kondisi *disaster* dengan terus melakukan berbagai upaya dan program mitigasi risiko dampak pandemi di lingkungan kerja LPEI dalam rangka menjaga keberlangsungan bisnis dan operasional Lembaga.

Penanganan dan penanggulangan pandemi COVID-19 yang dilakukan di lingkungan kerja LPEI sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Organisasi  
Penetapan Gugus Tugas (Satuan Kerja)  
Penanggulangan dan Pencegahan Covid-19  
melalui Keputusan Direktur Eksekutif No. 0067/KDE/07/2021 tentang Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 di Lingkungan LPEI tanggal 8 Juli 2021 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

**Mitigation and Handling of the COVID-19 Pandemic Condition at Indonesia Eximbank**

Considering the COVID-19 pandemic which began to spread in 2020, which remained in 2021 due to new virus variants, Indonesia Eximbank is implementing the Business Continuity Plan (BCP) Policy in disaster conditions by continuing to carry out various efforts and programs to mitigate the risk of the impact of the pandemic in the Institution's working environment in order to maintain business continuity and operations.

The handling and mitigation of the COVID-19 pandemic in the Institution's work environment throughout 2021 were as follows:

- a. Organization  
Determination of the Task Force (Work Unit) for the Countermeasures and Prevention of Covid-19 through Executive Director Decree No. 0067/KDE/07/2021 regarding the Covid-19 Handling Task Force within the Indonesia Eximbank on 8 July 2021 with the following membership structure:

<b>Penanggungjawab</b> <i>Accountability of</i>	Direktur Eksekutif dan Seluruh Direktur Pelaksana Executive Director and All Managing Directors
--	--

<b>Ketua</b> <i>Chairman</i>	Chesna F. Anwar
---------------------------------	-----------------

<b>Wakil Ketua I</b> <i>Vice Chairman I</i>	Agus Windiarto
--	----------------

<b>Wakil Ketua II</b> <i>Vice Chairman II</i>	Wahyu P. Wibowo
--	-----------------

<b>Wakil Ketua III</b> <i>Vice Chairman III</i>	Paul S. Hasjim
--	----------------

<b>Anggota</b> <i>Members</i>	
----------------------------------	--

<b>1. Fungsi Operation &amp; IT</b> <i>Operation &amp; IT Function</i>	Paul S. Hasjim Christiati E. Sianipar Yudi Imandapurba Herdiansyah Hamid
---	---

<b>2. Fungsi Komunikasi &amp; Manajemen</b> <i>Communication &amp; Management Function</i>	Agus Windiarto Saur Maria Sidabutar T. Dyza R.A. Rochadi Yanti Sudjarwo
---	--

## MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Managing and Developing Human Resources Competency

### **3. Fungsi Penanganan SDM** HR Handling Function

Wahyu P. Wibowo  
Noviana Rahatmi  
Susi Rebeka Siagian  
Ayu Triana

### **4. Fungsi Umum** General Function

Agus Windarto  
Anwar Harsono  
Hendi Wibawa  
Priyo Basuki  
Widodo

- |  |  |
|--|--|
| <p>b. Infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian bantuan dan dukungan infrastruktur kerja bagi pegawai yang bekerja di rumah (WFH)</li> <li>• Penyemprotan <i>disinfectant</i> seluruh lingkungan kantor LPEI secara rutin dan berkala</li> <li>• Penyediaan alat-alat sanitasi bagi pegawai yang bekerja di kantor (WFO)</li> <li>• Penyediaan akomodasi berupa makan siang dan tunjangan transportasi kepada pegawai yang WFO.</li> </ul>  | <p>b. Infrastructure</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Providing work infrastructure assistance and support for employees who work at home (WFH)</li> <li>• Spraying of disinfectants throughout the Indonesia Eximbank office environment regularly and periodically</li> <li>• Sanitation equipment for employees working in the office (WFO)</li> <li>• Provision of accommodation such as lunch and transportation allowances for employees who are WFO.</li> </ul> |
| <p>c. Pengaturan Kerja</p> <p>Pengaturan kerja di kantor (WFO) dan di rumah (WFH) dengan memberlakukan operasional kantor secara minimum <i>operation</i> dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 di lingkungan kerja LPEI.</p>   |  |
| <p>c. Work Arrangement</p> <p>Work arrangements at the office (WFO) and at home (WFH) by imposing minimum office operations to prevent the transmission of Covid-19 in the Indonesia Eximbank work environment.</p>  |  |
| <p>d. Pelayanan Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada seluruh pegawai dan keluarga di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran LPEI yang dilakukan di Kementerian Keuangan RI (untuk vaksinasi jenis Sinovac) pada bulan April 2021 dan melalui kerjasama dengan Biofarma (untuk vaksinasi jenis Sinopharm) bekerja sama dengan SMV Kementerian Keuangan (Geodipa dan PII) pada bulan Juni dan Juli 2021. Sampai dengan Agustus 2021, total yang telah tervaksinasi Covid-19 lengkap di lingkungan LPEI adalah 623 pegawai dan 363 keluarga pegawai LPEI atau dengan pencapaian 100% dari total pegawai.</li> </ul> |  |
| <p>d. Health services</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementation of Covid-19 vaccination for all employees and families at the Head Office, Regional Offices, Branch Offices and Indonesia Eximbank Marketing Offices carried out at the Ministry of Finance of RI (for the Sinovac vaccination) in April 2021 and in collaboration with Biofarma (for the Sinopharm vaccination) in collaboration with SMV of the Ministry of Finance (Geodipa and PII) in June and July 2021. As of August 2021, the total fully vaccinated against Covid-19 within Indonesia Eximbank were 623 employees and 363 employees' families or 100% of the total employee.</li> </ul>                 |  |

## MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Managing and Developing Human Resources Competency

- Pelaksanaan deteksi Covid-19 berkala bagi seluruh manajemen dan pegawai LPEI baik secara mandiri melalui mekanisme *reimbursement* dan kerjasama dengan *platform* kesehatan Halodoc, maupun secara massal di lingkungan kerja LPEI. Total pelaksanaan deteksi Covid-19 sepanjang tahun 2021 di lingkungan LPEI adalah sebanyak 4,527 test.
  - Pemberian fasilitas pengobatan dan perawatan kesehatan kepada manajemen, pegawai dan keluarga yang terinfeksi Covid-19.
  - Pelaksanaan injeksi multivitamin bagi seluruh manajemen dan pegawai LPEI secara massal.
- d. Pemantauan Pegawai serta Keluarga
- membantu/memberikan kemudahan dalam pencarian/pengurusan Rumah Sakit melalui surat jaminan atau pengurusan dengan pihak asuransi kesehatan yang bekerjasama dengan LPEI.
  - mengirimkan obat/suplemen yang membantu untuk mengurangi gejala yang diderita.
  - mengirimkan atensi berupa *hampers* buah-buahan dan vitamin.
  - pengecekan perkembangan kesehatan melalui komunikasi WA (24/7).
- Implementation of periodic Covid-19 detection for all Indonesia Eximbank management and employees, both independently through the reimbursement mechanism and in collaboration with the Halodoc health platform, as well as en masse in the Indonesia Eximbank working environment. The total implementation of Covid-19 detection throughout 2021 in the Indonesia Eximbank environment was 4,527 tests.
  - Provision of medical and health care facilities to management, employees and families infected with Covid-19.
  - Multivitamin injections for all Indonesia Eximbank management and employees.
- d. Employee and Family Monitoring
- assist/facilitate the search/administration of hospitals through a letter of guarantee or management with a health insurance company in collaboration with Indonesia Eximbank.
  - send medicines/supplements that help to reduce the symptoms.
  - sending fruits and vitamin hampers.
  - checking health developments through WA communication (24/7).

## MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

### Managing and Developing Human Resources Competency

- |   |  |
|---|--|
| <p>e. Laporan dan Komunikasi Pegawai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerbitan Surat Edaran sebagai sarana komunikasi kepada seluruh jajaran LPEI terkait kebijakan manajemen di lingkungan kerja LPEI yang selalu disesuaikan terhadap kondisi terkini Covid-19</li> <li>• Pemantauan Status Covid-19 di lingkungan kerja LPEI</li> <li>• Laporan status Covid-19 secara rutin kepada stakeholder dan shareholders LPEI terutama pada saat kasus sedang meningkat</li> </ul> | <p>e. Employee Reports and Communication</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Issuance of Circular Letters as a means of communication to all levels of Indonesia Eximbank regarding management policies in the working environment which are always adapted to the latest conditions of Covid-19</li> <li>• Monitoring the Status of Covid-19 in the working environment</li> <li>• Routine Covid-19 status reports to Indonesia Eximbank stakeholders and shareholders, especially when cases are increasing.</li> </ul> |
| <p>f. Program CSR</p> <p>Pemberian donasi kepada masyarakat di Jakarta, Toba Samosir dan Yogyakarta melalui program vaksinasi Covid-19 bekerja sama dengan instansi terkait di masing-masing daerah, pemberian sumbangan sebanyak 10,000 masker dan 100 tabung oksigen sebagai bentuk tanggung jawab sosial LPEI terhadap lingkungan. Pemberian donasi ini merupakan kerjasama Gugus Tugas LPEI dengan Corporate Secretary.</p>   |  |



# TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN

About Sustainability Report



LPEI mengacu pada konsep ***triple bottom line*** sebagai landasan bagi manajemen Lembaga dalam mengambil keputusan

Indonesia Eximbank refers to the concept of triple bottom line as a foundation for the management of the Institution in making decisions

Laporan Keberlanjutan, atau “Laporan” Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“LPEI” atau “Lembaga”) tahun 2021 merupakan Laporan edisi perdana dari Lembaga. Melalui Laporan ini, LPEI memberi gambaran mengenai tantangan yang harus diatasi dan upaya yang dilakukan dalam mengelola kesinambungan usaha, berbagai upaya yang dilakukan untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan di tahun 2021, juga partisipasi LPEI dalam mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan.

The Sustainability Report, or “Report” of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“Indonesia Eximbank” or “Institution”) for 2021 is the inaugural edition of the Institution’s Report. Through this report, Indonesia Eximbank provides an overview of the challenges to overcome and the efforts made in managing business continuity, the various efforts made to meet the expectations of stakeholders in 2021, as well as Indonesia Eximbank participation in supporting the achievement of sustainability goals.

## TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN

### About Sustainability Report

Melalui Laporan ini, LPEI mengungkapkan apa yang dilakukan untuk meminimalisir dampak operasional terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial sekitar, juga menjelaskan apa yang telah dilaksanakan untuk mengoptimalkan manfaat dan kinerjanya, baik pada aspek ekonomi, lingkungan maupun sosial bagi negara dan perekonomian nasional secara berimbang. Melalui Laporan ini, LPEI berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memahami komitmen dukungan Lembaga terhadap pencapaian tujuan keberlanjutan.

Melalui Laporan ini para Pembaca juga dapat menilai sampai sejauh mana LPEI berkontribusi langsung dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Melalui implementasi strategi dan kegiatan yang dijalankan dengan penuh kesungguhan, LPEI berusaha menyelaraskan visi dan misi Lembaga agar sesuai dengan tujuan pembangunan dalam SDGs.

Laporan ini memuat informasi mengenai kondisi faktual yang terkait dengan program dan pendekatan yang dilakukan LPEI dalam menghadapi dan mengantisipasi segala bentuk peluang, risiko, serta tantangan yang terkait dengan keberlanjutan bisnis Lembaga. LPEI merangkum seluruh upaya tersebut dengan mengacu pada konsep *triple bottom line* sebagai landasan bagi manajemen Lembaga dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan faktor sebab-akibat terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), termasuk kondisi lingkungan sekitar.

LPEI berharap Laporan ini bisa menjadi rujukan bagi segenap pemangku kepentingan dalam memahami dan mengetahui pelaksanaan kinerja keberlanjutan Lembaga. Selain edisi cetak, dengan pertimbangan untuk menghemat penggunaan kertas, Laporan yang sama dapat diakses melalui situs LPEI, yakni [www.Indonesiaeximbank.go.id](http://www.Indonesiaeximbank.go.id)

## PEDOMAN, STANDAR LAPORAN & ASSURANCE [102-10, 102-54]

Laporan Keberlanjutan LPEI ini disusun dengan mengakomodir 2 (dua) standar, yaitu Lampiran II SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, serta praktik pelaporan Standar Global Reporting Initiative(GRI) yang dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) -

In this report, Indonesia Eximbank discloses the action to minimize operational impacts on the surrounding economy, environment and social, as well as explains what has been implemented to optimize benefits and performance, both in economic, environmental and social aspects for the country and the national economy in a balanced manner. Indonesia Eximbank hopes that all stakeholders can comprehend the commitment of the Institution's support to the achievement of sustainability goals.

Through this report the readers can also assess the extent to which Indonesia Eximbank directly contributes and supports the achievement of the Sustainable Development Goals(SDGs). Through the implementation of strategies and activities that are carried out with full sincerity, Indonesia Eximbank strives to align its vision and mission to be in line with the SDGs.

This report contains information on factual conditions related to the program and approach taken by Indonesia Eximbank in addressing and anticipating opportunities, risks, and challenges related to the sustainability of the Institution's business. Indonesia Eximbank summarizes all efforts by referring to the triple bottom line concept as the basis for the management of the Institution in making decisions by considering causal factors for all stakeholders, including the surrounding environmental conditions.

Indonesia Eximbank hopes that this report becomes a reference for all stakeholders in understanding and learning the implementation of the Institution's sustainability performance. In addition to the printed edition, with the consideration of saving paper consumption, the same report can be accessed through our website, [www.Indonesiaeximbank.go.id](http://www.Indonesiaeximbank.go.id).

## GUIDELINES, STANDARDS REPORTING & ASSURANCE [102-10, 102-54]

This Report has been prepared to accommodate 2 (two) standards, the Attachment II of SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 or Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, as well as the reporting practices of the Global Reporting Initiative (GRI) Standards issued by the Global Sustainability

## TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN

About Sustainability Report

lembaga yang dibentuk oleh GRI untuk menangani pengembangan standar laporan keberlanjutan.

Standards Board (GSSB) – the institution established by GRI to handle the development of sustainability reporting standards.

### Acuan Pelaporan Keberlanjutan LPEI

Indonesia Eximbank Sustainability Reporting Reference

Lampiran II SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021  
Pedoman Teknis Laporan Keberlanjutan bagi  
Emiten dan Perusahaan Publik  
atau

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  
No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan  
Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan,  
Emiten, dan Perusahaan Publik

Standar Global Reporting Initiative (GRI) – Standard  
Umum dan Spesifik Financial Disclosure, yang  
dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards  
Board (GSSB)

Global Reporting Initiative (GRI) Standards – Financial  
Disclosure General and Specific Standards, issued by the  
Global Sustainability Standards Board (GSSB)

Attachment II SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021

Technical Guidelines for Sustainability Reports for Issuers  
and Public Companies  
or

Financial Services Authority Regulation

No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of  
Sustainable Finance for Financial Service Institutions,  
Issuers, and Public Companies

Tujuan adopsi kedua standar pelaporan tersebut adalah mematuhi ketentuan pada:

1. Lampiran II SEOJK 16/SEOJK.04/2021 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik yang menjadi standar kepatuhan bagi Lembaga yang digolongkan sebagai Lembaga Jasa Keuangan (LJK) maupun Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, termasuk LPEI. Sesuai Pasal 3, ayat 1 butir b Peraturan OJK ini, Lembaga Jasa Keuangan lainnya wajib menerapkan peraturan ini mulai 1 Januari 2020.
2. Praktik pelaporan Standar Global Reporting Initiative (GRI) sebagai rujukan bagi penyusunan laporan keberlanjutan LPEI agar dapat dibaca dan diterima secara global.

The purpose of adopting the two reporting standards is to comply with the provisions on:

1. Attachment II of SEOJK 16/SEOJK.04/2021 and Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies which are the compliance standards for Institutions classified as Financial Services Institutions (LJK) and Other Financial Services Institutions, including Indonesia Eximbank. In accordance with Article 3, paragraph 1 point b of this OJK Regulation, other Financial Services Institutions are required to implement this regulation starting 1 January 2020.
2. The practice of reporting on the Global Reporting Initiative (GRI) Standard as a reference for the preparation of the Indonesia Eximbank sustainability report for readers and acceptance globally.

LPEI menerapkan prinsip materialitas dalam menyampaikan isu-isu keberlanjutan yang penting bagi para pemangku kepentingan dan dalam menjalankan kegiatan usaha. Lembaga menyajikan indikator disclosure GRI Standard Core yang diaplikasikan pada setiap halaman yang relevan.

Indonesia Eximbank applies the principle of materiality in conveying key sustainability issues to stakeholders and in conducting business activities. The institution presents the GRI Standard Core disclosure indicators which are applied to each relevant page.

## TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN

### About Sustainability Report

Sebagai wujud kepedulian dan komitmen LPEI sebagai lembaga intermediari, serta agar dapat menunjukkan peran besar Lembaga dalam berpartisipasi menangani isu-isu sosial dan lingkungan, pada Laporan edisi Perdana ini, Lembaga menyertakan pencatuman indeks GRI-Spesifik *Financial Disclosure*. Daftar Indeks *Standard Core*, *Indeks Financial* yang diterapkan dalam Laporan ini disajikan pada halaman 652. [102-55] Selain itu, LPEI juga menyampaikan indeks SEOJK 16/SEOJK.04/2021 atau Indeks Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 pada bagian Lampiran Laporan ini.

Pada penyusunan Laporan ini, LPEI masih belum menggunakan jasa penjamin (*assurance*), namun demikian untuk menjamin kredibilitas dan kualitas informasi yang tercantum dalam laporan ini, seluruh isi dan data yang disajikan telah melalui tahap verifikasi internal. [102-56]

### PERIODE DAN SIKLUS LAPORAN [102-50, 102-51, 102-52]

Laporan Keberlanjutan perdana yang disampaikan dalam satu buku dengan Laporan Tahunan ini memuat berbagai program dan kegiatan yang dilakukan yang relevan dengan pilihan topik material selama dua tahun terakhir, pada periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan perbandingannya untuk periode yang sama di tahun sebelumnya.

Laporan ini akan diterbitkan secara reguler setiap tahun, bersamaan dengan Laporan Tahunan LPEI. Sesuai dengan ketentuan SEOJK 16/SEOJK.04/2021 Laporan Keberlanjutan ini merupakan bagian dari Laporan Tahunan LPEI, dengan konten khusus mengenai program-program Tanggung Jawab Sosial yang dilaksanakan di tahun pelaporan, dan disampaikan dalam format sebagaimana ketentuan rujukan dimaksud.

Tidak ada penyajian ulang atas data tahun yang lalu, mengingat Laporan ini merupakan Laporan Keberlanjutan edisi perdana, juga tidak ada perubahan signifikan terhadap kegiatan bisnis maupun kepengurusan perusahaan selama tahun pelaporan. Begitu pula tidak terdapat perubahan signifikan atas ruang lingkup dan *boundary* dalam periode pelaporan. [102-48, 102-49]

As a manifestation of Indonesia Eximbank's concern and commitment as an intermediary institution, and in order to present major role of the Institution in participating in dealing with social and environmental issues, in this First edition of the Report, the Institution includes the inclusion of GRI-Specific Financial Disclosure index. The list of Standard Core Index, Financial Index applied in this Report is presented on page 652. [102-55] In addition, LPEI also submitted the SEOJK 16/SEOJK.04/2021 index or the OJK Regulation No. Index. 51/ POJK.03/2017 in the Attachment to this Report.

In the preparation of this report, Indonesia Eximbank has not used assurance services, however, to ensure the credibility and quality of the information contained in this report, all contents and data presented have gone through an internal verification stage. [102-56]

### REPORTING PERIOD AND CYCLE [102-50, 102-51, 102-52]

The inaugural Sustainability Report presented in one book with this Annual Report contains various programs and activities that are relevant to the choice of material topics for the last two years, in the period from 1 January 2021 to 31 December 2021 and their comparison for the same period in the previous year.

This report would be published regularly every year, together with the Indonesia Eximbank Annual Report. In accordance with the provisions of SEOJK 16/SEOJK.04/2021 this Sustainability Report is part of the Indonesia Eximbank Annual Report, with special content regarding Social Responsibility programs implemented in the reporting year, and submitted in the format as referred to in the reference.

There was no restatement of previous year's data, considering that this Report is the inaugural edition of the Sustainability Report, nor was there any significant change to the business activities or management of the company during the reporting year. Likewise, there were no significant changes to the scope and boundaries in the reporting period. [102-48, 102-49]

## TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN

About Sustainability Report

### RUANG LINGKUP (BOUNDARY) DAN BATASAN LAPORAN [102-45]

Laporan Keberlanjutan LPEI ini berfokus menguraikan kinerja operasional LPEI, serta segala perkembangan dan perubahan yang terjadi selama tahun 2021. Informasi dan data kinerja keberlanjutan yang disajikan dalam laporan ini mencakup uraian kinerja keuangan LPEI semata, kinerja sosial dan kinerja lingkungan. [102-45]

Data yang dilaporkan adalah data yang terhitung mulai dari 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Seluruh data keuangan dinyatakan dalam satuan mata uang Rupiah Indonesia (Rp), kecuali dinyatakan lain dalam laporan. Dalam melaporkan data keuangan, Kami menggunakan teknik berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") Indonesia. Sedangkan untuk data keberlanjutan, digunakan teknik pengukuran data yang berlaku secara internasional.

Sementara data pendukung upaya pelestarian lingkungan yang diterapkan dan disampaikan, terbatas pada aktivitas operasional Kantor Pusat di Jakarta, dengan pertimbangan karena ruang lingkup wilayah kerja LPEI yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan belum adanya keseragaman perhitungan sehingga belum dapat memaparkan penggunaan energi, konsumsi bahan bakar, konsumsi air maupun konsumsi kertas secara menyeluruh. Selain itu, LPEI tidak memantau, mengendalikan dan melaporkan aktivitas para mitra usaha diluar interaksinya dengan Lembaga.

### PENETAPAN KONTEN LAPORAN [102-46, 103-1, 103-2, 103-3]

LPEI menetapkan isi Laporan dengan menerapkan 4 (empat) langkah yang disyaratkan oleh Standar GRI, yaitu:

1. Mengidentifikasi aspek-aspek yang material dan *boundary* (langkah Identifikasi).  
Identifikasi aspek-aspek keberlanjutan (*sustainability context*) dipilih yang relevan dengan karakteristik industri perbankan, dan pengaruhnya terhadap pemangku kepentingan.
2. Membuat prioritas atas aspek-aspek yang telah diidentifikasi pada langkah sebelumnya (langkah

### SCOPE (BOUNDARIES) AND LIMITATIONS OF THE REPORT [102-45]

This Sustainability Report focuses on describing the operational performance of Indonesia Eximbank, as well as all developments and changes that occur during 2021. The information and sustainability performance data presented in this report includes a description of Indonesia Eximbank's financial performance only, social performance and environmental performance. [102-45]

The data reported is starting from 1 January 2021 to 31 December 2021. All financial data is stated in Indonesian Rupiah (Rp), unless otherwise stated in the report. In reporting financial data, we use techniques based on the Indonesian Financial Accounting Standards Statement ("PSAK"). Meanwhile, for sustainability data, internationally accepted data measurement techniques are used.

Meanwhile, the supporting data for environmental conservation efforts implemented and submitted are limited to the operational activities of the Head Office in Jakarta, considering that the scope of Indonesia Eximbank's work areas are spread across various regions of Indonesia and there is no uniformity of calculations so that it cannot describe energy use, fuel consumption, overall water consumption and paper consumption. In addition, Indonesia Eximbank does not monitor, control and report on the activities of business partners outside of interactions with the Institution.

### REPORT CONTENT DETERMINATION [102-46, 103-1, 103-2, 103-3]

Indonesia Eximbank determines the contents of the Report by implementing the 4 (four) steps required by the GRI Standards:

1. Identify material and boundary aspects (Identification step).  
Identification of selected sustainability contexts that are relevant to the characteristics of the banking industry, and their impact on stakeholders.
2. Prioritize the aspects identified in the previous step (Priority step). Considering that the priority aspects

## TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN

### About Sustainability Report

Prioritas). Dengan pertimbangan bahwa prioritas aspek dan isu yang material tahun 2019 masih relevan dengan kondisi tahun 2020, maka Laporan ini menggunakan aspek dan isu yang material yang sama dengan tahun sebelumnya.

3. Melakukan validasi atas aspek-aspek material tersebut (langkah Validasi).
4. Melakukan review atas Laporan setelah diterbitkan guna meningkatkan kualitas Laporan tahun berikutnya (langkah Review).

LPEI mengkaji ulang konten laporan ini dengan memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal (stakeholder inclusiveness). Penetapan isi Laporan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dengan prinsip yang disyaratkan oleh Standar GRI, yakni: *stakeholders inclusiveness* (pelibatan pemangku kepentingan); *Materiality* (materialitas); *Sustainability context* (konteks keberlanjutan) dan *Completeness* (kelengkapan). LPEI juga melakukan analisis terhadap respon pemangku kepentingan yang disampaikan melalui beragam kegiatan yang melibatkan berbagai kelompok pemangku kepentingan secara spesifik, misalnya dalam forum Rapat Pengesahan, media gathering dan sebagainya.

#### Proses Penetapan Isi Laporan

##### Report Content Determination Process



and material issues in 2020 are still relevant to the conditions in 2021, this Report uses the same material aspects and issues as the previous year.

3. Validate the material aspects (validation step).
4. Review the Report after it is published in order to improve the quality of the next year's Report (Review step).

Indonesia Eximbank reviewed the content of this report by taking into account the input from stakeholders, both internal and external (stakeholder inclusiveness). The determination of the contents of the Report is carried out by taking into account conformity with the principles required by the GRI Standards: stakeholder inclusiveness, Materiality, Sustainability context and Completeness. Indonesia Eximbank also conducts analysis of stakeholder responses delivered through various activities involving various stakeholder groups specifically, for example in the GMS forum, media gathering, etc.

## TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN

About Sustainability Report

## DAMPAK SIGNIFIKAN DAN UJI MATERIALITAS [102-47]

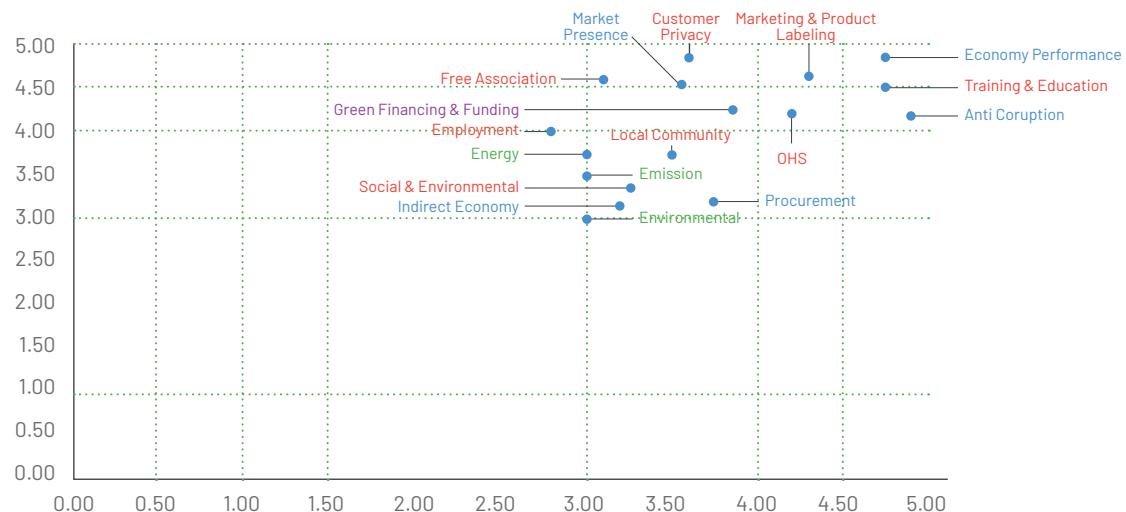
Untuk menentukan topik-topik yang dilaporkan, LPEI melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk mengkaji dampak material serta mempertimbangkan masukan dari beberapa pihak eksternal maupun melalui interaksi dengan masyarakat sekitar.

Melalui koordinasi tersebut LPEI melakukan uji materialitas terhadap sejumlah topik material yang diperkirakan layak disampaikan dalam laporan termasuk *boundary*-nya, kemudian menetapkan beberapa informasi material yang berada pada kategori 'tinggi' dan beberapa informasi lainnya berada pada kategori 'sedang' maupun 'rendah', sebagaimana digambarkan dalam diagram materialitas berikut.

### Diagram Matriks Materialitas [102-47]

Materiality Matrix Diagram [102-47]

Penting untuk Pemangku Kepentingan



Terdapat 17 kelompok topik material yang memenuhi kriteria dampak paling material terhadap kinerja keberlanjutan LPEI. Lembaga kemudian menetapkan tidak kurang 45 indeks disclosure dari topik material dimaksud, sebagai berikut.

## SIGNIFICANT IMPACT AND MATERIALITY TEST [102-47]

To determine the reported topics, Indonesia Eximbank coordinates with relevant work units to assess the material impact and consider input from several external parties and through interaction with the surrounding communities.

Through these discussions, Indonesia Eximbank conducts a materiality test on a number of material topics that are deemed appropriate to be submitted in the report including the boundaries, then determines that some material information is in the 'high' category and some other information is in the 'medium' or 'low' category, as illustrated in the following materiality diagram.

There are 17 groups of material topics meeting the criteria for the most material impact on Indonesia Eximbank's sustainability performance. The institution then stipulates no less than 45 disclosure indexes of the material topics, as follows.

**TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN**  
About Sustainability Report

**Daftar Topik Material dan *Boundary***

Material Aspects and Boundary [102-47]

No	Topik Material   Material Aspects	Alasan Materialitas Materiality Reason	Indeks Disclosure Disclosure Index		<i>Boundary</i>	
			SE OJK 16.04/2021 Atau POJK 51/2017	GRI Standard	Di dalam LPEI Inside LPEI	Diluar LPEI Outside LPEI
	<b>EKONOMI ECONOMY</b>					
1	Kinerja Keuangan / Ekonomi Financial / Economic Performance	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan Significant impact on stakeholders	F2, F3	201-1, 201-3 201-4	✓	
2	Kehadiran Pasar Market Presence	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan Significant impact on stakeholders	F.20	202-1	✓	
3	Dampak ekonomi tak langsung Indirect economic impact	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan Significant impact on stakeholders	F.23	203-1	✓	✓
4	Praktik Pengadaan Procurement Practice	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan Significant impact on stakeholders	F2, F3	204-1	✓	✓
5	Anti Korupsi Anti Corruption	Berdampak signifikan pada pembangunan dan pada reputasi Lembaga Significant impact on the development and on the reputation of the Institution	F.1	205-2, 205-3	✓	✓
	<b>LINGKUNGAN ENVIRONMENT</b>					
6	Energy	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan Significant impact on stakeholders	F.6 & F.7	302-1, 302-4	✓	
7	Emisi Emission	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan Significant impact on stakeholders	F.11	305-1, 305-2	✓	
8	Kepatuhan Lingkungan Environmental Compliance	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan dan reputasi Lembaga Significant impact on stakeholders and the reputation of the Institution	F.16	307-1, 308-1	✓	
	<b>SOSIAL SOCIAL</b>					
9	Kepegawaian Employee Affairs	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan dan bagi kesinambungan usaha Significant impact on stakeholders and for business sustainability	F.18	401-1, 401-2	✓	
10	Kesehatan dan Keselamatan Kerja Occupational Health and Safety	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan Significant impact on stakeholders	F.21	403-1, 403-5 403-8	✓	

## TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN

About Sustainability Report

No	Topik Material   Material Aspects	Alasan Materialitas Materiality Reason	Indeks Disclosure Disclosure Index		Boundary	
			SE OJK 16.04/2021 Atau POJK 51/2017	GRI Standard	Di dalam LPEI Inside LPEI	Diluar LPEI Outside LPEI
11	Pelatihan dan Pendidikan Training and Education	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan dan bagi kesinambungan usaha Significant impact on stakeholders and for business sustainability	F.18	404-1, 404-2 404-3	✓	
12	Kebebasan Berserikat dan PKB Freedom of Association and CLA	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan dan reputasi Lembaga Significant impact on stakeholders and the reputation of the Institution	F.21	405-1, 405-2, 407-1	✓	
13	Masyarakat Lokal Local Community	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan dan reputasi Lembaga Significant impact on stakeholders and the reputation of the Institution	F23. F.24, F.25	413-1	✓	
14	Pemasaran dan Label Produk Product Marketing and Labeling	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan dan reputasi Lembaga Significant impact on stakeholders and the reputation of the Institution	F.26, F.27	417-1, 417-2, 417-3	✓	
15	Privasi Pelanggan Customer Privacy	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan Significant impact on stakeholders	F.28, F.30	418-1	✓	
16	Kepatuhan thd Regulasi Sosial & Lingkungan Compliance with Social & Environmental Regulations	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan dan reputasi Lembaga Significant impact on stakeholders and the reputation of the Institution	F.16, F.24	419-1	✓	
<b>FINANCIAL SERVICE SECTOR</b>						
17	Pembiayaan Berkelanjutan Sustainable Financing	FS1, FS2, FS3, FS4, FS5, FS6, FS7, FS8, FS10, FS15, FS16,			✓	✓

## KEANDALAN LAPORAN

Seluruh informasi yang diungkapkan dalam laporan ini telah melalui proses verifikasi internal LPEI sehingga dapat diandalkan untuk proses evaluasi dan pengambilan keputusan. Untuk tahun ini, LPEI masih belum melakukan proses verifikasi oleh pihak eksternal namun ke depannya, Lembaga berkomitmen untuk melibatkan pihak eksternal dalam proses verifikasi untuk meningkatkan kehandalan laporan keberlanjutan.

Sistem pengukuran data yang digunakan untuk mengukur dan mengumpulkan data serta informasi yang

## REPORT RELIABILITY

All information disclosed in this report has gone through the internal verification process hence it can be relied upon for evaluation and decision-making processes. This year, Indonesia Eximbank is yet to carry out the verification process by external parties but in the future, the Institution is committed to involving external parties in the verification process to improve the reliability of the sustainability report.

The data measurement system used to measure and collect the data and information presented in this report

## TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN

### About Sustainability Report

disampaikan di dalam laporan ini telah sesuai dengan standar baku nasional yang berlaku dan telah diterapkan di LPEI, di antaranya seperti Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup, serta Peraturan dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

is in accordance with applicable national standards and has been implemented at Indonesia Eximbank, such as the Regulation of the Ministry of the Environment, as well as the Regulation of the Ministry of Manpower and Transmigration.

## KONTAK [102-53]

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut atau pertanyaan-pertanyaan tentang Laporan ini, silahkan menghubungi:

## CONTACT [102-53]

For further information or queries on this Report, please contact:

**Corporate Secretary**  
**Indonesia Eximbank – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)**  
Prosperity Tower Lantai 1 – District 8  
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta - 12190  
Telp : +62 21 395 03600  
Fax : +62 21 395 03699  
Email : [corpsec@indonesiaeximbank.go.id](mailto:corpsec@indonesiaeximbank.go.id)  
Web : [www.indonesiaeximbank.go.id](http://www.indonesiaeximbank.go.id)



# DAFTAR INDEKS GRI – OPSI CORE [102-55]

## GRI Index List – Core Option

GRI – Standard	KETERBUKAAN   DISCLOSURE		Halaman Page
	No Indeks Index	Judul   Titles	
<b>DISCLOSURE UMUM   GENERAL DISCLOSURES</b>			
GRI 102: Disclosure Umum General Disclosures		<b>Profil Organisasi   Organization Profile</b>	
	102-1	Nama Organisasi Organization Name	68
	102-2	Kegiatan, Merek, Produk, dan Jasa Activity, Brands, Products, and Services	68, 72-75
	102-3	Lokasi Kantor Pusat Organization Headquarters	68
	102-4	Lokasi Operasi Operational Regions	68
	102-5	Kepemilikan dan Bentuk Hukum Ownership and Legal Form	68, 108
	102-6	Pasar yang Dilayani Market Coverage	68
	102-7	Skala Organisasi Organization Scale	67
	102-8	Informasi Mengenai Karyawan dan Pekerja Lain Employees and Other Workers Information	109
	102-9	Rantai Pasokan Supply Chain	571
	102-10	Perubahan signifikan pada periode laporan, skala usaha, perubahan kegiatan usaha, termasuk organisasi dan rantai pasokannya Significant changes during the reporting period, business scale, business activity changes, including organization and supply chain	643
	102-11	Pendekatan atau Prinsip Pencegahan Precautionary Approached	462-481
	102-12	Inisiatif eksternal diadopsi atau diterapkan External initiative supported or adopted	n.a
	102-13	Keanggotaan Organisasi Memberships In Organizations	n.a
<b>Strategi   Strategy</b>			
	102-14	Pernyataan dari Pembuat Keputusan Senior Statement from the Senior Decision Maker	26-40
<b>Etika dan Integritas   Ethics and Integrity</b>			
	102-16	Nilai, Prinsip, Standar, dan Norma Perilaku Values, Principles, Standards, and Code of Conduct	498-502
<b>Tata Kelola   Governance</b>			
	102-18	Struktur Tata Kelola Governance Structure	251-253

DAFTAR INDEKS GRI – OPSI CORE [102-55]  
Gri Index List – Core Option

GRI – Standard	KETERBUKAAN   DISCLOSURE		Halaman Page
	No Indeks Index	Judul   Titles	
	102-22	Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors	259
	102-23	Ketua badan tata kelola tertinggi Chairman of the highest governance body	259
<b>Keterlibatan Pemangku Kepentingan   Stakeholders Engagement</b>			
	102-40	Daftar Kelompok Pemangku Kepentingan List of Stakeholders Group	557
	102-41	Perjanjian Perundingan Kolektif Collective Discussion Agreement	610
	102-42	Mengidentifikasi dan Memilih Pemangku Kepentingan Identification and Selection of Stakeholders	557
	102-43	Pendekatan terhadap keterlibatan Pemangku Kepentingan Approaches for Stakeholders Engagement	557
	102-44	Topik Utama dan Hal-hal yang Diajukan Main Topics and Proposed Issues	557
<b>Praktik Pelaporan   Reporting Practice</b>			
	102-45	Entitas Anak Usaha dikonsolidasi pada Laporan Keuangan Subsidiaries consolidated into the Financial Statements	646
	102-46	Menetapkan Isi Laporan, Topik dan Boundary Defining report contents and boundaries	646
	102-47	Daftar Topik Material List of Material Topics	648
	102-48	Penyajian Kembali Informasi Information Restatement	645
	102-49	Pengungkapan Perubahan pada Laporan Disclosure of Changes in the Report	645
	102-50	Periode Pelaporan Reporting Period	645
	102-51	Tanggal Laporan Terbaru Latest Report Date	645
	102-52	Siklus Laporan Report Cycles	645
	102-53	Titik kontak untuk Pertanyaan Mengenai Laporan Point of Contact for Report Inquiries	651
	102-54	Kesesuaian dengan Standar GRI Accordance with GRI Standard	643
	102-55	Indeks Isi GRI GRI Contents Index	645, 653
	102-56	Assurance oleh pihak Eksternal External Assurance	645

## DAFTAR INDEKS GRI – OPSI CORE [102-55]

Gri Index List – Core Option

GRI – Standard	KETERBUKAAN   DISCLOSURE		Halaman Page	
	No Indeks Index	Judul   Titles		
<b>KETERBUKAAN TOPIK SPESIFIK   DISCLOSURE OF SPECIFIC TOPICS</b>				
<b>TOPIK EKONOMI   ECONOMIC TOPICS</b>				
	<b>201 Kinerja Ekonomi   Economics Performance</b>			
GRI 103: Pendekatan Manajemen Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya Elaboration of Material Topics and Boundaries	558	
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya Management Approach and its Components	558	
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Management Approach Evaluation	558	
GRI 201: Kinerja Ekonomi Economic Performance 2016	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan Direct economic value generated and distributed	568	
	201-3	Kewajiban Program Pensiun Manfaat Pasti dan Program Pensiun Lainnya Defined Benefit Pension Plan Obligations and Other Retirement Plans	629	
	201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah Financial assistance from the government	562	
	<b>202 Keberadaan Pasar   Market Presence</b>			
GRI 103: Pendekatan Manajemen Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya Elaboration of Material Topics and Boundaries	606	
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya Management Approach and its Components	607	
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Management Approach Evaluation	606	
GRI 202: Keberadaan Pasar Market Presence 2016	202-1	Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional Standard ratio of entry-level employees' wages by gender to regional minimum wage	626	
<b>203 Dampak Ekonomi Tidak Langsung   Indirect Economic Impacts</b>				
GRI 103: Pendekatan Manajemen Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya Elaboration of Material Topics and Boundaries	597	
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya Management Approach and its Components	597	
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Management Approach Evaluation	597	
GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung Indirect Economic Performance 2016	203-1	Investasi Infrastruktur dan Layanan Jasa Infrastructure Investment and Services	604	

DAFTAR INDEKS GRI – OPSI CORE [102-55]  
Gri Index List – Core Option

GRI – Standard	KETERBUKAAN   DISCLOSURE		Halaman Page
	No Indeks Index	Judul   Titles	
<b>204 Praktik Pengadaan   Procurement Practice</b>			
GRI 103: Pendekatan Manajemen Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya <i>Elaboration of Material Topics and Boundaries</i>	558
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya Management Approach and its Components	558
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Management Approach Evaluation	558
GRI 204: Praktik Pengadaan Procurement Practice 2016	204-1	Proporsi Pengeluaran untuk Pemasok Lokal Proportion of Spending on Local Suppliers	571
<b>205 Anti Korupsi   Anti Corruption</b>			
GRI 103: Pendekatan Manajemen Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya <i>Elaboration of Material Topics and Boundaries</i>	230
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya Management Approach and its Components	230
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Management Approach Evaluation	230
GRI 205: Anti-Korupsi Anti-Corruption 2016	205-2	Komunikasi dan pelatihan anti korupsi Anti-corruption communication and trainings	534-540
	205-3	Kasus korupsi dan penindakan kasus korupsi Corruption cases and its prosecution	509
<b>TOPIK LINGKUNGAN   ENVIRONMENTAL TOPICS</b>			
<b>302 Energi   Energy</b>			
GRI 103: Pendekatan Manajemen Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya <i>Elaboration of Material Topics and Boundaries</i>	586
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya Management Approach and its Components	586
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Management Approach Evaluation	586
GRI 302: Energi Energy 2016	302-1	Konsumsi energi organisasi Organizational energy consumption	593
	302-4	Pengurangan konsumsi energi Energy consumption reduction	593
<b>305 Emisi   Emissions</b>			
GRI 103: Pendekatan Manajemen Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya <i>Elaboration of Material Topics and Boundaries</i>	586
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya Management Approach and its Components	586
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Management Approach Evaluation	586

**DAFTAR INDEKS GRI – OPSI CORE [102-55]**

Gri Index List – Core Option

<b>GRI – Standard</b>	<b>KETERBUKAAN   DISCLOSURE</b>		<b>Halaman Page</b>
	<b>No Indeks Index</b>	<b>Judul   Titles</b>	
GRI 305: Emisi Emissions 2016	305-1	Emisi yang Dihasilkan Perusahaan (Scope 1) Direct (Scope 1) GHG Emissions	594
	305-2	Emisi dari energi tidak langsung (Scope 2) Energy Indirect (Scope 2) GHG Emissions	594
<b>307 Kepatuhan Lingkungan   Environmental Compliance</b>			
GRI 103: Pendekatan Manajemen Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya Elaboration of Material Topics and Boundaries	586
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya Management Approach and its Components	586
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Management Approach Evaluation	586
GRI 307: Kepatuhan Lingkungan Environmental Compliance 2016	307-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup Incompliance to environmental laws and regulations	592
<b>308 Penilaian Lingkungan Pemasok   Suppliers Environmental Assessment</b>			
GRI 103: Pendekatan Manajemen Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya Elaboration of Material Topics and Boundaries	586
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya Management Approach and its Components	586
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Management Approach Evaluation	586
GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok Suppliers Environmental Assessment 2016	308-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan New suppliers selection using environmental criteria	571
<b>TOPIK SOSIAL   SOCIAL TOPICS</b>			
<b>401 Kepegawaian   Employment</b>			
GRI 103: Pendekatan Manajemen Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya Elaboration of Material Topics and Boundaries	606
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya Management Approach and its Components	607
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Management Approach Evaluation	606

DAFTAR INDEKS GRI – OPSI CORE [102-55]  
Gri Index List – Core Option

GRI – Standard	KETERBUKAAN   DISCLOSURE		Halaman Page
	No Indeks Index	Judul   Titles	
GRI 401: Kepegawaian Employment 2016	401-1	Perekutran Karyawan Baru dan Pergantian ( <i>Turn-over</i> ) Karyawan New Employee Recruitment and Turn Over	613
	401-2	Benefit yang didapat karyawan permanen, kontrak, dsb Benefits provided to full-time payment employees, contract employee, other types of employment	625
<b>403 Kesehatan &amp; Keselamatan Kerja   Occupational Health &amp; Safety</b>			
GRI 103: Pendekatan Manajemen Management Approach 2018	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya Elaboration of Material Topics and Boundaries	635
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya Management Approach and its Components	635
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Management Approach Evaluation	635
GRI 403: Kesehatan dan Keselamata Kerja Occupational Health and Safety 2018	403-1	Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja Occupational health and safety management system	636
	403-5	Pelatihan karyawan tentang kesehatan & keselamatan kerja Worker training on occupational health and safety	636
	403-8	Karyawan yang diberikan perlindungan oleh sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja Workers covered by an occupational health and safety management system	637
<b>404 Pelatihan dan Pendidikan   Trainings and Education</b>			
GRI 103: Pendekatan Manajemen Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya Elaboration of Material Topics and Boundaries	606
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya Management Approach and its Components	607
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Management Approach Evaluation	606
GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan Training and Education 2016	404-1	Rata-rata jam pelatihan karyawan, menurut gender dan jenjang jabatan Average employees training hours, based on gender and position level	615
	404-2	Program peningkatan kompetensi karyawan, dan program pra jabatan Employee competence progam, and pre-position program	615
	404-3	Prosentase karyawan yang mendapatkan penilaian kinerja dan penyesuaian jenjang karir secara reguler, menurut jabatan dan gender Percentage of employee receiving performance assessment and adjustment of career path regularly, according to position and gender	623

**DAFTAR INDEKS GRI – OPSI CORE [102-55]**

Gri Index List – Core Option

<b>GRI – Standard</b>	<b>KETERBUKAAN   DISCLOSURE</b>		<b>Halaman Page</b>
	<b>No Indeks Index</b>	<b>Judul   Titles</b>	
	<b>405 Keberagaman dan Kesamaan Kesempatan   Diversity and Equal Opportunities</b>		
GRI 103: Pendekatan Manajemen Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya Elaboration of Material Topics and Boundaries	606
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya Management Approach and its Components	607
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Management Approach Evaluation	606
GRI 405: Keanekaragaman dan Kesempatan Setara Diversity and Equal Opportunity 2016	405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan Diversity of governance body and employees	608
	405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki Ratio of basic salary and remuneration of women compared to men	626
	<b>407 Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif   Freedom of Association and Collective Bargaining</b>		
GRI 103: Pendekatan Manajemen Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya Elaboration of Material Topics and Boundaries	606
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya Management Approach and its Components	607
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Management Approach Evaluation	606
GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif Freedom of Association and Collective Bargaining 2016	407-1	Operasi dan pemasok dimana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin beresiko Operations and suppliers where the right to freedom of association and collective bargaining maybe at risk	610
	<b>413 Masyarakat Lokal   Local Communities</b>		
GRI 103: Pendekatan Manajemen Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya Elaboration of Material Topics and Boundaries	597
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya Management Approach and its Components	597
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Management Approach Evaluation	597
GRI 413: Masyarakat Lokal Local Community 2016	413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan Program Pengembangan Komunitas Operational involving local communities, impacts evaluation, and Community Development Program	599

**DAFTAR INDEKS GRI – OPSI CORE [102-55]**  
Gri Index List – Core Option

<b>GRI – Standard</b>	<b>KETERBUKAAN   DISCLOSURE</b>		<b>Halaman Page</b>
	<b>No Indeks Index</b>	<b>Judul   Titles</b>	
<b>417 Pemasaran dan Pelabelan   Marketing and Labelling</b>			
GRI 103: Pendekatan Manajemen Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya Elaboration of Material Topics and Boundaries	574
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya Management Approach and its Components	574
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Management Approach Evaluation	575
GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan Marketing and Labelling 2016	417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa Requirements for labelling and information of product and services	583
	417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa Incident of incompliance with information and labelling of product and services	581, 583
	417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran Incident of incompliance with marketing communication	581, 583
<b>418 Privasi Pelanggan   Customer Privacy</b>			
GRI 103: Pendekatan Manajemen Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya Elaboration of Material Topics and Boundaries	574
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya Management Approach and its Components	574
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Management Approach Evaluation	575
GRI 418: Privasi Pelanggan Customer Privacy 2016	418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan Complaints based on violations toward customer's privacy and customer loss data	580, 581
<b>419 Kepatuhan Sosial Ekonomi   Socio-Economy Compliance</b>			
GRI 103: Pendekatan Manajemen Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya Elaboration of Material Topics and Boundaries	574
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya Management Approach and its Components	574
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Management Approach Evaluation	575
GRI 419: Kepatuhan Sosial Ekonomi Socio-Economy Compliance 2016	419-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi Incompliance with laws and regulations in social and economic aspects	577

**DAFTAR INDEKS GRI – OPSI CORE [102-55]**

Gri Index List – Core Option

<b>GRI – Standard</b>	<b>KETERBUKAAN   DISCLOSURE</b>		<b>Halaman Page</b>
	<b>No Indeks Index</b>	<b>Judul   Titles</b>	
<b><i>Green Funding &amp; Lending – Indicator of Financial Services Specific Supplement</i></b>			
Disclosure Financial Specific – Financial Sector 2014	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya Elaboration of Material Topics and Boundaries	574
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya Management Approach and its Components	574
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Management Approach Evaluation	575
	FS1	Kebijakan khusus penerapan aspek lingkungan dan sosial dalam kegiatan usaha Policies with specific environmental and social components applied to business lines.	578
	FS3	Prosedur monitoring ketaatan nasabah dalam mematuhi ketentuan peraturan perundangan aspek sosial lingkungan yang tercantum dalam perjanjian kredit. Processes for monitoring customers' implementation of and compliance with environmental and social requirements included in agreements or transactions.	563, 589
	FS4	Proses peningkatan kompetensi karyawan untuk menerapkan aturan/perundangan terkait sosial dan lingkungan yang berlaku Process(es) for improving staff competency to implement the environmental and social policies and procedures as applied to business lines.	589, 622
	FS6	Prosentase portofolio bisnis dibagi menurut wilayah, ukuran (misal: Micro/SME/Besar), dan sektor Percentage of the portfolio for business lines by specific region, size (e.g. micro/SME/ large) and by sector.	562
	FS7	Nilai portofolio produk dan jasa yang dirancang untuk mendukung kegiatan sosial dibagi menurut segmen bisnis Monetary value of products and services designed to deliver a specific social benefit for each business line broken down by purpose.	566
	FS10	Prosentase dan jumlah perusahaan dalam portofolio Bank yang memiliki kewajiban dan aktif berinteraksi dalam menjawab isu-isu terkait risiko maupun aspek sosial dan lingkungan Percentage and number of companies held in the institution's portfolio with which the reporting organization has interacted on environmental or social issues.	568
	FS15	Kebijakan mengenai produk dan layanan yang adil dan wajar Policies for the fair design and sale of financial products and services	576
	FS16	Inisiatif untuk mengadakan dan mendukung kegiatan literasi keuangan atau pembiayaan khusus Initiatives to enhance financial literacy by type of beneficiary.	578



# DAFTAR PENGUNGKAPAN SESUAI SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021

List of Disclosure According to SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021

No Indeks Index No.	Nama Indeks Index Name	Halaman Page
<b>Strategi Keberlanjutan   Sustainability Strategy</b>		
A.1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan   Explanation Sustainability Strategy	550-557
<b>Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan   Sustainability Performance Highlights</b>		
B.1	Ikhtisar Kinerja Ekonomi   Economic Performance Highlights	544
B.2	Ikhtisar Kinerja Lingkungan Hidup   Environmental Performance Highlights	545
B.3	Ikhtisar Kinerja Sosial   Social Performance Highlights	546-547
<b>Profil Perusahaan   Company Profile</b>		
C.1	Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan   Vision, Mission, and Value of Sustainability	80-82, 553 - 554
C.2	Alamat Perusahaan   Company's Address	68
C.3	Skala Perusahaan   Scale Enterprises	69
C.4	Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan   Products, services and business activities	68, 74-76
C.5	Keanggotaan Pada Asosiasi   Member of Association	n.a
C.6	Perubahan Organisasi Bersifat Signifikan   Change of Significant Organization	643
<b>Penjelasan Direksi   Directors Statement</b>		
D.1	Penjelasan Direksi   Directors Statement	40-57, 58-63
<b>Tata Kelola Keberlanjutan   Sustainability Governance</b>		
E.1	Penanggungjawab Penerapan Keuangan berkelanjutan   Management of Sustainable Finance Implementation	556
E.2	Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan berkelanjutan   Competency Development related Sustainable Finance	589, 622 - 623
E.3	Penilaian Risiko Atas Penerapan Keuangan berkelanjutan   Risk Assessment for Sustainable Finance Implementation	554, 462-480
E.4	Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan   Stakeholder Engagement	557
E.5	Permasalahan Terhadap Penerapan Keuangan berkelanjutan   Challenges of Sustainable Financial Implementation	553-557
<b>Kinerja Keberlanjutan   Sustainability Performance</b>		
F.1	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan   Building A Culture of Sustainability	589-590, 622-623
<b>Kinerja Ekonomi   Economic Performance</b>		
F.2	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi   Comparison of performance targets and production, portfolios, financial targets, or investment, revenue and profit and loss	212
F.3	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi Pada Instrumen Keuangan atau Proyek Yang Sejalan   Comparison of performance targets and production, portfolios, financial targets, or investment on Financial Instruments or projects in line with Sustainable Finance Implementation.	212
<b>Kinerja Lingkungan   Environmental Performance</b>		
<b>Umum   General</b>		
F.4	Biaya Lingkungan Hidup   Environmental Costs	596

**DAFTAR PENGUNGKAPAN SESUAI SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021**

List of Disclosure According to SEOJK No. 16/Seojk.04/2021

No Indeks Index No.	Nama Indeks Index Name	Halaman Page
	<b>Aspek Material   Material Aspects</b>	
F.5	Penggunaan Material Yang Ramah Lingkungan   The Use of Environmentally Friendly Materials	n.a
	<b>Aspek Energi   Energy Aspects</b>	
F.6	Jumlah dan Intensitas Energi Yang Digunakan   The number and the intensity of energy use	593
F.7	Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan   The efforts and achievements made energy efficiency including the use of renewable energy sources	592
	<b>Aspek Air   Water Aspects</b>	
F.8	Penggunaan Air   Water Consumption	594
	<b>Aspek Keanekaragaman Hayati   Biodiversity Aspects</b>	
F.9	Dampak Dari Wilayah Operasional Yang Dekat atau Berada Di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati   The impact of operational areas near or in the area of conservation or biodiversity	n.a
F.10	Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati   Biodiversity conservation efforts	n.a
	<b>Aspek Emisi   Emission Aspects</b>	
F.11	Jumlah dan Intensitas Emisi Yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya   The number and intensity of emissions produced by type	594
F.12	Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi Yang Dilakukan   The efforts and achievement of emission reductions undertaken	593
	<b>Aspek Limbah Dan Efluen   Aspect of Waste and Effluents</b>	
F.13	Jumlah Limbah dan Efluen Yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis   The amount of waste and effluent generated by type	n.a
F.14	Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen   Waste and effluent management mechanism	n.a
F.15	Tumpahan Yang Terjadi (Jika Ada)   Spill that occurred (if any)	n.a
	<b>Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup   Aspect of environmental complaints</b>	
F.16	Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup Yang Diterima Dan Diselesaikan   The number and material environmental complaints received and resolved.	592
	<b>Kinerja Sosial   Social Performance</b>	
F.17	Komitmen LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik Untuk Memberikan Layanan Atas Produk dan/atau Jasa Yang Setara Kepada Konsumen   The Company's commitment to deliver products and/or services equivalent to the consumer.	574-580
	<b>Aspek Ketenagakerjaan   Employment Aspects</b>	
F.18	Kesetaraan Kesempatan Bekerja   Equality of employment opportunities	613
F.19	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa   Child Labor and Forced Labor	n.a
F.20	Upah Minimum Regional   The Minimum Wage	626
F.21	Lingkungan Bekerja Yang Layak Dan Aman   Environmental work decent and safe	635, 610
F.22	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai   Training and Competency Development for Employees	615-617

**DAFTAR PENGUNGKAPAN SESUAI SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021**  
List of Disclosure According to SEOJK No. 16/Seojk.04/2021

No Indeks Index No.	Nama Indeks Index Name	Halaman Page
	<b>Aspek Masyarakat   Community Aspects</b>	
F.23	Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar   Operational Impacts to Local Communities	599
F.24	Pengaduan Masyarakat   Public complaints	n.a
F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)	599-604
	<b>Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa BerkelaJutan   Responsibility on the development of Sustainable Finance products and/or services:</b>	
F.26	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan berkelanjutan   Innovation and development of Sustainable Finance products and/or services	578-580
F.27	Produk/Jasa Yang Sudah Dievaluasi Keamanannya Bagi Pelanggan   Customer Safety	578-580
F.28	Dampak Produk/Jasa   Impact of Products/Services	580
F.29	Jumlah Produk Yang Ditarik Kembali   The number of products recalled	n.a
F.30	Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan   Survey of customer satisfaction	584
	<b>Lain-lain   Others</b>	
G.1	Verifikasi Tertulis Dari Pihak Independen, Jika Ada   Written verification from independent parties (if any)	645
G.2	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keberlanjutan	64-65
G.3	Lembar Umpan Balik   Feedback Form	665
G.5	Daftar Pengungkapan Sesuai POJK 51/2017   POJK 51/2017 Index	662-664



# Lembar Umpan Balik

## Feedback Form

Kami mohon kesediaan para pemangku kepentingan untuk memberikan umpan balik setelah membaca Laporan Keberlanjutan ini dengan mengirim email atau mengirim formulir ini melalui fax/pos.:

We would like to ask all stakeholders to kindly provide feedback after reading this Sustainability Report by sending email or this form by fax/mail.

Mohon pilih jawaban yang paling sesuai | Please choose the most appropriate answer

1. Laporan ini menarik dan mudah dimengerti | This report is interesting and easy to understand.  
 Tidak setuju | Disagree       Netral | Neutral       Setuju | Agree
2. Laporan ini sudah menggambarkan kinerja Bank dalam pembangunan keberlanjutan | This report describes the Bank's performance in  
 Tidak setuju | Disagree       Netral | Neutral       Setuju | Agree
3. Laporan ini meningkatkan kepercayaan Anda pada keberlanjutan Bank | This report increases Your trust to the Bank's sustainability.  
 Tidak setuju | Disagree       Netral | Neutral       Setuju | Agree
4. Topik material apa yang paling penting bagi Anda: (nilai 1=paling penting s/d 4=paling tidak penting) | Material topic(s) which is(are)
  - Ekonomi Kinerja | Economic Performance ( )
  - Anti-korupsi | Anti-corruption ( )
  - Produk Portofolio | Product Portfolio ( )
  - Energi | Energy ( )
  - Privasi Pelanggan | Customer Privacy ( )
  - Keuangan Literasi | Financial Literacy ( )
  - Pelatihan dan Pendidikan | Training and Education ( )
  - Keuangan Literasi | Financial Literacy ( )
  - Pelatihan dan Pendidikan | Training and Education ( )
5. Mohon berikan saran/usul/komentar anda atas laporan ini.  
Kindly provide your inputs/suggestions/comments about this report.

---

---

### Profil Anda | Your Profile

Nama | Name : \_\_\_\_\_

Pekerjaan | Occupation : \_\_\_\_\_

Nama Lembaga/Perusahaan | Name of Institution/Company : \_\_\_\_\_

Golongan Pemangku Kepentingan | Stakeholder Group: \_\_\_\_\_

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Pemerintah   Governance | <input type="checkbox"/> Perusahaan   Corporate | <input type="checkbox"/> Masyarakat   Community |
| <input type="checkbox"/> Industri   Industry     | <input type="checkbox"/> LSM   NGO              | <input type="checkbox"/> Lainnya   Others       |

### Corporate Secretary

#### Indonesia Eximbank – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Prosperity Tower Lantai 1 – District 8

Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta - 12190

Telp : +62 21 395 03600

Fax : +62 21 395 03699

Email : [corpsec@indonesiaeximbank.go.id](mailto:corpsec@indonesiaeximbank.go.id)

Web : [www.indonesiaeximbank.go.id](http://www.indonesiaeximbank.go.id)

[ HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN  
THIS PAGE HAS BEEN INTENTIONALLY LEFT BLANK ]



# LAPORAN KEUANGAN 2021

Financial Statements  
2021





**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR  
INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA**

**Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
Beserta Laporan Auditor Independen**

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR  
INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY**

***Consolidated Financial Statements  
December 31, 2021 and 2020  
For the Year Ended  
With Independent Auditor's Report***

**TINJAUAN MAKRO EKONOMI**

Operational Review per Business Segment

**Daftar Isi**

**Halaman/  
Page**

**Table of Contents**

**Surat Pernyataan Direksi**

**Directors' Statement Letter**

**Laporan Auditor Independen**

**Independent Auditor's Report**

**Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020**

**Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021 and 2020**

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

675

*Consolidated Statements of Financial Position*

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan  
Komprehensif Lain Konsolidasian

679

*Consolidated Statements of Profit or Loss and  
Other Comprehensive Income*

Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian

682

*Consolidated Statements of Changes in Equity*

Laporan Arus Kas Konsolidasian

684

*Consolidated Statements of Cash Flows*

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian

687

*Notes to the Consolidated Financial Statements*

**Informasi Tambahan:**

**Additional Information:**

Laporan Posisi Keuangan  
Entitas Induk

Lampiran I/  
Appendix I

*Statements of Financial Position  
of Parent Entity*

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan  
Komprehensif Lain Entitas Induk

Lampiran II/  
Appendix II

*Statements of Profit or Loss and Other  
Comprehensive Income of Parent Entity*

Laporan Perubahan Ekuitas  
Entitas Induk

Lampiran III/  
Appendix III

*Statements of Changes in Equity  
of Parent Entity*

Laporan Arus Kas  
Entitas Induk

Lampiran IV/  
Appendix IV

*Statements of Cash Flows  
of Parent Entity*



Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Prosperity Tower, Lantai 1  
District 8, SCBD Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telp. : (62 21) 395 03600  
Fax. : (62 21) 395 03699  
[www.indonesiaeximbank.go.id](http://www.indonesiaeximbank.go.id)

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG  
BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021  
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAK**

Nomor : BS.0103/CEO/02/2022

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT  
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR  
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2021  
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND SUBSIDIARY**

Number : BS.0103/CEO/02/2022

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Rijani Tirtoso  
Alamat Kantor : Prosperity Tower, Lantai 1,  
District 8, SCBD Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53  
Jakarta 12190 - Indonesia

Alamat Rumah : Manggarai Utara V D No.20  
RT 005 RW 001  
Manggarai, Tebet  
Jakarta Selatan

Nomor Telepon : +6221 395 03600  
Jabatan : Direktur Eksekutif

2. Nama : Agus Windiarto  
Alamat Kantor : Prosperity Tower, Lantai 1,  
District 8, SCBD Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53  
Jakarta 12190 - Indonesia

Alamat Rumah : Jl. Hang Lekiu II No.10A  
RT 008 RW 004  
Gunung, Kebayoran Baru  
Jakarta 12190 - Indonesia

Nomor Telepon : +6221 395 03600  
Jabatan : Direktur Pelaksana  
Bidang Keuangan & Operasional

We, the undersigned:

1. Name : Rijani Tirtoso  
Office address : Prosperity Tower, 1<sup>st</sup> Floor,  
District 8, SCBD Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53  
Jakarta 12190 - Indonesia

Residential address : Manggarai Utara V D No. 20  
RT 005 RW 001  
Manggarai, Tebet  
Jakarta Selatan

Telephone : +6221 395 03600  
Title : Executive Director

2. Name : Agus Windiarto  
Office address : Prosperity Tower, 1<sup>st</sup> Floor,  
District 8, SCBD Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53  
Jakarta 12190 - Indonesia

Residential address : Jl. Hang Lekiu II No.10A  
RT 008 RW 004  
Gunung, Kebayoran Baru  
Jakarta 12190 - Indonesia

Telephone : +6221 395 03600  
Title : Managing Director  
of Finance & Operation

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("Indonesia Eximbank" atau "LPEI") dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian LPEI dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

1. We are responsible for the preparation and the presentation of the consolidated financial statements of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("Indonesia Eximbank" or "LPEI") and Subsidiary;
2. The consolidated financial statements of LPEI and Subsidiary have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG  
BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021  
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAK**

Nomor : BS.OIC/CEO/02/2022

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian LPEI dan Entitas Anak telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
- b. Laporan keuangan konsolidasian LPEI dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam LPEI dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT  
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR  
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2021  
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND SUBSIDIARY**

Number : BS.OIC/CEO/02/2022

3. a. All information in the consolidated financial statements of LPEI and Subsidiary has been disclosed in a complete and truthful manner;
- b. The consolidated financial statements of LPEI and Subsidiary do not contain any material incorrect information or facts, nor do they omit material information or facts.
4. We are responsible for LPEI and Subsidiaries' internal control system.

This is our declaration, which has been made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of Board of Directors

Jakarta, 25 Februari / February 25 , 2022



**Rijani Tirtoso**  
Direktur Eksekutif/  
Executive Director

**Agus Windarto**  
Direktur Pelaksana  
Bidang Keuangan & Operasional/  
Managing Director  
of Finance & Operation

# Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan  
Registered Public Accountants

Nomor/Number : 00062/2.1030/AU.1/09/1298-1/1/II/2022

RSM Indonesia  
Plaza ASIA, Level 10  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59  
Jakarta 12190 Indonesia  
T +62 2151401340  
F +62 2151401350

[www.rsm.id](http://www.rsm.id)

## Laporan Auditor Independen/ *Independent Auditor's Report*

Pemegang Saham, Dewan Direktur, dan Direktur Pelaksana/  
*The Shareholder, Board of Directors, and Managing Directors*

### Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

#### Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

#### Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia and its subsidiary, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2021, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

#### Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

#### Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

#### **Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasianya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

#### **Penekanan atas suatu hal**

Kami membawa perhatian ke Catatan 30 dan 45 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir yang menjelaskan tentang kondisi perekonomian Indonesia yang terkena dampak dari pandemi COVID-19, serta dampaknya terhadap Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan entitas anaknya. Catatan tersebut juga telah mengungkapkan tindakan yang telah dilakukan dan rencana yang disusun Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan entitas anaknya untuk merespons kondisi tersebut. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

*An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.*

*We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.*

#### **Opinion**

*In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia and its subsidiary as of December 31, 2021, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

#### **Emphasis of a matter**

*We draw attention to Notes 30 and 45 to the accompanying consolidated financial statements which explains the condition of the Indonesian economy that affected by COVID-19 pandemic, as well as its impact to Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia and its subsidiary. The Notes has also disclosed the actions that have been taken and the plans of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia and its subsidiary in response to such condition. Our opinion is not modified in respect of this matter.*

**Hal lain**

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidan tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Entitas Induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

**Other matter**

*Our audit of the accompanying consolidated financial statements of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia and its subsidiary as of December 31, 2021, and for the year then ended, were performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Parent Entity), which comprises the statement of financial position as of December 31, 2021, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.*

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

**Bimo Iman Santoso**

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1298/  
Public Accountant License Number: AP.1298

Jakarta, 25 Februari 2022/February 25, 2022



**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Per 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
FINANCIAL POSITION**

As of December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	<b>31 Desember / December 31,</b>		<b>ASSETS</b>
		<b>2021</b>	<b>2020</b>	
<b>ASET</b>				
Kas	2a,2e	65	1,099	Cash Current account
Giro pada Bank Indonesia	2a,2d,2f,4	2,318	17,913	with Bank Indonesia
Giro pada bank	2a,2d,2f			Current accounts with banks
Penugasan Umum	2ag,5,38	105,565	486,015	General Assignment
Cadangan kerugian penurunan nilai		(9)	(222)	Allowance for impairment losses
		105,556	485,793	
Penugasan Khusus		568,550	5,035,104	National Interest Account
Cadangan kerugian penurunan nilai		--	(54)	Allowance for impairment losses
		568,550	5,035,050	
		674,106	5,520,843	
Penempatan pada bank	2a,2d,2g			Placements with banks
Penugasan Umum	2ag,6,38	4,799,155	2,405,621	General Assignment
Cadangan kerugian penurunan nilai		(946)	(6,635)	Allowance for impairment losses
		4,798,209	2,398,986	
Penugasan Khusus		11,842,000	5,593,100	National Interest Account
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1,263)	(11,418)	Allowance for impairment losses
		11,840,737	5,581,682	
		16,638,946	7,980,668	
Efek-efek	2a,2d,2h,7	560,050	572,273	Securities
Tagihan derivatif	2a,2d,2j 2ag,3,8a	6	--	Derivatives receivable
Pembiayaan dan piutang, pembiayaan dan piutang syariah dan piutang lainnya				Financing and receivables, financing and sharia receivables and other receivables
Pembiayaan dan piutang, dan pembiayaan dan piutang syariah				Financing and receivables, and financing and sharia receivables
Penugasan Umum	2a,2d,2k,2l			General Assignment
Penugasan Umum	2ag,3,9	68,583,154	73,448,592	
Pembiayaan dan piutang yang diberikan	38,41			Financing and Receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai		(14,851,827)	(15,560,422)	Allowance for impairment losses
		53,731,327	57,888,170	
Pembiayaan dan piutang syariah yang diberikan	2a,2d			Financing and sharia receivables
Cadangan penyisihan aset produktif	2m,2n,2ag 3,9,38,41	12,431,504	15,362,114	Allowance for doubtful accounts
		(2,696,204)	(2,067,206)	
		9,735,300	13,294,908	
Penugasan Khusus	2a,2d,2k,2l			National Interest Account
Pembiayaan dan piutang yang diberikan	2ag,3,9	2,948,504	1,597,367	
Cadangan kerugian penurunan nilai	38,41			Financing and receivables
		(400,152)	(44,536)	Allowance for impairment losses
		2,548,352	1,552,831	
Total - neto		66,014,979	72,735,909	Total - net

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these consolidated financial statements

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (lanjutan)  
Per 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)**

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
FINANCIAL POSITION (continued)  
As of December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	<b>31 Desember / December 31,</b>		
		<b>2021</b>	<b>2020</b>	
<b>ASET (lanjutan)</b>				<b>ASSETS (continued)</b>
<b>Piutang lainnya</b>				<b>Other receivables</b>
Piutang pembiayaan garansi	2a,2d,2k,2l 2ag,3,9i	298,034	303,054	Guarantee financing receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai	41	(40,159)	(7,242)	Allowance for impairment losses
		<b>257,875</b>	<b>295,812</b>	
Pajak dibayar dimuka	2a,2ah,3,15a,41	76,071	169,074	Prepaid tax
Biaya dibayar dimuka	2a, 2v,12	15,782	12,068	Prepaid expenses
Piutang asuransi dan penjaminan	2a,2q	285,656	35,540	Insurance and guarantee receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai	2ag,10a	--	(909)	Allowance for impairment losses
		<b>285,656</b>	<b>34,631</b>	
Aset reasuransi	2a,2r,2ag,10b	2,615	1,284	Reinsurance assets
Tagihan akseptasi	2a,2d,2s			Acceptances receivable
Penugasan Umum	2ag,11,38	460,540	562,727	General Assignment
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1,910)	(4,310)	Allowance for impairment losses
		<b>458,630</b>	<b>558,417</b>	
Aset tetap				Premises and equipment
Harga perolehan	2a,2t,3,13	1,525,187	1,532,395	Cost
Akumulasi penyusutan		(421,762)	(366,047)	Accumulated depreciation
		<b>1,103,425</b>	<b>1,166,348</b>	
Aset pajak tangguhan - neto	2a,2ah,3,15d,41	2,767,613	2,793,458	Deferred tax assets - net
	2a,2l,2m			
Aset lain-lain	2u,14	182,184	224,763	Other assets
<b>TOTAL ASET</b>		<b>89,040,921</b>	<b>92,084,560</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

*The accompanying notes form integral part of these consolidated financial statements*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
Per 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
FINANCIAL POSITION (continued)**  
As of December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember / December 31,		
		2021	2020	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
<b>LIABILITAS</b>				
Liabilitas segera	2a,2d,2w	32,570	37,936	<b>Current liabilities</b>
Liabilitas akseptasi	2a,2d,2s			<i>Acceptances payable</i>
Penugasan Umum	2ag,11,38	460,540	562,727	<i>General Assignment</i>
Utang pajak	2a,2ah,15b	12,950	11,664	<i>Taxes payable</i>
Efek-efek utang yang diterbitkan	2a,2d,2x	27,743,500	36,524,500	<i>Debt securities issued</i>
Biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi	2ag,16,38	(31,111)	(43,456)	<i>Unamortized debt issuance cost</i>
		27,712,389	36,481,044	
Pinjaman yang diterima	2a,2d,2y,17,38	28,799,571	28,599,773	<i>Fund borrowings</i>
Utang asuransi	2a,2d,2q	4,055	2,563	<i>Insurance payable</i>
Utang penjaminan	2a,2d,2p	62,363	560	<i>Guarantee payable</i>
Liabilitas asuransi	2a,2d,2q,2ag,10c	6,390	3,230	<i>Insurance liabilities</i>
Estimasi klaim penjaminan	2a,2p,2ag,18b	392,559	41,129	<i>Estimated guarantee claim</i>
Liabilitas imbalan kerja	2a,2af,3,28,38	157,675	182,553	<i>Liability for employee benefits</i>
Liabilitas sewa	2a,2d,2t,19	10,980	14,837	<i>Lease liabilities</i>
		2a,2d,2t, 2ag,20	1,268,501	<i>Other liabilities</i>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>58,920,543</b>	<b>67,288,011</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>EKUITAS</b>				
Kontribusi modal Pemerintah				<b>EQUITY</b>
Penugasan Umum	2a,21	23,640,939	20,946,276	<i>Government capital contribution</i>
Penugasan Khusus	2a,21	13,700,000	11,200,000	<i>General Assignment</i>
		37,340,939	32,146,276	<i>National Interest Account</i>
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak tangguhan	2a,7,15d	26,462	39,456	<i>Unrealized gain of financial assets at fair value through other comprehensive income, net of deferred tax</i>
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti, setelah pajak tangguhan	2a,2af,15d	119,529	91,645	<i>Remeasurement of defined benefit obligation, net of deferred tax</i>
Saldo laba				<i>Retained earnings</i>
Telah ditentukan penggunaannya:				<i>Appropriated:</i>
Cadangan umum	2a,22	322,161	322,161	<i>General reserve</i>
Cadangan tujuan	2a,22	758,235	758,235	<i>Specific reserve</i>
		1,080,396	1,080,396	
Belum ditentukan penggunaannya		(8,446,949)	(8,561,224)	<i>Unappropriated</i>
		30,120,377	24,796,549	
Kepentingan non-pengendali		1	--	<i>Non-controlling interest</i>
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>30,120,378</b>	<b>24,796,549</b>	<b>TOTAL EQUITY</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>89,040,921</b>	<b>92,084,560</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these  
consolidated financial statements

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN LABA RUGI DAN  
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
PROFIT OR LOSS AND OTHER  
COMPREHENSIVE INCOME**

For the Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	<b>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember / Years ended December 31,</b>		<b>INCOME AND EXPENSES FROM OPERATIONS</b>
		<b>2021</b>	<b>2020</b>	
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>				<b>INCOME AND EXPENSES FROM OPERATIONS</b>
Pendapatan bunga dan usaha syariah				<i>Interest income and income from sharia Interest income</i>
Pendapatan bunga				<i>General Assignment</i>
Penugasan Umum	2a,2c,2ab,23a	2,932,550	3,958,233	<i>National Interest Account</i>
Penugasan Khusus	2a,2c,2aa,23a	410,231	314,579	
		3,342,781	4,272,812	
Usaha syariah				<i>Sharia General Assignment</i>
Penugasan Umum	2a,2aa,23b	920,739	830,069	<i>Total interest income and income from sharia</i>
Total pendapatan bunga dan usaha syariah		4,263,520	5,102,881	
Beban bunga	2a,2b,2d,2z, 2aa,24	(3,057,215)	(4,262,993)	<i>Interest expense</i>
<b>PENDAPATAN BUNGA DAN USAHA SYARIAH - NETO</b>		<b>1,206,305</b>	<b>839,888</b>	<b>INTEREST INCOME AND INCOME FROM SHARIA - NET</b>
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA</b>				<b>OTHER OPERATING INCOME</b>
Pendapatan dari asuransi				<i>Income from insurance</i>
Pendapatan dari asuransi	2a,2ae,10d	12,357	9,843	<i>Income from insurance</i>
Premi reasuransi	2a,2ae,10d	(7,568)	(5,739)	<i>Reinsurance premiums</i>
Pendapatan dari asuransi - neto		4,789	4,104	<i>Income from insurance - net</i>
(Kenaikan)/penurunan pada liabilitas asuransi	2a,2q,2ac, 10h	(3,190)	2,979	<i>(Increase)/decrease in insurance liabilities</i>
Kenaikan/(penurunan) pada aset reasuransi	2a,2r,2ae,10g	1,348	(3,437)	<i>Increase/(decrease) in reinsurance assets</i>
Beban klaim asuransi dan lainnya	2a,2q,2ae,10e	(1,074)	(1,395)	<i>Claim expense from insurance and other</i>
Pendapatan dari penjaminan	2a,2p,10f	79,353	80,194	<i>Income from guarantee</i>
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	2a,2ag	24,715	70,889	<i>Gain on foreign exchange transactions - net</i>
Provisi dan komisi selain dari pembentukan dan piutang	2a, 2ab	71,443	86,861	<i>Non financing and receivables related fees and commission</i>
Lain-lain		38,036	77,400	<i>Others</i>
<b>TOTAL PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA - NETO</b>		<b>215,420</b>	<b>317,595</b>	<b>TOTAL OTHER OPERATING INCOME - NET</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these  
consolidated financial statements

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN LABA RUGI DAN  
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  
KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
PROFIT OR LOSS AND OTHER  
COMPREHENSIVE INCOME (continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember / Years ended December 31,		
	2021	2020	
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	2a,20,9,25	(257,752)	(423,080)
Penyisihan kerugian estimasi klaim penjaminan	2a,2p,18b	(114)	(1,946)
<b>BEBAN OPERASIONAL LAINNYA</b>			
Gaji dan tunjangan	2a,3,27	(467,309)	(395,732)
Umum dan administrasi	2a,26	(269,077)	(235,346)
Lain-lain		(22,377)	(45,809)
<b>TOTAL BEBAN OPERASIONAL LAINNYA</b>		<b>(758,763)</b>	<b>(676,887)</b>
<b>LABA OPERASIONAL</b>		<b>405,096</b>	<b>55,570</b>
<b>PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL - NETO</b>		<b>3,943</b>	<b>6,152</b>
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK</b>		<b>409,039</b>	<b>61,722</b>
<b>(BEBAN)/MANFAAT PAJAK</b>	2a,2ah,15c	(21,643)	226,666
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>		<b>387,396</b>	<b>288,388</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:</b>			
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI</b>			
Perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto		(16,657)	32,924
Pajak terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lainnya	2a,2ah,15d	3,663	(6,713)
		(12,994)	26,211

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these  
consolidated financial statements

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN  
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  
KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
PROFIT OR LOSS AND OTHER  
COMPREHENSIVE INCOME (continued)**  
For the Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	<b>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember / Years ended December 31,</b>		<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME NOT TO BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS</b>
		<b>2021</b>	<b>2020</b>	
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI</b>				
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti	2a,2af,28	35,749	103,864	Remeasurement of defined benefit obligation
Pajak terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lainnya	2a,2ah,15d	(7,865)	(20,238)	Tax related to components of other comprehensive income
		27,884	83,626	
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - NETO SETELAH PAJAK</b>		<b>14,890</b>	<b>109,837</b>	
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>402,286</b>	<b>398,225</b>	<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME - NET OF TAX</b>
<b>Penghasilan Tahun Berjalan yang diatribusikan kepada:</b>				<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR</b>
Pemilik entitas induk		387,396	288,388	<b>Income For The Year Attributable to:</b>
Kepentingan non-pengendali		--	--	Equity holders of the parent entity Non-controlling interest
<b>Total</b>		<b>387,396</b>	<b>288,388</b>	<b>Total</b>
<b>Total Penghasilan Komprehensif yang diatribusikan kepada:</b>				<b>Total Comprehensive Income For the Year Attributable To :</b>
Pemilik entitas induk		402,286	398,225	Equity holders of the parent entity Non-controlling interest
Kepentingan non-pengendali		--	--	<b>Total</b>
<b>Total</b>		<b>402,286</b>	<b>398,225</b>	

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these consolidated financial statements

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPORT INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

Keuntungan/(kehilangan)  
Yang belum direalisasi  
dari kenaikan nilai wajar  
aset keuangan  
yang diukur  
pada nilai wajar melalui  
penghasilan  
komprehensif lain  
setelah dikurangi  
piak tangguhan/  
Unrealized gain/(loss)  
from increase in the  
fair value of  
financial assets  
at fair value  
through  
other comprehensive  
income net of  
deferred tax

Pengukuran  
kembali kewajiban  
imbalan pasti,  
setelah pajak  
tangguhan/  
Re-measurement  
of defined benefit  
obligation,  
net of deferred tax

Cadangan lumum/  
General reserve  
322,161

Cadangan lumum/  
General reserve  
758,235

Belum ditentukan  
penggunaannya/  
Unappropriated  
758,235

Belum ditentukan  
penggunaannya/  
Unappropriated  
(4,540,428)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPORT INDONESIA**

**DAN ENTITAS ANAKNYA**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPORT INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**

For the Year Ended December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Kontribusi modal Pemerintah/ Government capital/ contribution	Saldo per 31 Desember 2019	Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti, setelah pajak tangguhan/ Re-measurement of defined benefit obligation, net of deferred tax		Saldo laba/Retained earnings Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	Total/ Total Capital/ Equity	Kepentingan nonpengendali/ Non-controlling interest	Total ekuitas/ Total Equity
			8,019	13,245					
2a.44	22,146,276	—	—	—	—	—	—	—	(4,540,428)
Dampak penyesuaian transaksi atas peraturan peresmian dan Penyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.71 Saldo per 1 Januari 2020 sebelum penyerapan peresmian dan Penyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.71	22,146,276	—	13,245	8,019	322,161	758,235	(8,849,612)	14,398,324	—
Modal lamahan Penugasan Lumum Penugasan Khusus	2a.21	4,000,000 6,000,000	—	—	—	—	4,000,000 6,000,000	—	4,000,000 6,000,000
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto setelah pajak/tangguhan	2a.2b.7.15d	—	26,211	—	—	—	26,211	—	26,211
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti, setelah pajak/tangguhan Laba tahun berjalan	2a.2a.115d.28	—	83,626	—	—	—	83,626	—	83,626
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>32,146,276</b>	<b>—</b>	<b>39,466</b>	<b>91,046</b>	<b>322,161</b>	<b>758,235</b>	<b>(8,561,224)</b>	<b>24,796,549</b>	<b>—</b>
									<b>Balance as of December 31, 2020</b>
Keuntungan/(kehilangan) Yang belum direalisasi dari kenaikan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah pajak/tangguhan/ Unrealized gain/(loss) from increase in the fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income net of deferred tax									<b>Balance as of December 31, 2019</b>
Kontribusi modal Pemerintah/ Government capital/ contribution									<b>Balance as of December 31, 2019</b>
Keuntungan/(kehilangan) Yang belum direalisasi dari kenaikan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah pajak/tangguhan/ Unrealized gain/(loss) from increase in the fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income net of deferred tax									<b>Impact of transitional adjustment on the implementation of Statement Financial Accounting Standards (SFAS) No.71</b>
Kontribusi modal Pemerintah/ Government capital/ contribution									<b>Balance as of January 1, 2020 after the implementation of Statement Financial Accounting Standards (SFAS) No.71</b>
Keuntungan/(kehilangan) Yang belum direalisasi dari kenaikan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah pajak/tangguhan/ Unrealized gain/(loss) from increase in the fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income net of deferred tax									<b>Additional capital General Assignment National Interest Account Unrealized gain of financial assets at fair value through other comprehensive income - net of deferred tax Remeasurement of defined benefit obligation, net of deferred tax Income for the year</b>
Kontribusi modal Pemerintah/ Government capital/ contribution									<b>Balance as of December 31, 2020</b>

The accompanying notes form integral part of these  
consolidated financial statements

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

<b>Kountungan/(keugian) Yang belum direalisasi dari kontrak nilai wajar aset keuangan yang diikut pada nilai wajar melalui pengisian lain komprehensif lain setelah dikurangi pajak tangguhan/ Unrealized gain/(loss) <i>from increase in the fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income net of deferred tax</i></b>									
<b>Kontribusi modal Pemerintah/ Government capital <i>contribution</i></b>									
<b>Catatan/ Notes</b>	<b>32.46.2.6</b>	<b>39.455</b>	<b>91.65</b>	<b>372.161</b>	<b>750.25</b>	<b>(6.56.724)</b>	<b>24.795.59</b>	<b>-</b>	<b>24.795.549</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>									
<b>Pemerintahan Negara Bukan Pajak berdasarkan UU No. 2 tahun 2009 pasal 20 ayat (2)</b>									
<b>Kapitalisasi Modal berdasarkan UU No. 2 tahun 2009 pasal 20 ayat (2)</b>									
<b>Bagian atau pemeliharaan dan catatan cadangan umum dan cadangan tujuan</b>									
<b>Modal tambahan</b>									
<b>Pengugatan Umum</b>									
<b>Pengugatan Khusus</b>									
<b>Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek yang dikuatkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto</b>									
<b>Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti setelah pajak tangguhan</b>									
<b>Setoran modal dan kepemilikan non-pengendali</b>									
<b>Laba/tarun/bayaran</b>									
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>									
<b>Kountungan/(keugian) Yang belum direalisasi dari kontrak nilai wajar aset keuangan yang diikut pada nilai wajar melalui pengisian lain komprehensif lain setelah dikurangi pajak tangguhan/ Unrealized gain/(loss) <i>from increase in the fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income net of deferred tax</i></b>									
<b>Kontribusi modal Pemerintah/ Government capital <i>contribution</i></b>									
<b>Catatan/ Notes</b>	<b>37.340.959</b>	<b>26.462</b>	<b>119.529</b>	<b>322.161</b>	<b>786.235</b>	<b>(8.446.949)</b>	<b>30.120.377</b>	<b>1</b>	<b>30.120.378</b>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
CHANGES IN EQUITY (continued)**  
*For the Year Ended December 31, 2021 and 2020*  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

*Balance as of December 31, 2020*

*Impact of transitional adjustment on  
Government's non-tax revenue  
based on Law No. 2 year 2009  
article 20 paragraph 2  
Capitalization based on  
Law No.2 year 2019  
article 20 paragraph  
Government's profit share  
Allocation for general reserve  
and specific reserve  
Additional capital*

*General Assignment  
National Interest Account  
Unrealized loss of  
financial assets at fair value  
through other comprehensive  
income - net  
of deferred tax  
Re-measurement of defined benefit  
obligation, net of deferred tax  
income for the year  
Income for the year  
Capital subscription from non-controlling interest  
Balance as of December 31, 2021*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

*The accompanying notes form integral part of these  
consolidated financial statements*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOW**  
For the Year Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

Catanan/ Notes	<b>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember / Years ended December 31,</b>		<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
Penerimaan bunga, provisi dan komisi	3,342,781	4,270,083	<i>Interest, fees and commissions received</i>
Pendapatan usaha syariah	920,739	830,069	<i>Sharia income</i>
Pendapatan operasional lainnya - neto	224,895	248,585	<i>Other operating income - net</i>
Pembayaran pajak penghasilan badan - neto	91,639	170,551	<i>Payments of corporate income tax - net</i>
Beban operasional lainnya - neto	(613,603)	(710,619)	<i>Other operating expenses - net</i>
Pembayaran bunga dan pembiayaan lainnya	(3,042,626)	(4,057,843)	<i>Interest and other financing charges</i>
Pendapatan bukan operasional - neto	3,071	6,301	<i>Non-operating income - net</i>
Arus kas dari operasi sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi	926,896	757,127	<i>Cash flows from operations before changes in operating assets and liabilities</i>
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi (Kenaikan) penurunan aset operasi:			<i>Changes in operating assets and liabilities</i>
Tagihan derivatif	(6)	1,410	<i>(Increase) decrease in operating assets: Derivatives receivable</i>
Pembiayaan dan piutang	3,519,321	6,757,729	<i>Financing and receivables</i>
Pembiayaan/piutang syariah	2,930,610	628,337	<i>Sharia financing/receivables</i>
Biaya dibayar dimuka	(3,714)	(1,023)	<i>Prepaid expenses</i>
Piutang asuransi dan penjaminan	(251,025)	(33,231)	<i>Insurance and guarantee receivables</i>
Aset reasuransi	(1,331)	3,569	<i>Reinsurance assets</i>
Tagihan akseptasi	99,787	99,872	<i>Acceptances receivable</i>
Aset lain-lain	40,345	(158,157)	<i>Other assets</i>
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:			<i>Increase (decrease) in operating liabilities:</i>
Liabilitas segera	(5,366)	2,906	<i>Current liabilities</i>
Liabilitas akseptasi	(102,187)	(95,562)	<i>Acceptances payable</i>
Utang pajak	1,286	(34,265)	<i>Taxes payable</i>
Liabilitas derivatif	--	(2,258)	<i>Derivatives payable</i>
Utang asuransi	1,492	413	<i>Insurances payable</i>
Utang penjaminan	61,803	63	<i>Guarantee payable</i>
Liabilitas asuransi	3,160	(3,285)	<i>Insurance liabilities</i>
Estimasi klaim penjaminan	351,430	34,281	<i>Estimated guarantee claim</i>
Liabilitas imbalan kerja	(24,878)	(109,776)	<i>Liability for employee benefits</i>
Liabilitas lain-lain	(81,494)	(726,432)	<i>Other liabilities</i>
<b>Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>7,466,129</b>	<b>7,121,718</b>	<b><i>Net cash provided by operating activities</i></b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

*The accompanying notes form integral part of these  
consolidated financial statements*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN  
(lanjutan)**

Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
CASH FLOW (continued)**  
*For the Year Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

Catatan/ Notes	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember / Years ended December 31,		
	2021	2020	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
Hasil penjualan aset tetap	875	--	<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Penjualan (pembelian) efek-efek tersedia untuk dijual	(4,657)	37,337	Proceeds from sale of premises and equipment Sales (purchases) of available for sale securities
Perolehan aset tetap	2a,13	(44,745)	Acquisitions of premises and equipment
<b>Kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas investasi</b>		(48,527)	<b>Net cash (used in) provided by investing activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
Penerimaan pinjaman yang diterima	38,343,278	32,679,208	<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Penerimaan efek-efek utang yang diterbitkan	--	148,000	Proceeds from fund borrowings
Pembayaran pinjaman yang diterima	(38,143,480)	(45,572,347)	Proceeds from debt securities issued
Pembayaran efek-efek utang yang diterbitkan yang jatuh tempo	(8,781,000)	(8,833,002)	Payments of fund borrowings
Setoran modal dari kepentingan non-pengendali	1	--	Payments for matured debt securities issued
Pembayaran liabilitas sewa	19	(3,857)	Capital subscription from non-controlling interest
Pembayaran ke pemerintah sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak	21	(64,888)	Payments of lease liability
Pembayaran bagian laba pemerintah	22	(13,570)	Payments for government as Goverment non Tax Revenue
Penerimaan kontribusi modal dari Pemerintah Republik Indonesia			Payments government's profit share
Penugasan Umum	2a,21	2,500,000	Contributed capital received from Government of the Republic of Indonesia
Penugasan Khusus	2a,21	2,500,000	General Assignment
Pembayaran emisi efek-efek utang yang diterbitkan	--	(1,592)	National Interest Account
<b>Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan</b>		(3,663,516)	Payments for issuance cost of debt securities issued
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas		(11,579,733)	<b>Net cash used in financing activities</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS</b>			Foreign exchange effect related to cash and cash equivalents
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>		3,778,801	<b>NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND EQUIVALENTS</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>		13,538,852	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR</b>
		17,317,653	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR</b>
		13,538,852	

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

*The accompanying notes form integral part of these  
consolidated financial statements*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN  
(lanjutan)**

Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
CASH FLOW (continued)**  
*For the Year Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

Catatan/ Notes	<b>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember / Years ended December 31,</b>		<b>COMPONENTS OF CASH AND CASH EQUIVALENTS:</b>
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	
<b>KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI:</b>			
Kas	65	1,099	<i>Cash</i>
Giro pada Bank Indonesia	2,318	17,913	<i>Current account with Bank Indonesia</i>
Giro pada bank	674,115	5,521,119	<i>Current accounts with banks</i>
Penempatan pada bank - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	16,641,155	7,998,721	<i>Placements with banks - maturing within three months or less since the acquisition date</i>
<b>Total kas dan setara kas</b>	<b>17,317,653</b>	<b>13,538,852</b>	<b>Total cash and cash equivalents</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

*The accompanying notes form integral part of these  
consolidated financial statements*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**1. Umum**

**1.a. Pendirian**

PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) ("Bank" atau "BEI") didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1999 tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan. Pendirian Bank ditetapkan dengan akta No. 49 tanggal 25 Juni 1999 oleh notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-13130.HT.01.01-TH.99 tanggal 19 Juli 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 1999, Tambahan No. 6652.

Pemegang saham menyetujui perubahan pasal 3 anggaran dasar Bank tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Bank berdasarkan (i) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Mei 2003 yang diaktakan dengan akta No. 45 tanggal 21 Mei 2003 oleh notaris Imas Fatimah, S.H., yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-11539.HT.01.04.TH.2003 tanggal 23 Mei 2003 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tanggal 2 September 2003, Tambahan No. 7838 dan (ii) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Maret 2007 yang diaktakan dengan akta No. 15 tanggal 10 Mei 2007 oleh notaris Imas Fatimah, S.H., yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. W7-05624.HT.01.04- TH.2007 tanggal 21 Mei 2007 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 61 tanggal 31 Juli 2007, Tambahan No. 7655.

**1. General**

**1.a. Establishment**

*PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) ("the Bank" or "BEI") was established based on Government Regulation No. 37 of 1999 dated May 25, 1999, regarding the State Capital Participation of the Government of the Republic of Indonesia in the Establishment of a Limited Liability Company (Persero) in the Banking Sector. The establishment of the Bank was notarized under deed No. 49 dated June 25, 1999 of notary Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C-13130.HT.01.01-TH.99 dated July 19, 1999 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 81 dated October 8, 1999, Supplement No. 6652.*

*The stockholder approved the revision of article 3 of the Bank's Articles of Association concerning the Bank's objectives and scope of activities based on (i) Shareholder's Extraordinary General Meeting held on May 19, 2003 as provided in the deed No. 45 dated May 21, 2003 of notary Imas Fatimah, S.H, which was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C-11539.HT.01.04.TH.2003 dated May 23, 2003 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 70 dated September 2, 2003, Supplement No. 7838 and (ii) Stockholder's Extraordinary General Meeting held on March 22, 2007 as provided in the deed No. 15 dated May 10, 2007 of notary Imas Fatimah, S.H., which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. W7-05624.HT.01.04-TH.2007 dated May 21, 2007 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 61 dated July 31, 2007, Supplement No. 7655.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**1. Umum (lanjutan)**

**1.a. Pendirian (lanjutan)**

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Juli 2008, yang diakta dengan akta No. 2 tanggal 1 Agustus 2008 oleh notaris Sutjipto, S.H., M.Kn. yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU- 73679.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 14 Oktober 2008, pemegang saham menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2003, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005.

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar Bank, maksud dan tujuan Bank adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang pembiayaan perdagangan ekspor impor melalui pemberian pinjaman/pembiayaan, penjaminan dan/atau asuransi serta jasa konsultasi yang berkaitan dengan pembiayaan perdagangan luar negeri, penerus pinjaman pemerintah, termasuk menghimpun dana pihak ketiga dalam bentuk giro, simpanan berjangka atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memperoleh pinjaman dan menerbitkan efek-efek baik di dalam maupun di luar negeri serta melaksanakan kegiatan perbankan syariah.

Bank memperoleh izin usaha sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/12/KEP.GBI/1999 tanggal 18 Agustus 1999 dan beroperasi secara komersial sejak tanggal 10 September 1999. Berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 2/6/KEP.DpG/2000 tanggal 24 April 2000, Bank memperoleh status sebagai bank devisa.

Pada tanggal 21 September 2007, Bank telah mendapat izin usaha syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 9/1494/DPbs.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**1. General (continued)**

**1.a. Establishment (continued)**

*In the Stockholder's Extraordinary General Meeting held on July 18, 2008 as mentioned in deed No. 2 dated August 1, 2008 of notary Sutjipto, S.H., M.Kn. which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-73679.AH.01.02.Year 2008 dated October 14, 2008, the stockholders approved the entire changes in the Bank's Articles of Association to conform with Law No. 19 Year 2003, Law No. 40 Year 2007 and Government Regulation No. 45 Year 2005.*

*According to article 3 of the Bank's Articles of Association, the Bank's objectives and scope are to execute and provide assistance to the government in the implementation of its policies and programs in the economic sector and in the national development in general, particularly in export and import trade financing through the disbursement/financing of trade financing and providing guarantees/insurance as well as providing consultations on foreign trade financing, the disbursement of two-step financing from the government, including collecting third-parties funds in the form of demand deposits, time deposits or other forms, obtaining borrowings and issuing securities in the local or foreign markets, and conducting sharia banking activities.*

*The Bank has a business license to conduct commercial banking activities based on the Decision Letter No. 1/12/KEP.GBI/1999 dated August 18, 1999 of the Governor of Bank Indonesia and started commercial operations on September 10, 1999. The Bank obtained its status as a foreign exchange bank based on the Decision Letter of the Deputy Governor of Bank Indonesia No. 2/6/KEP.DpG/2000 dated April 24, 2000.*

*On September 21, 2007, the Bank obtained its sharia business license from the Bank Indonesia through Decision Letter No. 9/1494/DPbs.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**1. Umum (lanjutan)**

**1.a. Pendirian (lanjutan)**

Gubernur Bank Indonesia memutuskan bahwa izin usaha PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) dicabut sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan menegaskan bahwa dengan dicabutnya izin usaha PT Bank Ekspor Indonesia (Persero), maka seluruh aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) beralih kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI") sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang LPEI (Catatan 1d).

Kantor LPEI berlokasi di Prosperity Tower, District 8, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta - 12190. Pada tanggal 31 Desember 2021, LPEI mempunyai tiga kantor wilayah yaitu Kantor Wilayah I yang membawahi Wilayah Jakarta, Kantor Cabang Medan dan Kantor Pemasaran Batam; Kantor Wilayah II membawahi Kantor Cabang Surakarta dan Kantor Pemasaran Balikpapan; dan Kantor Wilayah III membawahi Wilayah Surabaya, Kantor Cabang Makassar dan Kantor Pemasaran Denpasar.

Pada tanggal 31 Desember 2020, LPEI mempunyai dua kantor wilayah yaitu di Kantor Wilayah Jakarta dan Kantor Wilayah Surabaya. Kantor Wilayah Jakarta membawahi Wilayah Jakarta, Kantor Cabang Medan dan Kantor Pemasaran Batam; dan Kantor Wilayah Surabaya membawahi Wilayah Surabaya, Kantor Cabang Surakarta, Kantor Cabang Makassar dan Kantor Pemasaran Denpasar.

**1.b. Penawaran umum obligasi, penerbitan Medium Term Notes dan penawaran umum Sukuk Mudharabah**

LPEI (dahulu Bank) telah menerbitkan obligasi, Medium Term Notes dan Sukuk Mudharabah sejak tahun 2003 sampai dengan 31 Desember 2021. Berikut adalah rincian obligasi, Medium Term Notes dan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan dan belum jatuh tempo sampai dengan 31 Desember 2021:

**1. General (continued)**

**1.a. Establishment (continued)**

*The Governor of Bank Indonesia decided that the license business of PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) revoked as a follow up to Law No. 2 Year 2009 dated January 12, 2009 concerning Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia and confirms that with the revocation of the licence of PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) switch to Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI") as regulated in Law No. 2 Year 2009 dated January 12, 2009 concerning LPEI (Note 1d).*

*LPEI's office is located at the Prosperity Tower, District 8, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta - 12190. As of June 30, 2021, LPEI has three regional offices which are Regional Office I covers Jakarta, Medan Branch and Batam Marketing Office; Regional Office II covers Surakarta Branch Office and Balikpapan Marketing Office; Regional Office III covers Surabaya, Makassar Branch and Denpasar Marketing Office.*

*As of December 31, 2020, LPEI has two regional offices which are Jakarta Regional Office covers Jakarta, Medan branch, and Batam marketing office; and Surabaya Regional Office covers Surabaya, Surakarta Branch Office, Makassar Branch Office and Denpasar Marketing Office.*

**1.b. Public offerings of the bonds, issuance of Medium Term Notes and public offerings of the Sukuk Mudharabah**

*LPEI (formerly the Bank) issued bonds, Medium Term Notes and Sukuk Mudharabah from 2003 until December 31, 2021. Below are the details of bonds issued, Medium Term Notes and Sukuk Mudharabah which have not yet matured until December 31, 2021:*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**1. Umum (lanjutan)**

**1.b. Penawaran umum obligasi, penerbitan Medium Term Notes dan penawaran umum Sukuk Mudharabah (lanjutan)**

**i. Obligasi**

<b>Nama Obligasi</b>	<b>Jumlah nominal/ Nominal amount</b>	<b>Tanggal jatuh tempo/ Maturity date</b>	<b>Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum</b>	<b>Name of Bonds</b>
Obligasi berkelanjutan IEB III Tahap III - 2016 Seri D	1,038,000	22 Nopember/ November 2023	Tetap/Fixed - 8,50%	IEB Phase III Shelf Registration Offering Bonds III - 2016 Series D
Obligasi berkelanjutan IEB III Tahap IV - 2017 Seri C	748,000	23 Februari/ February 2022	Tetap/Fixed - 8,90%	IEB Phase IV Shelf Registration Offering Bonds III - 2017 Series C
Obligasi berkelanjutan IEB III Tahap IV - 2017 Seri D	1,007,000	23 Februari/ February 2024	Tetap/Fixed - 9,20%	IEB Phase IV Shelf Registration Offering Bonds III - 2017 Series D
Obligasi berkelanjutan IEB III Tahap IV - 2017 Seri E	1,266,000	23 Februari/ February 2027	Tetap/Fixed - 9,40%	IEB Phase IV Shelf Registration Offering Bonds III - 2017 Series E
Obligasi berkelanjutan IEB III Tahap V - 2017 Seri B	436,000	15 Agustus/ August 2022	Tetap/Fixed - 7,90%	IEB Phase V Shelf Registration Offering Bonds III - 2017 Series B
Obligasi berkelanjutan IEB III Tahap V - 2017 Seri C	1,786,000	15 Agustus/ August 2024	Tetap/Fixed - 8,25%	IEB Phase V Shelf Registration Offering Bonds III - 2017 Series C
Obligasi berkelanjutan IEB III Tahap VI - 2018 Seri B	1,650,000	14 Februari/ February 2023	Tetap/Fixed - 6,70%	IEB Phase VI Shelf Registration Offering Bonds III - 2018 Series B
Obligasi berkelanjutan IEB III Tahap VI - 2018 Seri C	206,000	14 Februari/ February 2025	Tetap/Fixed - 6,90%	IEB Phase VI Shelf Registration Offering Bonds III - 2018 Series C
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap I - 2018 Seri B	35,000	6 Juni/ June 2023	Tetap/Fixed - 7,70%	IEB Phase I Shelf Registration Offering Bonds IV - 2018 Series B
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap I - 2018 Seri C	1,756,000	6 Juni/ June 2025	Tetap/Fixed - 8,30%	IEB Phase I Shelf Registration Offering Bonds IV - 2018 Series C
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap II - 2018 Seri C	275,700	5 September / September 2023	Tetap/Fixed - 8,40%	IEB Phase II Shelf Registration Offering Bonds IV - 2018 Series C
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap II - 2018 Seri D	1,324,000	5 September / September 2025	Tetap/Fixed - 8,75%	IEB Phase II Shelf Registration Offering Bonds IV - 2018 Series D
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap III - 2018 Seri C	28,000	8 Nopember/ November 2023	Tetap/Fixed - 9,25%	IEB Phase III Shelf Registration Offering Bonds IV - 2018 Series C
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap III - 2018 Seri D	380,000	8 Nopember/ November 2025	Tetap/Fixed - 9,75%	IEB Phase III Shelf Registration Offering Bonds IV - 2018 Series D

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**1. Umum (lanjutan)**

**1.b. Penawaran umum obligasi, penerbitan Medium Term Notes dan penawaran umum Sukuk Mudharabah (lanjutan)**

**i. Obligasi (lanjutan)**

Nama Obligasi	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Name of Bonds
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap IV - 2019 Seri B	935,000	23 April/April 2022	Tetap/Fixed - 8,40%	IEB Phase IV Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series B
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap IV - 2019 Seri C	1,523,000	23 April/April 2024	Tetap/Fixed - 8,90%	IEB Phase IV Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series C
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap IV - 2019 Seri D	278,000	23 April/April 2026	Tetap/Fixed - 9,25%	IEB Phase IV Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series D
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap IV - 2019 Seri E	349,000	23 April/April 2029	Tetap/Fixed - 9,50%	IEB Phase IV Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series E
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap IV - 2019 Seri F	625,000	23 April/April 2034	Tetap/Fixed - 9,80%	IEB Phase V Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series F
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap V - 2019 Seri B	621,000	9 Juli/July 2022	Tetap/Fixed - 8,45%	IEB Phase V Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series B
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap V - 2019 Seri C	330,000	9 Juli/July 2024	Tetap/Fixed - 8,70%	IEB Phase V Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series C
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap V - 2019 Seri D	737,000	9 Juli/July 2026	Tetap/Fixed - 9,20%	IEB Phase VI Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series D
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap VI - 2019 Seri B	15,000	3 September/September 2022	Tetap/Fixed - 7,80%	IEB Phase VI Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series B
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap VI - 2019 Seri C	6,000	3 September/September 2024	Tetap/Fixed - 8,10%	IEB Phase VI Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series C
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap VI - 2019 Seri D	714,500	3 September/September 2026	Tetap/Fixed - 8,50%	IEB Phase VII Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series D
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap VII - 2019 Seri B	101,300	29 Oktober/October 2022	Tetap/Fixed - 7,80%	IEB Phase VII Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series B
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap VII - 2019 Seri C	25,500	29 Oktober/October 2024	Tetap/Fixed - 8,10%	IEB Phase VII Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series C
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap VII - 2019 Seri D	112,000	29 Oktober/October 2026	Tetap/Fixed - 8,50%	IEB Phase VII Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series D
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap VII - 2019 Seri E	219,750	29 Oktober/October 2029	Tetap/Fixed - 8,75%	IEB Phase VIII Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series E
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap VIII - 2019 Seri A	88,000	6 Desember/December 2022	Tetap/Fixed - 7,50%	IEB Phase VIII Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series A

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**1. Umum (lanjutan)**

**1.b. Penawaran umum obligasi, penerbitan Medium Term Notes dan penawaran umum Sukuk Mudharabah (lanjutan)**

**i. Obligasi (lanjutan)**

Nama Obligasi	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Name of Bonds
Obligasi berkelanjutan				<i>IEB Phase VIII Shelf</i>
IEB IV Tahap VIII - 2019		6 Desember/ December 2024	Tetap/Fixed -	<i>Registration Offering Bonds IV</i>
Seri B	1,551,000		7,90%	- 2019 Series B
Obligasi berkelanjutan				<i>IEB Phase VIII Shelf</i>
IEB IV Tahap VIII - 2019		6 Desember/ December 2026	Tetap/Fixed -	<i>Registration Offering Bonds IV</i>
Seri C	22,500		8,20%	- 2019 Series C
Obligasi Berkelanjutan Indonesia		8 Juli/ July 2023	Tetap/Fixed -	<i>Indonesia Eximbank Phase I</i>
Eximbank V Tahap I - 2020	48,000		7,60%	<i>Shelf Registration Offering V - 2020</i>
<b>Total ekuivalen Rp</b>	<b>20,237,250</b>			<b>Total equivalent in Rp</b>

**ii. Medium term notes**

Nama Medium Term Notes	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Name of Medium Term Notes
Euro Medium Term Note (EMTN) Programme IEB - 2017 (USD500.000.000)		6 April/ April 2024	Tetap/Fixed	<i>IEB Medium Term Note (EMTN)</i> Programme - 2017 (USD500,000,000)
<b>Total ekuivalen Rp</b>	<b>7,126,250</b>			<b>Total equivalent Rp</b>

**iii. Sukuk mudharabah**

Nama Sukuk Mudharabah	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Name of Sukuk Mudharabah
Sukuk Mudharabah Indonesia				<i>Shelf Sukuk Mudharabah I</i>
Eximbank I Tahap II - 2018		8 Nopember/ November 2023		<i>Indonesia Eximbank</i>
Seri C	14,000		9,25%	<i>Phase II - 2018 Series C</i>
Sukuk Mudharabah Indonesia				<i>Shelf Sukuk Mudharabah I</i>
Eximbank I Tahap II - 2018		8 Nopember/ November 2025		<i>Indonesia Eximbank</i>
Seri D	155,000		9,75%	<i>Phase II - 2018 Series D</i>
Sukuk Mudharabah Indonesia				<i>Shelf Sukuk Mudharabah I</i>
Eximbank I Tahap III - 2019		23 April/ April 2022		<i>Indonesia Eximbank</i>
Seri B	145,000		8,40%	<i>Phase III - 2019 Series B</i>
Sukuk Mudharabah Indonesia				<i>Shelf Sukuk Mudharabah I</i>
Eximbank I Tahap III - 2019		23 April/ April 2024		<i>Indonesia Eximbank</i>
Seri C	66,000		8,90%	<i>Phase III - 2019 Series C</i>
<b>Total ekuivalen Rp</b>	<b>380,000</b>			<b>Total equivalent Rp</b>

Seluruh penerbitan obligasi, penerbitan Medium Term Notes dan penerbitan Sukuk Mudharabah tersebut telah mendapat pernyataan efektif berdasarkan surat terlampir:

*All the offerings of the above bonds, issuance of the Medium Term Notes and the offering of the Sukuk Mudharabah have been declared effective based on letters as follows:*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**1. Umum (lanjutan)**

**1.b. Penawaran umum obligasi, penerbitan Medium Term Notes dan penawaran umum Sukuk Mudharabah (lanjutan)**

**i. Obligasi**

<b>Nama Obligasi/ Name of Bonds</b>	<b>Nomor surat/ Letter number</b>	<b>Tanggal/ Date</b>	<b>Tempat terdaftar/ Register</b>
Obligasi berkelanjutan IEB III, Tahap III - 2016/ <i>IEB Phase III Shelf -</i> <i>Registration Offering Bonds III - 2016</i>	No. S-250/D.04/2016	30 Mei 2016/ May 2016	Otoritas Jasa Keuangan/ Financial Services Authority
Obligasi berkelanjutan IEB III, Tahap IV dan V - 2017/ <i>IEB Phase IV and V Shelf -</i> <i>Registration Offering Bonds III - 2017</i>	No. S-250/D.04/2016	30 Mei 2016/ May 2016	Otoritas Jasa Keuangan/ Financial Services Authority
Obligasi berkelanjutan IEB III, Tahap VI - 2018/ <i>IEB Phase VI Shelf -</i> <i>Registration Offering Bonds III - 2018</i>	No. S-250/D.04/2016	30 Mei 2016/ May 2016	Otoritas Jasa Keuangan/ Financial Services Authority
Obligasi berkelanjutan IEB IV, Tahap I, II, dan III - 2018/ <i>IEB Phase I, II, and III Shelf -</i> <i>Registration Offering Bonds IV - 2018</i>	No. S-56/D.04/2018	25 Mei 2018/ May 2018	Otoritas Jasa Keuangan/ Financial Services Authority
Obligasi berkelanjutan IEB IV, Tahap IV, V, VI, VII dan VIII - 2019/ <i>IEB Phase IV, V, VI, VII and VIII Shelf -</i> <i>Registration Offering Bonds IV - 2019</i>	No. S-56/D.04/2018	25 Mei 2018/ May 2018	Otoritas Jasa Keuangan/ Financial Services Authority
Obligasi berkelanjutan IEB V, Tahap I - 2020/ <i>IEB Phase I Shelf -</i> <i>Registration Offering Bonds V - 2020</i>	No. S-183/D.04/2020	30 Juni 2020/ June 2020	Otoritas Jasa Keuangan/ Financial Services Authority

**ii. Medium term notes**

**1. General (continued)**

**1.b. Public offerings of the bonds, issuance of Medium Term Notes and public offerings of the Sukuk Mudharabah (continued)**

**i. Bonds**

**ii. Medium term notes**

<b>Nama Obligasi/ Name of Bonds</b>	<b>Nomor surat/ Letter No.</b>	<b>Tanggal/ Date</b>	<b>Tempat terdaftar/ Register</b>
EMTN Program IEB - 2017/ IEB EMTN Programme - 2017	Ref:RMR/IR/THJ/ 2012040022	7 April 2017/ April 2017	Singapore Exchange Securities Trading

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**1. Umum (lanjutan)**

**1.b. Penawaran umum obligasi, penerbitan Medium Term Notes dan penawaran umum Sukuk Mudharabah (lanjutan)**

**iii. Sukuk mudharabah**

<b>Nama Sukuk Mudharabah/ Name of Sukuk Mudharabah</b>	<b>Nomor surat/ Letter number</b>	<b>Tanggal/ Date</b>	<b>Tempat terdaftar/ Register</b>
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I dan II - 2018/ Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase I and II - 2018	No. S-56/D.04/2018	25 Mei 2018/ May 2018	Otoritas Jasa Keuangan/ Financial Services Authority
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III - 2019/ Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III - 2019	No. S-56/D.04/2018	25 Mei 2018/ May 2018	Otoritas Jasa Keuangan/ Financial Services Authority

**1.c. Dewan direktur, direktur pelaksana, komite audit dan pegawai**

Susunan Dewan Direktur LPEI pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**1. General (continued)**

**1.b. Public offerings of the bonds, issuance of Medium Term Notes and public offerings of the Sukuk Mudharabah (continued)**

**iii. Sukuk mudharabah**

**1.c. Board of directors, managing directors, audit committee and employees**

*The composition of the Board of Directors of LPEI as of December 31, 2021 and 2020, are as follows:*

	<b>31 Desember / December 31,</b>	
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif *)	Daniel James Rompas	Daniel James Rompas
Anggota Dewan Direktur **)	Kasan	Kasan
Anggota Dewan Direktur ***)	Arus Gunawan	Arus Gunawan
Anggota Dewan Direktur ****)	Suminto	Suminto
Anggota Dewan Direktur *****)	Felia Salim	Felia Salim
Anggota Dewan Direktur *****)	Rijani Tirtoso	Rijani Tirtoso

\*) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 933/KMK.06/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Dewan Direktur Merangkap Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 23 Desember 2019, memberhentikan dengan hormat Sinhya Roesly dan mengangkat Daniel James Rompas sebagai Ketua Dewan Direktur Merangkap Direktur Eksekutif sejak 23 Desember 2019 dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024.

\*) Based on Minister of Finance Decision Letter No.933/KMK.06/2019 regarding Termination and Appointment of the Chairman of the Board of Directors concurrently as Executive Director Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated December 23, 2019, Sinhya Roesly was honorably dismissed and appointed Daniel James Rompas as Chairman of the Board of Directors and concurrently as Executive Director since December 23, 2019 with a tenure up to August 31, 2024.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**1. Umum (lanjutan)**

**1.c. Dewan direktur, direktur pelaksana, komite audit dan pegawai (lanjutan)**

- \*\*) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 274/KMK.06/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 5 Juni 2020, mengangkat Kasan sebagai anggota dewan direktur sejak 5 Juni 2020 dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023.
- \*\*\*) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 530/KMK.06/2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 19 November 2020, mengangkat Arus Gunawan sebagai anggota dewan direktur sejak 19 November 2020 dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
- \*\*\*\*) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK.06/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 14 Agustus 2018, memberhentikan Susiwijono Moegiarso dan mengangkat Suminto sebagai anggota dewan direktur sejak 1 September 2018 dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
- \*\*\*\*\*) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 522/KMK.06/2018 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 25 Juli 2018, mengangkat Felia Salim sebagai anggota dewan direktur sejak 25 Juli 2018 dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
- \*\*\*\*\*\*) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 934/KMK.06/2019 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 23 Desember 2019, mengangkat Rijani Tirtoso sebagai anggota dewan direktur sejak 23 Desember 2019 dengan masa jabatan sampai dengan 23 Desember 2024.
- \*\*) Based on Minister of Finance Decision Letter No. 274/KMK.06/2020 regarding Termination and Appointment of Members of the Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated June 5, 2020, Kasan was appointed as a member of the board of directors since June 5, 2020 for a tenure up to August 31, 2023.
- \*\*\*) Based on Minister of Finance Decision Letter No. 530/KMK.06/2020 regarding Appointment of Members of the Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated November 19, 2020, Arus Gunawan was appointed as a member of the board of directors since November 19, 2020 for a tenure of 5 (five).
- \*\*\*\*) Based on Minister of Finance Decision Letter No. 554/KMK.06/2018 regarding Termination and Appointment of Members of the Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated August 14, 2018, dismissed Susiwijono Moegiarso and Suminto was appointed as a member of the board of directors since September 1, 2018 for a tenure of 5 (five) years.
- \*\*\*\*\*) Based on Minister of Finance Decision Letter No. 522/KMK.06/2018 regarding Appointment of Members of the Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated July 25, 2018, Felia Salim was appointed as a member of the board of directors since July 25, 2018 for a tenure of 5 (five) years.
- \*\*\*\*\*\*) Based on Minister of Finance Decision Letter No. 934/KMK.06/2019 regarding Appointment of Members of the Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated December 23, 2019, Rijani Tirtoso was appointed as a member of the board of directors since December 23, 2019 for a tenure up to December 23, 2024.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**1. Umum (lanjutan)**

**1.c. Dewan direktur, direktur pelaksana, komite audit dan pegawai (lanjutan)**

Berdasarkan pasal 25 ayat (5) Undang-Undang No. 2 tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menyatakan bahwa salah seorang dari anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif.

Susunan Direktur Pelaksana LPEI pada tanggal tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember / December 31,</b>	
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Direktur Pelaksana I *)	Dikdik Yustandi	Managing Director I *)
Direktur Pelaksana II **)	Maqin U. Norhadi	Managing Director II **)
Direktur Pelaksana III ***)	Agus Windarto	Managing Director III ***)
Direktur Pelaksana IV ****)	Henry Sihotang	Managing Director IV ****)
Direktur Pelaksana V *****)	Chesna F. Anwar	Managing Director V *****)

\*) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No. 0010/KDD/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menetapkan Dikdik Yustandi sebagai Direktur Pelaksana sejak 1 September 2019 dengan masa jabatan sampai dengan 31 Agustus 2024.

\*\*) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No. 0011/KDD/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menetapkan Djoko Retnadi sebagai Direktur Pelaksana II sejak 1 September 2019 dengan masa jabatan sampai dengan 31 Agustus 2024. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No. 001/KDD/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Pemberhentian Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia memberhentikan dengan hormat Djoko Retnadi sebagai Direktur Pelaksana II.

**1. General (continued)**

**1.c. Board of directors, managing directors, audit committee and employees (continued)**

According to article 25 paragraph (5) of Law No. 2 of year 2009 dated January 12, 2009 regarding Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), it states that one of the members of the Board of Directors referred to in paragraph (2) b is determined by the Minister as Chairman of the Board of Director and Executive Director.

The Managing Directors of LPEI as of December 31, 2021 and 2020, are as follows:

<b>31 Desember / December 31,</b>	
<b>2021</b>	<b>2020</b>

Dikdik Yustandi	Managing Director I *)
Djoko Retnadi	Managing Director II **)
Agus Windarto	Managing Director III ***)
Henry Sihotang	Managing Director IV ****)
Chesna F. Anwar	Managing Director V *****)

\*) Based on Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Letter No. 0010/KDD/08/2019 dated August 30, 2019 regarding Appointment of Managing Director of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Dikdik Yustandi was assigned as Managing Director I since September 1, 2019 for his term until August 31, 2024.

\*\*) Based on Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Letter No. 0011/KDD/08/2019 dated August 30, 2019 regarding Appointment of Managing Director of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Djoko Retnadi was assigned as Managing Director II since September 1, 2019 for his term until August 31, 2024. Based on the Decree of the Board of Directors of the Indonesian Export Financing Agency No. 001/KDD/02/2021 dated February 16, 2021 regarding the Discharge of the Managing Director of the Indonesian Export Financing Agency, respectfully discharge Djoko Retnadi as Managing Director II.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**1. Umum (lanjutan)**

**1.c. Dewan direktur, direktur pelaksana, komite audit dan pegawai (lanjutan)**

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No. 0004/KDD/04/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Pengangkatan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menetapkan Maqin U. Norhadi sebagai Direktur Pelaksana II dengan masa jabatan sampai dengan 31 Agustus 2024.

\*\*\*) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No. 0012/KDD/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menetapkan Agus Windiarto sebagai Direktur Pelaksana III sejak 1 September 2019 dengan masa jabatan sampai dengan 31 Agustus 2024.

\*\*\*\*) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No. 0013/KDD/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menetapkan Henry Sihotang sebagai Direktur Pelaksana IV sejak 1 September 2019 dengan masa jabatan sampai dengan 31 Agustus 2024.

**1. General (continued)**

**1.c. Board of directors, managing directors, audit committee and employees (continued)**

Based on Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Letter No. 0004/KDD/04/2021 dated April 21, 2021 regarding Appointment of Managing Director of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Maqin U. Norhadi was assigned as Managing Director II for his term until August 31, 2024.

\*\*\*) Based on Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Letter No. 0012/KDD/08/2019 dated August 30, 2019 regarding Appointment of Managing Director of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Agus Windiarto was assigned as Managing Director III since September 1, 2019 for his term until August 31, 2024.

\*\*\*\*) Based on Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Letter No. 0013/KDD/08/2019 dated August 30, 2019 regarding Appointment of Managing Director of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Henry Sihotang was assigned as Managing Director IV since September 1, 2019 for his term until August 31, 2024.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**1. Umum (lanjutan)**

**1.c. Dewan direktur, direktur pelaksana, komite audit dan pegawai (lanjutan)**

\*\*\*\*\*) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No. 0014/KDD/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menetapkan Chezna Fizetty Anwar sebagai Direktur Pelaksana V sejak 1 September 2019 dengan masa jabatan sampai dengan 31 Agustus 2024.

Peranan dan tanggung jawab pembidangan Manajemen LPEI berdasarkan Memorandum Prosedur No. MPO.0029/CEO/11/2021 tanggal 25 November 2021 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Eksekutif No. 0065/PDE/11/2019 tentang Pedoman dan Tata Kerja Organisasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang mulai berlaku tanggal 8 Februari 2021 tentang Pembidangan Unit Kerja Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia adalah sebagai berikut:

Direktur Eksekutif membawahi Direktur Pelaksana I, Direktur Pelaksana II, Direktur Pelaksana III, Direktur Pelaksana IV Direktur Pelaksana V, Head of Compliance, HR & TO dan Head of Internal Audit.

- Direktur Pelaksana I membawahi Head of Penjaminan, Divisi Bisnis Korporasi, Divisi Bisnis BUMN, Divisi Trade Finance, Team Leader Corporate Desk Surabaya dan Decision Support.
- Direktur Pelaksana II membawahi Divisi Bisnis Syariah & Special Mention, Divisi Bisnis Usaha Kecil, Menengah dan Komersial, Divisi Jasa Konsultasi, Kantor Wilayah, Divisi Penugasan Khusus, Divisi Program Pemerintah dan Decision Support.

**1. General (continued)**

**1.c. Board of directors, managing directors, audit committee and employees (continued)**

\*\*\*\*\*) Based on Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Letter No. 0014/KDD/08/2019 dated August 30, 2019 regarding Appointment of Managing Director of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Chesna Fizetty Anwar was assigned as Managing Director V since September 1, 2019 for her term until August 31, 2024.

*The roles and responsibilities of Management of LPEI based on the Memorandum of Procedure No. MPO.0029/CEO/11/2021 dated November 25, 2021 which is an inseparable part of Executive Director Regulation No. 0065/PDE/11/2019 regarding the Guidelines and Work Procedures of the Indonesian Export Financing Institutions which came into force on February 8, 2021, regarding the Work Unit Structure of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia are as follows:*

*Executive Director is responsible for Managing Director I, Managing Director II, Managing Director III, Managing Director IV, Managing Director V, Head of Compliance, HR & TO and Head of Internal Audit.*

- *Managing Director I is responsible for Head of Guarantee, Corporation Financing, State-Owned Enterprise Financing, Trade Financem Team Leader Corporate Desk Surabaya and Decision Support.*
- *Managing Director II is responsible for Sharia & Special Mention Finacing, Small Medium Enterprise Financing and Commercial, Consultation, NIA, State Program Financing and Decision Support.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**1. Umum (lanjutan)**

**1.c. Dewan direktur, direktur pelaksana, komite audit dan pegawai (lanjutan)**

- Direktur Pelaksana III membawahi *Head of Finance & Strategic Planning*, Divisi IEB Institute, Divisi Communication & Stakeholder Engagement, Divisi Office of the Board, Divisi Financial Institution & Treasury, Divisi Pengadaan dan Umum dan Divisi Hukum.
- Direktur Pelaksana IV membawahi *Head of Credit & Risk*, Divisi Restrukturisasi Aset Konvensional dan Syariah, Divisi Litigasi dan *Decision Support*.
- Direktur Pelaksana V membawahi *Head of Operation & IT*, Divisi Policy & Procedure, Divisi Product Development dan Divisi *Credit Operation and Supervision*.
- *Head of Penjaminan* membawahi Divisi Penjaminan, Divisi Reviewer Penjaminan dan Divisi Operasional Penjaminan.
- *Head of Operation & IT* membawahi Divisi Teknologi Sistem Informasi dan Divisi Operasional.
- *Head of Finance & Strategic Planning* membawahi Divisi Finance, Divisi Strategic & Corporate Planning, Divisi MIS & Business Finance, dan Divisi Middle Office Treasury.
- *Head of Compliance, HR & TO* membawahi Divisi Human Resources Business Partner Organization Development & Recruitment, Divisi Human Resources Services & People Development, Divisi Kepatuhan, dan Divisi Transformation Office & Culture.
- *Head of Internal Audit* membawahi Divisi Reguler Audit, Divisi Special Audit dan Dept. QA, Follow Up & Methodology.
- *Head of Credit & Risk* membawahi Divisi Credit Reviewer I, Divisi Credit Reviewer II, Divisi Risk & Portofolio Management dan Pemegang Limit Individu.
- *Managing Director III* is responsible for *Head of Finance & Strategic Planning*, IEB Institute, Communication & Stakeholder Engagement, Office of the Board, Financial Institution & Treasury, General and Procurement and Legal.
- *Managing Director IV* is responsible for *Head of Credit & Risk*, Asset Restructuring Conventional and Syariah and Recovery, Litigation and Decision Support.
- *Managing Director V* is responsible for *Head of Operation & IT*, Policy & Procedure, Product Development and *Credit Operation and Supervision*.
- Senior Executive Vice President I is responsible for Guarantees, Guarantee Reviewer and Operational Guarantee.
- *Head of Operation & IT* is responsible for Information Systems and Operations.
- *Head of Finance & Strategic Planning* is responsible for Finance, Strategic & Corporate Planning, MIS & Business Finance, and Middle Office Treasury.
- *Head of Compliance, HR & TO* is responsible for Human Resources Business Partner Organization Development & Recruitment, Human Resources Services & People Development, Compliance, and Transformation Office & Culture.
- *Head of Internal Audit* is responsible for Reguler Audit, Special Audit and Dept. QA, Follow Up & Methodology.
- *Head of Credit & Risk* is responsible for Credit Reviewer and Risk & Portofolio Management and Individual Limit Holders.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**1. Umum (lanjutan)**

**1.c. Dewan direktur, direktur pelaksana, komite audit dan pegawai (lanjutan)**

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur No. 0077/KDE/08/2021 tanggal 24 Agustus 2021 dan Surat Keputusan Dewan Direktur No. 0029/KDE/05/2020 tanggal 20 Mei 2020, susunan Komite Audit LPEI pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<i>31 Desember / December 31,</i>		<i>Chairman Member Member</i>
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
Ketua	Rijani Tirtoso	Rijani Tirtoso	
Anggota	Yulida S. Marbun	Yulida S. Marbun	
Anggota	Peter Umar Abdilla A.	Untung Dwiyono	

Berdasarkan Memorandum Prosedur No.MPO.0035/CEO/07/2020 tanggal 1 Juli 2020, Kepala Satuan Audit Internal LPEI pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<i>31 Desember / December 31,</i>		<i>Head of Internal Audit</i>
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
<i>Ketua Satuan Kerja Audit Internal</i>	Agung Waluyo	Agung Waluyo	

Berdasarkan Memorandum Prosedur No.MPO.0035/CEO/07/2020 tanggal 1 Juli 2020, Sekretaris LPEI pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<i>31 Desember / December 31,</i>		<i>LPEI's Secretary</i>
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
Sekretaris LPEI	Agus Windarto	Agus Windarto	

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Eksekutif No. 0044/KDE/07/2020 tanggal 27 Juli 2020, susunan Dewan Pengawas Syariah pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<i>31 Desember / December 31,</i>		<i>Chairman Member</i>
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
Ketua	Kanny Hidaya	Kanny Hidaya	
Anggota	Yulizar D. Sanrego	Yulizar D. Sanrego	

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut berdasarkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui surat No. U-453/DSN-MUI/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012.

*The appointment of member of the Sharia Supervisory Board based on the recommendation of the National Sharia Board of the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) by the letter No. U-453/DSN-MUI/XII/2012 dated December 12, 2012.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**1. Umum (lanjutan)**

**1.c. Dewan direktur, direktur pelaksana, komite audit dan pegawai (lanjutan)**

Jumlah pegawai tetap LPEI pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah 526 dan 461 (tidak diaudit).

**1.d. Pembentukan LPEI**

Bank yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 1999 dikembangkan menjadi sebuah lembaga keuangan yang berdaulat, dengan nama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2007, Presiden Republik Indonesia telah menegaskan pengembangan ekspor melalui pembentukan LPEI tersebut. Pembentukan LPEI ini berdasarkan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Januari 2009.

Gubernur Bank Indonesia memutuskan bahwa izin usaha Bank dicabut sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan menegaskan bahwa dengan pencabutan izin usaha Bank maka seluruh aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum BEI beralih kepada LPEI sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang LPEI.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang LPEI Pasal 48 menyebutkan bahwa paling lama 9 (sembilan) bulan sejak Undang-undang ini diundangkan, LPEI mulai beroperasi, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 336/KMK.06/2009 tanggal 24 Agustus 2009, Pemerintah Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa tanggal 1 September 2009 sebagai tanggal mulai beroperasinya LPEI. Pada saat mulai beroperasinya LPEI, maka Bank dinyatakan bubar dan seketika itu pula seluruh aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum Bank dan pegawai BEI tersebut beralih menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum LPEI dan pegawai LPEI.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**1. General (continued)**

**1.c. Board of directors, managing directors, audit committee and employees (continued)**

As of December 31, 2021 and 2020, LPEI had 526 and 461 permanent employees, respectively (unaudited).

**1.d. Formation of LPEI**

The Bank which was formed according to the Government Regulations (PP) No. 37 year 1999 was developed as sovereign financial institution, named Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). In compliance to the President Instruction No. 6 Year 2007, the President of Republic of Indonesia had confirmed the development of export through the formation of LPEI. The formation of LPEI is based on the Law No. 2 Year 2009 regarding Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) which was signed by the President of Republic Indonesia on January 12, 2009.

The Governor of Bank Indonesia decided to revoke the Bank's business license pursuant to Law No. 2 Year 2009 dated January 12, 2009 about Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) and stated that according to the revocation of license, are transferred all legal assets and liabilities of BEI to LPEI as regulated in Law No. 2 Year 2009 dated January 12, 2009 about LPEI.

Law No. 2 Year 2009 dated January 12, 2009 about LPEI Article 48 states maximum of 9 (nine) months since the Law was promulgated, LPEI started to operate so that based on Decree of the Financial Minister No. 336/KMK.06/2009 dated August 24, 2009, the Government of Republic of Indonesia decided that September 1, 2009 is the start of operation date of LPEI. When LPEI started to operate, the Bank was dissolved and effective immediately, all legal assets and liabilities as well as rights and obligations of the Bank and the Bank's employees become the legal assets and liabilities, as well as the rights and obligations of employees of LPEI.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**1. Umum (lanjutan)**

**1.d. Pembentukan LPEI (lanjutan)**

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank yang diaktakan No. 16 tanggal 31 Agustus 2009 oleh Notaris Ny. Anne Meyanne Alwie, S.H., pemegang saham memutuskan diantaranya:

- Mengalihkan seluruh aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum Bank menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum LPEI.
- Mengalihkan semua pegawai Bank menjadi mpegawai LPEI termasuk namun tidak terbatas pada masa kerja, penghargaan masa kerja dan jasa produksi pegawai yang telah dibiayakan sampai dengan 31 Agustus 2009.
- Pembubaran Bank tanpa likuidasi.

LPEI akan lebih berfokus dalam menjalankan kegiatan usaha berupa pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi dalam rangka ekspor. Keberadaan LPEI juga akan memberikan garansi atas berbagai risiko yang selama ini tidak diberikan oleh bank komersial. Pihak asing akan lebih mempunyai keyakinan atas LPEI karena LPEI merupakan bagian dari Pemerintah dan dibentuk berdasarkan atas undang-undang (*sovereign*). LPEI juga bisa mengatur *prudential norm*-nya sendiri. Selain itu, struktur organisasi LPEI yang menggunakan *One Board System* tentu akan bisa mengefektifkan pengambilan keputusan.

Kegiatan usaha LPEI adalah:

- a. Memberikan pembiayaan konvensional maupun secara prinsip syariah baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- b. Penjaminan yang meliputi: penjaminan bagi eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang/jasa di luar negeri, penjaminan bagi importir barang/jasa Indonesia di luar negeri atas pembayaran yang telah diberikan, penjaminan bagi bank yang menyediakan pembiayaan transaksi ekspor kepada eksportir Indonesia, serta penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang ekspor;

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**1. General (continued)**

**1.d. Formation of LPEI (continued)**

*Based on the decision statement of the Bank's Stockholder's Extraordinary General Meeting as mentioned in the deed No. 16 dated August 31, 2009 of notary Ms. Anne Meyanne Alwie, S.H., the stockholders decided among others to:*

- *Transfer all the legal assets, liabilities, rights and obligations of the Bank to become the legal assets, liabilities, rights and obligations of LPEI.*
- *Transfer all of the Bank's employees to become employees of LPEI including but not limited to the working period, employee benefits and employee production service that had been expensed up to August 31, 2009.*
- *Dissolve the Bank without liquidation.*

*LPEI will be more focused on running the business activities of financing, guarantees, insurance and consulting services in order to export. The presence of LPEI also will provide warranty for a variety of risk that has not been granted by commercial banks. Foreign parties will have more confidence in LPEI because LPEI is part of the Government and was formed based on law (sovereign). LPEI can also set the prudential norm of his own. In addition, the structure of LPEI use One Board System would be effective for decision making.*

*LPEI business activities are:*

- a. *Provides local and international financing and receivable under the conventional and Syariah principles;*
- b. *Guarantee that includes: underwriting for Indonesian exporters for payment received from the buyer of goods/services overseas, guarantee for importers of goods/services from Indonesia to overseas for the payment of which has been given, which provides a guarantee for bank financing on export transactions to Indonesian exporters, as well as guarantee in order to tender related to the implementation of the project in whole or in part which is supporting export activity;*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**1. Umum (lanjutan)**

**1.d. Pembentukan LPEI (lanjutan)**

- c. Asuransi ekspor yang meliputi asuransi atas risiko kegagalan ekspor, asuransi atas risiko kegagalan bayar, asuransi atas investasi yang dilakukan perusahaan Indonesia di luar negeri, dan/atau asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor;
- d. Bimbingan dan jasa konsultasi kepada bank, lembaga keuangan, eksportir, produsen barang ekspor, khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank/lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan/atau penting bagi perkembangan ekonomi Indonesia.

Untuk membiayai kegiatan dalam melaksanakan Penugasan Umum, LPEI dapat memperoleh dana yang berasal dari:

- a. Penerbitan surat berharga;
- b. Pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang dari pemerintah Indonesia, pemerintah asing, lembaga multilateral, bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik di dalam maupun luar negeri;
- c. Hibah;
- d. Penempatan dana oleh Bank Indonesia.

**1.e. Penugasan Khusus**

Penugasan Khusus atau *National Interest Account* (NIA) adalah penugasan yang diberikan pemerintah kepada LPEI untuk menyediakan pembiayaan ekspor atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi dianggap perlu oleh pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor.

Penugasan Khusus kepada LPEI bertujuan membantu memberikan pembiayaan pada area yang tidak dimasuki oleh bank atau lembaga keuangan komersial yang enggan atau tidak memiliki kemampuan dalam hal pembiayaan yang kompetitif dan kemampuan menyerap risiko, namun harus memenuhi kriteria meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk Indonesia, mendukung pertumbuhan industri dalam negeri dan memiliki potensi peningkatan dan pengembangan ekspor jangka panjang.

**1. General (continued)**

**1.d. Formation of LPEI (continued)**

- c. Export insurances cover the risk of failure on export, failure to pay, the investment by insurance Indonesian companies abroad, and/or political risk insurance in a country's export destination;
- d. Provides guidance and consulting services to banks, financial institutions, exporters, manufacturers of export goods, especially micro, small, medium and cooperatives to help overcome the barriers faced by banks/financial institutions in providing financing to exporters with commercial potential and/or important to the economic development of Indonesia.

To finance its activities in order to conduct the General Assignment, LPEI can obtain funds derived from:

- a. Issuance of securities;
- b. Short-term, medium-term, and/or long-term Indonesia government, foreign governments, multilateral institutions, banks and financial institutions and finance loans, both at domestic and abroad;
- c. Grant;
- d. Placement of funds by Bank Indonesia.

**1.e. National Interest Account**

The Special Assignment or National Interest Account (NIA) was assigned from government to LPEI to provide export financing for transactions or projects that is difficult to be implemented commercially, but its required by the government to support the government policies or export program.

This NIA assignment to LPEI aims to help in providing finance to the area that is not accessible by banks or commercial financial institutions that are reluctant or do not have the capacity in terms of competitive financing and the ability to absorb risks, it must meet the criteria to enhance competitiveness and value-added Indonesian products, support the growth of the domestic industry and has the potential for improvement and long-term export development.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**1. Umum (lanjutan)**

**1.e. Penugasan Khusus (lanjutan)**

Berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, LPEI dapat memberikan pembiayaan atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan namun dianggap perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor nasional/*National Interest Account* (NIA). Penugasan khusus ini menjadi strategis karena bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk Indonesia, mendukung pertumbuhan industri dalam negeri, dan memiliki potensi peningkatan dan pengembangan ekspor jangka panjang.

Kegiatan usaha LPEI dalam rangka Penugasan Khusus dapat diberikan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang meliputi pembiayaan, penjaminan dan asuransi kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum termasuk perorangan yang berdomisili di dalam atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Di tahun 2015, LPEI telah mendapatkan penugasan khusus dari Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 134/PMK.08/2015 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang ditetapkan tanggal 14 Juli 2015. Pelaksanaan atas mandat tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 1156/KMK.08/2015 tanggal 13 November 2015 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI Untuk Menyediakan Pembiayaan Ekspor Produk Gerbong Penumpang Kereta Api. KMK No. 1231/KMK.08/2015 tanggal 8 Desember 2015 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI Untuk Mendukung Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Tahun 2015 dan KMK No. 167/KMK.08/2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 1231/KMK.08/2015 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI Untuk Mendukung Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Tahun 2015.

**1. General (continued)**

**1.e. National Interest Account (continued)**

*Based on the mandate of Law No. 2 Year 2009, LPEI is able to provide financing for the transaction or project that is commercially difficult to implement but is considered necessary by the Government to support a national export policy or program/NIA. This special assignment becomes strategic because it aims to improve the competitiveness and value-added products of Indonesia, supporting the growth of the domestic industry, and has the potential for improvement and long-term export development.*

*The business activities of LPEI in the framework of NIA can be administered either through conventional or based on sharia principles that include financing, guarantees and insurance to both legal entities and other entities including individuals who live inside or outside the territory of the Republic Indonesia.*

*In 2015, LPEI has gained a special assignment from the Government through the Regulation of Minister of Finance (PMK) No. 134/PMK.08/2015 on National Interest Account Assignment To Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia issued on July 14, 2015. The implementation of the mandate is set out in Decree of the Minister of Finance (KMK) No. 1156/KMK.08/2015 dated November 13, 2015 on Special Assignment LPEI to Provide Financing for Export of Passenger Railway Carriages Product and also KMK No. 1231/KMK.08/2015 dated December 8, 2015 on Special Assignment To LPEI Economic Policy Package To Support Government in 2015 and KMK No. 167/KMK.08/2016 dated March 8, 2016 on the Amendment to Decree of the Minister of Finance No. 1231/KMK.08/2015 on Special Assignment To LPEI To Support Government Economic Policy Package year 2015.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**1. Umum (lanjutan)**

**1.e. Penugasan Khusus (lanjutan)**

LPEI telah mendapatkan penugasan khusus dari Pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 374/KMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk Menyediakan Pembiayaan Ekspor Gerbong Penumpang Kereta Api yang ditetapkan tanggal 12 Mei 2017 dengan negara tujuan ke Bangladesh dan memiliki jangka waktu penugasan sampai dengan 31 Desember 2018 dengan mempertimbangkan alokasi dana.

Pada tahun 2018 telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 513/KMK.08/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 374/KMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI untuk Menyediakan Pembiayaan Ekspor Kereta Penumpang dan Gerbong Barang Kereta Api Dengan Negara Tujuan ke Bangladesh dan Srilanka yang memiliki jangka waktu penugasan sampai dengan 31 Desember 2020 dengan mempertimbangkan alokasi dana.

LPEI telah mendapatkan penugasan khusus dari Pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 649/KMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk Menyediakan Pembiayaan Ekspor Pesawat Udara yang ditetapkan tanggal 5 September 2017 dengan negara tujuan ke Thailand, Nepal, Uni Emirat Arab dan negara-negara di kawasan Afrika yang tidak diembargo Perserikatan Bangsa-Bangsa dan memiliki jangka waktu penugasan sampai dengan 31 Desember 2018 dengan mempertimbangkan alokasi dana.

Pada tahun 2017, Pemerintah mengeluarkan PMK No. 198/PMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang ditetapkan tanggal 21 Desember 2017 dan mencabut PMK No. 134/PMK.08/2015.

**1. General (continued)**

**1.e. National Interest Account (continued)**

*LPEI has gained a special assignment from the Government through the Decree of Minister of Finance (KMK) No. 374/KMK.08/2017 on Special Assignment LPEI to Provide Financing for Export of Passenger Railway Carriages Products dated on May 12, 2017 with Bangladesh as the country of destination and has term of assignment until December 31, 2018 taking into account the allocation of funds.*

*In 2018, the government issued the Decree of Minister of Finance (KMK) No. 513/KMK.08/2018 regarding changes of KMK No. 374/KMK.08/2017 on National Interest Account Assignment to LPEI to Provide Financing for Export of Passenger Railway Carriages Products with Bangladesh as the country of destination and has term of assignment until December 31, 2020 taking into account the allocation of funds.*

*LPEI has gained a special assignment from the Government through the Decree of Minister of Finance (KMK) No. 649/KMK.08/2017 on Special Assignment LPEI to Provide Financing for Export of Aircrafts dated on September 5, 2017 with the countries of destination Thailand, Nepal, United Arab Emirates and countries in the African region that are not in the embargo of the United Nations and has term of assignment until December 31, 2018 taking into account the allocation of funds.*

*In 2017, the Government issued PMK No. 198/PMK.08/2017 on National Interest Account Assignment to Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated December 21, 2017 and revoked PMK No. 134/PMK.08/2015.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**1. Umum (lanjutan)**

**1.e. Penugasan Khusus (lanjutan)**

Pada tahun 2018 telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 512/KMK.08/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 649/KMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk Menyediakan Pembiayaan Ekspor Pesawat Udara yang memiliki jangka waktu penugasan sampai dengan 31 Desember 2020 dengan mempertimbangkan ketersediaan alokasi dana.

Pada tahun 2019 telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 01/KMK.08/2019 tanggal 2 Januari 2019 sebagai Addendum KMK No.787/KMK.08/2017 tanggal 6 November 2017 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk Mendorong Ekspor ke Negara Kawasan Afrika, Asia Selatan dan Timur Tengah dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 685/KMK.08/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Penugasan Khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam rangka Pengembangan Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

Pada tahun 2020 telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 372/KMK.08/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam Rangka Mendukung Sektor Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Ekspor, dengan jangka penugasan sampai dengan 31 Desember 2025.

Pada tahun 2020 telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 428/KMK.08/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk Mendukung Industri Penerbangan Indonesia, dengan jangka penugasan sampai dengan 31 Desember 2021.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**1. General (continued)**

**1.e. National Interest Account (continued)**

*In 2018, the government issued the Decree of Minister of Finance (KMK) No. 512/KMK.08/2018 regarding changes of KMK No. 649/KMK.08/2017 on National Interest Account Assignment to LPEI to Provide Financing for Export of Passenger Railway Carriages Products with Bangladesh as the country of destination and has term of assignment until December 31, 2020 taking into account the allocation of funds.*

*In 2019, the government issued the Decree of Minister of Finance (KMK) No. 01/KMK.08/2019 dated January 2, 2019 regarding changes of KMK No. 787/KMK.08/2017 dated November 6, 2017 on National Interest Account Assignment to LPEI to Provide Financing Exports to Africa, South Asia and the Middle East and issued the Decree of Minister of Finance (KMK) Np. 685/KMK.08/2019 dated August 27, 2019 regarding National Interest Account Assignment to LPEI to developing Mandalika Special Economic Zone Tourism.*

*In 2020, the government issued the Decree of Minister of Finance (KMK) No. 372/KMK.08/2020 dated August 11, 2020 regarding National Interest Account Assignment to LPEI to Supporting the Export Oriented Small and Medium Enterprises Sector, with a term of assignment period until December 31, 2025.*

*In 2020, the government issued the Decree of Minister of Finance (KMK) No. 428/KMK.08/2020 dated September 23, 2020 regarding National Interest Account Assignment to LPEI to Supporting the Indonesian Aviation Industry, with a term of assignment period until December 31, 2021.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**1. Umum (lanjutan)**

**1.e. Penugasan Khusus (lanjutan)**

Pada tahun 2020 telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 526/KMK.08/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk Menyediakan Fasilitas Trade Finance Dalam Rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pada tahun 2021 telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 410/KMK.08/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Perubahan Atas KMK No. 526/KMK.08/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk Menyediakan Fasilitas Trade Finance Dalam Rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dengan jangka penugasan sampai dengan 31 Desember 2022.

Pada tahun 2021 telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 409/KMK.08/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 372/KMK.08/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam Rangka Mendukung Sektor Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Ekspor, dengan jangka penugasan sampai dengan 31 Desember 2025.

Pada tahun 2021 telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 406/KMK.08/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Untuk Menyediakan Pembiayaan Ekspor Dalam Rangka Mendukung Industri Alat Transportasi dengan jangka penugasan sampai dengan 31 Desember 2026.

Pada tahun 2021, Pemerintah mengeluarkan PMK No. 183/PMK.08/2021 tentang Penugasan Khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang ditetapkan tanggal 14 Desember 2021 dan mencabut PMK No. 198/PMK.08/2017.

**1. General (continued)**

**1.e. National Interest Account (continued)**

*In 2020, the government issued the Decree of Minister of Finance (KMK) No. 526/KMK.08/2020 dated November 18, 2020 regarding National Interest Account Assignment to LPEI to Provide Trade Finance Facilities In Order To Support National Economic Recovery.*

*In 2021, the government issued the Decree of Minister of Finance (KMK) No. 410/KMK.08/2021 dated December 21, 2021 revision of KMK No. 526/KMK.08/2020 dated November 18, 2020 regarding National Interest Account Assignment to LPEI to Provide Trade Finance Facilities In Order To Support National Economic Recovery, with a term of assignment period until December 31, 2022.*

*In 2021, the government issued the Decree of Minister of Finance (KMK) No. 409/KMK.08/2021 dated September 21, 2021 revision of Decree of KMK No. 372/KMK.08/2020 dated August 11, 2020 regarding National Interest Account Assignment to LPEI to Supporting the Export Oriented Small and Medium Enterprises Sector, with a term of assignment period until December 31, 2025.*

*In 2021, the Decree of the Minister of Finance (KMK) No. 406/KMK.08/2021 dated September 21, 2021 regarding Special Assignment to Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia to Provide Export Financing in Order to Support the Transportation Equipment Industry with an assignment period until December 31, 2026.*

*In 2021, the Government issued PMK No. 183/PMK.08/2021 regarding National Interest Account Assignment to Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated December 14, 2021 and revoked PMK No. 198/PMK.08/2017.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**1. Umum (lanjutan)**

**1.e. Penugasan Khusus (lanjutan)**

Berdasarkan pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan No. 183/PMK/08/2021 tentang penugasan khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia perlu dibentuk komite penugasan khusus.

Dalam rangka pelaksanaan tugas komite, Ketua komite membentuk tim teknis, Komite bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kementerian Keuangan.

Dalam rangka memperoleh masukan terkait kebijakan kementerian sektor sesuai surat keputusan Menteri Keuangan No. 191/KMK.08/2016 dibentuk kelompok advisor yang merupakan perwakilan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan No. 66/KMK.08/2020 tentang Pembentukan Komite Penugasan Khusus Ekspor Tahun 2020, masa kerja komite dan kelompok Advisor ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 36/KMK.08/2021 tentang Pembentukan Komite Penugasan Khusus Ekspor Tahun 2021 ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Peraturan Menteri Keuangan No. 183/PMK.08/2021 tentang LPEI juga memuat tata cara pengajuan usul program ekspor nasional dari kementerian dan lembaga, sumber dana, denda, provisi penjaminan, premi asuransi, penggantian kerugian, pembentukan komite penugasan khusus ekspor dan pembayaran.

**1. General (continued)**

**1.e. National Interest Account (continued)**

*According to Article 9 Minister of Finance Regulation No. 183/PMK/08/2021 on special assignment to the Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, committees for NIA need to be established.*

*In order to execute the task of the committee, the Chairman of the committee formed a technical team, the Committee which is responsible and report on performance of its duties to the Ministry of Finance.*

*In order to obtain feedback regarding the appropriate sector ministry policy decision in accordance with the Minister of Finance decision No. 191/KMK.08/2016, Advisory Group comprising representatives of the Ministries/Non-ministries Government Organization has been formed.*

*Based on the decision of the Minister of Finance No. 66/KMK.08/2020, about establishing committess for NIA in 2020, the tenure of committees and Advisory Group is set for 12 (twelve) months from January 1, 2020 until December 31, 2020.*

*Based on the decision of the Minister of Finance No. 36/KMK.08/2021, about establishing committess for NIA in 2021, the tenure of committees and Advisory Group is set for 12 (twelve) months from January 1, 2021 until December 31, 2021.*

*Minister of Finance Regulation No. 183/PMK.08/2021 on LPEI also includes procedure of filing a national export program proposals of ministries and agencies, sources of funds, fines, underwriting fees, insurance premiums, indemnities, committees and special assignments export payments.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**1. Umum (lanjutan)**

**1.e. Penugasan Khusus (lanjutan)**

Kegiatan usaha LPEI dalam Penugasan Khusus:

- a. Memberikan pembiayaan konvensional maupun secara prinsip syariah baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- b. Penjaminan yang meliputi Penjaminan bagi eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang dan/atau jasa diluar negeri, penjaminan bagi bank yang menjadi mitra penyediaan pembiayaan transaksi yang telah diberikan kepada eksportir Indonesia;
- c. Asuransi yang meliputi asuransi atas risiko gagal bayar, asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri, dan/atau asuransi risiko politik.

Untuk membiayai kegiatannya dalam rangka penugasan khusus, LPEI dapat memperoleh dana yang berasal dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja negara berupa penyertaan modal negara yang diakui dalam ekuitas LPEI sebagaimana penambahan modal dan/atau bentuk lain yang diatur dalam peraturan menteri;
- b. Bagian kapitalisasi modal LPEI untuk Dana Penugasan Khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha pelaksanaan Penugasan Khusus Pemerintah kepada LPEI guna mendukung program ekspor nasional pada tanggal 31 Desember 2020, Negara Republik Indonesia telah menyetorkan penambahan penyertaan modal negara masing-masing sebesar Rp6.000.000 untuk LPEI. Modal tersebut sebesar Rp1.000.000 efektif diterima pada tanggal 18 Agustus 2020, dan Rp5.000.000 efektif diterima pada 30 Desember 2020.

**1. General (continued)**

**1.e. National Interest Account (continued)**

*LPEI's business activities in NIA include the following:*

- a. Provides conventional and sharia financing both domestic and overseas;*
- b. Guarantees for Indonesian exporters on payments received from the buyer of goods and/or services abroad, guarantee for banks that become partners in providing financing transactions that have been provided to the Indonesian exporters;*
- c. Insurance that cover against payment default, insurance on the investments made by the Indonesian company in overseas, and/or insurance on political risk.*

*To finance its activities in the framework of a special assignment (National Interest Account), LPEI can obtain funds from:*

- a. State budget of revenues and expenditures in the form of equity participation which is recognized in LPEI's equity as additional capital and/or other forms stipulated in the ministerial regulations;*
- b. Part of capitalization of LPEI's equity for NIA stipulated in the requirements of law;*
- c. Other legitimate sources in accordance with the requirements of law.*

*In strengthening the capital structure and increase the capacity of business for the implementation of NIA to export financing to support export programs nationwide, December 31, 2020, the Republic of Indonesia has injected additional equity participation amounting to Rp6,000,000 to LPEI, respectively. The capital injection Rp1.000.000 was received on August 18, 2020 and Rp5.000.000 was received on December 30, 2020, respectively.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**1. Umum (lanjutan)**

**1.e. Penugasan Khusus (lanjutan)**

Dana dalam rekening Penugasan Khusus hanya dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan Penugasan Khusus. Pendanaan program Penugasan Khusus dibatasi paling banyak sebesar akumulasi dana Penugasan Khusus, setelah memperhitungkan seluruh biaya terkait. Biaya terkait program Penugasan Khusus meliputi biaya dana, cadangan kerugian penurunan nilai dan biaya operasional lain yang dibebankan oleh LPEI.

**1.f. Entitas Anak**

LPEI mempunyai kepemilikan langsung pada Entitas Anak berikut:

<b>Nama Perusahaan/ Company Name</b>	<b>Kegiatan Usaha/ Business Activity</b>	<b>Tahun Mulai Beroperasi/ Year Started Operations</b>	<b>Percentasi Kepemilikan/ Percentage of Ownership</b>	<b>Total Aset/ Total Assets</b>
			<b>2021</b>	
PT IEB Prima Aset	Jasa Konsultasi/ Consulting Services	2021	99.99%	50,006

**PT IEB Prima Aset (IEBPA)**

IEBPA didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 154 tanggal 17 Desember 2021.

Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-1097/MK.06/2021 pada tanggal 6 Desember 2021, ruang lingkup IEBPA khususnya dalam rangka percepatan penanganan aset bermasalah dan perbaikan struktur neraca.

Pada bulan Desember 2021 LPEI memberikan setoran modal awal kepada IEBPA sebesar Rp49.999. Modal saham tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0081370.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021.

Kantor pusat IEBPA berlokasi di Prosperity Tower Lantai 33, District 8, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta – 12190.

**1. General (continued)**

**1.e. National Interest Account (continued)**

*The funds available under NIA bank account can only be used for the implementation of NIA program. Financing for NIA program is limited to the accumulated funds of NIA, after taking into account all of the related costs. The cost of NIA includes cost of fund and allowance for impairment and operational expense charge by LPEI.*

**1.f. Subsidiary**

*LPEI has direct ownership in the following Subsidiary:*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**1. Umum (lanjutan)**

**1.f. Entitas Anak (lanjutan)**

**Dasar Pembentukan PT. IEB Prima Aset**

Dalam rangka mengatasi tingginya angka aset bermasalah yang lebih komprehensif, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) telah mengkaji beberapa opsi yang tersedia. Berdasarkan kajian tersebut disimpulkan pembentukan PT IEB Prima Aset, entitas anak, sebagai *Special Purpose Vehicle* (SPV) yang mengelola aset bermasalah sebagai opsi yang paling efektif untuk mengatasi pembiayaan/piutang bermasalah LPEI. Kajian atas perlunya entitas anak dilakukan bersama dengan konsultan bisnis (Deloitte) dan konsultan hukum (Tumbuan and partner) termasuk memastikan bahwa pendirian entitas anak ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang mengatur LPEI.

Landasan pembentukan entitas anak mengacu pada:

1. UU No.2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Pasal 14 (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, LPEI berwenang: a. menetapkan skema Pembiayaan Ekspor Nasional; b. melakukan restrukturisasi Pembiayaan Ekspor Nasional; c. melakukan reasuransi terhadap asuransi yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan d. melakukan penyertaan modal. (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dapat dilakukan pada badan hukum atau badan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas LPEI dengan persetujuan Menteri.

**1. General (continued)**

**1.f. Subsidiary (continued)**

**Basis for Establishment of PT. IEB Prima Asset**

*In order to more comprehensively address the high number of non-performing assets, the Indonesian Export Financing Agency (LPEI) has reviewed several available options. Based on this study, it was concluded that the establishment of PT IEB Prima Aset, a subsidiary, as a Special Purpose Vehicle (SPV) which manages non-performing assets is the most effective option to overcome LPEI's non-performing financing/receivables. A study on the need for a subsidiary is carried out together with a business consultant (Deloitte) and a legal consultant (Tumbuan and partners) including ensuring that the establishment of a subsidiary does not conflict with the Law governing LPEI.*

*The establishment basis of a subsidiary refers to:*

- 1. Law No. 2 of 2009 regarding Indonesian Export Financing Institution Article 14 (1) In order to carry out the tasks as referred to in Article 13, LPEI is authorized to: a. establish a National Export Financing scheme; b. restructure the National Export Financing; c. carry out reinsurance of the implemented insurance as referred to in Article 8; and d. make n equity participation.*
- (2) Equity participation as referred to in paragraph (1) letter d may only be made to a legal entity or other entity required to carry out LPEI duties with the approval of Minister.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**1. Umum (lanjutan)**

**1.f. Entitas Anak (lanjutan)**

2. PP No. 43/2019 tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional Pasal 16 ayat (2) Selain kegiatan menyediakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPEI dapat melaksanakan kegiatan berupa:
  - a. menyediakan jasa konsultasi;
  - b. melakukan restrukturisasi PEN;
  - c. melakukan reasuransi;
  - d. melakukan penyertaan modal; dan atau
  - e. melakukan kegiatan lain yang menunjang fungsi, tugas, dan wewenang LPEI sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 25 ayat (1) Penyertaan modal dilakukan dengan persetujuan Menteri, dan ayat (2) Penyertaan modal dapat dilakukan kepada badan hukum dalam negeri dan badan hukum luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Selanjutnya rencana pembentukan entitas anak ini telah dicantumkan pada RKAT LPEI tahun 2021 yang mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan melalui surat Menteri Keuangan Nomor. S-121/MK.06/2021 pada tanggal 15 Februari 2021.
4. Dengan pertimbangan perlu segera dilakukan upaya penyelesaian kondisi NPL dan perbaikan kualitas aset, LPEI telah mendapat dukungan penuh dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk pembentukan entitas anak seperti yang disampaikan melalui surat nomor: S-86/KN/2021 pada tanggal 17 Juni 2021. Pada surat tersebut juga dinyatakan bahwa mengacu pada amanat Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2009 tentang LPEI, dalam hal membentuk badan hukum dan melakukan penyertaan modal, maka agar mengajukan kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan dan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.

**1. General (continued)**

**1.f. Subsidiary (continued)**

2. Government Regulation No. 43/2019 regarding Basic Policy of National Export Financing Article 16 paragraph (2) In addition to providing facilities as referred to in paragraph (1), LPEI may carry out activities in the form of:
  - a. provide consulting services;
  - b. carry out restructuring of PEN;
  - c. carry out reinsurance;
  - d. make equity participation; and/or
  - e. carry out other activities that support the functions, duties, and authorities of LPEI as long as they do not conflict with the provisions of laws and regulations. Article 25 paragraph (1) states that Equity participation is carried out with the approval of Minister, and paragraph (2) Equity participation may be made to domestic legal entities and foreign legal entities in accordance with the provisions of laws and regulations.
3. Furthermore, the plan for the establishment of a subsidiary has been included in the Annual Work and Budget Plan of LPEI 2021 which has received approval from Minister of Finance through the letter of Minister of Finance Number. S-121/MK.06/2021 dated 15 February 2021.
4. Considering the need to immediately resolve the NPL condition and improve asset quality, LPEI has received full support from the Directorate General of State Assets (DJKN) for the establishment of a subsidiary as submitted by the letter number: S-86/KN/2021 dated 17 June 2021. The letter also stated that referring to the mandate of Article 14 of Law No. 2 of 2009 concerning LPEI, in terms of establishing a legal entity and making equity participation, then to submit to Minister of Finance for approval and set forth in the Annual Work Plan and Budget.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**1. Umum (lanjutan)**

**1.f. Entitas Anak (lanjutan)**

5. Menteri Keuangan melalui surat nomor: S-1097/MK/06/2021 pada tanggal 6 Desember 2021 menyetujui permohonan penyertaan modal oleh LPEI dalam rangka pembentukan entitas anak.
6. Entitas anak, yang selanjutnya disebut PT. IEB Prima Aset berdiri pada tanggal 17 Desember 2021 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. IEB Prima Aset disingkat PT IEBPA No. 154 tanggal 17 Desember 2021 dengan modal dasar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dengan jumlah saham beredar 50.000 (lima puluh ribu) lembar yang dimiliki oleh LPEI sebesar 49.999 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham (99,99%) dan Koperasi Konsumen Pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebesar 1 lembar saham (0,01%). Pengesahan dari Menkumham tanggal 20 Desember 2021 dengan No. AHU-0081370.AH.01.01. Tahun 2021.
7. Sesuai dengan Akta Pendirian PT IEBPA pada pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta kegiatan Usaha, sebagaimana tercantum pada ayat 1 mengenai Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang konsultasi, termasuk konsultasi atas kegiatan yang berorientasi ekspor. Pada ayat 2 mengenai kegiatan usaha yang meliputi kegiatan usaha sebagai berikut:

**1. General (continued)**

**1.f. Subsidiary (continued)**

5. Minister of Finance by the letter number : S-1097/MK/06/2021 dated 6 December 2021 approved the application for equity participation by LPEI in the context of establishing a subsidiary.
6. The subsidiary, hereinafter referred to as PT. IEB Prima Aset was established on 17 December 2021 based on Deed of Establishment of the Limited Company PT. IEB Prima Aset for the sake brevity as PT IEBPA No. 154 dated 17 December 2021 with the authorized capital of Rp.50,000,000,000.00 (fifty billion rupiah) with a total outstanding share of 50,000 (fifty thousand). The shares owned by LPEI is amounting to 49,999 (forty nine thousand nine hundred ninety nine) shares (99.99%) and the Consumer Cooperative of Employees of the Indonesian Export Financing Institution owns 1 share (0.01%). Ratification from Minister of Law and Human Rights was on 20 December 2021 with No. AHU-0081370.AH.01.01. year 2021.
7. In accordance with the Deed of Establishment of PT IEBPA Article 3 concerning Aim and Objective as well as Business Activities as set forth in paragraph 1, the aim and objective of the Company is to engage in the field of consulting, including consulting on export-oriented activities. Paragraph 2 concerning the business activities include the following:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**1. Umum (lanjutan)**

**1.f. Entitas Anak (lanjutan)**

- a. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209), meliputi: Bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economists pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan - masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur
  - b. Pemberian jasa hukum terkait aset, dan
  - c. Kegiatan lain sesuai maksud dan tujuan Perseroan
8. Sampai dengan 31 Desember 2021, PT IEBPA adalah sebagai konsultasi manajemen dan dalam kegiatannya tidak ada pengalihan aset dari LPEI ke PT IEBPA.
  9. Pembentukan entitas anak sebagaimana diatas sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**1. General (continued)**

**1.f. Subsidiary (continued)**

- a. Other Management Consulting Activities (KBLI 70209), including: Assistance with advice, guidance and business operations and other organizational and management issues, such as strategic and organizational planning; decisions related to finance; marketing objectives and policies; human resource planning, practices and policies; planning scheduling and controlling production. The provision of these business services may include advice, guidance and operational assistance for various management functions, management consulting for agronomists and agricultural economists in agriculture and the like, design of accounting methods and procedures, cost accounting programs, budget control procedures, providing advice and assistance to businesses and public services in planning, organizing, efficiency and control, management information and others. Including infrastructure investment study services:
  - b. Provision of legal services related to assets, and
  - c. Other activities according to the purposes and objectives of the Company.
8. Until 31 December 2021, PT IEBPA is a management consultancy and in its activities there is no transfer of assets from LPEI to PT IEBPA.
  9. Establishment of a subsidiary as above is in accordance with the applicable provisions.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan**

**2.a. Dasar penyajian laporan keuangan Pernyataan Kepatuhan**

Laporan keuangan konsolidasian LPEI dan entitas anak ("Grup") telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI"), dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal - Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" yang terlampir dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI, PMK No. 161/PMK.010/2010 tentang Perubahan atas PMK No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI dan PMK No. 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 40/POJK.05/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan menggunakan konsep nilai historis, kecuali jika standar akuntansi mensyaratkan pengukuran nilai wajar, dan disusun atas basis akrual, kecuali untuk hasil dari pembiayaan Musyarakah dan laporan arus kas.

**2. Summary of Significant Accounting Policies**

**2.a. Basis of financial statements presentation Statement of Compliance**

*The consolidated financial statements of LPEI and subsidiary ("Group") were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK) in Indonesia, which include the Statement and Interpretation which published by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI"), and Regulations from the Capital Markets and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) No. VIII.G.7 regarding "Financial Statements Presentation and Disclosure for Issuers or Public Companies" included in the Appendix of the Decision of the Chairman of BAPEPAM - LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012, Regulation of Financial Minister (PMK) No. 140/PMK.010/2009 about Development and Supervision of LPEI, PMK No. 161/PMK.010/2010 regarding changes of No. 140/PMK.010/2009 regarding Development and Supervision of LPEI and PMK No. 58/PMK.06/2020 regarding Development and Supervision of LPEI, and Regulation of Financial Service Authority (POJK) No. 40/POJK.05/2015 dated December 21, 2015 regarding Development and Supervision of LPEI.*

*The consolidated financial statements have been prepared using the historical cost concept, except where the accounting standards require fair value measurement, and under the accrual basis, except for profit sharing income from Musyarakah financing and the statement of cash flows.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

- 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)**
- 2.a. Dasar penyajian laporan keuangan Pernyataan Kepatuhan (lanjutan)**

Untuk unit syariah yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip perbankan syariah, laporan keuangannya disajikan sesuai dengan PSAK No. 101 (Revisi 2016) "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102 (Revisi 2019) "Akuntansi Murabahah", PSAK No. 104 "Akuntansi Istishna", PSAK No. 105 "Akuntansi Mudharabah", PSAK No. 106 "Akuntansi Musyarakah", PSAK No. 107 (Revisi 2016) "Akuntansi Ijarah", PSAK No. 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk", PSAK No. 111 "Akuntansi Wa'd", dan Pedoman Akuntasi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk keperluan laporan arus kas, yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank dan penempatan pada bank yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp), yang merupakan mata uang fungsional. Angka-angka disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

LPEI menyajikan laporan posisi keuangan sesuai tingkat likuiditas. Suatu analisis mengenai pemulihan (aset) atau penyelesaian (kewajiban) dalam dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan (lancar) dan lebih dari dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan (tidak lancar) disajikan di dalam Catatan 41.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

- 2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**
- 2.a. Basis of financial statements presentation Statement of Compliance (continued)**

*For the sharia business unit which operates based on the sharia banking principles, the presentation of the financial statement is in accordance to PSAK No. 101 (Revised 2016) "Presentation of Sharia Financial Statements", PSAK No. 102 (Revised 2016) "Accounting for Murabahah", PSAK No. 104 "Accounting for Istishna", PSAK No. 105 "Accounting for Mudharabah", PSAK No. 106 "Accounting for Musyarakah", PSAK No. 107 (Revised 2016) "Accounting for Ijarah", PSAK No. 110 (Revised 2015) "Sukuk Accounting", PSAK Np. 111 "Wa'd Accounting", and Accounting Guidelines for Indonesian Sharia Banking (PAPSI Revised 2013) established by Bank Indonesia and the Indonesian Institute of Accountants.*

*The statement of cash flows are prepared based on direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities. For purposes of the statement of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with banks and placements with banks maturing within 3 (three) months from the date of acquisition, provided they are not pledged as collateral for borrowings nor restricted.*

*The presentation currency used for the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah (Rp), which is LPEI's functional currency. Unless otherwise stated, all figures presented in the consolidated financial statements are rounded off to millions of Rupiah.*

*LPEI presents its statement of financial position based on liquidity level. An analysis regarding recovery (asset) or settlement (liability) within twelve (12) months after the reporting date (current) and more than twelve (12) months after the reporting date (non-current) is presented in Note 41.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

<b>2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)</b>	<b>2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)</b>
<b>2.a. Dasar penyajian laporan keuangan konsolidasian Pernyataan Kepatuhan (lanjutan)</b>	<b>2.a. Basis of consolidated financial statements presentation Statement of Compliance (continued)</b>
Termasuk di dalam laporan keuangan konsolidasian LPEI adalah penyajian aset, liabilitas, modal, laba dan rugi yang berasal dari Penugasan Khusus sesuai surat yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara No. S-368/KN/2017 tanggal 16 Februari 2017.	<i>Included in the consolidated financial statements of LPEI is the presentation of assets, liabilities, capital, profits and losses derived from Special Assignment accordance with the letter issued by the Directorate General of State No. S-368/KN/2017 dated February 16, 2017.</i>
<b>2.b. Prinsip konsolidasian</b>	<b>2.b. Consolidation principal</b>
Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan LPEI dan entitas anak yang mayoritas sahamnya dimiliki atau dikendalikan oleh LPEI.	<i>The consolidated financial statements include the financial statements of LPEI and its subsidiary whose majority shares are owned or controlled by the LPEI.</i>
Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh LPEI, yakni terekspos, atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas investee).	<i>A subsidiary is an entity controlled by the LPEI, is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity's relevant activities (power over the investee).</i>
Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana LPEI memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah LPEI mengendalikan entitas lain.	<i>The existence and effect of substantive potential voting rights that LPEI has the practical ability to exercise (ie substantive rights) are considered when assessing whether LPEI controls another entity.</i>
Laporan keuangan LPEI dan entitas anak mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari LPEI dan seluruh entitas anak yang, secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh LPEI. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana LPEI dan entitas anak secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.	<i>LPEI and its subsidiary' financial statements incorporate the results, cash flows, assets, and liabilities of LPEI and all of its directly and indirectly controlled subsidiary. Subsidiary are consolidated from the effective date of acquisition, which is the date on which LPEI effectively obtains control of the acquired business, until that control ceases.</i>
Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh.	<i>A parent prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intra-group transactions, balances, income, expenses, and cash flows relating to transactions between entities of the group are eliminated in full.</i>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**2.b. Prinsip konsolidasian (lanjutan)**

LPEI dan entitas anak mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non-pengendali memiliki saldo defisit. LPEI dan entitas anak menyajikan kepentingan non-pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali berubah, LPEI dan entitas anak menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Jika LPEI dan entitas anak kehilangan pengendalian, maka LPEI dan entitas anak akan:

- Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non-pengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non-pengendali);
- Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.b. Consolidation principal (continued)**

*LPEI and its subsidiary attributed the profit or loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. LPEI and its subsidiary presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.*

*Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (ie transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, LPEI and its subsidiaries adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiary. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognised directly in equity and attributed to the owners of the parent.*

*If LPEI and its subsidiary loses control, so LPEI and its subsidiary will:*

- *Derecognise the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;*
- *Derecognise the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);*
- *Recognise the fair value of the consideration received (if any) from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control;*
- *Recognise any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**2.b. Prinsip konsolidasian (lanjutan)**

- Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
- Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

**2.c. Pernyataan dan interpretasi standar akuntansi baru dan revisi yang berlaku efektif pada tahun berjalan**

LPEI dan entitas anaknya telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2021, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan konsolidasian, yaitu:

- PSAK 22 (Amendemen 2019): Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis;
- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, Amendemen PSAK 62 dan Amendemen PSAK 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2;
- PSAK 110 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Sukuk;
- PSAK 111 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Wa'd;
- PSAK 112: Akuntansi Wakaf;
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2021): Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK 13 (Penyesuaian Tahunan 2021): Properti Investasi;
- PSAK 48 (Penyesuaian Tahunan 2021): Penurunan Nilai Aset;
- PSAK 66 (Penyesuaian Tahunan 2021): Pengaturan Bersama; dan
- ISAK 16 (Penyesuaian Tahunan 2021): Perjanjian Konsesi Jasa.

Penerapan standar akuntansi baru ini tidak berdampak material terhadal laporan keuangan konsolidasian.

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.b. Consolidation principal (continued)**

- Reclassify to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other FAS, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary;
- Recognise any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.

**2.c. New and revised statements interpretations of financial accounting standards effective in the current year**

As of January 1, 2021, LPEI and subsidiary have implemented revised accounting standards that are relevant to operations, which are as follows:

- PSAK 22 (Amendment 2019): Business Combinations regarding Definition of Business;
- Amendment PSAK 71, Amendment PSAK 55, Amendment PSAK 60, Amendment PSAK 62, and Amendment PSAK 73 regarding Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2;
- PSAK 110 (Improvement 2020): Accounting for Sukuk;
- PSAK 111 (Improvement 2020): Accounting for Wa'd; and
- PSAK 112: Accounting for Endowments;
- PSAK 1 (Annual Improvement 2021): Presentation of Financial Statements;
- PSAK 13 (Annual Improvement 2021): Investment Properties;
- PSAK 48 (Annual Improvement 2021): Impairment of Assets
- PSAK 66 (Annual Improvement 2021): Joint Arrangement; and
- ISAK 16 (Annual Improvement 2021): Service Concession Arrangements.

Implementation of new accounting standards has no significant impact to the consolidated financial statements.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan  
(lanjutan)**

**2.d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi**

LPEI menerapkan PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". PSAK penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa entitas manajemen (entitas yang menyediakan jasa personel manajemen kunci) adalah pihak berelasi yang dikenakan pengungkapan berelasi.

Suatu pihak dianggap berelasi dengan LPEI jika:

- a. langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan LPEI; (ii) memiliki kepentingan dalam LPEI yang memberikan pengaruh signifikan atas LPEI; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas LPEI;
- b. suatu pihak yang berelasi dengan LPEI;
- c. suatu pihak adalah ventura bersama di mana LPEI sebagai venturer;
- d. suatu pihak adalah anggota dari personel dipemanajemen kunci LPEI;
- e. suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (a) atau (d);
- f. suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau ngaruh signifikan oleh atau untuk pihak yang memiliki hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, yaitu individu seperti diuraikan dalam butir (d) atau (e);
- g. suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari LPEI atau entitas yang terkait dengan LPEI;

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi, kecuali dengan personel manajemen kunci, dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan LPEI akan memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.42/POJK.04/2020 tentang "Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan", pada saat transaksi-transaksi tersebut dilakukan.

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.d. Transactions with related parties**

*LPEI implemented PSAK No. 7 (improvement 2015) "Related Party Disclosures". This improvement of PSAK clarifies that a management entity (an entity that provides key management personnel services) is a related party subject to the related party disclosures.*

*Parties are considered to be related to LPEI if:*

- a. directly, or indirectly through one or more intermediaries, the parties (i) control, or are controlled by, or are under common control as with LPEI, (ii) have interests in LPEI which give significant influence on LPEI; or (iii) have joint control over LPEI;*
- b. a party which is related to LPEI;*
- c. a party is a joint venture in which LPEI is a venturer;*
- d. a party is the member of key management personnel of LPEI;*
- e. a party is a close family members of an individual described in clause (a) or (d);*
- f. a party is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by or for whom has significant voting rights in some entities, directly or indirectly, which are individuals identified in point (d) or (e);*
- g. a party is a post-employment programs for the benefit of employees of either LPEI or a party related to LPEI;*

*Transaction with related parties, except for key management personnel is conducted under terms and conditions similar with third party transactions. The transactions to be conducted by LPEI will be in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.42/POJK.04/2020 about "Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions".when the transactions are conducted.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan  
(lanjutan)**

**2.d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi  
(lanjutan)**

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 38 atas laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya, saldo dan transaksi yang material antara LPEI dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia (RI) dan entitas lain yang berelasi dengan Pemerintah Negara RI diungkapkan juga pada Catatan 38.

**2.e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan**

LPEI menerapkan PSAK 71, "Instrumen Keuangan" efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, yang menggantikan PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

Aset keuangan LPEI terdiri dari giro pada Bank Indonesia, giro pada bank, penempatan pada bank, efek-efek, tagihan derivatif, pembiayaan dan piutang syariah, piutang pembiayaan garansi, piutang asuransi dan penjaminan, tagihan akseptasi, dan aset lain-lain (bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan).

Liabilitas keuangan LPEI terdiri dari liabilitas segera, liabilitas akseptasi, efek-efek utang yang diterbitkan, liabilitas terkait dengan transaksi liabilitas derivatif, pinjaman yang diterima, utang asuransi, utang penjaminan, liabilitas sewa guna usaha dan liabilitas lain-lain (bunga yang masih harus dibayar, tantiem dan jasa produksi, kewajiban kepada penjamin ulang).

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.d. Transactions with related parties (continued)**

*All material transactions and balances with the related parties are disclosed in the relevant notes to financial statements and the details are presented in Note 38 of the financial statements. Furthermore, material balances and transactions between LPEI with the Government of the Republik Indonesia (RI) and other entities that are related with the Government of RI are disclosed also in Note 38.*

**2.e. Financial assets and financial liabilities**

*LPEI adopted PSAK 71, "Financial Instruments" with effect beginning January 1, 2020 which replaced PSAK 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement".*

*LPEI's financial assets consist of current accounts with Bank Indonesia, current accounts with banks, placements with banks, securities, derivative receivables, financing and sharia receivables, guarantee financing receivables, insurance and guarantee receivables, acceptances receivable, and other assets (accrued interest receivables and refundable deposits).*

*LPEI's financial liabilities consist of current liabilities, acceptances payable, derivative payables, debt securities issued, fund borrowings, insurance payables, guarantee payables, liability related to reverse repos, lease liabilities and other liabilities (accrued interest payable, tantiem and accrued bonus, liabilities to reguarantor).*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

2. **Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)**
- 2.e. **Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)**
- (i) **Klasifikasi**

LPEI mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
2. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajarmelalui penghasilan komprehensif lain;
3. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

**Pengujian SPPI**

Sebagai langkah pertama dari proses klasifikasi, LPEI menilai persyaratan kontraktual keuangan untuk mengidentifikasi apakah instrumen keuangan memenuhi pengujian SPPI.

Pokok pinjaman untuk tujuan pengujian ini didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal dan dapat berubah selama umur aset keuangan (misalnya, jika ada pembayaran pokok atau amortisasi premi/diskon).

Elemen bunga yang paling signifikan dalam perjanjian pembiayaan biasanya adalah pertimbangan atas nilai waktu dari uang dan risiko kredit. Untuk membuat penilaian SPPI, LPEI menerapkan pertimbangan dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan seperti mata uang dimana aset keuangan didenominasikan dan periode pada saat suku bunga ditetapkan.

Sebaliknya, persyaratan kontraktual yang memberikan eksposur lebih dari *de minimis* atas risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual yang tidak terkait dengan dasar pengaturan pinjaman, tidak menimbulkan arus kas kontraktual SPPI atas jumlah saldo. Dalam kasus seperti itu, aset keuangan diharuskan untuk diukur pada FVPL.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

2. **Summary of Significant Accounting Policies (continued)**
- 2.e. **Financial assets and financial liabilities (continued)**
- (i) **Classification**

*LPEI classifies its financial assets according to the following categories at initial recognition:*

1. *Financial assets measured at fair value through profit or loss;*
2. *Financial assets measured at fair value through other comprehensive income;*
3. *Financial assets measured at amortized cost.*

**SPPI Test**

*As a first step of its classification process, LPEI assesses the contractual terms of financial to identify whether they meet the SPPI test.*

*Principal for the purpose of this test is defined as the fair value of the financial asset at initial recognition and may change over the life of the financial asset (for example, if there are repayments of principal or amortisation of the premium/discount).*

*The most significant elements of interest within a lending arrangement are typically the consideration for the time value of money and financing risk. To make the SPPI assessment, LPEI applies judgement and considers relevant factors such as the currency in which the financial asset is denominated, and the period for which the interest rate is set.*

*In contrast, contractual terms that introduce a more than de minimis exposure to risks or volatility in the contractual cash flows that are unrelated to a basic lending arrangement, do not give rise to contractual cash flows that are solely payments of principal and interest on the amount outstanding. In such cases, the financial asset is required to be measured at FVPL.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**2.e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**(i) Klasifikasi (lanjutan)**

**Penilaian model bisnis**

LPEI menentukan model bisnisnya berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan bagaimana LPEI mengelola kelompok aset keuangannya untuk mencapai tujuan bisnisnya.

Model bisnis LPEI tidak dinilai berdasarkan masing-masing instrumen nya, tetapi pada tingkat portofolio secara agregat yang lebih tinggi dan didasarkan pada faktor-faktor yang dapat diamati seperti:

- Bagaimana kinerja model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut dievaluasi dan dilaporkan kepada personel manajemen kunci;
- Risiko yang mempengaruhi kinerja model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut) dan, khususnya, bagaimana cara risiko tersebut dikelola;
- Bagaimana manajer bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang tertagih);
- Frekuensi, nilai, dan waktu penjualan yang diharapkan, juga merupakan aspek penting dari penilaian LPEI.

Penilaian model bisnis didasarkan pada skenario yang diharapkan secara wajar tanpa mempertimbangkan skenario "worst case" atau "stress case". Jika arus kas setelah pengakuan awal direalisasikan dengan cara yang berbeda dari yang awal diharapkan, LPEI tidak mengubah klasifikasi aset keuangan dimiliki yang tersisa dalam model bisnis tersebut, tetapi memasukkan informasi tersebut dalam melakukan penilaian atas aset keuangan yang baru atau yang baru dibeli selanjutnya.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.e. Financial assets and financial liabilities (continued)**

**(i) Classification (continued)**

**Business model assessment**

*LPEI determines its business model at the level that best reflects how it manages LPEI of financial assets to achieve its business objective.*

*LPEI's business model is not assessed on an instrument-by-instrument basis, but at a higher level of aggregated portfolios and is based on observable factors such as:*

- *How the performance of the business model and the financial assets held within that business model are evaluated and reported to the entity's key management personnel;*
- *The risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held within that business model) and, in particular the way those risks are managed;*
- *How managers of the business are compensated (for example, whether the compensation is based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected);*
- *The expected frequency, value and timing of sales are also important aspects of LPEI's assessment.*

*The business model assessment is based on reasonably expected scenarios without taking "worst case" or "stress case" scenarios into account. If cash flows after initial recognition are realised in a way that is different from LPEI's original expectations, LPEI does not change the classification of the remaining financial assets held in that business model, but incorporates such information when assessing newly originated or newly purchased financial assets going forward.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**2.e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**(i) Klasifikasi (lanjutan)**

LPEI mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

LPEI mengukur aset keuangan dengan biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

1. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual.
2. persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang (SPPI).

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

LPEI menerapkan kategori baru berdasarkan PSAK 71 dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ketika kedua kondisi berikut terpenuhi:

1. Instrumen utang dimiliki dalam model bisnis, yang tujuannya dicapai dengan mengumpulkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan.
2. Ketentuan kontrak dari aset keuangan yang memenuhi pengujian SPPI.

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.e. Financial assets and financial liabilities (continued)**

**(i) Classification (continued)**

*LPEI classifies its financial assets in the following categories at initial recognition:*

- Financial assets measured at amortised cost*

*LPEI measures financial assets at amortised cost if both of the following conditions are met:*

- The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows.*
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.*

- Financial assets measured at fair value through other comprehensive income*

*LPEI applies the new category under SFAS 71 of financial assets measured at FVOCI when both of the following conditions are met:*

- The debt instrument is held within a business model, the objective of which is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets.*
- The contractual terms of the financial asset meet the SPPI test.*

- Financial assets measured at fair value through profit or loss.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**2.e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**(i) Klasifikasi (lanjutan)**

LPEI menerapkan kategori aset keuangan berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi jika tidak memenuhi kriteria sebagai biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut:

- a. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi  
Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi terdiri dari dua sub-kategori, yaitu liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh LPEI untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki LPEI untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama untuk memperoleh laba jangka pendek atau *position taking*.

- b. Liabilitas keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.e. Financial assets and financial liabilities (continued)**

**(i) Classification (continued)**

*LPEI applies the category of financial assets based on fair value through profit or loss if it does not meet the criteria as amortised cost or fair value through other comprehensive income.*

*Financial liabilities are classified into the following categories:*

- a. *Financial liabilities at fair value through profit or loss*  
*Financial liabilities at fair value through profit or loss consist of two sub-categories; financial liabilities classified as held for trading and financial liabilities designated by LPEI as at fair value through profit or loss upon initial recognition.*

*A financial liability is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term or if it is part of portfolio of identified financial instrument that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short term profit taking.*

- b. *Financial liabilities measured at amortised cost*

*Financial liabilities at amortized cost are financial liabilities that are not held-for-trading nor designated as at fair value through profit or loss upon the recognition liability.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan  
(lanjutan)**

**2.e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan  
(lanjutan)**

**(i) Klasifikasi (lanjutan)**

**2. Summary of Significant Accounting  
Policies (continued)**

**2.e. Financial assets and financial liabilities  
(continued)**

**(i) Classification (continued)**

<b>Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71 / Category as defined by PSAK 71</b>		<b>Golongan (ditentukan oleh LPEI)/ Class (as determined by LPEI)</b>
Aset keuangan/ <i>Financial assets</i>	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Financial assets at fair value through profit or loss</i>	Tagihan derivatif/ <i>derivative receivables</i>
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/ <i>Financial assets at amortised cost</i>	Giro pada Bank Indonesia/ <i>Current accounts with Bank Indonesia</i>
		Giro pada bank-bank lain/ <i>Current accounts with other banks</i>
		Penempatan pada bank Indonesia dan bank-bank lain/ <i>Placements with Bank Indonesia and other banks</i>
Liabilitas keuangan/ <i>Financial liabilities</i>	Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Financial liabilities at fair value through profit or loss</i>	Tagihan akseptasi/ <i>Acceptances receivables</i>
		Pembiayaan, piutang pembiayaan garansi, tagihan akseptasi/ <i>Financing receivables, guarantee financing receivables, acceptances receivable</i>
		Efek-efek/ <i>Marketable securities</i>
	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortised cost</i>	Liabilitas derivatif/ <i>Derivative payables</i>
		Liabilitas segera/ <i>Obligation due immediately</i>
		Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali/ <i>Securities sold under agreements to repurchase</i>
		Liabilitas akseptasi/ <i>Acceptable payables</i>
		Efek-efek yang ditebitkan/ <i>Marketable securities issued</i>
		Pinjaman yang diterima, utang asuransi, utang penjaminan, liabilitas sewa guna usaha/ <i>Fund Borrowings, insurance payables, guarantee payables, lease liabilities</i>
		Liabilitas lain-lain/ <i>Other liabilities</i>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**2.e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**(ii) Metode suku bunga efektif**

Metode suku bunga efektif adalah metode untuk menghitung biaya diamortisasi instrumen utang dan alokasi pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif yang mendiskonto penerimaan kas masa depan (termasuk semua biaya pada poin-poin yang dibayar atau diterima yang membentuk bagian integral dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premi atau diskon lainnya) sepanjang umur ekonomis yang diharapkan dari instrumen utang, atau (jika lebih tepat) periode yang lebih singkat, dengan jumlah tercatat neto pada pengakuan awal.

**(iii) Pengakuan awal dan pengukuran selanjutnya**

Setelah pengakuan awal, LPEI mengukur aset keuangan, sesuai dengan klasifikasi aset keuangan pada (i) Biaya perolehan diamortisasi; (ii) Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain; atau (iii) Nilai wajar melalui laba rugi.

**- Aset Keuangan pada biaya perolehan diamortisasi**

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur dengan menjumlahkan aset keuangan yang diukur saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya dan disesuaikan dengan penyisihan kerugiannya.

Keuntungan atau kerugian akibat fluktuasi nilai wajar tidak diakui aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.e. Financial assets and financial liabilities (continued)**

**(ii) Effective interest method**

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a debt instrument and of allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate exactly that discounts estimated future cash receipts (including all fees on points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs other premiums or discounts) through the expected life of the debt instrument, or (where appropriate) a shorter period, to the net carrying amount on the initial recognition.

**(iii) Initial recognition and subsequent measurement**

After initial recognition, the LPEI measures financial assets, according to the classification of financial assets at (i) Amortized cost; (ii) Fair value through other comprehensive income; or (iii) Fair value through profit or loss

**- Financial assets at amortized cost**

Financial assets at amortized cost are measured by adding up the financial assets measured at initial recognition minus principal payments, added or reduced by cumulative amortization using the effective interest method calculated from the difference between the initial value and the maturity value and adjusted for the allowance for losses.

Gains or losses due to fluctuations in fair value are not recognized financial assets at amortized cost.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**2.e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

- (iii) Pengakuan awal dan pengukuran selanjutnya (lanjutan)

Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode bunga efektif yaitu dengan menerapkan suku bunga efektif atas jumlah tercatat bruto aset keuangan, kecuali untuk:

- a) aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk. Untuk aset keuangan tersebut, LPEI menerapkan suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit atas biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sejak pengakuan awal.
- b) aset keuangan yang tidak dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk tetapi selanjutnya menjadi aset keuangan memburuk. Untuk aset keuangan tersebut, LPEI menerapkan suku bunga efektif atas biaya perolehan diamortisasi aset keuangan di periode pelaporan selanjutnya.

LPEI dalam suatu periode pelaporan menghitung pendapatan bunga dengan menerapkan metode bunga efektif atas biaya perolehan diamortisasi aset keuangan, pada periode pelaporan selanjutnya, menghitung pendapatan bunga dengan menerapkan suku bunga efektif atas jumlah tercatat bruto jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut membaik sehingga aset keuangan tidak lagi mengalami penurunan nilai kredit dan perbaikan tersebut secara objektif dapat dikaitkan dengan suatu peristiwa yang terjadi setelah persyaratan yang tercantum dalam poin (b) paragraf di atas diterapkan (misalnya perbaikan peringkat kredit peminjam).

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.e. Financial assets and financial liabilities (continued)**

- (iii) Initial recognition and subsequent measurement (continued)

*Interest income is calculated using the effective interest method by applying an effective interest rate to the gross carrying amount of financial assets, except for:*

- a) *financial assets purchased or originating from financial assets deteriorate. For these financial assets, LPEI applies an effective interest rate adjusted by credit for the amortized cost of the financial assets from initial recognition.*
- b) *financial assets that are not purchased or that originate from financial assets deteriorate but subsequently become financial assets deteriorate. For these financial assets, LPEI applies an effective interest rate on the amortized cost of the financial assets in the next reporting period*

*LPEI in a reporting period calculates interest income by applying the effective interest method on the acquisition cost of amortized financial assets, in the next reporting period, calculating interest income by applying an effective interest rate on the gross carrying amount if the credit risk of the financial instrument improves so that the financial assets no longer experience Impairment of credit value and improvement can be objectively related to an event that occurs after the requirements listed in point (b) of the above paragraph are applied (for example an improvement in the borrower's credit rating).*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**2.e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**(iii) Pengakuan awal dan pengukuran selanjutnya (lanjutan)**

- Aset Keuangan pada biaya nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Keuntungan atau kerugian aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui dalam penghasilan komprehensif lain sampai aset keuangan dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, kecuali:
  - a. bunga yang dihitung menggunakan metode bunga efektif diakui dalam laba rugi, jumlah yang diakui dalam laba rugi sama dengan jumlah yang akan diakui dalam laba rugi jika aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
  - b. keuntungan atau kerugian penurunan nilai; atau
  - c. Keuntungan atau kerugian selisih kurs.

Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Khusus untuk aset keuangan berbentuk instrumen ekuitas, jumlah yang disajikan pada penghasilan komprehensif lainnya tidak selanjutnya dialihkan ke laba rugi. Akan tetapi LPEI dapat mengalihkan keuntungan atau kerugian kumulatif pada ekuitas.

Sesuai dengan paragraf sebelumnya, jika aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, jumlah yang diakui dalam laba rugi sama dengan jumlah yang akan diakui dalam laba rugi jika aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.e. Financial assets and financial liabilities (continued)**

**(iii) Initial recognition and subsequent measurement (continued)**

*- Financial assets at fair value through other comprehensive income  
Gains or losses of financial assets measured at fair value through other comprehensive income are recognized in other comprehensive income until the financial assets are derecognized or reclassified, except:*

- a. interest calculated using the effective interest method is recognized in profit or loss, the amount recognized in profit or loss is equal to the amount to be recognized in profit or loss if the financial asset is measured at amortized cost;*
- b. impairment gains or losses; or*
- c. Foreign exchange gains or losses.*

*When a financial asset is derecognized, the cumulative gain or loss previously recognized in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.*

*Specifically for financial assets in the form of equity instruments, the amounts presented in other comprehensive income are not subsequently transferred to profit or loss. However, LPEI can transfer cumulative gains or losses on equity.*

*In accordance with the previous paragraph, if a financial asset is measured at fair value through other comprehensive income, the amount recognized in profit or loss is the same as the amount to be recognized in profit or loss if the financial asset is measured at amortized cost.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**2.e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**(iii) Pengakuan awal dan pengukuran selanjutnya (lanjutan)**

- Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi  
Aset dinilai pada nilai wajar. Seluruh keuntungan dan kerugian yang timbul akibat perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi, kecuali instrumen lindung nilai yang ditetapkan kedalam hubungan lindung nilai tertentu.

LPEI menerapkan persyaratan penurunan nilai untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan dalam bentuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasi di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.

Setelah pengakuan awal, LPEI mengukur liabilitas keuangan, sesuai dengan klasifikasi aset keuangan pada: (i) Biaya perolehan diamortisasi; atau (ii) Nilai wajar melalui laba rugi.

Untuk liabilitas keuangan yang diukur pada laba rugi, keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi. Terdapat pengecualian pada kasus liabilitas keuangan ditetapkan sebagai FVTPL dimana perubahan risiko kredit liabilitas diakui pada penghasilan komprehensif lain dengan keuntungan dan kerugian lainnya diakui pada laba rugi.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.e. Financial assets and financial liabilities (continued)**

**(iii) Initial recognition and subsequent measurement (continued)**

- *Financial assets at fair value through profit or loss*  
*Assets are valued at fair value. All gains and losses arising from changes in fair value are recognized in profit or loss, except for hedging instruments that are designated in certain hedging relationships.*

*LPEI applies an impairment requirement for financial assets measured at amortized cost and financial assets in the form of debt instruments that are measured at fair value through other comprehensive income.*

*Investment in equity instruments that do not have a quoted market price in an active market and whose fair value cannot be reliably measured are measured at cost.*

*After initial recognition, LPEI measures financial liabilities, according to the classification of financial assets at: (i) Amortized cost; or (ii) Fair value through profit or loss*

*For financial liabilities measured at profit or loss, gains and losses are recognized in profit or loss. There are exceptions in the case of financial liabilities designated as FVTPL where changes in credit liability risks are recognized in other comprehensive income with other gains and losses recognized in profit or loss.*

*After initial recognition, financial liabilities at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value are recognized in profit or loss.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan  
(lanjutan)**

**2.e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan  
(lanjutan)**

**(iv) Penghentian Pengakuan**

LPEI menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau LPEI mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana LPEI secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau kewajiban atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh LPEI diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Dalam transaksi dimana LPEI secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, LPEI menghentikan pengakuan aset tersebut jika LPEI tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, LPEI tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan LPEI dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.e. Financial assets and financial liabilities (continued)**

**(iv) Derecognition**

*LPEI derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or when it transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred. Any interest in transferred financial assets that is created or retained by the LPEI is recognized as a separate asset or liability.*

*In transactions in which the LPEI neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of ownership of a financial asset, the LPEI derecognizes the asset if it does not retain control over the asset. The rights and obligations retained in the transfer are recognized separately as assets and liabilities as appropriate. In transfers in which control over the asset is retained, the LPEI continues to recognize the asset to the extent of its continuing involvement, determined by the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**2.e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

(iv) Penghentian Pengakuan (lanjutan)

- a. Penghentian pengakuan atas modifikasi substansial atas syarat dan ketentuan Jika modifikasi atas aset keuangan tidak menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan, maka LPEI akan mencatat aset keuangan tersebut sebagai aset keuangan modifikasi pada tanggal modifikasi. Selisih jumlah tercatat bruto aset keuangan awal dengan nilai wajar aset modifikasi diakui di laba rugi pendapatan atau biaya transaksi yang terjadi sehubungan dengan kejadian modifikasi diakui sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian atas modifikasi tersebut.
- b. Penghentian pengakuan selain modifikasi substansial Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:
- hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
  - LPEI telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dan antara (a) LPEI telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) LPEI tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.e. Financial assets and financial liabilities (continued)**

(iv) Derecognition (continued)

a. *Derecognition due to substantial modification of terms and condition*  
*If the modification of the financial asset does not result in the termination of recognition of the financial asset, LPEI will record the financial asset as the modified financial asset at the date of modification. ii. The difference between the gross carrying amount of the initial financial assets and the fair value of the modified assets is recognized in profit or loss. The income or transaction costs incurred in connection with the modification event are recognized as part of the gain or loss on the modification.*

b. *Derecognition other than for substantial modification*

*Financial assets are derecognized if:*

- *the contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; or*
- *LPEI has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the cash flows in full without material delay to third parties under a 'pass-through' arrangement; and either (a) LPEI has transferred substantially all the risks and rewards of the assets, or (b) LPEI has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred the control of the asset.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**2.e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)**

LPEI menghapusbukukan aset keuangan dan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat LPEI menentukan bahwa kemungkinan tertagihnya aset keuangan tersebut relatif kecil. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti kemungkinan tertagihnya piutang dari debitur, telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur/penerbit aset keuangan sehingga debitur/penerbit tidak lagi dapat melunasi kewajibannya, atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh eksposur. Jumlah hari lewat jatuh tempo yang digunakan untuk memicu penghapusan pembiayaan tanpa jaminan dalam portofolio ritel ditentukan berdasarkan pengalaman akun masa lalu yang menunjukkan ketika suatu akun mencapai jumlah hari lewat jatuh tempo tertentu, maka probabilitas pengembalian dari akun tersebut mendekati nol.

Pembiayaan dan piutang atau aset keuangan lain dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistik mengenai pengembalian pembiayaan dan piutang atau hubungan normal antara LPEI dan debitur telah berakhir. Ketika pembiayaan dan piutang tidak dapat dilunasi, maka akan dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

Penerimaan kemudian atas pembiayaan yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada tahun berjalan dikreditkan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan di laporan posisi keuangan, sedangkan jika setelah tanggal laporan posisi keuangan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.e. Financial assets and financial liabilities (continued)**

**(iv) Derecognition (continued)**

*LPEI writes off a financial asset and any related impairment losses, when the LPEI determines that the collectibility of financial assets is relatively remote. This decision is reached after considering information such as recoverability of the amount due from borrowers, the occurrence of significant changes in the financial position of borrower/financial asset issuer such that the borrower/issuer can no longer pay the obligation, or that proceeds from collateral will not be sufficient to pay back the entire exposure. The days past due used to trigger write off of unsecured financing in retail portfolio are broadly driven by past experiences which shows that once an account reaches the certain number of days past due, the probability of recovery is almost zero.*

*Financing and receivables or other financial assets are written off when there is no realistic prospect of collection in the near future or the normal relationship between LPEI and the borrowers has ceased to exist. When financing and receivables are deemed uncollectible, they are written off against the related allowance for impairment losses.*

*Subsequent recoveries from financing previously written off are added to the allowance for impairment losses account in the statement of financial position, if recovered in the current year and are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as other operating income, if recovered after the statement of financial position dates.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**2.e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)**

Ketika LPEI telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki *pass-through arrangement* dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan LPEI yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Melanjutkan keterlibatan yang diambil dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer adalah diukur dari nilai tercatat awal dari aset dan jumlah maksimum pertimbangan bahwa LPEI diminta untuk membayar.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru. Perbedaan antara nilai tercatat liabilitas keuangan awal dan imbalan yang dibayarkan diakui dalam laba rugi.

Kebijakan akuntansi terkait pencadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dapat mengacu pada Catatan 2o.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.e. Financial assets and financial liabilities (continued)**

**(iv) Derecognition (continued)**

*When LPEI has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of LPEI's continuing involvement in the asset.*

*Continuing involvement that has taken the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that LPEI could be required to repay.*

*Financial liabilities are derecognized when the obligation under the liability is discharged, cancelled or has expired. Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability. The difference between the carrying value of the original financial liability and the consideration paid is recognized in profit or loss.*

*The accounting policy related to the allowance for impairment losses can be seen on Note 2o.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan  
(lanjutan)**

**2.e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan  
(lanjutan)**

(v) Pengakuan pendapatan dan beban

- a. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan dalam nilai wajar tidak diakui untuk aset yang dicatat berdasarkan perolehan diamortisasi;
- b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan dalam nilai wajar diakui dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk aset yang diklasifikasikan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- c. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam ekuitas untuk aset yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas dan pendapatan komprehensif lain harus diakui pada laba rugi

(vi) Reklasifikasi aset keuangan

Reklasifikasi atas aset keuangan yang dimiliki dilakukan jika adanya perubahan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan dan tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas liabilitas keuangan.

Perubahan model bisnis sifatnya harus berdampak secara signifikan terhadap kegiatan operasional LPEI seperti memperoleh, melepaskan, atau mengakhiri suatu lini bisnis. Selain itu, perlu membuktikan adanya perubahan tersebut kepada pihak eksternal.

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.e. Financial assets and financial liabilities (continued)**

(v) Income and expense recognition

- a. *Gains and losses arising from changes in fair value are not recognized for assets recorded at amortized cost;*
- b. *Gains and losses arising from changes in fair value are recognized in the Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income for assets classified in the group of financial assets measured at fair value through profit or loss;*
- c. *Gains and losses arising from changes in fair value are recognized in equity for assets classified as fair value through other comprehensive income.*

*When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity and other comprehensive income are recognized in the statement of profit or loss.*

(vi) Reclassification of financial assets

*Reclassification of owned financial assets is made if there is a change in the business model for managing financial assets and is not allowed to reclassify financial liabilities.*

*Changes in the business model must have a significant impact on the LPEI's operational activities, such as acquiring, releasing, or ending a line of business. In addition, it is necessary to prove these changes to external parties.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**2.e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

(vi) Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

LPEI akan mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terkena dampak dari perubahan model bisnis. Perubahan tujuan model bisnis LPEI harus berdampak sebelum tanggal reklassifikasi.

Yang bukan merupakan perubahan model bisnis adalah:

- a. perubahan intensi berkaitan dengan aset keuangan tertentu (bahkan dalam situasi perubahan signifikan dalam kondisi pasar).
- b. hilangnya sementara pasar tertentu untuk aset keuangan.
- c. pengalihan aset keuangan antara bagian dari Grup dengan model bisnis berbeda

(vii) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilainya dilaporkan di laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus jumlah keduanya dan terdapat intensi untuk diselesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Hak yang berkekuatan hukum berarti:

- a. tidak terdapat kontingenji di masa yang akan datang, dan
- b. hak yang berkekuatan hukum pada kondisi-kondisi berikut ini:
  - i. kegiatan bisnis normal;
  - ii. kondisi kegagalan usaha; dan
  - iii. kondisi gagal bayar atau bangkrut.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.e. Financial assets and financial liabilities (continued)**

(vi) Reclassification of financial assets (continued)

*The LPEI will reclassify all financial assets affected by changes in business models. Changes in the objectives of the LPEI's business model should take effect before the reclassification date.*

*What is not a change in the business model are:*

- a. *change in intention relating to a particular financial asset (even in situations of significant changes in market conditions).*
- b. *the temporary loss of certain markets for financial assets.*
- c. *transfers of financial assets between parts of the Group with different business models*

(vii) Offsetting

*Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position if, and only if, there is currently an enforceable legal rights to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously.*

*This means that the right to set off:*

- a. *must not be contingent on a future event, and*
- b. *must be legally enforceable in all of the following circumstances:*
  - i. *the normal course of business;*
  - ii. *the event of default; and*
  - iii. *the event of insolvency or bankruptcy.*

*Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the accounting standards.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**2.e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

(viii) Pengukuran biaya perolehan diamortisasi  
Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya dan dikurangi penurunan nilai.

(ix) Pengukuran nilai wajar  
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nilai pasar dapat diperoleh dari Interdealer Market Association (IDMA) atau harga pasar atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) dari Bloomberg dan Reuters pada tanggal pengukuran.

Selain itu, untuk tujuan pelaporan keuangan, pengukuran nilai wajar dikategorikan ke Level 1, 2 atau 3 berdasarkan tingkat input untuk pengukuran nilai wajar yang dapat diobservasi dan signifikansi input pada pengukuran nilai wajar secara keseluruhan, yang digambarkan sebagai berikut:

- Tingkat 1 adalah harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran;
- Tingkat 2 adalah input, selain harga kuotasi yang termasuk dalam Level 1, yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- Tingkat 3 adalah input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.e. Financial assets and financial liabilities (continued)**

**(viii) Amortised cost measurement**

*The amortised cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.*

**(ix) Fair value measurement**

*Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value can be obtained from IDMA's (Interdealer Market Association) or quoted market prices or broker's quoted price from Bloomberg and Reuters on the measurement date.*

*In addition, for financial reporting purposes, fair value measurements are categorized into Level 1, 2 or 3 based on the degree to which the inputs to the fair value measurements are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety, which are described as follows:*

- *Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date;*
- *Level 2 inputs are inputs, other than quoted prices included within Level 1, which are observable for the asset or liability, either directly or indirectly; and*
- *Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan  
(lanjutan)**

**2.e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan  
(lanjutan)**

**(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)**

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, LPEI menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan (jika tersedia), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial serupa dan analisis arus kas yang didiskonto. LPEI menggunakan *credit risk spread* sendiri untuk menentukan nilai wajar dari liabilitas derivatif dan liabilitas lainnya yang telah ditetapkan menggunakan opsi nilai wajar.

Ketika terjadi kenaikan di dalam credit spread, LPEI mengakui keuntungan atas liabilitas tersebut sebagai akibat penurunan nilai tercatat liabilitas. Ketika terjadi penurunan di dalam credit spread, LPEI mengakui kerugian atas liabilitas tersebut sebagai akibat kenaikan nilai tercatat liabilitas.

LPEI menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan swap mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

Untuk instrumen yang lebih kompleks, LPEI menggunakan model penilaian internal, yang pada umumnya berdasarkan teknik dan metode penilaian yang umumnya diakui sebagai standar industri. Model penilaian terutama digunakan untuk menilai kontrak derivatif yang ditransaksikan melalui pasar *over-the-counter*, unlisted debt securities (termasuk surat utang dengan derivatif melekat) dan instrumen utang lainnya yang pasarnya tidak aktif. Beberapa input dari model ini tidak berasal dari data yang dapat diobservasi di pasar dan dengan demikian merupakan hasil estimasi berdasarkan asumsi tertentu.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.e. Financial assets and financial liabilities (continued)**

**(ix) Fair value measurement (continued)**

If a market for a financial instrument is not active, LPEI establishes fair value using a valuation technique. Valuation techniques include using the recent arm's length transactions between knowledgeable and willing parties (if available), reference to the current fair value of other instruments that are substantially the same and discounted cash flow analysis. LPEI uses its own credit risk spreads in determining the fair value for its derivative liabilities and all other liabilities for which it has elected the fair value option.

When LPEI's credit spread widens, LPEI recognizes a gain on these liabilities because the value of the liabilities has decreased. When LPEI's credit spread becomes narrow, LPEI recognizes a loss on these liabilities because the value of the liabilities has increased.

LPEI uses widely recognized valuation models for determining fair values of financial instruments of lower complexity, such as exchange value options and currency swaps. For these financial instruments, inputs into models are generally market-observable.

For more complex instruments, LPEI uses internally developed model which are usually based on valuation methods and techniques generally recognized as standard within the industry. Valuation models are used primarily to value derivatives transacted in the over-the-counter market, unlisted debt securities (including those with embedded derivatives) and other debt instruments for which markets were or have become illiquid. Some of the inputs to these models may not be market observable and are therefore estimated based on assumptions.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan  
(lanjutan)**

**2.e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan  
(lanjutan)**

**(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)**

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

Hasil dari suatu teknik penilaian merupakan sebuah estimasi atau perkiraan dari suatu nilai yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, dan teknik penilaian yang digunakan mungkin tidak dapat menggambarkan seluruh faktor yang relevan atas posisi yang dimiliki LPEI. Dengan demikian, penilaian disesuaikan dengan faktor tambahan seperti model risk, risiko likuiditas dan risiko pembiayaan *counterparties*.

Berdasarkan kebijakan teknik penilaian nilai wajar, pengendalian dan prosedur yang diterapkan, manajemen berkeyakinan bahwa penyesuaian atas penilaian tersebut di atas diperlukan dan dianggap tepat untuk menyajikan secara wajar nilai dari instrumen keuangan yang diukur berdasarkan nilai wajar dalam laporan posisi keuangan. Data harga dan parameter yang digunakan didalam prosedur pengukuran pada umumnya telah di-review dan disesuaikan, jika diperlukan, khususnya untuk perkembangan atas pasar terkini.

Pada saat nilai wajar dari *unlisted equity instruments* tidak dapat ditentukan dengan handal, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada LPEI dan debitur ditentukan menggunakan nilai kini berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas pembiayaan dan piutang, likuiditas dan biaya.

**2. Summary of Significant Accounting Policies  
(continued)**

**2.e. Financial assets and financial liabilities  
(continued)**

**(ix) Fair value measurement (continued)**

*For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the fair value of another instrument which substantially has the same characteristics or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the marketable securities.*

*The output of a valuation technique is an estimate or approximation of a value that cannot be determined with certainty, and the valuation technique employed may not fully reflect all factors relevant to the positions that LPEI holds. Valuations are therefore adjusted, with additional factors such as model risks, liquidity risk and counterparties credit risk.*

*Based on the established fair value valuation technique policy, related controls and procedures applied, management believes that these valuation adjustments are necessary and considered appropriate to fairly state the values of financial instruments measured at fair value in the statement of financial position. Price data and parameters used in the measurement procedures applied are generally reviewed and adjusted, if necessary, particularly in view of the current market developments.*

*In cases when the fair value of unlisted equity instruments cannot be determined reliably, the instruments are carried at cost less impairment value. The fair values of financing and receivables as well as liability to LPEI and debtors are determined using a present value model on the basis of contractually agreed cash flows, by considering quality of financing and receivables, liquidity and costs.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**2.e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)**

Aset keuangan, *long position*, liabilitas keuangan, dan *short position* diukur dengan harga penutupan. Dimana LPEI memiliki posisi aset dan liabilitas yang risiko pasarnya saling hapus, maka dapat digunakan nilai tengah dari nilai pasar sebagai dasar untuk menentukan nilai wajar posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian tersebut terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka atau neto (*net open position*), mana yang lebih sesuai.

**(x) Perbedaan hari pertama**

Pada saat nilai transaksi berbeda dengan nilai wajar dari transaksi pasar lainnya yang dapat diobservasi saat ini atas instrumen yang sama atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan variabel data dari pasar yang dapat diobservasi. LPEI secara langsung mengakui perbedaan antara nilai transaksi dan nilai wajar ("1 hari" keuntungan atau kerugian) pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jika nilai wajar ditentukan berdasarkan data yang tidak dapat diobservasi, maka perbedaan antara nilai transaksi dan nilai model hanya dapat diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat data menjadi dapat diobservasi atau pada saat instrumen tersebut tidak diakui lagi.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.e. Financial assets and financial liabilities (continued)**

**(ix) Fair value measurement (continued)**

*Financial assets, long positions, financial liabilities, and short positions are measured at closing price. Where LPEI has assets and liabilities positions with off-setting market risk, middle market prices are used to measure the off-setting risk positions and a bid or ask price adjustment is applied to the net open positions as appropriate.*

**(x) Day 1 (one) difference**

*When the transaction price differs from the fair value of other observable current market transactions in the same instrument or based on a valuation technique whose variables include only data from observable markets. LPEI immediately recognizes the difference between the transaction price and fair value (a 'Day 1' profit or loss) in the statement of profit or loss and comprehensive income. In cases where fair value is determined using data which is not observable, the difference between the transaction price and model value is only recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income when the inputs become observable or when the instrument is derecognized.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**2.f. Giro pada Bank Indonesia dan bank**

Giro pada Bank Indonesia dan bank diklasifikasikan masing-masing sebagai biaya perolehan diamortisasi. Giro pada Bank Indonesia dan bank dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

**2.g. Penempatan pada bank**

Penempatan pada bank adalah penanaman dana pada bank berupa penempatan pada pasar uang (*interbank call money*) dan deposito berjangka.

Penempatan pada bank diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Penempatan pada bank dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

**2.h. Efek-efek**

Efek-efek terdiri atas efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang, berupa Obligasi Negara Republik Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan obligasi korporasi.

Efek-efek pada awalnya disajikan sebesar nilai wajarnya.

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.f. Current accounts with Bank Indonesia and banks**

*Current accounts with Bank Indonesia and banks are classified as amortised cost. The current accounts with Bank Indonesia and banks are stated at amortised cost using the effective interest method less allowance for impairment losses.*

**2.g. Placements with banks**

*Placements with banks represent funds in banks in the form of interbank call money and time deposits.*

*Placements with banks are classified as amortised cost. The placements with banks are stated at amortised cost using the effective interest method less allowance for impairment losses.*

**2.h. Securities**

*Securities consist of securities traded on the stock exchanges and in the money market, in the form of bonds of the Republic of Indonesia, Certificates of Bank Indonesia (SBI) and corporate bonds.*

*Securities are initially measured at fair value.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**2.h. Efek-efek (lanjutan)**

Setelah pengakuan awal, efek-efek dicatat sesuai dengan kategorinya. Pada tanggal 1 Januari 2020, seluruh efek-efek diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Penilaian efek-efek didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut:

1. Efek-efek diakui pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dinyatakan pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
2. Efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dinyatakan pada nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs atas efek-efek yang nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**2.i. Sukuk**

Surat berharga syariah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain obligasi syariah (sukuk) dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

LPEI menentukan klasifikasi investasi pada surat berharga, khususnya sukuk, berdasarkan model usaha yang ditentukan berdasarkan klasifikasi sesuai PSAK No. 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

- 1) Sukuk diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo menggunakan metode garis lurus.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.h. Securities (continued)**

*After the initial recognition, the securities are recorded according to their category. As of January 1, 2020 all securities are classified as fair value through other comprehensive income.*

*The valuation of securities is stated based on the classification as follows:*

- 1. Securities classified as fair value through other comprehensive income are stated at fair value. Gains and losses from changes in fair value are recognized directly in the statement of profit or loss and other comprehensive income.*
- 2. Securities classified as fair value through other comprehensive income are stated at fair value. Interest income is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest method. Foreign exchange gains or losses on fair value through other comprehensive income investments are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.*

**2.i. Sukuk**

*Sharia securities is a proof of investment based on syariah principles that are commonly traded in syariah money market and/or sharia capital market, such as sharia bonds (sukuk) and other securities based on syariah principles.*

*LPEI defined the classification of investment in marketable securities especially sukuk, based on business model in accordance with SFAS No. 110 (Revised 2015) on "Accounting for Sukuk" as follows:*

- 1) Sukuk measured at cost are stated at cost (including transaction costs), adjusted by unamortized premium and/or discount. Premium and discount are amortized over the period until maturity using straight line method.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**2.i. Sukuk (lanjutan)**

- 2) Sukuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun yang bersangkutan.
- 3) Sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya. Surat berharga disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Premi dan diskonto diamortasi selama periode hingga jatuh tempo menggunakan metode garis lurus.

**2.j. Instrumen keuangan derivatif**

Dalam melakukan usaha bisnisnya, LPEI melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif seperti kontrak berjangka mata uang asing dan swap mata uang asing untuk mengelola eksposur pada risiko pasar seperti risiko mata uang dan risiko tingkat suku bunga.

Seluruh instrumen derivatif dicatat dalam laporan posisi keuangan berdasarkan nilai wajarnya. Nilai wajar tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar, kurs Reuters pada tanggal pelaporan laporan posisi keuangan, diskonto arus kas, model penentu harga atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) atas instrumen lain yang memiliki karakteristik atau model penentuan harga serupa.

Nilai wajar instrumen derivatif ditentukan berdasarkan diskonto arus kas dan model penentu harga atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa.

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.i. Sukuk (continued)**

- 2) *Sukuk measured at fair value through profit and loss are stated at fair value. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year statements of profit or loss and other comprehensive income.*
- 3) *Sukuk measured at fair value through other comprehensive income are measured at fair value. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair value are presented in other comprehensive income. Premium and discount are amortized over the period until maturity using straight line method.*

**2.j. Derivative financial instruments**

*In the normal course of business, LPEI enters into transactions involving derivative financial instruments such as foreign currency forward contracts and foreign currency swaps to manage exposures on market risks, such as currency risk and interest rate risk.*

*All derivative instruments are recognized in the statement of financial position at fair value. The fair value is based on market rate, Reuters exchange rate at statement of financial position date, discounted cash flows, price valuation or broker quoted price on other instruments with similar characteristics or price model.*

*The fair value of derivative instruments is determined based on discounted cash flows and pricing models or quoted prices from brokers of other instruments with similar characteristics.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**2.j. Instrumen keuangan derivatif (lanjutan)**

Sejak 1 Januari 2020, derivatif melekat tidak lagi dipisahkan dari aset keuangan utamanya. Melainkan, aset keuangan diklasifikasikan berdasarkan model bisnis dan ketentuan kontraktualnya. Akuntansi untuk derivatif yang melekat atas liabilitas keuangan dan kontrak utama non-keuangan dalam PSAK 71 adalah sama dengan dalam PSAK 55

**2.k. Tagihan wesel ekspor**

Tagihan wesel ekspor diklasifikasikan dan disajikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Tagihan wesel ekspor adalah wesel ekspor yang dinegosiasikan secara diskonto dan dijaminkan oleh LPEI. Tagihan wesel ekspor dicatat pada biaya perolehan diamortisasi setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

**2.l. Pembiayaan dan piutang**

Pembiayaan dan piutang yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utang dan bunganya setelah jangka waktu tertentu, dan tagihan yang berasal dari transaksi perdagangan yang telah jatuh tempo yang belum diselesaikan dalam waktu 15 (lima belas) hari.

Pembiayaan dan piutang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Pembiayaan dan piutang yang diberikan pada awalnya diukur menggunakan metode EIR dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi diukur dengan memperhitungkan diskonto atau premi yang timbul pada saat akuisisi serta biaya/fee transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif. Amortisasi tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Cadangan kerugian atas penurunan nilai dilakukan dengan menggunakan metode perhitungan kerugian kredit ekspektasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 20.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.j. Derivative financial instruments (continued)**

*From January 1, 2020, embedded derivatives are no longer separated from a host financial asset. Instead, financial assets are classified based on the business model and their contractual terms. The accounting for derivatives embedded in financial liabilities and in non-financial host contracts under SFAS 71 is the same as it was under SFAS 55*

**2.k. Export bills receivable**

*Export bills receivable are classified and presented as amortised cost. Export bills receivable are negotiated export bills discounted and negotiated by LPEI. Export bills receivable are stated at amortized cost less allowance for impairment losses.*

**2.l. Financing and receivables**

*Financing and receivables represent funds provided or receivables that can be considered as equivalents thereof, based on agreements or financing contracts with borrowers, where borrowers are required to repay their debts with interest after a specified period, and matured trade finance facilities which have not been settled within 15 (fifteen) days.*

*Financing and receivables are classified as amortised cost.*

*Financing and receivables provided are measured at amortized cost using EIR method less allowance for impairment losses. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and cost/fee that are an integral part of the EIR. The amortization is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Allowance for impairment losses is carried out using the expected credit loss calculation method as disclosed in Note 20.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan  
(lanjutan)**

**2.m. Pembiayaan dan piutang berdasarkan prinsip syariah**

Pembiayaan/piutang berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil antara LPEI dengan pihak lain selama jangka waktu tertentu. Pembiayaan/piutang tersebut meliputi piutang *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah*.

Piutang *murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan harga pembelian dan marjin yang telah disepakati oleh pembeli dan penjual dan dibuat secara eksplisit (dinyatakan dalam akad pembiayaan). *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, LPEI melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari debitur.

Piutang *murabahah* pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (*mitra musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan *nisbah* pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan kerugian yang dibentuk berdasarkan hasil penelaahan oleh manajemen terhadap tingkat kolektibilitasnya pada setiap akhir tahun.

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.m. Sharia financing and receivables**

*Sharia financing/receivables are receivables from providing funds or other similar forms of receivables arising from transactions carried out based on the sale and purchase arrangements and profit sharing between LPEI and borrowers for a certain period of time. The financing/receivables consist of murabahah receivables and musyarakah financing.*

*Murabahah receivable is a transaction carried out based on sales and purchase agreement whereby the price and the profit margin are agreed by the buyer and seller and are disclosed explicitly (stated on the financing agreement). Murabahah may or may not be carried out based on a certain order to purchase goods. Under Murabahah, based on a certain order, the purchase will be realized by LPEI after the order is received.*

*Murabahah receivable is initially recognized at fair value plus directly attributable transaction costs and is an additional cost to obtain the respected financial assets and after the initial recognition are measured at amortized cost using the effective interest rate method less any allowance for impairment losses.*

*Musyarakah financing is a partnership contract between fund owners (musyarakah partners) to contribute funds and conduct business through partnership. All parties share profits based on a predetermined ratio, while the loss will be distributed proportionately based on the capital contribution. At statement of financial position date musyarakah financing is stated at the outstanding balance of the financing less allowance for possible losses based on the management's review on the musyarakah financing collectibility at the end of the year.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**2.n. Pinjaman *qardh***

Pinjaman *qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan yang diperjanjikan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Pinjaman *qardh* dapat disertai dengan wakalah.

Wakalah digunakan dalam hal nasabah mewakilkan kepada LPEI untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen nasabah dan menagih piutang kepada *buyer*. Atas jasa tersebut LPEI dapat memperoleh ujrah yang diakui secara proporsional selama jangka waktu pembiayaan.

Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Pinjaman *qardh* disajikan sebesar saldoanya dikurangi cadangan kerugian. LPEI menetapkan cadangan kerugian *qardh* berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo.

**2.o. Cadangan kerugian penurunan nilai**

Aset keuangan

Penerapan PSAK 71 telah mengubah metode kerugian penurunan nilai LPEI dengan mengganti pendekatan kerugian kredit pada saat terjadinya (*incurred loss*) dalam PSAK 55 dengan pendekatan kerugian kredit ekpektasian (*expected credit loss*). Sejak 1 Januari 2020, LPEI telah mencatat cadangan kerugian kredit ekpektasian (*expected loss*) atas instrumen keuangan sebagai berikut:

1. Aset keuangan yang berupa instrumen hutang yang diklasifikasikan dalam biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.n. Funds of *qardh***

*Funds of qardh are borrowing funds without an agreed commitment of benefits where the borrower is obligated to repay the principal simultaneously or in installments in certain periods. Funds of qardh can be combined with wakalah.*

*Wakalah is used in the event that the customer represents LPEI to manage customer documents and collect receivables from the buyer. For these services, LPEI can obtain ujrah which is recognized proportionally during the period.*

*Funds of qardh are recognised at the amount lent at the transaction date. Any excess amount paid by the borrower in repaying a qardh is recognized as revenue upon realization. Funds of qardh is stated at its outstanding balance less allowance for possible losses. LPEI provides allowance for possible losses on qardh based on the review of quality of the individual outstanding balances.*

**2.o. Allowance for impairment losses**

Financial asset

*The implementation of SFAS 71 has changed LPEI's loss impairment method from SFAS 55's incurred loss approach to a forward-looking expected credit loss approach. As of January 1, 2020, LPEI has been recognizing the allowance for expected credit loss (expected loss) for all financial instruments as follows:*

1. *Financial assets in the form of debt instruments that are classified as amortised cost or fair value through other comprehensive income.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan  
(lanjutan)**

**2.o. Cadangan kerugian penurunan nilai  
(lanjutan)**

- a. Penurunan nilai atas aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset di dalam laporan posisi keuangan, dan disajikan di dalam laporan laba rugi sebagai “Beban Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai”.
- b. Penurunan nilai atas aset keuangan (di luar instrumen ekuitas) yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui sebagai penambah dari penghasilan komprehensif lainnya di dalam laporan posisi keuangan sebagai “*unrealized gain or loss*”, (tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam laporan keuangan konsolidasian) dan diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai “Beban Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai”.

**2. Komitmen pinjaman atau kelonggaran tarik yang sifatnya tidak dapat dibatalkan (committed)**

- a. Penurunan nilai atas komitmen pinjaman diakui sebagai provisi pada komponen liabilitas bank yang dicatat secara terpisah dari aset pinjaman yang terkait sebagai “Provisi Kerugian Kredit Ekspektasian Komitmen Pinjaman”, kecuali LPEI tidak dapat mengidentifikasi secara terpisah.
- b. Dalam kondisi tersebut, penurunan nilai atas komitmen pinjaman dan aset pinjaman diakui bersama sebagai pengurang dari nilai tercatat aset di dalam laporan posisi keuangan.

**3. Kontrak penjaminan keuangan yang termasuk dalam PSAK 71 dan tidak diukur dalam nilai wajar melalui laba rugi.**

Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas.

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.o. Allowance for impairment losses (continued)**

- a. *Impairment loss for financial asset under the classification of amortised cost are recognized as a deduction from the asset's carrying value and is presented as “allowance for impairment losses” in the statement of profit and loss and other comprehensive income.*
- b. *Allowance for impairment of financial assets (other than equity instruments) under the classification of fair value through other comprehensive income are recognized as addition to other comprehensive income in the statement of financial position as “unrealized gain or loss” (which will not deduct the carrying value of a financial asset in the financial statement) and is presented in the statement of profit and loss and other comprehensive income as “Allowance for impairment”.*

**2. Committed loan commitment or undisbursed loan (committed)**

- a. *Impairment loss for loan commitments are recognized as provision in liability separate from its related loan asset as “Expected Credit Loss Provision on Loan Commitments”, unless an event has caused LPEI to not be able to identify both components separately.*
- b. *In such condition, impairment loss for loan commitment and financial asset are recognized together as deduction to a financial asset carrying value in the statement of financial position.*

**3. Financial guarantee contracts included in SFAS 71 and not measured at fair value through profit or loss.**

*There is no allowance for expected credit losses on investment in equity instruments.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**2.o. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)**

Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

LPEI mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan:

- i. Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
- ii. Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

LPEI mengevaluasi apakah terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan atau terdapat bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

Dalam mengevaluasi hal tersebut, LPEI menetapkan kriteria berikut:

**1. Stage 1**

Pada tanggal evaluasi penurunan nilai, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal yang dapat dibuktikan dengan terjadinya seluruh hal berikut, yaitu:

- a. Tidak terdapat tunggakan lebih dari 30 hari;
- b. Instrumen keuangan memiliki peringkat kolektabilitas 1 atau 2; dan
- c. Tidak di restrukturisasi (berdasarkan informasi flag restrukturisasi di sistem).

Pada stage ini, LPEI akan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

**2. Stage 2**

Pada tanggal evaluasi penurunan nilai, risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal yang dapat dibuktikan dengan terdapat tunggakan antara 31 hari sampai dengan 89 hari.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.o. Allowance for impairment losses (continued)**

Allowance for impairment losses on financial assets

*LPEI measure the allowance for losses for the lifetime of an expected credit losses, except for the following, which are measured according to 12 months expected credit losses:*

- i. *Debt instruments that have low credit risk at the reporting date; and*
- ii. *Other financial instruments for which credit risk has not increased significantly since initial recognition.*

*LPEI evaluates whether there is significant increase in credit risk or objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired.*

*In assessing those matters, LPEI applies the criteria as follows:*

**1. Stage 1**

*At the evaluation date, credit risk on financial instruments does not increase significantly since initial recognition, which can be proven by the occurrence of all of the following, namely:*

- a. *Does not have past due obligation not more than 30 days;*
- b. *The financial instrument has a collectability rating 1 or 2; and*
- c. *Not restructured (based on restructuring flag information in the system).*

*At this stage, LPEI will measure the allowance for impairment losses for the financial instrument at the amount of an expected 12 months credit loss.*

**2. Stage 2**

*At the evaluation date, credit risk on financial instruments has increased significantly since initial recognition, when the is past due obligation of 31 days to 89 days.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan  
(lanjutan)**

**2.o. Cadangan kerugian penurunan nilai  
(lanjutan)**

Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Pada tahapan ini, LPEI akan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*lifetime*).

**3. Stage 3**

Pada tanggal evaluasi penurunan nilai, aset keuangan mengalami penurunan nilai yang dapat dibuktikan dengan terjadinya salah satu dari 3 (tiga) hal berikut, yaitu:

- a. Terdapat tunggakan lebih dari 89 hari; atau
- b. Instrumen keuangan memiliki peringkat kolektibilitas 3, 4, atau 5; atau
- c. Terdapat restrukturisasi atas aset keuangan (berdasarkan informasi flag restrukturisasi di sistem).

Pada stage ini, LPEI akan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya.

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

i. Penilaian secara individual

1) Kriteria individual

LPEI mengevaluasi penurunan nilai secara individual jika LPEI memiliki informasi yang wajar dan terdukung untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya secara individual dan aset keuangan memiliki kriteria sebagai berikut:

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.o. Allowance for impairment losses (continued)**

Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

*At this stage, LPEI will measure the allowance for impairment losses for the financial instrument at the amount of the expected credit losses over its lifetime.*

**3. Stage 3**

*At the evaluation date, there is objective evidence that the financial asset is impaired, which can be proven by the occurrence of one of the following:*

- b. Past day obligation for more than 89 days has occurred; or*
- c. The financial instrument has a collectability rating of 3, 4, or 5; or*
- d. Restructured financial instrument (based on restructuring flag information in the system).*

*At this stage, LPEI will measure the allowance for losses for financial instruments at the amount of the expected credit losses over their lifetime.*

Measurement of Expected Credit Losses

*Expected Credit Loss is an estimate of the weighted probability of a credit loss measured as follows:*

i. Individual assessment

1) Individual criteria

*LPEI evaluates impairment individually if LPEI has reasonable and supportable information to measure the lifetime expected credit losses on an individual instrument and the financial assets have the following criteria:*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**2.o. Cadangan kerugian penurunan nilai**

Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

- a. Aset keuangan dikategorikan sebagai *non-performing financing*; atau
- b. Aset keuangan yang mengalami restrukturisasi; atau
- c. Terdapat bukti objektif penurunan nilai.

LPEI juga dapat menetapkan aset keuangan untuk di evaluasi secara individual meskipun aset keuangan dimaksud belum memiliki kriteria untuk dievaluasi secara individual apabila dinilai oleh manajemen akan menghasilkan kerugian kredit ekspektasi yang lebih akurat apabila dinilai secara individual.

**2) Evaluasi penurunan nilai**

Evaluasi penurunan nilai secara individual didasarkan pada konsep estimasi jumlah probabilitas tertimbang kerugian aset keuangan. Konsep tersebut menggunakan pembobotan masing-masing dari 3 (tiga) skenario yaitu skenario optimis, skenario moderat, dan skenario pesimis. Setiap skenario menghasilkan nilai kini arus kas yang didiskontokan menggunakan EIR, dimana arus kas tersebut didasarkan pada seluruh informasi yang tersedia dan *experienced credit judgement*.

Dalam membuat estimasi *recoverable amount* pada arus kas, metode individual di dasarkan pada 2 (dua) konsep yaitu: (1) *Discounted Cashflow* berdasarkan estimasi arus kas masa depan; dan (2) *Expected Collateral* berdasarkan estimasi penjualan agunan dengan mempertimbangkan nilai wajar dan jangka waktu penjualan agunan di masa depan. Selisih estimasi jumlah probabilitas tertimbang dengan jumlah *outstanding* aset keuangan mencerminkan jumlah kerugian kredit ekspektasian secara individual.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.o. Allowance for impairment losses (continued)**

Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

- a. The financial asset is categorized as non-performing financing
- b. The financial asset is restructured; or
- c. There is objective evidence that the financial asset is impaired.

*LPEI can also assign certain financial assets to be evaluated individually even though the said criteria has not been met, if the management has determined that the individual method will result in a more accurate expected credit loss.*

**2) Impairment evaluation**

*Individual impairment evaluation is based on the concept of an estimated weighted probability of loss of financial assets. This concept uses the weighting of each of the 3 (three) scenarios, namely optimistic scenario, moderate scenario, and pessimistic scenario. Each scenario results in fair value of cashflow discounted using EIR, where the cashflow is based on readily available information and experienced credit judgement.*

*In estimating cashflow based on recoverable amount, the individual method is based on 2 (two) concept, consisting of: (1) The Discounted Cashflow which is based on estimated future cashflow; and The Expected Collateral which is based on estimated sale of collateral taking into consideration the fair value of the collateral and length of sale in the future. The difference between the estimated weighted average amount against the financial asset outstanding reflects the individual expected credit loss.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

- 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)**
- 2.o. Cadangan kerugian penurunan nilai**
- a. Optimis  
Skenario dengan asumsi penguatan ekonomi di negara-negara emerging. Terdapat setidaknya 3 faktor yang diperkirakan mampu mengangkat ekonomi negara-negara emerging, antara lain (1) Kebijakan pelonggaran ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terus berlanjut; (2) Tercapai kesepakatan antara AS dengan Tiongkok untuk mengakhiri perang dagang; dan (3) Kebijakan moneter di negara-negara maju tetap akomodatif.
  - b. Moderat  
Skenario dengan asumsi pertumbuhan ekonomi global diekspektasikan masih lemah. Dimana dukungan dari respon kebijakan dari negara-negara utama sangat diharapkan untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dunia.
  - c. Pesimis  
Skenario dengan asumsi kemungkinan terjadinya resesi ekonomi global. Kemungkinan ini dapat terjadi apabila terdapat beberapa faktor berikut antara lain (1) Pelemahan industri manufaktur terus berlanjut dan berdampak terhadap sektor jasa; (2) Pemburukan terhadap kepercayaan bisnis yang berdampak terhadap penurunan harga aset; dan (3) Kebijakan fiskal dari negara-negara utama dunia tidak mampu menahan penurunan demand.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

- 2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**
- 2.o. Allowance for impairment losses (continued)**
- a. *Optimistic*  
*This scenario assumes a strengthening economy in emerging countries. There are at least 3 factors that are thought to be able to lift the economies of emerging countries, including (1) the continuity of economic easing policy of the Chinese government's economic; (2) the end of trade war noted by an agreement between the US and China; and (3) Monetary policy in developed countries remains accommodative.*
  - b. *Moderate*  
*This scenario assumes that global economic growth is expected to remain weak. Where support from major countries marked by policy response is very much expected to support increase in world economic growth.*
  - c. *Pessimistic*  
*This scenario assumes that there will be a possibility of a global economic recession. This possibility can occur if the following factors occurs: (1) The weakening of the manufacturing industry continues and impacts the service sector; (2) deterioration of business confidence which impacts on the decrease of asset prices; and (3) The fiscal policies of major countries in the world are unable to contain the decline in demand.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**2.o. Cadangan kerugian penurunan nilai**

ii. Penilaian secara kolektif

1) Kriteria kolektif

LPEI mengevaluasi penurunan nilai secara kolektif jika aset keuangan memiliki kesamaan dalam karakteristik risiko kredit aset keuangan dengan tujuan untuk memfasilitasi analisis yang didesain untuk memungkinkan peningkatan risiko kredit secara signifikan dapat diidentifikasi tepat waktu. LPEI mengevaluasi pencadangan secara kolektif untuk aset keuangan memiliki hari tunggakan kurang dari 90 hari untuk dan bukan merupakan *non-performing financing*.

Secara garis besar, seluruh portofolio pembiayaan yang evaluasi penurunan nilainya tidak dihitung menggunakan metode individual, akan dievaluasi menggunakan metode kolektif.

2) Evaluasi penurunan nilai

Evaluasi penurunan nilai secara kolektif didasarkan pada konsep *probability of default* (PD), *loss given default* (LGD), dan *exposure at default* (EAD) yang mempertimbangkan informasi masa lalu, masa kini, dan masa mendatang.

a. *Probability of default* (PD)

*Probability of default* mencerminkan estimasi kemungkinan suatu debitur gagal bayar pada rentang waktu tertentu.

PD dihitung untuk setiap *bucket* pada setiap segmen yang telah ditetapkan melalui kesamaan karakteristik risiko kredit.

Dalam menghasilkan PD, LPEI menggunakan menggunakan 3 tahapan perhitungan, yaitu: (1) PD through the cycle; (2) PD forward looking; dan (3) PD point in time melalui proses scaling.

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.o. Allowance for impairment losses (continued)**

ii. Collective assessment

1) Collective criteria

*LPEI evaluates impairment collectively if the financial assets share the same risk characteristics of the financial assets which allows a significant increase in credit risk to be identified in a timely manner. LPEI evaluates the financial assets collectively if the financial asset has past due obligation of less than 90 days and is not categorized as non-performing loan.*

*In general, all financing portfolios for which impairment evaluation is not calculated using the individual method will be evaluated using the collective method.*

2) Impairment evaluation

*The evaluation of collective impairment is based on the concepts of probability of default (PD), loss given default (LGD), and exposure at default (EAD) which take into account past, current, and future information.*

a. *Probability of default* (PD)

*Probability of default reflects the estimated probability of a debtor defaulting over a certain period of time.*

*PD is calculated for each bucket in each segment that reflects similarity in credit risk characteristic.*

*In calculating the PD, LPEI uses 3 calculation phases, namely: (1) PD through the cycle; (2) PD forward looking; and (3) PD point in time through a scaling process.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan  
(lanjutan)**

**2.o. Cadangan kerugian penurunan nilai  
(lanjutan)**

a. *Probability of default (PD) (lanjutan)*

Dalam 3 tahapan ini LPEI menggunakan metode vasicek, *roll rate transition matrix*, dan pendekatan lainnya yang lebih sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan regulator.

Metode vasicek adalah metode penentuan PD menggunakan formula korelasi aset yang telah ditentukan oleh Basel Committee digunakan untuk aset keuangan yang termasuk dalam portofolio tresuri, diantaranya giro pada Bank Indonesia dan Bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain, serta efek-efek.

Metode *roll rate transition matrix* menggunakan transisi historis bucket PD. Bucket PD yang digunakan dalam perhitungan historis adalah sebagai berikut:

1. Bucket 1: 0 day past due (DPD)
2. Bucket 2: 1 – 30 DPD
3. Bucket 3: 31 – 60 DPD
4. Bucket 4: 61 – 89 DPD
5. Bucket 5: > 89 DPD, atau restrukturisasi (*flag* restukturisasi), atau berada di kolektibilitas 3, atau 4, atau 5.

PD dilakukan *forward looking macroeconomic adjustment* untuk menentukan *forward looking PD* berdasarkan hubungan historis antara makro ekonomi dengan nilai PD LPEI.

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.o. Allowance for impairment losses (continued)**

a. *Probability of default (PD) (continued)*

*In these 3 stages, LPEI uses the vasicek method, roll rate transition matrix, and other approaches that is deemed more appropriate and is not contradictory with the regulation.*

*The vasicek method is a method of determining PD using the asset correlation formula that has been determined by the Basel Committee, is used for financial assets that are included in treasury portfolios, namely current accounts with Bank Indonesia and other Banks, placement with Bank Indonesia and other Banks, and securities.*

*The roll rate transition matrix method uses the historical transition bucket PD. PD buckets used in historical calculations are as follows:*

1. Bucket 1: 0 day past due (DPD)
2. Bucket 2: 1 – 30 DPD
3. Bucket 3: 31 – 60 DPD
4. Bucket 4: 61 – 89 DPD
5. Bucket 5: > 89 DPD, or restructured financial assets (restructuring flag), or has a collectability rating of 3, 4, or 5.

*A forward looking macroeconomic adjustment is made to the PD to determine the forward looking PD based on the historical relationship between the macroeconomic and LPEI PD value*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**2.o. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)**

**b. Loss given default (LGD)**

*Loss given default (LGD)* merupakan estimasi kerugian dengan menghitung recovery yang didapatkan setelah debitur tersebut default. *Recovery date* dihitung mempertimbangkan *time value of money* dari pengembalian kewajiban yang telah *default*. Tingkat suku bunga yang digunakan untuk menghitung *time value of money* adalah *effective interest rate* (EIR).

LGD dihitung dengan mempertimbangkan *forward looking adjustment* berdasarkan hubungan historis antara makroekonomi dengan nilai LGD LPEI. Jika tidak terdapat hubungan antara makroekonomi dengan nilai LGD LPEI, maka LPEI dapat tidak menggunakan *forward looking* dalam penentuan nilai LGD.

**c. Exposure at default (EAD)**

Dalam menentukan nilai EAD dari setiap debitur, LPEI mempertimbangkan *expected lifetime*. EAD menggambarkan *exposure* yang akan ditanggung LPEI jika terdapat debitur yang *default*.

*Expected lifetime* adalah pendekatan yang mempelajari *behaviour* dari tingkat penyelesaian fasilitas (lunas atau *write off*) debitur dibandingkan dengan jadwal penyelesaian fasilitas.

**d. Expected credit loss (ECL)**

Secara umum formula untuk menghitung ECL secara kolektif adalah perkalian antara PD, LGD, dan EAD.

Dalam menghitung besarnya cadangan kerugian penurunan nilai kolektif, LPEI menggunakan nilai outstanding aset keuangan dari yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.o. Allowance for impairment losses (continued)**

**b. Loss given default (LGD)**

*Loss given default (LGD)* is the estimated loss by calculating the recoverable amount through collateral after the debtor has defaulted. The recovery date is calculated by considering the time value of money from the repayment of the defaulted obligation. The interest rate used to calculate the time value of money is the effective interest rate (EIR).

*LGD* is calculated by considering forward looking adjustments based on the historical relationship between macroeconomics and the LPEI LGD value. If there is no macroeconomic relationship with the LPEI LGD value, then the LPEI may not use forward looking in determining the LGD value.

**c. Exposure at default (EAD)**

In determining the EAD value of each debtor, LPEI considers the expected lifetime. EAD describes the exposure that will be borne by LPEI if a debtor has defaulted.

The expected lifetime is an approach that studies the behavior of the debtor's facility settlement rate (paid off or written off) compared to the facility completion schedule.

**d. Expected credit loss (ECL)**

In general, the formula for calculating ECL collectively is the multiplication of PD, LGD, and EAD.

In calculating the amount of collective impairment loss, LPEI uses the outstanding value of collectively assessed financial assets.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan  
(lanjutan)**

**2.o. Cadangan kerugian penurunan nilai  
(lanjutan)**

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai masing-masing stage sesuai pada karakteristik *staging*. Metode perhitungan pada masing-masing stage adalah sebagai berikut:

- Stage 1: kerugian kredit ekspektasian 12 bulan
- Stage 2: kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya
- Stage 3: kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah porsi aset keuangan yang mungkin akan *default* dalam 12 bulan ke depan.

Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya adalah ekspektasi kerugian yang merupakan hasil dari kejadian *default* selama umur aset keuangan atau sesuai dengan sisa tenor fasilitas.

Faktor diskonto yang digunakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian adalah suku bunga efektif (EIR).

Probabilitas rata-rata tertimbang (*probability weighted*) dalam perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai ditentukan LPEI yang mencakup skenario optimis, normal, dan pesimis.

Total rata-rata tertimbang (*weighted*) atas estimasi cashflow dimaksud menjadi pengurang atas nilai tercatat aset keuangan yang dimana selisihnya akan menjadi cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan.

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.o. Allowance for impairment losses (continued)**

*The impairment loss is calculated based on the criteria of respective stages according to the criteria stated above. The calculation method for respective stages are as follows:*

- Stage 1: 12-months expected credit loss (ECL)
- Stage 2: Lifetime ECL
- Stage 3: Lifetime ECL

*The 12-months ECL is the portion of the financial asset possibly defaulting within the next 12 months.*

*The ECL lifetime is the expected credit loss that result from default events over the expected life of the financial asset or according to the remaining tenor of the facility.*

*The discount factor used to calculate ECL is effective interest rate (EIR).*

*The probability weighted calculation of ECL is determined by LPEI which consists of optimistic, normal, and pessimistic scenarios.*

*The total weighted cash flow estimation is deducted from the financial asset's carrying amount, where the difference between the weighted average cashflow estimation to the carrying value of the financial asset will result in the impairment loss of the financial assets.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**2.o. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)**

Estimasi dan asumsi yang digunakan untuk menghitung cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan dan piutang berdasarkan PSAK 71 diungkapkan dalam Catatan 3b.2.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah yang dinilai secara kolektif dan individual dihitung berdasarkan PSAK 102 "Akuntansi Murabahah" dan ISAK 102 "Penurunan Nilai Piutang Murabahah".

**Aset Keuangan yang Direstrukturisasi**

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuan dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- i. Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.o. Allowance for impairment losses (continued)**

*The estimates and assumptions used to calculate allowance for impairment losses on financing and receivables based on PSAK 71 are disclosed in Note 3b.2.*

*Allowance for impairment losses on murabahah receivables that are assessed collectively and individually is calculated based on PSAK 102 "Murabahah Accounting" and ISAK 102 "Impairment of Murabahah Receivables".*

**Restructured Financial Assets**

*If the terms of the financial assets are renegotiated or modified or the existing financial assets are replaced with new ones due to the borrower's financial difficulties, an assessment is made whether recognition of existing financial assets must be derecognized and expected credit losses measured as follows:*

- i. If the restructuring does not result in the termination of recognition of existing assets, then the estimated cash flows arising from the modified financial assets are included in the calculation of cash shortages of existing assets.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan  
(lanjutan)**

**2.o. Cadangan kerugian penurunan nilai**

Aset Keuangan yang Direstrukturisasi  
(lanjutan)

- ii. Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

Aset Keuangan yang Memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, LPEI menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti obyektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi wanprestasi atau tunggakan pembayaran oleh debitur, restrukturisasi kredit atau tagihan oleh LPEI dengan persyaratan yang tidak mungkin diberikan jika debitur tidak mengalami kesulitan keuangan, indikasi bahwa debitur atau penerbit akan dinyatakan pailit, hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan, atau data yang dapat diobservasi lainnya yang terkait dengan kelompok aset keuangan seperti memburuknya status pembayaran debitur atau penerbit dalam kelompok tersebut, atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.o. Allowance for impairment losses (continued)**

Restructured Financial Assets(continued)

- ii. If the restructuring will result in a derecognition of the existing assets, the fair value of the new asset is treated as the final cash flow of the existing financial assets at the time of derecognition. This amount is included in the calculation of cash shortages from existing financial assets which are discounted from the date of derecognition to the reporting date using the initial effective interest rate of the existing financial assets.

Credit-impaired Financial Assets

At each reporting date, LPEI assesses whether the financial assets recorded at amortised cost and the financial assets of debt instruments which are recorded at fair value through other comprehensive income are credit impaired (worsening). Financial assets deteriorate when one or more events that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the financial assets have occurred.

Objective evidence that financial assets are impaired can include default or delinquency by a borrower, restructuring of a loan or receivable by LPEI on terms that the LPEI would not otherwise consider, indications that a borrower or issuer will enter bankruptcy, the disappearance of an active market for a security due to financial difficulties, or other observable data relating to a group of assets such as adverse changes in the payment status of borrowers or issuers in the group, or economic conditions that correlate with defaults in the group.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

- 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)**
- 2.o. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)**

Aset Keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk (Purchased or Originated Credit Impaired Financial Assets - POCI)

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari cadangan kerugian penurunan nilai.

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- i. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan komitmen pinjaman, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- ii. Instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

- 2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**
- 2.o. Allowance for impairment losses (continued)**

Purchased or originated credit impaired financial assets – POCI

*Financial assets are categorized as POCI if there is objective evidence of impairment at initial recognition. At initial recognition, no allowance for credit losses is recognized because the purchase price or value has included lifetime estimated credit losses. Furthermore, changes in lifetime credit losses, whether positive or negative, are recognized in the statement of profit or loss as part of the allowance for impairment losses.*

Presentation of Allowance for Expected Credit Losses in Statements of Financial Position

*Allowance for expected credit losses is presented in the statement of financial positions as follows:*

- i. *Financial assets measured at amortized cost and loan commitments, allowance for expected credit losses is presented as a deduction from the gross carrying amount of the asset;*
- ii. *Debt instruments measured at fair value through other comprehensive income, allowance for expected credit losses are not recognized in the statement of financial position because the carrying amounts of these assets are at their fair values. However, allowance for expected credit losses is disclosed and recognized in other comprehensive income.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan  
(lanjutan)**

**2.o. Cadangan kerugian penurunan nilai**

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang  
telah dihapusbukukan

Ketika pinjaman yang diberikan tidak tertagih, pinjaman yang diberikan tersebut dihapusbuku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

Ketika pembiayaan yang diberikan tidak tertagih, maka pembiayaan yang diberikan tersebut dihapusbuku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pembiayaan yang diberikan tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

Aset keuangan syariah

Untuk aset keuangan unit usaha Pembiayaan Syariah, kecuali transaksi murabahah, LPEI Syariah menerapkan PMK No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI dan PMK No. 161/PMK.010/2010 tentang Perubahan atas PMK No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI dalam menentukan kerugian penurunan nilai.

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.o. Allowance for impairment losses (continued)**

Recoveries of written-off financial assets

*When a loan is uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment loss. Such loans are written off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined.*

*When a financing is uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment loss. Such financing are written off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined.*

*The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off financial assets from previous years are recorded as operational income other than interest income.*

Sharia financial assets

*For the financial assets of the business unit that is engaged in Sharia Financing, except for Murabahah transactions, LPEI Sharia applies PMK No. 140/PMK.010/2009 on Supervising and Monitoring of LPEI and PMK No. 161/PMK.010/2010 on Changes on No. 140/PMK.010/2009 on Supervising and Monitoring of LPEI for determination of impairment loss.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan  
(lanjutan)**

**2.o. Cadangan kerugian penurunan nilai  
(lanjutan)**

Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan

LPEI menerapkan PSAK No, 48 (Revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset", yang menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan LPEI agar aset dicatat tidak melebihi jumlah aset yang dapat dipulihkan.

PSAK ini juga yang menentukan kapan LPEI membalik suatu rugi penurunan nilai dan pengungkapan yang diperlukan.

Pada setiap tanggal pelaporan, LPEI melakukan penilaian apakah terdapat indikasi bahwa aset non- keuangan mungkin mengalami penurunan nilai sesuai dengan PSAK No. 48 (Revisi 2014) tentang "Penurunan Nilai Aset". Ketika sebuah indikator penurunan nilai ada atau ketika sebuah pengujian penurunan nilai tahunan untuk aset diperlukan, LPEI membuat estimasi resmi atas jumlah terpulihkan.

Nilai yang dapat dipulihkan adalah sebesar jumlah yang lebih tinggi dari nilai wajar aset (atau unit penghasil kas) setelah dikurangi besarnya biaya pelepasan dibandingkan dengan nilai pakainya, dan ditentukan untuk aset individu, kecuali aset tersebut menghasilkan arus kas masuk yang tidak tergantung lagi dari aset yang lain atau kumpulan aset, yang dalam hal jumlah terpulihkan dinilai sebagai bagian dari unit penghasil kas. Apabila nilai tercatat suatu aset (atau unit penghasil kas) melebihi jumlah terpulihkan, maka aset (atau unit penghasil kas) tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat dipulihkan.

Dalam menilai nilai pakai suatu aset, estimasi terhadap arus kas dipulihkan di masa depan akan didiskontokan menjadi nilai kini dengan menggunakan tingkat suku bunga diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar terhadap nilai waktu dari uang (*time value of money*) dan risiko spesifik aset (atau unit penghasil kas) tersebut.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.o. Allowance for impairment losses (continued)**

Allowance for impairment losses on non-financial assets

*LPEI applied SFAS No, 48 (Revised 2014), Impairment of Asset, that states the procedures applicable for LPEI so that the amount of assets recorded do not exceed the assets recoverable amount.*

*The SFAS also states that when LPEI is able to offset the loss from impairment and the disclosures needed.*

*At each reporting date, LPEI assesses whether there is any indication that its non-financial assets may be impaired in accordance with SFAS No. 48 (Revised 2014) "Impairment of Assets". When an indicator of impairment exists or when an annual impairment testing for an asset is required, LPEI makes a formal estimate of recoverable amount.*

*Recoverable amount is the higher of an asset's or Cash Generating Unit (CGU)'s fair value less costs of disposal and its value in use and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets, in which case the recoverable amount is assessed as part of the CGU to which it belongs. Where the carrying amount of an asset (or CGU) exceeds its recoverable amount, the asset (or CGU) is considered impaired and is written down to its recoverable amount.*

*In assessing value in use of assets, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pretax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset (or CGU).*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan  
(lanjutan)**

**2.o. Cadangan kerugian penurunan nilai  
(lanjutan)**

Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan (lanjutan)

Kerugian penurunan nilai akan dibebankan pada tahun yang bersangkutan, kecuali aset tersebut telah dicatat sebesar jumlah yang direvaluasi, dalam hal ini kerugian penurunan nilai tersebut akan dibebankan langsung ke dalam selisih penilaian kembali aset bersangkutan.

Penelaahan dilakukan pada setiap tanggal pelaporan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa pengakuan kerugian penurunan nilai sebelumnya mungkin tidak lagi ada atau telah menurun. Bila terdapat indikasi tersebut, maka jumlah terpulihkan akan diestimasi. Kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui akan dibalik hanya jika telah terjadi perubahan dalam estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset sejak kerugian penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, nilai tercatat aset akan ditingkatkan sejumlah nilai terpulihkan.

Perhitungan cadangan klaim atas aktivitas penjaminan telah dihitung sesuai dengan Peraturan Direktur Eksekutif No. 0036/PDE/12/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang perhitungan cadangan klaim atas aktivitas penjaminan dan telah berdasarkan perhitungan aktuaris.

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.o. Allowance for impairment losses (continued)**

Allowance for impairment losses on non financial assets (continued)

*An impairment loss is charged to operations on the year in which it arises, unless the asset is carried at a revalued amount, in which case the impairment loss is charged to the revaluation increment of the said asset.*

*An assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss is reversed only if there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount.*

*The calculation of estimated guarantee claim was calculated based on Regulation of Director Executive No. 0036/PDE/12/2015 dated December 29, 2015 regarding the calculation of estimated guarantee claim and based on actuary calculation.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan  
(lanjutan)**

**2.p. Kontrak penjaminan**

Kontrak penjaminan yang memenuhi definisi kontrak penjaminan keuangan yang tercantum dalam PSAK No. 55 (Revisi 2014) dicatat sebagai kontrak asuransi berdasarkan PSAK No. 62, "Kontrak Asuransi" atau kontrak penjaminan keuangan berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2014).

Kontrak penjaminan yang tidak memenuhi definisi kontrak penjaminan keuangan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2014), dicatat berdasarkan PSAK No. 62 jika memenuhi definisi kontrak asuransi. Jika tidak, dicatat dengan PSAK No. 57 (Revisi 2009).

Piutang yang timbul dari proses penyelesaian klaim dari kontrak garansi dengan menggunakan akta pengakuan hutang dicatat sebagai aset keuangan karena memenuhi definisi asset keuangan sesuai PSAK No. 55 (Revisi 2014).

Liabilitas yang timbul dari kontrak penjaminan keuangan diakui sebesar nilai wajar pada saat pengakuan awal. Jika kontrak jaminan keuangan diterbitkan untuk pihak yang tidak berelasi dalam suatu transaksi yang wajar (arm's length transaction) yang berdiri sendiri, nilai wajarnya pada saat dimulainya transaksi kemungkinan sama dengan guarantee fee yang diterima, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya. Setelah pengakuan awal, jumlah di dalam liabilitas kontrak jaminan keuangan diukur pada jumlah yang lebih tinggi antara jumlah yang diakui provisi dan jumlah yang diakui pada saat pengakuan awal dikurangi amortisasi kumulatif (jika sesuai).

Liabilitas yang timbul atas suatu klaim yang telah disetujui namun belum dibayarkan akan dicatat sebagai utang klaim. Pendapatan fee kontrak penjaminan keuangan diakui sebagai pendapatan selama periode penjaminan.

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.p. Guarantee contracts**

*Guarantee contracts that meets the definition of financial guarantee contracts laid out in SFAS No. 55 (Revised 2014) is accounted for either as insurance contract based on SFAS No. 62, "Insurance Contract" or as financial guarantee contract based on SFAS No. 55 (Revised 2014).*

*Guarantee contracts that do not meet the definition of financial guarantee contracts under SFAS No. 55 (Revised 2014), is accounted for under SFAS No. 62 if it meets the definition of an insurance contract. Otherwise, they are accounted for under SFAS No. 57 (Revised 2009).*

*Receivables resulting from guarantee contracts claim which is settled with debentures is accounted for under SFAS No. 55 (Revised 2014).*

*Liabilities arising from financial guarantee contracts are recognized at fair value at initial recognition. If the financial guarantee contract was issued to an unrelated party in a stand-alone arm's length transaction, its fair value at inception is likely to equal the premium received, unless there is evidence to the contrary. After initial recognition, the amount of financial guarantee contract liabilities are measured at the higher of the provision amount recognized and amount initially recognized less cumulative amortization (when appropriate).*

*Liabilities incurred on claims approved but have not been paid are recorded as claims payable. Guarantee fees from financial guarantee contracts are recognized as revenue over the period of the guarantee.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**2.q. Piutang asuransi, liabilitas asuransi dan utang asuransi**

Piutang asuransi merupakan tagihan premi kepada tertanggung/agen/broker dan perusahaan asuransi (*ceding company*) pada tanggal pelaporan keuangan.

Liabilitas asuransi meliputi estimasi klaim dan premi belum merupakan pendapatan serta pendapatan premi ditangguhkan. Estimasi klaim adalah estimasi jumlah kewajiban yang menjadi tanggungan sehubungan dengan klaim yang dilaporkan masih dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan (IBNR).

Cadangan yang terkait dengan klaim dilaporkan masih dalam proses penyelesaian menunjukkan biaya akhir atas klaim yang dilaporkan, namun belum disetujui pada tanggal pelaporan.

IBNR adalah bagian dari klaim dimana kejadian yang diasuransikan telah terjadi namun asuradur belum memperoleh pemberitahuan atas klaim. Walaupun asuradur belum diberitahu mengenai klaim tersebut sebelum akhir tahun buku, pencadangan biaya atas klaim tersebut diperlukan untuk memenuhi konsep kehati-hatian dan konsep penandangan (*matching concept*).

Utang asuransi terdiri dari utang premi reasuransi, utang komisi, dan utang klaim.

Utang premi termasuk diantaranya adalah:

- Kewajiban pembayaran premi kepada reasuradur, sebagai akibat adanya transaksi reasuransi yang dilakukan dengan pihak reasuradur.
- Kewajiban pembayaran premi kepada koasuransi.

Utang klaim merupakan klaim yang telah disetujui namun belum dibayarkan kepada tertanggung dari transaksi asuransi langsung atau koasuransi.

Utang klaim diakui saat klaim disetujui untuk dibayar.

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.q. Insurance receivables, insurance liabilities and insurance payables**

*Insurance receivables represent premium charges due from the insured/agent/broker and insurer (ceding company) as of the reporting date.*

*Insurance liabilities include estimated claims and unearned premiums and deferred premium income. Estimated claims are based on the estimated ultimate cost of all claims incurred but not settled including claims incurred but not reported (IBNR).*

*Reserves associated with claims reported but have not been settled represents the ultimate cost of claims that were reported, but is yet to be approved as of the reporting date.*

*IBNR is the element of claims where the insured event has occurred but where the insurer has yet to be notified of a claim. Although the insurer has not yet been notified of these claims before the end of the financial year, the cost of these claims are provided to comply with both the prudence and the matching concept.*

*Insurance payables consist of reinsurance premium payables, commission payables, and claims payables.*

*Premium payables includes:*

- *Premium payment obligations to the reinsurer, as a result of reinsurance transactions with reinsurers.*
- *Premium payment obligations due to co-insurers.*

*Claims payable is represents claims agreed but have not been paid to the insured arising from either direct insurance or coinsurance.*

*Claims payable is recognized when the claim is approved for payment.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**2.q. Piutang asuransi, liabilitas asuransi dan utang asuransi (lanjutan)**

Utang klaim dihentikan pengakuannya saat kewajiban telah berakhir, dilepaskan atau dibatalkan.

**2.r. Aset reasuransi**

Aset reasuransi adalah nilai hak kontraktual neto cedant dalam perjanjian reasuransi. Aset reasuransi terdiri dari estimasi penggantian reasuransi atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian, estimasi penggantian reasuransi atas klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, porsi reasuransi atas liabilitas premi asuransi, dan porsi reasuransi atas klaim yang disetujui untuk dibayar (piutang reasuransi). Aset reasuransi diukur secara konsisten dengan jumlah yang terkait dengan asuransi yang mendasari sesuai dengan jangka waktu kontrak reasuransi.

Setiap tanggal pelaporan, LPEI mengevaluasi apakah aset reasuransi mengalami penurunan nilai. Aset reasuransi mengalami penurunan nilai jika terdapat bukti obyektif yang menunjukkan adanya kemungkinan besar LPEI tidak mendapatkan jumlah yang tertagih kepada reasuradur. Kerugian penurunan nilai diakui sebagai beban di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**2.s. Tagihan dan liabilitas akseptasi**

Tagihan dan liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Tagihan akseptasi disajikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.q. Insurance receivables, insurance liabilities and insurance payables (continued)**

*Claims payable is derecognized when the obligation expires, is discharged or cancelled.*

**2.r. Reinsurance assets**

*Reinsurance assets is a cedant's net contractual rights under a reinsurance contract. Reinsurance assets is consist of estimated reinsurance reimbursement for claims that are still in the process of completion, estimated reinsurance reimbursement for claims incurred but not yet reported, the portion of reinsurance premiums on liability insurance and reinsurance portion of claims approved for payment (reinsurance receivables). Reinsurance assets are measured consistently with the amounts associated with the underlying insurance in accordance with the terms of the reinsurance contract.*

*At each reporting date, LPEI assesses whether reinsurance assets are impaired. Reinsurance assets are impaired if objective evidence is available to suggest that it is probable that LPEI will not be able to collect the amounts due from reinsurers. The impairment loss is recognized as an expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income.*

**2.s. Acceptances receivable and payable**

*Acceptances receivable and payable are stated at amortised cost. Acceptances receivable is stated net of allowance for impairment losses.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**2.t. Aset tetap, Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa**

LPEI menerapkan PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015). "Aset Tetap". Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa dalam PSAK No. 16 aset dapat direvaluasi dengan mengacu pada data pasar yang dapat diobservasi terhadap jumlah tercatat bruto ataupun neto, dan akumulasi penyusutan atau amortisasi adalah perbedaan antara jumlah tercatat bruto dan jumlah tercatat aset tersebut. Jumlah tercatat aset tersebut disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.

Harga perolehan awal atas aset tetap terdiri dari harga beli dan semua biaya langsung yang dapat diatribusikan untuk membuat aset dalam kondisi siap pakai dan berlokasi di tempat yang digunakan. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai.

Pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu dikapitalisasi sebagai biaya penggantian atas jumlah tercatat (carrying amount) aset tetap sebagai suatu penggantian, jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

LPEI menerapkan model biaya untuk aset tetap.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat, dan metode penyusutan aset ditelaah kembali dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.t. Fixed assets, Right-of-Use-Assets and Lease Liability**

*LPEI implemented SFAS No. 16 (Improvement 2015) "Property, Plant and Equipment". The improvement clarifies that in SFAS No. 16, the asset may be revalued by reference to observable data on either the gross or the net carrying amount. In addition, the accumulated depreciation or amortization is the difference between the gross and net carrying amounts of the asset. Carrying amounts of the asset is restated by reevaluated amounts.*

*The initial cost of premises and equipment consists of its purchase price and any directly attributable costs of bringing the asset to its working condition and location for its intended use. Cost includes the replacement cost of a part of the fixed assets when the expenditure meets the criteria for recognition. Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment loss.*

*When a significant inspection of the asset is performed, the cost of inspection is capitalized as part of the replacement cost of the asset's carrying amount if the criteria for recognition are met. All maintenance and repair costs which do not fulfill the capitalization criteria, are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income upon occurrence.*

*LPEI adopts the cost model for its premises and equipment.*

*At each statement of financial position date, the assets' residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively as appropriate.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

2. **Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)**
- 2.t. Aset tetap, Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa (lanjutan)**

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut.

Tahun/ Years	Percentase/ Percentage
Gedung	20
Peralatan dan perlengkapan kantor	5
Kendaraan bermotor	5

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat pekerjaan aset tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan.

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai yang dipakai.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dihapuskan dari akun tersebut. Keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

**Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa**

PSAK 73 memperkenalkan model akuntansi penyewa tunggal dan mensyaratkan penyewa untuk mengakui aset dan liabilitas untuk semua sewa dengan pengecualian sewa jangka pendek dan aset dengan nilai rendah. Penyewa diharuskan untuk mengakui aset hak-guna yang mewakili haknya untuk menggunakan aset sewaan dan liabilitas sewa yang mewakili kewajibannya untuk melakukan pembayaran sewa. PSAK 73 secara substansial masih menggunakan persyaratan akuntansi atas pesewa (lessor) sesuai PSAK 30 Sewa. Oleh karena itu, penyewa masih akan menggunakan klasifikasi sewa dalam sewa operasi atau pembiayaan, dan perlakuan atas kedua tipe sewa tersebut.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

2. **Summary of Significant Accounting Policies (continued)**
- 2.t. Fixed Assets, Right-of-Use-Assets and Lease Liability (continued)**

*Depreciation is calculated on a straight-line method over the estimated useful lives of the assets as follows.*

<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Tahun/ Years</th><th style="text-align: center;">Percentase/ Percentage</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gedung</td><td style="text-align: center;">20</td></tr> <tr> <td>Peralatan dan perlengkapan kantor</td><td style="text-align: center;">5</td></tr> <tr> <td>Kendaraan bermotor</td><td style="text-align: center;">5</td></tr> </tbody> </table>	Tahun/ Years	Percentase/ Percentage	Gedung	20	Peralatan dan perlengkapan kantor	5	Kendaraan bermotor	5	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Building</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Office furniture and fixtures</td></tr> <tr> <td>Motor vehicles</td></tr> </tbody> </table>	Building	Office furniture and fixtures	Motor vehicles
Tahun/ Years	Percentase/ Percentage											
Gedung	20											
Peralatan dan perlengkapan kantor	5											
Kendaraan bermotor	5											
Building												
Office furniture and fixtures												
Motor vehicles												

*Construction in progress is stated at cost. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate premises and equipment account when the construction is substantially completed and the asset constructed is ready for its intended use.*

*When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down to its recoverable amount, which is determined as the higher of the net selling price or value in use*

*When premises and equipment are retired or disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are derecognized from the accounts. Any resulting gain or loss is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income*

**Right-of-use-Assets and Lease Liabilities**

*SFAS 73 introduces a single lessee accounting model and requires a lessee to recognise assets and liabilities for all leases with the exemptions of short-term leases and the underlying asset is of low value. A lessee is required to recognise a right-of-use asset representing its right to use the underlying leased asset and a lease liability representing its obligation to make lease payments. SFAS 73 substantially carries forward the lessor accounting requirements in SFAS 30 Leases. Accordingly, a lessor continues to classify its leases as operating leases or finance leases, and to account for those two types of leases differently.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan  
(lanjutan)**

**2.t. Aset tetap, Aset Hak Guna dan Liabilitas  
Sewa (lanjutan)**

**Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa  
(lanjutan)**

Dampak penerapan PSAK 73 adalah LPEI sebagai penyewa atas kontrak sewa properti dan kendaraan. LPEI telah memilih *simplified approach* dalam melakukan transisi dan tidak melakukan penyajian kembali untuk informasi komparatif. Dengan demikian, informasi komparatif tetap dilaporkan sesuai dengan PSAK 30, "Sewa".

Pada tanggal 1 Januari 2020, LPEI mengakui liabilitas sewa, sebagai pembayaran sewa yang tersisa termasuk atas opsi perpanjangan dimana perpanjangan hampir dapat dipastikan, didiskontokan menggunakan tingkat bunga pinjaman inkremental pada tanggal penerapan awal. Sedangkan aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dibayarkan, biaya pemulihan dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa, dikurangi insentif sewa yang diterima. Aset hak guna disusutkan dengan metode garis lurus selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dengan estimasi masa manfaat aset.

Beban keuangan dicatat dalam laporan laba rugi. Aset sewa (disajikan sebagai bagian aset tetap) disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewa dan periode masa sewa, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa LPEI akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

**2. Summary of Significant Accounting  
Policies (continued)**

**2.t. Fixed Assets, Right-of-Use-Assets and  
Lease Liability (continued)**

**Right-of-use-Assets and Lease Liabilities  
(continued)**

*The impact of SFAS 73 at LPEI is where LPEI as a lessee in property and vehicle lease contracts. LPEI has elected the simplified approach of transition and did not restate comparative information. Therefore, the comparative information continues to be reported under PSAK 30, "Leases".*

*On January 1, 2020, LPEI recognized a lease liability, being the remaining lease payments including extensions options where renewal is reasonably certain, discounted using the incremental borrowing rate at the date of initial application. Meanwhile, rights of use assets include the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs paid, recovery costs and lease payments made on or before the start date of the lease, less rental incentives received. Rights of use assets are depreciated using the straight-line method over the shorter period between the lease term and the estimated useful life of the asset.*

*Finance expense is recorded in the statement of income. Leased assets (presented under fixed assets) are depreciated over the shorter of the estimated useful life of the assets and the lease term, if there is no reasonable certainty that LPEI will obtain ownership by the end of the lease term.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan  
(lanjutan)**

**2.u. Aset yang diambil alih**

Aset yang diambil alih (AYDA) adalah aset yang diperoleh LPEI, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada LPEI dan diselesaikan melalui penjualan. AYDA merupakan jaminan kredit yang diberikan yang telah diambil alih sebagai bagian dari penyelesaian kredit yang diberikan. LPEI memiliki kebijakan untuk selalu berusaha menjual AYDA untuk menyelesaikan sisa kewajiban debitur.

AYDA diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi (net realisable value), yaitu nilai wajar agunan setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan.

LPEI membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas AYDA berdasarkan kualitas atas aset, yaitu:

- 1) 15% (lima belas persen) untuk kualitas kurang lancar, yaitu dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
- 2) 50% (lima puluh persen) untuk kualitas aset diragukan, yaitu dimiliki lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun;
- 3) 100% untuk kualitas aset macet, yaitu dimiliki lebih dari 5 tahun

Biaya pemeliharaan atas AYDA yang terjadi setelah pengambilalihan atau akuisisi aset dibebankan sebagai laba/rugi pada saat terjadinya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset yang diambil alih diakui sebagai laba/rugi periode berjalan.

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.u. Foreclosed Assets**

*Foreclosed assets represent assets acquired by LPEI, both from auction and non-auction based on voluntary transfer by the debtors or based on debtors' approval to sell the collateral where the debtors could not fulfill their obligations to LPEI and is settled through a sale. Foreclosed assets represent loan collateral acquired in settlement of loans. LPEI has policy to sell foreclosed assets to settle debtors' liabilities.*

*Foreclosed assets are recognised at their net realisable value. Net realisable value is the fair value of the foreclosed assets less estimated cost of liquidating the foreclosed assets.*

*The allowance for impairment made on foreclosed assets is based on its asset quality:*

- 1) 15% (fifteen percent) for substandard assets, which are owned for more than 1 (one) year up to 3 (three) years.
- 2) 50% (fifty percent) for doubtful assets, which are owned for more than 3 (three) years up to 5 (five) years.
- 3) 100% (one hundred percent) for which are owned for more than 5 (five) years.

*Maintenance costs of foreclosed assets subsequent to the foreclosure or acquisition of the assets are charged as current year profit/loss as incurred. Gains or losses from sale of foreclosed assets are charged as current period profit/loss as incurred.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan  
(lanjutan)**

**2.v. Biaya dibayar dimuka**

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

**2.w. Liabilitas segera**

Liabilitas segera merupakan liabilitas LPEI kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas segera diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan.

**2.x. Efek-efek utang yang diterbitkan**

Efek-efek utang yang diterbitkan terdiri dari surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh LPEI berupa obligasi yang diperdagangkan di pasar modal. Obligasi yang diterbitkan disajikan sebesar nilai tercatat dengan biaya perolehan yang belum diamortisasi.

Beban yang berkaitan dengan penerbitan obligasi diakui sebagai diskonto dan dikurangkan langsung dari hasil emisi dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

**2.y. Pinjaman yang diterima**

Pinjaman diterima merupakan dana yang diterima dari bank atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman diterima dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.v. Prepaid expenses**

*Prepaid expenses, are amortized over its benefited periods using the straight-line method.*

**2.w. Current liabilities**

*Current liabilities represent LPEI's obligations to outside parties which should be settled immediately based on predetermined instructions by those having the authority. Obligations due immediately are recorded at amortized cost. This account is classified as other financial liabilities at amortized cost*

**2.x. Debt securities issued**

*Debt securities issued consist of obligations of LPEI in the form of bonds traded in the capital market. Bonds are stated at their carrying value, net of unamortized cost.*

*Expenses related to bonds issuance are recognized as discount, directly deducted from the net proceeds of the bonds issuance and amortized over the term of the bonds using the effective interest method.*

**2.y. Fund borrowings**

*Fund borrowings are funds received from banks or other parties with repayment obligation based on the borrowing agreement.*

*Borrowings are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of borrowings and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**2.z. Provisi**

LPEI menerapkan PSAK No. 57 (Revisi 2009), "Provisi, Liabilitas Kontinjenji, dan Aset Kontinjenji".

Provisi diakui jika LPEI memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan liabilitas tersebut, provisi tidak diakui.

**2.aa. Pendapatan dan beban bunga**

Sebelum terjadinya penurunan nilai (stage 1 & 2), pendapatan bunga dihitung menggunakan metode EIR yaitu dengan menerapkan suku bunga efektif atas jumlah tercatat bruto aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.z. Provision**

*LPEI adopted SFAS No. 57 (Revised 2009), "Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets".*

*Provisions are recognized when LPEI has current liability (both legal or constructive) as a result of past events with high profitability of settlement by outflow of resources with economic benefits and a reliable estimate of the amount of liability can be made.*

*Provisions are reviewed at the end of each reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If there is no probable outflow of resources to settle these liabilities, provision is not recognized.*

**2.aa. Interest income and expense**

*Prior to impairment (stage 1 & 2), interest income is calculated using the EIR method, namely by applying an effective interest rate on the gross carrying amount of financial assets except for financial assets purchased or originating from credit impaired financial assets.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan  
(lanjutan)**

**2.aa. Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)**

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai (*stage 3* atau POCI) dilakukan dengan menerapkan EIR atas jumlah tercatat neto aset keuangan yaitu jumlah *outstanding* setelah dikurangi dengan kerugian akibat penurunan nilai untuk:

- a. Aset keuangan yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk (POCI)  
Untuk aset keuangan tersebut, LPEI menerapkan suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit (*risk adjusted effective interest rate*) atas biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan sejak pengawuan awal.
- b. *Stage 3*  
Untuk aset keuangan tersebut, LPEI menerapkan suku bunga efektif atas biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan di periode pelaporan, yaitu nilai yang telah dikurangi kerugian akibat penurunan nilai.

Pendapatan bunga selanjutnya diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa depan dalam pengukuran kerugian penurunan nilai atau yang disebut dengan *unwinding interest*.

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.aa. Interest income and expense (continued)**

*Interest income on impaired financial assets (stage 3 or POCI) is calculated by applying EIR to the net carrying amount of financial assets, namely the outstanding amount after deducting losses due to impairment for:*

- a. *Financial assets purchased or originating from deteriorating financial assets (POCI)*  
*For these financial assets, LPEI applies an effective interest rate that is adjusted to credit risk (risk adjusted effective interest rate) on the amortized cost of financial assets since initial disclosure.*
- b. *Stage 3*  
*For these financial assets, LPEI applies an effective interest rate on the amortized cost of financial assets in the reporting period, namely the value that has been reduced by losses due to impairment.*

*Interest income is subsequently recognized based on the interest rate used to discount future cash flows in measuring impairment losses or what is known as unwinding interest.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan  
(lanjutan)**

**2.ab. Pendapatan provisi dan komisi**

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pembiayaan dan piutang, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu. diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan metode suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pendapatan ini mencakup provisi dan komisi.

Pendapatan atau komponen pendapatan yang terkait dengan kinerja tertentu diakui setelah memenuhi kriteria yang sesuai dan diklasifikasi sebagai bagian dari provisi dan komisi dari transaksi selain pembiayaan yang diberikan dan piutang dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pendapatan ini meliputi pendapatan jasa penjaminan emisi, pendapatan *arranger, upfront fees* dan pendapatan komitmen.

Pendapatan dan beban provisi dan komisi yang jumlahnya material yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian asset atau liabilitas keuangan diakui sebagai bagian/(pengurang) atau penambah dari biaya perolehan asset atau liabilitas keuangan yang bersangkutan dan akan diakui sebagai pendapatan atau beban dengan cara diamortisasi berdasarkan *E/R* sepanjang perkiraan umur aset atau liabilitas keuangan.

Pendapatan provisi dan komisi lainnya termasuk provisi yang terkait dengan kegiatan perkreditan, kegiatan ekspor-impor, provisi sebagai pengatur sindikasi dan provisi atas jasa diakui pada saat jasa tersebut dilakukan.

Beban provisi dan komisi lainnya sehubungan dengan transaksi antar bank diakui sebagai beban pada saat jasa tersebut diterima.

Saldo beban yang ditangguhkan dan pendapatan komisi atas pembiayaan yang diberikan yang diakhiri atau diselesaikan sebelum jatuh tempo diakui sebagai pendapatan dalam penyelesaian.

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.ab. Fees and commission income**

*Fees and commissions directly related to financing and receivables activities, or fees and commissions income which relate to a specific period are amortized over the term of the contract using the effective interest method and classified as part of interest income in the statement of profit or loss and other comprehensive income. These fees include provision and commission.*

*Fees or component of fees that are linked to a certain performance are recognized after fulfilling the corresponding criteria and classified as part of fees and commissions from non-financing and receivables transactions in the statement of profit or loss and other comprehensive income. These fees include underwriting fees, arranger fees, upfront fees and commitment fees.*

*Fees and commissions that have material amount directly related with the acquisition of financial assets or liabilities are recognized as part/(deduction) or addition of acquisition cost of the related financial assets or liabilities and will be recognized as income or expense and amortized using the EIR during the expected life of the financial assets or liabilities.*

*Other fees and commission income, including credit related fees, export-import related fees, syndication lead arranger fees, and provision for services are recognized when the related services are performed.*

*Other fees and commission expense related mainly to inter-bank transaction fees are expensed as the service are received.*

*The outstanding balances of deferred fees and commission income on financing receivable terminated or settled prior to maturity are recognized as income on settlement.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan  
(lanjutan)**

**2.ac. Pendapatan asuransi lainnya**

LPEI mengakui pendapatan asuransi seperti komisi yang diperoleh dari transaksi reasuransi dan pendapatan lainnya sebagai pendapatan asuransi lainnya.

**2.ad. Pendapatan bagi hasil dan beban bonus secara syariah**

Pendapatan usaha Syariah merupakan pendapatan marjin murabahah, dan pembiayaan musyarakah serta aset produktif lainnya yang diakui dengan menggunakan metode akrual kecuali untuk pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Beban bonus secara syariah merupakan distribusi bonus dan bagi hasil kepada pemilik dana yang diakui berdasarkan metode akrual.

Pendapatan marjin murabahah diakui menggunakan metode suku bunga efektif dengan mempertimbangkan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Jumlah pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan/piutang syariah dan dari aset produktif lainnya yang akan dibagikan kepada debitur penyimpan dana dan LPEI dihitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana debitur dan LPEI yang dipakai dalam piutang murabahah dan pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan dan aset produktif lainnya yang disalurkan.

Dari jumlah pendapatan marjin dan bagi hasil yang tersedia untuk debitur tersebut kemudian dibagikan silakan ke nasabah sebagai "shahibul maal" dan LPEI sebagai "mudharib" sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang memakai dana LPEI, seluruhnya menjadi milik LPEI.

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.ac. Other insurance income**

*LPEI recognized insurance income such as commission received from reinsurance transaction and other income as other insurance income.*

**2.ad. Sharia profit sharing income and bonus expenses**

*Sharia income represents margin income from murabahah, and musyarakah financing and other earning assets which are recognized on an accrual basis except for income derived from profit sharing. Sharia bonus expenses consist of bonus distribution and profit-sharing to fund owners which are recognized on an accrual basis.*

*Murabahah margin is recognized using the effective interest rate method taking into consideration directly attributable transaction costs.*

*Total margin income and profit sharing on the sharia financing/receivables transactions and from other earning assets to be distributed to debtors of fund owners and LPEI are computed based on the proportion of funds from the depositors and LPEI used to finance the murabahah receivables and mudharabah and musyarakah financing and other earning assets.*

*The total available margin and profit sharing are distributed to debtors as "shahibul maal" (owner of funds) and to LPEI as "mudharib" (fund manager) in accordance with a pre-determined ratio (nisbah).*

*Margin income and profit sharing from financing and other earning assets which use LPEI's funds belong to LPEI as a whole.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan  
(lanjutan)**

**2.ae. Pengakuan pendapatan dan beban asuransi  
Pendapatan premi**

Premi yang diterima dari kontrak asuransi diakui sebagai pendapatan selama periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan. Premi dari polis bersama diakui sebesar pada bagian pemilikan premi LPEI.

Premi yang diterima dari kontrak jangka pendek asuransi ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan secara individual ke masa pertanggungan.

Bagian tahun berjalan atas premi dari kontrak jangka panjang asuransi dicatat dengan cara yang sama seperti yang diterima untuk jangka pendek. Bagian premi tahun-tahun berikutnya ditangguhkan.

Premi yang belum merupakan pendapatan adalah proporsi dari premi dalam satu tahun yang berhubungan dengan periode risiko setelah tanggal pelaporan. Premi yang belum merupakan pendapatan dihitung secara pro rata harian. Proporsi yang timbul dari periode berikutnya ditangguhkan sebagai cadangan premi yang belum merupakan pendapatan.

LPEI mereasuransikan sebagian risiko atas akseptasi pertanggungan kepada perusahaan asuransi lain dan perusahaan reasuransi. Jumlah premi dibayar atau bagian premi atas transaksi reasuransi prospektif diakui sebagai premi reasuransi selama sisa periode kontrak reasuransi yang jumlahnya proporsional dengan proteksi yang diberikan.

Pendapatan premi menunjukkan jumlah premi bruto dan premi reasuransi. Premi reasuransi disajikan sebagai pengurang premi bruto.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting  
Policies (continued)**

**2.ae. Insurance revenue and expense recognition  
Premium income**

*Premium received from insurance contracts are recognized as income during the policy period (contracts) in proportion to the insurance coverage provided. Premiums from coinsurance policy is recognized based on LPEI's proportionate share of the premium.*

*Premium received from short-term insurance contracts are deferred and recognized as income on an individual basis over the coverage period.*

*Current portion of premium received from long-term insurance contracts are accounted for in the same manner as those received for short-term insurance contract. Portion for following years is deferred.*

*Unearned premium are those proportions of premiums written in a year relate to periods of risk after the reporting date. Unearned premiums are calculated on a daily pro rata basis. The proportion attributable to subsequent periods is deferred as a provision for unearned premiums.*

*LPEI reinsures part of its total accepted risk with other insurance and reinsurance companies. Premiums paid or share in premium on prospective reinsurance contracts are recognized over the remaining period of the reinsurance contracts based on the coverage provided.*

*Premium income represents gross premium and reinsurance premiums. Reinsurance premium is presented as deduction from gross premium.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan  
(lanjutan)**

**2.ae. Pengakuan pendapatan dan beban asuransi  
Pendapatan premi (lanjutan)**

**Beban klaim**

Klaim meliputi klaim disetujui (*settled claims*), klaim penjaminan, klaim dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, dan beban penyelesaian klaim. Klaim tersebut diakui sebagai beban pada saat timbulnya liabilitas untuk memenuhi klaim. Hak subrogasi diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi.

Jumlah klaim dalam proses penyelesaian (estimasi klaim) ditentukan berdasarkan estimasi kerugian dari klaim masih dalam proses di tanggal pelaporan, termasuk klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan. Perubahan estimasi klaim diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode terjadinya perubahan. Kenaikan (penurunan) estimasi klaim adalah selisih antara estimasi klaim tahun berjalan dan tahun lalu.

Beban klaim menunjukkan jumlah klaim bruto, klaim reasuransi, dan kenaikan (penurunan) estimasi klaim. Klaim reasuransi disajikan sebagai pengurang klaim bruto.

Estimasi klaim yang diperkirakan akan diselesaikan lebih dari satu tahun setelah akhir periode harus memperhitungkan pengaruh nilai waktu uang. Perubahan dalam estimasi liabilitas klaim sebagai hasil dari proses penelaahan lebih lanjut diakui berdasarkan perbedaan antara periode berjalan dan periode kewajiban klaim sebelumnya.

**2.af. Program dana pensiun dan imbalan kerja**

LPEI menerapkan PSAK No. 24 (Amendemen 2016), "Imbalan Kerja". PSAK ini memberikan panduan yang lebih jelas bagi entitas dalam mengakui biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian penyelesaian, biaya jasa kini dan bunga neto setelah adanya amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program karena menggunakan asumsi aktuarial terbaru (sebelumnya menggunakan asumsi aktuarial pada awal periode pelaporan tahunan).

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.ae. Insurance revenue and expense recognition Premium income (continued)**

**Claim expenses**

Claims consist of settled claims, guarantee claims, outstanding claims including claims incurred but not yet reported and claim settlement expenses. Claims are recognized as expenses when the liabilities to cover claims have been incurred. Subrogated rights are recognized as deduction from claim expenses upon realization.

Claims in process (estimated claims) are computed based on estimated loss from claims that are still in process at reporting date, including claims incurred but not yet reported. Changes in estimated claims are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income at the time of change. Increase (decrease) in estimated claims represents the difference between the balance of estimated claims in the current year and prior year.

Claim expenses represent gross claims, reinsurance claims and increase (decrease) in estimated claims. Reinsurance claims are presented as deduction from gross claims.

Estimated claims that are expected to be settled for more than one year after the end of the period must take into account the effect of time value of money. Changes in the estimated claims liabilities as a result of further review process are recognized based on the the difference between the current period and the prior period claims liability.

**2.af. Pension plan and employee benefits**

LPEI adopted SFAS No. 24 (2016 Amendments), "Employee Benefits". This SFAS provide clearer guidance for entities in recognizing past service costs, gain or loss on settlement, current service costs and net interest after amendments, curtailments, or completion of programs because they use the latest actuarial assumptions (previously using actuarial assumptions at the beginning of the annual reporting period).

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan  
(lanjutan)**

**2.af. Program dana pensiun dan imbalan kerja  
(lanjutan)**

Amandemen ini mengklarifikasi bagaimana persyaratan akuntansi untuk amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program dapat mempengaruhi persyaratan batas atas aset yang terlihat dari pengurangan surplus yang menyebabkan dampak batas atas aset berubah.

LPEI menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh pegawai tetap. Kontribusi LPEI adalah sebesar 6%, sedangkan kontribusi pegawai adalah sebesar 4% yang dihitung berdasarkan penghasilan dasar bulanan pegawai. Kontribusi LPEI terhadap dana pensiun dicatat sebagai beban pada saat terjadinya.

LPEI diwajibkan menyediakan program pensiun dengan imbalan minimal tertentu sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 11/2020. Karena UU Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh pegawai pada saat pensiun, biasanya berdasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja dan kompensasi.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.af. Pension plan and employee benefits (continued)**

*These amendments clarify how the accounting requirements for amendments, curtailments, or program completion can affect the asset boundary requirements as seen from the reduction in surplus which causes the impact of the upper limit of assets to change.*

*LPEI has a defined contribution retirement plan covering all of its permanent employees. LPEI and the employees' contributions are computed at 6% and 4%, respectively, of the employees' monthly basic salaries, LPEI's contributions to the retirement plan are recognized as expense when incurred.*

*LPEI is required to provide a minimum amount of pension benefits in accordance with Labor Law No. 11/2020. Since the Labor Law sets the formula for determining the minimum amount of benefits, the pension plans under the Labor Law represent defined benefit plans.*

*A defined benefit pension plan is a pension plan program where the pension amount to be received by employees at the time of retirement, usually depends on one or more factors such as age, years of service and compensation.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan  
(lanjutan)**

**2.af. Program dana pensiun dan imbalan kerja  
(lanjutan)**

Liabilitas imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan adalah nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan dikurangi nilai wajar aset program. Liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen menggunakan metode projected unit credit. Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi perusahaan berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui secara langsung dalam laporan posisi keuangan melalui penghasilan komprehensif lain dalam periode dimana mereka terjadi. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laporan laba rugi pada periode berikutnya.

Biaya jasa lalu diakui dalam laporan laba rugi pada tanggal yang lebih awal antara:

- ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi; dan
- ketika LPEI mengakui biaya restrukturisasi terkait atau pesongan.

Sehingga biaya jasa lalu yang belum vested tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode vesting masa depan

Biaya pemutusan kontrak kerja dan keuntungan/kerugian kurtailmen diakui pada periode dimana LPEI menunjukkan komitmennya untuk mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.af. Pension plan and employee benefits (continued)**

*The liability recognized in the statement of financial position is the defined benefit obligation less the fair value of the plan assets. The present value of defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method. The present value of a defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of high quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefit will be fully paid and that have the terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.*

*Actuarial gains and losses are recognized immediately in the statement of financial position through other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.*

*Past service costs are recognized in profit or loss on the earlier of:*

- the date of the plan amendment or curtailment; and*
- the date that LPEI recognizes restructuring-related costs.*

*Therefore, unvested past service cost can no longer be deferred and recognized over the future vesting period.*

*Termination costs and curtailment gain or loss are recognized in the period when LPEI is demonstrably committed to make a significant reduction in the number of employees covered by a plan.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan  
(lanjutan)**

**2.ag. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing**

LPEI menerapkan PSAK No. 10 (Revisi 2010). "Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing". mengatur bagaimana memasukkan transaksi dalam mata uang asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan LPEI dan bagaimana menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam nilai Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal posisi keuangan, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs Spot Reuters pada pukul 16.00 WIB. Reuters adalah salah satu sumber kurs penutupan yang diakui oleh Bank Indonesia dan PSAK.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kurs yang digunakan adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember / December 31,</b>	
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Dolar Amerika Serikat	14,253	14,050
Euro Eropa	16,112	17,234
100 Yen Jepang	12,377	13,597
Dolar Singapura	10,555	10,606

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.ag. Foreign currency transactions and balances**

*LPEI applied SFAS No. 10 (Revised 2010), "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", which describes how to include foreign currency transactions and foreign operations in the financial statements of LPEI and translate financial statements into a presentation currency.*

*Transactions in foreign currencies are recorded in Rupiah at the exchange rates prevailing at the time of the transaction. At financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated to Rupiah at the Reuters' spot exchange rates at 04.00 PM (West Indonesian local time). Reuters is one of the recognized sources of closing rate by Bank of Indonesia and SFAS.*

*As of December 31, 2021 and 2020, the exchange rates used are as follows:*

<i>United States Dollars</i>
<i>European Euro</i>
<i>100 Japanese Yen</i>
<i>Singapore Dollars</i>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan  
(lanjutan)**

**2.ah. Pajak Penghasilan**

LPEI menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014) "Pajak Penghasilan", yang menetapkan perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan mendatang dari pemulihian (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) masa depan yang diakui dalam laporan posisi keuangan dan transaksi dan kejadian lain dari periode kini yang diakui dalam laporan keuangan. PSAK revisi ini juga mensyaratkan LPEI untuk mencatat kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan beserta bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak untuk tahun yang bersangkutan dan dihitung menggunakan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas, kecuali perbedaan yang dikenakan pajak final. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan diterapkan pada periode aset atau liabilitas tersebut direalisasi atau diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan-peraturan pajak) yang berlaku atau secara substansi telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dikreditkan atau dibebankan pada laba rugi komprehensif tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

**2. Summary of Significant Accounting Policies  
(continued)**

**2.ah. Income Tax**

LPEI applied PSAK No. 46 (Revised 2014) "Income Taxes", which prescribes the accounting treatment for income taxes to account for the current and future tax consequences of the future recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) that are recognized in the statements of financial position and transactions and other events of the current period that are recognized in the financial statement. The revised PSAK also prescribes LPEI to present the underpayment/overpayment of income tax, including its interest/penalty, if any, as part of "Current Tax Expense" in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the year and calculated using the appropriate tax rate.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases, except those differences that are subject to final tax. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences while deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to be applied to the period when the assets are realized or the liabilities are settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at statements of financial position date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rate are credited or charged to current year statement of profit or loss and other comprehensive income, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**2.ah. Pajak Penghasilan (lanjutan)**

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus di laporan keuangan, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Pajak penghasilan tangguhan dihitung dengan menggunakan metode posisi keuangan, terhadap semua perbedaan temporer pada tanggal laporan posisi keuangan antara aset dan liabilitas menurut pajak dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan.

**2.ai. Informasi segmen**

LPEI menggunakan PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015): Segmen Operasi yang mengklarifikasi mengenai pertimbangan dalam yang dibuat oleh manajemen dalam penerapan kriteria agregasi. PSAK No. 5 paragraf 12 termasuk penjelasan singkat mengenai segmen operasi yang digabungkan dan karakteristik ekonomi lalu pengungkapan rekonsiliasi aset segmen terhadap total aset jika rekonsiliasi dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional, demikian juga untuk pengungkapan liabilitas segmen.

Informasi segmen diungkapkan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana LPEI terlibat dalam lingkungan ekonomi dimana LPEI beroperasi.

LPEI menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan kepada pengambil keputusan operasional.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari LPEI:

- a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.ah. Income Tax (continued)**

*Deferred tax assets and liabilities are offset in the statement of financial position, except if these are for different legal entities, in the same manner the current tax assets and liabilities are presented.*

*Deferred income tax is calculated using the financial position method, on all temporary differences at the statement of financial position date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes.*

**2.ai. Segment reporting**

*LPEI applies PSAK No. 5 (Improvement 2015): Operating Segment which clarifies about the judgments made by management in applying the aggregation criteria in paragraph 12 of PSAK No. 5 including a brief description of operating segments that have been aggregated and the economic characteristics and disclosure of reconciliation of segment assets to total assets if the reconciliation is reported to the chief operating decision maker, similar to the required disclosure for segment liabilities.*

*Segment information is disclosed to enable users of financial statement to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which LPEI is involved in and the economic environment where LPEI operates.*

*LPEI determines and presents operating segments based on the information that is internally provided to the chief operating decision maker.*

*An operating segment is a component of LPEI:*

- a) that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**2.ai. Informasi segmen (lanjutan)**

- b) hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional perusahaan untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

LPEI hanya beroperasi dalam usaha perbankan konvensional dan syariah dan hanya beroperasi di Indonesia tanpa cabang, sehingga LPEI tidak menyajikan informasi pelaporan segmen berdasarkan wilayah geografis operasi.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut.

**3. Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi Akuntansi Signifikan**

**a. Pertimbangan akuntansi yang signifikan**

**1. Usaha yang berkelanjutan**

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi LPEI, manajemen telah menggunakan pertimbangan dan estimasi dalam menentukan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Pertimbangan dan estimasi paling signifikan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Manajemen telah melakukan penilaian atas kemampuan LPEI untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa LPEI memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan LPEI untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

**2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)**

**2.ai. Segment reporting (continued)**

- b) whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and
- c) for which discrete financial information is available.

*LPEI only operates in the business of conventional banking and sharia and only operates in Indonesia without any branches. Therefore, LPEI cannot present reporting information segment by the operation geographical area.*

*Income, costs, outcome, assets and liabilities segment include items that directly attributable to a certain segment and also matters that can be allocated with the basis appropriate to specified segment.*

**3. Significant Accounting Judgments, Estimates and Assumptions**

**a. Significant accounting judgments**

**1. Going concern**

*In the process of implementing LPEI's accounting policies, management has exercised judgments and estimates in determining the amounts recognized in the financial statements. The most significant use of judgments and estimates are as follows:*

*The management has assessed LPEI's ability to continue as a going concern and believes that LPEI has the resources to continue its business in the future. In addition, management was not aware of any material uncertainty which may cast significant doubt to LPEI's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements have been prepared on a going concern basis.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**3. Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi  
Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**a. Pertimbangan akuntansi yang signifikan  
(lanjutan)**

**2. Nilai wajar atas instrumen keuangan**

Dalam rangka penerapan PSAK No.68, "Pengukuran Nilai Wajar", LPEI menyajikan nilai wajar atas instrumen keuangan berdasarkan hirarki nilai wajar berikut:

- Tingkat 1 - nilai wajar berdasarkan harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif;
- Tingkat 2 - nilai wajar yang menggunakan input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya diperoleh dari harga); dan
- Tingkat 3 - nilai wajar yang menggunakan input yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Bila nilai wajar aset keuangan dan kewajiban keuangan yang tercatat pada posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika statistic.

Masukan (input) untuk model ini berasal dari data pasar yang dapat diobservasi. Bila data pasar yang dapat diobservasi tersebut tidak tersedia, manajemen mempertimbangkan masukan dan asumsi yang diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan seperti model umpan balik likuiditas dan volatilitas untuk transaksi derivatif dan tingkat diskonto jangka panjang, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**3. Significant Accounting Judgments,  
Estimates and Assumptions (continued)**

**a. Significant accounting judgments  
(continued)**

**2. Fair value of financial instruments**

*Upon the adoption of PSAK No. 68, LPEI presents the fair value of financial instruments based on the following fair value hierarchy:*

- *Level 1 - the fair value is based quoted prices (unadjusted) in active markets;*
- *Level 2 - the fair value uses inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices); and*
- *Level 3 - the fair value uses inputs that are not based on observable market data (unobservable inputs).*

*If the fair value of financial assets and financial liabilities recorded in the financial position is not available in an active market, the fair value is determined using various valuation techniques including the use of statistical mathematical model.*

*The input for this model comes from observable market data. When observable market data are not available, management considers necessary inputs and assumptions to determine the fair value. Considerations include considerations such as liquidity and volatility feedback model for derivative transactions and long term discount rate, the level of early payment and the level of default assumption.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**3. Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi  
Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**a. Pertimbangan akuntansi yang signifikan  
(lanjutan)**

**3. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan**

LPEI menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 (Revisi 2017) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi LPEI seperti diungkapkan pada Catatan 2e.

**4. Klasifikasi produk asuransi dan  
penjaminan**

Produk LPEI berupa "Penjaminan Indonesia Eximbank" dan "Penjaminan Kepabeanan" dicatat sesuai dengan ketentuan di PSAK No. 57 (Revisi 2009) karena produk-produk tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai kontrak penjaminan keuangan berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dan tidak memenuhi kualifikasi sebagai kontrak asuransi berdasarkan PSAK No. 62 dikarenakan tidak terdapat risiko asuransi yang signifikan.

"Penjaminan Proteksi Piutang Dagang" dicatat sesuai dengan ketentuan di PSAK No. 28 (Revisi 2012) dan PSAK No. 62 karena penjaminan ini memenuhi kriteria pengakuan kontrak penjaminan keuangan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2014) dan LPEI telah mencatat produk tersebut sebagai kontrak asuransi dan memiliki intensi meneruskan perlakuan tersebut.

**3. Significant Accounting Judgments,  
Estimates and Assumptions (continued)**

**a. Significant accounting judgments  
(continued)**

**3. Classification of financial assets and  
liabilities**

*LPEI specifies certain classification of assets and liabilities with consideration whether the definition specified by the PSAK No. 71 (Revised 2017) is fulfilled. Therefore, financial assets and liabilities have been recognized in accordance with the accounting policies of LPEI stated in Note 2e.*

**4. Classification of insurance products  
and guarantees**

*LPEI's "Indonesia Eximbank Guarantee" and "Customs Guarantee" products are accounted for in accordance with PSAK No. 57 (Revised 2009) as they are not financial guarantee contract under PSAK No. 55 (Revised 2014) and do not qualify as insurance contract under PSAK No. 62 due to the lack of significant insurance risk.*

*Accounts Receivable Protection Guarantee" is recorded in accordance with PSAK No. 28 (Revised 2012) and PSAK No. 62 as it meets the recognition criteria of a financial guarantee contract under PSAK No. 55 (Revised 2014) and LPEI has recorded the product as insurance contract and intended to continue such accounting treatment.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**3. Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi  
Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**a. Pertimbangan akuntansi yang signifikan  
(lanjutan)**

**5. Penilaian mata uang fungsional**

Manajemen menggunakan pertimbangannya untuk menentukan mata uang fungsional LPEI yang dapat merepresentasikan secara benar efek ekonomi dari transaksi yang mendasarinya, peristiwa dan kondisi yang relevan dengan LPEI.

Dalam pembuatan pertimbangan tersebut, LPEI memperhatikan hal-hal berikut:

- mata uang yang sangat mempengaruhi harga jual untuk instrumen keuangan dan jasa-jasa (ini seringkali menjadi mata uang yang digunakan, yaitu mata uang dimana harga jual instrumen keuangan dan jasa-jasa didenominasi dan direalisasikan);
- mata uang atas dana yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan; dan
- mata uang dimana penerimaan dari kegiatan operasi biasanya didapatkan.

**6. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap  
penerapan PSAK 71 Instrumen Keuangan**

Pandemi Global Virus Corona (Covid-19) menimbulkan ketidakpastian ekonomi global dan domestik serta secara signifikan memengaruhi pertimbangan LPEI dalam menyusun laporan keuangan dan berdampak pada penerapan PSAK 71-instrumen keuangan.

Mengacu pada POJK No. 11/POJK.03/2020 serta panduan Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia tentang dampak pandemi Covid-19 maka LPEI:

- Mengidentifikasi debitur-debitur yang selama ini berkinerja baik namun menurun kinerjanya karena terdampak Covid-19.

**3. Significant Accounting Judgments,  
Estimates and Assumptions (continued)**

**a. Significant accounting judgments  
(continued)**

**5. Assessment of functional currency**

*The management uses its judgment to determine LPEI's functional currency which faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events and conditions that are relevant to LPEI.*

*In making this judgment, LPEI considers the following:*

- the currency that mainly influences sales prices for financial instruments and services (this will often be the currency in which sales prices for its financial instruments and services are denominated and settled);*
- the currency in which funds from financing activities are generated; and*
- the currency in which receipts from operating activities are usually retained.*

**6. Impact of Covid-19 Pandemic on the  
adoption of PSAK 71 Financial  
Instruments**

*The Global Corona Virus pandemic (Covid-19) raises global and domestic economic uncertainties and significantly influences LPEI's considerations in preparing financial statements and has an impact on the adoption of PSAK 71-financial instruments.*

*Referring to POJK No. 11/POJK.03/2020 and guidance of the Financial Accounting Standards Board - Indonesian Accountants Association about the impact of the pandemic Covid-19, LPEI:*

- Identifying debtors who have been performing well but have decreased their performance due to Covid-19.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**3. Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi  
Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

- a. Pertimbangan akuntansi yang signifikan (lanjutan)
6. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap penerapan PSAK 71 Instrumen Keuangan (lanjutan)
- Menerapkan skema restrukturisasi mengacu pada hasil asesmen yang akurat disesuaikan dengan profil debitur dengan jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun dan hanya diberikan pada debitur-debitur yang benar-benar terdampak Covid-19.
  - Melakukan identifikasi dan *monitoring* secara berkelanjutan serta berjaga-jaga untuk tetap melakukan pembentukan CKPN apabila debitur-debitur yang telah mendapatkan fasilitas restrukturisasi tersebut berkinerja baik pada awalnya, diperkirakan menurun karena terdampak Covid-19, dan tidak dapat pulih pasca restrukturisasi atau dampak Covid-19 berakhir.

**b. Estimasi dan asumsi**

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. LPEI mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali LPEI. Perubahan tersebut dicerminkan dalam estimasi dan asumsi terkait pada saat terjadinya.

**3. Significant Accounting Judgments,  
Estimates and Assumptions (continued)**

- a. *Significant accounting judgments (continued)*
6. *Impact of Covid-19 Pandemic on the adoption of PSAK 71 Financial Instruments (continued)*
- *Implementing a restructuring scheme refers to the results of the assessment which are accurately adjusted to the debtor profile with a period of maximum of 1 (one) year and is only given to debtors who are truly affected by Covid-19.*
  - *Identifying and monitoring on an ongoing basis as well as being prepared to continue forming the CKPN if debtors who have obtained the restructuring facility perform well initially, are expected to decrease due to covid-19 impact, and cannot recover after the restructuring or Covid-19 damage ends.*

**b. Estimates and assumptions**

*Future main assumption and main source of other uncertainty estimates on the reporting date which might have significant risk of material adjustment to the recorded asset and liabilities for the coming period are disclosed below. LPEI based its assumptions and estimates on the provided parameter during the preparation of financial statements. The assumptions and situations regarding the future development may change due to market changes or circumstances beyond the control of LPEI. Such changes are reflected in the estimates and assumptions when they occur.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**3. Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi  
Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)**

**1. Metode penyusutan dan masa manfaat  
aset tetap**

Untuk kepentingan perhitungan penyusutan, nilai sisa untuk semua aset tetap, kecuali ada catatan lain untuk aset tertentu, harus lebih besar dari Rp1 (nilai penuh). LPEI melakukan peninjauan kembali atas nilai sisa, umur manfaat, dan metode penyusutan yang ditetapkan untuk setiap aset tetap minimum pada setiap akhir tahun buku. Taksiran masa manfaat dari aset tetap diungkapkan dalam Catatan 2t.

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis untuk gedung dan peralatan dan perabotan, masing-masing adalah 20 tahun dan 5 tahun.

Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana LPEI menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Lihat Catatan 13 untuk nilai buku atas aset tetap LPEI pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

**2. Cadangan kerugian penurunan nilai atas  
pembiayaan dan piutang**

Evaluasi atas kerugian penurunan nilai aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dijelaskan di Catatan 2o.

Komponen cadangan kerugian penurunan nilai debitur tertentu dalam total cadangan kerugian penurunan nilai berlaku pada tagihan yang penurunan nilainya dievaluasi secara individual berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai tunai arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas ini, manajemen membuat pertimbangan mengenai kondisi keuangan dari debitur dan nilai bersih yang dapat direalisasi

**3. Significant Accounting Judgments,  
Estimates and Assumptions (continued)**

**b. Estimates and assumptions (continued)**

**1. Depreciation method and useful lives  
of premises and equipment**

For fixed asset calculations, residual amount for all fixed assets, except when there is disclosure for the specified asset, must be greater than Rp1 (full amount). LPEI reassess the residual value, useful life, and method of depreciation used at least at the end of each year. The estimated useful lives of premises and equipment are disclosed in Note 2t.

Fixed asset are depreciated using the straight-line method based on the economic useful life. Management estimates that the useful life of building and premises and equipment, are 20 years and 5 years, respectively.

This is the expected average useful life in the industry where LPEI operates. Changes in the level of usage and technology development may affect the economic useful life and also the residual value of the assets and therefore, costs may be revised. Refer to Note 13 for book value of LPEI's premises and equipment as of December 31, 2021 and 2020.

**2. Allowance for impairment losses on  
financing and receivables**

Financial assets accounted for at amortised cost are evaluated for impairment on a basis described in Note 2o.

The specific counterparty component of the total allowances for impairment applies to claims evaluated individually for impairment and is based upon management's best estimate of the present value of the cash flows that are expected to be received. In estimating these cash flows, management makes judgments about the counterparty's financial situation and the net realizable value of any underlying collateral under

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**3. Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)**

**2. Cadangan kerugian penurunan nilai atas pemberian dan piutang (lanjutan)**

dari agunan yang diterima dengan lebih dari satu scenario. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dievaluasi berdasarkan kinerjanya dan strategi penyelesaiannya serta estimasi arus kas yang dinilai dapat diperoleh kembali secara independen disetujui oleh Departemen Analisis Risiko dan Kredit Reviewer.

Evaluasi cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat pada portofolio tagihan dengan karakteristik ekonomi yang serupa ketika terdapat bukti obyektif bahwa telah terjadi penurunan nilai tagihan dalam portofolio tersebut namun penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menentukan perlunya membentuk cadangan kerugian penurunan nilai kredit secara kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit, besarnya portofolio, konsentrasi kredit dan faktor-faktor ekonomi.

Dalam mengestimasi cadangan yang dibutuhkan, asumsi-asumsi dibuat untuk menentukan model kerugian bawaan dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman historis dan kondisi ekonomi saat ini.

Ketepatan dari cadangan ini tergantung pada seberapa tepat estimasi arus kas masa depan untuk menentukan cadangan individual serta asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

**3. Significant Accounting Judgments, Estimates and Assumptions (continued)**

**b. Estimates and assumptions (continued)**

**2. Allowance for impairment losses on financing and receivables (continued)**

*impaired asset is assessed on its merits, and the workout strategy and estimate of cash flows considered recoverable are independently approved by the Risk Analysis and Credit Reviewer Department.*

*Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of claims with similar economic characteristics when there is objective evidence to suggest that they contain impaired claims, but the individual impaired items cannot yet be identified. In assessing the need for collective loan loss allowances, management considers factors such as credit quality, portfolio size, credit concentrations and economic factors.*

*In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modeled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions.*

*The accuracy of the allowances depends on how well the estimated future cash flows are determined for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**3. Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

- b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)**
- 3. Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya**

Penentuan liabilitas LPEI dan imbalan pasca kerja serta imbalan jangka panjang lainnya, tergantung pada pemilihan asumsi-asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaria untuk menghitung estimasi tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri pegawai tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan LPEI langsung diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya. Sementara LPEI berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Lihat Catatan 28 untuk nilai tercatat atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja LPEI pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

**4. Penurunan nilai efek-efek ekuitas yang diakui pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain**

LPEI menelaah aset keuangan mereka pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan pada biaya diamortisasi berdasarkan PSAK 71 yang mengharuskan untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian pada setiap tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit dari aset keuangan tidak pada nilai wajar melalui laba rugi. PSAK 71 menggabungkan informasi *forward-looking* dan historis, terkini dan yang diperkirakan ke dalam estimasi kerugian kredit ekspektasian.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**3. Significant Accounting Judgments, Estimates and Assumptions (continued)**

- b. Estimates and assumptions (continued)**
- 3. Pension and other long term employee benefits**

The determination of LPEI liabilities and pension and also other long term employee benefits depend on the assumptions used by the actuary in calculating the estimation. Those assumptions include discount rate, annual salary increases rate, annual resignation rate, level of disability, retirement age, and mortality rate. Difference in the actual result and assumption of LPEI is recognized in the profit or loss by the time of occurrence. While LPEI believes that the assumptions are fair and appropriate, there could be a significant difference between the actual result or, change in estimation on the pension and employee benefit and net employee benefit expense. See Note 28 for the amount recorded as liabilities on LPEI employees benefit as of December 31, 2021 and 2020.

**4. Impairment of equity securities classifies as fair value through other comprehensive income**

LPEI review their financial assets at fair value through other comprehensive income and financial assets at amortised cost under PSAK 71 which required to recognise the expected credit loss at each reporting date to reflect changes in credit risk of the financial assets not at fair value through profit or loss. PSAK 71 incorporates forward-looking and historical, current and forecasted information into expected credit loss estimation. judgment from LPEI.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**3. Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi  
Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)**

**4. Penurunan nilai efek-efek ekuitas yang  
diakui pada nilai wajar melalui  
penghasilan komprehensif lain  
(lanjutan)**

Dalam melakukan peninjauan penurunan nilai, penilaian manajemen berikut diperlukan:

- i. Penentuan apakah aset mengalami penurunan nilai berdasarkan indikator tertentu seperti, antara lain, kesulitan keuangan debitur, penurunan kualitas kredit; dan
- ii. Penentuan umur kredit ekspektasian yang mencerminkan:
  - a. Jumlah yang tidak bisa dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi kemungkinan dari berbagai hasil;
  - b. Nilai waktu dari uang; dan
  - c. Informasi yang masuk akal dan dapat didukung yang tersedia tanpa biaya atau usaha yang tidak semestinya pada tanggal pelaporan tentang peristiwa masa lalu, kondisi saat ini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Nilai tercatat instrumen keuangan cadangan kerugian penurunan nilai diungkapkan dalam Catatan 7.

Nilai tercatat efek-efek ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta cadangan kerugian penurunan nilai diungkapkan dalam Catatan 7.

**3. Significant Accounting Judgments,  
Estimates and Assumptions (continued)**

**b. Estimates and assumptions (continued)**

**4. Impairment of equity securities  
classifies as fair value through other  
comprehensive income (continued)**

*In carrying out the impairment review, the following management's judgements are required:*

- i. *Determination whether the assets is impaired based on certain indicators such as, amongst others, financial difficulties of the debtor's, deterioration of the credit quality of the debtor's; and*
- ii. *Determination of expected credit life that reflect:*
  - a. *An unbiased and probability-weighted amount that is determined by evaluating a range of possible outcomes;*
  - b. *The time value of money; and*
  - c. *Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions.*

*The carrying value of financial instrument and allowance for impairment losses are disclosed in Note 7.*

*The carrying value of fair value through other comprehensive income equity securities and allowance for impairment losses are disclosed in Note 7.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**3. Pertimbangan, Estimasi Dan Asumsi  
Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)**

**5. Penurunan nilai aset non-keuangan**

Dalam mengidentifikasi terdapat atau tidaknya penurunan nilai aset, LPEI mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

1. terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset;
2. perubahan signifikan yang bersifat merugikan sehubungan dengan cara penggunaan aset;
3. terdapat bukti bahwa kinerja ekonomi asset tidak memenuhi harapan atau lebih buruk dari yang diharapkan;
4. arus kas sesungguhnya secara material lebih kecil dari arus kas taksiran, sebelum perhitungan diskonto.

**6. Pengakuan aset pajak tangguhan**

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh saldo rugi fiskal yang belum digunakan sejauh terdapat kemungkinan bahwa saldo rugi tersebut dapat dikompensasikan terhadap penghasilan kena pajak di masa yang akan datang. Pertimbangan manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan saat dan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang seiring dengan strategi perencanaan pajak.

LPEI menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan mengurangi jumlah tercatat dalam hal tidak adanya lagi kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak yang cukup akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan.

**3. Significant Accounting Judgments,  
Estimates and Assumptions (continued)**

**b. Estimates and assumptions (continued)**

**5. Impairment of non-financial assets**

*In assessing the possibility of impairment of non-financial assets, LPEI considers these factors:*

1. *evidence of obsolescence or physical damage on assets;*
2. *significant changes which might negatively affect the use of the assets;*
3. *evidence that the assets economical performance is worse than expected;*
4. *the cash flow which is materially less than expected cash flow, before any discount*

**6. Recognition of deferred tax assets**

*Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses and credits to the extent that it is probable that taxable income will be available against which the losses can be utilized. Significant management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and level of future taxable income together with future tax planning strategies.*

*LPEI reviews their deferred tax assets at each statement of financial position date and reduce the carrying amount to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**3. Pertimbangan, Estimasi Dan Asumsi  
Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)**

**6. Pengakuan aset pajak tangguhan  
(lanjutan)**

Mengacu kepada Catatan 15d tentang aset pajak tangguhan.

**7. Estimasi Klaim Penjaminan**

Pada setiap tanggal pelaporan, LPEI menelaah kewajibannya atas potensi klaim atas risiko-risiko yang ditanggung LPEI dalam perjanjian penjaminan, untuk menilai apakah suatu liabilitas harus diakui dalam laporan keuangan. LPEI mencatat estimasi klaim penjaminan berdasarkan metode tertentu sesuai standar akuntansi keuangan di Indonesia. Hasil aktual yang berbeda dari hasil perhitungan akan dibebankan ke laba rugi tahun berjalan. Sementara LPEI berkeyakinan bahwa hasil perhitungan tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual akan dapat mempengaruhi secara material laba ruginya.

**8. Liabilitas Asuransi**

LPEI mencatat liabilitas asuransi berdasarkan metode perhitungan tertentu yang berlaku umum di Indonesia. Asumsi utama yang mendasari metode tersebut adalah pengalaman klaim masa lalu. Hasil aktual yang berbeda dari hasil perhitungan akan dibebankan ke laba rugi tahun berjalan. Sementara LPEI berkeyakinan bahwa hasil perhitungan tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual akan dapat mempengaruhi secara material laba ruginya.

**3. Significant Accounting Judgments,  
Estimates and Assumptions (continued)**

**b. Estimates and assumptions (continued)**

**6. Recognition of deferred tax assets  
(continued)**

Refer to Note 15d for the deferred tax assets.

**7. Estimated guarantee claim**

*At each reporting date, the Company assess its for potential claim on risks covered by the Company under guarantee agreements, to determine whether such liabilities should be recognised in the financial statements. LPEI records estimated guarantee claim based on a certain method based on accounting standards in Indonesia. Actual results that differ from LPEI's calculation result will be charged to profit or loss for the year. While LPEI believes that its calculation results are reasonable and appropriate, significant differences in the actual results may materially affect its profit and loss.*

**8. Insurance Liabilities**

*LPEI records insurance liabilities based on a certain calculation method which generally applied in Indonesia. The main assumption underlying this method is LPEI's past claim experience. Actual results that differ from LPEI's calculation result will be charged to profit or loss for the year. While LPEI believes that its calculation results are reasonable and appropriate, significant differences in the actual results may materially affect its profit and loss.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**3. Pertimbangan, Estimasi Dan Asumsi  
Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**8. Menentukan jangka waktu kontrak  
dengan opsi perpanjangan dan  
penghentian kontrak LPEI sebagai  
lessee**

LPEI menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu yang tidak dapat dibatalkan bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika dipastikan akan dilaksanakan, atau periode apa pun yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika cukup wajar untuk dilakukan.

LPEI memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian jangka waktu sewa. LPEI menerapkan penilaian dalam mengevaluasi apakah dapat dipastikan jika akan menggunakan opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh fakta atau keadaan yang relevan yang memberikan insentif ekonomi untuk melakukan perpanjangan atau penghentian sewa. Setelah tanggal dimulainya, LPEI menilai kembali masa sewa, jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan dalam keadaan yang berada dalam kendali dan mempengaruhi apakah lessee cukup pasti untuk mengeksekusi opsi memperpanjang atau menghentikan sewa.

**3. Significant Accounting Judgments,  
Estimates and Assumptions (continued)**

**8. Determining the term of the contract  
with the option of contract extension  
and termination LPEI as lessee**

*The LPEI determines the lease term as the term that cannot be canceled together with the period covered by the option to extend the lease if it is determined to be implemented, or any period covered by the option to terminate the lease, if it is reasonable to do so.*

*LPEI has several rental contracts that include options for extension and termination of the lease term. LPEI applies an assessment in evaluating whether it can be ascertained if it will use the option to extend or terminate the lease. This is done by considering all relevant facts or circumstances that provide economic incentives to extend or terminate the lease. After the commencement date, LPEI reassesses the lease term, if there is a significant event or change in circumstances which is under its control and affects whether the lessee is certain enough to exercise the option to extend or terminate the lease.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**4. Giro pada Bank Indonesia**

	<b>31 Desember / December 31,</b>		<b>Rupiah</b>
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	
Rupiah	2,318	17,913	
<b>Total</b>	<b>2,318</b>	<b>17,913</b>	<b>Total</b>

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 LPEI memiliki saldo giro pada Bank Indonesia untuk keperluan transfer dana *Real Time Gross Settlement (RTGS)*.

*As of December 31, 2021 and 2020, LPEI has current account with Bank Indonesia for Real Time Gross Settlement (RTGS) transfer of funds.*

**5. Giro pada Bank**

**a. Berdasarkan *counterparties* dan mata uang**

	<b>31 Desember/ December 31, 2021</b>		<b>31 Desember/ December 31, 2020</b>		<b>Rupiah</b>
	<b>Jumlah nosisional</b>	<b>Mata uang asing/ Notional amount in Foreign currencies</b>	<b>Ekuivalen/ Equivalent</b>	<b>Jumlah nosisional</b>	
	<b>(Dalam nilai penuh/ In full amount)</b>	<b>Rupiah</b>	<b>(Dalam nilai penuh/ In full amount)</b>	<b>Rupiah</b>	
<b>Rupiah</b>					<b>Related parties (Note 38)</b>
<b>Pihak berelasi (Catatan 38)</b>					<b>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</b>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		521,798		5,035,597	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		20,765		22,791	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		21,120		7,337	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		<b>563,683</b>		<b>5,065,725</b>	
<b>Pihak ketiga</b>					<b>Third parties</b>
PT Bank Jabar Banten Syariah		508		504	PT Bank Jabar Banten Syariah
PT Bank CIMB Niaga Tbk		10		--	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk		1		2	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
		<b>564,202</b>		<b>5,066,231</b>	
<b>Mata uang asing</b>					<b>Foreign currencies</b>
<b>Dolar Amerika Serikat</b>					<b>United States Dollars</b>
<b>Pihak berelasi (Catatan 38)</b>					<b>Related parties (Note 38)</b>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3,083,970	43,954	107,432	1,509	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	106,341	1,516	1,000	14	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6,303	90	6,041	85	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**5. Giro pada Bank (lanjutan)**

**a. Berdasarkan counterparties dan mata uang (lanjutan)**

	31 Desember/ December 31, 2021		31 Desember/ December 31, 2020		<i>Third parties</i> <i>Standard Chartered</i> <i>Bank, New York</i> <i>The HSBC Ltd, New York</i> <i>JP Morgan Chase bank</i> <i>PT. Bank Bukopin Tbk</i> <i>Commerzbank Aktiengesellschaft</i> <i>Citibank, N.A, Jakarta</i> <i>The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta</i> <i>PT Bank ICBC Indonesia</i> <i>PT Bank Central Asia Tbk</i> <i>PT Bank CIMB Niaga Tbk</i>
	Jumlah nosional <i>Notional amount in</i> <i>Foreign currencies</i> (Dalam nilai penuh/ <i>In full amount</i> )	Ekuivalen/ <i>Equivalent</i> <i>Rupiah</i>	Jumlah nosional <i>Notional amount in</i> <i>Foreign currencies</i> (Dalam nilai penuh/ <i>In full amount</i> )	Ekuivalen/ <i>Equivalent</i> <i>Rupiah</i>	
<b>Pihak ketiga</b>					
Standard Chartered					
Bank, New York	1,412,890	20,137	19,070,663	267,942	<i>Standard Chartered</i> <i>Bank, New York</i>
The HSBC Ltd, New York	1,083,294	15,440	8,023,281	112,728	<i>The HSBC Ltd, New York</i>
JP Morgan Chase Bank	475,728	6,780	--	--	<i>JP Morgan Chase bank</i>
PT. Bank Bukopin Tbk	118,295	1,686	--	--	<i>PT. Bank Bukopin Tbk</i>
Commerzbank Aktiengesellschaft	--	--	24,714	347	<i>Commerzbank Aktiengesellschaft</i>
Citibank, N.A, Jakarta	9375	134	9,375	132	<i>Citibank, N.A, Jakarta</i>
The Bank of Tokyo -					<i>The Bank of Tokyo - Mitsubishi</i>
Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta	9,228	131	9,229	130	<i>UFJ Ltd., Jakarta</i>
PT Bank ICBC Indonesia	5,866	84	5,866	82	<i>PT Bank ICBC Indonesia</i>
PT Bank Central Asia Tbk	4,762	68	4,765	67	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	944	13	--	--	<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk</i>
<b>Euro Eropa</b>					<i>European Euro</i>
<b>Pihak berelasi (Catatan 38)</b>					<i>Related party (Note 38)</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	760	12	880	15	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
<b>Pihak ketiga</b>					<i>Third parties</i>
Commerzbank Aktiengesellschaft	13,665	220	2,915,221	50,242	<i>Commerzbank Aktiengesellschaft</i>
Citibank, N.A, Jakarta	387	7	390	7	<i>Citibank, N.A, Jakarta</i>
<b>Yen Jepang</b>					<i>Japanese Yen</i>
<b>Pihak berelasi (Catatan 38)</b>					<i>Related party (Note 38)</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	26,000	3	38,000	5	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
<b>Pihak ketiga</b>					<i>Third parties</i>
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo	156,557,041	19,377	156,650,441	21,299	<i>Sumitomo Mitsui Banking</i> <i>Corporation, Tokyo</i>
Citibank, N.A, Jakarta	1,314,254	163	1,314,385	179	<i>Citibank, N.A, Jakarta</i>
<b>Dolar Singapura</b>					<i>Singapore Dollar</i>
<b>Pihak ketiga</b>					<i>Third party</i>
Overseas-Chinese Banking Corporation					<i>Overseas-Chinese Banking</i>
Bank (OCBC) Ltd., Singapura	9,332	98	9,880	105	<i>Corporation Bank</i> <i>(OCBC) Ltd., Singapore</i>
<b>Cadangan kerugian penurunan nilai</b>					<i>Allowance for impairment losses</i>
Total		674,106		5,520,843	<i>Total</i>

Termasuk dalam giro pada bank adalah giro pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, pihak berelasi (Catatan 38) sehubungan dengan Penugasan Khusus. Pemanfaatan jumlah tersebut dibatasi untuk Program NIA, sebesar Rp568.550 dan Rp5.035.104 masing-masing per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

*Included in current accounts with banks is current account in PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. a related party (Note 38) in relation with National Interest Account. The utilization of such amount is restricted for NIA Program, amounting to Rp568,550 and Rp5,035,104 as of December 31, 2021 and December 31, 2020, respectively.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**5. Giro pada Bank (lanjutan)**

**b. Berdasarkan kolektibilitas dan cadangan kerugian penurunan nilai**

LPEI melakukan penilaian giro pada bank secara kolektif dengan mempertimbangkan informasi dan analisis kualitatif dan kuantitatif, berdasarkan pengalaman historis dan penilaian kredit termasuk informasi masa depan.

Analisis atas perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

**5. Current Accounts with Banks (continued)**

**b. By collectibility and allowance for impairment losses**

*LPEI assesses current accounts with banks collectively by considering qualitative and quantitative information and analysis, based on historical experience and credit assessments including future information.*

*An analysis of the movement in the gross carrying amount are, as follows:*

<b>31 Desember/December 31, 2021</b>				
	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Jumlah/ Total
Saldo awal	5,521,119	--	--	5,521,119
Perpindahan antar tahapan	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--	--
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(4,854,499)	--	--	(4,854,499)
Aset baru	8,489	--	--	8,489
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(347)	--	--	(347)
Penyesuaian mata uang asing	(647)	--	--	(647)
<b>Saldo akhir</b>	<b>674,115</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>674,115</b>
 <b>31 Desember/ December 31, 2020</b>				
	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Jumlah/ Total
Saldo awal	335,734	--	--	335,734
Perpindahan antar tahapan	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--	--
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	5,174,919	--	--	5,174,919
Aset baru	1,545	--	--	1,545
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	--	--	--	--
Penyesuaian mata uang asing	8,921	--	--	8,921
<b>Saldo, akhir tahun</b>	<b>5,521,119</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>5,521,119</b>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**5. Giro pada Bank (lanjutan)**

**b. Berdasarkan kolektibilitas dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)**

Analisis atas Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31, 2021				
	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Jumlah/ Total	
Saldo awal	276	--	--	276	Beginning balance
Perpindahan antar tahapan					Transfer within stages
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--	Transfer to stage 1 -
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--	--	Transfer to stage 2 -
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--	--	Transfer to stage 3 -
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(276)	--	--	(276)	Net remeasurement of carrying value
Aset baru	9	--	--	9	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	--	--	--	--	Asset derecognized or repaid
Total (pembalikan)/pembentukan tahun berjalan	(267)	--	--	(267)	Total (reverse)/addition current year
Penyesuaian mata uang asing	--	--	--	--	Foreign exchange adjustment
<b>Saldo akhir</b>	<b>9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>9</b>	<b>Ending balance</b>
	31 Desember/ December 31, 2020				
	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Jumlah/ Total	
Saldo, 31 Desember 2019	--	--	--	--	Balance, 31 December 2019
Dampak penerapan awal PSAK 71	9	--	--	9	SFAS 71 first implementation impact
Saldo, 1 Januari 2020	9	--	--	9	Balance, 1 January 2020
Perpindahan antar tahapan					Transfer within stages
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--	Transfer to stage 1 -
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--	--	Transfer to stage 2 -
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--	--	Transfer to stage 3 -
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	213	--	--	213	Net remeasurement of loss allowance
Aset baru	53	--	--	53	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	--	--	--	--	Asset derecognized or repaid
Total (pembalikan)/pembentukan tahun berjalan	266	--	--	266	Total (reverse)/addition current year
Penyesuaian mata uang asing	1	--	--	1	Foreign exchange adjustment
<b>Saldo, akhir tahun</b>	<b>276</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>276</b>	<b>Balance, end of year</b>

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya penempatan pada bank lain.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dan mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 31.

**5. Current Accounts with Banks (continued)**

**b. By collectibility and allowance for impairment losses (continued)**

An analysis of the movement in the allowance for impairment losses are, as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020				
	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Jumlah/ Total	
Saldo, 31 Desember 2019	--	--	--	--	Balance, 31 December 2019
Dampak penerapan awal PSAK 71	9	--	--	9	SFAS 71 first implementation impact
Saldo, 1 Januari 2020	9	--	--	9	Balance, 1 January 2020
Perpindahan antar tahapan					Transfer within stages
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--	Transfer to stage 1 -
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--	--	Transfer to stage 2 -
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--	--	Transfer to stage 3 -
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	213	--	--	213	Net remeasurement of loss allowance
Aset baru	53	--	--	53	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	--	--	--	--	Asset derecognized or repaid
Total (pembalikan)/pembentukan tahun berjalan	266	--	--	266	Total (reverse)/addition current year
Penyesuaian mata uang asing	1	--	--	1	Foreign exchange adjustment
<b>Saldo, akhir tahun</b>	<b>276</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>276</b>	<b>Balance, end of year</b>

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses arising from uncollectible placement with banks.

Information with respect to classification of not impaired and impaired financial assets are disclosed in Note 31.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**5. Giro pada Bank (lanjutan)**

**c. Kisaran tingkat suku bunga per tahun untuk giro pada bank**

	<i>31 Desember / December 31,</i>		
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
Rupiah	0.00% - 2.00%	0.00% - 2.00%	Rupiah
Giro pada bank dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, Euro Eropa, Yen Jepang dan Dolar Singapura tidak memperoleh bunga			The current accounts with banks denominated in United States Dollars, European Euro, Japanese Yen and Singapore Dollars do not bear interest.

**d. Giro pada bank yang digunakan sebagai jaminan**

Tidak terdapat giro pada bank yang digunakan sebagai jaminan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

**6. Penempatan pada Bank**

**a. Berdasarkan mata uang, jenis dan counterparties**

	<i>31 Desember/ December 31, 2021</i>		<i>31 Desember/ December 31, 2020</i>				
	<i>Jumlah nosional</i>	<i>Mata uang asing/ Notional amount in Foreign currencies</i>	<i>Ekuivalen/ Equivalent</i>	<i>Jumlah nosional</i>	<i>Mata uang asing/ Notional amount in Foreign currencies</i>	<i>Ekuivalen/ Equivalent</i>	
<b>Rupiah</b>							<b>Rupiah</b>
<b>Deposito berjangka</b>							<b>Time deposit</b>
<b>Pihak berelasi (Catatan 38)</b>							<b>Related parties (Note 38)</b>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	4,201,000			4,508,000			PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4,136,000			1,220,100			PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1,295,000			--			PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	40,000			--			PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
	9,672,000			5,728,100			
<b>Pihak ketiga</b>							<b>Third parties</b>
PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk	2,210,000			1,566,000			PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	625,000			--			PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT BPD Jambi	400,000			--			PT BPD Jambi
	3,235,000			1,566,000			
<b>Call Money</b>							<b>Call Money</b>
<b>Pihak ketiga</b>							<b>Third parties</b>
PT BPD Jawa Timur Tbk	--			65,000			PT BPD Jawa Timur Tbk
	12,907,000			7,359,100			

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**6. Penempatan pada Bank (lanjutan)**

**b. Berdasarkan mata uang, jenis dan  
counterparties (lanjutan)**

	<b>31 Desember/ December 31, 2021</b>		<b>31 Desember/ December 31, 2020</b>	
	<b>Jumlah nosisional Mata uang asing/ Notional amount in Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)</b>	<b>Ekuivalen/ Equivalent Rupiah</b>	<b>Jumlah nosisional Mata uang asing/ Notional amount in Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)</b>	<b>Ekuivalen/ Equivalent Rupiah</b>
Dolar Amerika Serikat				
Deposito berjangka				
Pihak berelasi (Catatan 38)				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	70,000,000	997,675	--	--
PT Bank Raya Indonesia Tbk	5,000,000	71,263	--	--
		<b>1,068,938</b>		
Pihak ketiga				
PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk	95,000,000	1,353,988	--	--
PT Bank Mega Tbk	53,000,000	755,382	--	--
PT Bank CTBC Indonesia	20,000,000	285,050	--	--
PT KB Bukopin Tbk	--	--	17,524,592	246,221
		<b>2,394,420</b>		<b>246,221</b>
Call Money				
Pihak ketiga				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	19,000,000	270,797	--	--
Deutsche Zentral Bank Singapore	--	--	28,000,000	393,400
		<b>270,797</b>		<b>393,400</b>
		<b>3,734,155</b>		<b>639,621</b>
Cadangan kerugian penurunan nilai		<b>(2,209)</b>		<b>(18,053)</b>
Total		<b>16,638,946</b>		<b>7,980,668</b>

Termasuk dalam penempatan pada bank merupakan penempatan sehubungan dengan Penugasan Khusus. Berikut adalah rincian yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

*Included in placements with banks is placement in relation with National Interest Account. The details as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**6. Penempatan pada Bank (lanjutan)**

**a. Berdasarkan mata uang, jenis dan  
counterparties (lanjutan)**

	<i>31 Desember / December 31,</i>		
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
<b>Program NIA</b>			<b>NIA Program</b>
<b>Deposito berjangka</b>			<b>Time deposit</b>
<b>Pihak berelasi (Catatan 38)</b>			<b>Related parties (Note 38)</b>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	4,201,000	4,508,000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4,136,000	1,085,100	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1,295,000	--	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
	9,632,000	5,593,100	
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk	2,210,000	--	PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk
	2,210,000	--	
	11,842,000	5,593,100	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,263)	(11,418)	<i>Allowance for impairment losses</i>
<b>Total</b>	<b>11,840,737</b>	<b>5,581,682</b>	<b>Total</b>

**b. Berdasarkan periode sisa umur jatuh tempo**

Klasifikasi jangka waktu penempatan pada bank berdasarkan periode sisa umur jatuh tempo adalah sebagai berikut:

**6. Placements with Banks (continued)**

**a. By currencies, type and counterparties (continued)**

**b. By remaining period to maturity**

*The details of placements with banks classified as to remaining period to maturity are as follows:*

	<i>31 Desember / December 31,</i>		
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
<b>Rupiah</b>			<b>Rupiah</b>
Sampai dengan 1 bulan	4,201,000	6,844,100	<i>Up to 1 month</i>
Sampai dengan 3 bulan	8,706,000	515,000	<i>Up to 3 month</i>
<b>Dolar Amerika Serikat</b>			<b>United States Dollars</b>
Sampai dengan 1 bulan	3,306,581	393,400	<i>Up to 1 month</i>
Sampai dengan 3 bulan	427,574	246,221	<i>Up to 3 month</i>
	16,641,155	7,998,721	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2,209)	(18,053)	<i>Allowance for impairment losses</i>
<b>Total</b>	<b>16,638,946</b>	<b>7,980,668</b>	<b>Total</b>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**6. Penempatan pada Bank (lanjutan)**

**c. Kisaran tingkat suku bunga per tahun untuk penempatan pada bank**

	<b>31 Desember / December 31,</b>		<b>Rupiah</b>
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	
<b>Rupiah</b>			
Deposito berjangka	2.30% - 3.50%	2.75% - 5.30%	<b>Time deposit</b>
Call Money	--	3.03%	<b>Call Money</b>
<b>Dolar Amerika Serikat</b>			<b>United States Dollar</b>
Deposito berjangka	0.20% - 1.00%	2.80%	<b>Time deposit</b>
Call Money	0.05%	0.10%	<b>Call Money</b>

**d. Berdasarkan kolektibilitas dan cadangan kerugian penurunan nilai**

LPEI melakukan penilaian terhadap penempatan pada bank secara kolektif dengan menggunakan informasi dan analisis kualitatif dan kuantitatif, berdasarkan pengalaman historis dan penilaian kredit termasuk informasi masa depan.

Seluruh penempatan pada bank diklasifikasikan lancar dan tahap 1 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Analisis atas perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

**6. Placements with Banks (continued)**

**c. The range of annual interest rates for placement with banks**

**d. By collectibility and allowance for impairment losses**

*LPEI evaluates bank placements collectively using qualitative and quantitative information and analysis, based on historical experience and credit assessment including future information.*

*All placements with banks as of December 31, 2021 and 2020 are classified as current and stage 1.*

*An analysis of the movement in the gross carrying amount is, as follows:*

	<b>31 Desember/December 31, 2021</b>			
	<b>Tahap/ Stage 1</b>	<b>Tahap/ Stage 2</b>	<b>Tahap/ Stage 3</b>	<b>Jumlah/ Total</b>
Saldo awal	7,998,721	--	--	7,998,721
Perpindahan antar tahapan	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--	--
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	3,252,900	--	--	3,252,900
Aset baru	6,094,155	--	--	6,094,155
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(704,621)	--	--	(704,621)
Penyesuaian mata uang asing	--	--	--	--
<b>Saldo akhir</b>	<b>16,641,155</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>16,641,155</b>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**6. Penempatan pada Bank (lanjutan)**

**d. Berdasarkan kolektibilitas dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)**

	31 Desember/ December 31, 2020			
	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Jumlah/ Total
Saldo awal	17,538,669	--	--	17,538,669
Perpindahan antar tahapan				
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--	--
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	2,415,207	--	--	2,415,207
Aset baru	246,221	--	--	246,221
Aset dihentikan pengakuanannya/dilunasi	(12,206,066)	--	--	(12,206,066)
Penyesuaian mata uang asing	4,690	--	--	4,690
<b>Saldo, akhir tahun</b>	<b>7,998,721</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>7,998,721</b>

Analisis atas Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

An analysis of the movement in the allowance for impairment losses are, as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021			
	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Jumlah/ Total
Saldo awal	18,053	--	--	18,053
Perpindahan antar tahapan				
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--	--
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	8	--	--	8
Aset baru	2,209	--	--	2,209
Aset dihentikan pengakuanannya/dilunasi	(18,053)	--	--	(18,053)
Total (pembalikan)/pembentukan tahun berjalan	(15,836)	--	--	(15,836)
Penyesuaian mata uang asing	(8)	--	--	(8)
<b>Saldo akhir</b>	<b>2,209</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2,209</b>

	31 Desember/ December 31, 2020			
	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Jumlah/ Total
Saldo, 31 Desember 2019	--	--	--	--
Dampak penerapan awal PSAK 71	37,192	--	--	37,192
Saldo, 1 Januari 2020	37,192	--	--	37,192
Perpindahan antar tahapan				
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--	--
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	3,488	--	--	3,488
Aset baru	12,632	--	--	12,632
Aset dihentikan pengakuanannya/dilunasi	(36,452)	--	--	(36,452)
Total (pembalikan)/pembentukan tahun berjalan	(20,332)	--	--	(20,332)
Penyesuaian mata uang asing	1,193	--	--	1,193
<b>Saldo, akhir tahun</b>	<b>18,053</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>18,053</b>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**6. Penempatan Pada Bank (lanjutan)**

**e. Berdasarkan kolektibilitas dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)**

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya penempatan pada bank lain.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dan mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 31.

**f. Penempatan pada bank yang digunakan sebagai jaminan**

Tidak terdapat penempatan pada bank yang digunakan sebagai jaminan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

**6. Placements With Banks (continued)**

**e. By collectibility and allowance for impairment losses (continued)**

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses arising from uncollectible placement with banks.

Information with respect to classification of not impaired and impaired financial assets is disclosed in Note 31.

**f. Placements with banks pledged as collateral**

There are no placements with banks pledged as collateral as of December 31, 2021 and 2020.

**7. Efek-Efek**

**a. Berdasarkan mata uang, tujuan dan jenis**

**7. Securities**

**a. By currency, type and purpose**

Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain  
Pihak berelasi (Catatan 38)

Rupiah

	31 Desember/ December 31, 2021		31 Desember/ December 31, 2020		
	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value	
Indon 29 New	57,449	61,573	56,684	62,803	Indon 29 New
Indon 27 New	42,645	46,873	42,022	48,094	Indon 27 New
Indon 25	42,877	46,018	42,304	47,090	Indon 25
Indon 23 New	42,728	43,666	42,094	43,994	Indon 23 New
Indon 28 New	35,541	39,699	35,025	40,758	Indon 28 New
Indon 49 New	35,426	37,543	34,918	38,214	Indon 49 New
Indon 28	28,200	30,750	27,756	31,471	Indon 28
Indon 22 New	28,513	28,515	28,500	28,934	Indon 22 New
Indois 24 New	14,253	15,251	14,050	15,468	Indon 24 New
<b>Total</b>	<b>327,632</b>	<b>349,888</b>	<b>323,353</b>	<b>356,826</b>	
	<b>526,124</b>	<b>560,050</b>	<b>521,688</b>	<b>572,273</b>	<b>Total</b>

Fair value through  
other comprehensive income  
Related parties (Note 38)

Rupiah

United States Dollar

Indon 29 New

Indon 27 New

Indon 25

Indon 23 New

Indon 28 New

Indon 49 New

Indon 28

Indon 22 New

Indon 24 New

Total

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**7. Efek-Efek (lanjutan)**

**a. Berdasarkan mata uang, tujuan dan jenis (lanjutan)**

Efek-efek berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

31 Desember/ December 31, 2021		31 Desember/ December, 31 2020	
Jumlah nosional Mata uang asing/ <i>Notional amount in Foreign currencies</i> (Dalam nilai penuh/ <i>In full amount</i> )	Ekuivalen/ Equivalent <i>Rupiah</i>	(Dalam nilai penuh/ <i>In full amount</i> )	Ekuivalen/ Equivalent <i>Rupiah</i>
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			
Pihak berelasi (Catatan 38)			
Obligasi Pemerintah			
Rupiah	--	210,162	--
Dolar Amerika Serikat	24,549,202	349,888	25,396,783
<b>Total</b>	<b>24,549,202</b>	<b>560,050</b>	<b>25,396,783</b>
			Fair value through other comprehensive income
			Related party (Note 38)
			Government Bonds
			Rupiah
			United States Dollar
			<b>Total</b>

Keuntungan (kerugian) LPEI yang belum direalisasi atas perubahan nilai efek-efek dalam kelompok nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya sebesar Rp26.462 dan Rp39.456 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang tercatat pada bagian ekuitas laporan posisi keuangan. Harga pasar efek-efek dalam kelompok nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya berkisar antara 100,03%-111,42% dan 100,85%-116,04% dari nilai nominal masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

*LPEI's unrealized gains(loss) from the changes in market value of securities categorized as fair value through other comprehensive income amounted to Rp26,462 and Rp39,456 December 31, 2021 and 2020, respectively, which is reported in the equity section of the statement of financial position. The market values of the fair value through other comprehensive income securities as of December 31, 2021 and 2020 ranged from 100.03%-111.42% and 100.85%-116.04%, respectively, of the nominal amount.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**7. Efek-Efek (lanjutan)**

**b. Berdasarkan penerbit, jatuh tempo dan suku bunga**

**7. Securities (continued)**

**b. By issuer, maturity and interest rate**

Penerbit	Jenis/ Types	31 Desember/ December 31, 2021		Issuer
		Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Suku bunga kontrak per tahun/ Contractual interest rate per annum	
<b>Pemerintah Negara Republik Indonesia</b>				
FR0063	Obligasi/Bond	15 Mei/ May 15, 2023	5,625% tetap/fixed	FR0063
FR0064	Obligasi/Bond	15 Mei/ May 15, 2028	6,125% tetap/fixed	FR0064
FR0077	Obligasi/Bond	15 Mei/ May 15, 2024	8,125% tetap/fixed	FR0077
FR0078	Obligasi/Bond	15 Mei/ May 15, 2029	8,25% tetap/fixed	FR0078
FR0080	Obligasi/Bond	15 Juni/ June 15, 2035	7,50% tetap/fixed	FR0080
FR0081	Obligasi/Bond	15 Juni/ June 15, 2025	6,50% tetap/fixed	FR0081
FR0082	Obligasi/Bond	15 September/ September 15, 2030	7,00% tetap/fixed	FR0082
FR0083	Obligasi/Bond	15 April/ April 15, 2040	7,50% tetap/fixed	FR0083
Indois 24 New	Obligasi/Bond	20 Agustus/ August 20, 2024	3,90% tetap/fixed	Indois 24 New
Indon 23 New	Obligasi/Bond	11 Januari/ January 11, 2023	2,95% tetap/fixed	Indon 23 New
Indon 22 New	Obligasi/Bond	08 Januari/ January 08, 2022	3,70% tetap/fixed	Indon 23 New
Indon 25	Obligasi/Bond	15 Januari/ January 15, 2025	4,125% tetap/fixed	Indon 25
Indon 28	Obligasi/Bond	11 Januari/ January 11, 2028	3,50% tetap/fixed	Indon 28
Indon 27 New	Obligasi/Bond	18 Juli/ July 18, 2027	3,85% tetap/fixed	Indon 27 New
Indon 28 New	Obligasi/Bond	24 April/ April 24, 2028	4,10% tetap/fixed	Indon 28 New
Indon 29 New	Obligasi/Bond	18 September/ September 18, 2029	3,40% tetap/fixed	Indon 29 New
Indon 49 New	Obligasi/Bond	30 Oct/ October 30, 2049	3,70% tetap/fixed	Indon 49 New

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**7. Efek-Efek (lanjutan)**

**b. Berdasarkan penerbit, jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)**

**7. Securities (continued)**

**b. By issuer, maturity and interest rate (continued)**

Penerbit	Jenis/ Types	31 Desember/ December 31, 2020		<i>Issuer</i>
		Tanggal jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	Suku bunga kontrak per tahun/ <i>Contractual interest rate per annum</i>	
Pemerintah Negara Republik Indonesia				<i>The Government of the Republic of Indonesia</i>
FR0063	Obligasi/Bond	15 Mei/ <i>May 15, 2023</i>	5,625% tetap/fixed	FR0063
FR0064	Obligasi/Bond	15 Mei/ <i>May 15, 2028</i>	6,125% tetap/fixed	FR0064
FR0077	Obligasi/Bond	15 Mei/ <i>May 15, 2024</i>	8,125% tetap/fixed	FR0077
FR0078	Obligasi/Bond	15 Mei/ <i>May 15, 2029</i>	8,25% tetap/fixed	FR0078
FR0080	Obligasi/Bond	15 Juni/ <i>June 15, 2035</i>	7,50% tetap/fixed	FR0080
FR0081	Obligasi/Bond	15 Juni/ <i>June 15, 2025</i>	6,50% tetap/fixed	FR0081
FR0082	Obligasi/Bond	15 September/ <i>September 15, 2030</i>	7,00% tetap/fixed	FR0082
FR0083	Obligasi/Bond	15 April/ <i>April 15, 2040</i>	7,50% tetap/fixed	FR0083
Indois 24 New	Obligasi/Bond	20 Agustus/ <i>August 20, 2024</i>	3,90% tetap/fixed	Indois 24 New
Indon 23 New	Obligasi/Bond	11 Januari/ <i>January 11, 2023</i>	2,95% tetap/fixed	Indon 23 New
Indon 22 New	Obligasi/Bond	08 Januari/ <i>January 08, 2022</i>	3,70% tetap/fixed	Indon 23 New
Indon 25	Obligasi/Bond	15 Januari/ <i>January 15, 2025</i>	4,125% tetap/fixed	Indon 25
Indon 28	Obligasi/Bond	11 Januari/ <i>January 11, 2028</i>	3,50% tetap/fixed	Indon 28
Indon 27 New	Obligasi/Bond	18 Juli/ <i>July 18, 2027</i>	3,85% tetap/fixed	Indon 27 New
Indon 28 New	Obligasi/Bond	24 April/ <i>April 24, 2028</i>	4,10% tetap/fixed	Indon 28 New
Indon 29 New	Obligasi/Bond	18 September/ <i>September 18, 2029</i>	3,40% tetap/fixed	Indon 29 New
Indon 49 New	Obligasi/Bond	30 Oct/ <i>October 30, 2049</i>	3,70% tetap/fixed	Indon 49 New

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**7. Efek-Efek (lanjutan)**

**c. Berdasarkan peringkat**

Efek-efek yang dimiliki oleh LPEI memiliki peringkat BBB berdasarkan penilaian S&P pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

**d. Berdasarkan periode sisa umur jatuh tempo**

Klasifikasi jangka waktu efek-efek berdasarkan periode sisa umur jatuh tempo adalah sebagai berikut:

<b>31 Desember / December 31,</b>			
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	
Sampai dengan 5 tahun	196,063	198,095	<i>Up to 5 years</i>
Lebih dari 5 tahun			
sampai dengan 10 tahun	269,127	275,461	<i>More than 5 to 10 years</i>
Lebih dari 10 tahun			
sampai dengan 15 tahun	94,860	98,717	<i>More than 10 to 15 years</i>
<b>Total</b>	<b>560,050</b>	<b>572,273</b>	<b>Total</b>

**e. Berdasarkan efek Pemerintah dan bukan Pemerintah**

Seluruh efek-efek yang dimiliki oleh LPEI pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah efek Pemerintah.

**f. Berdasarkan kolektibilitas dan cadangan kerugian penurunan nilai**

Seluruh efek-efek pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 tidak mengalami penurunan nilai dan tergolong lancar.

Cadangan kerugian penurunan nilai pada efek-efek per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah nihil.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dan mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 31.

**7. Securities (continued)**

**c. By rating**

*Securities held by LPEI were rated BBB by S&P as of December 31, 2021 and 2020.*

**d. By remaining period to maturity**

*The details of securities classified as to remaining period to maturity are as follows:*

<b>31 Desember / December 31,</b>			
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	
Sampai dengan 5 tahun	196,063	198,095	<i>Up to 5 years</i>
Lebih dari 5 tahun			
sampai dengan 10 tahun	269,127	275,461	<i>More than 5 to 10 years</i>
Lebih dari 10 tahun			
sampai dengan 15 tahun	94,860	98,717	<i>More than 10 to 15 years</i>
<b>Total</b>	<b>560,050</b>	<b>572,273</b>	<b>Total</b>

**e. By Government and non-Government securities**

*All securities held by LPEI as of December 31, 2021 and 2020, are government securities*

**f. By collectibility and allowance for impairment losses**

*All securities as of December 31, 2021 and 2020 are not impaired and are classified as current.*

*Allowance for impairment losses on marketable securities as of December 31, 2021 and 2020 are nil, respectively.*

*Information with respect to classification of not impaired and impaired financial assets is disclosed in Note 31.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**7. Efek-Efek (lanjutan)**

**g. Efek-efek yang digunakan sebagai jaminan**

Tidak terdapat efek-efek yang digunakan sebagai jaminan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

**8. Tagihan dan Liabilitas Derivatif**

LPEI menghadapi risiko pasar atas perubahan nilai tukar mata uang dan menggunakan instrumen derivatif untuk mengelola risiko tersebut. LPEI melakukan transaksi derivatif berupa kontrak berjangka mata uang asing (*forward and swap*) dengan beberapa *counterparties* yang memungkinkan LPEI atau pihak lain untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

Perjanjian *swap* mata uang merupakan kontrak antara dua pihak untuk pertukaran arus kas berdasarkan nilai nosional dan nilai tukar yang ditetapkan terlebih dahulu. Sedangkan kontrak berjangka *forward* mata uang asing merupakan perjanjian untuk menjual sejumlah mata uang tertentu kepada pihak lain atau untuk membeli sejumlah mata uang tertentu dari pihak lain pada suatu tanggal di masa yang akan datang dengan harga yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Transaksi derivatif tersebut menimbulkan risiko pasar dan risiko kredit. Risiko pasar dari transaksi derivatif timbul sebagai akibat dari adanya fluktuasi nilai instrumen derivatif yang disebabkan adanya fluktuasi kurs mata uang asing, sedangkan risiko kredit timbul dalam hal pihak lain tidak dapat memenuhi liabilitasnya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kepada LPEI.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat instrumen derivatif LPEI yang memenuhi syarat sebagai transaksi lindung nilai untuk keperluan akuntansi. Oleh karena itu, seluruh keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar dari transaksi derivatif ini diakui dalam laba rugi.

**7. Securities (continued)**

**g. Securities pledged as collateral**

*There are no securities pledged as collateral as of December 31, 2021 and 2020.*

**8. Derivative Receivables and Payables**

*LPEI faces market risk with respect to changes in foreign currency exchange rates and thus, LPEI uses derivative instruments to manage this risk. LPEI enters into derivative transactions in the form of foreign currency forward contracts (forward and swap) with certain counterparties that allow LPEI to reduce the risk of fluctuations in foreign currency exchange rates.*

*Currency swap contract is a contract between two parties to exchange series of cash flows based on a predetermined notional value and exchange value. While foreign currency forward contract is a covenant to sell a certain amount of currencies to other parties or to buy a certain amount of currencies from other parties in the future at a predetermined price.*

*Such derivative transactions result in market risk and credit risk. Market risk from derivative transactions arises as a result of fluctuation in the value of derivative instruments due to foreign currency fluctuation, while credit risk arises when the other parties fail to fulfill their obligations stated in the contracts with LPEI.*

*As of December 31, 2021 and 2020, there are no derivatives which qualify as hedging instruments for accounting purposes. Therefore, all gains or losses resulting from fair value changes from these derivative transactions are recognized in profit or loss.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**8. Tagihan dan Liabilitas Derivatif (lanjutan)**

**a. Tagihan derivatif (lanjutan)**

Rincian tagihan derivatif pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2021	Nilai nosional mata uang asing/ Notional amount <i>in foreign currencies</i> (Dalam nilai penuh/ <i>In full amount</i> )	Tanggal efektif/ <i>Effective date</i>	Nilai wajar tagihan derivatif/ <i>Fair value of derivative receivables</i>	December 31, 2021
Mata uang asing				<i>Foreign currencies</i>
Dolar Amerika Serikat				<i>United States Dollars</i>
<i>Swap Beli</i>				<i>Swap Bought</i>
Pihak ketiga				<i>Third parties</i>
PT Bank Panin	2,110,000	29 Desember/ December 29, 2021	3 Januari/ 3 January 2022	PT Bank Panin
Indonesia Tbk				<i>Indonesia Tbk</i>
Total tagihan derivatif			6	<i>Total derivative receivables</i>
			6	

Pada tanggal 31 Desember 2020 LPEI tidak memiliki tagihan derivatif.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dan mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 31.

**b. Liabilitas derivatif**

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 LPEI tidak memiliki kewajiban derivatif.

**8. Derivative Receivables and Payables  
(continued)**

**a. Derivative receivables (continued)**

*The derivative receivable details as of December 31, 2021 are as follows:*

Foreign currencies
<i>United States Dollars</i>
<i>Swap Bought</i>
<i>Third parties</i>
PT Bank Panin
<i>Indonesia Tbk</i>
<i>Total derivative receivables</i>
6
6

*As of December 31, 2020, there are no derivatives receivables.*

*Information with respect to classification of not impaired and impaired financial assets are disclosed in Note 31.*

**b. Derivative payables**

*As of December 31, 2021 and 2020, there is no derivatives payables.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya**

**a. Berdasarkan jenis, mata uang dan kolektibilitas**

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>Lancar/ Current</b>	<b>Dalam perhatian khusus/ Special mention</b>	<b>Kurang lancar/ Substandard</b>	<b>Diragukan/ Doubtful</b>	<b>Macet/ Loss</b>	<b>Total</b>	<b>December 31, 2021</b>
<b>Rupiah</b>								<b>Rupiah</b>
Modal kerja	8,562,296	7,616,170	1,445,250	301,675	6,394,106	24,319,497		<i>Working capital</i>
Investasi	16,313,595	6,096,410	189,687	158,704	2,204,558	24,962,954		<i>Investment</i>
Konsumsi	127,979	--	--	--	--	127,979		<i>Consumption</i>
	<b>25,003,870</b>	<b>13,712,580</b>	<b>1,634,937</b>	<b>460,379</b>	<b>8,598,664</b>	<b>49,410,430</b>		
<b>Dolar Amerika Serikat</b>								<b>United States Dollars</b>
Modal kerja	8,818,864	6,820,782	122,153	193,543	4,780,134	20,735,476		<i>Working capital</i>
Investasi	7,954,128	3,991,649	79,743	--	1,791,736	13,817,256		<i>Investment</i>
	<b>16,772,992</b>	<b>10,812,431</b>	<b>201,896</b>	<b>193,543</b>	<b>6,571,870</b>	<b>34,552,732</b>		
<b>Total</b>	<b>41,776,862</b>	<b>24,525,011</b>	<b>1,836,833</b>	<b>653,922</b>	<b>15,170,534</b>	<b>83,963,162</b>		<b>Total</b>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(898,505)	(5,367,732)	(363,087)	(196,980)	(11,121,879)	(17,948,183)		<i>Allowance for impairment losses</i>
<b>Neto</b>	<b>40,878,357</b>	<b>19,157,279</b>	<b>1,473,746</b>	<b>456,942</b>	<b>4,048,655</b>	<b>66,014,979</b>		<b>Net</b>

**31 Desember/  
December 31, 2021**

	<b>Nilai Tercatat/ Carrying Value</b>	<b>Cadangan/ Allowance</b>
Individual	38,513,094	15,300,363
Kolektif:		
Lancar	39,728,750	471,460
Dalam perhatian khusus	2,260,907	155,506
Kurang lancar	1,328,249	239,268
Diragukan	11,397	4,990
Macet	2,120,765	1,776,596
<b>Total</b>	<b>83,963,162</b>	<b>17,948,183</b>

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>Lancar/ Current</b>	<b>Dalam perhatian khusus/ Special mention</b>	<b>Kurang lancar/ Substandard</b>	<b>Diragukan/ Doubtful</b>	<b>Macet/ Loss</b>	<b>Total</b>	<b>December 31, 2020</b>
<b>Rupiah</b>								<b>Rupiah</b>
Modal kerja	10,361,202	5,788,665	2,922,165	15,060	7,160,662	26,247,754		<i>Working capital</i>
Investasi	19,479,963	3,257,650	1,194,015	--	3,372,810	27,304,438		<i>Investment</i>
Konsumsi	102,988	--	--	--	--	102,988		<i>Consumption</i>
	<b>29,944,153</b>	<b>9,046,315</b>	<b>4,116,180</b>	<b>15,060</b>	<b>10,533,472</b>	<b>53,655,180</b>		
<b>Dolar Amerika Serikat</b>								<b>United States Dollars</b>
Modal kerja	9,198,141	5,339,134	822,395	--	5,934,619	21,294,289		<i>Working capital</i>
Investasi	10,690,267	2,614,210	--	--	2,154,127	15,458,604		<i>Investment</i>
	<b>19,888,408</b>	<b>7,953,344</b>	<b>822,395</b>	<b>--</b>	<b>8,088,746</b>	<b>36,752,893</b>		
<b>Total</b>	<b>49,832,561</b>	<b>16,999,659</b>	<b>4,938,575</b>	<b>15,060</b>	<b>18,622,218</b>	<b>90,408,073</b>		<b>Total</b>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,078,559)	(3,408,957)	(1,534,094)	(146)	(11,650,408)	(17,672,164)		<i>Allowance for impairment losses</i>
<b>Neto</b>	<b>48,754,002</b>	<b>13,590,702</b>	<b>3,404,481</b>	<b>14,914</b>	<b>6,971,810</b>	<b>72,735,909</b>		<b>Net</b>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)**

**a. Berdasarkan jenis, mata uang dan kolektibilitas (lanjutan)**

	<b>31 Desember/ December 31, 2020</b>		<i>Individual Collective: Current Special mention Loss Total</i>
	<b>Nilai Tercatat/ Carrying Value</b>	<b>Cadangan/ Allowance</b>	
Individual	35,898,222	15,114,112	
Kolektif:			
Lancar	48,629,393	938,514	
Dalam perhatian khusus	3,056,356	266,030	
Macet	2,824,102	1,353,508	
<b>Total</b>	<b>90,408,073</b>	<b>17,672,164</b>	

Termasuk dalam pembiayaan dan piutang masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 piutang kepada bank dengan kategori lancar masing-masing sebesar Rp4.302 dan Rp55.996. Pembiayaan tersebut diklasifikasikan lancar dan telah dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif masing-masing sebesar nihil dan Rp2.488.

**b. Berdasarkan sektor ekonomi, mata uang dan kolektibilitas**

Perincian pembiayaan dan piutang berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut

*Financing and receivables as of December 31, 2021 and 2020 include financing and receivables to banks amounting to Rp4,302 and Rp55,996, respectively. These are classified as current and subjected to collective impairment resulting to impairment loss of nil and Rp2,488, respectively.*

**b. By economic sector, currency and collectibility**

*Financing and receivables based on currencies are as follows*

	<b>31 Desember/ December 31, 2021</b>		<b>31 Desember/ December 31, 2020</b>	
	<b>Jumlah nosional</b>	<b>Mata uang asing/ Notional amount Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)</b>	<b>Jumlah nosional</b>	<b>Mata uang asing/ Notional amount Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)</b>
	<b>Rupiah</b>	<b>Rupiah</b>	<b>Rupiah</b>	<b>Rupiah</b>
Rupiah	--	49,410,430	--	53,655,180
Dolar Amerika Serikat	2,424,327,835	34,552,732	2,615,864,223	36,752,893
Total		83,963,162		90,408,073
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(17,948,183)		(17,672,164)
<b>Neto</b>		<b>66,014,979</b>		<b>72,735,909</b>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)**

**b. Berdasarkan sektor ekonomi, mata uang dan kolektibilitas (lanjutan)**

**9. Financing and Receivables, and Financing and Sharia Receivables and Other Receivables (continued)**

**b. By economic sector, currency and collectability (continued)**

	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Total	December 31, 2021
31 Desember 2021							
Rupiah							Rupiah
Perindustrian	4,529,787	9,530,104	1,316,382	22,424	3,955,017	19,353,714	Manufacturing
Pertanian, perburuan dan sarana pertanian	7,521,663	2,502,982	--	437,955	1,453,719	11,916,319	Agriculture, hunting and agriculture services
Konstruksi	2,335,617	18,296	--	--	72,589	2,426,502	Construction
Listrik, gas dan air	3,318,241	439,418	--	--	--	3,757,659	Electricity, gas and water
Pengangkutan, perdugungan dan telekomunikasi	3,557,187	706,256	--	--	182,136	4,445,579	Transportation, warehousing and communication
Perdagangan, restoran dan hotel	535,526	39,359	--	--	1,746,077	2,320,962	Trading, restaurants and hotels
Jasa dunia usaha	2,551,524	--	--	--	445,900	2,997,424	Business services
Pertambangan	197,904	452,926	318,555	--	733,426	1,702,811	Mining
Jasa-jasa sosial/masyarakat	330,024	23,239	--	--	9,800	363,063	Social, services/society
Lain-lain	126,397	--	--	--	--	126,397	Others
	25,003,870	13,712,580	1,634,937	460,379	8,598,664	49,410,430	
Dolar Amerika Serikat							United States Dollars
Perindustrian	8,156,181	7,337,084	113,938	--	4,057,932	19,665,135	Manufacturing
Pertambangan	1,961,279	2,416,697	87,958	--	370,704	4,836,638	Mining
Pertanian, perburuan dan sarana pertanian	2,451,923	812,951	--	193,543	407,122	3,865,539	Agriculture, hunting and agriculture services
Pengangkutan, perdugungan dan telekomunikasi	501,268	157,315	--	--	287,657	946,240	Transportation, warehousing and communication
Konstruksi	1,224,547	38,275	--	--	318,562	1,581,384	Construction
Perdagangan, restoran dan hotel	694,237	50,109	--	--	496,402	1,240,748	Trading, restaurants and hotels
Jasa dunia usaha	846,584	--	--	--	626,365	1,472,949	Business services
Listrik, gas dan air	492,264	--	--	--	--	492,264	Electricity, gas and water
Jasa-jasa sosial/masyarakat	444,709	--	--	--	7,126	451,835	Social, services/society
Lain-lain	--	--	--	--	--	--	Others
	16,772,992	10,812,431	201,896	193,543	6,571,870	34,552,732	
Total	41,776,862	24,525,011	1,836,833	653,922	15,170,534	83,963,162	Total
Cadangan Kerugian							Allowance for Impairment Losses
Penurunan Nilai	(898,505)	(5,367,732)	(363,087)	(196,980)	(11,121,879)	(17,948,183)	
<b>Neto</b>	<b>40,878,357</b>	<b>19,157,279</b>	<b>1,473,746</b>	<b>456,942</b>	<b>4,048,655</b>	<b>66,014,979</b>	<b>Net</b>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)**

**b. Berdasarkan sektor ekonomi, mata uang dan kolektibilitas (lanjutan)**

31 Desember 2020	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Total	<i>December 31, 2020</i>
Rupiah							Rupiah
Perindustrian	8,872,940	4,919,220	2,745,252	15,060	5,316,983	21,869,455	Manufacturing
Pertanian, perburuan dan sarana pertanian	7,879,077	2,232,484	1,229,617	--	1,992,311	13,333,489	Agriculture, hunting and agriculture services
Konstruksi	3,192,929	46,220	--	--	48,582	3,287,731	Construction
Listrik, gas dan air	2,796,590	444,115	--	--	--	3,240,705	Electricity, gas and water Transportation, warehousing and communication
Pengangkutan, perdugungan dan telekomunikasi	3,949,032	146,935	--	--	184,982	4,280,949	Trading, restaurants and hotels
Perdagangan, restoran dan hotel	662,507	357,045	--	--	1,975,373	2,994,925	Business services
Jasa dunia usaha	2,143,089	421,721	--	--	34,852	2,599,662	Mining
Pertambangan	181,498	478,574	141,312	--	970,589	1,771,973	Social, services/society Others
Jasa-jasa sosial/masyarakat	33,164	--	--	--	9,800	42,964	
Lain-lain	233,327	--	--	--	--	233,327	
	<b>29,944,153</b>	<b>9,046,314</b>	<b>4,116,181</b>	<b>15,060</b>	<b>10,533,472</b>	<b>53,655,180</b>	
Dolar Amerika Serikat							United States Dollars
Perindustrian	9,448,746	5,399,702	819,585	--	4,660,027	20,328,060	Manufacturing
Pertambangan	2,440,942	2,185,729	--	--	786,825	5,413,496	Mining
Pertanian, perburuan dan sarana pertanian	3,414,101	217,531	--	--	401,324	4,032,956	Agriculture, hunting and agriculture services
Pengangkutan, perdugungan dan telekomunikasi	711,724	112,625	--	--	512,789	1,337,138	Transportation, warehousing and communication
Konstruksi	1,309,047	37,757	--	--	314,036	1,660,840	Construction
Perdagangan, restoran dan hotel	837,370	--	2,810	--	789,254	1,629,434	Trading, restaurants and hotels
Jasa dunia usaha	947,951	--	--	--	617,466	1,565,417	Business services
Listrik, gas dan air	547,769	--	--	--	--	547,769	Electricity, gas and water
Jasa-jasa sosial/masyarakat	19,708	--	--	--	7,025	26,733	Social, services/society
Lain-lain	211,050	--	--	--	--	211,050	Others
	<b>19,888,408</b>	<b>7,953,344</b>	<b>822,395</b>	<b>--</b>	<b>8,088,746</b>	<b>36,752,893</b>	
Total	<b>49,832,561</b>	<b>16,999,658</b>	<b>4,938,576</b>	<b>15,060</b>	<b>18,622,218</b>	<b>90,408,073</b>	Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1,078,559)	(3,408,957)	(1,534,094)	(146)	(11,650,408)	(17,672,164)	Allowance for Impairment Losses
<b>Neto</b>	<b>48,754,002</b>	<b>13,590,701</b>	<b>3,404,482</b>	<b>14,914</b>	<b>6,971,810</b>	<b>72,735,909</b>	<b>Net</b>

Pada tanggal - tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, lain-lain termasuk pembiayaan kepada karyawan.

*As of December 31, 2021 and 2020, others include employee financing.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)**

**c. Berdasarkan pihak-pihak, jenis dan mata uang**

	<i>31 Desember / December 31 ,</i>		
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
Rupiah			<i>Rupiah</i>
Pihak berelasi (Catatan 38)			<i>Related parties (Note 38)</i>
Modal kerja	5,854,866	3,802,702	<i>Working capital</i>
Investasi	8,461,396	10,014,744	<i>Investment</i>
Konsumsi	11,981	12,806	<i>Consumption</i>
	<u>14,328,243</u>	<u>13,830,252</u>	
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
Modal kerja	18,464,631	22,445,052	<i>Working capital</i>
Investasi	16,501,558	17,289,694	<i>Investment</i>
Konsumsi	115,998	90,182	<i>Consumption</i>
	<u>35,082,187</u>	<u>39,824,928</u>	
Total Rupiah	<u>49,410,430</u>	<u>53,655,180</u>	<i>Rupiah Total</i>
Dolar Amerika Serikat			<i>United States Dollar</i>
Pihak berelasi (Catatan 38)			<i>Related parties (Note 38)</i>
Modal kerja	333,381	338,708	<i>Working capital</i>
Investasi	420,727	436,398	<i>Investment</i>
	<u>754,108</u>	<u>775,106</u>	
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
Modal kerja	20,402,095	20,955,581	<i>Working capital</i>
Investasi	13,396,529	15,022,206	<i>Investment</i>
	<u>33,798,624</u>	<u>35,977,787</u>	
Total Dolar Amerika Serikat	<u>34,552,732</u>	<u>36,752,893</u>	<i>United States Dollar Total</i>
Total	83,963,162	90,408,073	<i>Total</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(17,948,183)	(17,672,164)	<i>Allowance for impairment losses</i>
<b>Neto</b>	<b>66,014,979</b>	<b>72,735,909</b>	<i>Net</i>

**d. Berdasarkan jangka waktu**

	<i>31 Desember / December 31 ,</i>		
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
Rupiah			<i>Rupiah</i>
Sampai dengan 1 tahun	8,645,286	11,611,285	<i>Up to 1 year</i>
Lebih dari 1 sampai dengan 3 tahun	4,202,447	5,691,948	<i>More than 1 up to 3 years</i>
Lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun	4,837,372	3,788,920	<i>More than 3 up to 5 years</i>
Lebih dari 5 tahun	31,725,325	32,563,027	<i>More than 5 years</i>
	<u>49,410,430</u>	<u>53,655,180</u>	
Dolar Amerika Serikat			<i>United States Dollars</i>
Sampai dengan 1 tahun	6,239,945	6,058,013	<i>Up to 1 year</i>
Lebih dari 1 sampai dengan 3 tahun	2,479,698	3,358,491	<i>More than 1 up to 3 years</i>
Lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun	4,868,262	5,592,616	<i>More than 3 up to 5 years</i>
Lebih dari 5 tahun	20,964,827	21,743,773	<i>More than 5 years</i>
	<u>34,552,732</u>	<u>36,752,893</u>	
Total	83,963,162	90,408,073	<i>Total</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(17,948,183)	(17,672,164)	<i>Allowance for impairment losses</i>
<b>Neto</b>	<b>66,014,979</b>	<b>72,735,909</b>	<i>Net</i>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)**

**e. Berdasarkan periode sisa jatuh tempo**

	<i>31 Desember / December 31,</i>		<i>Rupiah</i>
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
<b>Rupiah</b>			
Sampai dengan 1 tahun	12,264,565	15,042,154	<i>Up to 1 year</i>
Lebih dari 1 sampai dengan 3 tahun	4,046,820	6,028,238	<i>More than 1 up to 3 years</i>
Lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun	9,765,754	6,972,251	<i>More than 3 up to 5 years</i>
Lebih dari 5 tahun	23,333,291	25,612,537	<i>More than 5 years</i>
	<b>49,410,430</b>	<b>53,655,180</b>	
<b>Dolar Amerika Serikat</b>			<i>United States Dollars</i>
Sampai dengan 1 tahun	8,496,747	7,900,486	<i>Up to 1 year</i>
Lebih dari 1 sampai dengan 3 tahun	7,377,058	8,131,595	<i>More than 1 up to 3 years</i>
Lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun	4,990,451	8,008,099	<i>More than 3 up to 5 years</i>
Lebih dari 5 tahun	13,688,476	12,712,713	<i>More than 5 years</i>
	<b>34,552,732</b>	<b>36,752,893</b>	
<b>Total</b>	<b>83,963,162</b>	<b>90,408,073</b>	<i>Total</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	<b>(17,948,183)</b>	<b>(17,672,164)</b>	<i>Allowance for impairment losses</i>
<b>Neto</b>	<b>66,014,979</b>	<b>72,735,909</b>	<i>Net</i>

**f. Pembiayaan/piutang syariah**

Rincian pembiayaan/piutang syariah pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut

**9. Financing and Receivables, and Financing and Sharia Receivables and Other Receivables (continued)**

**e. By remaining period to maturity**

	<i>31 Desember / December 31,</i>		<i>Rupiah</i>
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
<b>Total</b>	<b>83,963,162</b>	<b>90,408,073</b>	<i>Total</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	<b>(17,948,183)</b>	<b>(17,672,164)</b>	<i>Allowance for impairment losses</i>
<b>Neto</b>	<b>66,014,979</b>	<b>72,735,909</b>	<i>Net</i>

**f. Sharia financing/receivables**

*As of December 31, 2021 and 2020, the details of sharia financing/receivables are as follows*

	<i>31 Desember / December 31,</i>		<i>Murabahah receivables</i>
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
Piutang Murabahah	1,657,211	2,367,032	<i>Murabahah receivables</i>
Pembiayaan Musyarakah	10,774,293	12,995,082	<i>Musyarakah financing</i>
<b>Total</b>	<b>12,431,504</b>	<b>15,362,114</b>	<i>Total</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	<b>(2,696,204)</b>	<b>(2,067,206)</b>	<i>Allowance for impairment losses</i>
<b>Neto</b>	<b>9,735,300</b>	<b>13,294,908</b>	<i>Net</i>

**g. Pembiayaan dan piutang Penugasan Khusus**

LPEI memiliki Penugasan Khusus untuk melakukan pembiayaan ekspor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 183/PMK.08/2021 yang ditetapkan tanggal 21 Desember 2017 dan mencabut (PMK) No. 198/PMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus LPEI. Rincian pembiayaan dan piutang Penugasan Khusus pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**g. Financing and receivables National Interest Account**

*LPEI has National Interest Account (NIA) for export financing according to PMK No. 183/PMK.08/2021 dated December 21, 2017 and revoked PMK No. 198/PMK.08/2017 regarding NIA for LPEI. As of December 31, 2021 and 2020, the details of NIA financing and receivables, are as follows:*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)**

**g. Pembiayaan dan piutang Penugasan Khusus (lanjutan)**

	<b>31 Desember / December 31,</b>	
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Pembiayaan dan piutang konvensional	2,948,504	1,597,367
Cadangan kerugian penurunan nilai	(400,152)	(44,536)
<b>Neto</b>	<b>2,548,352</b>	<b>1,552,831</b>

Kolektibilitas pada seluruh pembiayaan dan piutang Penugasan Khusus pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah lancar.

Rincian pembiayaan dan piutang Penugasan Khusus berdasarkan jenis dan mata uang pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**9. Financing and Receivables, and Financing and Sharia Receivables and Other Receivables (continued)**

**g. Financing and receivables National Interest Account (continued)**

*The collectibility for all of NIA financing and receivables as of December 31, 2021 and 2020 are classified as current.*

*The details of NIA financing and receivables by type and currency as of December 31, 2021 and 2020, are as follows:*

	<b>31 Desember / December 31,</b>		
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	
Rupiah			<i>Rupiah</i>
Modal kerja	1,421,445	1,092,679	<i>Working capital</i>
Investasi	1,218,005	504,688	<i>Investment</i>
	<b>2,639,450</b>	<b>1,597,367</b>	
Dolar Amerika Serikat			<i>United States Dollars</i>
Modal kerja	309,054	--	<i>Working capital</i>
Total	<b>2,948,504</b>	<b>1,597,367</b>	<i>Total</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(400,152)	(44,536)	<i>Allowance for impairment losses</i>
<b>Neto</b>	<b>2,548,352</b>	<b>1,552,831</b>	<i>Net</i>

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh pembiayaan dan piutang Penugasan Khusus adalah debitur dengan sektor ekonomi jasa dunia usaha, jasa-jasa sosial/masyarakat, pengangkutan, pergudangan dan komunikasi, perdagangan, restoran dan hotel, perindustrian dan pertanian, perburuan dan sarana pertanian. Suku bunga yang digunakan untuk seluruh pembiayaan dan piutang Penugasan Khusus berkisar antara 1,10%-6,00% dan 3,92%-5,00% pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Seluruh pembiayaan dan piutang Penugasan Khusus yang diberikan telah dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai dengan menggunakan metode kolektif.

*As of December 31, 2021 and 2020, all NIA financing and receivables were originated from debtors in business services, social services/society, transportation, warehousing, and communication, trading, restaurants and hotels, manufacturing economic and agriculture, hunting and agriculture sector. Interest rate for all NIA financing and receivables ranged from 1.10%-6.00% and 3.92%-5.00%, as of December 31, 2021 and 2020, respectively. Allowance method for impairment losses for NIA financing and receivables are collective*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)**

**h. Informasi signifikan lainnya**

1. Kisaran suku bunga per tahun untuk pembiayaan dan piutang dalam Rupiah, dan Dolar Amerika Serikat adalah sebagai berikut:

	<i>31 Desember / December 31,</i>		<i>Contractual interest rate</i>
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
<b>Suku bunga kontrak</b>			
Rupiah	0,00% - 14,50%	0,00% - 14,50%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	0,00% - 10,75%	0,00% - 10,75%	United States Dollars
<b>Suku bunga efektif</b>			
Rupiah	0,00% - 20,06%	0,00% - 26,53%	<b>Effective interest rate</b>
Dolar Amerika Serikat	0,00% - 13,07%	0,00% - 13,62%	Rupiah
			United States Dollars

2. Pembiayaan dan piutang dijamin dengan surat sanggup (*promissory note*), agunan yang diikat dengan hak tanggungan, piutang dagang dan persediaan yang diikat secara fidusia ("cessie") dan jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh LPEI.
3. Jumlah pembiayaan dan piutang dalam bentuk sindikasi adalah sebesar Rp26.368.453 dan Rp21.468.184 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Keikutsertaan LPEI berkisar antara 4,17% sampai dengan 84,24% dan 4,17% sampai dengan 85% dari jumlah pembiayaan dan piutang sindikasi, masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Risiko atas pembiayaan dan piutang sindikasi ditanggung secara proporsional oleh bank-bank peserta.
4. Pinjaman pegawai adalah pinjaman yang diberikan kepada pegawai dengan tingkat bunga sebesar 0% dan 4% per tahun yang ditujukan untuk pembelian rumah, kendaraan dan keperluan lainnya dengan jangka waktu berkisar antara 1 (satu) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun. Jumlah pinjaman pegawai adalah sebesar Rp127.979 dan Rp102.988 masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Pembayaran pokok pinjaman dan bunga dilunasi melalui pemotongan gaji setiap bulan.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**9. Financing and Receivables, and Financing and Sharia Receivables and Other Receivables (continued)**

**h. Other significant information**

1. Range of annual interest rates for financing and receivables in Rupiah, and United States Dollars are as follows:
2. *Financing and receivables are secured by promissory notes, registered mortgages, trade receivables and inventories pledged under a fiduciary transfer of ownership ("cessie") and by other guarantees generally accepted by LPEI.*
3. *Total syndicated financing and receivables amounted to Rp26,368,453 and Rp21,468,184, as of December 31, 2021 and 2020, respectively. LPEI's share in syndicated financing and receivables ranged from 4.17% to 84.24% and 4.17% to 85% of the total syndicated financing and receivables as of December 31, 2021 and 2020, respectively. Risks from syndicated financing and receivables are shared proportionately among the participating banks.*
4. *Loans to employees which carry interest rates of 0% and 4% per annum are intended for the acquisition of houses, vehicles and other necessities with terms ranging from 1 (one) year to 20 (twenty) years. Total loan to employees amounted to Rp127,979 and Rp102,988 as of December 31, 2021 and 2020, respectively. The loan principal and interest payments are collected through monthly payroll deductions.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)**

**h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)**

Perbedaan antara tingkat bunga pinjaman karyawan dan Base Lending Rate (BLR) diamortisasi sepanjang jangka waktu pembiayaan dengan menggunakan *Effective Interest Rate* (EIR).

Besarnya biaya tersebut pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp3.739 dan Rp1.260 yang dibukukan sebagai bagian dari beban gaji dan tunjangan (Catatan 27).

5. Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) yang diserahkan oleh LPEI kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat pemberian pembiayaan dan piutang, baik kepada pihak berelasi maupun pihak ketiga, yang tidak memenuhi atau melampaui ketentuan BMPP.

6. Analisis atas perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

**9. Financing and Receivables, and Financing and Sharia Receivables and Other Receivables (continued)**

**h. Other significant information (continued)**

*The difference between the employee loan's interest rates and the Base Lending Rate (BLR) is amortized over of the term of the loan using Effective Interest Rate (EIR).*

*As of December 31, 2021 and 2020, amortization of the difference amounted to Rp3,739 and Rp1,260, respectively, which is recorded as part of salaries and benefit expenses (Note 27).*

5. *Based on the Legal Lending Limit (LLL) reports submitted by LPEI to Otoritas Jasa Keuangan as of December 31, 2021 and 2020, there were no financing and receivables, either to related parties or third parties, that breached or exceeded the LLL requirement.*

6. *The changes in the allowance for impairment losses on financing and receivables are as follows:*

	31 Desember/December 31, 2021					
	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Jumlah/ Total	
Saldo awal	1,530,797	248,393	13,825,768	2,067,206	17,672,164	<i>Beginning balance</i>
- Perubahan ke tahap 1	2,498	(2,498)	--	--	--	<i>Transfer to stage 1 -</i>
- Perubahan ke tahap 2	(95)	27,111	(27,016)	--	--	<i>Transfer to stage 2 -</i>
- Perubahan ke tahap 3	(176,244)	(90,117)	266,361	--	--	<i>Transfer to stage 3 -</i>
Total perpindahan antar tahapan	(173,841)	(65,504)	239,345	--	--	<i>Total transfer within stages</i>
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(398,347)	(11,851)	541,136	1,064,794	1,195,732	<i>Net remeasurement of carrying value</i>
Aset baru	853,063	12,076	--	--	865,139	<i>New assets originated</i>
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(393,361)	(131,545)	(862,943)	(451,022)	(1,838,871)	<i>Asset derecognized or repaid</i>
Total (pembalikan)/pembentukan tahun berjalan	61,355	(131,320)	(321,807)	613,772	222,000	<i>Total (reverse)/addition current year</i>
Penyesuaian mata uang asing	10,755	26	28,012	15,226	54,019	<i>Foreign exchange adjustment</i>
<b>Saldo akhir</b>	<b>1,429,066</b>	<b>51,595</b>	<b>13,771,318</b>	<b>2,696,204</b>	<b>17,948,183</b>	<i>Ending balance</i>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)**

**h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)**

**9. Financing and Receivables, and Financing and Sharia Receivables and Other Receivables (continued)**

**h. Other significant information (continued)**

31 Desember/December, 31 2020					
Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Jumlah/ Total	
Saldo, 31 Desember 2019	682,542	63,995	9,295,049	1,239,590	11,281,176
Dampak penerapan awal PSAK 71	1,009,406	112,775	4,884,828	-	6,007,009
Saldo, 1 Januari 2020	1,691,948	176,770	14,179,877	1,239,590	17,288,185
Perubahan penyisihan kerugian :					
- Pindah ke tahap 1	4,193,478	(679,845)	(3,513,633)	--	--
- Pindah ke tahap 2	(1,578,476)	2,607,508	(1,029,032)	--	--
- Pindah ke tahap 3	(1,685,252)	(2,018,619)	3,703,871	--	--
Total perpindahan antar tahapan	929,750	(90,956)	(838,794)	--	--
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(1,334,234)	1,832,677	3,087,738	824,735	4,410,916
Aset baru	822,294	24,526	247,422	--	1,094,242
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(593,780)	(1,752,050)	(2,709,532)	(3,371)	(5,058,733)
Total (pembalikan)/pembentukan tahun berjalan	(1,105,720)	105,153	625,628	821,364	446,425
Penyesuaian mata uang asing	14,819	57,426	(140,943)	6,252	(62,446)
<b>Saldo, akhir tahun</b>	<b>1,530,797</b>	<b>248,393</b>	<b>13,825,768</b>	<b>2,067,206</b>	<b>17,672,164</b>

Perubahan nilai tercatat bruto pembiayaan yang diberikan selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

*The changer in gross carrying amount on loans during the year are as follow:*

31 Desember/December, 31 2021					
Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Jumlah/ Total	
Saldo awal	43,454,065	1,451,857	30,140,037	15,362,114	90,408,073
- Perubahan ke tahap 1	6,292	(6,292)	--	--	--
- Perubahan ke tahap 2	(26,812)	53,828	(27,016)	--	--
- Perubahan ke tahap 3	(631,353)	(225,189)	856,542	--	--
Total perpindahan antar tahapan	(651,873)	(177,653)	829,526	--	--
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(2,544,091)	(3,931)	(120,927)	(528,589)	(3,197,538)
Aset baru	20,489,641	153,961	(18,362,824)	6,243,982	8,524,760
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(21,561,818)	(1,117,022)	19,057,837	(8,673,363)	(12,294,366)
Penyesuaian mata uang asing	180,998	--	313,884	27,360	522,233
<b>Saldo akhir</b>	<b>39,366,913</b>	<b>307,212</b>	<b>31,857,533</b>	<b>12,431,504</b>	<b>83,963,162</b>

31 Desember/December, 31 2020					
Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Jumlah/ Total	
Saldo awal	52,271,376	913,383	28,631,395	15,990,451	97,806,605
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 2	429,929	(429,929)	--	--	--
- Perubahan ke tahap 3	692,092	120,225	(812,318)	--	(1)
Total perpindahan antar tahapan	1,122,021	(309,704)	(812,318)	--	(1)
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(5,304,543)	577,129	1,465,399	(306,944)	(3,568,959)
Aset baru	18,864,578	1,064,036	(13,153,531)	8,373,318	15,148,401
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(23,661,967)	(793,158)	13,754,009	(8,715,173)	(19,416,289)
Penyesuaian mata uang asing	162,600	171	255,083	20,462	438,316
<b>Saldo, akhir tahun</b>	<b>43,454,065</b>	<b>1,451,857</b>	<b>30,140,037</b>	<b>15,362,114</b>	<b>90,408,073</b>

Balance, 31 December 2019  
SFAS 71 first implementation impact  
Balance, 1 January 2020  
Changes in ECL :  
Transfer to stage 1 -  
Transfer to stage 2 -  
Transfer to stage 3 -  
Total transfer within stages

Net remeasurement of loss allowance  
New assets originated  
Asset derecognized or repaid  
Total (reverse)/addition current year  
Foreign exchange adjustment  
Balance, end of year

Balance, beginning of the year  
Transfer to stage 1 -  
Transfer to stage 2 -  
Transfer to stage 3 -  
Total transfer within stages

Net remeasurement of carrying value  
New assets originated  
Asset derecognized or repaid  
Foreign exchange adjustment  
Balance, end of year

Balance, beginning of the year  
Transfer to stage 1 -  
Transfer to stage 2 -  
Transfer to stage 3 -  
Total transfer within stages

Net remeasurement of carrying value  
New assets originated  
Asset derecognized or repaid  
Foreign exchange adjustment  
Balance, end of year

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)**

**h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)**

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya pembiayaan dan piutang, pembiayaan dan piutang syariah dan piutang lainnya.

Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi dari cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan berdasarkan kelompok untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

<b>31 Desember/ December 31, 2021</b>				
	<b>Modal Kerja/ Working Capital</b>	<b>Investasi/ Investment</b>	<b>Konsumsi/ Consumption</b>	<b>Total</b>
Saldo awal per 1 Januari	12,703,587	4,968,128	449	17,672,164
Pembentukan penyisihan tahun berjalan (Catatan 25)	(336,232)	558,519	(287)	222,000
Penyesuaian karena penjabaran mata uang asing	38,660	29,359	--	68,019
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>12,392,015</b>	<b>5,556,006</b>	<b>162</b>	<b>17,948,183</b>
Mengalami penurunan nilai secara individual	11,374,577	3,925,785	--	15,300,362
Mengalami penurunan nilai secara kolektif	1,017,438	1,630,221	162	2,647,821
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>12,392,015</b>	<b>5,556,006</b>	<b>162</b>	<b>17,948,183</b>
Jumlah bruto dari pembiayaan yang mengalami penurunan nilai secara individu	<b>27,070,270</b>	<b>11,442,824</b>	--	<b>38,513,094</b>
<b>31 Desember/ December 31, 2020</b>				
	<b>Modal Kerja/ Working Capital</b>	<b>Investasi/ Investment</b>	<b>Konsumsi/ Consumption</b>	<b>Total</b>
Saldo awal per 1 Januari	8,306,196	2,974,021	959	11,281,176
Dampak penerapan awal PSAK 71	4,023,492	1,983,995	(478)	6,007,009
Saldo awal per 1 Januari - setelah penyesuaian	12,329,688	4,958,016	481	17,288,185
Pembentukan penyisihan tahun berjalan (Catatan 25)	408,226	38,231	(32)	446,425
Penyesuaian karena penjabaran mata uang asing	(34,327)	(28,119)	--	(62,446)
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>12,703,587</b>	<b>4,968,128</b>	<b>449</b>	<b>17,672,164</b>
Mengalami penurunan nilai secara individual	11,854,137	3,259,975	--	15,114,112
Mengalami penurunan nilai secara kolektif	849,450	1,708,153	449	2,558,052
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>12,703,587</b>	<b>4,968,128</b>	<b>449</b>	<b>17,672,164</b>
Jumlah bruto dari pembiayaan yang mengalami penurunan nilai secara individu	<b>26,470,318</b>	<b>9,427,904</b>	--	<b>35,898,222</b>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan  
Piutang Syariah dan Piutang Lainnya  
(lanjutan)**

**h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)**

Analisis atas perubahan nilai tercatat bruto piutang pembiayaan garansi adalah sebagai berikut:

	<i>31 Desember/December 31, 2021</i>			
	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Jumlah/ Total
Saldo awal	303,054	--	--	303,054
Perpindahan antar tahapan	--	--	--	
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--	
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--	
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	--	--	--	
Aset baru	--	--	--	
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	--	--	--	
Penyesuaian mata uang asing	(5,020)	--	--	(5,020)
<b>Saldo akhir</b>	<b>298,034</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>298,034</b>

*Beginning balance  
Transfer within stages  
Transfer to stage 1 -  
Transfer to stage 2 -  
Transfer to stage 3 -  
Net remeasurement of carrying value  
New assets originated  
Asset derecognized or repaid  
Foreign exchange adjustment  
Ending balance*

	<i>31 Desember/ December 31, 2020</i>			
	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Jumlah/ Total
Saldo awal	290,587	--	--	290,587
Perpindahan antar tahapan	--	--	--	
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--	
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--	
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	--	--	--	
Aset baru	--	--	--	
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	--	--	--	
Penyesuaian mata uang asing	12,467	--	--	12,467
<b>Saldo, akhir tahun</b>	<b>303,054</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>303,054</b>

*Beginning balance  
Transfer within stages  
Transfer to stage 1 -  
Transfer to stage 2 -  
Transfer to stage 3 -  
Net remeasurement of carrying value  
New assets originated  
Asset derecognized or repaid  
Foreign exchange adjustment  
Balance, end of year*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)**

**h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)**

Analisis atas Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan garansi adalah sebagai berikut:

**9. Financing and Receivables, and Financing and Sharia Receivables and Other Receivables (continued)**

**h. Other significant information (continued)**

*An analysis of the movement in and the movement in the allowance for impairment losses on financing guarantee are as follows:*

<b>31 Desember/December 31, 2021</b>				
	<b>Tahap/ Stage 1</b>	<b>Tahap/ Stage 2</b>	<b>Tahap/ Stage 3</b>	<b>Jumlah/ Total</b>
Saldo awal	7,242	--	--	7,242
Perpindahan antar tahapan				
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--	--
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	32,780	--	--	32,780
Aset baru	--	--	--	--
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	--	--	--	--
Total (pembalikan)/pembentukan tahun berjalan	32,780	--	--	32,780
Penyesuaian mata uang asing	137	--	--	137
<b>Saldo akhir</b>	<b>40,159</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>40,159</b>

<b>31 Desember/ December 31, 2020</b>				
	<b>Tahap/ Stage 1</b>	<b>Tahap/ Stage 2</b>	<b>Tahap/ Stage 3</b>	<b>Jumlah/ Total</b>
Saldo, 31 Desember 2019	2,989	--	--	2,989
Dampak penerapan awal PSAK 71	3,756	--	--	3,756
Saldo, 1 Januari 2020	6,745	--	--	6,745
Perpindahan antar tahapan	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--	--
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	418	--	--	418
Aset baru	--	--	--	--
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	--	--	--	--
Total (pembalikan)/pembentukan tahun berjalan	418	--	--	418
Penyesuaian mata uang asing	79	--	--	79
<b>Saldo, akhir tahun</b>	<b>7,242</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>7,242</b>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan  
Piutang Syariah dan Piutang Lainnya  
(lanjutan)**

**h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)**

LPEI melakukan penilaian pembiayaan dan piutang secara individual dengan menggunakan bukti obyektif penurunan nilai

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya pembiayaan dan piutang.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dan mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 31.

7. Jumlah pembiayaan dan piutang yang mengalami penurunan nilai pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp38.513.094 dan Rp35.898.222 yang terdiri dari pembiayaan dan piutang dalam Rupiah masing-masing sebesar Rp21.802.060 dan Rp19.116.830 dan pembiayaan dan piutang dalam Dolar Amerika Serikat masing-masing sebesar Rp16.711.034 dan Rp16.781.392.

LPEI telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas pembiayaan dan piutang yang mengalami penurunan nilai/bermasalah pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp15.300.363 dan Rp15.114.112.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**9. Financing and Receivables, and Financing  
and Sharia Receivables and Other  
Receivables (continued)**

**h. Other significant information  
(continued)**

*LPEI performs individual impairment assessment on financing and receivables based on whether an objective evidence of impairment exists*

*Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover losses on uncollectible financing and receivables.*

*Information with respect to classification of not impaired and impaired financial assets is disclosed in Note 31.*

7. As of December 31, 2021 and 2020, gross carrying amounts of total impaired financing and receivables amounted to Rp38,513,094 and Rp35,989,222, respectively, which consist of financing and receivables in Rupiah of Rp21,802,060 and Rp19,116,830, respectively, and financing and receivables in United States Dollars of Rp16,711,034 and Rp16,781,392, respectively.

*LPEI has provided allowance for impairment losses on the impaired/non-performing financing and receivables amounting to Rp15,300,363, as of December 31, 2021 and Rp15,114,112 as of December 31, 2020, respectively.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)**

**h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)**

8. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo pembiayaan dan piutang yang direstrukturasi oleh LPEI adalah Rp47.356.443 dan Rp57.745.441 serta cadangan kerugian penurunan nilai atas pembiayaan dan piutang tersebut, telah dibentuk oleh LPEI masing-masing sebesar Rp14.321.830 dan Rp15.098.761. Skema restrukturisasi kredit meliputi perpanjangan dan penjadwalan kembali jangka waktu kredit, penurunan suku bunga kredit dan skema restrukturisasi lain.

a. Pembiayaan dan piutang yang direstrukturasi berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

	<i>31 Desember / December 31,</i>		<i>Current</i>
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
Lancar	12,984,098	20,418,467	<i>Special mention</i>
Dalam perhatian khusus	19,002,167	16,416,874	<i>Substandard</i>
Kurang lancar	1,512,532	4,938,574	<i>Doubtful</i>
Diragukan	653,922	15,060	<i>Loss</i>
Macet	13,203,724	15,956,466	<i>Total</i>
Total	47,356,443	57,745,441	<i>Allowance for impairment losses</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14,321,830)	(15,098,761)	<i>Net</i>
Neto	<b>33,034,613</b>	<b>42,646,680</b>	

b. Pembiayaan dan piutang yang direstrukturasi berdasarkan jenis dan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

**9. Financing and Receivables, and Financing and Sharia Receivables and Other Receivables (continued)**

**h. Other significant information (continued)**

8. As of December 31, 2021 and 2020, the outstanding balance of financing and receivables which are restructured amounted to Rp47,356,443 and Rp57,745,441, respectively, and the related allowance for impairment losses provided by LPEI amounted to Rp14,321,830 and Rp15,098,761, respectively. Financing restructuring involves extension and rescheduling of loan maturity date, reduction of interest rate and other restructuring scheme.

a. *Restructured financing and receivables by collectibility are as follows:*

<i>31 Desember 2021</i>	<i>Dalam perhatian khusus/ Special mention</i>					<i>December 31, 2021</i>
	<i>Lancar/ Current</i>	<i>Kurang lancar/ Substandard</i>	<i>Diragukan/ Doubtful</i>	<i>Macet/ Loss</i>	<i>Total</i>	
Modal kerja	2,342,029	11,380,677	1,448,047	495,218	9,728,342	25,394,313
Investasi	10,642,069	7,621,490	64,485	158,704	3,475,382	21,962,130
Konsumsi	—	—	—	—	—	<i>Working capital</i>
Total	12,984,098	19,002,167	1,512,532	653,922	13,203,724	47,356,443
Cadangan kerugian penurunan nilai	(188,476)	(3,916,938)	(294,915)	(196,980)	(9,724,521)	(14,321,830)
Neto	<b>12,795,622</b>	<b>15,085,229</b>	<b>1,217,617</b>	<b>456,942</b>	<b>3,479,203</b>	<b>33,034,613</b>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)**

**h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)**

31 Desember 2020	Dalam perhatian khusus/ Special mention					<b>Total</b>	<b>December 31, 2020</b>
	Lancar/ Current	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss			
Modal kerja	6,518,020	11,025,794	3,744,559	15,060	10,499,933	31,803,366	Working capital
Investasi	13,900,447	5,391,080	1,194,015	--	5,456,533	25,942,075	Investment
Konsumsi	--	--	--	--	--	--	Consumption
<b>Total</b>	<b>20,418,467</b>	<b>16,416,874</b>	<b>4,938,574</b>	<b>15,060</b>	<b>15,956,466</b>	<b>57,745,441</b>	<b>Total</b>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(485,952)	(3,335,339)	(1,534,094)	(146)	(9,743,230)	(15,098,761)	Allowance for impairment losses
<b>Neto</b>	<b>19,932,515</b>	<b>13,081,535</b>	<b>3,404,480</b>	<b>14,914</b>	<b>6,213,236</b>	<b>42,646,680</b>	<b>Net</b>

9. Berdasarkan POJK No. 40/POJK.05/2015("POJK No. 40") tanggal 21 Desember 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI, Pasal 14 ayat (2) menyebutkan LPEI dilarang memiliki Pembiayaan dengan kategori kualitas Pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing* (NPF) setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan pembiayaan, lebih dari 5% (lima persen) dari total Pembiayaan. Namun demikian, berdasarkan POJK No. 40 pasal 71 perihal "Rencana Pemenuhan", menyatakan:

- (1) Dalam hal LPEI tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), LPEI wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran oleh OJK.

**9. Financing and Receivables, and Financing and Sharia Receivables and Other Receivables (continued)**

**h. Other significant information (continued)**

9. Based on POJK No. 40/POJK.05/2015 dated December 21, 2015 regarding Development and Supervision of LPEI, Article 14 paragraph (2) states that LPEI is not allowed to have Financing with a Non-Performing Financing (NPF) category less allowance for financing losses, more than 5% (five percent) of the total Financing. However, based on POJK No. 40 article 71 concerning the "Fulfillment Plans", states:

- (1) In the event that LPEI does not comply with the provisions referred to in Article 14 paragraph (2), LPEI must submit a plan for fulfillment no later than 1 (one) month from the date of stipulation of the violation by the OJK.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan  
Piutang Syariah dan Piutang Lainnya  
(lanjutan)**

**h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)**

- (2) Rencana pemenuhan sebagaimana di maksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana yang akan dilakukan oleh LPEI untuk memenuhi ketentuan yang disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rencana pemenuhan sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus memperoleh pernyataan tidak keberatan dari OJK.
- (4) Dalam hal rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh OJK tidak cukup untuk mengatasi permasalahan, LPEI wajib melakukan perbaikan atas rencana pemenuhan tersebut.
- (5) OJK memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana pemenuhan yang disampaikan oleh LPEI dengan memperhatikan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh LPEI paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya rencana pemenuhan secara lengkap.
- (6) LPEI wajib melaksanakan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**9. Financing and Receivables, and Financing  
and Sharia Receivables and Other  
Receivables (continued)**

**h. Other significant information  
(continued)**

- (2) *The fulfillment plan as referred to in paragraph (1) shall at least contain the plan to be carried out by LPEI to fulfill the provisions followed by a certain period of time needed to fulfill the provisions referred to in paragraph (1).*
- (3) *The plans for fulfillment as referred to in paragraph (1) must obtain a statement of no objection from OJK.*
- (4) *In the event that the fulfillment plan as referred to in paragraph (1) is assessed by the OJK as insufficient to resolve the problem, LPEI must improve the fulfillment plan.*
- (5) *OJK gives a statement of noobjection to the fulfillment plan submitted by LPEI by taking into account the conditions of the problems faced by LPEI no later than 14 (fourteen) days from the date that OJK received the fulfillment plan.*
- (6) *LPEI must implement the fulfillment plan referred to in paragraph (1).*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan  
Piutang Syariah dan Piutang Lainnya  
(lanjutan)**

**h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)**

Pemenuhan Ketentuan POJK No. 40 di tahun 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2019, rasio NPF bersih LPEI tidak memenuhi ketentuan POJK No. 40 Pasal 14 ayat 2 dan melalui surat OJK Nomor: S-28/NB.22/2020 tanggal 30 Januari 2020, OJK menyatakan bahwa rasio NPF bersih LPEI tidak memenuhi ketentuan POJK No. 40 Pasal 14 ayat 2 dan sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) atas POJK No. 40 tersebut. OJK meminta LPEI untuk wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran ketentuan NPF Bersih oleh OJK.

Selanjutnya, LPEI telah menyampaikan tanggapannya atas surat OJK tersebut perihal Pemenuhan Ketentuan Pembiayaan Bermasalah (NPF) dan LPEI telah menyampaikan Pemenuhan Ketentuan Pembiayaan Bermasalah (NPF) ke OJK serta Pemenuhan *Action Plan* Pembiayaan Bermasalah (NPF) dengan jangka waktu pemenuhan NPF bersih sampai dengan kuartal IV tahun 2021 melalui surat LPEI kepada OJK No. BS.0016/CEO/02/2020 tanggal 6 Februari 2020 dan No.BS0027/MDI/02/2020 tanggal 18 Februari 2020. Dalam tanggapan LPEI kepada OJK, LPEI menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Penyebab NPL meningkat signifikan.**

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**9. Financing and Receivables, and Financing  
and Sharia Receivables and Other  
Receivables (continued)**

**h. Other significant information  
(continued)**

*Compliance with POJK No. 40 in 2020.*

*As of December 31, 2019, the ratio of LPEI net NPF did not meet the requirement of POJK No. 40 Article 14 paragraph 2 and based on Letter Number: S-28/NB.22/2020 dated January 30, 2020, the OJK stated that the LPEI net NPF ratio did not meet the provisions of POJK No. 40 Article 14 paragraph 2 and in accordance with the provisions of Article 71 paragraph (1) for POJK No. 40. OJK requests LPEI to be obliged to submit a fulfillment plan no later than 1 (one) month from the stipulated date of the Net NPF violation by the OJK.*

*Furthermore, LPEI has conveyed its response to the OJK regarding fulfillment the compliance of Non Performing Financing (NPF) and LPEI has submitted Fulfillment the compliance of Non Performing Financing (NPF) with the improvement period of NPF net up to the fourth quarter of 2021 OJK through LPEI letter to OJK No. BS.0016/CEO/02/2020 dated February 6, 2020 and No.BS0027/MDI/02/2020 dated February 18, 2020. In the response of LPEI to OJK, LPEI has submitted things as follows:*

**1. Cause of NPL has significantly increased.**

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)**

**h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)**

2. Melakukan perbaikan prosedur penanganan pembiayaan bermasalah di tahun 2020 dan *refocusing* kegiatan sepanjang tahun yang meliputi (1) perbaikan kualitas pembiayaan, (2) perbaikan kinerja keuangan, (3) penguatan manajemen risiko termasuk menyusun framework berdasarkan *sui generis*, (4) peningkatan peran LPEI sebagai *Special Mission Vehicle (SMV)* dan pelaksanaan NIA, (5) pembuatan model pembiayaan segmen UKME, (6) *re-build corporate early warning system*, dan (7) pengembangan organisasi, SDM dan TI.
3. Pelaksanaan mandat LPEI dan proyeksi keuangan tahun 2020-2024.
4. Indikator kinerja kuantitatif penanganan pembiayaan bermasalah.

Melalui surat OJK kepada LPEI Nomor:S-45/NB.22/2020 tanggal 20 Februari 2020 perihal tanggapan atas rencana pemenuhan ketentuan pembiayaan bermasalah (NPF), menyatakan bahwa OJK tidak keberatan atas rencana pemenuhan ketentuan mengenai rasio NPF Bersih yang disampaikan oleh LPEI, untuk dapat memenuhi ketentuan POJK Nomor 40 Pasal 14 ayat (2) dimana LPEI wajib melaksanakan rencana pemenuhan yang telah disampaikan kepada OJK tersebut dan melaporkan perkembangan rencana pemenuhan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut (Catatan 16 dan 17):

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**9. Financing and Receivables, and Financing and Sharia Receivables and Other Receivables (continued)**

**h. Other significant information (continued)**

2. *Improving procedures for handling problem financing in 2020 and refocusing activities through out the year which includes (1) improving the quality of financing, (2) improving financial performance, (3)streng the ningrisk management including developing a framework based on sui generis, (4) enhancing the role of LPEI as an Special Mission Vehicle (SMV) and implementing the NIA, (5) creating a financing model for the UKME segment, (6) re-building corporate early warning systems, and (7) organizational, HR and IT development.*
3. *Implementation of the LPEI mandate and financial projections for 2020-2024.*
4. *Quantitative performance indicators for handling non performing financing.*

*Based on the OJK letter to LPEI Number: S-45/NB.22/2020 dated February 20, 2020 regarding the response to the plan to fulfill the trouble financing provisions (NPF), states that the OJK has no objection to the plan to fulfill the provisions regarding Net NPF ratios submitted by LPEI in order to fulfill POJK No. 40 Article 14 paragraph (2) where LPEI is obliged to implement the fulfillment plan that has been submitted to the OJK and report on the progress of the fulfillment plan with the following conditions (Notes 16 and 17):*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)**

**h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)**

1. Laporan perkembangan rencana pemenuhan disampaikan secara triwulan kepada OJK atau setiap waktu dalam hal terjadi kondisi yang dapat mempengaruhi pencapaian rencana pemenuhan. Laporan perkembangan tersebut disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode triwulan yang bersangkutan berakhir atau 5 (lima) hari setelah terjadinya kondisi yang dapat mempengaruhi pencapaian rencana pemenuhan.
2. Laporan perkembangan rencana pemenuhan disertai dengan dokumen pendukung, antara lain bukti penerimaan pembayaran pokok atau bunga pembiayaan dan dokumen lain yang menjadi dasar perbaikan kualitas pembiayaan masing-masing debitur.

Rasio pembiayaan dan piutang yang diklasifikasikan NPF/NPL adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember / December 31,</b>		<i>Gross NPF ratio</i>	<i>Net NPF ratio</i>
	<b>2021</b>	<b>2020</b>		
Rasio NPF bruto	21.03%	26.08%		
Rasio NPF neto	7.12%	11.49%		

Penugasan Khusus tidak memiliki pembiayaan dan piutang yang diklasifikasikan sebagai *Non Performing Financing* per 31 Desember 2021 dan 2020.

Per 31 Desember 2021, ikhtisar pembiayaan dan piutang bermasalah berdasarkan sektor ekonomi dan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan PMK No. 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI adalah sebagai berikut:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**9. Financing and Receivables, and Financing  
and Sharia Receivables and Other  
Receivables (continued)**

**h. Other significant information  
(continued)**

1. A progress report on the fulfillment plan is submitted quarterly to OJK or at any time in the event of a condition that can affect the achievement of the fulfillment plan. The progress report is submitted no later than 15 (fifteen) days after the quarter period ends or 5 (five) days after the occurrence of conditions that can affect the achievement of the fulfillment plan.
2. The progress report of the fulfillment plan is attached with supporting documents, including receipt of payment of principal or interest on financing and other underlying documents for improving the quality of financing of each debtor.

*Financing and receivables ratios classified as NPF/NPL are as follows:*

*National Interest Account does not have any Non Performing Financing as of December 31, 2021 and 2020.*

*As of December 31, 2021, a summary of non-performing financing and receivables based on economic sector and related allowance for impairment losses based on PMK No. 58/PMK.06/2020 regarding Development and Supervision of LPEI, is as follows:*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)**

**h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)**

**31 Desember 2021**

	<b>Pembiayaan dan piutang bermasalah/ <i>Non-performing financing and receivables</i></b>	<b>Cadangan kerugian penurunan nilai/ <i>Allowance for impairment losses</i></b>	<b>Rupiah</b>
<b>Rupiah</b>			<b>Agriculture, hunting, and agriculture services</b>
Pertanian, perburuan, dan sarana pertanian	1,891,674	1,082,466	Trading, restaurants and hotel
Perdagangan, restoran dan hotel	1,746,077	1,062,892	Industry
Perindustrian	5,293,823	3,179,968	Mining
Pertambangan	1,051,981	663,717	Transportation, warehousing, and communication
Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi	182,136	125,312	Construction
Konstruksi	72,589	33,279	Business services
Jasa dunia usaha	445,900	426,186	Social services/society
Jasa-jasa sosial/masyarakat	9,800	9,800	
	<b>10,693,980</b>	<b>6,583,620</b>	<b>Rupiah</b>
<b>Dolar Amerika Serikat</b>			<b>United States Dollar</b>
Pertanian, perburuan, dan sarana pertanian	600,665	451,954	Agriculture, hunting, and agriculture services
Perdagangan, restoran dan hotel	496,402	309,634	Trading, restaurants and hotel
Perindustrian	4,171,870	3,038,828	Industry
Pertambangan	458,662	343,444	Mining
Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi	287,657	214,043	Transportation, warehousing, and communication
Konstruksi	318,562	318,562	Construction
Jasa dunia usaha	626,365	414,736	Business services
Jasa-jasa sosial/masyarakat	7,126	7,126	Social services/society
	<b>6,967,309</b>	<b>5,098,327</b>	
<b>Total</b>	<b>17,661,289</b>	<b>11,681,947</b>	<b>Total</b>

Per 31 Desember 2020, ikhtisar pembiayaan dan piutang bermasalah berdasarkan sektor ekonomi dan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai sesuai PMK No. 140/PMK.010/2009 yang terakhir diubah sesuai PMK No. 161/PMK/010/2010 tentang perubahan atas PMK No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI adalah sebagai berikut:

*As of December 31, 2020, a summary of non-performing financing and receivables based on economic sector and related allowance for impairment losses based on PMK No. 140/PMK.010/2009 as last amended by PMK No. 161/PMK.010/2010 regarding changes of PMK No. 140/PMK.010/2009 regarding Development and Supervision of LPEI, is as follows:*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)**

**h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)**

**31 Desember 2020**

	Pembiayaan dan piutang bermasalah/ <i>Non-performing financing and receivables</i>	Cadangan kerugian penurunan nilai/ <i>Allowance for impairment losses</i>	Rupiah
<b>Rupiah</b>			<i>Agriculture, hunting, and agriculture services</i>
Pertanian, perburuan, dan sarana pertanian	3,221,928	1,047,174	<i>Trading, restaurants and hotel</i>
Perdagangan, restoran dan hotel	1,975,373	1,425,394	<i>Industry</i>
Perindustrian	8,077,295	4,140,662	<i>Mining</i>
Pertambangan	1,111,901	607,168	<i>Transportation, warehousing, and communication</i>
Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi	184,982	123,509	<i>Construction</i>
Konstruksi	48,582	26,634	<i>Business services</i>
Jasa dunia usaha	34,852	19,713	<i>Social services/society</i>
Jasa-jasa sosial/masyarakat	9,800	9,800	
	<b>14,664,713</b>	<b>7,400,054</b>	
<b>Dolar Amerika Serikat</b>			<b><i>United States Dollar</i></b>
Pertanian, perburuan, dan sarana pertanian	401,324	393,816	<i>Agriculture, hunting, and agriculture services</i>
Perdagangan, restoran dan hotel	792,064	503,761	<i>Trading, restaurants and hotel</i>
Perindustrian	5,479,612	3,229,190	<i>Industry</i>
Pertambangan	786,825	545,371	<i>Mining</i>
Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi	512,789	327,149	<i>Transportation, warehousing, and communication</i>
Konstruksi	314,036	314,036	<i>Construction</i>
Jasa dunia usaha	617,466	464,246	<i>Business services</i>
Jasa-jasa sosial/masyarakat	7,025	7,025	<i>Social services/society</i>
	<b>8,911,141</b>	<b>5,784,594</b>	
<b>Total</b>	<b>23,575,854</b>	<b>13,184,648</b>	<b>Total</b>

10. Rasio pembiayaan dan piutang usaha kecil dan menengah terhadap total pembiayaan dan piutang LPEI yang mana tidak termasuk pembiayaan yang merupakan Penugasan Khusus pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 17,14% dan 15,92%.

10. *The ratio of small medium enterprises financing and receivables to total financingand receivables of LPEI, which does not include loan under National Interest Account as of December 31, 2021 and 2020, are 17.14% and 15.92%, respectively.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan  
Piutang Syariah dan Piutang Lainnya  
(lanjutan)**

**h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)**

11. LPEI memiliki pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE) pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp121.204 dan Rp126.842. Fasilitas KURBE merupakan bentuk pembiayaan yang disediakan oleh LPEI untuk para pelaku usaha dengan skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berorientasi ekspor. KURBE diluncurkan untuk membantu para pelaku bisnis mikro, kecil dan UMKM yang berorientasi ekspor dalam memperoleh akses pendanaan yang murah. LPEI telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai pada pembiayaan KURBE per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp71.373 dan Rp54.135.

**Pembiayaan kepada PT Garuda Indonesia  
Airlines, Tbk**

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 18 Undang-Undang nomor 02 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI dapat melaksanakan penugasan khusus dari Pemerintah untuk mendukung program Ekspor nasional atas biaya Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai hal-hal yang terkait dengan penugasan khusus pelaksanaan program Ekspor nasional diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (PMK No. 198/2017) yang saat ini telah dicabut dan diganti dengan PMK 183/PMK.08/2021 tentang Penugasan Khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (PMK No 183/2021).

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**9. Financing and Receivables, and Financing  
and Sharia Receivables and Other  
Receivables (continued)**

**h. Other significant information  
(continued)**

11. *LPEI has financing under Credit Export related to SME (KURBE) as of December 31, 2021 and 2020, amounting to Rp121,204 and Rp126,842, respectively. KURBE facility is a form of financing provided by LPEI for micro, small and medium enterprises (SMEs) which are export-oriented. KURBE is launched to help the export-oriented micro, small and SMEs in gaining access to low cost financing. LPEI has provided allowance for impairment losses on financing to KURBE amounting to Rp71,373 and Rp54,135, as of December 31, 2021 and 2020, respectively.*

**Financing to PT Garuda Indonesia Airlines,  
Tbk**

*Based on the provision of Article 18 of Law number 02 of concerning Indonesian Export Financing Agency, LPEI may carry out special assignments from the Government to support the national Export program at the Government's expense. Further provisions regarding matters related to special assignments for the implementation of the national Export program are regulated by Regulation of Minister of Finance Number 198/PMK.08/2017 concerning Special Assignments to the Indonesian Export Financing Institution (Regulation of Minister of Finance No. 198/2017) which currently has been revoked and substituted with PMK 183/PMK.08/2021 concerning Special Assignment to the Indonesian Export Financing Institution (Regulation of Minister of Finance No 183/2021) .*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan  
Piutang Syariah dan Piutang Lainnya  
(lanjutan)**

**h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)**

Melalui PP nomor 44 tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI menerima PMN sebesar Rp 2,5 triliun dengan alokasi Rp 1,5 triliun untuk melaksanakan Penugasan Umum (peningkatan kapasitas usaha) dan Rp 1 triliun untuk melaksanakan program Penugasan Khusus Ekspor (PKE).

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) melalui Surat nomor S-427/MBU/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 menyampaikan usulan Program PKE Industri Penerbangan dan Komite PKE yang terdiri dari perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian sebagai anggota tetap melakukan penilaian melalui beberapa Rapat Teknis dan melaksanakan Rapat Pleno untuk menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan atas usulan program PKE Industri Penerbangan yang telah disampaikan oleh KBUMN.

Melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 428/KMK/08/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI untuk mendukung Industri Penerbangan Indonesia, LPEI ditugaskan untuk menyediakan pembiayaan ekspor dengan alokasi Dana Penugasan Khusus (DPK) sebesar Rp 1 triliun sesuai ketentuan pelaksanaan yang tercantum dalam KMK tersebut. Adapun jangka waktu penugasan atas PKE Industri Penerbangan ini telah berakhir di 31 Desember 2021.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk/GIAA melalui Surat nomor GARUDA/JKDZ/24610/2020 tanggal 25 September 2020 menyampaikan permohonan pembiayaan modal kerja PKE kepada LPEI. Terhadap permohonan GIAA tersebut, LPEI melakukan evaluasi pembiayaan berdasarkan Feasibility Study (FS) yang disusun oleh pihak independen.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**9. Financing and Receivables, and Financing  
and Sharia Receivables and Other  
Receivables (continued)**

**h. Other significant information (continued)**

*Through Government Regulation number 44 of 2019 regarding Additional State Equity Participation of the Republic of Indonesia into the Equity of the Indonesian Export Financing Institution, LPEI receives State Equity Participation in the amount of Rp 2.5 trillion with the allocation of Rp 1.5 trillion to carry out General Assignment (increasing of business capacity) and Rp 1 trillion to carry out the Export Special Assignment (PKE) program.*

*Ministry of State-Owned Enterprises by the Letter number S-427/MBU/06/2020 dated 26 June 2020 conveyed the proposed PKE Program for Aviation Industry and PKE Committee consisting of representatives of Ministry of Finance, Ministry of Trade and Ministry of Industry as permanent members to conduct an assessment through several Technical Meetings and carry out Plenary Meetings to prepare recommendations that will be submitted to the Minister of Finance on the proposed PKE program for Aviation Industry that has been submitted by Ministry of State-Owned Enterprises.*

*Through Decree of Minister of Finance number 428/KMK/08/2020 dated 23 September 2020 concerning Special Assignment to LPEI to support the Indonesian Aviation Industry, LPEI is assigned to provide export financing with the allocation of the Special Assignment Fund of Rp. 1 trillion in accordance with the implementation provisions contained in the Decree of Minister of Finance. The assignment period for this Aviation Industry PKE has ended on December 31, 2021.*

*PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk/GIAA by the Letter number GARUDA/JKDZ/24610/2020 dated 25 September 2020 submitted an application for PKE working capital financing to LPEI. With respect to the GIAA application, LPEI conducted a financing evaluation based on the Feasibility Study (FS) prepared by an independent party.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan  
Piutang Syariah dan Piutang Lainnya  
(lanjutan)**

**h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)**

LPEI dan GIAA melakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor nomor 19 tanggal 06 Oktober 2020 di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito di Jakarta, dengan limit pembiayaan sebesar Rp 1 triliun dan tujuan penggunaan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMKE) PKE untuk pembayaran past-due kepada lessors dalam rangka penurunan biaya sewa atau manfaat lainnya, pembayaran kepada lessors untuk pencabutan grounding notice pesawat serta pembiayaan direct costs atas biaya-biaya operasional sebagai berikut: (1) biaya sewa pesawat kepada lessor; (2) biaya bahan bakar untuk rute internasional atau pengisian bahan bakar di luar wilayah Republik Indonesia; (3) biaya pelayanan pesawat dan bandara atas rute internasional; (4) biaya perawatan pesawat.

Per 31 Desember 2021, LPEI telah melakukan pencairan atas Fasilitas KMKE PKE kepada GIAA sebesar Rp 977 miliar sesuai dengan tujuan penggunaan dan melaksanakan kegiatan monitoring pemenuhan covenant debitur. Selama tahun 2021, LPEI telah melakukan kegiatan monitoring baik onsite dengan melakukan site visit ke lokasi usaha dan offsite berupa penyampaian laporan-laporan kepada Komite PKE.

Pelaksanaan pemberian KMKE PKE kepada GIAA pada tahun 2020 tersebut telah sesuai dengan PMK No. 198/2017 (yang saat ini telah dicabut dan diganti dengan PMK No.. 183/2021) dan ketentuan dalam KMK nomor 428/KMK/08/2020.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**9. Financing and Receivables, and Financing  
and Sharia Receivables and Other  
Receivables (continued)**

**h. Other significant information (continued)**

*LPEI and GIAA signed the Deed of Export Working Capital Credit Agreement number 19 dated 6 October 2020 before Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito in Jakarta, with a financing limit of Rp 1 trillion and the purpose of using the Working Capital Credit of National Interest Account facility for past-due payments to lessors in order to reduce rental costs or other benefits, payments to lessors for revocation of aircraft grounding notices as well as direct costs financing for costs operational as follows: (1) aircraft rental costs to lessors; (2) fuel costs for international routes or refueling outside the territory of the Republic of Indonesia; (3) the cost of aircraft and airport services on international routes; (4) aircraft maintenance costs.*

*As of 31 December 2021, LPEI has disbursed the Working Capital Credit of National Interest Account Facility to GIAA in the amount of Rp 977 billion in accordance with the intended use and carried out monitoring activities for the fulfillment of debtor covenants. During 2021, LPEI has carried out monitoring activities both onsite by conducting site visits to business locations and offsite in the form of submitting reports to the National Interest Account Committee.*

*The implementation of the granting of the Working Capital Credit of National Interest Account to GIAA in 2020 was in accordance with Regulation of Minister of Finance No. 198/2017 (which has now been revoked and substituted with Regulation of Minister of Finance No. 183/2021) and the provisions in Decree of Minister of Finance number 428/KMK/08/2020.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan  
Piutang Syariah dan Piutang Lainnya  
(lanjutan)**

**i. Piutang Pembiayaan Garansi**

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, LPEI memiliki piutang pembiayaan garansi sebesar Rp298.034 dan Rp303.054 dengan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp40.159 dan Rp7.242.

Piutang pembiayaan garansi tersebut adalah pembayaran klaim oleh LPEI kepada PT Pertamina (Persero) atas Refund Guarantee sebesar USD22.654.767, dimana LPEI bertindak sebagai penjamin atas Bank Garansi yang diterbitkan untuk nasabah Konsorsium PT Anggrek Hitam dan PT High Speed Shipyard ("HSS") sebesar USD22.665.347 yang diterbitkan dari tanggal 1 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018. Konsorsium HSS telah gagal melaksanakan pekerjaan atas penyelesaian pembuatan kapal yang dipesan oleh PT Pertamina (Persero) secara tepat waktu, yaitu melewati tenggat waktu maksimal penyelesaian yang telah disepakati bersama pada tanggal 31 Juli 2018.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**9. Financing and Receivables, and Financing  
and Sharia Receivables and Other  
Receivables (continued)**

**i. Guarantee Financing Receivables**

As of December 31, 2021 and 2020, LPEI has other guarantee receivables of Rp298,034 and Rp303,054 with allowance of impairment losses of Rp40,159 and Rp7,242.

Guarantee financing receivables are claims payments by LPEI to PT Pertamina (Persero) for a Refund Guarantee of USD22,654,767 where LPEI acts as guarantor of Bank Guarantees issued to Consortium customers PT Anggrek Hitam and PT High Speed Shipyard ("HSS") amounting USD22,665,347 issued from November 1, 2017 to August 24, 2018. The HSS Consortium has failed to carry out work on the completion of shipbuilding ordered by PT Pertamina (Persero) on time, i.e past the maximum agreed deadline for completion on July 31, 2018.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan  
Piutang Syariah dan Piutang Lainnya  
(lanjutan)**

**i. Piutang Pembiayaan Garansi (lanjutan)**

Pembayaran klaim kepada PT Pertamina (Persero) tersebut di atas berasal dari porsi retensi (yang menjadi bagian) LPEI atas klaim sebesar USD6.089.430, serta cash collateral sebesar USD1.743.757, dan sisanya ditanggung oleh Penjamin Ulang (Reguarantor), yaitu konsorsium PT Asuransi Central Asia, Asia Capital Reinsurance Group Pte Ltd, PT Reasuransi Nasional Indonesia, PT Asuransi Jasa Indonesia, dan PT Asuransi Kredit Indonesia melalui skema penjaminan ulang dan kontra-bank garansi sebesar USD14.821.580.

Sehubungan dengan recovery atas klaim yang telah dibayarkan LPEI tersebut. HSS telah menandatangani Perjanjian Pengakuan Hutang sebesar USD21.548.796 kepada LPEI pada tanggal 5 November 2018 dengan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2019 yang diperpanjang sampai 30 September 2022.

Sesuai perjanjian kerjasama penutupan asuransi dan perjanjian pembagian pertanggungan penjaminan atas pembayaran yang diterima oleh LPEI dari HSS, LPEI akan mengembalikannya kepada para Penjamin Ulang sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh masing-masing Penjamin Ulang. LPEI mencatat liabilitas kepada Penjamin Ulang sebesar USD14.821.580.38 dan USD15.357.567 (bilangan penuh) atau ekuivalen dengan Rp211.244 dan Rp215.774 (dalam jutaan Rupiah) (Catatan 20) masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 atas porsi risiko yang ditanggung oleh Penjamin Ulang tersebut. Termasuk dalam jumlah liabilitas kepada Penjamin Ulang tersebut adalah bagian dari pengenaan denda yang menjadi porsi Penjamin Ulang sebesar USD73.422 dan USD535.986 masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**9. Financing and Receivables, and Financing  
and Sharia Receivables and Other  
Receivables (continued)**

**i. Guarantee Financing Receivables  
(continued)**

*The payment of claims to PT Pertamina (Persero) above originates from the own retention portion (which is part of) LPEI claims amounting to USD6,089,430, and cash collateral amounting to USD1,743,757, and the balance reinsured by the Reinsurer (Reguarantor), namely PT Asuransi Central Asia Consortium, Asia Capital Reinsurance Group Pte Ltd, PT Reasuransi Nasional Indonesia, PT Asuransi Jasa Indonesia, and PT Asuransi Kredit Indonesia through a re-guarantee scheme and counter-bank guarantee amounting to USD14,821,580.*

*Due to the recovery of claims that was paid by LPEI, HSS has signed a Debt Recognition Agreement amounting to USD21,548,796 with LPEI on November 5, 2018, with maturity date on September 30, 2019 which has been extended up to September 30, 2022.*

*Referring to co-insurance agreement and co-guarantee agreement for payments received by LPEI from HSS, LPEI will share it to the Re-guarantor a portion of the risk covered by each Re-guarantor. LPEI records the reinsurance liability to the Re-Guarantee amounting to USD14,821,580.38 and USD15,357,567 (full amount) or equivalent with Rp211,244 and Rp215,774 (in million Rupiah) (Note 20) for the portion of the risk borne by the Reinsurer as of December 31, 2021 and 2020, respectively. Included in the obligations amount of the Re-guarantor is part of a fine which is the Re-Guarantee portion amounting to USD73,422 and USD535,986 as of December 31, 2021 and 2020, respectively.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**10. Asuransi dan Penjaminan**

a. Piutang asuransi dan penjaminan

	<i>31 Desember / December 31,</i>		
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
<b>Rupiah</b>			<b>Rupiah</b>
Piutang penjaminan-PEN	281,470	28,620	Guarantee receivables - PEN
Piutang proteksi piutang dagang	241	387	Trade receivable protection
Piutang asuransi kegagalan ekspor	46	162	Export failure insurance receivables
Piutang asuransi properti	35	90	Property insurance receivables
Piutang asuransi teknik	6	--	Engineering insurance receivables
	<b>281,798</b>	<b>29,259</b>	
<b>Mata uang asing</b>			<b>Foreign currency</b>
Piutang proteksi piutang dagang	3,745	2,423	Guarantee receivables - PEN
Piutang asuransi kegagalan ekspor	109	3,489	Trade receivable protection receivables
Piutang asuransi properti	4	364	Export failure insurance receivables
Piutang penjaminan-PEN	--	5	Property insurance receivables
	<b>3,858</b>	<b>6,281</b>	
Cadangan kerugian penurunan nilai	<b>285,656</b>	<b>35,540</b>	
Total - neto	<b>285,656</b>	<b>34,631</b>	<i>Allowance for impairment losses</i>
			<b>Total - net</b>

Perubahan cadangan penyisihan adalah sebagai berikut:

*The movements in the allowance are as follows:*

	<i>31 Desember / December 31,</i>		
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
Saldo awal	909	2,828	<i>Beginning balance</i>
Penyesuaian karena penjabaran mata uang asing	14	150	<i>Foreign exchange translation adjustment</i>
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 25)	(923)	(2,069)	<i>Provision during the year (Notes 25)</i>
<b>Saldo akhir</b>	<b>--</b>	<b>909</b>	<b>Ending balance</b>

b. Aset reasuransi

*b. Reinsurance assets*

	<i>31 Desember / December 31,</i>		
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
Premi yang belum diakui sebagai pendapatan			<i>Unearned premium income</i>
Rupiah			<i>Rupiah</i>
Piutang proteksi piutang dagang	354	182	Trade receivable protection
Asuransi kegagalan ekspor	22	--	Failure on export insurance
Mata uang asing			<i>Foreign currency</i>
Proteksi piutang dagang	2,200	969	Trade receivable protection
Asuransi kegagalan ekspor	39	133	Failure on export insurance
<b>Total</b>	<b>2,615</b>	<b>1,284</b>	<b>Total</b>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**10. Asuransi dan Penjaminan (lanjutan)**

b. Aset reasuransi (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa estimasi klaim asuransi yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset reasuransi tersebut.

c. Liabilitas asuransi

**10. Insurance and Guarantee (continued)**

b. Reinsurance assets (continued)

*Management believes that the estimated reinsurance claims provided is adequate to cover losses on the reinsurance assets.*

c. Insurance liabilities

	<i>31 Desember / December 31,</i>		
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
Premi yang belum diakui sebagai pendapatan Rupiah			<i>Unearned premium income Rupiah</i>
Proteksi piutang dagang	298	227	<i>Trade receivable protection</i>
Asuransi kegagalan ekspor	16	--	<i>Failure on export insurance</i>
Mata uang asing			<i>Foreign currency</i>
Proteksi piutang dagang	3,438	1,491	<i>Trade receivable protection</i>
Asuransi kegagalan ekspor	17	132	<i>Failure on export insurance</i>
	<b>3,769</b>	<b>1,850</b>	
Estimasi klaim asuransi Rupiah			<i>Estimated insurance claim Rupiah</i>
Proteksi piutang dagang	351	178	<i>Trade receivable protection</i>
Asuransi kegagalan ekspor	26	--	<i>Failure on export insurance</i>
Mata uang asing			<i>Foreign currency</i>
Proteksi piutang dagang	2,180	1,101	<i>Trade receivable protection</i>
Asuransi kegagalan ekspor	64	101	<i>Failure on export insurance</i>
	<b>2,621</b>	<b>1,380</b>	
<b>Total</b>	<b>6,390</b>	<b>3,230</b>	<b>Total</b>

d. Pendapatan asuransi - neto

d. Income from insurance – net

	<i>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,</i>		
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
Pendapatan asuransi - bruto Rupiah			<i>Income from insurance - gross Rupiah</i>
Pendapatan premi bruto	982	406	<i>Gross written premiums</i>
Pendapatan komisi	245	88	<i>Commission income</i>
Pendapatan asuransi lainnya	185	--	<i>Other insurance income</i>
	<b>1,412</b>	<b>494</b>	
Mata uang asing			<i>Foreign currency</i>
Pendapatan premi bruto	8,650	7,888	<i>Gross written premiums</i>
Pendapatan komisi	1,848	1,497	<i>Commission income</i>
Pendapatan asuransi lainnya	447	(36)	<i>Other insurance income</i>
	<b>10,945</b>	<b>9,349</b>	
	<b>12,357</b>	<b>9,843</b>	
Premi reasuransi Rupiah			<i>Reinsurance premiums Rupiah</i>
Premi reasuransi	(1,072)	(323)	<i>Reinsurance premiums</i>
Mata uang asing			<i>Foreign currency</i>
Premi reasuransi	(6,496)	(5,416)	<i>Reinsurance premiums</i>
	<b>(7,568)</b>	<b>(5,739)</b>	
<b>Pendapatan dari asuransi - neto</b>	<b>4,789</b>	<b>4,104</b>	<b>Income from insurance - net</b>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**10. Asuransi dan Penjaminan (lanjutan)**

- e. Beban klaim bruto asuransi dan beban asuransi lainnya

<i>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,</i>		
	<i>2021</i>	<i>2020</i>
<b>Beban klaim</b>		
Rupiah		
Klaim reasuransi	5	1,270
Beban klaim bruto	(8)	(1,309)
	(3)	(39)
<b>Mata uang asing</b>		
Klaim reasuransi	513	980
Beban klaim bruto	(790)	(1,500)
	(277)	(520)
Subtotal beban klaim	(280)	(559)
<b>Beban asuransi lainnya</b>		
Rupiah	(150)	(51)
Mata uang asing	(644)	(785)
Subtotal beban asuransi lainnya	(794)	(836)
<b>Beban klaim asuransi dan lainnya</b>	<b>(1,074)</b>	<b>(1,395)</b>

- f. Pendapatan penjaminan

<i>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,</i>		
	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Rupiah	31,012	26,565
Mata uang asing	48,341	53,629
<b>Total</b>	<b>79,353</b>	<b>80,194</b>

- g. Kenaikan/(penurunan)  
reasuransi - neto

pada      aset      g. *Increase/(decrease) in reinsurance assets – net*

<i>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,</i>		
	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Rupiah	194	(1,093)
Mata uang asing	1,154	(2,344)
<b>Total</b>	<b>1,348</b>	<b>(3,437)</b>

- h. (Kenaikan)/penurunan  
asuransi

pada      liabilitas      h. *(Increase)/decrease in insurance liabilities*

<i>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,</i>		
	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Rupiah	(286)	938
Mata uang asing	(2,904)	2,041
<b>Total</b>	<b>(3,190)</b>	<b>2,979</b>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**10. Asuransi dan Penjaminan (lanjutan)**

*i. Informasi signifikan lainnya*

**Program Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional**  
Dampak dari Pandemi Covid-19 yang muncul di Indonesia sejak bulan Maret 2020 membuat Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (UU No 2/2020). Pasal 11 Lampiran UU No 2/2020 mengatur bahwa salah satu program yang dapat dilakukan untuk pemulihran ekonomi nasional adalah kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan Pemerintah.

Skema penjaminan sebagaimana yang disebutkan dalam UU No 2/2020 pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PP No 23/2020) yang telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 23/2020 (PP No 43/2020), dimana Pasal 18 ayat (1) PP No 43/2020 mengatur bahwa dalam pelaksanaan penjaminan oleh Pemerintah, Pemerintah dapat menugaskan LPEI dan/atau PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) untuk melakukan Penjaminan.

**10. Insurance and Guarantee (continued)**

*i. Other significant information*

**Government Guarantee Program in the Context of National Economic Recovery**  
*The impact of the Covid-19 Pandemic that has emerged in Indonesia since March 2020 has made the Government stipulated a Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and/or in the Context of Facing Threats that endanger the National Economy and/or Financial System Stability which has been approved by the House of Representatives (DPR) to be later ratified as Law No. 2 of 2020 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2020 on State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and/or in the Context of Facing Threats that endanger the National Economy and/or Financial System Stability into Law (Law No 2/2020). Article 11 of Attachment to Law No. 2/2020 stipulates that one of the programs that can be carried out for national economic recovery is a guarantee activity with a scheme set by the Government.*

*The implementation of the guarantee scheme as stated in Law No. 2/2020 is further regulated in Government Regulation No. 23 of 2020 concerning Implementation of the National Economic Recovery Program in order to Support State Financial Policy for Handling the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic and/or Facing Threats That Endanger the National Economy and/or Financial System Stability and Saving the National Economy (Government Regulation No 23/2020) which has been amended by Government Regulation Number 43 of 2020 concerning Amendment to Government Regulation Number 23/2020 (Government Regulation No 43/2020), where Article 18 paragraph (1) of Government Regulation No. 43/2020 regulates that in the implementation of guarantee by Government, the Government may assign LPEI and/or PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) to carry out Guarantee.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**10. Asuransi dan Penjaminan (lanjutan)**

**i. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penjaminan sebagaimana dimaksud pada PP 43/2020 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan (PMK No. 98/2020) yang telah diubah dengan PMK Nomor 32/PMK.08/2021 tentang Perubahan atas PMK No. 98/2020 (PMK No 32/2021). Pasal 6 PMK No 98/2020 mengatur bahwa dalam rangka melaksanakan Penjaminan Pemerintah, Menteri menugaskan LPEI untuk memberikan Penjaminan Pemerintah serta dapat menugaskan LPEI untuk melakukan Penjaminan Bersama dengan PT. PII.

Penugasan atas pelaksanaan Penjaminan Pemerintah tersebut kemudian ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 599/KMK.08/2020 tentang Penugasan Kepada LPEI dalam Melaksanakan Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam rangka Pelaksanaan Program PEN (KMK No. 599/2020).

Berdasarkan KMK No. 599/2020 tersebut, LPEI ditugaskan untuk memberikan penjaminan pemerintah kepada pelaku usaha dengan kriteria yang memenuhi strategi pembiayaan ekspor nasional. LPEI dapat memberikan penjaminan kepada pelaku usaha yang kriteria pelaku usahanya tidak dapat dijamin LPEI secara sendiri dan/atau kapasitas penjaminan LPEI mendekati batas maksimal sesuai peraturan perundang-undangan dengan cara melakukan penjaminan bersama dengan PT PII, dengan ketentuan LPEI menanggung porsi retensi paling tinggi sebesar 49% (empat puluh sembilan persen). Pada pelaksanaannya atas Penjaminan bersama, LPEI menanggung porsi retensi sebesar 20% (dua puluh persen).

**10. Insurance and Guarantee (continued)**

**i. Other significant information (continued)**

*Further provision regarding Guarantee Procedures as referred to in Government Regulation 43/2020 is regulated by Regulation of Minister of Finance Number 98/PMK.08/2020 regarding Government Guarantee Procedures for Corporate Business Players through Guarantee Business Entity (Regulation of Minister of Finance No. 98/2020) which has been amended by Regulation of Minister of Finance Number 32/PMK.08/2021 regarding Amendment to Regulation of Minister of Finance No. 98/2020 (Regulation of Minister of Finance No 32/2021). Article 6 of Regulation of Minister of Finance No 98/2020 regulates that in order to implement Government Guarantee, the Minister assigns LPEI to provide Government Guarantee and may assign LPEI to carry out Joint Guarantee with PT. PII.*

*The assignment for the implementation of Government Guarantee is then stipulated in Decree of Minister of Finance Number 599/KMK.08/2020 concerning Assignment to LPEI in Implementing Government Guarantees for Corporate Business Players in the Implementation of PEN Program (Decree of Minister of Finance No. 599/2020).*

*Based on the Decree of Minister of Finance No. 599/2020, LPEI is assigned to provide government guarantee to business players with criteria that meet the national export financing strategy. LPEI may provide guarantees to business players whose criteria for business actors cannot be guaranteed by LPEI itself and/or guarantee capacity of LPEI approaching the maximum limit in accordance with the laws and regulations by way of joint guarantee with PT PII, provided that LPEI bears the highest retention portion of 49% (forty nine percent). In the implementation of Joint Guarantee, LPEI bears the retention portion of 20% (twenty percent).*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**10. Asuransi dan Penjaminan (lanjutan)**

*i. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)*

Dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Pemerintah oleh LPEI, pasal 11 PMK No. 98/2020 mengatur bahwa Pemerintah melalui Menteri dapat memberikan dukungan berupa loss limit, Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP) loss limit. Dukungan berupa loss limit ditujukan untuk membatasi risiko LPEI dalam melaksanakan penugasan Penjaminan Pemerintah pada kondisi tertentu yang diatur dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah melalui Menteri dan LPEI. Lebih lanjut dukungan loss limit diatur dalam perjanjian kerja sama nomor PRJ-291/PR/2020 dan 314/PKS/07/2020 antara Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko (DJPPR) dengan LPEI bahwa dukungan loss limit diberikan dengan threshold loss limit sebesar 85% dari akumulasi IJP yang diterima.

Sebagai Penjamin dalam pelaksanaan Penjaminan Pemerintah, LPEI telah menerima PMN sebesar Rp5 Triliun. Penyertaan modal negara ini merupakan bagian dari dana penugasan khusus dalam melaksanakan penugasan Penjaminan Pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha penjaminan LPEI dan sebagai likuiditas yang dapat digunakan untuk pembayaran ketika terjadi klaim. Tujuan penggunaan PMN tersebut akan ditetapkan kembali ketika pertanggungan Penjaminan Pemerintah telah berakhir. Pelaksanaan program Penjaminan Pemerintah berakhir pada tanggal 17 Desember 2022 dengan masa pertanggungan Penjaminan Pemerintah akan berlangsung sampai dengan tanggal 15 Desember 2024.

**10. Insurance and Guarantee (continued)**

*i. Other significant information (continued)*

*In the context of implementing Government Guarantees by LPEI, Article 11 of Regulation of Minister of Finance No. 98/2020 stipulates that the Government through Minister may provide support in the form of loss limits, State Equity Participation (PMN) and Payment Guarantee Service Fees (IJP) loss limits. Support in the form of loss limits is intended to limit the risk of LPEI in carrying out Government Guarantee assignments under certain conditions stipulated in the cooperation agreement between the Government through Minister and LPEI. Furthermore, loss limit support is regulated in the cooperation agreement number PRJ-291/PR/2020 and 314/PKS/07/2020 between the Ministry of Finance through the Director General of Risk Financing Management (DJPPR) and LPEI that loss limit support is provided with a threshold loss limit of 85% of accumulated IJP received.*

*As a guarantor in the implementation of government guarantees, LPEI has received a State Equity Participation in the amount of Rp. 5 trillion. This state equity participation is part of the special assignment fund in carrying out Government Guarantee assignments with the aim of increasing the LPEI guarantee business capacity and as liquidity that can be used for payments when claims occur. The purpose of using the State Equity Participation will be redefined when the Government Guarantee coverage has ended. The implementation of the Government Guarantee program ends on 17 December 2022 with the period of coverage of the Government Guarantee will last until 15 December 2024.*

<u>31 Desember / December 31, 2021</u>		
<i>Outstanding Penjaminan</i>		<i>Guarantee Outstanding</i>
Penjaminan Sendiri oleh LPEI	3,290	<i>Self-Guarantee by LPEI</i>
Penjaminan bersama PT PII	1,558	<i>Joint Guarantee with PT PII</i>
<b>Total</b>	<b>4,848</b>	<b>Total</b>

Program Penjaminan Pemerintah yang dilakukan oleh LPEI, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

*The Government Guarantee Program implemented out by LPEI, is in accordance with applicable regulations*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**11. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi**

**a. Berdasarkan mata uang, jatuh tempo dan hubungan**

Perincian tagihan dan liabilitas akseptasi berdasarkan mata uang, jatuh tempo dan hubungan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021		31 Desember/ December 31, 2020	
	Tagihan akseptasi/ Acceptances receivable	Liabilitas akseptasi/ Acceptances payable	Tagihan akseptasi/ Acceptances receivable	Liabilitas akseptasi/ Acceptances payable
Rupiah				
Pihak berelasi (Catatan 38)				
Lebih dari 1 sampai 3 bulan	654	654	--	--
Lebih dari 3 sampai 6 bulan	2,306	2,306	--	--
Pihak ketiga				
Lebih dari 1 sampai 3 bulan	53,275	53,275	62,716	62,716
Lebih dari 3 sampai 6 bulan	244,636	244,636	354,351	354,351
	<b>300,871</b>	<b>300,871</b>	<b>417,067</b>	<b>417,067</b>
Dolar Amerika Serikat				
Pihak ketiga				
Sampai dengan 1 bulan	5,387	5,387	3,728	3,728
Lebih dari 1 sampai 3 bulan	16,255	16,255	13,785	13,785
Lebih dari 3 sampai 6 bulan	138,027	138,027	114,303	114,303
	<b>159,669</b>	<b>159,669</b>	<b>131,816</b>	<b>131,816</b>
Euro Eropa				
Pihak ketiga				
Lebih dari 1 tahun	--	--	13,844	13,844
	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>13,844</b>	<b>13,844</b>
Total	<b>460,540</b>	<b>460,540</b>	<b>562,727</b>	<b>562,727</b>
Cadangan kerugian penurunan nilai	<b>(1,910)</b>	<b>--</b>	<b>(4,310)</b>	<b>--</b>
<b>Neto</b>	<b>458,630</b>	<b>460,540</b>	<b>558,417</b>	<b>562,727</b>

Perincian tagihan dan liabilitas akseptasi berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

**11. Acceptances Receivable and Payable**

**a. By currency, maturity and relationship**

Acceptance's receivable and payable based on currencies, maturity and relationship are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021		31 Desember/ December 31, 2020	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional Amount in Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional Amount in Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
Rupiah		300,871		417,067
Mata uang asing				
Dolar Amerika Serikat	11,202,917	159,669	9,381,812	131,816
Euro Eropa	--	--	803,250	13,844
Total		460,540		562,727
Cadangan kerugian penurunan nilai	<b>(1,910)</b>		<b>(4,310)</b>	
<b>Neto</b>	<b>458,630</b>		<b>558,417</b>	

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**11. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi (lanjutan)**

**b. Tagihan dan liabilitas akseptasi Penugasan Khusus**

LPEI tidak memiliki tagihan dan liabilitas akseptasi terkait dengan Penugasan Khusus pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

**c. Berdasarkan kolektibilitas dan cadangan kerugian penurunan nilai**

Analisis atas perubahan nilai tercatat bruto dan perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

**11. Acceptances Receivable and Payable (continued)**

**b. Acceptances receivable and payable - National Interest Account**

*LPEI does not have acceptances receivable and payable regarding to NIA as of December 31, 2021 and 2020.*

**c. By collectibility and allowance for impairment losses**

*An analysis of the movement in the gross carrying amount and the movement in the allowance for*

	31 Desember/December 31, 2021			
	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Jumlah/ Total
Saldo awal	562,727	--	--	562,727
Perpindahan antar tahapan	--	--	--	--
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	--	--	--	--
Aset baru	460,540	--	--	460,540
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(562,727)	--	--	(562,727)
Penyesuaian mata uang asing	--	--	--	--
<b>Saldo akhir</b>	<b>460,540</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>460,540</b>

*Beginning balance*  
*Transfer within stages*  
*Net remeasurement of carrying value*  
*New assets originated*  
*Asset derecognized or repaid*  
*Foreign exchange adjustment*  
*Ending balance*

	31 Desember/December 31, 2020			
	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Jumlah/ Total
Saldo awal	657.217	1.072	--	658.289
Perpindahan antar tahapan	--	--	--	--
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(643.374)	(1.072)	--	(644.446)
Aset baru	548.883	--	--	548.883
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	--	--	--	--
Penyesuaian mata uang asing	--	--	--	--
<b>Saldo akhir</b>	<b>562.727</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>562.727</b>

*Beginning balance*  
*Transfer within stages*  
*Net remeasurement of carrying value*  
*New assets originated*  
*Asset derecognized or repaid*  
*Foreign exchange adjustment*  
*Ending balance*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**11. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi (lanjutan)**

**c. Berdasarkan kolektibilitas dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)**

Analisis atas Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021			
	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Total
Saldo awal	4,310	--	--	4,310
Perpindahan antar tahapan	--	--	--	--
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	--	--	--	--
Aset baru	1,910	--	--	1,910
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(4,322)	--	--	(4,322)
Total pembalikan tahun berjalan	(2,412)	--	--	(2,412)
Penyesuaian mata uang asing	12	--	--	12
<b>Saldo akhir</b>	<b>1,910</b>	--	--	<b>1,910</b>

*Beginning balance  
Transfer within stages  
Net remeasurement of carrying value  
New assets originated  
Asset derecognized or repaid  
Total reverse current year  
Foreign exchange adjustment  
Ending balance*

	31 Desember/ December 31, 2020			
	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Total
Saldo, 31 Desember 2019	--	--	--	--
Dampak penerapan awal PSAK 71	5.854	84	--	5.938
Saldo, 1 Januari 2020	5.854	84	--	5.938
Perpindahan antar tahapan	--	--	--	--
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(5.736)	(84)	--	(5.820)
Aset baru	4.192	--	--	4.192
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	--	--	--	--
Total pembalikan tahun berjalan	(1.544)	(84)	--	(1.628)
Penyesuaian mata uang asing	--	--	--	--
<b>Saldo akhir</b>	<b>4.310</b>	--	--	<b>4.310</b>

*Balance, 31 December 2019  
SFAS 71 first implementation impact  
Balance, 1 January 2020  
Transfer within stages  
Net remeasurement of loss allowance  
New assets originated  
Asset derecognized or repaid  
Total reverse current year  
Foreign exchange adjustment  
Ending balance*

Seluruh tagihan akseptasi yang dimiliki LPEI diklasifikasikan lancar pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutupi kemungkinan penurunan nilai tagihan akseptasi.

**11. Acceptances Receivable and Payable (continued)**

**c. By collectability and allowance for impairment losses (continued)**

*An analysis of the movement in the allowance for impairment are as follows:*

	31 Desember/ December 31, 2020			
	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Total
Saldo, 31 Desember 2019	--	--	--	--
Dampak penerapan awal PSAK 71	5.854	84	--	5.938
Saldo, 1 Januari 2020	5.854	84	--	5.938
Perpindahan antar tahapan	--	--	--	--
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(5.736)	(84)	--	(5.820)
Aset baru	4.192	--	--	4.192
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	--	--	--	--
Total pembalikan tahun berjalan	(1.544)	(84)	--	(1.628)
Penyesuaian mata uang asing	--	--	--	--
<b>Saldo akhir</b>	<b>4.310</b>	--	--	<b>4.310</b>

*As of December 31, 2021 and 2020, all LPEI acceptances receivable are classified as current.*

*The Bank's management believes that the allowance for impairment losses provided is adequate to cover any possible impairment on acceptance receivables.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**12. Biaya Dibayar Dimuka**

**12. Prepaid Expenses**

	<i>31 Desember / December 31,</i>		
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
Asuransi	9,812	9,953	<i>Insurance</i>
Sistem	5,027	2,022	<i>System</i>
Sewa	354	77	<i>Rent</i>
Profesional	310	--	<i>Professional</i>
Telekomunikasi	279	16	<i>Telecommunication</i>
<b>Total</b>	<b>15,782</b>	<b>12,068</b>	<b>Total</b>

**13. Aset Tetap**

**13. Premises and Equipment**

	<i>31 Desember/ December 31, 2021</i>					
	<i>Saldo awal/ Beginning balance</i>	<i>Penambahan/ Additions</i>	<i>Pengurangan/ Deductions</i>	<i>Reklasifikasi/ Reclassification</i>	<i>Saldo akhir/ Ending balance</i>	
<b>Harga perolehan</b>						
<b>Pemilikan langsung</b>						
Gedung	1,148,616	--	--	--	1,148,616	<i>Cost</i> <i>Direct ownership</i>
Peralatan dan perlengkapan						<i>Building</i>
kantor	346,975	2,620	(50,653)	8,719	307,661	<i>Office furniture</i>
Kendaraan bermotor	216	7,200	(65)	--	7,351	<i>and fixtures</i>
	<u>1,495,807</u>	<u>9,820</u>	<u>(50,718)</u>	<u>8,719</u>	<u>1,463,628</u>	<i>Motor vehicles</i>
Aset dalam penyelesaian	13,348	34,925	--	(8,719)	39,554	<i>Construction in progress</i>
Aset hak guna						<i>Right of use asset</i>
Gedung	14,980	1,727	(530)	--	16,177	<i>Building</i>
Kendaraan bermotor	8,260	-	(2,432)	--	5,828	<i>Motor vehicles</i>
Total	<u>1,532,395</u>	<u>46,472</u>	<u>(53,680)</u>	--	<u>1,525,187</u>	<i>Total</i>
<b>Akumulasi penyusutan</b>						
<b>Pemilikan langsung</b>						
Gedung	129,219	57,431	--	--	186,650	<i>Accumulated depreciation</i>
Peralatan dan perlengkapan						<i>Direct ownership</i>
kantor	230,326	44,056	(50,633)	--	223,749	<i>Building</i>
Kendaraan bermotor	194	615	(65)	--	744	<i>Office furniture</i>
	<u>359,739</u>	<u>102,102</u>	<u>(50,698)</u>	--	<u>411,143</u>	<i>and fixtures</i>
Aset hak guna						<i>Motor vehicles</i>
Gedung	3,385	5,046	(64)	--	8,367	<i>Right of use asset</i>
Kendaraan bermotor	2,923	1,222	(1,893)	--	2,252	<i>Building</i>
	<u>366,047</u>	<u>108,370</u>	<u>(52,655)</u>	--	<u>421,762</u>	<i>Motor vehicles</i>
<b>Nilai buku</b>	<b><u>1,166,348</u></b>				<b><u>1,103,425</u></b>	<b><i>Book value</i></b>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**13. Aset Tetap (lanjutan)**

**13. Premises and Equipment (continued)**

31 Desember/ December 31, 2020						
	Dampak Saldo awal/ Beginning balance	PSAK 73/ Impact of PSAK 73	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance
<b>Harga perolehan</b>						
<b>Pemilikan langsung</b>						<b>Cost</b>
Gedung	1,148,616	--	--	--	--	Building
Peralatan dan perlengkapan kantor	337,689	--	1,082	--	8,204	Office fixtures and fixtures
Kendaraan bermotor	216	--	--	--	--	Motor vehicles
	<b>1,486,521</b>	<b>--</b>	<b>1,082</b>	<b>--</b>	<b>8,204</b>	<b>1,495,807</b>
Aset dalam penyelesaian	20,432	--	1,120	--	(8,204)	Construction in progress
Aset hak guna						Right of use asset
Gedung	--	8,860	6,120	--	--	Building
Kendaraan bermotor	1,740	6,062	458	--	--	Motor vehicles
Total	<b>1,508,693</b>	<b>14,922</b>	<b>8,780</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1,532,395</b>
<b>Akumulasi penyusutan</b>						
<b>Pemilikan langsung</b>						<b>Accumulated depreciation</b>
Gedung	71,789	--	57,430	--	--	Building
Peralatan dan perlengkapan kantor	181,632	--	48,694	--	--	Office fixtures and fixtures
Kendaraan bermotor	177	--	17	--	--	Motor vehicles
	<b>253,598</b>	<b>--</b>	<b>106,141</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>359,739</b>
Aset hak guna						Right of use asset
Gedung	--	--	3,385	--	--	Building
Kendaraan bermotor	1,740	--	1,183	--	--	Motor vehicles
	<b>255,338</b>	<b>--</b>	<b>110,709</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>366,047</b>
<b>Nilai buku</b>	<b>1,253,355</b>					<b>Book value</b>

Beban penyusutan yang dibebankan pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp108.370 dan Rp110.709 (Catatan 26).

The depreciation expense for the year ended December 31, 2021 and 2020, amounted to Rp108,370 and Rp110,709, respectively (Note 26).

Rincian aset dalam penyelesaian per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Details of construction in progress as of December 31, 2021 and 2020, are as follows:

31 Desember/ December 31, 2021			
	Percentase penyelesaian/ Percentage of completion	Estimasi penyelesaian/ Estimated completion	
Total			
Aset dalam penyelesaian	<b>42,812</b>	68.14%	Desember/December 2022 Construction in progress
31 Desember/ December 31, 2020			
	Percentase penyelesaian/ Percentage of completion	Estimasi penyelesaian/ Estimated completion	
Total			
Aset dalam penyelesaian	<b>13,348</b>	95.18%	Maret/March 2021 Construction in progress

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**13. Aset Tetap (lanjutan)**

Pada tanggal - tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah masing-masing sebesar Rp86.368 dan Rp125.354.

Selama tahun 2021, LPEI telah melakukan penjualan aset tetap berupa furniture, perlengkapan kantor, hardware dan kendaraan bermotor dengan harga perolehan sebesar Rp53.680 dan pada tahun 2020 tidak terdapat penjualan aset.

Aset tetap diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan pihak ketiga. Untuk tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, LPEI menggunakan PT Asuransi Sinarmas dengan nilai pertanggungan sebesar Rp241 dan nihil. Pada 31 Desember 2021 dan 2020, LPEI menggunakan PT Asuransi Central Asia dengan nilai pertanggungan sebesar Rp138 dan Rp144. Pada 31 Desember 2021 LPEI menggunakan Asuransi Central Asia dengan nilai pertanggungan sebesar Rp215.760 dan 31 Desember 2020 menggunakan PT Askrindo Insurance dengan nilai pertanggungan sebesar Rp265.812. Pada 31 Desember 2021 dan 2020, LPEI menggunakan PT BRI Asuransi Indonesia dengan nilai pertanggungan sebesar Rp6.480 dan nihil. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Berdasarkan penelaahan Manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

LPEI menyewa beberapa aset termasuk gedung kantor, rumah dinas, dan kendaraan. Rata-rata masa sewa berdasarkan kontrak yang dimiliki LPEI adalah 2,5 tahun. LPEI juga memiliki sewa tertentu dengan masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa aset bernilai rendah. LPEI menerapkan pengecualian untuk sewa jangka pendek dan sewa bernilai rendah untuk sewa tersebut.

**13. Premises and Equipment (continued)**

*As of December 31, 2021 and 2020, the gross amount of fixed assets which have been fully depreciated and are still in use amounted to Rp86,368 and Rp125,354, respectively*

*During the year 2021, LPEI has sold fixed asset in the form of furniture, office equipment, hardware and vehicle with acquisition cost amounting to Rp53,680 and in 2020, there were no sale of premises and equipment.*

*Premises and equipment are covered by insurance against fire and other risks under certain package policies issued by third parties. As of December 31, 2021 and 2020, LPEI has obtained insurance coverage from PT Asuransi Sinarmas with sum insured amounting to Rp241 and RpNil. As of December 31, 2021 and 2020, LPEI has obtained insurance coverage from PT Asuransi Central Asia with sum insured amounting to Rp138 and Rp144. As of December 31, 2021 LPEI has obtained PT Asuransi Central Asia with sum insured amounting Rp215,760 and December 31, 2020, has obtained insurance coverage from PT Askrindo Insurance with sum insured amounting to Rp265,812. As of December 31, 2021 and 2020, LPEI has obtained insurance coverage from PT BRI Asuransi Indonesia with sum insured amounting to Rp6,480 and RpNil. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover losses arising from insured premises and equipment.*

*Based on Management's assessment, there are no events or changes in circumstances which may indicate any impairment in the value of premises and equipment as of December 31, 2021 and 2020.*

*LPEI leases several assets including office buildings, official houses, and vehicles. The average lease period based on the contracts held by LPEI is 2.5 years. LPEI also has certain leases with lease terms of 12 months or less and leases of low value assets. LPEI applies a license for short term leases and low value leases for these leases.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

#### 14. Aset Lain-lain

	<i>31 Desember / December 31,</i>		
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
<b>Rupiah</b>			<b>Rupiah</b>
Bunga yang masih akan diterima:			Accrued interest receivable:
Penempatan pada bank	18,831	23,404	Placements with banks
Efek-efek	1,967	1,967	Securities
Uang muka	12,453	11,952	Advances
Uang jaminan	1,040	1,038	Refundable deposits
Agunan yang diambil alih	126,989	149,399	Foreclosed assets
Lain-lain	6,563	9,735	Others
	<b>167,843</b>	<b>197,495</b>	
<b>Mata uang asing</b>			<b>Foreign currencies</b>
Bunga yang masih akan diterima:			Accrued interest receivable:
Penempatan pada bank	815	2,325	Placements with banks
Efek-efek	4,384	4,322	Securities
Uang muka	4	3,603	Advances
Lain-lain	9,138	17,018	Others
	<b>14,341</b>	<b>27,268</b>	
<b>Total</b>	<b>182,184</b>	<b>224,763</b>	<b>Total</b>

#### 15. Perpajakan

##### a. Pajak di bayar dimuka

	<i>31 Desember / December 31,</i>		
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
<b>Pajak penghasilan badan</b>			<b>Corporate income tax</b>
Tahun 2019	--	93,268	Year 2019
Tahun 2020	75,806	75,806	Year 2020
Tahun 2021	865	--	
<b>Total</b>	<b>76,671</b>	<b>169,074</b>	<b>Total</b>

##### b. Utang pajak

	<i>31 Desember / December 31,</i>		
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
PPh Pasal 21	7,814	6,167	Income Tax Article 21
PPh Pasal 22	99	2	Income Tax Article 22
PPh Pasal 23	302	178	Income Tax Article 23
PPh Pasal 26	2,923	4,950	Income Tax Article 26
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	1,798	354	Value Added Tax (VAT)
PPh Pasal 4(2)	14	13	Income Tax Article 4(2)
<b>Total</b>	<b>12,950</b>	<b>11,664</b>	<b>Total</b>

##### c. (Beban) manfaat pajak

	<i>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,</i>		
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
Pajak tangguhan	(21,643)	226,666	Deferred tax
<b>(Beban) manfaat pajak</b>	<b>(21,643)</b>	<b>226,666</b>	<b>Tax (expense) benefit</b>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**15. Perpajakan (lanjutan)**

**c. (Beban) manfaat pajak (lanjutan)**

Rekonsiliasi antara rugi/(laba) sebelum beban pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<i>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,</i>		
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
Laba sebelum beban pajak	409,039	61,722	<i>Income before tax expense</i>
Perbedaan waktu:			<i>Timing differences:</i>
Penyisihan/(pembalikan) cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif untuk pembentukan dan piutang dan pembentukan/piutang syariah	139,882	33,559	Provision for/(reversal of) impairment losses on earning assets
Penyisihan imbalan kerja	10,871	(8,586)	for financing and receivables and sharia financing/receivables
Penyusutan aset tetap	8,167	10,026	Provision for employee benefits
Estimasi klaim asuransi	1,241	(4,311)	Depreciation of premises and equipment
Estimasi klaim penjaminan	96	1,983	Estimated insurance claim
Penyisihan/cadangan kerugian piutang pembentukan garansi	32,917	497	Estimated guarantee claim
Estimasi klaim penjaminan HSS	--	(11,069)	Provision for/allowance for impairment guarantee financing receivables
Penyisihan/cadangan kerugian piutang tresuri	(16,110)	(18,872)	Estimated guarantee claim HSS
Penyisihan/cadangan kerugian piutang akseptasi	(2,400)	(1,628)	Provision for/allowance for impairment treasury
Penyisihan/cadangan kerugian piutang PEN	22,409	--	Provision for/allowance for impairment acceptance
	197,073	1,599	Provision for/allowance for impairment PEN
Perbedaan tetap:			<i>Permanent differences:</i>
Kenikmatan pegawai	33,452	23,476	Employees' benefits in kind
Hubungan masyarakat	3,125	2,185	Public relationship
Aktivitas karyawan	599	328	Employee activities
Jamuan dan representasi	1,037	1,255	Representation and entertainment
Lain-lain	10,930	20,882	Others
Penghasilan yang sudah dikenakan pajak final	49,143	48,126	
Taksiran laba fiskal kena pajak	(315,164)	(460,368)	<i>Income subject to final tax</i>
	340,091	(348,921)	<i>Estimated taxable income (fiscal loss)</i>
Beban pajak kini			<i>Current tax expense</i>
Dikurangi pajak penghasilan dibayar dimuka Pasal 25	--	(75,806)	<i>Less prepaid taxes</i>
dibayar dimuka Pasal 23	(864)	--	Article 25 Article 23
Lebih bayar tahun berjalan	(864)	(75,806)	Overpayment current year
Taksiran rugi fiskal tahun berjalan	--	(348,921)	<i>Estimated fiscal loss during the year</i>
Akumulasi rugi fiskal tahun sebelumnya			<i>Accumulated prior year's fiscal loss</i>
Tahun 2018	(309,885)	(309,885)	Year 2018
Tahun 2019	(4,770,892)	(4,784,669)	Year 2019
Tahun 2020	(348,917)	--	Year 2020
<b>Akumulasi rugi fiskal</b>	<b>(5,429,694)</b>	<b>(5,443,475)</b>	<b>Accumulated fiscal loss</b>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**15. Perpajakan (lanjutan)**

**c. (Beban) manfaat pajak (lanjutan)**

Klaim atas kelebihan pembayaran pajak bulan Desember 2021 sebesar Rp76.671 merupakan kelebihan pembayaran pajak tahun 2020 dan 2021 yang belum diterima.

Tarif pajak penghasilan LPEI menggunakan tarif pajak tunggal 22% untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 berdasarkan Undang-undang Harmonisasi Perpajakan No. 07 tahun 2021.

Pajak atas laba sebelum pajak berbeda dari nilai teoritis yang mungkin muncul apabila menggunakan rata-rata tertimbang tarif pajak terhadap laba dalam jumlah sebagai berikut:

	<i>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,</i>	
	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Laba sebelum beban pajak	409,039	61,722
Beban pajak penghasilan yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku	(89,989)	(13,579)
Pengaruh pajak atas beda tetap pada tarif pajak yang berlaku	58,525	90,693
Penyisihan atas aset pajak tangguhan	9,821	149,552
<b>(Beban) manfaat pajak</b>	<b>(21,643)</b>	<b>226,666</b>

*Income before tax expense  
Corporate income tax based on  
the prevailing tax rate  
Effect of tax on permanent  
differences with prevailing tax rate  
Allowance for deferred tax assets  
Tax (expense) benefit*

Taksiran penghasilan kena pajak tahun 2021 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilaporkan LPEI kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). LPEI telah melaporkan SPT tahun 2020 kepada KPP pada tanggal 30 April 2021.

**15. Taxes (continued)**

**c. Tax (expense) benefit (continued)**

*Claims for tax refund as of December 2021 amounting to Rp76,671 are 2020 and 2021 tax over payment which has not been received*

*LPEI's income tax rate is calculated using single tax rate of 22% for the fiscal years ended December 31, 2021 and 2020 based on Tax Harmonization Law No. 07 Year 2021.*

*The tax on profit before tax differs from the theoretical amount that would arise using the weighted average tax rate applicable to profits as follows:*

*Estimated taxable income in 2021 is consistent with Annual Tax Return (SPT) for corporate income tax reported by LPEI to Tax Office (KPP). LPEI has reported its SPT fiscal year 2020 to the tax office on April 30, 2021.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**15. Perpajakan (lanjutan)**

**d. Aset (liabilitas) pajak tangguhan neto**

	31 Desember/ December 31, 2021						<i>Liability for employee benefits Allowance for impairment losses on earning assets Estimated guarantee claim Unrealized gain on available-for-sale securities - net Estimated insurance claim Allowance for impairment losses on other guarantee receivables Allowance for impairment losses on guarantee receivables Premises and equipment Fiscal loss Allowance for impairment losses on treasury Allowance for impairment losses on acceptance Allowance for impairment losses on AYDA Net</i>	
	1 Januari/ January 1	Dibebankan ke laporan laba rugi/ Charged to profit or loss	(rugi) penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive (loss) income	Penyesuaian tarif pajak dari 20% ke 22% Tax rates adjustments from 20% to 22%	31 Desember/ December 31			
					Dikreditkan ke laporan (rugi) penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive (loss) income	31 Desember/ December 31		
Liabilitas atas imbalan kerja	36,512	2,391	(7,865)	3,651	34,689			
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	1,645,300	30,773	--	--	1,676,073			
Estimasi klaim penjaminan	1,943	21	--	--	1,964			
Laba yang belum direalisasi atau efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual - neto	(11,128)	--	3,663	--	(7,465)			
Estimasi klaim asuransi	304	273	--	--	577			
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain - lain	1,761	--	--	--	1,761			
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang garansi	1,593	7,242	--	--	8,835			
Aset tetap	3,335	1,797	--	--	5,132			
Rugi fiskal	1,108,858	(157,354)	--	88,706	1,040,210			
Cadangan kerugian penurunan nilai treasuri	4,032	(3,545)	--	--	487			
Cadangan kerugian penurunan nilai akseptasi	948	(528)	--	--	420			
Cadangan kerugian penurunan nilai AYDA	--	4,930	--	--	4,930			
<b>Neto</b>	<b>2,793,458</b>	<b>(114,000)</b>	<b>(4,202)</b>	<b>92,357</b>	<b>2,767,613</b>			

	31 Desember/ December 31, 2020						<i>Liability for employee benefits Allowance for impairment losses on earning assets Estimated guarantee claim Unrealized gain on available-for-sale securities - net Estimated insurance claim Allowance for impairment losses on other guarantee receivables Allowance for impairment losses on guarantee receivables Premises and equipment Fiscal loss Allowance for impairment losses on treasury Allowance for impairment losses on acceptance Others Net</i>
	1 Januari/ January 1	Saldo Awal PSAK 71/ SFAS 71	Penyesuaian tarif pajak dari 25% menjadi 22% Tax rate's adjustments From 25% to 22%	Dibebankan ke laporan laba rugi/ Charged to profit or loss	(rugi) penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive (loss) income	31 Desember/ December 31	
						Dikreditkan ke laporan (rugi) penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive (loss) income	31 Desember/ December 31
Liabilitas atas imbalan kerja	73,083	--	(14,616)	(1,717)	(20,238)	36,512	
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	359,515	1,501,753	(223,351)	7,383	--	1,645,300	
Estimasi klaim penjaminan	1,713	--	(206)	436	--	1,943	
Laba yang belum direalisasi atau efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual - neto	(4,415)	--	--	--	(6,713)	(11,128)	
Estimasi klaim asuransi	1,423	--	(171)	(948)	--	304	
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain - lain	2,001	--	(240)	--	--	1,761	
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang garansi	747	939	(202)	109	--	1,593	
Aset tetap	1,284	--	(154)	2,205	--	3,335	
Rugi fiskal	642,148	--	(77,058)	543,768	--	1,108,858	
Cadangan kerugian penurunan nilai tresuri	--	9,300	(1,116)	(4,152)	--	4,032	
Cadangan kerugian penurunan nilai akseptasi	--	1,484	(178)	(358)	--	948	
Lain-lain	2,768	--	(333)	(2,435)	--	--	
<b>Neto</b>	<b>1,080,267</b>	<b>1,513,476</b>	<b>(317,625)</b>	<b>544,291</b>	<b>(26,951)</b>	<b>2,793,458</b>	

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan seluruhnya dapat dipulihkan.

*Management believes that the deferred tax assets are fully realizable.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**15. Perpajakan (lanjutan)**

**e. Pemeriksaan pajak**

**Klaim atas kelebihan pembayaran pajak**

**1. Klaim kurang bayar PPN beserta bunga tahun pajak 2009**

Pada tanggal 13 April 2011, LPEI telah menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) PPN tahun 2009 dengan total seluruhnya sebesar Rp44.530 dengan rincian sebagai berikut:

	<b>Pokok/ Principal (Rp)</b>	<b>Denda/ Penalty (Rp)</b>	
Tahun pajak 2009			<i>Fiscal year 2009</i>
SKP PPN Masa September 2009			<i>TAL PPN September 2009</i>
No. 00153/207/09/051/11	7,019	2,667	No. 00153/207/09/051/11
SKP PPN Masa Oktober 2009			<i>TAL PPN October 2009</i>
No. 00154/207/09/051/11	6,894	2,482	No. 00154/207/09/051/11
SKP PPN Masa November 2009			<i>TAL PPN November 2009</i>
No. 00155/207/09/051/11	6,502	2,210	No. 00155/207/09/051/11
SKP PPN Masa Desember 2009			<i>TAL PPN December 2009</i>
No. 00156/207/09/051/11	8,337	2,669	No. 00156/207/09/051/11
STP PPN Masa September-Desember 2009			<i>TCL PPN September-December 2009</i>
No. 00085/107/09/051/11	--	5,750	No. 00085/107/09/051/11
<b>Total</b>	<b>28,752</b>	<b>15,778</b>	<b>Total</b>

Pada tanggal 5 Januari 2015, LPEI menerima lima salinan Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa pajak PPN tahun 2009. Pengadilan Pajak mengabulkan seluruhnya permohonan banding LPEI atas SKPKB PPN masa September 2009, Oktober 2009, November 2009, Desember 2009 dan mengabulkan seluruhnya surat gugatan atas STP PPN masa September sampai dengan Desember 2009, dengan rincian sebagai berikut:

<b>Nomor Putusan</b>	<b>Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang dibatalkan/ Tax Assesment Letter cancelled by Tax Court</b>	<b>Dana yang dikembalikan/ Tax Refund</b>	<b>Nomor Keputusan Pengadilan Pajak Tax Court Decision Number</b>
57515/PP/M.IVB/16/2014	SKP PPN Masa September 2009 No. 00153/207/09/051/11	9,686	57515/PP/M.IVB/16/2014
57516/PP/M.IVB/16/2014	SKP PPN Masa Oktober No. 00154/207/09/051/11	9,376	57516/PP/M.IVB/16/2014
57517/PP/M.IVB/16/2014	SKP PPN Masa November 2009 No. 00155/207/09/051/11	8,712	57517/PP/M.IVB/16/2014
57518/PP/M.IVB/16/2014	SKP PPN Masa Desember 2009 No. 00156/207/09/051/11	11,006	57518/PP/M.IVB/16/2014
57519/PP/M.IVB/16/2014	STP PPN Masa September Desember 2009 No. 00085/107/09/051/11	5,750	57519/PP/M.IVB/16/2014
<b>Total</b>		<b>44,530</b>	<b>Total</b>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**15. Perpajakan (lanjutan)**

**e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)**

**Klaim atas kelebihan pembayaran pajak  
(lanjutan)**

**1. Klaim kurang bayar PPN beserta bunga  
tahun pajak 2009**

Pada tanggal 28 Januari 2015, LPEI menerima pengembalian dana dari kas negara sehubungan pembatalan SKPKB PPN Masa September sampai dengan Desember 2009 sebesar Rp38.780. Pada tanggal 18 Februari 2015, LPEI telah menerima pengembalian dana dari kas negara atas STP PPN masa September 2009 sampai dengan Desember 2009 sebesar Rp5.750.

Pada tanggal 16 Juni 2016, LPEI menerima empat surat dari Pengadilan Pajak tentang Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali atas perkara sengketa pajak PPN tahun 2009 yang terdiri dari:

Nomor Surat/ <i>Letter Number</i>	Nomor Surat Peninjauan Kembali Ditjen Pajak <i>No. Judicial Review Letter of Directorate General of Taxation</i>
MPK-1255T/PAN.Wk/2016	S- 1758/PJ.07/2015
MPK-1254T/PAN.Wk/2016	S- 1756/PJ.07/2015
MPK-1256T/PAN.Wk/2016	S- 1762/PJ.07/2015
MPK-1253T/PAN.Wk/2016	S- 1760/PJ.07/2015

Sehubungan dengan Surat Peninjauan Kembali di atas, LPEI telah memberikan jawaban berupa Kontra Memori Peninjauan Kembali atas Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung yang dikirimkan melalui Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Juli 2016.

Pada tanggal 19 Oktober 2016, LPEI menerima surat dari Pengadilan Pajak tentang Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali atas perkara sengketa pajak PPN masa November 2009.

**15. Taxes (continued)**

**e. Tax assesment (continued)**

**Claims for tax refund (continued)**

**1. Claims for underpayment of VAT and  
interest for fiscal year 2009**

On January 28, 2015, LPEI has received tax refund from the state treasury in respect of the cancellation of the tax Assesment from September to December 2009 amounting to Rp38,780. On February 18, 2015, LPEI received tax refund of from the State Treasury because of cancellation VAT sanction (STP PPN) from September 2009 to December 2009 amounting to Rp5,750.

On June 16, 2016, LPEI has received four letters from the Tax Court about Judicial Review of Tax Court Decision on tax dispute case of VAT in 2009. The Judicial Review Letter from Directorate General of Tax is consist of:

Nomor Surat/Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang dibatalkan oleh Pengadilan Pajak <i>No. Judicial Review Letter of Directorate General of Taxation</i>	Nomor Keputusan Pengadilan Pajak/ <i>Tax Court Decision Number</i>
SKPKB PPN Masa September 2009 No. 00153/207/09/051/11	MPK-1255T/PAN.Wk/2016
SKPKB PPN Masa Oktober 2009 No. 00154/207/09/051/11	MPK-1254T/PAN.Wk/2016
SKPKB PPN Masa Desember 2009 No. 00156/207/09/051/11	MPK-1256T/PAN.Wk/2016
STP PPN Masa September - Desember 2009 No. 00085/107/09/051/11	MPK-1253T/PAN.Wk/2016

In connection with the above Judicial Review Letter, LPEI has provided an answer in the form of a Counter Memorandum which was submitted to the Supreme Court through the Tax Court on July 13, 2016.

On October 19, 2016, LPEI has received letter from the Tax Court about Judicial Review of Tax Court Decision on Tax Dispute Cases of VAT for the period November 2009.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**15. Perpajakan (lanjutan)**

**e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)**

**Klaim atas kelebihan pembayaran pajak (lanjutan)**

**1. Klaim kurang bayar PPN beserta bunga tahun pajak 2009 (lanjutan)**

Nomor Surat/ Letter Number	No. Surat Peninjauan Kembali Direktorat Pajak/ No. Judicial Review Letter of Directorate General of Taxation
MPK 1462T/PAN.Wk/2016	S-1761/PJ.07/2015

Pada tanggal 10 September 2019, LPEI menerima surat dari Pengadilan Pajak tentang Putusan Mahkamah Agung atas perkara sengketa pajak PPN masa November 2009 sebagai berikut:

Nomor Putusan Mahkamah Agung/ Supreme Court of Indonesia decision Number	No. Surat Peninjauan Kembali Direktorat Pajak/ No. Judicial Review Letter of Directorate General of Taxation
1578/B/PK/Pjk/2019	S- 1761/PJ.07/2015

Putusan Mahkamah Agung No. 1578/B/PK/Pjk/2019 tanggal 19 Juni 2019 memutuskan menolak Peninjauan Kembali Direktorat Jenderal Pajak No.Put-57517/PP/M.IVB/16/2014 tanggal 20 November 2014 tentang Surat Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai masa Pajak November 2009.

Pada tanggal 9 Januari 2020, LPEI menerima Putusan Mahkamah Agung No. 3719/B/PK/Pjk/2019 tanggal 28 Oktober 2019 memutuskan menolak Peninjauan Kembali Direktorat Jenderal Pajak No. Put-57519/PP/M.IVB/99/2014 tanggal 20 November 2014 tentang Surat Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai masa Pajak September sampai Desember 2019.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**15. Taxes (continued)**

**e. Tax assesment (continued)**

**Claims for tax refund (continued)**

**1. Claims for underpayment of VAT and interest for fiscal year 2009 (continued)**

Dana yang dikembalikan/ Tax Refund	Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang Dibatalkan oleh Pengadilan/Tax Assesment Letter Cancelled by Tax Court
8,713	SKPKB PPN Masa November 2009 No. 00155/207/09/051/11

*On September 10, 2019, LPEI has received a letter from Tax Court about Supreme Court Decision on VAT tax dispute case November 2009 as follows:*

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang dibatalkan oleh Pengadilan Pajak/Tax Assesment Letter cancelled by Tax Court	Nomor keputusan pengadilan pajak/ Tax court decision Number
SKPKB PPN Masa November 2009 No. 00155/207/09/051/11	57517/PP/M.IVB/16/2014

*Supreme Court of Indonesia Decision number 1578/B/PK/Pjk/2019 dated June 19, 2019 has decided to refuse Judicial Review of Directorate General of Taxation number 57517/PP/M.IVB/16/ 2014 dated November 20, 2014 regarding Tax Assesments Letter of VAT for the period November 2009.*

*On January 9, 2020, LPEI received Indonesia Supreme Court Decision number 3719/B/PK/Pjk/2019 dated October 28, 2019 and has decided to refuse Judicial Review Directorate General of Taxation No.Put-57519/PP/M.IVB/99/2014 dated November 20, 2014 regarding Tax Assesments Letter of VAT for the period from September until December 2019.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**15. Perpajakan (lanjutan)**

**e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)**

**Klaim atas kelebihan pembayaran pajak  
(lanjutan)**

**2. Surat keputusan DJP PPh 25/29 tahun  
pajak 2010**

LPEI mengajukan permohonan restitusi  
lebih bayar tahun pajak 2010 sebesar  
Rp124.075. Dalam Surat Ketetapan  
Pajak Lebih Bayar  
No.00013/406/10/093/12 tanggal 26  
April 2012. Direktorat Jenderal Pajak  
menetapkan pengembalian kepada  
LPEI sebesar Rp52.240.

Selisih antara permohonan restitusi  
lebih bayar tahun pajak 2010 dengan  
SKP disebabkan karena koreksi  
cadangan kerugian penurunan nilai  
pembiayaan dan piutang tahun pajak  
2010 sebesar Rp71.835.

LPEI telah mengajukan permohonan  
keberatan dan banding sebesar  
Rp71.835 terkait cadangan kerugian  
penurunan nilai pembiayaan dan  
piutang yang diperbolehkan untuk  
dibayangkan.

Pada tanggal 30 Maret 2015, LPEI  
menerima Putusan Pengadilan Pajak  
atas sengketa pajak PPh Badan Tahun  
2010  
nomor Put.59987/PP/M.IVB/15/2015  
yang diumumkan tanggal 5 Maret 2015.  
Pengadilan Pajak Republik Indonesia  
mengabulkan seluruhnya permohonan  
banding LPEI atas SKPLB PPh Badan  
Tahun 2010 dengan rincian sebagai  
berikut:

Nomor keputusan Pengadilan pajak	Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang dibatalkan/ Tax Assesment Letter canceled by Tax Court	Dana yang dikembalikan/ Tax Refund	Tax Court Decision Number
Put.59987/PP/M.IVB/15/2015	SKPLB PPh Badan Tahun 2010 Nomor 00013/406/10/093/12	75,508	Put.59987/PP/M.IVB/15/2015

Pada tanggal 27 April 2015, LPEI telah  
menerima pengembalian dana dari kas  
negara sehubungan Putusan  
Pengadilan Pajak atas SKPLB PPh  
Badan tahun 2010 sebesar Rp75.508  
(sebelumnya LPEI mencatat klaim atas  
kelebihan pembayaran pajak sebesar  
Rp71.835). Selisih sebesar Rp3.673,  
diakui sebagai penghasilan lain- lain.

**15. Taxes (continued)**

**e. Tax assesment (continued)**

**Claims for tax refund (continued)**

**2. DGT decision letter Income Tax  
Article 25/29 fiscal year 2010**

LPEI submitted the overpayment tax  
refund for fiscal year 2010 amounting to  
Rp124,075. In the Tax Assesment Letter  
No. 00013/406/10/093/12 dated April  
26, 2012. The Directorate General of  
Taxation has decided the tax refund to  
LPEI amounting to Rp52,240.

The difference in the overpayment of tax  
refund for fiscal year 2010 with SKP is  
due to the correction of allowance of  
impairment losses financing and  
receivables in fiscal year 2010  
amounting to Rp71,835.

LPEI has filed the tax objection and tax  
appeal amounting to Rp71,835  
regarding the correction of allowance of  
impairment losses financing and  
receivables.

On March 30, 2015 LPEI has received  
copies of the Tax Court decision on  
corporate income tax year 2010 number  
Put.59987/PP/M.IVB/15/2015 which was  
pronounced on March 5, 2015. Tax  
Court Republic of Indonesia granted the  
appeal of LPEI entirely on corporate  
income tax disputes in 2010, with details  
as follows:

On April 27, 2015, LPEI has received a  
refund from the state treasury in respect  
of the Tax Court Decision on  
overpayment of 2010 Corporate Income  
Tax amounting to Rp75,508 (previously  
LPEI recorded Tax Return Claim  
amounting to Rp71,835). The difference  
of Rp3,673, has been recognized as  
other income.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**15. Perpajakan (lanjutan)**

**e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)**

**Klaim atas kelebihan pembayaran pajak  
(lanjutan)**

**2. Surat keputusan DJP PPh 25/29 tahun  
pajak 2010 (lanjutan)**

Pada tanggal 1 Juli 2016, LPEI menerima surat dari Pengadilan Pajak tentang Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali atas perkara sengketa pajak PPh Badan tahun 2010 yang terdiri dari:

Nomor Surat / Letter Number	No. Surat Peninjauan Kembali Direktorat Pajak/ No. Judicial Review Letter of Directorate General of Taxation
MPK-2119T/PAN.Wk/2016	S- 3566/PJ.07/2015

Sehubungan dengan Surat Peninjauan Kembali diatas. LPEI telah memberikan jawaban berupa Kontra Memori Peninjauan Kembali yang dikirimkan melalui Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Juli 2016.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan 31 Desember 2021, LPEI belum menerima Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Putusan Pengadilan Pajak PPh Badan tahun 2010.

**3. Surat keputusan DJP PPN tahun  
pajak 2010**

Pada tanggal 26 April 2012, LPEI telah menerima beberapa SKP dan STP PPN dengan total seluruhnya sebesar Rp34.283 dengan rincian sebagai berikut:

**15. Taxes (continued)**

**e. Tax assessment (continued)**

**Claims for tax refund (continued)**

**2. DGT decision letter Income Tax  
Article 25/29 fiscal year 2010  
(continued)**

*On July 1, 2016, LPEI has received a letter from the Tax Court about Judicial Review of Tax Court Decision on Tax Dispute Cases of Corporate Income Tax 2010 submitted by Directorate General of Taxes.*

Nomor keputusan pengadilan pajak/ Tax Court Decision Number	Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang dibatalkan oleh Pengadilan Pajak/Tax Assessment Letter cancelled by Tax Court	No. Surat Peninjauan Kembali Direktorat Pajak/ No. Judicial Review Letter of Directorate General of Taxation
59990/PP/M.IVB/16/2015 No. 00013/406/10/093/12	SKPLB PPh tahun 2010 No. 00013/406/10/093/12	MPK-2119T/PAN.Wk/2016

*In connection with the Judicial Review Letter. LPEI has provided an answer in the form of a Counter Memorandum which was submitted to the Supreme Court through the Tax Court on July 28, 2016.*

*Until the date of completion of the financial statement as of September 30, 2020, LPEI has not received the Supreme Court Decision of the Judicial Review of Tax Court Decision on Tax Dispute Case of Corporate Income Tax 2010 proposed by the Directorate General of Taxes.*

**3. DGT decision letter VAT fiscal year  
2010**

*On April 26, 2012, LPEI has received several TALS and TCL of VAT amounting to Rp34,283 as follows:*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**15. Perpajakan (lanjutan)**

**e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)**

**Klaim atas kelebihan pembayaran pajak (lanjutan)**

**3. Surat keputusan DJP PPN tahun pajak 2010 (lanjutan)**

<b>Pokok/ Principal (Rp)</b>	<b>Denda/ Penalty (Rp)</b>	<i>Fiscal year 2010</i>
Tahun pajak 2010		<i>TAL PPN January 2010</i>
SKP PPN Masa Januari 2010		No. 00068/207/10/093/12
No. 00068/207/10/093/12	7,201	<i>TAL PPN February 2010</i>
SKP PPN Masa Februari 2010		No. 00069/207/10/093/12
No. 00069/207/10/093/12	5,433	<i>TAL PPN March 2010</i>
SKP PPN Masa Maret 2010		No. 00070/207/10/093/12
No. 00070/207/10/093/12	7,772	<i>TCL PPN January 2010</i>
STP PPN Masa Januari 2010		No. 00037/107/10/093/12
No. 00037/107/10/093/12	--	<i>TCL PPN February 2010</i>
STP PPN Masa Februari 2010		No. 00038/107/10/093/12
No. 00038/107/10/093/12	--	<i>TCL PPN March 2010</i>
STP PPN Masa Maret 2010		No. 00039/107/10/093/12
No. 00039/107/10/093/12	--	
<b>Total</b>	<b>20,406</b>	<b>13,877</b>
		<b>Total</b>

LPEI mengajukan keberatan dan banding atas penetapan SKPKB PPN tahun pajak 2010, karena atas pendapatan bunga dari pemberian pinjaman kepada debitur tidak terhutang PPN sesuai UU PPN No. 18 tahun 2000.

Pada tanggal 30 Maret 2015, LPEI menerima Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa pajak PPN masa pajak Januari 2010, Februari 2010 dan Maret 2010 dengan putusan mengabulkan seluruhnya permohonan banding LPEI atas SKPKB PPN masa Januari sampai dengan Maret 2010 dengan rincian sebagai berikut:

*LPEI appealed against the assesment of underpayment of VAT in fiscal year 2010, because the interest income from financing and receivables to debtors is not subject to VAT according to VAT Law No. 18 year 2000.*

*On March 30, 2015, LPEI has received the Tax Court decision on the dispute for VAT tax period in January 2010, February 2010 and March 2010 with the decision to approve entirely the appeal of LPEI on the tax Assesment over the period from January to March 2010 with the following details:*

<b>Nomor keputusan Pengadilan pajak</b>	<b>Surat Ketetapan yang dibatalkan/ Tax Assesment Letter cancelled by Tax Court</b>	<b>Dana yang dikembalikan/ Tax Refund</b>	<b>Tax court decision number</b>
59988/PP/M.IVB/16/2014	SKPKB PPN Masa Januari 2010 No. 00068/207/10/093/12	10,658	59988/PP/M.IVB/16/2014
59989/PP/M.IVB/16/2014	SKPKB PPN Masa Februari 2010 No. 00069/207/10/093/12	8,041	59989/PP/M.IVB/16/2014
59990/PP/M.IVB/16/2014	SKPKB PPN Masa Maret 2010 No. 00070/207/10/093/12	11,503	59990/PP/M.IVB/16/2014
<b>Total</b>		<b>30,202</b>	<b>Total</b>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**15. Perpajakan (lanjutan)**

**e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)**

**Klaim atas kelebihan pembayaran pajak (lanjutan)**

**3. Surat keputusan DJP PPN tahun pajak 2010 (lanjutan)**

Pada tanggal 27 April 2015, LPEI telah menerima pengembalian dana dari kas negara sehubungan pembatalan SKPKB PPN Masa Januari sampai dengan Maret 2010 sebesar Rp30.202.

Sehubungan perkara sengketa pajak PPN masa Januari 2010, Februari 2010 dan Maret 2010 telah dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Pajak, maka sesuai dengan pasal 34 Putusan Menteri Keuangan nomor PMK. 8/PMK.03/2013 maka atas STP PPN secara otomatis akan dibatalkan secara jabatan oleh Kantor Pajak.

Pada tanggal 17 September 2015, LPEI menerima Surat Keputusan Pembatalan STP secara jabatan dari Direktorat Jenderal Pajak dengan rincian sebagai berikut:

<b>Nomor Surat / Letter Number</b>	<b>Surat Tagihan Pajak yang dibatalkan Pengadilan Pajak/ (Tax Assesment Letter canceled by Tax Court)</b>
Kep 1673/WPJ.19/2015	STP PPN Masa Januari 2010 No. 00037/107/10/093/12
Tanggal 15-09-2015	STP PPN Masa Februari 2010 No. 00038/107/10/093/12
Kep-1674/WPJ.19/2015	STP PPN Masa Maret 2010 No. 00039/107/10/093/12
Tanggal 15-09-2015	
Kep-1675/WPJ.19/2015	
Tanggal 15-09-2015	

Pada tanggal 1 Juli 2016, LPEI menerima surat dari Pengadilan Pajak tentang Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali atas perkara sengketa pajak PPN tahun 2010 yang terdiri dari:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**15. Taxes (continued)**

**e. Tax assesment (continued)**

**Claims for tax refund (continued)**

**3. DGT decision letter VAT fiscal year 2010 (continued)**

*On April 27, 2015, the LPEI has received a refund from the state treasury in respect of the cancellation of the tax Assesment period from January to March 2010 amounting to Rp30,202.*

*In respect of past VAT tax dispute case in January 2010, February 2010 and March 2010 had been granted entirely by the Tax Court, then in accordance with article 34 of Decision of the Minister of Finance number PMK.8/PMK.03/2013, the sanction (STP) of Value Added Tax automatically canceled by the office of the Tax Office.*

*On September 17, 2015, LPEI has received a Letter of Cancellation of STP PPN from Directorate General of Taxation with the following details:*

<b>Jumlah nominal/ Nominal amount</b>	<b>Nomor keputusan pengadilan pajak/ Tax Court Decision Number</b>
1,440	59988/PP/M.IVB/16/2014
1,087	59989/PP/M.IVB/16/2014
1,554	59990/PP/M.IVB/16/2014
<b>4,081</b>	

*On July 1, 2016, LPEI has received a letter from the Tax Court about Judicial Review of Tax Court Decision on tax dispute case in 2010 of VAT. The Judicial Review from Directorate General of Tax consists of:*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**15. Perpajakan (lanjutan)**

**e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)**

**Klaim atas kelebihan pembayaran pajak  
(lanjutan)**

**3. Surat keputusan DJP PPN tahun  
pajak 2010 (lanjutan)**

<b>Nomor Surat / Letter Number</b>	<b>No. Surat Peninjauan Kembali Direktorat Pajak/ No. Judicial Review Letter of Directorate General of Taxation</b>	<b>Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang dibatalkan oleh Pengadilan Pajak/Tax Assesment Letter cancelled by Tax Court</b>	<b>Nomor keputusan pengadilan pajak/ Tax court decision Number</b>
MPK-2116T/PAN.Wk/2016	S- 3563/PJ.07/2015	SKPKB PPN Masa Maret 2010 No. 00070/207/10/093/12	59987/PP/M.IVB/15/2015

Sehubungan dengan Surat Peninjauan Kembali diatas, LPEI telah memberikan jawaban berupa Kontra Memori Peninjauan Kembali atas Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung yang dikirimkan melalui Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Juli 2016. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, LPEI belum menerima Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak atas kasus sengketa pajak PPh Badan dan PPN tahun 2010 yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, LPEI belum menerima Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak atas kasus sengketa pajak PPN Masa Maret tahun 2010 yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pada tanggal 4 September 2017, LPEI menerima surat dari Pengadilan Pajak tentang Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali atas perkara sengketa pajak PPN Masa Pajak Februari 2010.

*In connection with the above Judicial Review Letter, LPEI has provided an answer in the form of a Counter Memorandum which was submitted to the Supreme Court through the Tax Court on July 28, 2016. Until the date of the finalization of this financial statements, LPEI has not received the Supreme Court Decision of the Judicial Review of Tax Court Decision on tax dispute case of Corporate Income Tax and VAT in 2010 proposed by the Directorate General of Taxes.*

*Until the date of the finalization of this financial statements, LPEI has not received the Supreme Court Decision of the Judicial Review of Tax Court Decision on tax dispute case of VAT March 2010 proposed by the Directorate General of Taxes.*

*On September 4, 2017, LPEI has received letter from the Tax Court about Judicial Review of Tax Court Decision on Tax Dispute Cases of VAT for Period February 2010.*

<b>Nomor Surat / Letter Number</b>	<b>No. Surat Peninjauan Kembali Direktorat Pajak/ No. Judicial Review Letter of Directorate General of Taxation</b>	<b>Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang dibatalkan oleh Pengadilan Pajak/Tax Assesment Letter cancelled by Tax Court</b>	<b>Nomor keputusan pengadilan pajak/ Tax Court Decision Number</b>
MPK-2118/PAN/2017	S- 3573/PJ.07/2015	SKPKB PPN Masa Februari 2010 No. 00069/207/10/093/12	59989/PP/M.IVB/16/2015

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**15. Perpajakan (lanjutan)**

**e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)**

**Klaim atas kelebihan pembayaran pajak (lanjutan)**

**3. Surat keputusan DJP PPN tahun pajak 2010 (lanjutan)**

Sehubungan dengan Surat Peninjauan Kembali diatas, LPEI telah memberikan jawaban berupa Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Februari 2019.

Pada tanggal 20 Mei 2021, LPEI menerima Putusan Mahkamah Agung No. 477/B/PK/Pjk/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang memutuskan menolak Peninjauan Kembali Direktorat Jenderal Pajak No. Put-59989/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Surat Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai masa Pajak Februari 2010.

Pada tanggal 28 Januari 2019, LPEI menerima surat dari Pengadilan Pajak tentang Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali atas perkara sengketa pajak PPN Masa Pajak Januari 2010.

Nomor Surat / Letter Number	No. Surat Peninjauan Kembali Direktorat Pajak/ No. Judicial Review Letter of Directorate General of Taxation	Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang dibatalkan oleh Pengadilan Pajak/Tax Assesment Letter cancelled by Tax Court	Nomor keputusan pengadilan pajak/ Tax Court Decision Number
MPK-2117/PAN.Wk/2019	S- 3574/PJ.07/2015	SKPKB PPN Masa Januari 2010 No. 00068/207/10/093/12	59988/PP/M.IVB/16/2015

Sehubungan dengan Surat Peninjauan Kembali diatas, LPEI telah memberikan jawaban berupa Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Februari 2019.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, LPEI belum menerima Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas Putusan Pengadilan Pajak terhadap sengketa PPN Masa Januari 2010.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**15. Taxes (continued)**

**e. Tax assesment (continued)**

**Claims for tax refund (continued)**

**3. DGT decision letter VAT fiscal year 2010 (continued)**

*In connection with the Judicial Review Letter, LPEI has provided an answer in the form of a Counter Memorandum which was submitted to the Supreme Court through the Tax Court on February 25, 2019.*

*On May 2021, LPEI received Indonesia Supreme Court Decision number 477/B/PK/Pjk/2021 dated March 18, 2021 and the Supreme Court has decided to refuse Judicial Review Directorate General of Taxation No.Put-59989/PP/M.IVB/16/2015 dated March 5, 2015 regarding Tax Assesments Letter of VAT for the period Februari 2010.*

*On Januari 28,2019, LPEI has received letter from the Tax Court about Judicial Review of Tax Court Decision on Tax Dispute Cases of VAT for Period Januari 2010.*

*In connection with the Judicial Review Letter, LPEI has provided an answer in the form of a Counter Memorandum which was submitted to the Supreme Court through the Tax Court on February 25, 2019.*

*Until the date of completion of the financial statements, LPEI has not received the Supreme Court Decision of the Judicial Review of Tax Court Decision on Tax Dispute Case of VAT January 2010 proposed by the Directorate General of Taxes.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**15. Perpajakan (lanjutan)**

**e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)**

**Klaim atas kelebihan pembayaran pajak  
(lanjutan)**

**4. Hasil Pemeriksaan Pajak PPh Badan  
Tahun 2018**

SPT Tahunan PPh badan tahun 2018 yang dilaporkan oleh LPEI adalah lebih bayar pajak penghasilan badan.

Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 7 Agustus 2019, LPEI menerima Surat Perintah Pemeriksaan Pajak untuk seluruh jenis pajak tahun pajak 2018 dari Direktorat Jenderal Pajak.

Melalui Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tanggal 17 April 2020, Direktorat Jenderal Pajak mengabulkan permohonan lebih bayar LPEI tahun 2018 sebesar Rp246.357. Namun demikian pengembalian atas lebih bayar tersebut dikurangi dengan pembayaran kurang bayar pajak PPh Pasal 22, PPh 4(2) dan PPN Barang dan Jasa atas barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dengan jumlah pengurangan total Rp30. sehingga jumlah uang yang dikembalikan ke LPEI adalah sebesar Rp246.327. Sedangkan hasil pemeriksaan pajak tahun 2018 atas PPh Pasal 21, 21 Final 23, 26, PPN dan PPN Pemungut adalah SKP Nihil.

Pada tanggal 26 Mei 2020, LPEI telah menerima transfer dari kas negara atas pengembalian pajak PPh Badan tahun 2018 sebesar Rp246.327.

Hasil Pemeriksaan Pajak PPh Badan Tahun 2018 dan rugi fiskal tahun 2018 yang diakui Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

	<b>Pengembalian Pajak Tax Return</b>	<b>Rugi Fiskal/ Fiscal Loss</b>	<b>Fiscal Year 2018 TAL Tax Return</b>
Tahun Pajak 2018			
SKPLB PPh Badan			
No. 00025/406/18/093/20	(246,357)	(309,885)	No. 00025/406/18/093/20
<b>Total</b>	<b>(246,357)</b>	<b>(309,885)</b>	<b>Total</b>

**15. Taxes (continued)**

**e. Tax assesment (continued)**

**Claims for tax refund (continued)**

**4. The Result of 2018 Corporate Income  
Tax**

The 2018 corporate income tax return reported by LPEI is an overpayment of corporate income tax.

Based on this, on August 7, 2019, LPEI received Tax Audit Warrants for all types of tax for the 2018 tax year from the Directorate General of Taxes.

Based on the Tax Overpayment Assesment Letter dated April 17, 2020, The Directorate General of Taxation approved LPEI's Claim 2018 for the tax overpayment amounting Rp246,357. However the tax overpayment was offset by the underpayment of tax articles 22, 4(2) and VAT on taxable intangible goods and services out of custom area with a total reduction Rp30. So the amount transferred to LPEI Rp246,327. Whereas the results of 2018 tax audits article 21,21 Final, 23, 26, VAT and VAT Collecting Tax are Zero Tax Assesment Letter.

On May 26, 2020, LPEI has received transfer from Government Treasury for 2018 Corporate Income Tax refund amounting to Rp246,327.

The result of 2018 Tax Overpayment Assesment Letter Corporate Income Tax and 2018 Fiscal Loss recognized by Directorate General of Taxation as follow:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**15. Perpajakan (lanjutan)**

**e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)**

**Klaim atas kelebihan pembayaran pajak  
(lanjutan)**

**5. Hasil Pemeriksaan Pajak PPh Badan  
Tahun 2019**

SPT Tahunan PPh badan tahun 2019 yang dilaporkan oleh LPEI adalah SPT lebih bayar pajak penghasilan Badan.

Pada tanggal 10 Agustus 2020, LPEI menerima Surat Perintah Pemeriksaan Pajak untuk seluruh jenis pajak tahun pajak 2019 dari Direktorat Jenderal Pajak.

Melalui Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tanggal 20 April 2021, Direktorat Jenderal Pajak mengabulkan permohonan lebih bayar LPEI tahun Pajak 2019 sebesar Rp93.267. Namun demikian pengembalian atas lebih bayar tersebut dikurangi dengan pembayaran kurang bayar pajak PPh Pasal 23, PPh 26 dan PPN Barang dan Jasa atas barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dengan jumlah pengurangan total Rp203. sehingga jumlah uang yang dikembalikan ke LPEI adalah sebesar Rp93.064. Sedangkan hasil pemeriksaan pajak tahun 2019 atas PPh Pasal 21, 21 Final 22, PPh Pasal 4 (2), PPN dan PPN Pemungut adalah SKP Nihil.

Pada tanggal 19 Mei 2021, LPEI menerima transfer dari kas negara atas pengembalian pajak PPh Badan tahun 2019 sebesar Rp93.062 setelah dikurangi utang pajak yang belum dibayar.

Hasil Pemeriksaan pajak PPh Badan Tahun 2019 dan Rugi fiskal tahun 2019 yang diakui Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

**15. Taxes (continued)**

**e. Tax assesment (continued)**

**Claims for tax refund (continued)**

**5. The Result of 2019 Corporate Income Tax**

*The 2019 corporate income tax reported by LPEI is an overpayment of corporate income tax.*

*On August 10, 2020, LPEI received Tax Audit Warrant for all types of tax for the 2019 tax year from the Directorate General of Taxes.*

*Based on the Tax Overpayment Assesment Letter dated April 20, 2020, The Directorate General of Taxation approved LPEI's Claim 2019 for the tax overpayment amounting Rp93,267. However, the tax overpayment was offset by the underpayment of tax articles 23, 26 and VAT on taxable intangible goods and services out of custom area with a total reduction Rp203. So the amount transferred to LPEI Rp93,064. Whereas the results of 2019 tax audits article 21,21 Final, 4(2), VAT and VAT Collecting Tax are Zero Tax Assesment Letter.*

*On May 19, 2021, LPEI received transfer from Government Treasury for 2019 Corporate Income Tax refund amounting to Rp93,062 after deducting the unpaid tax debt.*

*The result of 2019 Tax Overpayment Assesment Letter Corporate Income Tax and 2019 Fiscal Loss recognized by Directorate General of Taxation as follow:*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**15. Perpajakan (lanjutan)**

**e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)**

**Klaim atas kelebihan pembayaran pajak  
(lanjutan)**

**5. Hasil Pemeriksaan Pajak PPh Badan  
Tahun 2019 (lanjutan)**

<b>Pengembalian Pajak Tax Return</b>	<b>Rugi Fiskal/ Fiscal Loss</b>	<i>Fiscal Year 2019 TAL Tax Return No. 00021/406/19/093/21 Total</i>
Tahun Pajak 2019 SKPLB PPh Badan No. 00021/406/19/093/21	93,267	(4,770,892) No. 00021/406/19/093/21
<b>Total</b>	<b>93,267</b>	<b>(4,770,892)</b>

**6. Hasil Pemeriksaan Pajak PPh Badan  
Tahun 2020**

SPT Tahunan PPh badan tahun 2020  
yang dilaporkan LPEI adalah SPT Lebih  
Bayar PPh Badan.

Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal  
29 Desember 2021, LPEI menerima  
Surat Perintah Pemeriksaan Pajak  
untuk seluruh jenis pajak tahun pajak  
2020 dari Direktorat Jenderal Pajak.

Sampai dengan tanggal penyelesaian  
laporan keuangan ini, pemeriksaan  
Pajak tahun 2020 masih dalam proses  
pemeriksaan.

**15. Taxes (continued)**

**e. Tax assesment (continued)**

**Claims for tax refund (continued)**

**5. The Result of 2019 Corporate Income  
Tax (continued)**

**6. The Result of 2020 Corporate Income  
Tax**

*The 2020 corporate income tax return  
reported by LPEI is an overpayment of  
corporate income tax.*

*Based on this, on December 29, 2021,  
LPEI received Tax Audit Letter for all  
types of tax for the 2020 tax year from  
the Directorate General of Taxes.*

*Until the date of completion of this  
financial reports, tax audit 2020 year still  
in process.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan**

Rincian efek-efek utang yang diterbitkan berdasarkan tempat terdaftar adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember / December 31,</b>		<b>Domestic</b>
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Rupiah</b>
<b>Dalam Negeri</b>			<b>Overseas</b>
Rupiah	20,597,711	29,471,907	<b>United States Dolar</b>
<b>Luar negeri</b>			<b>Total</b>
Dolar Amerika Serikat	7,114,678	7,009,137	
<b>Total</b>	<b>27,712,389</b>	<b>36,481,044</b>	

Rincian efek-efek utang yang diterbitkan berdasarkan jenis dan mata uang adalah sebagai berikut:

*The details of debt securities issued based on listed country location are as follows:*

	<b>31 Desember / December 31,</b>		<b>Nominal value</b>
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Rupiah</b>
Nilai nominal			<b>Continuous bonds</b>
<b>Rupiah</b>			<b>Indonesia Eximbank Phase VII</b>
Obligasi berkelanjutan			<b>Shelf Registration Offering II - 2016</b>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia			<b>Series C</b>
Eximbank II Tahap VII - 2016	--	1,732,250	<b>Indonesia Eximbank Phase I</b>
Seri C	--	2,252,000	<b>Shelf Registration Offering III - 2016</b>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia			<b>Series C</b>
Eximbank III Tahap I - 2016	--	500,000	<b>Indonesia Eximbank Phase I</b>
Seri C	--	1,582,000	<b>Medium Term Notes (MTN) - 2016</b>
Medium Term Notes (MTN) I			<b>Indonesia Eximbank Phase II</b>
Indonesia Eximbank - 2016	--	282,000	<b>Shelf Registration Offering III - 2016</b>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia			<b>Series C</b>
Eximbank III Tahap II - 2016	--	1,038,000	<b>Indonesia Eximbank Phase III</b>
Seri C	--	282,000	<b>Shelf Registration Offering III - 2016</b>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia			<b>Series C</b>
Eximbank III Tahap III - 2016	--	1,038,000	<b>Indonesia Eximbank Phase III</b>
Seri C	--	282,000	<b>Shelf Registration Offering III - 2016</b>
Seri D	1,038,000	1,038,000	<b>Series D</b>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia			<b>Indonesia Eximbank Phase IV</b>
Eximbank III Tahap IV - 2017			<b>Shelf Registration Offering III - 2017</b>
Seri C	748,000	748,000	<b>Series C</b>
Seri D	1,007,000	1,007,000	<b>Series D</b>
Seri E	1,266,000	1,266,000	<b>Series E</b>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia			<b>Indonesia Eximbank Phase V</b>
Eximbank III Tahap V - 2017			<b>Shelf Registration Offering III - 2017</b>
Seri B	436,000	436,000	<b>Series B</b>
Seri C	1,786,000	1,786,000	<b>Series C</b>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia			<b>Indonesia Eximbank Phase VI</b>
Eximbank III Tahap VI - 2018			<b>Shelf Registration Offering III - 2018</b>
Seri A	--	610,000	<b>Series A</b>
Seri B	1,650,000	1,650,000	<b>Series B</b>
Seri C	206,000	206,000	<b>Series C</b>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**

**16. Debt Securities Issued (continued)**

	<i>31 Desember / December 31,</i>		
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I - 2018			<i>Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV - 2018</i>
Seri A	--	938,000	Series A
Seri B	35,000	35,000	Series B
Seri C	1,756,000	1,756,000	Series C
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II - 2018			<i>Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV - 2018</i>
Seri B	--	190,000	Series B
Seri C	275,700	275,700	Series C
Seri D	1,324,000	1,324,000	Series D
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III - 2018			<i>Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV - 2018</i>
Seri B	--	81,000	Series B
Seri C	28,000	28,000	Series C
Seri D	380,000	380,000	Series D
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV - 2019			<i>Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019</i>
Seri B	935,000	935,000	Series B
Seri C	1,523,000	1,523,000	Series C
Seri D	278,000	278,000	Series D
Seri E	349,000	349,000	Series E
Seri F	625,000	625,000	Series F
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V - 2019			<i>Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV - 2019</i>
Seri B	621,000	621,000	Series B
Seri C	330,000	330,000	Series C
Seri D	737,000	737,000	Series D
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI - 2019			<i>Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV - 2019</i>
Seri B	15,000	15,000	Series B
Seri C	6,000	6,000	Series C
Seri D	714,500	714,500	Series D

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**

**16. Debt Securities Issued (continued)**

	<i>31 Desember / December 31,</i>		
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV - 2019			<i>Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019</i>
Seri B	935,000	935,000	Series B
Seri C	1,523,000	1,523,000	Series C
Seri D	278,000	278,000	Series D
Seri E	349,000	349,000	Series E
Seri F	625,000	625,000	Series F
Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V - 2019			<i>Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV - 2019</i>
Seri B	621,000	621,000	Series B
Seri C	330,000	330,000	Series C
Seri D	737,000	737,000	Series D
Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI - 2019			<i>Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV - 2019</i>
Seri B	15,000	15,000	Series B
Seri C	6,000	6,000	Series C
Seri D	714,500	714,500	Series D
Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII - 2019			<i>Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV - 2019</i>
Seri B	101,300	101,300	Series B
Seri C	25,500	25,500	Series C
Seri D	112,000	112,000	Series D
Seri E	219,750	219,750	Series E
Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII - 2019			<i>Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV - 2019</i>
Seri A	88,000	88,000	Series A
Seri B	1,551,000	1,551,000	Series B
Seri C	22,500	22,500	Series C
Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I - 2020			<i>Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V - 2020</i>
	48,000	48,000	
Dikurangi:	20,237,250	28,404,500	<i>Less:</i>
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	(19,539)	(27,593)	<i>Unamortized bonds issuance cost</i>
	(19,539)	(27,593)	
	20,217,711	28,376,907	
Sukuk Mudharabah			<i>Sukuk Mudharabah</i>
Sukuk Mudharabah Berkelaanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I - 2018			<i>Sukuk Mudharabah Phase I Shelf Registration Offering I - 2018</i>
Seri B	--	365,000	Series B
Sukuk Mudharabah Berkelaanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II - 2018			<i>Sukuk Mudharabah Phase II Shelf Registration Offering I - 2018</i>
Seri B	--	250,000	Series B
Seri C	14,000	14,000	Series C
Seri D	155,000	155,000	Series D
Sukuk Mudharabah Berkelaanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III - 2019			<i>Sukuk Mudharabah Phase III Shelf Registration Offering I - 2019</i>
Seri B	145,000	145,000	Series B
Seri C	66,000	66,000	Series C
Sukuk Mudharabah Berkelaanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I - 2020			<i>Sukuk Mudharabah Phase I Shelf Registration Offering II - 2020</i>
	--	100,000	
Total Rupiah	380,000	1,095,000	<i>Total Rupiah</i>
	20,597,711	29,471,907	

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**

**16. Debt Securities Issued (continued)**

	<i>31 Desember / December 31,</i>		
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
<b>Dolar Amerika Serikat</b>			<b>United States Dollars</b>
Obligasi berkelanjutan			<i>Continuous bonds</i>
EMTN Program IEB - 2017 (USD500.000.000)	7,126,250	7,025,000	<i>IEB EMTN Programme - 2017 (USD500,000,000)</i>
Diskonto obligasi yang belum diamortisasi	(4,160)	(5,666)	<i>Unamortized bonds discount</i>
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	(7,412)	(10,197)	<i>Unamortized bonds issuance cost</i>
	(11,572)	(15,863)	
<b>Total Dolar Amerika Serikat</b>	<b>7,114,678</b>	<b>7,009,137</b>	<b>Total United States Dollars</b>
<b>Neto</b>	<b>27,712,389</b>	<b>36,481,044</b>	<b>Net</b>

Rincian efek-efek utang yang diterbitkan berdasarkan pihak-pihak:

*The details of debt securities issued based on parties:*

	<i>31 Desember / December 31,</i>		
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
Pihak berelasi (Catatan 38)			<i>Related parties (Note 38)</i>
Obligasi	4,995,000	7,530,300	<i>Bonds</i>
Sukuk Mudharabah	75,000	494,000	<i>Sukuk Mudharabah</i>
	5,070,000	8,024,300	
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
Obligasi	15,242,250	20,379,866	<i>Bonds</i>
Sukuk Mudharabah Indonesia	305,000	601,000	<i>Sukuk Mudharabah</i>
Medium Term Notes	--	500,000	<i>Medium Term Notes</i>
European Medium Term Notes (EMTN)	7,126,250	7,019,334	<i>European Medium Term Notes (EMTN)</i>
	22,673,500	28,500,200	
<b>Total</b>	<b>27,743,500</b>	<b>36,524,500</b>	<b>Total</b>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Diskonto obligasi yang belum diamortisasi	(4,160)	(5,666)	<i>Unamortized bonds discount</i>
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	(26,951)	(37,790)	<i>Unamortized bonds issuance cost</i>
	(31,111)	(43,456)	
<b>Neto</b>	<b>27,712,389</b>	<b>36,481,044</b>	<b>Net</b>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**

**a. Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII 2016**

Pada bulan Februari 2016, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII 2016 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp4.036.250 yang merupakan obligasi berseri A, B, dan C dengan rincian sebagai berikut:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
<b>Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII - 2016</b>				
Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII 2016 Seri A				
	657,000	1 Maret/ March 2017	8,50% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering II - 2016 Series A</i>
Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII 2016 Seri B				
	1,647,000	19 Februari/ February 2019	9,25% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering II - 2016 Series B</i>
Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII 2016 Seri C				
	1,732,250	19 Februari/ February 2021	9,60% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering II - 2016 Series C</i>

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank II dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp24.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 Februari 2016. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 19 Mei 2016.

Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII - 2016 Seri A, Seri B, dan Seri C telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 1 Maret 2017, 19 Februari 2019, dan 19 Februari 2021.

**16. Debt Securities Issued (continued)**

**a. Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering II 2016**

In February 2016, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering II 2016 with a face value of Rp4,036,250, which is divided into series A, B, and C with details as follows:

<b>Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII - 2016</b>	<b>Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering II - 2016 Series A</b>
Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII 2016 Seri A	Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering II - 2016 Series A
	<i>Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering II - 2016 Series B</i>
Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII 2016 Seri B	<i>Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering II - 2016 Series B</i>
Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII 2016 Seri C	<i>Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering II - 2016 Series C</i>

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering II with targeted fund subscribed of Rp24,000,000, that is planned to be fully issued within 2 years.

These bond are listed in Indonesia Stock Exchange on February 22, 2016. Interest is payable quarterly starting on May 19, 2016.

IEB Phase VII Shelf Registration Offering II - 2016 Series A, B, and C were fully paid upon maturity on March 1, 2017, February 19, 2019, and February 19, 2021.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**

**a. Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII 2016 (lanjutan)**

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII 2016 sebesar Rp4.047 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII 2016 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII 2016 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII 2016 digunakan untuk pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

Selama periode efektif PUB II, LPEI telah menerbitkan Obligasi Berkelaanjutan Tahap I sampai dengan Tahap VII dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp19.321.250. Adapun jumlah target dana yang kurang dihimpun adalah sebesar Rp4.678.750 dari total target dana yang dihimpun sebesar Rp24.000.000. Dalam rangka pemenuhan terhadap Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelaanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, LPEI telah mengumumkan Penghentian PUB II pada Laman resmi LPEI dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Maret 2016.

**b. Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I 2016**

Pada bulan Juni 2016, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I 2016 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp4.000.000 yang merupakan obligasi berseri A, B, dan C dengan rincian sebagai berikut:

**16. Debt Securities Issued (continued)**

**a. Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering II 2016 (continued)**

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering II 2016 amounting to Rp4,047 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering II 2016 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering II 2016 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering II 2016 were used to finance earning assets in the form of export financing.

During the Shelf Registration Offering Bond II period, LPEI has issued Bond Phase I to Phase VII with total funds raised amounting to Rp19,321,250. The deficiency of the target amount of funds raised is Rp4,678,750 from target funds amounting to Rp24,000,000. In order to comply with FSA Regulation No. 36/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 on Shelf Registration Offering of Debt Securities and/or Sukuk, LPEI announced Discontinuation of Shelf Registration Offering Bond II on LPEI's official Website and IDX's official Website on March 7, 2016.

**b. Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering III 2016**

In June 2016, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering I 2016 with a face value of Rp4,000,000 which is divided into series A, B and C with details as follows:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**

**b. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I 2016 (lanjutan)**

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I - 2016				<i>Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering III - 2016</i>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I 2016 Seri A	688,000	18 Juni/ June 2017	7.50% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering III - 2016 Series A</i>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I 2016 Seri B	1,060,000	8 Juni/ June 2019	8.20% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering III - 2016 Series B</i>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I 2016 Seri C	2,252,000	8 Juni/ June 2021	8.70% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering III - 2016 Series C</i>

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp24.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Juni 2016. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 8 September 2016.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I 2016 Seri A, Seri B, dan Seri C telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 18 Juni 2017, 8 Juni 2019, dan 8 Juni 2021.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I 2016 sebesar Rp4.964 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I 2016 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

**16. Debt Securities Issued (continued)**

**b. Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering III - 2016 (continued)**

<i>Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering III - 2016</i>
<i>Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering III - 2016 Series A</i>
<i>Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering III - 2016 Series B</i>
<i>Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering III - 2016 Series C</i>
<i>These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering III with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp24,000,000, that is planned to be fully issued within 2 years.</i>

*These bond are listed in Indonesia Stock Exchange on June 9, 2016. Interest is payable quarterly starting on September 8, 2016.*

*IEB Phase I Shelf Registration Offering III 2016 Series A, B, and C were fully paid upon maturity on June 18, 2017, June 8, 2019, and June 8, 2021 respectively.*

*LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering III 2016 amounting to Rp4,964 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering III 2016 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**

**b. Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I 2016 (lanjutan)**

Bertindak sebagai wali amanat obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I - 2016 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I -2016 digunakan untuk pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

**c. Medium Term Notes (MTN) I Indonesia Eximbank Tahun 2016**

Pada bulan Juli 2016, LPEI menerbitkan Medium Term Note (MTN) I Indonesia Eximbank Tahun 2016 dengan nilai nominal sebesar Rp500.000 dengan rincian sebagai berikut:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
Medium Term Note (MTN) I Indonesia Eximbank Tahun 2016	500,000	15 Juli/ July 2021	8.65% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase I Medium Term Note (MTN) - 2016

Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2016. Penerbitan Medium Term Note (MTN) I Indonesia Eximbank Tahun 2016 telah dinyatakan efektif tanggal 15 Juli 2016 setelah diterimanya seluruh dana hasil Penerbitan MTN masuk ke dalam rekening penerbit dan juga merupakan tanggal distribusi/tanggal pendistribusian secara elektronik MTN oleh KSEI kepada Pemegang MTN.

Bertindak sebagai Agen Pemantau Medium Term Note (MTN) I Indonesia Eximbank Tahun 2016 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bertindak sebagai Arranger (Penatalaksana) adalah PT CIMB Securities Indonesia dan PT DBS Vickers Securities Indonesia. Penerimaan neto dari penerbitan Medium Term Note (MTN) I Indonesia Eximbank Tahun 2016 digunakan untuk pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

**16. Debt Securities Issued (continued)**

**b. Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering III - 2016 (continued)**

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering III - 2016 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering III - 2016 were used to finance earning assets in the form of export financing.

**c. Indonesia Eximbank Phase I Medium Term Note (MTN) 2016**

In July 2016, LPEI issued the Indonesia Eximbank Phase I Medium Term Note (MTN) 2016 with a face value of Rp500,000 with details as follows:

Interest is payable quarterly starting on October 15, 2016. The offering of the Indonesia Eximbank Phase I Medium Term Note (MTN) 2016 was declared effective on July 15, 2016 based on all proceeds from issuance of MTN entered the account issuer and also the distribution date/date of distribution of electronic MTN by KSEI to the MTN Holder.
---

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase I Medium Term Note (MTN) 2016 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The Arranger for the Indonesia Eximbank Phase I Medium Term Note (MTN) 2016 is PT CIMB Securities Indonesia and PT DBS Vickers Securities Indonesia. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase I Medium Term Note (MTN) 2016 were used to finance earning assets in the form of export financing.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**

**c. Medium Term Notes (MTN) I Indonesia Eximbank Tahun 2016 (lanjutan)**

LPEI mencatat beban emisi Medium Term Note (MTN) I Indonesia Eximbank tahun 2016 sebesar Rp901 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Medium Term Note (MTN) I Indonesia Eximbank Tahun 2016 dan diamortisasi selama jangka waktu MTN tersebut dengan metode suku bunga efektif.

MTN I Indonesia Eximbank 2016 memiliki peringkat "idAAA" berdasarkan PT Pefindo Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021.

MTN ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan LPEI baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

MTN ini tidak dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa preferensi dengan hak-hak kreditur LPEI lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**d. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II 2016**

Pada bulan Agustus 2016, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II 2016 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp4.331.000, yang merupakan obligasi berseri A, B, dan C dengan rincian sebagai berikut:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II - 2016				<i>Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering III - 2016</i>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II 2016 Seri A	1,793,000	5 September/ September 2017	7.25% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering III - 2016 Series A</i>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II 2016 Seri B	956,000	25 Agustus/ August 2019	7.95% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering III - 2016 Series B</i>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II 2016 Seri C	1,582,000	25 Agustus/ August 2021	8.35% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering III - 2016 Series C</i>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**16. Debt Securities Issued (continued)**

**c. Indonesia Eximbank Phase I Medium Term Note (MTN) 2016 (continued)**

*LPEI recorded the issuance cost on the Indonesia Eximbank Phase I Medium Term Note (MTN) 2016 amounting to Rp901 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase I Medium Term Note (MTN) 2016 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.*

*Indonesia Eximbank Phase I Medium Term Note (MTN) 2016 were rated "idAAA" by PT Pefindo as of December 31, 2020 and December 31, 2021.*

*The MTN are not secured by specific collateral but are secured by all of LPEI's fixed and non-fixed assets, both existing and will exist in the future, in compliance with the regulations of Indonesian Civil Law Articles 1131 and 1132.*

*The MTN are not guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia.*

*The bondholders' right is paripassu without preference offer other LPEI creditors' rights in compliance with prevailing regulations.*

**d. Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering III 2016**

*In August 2016, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering III 2016 with a face value of Rp4,331,000, which is divided into series A, B, and C with details as follows:*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**

**d. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II 2016 (lanjutan)**

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp24.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Agustus 2016. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 25 November 2016.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II 2016 Seri A, Seri B, dan Seri C telah jatuh tempo dan dilunasi masing-masing pada tanggal 5 September 2017, 25 Agustus 2019, dan 25 Agustus 2021.

Bertindak sebagai wali amanat obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II 2016 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II 2016 digunakan untuk pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II 2016 sebesar Rp4.216 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II 2016 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

**16. Debt Securities Issued (continued)**

**d. Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering III 2016 (continued)**

*These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering III targeted funds to be raised amounting to Rp24,000,000, that is planned to be fully issued within 2 years.*

*These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on August 26, 2016. Interest is payable quarterly starting on November 25, 2016.*

*IEB Phase II Shelf Registration Offering III 2016 Series A, B, and C were fully paid upon maturity on September 5, 2017, August 25, 2019, and August 25, 2021, respectively.*

*The trustee for the Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering III 2016 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering III 2016 were used to finance earning assets in the form of export financing.*

*LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering III 2016 amounting to Rp4,216 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering III 2016 and amortised over the term of the bonds using the effective interest rate method.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**

**e. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016**

Pada bulan November 2016, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp2.532.000 yang merupakan obligasi berseri A, B, C and D dengan rincian sebagai berikut:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III - 2016				<i>Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III - 2016</i>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 Seri A	672,000	2 Desember/ December 2017	7.15% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III - 2016 Series A</i>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 Seri B	540,000	22 November/ November 2019	7.85% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III - 2016 Series B</i>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 Seri C	282,000	22 November/ November 2021	8.20% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III - 2016 Series C</i>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 Seri D	1,038,000	22 November/ November 2023	8.50% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III - 2016 Series D</i>

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp24.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 November 2016. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 22 Februari 2017.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 Seri A, Seri B, dan Seri C telah jatuh tempo dan dilunasi masing-masing pada tanggal 2 Desember 2017, 22 November 2019, dan 22 November 2021.

**16. Debt Securities Issued (continued)**

**e. Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III 2016**

*In November 2016, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III 2016 with a face value of Rp2,532,000, which is divided into series A, B, C, and D with details as follows:*

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III - 2016				<i>Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III - 2016</i>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 Seri A	672,000	2 Desember/ December 2017	7.15% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III - 2016 Series A</i>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 Seri B	540,000	22 November/ November 2019	7.85% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III - 2016 Series B</i>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 Seri C	282,000	22 November/ November 2021	8.20% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III - 2016 Series C</i>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 Seri D	1,038,000	22 November/ November 2023	8.50% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III - 2016 Series D</i>

*These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering III targeted funds to be raised amounting to Rp24,000,000, that is planned to be fully issued within 2 years.*

*These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on November 23, 2016. Interest is payable quarterly starting on February 22, 2017.*

*IEB Phase III Shelf Registration Offering III 2016 Series A, B, and C were fully paid upon maturity on December 2, 2017, November 22, 2019, and November 22, 2021, respectively.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**

**e. Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 (lanjutan)**

Bertindak sebagai wali amanat obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III - 2016 digunakan untuk pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 sebesar Rp4.093 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

**f. Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017**

Pada bulan Februari 2017, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp5.221.000, yang merupakan obligasi berseri A, B, C, D dan E dengan rincian sebagai berikut:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
<b>Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV - 2017</b>				
Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 Seri A	861,000	3 Maret/ March 2018	7.40% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III - 2017 Series A
Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 Seri B	1,339,000	23 Februari/ February 2020	8.40% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III - 2017 Series B
Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 Seri C	748,000	23 Februari/ February 2022	8.90% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III - 2017 Series C
Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 Seri D	1,007,000	23 Februari/ February 2024	9.20% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III - 2017 Series D
Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 Seri E	1,266,000	23 Februari/ February 2027	9.40% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III - 2017 Series E

**16. Debt Securities Issued (continued)**

**e. Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III 2016 (continued)**

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III - 2016 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III 2016 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III 2016 amounting to Rp4,093 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III 2016 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method

**f. Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III 2017**

In February 2017, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III 2017 with a face value of Rp5,221,000, which is divided into series A, B, C, D and E with details as follows:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**

**f. Obligasi BerkelaJutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 (lanjutan)**

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi BerkelaJutan Indonesia Eximbank III dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp24.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Februari 2017. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 23 Mei 2017.

Obligasi BerkelaJutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 Seri A dan B telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 3 Maret 2018 dan 23 Februari 2020.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi BerkelaJutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi BerkelaJutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 digunakan untuk pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi BerkelaJutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 sebesar Rp6.556 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi BerkelaJutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**16. Debt Securities Issued (continued)**

**f. Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III 2017 (continued)**

*These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering III targeted funds to be raised amounting to Rp24,000,000, that is planned to be fully issued within 2 years.*

*These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on February 24, 2017. Interest is payable quarterly starting on May 23, 2017.*

*IEB Phase IV Shelf Registration Offering III 2017 Series A and B were fully paid upon maturity on March 3, 2018 and February 23, 2020, respectively.*

*The trustee for the Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III 2017 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III 2017 were used to finance earning assets in the form of export financing.*

*LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III 2017 amounting to Rp6,556 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III 2017 and amortised over the term of the bonds using the effective interest rate method.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**

**g. Euro Medium-Term Note (EMTN)  
Programme Indonesia Eximbank 2017**

Pada bulan April 2017, LPEI menerbitkan *Euro Medium Term Note (EMTN) Programme Indonesia Eximbank - 2017* dengan nilai nominal sebesar USD500.000.000 (nilai penuh) dengan rincian sebagai berikut:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
<i>Euro Medium Term Note (EMTN) Programme Indonesia Eximbank 2017 (nilai penuh)</i>	USD500.000.000	6 April/ April 2024	3.87% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Euro Medium Term Note (EMTN) Programme - 2017 (full amount)</i>

*EMTN Programme Indonesia Eximbank - 2017* ini merupakan bagian dari *Euro Medium Term Note (EMTN) Programme* dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar USD1.500.000.000 (nilai penuh).

Jadwal pembayaran bunga adalah semesteran dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2017. *EMTN Programme Indonesia Eximbank - 2017* tercatat di Singapore Exchange Securities Trading Limited. Penerbitan *EMTN Indonesia Eximbank - 2017* telah dinyatakan efektif mulai tanggal 7 April 2017.

Bertindak sebagai wali amanat *EMTN Programme Indonesia Eximbank 2017* adalah *The Hong Kong Shanghai Banking Corporation Limited*. Bertindak sebagai *Join Lead Managers (JLM)* emisi *Euro Medium Term Note (EMTN) Programme Indonesia Eximbank 2017* adalah *The Hong Kong Shanghai Banking Corporation Limited, Overseas Chinese Banking Corporation dan Mitsubishi UFJ Securities International*. Penerimaan neto dari penerbitan *EMTN Programme Indonesia Eximbank 2017* digunakan untuk membayar hutang yang telah ada, pembiayaan operasional dan aset produktif dan untuk kegunaan umum perusahaan.

**16. Debt Securities Issued (continued)**

**g. Indonesia Eximbank Euro Medium-Term  
Note (EMTN) Programme 2017**

*In April 2017, LPEI issued the Indonesia Eximbank Euro Medium Term Note (EMTN) Programme 2017 with a face value of USD500,000,000 (full amount) with details as follows:*

<i>Euro Medium Term Note (EMTN) Programme Indonesia Eximbank 2017 (nilai penuh)</i>	USD500.000.000	6 April/ April 2024	3.87% tetap/fixed	<i>The Indonesia Eximbank EMTN Programme - 2017 are part of the Indonesia Eximbank Euro Medium Term Note (EMTN) Programme with fixed interest rate and targeted funds to be raised amounted to USD1,500,000,000 (full amount).</i>
---	----------------	------------------------	-------------------	--

*Interest is payable semi-annually starting on October 6, 2017. The Indonesia Eximbank EMTN Programme -2017 is listed in the Singapore Exchange Securities Trading Limited. The offering of the Indonesia Eximbank EMTN Programme - 2017 was declared effective since April 7, 2017.*

*The trustee for the Indonesia Eximbank EMTN -2017 are The Hong Kong Shanghai Banking Corporation Limited. The Join Lead Managers (JLM) for the Indonesia Eximbank Euro Medium Term Note (EMTN) Programme - 2017 are The Hong Kong Shanghai Banking Corporation Limited, Overseas Chinese Banking Corporation and Mitsubishi UFJ Securities International. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank EMTN Programme - 2017 were used to refinance existing debt, finance its operations and earning assets and for its general corporate purposes.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**

**g. Euro Medium-Term Note (EMTN) Programme Indonesia Eximbank 2017 (lanjutan)**

LPEI mencatat beban emisi EMTN Programme Indonesia Eximbank -2017 sebesar USD1.405.097 (nilai penuh) dan diskonto sebesar USD860.000 (nilai penuh) yang dikurangkan langsung dari hasil emisi EMTN Programme Indonesia Eximbank -2017 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, EMTN Programme Indonesia Eximbank 2017 memiliki peringkat "BBB" dari Fitch dan "Baa2" dari Moody's Investor Inc.

**h. Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017**

Pada bulan Agustus 2017, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp3.222.000 yang merupakan obligasi berseri A, B, dan C dengan rincian sebagai berikut:

**16. Debt Securities Issued (continued)**

**g. Indonesia Eximbank Euro Medium-Term Note (EMTN) Programme 2017 (continued)**

*LPEI recorded the issuance cost and discount on Indonesia Eximbank EMTN Programme 2017 amounting to USD1,405,097 (full amount) and USD860,000 (full amount), respectively, as a deduction from the proceeds of the Indonesia EMTN Programme 2017 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.*

*As of December 31, 2021 and 2020, Indonesia EMTN Programme 2017 were rated "BBB" by Fitch and "Baa2" by Moody's Investor Inc.*

**h. Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III 2017**

*In August 2017, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III 2017 with a face value of Rp3,222,000 which is divided into series A, B, and C with details as follows:*

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
<b>Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V - 2017</b>				
Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 Seri A	1,000,000	15 Agustus/ August 2020	7.60% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III - 2017
Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 Seri B	436,000	15 Agustus/ August 2022	7.90% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III - 2017 Series A
Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 Seri C	1,786,000	15 Agustus/ August 2024	8.25% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III - 2017 Series B
				Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III - 2017 Series C

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**

**h. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 (lanjutan)**

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp24.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2017. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 15 November 2017.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V - 2017 Seri A telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 15 Agustus 2020.

Bertindak sebagai wali amanat obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V -2017 digunakan untuk pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 sebesar Rp4.333 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

**16. Debt Securities Issued (continued)**

**h. Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III 2017 (continued)**

*These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering III targeted funds to be raised amounting to Rp24,000,000, that is planned to be fully issued within 2 years.*

*These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on August 16, 2017. Interest is payable quarterly starting on November 15, 2017.*

*IEB Phase V Shelf Registration Offering III - 2017 Series A was fully paid upon maturity on August 15, 2020.*

*The trustee for the Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III - 2017 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III 2017 were used to finance earning assets in the form of export financing.*

*LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III 2017 amounting to Rp4,333 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III 2017 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**

**i. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018**

Pada bulan Februari 2018, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp2.466.000 yang merupakan obligasi berseri A, B, dan C dengan rincian sebagai berikut:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
<b>Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI - 2018</b>				<i>Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III - 2018</i>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 Seri A	610,000	14 Februari/ February 2021	6.35% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III - 2018 Series A</i>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 Seri B	1,650,000	14 Februari/ February 2023	6.70% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III - 2018 Series B</i>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 Seri C	206,000	14 Februari/ February 2025	6.90% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III - 2018 Series C</i>

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp24.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Februari 2018. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 14 Mei 2018.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 Seri A telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 14 Februari 2021.

**16. Debt Securities Issued (continued)**

**i. Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III 2018**

In February 2018, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III 2018 with a face value of Rp2,466,000 which is divided into series A, B, and C with details as follows:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
<b>Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI - 2018</b>				<i>Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III - 2018</i>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 Seri A	610,000	14 Februari/ February 2021	6.35% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III - 2018 Series A</i>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 Seri B	1,650,000	14 Februari/ February 2023	6.70% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III - 2018 Series B</i>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 Seri C	206,000	14 Februari/ February 2025	6.90% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III - 2018 Series C</i>

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering III targeted funds to be raised amounting to Rp24,000,000, that is planned to be fully issued within 2 years.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on February 15, 2018. Interest is payable quarterly starting on May 14, 2018.

IEB Phase VI Shelf Registration Offering III 2018 Series A was fully paid upon maturity on February 14, 2021.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**

**i. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 (lanjutan)**

Bertindak sebagai wali amanat obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 digunakan untuk pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 sebesar Rp3.783 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

Selama periode efektif PUB III, LPEI telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Tahap I sampai dengan Tahap VI dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp21.772.000 adapun jumlah target dana yang kurang dihimpun adalah sebesar Rp2.228.000 dari total target dana yang dihimpun sebesar Rp24.000.000. Dalam rangka pemenuhan terhadap Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, LPEI telah mengumumkan Penghentian PUB III pada Laman resmi LPEI dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Februari 2018.

**16. Debt Securities Issued (continued)**

**i. Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III 2018 (continued)**

*The trustee for the Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III 2018 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III 2018 were used to finance earning assets in the form of export financing.*

*LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III 2018 amounting to Rp3,783 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III 2018 and amortised over the term of the bonds using the effective interest rate method.*

*During the Shelf Registration Offering Bond III period, LPEI has issued Bond Phase I to Phase VI with total funds raised amounting to Rp21,772,000, the deficiency of the target amount of funds raised is Rp2,228,000 from target funds amounting to Rp24,000,000. In order to comply with FSA Regulation No. 36/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 on Shelf Registration Offering of Debt Securities and/or Sukuk, LPEI announced Discontinuation of Shelf Registration Offering Bond III on LPEI's official Website and Indonesian Stock Exchange's (IDX) official Website on February 28, 2018.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**

**j. Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018**

Pada bulan Juni 2018, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp2.729.000 yang merupakan obligasi berseri A, B dan C dengan rincian sebagai berikut:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I - 2018				Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV - 2018
Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 Seri A	938,000	6 Juni/ June 2021	7.50% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV - 2018 Series A
Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 Seri B	35,000	6 Juni/ June 2023	7.70% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV - 2018 Series B
Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 Seri C	1,756,000	6 Juni/ June 2025	8.30% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV - 2018 Series C

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp26.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Juni 2018. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 6 September 2018.

Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 Seri A telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 6 Juni 2021.

Bertindak sebagai wali amanat obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 digunakan untuk pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

**16. Debt Securities Issued (continued)**

**j. Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV 2018**

In June 2018, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV 2018 with a face value of Rp2,729,000 which is divided into series A, B and C with details as follows:

<p>Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I - 2018</p> <p>Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 Seri A</p> <p>Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 Seri B</p> <p>Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 Seri C</p>	<p>Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV - 2018</p> <p>Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV - 2018 Series A</p> <p>Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV - 2018 Series B</p> <p>Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV - 2018 Series C</p>
--	--

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering IV with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp26,000,000, that is planned to be fully issued within 2 years.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on June 7, 2018. Interest is payable quarterly starting on September 6, 2018.

IEB Phase I Shelf Registration Offering IV 2018 Series A was fully paid upon maturity on June 6, 2021.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV 2018 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV 2018 were used to finance earning assets in the form of export financing.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**

**j. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 (lanjutan)**

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 sebesar Rp4.749, yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

**k. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I 2018**

Pada bulan Juni 2018, LPEI menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indonesia Eximbank Tahap I Tahun 2018 ("Sukuk Mudharabah") sebesar Rp500.000 yang terdiri dari Sukuk Mudharabah seri A dan Seri B, dengan rincian sebagai berikut:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I - 2018				Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase I - 2018
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I 2018 Seri A	135,000	16 Juni/ June 2019	6.15%	Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase I - 2018 Series A
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I 2018 Seri B	365,000	6 Juni/ June 2021	7.50%	Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase I - 2018 Series B

Penerimaan dana dari penerbitan Sukuk Mudharabah ini digunakan untuk pemberian pembiayaan asset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor berdasarkan prinsip syariah.

Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Seri A adalah sebesar 16,18% dengan indikatif bagi hasil setara 6,15% per tahun, berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Sedangkan nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Seri B adalah sebesar 19,74% dengan indikatif bagi hasil setara 7,50% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi yaitu 6 Juni 2018. Sukuk Mudharabah ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

**16. Debt Securities Issued (continued)**

**j. Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV 2018 (continued)**

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV 2018 amounting to Rp4,749, as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV 2018 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

**k. Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase I 2018**

On June 2018, LPEI issued Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase I Year 2018 ("Sukuk Mudharabah") amounting to Rp500,000 which is divided into series A and B, with detail as follows:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I - 2018				Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase I - 2018
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I 2018 Seri A	135,000	16 Juni/ June 2019	6.15%	Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase I - 2018 Series A
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I 2018 Seri B	365,000	6 Juni/ June 2021	7.50%	Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase I - 2018 Series B

The fund received from Sukuk Mudharabah issuance will be used to finance earning assets in the form of export financing with sharia principles.

Customer's nisbah of Sukuk Mudharabah Series A is at 16.18% with profit sharing indicative equivalent at 6.15% per annum, with 370 days calendar tenor since Issuance Date. While Customer's nisbah of Sukuk Mudharabah Series B is at 19.74% with profit sharing indicative equivalent at 7.50% per annum, with 3 (three) years tenor since Issuance Date in June 6, 2018. This Sukuk Mudharabah is listed on the Indonesian Stock Exchange.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**

**k. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan  
Indonesia Eximbank I Tahap I 2018  
(lanjutan)**

Pendapatan bagi hasil akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran pendapatan bagi hasil pertama Sukuk Mudharabah seri A dan B akan dilakukan pada tanggal 6 September 2018, sedangkan pembayaran pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus jatuh tempo pokok Sukuk Mudharabah akan dilakukan pada tanggal 16 Juni 2019 untuk Seri A dan tanggal 6 Juni 2021 untuk Seri B yang juga merupakan tanggal pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I 2018 Seri A dan Seri B telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 16 Juni 2019 dan 6 Juni 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Sukuk Mudharabah yang diterbitkan, Pefindo memberikan peringkat "idAAA(sy)".

Sukuk Mudharabah tersebut tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan LPEI baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Mudharabah dan sebelum dilunasinya dana Sukuk Mudharabah dan pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah, LPEI berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Tahap I Tahun 2018

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**16. Debt Securities Issued (continued)**

**k. Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia  
Eximbank Phase I 2018 (continued)**

*The profit sharing income is paid quarterly based on profit sharing income payment date of Sukuk Mudharabah. The first profit sharing income payment of Sukuk Mudharabah Series A and Series B will be paid on September 6, 2018, while the last profit sharing income payment and due date of Sukuk Mudharabah Series A will be made on June 16, 2019 and Series A on June 6, 2021 for which is also the repayment date of Sukuk Mudharabah principal.*

*Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase I 2018 Series A and B were fully paid upon maturity on June 16, 2019 and June 6, 2021 respectively.*

*As of December 31, 2020 Sukuk Mudharabah is rated as "idAAA(sy)" by Pefindo.*

*Sukuk Mudharabah are not guaranteed with specific guarantee, but guaranteed with all assets of LPEI, whether present or future fixed or non-fixed assets in accordance with the provisions of Article 1131 and 1132 of the Civil Laws.*

*During the validity period of Sukuk Mudharabah and prior to the redemption of all principal and profit sharing income of Sukuk Mudharabah, LPEI agreed to maintain and/or comply with all terms stated in the trustee agreement as outlined in the Self Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase I 2018.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**

**I. Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018**

Pada bulan September 2018, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp2.514.100 yang merupakan obligasi berseri A, B, C, dan D dengan rincian sebagai berikut:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
<b>Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II - 2018</b>				
Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 Seri A				
	724,400	15 September/ September 2019	7.00% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV - 2018</i>
Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 Seri B				
	190,000	5 September/ September 2021	7.50% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV - 2018 Series A</i>
Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 Seri C				
	275,700	5 September / September 2023	8.40% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV - 2018 Series B</i>
Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 Seri D				
	1,324,000	5 September / September 2025	8.75% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV - 2018 Series C</i>
				<i>Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV - 2018 Series D</i>

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp26.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 September 2018. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 5 Desember 2018.

Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 Seri A dan Seri B telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 15 September 2019 dan 5 September 2021.

**16. Debt Securities Issued (continued)**

**I. Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV 2018**

In September 2018, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV 2018 with a face value of Rp2,514,100 which is divided into series A, B, C, and D with details as follows:

<b>Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV - 2018</b>	<b>Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV - 2018 Series A</b>
Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV - 2018 Series B	<i>Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV - 2018 Series B</i>
Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV - 2018 Series C	<i>Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV - 2018 Series C</i>
Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV - 2018 Series D	<i>Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV - 2018 Series D</i>

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering IV with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp26,000,000, that is planned to be fully issued within 2 years.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on September 6, 2018. Interest is payable quarterly starting on December 5, 2018.

IEB Phase II Shelf Registration Offering IV 2018 Series A and B were fully paid upon maturity on September 15, 2019 and September 5, 2021 respectively.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**

**I. Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 (lanjutan)**

Bertindak sebagai wali amanat obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 digunakan untuk pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 sebesar Rp3.912 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

**m. Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018**

Pada bulan November 2018, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp1.004.000 yang merupakan obligasi berseri A, B, C, dan D dengan rincian sebagai berikut:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
<b>Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III - 2018</b>				<b>Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV - 2018</b>
Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 Seri A	515,000	18 November/ November 2019	8.25% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV - 2018 Series A
Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 Seri B	81,000	8 November/ November 2021	8.75% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV - 2018 Series B
Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 Seri C	28,000	8 November/ November 2023	9.25% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV - 2018 Series C
Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 Seri D	380,000	8 November/ November 2025	9.75% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV - 2018 Series D

**16. Debt Securities Issued (continued)**

**I. Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV 2018 (continued)**

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV 2018 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV 2018 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV 2018 amounting to Rp3.912 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV 2018 and amortised over the term of the bonds using the effective interest rate method.

**m. Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV 2018**

In November 2018, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV 2018 with a face value of Rp1,004,000 which is divided into series A, B, C, and D with details as follows:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**

**m. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 (lanjutan)**

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp26.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 November 2018. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 8 Februari 2019.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III - 2018 Seri A dan Seri B telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 18 November 2019 dan 8 November 2021.

Bertindak sebagai wali amanat obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 digunakan untuk pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 sebesar Rp2.996 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

**16. Debt Securities Issued (continued)**

**m. Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV 2018 (continued)**

*These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering IV with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp26,000,000, that plan to be fully issued within 2 years.*

*These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on November 9, 2018. Interest is payable quarterly starting on February 8, 2018.*

*IEB Phase III Shelf Registration Offering IV – 2018 Series A and B were fully paid upon maturity on November 18, 2019, and November 8, 2021, respectively.*

*The trustee for the Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV 2018 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV 2018 were used to finance earning assets in the form of export financing.*

*LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV 2018 amounting to Rp2,996 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV 2018 and amortised over the term of the bonds using the effective interest rate method.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**

**n. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II 2018**

Pada bulan November 2018, LPEI menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indonesia Eximbank Tahap II Tahun 2018 ("Sukuk Mudharabah") sebesar Rp630.500 yang terdiri dari Sukuk Mudharabah seri A, B, C, dan D, dengan rincian sebagai berikut:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
<b>Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II - 2018</b>				
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II				
2018 Seri A	211,500	18 November/ November 2019	8,25%	Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II - 2018 Series A
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II		8 November/ November 2021	8,75%	Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II - 2018 Series B
2018 Seri B	250,000	8 November/ November 2023	9,25%	Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II - 2018 Series C
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II		8 November/ November 2025	9,75%	Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II - 2018 Series D
2018 Seri C	14,000			
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II				
2018 Seri D	155,000			

Penerimaan dana dari penerbitan Sukuk Mudharabah ini digunakan untuk pemberian pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor berdasarkan prinsip syariah.

*The fund received from Sukuk Mudharabah issuance will be used to finance earning assets in the form of export financing with sharia principles.*

**16. Debt Securities Issued (continued)**

**n. Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II 2018**

*On November 2018, LPEI issued Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II Year 2018 ("Shelf Sukuk Mudharabah") amounting to Rp630,500, which is divided into series A, B, C, and D, with detail as follows:*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**

**n. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan  
Indonesia Eximbank I Tahap II 2018  
(lanjutan)**

Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Seri A adalah sebesar 43,42% dengan indikatif bagi hasil setara 8,25% per tahun, berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Seri B adalah sebesar 46,05% dengan indikatif bagi hasil setara 8,75% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi yaitu 8 November 2018. Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Seri C adalah sebesar 48,68% dengan indikatif bagi hasil setara 9,25% per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi yaitu 8 November 2018. Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Seri D adalah sebesar 51,32% dengan indikatif bagi hasil setara 9,75% per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi yaitu 8 November 2018. Sukuk Mudharabah ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Pendapatan bagi hasil akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran pendapatan bagi hasil pertama Sukuk Mudharabah seri A, B, C, dan D akan dilakukan pada tanggal 8 Februari 2019, sedangkan pembayaran pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus jatuh tempo pokok Sukuk Mudharabah akan dilakukan pada tanggal 18 November 2019 untuk Seri A, tanggal 8 November 2021 untuk Seri B, tanggal 8 November 2023 untuk Seri C, dan tanggal 8 November 2025 untuk Seri D yang juga merupakan tanggal pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah.

**16. Debt Securities Issued (continued)**

**n. Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia  
Eximbank Phase II 2018 (continued)**

*Customer's nisbah of Sukuk Mudharabah Series A at 43.42% with profit sharing indicative equivalent at 8.25% per annum, with 370 days calendar tenor since Issuance Date. Customer's nisbah of Sukuk Mudharabah Series B at 46.05% with profit sharing indicative equivalent at 8.75% per annum, with 3 (three) years tenor since Issuance Date in November 8, 2018. Customer's nisbah of Sukuk Mudharabah Series C at 48.68% with profit sharing indicative equivalent at 9.25% per annum, with 5 (five) years tenor since Issuance Date in November 8, 2018. Customer's nisbah of Sukuk Mudharabah Series D at 51.32% with profit sharing indicative equivalent at 9.75% per annum with 7 (seven) years tenor since Issuance Date in November 8, 2018. This Sukuk Mudharabah is listed at Indonesian Stock Exchange.*

*The profit sharing income is paid quarterly based on profit sharing income payment date of SukukMudharabah. The first profit sharing income payment of Sukuk Mudharabah Series A, B, C, and D will be paid on February 8, 2019, while the last profit sharing income payment and due date of Sukuk Mudharabah Series A will be made on November 18, 2019, Series B on November 8, 2021, Series C on November 8, 2023, and Series D on November 8, 2025 for which is also the repayment date of Sukuk Mudharabah principal.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**

**n. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan  
Indonesia Eximbank I Tahap II 2018  
(lanjutan)**

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II 2018 Seri A dan Seri B telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 18 November 2019 dan 8 November 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Sukuk Mudharabah yang diterbitkan, Pefindo memberikan peringkat "idAAA(sy)".

Sukuk Mudharabah tersebut tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan LPEI baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Mudharabah dan sebelum dilunasinya dana Sukuk Mudharabah dan pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah, LPEI berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Tahap II Tahun 2018.

**o. Obligasi Berkelanjutan Indonesia  
Eximbank IV Tahap IV 2019**

Pada bulan April 2019, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp3.857.000 yang merupakan obligasi berseri A, B, C, D, E dan F dengan rincian sebagai berikut:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**16. Debt Securities Issued (continued)**

**n. Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia  
Eximbank Phase II 2018 (continued)**

*Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II 2018 Series A and B were fully paid upon maturity on November 18, 2019, and November 8, 2021, respectively.*

*As of December 31, 2021 and 2020, Sukuk Mudharabah is rated as "idAAA(sy)" by Pefindo.*

*Sukuk Mudharabah are not guaranteed with specific guarantee, but guaranteed with all assets of the LPEI, whether present or future fixed or non-fixed assets in accordance with the provisions of Article 1131 and 1132 of the Civil Laws.*

*During the validity period of Sukuk Mudharabah and prior to the redemption of all principal and profit sharing income of Sukuk Mudharabah, LPEI agreed to maintain and/or comply with all terms stated in the trustee agreement as outlined in the Self Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II - 2018.*

**o. Indonesia Eximbank Phase IV Shelf  
Registration Offering IV 2019**

*In April 2019, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV 2019 with a face value of Rp3,857,000 which is divided into series A, B, C, D, E and F with details as follows*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**

**o. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 (lanjutan)**

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
<b>Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV - 2019</b>				
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 Seri A	147,000	03 Mei/ May 2020	7,35% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019 Series A</i>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 Seri B	935,000	23 April/ April 2022	8,40% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019 Series B</i>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 Seri C	1,523,000	23 April/ April 2024	8,90% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019 Series C</i>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 Seri D	278,000	23 April/ April 2026	9,25% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019 Series D</i>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 Seri E	349,000	23 April/ April 2029	9,50% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019 Series E</i>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 Seri F	625,000	23 April/ April 2034	9,80% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019 Series F</i>

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp26.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 April 2019. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 23 Juli 2019.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV - 2019 Seri A telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 3 Mei 2020.

**16. Debt Securities Issued (continued)**

**o. Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019 (continued)**

<i>Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019 Series A</i>	<i>Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019 Series B</i>
<i>Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019 Series C</i>	<i>Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019 Series D</i>
<i>Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019 Series E</i>	<i>Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019 Series F</i>
<i>These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering IV with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp26,000,000, that plan to be fully issued within 2 years.</i>	

*These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on April 24, 2019. Interest is payable quarterly starting on July 23, 2019.*

*IEB Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019 Series A was fully paid upon maturity on May 3, 2020.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**

**o. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 (lanjutan)**

Bertindak sebagai wali amanat obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 digunakan untuk pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 sebesar Rp7.525 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

**p. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III 2019**

Pada bulan April 2019, LPEI menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indonesia Eximbank Tahap III Tahun 2019 ("Sukuk Mudharabah") sebesar Rp441.000 yang terdiri dari Sukuk Mudharabah seri A, B dan C, dengan rincian sebagai berikut:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
<b>Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III - 2019</b>				
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III				
2019 Seri A	230,000	03 Mei/ May 2020	7.35%	Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III - 2019 Series A
2019 Seri B	145,000	23 April/ April 2022	8.40%	Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III - 2019 Series B
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III 2019 Seri C	66,000	23 April/ April 2024	8.90%	Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III - 2019 Series C

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**

**p. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan  
Indonesia Eximbank I Tahap III 2019  
(lanjutan)**

Penerimaan dana dari penerbitan Sukuk Mudharabah ini digunakan untuk pemberian pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan eksport berdasarkan prinsip syariah.

Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Seri A adalah sebesar 38,68% dengan indikatif bagi hasil setara 7,35% per tahun, berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Seri B adalah sebesar 44,21% dengan indikatif bagi hasil setara 8,40% per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi yaitu 23 April 2019. Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Seri C adalah sebesar 46,84% dengan indikatif bagi hasil setara 8,90% per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi yaitu 23 April 2019. Sukuk Mudharabah ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Pendapatan bagi hasil akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran pendapatan bagi hasil pertama Sukuk Mudharabah seri A, B, dan C akan dilakukan pada tanggal 23 Juli 2019, sedangkan pembayaran pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus jatuh tempo pokok Sukuk Mudharabah akan dilakukan pada tanggal 3 Mei 2020 untuk Seri A, tanggal 23 April 2022 untuk Seri B, dan tanggal 23 April 2024 untuk Seri C yang juga merupakan tanggal pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III 2019 Seri A telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 3 Mei 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021, Sukuk Mudharabah yang diterbitkan, Pefindo memberikan peringkat "idAAA(sy)".

**16. Debt Securities Issued (continued)**

**p. Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia  
Eximbank Phase III 2019 (continued)**

*The fund received from Sukuk Mudharabah issuance will be used to finance earning assets in the form of export financing with sharia principles.*

*Customer's nisbah of Sukuk Mudharabah Series A at 38.68% with profit sharing indicative equivalent at 7.35% per annum, with 370 days calendar tenor since Issuance Date. Customer's nisbah of Sukuk Mudharabah Series B at 44.21% with profit sharing indicative equivalent at 8.40% per annum with 3 (three) years tenor since Issuance Date in April 23, 2019. Customer's nisbah of Sukuk Mudharabah Series C at 46.84% with profit sharing indicative equivalent at 8.90% per annum, with 5 (five) years tenor since Issuance Date in April 23, 2019. This Shelf Sukuk Mudharabah is listed at Indonesian Stock Exchange.*

*The profit sharing income is paid quarterly based on profit sharing income payment date of Sukuk Mudharabah. The first profit sharing income payment of Shelf Sukuk Mudharabah Series A, B, and C will be paid on July 23, 2019, while the last profit sharing income payment and due date of Shelf Sukuk Mudharabah Series A will be made on May 3, 2020, Series B on April 23, 2022, and Series C on April 23, 2024 for which is also the repayment date of Sukuk Mudharabah principal.*

*Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III 2019 Series A was fully paid upon maturity on May 3, 2020.*

*As of December 31, 2020 and December 31, 2021, Sukuk Mudharabah is rated as "idAAA(sy)" by Pefindo.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**

**p. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan  
Indonesia Eximbank I Tahap III 2019  
(lanjutan)**

Sukuk Mudharabah tersebut tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan LPEI baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Mudharabah dan sebelum dilunasinya dana Sukuk Mudharabah dan pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah, LPEI berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Tahap III Tahun 2019.

**q. Obligasi Berkelanjutan Indonesia  
Eximbank IV Tahap V 2019**

Pada bulan Juli 2019, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp2.000.000 yang merupakan obligasi berseri A, B, C, dan D dengan rincian sebagai berikut:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**16. Debt Securities Issued (continued)**

**p. Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia  
Eximbank Phase III 2019 (continued)**

*Sukuk Mudharabah are not guaranteed with specific guarantee, but guaranteed with all assets of the LPEI, whether present or future fixed or non-fixed assets in accordance with the provisions of Article 1131 and 1132 of the Civil Laws.*

*During the validity period of Sukuk Mudharabah and prior to the redemption of all principal and profit sharing income of Sukuk Mudharabah, LPEI agreed to maintain and/or comply with all terms stated in the trustee agreement as outlined in the Self Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III - 2019.*

**q. Indonesia Eximbank Phase V Shelf  
Registration Offering IV 2019**

*In July 2019, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV 2019 with a face value of Rp2,000,000 which is divided into series A, B, C, and D with details as follows:*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**

**q. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 (lanjutan)**

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
<b>Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V - 2019</b>				
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 Seri A				
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 Seri A	312,000	19 Juli/ July 2020	7.45% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV - 2019</i>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 Seri B	621,000	9 Juli/ July 2022	8.45% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV - 2019 Series A</i>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 Seri C	330,000	9 Juli/ July 2024	8.70% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV - 2019 Series B</i>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 Seri D	737,000	9 Juli/ July 2026	9.20% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV - 2019 Series C</i>
<i>Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV - 2019 Series D</i>				

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp26.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Juli 2019. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2019.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 Seri A telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 19 Juli 2020.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 digunakan untuk pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

**16. Debt Securities Issued (continued)**

**q. Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV 2019 (continued)**

<b>Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V - 2019</b>	<b>Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV - 2019</b>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 Seri A	<i>Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV - 2019 Series A</i>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 Seri B	<i>Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV - 2019 Series B</i>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 Seri C	<i>Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV - 2019 Series C</i>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 Seri D	<i>Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV - 2019 Series D</i>

*These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering IV with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp26,000,000, that plan to be fully issued within 2 years.*

*These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on July 10, 2019. Interest is payable quarterly starting on October 9, 2019.*

*IEB Phase V Shelf Registration Offering IV 2019 Series A was fully paid upon maturity on July 19, 2020.*

*The trustee for the Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV 2019 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV 2019 were used to finance earning assets in the form of export financing.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**

**q. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 (lanjutan)**

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 sebesar Rp3.594. yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

**r. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019**

Pada bulan September 2019, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp1.018.500 yang merupakan obligasi berseri A, B, C, dan D dengan rincian sebagai berikut:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
<b>Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI - 2019</b>				<b>Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV - 2019</b>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 Seri A	283,000	13 September/ September 2020	7.00% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV - 2019 Series A
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 Seri B	15,000	3 September/ September 2022	7.80% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV - 2019 Series B
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 Seri C	6,000	3 September/ September 2024	8.10% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV - 2019 Series C
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 Seri D	714,500	3 September / September 2026	8.50% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV - 2019 Series D

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**

**r. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 (lanjutan)**

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp26.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 September 2019. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 3 Desember 2019.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 Seri A telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 13 September 2020.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 digunakan untuk pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 sebesar Rp3.040 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

**16. Debt Securities Issued (continued)**

**r. Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV 2019 (continued)**

*These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering IV with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp26,000,000, that plan to be fully issued within 2 years*

*These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on September 4, 2019. Interest is payable quarterly starting on December 3, 2019.*

*IEB Phase VI Shelf Registration Offering IV 2019 Series A was fully paid upon maturity on September 13, 2020.*

*The trustee for the Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV 2019 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV 2019 were used to finance earning assets in the form of export financing.*

*LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV 2019 amounting to Rp3,040 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV 2019 and amortised over the term of the bonds using the effective interest rate method.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**

**s. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019**

Pada bulan Oktober 2019, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp1.058.550 yang merupakan obligasi berseri A, B, C, D dan E dengan rincian sebagai berikut:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
<b>Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII - 2019</b>				
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 Seri A	600,000	9 November/ November 2020	7.00% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV - 2019</i> <i>Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series A</i>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 Seri B	101,300	29 Oktober/ October 2022	7.80% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series B</i>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 Seri C	25,500	29 Oktober/ October 2024	8.10% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series C</i>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 Seri D	112,000	29 Oktober/ October 2026	8.50% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series D</i>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 Seri E	219,750	29 Oktober/ October 2029	8.75% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series E</i>

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp26.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Oktober 2019. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 29 Januari 2020.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 Seri A telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 9 November 2020.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 digunakan untuk pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

**16. Debt Securities Issued (continued)**

**s. Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV 2019**

*In October 2019, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV 2019 with a face value of Rp1,058,550 which is divided into series A, B, C, D and E with details as follows:*

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
<b>Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII - 2019</b>				
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 Seri A	600,000	9 November/ November 2020	7.00% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series A</i>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 Seri B	101,300	29 Oktober/ October 2022	7.80% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series B</i>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 Seri C	25,500	29 Oktober/ October 2024	8.10% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series C</i>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 Seri D	112,000	29 Oktober/ October 2026	8.50% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series D</i>
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 Seri E	219,750	29 Oktober/ October 2029	8.75% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series E</i>

*These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering IV with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp26,000,000, that plan to be fully issued within 2 years.*

*These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on October 30, 2019. Interest is payable quarterly starting on January 29, 2020.*

*IEB Phase VII Shelf Registration Offering IV 2019 Series A was fully paid upon maturity on November 9, 2020.*

*The trustee for the Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV 2019 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV 2019 were used to finance earning assets in the form of export financing.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**

**s. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 (lanjutan)**

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 sebesar Rp4.238 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

**t. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019**

Pada bulan Desember 2019, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp1.661.500 yang merupakan obligasi berseri A, B dan C dengan rincian sebagai berikut:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
<b>Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII - 2019</b>				
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 Seri A	88,000	6 Desember/ December 2022	7,50% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series A
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 Seri B	1,551,000	6 Desember/ December 2024	7,90% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series B
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 Seri C	22,500	6 Desember/ December 2026	8,20% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series C

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp26.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

**16. Debt Securities Issued (continued)**

**s. Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV 2019 (continued)**

*LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV 2019 amounting to Rp4,238 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV 2019 and amortised over the term of the bonds using the effective interest rate method.*

**t. Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV 2019**

*In December 2019, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV 2019 with a face value of Rp1,661,500 which is divided into series A, B and C with details as follows:*

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
<b>Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV - 2019</b>				
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series A				Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series A
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series B				Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series B
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series C				Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series C

*These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering IV with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp26,000,000, that plan to be fully issued within 2 years.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**

**t. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 (lanjutan)**

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Desember 2019. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 6 Maret 2020.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII - 2019 digunakan untuk pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 sebesar Rp3.323, yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

Selama periode efektif PUB Obligasi IV dan PUB Sukuk Mudharabah I, LPEI telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Tahap I sampai dengan Tahap VIII serta Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Tahap I sampai dengan Tahap IV dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp17.564.150 adapun jumlah target dana yang kurang dihimpun adalah sebesar Rp14.435.850 dari total target dana yang dihimpun sebesar Rp32.000.000. Dalam rangka pemenuhan terhadap Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, LPEI telah mengumumkan Penghentian PUB Obligasi IV dan PUB Sukuk Mudharabah I pada Laman resmi LPEI dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Maret 2020.

**16. Debt Securities Issued (continued)**

**t. *Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV 2019 (continued)***

*These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on December 9, 2019. Interest is payable quarterly starting on March 6, 2020.*

*The trustee for the Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV - 2019 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV 2019 were used to finance earning assets in the form of export financing.*

*LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV 2019 amounting to Rp3,323 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV 2019 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.*

*During the Shelf Registration Offering Bond IV and Sukuk Mudharabah I period, LPEI has issued Bond Phase I to Phase VIII and Sukuk Mudharabah Phase I to Phase IV with total funds raised amounting to Rp17,564,150, the deficiency of the target amount of funds raised is Rp14,435,850 from target funds amounting to Rp32,000,000. In order to comply with FSA Regulation No. 36/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 on Shelf Registration Offering of Debt Securities and/or Sukuk, LPEI announced Discontinuation of Shelf Registration Offering Bond IV and Sukuk Mudharabah I on LPEI's official Website and IDX's official Website on March 27, 2020.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**

**u. Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I 2020**

Pada bulan Juli 2020, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I 2020 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp48.000 dengan rincian sebagai berikut:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
<b>Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I - 2020</b>				
<b>Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I - 2020</b>				
	48,000	8 Juli/ July 2023	7,60% tetap/fixed	<i>Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V - 2020</i> <i>Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V - 2020</i>

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank V dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp22.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Juli 2020. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2020.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I 2020 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I - 2020 digunakan untuk pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I 2020 sebesar Rp905 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I 2020 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

**16. Debt Securities Issued (continued)**

**u. Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V 2020**

In July 2020, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V 2020 with a face value of Rp48,000 with details as follows:

<i>Obligasi Berkelaanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I - 2020</i>	<i>Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V - 2020</i>
	<i>Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V - 2020</i>

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering V with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp22,000,000, that plan to be fully issued within 2 years.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on July 9, 2020. Interest is payable quarterly starting on October 8, 2020.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V 2020 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V - 2020 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V 2020 amounting to Rp905 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V 2020 and amortised over the term of the bonds using the effective interest rate method.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**

**v. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I 2020**

Pada bulan Juli 2020, LPEI menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indonesia Eximbank Tahap I Tahun 2020 ("Sukuk Mudharabah") sebesar Rp100.000, dengan rincian sebagai berikut:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
<b>Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I - 2020</b>				<b>Shelf Sukuk Mudharabah II Indonesia Eximbank Phase I - 2020</b>
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I - 2020	100,000	18 Juli/ July 2021	6.75% tetap/fixed	Shelf Sukuk Mudharabah II Indonesia Eximbank Phase I - 2020

Penerimaan dana dari penerbitan Sukuk Mudharabah ini digunakan untuk pemberian pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor berdasarkan prinsip syariah.

Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah adalah sebesar 47,37% dengan indikatif bagi hasil setara 6,75% per tahun, berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi yaitu 8 Juli 2020. Sukuk Mudharabah ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Pendapatan bagi hasil akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran pendapatan bagi hasil pertama Sukuk Mudharabah akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2020, sedangkan pembayaran pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus jatuh tempo pokok Sukuk Mudharabah akan dilakukan pada tanggal 18 Juli 2021 yang juga merupakan tanggal pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I 2020 telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 18 Juli 2021.

**16. Debt Securities Issued (continued)**

**v. Shelf Sukuk Mudharabah II Indonesia Eximbank Phase I 2020**

On July 2020, LPEI issued Shelf Sukuk Mudharabah II Indonesia Eximbank Phase I Year 2020 ("Sukuk Mudharabah") amounting to Rp100,000, as follows:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
<b>Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I - 2020</b>				<b>Shelf Sukuk Mudharabah II Indonesia Eximbank Phase I - 2020</b>
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I - 2020	100,000	18 Juli/ July 2021	6.75% tetap/fixed	Shelf Sukuk Mudharabah II Indonesia Eximbank Phase I - 2020

The fund received from Sukuk Mudharabah issuance will be used to finance earning assets in the form of export financing with sharia principles.

Customer's nisbah of Sukuk Mudharabah at 47.37% with profit sharing indicative equivalent at 6.75% per annum, with 370 days calendar tenor since Issuance Date in July 8, 2020. This Sukuk Mudharabah is listed at Indonesian Stock Exchange.

The profit sharing income is paid quarterly based on profit sharing income payment date of Sukuk Mudharabah. The first profit sharing income payment of Sukuk Mudharabah will be paid on October 8, 2020, while the last profit sharing income payment and due date of Sukuk Mudharabah will be made on July 18, 2021, for which is also the repayment date of Sukuk Mudharabah principal.

Shelf Sukuk Mudharabah II Indonesia Eximbank Phase I 2020 was fully paid upon maturity on July 18, 2021.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**

v. **Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I 2020 (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2020, Sukuk Mudharabah yang diterbitkan, Pefindo memberikan peringkat "idAAA(sy)".

Sukuk Mudharabah tersebut tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan LPEI baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Mudharabah dan sebelum dilunasinya dana Sukuk Mudharabah dan pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah, LPEI berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwalianan Sukuk Mudharabah II Indonesia Eximbank Tahap I Tahun 2020.

Sebelum dilunasinya semua pokok obligasi, bunga obligasi dan biaya lain yang harus ditanggung oleh LPEI berkenaan dengan seluruh Obligasi, LPEI berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwalianan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank memiliki peringkat "idAAA" berdasarkan PT Pefindo pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021.

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan LPEI baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

**16. Debt Securities Issued (continued)**

v. **Shelf Sukuk Mudharabah II Indonesia Eximbank Phase I 2020 (continued)**

As of December 31, 2020, Sukuk Mudharabah is rated as "idAAA(sy)" by Pefindo.

Sukuk Mudharabah are not guaranteed with specific guarantee, but guaranteed with all assets of the LPEI, whether present or future fixed or non-fixed assets in accordance with the provisions of Article 1131 and 1132 of the Civil Laws.

During the validity period of Sukuk Mudharabah and prior to the redemption of all principal and profit sharing income of Sukuk Mudharabah, LPEI agreed to maintain and/or comply with all terms stated in the trustee agreement as outlined in the Self Sukuk Mudharabah II Indonesia Eximbank Phase I - 2020.

Before settlement of all the principal and interest on all LPEI Bonds ("Bonds") and other charges payable by LPEI in connection with the issuance of Bonds, LPEI agreed to maintain and/or comply with all terms stated in the trustee agreement as outlined in the Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering .

Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering were rated "idAAA" by PT Pefindo as of December 31, 2020 and December 31, 2021.

The bonds are not secured by specific collateral but are secured by all of LPEI's fixed and non-fixed assets, both existing and will exist in the future, in compliance with the regulations of Indonesian Civil Law Articles 1131 and 1132.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)**

Obligasi ini tidak dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa preferensi dengan hak-hak kreditur LPEI lain sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku.

**Persyaratan dan kondisi pembatasan**

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, LPEI telah memenuhi seluruh persyaratan dan kondisi pembatasan yang dipersyaratkan, kecuali pemenuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK No. 40/POJK.05/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI) (POJK No. 40) Pasal 14 ayat (2) perihal pemenuhan terhadap rasio Non Performing Financing (NPF) setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan pembiayaan yang melampaui ketentuan yang berlaku yaitu di atas 5%. Atas pelampauan tersebut, sesuai dengan POJK No. 40 Pasal 71, LPEI wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran ketentuan NPF bersih oleh OJK.

Sehubungan dengan pemenuhan terhadap POJK tersebut, LPEI telah menyampaikan Pemenuhan Ketentuan Pembiayaan Bermasalah (NPF) ke OJK melalui surat LPEI kepada OJK pada tanggal 6 Februari dan 18 Februari 2020 dengan surat No. BS.0016/CEO/02/2020 dan Pemenuhan Action Plan Pembiayaan Bermasalah (NPF) melalui surat LPEI kepada OJK No. BS.0027/CEO/02/2020 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pada tanggal 11 Februari 2019 dengan surat Nomor: BS.0039/CEO/02/2019 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018. Atas surat-surat tersebut, OJK menyatakan tidak keberatan atas rencana pemenuhan ketentuan mengenai rasio NPF bersih yang disampaikan oleh LPEI untuk dapat memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (2) POJK No. 40 tersebut (Catatan 9h.9).

Selanjutnya LPEI wajib melaksanakan rencana pemenuhan yang telah disampaikan kepada OJK tersebut dan melaporkan perkembangan rencana pemenuhan secara periodik kepada OJK (Catatan 9h.9).

**16. Debt Securities Issued (continued)**

*These bonds are not guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia.*

*The bondholders' right is paripassu without preference offer other LPEI creditors' rights in compliance with prevailing regulations.*

**Terms and required covenants**

*As of December 31, 2021 and 2020, LPEI has complied with all the terms and required covenants, except for the fulfillment of the Financial Services Authority Regulations (POJK No.40/POJK.05/2015 dated December 21, 2015 regarding Development and Supervision of LPEI (POJK No. 40) Article 14 paragraph (2) concerning the fulfillment of Non Performing Financing (NPF) net of allowance for impairment losses on financing ratio that exceeds the prevailing provision, i.e. above 5%. For the excess over prevailing provision, in accordance with POJK No. 40 Article 71, LPEI must submit action plan no later than 1 (one) month from the date of OJK determine the incompliance of NPF net.*

*In relation with the requirement of POJK, LPEI has submitted action plan in fulfilling the compliance with the Non Performing Financing (NPF) requirement to OJK through letter from LPEI to OJK on February 6 and February 18, 2020, No. BS.0016/CEO/02/2020 and fulfillment of the Action Plan of Non Performing Financing (NPF) through letter from LPEI No. BS.0027/CEO/02/2020 for the year ended December 31, 2019 and as of February 11, 2019 through letter No. BS.0039/CEO/02/2019 for the year ended December 31, 2018. Through those letters, OJK has communicated that it has no objection to the action plan in fulfilling the compliance with NPF net ratio that LPEI submitted in order to comply with the requirement of Article 14 paragraph 2 POJK No. 40 (Note 9h.9).*

*Furthermore, LPEI must implement the action plan that has been submitted to OJK and submit progress report of the action plan periodically for OJK (Note 9h.9).*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**17. Pinjaman Yang Diterima**

**17. Fund Borrowings**

	<i>31 Desember / December 31,</i>		<i>Borrowings Syndicated Bilateral Total</i>
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
Pinjaman			
Sindikasi	15,912,055	18,959,188	
Bilateral	12,887,516	9,640,585	
<b>Total</b>	<b>28,799,571</b>	<b>28,599,773</b>	

Di bawah ini adalah rincian pinjaman yang diterima berdasarkan pemberi pinjaman:

*Below are the details of fund borrowings based on the lenders:*

**Pinjaman Sindikasi**

**Borrowings - Syndicated**

<i>31 Desember/ December 31, 2021</i>				
<i>Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)</i>	<i>Ekuivalen/ Equivalent Rupiah</i>	<i>Tanggal efektif/ Effective date</i>	<i>Tanggal jatuh tempo/ Maturity date</i>	<i>Foreign currencies United States Dollar with facility agent</i>
<b>Mata uang asing</b>				
<b>Dolar Amerika Serikat</b>				
<i>Facility agent</i>				
MUFG Bank. Ltd.	348,900,450	4,972,704	24 Mei/ May 24, 2018 23 Agustus/ Agustus 23, 2018	24 Mei/ May 24, 2023 24 Mei/ May 24, 2023
MUFG Bank. Ltd.	69,776,662	994,492		
		5,967,196		
Chinatrust Banking Corporation Ltd	499,183,839	7,114,618	23 Mei/ May 23, 2019 1 Juli/ July 1, 2019	23 Juni/ June 23, 2022 23 Juni/ June 23, 2022
Chinatrust Banking Corporation Ltd	99,826,019	1,422,770		
		8,537,388		
Commerzbank	98,752,596	1,407,471	20 Mei/ May 20, 2021	20 Mei/ May 20, 2024
<b>Total</b>		<b>15,912,055</b>		

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**17. Pinjaman Yang Diterima (lanjutan)**

**Pinjaman Sindikasi (lanjutan)**

**17. Fund Borrowings (continued)**

**Borrowings – Syndicated (continued)**

31 Desember/ December 31, 2020				
Mata uang asing Dolar Amerika Serikat Pihak ketiga Facility agent	Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Tanggal efektif/ Effective date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date
MUFG Bank. Ltd.	249,783,532	3,509,459	24 Mei/ May 24, 2018	24 Mei/ May 24, 2021
MUFG Bank. Ltd.	84,922,488	1,193,161	23 Agustus/ Agustus 23, 2018	24 Mei/ May 24, 2021
MUFG Bank. Ltd.	348,132,144	4,891,257	24 Mei/ May 24, 2018	24 Mei/ May 24, 2023
MUFG Bank. Ltd.	69,620,570	978,169	23 Agustus/ Agustus 23, 2018	24 Mei/ May 24, 2023
		10,572,046		
Chinatrust Banking Corporation Ltd	497,485,345	6,989,669	23 Mei/ May 23, 2019	23 Juni/ June 23, 2022
Chinatrust Banking Corporation Ltd	99,464,271	1,397,473	1 Juli/ July 1, 2019	23 Juni/ June 23, 2022
		8,387,142		
<b>Total</b>		<b>18,959,188</b>		<b>Total</b>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**17. Pinjaman Yang Diterima (lanjutan)**

**Pinjaman Bilateral**

31 Desember/ December 31, 2021					Rupiah Third parties
Jumlah nosisional Mata uang asing/ Notional amount Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekivalen/ Equivalent Rupiah	Tanggal efektif/ Effective date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date		
<b>Rupiah</b>					
Pihak ketiga					
PT Bank Central Asia Tbk	2,000,000	September 21, 2021 30 September/ September 30, 2021	September 21, 2023 6 Januari/ January 6, 2022		PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1,250,000				PT Bank Danamon Indonesia Tbk
<b>Total mata uang Rupiah</b>	<b>3,250,000</b>				<b>Total Rupiah</b>
<b>Mata uang asing</b>					
Dolar Amerika Serikat					<b>Foreign currencies</b>
Pihak ketiga					<b>United States Dollar</b>
PT Bank ICBC Indonesia	147,523,900	2,102,584	29 September/ September 29, 2020 19 November/ November 19, 2020	29 September/ September 29, 2025 17 November/ November 17, 2023	PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank ICBC Indonesia	128,207,510	1,827,278			PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank ICBC Indonesia	98,291,821	1,400,904	November 19, 2020	November 19, 2025	PT Bank ICBC Indonesia
		<b>5,330,766</b>			
China Eximbank	198,500,616	2,829,130	21 Oktober/ October 21, 2020 21 Mei/ May 21, 2021	20 Oktober/ October 20, 2023 20 Mei/ May 20, 2022	China Eximbank
Standard Chartered Bank, Jakarta	99,916,704	1,424,063			Standard Chartered Bank, Jakarta
<b>Total Dolar Amerika Serikat</b>	<b>9,583,959</b>				<b>Total Dollar</b>
<b>Euro Eropa</b>					
Pihak berelasi (Catatan 38)					<b>European Euro</b>
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	631,261	10,171	4 Juli/ July 4, 2008	30 Juni/ June 30, 2044	Related parties (Note 38) Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	791,308	12,750	23 Desember/ December 23, 2010	30 Juni/ June 30, 2044	Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	475,165	7,656	30 Desember/ December 30, 2010	30 Juni/ June 30, 2044	Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	808,756	13,031	9 Maret/ March 9, 2011	30 Juni/ June 30, 2044	Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	617,510	9,949	4 Mei/ May 4, 2011	30 Juni/ June 30, 2044	Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance
<b>Total Euro Eropa</b>	<b>53,557</b>				<b>Total European Euro</b>
<b>Total mata uang asing</b>	<b>9,637,516</b>				<b>Total foreign currency</b>
<b>Total Pinjaman Bilateral</b>	<b>12,887,516</b>				<b>Total Bilateral Borrowings</b>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**17. Pinjaman Yang Diterima (lanjutan)**

**Pinjaman Bilateral (lanjutan)**

**17. Fund Borrowings (continued)**

**Borrowings Bilateral (continued)**

31 Desember/ December 31, 2020				
Rupiah Pihak ketiga	Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Tanggal efektif/ Effective date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1,575,000	26 Juni/ June 26, 2020	23 Maret/ March 23, 2021	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
<b>Total mata uang Rupiah</b>	<b>1,575,000</b>			<b>Rupiah Third parties</b>
<b>Mata uang asing</b>				<b>Foreign currencies</b>
<b>Dolar Amerika Serikat</b>				<b>United States Dollar</b>
Pihak ketiga				Third parties
PT Bank ICBC Indonesia	146,915,529	2,064,163	29 September/ September 29, 2020 19 November/ November 19, 2020	29 September/ September 29, 2025 17 November/ November 17, 2023
PT Bank ICBC Indonesia	127,298,781	1,788,548	19 November/ November 19, 2020	19 November/ November 19, 2025
PT Bank ICBC Indonesia	97,888,071	1,375,327	November 19, 2020	November 19, 2025
		5,228,038		
China Eximbank	197,702,960	2,777,727	21 Oktober/ October 21, 2020	20 Oktober/ October 20, 2023
<b>Total Dolar Amerika Serikat</b>	<b>8,005,765</b>			<b>China Eximbank Total Dollar</b>
<b>Euro Eropa</b>				<b>European Euro</b>
Pihak berelasi (Catatan 38)				Related parties (Note 38)
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	659,178	11,360	4 Juli/ July 4, 2008	Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	826,302	14,241	23 Desember/ December 23, 2010	Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	496,178	8,551	30 Desember/ December 30, 2010	Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	844,522	14,555	9 Maret/ March 9, 2011	Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	644,819	11,113	4 Mei/ May 4, 2011	Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance
<b>Total Euro Eropa</b>	<b>59,820</b>			<b>Total European Euro</b>
<b>Total mata uang asing</b>	<b>8,065,585</b>			<b>Total foreign currency</b>
<b>Total Pinjaman Bilateral</b>	<b>9,640,585</b>			<b>Total Bilateral Borrowings</b>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**17. Pinjaman Yang Diterima (lanjutan)**

**Pinjaman Sindikasi (lanjutan)**

**a. Pinjaman sindikasi dengan facility agent MUFG Bank, Ltd. (lanjutan)**

Pada tanggal 15 Mei 2018, LPEI menandatangani fasilitas pinjaman sindikasi dari bank-bank asing dan lokal sebesar USD950.000.000 (nilai penuh), pada tanggal 23 Juli 2018 diamandemen dan dilakukan peningkatan jumlah pinjaman menjadi sebesar USD1.150.000.000 yang terbagi menjadi Tranche A sebesar USD395.000.000 (nilai penuh) yang telah jatuh tempo pada tanggal 3 Juli 2019 dan telah dilunasi. Tranche B sebesar USD335.000.000 (nilai penuh) yang telah jatuh tempo pada tanggal 24 Mei 2021 dan telah dilunasi, dan Tranche C sebesar USD420.000.000 (nilai penuh) yang akan tempo pada tanggal 24 Mei 2023. Bank yang bertindak sebagai facility agent adalah MUFG Bank Ltd. dengan rincian per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

**Tranche B**

<b>Komposisi sindikasi</b>	<b>Jumlah fasilitas/ Facility amount (USD)</b>	<b>Tranche B</b>
Bank peserta:		Participant banks:
• United Overseas Bank Limited, Singapura	61,750,000	United Overseas Bank Limited, Singapore •
• First Abu Dhabi Bank P.J.S.C., - Cabang Singapore	35,000,000	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. • - Singapore Branch
• The Bank of Yokohama, Ltd.	28,050,000	The Bank of Yokohama Ltd. •
• Oversea-Chinese Banking Corporation., Limited. Singapore	25,000,000	Oversea-Chinese Banking Corporation • Limited, Singapore
• Shinsei Bank, Limited	25,000,000	Shinsei Bank Limited •
• Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Cabang Offshore Banking	20,500,000	Mega International Commercial • Bank Co. Ltd., Offshore Banking Branch
• PT Bank Danamon Indonesia Tbk .	20,000,000	PT Bank Danamon Indonesia Tbk. •
• Shinkin Central Bank	14,250,000	Shinkin Central Bank •
• Australia and New Zealand Banking Group Limited, Singapura	12,000,000	Australia and New Zealand Banking. • Group Limited, Singapore
• PT Bank Mizuho Indonesia	10,000,000	PT Bank Mizuho Indonesia •
• Apple Bank for Savings	9,750,000	Apple Bank for Savings •
• The Chiba Bank Ltd., Cabang Hong Kong	9,750,000	The Chiba Bank Ltd., Hong Kong Branch •
• The Minato Bank Ltd.	9,750,000	The Minato Bank Ltd. •
• Bank of Taiwan, Cabang Singapura	9,500,000	Bank of Taiwan, Singapore Branch •
• The Gunma Bank Ltd.	9,500,000	The Gunma Bank Ltd. •
• The Hachijuni Bank Ltd.	9,500,000	The Hachijuni Bank Ltd. •
• The Iyo Bank Ltd.	9,500,000	The Iyo Bank Ltd. •
• Standard Chartered Bank, London	8,700,000	Standard Chartered Bank, London •
• Bank of Panshin	5,000,000	Bank of Panshin •
• The Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd., Cabang Offshore Banking	2,500,000	The Shanghai Commercial & Savings • Bank Ltd., Offshore Banking Branch
	<b>335,000,000</b>	

**17. Fund Borrowings (continued)**

**Borrowings Syndicated (continued)**

**a. Syndicated loan with MUFG Bank,  
Ltd. as facility agent (continued)**

On May 15, 2018, LPEI signed a syndicated loan facility amounting to USD950,000,000 (full amount), with foreign and local banks and was amended and increasing the loan amounted to USD1,150,000,000 on July 23, 2018 which was divided into Tranche A amounting USD395,000,000 (full amount) which already matured on July 3, 2019 and already full paid. Tranche B amounting USD335,000,000 (full amount) which already matured on May 24, 2021 and already full paid, and Tranche C amounting USD420,000,000 (full amount) which will be mature on May 24, 2023. Bank acting as the facility agent is MUFG Bank Ltd. with the details as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**17. Pinjaman Yang Diterima (lanjutan)**

**Pinjaman Sindikasi (lanjutan)**

**a. Pinjaman sindikasi dengan facility agent MUFG Bank, Ltd. (lanjutan)**

Tranche C

Komposisi sindikasi	Jumlah fasilitas/ Facility amount (USD)
Bank peserta:	
• National Bank of Kuwait S.A.K.P., Cabang Singapore	46,000,000
• Shinsei Bank. Limited	30,000,000
• United Overseas Bank Limited, Singapore	30,000,000
• First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.	
- Cabang Singapura	25,000,000
• Mega International Commercial Bank Co. Ltd., Cabang Offshore Banking	25,000,000
• CTBC Bank Co., Ltd., Singapore	19,000,000
• DZ Bank Ag. Deutsche Zentral	
- Genossenschaftsbank, Cabang Singapura	19,000,000
• The Chugoku Bank Ltd., Cabang Hong Kong	19,000,000
• The Joyo Bank Ltd.	19,000,000
• The Hachijuni Bank Ltd.	14,500,000
• KGI Bank, Taipei	14,250,000
• Land Bank of Taiwan, Cabang Offshore Banking	14,250,000
• The Hyakugo Bank Ltd.	14,250,000
• E.SUN Commercial Bank, Ltd., Cabang Singapura	11,500,000
• The Export-Import Bank of The Republic Of China, Taipei	11,500,000
• PT Bank Mizuho Indonesia	10,000,000
• Bank of Kaohsiung, Cabang Offshore Banking	9,750,000
• Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Cabang Singapura	9,750,000
• Taishin International Bank Co. Ltd., Taipei	9,750,000
• Taiwan Business Bank, Cabang Offshore Banking	9,750,000
• The Shizuoka Bank, Cabang Hong Kong	9,750,000
• Bank of Taiwan, Cabang Singapura	9,500,000
• The Gunma Bank Ltd.	9,500,000
• The Iyo Bank Ltd.	9,500,000
• Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Singapore	8,000,000
• Australia and New Zealand Banking Group Limited, Singapura	5,000,000
• MUFG Bank. Ltd., Jakarta	5,000,000
• The Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd., Cabang Offshore Banking	2,500,000
	<b>420,000,000</b>

**17. Fund Borrowings (continued)**

**Borrowings Syndicated (continued)**

**a. Syndicated loan with MUFG Bank, Ltd. as facility agent (continued)**

Tranche C

Composition of the syndicate
Participant banks:
National Bank of Kuwait S.A.K.P., • Singapore Branch
Shinsei Bank Limited • United Overseas Bank Limited, Singapore • First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. • -Singapore Branch
Mega International Commercial • Bank Co. Ltd., Offshore Banking Branch
CTBC Bank Co., Ltd., Singapore • DZ Bank Ag. Deutsche Zentral • - Genossenschaftsbank, Singapore Branch
The Chugoku Bank Ltd., Hong Kong Branch • The Joyo Bank Ltd. • The Hachijuni Bank Ltd. • KGI Bank, Taipei • Land Bank of Taiwan, Offshore • Banking Branch
The Hyakugo Bank Ltd. • E.SUN Commercial Bank, Ltd. • Singapore Branch
The Export-Import Bank of • The Republic Of China, Taipei • PT Bank Mizuho Indonesia • Bank of Kaohsiung, Offshore • Banking Branch
Hua Nan Commercial Bank, Ltd. • Singapore Branch
Taishin International Bank Co. Ltd., Taipei • Taiwan Business Bank, • Offshore Banking Branch
The Shizuoka Bank, • Hong Kong Branch
Bank of Taiwan, Singapore Branch • The Gunma Bank Ltd. • The Iyo Bank Ltd.
Oversea-Chinese Banking Corporation • Limited, Singapore
Australia and New Zealand Banking • Group Limited, Singapore
MUFG Bank. Ltd., Jakarta • The Shanghai Commercial & Savings • Bank Ltd., Offshore Banking Branch

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**17. Pinjaman Yang Diterima (lanjutan)**

**Pinjaman Sindikasi (lanjutan)**

**a. Pinjaman sindikasi dengan facility agent MUFG Bank, Ltd. (lanjutan)**

Tingkat kisaran suku bunga sebesar LIBOR ditambah marjin tertentu untuk Tranche B dan C pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

**b. Pinjaman sindikasi dengan facility agent CTBC Bank Co., Ltd.**

Pada tanggal 15 Mei 2019, LPEI menandatangani fasilitas pinjaman sindikasi dari bank-bank asing sebesar USD900.000.000 (nilai penuh) yang terbagi menjadi Tranche A sebesar USD600.000.000 (nilai penuh) yang akan jatuh tempo pada tanggal 23 Juni 2022, dan Tranche B sebesar USD300.000.000 (nilai penuh) yang telah dilunasi pada tanggal 17 Desember 2020. Bank yang bertindak sebagai *facility agent* adalah CTBC Bank Co. Ltd, dengan rincian per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

**Tranche A**

**Komposisi sindikasi**

**17. Fund Borrowings (continued)**

**Borrowings Syndicated (continued)**

**a. Syndicated loan with MUFG Bank, Ltd. as facility agent (continued)**

*The syndicated loan bear interest rate of LIBOR plus a certain margin for Tranche B and C as of December 31, 2021 and 2020.*

**b. Syndicated loan with CTBC Bank Co., Ltd. as facility agent**

*On May 15, 2019, LPEI signed a syndicated loan facility amounting to USD900,000,000 (full amount) with foreign banks which was divided into Tranche A amounting USD600,000,000 (full amount) which will be mature on September 23, 2022, and Tranche B amounting USD300,000,000 (full amount) which has been repaid on December 17, 2020. Bank acting as the facility agent is CTBC Bank Co. Ltd., with the details as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:*

**Tranche A**

<b>Komposisi sindikasi</b>	<b>Jumlah fasilitas/ Facility amount (USD)</b>	<b>Composition of the syndicate</b>
Bank peserta: China Development Bank, Kantor Cabang Hong Kong	65,000,000	Participant banks: China Development Bank, Hong Kong Branch
Industrial and Commercial Bank of China Limited, Kantor Cabang Singapura	65,000,000	Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch
The Norinchukin Bank, Kantor Cabang Singapura	65,000,000	The Norinchukin Bank, Singapore Branch
National Bank of Kuwait S.A.K.P., Kantor Cabang Singapura	50,000,000	National Bank of Kuwait S.A.K.P., Singapore Branch
CTBC Bank Co Ltd, Singapura	28,343,750	CTBC Bank Co Ltd, Singapore
State Bank of India, Cabang Singapura	34,156,250	State Bank of India, Singapore Branch
Standard Chartered Bank	33,750,000	Standard Chartered Bank
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited, Kantor Cabang Singapura	30,000,000	Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited, Singapore Branch
Australia and New Zealand Banking Group Limited, Singapura	24,156,250	Australia and New Zealand Banking Group Limited, Singapore
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. Kantor Cabang Singapura	24,156,250	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. Singapore Branch
Mizuho Bank, Ltd., Kantor Cabang Singapura	24,156,250	Mizuho Bank, Ltd., Singapore Branch
DZ Bank Ag. Deutsche Zentral Genossenschaftsbank, Cabang Singapura	22,500,000	DZ Bank Ag. Deutsche Zentral Genossenschaftsbank, Singapore Branch
Shinsei Bank, Limited	20,000,000	Shinsei Bank, Limited
MUFG Bank, Ltd., Kantor Cabang Singapura	18,312,500	MUFG Bank, Ltd., Singapore Branch
United Overseas Bank Limited	17,468,750	United Overseas Bank Limited

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**17. Pinjaman Yang Diterima (lanjutan)**

**Pinjaman Sindikasi (lanjutan)**

**b. Pinjaman sindikasi dengan *facility agent* CTBC Bank Co., Ltd. (lanjutan)**

**Tranche A**

<b>Komposisi sindikasi</b>	<b>Jumlah fasilitas/ Facility amount (USD)</b>	<b>Tranche A</b>
The Export-Import Bank of The Republic of China	15,000,000	The Export-Import Bank of The Republic of China
The Hyakugo Bank, Ltd.	15,000,000	The Hyakugo Bank, Ltd.
Cathay United Bank	10,000,000	Cathay United Bank
The Nomura Trust and Banking Co., Ltd.	10,000,000	The Nomura Trust and Banking Co., Ltd.
Eastspring Investments SICAV-FIS-Asia Pacific Loan Fund	5,000,000	Eastspring Investments SICAV-FIS-Asia Pacific Loan Fund
The Gunma Bank, Ltd.	5,000,000	The Gunma Bank, Ltd.
The Hokkoku Bank, Ltd., Kantor Cabang Singapura	5,000,000	The Hokkoku Bank, Ltd., Singapore Branch
Kexim Bank (UK) Limited	5,000,000	Kexim Bank (UK) Limited
Industrial Bank of Korea, Cabang London	5,000,000	Industrial Bank of Korea, Cabang London
Industrial Bank of Korea		Industrial Bank of Korea
A Company incorporated under the laws of Republic of Korea and the liability of its member is Limited		A Company incorporated under the laws of Republic of Korea and the liability of its member is Limited
Hong Kong Branch	3,000,000	Hong Kong Branch
	<b>600,000,000</b>	

**c. Commerzbank AG**

Pada tanggal 29 Januari 2021, LPEI menandatangani perjanjian fasilitas sindikasi dengan bank-bank asing sebesar USD300.000.000 (nilai penuh).

Pada tanggal 20 Mei 2021, LPEI melakukan penarikan sebesar USD100.000.000 (nilai penuh) dari dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR (3 bulan) ditambah marjin tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2024. Bank yang bertindak sebagai *facility agent* adalah Commerzbank AG, dengan rincian per tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

**17. Fund Borrowings (continued)**

**Borrowings Syndicated (continued)**

**b. Syndicated loan with CTBC Bank Co., Ltd. as *facility agent* (continued)**

**Tranche A**

<b>Komposisi sindikasi</b>	<b>Jumlah fasilitas/ Facility amount (USD)</b>	<b>Composition of the syndicate</b>
The Export-Import Bank of The Republic of China	15,000,000	The Export-Import Bank of The Republic of China
The Hyakugo Bank, Ltd.	15,000,000	The Hyakugo Bank, Ltd.
Cathay United Bank	10,000,000	Cathay United Bank
The Nomura Trust and Banking Co., Ltd.	10,000,000	The Nomura Trust and Banking Co., Ltd.
Eastspring Investments SICAV-FIS-Asia Pacific Loan Fund	5,000,000	Eastspring Investments SICAV-FIS-Asia Pacific Loan Fund
The Gunma Bank, Ltd.	5,000,000	The Gunma Bank, Ltd.
The Hokkoku Bank, Ltd., Singapore Branch	5,000,000	The Hokkoku Bank, Ltd., Singapore Branch
Kexim Bank (UK) Limited	5,000,000	Kexim Bank (UK) Limited
Industrial Bank of Korea, Cabang London	5,000,000	Industrial Bank of Korea, Cabang London
Industrial Bank of Korea		Industrial Bank of Korea
A Company incorporated under the laws of Republic of Korea and the liability of its member is Limited		A Company incorporated under the laws of Republic of Korea and the liability of its member is Limited
Hong Kong Branch	3,000,000	Hong Kong Branch
	<b>600,000,000</b>	

**c. Commerzbank AG**

On January 29, 2021, LPEI signed a syndicated loan facility amounting to USD300,000,000 (full amount) with foreign banks.

On May 20, 2021, LPEI has withdrawal amounted to USD100,000,000 (full amount), which bear interest rate at LIBOR (3 months) plus a certain margin and will be matured on May 20, 2024. Bank acting as the *facility agent* is Commerzbank AG, with the details as of December 31, 2021 are as follows:

<b>Komposisi sindikasi</b>	<b>Jumlah fasilitas/ Facility amount (USD)</b>	<b>Composition of the syndicate</b>
Bank peserta: Commerzbank AG Frankfurt Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd	80,000,000 20,000,000 <b>100,000,000</b>	Participant banks: Commerzbank AG Frankfurt Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**17. Pinjaman Yang Diterima (lanjutan)**

**Pinjaman Bilateral**

- d. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan-Perjanjian Penerusan Pinjaman atas Fasilitas Kredit dari *Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW)*

LPEI memperoleh fasilitas kredit dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan sesuai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman No. SLA-1169/DP3/2004 tanggal 30 Juni 2004. Pinjaman ini berasal dari *Kreditanslat fur Wiederaufbau (KfW)* melalui Pemerintah dengan jumlah maksimum sebesar EUR4.500.000 (nilai penuh) yang digunakan untuk pembiayaan efisiensi industri dan kontrol fase II terhadap polusi di Indonesia. Jangka waktu pinjaman adalah empat puluh tahun sampai dengan 30 Juni 2044, termasuk masa tenggang sepuluh tahun atas pembayaran pokok. Tingkat suku bunga tetap per tahun adalah 1,25%.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, LPEI memiliki saldo pinjaman masing-masing sebesar EUR3.397.500 dan EUR3.471.000.

Tidak terdapat aset yang dijaminkan oleh LPEI atas seluruh pinjaman yang diterima di atas.

e. **China Eximbank**

Pada tanggal 25 September 2020, LPEI menandatangani perjanjian fasilitas dengan China Eximbank sebesar USD200.000.000 (nilai penuh).

Pada tanggal 21 Oktober 2020, LPEI melakukan penarikan sebesar USD200.000.000 (nilai penuh) dari China Eximbank dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR (3 bulan) ditambah margin tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2023.

**17. Fund Borrowings (continued)**

**Borrowings Bilateral**

- d. *Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance Subsidiary Loan Agreement on Credit Facility from Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW)*

*LPEI obtained a credit facility from the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance based on Subsidiary Loan Agreement No. SLA-1169/DP3/2004 dated June 30, 2004. This loan was granted by Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) through the Government with a maximum amount of EUR4,500,000 (full amount) that is intended to be used for financing industrial efficiency and pollution control phase II in Indonesia. The facility has a term of forty years up to June 30, 2044, including a grace period of ten years for the principal payments. The loan has a fixed interest rate of 1.25%.*

*As of December 31, 2021 and 2020, LPEI has a total outstanding borrowings of EUR3,397,500 and EUR3,471,000, respectively.*

*There are no assets pledged as collateral by LPEI for all of the above fund borrowings.*

e. **China Eximbank**

*On September 25, 2020, LPEI signed a Facility Agreement from China Eximbank amounting to USD200,000,000 (full amount).*

*On October 21, 2020, LPEI has withdrawal amounted to USD200,000,000 (full amount) from China Eximbank, which bear interest rate at LIBOR (3 months) plus a certain margin and will be mature on October 20, 2023.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**17. Pinjaman Yang Diterima (lanjutan)**

**Pinjaman Bilateral (lanjutan)**

**f. PT Bank ICBC Indonesia**

Pada tanggal 24 September 2020, LPEI menandatangani fasilitas pinjaman *Bilateral Committed Loan Credit* dengan PT Bank ICBC Indonesia sebesar USD380.000.000 (nilai penuh).

Pada tanggal 29 September 2020, LPEI melakukan penarikan sebesar USD150.000.000 (nilai penuh) dari PT Bank ICBC Indonesia dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR (3 bulan) ditambah marjin tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 September 2025.

Pada tanggal 19 November 2020, LPEI melakukan penarikan sebesar USD100.000.000 (nilai penuh) dari PT Bank ICBC Indonesia dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR (3 bulan) ditambah marjin tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 November 2025.

Pada tanggal 19 November 2020, LPEI melakukan penarikan sebesar USD130.000.000 (nilai penuh) dari PT Bank ICBC Indonesia dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR (3 bulan) ditambah marjin tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 November 2023.

**g. Standard Chartered Bank Indonesia**

Pada tanggal 18 Mei 2021, LPEI menandatangani perjanjian fasilitas dengan Standard Chartered Bank Indonesia sebesar USD100.000.000 (nilai penuh).

Pada tanggal 21 Mei 2021, LPEI melakukan penarikan sebesar USD100.000.000 (nilai penuh) dari Standard Chartered Bank Indonesia dengan tingkat suku bunga tetap yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2022.

**17. Fund Borrowings (continued)**

**Borrowings Bilateral (continued)**

**f. PT Bank ICBC Indonesia**

*On September 24, 2020, LPEI signed a Bilateral Committed Loan Credit from PT Bank ICBC Indonesia amounting to USD380,000,000 (full amount).*

*On September 29, 2020, LPEI has withdrawal amounted to USD150,000,000 (full amount) from PT Bank ICBC Indonesia, which bear interest rate at LIBOR (3 months) plus a certain margin and will be mature on September 29, 2025.*

*On November 19, 2020, LPEI has withdrawal amounted to USD100, 000,000 (full amount) from PT Bank ICBC Indonesia, which bear interest rate at LIBOR (3 months) plus a certain margin and will be mature on November 19, 2025.*

*On November 19, 2020, LPEI has withdrawal amounted to USD130, 000,000 (full amount) from PT Bank ICBC Indonesia, which bear interest rate at LIBOR (3 months) plus a certain margin and will be mature on November 17, 2023.*

**g. Standard Chartered Bank Indonesia**

*On May 18, 2021, LPEI signed a Facility Agreement from Standard Chartered Bank Indonesia amounting to USD100,000,000 (full amount).*

*On May 21, 2021, LPEI has withdrawal amounted to USD100,000,000 (full amount) from Standard Chartered Bank Indonesia with fixed interest rate and will be matured on May 20, 2022.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**17. Pinjaman Yang Diterima (lanjutan)**

**Pinjaman Bilateral (lanjutan)**

**h. PT Bank Danamon Indonesia**

Pada tanggal 16 Maret 2021 LPEI menandatangani Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit dan kemudian pada tanggal 20 April 2021, LPEI menandatangani perjanjian kredit *uncommitted* dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebesar Rp1.575.000.000.000 (nilai penuh).

Pada tanggal 31 Desember 2021, LPEI melakukan penarikan sebesar Rp1.250.000.000.000 (nilai penuh) dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk, dengan tingkat suku bunga sebesar JIBOR ditambah marjin tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 6 Januari 2022.

**i. PT Bank Central Asia Tbk**

Pada tanggal 22 Juni 2021 LPEI menandatangani Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp3.000.000.000.000 (nilai penuh).

Pada tanggal 21 September 2021, LPEI melakukan penarikan sebesar Rp2.000.000.000.000 (nilai penuh) dari PT Bank Central Asia Tbk, dengan tingkat suku bunga sebesar JIBOR ditambah marjin tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 September 2023.

**Persyaratan dan kondisi pembatasan**

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, LPEI telah memenuhi seluruh persyaratan dan kondisi pembatasan yang dipersyaratkan, kecuali pemenuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK No. 40/POJK.05/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI) (POJK No. 40) Pasal 14 ayat (2) perihal pemenuhan terhadap rasio *Non Performing Financing* (NPF) setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan pembiayaan yang melampaui ketentuan yang berlaku yaitu di atas 5%. Atas pelampauan tersebut, sesuai dengan POJK No. 40 Pasal 71, LPEI wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran ketentuan NPF bersih oleh OJK.

**17. Fund Borrowings (continued)**

**Borrowings Bilateral (continued)**

**h. PT Bank Danamon Indonesia**

On March, 16, 2021 LPEI signed an Amendment of Credit Agreement and later on April 20, 2021, LPEI signed a committed credit agreement with PT Bank Danamon Indonesia Tbk amounting Rp1,575,000,000,000 (full amount).

On December 31, 2021, LPEI has withdrawal amounted to Rp1,250,000,000,000 (full amount) from PT Bank Danamon Indonesia Tbk, which bear interest rate at JIBOR plus a certain margin and will be mature on January 6, 2022

**i. PT Bank Central Asia Tbk**

On June, 22, 2021 LPEI signed an Amendment of Credit Agreement with PT Bank Central Asia Tbk amounting Rp3,000,000,000,000 (full amount)

On September 21, 2021, LPEI has withdrawal amounted to Rp2,000,000,000,000 (full amount) from PT Bank Central Asia Tbk, which bear interest rate at JIBOR plus a certain margin and will be mature on September 21, 2023.

**Terms and required covenants**

As of December 31, 2021 and 2020, LPEI has complied with all the terms and required covenants, except for the fulfillment of the Financial Services Authority Regulations (POJK No. 40/POJK.05/2015 dated December 21, 2015 regarding Development and Supervision of LPEI (POJK No. 40) Article 14 paragraph (2) concerning the fulfillment of Non Performing Financing (NPF) net of allowance for impairment losses on financing ratio that exceeds the prevailing provision, i.e. above 5%. For the excess over prevailing provision, in accordance with POJK No. 40 Article 71, LPEI must submit action plan no later than 1 (one) month from the date of OJK determine the incompliance of NPF net.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**17. Pinjaman Yang Diterima (lanjutan)**

**Persyaratan dan kondisi pembatasan  
(lanjutan)**

Sehubungan dengan pemenuhan terhadap POJK tersebut, LPEI telah menyampaikan Pemenuhan Ketentuan Pembiayaan Bermasalah (NPF) ke OJK melalui surat LPEI kepada OJK pada tanggal 6 Februari dan 18 Februari 2020 dengan No. BS.0016/CEO/02/2020 dan Pemenuhan Action Plan Pembiayaan Bermasalah (NPF) melalui surat LPEI kepada OJK No. BS.0027/CEO/02/2020 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pada tanggal 11 Februari 2019 dengan surat No. BS.0039/CEO/02/2019. Atas surat-surat tersebut, OJK menyatakan tidak keberatan atas rencana pemenuhan ketentuan mengenai rasio NPF bersih yang disampaikan oleh LPEI untuk dapat memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (2) POJK No. 40 tersebut (Catatan 9h.9).

Selanjutnya LPEI wajib melaksanakan rencana pemenuhan yang telah disampaikan kepada OJK tersebut dan melaporkan perkembangan rencana pemenuhan secara periodik kepada OJK (Catatan 9h.9).

Sehubungan dengan pelampauan NPF bersih di atas 5% (POJK Nomor 40 Pasal 14 ayat 2) dan penyampaian rencana pemenuhan (POJK Nomor 40 Pasal 71), LPEI telah melakukan serangkaian diskusi dengan para kreditur terkait pinjaman yang diterima oleh LPEI.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, belum ada tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang diambil oleh para kreditur perihal pelampauan NPF ini (Catatan 9h.9).

**17. Fund Borrowings (continued)**

**Terms and required covenants (continued)**

*In relation with the requirement of POJK, LPEI has submitted action plan in fulfilling the compliance with the Non Performing Financing (NPF) requirement to OJK through letter from LPEI to OJK on February 6 and February 18, 2020, No. BS.0016/CEO/02/2020 and fulfillment of the Action Plan of Non Performing Financing (NPF) through letter from LPEI No. BS.0027/CEO/02/2020 for the year ended December 31, 2019 and as of February 11, 2019 through letter No. BS.0039/CEO/02/2019. Through those letters, OJK has communicated that it has no objection to the action plan in fulfilling the compliance with NPF net ratio that LPEI submitted in order to comply with the requirement of Article 14 paragraph 2 POJK No. 40. (note 9h.9)*

*Furthermore, LPEI must implement the action plan that has been submitted to OJK and submit progress report of the action plan periodically for OJK (Note 9h.9).*

*In relation to the excess of NPF net ratio over 5% (POJK No. 40 Article 14 paragraph 2) and submission of action plan (POJK No. 40 article 71), LPEI has conduct series of discussion with lenders, related to the borrowings by LPEI.*

*As of the date of this financial statement, there is no action taken by the creditors regarding exceeding these NPF (Note 9h.9).*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**18. Estimasi Kerugian atas Komitmen dan Kontinjensi**

**a. Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi**

31 Desember/ December 31, 2021							Rupiah
	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Total	Related parties (Note 38)	
<b>Rupiah</b>							
Pihak berelasi (Catatan 38)							
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	1,550,691	--	--	--	1,550,691	Unused loan facilities to debtors	
Bank garansi	223,835	--	--	--	223,835	Bank guarantee	
Penjaminan kredit - PEN	1,078,000				1,078,000	Credit guarantee - PEN	
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	7,652	--	--	--	7,652	Outstanding irrevocable L/C	
	2,860,178	--	--	--	2,860,178		
Pihak ketiga							Third parties
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	634,570	124,067	--	58,455	817,092	Unused loan facilities to debtors	
Bank garansi	1,247,252	--	--	--	1,247,252	Bank guarantee	
Penjaminan kredit - PEN	2,817,315	--	--	--	2,817,315	Credit guarantee - PEN	
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	168,766	--	--	--	168,766	Outstanding irrevocable L/C	
	4,867,903	124,067	--	58,455	5,050,425		
Total mata uang Rupiah	7,728,081	124,067	--	58,455	7,910,603	Total Indonesia Rupiah	
<b>Mata uang asing</b>							
<b>Dolar Amerika Serikat</b>							Foreign currencies United States Dollars
Pihak berelasi (Catatan 38)							Related parties (Note 38)
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	205,390	--	--	--	205,390	Unused loan facilities to debtors	
Bank garansi	1,006,817	983,423	--	--	1,990,240	Bank guarantee	
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	82,535	--	--	--	82,535	Outstanding irrevocable L/C	
	1,294,742	983,423	--	--	2,278,165		
Pihak ketiga							Third parties
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	1,581,218	62,220	--	491	1,643,929	Unused loan facilities to debtors	
Bank garansi	4,635,728	--	--	--	4,635,728	Bank guarantee	
Penjaminan Kredit - PEN	946,081	--	--	--	946,081	Credit Guarantee - PEN	
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	119,695	--	--	--	119,695	Outstanding irrevocable L/C	
	7,282,722	62,220	--	491	7,345,433		
<b>Sub Total</b>	<b>8,577,464</b>	<b>1,045,643</b>	<b>--</b>	<b>491</b>	<b>9,623,598</b>	<b>Sub Total</b>	
<b>Mata uang asing</b>							
<b>Yen Jepang</b>							Foreign currencies Japanese Yen
Pihak ketiga							Third parties
Bank garansi	17,857	--	--	--	17,857	Bank guarantee	
<b>Sub Total</b>	<b>17,857</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>17,857</b>	<b>Sub Total</b>	
<b>Euro Eropa</b>							European Euro
Pihak berelasi (Catatan 38)							Related parties (Note 38)
Bank garansi	729	--	--	--	729	Bank guarantee	
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	448	--	--	--	448	Outstanding irrevocable L/C	
	1,177	--	--	--	1,177		
Pihak ketiga							Third parties
Bank garansi	179,190	--	--	--	179,190	Bank guarantee	
<b>Sub Total</b>	<b>180,367</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>180,367</b>	<b>Sub Total</b>	
<b>Total mata uang asing</b>	<b>8,775,688</b>	<b>1,045,643</b>	<b>--</b>	<b>491</b>	<b>9,821,822</b>	<b>Total foreign currencies</b>	
<b>Total</b>	<b>16,503,769</b>	<b>1,169,710</b>	<b>--</b>	<b>58,946</b>	<b>17,732,425</b>	<b>Total</b>	

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**18. Estimasi Kerugian atas Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)**

**a. Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi (lanjutan)**

**18. Estimated Losses on Commitments and Contingencies (continued)**

**a. The estimated losses on commitments and contingencies (continued)**

						31 Desember/ December 31, 2020
	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Total	
<b>Rupiah</b>						<b>Rupiah</b>
Pihak berelasi (Catatan 38)						Related parties (Note 38)
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	2,621,741	--	--	--	2,621,741	Unused loan facilities to debtors
Bank garansi	307,180	--	--	--	307,180	Bank guarantee
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	5,221	--	--	--	5,221	Outstanding irrevocable L/C
	<b>2,934,142</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2,934,142</b>	<b>Third parties</b>
Pihak ketiga						
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	1,871,292	1,546	--	2	592,934	Unused loan facilities to debtors
Bank garansi	1,659,755	--	--	--	1,659,755	Bank guarantee
Penjaminan kredit - PEN	817,500	--	--	--	817,500	Credit guarantee - PEN
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	79,952	--	--	--	79,952	Outstanding irrevocable L/C
	<b>4,428,499</b>	<b>1,546</b>	<b>--</b>	<b>2</b>	<b>592,934</b>	<b>5,022,981</b>
Total mata uang Rupiah	<b>7,362,641</b>	<b>1,546</b>	<b>--</b>	<b>2</b>	<b>592,934</b>	<b>7,957,123</b>
<b>Mata uang asing</b>						<b>Foreign currencies</b>
<b>Dolar Amerika Serikat</b>						<b>United States Dollars</b>
Pihak berelasi (Catatan 38)						Related parties (Note 38)
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	184,402	--	--	--	184,402	Unused loan facilities to debtors
Bank garansi	1,168,460	969,450	--	--	2,137,910	Bank guarantee
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	7,143	--	--	--	7,143	Outstanding irrevocable L/C
	<b>1,360,005</b>	<b>969,450</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2,329,455</b>	<b>Third parties</b>
Pihak ketiga						
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	2,902,026	76,385	--	--	23,694	Unused loan facilities to debtors
Bank garansi	4,635,234	--	--	--	4,635,234	Bank guarantee
Penjaminan Kredit - PEN	49,175	--	--	--	49,175	Credit Guarantee - PEN
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	69,847	--	--	--	69,847	Outstanding irrevocable L/C
	<b>7,656,282</b>	<b>76,385</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>23,694</b>	<b>7,756,361</b>
<b>Sub Total</b>	<b>9,016,287</b>	<b>1,045,835</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>23,694</b>	<b>10,085,816</b>
<b>Mata uang asing</b>						<b>Sub Total</b>
<b>Yen Jepang</b>						<b>Foreign currencies</b>
Pihak ketiga						<b>Japanese Yen</b>
Bank garansi	56,487	--	--	--	56,487	Third parties
<b>Sub Total</b>	<b>56,487</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>56,487</b>	<b>Bank guarantee</b>
<b>Euro Europa</b>						<b>Sub Total</b>
Pihak berelasi (Catatan 38)						<b>European Euro</b>
Bank garansi	50,982	--	--	--	50,982	Related parties (Note 38)
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	2,252	--	--	--	2,252	Bank guarantee
	<b>53,234</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>53,234</b>	Outstanding irrevocable L/C
Pihak ketiga						<b>Third parties</b>
Bank garansi	194,769	--	--	--	194,769	Bank guarantee
<b>Sub Total</b>	<b>248,003</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>248,003</b>	<b>Sub Total</b>
<b>Total mata uang asing</b>	<b>9,320,777</b>	<b>1,045,835</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>23,694</b>	<b>10,390,306</b>
<b>Total</b>	<b>16,683,418</b>	<b>1,047,381</b>	<b>--</b>	<b>2</b>	<b>616,628</b>	<b>18,347,429</b>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**18. Estimasi Kerugian atas Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)**

**b. Perubahan estimasi klaim penjaminan**

Perubahan estimasi klaim penjaminan adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31, 2021			
	Rupiah	Mata uang asing/ Foreign currencies	Total	
Saldo awal	34,051	7,078	41,129	Beginning balance
Pembentukan tahun berjalan penjaminan	427	(313)	114	Addition during the year of guarantee
Pembentukan tahun berjalan penjaminan - PEN	353,393	(2,071)	351,322	Addition during the year of guarantee - PEN
Selisih kurs penjabaran tahun berjalan	--	(6)	(6)	Foreign currency translation during the year
<b>Saldo akhir</b>	<b>387,871</b>	<b>4,688</b>	<b>392,559</b>	<b>Ending balance</b>

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31, 2020			
	Rupiah	Mata uang asing/ Foreign currencies	Total	
Saldo awal	1,818	5,030	6,848	Beginning balance
Pembentukan tahun berjalan penjaminan	1,995	(49)	1,946	Addition during the year of guarantee
Pembentukan tahun berjalan penjaminan - PEN	30,238	2,059	32,297	Addition during the year of guarantee - PEN
Selisih kurs penjabaran tahun berjalan	--	38	38	Foreign currency translation during the year
<b>Saldo akhir</b>	<b>34,051</b>	<b>7,078</b>	<b>41,129</b>	<b>Ending balance</b>

Manajemen berpendapat bahwa estimasi klaim penjaminan yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian klaim penjaminan.

*Management believes that the estimated guarantee claims as provided is adequate to cover losses on guarantee claim.*

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dan mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 31.

*Information with respect to classification of not impaired and impaired financial assets is disclosed in Note 31.*

**19. Liabilitas Sewa**

Pembayaran sewa berdasarkan perjanjian sewa pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**19. Lease Liabilities**

*The payments based on the lease agreements as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:*

	31 Desember / December 31,		
	2021	2020	
Rincian liabilitas sewa berdasarkan jatuh tempo			<i>Detail of lease liabilities based on maturity</i>
Sampai dengan 1 tahun	7,706	4,398	<i>Up to 1 year</i>
Lebih dari 1 sampai dengan 3 tahun	2,657	8,509	<i>More than 1 up to 3 years</i>
Lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun	617	1,930	<i>More than 3 up to 5 years</i>
<b>Total</b>	<b>10,980</b>	<b>14,837</b>	<b>Total</b>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**19. Liabilitas Sewa (lanjutan)**

Semua utang sewa di denominasi dalam Rupiah yang dibayar setiap bulan dalam suatu jumlah tetap.

Berikut adalah rincian liabilitas sewa pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

Rincian liabilitas sewa	Saldo awal 1 Januari 2021/ Beginning balance January 1, 2021	Penambahan liabilitas sewa/ Additions of lease liabilities	Beban bunga liabilitas sewa/ Interest expense of lease liabilities	Pembayaran sewa/ Payments of lease liabilities	Saldo, 31 Desember 2021/ Balance, December 31, 2021	Detail of lease liabilities
Kendaraan bermotor	5,544	1,006	413	(3,077)	3,886	Vehicles
Bangunan	9,293	1,678	661	(4,538)	7,094	Building
<b>Total</b>	<b>14,837</b>	<b>2,684</b>	<b>1,074</b>	<b>(7,615)</b>	<b>10,980</b>	<b>Total</b>

Rincian liabilitas sewa	Saldo awal 1 Januari 2020/ Beginning balance 1 January 2020	Penambahan liabilitas sewa/ Additions of lease liabilities	Beban bunga liabilitas sewa/ Interest expense of lease liabilities	Pembayaran sewa/ Payments of lease liabilities	Saldo, 31 Desember 2020/ Balance, 31 December 2020	Detail of lease liabilities
Kendaraan bermotor	6,062	458	507	(1,483)	5,544	Vehicles
Bangunan	5,323	5,108	594	(1,732)	9,293	Building
<b>Total</b>	<b>11,385</b>	<b>5,566</b>	<b>1,101</b>	<b>(3,215)</b>	<b>14,837</b>	<b>Total</b>

**20. Liabilitas Lain-lain**

**19. Lease Liabilities (continued)**

All the lease liabilities are denominated in Rupiah, payable every month at fixed amounts.

Following is the details of lease liabilities as of December, 31, 2021 and 2020:

	31 Desember / December 31,		<b>Rupiah</b>
	2021	2020	
<b>Rupiah</b>			
Bunga yang masih harus dibayar	237,012	345,289	Accrued interest payable
Rekening penampungan	203,478	212,442	Suspense accounts
Jaminan atas pembukaan L/C dan bank garansi	110,241	74,823	Collateral for L/C and bank guarantee opening
Tantiem dan jasa poduksi	27,009	17,255	Tantiem and accrued bonus
Lain-lain	77,038	68,762	Others
	<b>654,778</b>	<b>718,571</b>	
<b>Mata uang asing</b>			<b>Foreign currencies</b>
Jaminan atas pembukaan L/C dan bank garansi	220,690	213,644	Collateral for L/C and bank guarantee opening
Bunga yang masih harus dibayar	93,027	93,880	Accrued interest payable
Rekening penampungan	87,882	104,084	Suspense accounts
Lain-lain	212,124	4,042	Others
Kewajiban kepada Penjamin Ulang (Catatan 9i)	--	215,774	Liabilities to Reguarantor (Note 9i)
	<b>613,723</b>	<b>631,424</b>	
<b>Total</b>	<b>1,268,501</b>	<b>1,349,995</b>	<b>Total</b>

Termasuk dalam rekening penampungan adalah rekening yang digunakan oleh debitur untuk melakukan pembayaran pokok kembali maupun bunga atas pembiayaan dan piutang.

The suspense accounts include accounts used by debtors for the repayment of principal and interest of financing and receivables.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**21. Kontribusi Modal Pemerintah**

Berdasarkan penjelasan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dinyatakan bahwa modal awal LPEI berasal dari seluruh kekayaan negara yang tertanam dalam PT Bank Ekspor Indonesia (Persero). Selanjutnya berdasarkan pasal 19 ayat (2) dari undang-undang di atas dinyatakan bahwa modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Berdasarkan surat Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan Republik Indonesia No. S-139/SJ.3/2010 tanggal 3 Februari 2010 perihal Permintaan Tinjauan Hukum Terkait Penerapan Modal Awal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dinyatakan bahwa saldo laba yang ditahan termasuk dalam pengertian seluruh kekayaan negara yang tertanam di PT Bank Ekspor Indonesia (Persero).

Dengan demikian, modal saham dan saldo laba direklasifikasi sebagai Kontribusi Modal Pemerintah yang sebelumnya dalam bentuk modal saham, cadangan umum, cadangan tujuan dan belum ditentukan penggunaannya masing-masing sebesar Rp3.000.000, Rp1.088.094, Rp140.470 dan Rp93.022.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit Rp4.000.000. Dalam hal modal LPEI berkurang dari Rp4.000.000. Pemerintah menutup kekurangan tersebut dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan mekanisme yang berlaku. Penambahan modal LPEI untuk menutup kekurangan modal ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pada tanggal 22 Desember 2010, LPEI menerima kontribusi modal dari Pemerintah Negara Republik Indonesia sebesar Rp2.000.000. Dengan demikian, pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 kontribusi modal dari Pemerintah Negara Republik Indonesia pada LPEI menjadi sebesar Rp6.321.586.

**21. Government Capital Contribution**

*Based on the explanation on article 19 paragraph (1) Law No. 2 of Year 2009 dated January 12, 2009 regarding Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, it was stated that LPEI's initial capital is composed of all shares of the state's treasury in PT Bank Ekspor Indonesia (Persero). Furthermore, based on article 19 paragraph (2) of above mentioned law, the paid up capital as specified in paragraph (1) hereof, shall be the state's treasury and is separated and undivided into shares. Based on the letter of the Head of Legal Department of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. S-139/SJ.3/2010 dated February 3, 2010 regarding Request for Legal Review Related Legal to the Initial Capital of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, retained earnings included all state's treasury in PT Bank Ekspor Indonesia (Persero).*

*Therefore, the share capital and retained earnings were reclassified as Government Contributed Capital which were previously in the form of capital stocks, general reserve, specific reserve and unappropriated retained earnings amounting to Rp3,000,000, Rp1,088,094, Rp140,470 and Rp93,022, respectively.*

*Based on Law No. 2 of Year 2009 dated January 12, 2009 regarding Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. LPEI's initial capital shall be at least Rp4,000,000. In the event that LPEI's capital becomes less than Rp4,000,000, the Government shall cover such deficiency from the State Budget based on the applicable mechanism. LPEI's additional capital to cover such capital deficiency shall be determined by Government Regulation.*

*On December 22, 2010, LPEI received the contributed capital from the Government of the Republic of Indonesia which amounted to Rp2,000,000. As of December 31, 2013 and 2012, the contributed capital from the Government of the Republic of Indonesia in LPEI amounted to Rp6,321,586.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**21. Kontribusi Modal Pemerintah (lanjutan)**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Perencanaan, Penetapan, Alokasi dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara, perencanaan investasi pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) salah satunya adalah penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN/Lembaga dan untuk tahun anggaran 2014. LPEI telah melakukan permohonan PMN sebesar Rp1.000.000. Permohonan tersebut telah masuk kedalam nota APBN tahun 2014.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Eksport Indonesia dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp1.000.000.

Berdasarkan perencanaan pemerintah, maka pada tanggal 30 Desember 2014, LPEI menerima kontribusi modal dari Pemerintah Negara Republik Indonesia sebesar Rp1.000.000.

Untuk memperkuat struktur permodalan dan berdasarkan pada UU No 2 tahun 2009, atas kelebihan akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan telah melebihi 25% dari modal, 75% telah dilakukan kapitalisasi modal sebesar Rp54.370 dan 25% sebagai penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp18.123. LPEI telah menyetorkan ke Pemerintah Negara Republik Indonesia sebesar Rp18.123 pada bulan Agustus 2014.

Dengan demikian, pada tanggal 31 Desember 2014, kontribusi modal dari Pemerintah Negara Republik Indonesia pada LPEI menjadi sebesar Rp7.375.956.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**21. Government  
(continued)**

*Based on the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 247/PMK.02/2012 on Procedures for Planning, Determination, Allocation and Implementation Document Legalization of State General Treasury, the government plans to increase the Capital Participation of the Government of the Republic of Indonesia (PMN) to State Owned Company/Institutions for the year 2014. Hence, LPEI has made a request for Rp1,000,000. The request has been incorporated in APBN year 2014.*

*Based on Government Regulation No. 86 year 2014 dated October 17, 2014 regarding the Capital Contribution from the State's Treasury into The Capital of Indonesia Eximbank stated that the Republic of Indonesia increased its capital of the state amounting to Rp1,000,000.*

*Based on the above goverment plan on December 30, 2014, LPEI received the contributed capital from the Government of the Republic of Indonesia amounting to Rp1,000,000.*

*To strengthen the capital structure and based on Act No. 2 of 2009, the excess of the general reserve and the reserve accumulation of interest has exceeded 25% of the capital, 75% has been capitalized amounting to Rp54,370 and 25% as non-tax revenue amounting to Rp18,123. LPEI has deposited to the Government of the Republic of Indonesia at Rp18,123 in August 2014.*

*Therefore, as of December 31, 2014, the contributed capital from the Government of the Republic of Indonesia in LPEI amounted to Rp7,375,956.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**21. Kontribusi Modal Pemerintah (lanjutan)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 2015 tanggal 20 Agustus 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp1.000.000. Penambahan penyertaan modal tersebut efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI pada tanggal 26 November 2015.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1154/KMK.06/2015 tanggal 12 November 2015, tentang Penetapan Kapitalisasi Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang berasal dari surplus tahun 2013 dan 2014, Menteri Keuangan menetapkan Kapitalisasi Modal LPEI yang berasal dari surplus tahun buku 2013 dan 2014 sebesar Rp554.586 dan Rp798.046.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp4.000.000. Penambahan penyertaan modal dimaksud terdiri dari Rp2.000.000 digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI dan Rp2.000.000 untuk melaksanakan Penugasan Khusus. Modal tersebut efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI pada tanggal 31 Desember 2016.

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan LPEI berdasarkan pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 2 tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.06/2015 ditetapkan bahwa dalam hal akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan telah melebihi 25% dari modal awal LPEI, kelebihannya 75% digunakan untuk kapitalisasi modal dan 25% sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

**21. Government  
(continued)**

*Based on Government Regulation No. 67 year 2015 dated August 20, 2015 regarding the Capital Contribution from the state's treasury into the capital of Indonesia Eximbank stated that the Republic of Indonesia increased its capital of the state amounting to Rp1,000,000. This increase in capital was received and recorded by LPEI on November 26, 2015.*

*Based on the Decree of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. 1154/KMK.06/2015 dated November 12, 2015, on the Establishment of Share Capitalization for Indonesia Eximbank derived from surplus in year 2013 and 2014, the Ministry of Finance set share Capitalization from LPEI 2013 and 2014 surplus amounting to Rp554,586 and Rp798,046.*

*Based on Government Regulation No. 81 year 2016 dated December 30, 2016 regarding Government of Indonesia's capital contribution to LPEI stated that the Government of Indonesia increased its capital contribution by Rp4,000,000. The increase in capital is composed of Rp2,000,000 to increase LPEI's business capacity and Rp2,000,000 to carry out National Interest Account. The capital injection was received and recorded by LPEI effective on December 31, 2016.*

*In order to strengthen LPEI's capital structure, pursuant to Article 20 paragraph (2) of Law No. 2 of 2009 dated January 12, 2009 of Eximbank and Ministry of Finance No. 260/PMK.06/2015, if the accumulated general and specific reserves has exceeded 25% of the initial capital of LPEI, the excess of 75% is used for the capitalization of capital and 25% as Tax State Revenue (non-tax).*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**21. Kontribusi Modal Pemerintah (lanjutan)**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 463/KMK.06/2016 tanggal 15 Juni 2016, tentang Penetapan Kapitalisasi Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang berasal dari surplus tahun 2015, Menteri Keuangan menetapkan Kapitalisasi Modal LPEI yang berasal dari Surplus tahun buku 2015 sebesar Rp963.600.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp3.200.000. Penambahan penyertaan modal dimaksud terdiri dari Rp1.000.000 digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI dan Rp2.200.000 untuk melaksanakan Penugasan Khusus. Modal tersebut efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI pada tanggal 30 Desember 2017.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 788/KMK.06/2017 tanggal 6 November 2017, tentang Penetapan Kapitalisasi Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang berasal dari surplus tahun 2016, Menteri Keuangan menetapkan Kapitalisasi Modal LPEI yang berasal dari surplus tahun buku 2016 sebesar Rp951.998.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 620/KMK.06/2018 tanggal 24 September 2018, tentang Penetapan Kapitalisasi Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang berasal dari surplus tahun 2017, Menteri Keuangan menetapkan Kapitalisasi Modal LPEI yang berasal dari surplus tahun buku 2017 sebesar Rp686.211.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**21. Government Capital Contribution (continued)**

*Based on the Decree of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. 463/KMK.06/2016 dated June 15, 2016, on the Establishment of Share Capitalization for Indonesia Eximbank derived from surplus in year 2015, the Ministry of Finance set share Capitalization from LPEI 2015 surplus amounting to Rp963,600.*

*Based on Government Regulation No. 55 year 2017 dated December 28, 2017 regarding Government of Indonesia's capital contribution to LPEI stated that the Government of Indonesia increased its capital contribution by Rp3,200,000. The increase in capital is composed of Rp1,000,000 to increase LPEI's business capacity and Rp2,200,000 to carry out National Interest Account. The capital injection was received and recorded by LPEI effective on December 30, 2017.*

*Based on the Decree of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. 788/KMK.06/2017 dated November 6, 2017, on the Establishment of Share Capitalization for Indonesia Eximbank derived from surplus in year 2016, the Ministry of Finance set share Capitalization from LPEI 2016 surplus amounting to Rp951,998.*

*Based on the Decree of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. 620/KMK.06/2018 dated September 24, 2018, on the Establishment of Share Capitalization for Indonesia Eximbank derived from surplus in year 2017, the Ministry of Finance set share Capitalization from LPEI 2017 surplus amounting to Rp686,211.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**21. Kontribusi Modal Pemerintah (lanjutan)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp2.500.000. Penambahan penyertaan modal dimaksud terdiri dari Rp1.500.000 digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI dan Rp1.000.000 untuk melaksanakan Penugasan Khusus. Modal tersebut efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI pada tanggal 28 Juni 2019.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-838/MK.06/2019 tanggal 22 November 2019, tentang Pertanggungjawaban Laporan Keuangan LPEI Tahun 2018 dan Penetapan penggunaan surplus usaha tahun 2018, Menteri Keuangan menetapkan Kapitalisasi Modal LPEI yang berasal dari surplus tahun buku 2018 sebesar Rp115.879.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp5.000.000. Penambahan penyertaan modal dimaksud terdiri dari Rp4.000.000 digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI dan Rp1.000.000 untuk melaksanakan Penugasan Khusus. Modal Rp4.000.000 tersebut efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI pada tanggal 12 Agustus 2020 dan Rp1.000.000 tersebut efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI tanggal 18 Agustus 2020.

**21. Government  
(continued)**

*Based on Government Regulation No. 44 year 2019 dated June 26, 2019 regarding Government of Indonesia's capital contribution to LPEI stated that the Government of Indonesia increased its capital contribution by Rp2,500,000. The increase in capital is composed of Rp1,500,000 to increase LPEI's business capacity and Rp1,000,000 to carry out National Interest Account. The capital injection was received and recorded by LPEI effective on June 28, 2019.*

*According to the Letter of Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. S-838/MK.06/2019 dated November 22, 2019, on Accountability of LPEI Financial Report of 2018, determination of business from surplus in year 2018, the Ministry of Finance set share Capitalization from LPEI 2018 surplus amounted to Rp115,879.*

*Based on Government Regulation No. 40 year 2020 dated July 21, 2020 regarding Government of Indonesia's capital contribution to LPEI stated that the Government of Indonesia increased its capital contribution by Rp5,000,000. The increase in capital is composed of Rp4,000,000 to increase LPEI's business capacity and Rp1,000,000 to carry out National Interest Account. The capital injection amounting Rp4,000,000 was received and recorded by LPEI effective on August 12, 2020 and Rp1,000,000 was received and recorded by LPEI effective on August 18, 2020.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**21. Kontribusi Modal Pemerintah (lanjutan)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp5.000.000. Penambahan penyertaan modal dimaksud digunakan untuk Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI tanggal 30 Desember 2020.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-688/MK.06/2021 tanggal 3 Agustus 2021, tentang Pertanggungjawaban Laporan Keuangan LPEI Tahun 2020, Menteri Keuangan menetapkan Kapitalisasi Modal LPEI yang berasal dari Surplus tahun buku 2020 sebesar Rp194.663.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 117 tahun 2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp5.000.000. Penambahan penyertaan modal dimaksud terdiri dari Rp2.500.000 digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI dan sebesar Rp2.500.000 digunakan untuk melaksanakan Penugasan Khusus. Modal tersebut efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI pada tanggal 29 Desember 2021 dan tanggal 30 Desember 2021.

Dengan demikian, pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 kontribusi modal dari Pemerintah Negara Republik Indonesia pada LPEI adalah sebesar Rp37.340.939 dan Rp32.146.276.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S 688/MK.06/2021 dinyatakan bahwa atas kelebihan akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan berdasarkan surplus tahun buku 2020, terdapat PNBP yang harus disetorkan ke kas Negara sebesar Rp 64.888 dan Menteri Keuangan menetapkan Kapitalisasi Modal LPEI yang berasal dari Surplus tahun buku 2020 sebesar Rp194.663. LPEI telah menyetorkan PNBP tersebut pada bulan Agustus 2021.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**21. Government Capital Contribution (continued)**

*Based on Government Regulation No. 78 year 2020 dated December 30, 2020 regarding Government of Indonesia's capital contribution to LPEI stated that the Government of Indonesia increased its capital contribution by Rp5,000,000. The increase in capital is to carry Implementation of The National Economic Recovery Program. The capital injection was received and recorded by LPEI effective on December 30, 2020.*

*According to the Letter of Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. S-688/MK.06/2021 dated August 3, 2021, on Accountability of LPEI Financial Report of 2020, the Ministry of Finance set share Capitalization from LPEI 2020 surplus amounted to Rp194,663.*

*Based on Government Regulation No. 117 year 2021 dated December 15, 2021 regarding Government of Indonesia's capital contribution to LPEI stated that the Government of Indonesia increased its capital contribution by Rp5,000,000. The increase in capital is composed of Rp2,500,000 to increase LPEI's business capacity and Rp2,500,000 to carry out National Interest Account. The capital injection was received and recorded by LPEI effective on December 29, 2021 and December 30, 2021.*

*As of December 31, 2021 and 2020, the capital contribution from the Government of the Republic of Indonesia in LPEI amounted to Rp37,340,939 and Rp32,146,276, respectively.*

*Based on the letter of the Minister of Finance No. S 688/MK.06/2021 regarding the excess accumulated general and specific reserves based on surplus of year 2020, there are non-tax revenues to be deposited into the state treasury amounting to Rp64,888 and the Ministry of Finance set Share Capitalization from LPEI 2020 surplus amounted to Rp194,663. LPEI has deposited the non-tax revenues in August 2021.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**22. Pembagian Laba Tahun Berjalan**

Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI dan Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.06/2015, surplus yang diperoleh LPEI dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kegiatan digunakan untuk cadangan umum, cadangan tujuan, jasa produksi dan tantiem dan bagian laba Pemerintah. Persentase alokasi surplus ditetapkan sebagai cadangan umum dan cadangan tujuan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari surplus dan jasa produksi dan tantiem serta bagian laba Pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari surplus. Besarnya persentase untuk cadangan umum, cadangan tujuan, jasa produksi dan tantiem, serta bagian laba Pemerintah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-688/MK.06/2021 tanggal 3 Agustus 2021, Menteri Keuangan menetapkan penggunaan surplus usaha LPEI tahun buku 2020 sebesar Rp259.550 untuk alokasi cadangan tujuan sebesar Rp83.704 serta cadangan umum sebesar Rp175.847, dan bagian laba Pemerintah sebesar Rp13.570.

Jasa produksi, tantiem serta bagian laba Pemerintah tahun buku 2020 telah dibayarkan pada bulan Agustus 2021.

**22. Distribution of Income for the Current Year**

According to article 21 of Republic of Indonesia Law No. 2 Year 2009 regarding LPEI and Regulation of the Ministry of Finance No. 260/PMK.06/2015, the surplus gained by LPEI in 1 (one) year operation shall be used for general reserve, special purpose reserve, performance bonus and tantiem, and the Government's profit share. The surplus allocation percentage shall be determined as follows: general reserve and special purpose reserve shall be 90% (ninety percent) of the surplus and performance bonus and tantiem and the Government's profit share shall be 10% (ten percent) of the surplus. The percentage amount for general reserve, special purpose reserve, performance bonus and tantiem, including Government's profit share shall be determined by the Ministry of Finance.

According to the Letter of Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. S-688/MK.06/2021 dated August 3, 2021, the Ministry of Finance determined the business surplus for the year ended 2020 amounting to Rp259,550 for the allocation of special purpose reserve amounting to Rp83,704 and general reserve amounting to Rp175,847, and Government's profit share amounting to Rp13,570.

Bonus, tantiem and Government's profit share for 2020 were paid in August 2021.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**23. Pendapatan Bunga dan Usaha Syariah**

a. Pendapatan bunga

<b>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,</b>		
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Penugasan Umum</b>		
Pembiayaan dan piutang		
Modal kerja	1,349,265	1,829,472
Investasi	1,519,035	1,904,561
Konsumsi	8,759	7,319
Penempatan pada bank		
Deposito berjangka	26,902	179,667
Call money	1,972	9,666
Efek-efek		
Obligasi Pemerintah	26,176	26,914
Giro pada bank	441	634
	<b>2,932,550</b>	<b>3,958,233</b>
<b>Penugasan Khusus</b>		
Deposito berjangka	317,269	287,891
Pembiayaan dan piutang		
Modal kerja	48,240	20,235
Investasi	42,430	5,690
Giro pada bank	2,292	763
	<b>410,231</b>	<b>314,579</b>
<b>Total</b>	<b>3,342,781</b>	<b>4,272,812</b>

Berikut adalah rincian pendapatan bunga berdasarkan klasifikasi aset keuangan pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

**23. Interest Income and Income From Sharia**

a. Interest income

<b>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,</b>		
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>General Assignment</b>		
<i>Financing and receivables</i>		
<i>Working capital</i>		
<i>Investment</i>		
<i>Consumption</i>		
<i>Placements with banks</i>		
<i>Time deposit</i>		
<i>Call money</i>		
<i>Securities</i>		
<i>Government bonds</i>		
<i>Current accounts with banks</i>		
<b>National Interest Account</b>		
<i>Time deposit</i>		
<i>Financing and receivables</i>		
<i>Working capital</i>		
<i>Investment</i>		
<i>Current account with banks</i>		
<b>Total</b>		

*Following is the details of interest income according to the classification of financial assets for year ended December 31, 2021 and 2020:*

<b>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,</b>		
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Amortised cost</b>		
<i>Financing and receivables</i>		
<i>Placements with banks</i>		
<i>Current accounts with banks</i>		
<i>Fair value through other comprehensive income</i>		
<i>Securities</i>		
<b>Total</b>		

b. Pendapatan usaha syariah

b. Income from sharia

<b>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,</b>		
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>General Assignment</b>		
<b>Rupiah</b>		
<i>Musyarakah financing</i>		
<i>Murabahah receivables margin</i>		
<b>Foreign currency</b>		
<i>Musyarakah financing</i>		
<i>Murabahah receivables margin</i>		
<b>Total</b>		

**Penugasan Umum**

**Rupiah**

Pembiayaan <i>musyarakah</i>	734,695	593,166
<i>Margin piutang murabahah</i>	101,483	103,727
	<b>836,178</b>	<b>696,893</b>

**Mata uang asing**

Pembiayaan <i>musyarakah</i>	72,804	88,580
<i>Margin piutang murabahah</i>	11,757	44,596
	<b>84,561</b>	<b>133,176</b>

**Total**

**820,739**

**830,069**

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**24. Beban Bunga**

Akun ini merupakan beban bunga atas:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		<i>Rupiah</i>
	2021	2020	
<b>Rupiah</b>			
Efek-efek utang yang diterbitkan	1,991,065	2,623,468	<i>Debt securities issued</i>
Pinjaman yang diterima	6,506	31,440	<i>Fund borrowing</i>
	<u>1,997,571</u>	<u>2,654,908</u>	
<b>Mata uang asing</b>			
Efek-efek utang yang diterbitkan	362,717	429,423	<i>Foreign currency</i>
Pinjaman yang diterima	696,927	1,178,662	<i>Debt securities issued</i>
	<u>1,059,644</u>	<u>1,608,085</u>	<i>Fund borrowing</i>
<b>Total</b>	<b><u>3,057,215</u></b>	<b><u>4,262,993</u></b>	<b><i>Total</i></b>

**25. Pembentukan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Non Keuangan**

**24. Interest Expense**

*Interest expense was derived from:*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		<i>Rupiah</i>
	2021	2020	
Giro pada bank (Catatan 5b)	(267)	266	<i>Current accounts with banks (Note 5b)</i>
Penempatan pada bank (Catatan 6d)	(15,836)	(20,332)	<i>Placements with banks (Note 6d)</i>
Pembiayaan dan piutang, dan Pembentukan dan piutang syariah (Catatan 9h)			<i>Financing and receivables and financing and sharia receivables (Note 9h)</i>
Tagihan akseptasi (Catatan 11c)	(2,412)	(1,628)	<i>Acceptance receivables (Note 11c)</i>
Piutang pembentukan garansi (Catatan 9h)	222,000	446,425	<i>Guarantee financing receivables (Note 9h)</i>
Piutang asuransi (Catatan 10a)	(2,412)	(1,628)	<i>Insurance receivables (Note 10a)</i>
Agunan yang diambil alih (Catatan 14)	32,780	418	<i>Foreclosed assets (Note 14)</i>
<b>Total</b>	<b>22,410</b>	<b>-</b>	<b><i>Total</i></b>
	<b><u>257,752</u></b>	<b><u>423,080</u></b>	

**26. Beban Umum dan Administrasi**

**26. General and Administrative Expenses**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		<i>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,</i>
	2021	2020	
Penyusutan aset tetap (Catatan 13)	108,370	110,709	<i>Depreciation of premises and equipment (Note 13)</i>
Jasa profesional	66,985	46,573	<i>Professional services</i>
Sewa	25,211	26,133	<i>Rent</i>
Perbaikan dan pemeliharaan	18,959	13,882	<i>Repairs and maintenance</i>
Komunikasi	10,882	10,628	<i>Communications</i>
Perjalanan dinas	6,395	4,164	<i>Travelling</i>
Iklan dan promosi	4,592	4,200	<i>Advertising and promotions</i>
Corporate social responsibilities	4,163	601	<i>Corporate social responsibilities</i>
Listrik dan air	3,221	3,584	<i>Electricity and water</i>
Biaya berlangganan	3,104	2,785	<i>Subscription cost</i>
Percetakan dan perlengkapan kantor	1,967	2,477	<i>Printing and office supplies</i>
Kegiatan perusahaan	722	972	<i>Corporate activities</i>
Aktivitas pegawai	600	328	<i>Employee activities</i>
Lain-lain	13,906	8,310	<i>Others</i>
<b>Total</b>	<b><u>269,077</u></b>	<b><u>235,346</u></b>	<b><i>Total</i></b>

Termasuk dalam lain-lain adalah beban-beban yang dikeluarkan untuk transportasi, beban bunga atas liabilitas sewa, donasi, asuransi atas kendaraan dinas, dan bea materai.

*Included in others are expenses disbursed for transportation, interest expense of lease liabilities, donation, insurance on official vehicles and stamp duty.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**27. Beban Gaji dan Tunjangan**

**27. Salaries and Benefits**

	<b>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,</b>	
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Beban gaji dan tunjangan	277,171	235,930
Imbalan kerja (Catatan 28)	21,178	11,360
Manfaat lain-lain	42,561	45,265
Tunjangan hari raya	35,324	31,458
Tunjangan kesehatan	22,320	22,038
Pendidikan dan pelatihan	17,174	7,948
Asuransi	17,502	14,144
Lain-lain	34,079	27,589
<b>Total</b>	<b>467,309</b>	<b>395,732</b>

Termasuk di dalam beban gaji dan tunjangan adalah beban atas perbedaan antara tingkat bunga pinjaman karyawan dan *Base Lending Rate* (BLR) sebesar Rp3.739 dan Rp1.260 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (Catatan 9h).

Termasuk dalam lain-lain adalah honorarium atas staf ahli Dewan Direktur.

Rincian gaji, tunjangan serta jasa produksi dan tantiem atas Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah dan Kepala Divisi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Included in salaries and benefits expenses is the amount expensed arising from the difference between the employee loan's interest rates and the Base Lending Rate (BLR) which amounted to Rp3,739 and Rp1,260 for the years ended December 31, 2021 and 2020, respectively (Note 9h).*

*Included in others are honorarium for technical assistance of the Board of Directors.*

*The details of salaries, allowances and bonuses and tantiem of the Boards of Directors, Managing Directors, Audit Committee, Sharia Supervisory Board and Head of Divisions for the years ended December 31, 2021 and 2020 are as follows:*

	<b>31 Desember/ December 31, 2021</b>			
	<b>Jumlah Pegawai/ Number of Employees</b>	<b>Gaji/ Salaries</b>	<b>Tunjangan/ Allowances</b>	<b>Bonus dan Tantiem/ Bonuses and Tantiem</b>
Dewan Direktur	5	5,276	6,909	1,004
Direktur Pelaksana	6	11,376	13,950	2,894
Komite Audit	2	593	32	--
Komite Pemantau Risiko	2	559	35	--
Dewan Pengawas Syariah	2	630	40	--
Wakil Ketua Eksekutif Senior	6	6,826	11,028	746
Kepala Divisi	58	25,001	48,879	1,686
<b>Total</b>	<b>81</b>	<b>50,261</b>	<b>80,873</b>	<b>6,330</b>
				<b>137,464</b>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**28. Liabilitas Imbalan Kerja**

Berdasarkan kebijakan LPEI, pegawai memperoleh tunjangan dan manfaat selain gaji berupa tunjangan hari raya (THR), penggantian biaya pengobatan, tunjangan kematian, tunjangan cuti, masa persiapan pensiun, penghargaan masa bakti, dana pensiun, jasa produksi, asuransi dan manfaat lainnya berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.

**Pensiun iuran pasti**

LPEI menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh pegawai tetapnya yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia. Jumlah kontribusi LPEI untuk dana pensiun adalah sebesar 6,00% dari gaji pokok pegawai yang disajikan sebagai bagian dari "beban gaji dan tunjangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jumlah kontribusi LPEI adalah sebesar Rp3.777 dan Rp4.110 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

**Pensiun manfaat pasti**

LPEI menyiapkan penyisihan imbalan kerja jangka panjang dan paska kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 yang meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta imbalan kerja atas long-service award.

LPEI memberikan imbalan tersebut sesuai dengan Peraturan Perusahaan dibandingkan dengan peraturan imbalan pasca kerja Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003, dan memberikan mana yang lebih tinggi.

Liabilitas imbalan kerja dihitung oleh aktuaris independen, Kantor Konsultan Aktuaria Enny Diah Awal tertanggal 3 Januari 2022 dan oleh PT Sentra Jasa Aktuaria tertanggal 25 Februari 2021, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

**28. Liability For Employee Benefits**

*Under LPEI's policy, in addition to salaries, the employees are entitled to allowances and benefits, which are religion holiday benefits (THR), medical reimbursements, death allowances, leave allowances, pension preparation period, long service award, pension plan, bonus, insurance and other benefits based on Labor Law No. 13/2003*

**Defined contribution plan**

*LPEI implements a defined contribution plan covering all of their permanent employees, which is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia. LPEI's contribution to the pension plan retirement fund is 6.00% of the employees' basic salaries and is presented as part of "salaries and benefits" in the statements of profit or loss and other comprehensive income. LPEI's contributions were amounted to Rp3,777 and Rp4,110 for the years ended December 31, 2021 and 2020, respectively.*

**Defined benefit plan**

*LPEI has provided allowance for employee long-service and post-service benefits in accordance with Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003 which include severance fee, service pay benefits and compensation fees as well as employee benefit long-service award.*

*LPEI has provided the benefits in accordance with the Collective Labor Agreement as compared with benefits regulation under Labor Law No. 13/2003, and provide whichever is higher.*

*Liability for employee benefits is computed by an independent actuary, Kantor Konsultan Aktuaria Enny Diah Awal dated January 3, 2022 and PT Sentra Jasa Aktuaria dated February 25, 2021 for year ended December 31, 2021 and 2020, respectively:*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**28. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)**

**Penyisihan imbalan kerja**

Penyisihan imbalan kerja terdiri dari:

	<i>31 Desember / December 31,</i>	
	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Program imbalan kerja	110,873	130,324
Imbalan jangka panjang lainnya	45,489	52,229
Program PKWT	1,313	--
<b>Saldo akhir</b>	<b>157,675</b>	<b>182,553</b>

Beban yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk imbalan kerja adalah:

**28. Liability For Employee Benefits (continued)**

**Provision for employee benefits**

The provision for employee benefits consist of:

	<i>31 Desember / December 31,</i>	
	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Program imbalan kerja	110,873	130,324
Imbalan jangka panjang lainnya	45,489	52,229
Program PKWT	1,313	--
<b>Saldo akhir</b>	<b>157,675</b>	<b>182,553</b>

*Employee benefit plan  
Other long-term employee benefit  
PKWT Program  
Ending balance*

Beban yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk imbalan kerja adalah:

*The expense recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the employee benefits are as follows:*

	<i>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,</i>	
	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Program imbalan kerja	20,971	30,643
Imbalan jangka panjang lainnya	(1,116)	(19,283)
Program PKWT	1,323	--
<b>Beban yang diakui dalam laporan laba rugi</b>	<b>21,178</b>	<b>11,360</b>

*Employee benefit plan  
Other long-term employee benefit  
PKWT program  
Expense recognized in the statement of profit or loss*

Beban yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian berdasarkan klasifikasi akun adalah sebagai berikut:

*The expense recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income based on account classification are as follows:*

	<i>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,</i>	
	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Beban gaji dan tunjangan (Catatan 27)	21,178	11,360
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja - kerugian/(laba) aktuarial	(35,749)	(103,864)
<b>Beban yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian</b>	<b>(14,570)</b>	<b>(92,504)</b>

*Salaries and benefits expense (Note 27)  
Remeasurement of liability for employee benefits - actuarial loss/(gains)  
Expense recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income*

**Program imbalan kerja**

Berikut ini adalah hal-hal penting yang diungkapkan dalam laporan aktuaris.

**Employee benefit plan**

*The following are the significant items disclosed in the actuarial reports.*

	<i>31 Desember / December 31,</i>	
	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Tingkat diskonto pertahanan	7.50% dan 7.60%	3.64% - 7.83%
Tingkat kenaikan Gaji per tahun	4.00%	5.00%
Tingkat pengunduran diri pertahanan untuk pegawai dibawah usia 30 tahun dan akan menurun menjadi 0% pada umur 46 tahun	3.50%	3.50%
Tingkat kematian	TMI 19	TMI 11
Usia pensiun	56 tahun/years	56 tahun/years
Ekspektasi sisa masa kerja rata-rata karyawan	18.49	15.64

*Annual discount rates  
Increase rates  
Annual salary  
Annual resignation rates for employee before the age of 30 and will decrease until 0% at the age of 46  
Mortality rate  
Retirement age  
Average remaining working periods*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**28. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)**

**Program imbalan kerja (lanjutan)**

- a. Beban yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian suntuk imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	<i>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,</i>	
	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Biaya jasa kini dan jasa lalu	13,859	14,621
Biaya bunga	9,346	16,022
Beban pesangon	--	--
<b>Beban yang diakui dalam laporan laba rugi</b>	<b>23,204</b>	<b>30,643</b>
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja - neto:		
Keuntungan aktuaria dari penyesuaian sebelumnya	--	4
Keuntungan aktuaria dari perubahan asumsi keuangan	(16,634)	(40,397)
Keuntungan aktuaria dari penyesuaian sebelumnya	(19,114)	(63,471)
Keuntungan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(35,749)	(103,864)
<b>Total beban yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain</b>	<b>(12,544)</b>	<b>(73,221)</b>

- b. Perubahan cadangan penyisihan adalah sebagai berikut:

**28. Liability For Employee Benefits (continued)**

**Employee benefit plan (continued)**

- a. Expense recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for employee benefit plan follows:

	<i>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,</i>		
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
Current and past service cost			
Interest cost			
Termination cost			
<b>Expense recognized in the statement of profit or loss</b>	<b>23,204</b>	<b>30,643</b>	
Remeasurement of the net liability for employee benefits:			
Actuarial gain from experience adjustment	--	4	
Actuarial gains from changes in financial assumption	(16,634)	(40,397)	
Actuarial gains from experience adjustments	(19,114)	(63,471)	
Gain recognized in other comprehensive income	(35,749)	(103,864)	
<b>Total expense recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income</b>	<b>(12,544)</b>	<b>(73,221)</b>	

- b. The movements in the allowance are as follows:

	<i>31 Desember / December 31,</i>		
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
Saldo awal	130,324	213,476	<i>Beginning balance</i>
Penambahan tahun berjalan	23,204	30,643	<i>Addition during the year</i>
Nilai yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain	(35,749)	(103,864)	<i>Amount recognized in other comprehensive income</i>
Pembayaran tahun berjalan	(4,673)	(9,931)	<i>Payment during the year</i>
<b>Saldo akhir</b>	<b>113,107</b>	<b>130,324</b>	<b>Ending balance</b>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**28. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)**

**Program imbalan kerja (lanjutan)**

- c. Perubahan nilai kini liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	<i>31 Desember / December 31,</i>		
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
Saldo awal tahun	130,324	213,476	<i>Balance at beginning of the year</i>
Biaya jasa kini	17,267	14,621	<i>Current service cost</i>
Biaya jasa lalu	(3,408)	--	<i>Past service cost</i>
Biaya bunga	9,346	16,022	<i>Interest cost</i>
Pembayaran tahun berjalan	(4,673)	(9,931)	<i>Payment during the year</i>
Pengukuran kembali kerugian aktuaria:			<i>Remeasurement of actuarial losses:</i>
Kerugian aktuaria dari perubahan asumsi demografis	--	4	<i>Actuarial loss from changes in demographic assumption</i>
Keuntungan aktuaria dari perubahan asumsi keuangan	(16,634)	(63,471)	<i>Actuarial gain from changes in financial assumption</i>
Keuntungan aktuaria dari penyesuaian sebelumnya	(19,114)	(40,397)	<i>Actuarial gain from experience adjustments</i>
<b>Saldo akhir tahun nilai kini liabilitas imbalan kerja</b>	<b>113,107</b>	<b>130,324</b>	<b><i>Ending balance present value of employee benefit liabilities</i></b>

- d. Analisa tingkat sensitivitas untuk risiko tingkat diskonto (tidak diaudit):

**28. Liability for Employee Benefits (continued)**

**Employee benefit plan (continued)**

- c. The movements for the present value of employee benefit are as follows:

- d. Sensitivity analysis for discount rate risk (unaudited):

<i>31 Desember/ December 31, 2021</i>			
<i>Perubahan Persentase/ Percentage Change</i>	<i>Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ Impact to present value of employee benefit obligation</i>	<i>Perubahan Persentase/ Percentage Change</i>	<i>Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ Impact to current service cost</i>
-1%	14,624	-1%	618
+1%	(16,269)	+1%	(673)
<i>31 Desember/ December 31, 2020</i>			
<i>Perubahan Persentase/ Percentage Change</i>	<i>Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ Impact to present value of employee benefit obligation</i>	<i>Perubahan Persentase/ Percentage Change</i>	<i>Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ Impact to current service cost</i>
-1%	17,917	-1%	2,435
+1%	(15,092)	+1%	(2,007)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**28. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)**

**Program imbalan kerja (lanjutan)**

- e. Analisa tingkat sensitivitas untuk risiko tingkat kenaikan gaji (tidak diaudit)

**28. Liability For Employee Benefits (continued)**

**Employee benefit plan (continued)**

- e. Sensitivity analysis for salary increase risk (unaudited)

**31 Desember/  
December 31, 2021**

<b>Perubahan Persentase/ Percentage Change</b>	<b>Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ Impact to present value of employee benefit obligation</b>	<b>Perubahan Persentase/ Percentage Change</b>	<b>Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ Impact to current service cost</b>
-1%	(16,896)	-1%	(711)
+1%	15,163	+1%	651

**31 Desember/  
December 31, 2020**

<b>Perubahan Persentase/ Percentage Change</b>	<b>Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ Impact to present value of employee benefit obligation</b>	<b>Perubahan Persentase/ Percentage Change</b>	<b>Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ Impact to current service cost</b>
-1%	(12,421)	-1%	(1,587)
+1%	14,345	+1%	1,872

- f. Jatuh tempo dari liabilitas imbalan pasca-kerja pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

- f. The maturity of the obligation for post-employment benefits as of December 31, 2021 and 2020 is as follows:

**31 Desember/  
December 31, 2021**

<b>Jumlah Pembayaran Manfaat Pension/Amount Benefit Payment for Pension</b>	<b>Pembayaran Manfaat OLTEB/Amount of Benefit Payment for OLTEB</b>	<b>Pembayaran Manfaat Kesehatan/Amount of Benefit Payment for Healthcare</b>	<b>Pembayaran Manfaat PKWT/Amount of Benefit Payment for PKWT</b>	<b>Total</b>	
Dibawah 1 tahun	4,666	3,787	192	1,795	10,441
Antara 1 - 2 tahun	7,995	4,331	585	227	13,138
Antara 2 - 5 tahun	39,074	26,454	3,024	--	68,552
Antara 5 - 10 tahun	75,401	46,647	6,410	--	128,458
Diatas 10 tahun	636,223	122,592	246,613	--	1,005,428
					Below 1 year Within 1 - 2 years Within 2 - 5 years Within 5 - 10 years Up 10 years

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**28. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)**

**Program imbalan kerja (lanjutan)**

- f. Jatuh tempo dari liabilitas imbalan pasca-kerja pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2020				
	Jumlah Pembayaran Manfaat Pensiun/Amount Benefit Payment for Pension	Pembayaran Manfaat OLTEB/Amount of Benefit Payment for OLTEB	Pembayaran Manfaat Kesehatan/Amount of Benefit Payment for Healthcare	Pembayaran Manfaat PKWT/Amount of Benefit Payment for PKWT	Total
Dibawah 1 tahun	6,839	6,112	2,193	--	15,144
Antara 1 - 2 tahun	5,668	4,230	1,648	--	11,546
Antara 2 - 5 tahun	29,983	22,268	2,834	--	55,085
Antara 5 - 10 tahun	79,393	43,170	6,036	--	128,599
Diatas 10 tahun	768,415	129,401	383,685	--	1,281,501

Rata-rata durasi dari liabilitas imbalan pasca-kerja adalah 18,49 dan 14,51 tahun pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

**28. Liability For Employee Benefits (continued)**

**Employee benefit plan (continued)**

- f. The maturity of the obligation for post-employment benefits as of December 31, 2021 and 2020 is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020				
	Jumlah Pembayaran Manfaat Pensiun/Amount Benefit Payment for Pension	Pembayaran Manfaat OLTEB/Amount of Benefit Payment for OLTEB	Pembayaran Manfaat Kesehatan/Amount of Benefit Payment for Healthcare	Pembayaran Manfaat PKWT/Amount of Benefit Payment for PKWT	Total
Dibawah 1 tahun	6,839	6,112	2,193	--	15,144
Antara 1 - 2 tahun	5,668	4,230	1,648	--	11,546
Antara 2 - 5 tahun	29,983	22,268	2,834	--	55,085
Antara 5 - 10 tahun	79,393	43,170	6,036	--	128,599
Diatas 10 tahun	768,415	129,401	383,685	--	1,281,501

The average of duration of the obligation for post employment benefits is 18.49 and 14.51 for the years as of December 31, 2021 and 2020, respectively.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefit obligation liability recognised in the statement of financial position.

There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior years.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**28. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)**

**Imbalan jangka panjang lainnya**

Imbalan jangka panjang lainnya terdiri dari *long-service award* (*LSA*), masa persiapan pensiun, pemberian logam mulia dan *long leave* (*LL*).

Asumsi-asumsi yang digunakan oleh aktuaris dalam perhitungan imbalan jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

**28. Liability For Employee Benefits (continued)**

**Other long-term benefits**

Other long-term benefits consist of long-service award (*LSA*), pre-retirement period, gold granting, and long leave (*LL*).

The assumptions used by the actuary for other long-term benefits calculation are as follows:

	<b>31 Desember / December 31,</b>		
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	
Tingkat diskonto pertahan	7.10%	3.64% - 7.83%	<i>Annual discount rates</i>
Tingkat kenaikan gaji per tahun	4.00%	10.00%	<i>Annual salary increase rates</i>
Tingkat pengunduran diri pertahan untuk pegawai dibawah usia 30 tahun dan akan menurun menjadi 0% pada umur 46 tahun	3.50%	3.50%	<i>Annual resignation rates for employee before the age of 30 and will decrease until 0% at the age of 46</i>
Tingkat kematian	TMI 19	TMI 11	<i>Mortality rate</i>
Usia pensiun	56 tahun/years	56 tahun/years	<i>Retirement age</i>
Ekspektasi sisa masa kerja rata-rata karyawan	12.03	15.64	<i>Average remaining working period</i>

- a. Beban imbalan jangka panjang lainnya yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

- a. Other long term benefit plan expense recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	<b>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,</b>		
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	
Biaya jasa:			<i>Service cost:</i>
Biaya jasa kini dan jasa lalu	7,410	1,147	<i>Current and past service cost</i>
Pengukuran kembali imbalan jangka panjang lainnya	(11,837)	(25,947)	<i>Remeasurement of other long term benefit</i>
Beban bunga neto pada liabilitas imbalan yang ditetapkan	3,311	5,517	<i>Net interest on net defined benefit liability</i>
<b>Beban yang diakui dalam laporan laba rugi</b>	<b>(1,116)</b>	<b>(19,283)</b>	<i>Expense recognized in the statement of profit or loss</i>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**28. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)**

**Imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)**

- b. Perubahan penyisihan adalah sebagai berikut:

	<i>31 Desember / December 31,</i>		
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
Saldo awal	52,229	78,853	<i>Beginning balance</i>
Penambahan tahun berjalan	(1,116)	(19,283)	<i>Addition during the year</i>
Pembayaran tahun berjalan	(5,624)	(7,341)	<i>Payments during the year</i>
<b>Saldo akhir</b>	<b>45,489</b>	<b>52,229</b>	<b><i>Ending balance</i></b>

- c. Perubahan nilai kini liabilitas imbalan jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

	<i>31 Desember / December 31,</i>		
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
Saldo awal tahun	52,229	78,853	<i>Balance at beginning of the year</i>
Biaya jasa kini	7,410	7,077	<i>Current service cost</i>
Biaya jasa lalu	-	(5,930)	<i>Past service cost</i>
Biaya bunga	3,311	5,517	<i>Interest cost</i>
Pembayaran tahun berjalan	(5,624)	(7,341)	<i>Payments during the year</i>
(Keuntungan)/Kerugian aktuaria dari perubahan asumsi demografis	-	(8)	<i>Actuarial (gain)/loss from changes in demographic assumption</i>
(Keuntungan)/Kerugian aktuaria dari perubahan asumsi keuangan	(4,742)	(12,835)	<i>Actuarial (gains)/losses from changes in financial assumptions</i>
Keuntungan aktuaria dari <i>experience adjustment</i>	(7,095)	(13,104)	<i>Actuarial gains from experience adjustment</i>
<b>Saldo akhir tahun nilai kini liabilitas imbalan jangka panjang lainnya</b>	<b>45,489</b>	<b>52,229</b>	<b><i>Ending balance present value of other long term benefit</i></b>

- d. Saldo imbalan kerja untuk posisi 31 Desember 2021 dan posisi selama empat tahun sebelumnya:

	<i>31 Desember/ December 31,</i>					
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>	
Nilai kini dari liabilitas imbalan kerja	(157,675)	(182,553)	(292,329)	(231,274)	(194,680)	<i>Present value of employee benefit obligation</i>
Penyesuaian asumsi pada liabilitas program	23,729	53,501	15,015	20,669	3,139	<i>Experience adjustments on plan liabilities</i>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**28. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)**

**Imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)**

- e. Analisa tingkat sensitivitas untuk risiko tingkat diskonto (tidak diaudit)

Tabel berikut menunjukkan analisa sensitivitas atas nilai kini liabilitas imbalan kerja dan biaya jasa kini dengan asumsi perubahan atas tingkat diskonto:

31 Desember/ December 31, 2021			
Perubahan Percentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ <i>Impact to present value of employee benefit obligation</i>	Perubahan Percentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ <i>Impact to current service cost</i>
-1%	3,154	-1%	150
1%	(2,823)	1%	(131)
31 Desember/ December 31, 2020			
Perubahan Percentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ <i>Impact to present value of employee benefit obligation</i>	Perubahan Percentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ <i>Impact to current service cost</i>
-1%	3,307	-1%	507
1%	(2,966)	1%	(451)

- f. Analisa tingkat sensitivitas untuk risiko kenaikan gaji (tidak diaudit):

**28. Liability For Employee Benefits (continued)**

**Other long-term benefits (continued)**

- e. Sensitivity analysis for discount rate risk (unaudited)

The tables below show the sensitivity analysis of the present value of employee benefit liabilities and current service cost in the assumed changes in the discount rate:

31 Desember/ December 31, 2021			
Perubahan Percentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ <i>Impact to present value of employee benefit obligation</i>	Perubahan Percentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ <i>Impact to current service cost</i>
-1%	(2,929)	-1%	(136)
1%	3,221	1%	154
31 Desember/ December 31, 2020			
Perubahan Percentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ <i>Impact to present value of employee benefit obligation</i>	Perubahan Percentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ <i>Impact to current service cost</i>
-1%	(3,031)	-1%	(461)
1%	3,322	1%	510

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**29. Komitmen dan Kontinjensi**

Komitmen dan kontinjensi LPEI adalah sebagai berikut:

**29. Commitments and Contingencies**

*LPEI's commitments and contingencies are as follows:*

	<i>31 Desember / December 31,</i>		
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
<b>KOMITMEN</b>			<b>COMMITMENTS</b>
<b>Liabilitas komitmen</b>			<b>Commitment liabilities</b>
<b>Rupiah</b>			<b>Rupiah</b>
Pihak berelasi (Catatan 38)			Related parties (Note 38)
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	1,550,691	2,621,741	Unused loan facilities to debtors
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	7,652	5,221	Outstanding irrevocable L/C
	<u>1,558,343</u>	<u>2,626,962</u>	
Pihak ketiga			Third parties
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	817,092	2,465,774	Unused loan facilities to debtors
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	168,766	79,952	Outstanding irrevocable L/C
	<u>985,858</u>	<u>2,545,726</u>	
Total Rupiah	<u>2,544,201</u>	<u>5,172,688</u>	<b>Total Rupiah</b>
<b>Mata uang asing</b>			<b>Foreign currencies</b>
Pihak berelasi (Catatan 38)			Related parties (Note 38)
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	205,390	184,402	Unused loan facilities to debtors
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	82,983	9,395	Outstanding irrevocable L/C
	<u>288,373</u>	<u>193,797</u>	
Pihak ketiga			Third parties
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	1,643,929	3,002,105	Unused loan facilities to debtors
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	119,695	69,847	Outstanding irrevocable L/C
	<u>1,763,624</u>	<u>3,071,952</u>	
Total mata uang asing	<u>2,051,997</u>	<u>3,265,749</u>	<b>Total foreign currencies</b>
<b>Total liabilitas komitmen</b>	<b>4,596,198</b>	<b>8,438,437</b>	<b>Total commitment liabilities</b>
<b>Komitmen</b>	<b>(4,596,198)</b>	<b>(8,438,437)</b>	<b>Commitments</b>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**29. Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)**

**29. Commitments  
(continued) and Contingencies**

	<i>31 Desember / December 31,</i>		
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
<b>KONTINJENSI</b>			<b>CONTINGENCIES</b>
<b>Tagihan kontinjensi</b>			<b>Contingent receivables</b>
<b>Rupiah</b>			<b>Rupiah</b>
Pihak berelasi (Catatan 38)			Related parties (Note 38)
Pendapatan bunga kredit bermasalah	204,015	143,380	Interest income on non-performing loans
Pihak ketiga			Third parties
Pendapatan bunga kredit bermasalah	4,377,810	3,355,575	Interest income on non-performing loans
<b>Mata uang asing</b>			<b>Foreign currencies</b>
Pihak berelasi (Catatan 38)			Related parties (Note 38)
Pendapatan bunga kredit bermasalah	130,413	122,491	Interest income on non-performing loans
Pihak ketiga			Third parties
Pendapatan bunga kredit bermasalah	1,879,527	1,432,651	Interest income on non-performing loans
<b>Total tagihan kontinjensi</b>	<b>6,591,765</b>	<b>5,054,097</b>	<b>Total contingent receivables</b>
<b>Liabilitas kontinjensi</b>			<b>Contingent liabilities</b>
<b>Rupiah</b>			<b>Rupiah</b>
Pihak berelasi (Catatan 38)			Related parties (Note 38)
Bank garansi	223,835	307,180	Bank guarantee
Penjaminan Kredit - PEN	1,078,000	--	Credit Guarantee - PEN
	1,301,835	307,180	
Pihak ketiga			Third parties
Penjaminan Kredit - PEN	2,817,315	817,500	Credit Guarantee - PEN
Bank garansi	1,247,252	1,659,755	Bank guarantee
Asuransi kegagalan ekspor	643,548	--	Failure on export insurance
Proteksi piutang dagang	251,313	106,505	Receivable protection
	4,959,428	2,583,760	
<b>Mata uang asing</b>			<b>Foreign currencies</b>
Pihak berelasi (Catatan 38)			Related parties (Note 38)
Bank garansi	1,990,968	1,098,731	Bank guarantee
Asuransi kegagalan ekspor	9,997	1,053,600	Failure on export insurance
Proteksi piutang dagang	--	48,473	Receivable protection
Pihak ketiga			Third parties
Asuransi kegagalan ekspor	6,025,056	3,248,140	Failure on export insurance
Bank garansi	4,832,775	5,976,651	Bank guarantee
Proteksi piutang dagang	4,008,495	3,652,008	Receivable protection
Penjaminan Kredit - PEN	946,081	49,175	Credit Guarantee - PEN
	17,813,372	15,126,778	
<b>Total liabilitas kontinjensi</b>	<b>24,074,635</b>	<b>18,017,718</b>	<b>Total contingent liabilities</b>
<b>Kontinjensi - neto</b>	<b>(17,482,870)</b>	<b>(12,963,621)</b>	<b>Contingencies - net</b>

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dan yang mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 31.

*Information with respect to classification of not impaired and impaired financial assets is disclosed in Note 31.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

### **30. Manajemen Risiko**

Penerapan manajemen risiko dilakukan berdasarkan Pasal 17 UU No.2 Tahun 2009 tentang LPEI dengan mencakup pemenuhan modal minimum, pengawasan aktif dan pemenuhan disiplin pasar terhadap risiko yang melekat. Penerapan ini dilaksanakan melalui (i) implementasi manajemen risiko pada setiap aktivitas operasional sehingga manajemen risiko mampu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap aktivitas operasionalnya dan (ii) pengelolaan permodalan agar mampu menyerap risiko yang dihadapi LPEI.

Pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif, merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia No.208/PMK.06/2021 tentang Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI, bentuk penerapannya paling kurang mencakup:

1. Pengawasan aktif Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif;
  2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko;
  3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
  4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Sasaran Penerapan Manajemen Risiko LPEI adalah mengelola risiko agar pelaksanaan kegiatan usaha LPEI tetap berada dalam koridor profil Risiko lembaga yang terkendali, terarah, terintegrasi dan berkesinambungan melalui institusi Manajemen Risiko yang berfungsi sebagai penyaring dan pemberi peringatan dini (*early warning system*).

LPEI menerapkan manajemen risiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan mengelola risiko yang baik yang diharapkan tidak hanya meningkatkan *stakeholder value*, tetapi juga memberikan gambaran mengenai potensi kerugian yang mungkin dihadapi di masa mendatang, memelihara tingkat *risk adjusted return* yang optimal dan membantu dalam proses pengambilan keputusan usaha secara tepat.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)**

## **30. Risk Management**

*LPEI implements risk management in accordance with Law No. 2 in 2009 about LPEI Article 17 which encompasses the fulfillment of capital adequacy, active supervision and compliance of market discipline against inherent risk. This implementation is realized in the form of (i) risk management implementation in each and every operational activity so that risk management becomes an inseparable part of every operational activity (ii) capital management in order to be able to absorb risks that LPEI faces.*

The process and system of effective risk management are being carried out in accordance to the Regulation of the Ministry of Finance No. 208/PMK.06/2021 regarding Governance, Risk Management Principles and Know Your Customer Principles, in which the forms of application at the very least include:

1. Active monitoring by the Board of Directors and Managing Directors;
  2. Adequate policies, procedures and indetermining risk barrier;
  3. Adequate process in identifying, measuring, monitoring, risk control, and system information of risk management; and
  4. Comprehensive internal control system.

The target of LPEI Risk Management Implementation is to manage risk so that the implementation of LPEI business activities remains within the corridor of the controlled risk profile, directed, integrated and sustainable institution through Risk Management system that functions as a filter and provider of early warning systems.

*LPEI applied effective risk management which aligned with target, policy, criteria, complexity and good risk mitigation, which expected to increase stakeholder value and provide a good prediction of potential loss in the upcoming future. This also expected to maintain optimum risk-adjusted-return and also helping on making a good decision.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**30. Manajemen Risiko (lanjutan)**

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usaha, risiko yang dihadapi LPEI juga berkembang secara luas, antara lain mencakup risiko kredit, risiko asuransi, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko investasi. Risiko kredit merupakan risiko yang paling signifikan di LPEI dibanding jenis risiko lainnya. Risiko kredit adalah risiko yang terjadi karena kegagalan debitur, yang menyebabkan tak terpenuhinya kewajiban untuk membayar hutang.

Pada tahun 2021, LPEI menata kembali penerapan kerangka manajemen risiko, khususnya pada jenis-jenis risiko, *risk appetite*, alat pengukuran, metodologi, pengukuran ataupun internalisasi *risk culture* sebagai satu kesatuan dalam penerapan *Enterprise Risk Management Framework* di LPEI. Pada hakikatnya *Enterprise Risk Management* di LPEI telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 142/PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko LPEI sebagaimana diubah dalam PMK No.208/PMK.06/2021 tentang Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. Pengelolaan sepuluh jenis risiko diatas juga termasuk pengelolaan risiko penugasan khusus melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.183/PMK.08/2021 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI.

Penerapan manajemen risiko dicerminkan dari hasil penilaian Profil Risiko LPEI yang mencakup penilaian risiko inheren, yaitu penilaian atas risiko yang melekat (inherent) pada pelaksanaan kegiatan usaha LPEI, yang mencakup pembiayaan, penjaminan dan asuransi dan penilaian atas Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yang mencakup seluruh pilar-pilar penerapan manajemen risiko sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan. Hasil penggabungan penilaian risiko inheren dan penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko akan menghasilkan Profil Risiko secara komposit. Profil risiko LPEI merupakan salah satu faktor penilaian Tingkat Kesehatan LPEI sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Dewan Direktur No. 0001/PDD/11/2012 tentang Pedoman Tingkat Kesehatan LPEI.

**30. Risk Management (continued)**

*In line with the development of business activities, LPEI also deal with higher risk. This risk are including credit risk, insurance risk, liquidity risk, market risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, compliance risk, and equity investment risk. Credit risk is the most significant among others. Credit risk is a risk that occurred because of the failure of the debtor, which causes not fulfilled to pay off debt.*

*In 2021, LPEI improved the management risk framework, especially on the following section, risk appetite, risk measurement tools, methodology, measurement, and risk culture internalization as a part on applying Enterprise Risk Management Framework on LPEI. Risk Management Framework on LPEI has been describe on Ministry of Finance Regulation No. 142/PMK.010/2009 that has been rectified by the Regulation of the Ministry of Finance No. 208/PMK.06/2021 regarding Governance, Risk Management Principles and Know Your Customer Principles. The risk management of ten points above also covered special assignment by the Finance Minister Regulation No.183/PMK.08/2021 on special assignment to LPEI.*

*Risk management implementation also reflected in LPEI Risk Profile Assesment that consist of Inherent Risk Assesment in all LPEI business activity that include financing activity, guarantee and insurance, and technical assistance that potentially affect LPEI financial position and Risk Control System Assesment covering all risk management pillars as defined in the regulation of the Ministry of Finance. The result of inherent risk Assesment and Risk Control System Assesment is LPEI Risk Profile which is one of the factors in Risk Based Indonesia Eximbank Rating as stipulated in the Regulation of the Board of Directors No. 0001/PDD/11/2012 concerning LPEI Risk Based LPEI Rating Guidelines.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

### **30. Manajemen Risiko (lanjutan)**

Dalam kerangka manajemen risiko terpadu (*enterprise risk management*), LPEI menerapkan konsep *three lines of defense*, yakni:

- *First line of defense* yaitu unit kerja bisnis dengan aktivitas fungsional sebagai unit kerja yang mengambil risiko (*risk taking function*) dan sebagai unit yang memasarkan dan memproses pembiayaan, penjaminan dan asuransi dengan merujuk pada kebijakan, prosedur dan limit yang telah ditetapkan dan direview secara *joint memo* oleh unit kerja Analisa Risiko Bisnis yang bertindak sebagai *dynamic partner* dari unit bisnis.
- *Second line of defense* yakni unit kerja Manajemen Risiko dan Unit Kerja Kepatuhan yang bersifat independen yang memantau pemenuhan manajemen risiko di LPEI sesuai toleransi risiko dan merupakan unit kerja yang merumuskan *risk policy* dan membangun *risk modeling* yang digunakan oleh unit bisnis dan unit analisa risiko bisnis (*risk management function*).
- *Third line of defense* yakni unit kerja Audit Internal yang berfungsi melakukan pengendalian melalui evaluasi kepada *first and second lines of defense* serta memberikan laporan kepada Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana secara independen (*internal audit function*).

### **30. Risk Management (continued)**

*In the organizational structure to support the implementation of risk management in business activities. LPEI has implemented the concept of three lines of defense:*

- *First line of defense is a business unit with functional activity as a unit which markets and processes financing, guarantees and insurance with reference to the policy, procedures and limits which has been determined and reviewed as a joint memo by Business Risk Analysis Unit that acts as a dynamic business partner of the business unit.*
- *Second line of defense is Risk Management and Strategic Planning Unit to independently monitor risk management implementation in LPEI regarding to risk tolerance, besides acting as a unit that formulates risk policy and constructs also risk model that is used by Business Unit and Business Risk Analyst Unit.*
- *Third line of defense is Internal Audit Unit function as controller through the evaluation of the first and second lines of defense and provides a report to the Executive Director and Managing Director independently.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**30. Manajemen Risiko (lanjutan)**

**Manajemen Risiko dalam Kondisi  
COVID-19**

Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap tingkat risiko yang dihadapi LPEI walaupun tidak secara signifikan. Hal ini tercermin dalam hasil penilaian Tingkat Kesehatan (TK) LPEI posisi triwulan III 2021 menunjukkan peringkat komposit 3 (PK-3) atau sama bila dibandingkan dengan Tingkat Kesehatan LPEI posisi triwulan IV 2020.

Dari segi kebijakan, LPEI telah menyusun regulasi terkait debitur terdampak pandemi Covid-19 melalui Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0012/PDE/04/2021 tentang Manual Operasional Tindak Lanjut Pengelolaan Nasabah terdampak COVID-19.

Regulasi ini disusun sesuai dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.05/2020 tentang "Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank" yang telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 58/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.05/2020 tentang "Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank" serta sebagai pedoman dan panduan bagi unit-unit kerja terkait dalam penetapan tindak lanjut bagi debitur LPEI yang terdampak pandemi Covid-19, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tetap memenuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik, penerapan manajemen risiko dan prinsip mengenal nasabah.

**30. Risk Management (continued)**

**Risk Management During Covid-19  
Pandemic**

*The Covid-19 pandemic has affected the level of risk that LPEI faced, albeit not significantly. This is reflected in the outcome of LPEI's Soundness Level (TK) assessment as of 30 September, which resulted in Rank 3 (PK-3) or relatively stable compared to the results of LPEI's Soundness Level (TK) assessment as of 31 December 2020.*

*In terms of policy, LPEI has established a regulation regarding debtors being impacted with the Covid-19 pandemic by ratifying the Regulation of the Executive Director No. 0012/PDE/04/2021 about Follow-Up Actions to Manage Debtors Affected by COVID-19.*

*This regulation was constructed based on The Regulation of Financial Services Authority (POJK) No. 14/POJK.05/2020 about "Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank" which were revised by POJK No. 58/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.05/2020 about "Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank", and serves as a guidance for related units to manage debtors being impacted by the Covid-19 pandemic so that the practices of good corporate governance, risk management and know your customer are carried out accordingly.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**30. Manajemen Risiko (lanjutan)**

**Manajemen Risiko dalam Kondisi  
COVID-19 (lanjutan)**

Kebijakan ini mengatur kriteria sektor usaha dan debitur yang terdampak penyebaran Covid-19, kriteria restrukturisasi debitur terdampak Covid-19, bentuk restrukturisasi pembiayaan, penetapan kualitas pembiayaan bagi debitur terdampak Covid-19 dan ketentuan lain terkait tindak lanjut pengelolaan debitur terdampak Covid-19. Pengambilan keputusan atas restrukturisasi dilakukan oleh Komite Pembiayaan dan dengan mekanisme proses persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan diterapkannya kebijakan tersebut, diharapkan debitur-debitur terdampak penyebaran Covid-19 dapat terbantu dan kualitas portofolio tetap terjaga.

Terkait dengan kondisi pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung, LPEI telah melakukan kajian maupun *backtesting* pada beberapa alat pengukuran risiko yaitu pelaksanaan *Stress Testing* secara berkala, *backtesting* terhadap *forward looking model* PD yang telah diimplementasikan saat ini serta permodelan kembali atas komponen historis dan *forward looking* untuk perhitungan ECL (PD, LGD dan EAD) untuk mengakomodasi dampak pandemi Covid-19.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**30. Risk Management (continued)**

**Risk Management During The Covid-19  
Pandemic (continued)**

*This policy states the criteria of which economic sectors and debtors are categorized of being impacted by Covid-19, restructuration criteria of impacted debtors, forms of restructuration, stipulation of impacted debtors' loan qualities and other related regulations regarding the management of debtors being impacted by the Covid-19 pandemic. All decision making processes are carried out by the Financing Committee in accordance to the applicable regulations. By ratifying this policy, debtors being impacted by the Covid-19 pandemic could hopefully be eased of their burdens and LPEI could maintain its portfolio quality.*

*Still on the topic of the ongoing Covid-19 pandemic, LPEI has conducted studies and back-testing processes on several risk measurement tools, including conducting Stress Testing practices regularly. LPEI has performed back-testing on the current forward looking PD model and re-modeling of the historical and forward looking ECL components (i.e., PD, LGD and EAD) to accommodate the impact of the Covid-19 pandemic.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**31. Risiko Kredit**

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko ketidakmampuan debitur atau *counterparties* melakukan pembayaran kembali kepada LPEI (*counterparties default*). Jenis risiko ini merupakan risiko terbesar yang dihadapi LPEI. LPEI menerapkan manajemen risiko kredit melalui tahapan identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan risiko kredit baik secara individual maupun secara portofolio. Pembiayaan posisi 31 Desember 2021 memiliki rasio NPF Gross sebesar 21,03% menurun terhadap posisi 31 Desember 2020 sebelumnya yang sebesar 26,08%. Rasio NPF Net posisi 31 Desember 2021 sebesar 7,12% menurun terhadap posisi 31 Desember 2020 yang sebesar 11,49%. Pengelolaan risiko kredit diantaranya dilakukan dengan pengelolaan limit pada batasan eksposur risiko yang dapat diterima untuk individu debitur, pengelolaan limit pada batasan geografis tertentu, pengelolaan limit konsentrasi per industri dan sektor ekonomi tertentu. Penetapan limit juga dilakukan melalui penggolongan risiko kredit (*rating*) per individual debitur. Rating risiko kredit dikenakan secara berkala untuk memperkirakan *potential loss* sebagai risiko kredit akibat ekspansi pembiayaan dan penentuan tindak lanjut perbaikan. Penerapan manajemen risiko kredit tidak hanya ditujukan untuk memenuhi ketentuan regulator, namun merupakan suatu tuntutan manajemen untuk menerapkan sistem pengelolaan risiko kredit pada tingkat *risk and return* yang optimum dan sesuai dengan praktik di lembaga keuangan, sehingga diharapkan mampu mendorong kegiatan usaha LPEI.

Proses analisa dan persetujuan pembiayaan diawali dengan proses pengenalan calon debitur melalui penilaian tingkat risiko masing-masing calon debitur dengan menggunakan IEB *Credit Risk Rating System* untuk pembiayaan korporasi. Hasil rating dimaksud dipergunakan pula untuk penerapan *risk based pricing* dalam Asset Liabilities Committee (ALCO).

**31. Credit Risk**

*Credit risk is defined as the risk of the inability of debtors or counterparties to fulfill its obligation to LPEI (counterparties default). This type of risk is the biggest risk which is faced by LPEI. LPEI implements credit risk management through the stages of identification, measurement, control and monitoring of credit risk either individually or as a portfolio. Financing position December 31, 2021 has a Gross NPF ratio at 21.03%, which decreased from the December 31, 2020 position of 26.08%. Net NPF ratio of December 31, 2021 was 7.12%, a decrease from December 31, 2020 position at 11.49%. Credit risk management implemented by managing risk exposure at acceptable limit for individual borrowers, specific geographic boundaries, concentration limit per industry and economic sectors. Set-up limit is also done through the classification of credit risk (rating) per individual debtor. Credit risk ratings are periodically updated to estimate potential losses (as credit risk) as a result of financing expansion and determining follow-up improvement. Credit risk management is not only intended to comply with regulator, but also Management's intention to implement credit risk management system at the optimum risk and return and commonly practiced in financial institutions, so that is expected to encourage LPEI's business activities.*

*Loan analysis and approval process begins with the introduction of the applicants through risk evaluation of each prospective borrower by using the IEB Credit Risk Rating System for corporate funding. Rating result is also used by the Asset Liabilities Committee (ALCO) to set risk-based pricing.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**31. Risiko Kredit (lanjutan)**

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh unit bisnis telah mempertimbangkan dan memperhatikan risiko kredit sejak pembiayaan dimaksud diberikan sampai dengan pelunasannya. Pemantauan dilakukan secara berkala terhadap kualitas pembiayaan untuk mencegah terjadinya *Non Performing Loan* (NPL) termasuk memantau ada atau tidaknya bukti obyektif penurunan nilai serta perhitungan besarnya cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) baik secara kolektif maupun secara individual.

Melalui penerapan *Early Warning System* (EWS) terhadap kondisi perkembangan debitur, maka pengelolaan risiko kredit yang efektif dapat meminimalkan risiko terjadinya kerugian dan mengoptimalkan penggunaan modal untuk mendukung pembiayaan ekspor nasional.

Pengelolaan risiko kredit di LPEI dimaksudkan agar kemungkinan kerugian yang diakibatkan oleh tidak terbayarnya pinjaman yang diberikan dan kontrak keuangan lainnya, baik secara tingkat individual maupun portofolio pembiayaan secara keseluruhan dapat dikelola seminimal mungkin. Pengelolaan risiko kredit ini juga dilakukan LPEI dalam upaya memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundangan-undangan termasuk Peraturan Menteri Keuangan.

- a. Analisis eksposur maksimum risiko kredit dengan mempertimbangkan dampak keuangan dari agunan dan peningkatan kredit lainnya.

Nilai tercatat aset keuangan LPEI selain pembiayaan dan piutang merupakan eksposur maksimum risiko kredit per tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Pembiayaan dan piutang LPEI dijamin dengan agunan (misalnya piutang, persediaan, mesin dan lain-lain). LPEI menggunakan nilai wajar agunan sebagai dasar arus kas masa depan untuk tujuan penurunan jika pembiayaan dan piutang bersifat *collateral dependent* dan penyitaan agunan kemungkinan besar terjadi berdasarkan perjanjian.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**31. Credit Risk (continued)**

*In granting its financing, the business unit has considered credit risk since loan being drawdowned up until the said facility is settled. Monitoring of loan quality is conducted periodically to prevent non-performing loans (NPL), including to monitor any objective evidence of impairment, as well as to calculate the allowance for impairment losses, both collectively and individually.*

*Through the implementation of Early Warning System (EWS) in monitoring debtors, LPEI could enhance the effectiveness of credit risk management and eventually minimize potential loss as well as optimize capital utilization to support national export programme.*

*The purpose of LPEI's credit risk management is to manage the possible losses on loan and other financial contracts default at minimum level, both as individual and as loan portfolio. Besides, credit risk management also intended to comply with regulations including the Regulation of the Minister of Finance.*

- a. *Analysis of maximum exposure to credit risk considering the financial effect of collateral and other credit enhancement.*

*As of December 31, 2021 and December 31, 2020, the carrying value of LPEI's financial assets other than financing and receivables represents the maximum exposure to credit risk.*

*LPEI's financing and receivables are secured by collateral (e.g. receivables, inventories, machineries and etc.). LPEI uses the fair value of collateral as a basis of future cash flows for impairment purposes if financing and receivables are collateral dependent and foreclosure of collateral is most likely to occur based on the agreement.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**31. Risiko Kredit (lanjutan)**

Agunan adalah hak dan kekuasaan atas benda berwujud dan/atau benda tidak berwujud yang diserahkan oleh debitur dan/atau pihak ketiga sebagai pemilik agunan kepada LPEI sebagai *second way out* guna menjamin pelunasan hutang debitur, apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan atau addendumnya. Objek agunan yang dibiayai berupa:

- Barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang dibiayai dengan pembiayaan.
- Fungsi agunan berupa objek yang dibiayai tersebut tidak hanya sebagai bukti penggunaan pembiayaan, keseriusan/ kesungguhan debitur atau calon debitur, tetapi juga sebagai faktor pengurang risiko pembiayaan dikemudian hari jika fasilitas pembiayaan yang diberikan tersebut mengalami macet.

Untuk meminimalkan risiko, LPEI mengutamakan untuk memperoleh aset tetap sebagai agunan.

Manajemen meyakini kemampuan LPEI untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit yang berasal dari pembiayaan dan piutang berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- LPEI telah memiliki pedoman tertulis mengenai kebijakan dan proses pembiayaan dan piutang yang mencakup seluruh aspek pemberian pembiayaan dan piutang yang dilakukan. Setiap pemberian pembiayaan dan piutang harus senantiasa mengacu pada kebijakan tersebut.
- LPEI telah memiliki sistem deteksi dini permasalahan melalui “*early warning system*” dan pemantauan yang disiplin.
- Seluruh pembiayaan dan piutang diberikan dengan agunan, kecuali untuk jenis pembiayaan dan piutang tertentu seperti fasilitas antar bank (pinjaman yang diberikan).

- b. Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit

**31. Credit Risk (continued)**

*Collateral is the right and power over tangible and/or intangible assets submitted by the debtor and the owner or a third party as collateral to LPEI as a second way out to ensure repayment of a debt of the debtor, if financing cannot be paid based on receipt of the financing agreement time or its addendum. Object of financed collateral is follows:*

- *Moveable and immovable goods funded by financing.*
- *Function of object collateral not only as evidence of financing, seriousness/earnestness debtor, but also as a risk-reducing financing in the future if the financing facilities cannot be paid.*

*To minimize the risk, LPEI prioritizes to acquire fixed assets as collateral.*

*Management believes on LPEI's ability to control and sustain minimal exposure on credit risk of LPEI resulting from its financing and receivables based on the following:*

- *LPEI has written financing and receivables policy and manual procedures that covers all aspects of LPEI's lending activities. At all times, the financing and receivables must adhere to the requirements of LPEI's policy.*
- *LPEI has an early problem detection system through “early warning system” and a disciplined monitoring practice.*
- *All financing and receivables are secured by collateral, except for certain financing and receivables such as interbank financing (i.e. loan).*

- b. *Concentration of financial assets risk with credit risk exposure*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**31. Risiko Kredit (lanjutan)**

- a) Sektor geografis, neto cadangan kerugian penurunan nilai

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit LPEI pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung pembiayaan dan piutang lainnya), yang dikategorikan berdasarkan area geografis pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

**31. Credit Risk (continued)**

- a) Geographical sectors, net of allowance for impairment losses

The following tables provide details of LPEI's credit exposures at their carrying amounts (without taking into account any collateral held or other financing and receivables support), categorized by geographical region as of December 31 2021 and December 31, 2020.

	31 Desember/ December 31, 2021								
	Dalam Negeri/Domestic								
	DKI Jakarta	Jawa Barat/ West Java	Jawa Tengah/ Central Java	Jawa Timur/ East Java	Sumatera	Kalimantan	Indonesia Timur/ East Indonesia	Luar Negeri/ Overseas	Total
Giro pada Bank Indonesia	2,318	--	--	--	--	--	--	--	2,318
Giro pada bank	626,993	508	--	--	--	--	--	--	674,106
Penempatan pada bank	12,404,768	3,563,390	--	--	399,996	--	--	270,792	16,638,946
Efek-efek	560,050	--	--	--	--	--	--	--	560,050
Tagihan derivatif	6.0	--	--	--	--	--	--	--	6
Pembayaran dan piutang									
Modal kerja	11,065,064	3,362,640	4,458,804	8,679,027	2,444,139	1,439,169	815,165	398,950	32,662,958
Investasi	15,498,535	2,490,825	1,158,057	2,308,917	3,969,991	5,613,456	1,699,974	484,449	33,224,204
Konsumsi	125,582	2,235	--	--	--	--	--	--	127,817
Piutang pembiayaan garansi	257,875	--	--	--	--	--	--	--	257,875
Piutang asuransi dan penjaminan	285,656	--	--	--	--	--	--	--	285,656
Tagihan akseptasi	387,901	37,366	--	33,363	--	--	--	--	458,630
Aset lain-lain neto *)	55,191	--	--	--	--	--	--	--	55,191
<b>Neto</b>	<b>41,269,939</b>	<b>9,456,964</b>	<b>5,616,861</b>	<b>11,021,307</b>	<b>6,814,126</b>	<b>7,052,625</b>	<b>2,515,139</b>	<b>1,200,796</b>	<b>84,947,757</b>

	31 Desember/ December 31, 2020								
	Dalam Negeri/Domestic								
	DKI Jakarta	Jawa Barat/ West Java	Jawa Tengah/ Central Java	Jawa Timur/ East Java	Sumatera	Kalimantan	Indonesia Timur/ East Indonesia	Luar Negeri/ Overseas	Total
Giro pada Bank Indonesia	17,913	--	--	--	--	--	--	--	17,913
Giro pada bank	5,180,544	504	--	--	--	--	--	339,795	5,520,843
Penempatan pada bank	5,961,663	1,561,401	--	64,478	--	--	--	393,126	7,980,668
Efek-efek	572,273	--	--	--	--	--	--	--	572,273
Pembayaran dan piutang									
Modal kerja	11,255,101	4,116,759	4,300,547	11,222,766	1,585,984	1,188,114	966,570	202,615	34,838,456
Investasi	20,322,223	2,558,220	1,461,494	2,704,622	4,311,951	4,791,423	1,172,354	472,628	37,794,915
Konsumsi	98,200	4,338	--	--	--	--	--	--	102,538
Piutang pembiayaan garansi	295,812	--	--	--	--	--	--	--	295,812
Piutang asuransi dan penjaminan	34,631	--	--	--	--	--	--	--	34,631
Tagihan akseptasi	470,802	57,189	--	30,426	--	--	--	--	558,417
Aset lain-lain neto *)	33,056	--	--	--	--	--	--	--	33,056
<b>Neto</b>	<b>44,242,218</b>	<b>8,298,411</b>	<b>5,762,041</b>	<b>14,022,292</b>	<b>5,897,935</b>	<b>5,979,537</b>	<b>2,138,924</b>	<b>1,408,164</b>	<b>87,749,522</b>

\*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.

\*) Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**31. Risiko Kredit (lanjutan)**

- a) Sektor geografis, neto cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Eksposur risiko kredit atas rekening administratif *gross* adalah sebagai berikut:

**31. Credit Risk (continued)**

- a) *Geographical sectors, net of allowance for impairment losses (continued)*

*Credit risk exposure related to gross administrative accounts items are as follows:*

31 Desember/ December 31, 2021								
Dalam Negeri/Domestic								
DKI Jakarta	Jawa Barat/ West Java	Jawa Tengah/ Central Java	Jawa Timur/ East Java	Sumatera	Kalimantan	Indonesia Timur/ East Indonesia	Luar Negeri/ Overseas	Total
Bank garansi	4,819,334	2,226,763	2,287	2,368	874,290	46,087	33,854	289,848
Penjaminan Kredit PEN	2,588,694	505,565	155,000	985,593	19,010	300,000	287,534	--
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	56,446	35,424	5,033	164,682	--	117,511	--	379,096
<b>Total</b>	<b>7,464,474</b>	<b>2,767,752</b>	<b>162,320</b>	<b>1,152,643</b>	<b>893,300</b>	<b>463,598</b>	<b>321,388</b>	<b>289,848</b>
								<b>13,515,323</b>
Estimasi klaim Penjaminan								(392,559)
<b>Total</b>								<b>13,122,764</b>

31 Desember/ December 31, 2020								
Dalam Negeri/Domestic								
DKI Jakarta	Jawa Barat/ West Java	Jawa Tengah/ Central Java	Jawa Timur/ East Java	Sumatera	Kalimantan	Indonesia Timur/ East Indonesia	Luar Negeri/ Overseas	Total
Bank garansi	5,091,059	2,299,682	9,858	62,122	977,999	68,491	25,382	9,042,317
Penjaminan Kredit PEN	17,500	105,000	345,000	99,175	--	300,000	--	866,675
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	55,521	73,326	--	22,368	--	13,200	--	164,415
<b>Total</b>	<b>5,164,080</b>	<b>2,478,008</b>	<b>354,858</b>	<b>183,665</b>	<b>977,999</b>	<b>381,691</b>	<b>25,382</b>	<b>10,073,407</b>
Estimasi klaim Penjaminan								(41,129)
<b>Total</b>								<b>10,032,278</b>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**31. Risiko Kredit (lanjutan)**

b) Jenis *counterparties*

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur risiko kredit LPEI pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung pembiayaan dan piutang lainnya), yang dikategorikan berdasarkan jenis *counterparties* pada tanggal-tanggal 30 Desember 2021 dan 31 Desember 2020:

**31. Credit Risk (continued)**

b) Type of counterparties

The following tables provide the details of LPEI's credit risk exposure at carrying amounts (without taking into account any collateral held or financing and receivables support), as categorized based on type of counterparties as of December 31, 2021 and December 31, 2020:

31 Desember/ December 31, 2021					
Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies	Perseorangan/ Individuals	Total
Giro pada Bank Indonesia	2,318	--	--	--	2,318
Giro pada bank	--	674,106	--	--	674,106
Penempatan pada bank	--	16,638,946	--	--	16,638,946
Efek-efek	560,050	--	--	--	560,050
Tagihan derivatif	--	6	--	--	6
Pembiayaan dan piutang					
Modal kerja	5,542,114	4,302	291,338	26,802,954	32,662,958
Investasi	8,695,902	--	79,631	24,448,671	33,224,204
Konsumsi	--	--	--	127,817	127,817
Piutang pembiayaan garansi	--	--	--	257,875	257,875
Piutang asuransi dan penjaminan	--	--	285,656	--	285,656
Tagihan akseptasi	--	--	458,630	--	458,630
Aset lain-lain *)	--	--	27,037	--	27,037
<b>Neto</b>	<b>14,800,384</b>	<b>17,317,360</b>	<b>370,969</b>	<b>52,280,823</b>	<b>84,919,603</b>

31 Desember/ December 31, 2020					
Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies	Perseorangan/ Individuals	Total
Giro pada Bank Indonesia	17,913	--	--	--	17,913
Giro pada bank	--	5,520,843	--	--	5,520,843
Penempatan pada bank	--	7,980,668	--	--	7,980,668
Efek-efek	572,273	--	--	--	572,273
Pembiayaan dan piutang					
Modal kerja	3,888,271	46,568	347,645	30,547,596	34,838,456
Investasi	10,142,406	--	--	27,652,509	37,794,915
Konsumsi	--	--	--	102,538	102,538
Piutang pembiayaan garansi	--	--	--	295,812	295,812
Piutang asuransi dan penjaminan	--	--	34,631	--	34,631
Tagihan akseptasi	--	--	558,417	--	558,417
Aset lain-lain *)	--	--	33,056	--	33,056
<b>Neto</b>	<b>14,620,863</b>	<b>13,548,079</b>	<b>347,645</b>	<b>59,122,021</b>	<b>87,749,522</b>

\*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.

\*) Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**31. Risiko Kredit (lanjutan)**

b) Jenis *counterparties* (lanjutan)

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur risiko kredit LPEI yang dikategorikan berdasarkan jenis *counterparties* terhadap rekening administratif:

31 Desember/ December 31, 2021						
Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies	Perseorangan/ Individuals	Total	
Bank garansi	--	--	--	8,294,831	--	8,294,831
Penjaminan Kredit PEN	--	--	--	4,841,396	--	4,841,396
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	--	--	--	379,096	--	379,096
<b>Total</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>13,515,323</b>	<b>--</b>	<b>13,515,323</b>
Estimasi klaim penjaminan						
<b>Neto</b>					<b>(392,559)</b>	<b>13,122,764</b>
31 Desember/ December 31, 2020						
Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies	Perseorangan/ Individuals	Total	
Bank garansi	--	--	--	9,042,317	--	9,042,317
Penjaminan Kredit PEN	--	--	--	866,675	--	866,675
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	--	--	--	164,415	--	164,415
<b>Total</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>10,073,407</b>	<b>--</b>	<b>10,073,407</b>
Estimasi klaim penjaminan						
<b>Neto</b>					<b>(41,129)</b>	<b>10,032,278</b>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**31. Risiko Kredit (lanjutan)**

c) Sektor industri

Tabel di bawah menggambarkan rincian eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri

**31. Credit Risk (continued)**

c) Industrial sectors

The following tables provide details of LPEI's credit exposures at their carrying amounts as categorized by industrial sectors.

31 Desember December 31, 2021												
	Industri minyak kelapa sawit mentah/ Crude palm oil industry	Industri tanaman perkebunan-kelapa sawit/ Palm oil - plantation industry	Pengangkutan umum-laut/ General transport sea	Industri crumb rubber/ Crumb rubber industry	Pengangkutan umum udara/ General transport air	Industri perabot/ Furniture industry	Industri logam dasar/ Basic metal industry	Pertambangan batubara/ Coal mining	Lainnya/ Others	Total		
Giro pada Bank Indonesia	--	--	--	--	--	--	--	--	2,318	2,318	Current account with Bank Indonesia	
Giro pada Bank	--	--	--	--	--	--	--	--	674,106	674,106	Current accounts with banks	
Penempatan pada Bank	--	--	--	--	--	--	--	--	16,638,946	16,638,946	Placements with banks	
Efek-efek	--	--	--	--	--	--	--	--	560,050	560,050	Securities	
Tagihan derivatif	--	--	--	--	--	--	--	--	6	6	Derivatives receivable	
Pembayaran dan piutang pembayaran											Financing and receivables	
Modal kerja	4,226,467	2,573,230	1,357,729	95,192	340,655	624,683	582,579	1,519,666	1,661,823	19,680,934	Working capital	
Investasi	807,945	2,192,854	9,144,827	1,618,260	65,825	1,272,893	39,806	1,664,759	539,151	15,877,884	Investment	
Konsumsi	--	--	--	--	--	--	--	--	127,817	127,817	Consumption	
Piutang pembayaran garansi	--	--	--	--	--	--	--	--	257,875	257,875	Guarantee financing receivables	
Piutang asuransi dan penjaminan	--	--	--	--	--	--	--	--	285,656	285,656	Insurance and guarantee receivables	
Tagihan akseptasi	--	--	--	--	--	--	--	--	431,990	431,990	Acceptances receivable	
Aset lain-lain - neto *)									27,037	27,037	Other assets - net *)	
<b>Neto</b>	<b>5.034.412</b>	<b>4.766.094</b>	<b>10.502.556</b>	<b>1.713.452</b>	<b>406.480</b>	<b>1.897.576</b>	<b>622.385</b>	<b>3.211.465</b>	<b>2.200.974</b>	<b>54.564.219</b>	<b>84.919.603</b>	<b>Net</b>

31 Desember/ December 31, 2020												
	Industri minyak kelapa sawit mentah/ Crude palm oil industry	Industri tanaman perkebunan-kelapa sawit/ Palm oil - plantation industry	Pengangkutan umum-laut/ General transport sea	Industri crumb rubber/ Crumb rubber industry	Pengangkutan umum udara/ General transport air	Industri perabot/ Furniture industry	Industri logam dasar/ Basic metal industry	Pertambangan batubara/ Coal mining	Lainnya/ Others	Total		
Giro pada Bank Indonesia	--	--	--	--	--	--	--	--	17,913	17,913	Current account with Bank Indonesia	
Giro pada Bank	--	--	--	--	--	--	--	--	5,520,843	5,520,843	Current accounts with banks	
Penempatan pada Bank	--	--	--	--	--	--	--	--	7,980,668	7,980,668	Placements with banks	
Efek-efek	--	--	--	--	--	--	--	--	572,273	572,273	Securities	
Tagihan derivatif	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Derivatives receivable	
Pembayaran dan piutang pembayaran											Financing and receivables	
Modal kerja	3,890,534	1,966,817	1,477,562	138,253	359,673	946,305	1,580,070	1,790,219	2,140,968	20,548,055	34,838,456	
Investasi	474,400	2,637,815	11,308,776	1,722,338	80,833	1,271,327	15,237	1,556,937	514,614	18,212,638	37,794,915	
Konsumsi	--	--	--	--	--	--	--	--	102,538	102,538	Consumption	
Piutang pembayaran garansi	--	--	--	--	--	--	--	--	295,812	295,812	Guarantee financing receivables	
Piutang asuransi dan penjaminan	--	--	--	--	--	--	--	--	34,631	34,631	Insurance and guarantee receivables	
Tagihan akseptasi	13,726	--	--	--	57,189	--	--	--	487,502	558,417	Acceptances receivable	
Aset lain-lain - neto *)	--	--	--	--	--	--	--	--	33,056	33,056	Other assets - net *)	
<b>Neto</b>	<b>4,378,660</b>	<b>4,604,632</b>	<b>12,786,338</b>	<b>1,860,591</b>	<b>497,695</b>	<b>2,217,632</b>	<b>1,595,307</b>	<b>3,347,156</b>	<b>2,655,582</b>	<b>53,805,929</b>	<b>87,749,523</b>	<b>Net</b>

\*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.

\*) Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

### 31. Risiko Kredit (lanjutan)

c) Sektor industri (lanjutan)

Tabel di bawah menggambarkan rincian eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri terhadap rekening administratif.

31 Desember December 31, 2021											
	Industri minyak kelapa sawit/ mentah/ Crude palm oil industry	Industri tanaman perkebunan-kelapa sawit/ Palm oil - plantation industry	Pengangkutan umum laut/ General transport sea	Industri crumb rubber/ Crumb rubber industry	Pengangkutan umum udara/ General transport air	Industri perabot/ Furniture industry	Industri logam dasar/ Basic metal industry	Pertambangan batubara/ Coal mining	Lainnya/ Others	Total	
Bank garansi	--	--	--	1,522,462	--	5,346	--	1,576,325	161,280	5,029,418	8,294,831
Penjaminan Kredit PEN	49,884	--	19,911	--	--	1,000,000	71,263	120,000	300,000	3,280,338	4,841,396
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	--	--	5,033	--	--	--	--	--	117,511	256,552	379,096
<b>Total</b>	<b>49,884</b>	<b>--</b>	<b>24,944</b>	<b>1,522,462</b>	<b>--</b>	<b>1,005,346</b>	<b>71,263</b>	<b>1,696,325</b>	<b>578,791</b>	<b>8,566,308</b>	<b>13,515,323</b>
Estimasi klaim penjaminan Neto									(392,559)		
										<b>13,122,764</b>	

### **31. Credit Risk (continued)**

c) *Industrial sectors (continued)*

The following tables provide details of LPEI's credit exposures at their carrying amounts as categorized by industrial sectors to administrative accounts items.

31 Desember/ December 31, 2020												
	Industri minyak kelapa sawit	Industri tanaman perkebunan-kelapa sawit/ mentah/ Crude palm oil - plantation industry	Pengangkutan umum laut/ General transport sea	Industri crumb rubber/ Crumb rubber industry	Pengangkutan umum udara/ General transport air	Industri perabot/ Furniture Industry	Industri logam dasar/ Basic metal industry	Pertambangan batubara/ Coal mining	Lainnya/ Others	Total		
Industri tekstil/ Textile industry	--	260	--	--	1,511,287	--	6,826	--	1,602,430	132,176	5,014,866	8,267,865
Bank garansi	--	--	79,750	--	--	--	--	--	300,000	1,346,865		1,726,615
Penjaminan Kredit PEN												
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	--	--	--	--	--	--	4,066	18366.0	12,829	194,583	229,844	
<b>Total</b>	<b>79,750</b>	<b>260</b>			<b>1,511,287</b>		<b>6,826</b>	<b>4,066</b>	<b>1,620,796</b>	<b>445,005</b>	<b>6,556,334</b>	<b>10,224,324</b>
Estimasi klaim penjaminan Neto										(81,638)		
										10,142,686		

d) Sektor ekonomi

Tabel berikut ini menyajikan rincian eksposur risiko kredit berdasarkan sektor ekonomi

d) *Economic sectors*

*The following tables provide details of LPEI's credit risk exposures by economic sectors.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**31. Risiko Kredit (lanjutan)**

d) Sektor ekonomi (lanjutan)

31 Desember/ December 31, 2020										
Perindustrian/ Industry	Pertanian/ Agriculture	Jasa dunia Usaha/ Business services	Pengang- kutan/ Transportation	Pertam- bangunan/ Mining	Perdagangan, restoran dan hotel/ Trading, restaurant and hotels	Konstruksi/ Construction	Lainnya/ Others	Total		
Giro pada Bank Indonesia	--	--	--	--	--	--	17,913	17,913	Current account with Bank Indonesia	
Giro pada Bank	--	--	--	--	--	--	5,520,843	5,520,843	Current accounts with banks	
Penempatan pada Bank	--	--	--	--	--	--	7,980,668	7,980,668	Placements with Banks	
Efek-efek	--	--	--	--	--	--	572,273	572,273	Securities	
Pembayaran dan piutang Pembayaran									Financing and receivables	
Modal kerja	20,428,643	2,866,631	2,026,305	1,185,320	4,058,855	2,316,962	1,779,224	34,838,456	Working Capital	
Investasi	11,525,901	12,961,015	1,460,406	3,739,042	4,857,513	345,019	2,689,462	37,794,915	Investment	
Konsumsi	--	--	--	--	--	--	102,538	102,538	Consumption	
Piutang pembayaran garansi	295,812	--	--	--	--	--	--	295,812	Guarantee financing	
Piutang asuransi dan penjaminan	--	--	--	--	--	--	34,631	34,631	Receivables	
Tagihan akseptasi	347,536	21,619	--	--	--	107,297	81,965	558,417	Insurance and guarantee receivables	
Aset lain-lain neto *)	--	--	--	--	--	--	33,056	33,056	Acceptances receivable	
Neto	<b>32,597,892</b>	<b>15,849,265</b>	<b>3,486,711</b>	<b>4,924,362</b>	<b>8,916,368</b>	<b>2,769,278</b>	<b>4,550,651</b>	<b>14,654,995</b>	<b>87,749,522</b>	Other assets - net *)
									Net	

\*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.

Tabel berikut ini menyajikan rincian eksposur risiko kredit terhadap rekening administratif berdasarkan sektor ekonomi terhadap rekening administratif.

\*) Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.

The following tables provide details of LPEI's credit risk exposures relating to administrative accounts items by economic sectors to administrative accounts.

31 Desember/ December 31, 2021										
Perindustrian/ Industry	Pertanian/ Agriculture	Jasa dunia Usaha/ Business services	Pengang- kutan/ Transportation	Pertam- bangunan/ Mining	Perdagangan, restoran dan hotel/ Trading, restaurant and hotels	Konstruksi/ Construction	Lainnya/ Others	Total		
Bank garansi	1,006,503	--	2,298,897	1,814,854	795,552	416,544	441,441	1,521,040	8,294,831	Bank guarantee
Penjaminan Kredit PEN	1,459,307	127,549	196,500	1,100,000	399,768	563,600	--	994,672	4,841,396	Credit Guarantee - PEN
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	230,149	11,787	--	--	117,511	11,997	7,652	--	379,096	Outstanding irrevocable L/C Total
<b>Total</b>	<b>2,695,959</b>	<b>139,336</b>	<b>2,495,397</b>	<b>2,914,854</b>	<b>1,312,831</b>	<b>992,141</b>	<b>449,093</b>	<b>2,515,712</b>	<b>13,515,323</b>	
Estimasi klaim Penjaminan Total								(392,559)	<b>13,122,764</b>	Estimated Guarantee claim Total

31 Desember/ December 31, 2020										
Perindustrian/ Industry	Pertanian/ Agriculture	Jasa dunia Usaha/ Business services	Pengang- kutan/ Transportation	Pertam- bangunan/ Mining	Perdagangan, restoran dan hotel/ Trading, restaurant and hotels	Konstruksi/ Construction	Lainnya/ Others	Total		
Bank garansi	993,806	927	1,940,340	1,789,460	1,040,264	645,935	776,072	1,855,513	9,042,317	Bank guarantee
Penjaminan Kredit PEN	299,175	--	47,500	--	300,000	--	--	220,000	866,675	Credit Guarantee - PEN
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	124,782	9,698	--	--	15,724	11,826	2,387	--	164,415	Outstanding irrevocable L/C Total
<b>Total</b>	<b>1,417,763</b>	<b>10,623</b>	<b>1,987,840</b>	<b>1,789,460</b>	<b>1,355,988</b>	<b>657,761</b>	<b>778,459</b>	<b>2,075,513</b>	<b>10,073,407</b>	
Estimasi klaim Penjaminan Total								(41,129)	<b>10,032,278</b>	Estimated Guarantee claim Total

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**31. Risiko Kredit (lanjutan)**

e) Kualitas kredit dari aset keuangan

Informasi kualitas kredit dari aset keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

31 Desember December 31, 2021							
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired				Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Past-due but not Impaired			
Tingkat tinggi/ High grade	Tingkat standar/ Standard grade	Tingkat sub standar/ Sub-standard grade	Tidak diperingkat/ Unrated	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Total		
Giro pada							
Bank Indonesia	--	2,318	--	--	--	2,318	Current account with Bank Indonesia
Giro pada bank	633,346	40,760	--	--	--	674,106	Current accounts with banks
Penempatan pada bank	15,683,825	955,121	--	--	--	16,638,946	Placements with banks
Efek-efek	--	560,050	--	--	--	560,050	Securities
Tagihan derivatif	--	6	--	--	--	6	Derivatives receivable
Pembiayaan dan piutang							Financing and receivables
Pembiayaan							Financing
Modal kerja	452,425	11,308,955	838,382	4,276,968	482,517	15,303,711	Working capital
Investasi	548,894	12,344,866	2,374,128	10,041,475	369,876	7,544,965	Investment
Konsumsi	--	--	--	127,817	--	--	Consumption
Piutang penjaminan garansi	--	--	--	257,875	--	--	Financing guarantee
Piutang asuransi dan penjaminan	--	--	--	285,656	--	--	receivables
Tagihan akseptasi	--	458,630	--	--	--	--	Insurance and guarantee receivables
Aset lain-lain - neto *)	--	--	--	55,191	--	--	Acceptances receivable
Neto	17,318,490	25,670,706	3,212,510	15,044,982	852,393	22,848,676	Other assets - net *)
							Net

31 Desember/ December 31, 2020							
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired				Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Past-due but not Impaired			
Tingkat tinggi/ High grade	Tingkat standar/ Standard grade	Tingkat sub standar/ Sub-standard grade	Tidak diperingkat/ Unrated	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Total		
Giro pada							
Bank Indonesia	--	17,913	--	--	--	17,913	Current account with Bank Indonesia
Giro pada bank	5,180,121	340,722	--	--	--	5,520,843	Current accounts with banks
Penempatan pada bank	5,716,679	2,263,989	--	--	--	7,980,668	Placements with banks
Efek-efek	--	572,273	--	--	--	572,273	Securities
Pembiayaan dan piutang							Financing and receivables
Pembiayaan							Financing
Modal kerja	69,869	10,877,587	256,080	8,065,497	678,417	14,891,006	Working capital
Investasi	41,880	7,717,305	1,391,272	19,204,450	2,076,310	7,363,698	Investment
Konsumsi	--	--	--	102,538	--	--	Consumption
Piutang penjaminan garansi	--	--	--	295,812	--	--	Financing guarantee
Piutang asuransi dan penjaminan	--	--	--	34,631	--	--	receivables
Tagihan akseptasi	--	449,347	--	109,070	--	--	Insurance and guarantee receivables
Aset lain-lain - neto *)	--	--	--	33,056	--	--	Acceptances receivable
Neto	11,008,549	22,239,136	1,647,352	27,845,054	2,754,727	22,254,704	Other assets - net *)
							Net

\*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.

\*) Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**31. Risiko Kredit (lanjutan)**

e) Kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

Kualitas kredit aset keuangan LPEI dinilai dan dikelola berdasarkan peringkat eksternal dan internal.

Kualitas kredit dimonitor dengan menggunakan sistem peringkat IEB Credit Rating System. Sistem peringkat dinilai dan diperbarui secara berkala dan peringkat risiko debitur individual divalidasi untuk menjaga akurasi dan konsistensi peringkat risiko. Kualitas kredit berdasarkan sistem peringkat IEB Credit Rating System dinilai sebagai berikut:

- Tingkat tinggi

Luar biasa

Debitur diberi peringkat luar biasa (nilai 'AAA') jika memiliki *debt service capacity* yang sangat kuat. Debitur 'AAA' dinilai dapat memiliki sebuah kualitas *outlook* kualitas kredit yang tinggi dalam segala kondisi ekonomi. 'AAA' adalah peringkat tertinggi yang diberikan kepada debitur berdasarkan IEB Credit Rating System.

- Tingkat standar

Kuat

Debitur yang diberi peringkat kuat (nilai 'AA') adalah debitur yang dianggap memiliki *debt service capacity* yang sangat kuat dan probabilitas yang rendah pinjamannya akan gagal bayar. Terdapat perbedaan yang kecil antara debitur dengan peringkat 'AA' dan debitur dengan nilai tertinggi.

Baik

Debitur yang diberi peringkat baik (nilai 'A') adalah debitur yang dianggap memiliki *debt service capacity* yang kuat. Walaupun probabilitas gagal bayar rendah, debitur dengan peringkat 'A' dinilai lebih rentan terhadap efek yang merugikan perubahan kondisi ekonomi.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**31. Credit Risk (continued)**

e) Credit quality of financial assets (continued)

*The credit quality of LPEI's financial assets is assessed and managed using external and internal ratings.*

*The credit quality is monitored using IEB Credit Rating System. The rating system is assessed and updated regularly and individual borrower risk rating is validated to maintain accuracy and consistency of risk rating. The credit quality and the corresponding IEB Credit Rating System grade are as follows:*

- *High grade*

*Outstanding*

*A borrower given an outstanding outlook (rated 'AAA') if it has an extremely strong debt service capacity. 'AAA' rated borrowers are viewed to possess a high credit quality outlook under all economic conditions. 'AAA' is the highest rating provided to a borrower under the IEB Credit Rating System.*

- *Standard grade*

*Strong*

*A borrower given a strong outlook (rated 'AA') is deemed to have a very strong debt service capacity and a low probability of going into default. An 'AA' rated borrower differs from the highest rated borrowers in a small degree.*

*Good*

*A borrower given a good outlook (rated 'A') is deemed to have a strong debt service capacity. While the probability of default is low, 'A' rated borrowers are more susceptible to the adverse effects of changes in economic conditions.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**31. Risiko Kredit (lanjutan)**

- e) Kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

Rata-rata

Debitur yang diberi peringkat rata-rata (nilai 'BBB') adalah debitur yang dianggap memiliki *debt service capacity* yang memadai. Namun, kondisi ekonomi yang buruk atau perubahan keadaan yang akan cenderung membuat *debt service capacity* melemah.

- Tingkat sub standar

Dapat diterima

Debitur diberi peringkat rata-rata (nilai 'BB') adalah debitur yang dalam jangka pendek dianggap lebih tidak rentan daripada debitur pada peringkat yang lebih rendah lain. Namun, debitur ini menghadapi ketidakpastian yang besar dan terpapar kondisi bisnis yang rugi, kondisi keuangan atau kondisi ekonomi yang dapat menyebabkan debitur tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya.

Risiko tinggi

Debitur diberi peringkat berisiko tinggi (nilai 'BB-' sampai 'B+') adalah debitur yang dianggap kurang rentan daripada debitur dengan peringkat yang lebih rendah lain. Namun, kondisi bisnis yang merugikan, kondisi keuangan, atau kondisi ekonomi kemungkinan akan menurunkan kemampuan debitur atau menurunkan kesediaan debitur untuk memenuhi komitmen keuangannya.

Dalam perhatian

Eksposur kredit bagi debitur diberi peringkat dalam perhatian (nilai 'B') adalah debitur yang untuk sementara waktu dianggap tidak berisiko tetapi kinerja debitur telah melemah dan kecuali tren berubah, dapat menyebabkan kerugian.

**31. Credit Risk (continued)**

- e) Credit quality of financial assets (continued)

Average

*A borrower given an average outlook (rated 'BBB') is deemed to have an adequate debt service capacity. However, adverse economic conditions or changing circumstances are more likely to lead to a weakened debt service capacity.*

- Sub-standard grade

Acceptable

*A borrower given an acceptable outlook (rated 'BB') is deemed to be less vulnerable in the near term than other lower rated borrowers. However, it faces major ongoing uncertainties and exposure to adverse business, financial, or economic conditions which could lead to the borrower being unable to meet its financial obligations.*

High risk

*A borrower given a high risk outlook (rated 'BB-' to 'B+') is deemed to be less vulnerable than lower rated borrowers. However, adverse business, financial or economic conditions will likely impair the borrowers capacity or willingness to meet its financial commitments.*

Watch list

*Credit exposures for a borrower given a watch list outlook (rated 'B') is deemed to be not at risk for the moment but the borrower's performance has already weakened and unless present trends are reversed, could lead to losses.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**31. Risiko Kredit (lanjutan)**

- e) Kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)
- Tidak diperingkat

Aset keuangan yang tidak diperingkat adalah aset yang tidak dinilai dengan Sistem Penilaian IEB atau *provider* peringkat kredit eksternal.

Transaksi tresuri

Untuk memastikan kualitas portofolio investasi LPEI, LPEI menggunakan peringkat kredit eksternal dari *provider* Moody's.

f) Efek-efek

Cadangan kerugian penurunan nilai terkait dengan akun ini disebabkan karena investasi divisi Syariah LPEI yang tidak dihitung dan dilaporkan menurut PSAK 55 (Revisi 2014).

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, seluruh efek-efek tidak mengalami penurunan nilai dan tergolong lancar sehingga tidak terdapat pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai terkait akun tersebut.

g) Pembiayaan dan piutang dan piutang pembiayaan garansi

Aset keuangan yang signifikan dianalisa berdasarkan bukti obyektif secara individual per debitur. Selanjutnya nasabah signifikan yang memiliki bukti obyektif penurunan nilai, perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai dilakukan secara individual berdasarkan arus kas masing-masing debitur, sedangkan debitur yang tidak terdapat bukti obyektif penurunan nilai, perhitungan penyisihan kerugian penurunan nilai dilakukan secara kolektif.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**31. Credit Risk (continued)**

- e) Credit quality of financial assets (continued)

- Unrated

*Unrated financial assets are those who have not been assessed under the IEB Rating System or by external rating agencies.*

*Treasury transaction*

*To ensure the quality of LPEI's investment portfolio, LPEI uses the credit risk rating of external provider Moody's.*

f) Securities

*The allowance for impairment losses related to this account pertains to the investment of LPEI's Sharia division that is not measured and reported under PSAK 55 (Revised 2014).*

*As of December 31, 201 and December 31, 2020, all securities are not impaired and are classified as current and there is no allowance for impairment losses related to this account.*

g) Financing and receivables and guarantee financing receivables

*Individually significant financial asset is analyzed if objective evidence of impairment exist. For significant debtors with objective evidence of impairment, the allowance for impairment losses is calculated individually based on the cash flow while for debtors with no objective evidence of impairment, the allowance for impairment losses is calculated collectively.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**31. Risiko Kredit (lanjutan)**

- g) Pembiayaan dan piutang dan piutang pembiayaan garansi (lanjutan)

Ikhtisar pembiayaan dan piutang yang diberikan dan piutang pembiayaan garansi adalah sebagai berikut:

**31. Credit Risk (continued)**

- g) *Financing and receivables and guarantee financing receivables (continued)*

*Financing and receivables and guarantee financing receivables are summarized are as follows:*

31 Desember December 31, 2021				
	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Not impaired</i>	Individual	Kolektif/ <i>Collective</i>	Total
<b>Rupiah</b>				<b>Rupiah</b>
Perindustrian	5,224,185	8,544,927	286,366	14,055,478
Pertanian	8,397,587	1,776,717	270,859	10,445,163
Jasa dunia usaha	2,486,736	28,406	--	2,515,142
Perdagangan, restoran dan hotel	543,293	683,185	--	1,226,478
Pengangkutan	3,137,134	600,235	--	3,737,369
Konstruksi	2,300,337	54,126	--	2,354,463
Pertambangan	3,485,368	1,021,572	39,822	4,546,762
Lain-lain	351,230	123,282	--	474,512
<b>Total Rupiah</b>	<b>25,925,870</b>	<b>12,832,450</b>	<b>597,047</b>	<b>39,355,367</b>
<b>Mata uang asing</b>				<b>Foreign currencies</b>
Perindustrian	8,438,839	6,228,967	--	Manufacturing
Pertanian	3,158,580	202,137	--	Agriculture
Jasa dunia usaha	829,474	211,629	--	Business services
Perdagangan, restoran dan hotel	693,697	216,714	--	Trading, restaurants and hotels
Pengangkutan	173,694	508,992	--	Transportation
Konstruksi	1,202,492	30,378	--	Construction
Pertambangan	2,299,421	1,989,029	31,333	Mining
Lain-lain	444,236.0	--	--	Others
<b>Total mata uang asing</b>	<b>17,240,433</b>	<b>9,387,846</b>	<b>31,333</b>	<b>26,659,612</b>
<b>Total</b>	<b>43,166,303</b>	<b>22,220,296</b>	<b>628,380</b>	<b>66,014,979</b>
31 Desember/ December 31, 2020				
	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Not impaired</i>	Individual	Kolektif/ <i>Collective</i>	Total
<b>Rupiah</b>				<b>Rupiah</b>
Perindustrian	8,969,740	7,167,496	157,929	16,295,165
Pertanian	9,400,025	1,699,097	1,175,330	12,274,452
Jasa dunia usaha	2,355,243	58,398	--	2,413,641
Perdagangan, restoran dan hotel	660,748	877,883	--	1,538,631
Pengangkutan	3,501,461	506,551	--	4,008,012
Konstruksi	3,134,578	56,003	--	3,190,581
Pertambangan	3,039,468	995,130	114,463	4,149,061
Lain-lain	265,679	--	--	265,679
<b>Total Rupiah</b>	<b>31,326,942</b>	<b>11,360,558</b>	<b>1,447,722</b>	<b>44,135,222</b>
<b>Mata uang asing</b>				<b>Foreign currencies</b>
Perindustrian	8,989,177	6,647,330	22,873	Manufacturing
Pertanian	3,383,719	169,474	--	Agriculture
Jasa dunia usaha	919,851	153,220	--	Business services
Perdagangan, restoran dan hotel	835,048	288,303	--	Trading, restaurants and hotels
Pengangkutan	624,717	291,632	--	Transportation
Konstruksi	1,248,001	30,104	--	Construction
Pertambangan	2,923,818	1,843,488	--	Mining
Lain-lain	525,744	--	--	Others
<b>Total mata uang asing</b>	<b>19,450,075</b>	<b>9,423,551</b>	<b>22,873</b>	<b>28,896,499</b>
<b>Total</b>	<b>50,777,017</b>	<b>20,784,109</b>	<b>1,470,595</b>	<b>73,031,721</b>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**31. Risiko Kredit (lanjutan)**

- h) Analisis umur pinjaman yang jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020:

**31. Credit Risk (continued)**

- h) *The aging analysis of past due but not impaired loans as of December 31, 2021 and December 31, 2020:*

<b>31 Desember/ December 31, 2021</b>			
	<b>Kurang dari 30 hari/ Less than 30 days</b>	<b>31 sampai 90 hari/ 31 to 90 days</b>	<b>Total</b>
Modal kerja	99,318	383,199	482,517
Investasi	369,876	--	369,876
<b>Neto</b>	<b>469,194</b>	<b>383,199</b>	<b>852,393</b>

<b>31 Desember/ December 31, 2020</b>			
	<b>Kurang dari 30 hari/ Less than 30 days</b>	<b>31 sampai 90 hari/ 31 to 90 days</b>	<b>Total</b>
Modal kerja	504,039	174,378	678,417
Investasi	1,143,425	932,885	2,076,310
<b>Neto</b>	<b>1,647,464</b>	<b>1,107,263</b>	<b>2,754,727</b>

i) Komitmen dan Kontinjensi

*i) Commitments and contingencies*

<b>31 Desember / December 31,</b>		<b>Rupiah</b>	
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Rupiah</b>
<b>Rupiah</b>			
Bank garansi	1,471,087	1,935,103	Bank guarantee
Penjaminan Kredit PEN	3,895,315	817,500	Credit Guarantee - PEN
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	176,417	85,173	Outstanding irrevocable L/C
	<b>5,542,819</b>	<b>2,837,776</b>	
<b>Mata uang asing</b>			<b>Foreign currencies</b>
Bank garansi	6,823,743	7,107,214	Bank guarantee
Penjaminan Kredit PEN	946,081	49,175	Credit Guarantee - PEN
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	202,679	79,242	Outstanding irrevocable L/C
	<b>7,972,503</b>	<b>7,235,631</b>	
<b>Total</b>	<b>13,515,322</b>	<b>10,073,407</b>	<b>Total</b>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**32. Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa LPEI tidak akan mampu memenuhi liabilitas pembayaran pada saat jatuh tempo dalam keadaan normal ataupun tertekan (*distress*). LPEI mengelola risiko likuiditas agar dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, serta dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal.

Untuk membatasi risiko ini, manajemen telah mengatur diversifikasi sumber dana selain dasar modal intinya, mengelola aset yang terkait likuiditas dan memonitor arus kas dan likuiditas masa depan setiap hari. Hal ini menggabungkan penilaian atas arus kas yang masa depan dan ketersediaan jaminan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk mengamankan dana tambahan jika diperlukan.

LPEI telah merencanakan langkah-langkah untuk mengatasi perbedaan jatuh tempo antara aset dan liabilitas, diantaranya:

- Menjaga stabilitas dan kontinuitas sumber dan dengan melakukan pengelolaan Aset-Liabilitas secara hati-hati dan terencana.
- Menjaga ketersediaan fasilitas pinjaman *moneymarket line* dari berbagai bank, baik di dalam maupun di luar negeri.

**Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual berdasarkan Undiscounted Cash flows**

Potensi risiko likuiditas yang akan dihadapi LPEI di masa mendatang diukur melalui *Liquidity Gap Analysis*, yang merupakan proyeksi kelebihan atau kekurangan likuiditas atas dasar jatuh tempo aset dan liabilitas, setelah memperhitungkan kebutuhan untuk ekspansi bisnis. Informasi ini menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan pengelolaan likuiditas, termasuk juga kebutuhan ekspansi bisnis. Dengan diterapkannya pengelolaan likuiditas yang efektif, diharapkan dapat meminimalkan risiko likuiditas di LPEI.

**32. Liquidity Risk**

*Liquidity risk is defined as the inability to meet debt obligations at maturity in normal condition or under distressed condition. LPEI manages liquidity risk to meet every obligation in time and maintain optimum liquidity ratio at the same time.*

*To limit this risk, management has arranged diversified funding sources in addition to its core capital base, manages assets with liquidity in mind, and monitors future cash flows and liquidity on a daily basis. This incorporates an assesment of expected cash flows and the availability of high grade collateral which could be used to secure additional funding if required.*

*LPEI has planned step to overcome the maturity gap between assets and liabilities, among others by:*

- *Maintaining the stability and continuity of funding sources by managing the Assets - Liabilities carefully and proper planning.*
- *Maintaining the sufficiency of money market linecredit facility from several banks, either on-shore or off-shore*

**Analysis of Assets and Liabilities by Remaining Contractual Maturity based on the Undiscounted Cash flows**

*The potential liquidity risk that LPEI may be exposed in the future is measured through Liquidity Gap Analysis, which is the projection of excess or shortage of liquidity base on maturity of assets and liabilities, after taking into account the need for business expansion. This information is also used as a base consideration when planning and managing liquidity as well as business expansion plan. By implementing effective liquidity management, it is expected to minimize liquidity risk at LPEI.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**32. Risiko Likuiditas (lanjutan)**

**Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual berdasarkan Undiscounted Cash flows (lanjutan)**

Tabel di bawah ini menyajikan mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan-neto dalam skala waktu tertentu (*maturity bucket*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*).

**32. Liquidity Risk (continued)**

**Analysis of Assets and Liabilities by Remaining Contractual Maturity based on the Undiscounted Cash flows (continued)**

The tables below present the mapping of net financial assets and liabilities undiscounted cash flows in a specific timescale (*maturity bucket*) remaining maturity.

31 Desember/December 31, 2021							
	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1-3 bulan/ More than 1-3 months	Lebih dari 3-6 bulan/ More than 3-6 months	Lebih dari 6-12 bulan/ More than 6-12 months	Lebih dari 1-3 tahun/ More than 1-3 years	Lebih dari 3-5 tahun/ More than 3-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years
<b>Aset Keuangan</b>							<b>Total</b>
Giro pada Bank Indonesia	2,318	--	--	--	--	--	2,318
Giro pada bank	674,115	--	--	--	--	--	674,115
Penempatan pada Bank	7,474,897	8,790,802	345,000	--	--	--	16,610,699
Efek-efek	34,174	4,601	15,099	25,602	182,994	150,770	1,113,835
Tagihan akseptasi	128,391	230,035	103,347	--	--	--	461,773
Tagihan derivatif	6	--	--	--	--	--	6
Pembayaran dan piutang							
Modal Kerja	4,181,523	3,548,464	3,325,220	4,067,290	6,779,131	6,250,739	22,992,249
Investasi	16,852	9,266	120,728	666,679	6,740,993	10,501,854	30,904,629
Konsumsi	16	73	56	610	6,616	12,175	166,560
Pluitang asuransi dan penjaminan	285,656	--	--	--	--	--	285,656
Aset lain-lain - neto *)	55,191	--	--	--	--	--	55,191
Sub total	12,853,139	12,583,241	3,909,450	4,760,181	13,709,734	16,915,538	54,764,033
							119,495,316
<b>Liabilitas Keuangan</b>							
Liabilitas segera	32,570	--	--	--	--	--	32,570
Liabilitas akseptasi	128,391	230,035	103,347	--	--	--	461,773
Liabilitas derivatif	--	--	--	--	--	--	--
Efek-efek hutang yang diterbitkan	543,613	1,891,293	2,955,342	4,547,810	26,903,602	9,036,882	47,768,404
Pinjaman yang diterima	1,250,000	--	10,152,341	--	14,854,298	4,062,642	176,501
Utang asuransi dan penjaminan	66,418	--	--	--	--	--	66,418
Liabilitas asuransi	3,769	--	--	--	--	--	3,769
Liabilitas lain-lain**	1,057,255	--	--	--	--	--	1,057,255
Sub total	3,082,016	2,121,328	13,211,030	4,547,810	41,757,900	13,099,524	4,944,905
<b>Maturity gap</b>	9,771,123	10,461,913	(9,301,580)	212,371	(28,048,166)	3,816,014	49,819,128
							36,730,803
31 Desember/December 31, 2020							
	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1-3 bulan/ More than 1-3 months	Lebih dari 3-6 bulan/ More than 3-6 months	Lebih dari 6-12 bulan/ More than 6-12 months	Lebih dari 1-3 tahun/ More than 1-3 years	Lebih dari 3-5 tahun/ More than 3-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years
<b>Aset Keuangan</b>							<b>Total</b>
Giro pada Bank Indonesia	17,913	--	--	--	--	--	17,913
Giro pada bank	5,521,119	--	--	--	--	--	5,521,119
Penempatan pada Bank	7,219,597	761,914	--	--	--	--	7,981,511
Efek-efek	6,608	4,554	15,045	26,429	185,519	196,678	745,033
Pembayaran dan piutang							
Modal Kerja	1,398,688	4,809,012	3,572,978	5,150,114	8,475,926	5,677,858	23,558,679
Investasi	47,518	52,531	188,956	353,775	8,390,490	12,830,274	31,913,865
Konsumsi	1	19	42	256	6,907	11,683	134,262
Pluitang asuransi dan penjaminan	34,631	--	--	--	--	--	34,631
Tagihan akseptasi	125,975	321,554	115,595	--	--	--	563,124
Aset lain-lain - neto *)	75,365	--	--	--	--	--	75,365
Sub total	14,447,416	5,949,583	3,892,616	5,530,574	17,058,842	18,716,493	56,351,839
							121,947,363
<b>Liabilitas Keuangan</b>							
Liabilitas segera	37,936	--	--	--	--	--	37,936
Liabilitas akseptasi	125,975	321,554	115,595	--	--	--	563,124
Efek-efek hutang yang diterbitkan	550,362	4,044,197	5,787,552	6,323,116	19,026,305	24,060,106	7,859,181
Pinjaman yang diterima	--	1,575,000	4,752,328	-	20,549,648	4,205,890	210,896
Utang asuransi dan penjaminan	3,123	--	--	--	--	--	3,123
Liabilitas asuransi	1,850	--	--	--	--	--	1,850
Liabilitas lain-lain**	1,134,221	--	--	--	--	--	1,134,221
Sub total	1,853,468	5,940,751	10,655,475	6,323,116	39,575,953	28,265,996	8,070,077
<b>Maturity gap</b>	12,593,948	8,833	(6,762,859)	(792,542)	(22,517,111)	-9,549,503	48,281,762
							21,262,528

\*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.

\*\*) Liabilitas keuangan dalam "liabilitas lain-lain" terdiri dari bunga yang masih harus dibayar dan tantiem dan jasa produksi.

\*) Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.

\*\*) Financial liabilities under "other liabilities" consist of accrued interest payable and tantiem and accrued bonus.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**32. Risiko Likuiditas (lanjutan)**

**Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual berdasarkan Undiscounted Cash flows (lanjutan)**

31 Desember/December 31, 2021								Commitment and contingent liabilities Bank guarantee Outstanding irrevocable L/C Total
Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1-3 bulan/ More than 1-3 months	Lebih dari 3-6 bulan/ More than 3-6 months	Lebih dari 6-12 bulan/ More than 6-12 months	Lebih dari 1-3 tahun/ More than 1-3 years	Lebih dari 3-5 tahun/ More than 3-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Total	
Liabilitas komitmen dan kontinjenensi								
Bank garansi	435,875	1,009,171	2,054,721	2,385,601	5,188,559	1,851,155	785,437	13,710,519
Penerbit LC yang tidak dibatalkan	205,556	153,506	6,794	14,678	—	—	—	380,534
<b>Total</b>	<b>641,431</b>	<b>1,162,677</b>	<b>2,061,515</b>	<b>2,400,279</b>	<b>5,188,559</b>	<b>1,851,155</b>	<b>785,437</b>	<b>14,091,053</b>
31 Desember/December 31, 2020								Commitment and contingent liabilities Bank guarantee Outstanding irrevocable L/C Total
Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1-3 bulan/ More than 1-3 months	Lebih dari 3-6 bulan/ More than 3-6 months	Lebih dari 6-12 bulan/ More than 6-12 months	Lebih dari 1-3 tahun/ More than 1-3 years	Lebih dari 3-5 tahun/ More than 3-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Total	
Liabilitas komitmen dan kontinjenensi								
Bank garansi	747,866	7,713,148	2,019,921	1,670,683	16,218,883	1,432,950	781,890	30,585,341
Penerbit LC yang tidak dibatalkan	38,633	104,892	4,417	4,843	12,623	—	—	165,408
<b>Total</b>	<b>786,499</b>	<b>7,818,040</b>	<b>2,024,338</b>	<b>1,675,526</b>	<b>16,231,506</b>	<b>1,432,950</b>	<b>781,890</b>	<b>30,750,749</b>

Untuk aset keuangan, analisis pengelompokan jatuh tempo didasarkan pada sisa periode dari akhir periode pelaporan ke tanggal jatuh tempo kontraktual atau jika lebih awal tanggal perkiraan aset akan direalisasi.

Untuk liabilitas keuangan, analisis jatuh tempo didasarkan pada tanggal yang lebih awal dimana LPEI disyaratkan untuk membayar.

Termasuk di tabel di atas adalah arus kas bunga dan pokok. Sepanjang bunga adalah suku bunga mengambang, jumlah yang tidak didiskonto diperoleh dari kurva suku bunga pada akhir periode pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang didenominasi dengan mata uang asing, jumlah yang tidak didiskonto ditranslasi dengan kurva nilai tukar forward yang relevan pada akhir periode pelaporan.

Tabel selanjutnya menyajikan mengenai pemetaan liabilitas komitmen dan kontinjenensi dalam skala waktu tertentu (*maturity bucket*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*).

**32. Liquidity Risk (continued)**

**Analysis of Assets and Liabilities by Remaining Contractual Maturity based on the Undiscounted Cash flows (continued)**

*For financial assets, the analysis into maturity buckets is based on the remaining period from the end of the reporting period to the contractual maturity date or if earlier the expected date the assets will be realized.*

*For financial liabilities, the maturity analysis is based on the earliest date on which LPEI may be required to pay.*

*The tables above include both interest and principal cash flows. To the extent that interest flows are floating rate, the undiscounted amount is derived from interest rate curves at the end of the reporting period. For foreign currency denominated financial instruments, the undiscounted amount is translated by the relevant forward exchange curve at the end of the reporting period.*

*The following tables present the mapping of commitment and contingent liabilities in a specific timescale (maturity bucket) based on remaining maturity.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

### 33. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko kerugian yang timbul karena adanya pergerakan faktor pasar yang meliputi suku bunga dan nilai tukar yang berlawanan dengan posisi yang dimiliki LPEI baik posisi yang ada di laporan posisi keuangan maupun rekening administratif. Posisi tersebut merupakan posisi yang ada dalam *trading book* dan *banking book*.

LPEI telah memiliki sistem aplikasi treasuri untuk mengukur risiko pasar (*Opics Plus* dan *Opics Risk Plus*) yang merupakan suatu sistem yang terintegrasi, yang digunakan oleh fungsi *front office*, *middle office* dan *back office* untuk portofolio *treasury*. Penggunaan aplikasi tersebut saat ini belum dapat dilaksanakan secara optimal karena masih terkendala dengan ketersediaan data dan terbatas hanya untuk portofolio treasuri.

Selain melakukan monitoring eksposur risiko instrumen, LPEI juga melakukan monitoring limit risiko pasar dan limit transaksi antara lain limit nominal transaksi *dealer*, *cut loss limit* dan *stop loss limit*. Monitoring dilakukan secara harian sehingga mempercepat penyediaan informasi terkini yang mendukung pengambilan keputusan oleh pejabat lini dan manajemen secara tepat waktu, terutama untuk instrumen yang termasuk kedalam klasifikasi diperdagangkan (*trading*).

Termasuk di dalam risiko pasar adalah risiko perubahan harga instrumen keuangan akibat perubahan faktor-faktor pasar, seperti perubahan nilai tukar mata uang dan perubahan suku bunga.

#### (i) Risiko nilai tukar

Risiko nilai tukar merupakan risiko yang timbul karena adanya gap posisi valuta asing yang dimiliki LPEI yang tercermin dalam Posisi Devisa Neto (PDN) LPEI baik secara keseluruhan ataupun laporan posisi keuangan. Termasuk dalam posisi valuta asing tersebut yaitu posisi *trading book* dan *banking book* dalam rangka pengendalian PDN.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 140/PMK.010/2009.

### 33. Market Risk

*Market risk is the risk caused by changes of market factor, such as interest rate and exchange rate that is contrary with LPEI's position, both on statements of financial position and administrative accounts. The position is in trading book and banking book.*

*LPEI has a treasury application system to measure market risk (*Opics Plus* and *Opics Risk Plus*) which is an integrated system, and is used by front office, middle office and back office for treasury portfolios functions. The use of this application cannot be implemented optimally because it is still constrained by data availability and is limited to treasury portfolios.*

*In addition to monitoring of instrument's risk exposure, LPEI also monitors market risk limit and transaction limit, i.e. dealer transaction limit, cut loss limit and stop loss limit. Monitoring is done on a daily basis to provide updated information for a better desicion making by management, particularly for instrument classified as trading instrument.*

*Included in the market risk is the risk of the changes of financial instruments price due to the changes in market factors, such as exchange rate and interest rate changes*

#### (i) Currency risk

*Exchange rate risk is the risk of foreign exchange positions gap held by LPEI and reflected in Net Open Position (NOP) either on or off balance sheet. Included in the NOP is trading book and banking book.*

*As of December 31, 2021 and December 31, 2020, the calculation of Net Open Position (NOP) is based on the Minister of Finance Regulation No. 140/PMK.010/2009.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**33. Risiko Pasar (lanjutan)**

(i) Risiko nilai tukar (lanjutan)

PDN untuk laporan posisi keuangan adalah selisih neto jumlah aset dan jumlah liabilitas dalam setiap mata uang asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

PDN secara keseluruhan adalah penjumlahan nilai absolut dari selisih neto antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih neto dari tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjenji, yang dicatat dalam rekening administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang asing, yang dinyatakan dalam Rupiah.

Berdasarkan peraturan tersebut, LPEI wajib memelihara rasio PDN secara keseluruhan dan laporan posisi keuangan setinggi-tingginya sebesar 20% dari modal.

Berikut ini adalah Posisi Devisa Neto LPEI:

**33. Market Risk (continued)**

(i) Currency risk (continued)

*The NOP for the statement of financial position is the net difference of total assets and total liabilities in each foreign currency which are stated in Rupiah.*

*The overall NOP is the total of the absolute values of the net difference between the assets and liabilities denominated in each foreign currency and the net difference of the receivables and payables of both commitments and contingencies recorded in the administrative accounts denominated in each foreign currency which are stated in Rupiah.*

*Based on the regulation, LPEI has to maintain the overall NOP at a maximum of 20% of the total capital.*

*The following is LPEI's Net Open Position:*

31 Desember/December 31, 2021			
	Aset/ Assets	Kewajiban/ Liabilities	Posisi Devisa Neto/ Net Open Position
<b>Keseluruhan (Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif)</b>			
<i>Statement of Financial Position and Administrative Accounts)</i>			
Dolar Amerika Serikat	31,503,347	33,629,880	2,126,533
Euro Eropa	35,109	56,956	21,847
Yen Jepang	19,543	158	19,385
Dolar Singapura	98	1	97
Total			2,167,862
<b>Laporan Posisi keuangan</b>			
Dolar Amerika Serikat	31,302,417	33,394,959	2,092,542
Euro Eropa	664	56,508	55,844
Yen Jepang	19,543	158	19,385
Dolar Singapura	98	1	97
Total			2,167,868
Modal (Catatan 21)			30,655,652
<b>Rasio Posisi Devisa Neto (Laporan posisi keuangan)</b>			
			7.07%
<b>Rasio Posisi Devisa Neto Keseluruhan</b>			
			7.07%
			<i>Overall Net Open Position Ratio</i>
			<i>Capital (Note 21) Net Open Position Ratio (Statement of financial position)</i>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**33. Risiko Pasar (lanjutan)**

(i) Risiko nilai tukar (lanjutan)

31 Desember/December 31, 2020			
	Aset/ Assets	Kewajiban/ Liabilities	Posisi Devisa Neto/ Net Open Position
<b>Keseluruhan (Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif)</b>			
Dolar Amerika Serikat	30,509,094	34,819,312	4,310,218
Euro Eropa	66,401	82,028	15,627
Yen Jepang	21,475	195	21,280
Dolar Singapura	105	1,081	976
Total			4,348,101
<b>Laporan Posisi keuangan</b>			
Dolar Amerika Serikat	30,432,105	34,742,323	4,310,218
Euro Eropa	64,149	79,776	15,627
Yen Jepang	21,475	195	21,280
Dolar Singapura	105	1,081	976
Total			4,348,101
Modal (Catatan 21)			25,636,858
<b>Rasio Posisi Devisa Neto (Laporan posisi keuangan)</b>			<b>16.96%</b>
<b>Rasio Posisi Devisa Neto Keseluruhan</b>			<b>16.96%</b>
			<b>Overall Net Open Position Ratio</b>
			<b>Overall</b>
			<b>(Statement of Financial Position and Administrative Accounts)</b>
			United States Dollars
			European Euro
			Japanese Yen
			Singapore Dollars
			Total
			<b>Statement of Financial Position</b>
			United States Dollars
			European Euro
			Japanese Yen
			Singapore Dollars
			Total
			<b>Capital (Note 21)</b>
			<b>Net Open Position Ratio</b>
			<b>(Statement of financial position)</b>

Tabel berikut ini menunjukkan rincian sensitivitas perubahan eksposur LPEI atas perubahan nilai tukar mata uang asing. Analisis sensitivitas hanya termasuk pos moneter yang didenominasi dalam mata uang asing dan menyesuaikan translasinya pada akhir periode atas perubahan nilai tukar mata uang asing yang relevan. Persentase kenaikan dan penurunan menunjukkan penilaian LPEI atas perubahan yang mungkin terjadi pada nilai tukar mata uang asing setelah memperhatikan kondisi ekonomi saat ini.

Tingkat sensitivitas digunakan untuk menganalisis kemungkinan perubahan nilai tukar. Pada tanggal 31 Desember 2021, analisa sensitivitas menggunakan asumsi perubahan nilai tukar untuk portofolio terhadap IDR yaitu USD +/-4,16%; EUR +/-6,41%; JPY +/-5,69% dan SGD +/-4,54%. Pada tanggal 31 Desember 2020, analisa sensitivitas menggunakan asumsi perubahan nilai tukar untuk portofolio terhadap IDR yaitu USD +/-3,46%; EUR +/-3,30%; JPY +/-3,54% dan SGD +/-9,75%.

**33. Market Risk (continued)**

(i) Currency risk (continued)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**33. Risiko Pasar (lanjutan)**

**(i) Risiko nilai tukar (lanjutan)**

	31 Desember/December 31, 2021											
	USD	EUR	JPY	SGD	4.16%	-4.16%	6.41%	-6.41%	5.69%	-5.69%	4.54%	-4.54%
Aset Keuangan												
Giro pada bank	3,747	(3,747)	15	(15)	1,112	--	(1,112)	--	4	--	(4)	--
Efek-efek	14,099	(14,099)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tagihan akseptasi	6,638	(6,638)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pembayaran dan piutang	1,175,933	(1,175,933)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pluitang asuransi	148	(148)	20.0	(20.0)	--	--	--	--	--	--	--	--
Aset reasuransi	88	(88)	7	(7)	--	--	--	--	--	--	--	--
Pluitang pembayaran garansi	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Aset lain-lain - bersih *)	380	(380)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total - neto	1,201,033	(1,201,033)	42	(42)	1,112	--	(1,112)	--	4	--	(4)	--
Liabilitas Keuangan												
Liabilitas akseptasi	(6,638)	6,638	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Efek-efek utang yang diterbitkan	(298,774)	298,774	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pinjaman yang diterima	(1,078,430)	1,078,430	(3,478)	3,478	--	--	--	--	--	--	--	--
Liabilitas asuransi	(225)	225	(19)	19	--	--	--	--	--	--	--	--
Liabilitas lain-lain - bersih **)	(5,652)	5,652	(1)	1	(8)	--	8	--	--	--	--	--
Total - neto	(1,389,719)	1,389,719	(3,498)	3,498	(8)	--	8	--	--	--	--	--

	31 Desember/December 31, 2020											
	USD	EUR	JPY	SGD	3.46%	-3.46%	3.30%	-3.30%	3.54%	-3.54%	9.75%	-9.75%
Aset Keuangan												
Giro pada bank	13,236	(13,236)	1,660	(1,660)	761	--	(761)	--	10	--	(10)	--
Efek-efek	11,948	(11,948)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tagihan akseptasi	4,495	(4,495)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tagihan derivatif	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pembayaran dan piutang	889,625	(889,625)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pluitang asuransi	133	(133)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Aset reasuransi	31	(31)	6	(6)	--	--	--	--	--	--	--	--
Pluitang pembayaran garansi	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Aset lain-lain - bersih *)	713	(713)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total - neto	920,181	(920,181)	1,666	(1,666)	761	--	(761)	--	10	--	(10)	--
Liabilitas Keuangan												
Liabilitas akseptasi	(4,495)	4,495	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Liabilitas derivatif	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Efek-efek utang yang diterbitkan	(244,616)	244,616	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pinjaman yang diterima	(947,513)	947,513	(2,000)	2,000	--	--	--	--	--	--	--	--
Liabilitas asuransi	(80)	80	(16)	16	--	--	--	--	--	--	--	--
Liabilitas lain-lain - bersih **)	(7,327)	7,327	(16)	16	(5)	--	5	--	(105)	--	105	--
Total - neto	(1,204,031)	1,204,031	(2,033)	2,033	(5)	--	5	--	(105)	--	105	--

- \*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.
- \*\*) Liabilitas keuangan dalam "liabilitas lain-lain" terdiri dari bunga yang masih harus dibayar, tantiem dan jasa produksi dan kewajiban kepada penjamin ulang.

**(ii) Risiko suku bunga**

LPEI terekspos risiko tingkat suku bunga karena meminjamkan dananya atas dasar bunga tetap dan mengambang. LPEI menerapkan kebijakan pengelolaan aset dan liabilitas untuk memastikan eksposur atas fluktuasi suku bunga dalam batasan yang dapat diterima.

**33. Market Risk (continued)**

**(i) Currency risk (continued)**

- \*) *Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.*
- \*\*) *Financial liabilities under "other liabilities" consist of accrued interest payable, tantiem and accrued bonus and liability to guarantor.*

**(ii) Interest rate risk**

*LPEI is exposed to interest rate risk because it borrows funds at both fixed and floating interest rates. LPEI follows a prudent policy on managing its assets and liabilities to ensure that exposure to fluctuations in interest rates are kept within acceptable limits*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**33. Risiko Pasar (lanjutan)**

**(ii) Risiko suku bunga (lanjutan)**

Tabel berikut ini merangkum perbedaan sensitivitas tingkat suku bunga LPEI. Tabel menunjukkan penyesuaian nilai kontraktual untuk setiap kategori aset liabilitas dan item rekening administratif pada pembukuan LPEI. Posisi negatif *gap* (*short position*) muncul ketika liabilitas menyesuaikan nilai lebih cepat atau pada proporsi yang lebih besar daripada aset sepanjang periode dan cenderung menghasilkan pendapatan bunga neto di dalam lingkungan tingkat suku bunga menurun. Posisi positif *gap* (*long position*) muncul ketika aset menyesuaikan nilai lebih cepat atau berada pada proporsi yang lebih besar daripada liabilitas sepanjang periode dan cenderung menghasilkan pendapatan bunga neto di dalam lingkungan tingkat suku bunga meningkat. Syarat penyesuaian nilai kontraktual tidak merefleksikan dampak potensial dari pembayaran kembali awal atau penarikan. Posisi dapat tidak merepresentasikan posisi pada periode tanggal laporan posisi keuangan. Perubahan besar pada posisi dapat dibuat saat terjadi perubahan potensi pasar. Sebagai tambahan, variasi signifikan pada sensitivitas tingkat suku bunga dapat muncul pada periode penyesuaian nilai dan diantara mata uang dimana LPEI memiliki posisi tingkat suku bunga.

**33. Market Risk (continued)**

**(ii) Interest rate risk (continued)**

The following tables summarize the interest rate sensitivity gap of LPEI. The tables show the contractual repricing for each category of asset liability and administrative accounts items in LPEI's book. A liability (or negative) gap position exists when liabilities reprice more quickly or in greater proportion than assets during a given period and tends to benefit net interest income in a declining interest rate environment. An asset (or positive) gap position exists when assets reprice more quickly or in greater proportion than liabilities during a given period and tends to benefit net interest income in a rising interest rate environment. Contractual repricing terms do not reflect the potential impact of early repayment or withdrawal. Positions may not be reflective of those in subsequent periods. Major changes in positions can be made promptly as market outlooks change. In addition, significant variations in interest rate sensitivity may exist within the repricing periods presented and among the currencies in which LPEI has interest rate positions.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**33. Risiko Pasar (lanjutan)**

(ii) Risiko suku bunga (lanjutan)

**33. Market Risk (continued)**

(ii) Interest rate risk (continued)

31 Desember/December 31, 2021						
Suku bunga mengambang/Floating interest rate						
	Tidak lebih dari 3 bulan/ Less than 3 months	Lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ More than 3 months but less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Total
<b>Aset Keuangan</b>						
Giro pada Bank Indonesia	--	--	--	--	2,318	2,318
Giro pada bank	674,115	--	--	--	674,115	674,115
Penempatan pada bank	--	--	--	16,641,155	--	16,641,155
Efek-efek	--	--	--	560,050	--	560,050
Tagihan derivatif	--	--	--	--	6	6
Pembiayaan dan piutang						
Modal kerja	8,575,360	6,694,854	17,392,744	--	--	32,662,958
Investasi	40,775	904,023	32,279,406	--	--	33,224,204
Konsumsi	--	--	--	122,070	5,747	127,817
Piutang pembiayaan garansi	--	--	--	--	--	--
Piutang asuransi dan penjaminan	--	--	--	--	285,656	285,656
Tagihan akseptasi	--	--	--	--	460,540	460,540
Aset lain-lain *)	--	--	--	--	55,191	55,191
Total aset keuangan	9,290,250	7,598,877	49,672,150	17,323,275	809,458	84,694,010
<b>Liabilitas Keuangan</b>						
Liabilitas segera	--	--	--	--	32,430	32,430
Liabilitas akseptasi	--	--	--	--	460,540	460,540
Liabilitas derivatif	--	--	--	--	--	--
Efek-efek utang yang diterbitkan	--	--	--	27,712,389	--	27,712,389
Pinjaman yang diterima	1,250,000	9,961,451	17,588,120	--	--	28,799,571
Utang asuransi	--	--	--	--	4,055	4,055
Utang penjaminan	--	--	--	--	62,363	62,363
Liabilitas lain-lain **)	--	--	--	--	1,057,255	1,057,255
Total liabilitas keuangan	1,250,000	9,961,451	17,588,120	27,712,389	1,616,643	58,128,603
<b>Interest Gap</b>	8,040,250	(2,362,574)	32,084,030	(10,389,114)	(807,185)	26,565,407
31 Desember/December 31, 2020						
Suku bunga mengambang/Floating interest rate						
	Tidak lebih dari 3 bulan/ Less than 3 months	Lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ More than 3 months but less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Total
<b>Aset Keuangan</b>						
Giro pada Bank Indonesia	--	--	--	--	17,913	17,913
Giro pada bank	5,520,843	--	--	--	--	5,520,843
Penempatan pada bank	--	--	--	7,980,668	--	7,980,668
Efek-efek	--	--	--	572,273	--	572,273
Pembiayaan dan piutang						
Modal kerja	8,227,265	8,104,977	18,506,214	--	--	34,838,456
Investasi	233,280	1,696,889	35,864,746	--	--	37,794,915
Konsumsi	--	--	--	97,560	4,978	102,538
Piutang pembiayaan garansi	--	--	--	--	295,812	295,812
Piutang asuransi dan penjaminan	--	--	--	--	34,631	34,631
Tagihan akseptasi	--	--	--	--	558,417	558,417
Aset lain-lain *)	--	--	--	--	33,056	33,056
Total aset keuangan	13,981,388	9,801,866	54,370,960	8,650,501	944,807	87,749,522
<b>Liabilitas Keuangan</b>						
Liabilitas segera	--	--	--	--	37,936	37,936
Liabilitas akseptasi	--	--	--	--	562,727	562,727
Liabilitas derivatif	--	--	--	--	--	--
Efek-efek utang yang diterbitkan	--	--	--	36,481,044	--	36,481,044
Pinjaman yang diterima	1,575,000	4,702,620	22,322,153	--	--	28,599,773
Utang asuransi	--	--	--	--	2,563	2,563
Utang penjaminan	--	--	--	--	560	560
Liabilitas lain-lain **)	--	--	--	--	1,134,221	1,134,221
Total liabilitas keuangan	1,575,000	4,702,620	22,322,153	36,481,044	1,738,007	66,818,824
<b>Interest Gap</b>	12,406,388	5,099,246	32,048,807	(27,830,543)	(793,200)	20,930,698

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**33. Risiko Pasar (lanjutan)**

(ii) Risiko suku bunga (lanjutan)

**33. Market Risk (continued)**

(ii) Interest rate risk (continued)

31 Desember/December 31,2020						
Suku bunga mengambang/Floating interest rate						
	Tidak lebih dari 3 bulan/ Less than 3 months	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Total	
<b>Liabilitas Keuangan</b>						
Liabilitas segera	--	--	--	37,936	37,936	<b>Financial Liabilities</b>
Liabilitas akseptasi	--	--	--	562,727	562,727	Current liabilities
Liabilitas derivatif	--	--	--	--	--	Acceptances payable
Efek-efek utang yang diterbitkan	--	--	36,481,044	--	36,481,044	Derivatives payable
Pinjaman yang diterima	1,575,000	4,702,620	22,322,153	--	28,599,773	Debt securities issued
Utang asuransi	--	--	--	2,563	2,563	Fund borrowings
Utang penjaminan	--	--	--	560	560	Insurance payable
Liabilitas lain-lain **)	--	--	--	1,134,221	1,134,221	Guarantee payable
Total liabilitas keuangan	1,575,000	4,702,620	22,322,153	36,481,044	66,818,824	Other liabilities**)
<b>Interest Gap</b>	<b>12,406,388</b>	<b>5,099,246</b>	<b>32,048,807</b>	<b>(27,830,543)</b>	<b>(793,200)</b>	<b>Total financial liabilities</b>
						<b>Interest Gap</b>

\*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan

\*\*) Liabilitas keuangan dalam "liabilitas lain-lain" terdiri dari bunga yang masih harus dibayar, tantiem dan jasa produksi dan kewajiban kepada penjamin ulang.

\*) Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.

\*\*) Financial liabilities under "other liabilities" consist of accrued interest payable, tantiem and accrued bonus and liability to reguarantor.

Tabel di bawah ini menunjukkan suku bunga efektif dari mata uang utama untuk instrumen keuangan moneter yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

The tables below summarize the effective interest rate by major currencies for monetary financial instruments not carried at fair value through profit or loss.

31 Desember/December 31,2021						
Suku Bunga Efektif/ Effective Interest Rate				Suku Bunga Kontraktual/ Contractual Interest Rate		
	Mata uang asing/ Foreign Currency	Rupiah %	Rupiah %	Mata uang asing/ Foreign Currency	Rupiah %	
<b>ASET</b>						
Giro pada bank	0,00 - 0,00	0,00 - 0,00	0,00 - 0,00	0,00 - 0,00	0,00 - 0,00	<b>ASSETS</b>
Penempatan pada bank	2,40 - 3,65	0,04 - 1,00	2,40 - 3,65	0,04 - 1,00	0,04 - 1,00	Current accounts with banks
Efek-efek	5,63 - 8,25	2,95 - 4,13	5,63 - 8,25	2,95 - 4,13	2,95 - 4,13	Placements with banks
Pembianayaan dan piutang	(3,73) - 20,06	0,00 - 13,07	0,00 - 14,50	0,00 - 7,35	0,00 - 7,35	Securities
<b>LIABILITAS</b>						<b>LIABILITIES</b>
Efek-efek utang yang diterbitkan	6,70 - 9,80	3,88	6,70 - 9,80	3,88	3,88	Debt securities issued
Pinjaman yang diterima	3,55 - 4,65	0,75 - 3,03	3,55 - 4,65	0,75 - 3,03	0,75 - 3,03	Fund borrowings

31 Desember/December 31,2020						
Suku Bunga Efektif/ Effective Interest Rate				Suku Bunga Kontraktual/ Contractual Interest Rate		
	Mata uang asing/ Foreign Currency	Rupiah %	Rupiah %	Mata uang asing/ Foreign Currency	Rupiah %	
<b>ASET</b>						
Giro pada bank	0,00 - 0,00	0,00 - 0,00	0,00 - 2,00	0,00 - 0,00	0,00 - 0,00	<b>ASSETS</b>
Penempatan pada bank	2,75 - 5,30	0,10 - 6,40	2,75 - 5,30	0,10 - 2,80	0,10 - 2,80	Current accounts with banks
Efek-efek	5,63 - 8,25	2,95 - 4,13	5,63 - 8,25	2,95 - 4,13	2,95 - 4,13	Placements with banks
Pembianayaan dan piutang	0,00 - 26,53	0,00 - 13,62	0,00 - 14,50	0,00 - 10,75	0,00 - 10,75	Securities
<b>LIABILITAS</b>						<b>LIABILITIES</b>
Efek-efek utang yang diterbitkan	6,35 - 9,80	3,88 - 3,88	6,35 - 9,80	3,88	3,88	Debt securities issued
Pinjaman yang diterima	6,50 - 6,50	0,98 - 3,03	6,50 - 6,50	0,98 - 3,03	0,98 - 3,03	Fund borrowings

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**33. Risiko Pasar (lanjutan)**

(ii) Risiko suku bunga (lanjutan)

Tabel selanjutnya menunjukkan rincian sensitivitas laba dan ekuitas LPEI terhadap perubahan tingkat suku bunga. Analisis disusun dengan menggunakan asumsi atas saldo instrumen keuangan dengan bunga mengambang pada tanggal pelaporan telah beredar sepanjang tahun, dengan memperhatikan pergerakan aktual atas pokok selama tahun berjalan. Basis poin kenaikan dan penurunan menunjukkan penilaian manajemen atas perubahan yang mungkin terjadi atas suku bunga yang relevan setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

Tingkat sensitivitas yang digunakan untuk menganalisis kemungkinan perubahan suku bunga yang berdampak pada keuntungan dan kerugian portofolio banking book. Pada analisa sensitivitas menggunakan asumsi perubahan suku bunga untuk *portofolio banking book* dengan basis IDR+/30bp, USD+/-78 bp, EUR +/-0,02 bp, JPY +/-5,5 bp dan SGD +/-72 bp pada tanggal 31 Desember 2021 dan IDR+/17 bp, USD+/-17 bp, EUR +/-17 bp, JPY +/-10 bp dan SGD +/-29 bp pada tanggal 31 Desember 2020.

**33. Market Risk (continued)**

(ii) Interest rate risk (continued)

The following tables detail the sensitivity of LPEI's profit and equity to changes in interest rate. The analysis is prepared assuming the amount of floating rate financial instrument outstanding at the reporting date was outstanding for the whole year, taking into account actual principal movements during the year. The basis point increase and decrease represents the management's assessment of the reasonably possible change in the relevant interest rates after considering the current economic conditions.

The level of sensitivity that is used to analyze possible changes in interest rates which affect the profit and loss portfolio of banking book. Sensitivity analysis using assumptions of interest rates changes for banking book portfolio with base IDR+/30bp, USD+/-78 bp, EUR +/-0,02 bp, JPY +/-5,5 bp and SGD +/-72 bp as of December 31, 2021 and IDR+/17bp, USD+/-17 bp, EUR +/-17bp, JPY +/-10 bp and SGD +/-29 bp as of December 31, 2020.

31 Desember/December 31, 2021												
	Efek pada laba rugi/ Impact to profit or loss				Impact to statement on profit or loss and other comprehensive income							
	IDR		Lain-lain/Others		IDR		USD		EUR			
	+30bp	-30bp	+78 bp	-78bp	+30bp	-30bp	+78 bp	-78bp	+0,02bp	-0,02bp		
Aset Keuangan												
Penempatan pada bank	56,366	(56,366)	72,819	(72,819)	12	(12)	--	--	--	--	--	--
Efek-efek	--	--	--	--	--	--	(4,876)	5,046	(1,299,112)	2,004,221	--	--
Pembiayaan dan piutang	152,380	(152,380)	277,619	(277,619)	--	--	--	--	--	--	--	--
Neto	208,746	(208,746)	350,438	(350,438)	12	(12)	(4,876)	5,046	(1,299,112)	2,004,221	--	--

31 Desember/December 31, 2020												
	Efek pada laba rugi/ Impact to profit or loss				Impact to statement on profit or loss and other comprehensive income							
	IDR		Lain-lain/Others		IDR		USD		EUR			
	+17bp	-17bp	+17bp	-17bp	+17bp	-17bp	+17bp	-17bp	+17bp	-17bp		
Aset Keuangan												
Penempatan pada bank	19.343	(19.343)	8.161	(8.161)	377	(377)	--	--	--	--	--	--
Efek-efek	--	--	--	--	--	--	(2,870)	2,926	(368,408)	376,581	--	--
Pembiayaan dan piutang	92,748	(92,748)	64,671	(64,671)	--	--	--	--	--	--	--	--
Neto	112,091	(112,091)	72,832	(72,832)	377	(377)	(2,870)	2,926	(368,408)	376,581	--	--

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**34. Risiko Operasional**

Identifikasi dan analisa risiko operasional dilakukan terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko operasional yang melekat (*inherent*) pada seluruh aktivitas fungsional, produk, proses dan sistem informasi, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi dan permodalan LPEI. Kerangka kerja identifikasi risiko operasional berdasarkan faktor-faktor penyebab (*causes*), kejadian (*event*) dan akibat (*impact*).

Secara rutin telah dilakukan proses identifikasi Risiko Operasional secara umum melalui penilaian profil risiko triwulan. Telah dilakukan pula pengikinan *risk register* yang telah mengacu pada struktur organisasi terbaru dan dilakukan identifikasi risiko-risiko lain pada unit kerja secara berkala.

Proses Pengukuran Risiko Operasional selain dilakukan secara manual dan telah dilakukan *Risk Control and Self Assessment* (RCSA) sehingga lebih persis dalam mengukur risiko operasional pada masing-masing divisi. Saat ini, pengukuran RCSA masih dilakukan secara kualitatif, kedepannya RCSA akan dilakukan secara kuantitatif untuk mengukur seberapa besar dampak dan kemungkinan kejadian operasional sehingga dapat dibangun mitigasi yang lebih baik dan tepat. Untuk kemudian dilakukan mitigasi agar dapat menurunkan risiko operasional lembaga melalui peningkatan *governance* atas seluruh proses transaksi yang berjalan.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**34. Operational Risk**

*Operational risk is identified and analyzed through risk factor inherent in all business activities, products, process, and information system, either external or internal factor, that might cause negative impact on objectives and equity of LPEI. The framework of operational risk identification is based on cause, event, and impact.*

*Identification of Operational Risk in general has been carried out through the quarterly assessment of risk profile. Risk register referring to the latest organizational structure has also been updated, along with the identification of other risks in each working unit periodically.*

*Besides carrying out the process of Operational Risk measurement manually, Risk Control and Self Assessment (RCSA) has also been carried out in order to measure operation risks in each division more accurately. RCSA measurement is currently being done qualitatively and will also be measured quantitatively in the future to assess the impact and possibility of operational events, so that LPEI will be able to build a better and more precise mitigation plan. This mitigation plan will then be carried out so that LPEI's operational risks will be managed through better governance throughout each and every on-going transaction processes.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

---

**35. Risiko Asuransi**

Risiko utama yang dihadapi LPEI dalam kontrak asuransi adalah klaim aktual dan pembayaran manfaat atau waktu terkait dengan hal tersebut, berbeda dengan yang diperkirakan. Hal ini dipengaruhi oleh frekuensi klaim, besarnya klaim, manfaat klaim yang dibayarkan dan perkembangan selanjutnya atas klaim jangka panjang. Oleh karena itu, tujuan LPEI adalah untuk memastikan terdapat cadangan yang cukup untuk menyelesaikan liabilitas tersebut.

Aktivitas pengelolaan risiko asuransi LPEI dilakukan pada tingkat transaksi dan portofolio. Pada tingkatan transaksi, LPEI membuat batasan risiko atas jumlah yang diasuransikan. Pada tingkatan portofolio, LPEI memastikan bahwa strategi besarnya asuransi dalam sektor ekonomi/industri merefleksikan seluruh struktur ekonomi/industri nasional. Sebagai tambahan LPEI juga mengalihkan risiko asuransi kepada pihak lain melalui reasuransi atau koasuransi.

---

**35. Insurance Risk**

*The principal risk that LPEI faces under insurance contracts is that the actual claims and benefit payments or the timing thereof, differ from expectations. This is influenced by the frequency of claims, severity of claims, actual benefits paid and subsequent development of long-term claims. Therefore, LPEI's objective is to ensure that sufficient reserves are available to cover these liabilities.*

*LPEI's insurance risk management activities are carried out on a transaction and portfolio level. At the transaction level, LPEI establishes risk limits on the insured amount. At the portfolio level, LPEI ensures that insurance coverage strategy in the economic/industry sector reflects the overall national economic/ industry structure. Additionally, LPEI also transfers insurance risk to other parties through the use of reinsurance or coinsurance.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**36. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan**

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari semua aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal ini.

<b>31 Desember/ December 31, 2021</b>		
	<b>Nilai tercatat/ Carrying value</b>	<b>Nilai wajar/ Fair value</b>
<b>Aset Keuangan</b>		
Giro pada Bank Indonesia	2,318	2,318
Giro pada bank	674,115	674,115
Penempatan pada bank	16,641,155	16,641,155
Efek-efek	560,050	560,050
Tagihan akseptasi	460,540	460,540
Tagihan derivatif	6	6
Pembentukan dan piutang		
Modal kerja	45,054,973	33,680,397
Investasi	38,780,210	34,210,708
Konsumsi	127,979	120,356
Piutang asuransi	285,656	285,656
Aset lain-lain*)	55,191	55,191
	<b>102,642,193</b>	<b>86,690,492</b>
<b>Liabilitas Keuangan</b>		
Liabilitas segera	32,570	32,570
Liabilitas akseptasi	460,540	460,540
Efek-efek utang yang diterbitkan	27,712,389	25,400,783
Pinjaman yang diterima	28,799,571	36,342,516
Utang asuransi	4,055	4,055
Utang penjaminan	62,363	62,363
Liabilitas lain-lain**)	1,057,255	1,057,255
	<b>58,128,743</b>	<b>63,360,082</b>
<b>Financial Assets</b>		
Current account with Bank Indonesia		
Current accounts with banks		
Placements with banks		
Securities		
Acceptances receivable		
Derivatives receivable		
Financing and receivables		
Working capital		
Investment		
Consumption		
Insurance receivables		
Other assets*)		
<b>Financial Liabilities</b>		
Current liabilities		
Acceptances payable		
Debt securities issued		
Fund borrowings		
Insurance payable		
Guarantee payable		
Other liabilities**)		

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**36. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan  
(lanjutan)**

**36. Fair Value of Financial Assets and  
Liabilities (continued)**

	<b>31 Desember/ December 31, 2020</b>		
	<b>Nilai tercatat/ Carrying value</b>	<b>Nilai wajar/ Fair value</b>	
<b>Aset Keuangan</b>			
Giro pada Bank Indonesia	17,913	17,913	Current account with Bank Indonesia
Giro pada bank	5,521,119	5,521,119	Current accounts with banks
Penempatan pada bank	7,998,721	7,998,721	Placements with banks
Efek-efek	572,273	572,273	Securities
Pembiayaan dan piutang			Financing and receivables
Modal kerja	47,542,043	35,687,906	Working capital
Investasi	42,763,042	42,006,352	Investment
Konsumsi	102,988	97,021	Consumption
Piutang asuransi	35,540	35,540	Insurance receivables
Tagihan akseptasi	562,727	562,727	Acceptances receivable
Aset lain-lain*)	75,365	75,365	Other assets*)
	<b>105,191,731</b>	<b>92,574,937</b>	
<b>Liabilitas Keuangan</b>			
Liabilitas segera	37,938	37,938	Current liabilities
Liabilitas akseptasi	562,727	562,727	Acceptances payable
Efek-efek utang yang diterbitkan	36,481,044	33,380,393	Debt securities issued
Pinjaman yang diterima	28,599,773	32,136,421	Fund borrowings
Utang asuransi	2,563	2,563	Insurance payable
Utang penjaminan	560	560	Guarantee payable
Liabilitas lain-lain**)	1,134,221	1,134,221	Other liabilities**)
	<b>66,818,826</b>	<b>67,254,823</b>	

\*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.

\*\*) Liabilitas keuangan dalam "liabilitas lain-lain" terdiri dari bunga yang masih harus dibayar, tantiem dan jasa produksi dan kewajiban kepada penjamin ulang.

\*) Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.

\*\*) Financial liabilities under "other liabilities" consist of accrued interest payable, tantiem and accrued bonus and liability to reguarantor.

Metode dan asumsi yang digunakan oleh LPEI dalam mengestimasi nilai wajar dari instrumen keuangan adalah sebagai berikut:

- (i) Nilai tercatat dari giro pada Bank Indonesia, giro pada bank, penempatan pada bank dengan suku bunga tetap, kas, piutang pembiayaan garansi, tagihan dan liabilitas akseptasi, piutang asuransi, aset reasuransi, utang asuransi, utang penjaminan, liabilitas asuransi dan aset lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar karena sisa jatuh tempo di bawah satu tahun.

The methods and assumptions used by LPEI in estimating the fair value of the financial instruments are as follows:

- (i) The carrying value of fixed rate current accounts with Bank Indonesia, current accounts with banks, fixed rates placements with banks, cash, guarantee financing receivable, acceptances receivables and payable, insurances receivable, reinsurance assets, insurances payable, guarantee payable, insurance liabilities and other assets were the reasonable approximation of its fair values since the maturity is below one year.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**36. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan  
(lanjutan)**

- (ii) Pembiayaan dan piutang LPEI secara umum terdiri dari pembiayaan dan piutang yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan suku bunga tetap. Pembiayaan dan piutang yang diberikan dinyatakan berdasarkan jumlah nilai tercatat. Nilai wajar dari pembiayaan dan piutang yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh LPEI. Perkiraan arus kas ini didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pasar untuk menentukan nilai wajar.
- (iii) Nilai wajar atas instrumen derivatif yang didapatkan dari teknik penilaian dengan menggunakan masukan yang dapat diamati di pasar terutama adalah suku bunga dan nilai tukar mata uang asing.
- (iv) Estimasi nilai wajar liabilitas segera adalah sebesar jumlah yang harus dibayarkan kembali sewaktu-waktu.
- (v) Nilai wajar untuk efek-efek ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (broker)/pedagang efek (*dealer*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa atau dinilai dengan menggunakan metode penilaian internal.
- (vi) Nilai wajar agregat untuk efek-efek utang yang diterbitkan dan pinjaman yang diterima dengan tingkat bunga tetap didasarkan pada arus kas diskonto model yang menggunakan kurva *yield* terkini yang sesuai dengan sisa periode jatuh temponya. Untuk efek-efek utang yang diterbitkan dan pinjaman yang diterima dengan suku bunga mengambang nilai tercatat mendekati nilai wajarnya.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**36. Fair Value of Financial Assets and  
Liabilities (continued)**

- (ii) *Financing and receivables of LPEI generally consists of financing and receivables granted at a floating rate and fixed rate. Financing and receivables granted are stated at carrying amount. The fair value of financing and credit extended show discounted value of the estimated future cash flows expected to be received by LPEI. These discounted cash flows use market rates to determine fair value.*
- (iii) *The fair values of derivative instruments are obtained from valuation techniques by using inputs that can be observed in the market such as interest rate and foreign currency exchange rate.*
- (iv) *The estimated fair values of current liabilities are the amounts repayable on demand.*
- (v) *The fair values of securities are based on the market prices or broker/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit, maturity and yield characteristics or using internal valuation model.*
- (vi) *The aggregate fair values for debt securities issued and fund borrowings with fixed interest rates are based on discounted cash flow model using current yield curve appropriate for the remaining term to maturity. For debt securities issued and fund borrowings with floating interest rates the carrying value approximates its fair value.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**36. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

LPEI menggunakan hierarki berikut untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

- (i) Tingkat 1: nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga pasar aktif (*unadjusted*) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik;
- (ii) Tingkat 2: pengukuran nilai wajar diperoleh dari input selain dari kuotasi harga pasar yang termasuk dalam Tingkat yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (seperti harga) maupun tidak langsung (diperoleh dari harga);
- (iii) Tingkat 3: pengukuran nilai wajar diperoleh dari teknik valuasi yang di dalamnya terdapat input untuk aset dan liabilitas yang tidak didasarkan pada data yang dapat diobservasi di pasar (input yang tidak dapat diobservasi).

Tabel berikut menunjukkan suatu analisa instrumen keuangan yang dicatat pada nilai wajar berdasarkan tingkatan hierarki:

**36. Fair Value of Financial Assets and Liabilities (continued)**

*LPEI adopts the following hierarchy for determining and disclosing the fair value of financial instruments:*

- (i) *Level 1: fair values derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;*
- (ii) *Level 2: fair value measurements derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices);*
- (iii) *Level 3: fair value measurements derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).*

*The following table shows an analysis of financial instruments recorded at fair value by level of the hierarchy:*

	31 Desember/ December 31, 2021			
	Tingkat/ Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat/ Level 3	
<b>Aset yang diukur pada nilai wajar</b>				<b>Assets measured at fair value</b>
Tersedia untuk dijual				Available-for-sale
Efek-efek	560,050	--	--	Securities
Aset keuangan pada FVTPL				Financial assets at FVTPL
Tagihan derivatif	--	6	--	Derivatives receivable
	<b>560,050</b>	<b>6</b>	<b>--</b>	
<b>Aset yang nilai wajarnya diungkapkan</b>				<b>Assets for which fair value are disclosed</b>
Giro pada				Current account with
Bank Indonesia	--	2,318	--	Bank Indonesia
Giro pada bank	--	674,115	--	Current account with bank
Penempatan pada bank	--	16,641,155	--	Placement with bank
Tagihan akseptasi	--	460,540	--	Acceptances receivable
Pembiayaan dan piutang				Financing and receivables
Modal kerja	--	17,984,704	15,695,693	Working capital
Investasi	--	26,693,669	7,517,039	Investment
Konsumsi	--	120,356	--	Consumption
Piutang asuransi	--	285,656	--	Insurance receivables
Aset lain-lain*)	--	55,191	--	Other assets*)
	<b>--</b>	<b>62,917,704</b>	<b>23,212,732</b>	
<b>Total</b>	<b>560,050</b>	<b>62,917,710</b>	<b>23,212,732</b>	<b>Total</b>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**36. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan  
(lanjutan)**

**36. Fair Value of Financial Assets and  
Liabilities (continued)**

	<b>31 Desember/ December 31, 2021</b>			
	<b>Tingkat/ Level 1</b>	<b>Tingkat/ Level 2</b>	<b>Tingkat/ Level 3</b>	
<u>Liabilitas yang diukur pada nilai wajar</u>				
Liabilitas derivatif	--	--	--	
<u>Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan</u>				
Liabilitas segera	--	32,570	--	
Liabilitas akseptasi	--	460,540	--	
Efek-efek utang yang diterbitkan	--	25,400,783	--	
Pinjaman yang diterima	--	36,342,516	--	
Utang asuransi	--	4,055	--	
Utang penjaminan	--	62,363	--	
Liabilitas lain-lain**)	--	1,057,255	--	
	--	63,360,082	--	
<b>Total</b>	<b>--</b>	<b>63,360,082</b>	<b>--</b>	<b>Total</b>
	<b>31 Desember/ December 31, 2020</b>			
	<b>Tingkat/ Level 1</b>	<b>Tingkat/ Level 2</b>	<b>Tingkat/ Level 3</b>	
<u>Aset yang diukur pada nilai wajar</u>				
Tersedia untuk dijual				
Efek-efek	572,273	--	--	
Aset keuangan pada FVTPL				
Tagihan derivatif	--	--	--	
	<b>572,273</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	
<u>Aset yang nilai wajarnya diungkapkan</u>				
Giro pada				
Bank Indonesia	--	17,913	--	
Giro pada bank	--	5,521,119	--	
Penempatan pada bank	--	7,998,721	--	
Pembentukan dan piutang				
Modal kerja	--	21,071,725	14,616,181	
Investasi	--	35,838,423	6,167,929	
Konsumsi	--	97,021	--	
Piutang asuransi	--	35,540	--	
Tagihan akseptasi	--	562,727	--	
Aset lain-lain*)	--	75,365	--	
	--	71,218,554	20,784,110	
<b>Total</b>	<b>572,273</b>	<b>71,218,554</b>	<b>20,784,110</b>	<b>Total</b>
<u>Liabilitas yang diukur pada nilai wajar</u>				
Liabilitas derivatif	--	--	--	
<u>Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan</u>				
Liabilitas segera	--	37,938	--	
Liabilitas akseptasi	--	562,727	--	
Efek-efek utang yang diterbitkan	--	33,380,393	--	
Pinjaman yang diterima	--	32,136,421	--	
Utang asuransi	--	2,563	--	
Utang penjaminan	--	560	--	
Liabilitas lain-lain**)	--	1,134,221	--	
	--	67,254,823	--	
<b>Total</b>	<b>--</b>	<b>67,254,823</b>	<b>--</b>	<b>Total</b>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**36. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

- \*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.
- \*\*) Liabilitas keuangan dalam "liabilitas lain-lain" terdiri dari bunga yang masih harus dibayar, tantiem dan jasa produksi dan kewajiban kepada penjamin ulang.

Tidak terdapat perpindahan level untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

**36. Fair Value of Financial Assets and Liabilities (continued)**

- \*) Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.
- \*\*) Financial liabilities under "other liabilities" consist of accrued interest payable, tantiem and accrued bonus and liability to guarantor.

*There were no transfers between levels for the years ended December 31, 2021 and December 31, 2020.*

**37. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum**

**Manajemen modal**

Tujuan utama dari kebijakan LPEI atas kebijakan pengelolaan modal adalah untuk memastikan LPEI memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi ekspansi usaha LPEI dan memenuhi ketentuan kecukupan permodalan oleh regulator. Rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) merupakan rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

Perhitungan rasio KPMM LPEI pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 140/PMK/010/2009 Pasal 58, dimana LPEI wajib memelihara rasio kecukupan Modal paling rendah sebesar 8,00%.

**37. Minimum Required Capital Adequacy Ratio**

**Capital management**

The main purpose of LPEI's policy on capital management policies is to ensure that LPEI has strong capital to support expansive business strategy and to comply with provisions from the regulator. The Capital Adequacy Ratio (CAR) is the ratio of capital to asset based on its risk (ATMR).

*The CAR calculation of LPEI as of December 31, 2021 and 2020, are based on Minister of Finance Regulation No. 140/PMK/010/2009 Article 58, wherein LPEI is required to maintain the capital adequacy ratio of at least 8.00%.*

	<b>31 Desember / December 31,</b>		
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	
ATMR (tanpa memperhitungkan risiko pasar)	80,400,905	87,000,665	Risk Weighted Assets (RWA) (without market risk charge)
ATMR (dengan memperhitungkan risiko pasar)	82,568,767	91,348,831	RWA (with market risk charge)
Modal			Capital
Modal inti	29,807,149	24,560,709	Core capital
Modal pelengkap	898,504	1,078,559	Supplementary capital
<b>Total modal</b>	<b>30,705,653</b>	<b>25,639,268</b>	<b>Total capital</b>
Rasio KPMM (tanpa memperhitungkan risiko pasar)	38.19%	29.47%	CAR (without market risk charge)
Rasio KPMM (dengan memperhitungkan risiko pasar)	37.19%	28.07%	CAR (with market risk charge)
Rasio KPMM minimum	8.00%	8.00%	Minimum CAR

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, LPEI telah memenuhi ketentuan rasio KPMM.

*As of December 31, 2021 and 2020, LPEI has complied with the required capital adequacy ratio.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**38. Informasi Mengenai Transaksi Dengan  
Pihak-Pihak Berelasi**

Dalam kegiatan normal usaha, LPEI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

**Pihak berelasi/Related parties**

1. Personel manajemen kunci/  
*Key management personnel*

**Sifat dari hubungan/Nature of relationship**

Dewan direktur, direktur pelaksana,  
komite audit, dewan pengawas syariah  
dan kepala divisi/*Board of directors,*  
*managing directors, audit committee,*  
*sharia supervisory board and*  
*head of divisions*

**Sifat dari transaksi/Nature of transactions**

Pembentukan dan piutang dan penyisihan  
imbalan kerja/*Financing and receivables,*  
*provision for employee benefits*

2. Kementerian Keuangan atas nama  
Pemerintah Republik Indonesia/  
*Government of the Republic Indonesia*  
*Through the Ministry of Finance*

3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pengendalian melalui Pemerintah  
Republik Indonesia (RI)/  
*Controlling through the Government of the*  
*Republic of Indonesia*

Efek-efek dan pinjaman yang  
diterima/*Securities and fund borrowings*

4. PT Bank Negara Indonesia  
(Persero) Tbk

Pengendalian melalui Pemerintah  
Republik Indonesia (RI)/  
*Controlling through the Government of the*  
*Republic of Indonesia*

Giro pada bank dan penempatan pada bank  
*/Current account with banks and placements*  
*with banks*

5. PT Bank Rakyat Indonesia  
(Persero) Tbk

Pengendalian melalui Pemerintah  
Republik Indonesia (RI)/  
*Controlling through the Government of the*  
*Republic of Indonesia*

Giro pada bank, penempatan pada bank dan  
pinjaman yang diterima/*Current account with banks,*  
*placements with banks and fund borrowings*

6. PT Bank Tabungan Negara  
(Persero) Tbk

Pengendalian melalui Pemerintah  
Republik Indonesia (RI)/  
*Controlling through the Government of the*  
*Republic of Indonesia*

Giro pada bank, penempatan pada bank dan  
pinjaman yang diterima/*Current account with banks,*  
*placements with banks and fund borrowings*

7. PT Bank Rakyat Indonesia  
Agroniaga Tbk

Pengendalian melalui Pemerintah  
Republik Indonesia (RI)/  
*Controlling through the Government of the*  
*Republic of Indonesia*

Penempatan pada bank/  
*Placements with banks*

8. PT BNI Multifinance

Pengendalian melalui Pemerintah  
Republik Indonesia (RI)/  
*Controlling through the Government of the*  
*Republic of Indonesia*

Penempatan pada bank/  
*Placements with banks*

Pembentukan dan piutang/*Financing and*  
*receivables*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**38. Informasi Mengenai Transaksi Dengan Pihak-  
Pihak Berelasi (lanjutan)**

**38. Information of Transaction With Related  
Parties (continued)**

Pihak berelasi/Related parties	Sifat dari hubungan/Nature of relationship	Sifat dari transaksi/Nature of transactions
9.PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI) <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
10.PT Perkebunan Nusantara I (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI) <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
11. PT Perkebunan Nusantara V (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI) <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
12. PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI) <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
13.PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI) <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
14. PT PAL Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI) <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
15. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI) <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
16. PT Pindad (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI) <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
17. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI) <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
18. Pengembangan Pariwisata Indonesia	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI) <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
19. PT Nindya Karya (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI) <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**38. Informasi Mengenai Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)**

**38. Information of Transaction With Related  
Parties (continued)**

Pihak berelasi/Related parties	Sifat dari hubungan/Nature of relationship	Sifat dari transaksi/Nature of transactions
20. INKA Multi Solusi	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
21. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
22. PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
23. PT Angkasa Pura II (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
24. PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
25. PT Hutama Karya (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
26. PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
27. PT Petro Jordan Abadi	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
28. PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
29. PT Indofarma (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**38. Informasi Mengenai Transaksi Dengan Pihak-  
Pihak Berelasi (lanjutan)**

**38. Information of Transaction With Related  
Parties (continued)**

<b>Pihak berelasi/Related parties</b>	<b>Sifat dari hubungan/Nature of relationship</b>	<b>Sifat dari transaksi/Nature of transactions</b>
30. PT Industri Gula Glenmore	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
31. PT Industri Kereta Api (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
32. PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
33. PT Nusantara Turbin dan Propulsi	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
34. PT Brantas Abipraya (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
35. PT Permodalan Nasional Madani	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
36. PT Pejagan Pemalang Tol Road	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
37. PT Kimia Farma Tbk.	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
38. PT Jasamarga Surabaya Mojokerto	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
39. PT Jasamarga Pandan Malang	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
40. PT Jasamarga Solo Ngawi	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
41. PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
42. PT Jasamarga Manado Bitung	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**38. Informasi Mengenai Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)**

**38. Information of Transaction With Related  
Parties (continued)**

Pihak berelasi/Related parties	Sifat dari hubungan/Nature of relationship	Sifat dari transaksi/Nature of transactions
43.PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
44.PT Indah Karya (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
45.PT Bio Farma (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>

**ASET**

a. Giro pada bank (Catatan 5a)

	31 Desember / December 31,	
	2021	2020
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	565,767	5,037,126
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20,855	22,876
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	22,636	7,351
<b>Total</b>	<b>609,258</b>	<b>5,067,353</b>

**ASSETS**

a. Current accounts with banks (Note 5a)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk  
**Total**

b. Penempatan pada bank (Catatan 6a)

	31 Desember / December 31,	
	2021	2020
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	4,201,000	4,508,000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4,136,000	1,220,100
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2,292,675	--
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	40,000,00	--
PT Bank Raya Indonesia	71,263	--
<b>Total</b>	<b>10,740,938</b>	<b>5,728,100</b>

b. Placements with Banks (Note 6a)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk  
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  
**Total**

c. Efek-efek (Catatan 7a)

c. Securities (Note 7a)

	31 Desember / December 31,	
	2021	2020
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia	560,050	572,273

The Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**38. Informasi Mengenai Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)**

**ASET (lanjutan)**

d. Pembiayaan dan piutang (Catatan 9c)

**38. Information of Transaction With Related Parties (continued)**

**ASSETS (continued)**

d. Financing and receivables (Note 9c)

	<i>31 Desember / December 31,</i>	
	2021	2020
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	3,318,241	2,786,000
PT Angkasa Pura II (Persero)	1,300,514	1,313,596
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	1,142,149	1,145,595
Pengembangan Pariwisata Indonesia	1,053,394	487,706
PT Garuda Indonesia (Persero)	994,403	973,076
PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)	808,284	557,353
PT Pejagan Pemalang Tol Road	806,569	808,003
PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	805,961	806,228
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	651,710	361,022
PT Perkebunan Nusantara V (Persero)	621,978	661,755
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	472,016	422,606
PT Jasamarga Pandaan Malang	444,155	431,935
PT Perkebunan Nusantara I (Persero)	362,072	370,846
PT Jasamarga Ngawi Kertasano Kediri	296,912	315,213
PT PAL Indonesia (Persero)	291,526	297,934
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	284,180	284,226
PT Jasamarga Manado Bitung	214,152	136,943
PT Petro Jordan Abadi	181,395	198,432
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	177,045	--
PT Pindad (Persero)	134,850	140,258
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	120,208	400,836
PT Industri Kereta Api (Persero)	117,550	--
PT Nindya Karya (Persero)	110,150	166,846
PT Kimia Farma (Persero) Tbk	100,782	226,078
PT Inka Multi Solusi	88,676	20,754
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	71,104	--
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	60,245	--
PT Indah Karya (Persero)	21,078	21,077
PT Nusantara Turbin dan Propulsi	12,987	29,640
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	6,083	112,136
PT Jasamarga Solo Ngawi	--	410,993
PT Industri Gula Glenmore	--	274,452

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**38. Informasi Mengenai Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)**

**ASET (lanjutan)**

d. Pembiayaan dan piutang (Catatan 9c)  
(Lanjutan)

	<i>31 Desember / December 31,</i>	
	<i>2021</i>	<i>2020</i>
PT Hutama Karya (Persero)	--	185,393
PT Jasamarga Surabaya Mojokerto	--	132,763
PT Brantas Abipraya (Persero)	--	85,179
PT BNI Multifinance	--	8,584
Presisi Tbk	--	8,079
PT Biofarma (Persero) Tbk	--	6,352
PT Indoferma (Persero) Tbk	--	4,665
Personel manajemen kunci	11,982	12,804
Total	15,082,351	14,605,358
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(420,992)	(553,436)
<b>Neto</b>	<b>14,661,359</b>	<b>14,051,922</b>

**LIABILITAS**

e. Pinjaman yang diterima (Catatan 17)

	<i>31 Desember / December 31,</i>	
	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Pengendalian melalui Pemerintah RI		
Kementerian keuangan atas nama Pemerintah Republik Indonesia	53,557	59,820
<b>Total</b>	<b>53,557</b>	<b>59,820</b>

f. Penyisihan imbalan kerja

	<i>31 Desember / December 31,</i>	
	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Personel manajemen kunci	47,386	43,240

**38. Information of Transaction With Related Parties (continued)**

**ASSETS (continued)**

d. Financing and receivables (Note 9c)  
(Continued)

	<i>31 Desember / December 31,</i>	
	<i>2021</i>	<i>2020</i>
PT Hutama Karya (Persero)	--	185,393
PT Jasamarga Surabaya Mojokerto	--	132,763
PT Brantas Abipraya (Persero)	--	85,179
PT BNI Multifinance	--	8,584
Presisi Tbk	--	8,079
PT Biofarma (Persero) Tbk	--	6,352
PT Indoferma (Persero) Tbk	--	4,665
Key management personnel		
Total		
Less allowance for impairment losses		
<b>Neto</b>	<b>14,661,359</b>	<b>14,051,922</b>

**LIABILITIES**

e. Fund borrowings (Note 17)

	<i>31 Desember / December 31,</i>	
	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Controlling through the Government of Republic of Indonesia		
Government of the Republic Indonesia through Ministry of Finance		
<b>Total</b>	<b>53,557</b>	<b>59,820</b>

f. Provision for employee benefits

	<i>31 Desember / December 31,</i>	
	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Key management personnel		

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**38. Informasi Mengenai Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)**

**LIABILITAS (lanjutan)**

- g. Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan (Catatan 29)

	<i>31 Desember / December 31,</i>		
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
Entitas dan lembaga Pemerintah	<u>1,756,081</u>	<u>2,806,143</u>	<i>Government entities and institutions</i>

- h. Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan (Catatan 29)

	<i>31 Desember / December 31,</i>		
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
Entitas dan lembaga Pemerintah	<u>90,635</u>	<u>14,616</u>	<i>Government entities and institutions</i>

- i. Pendapatan Bunga Kredit (Catatan 29)

Bermasalah	<i>i. Interest income on non-performing loans (Note 29)</i>
	<i>31 Desember / December 31,</i>
	<i>2021</i> <i>2020</i>

Entitas dan lembaga Pemerintah	<u>334,428</u>	<u>265,871</u>	<i>Government entities and institutions</i>
--------------------------------	----------------	----------------	---

- j. Bank garansi (Catatan 29)

*j. Bank guarantee (Note 29)*

	<i>31 Desember / December 31,</i>		
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
Entitas dan lembaga Pemerintah	<u>2,214,803</u>	<u>1,405,911</u>	<i>Government entities and institutions</i>

- k. Proteksi piutang dagang (Catatan 29)

*k. Receivable protection (Note 29)*

	<i>31 Desember / December 31,</i>		
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
Entitas dan lembaga Pemerintah	--	<u>48,473</u>	<i>Government entities and institutions</i>

- l. Tagihan dan liabilitas akseptasi (Catatan 11a)

*l. Acceptances payable and receivable (Note 11a)*

	<i>31 Desember / December 31,</i>		
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
Entitas dan lembaga Pemerintah	<u>2,960</u>	--	<i>Government entities and institutions</i>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**38. Informasi Mengenai Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)**

**LIABILITAS (lanjutan)**

m. Efek-efek utang yang diterbitkan (Catatan 16)

**38. Information of Transaction With Related Parties (continued)**

**LIABILITIES (continued)**

*m. Debt securities issued (Note 16)*

	<b>31 Desember / December 31,</b>		
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	
Entitas dan lembaga Pemerintah	5,070,000	8,024,300	<i>Government entities and institutions</i>

Suku bunga untuk pemberian dan piutang dalam Rupiah dan Dolar Amerika Serikat dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

*Interest rate for financing and receivables in Rupiah and United States Dollar with related parties are asfollow:*

	<b>31 Desember / December 31,</b>		
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	
<b>Suku bunga kontrak</b>			<b>Contractual interest rate</b>
Rupiah	0.00 - 10.30	0.00 - 10.30	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	2.90 - 6.20	2.90 - 6.20	United States Dollar
<b>Suku bunga efektif</b>			<b>Effective interest rate</b>
Rupiah	3.44 - 17.47	3.44 - 17.47	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	2.93 - 6.42	2.93 - 6.42	United States Dollar

Persentase transaksi dengan pihak-pihak berelasi terhadap total aset dan liabilitas LPEI adalah sebagai berikut:

*Percentage of transactions with related parties to total assets and liabilities of LPEI are as follows:*

	<b>31 Desember / December 31,</b>		
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	
<b>Aset</b>			<b>Asset</b>
Giro pada bank	0.67%	5.50%	Current accounts with banks
Penempatan pada bank	12.01%	6.22%	Placements with banks
Efek-efek	0.63%	0.62%	Securities
Pembentukan dan piutang	16.46%	15.26%	Financing and receivables
Tagihan akseptasi	0.00%	0.00%	Acceptances receivable
Total	<b>29.77%</b>	<b>27.60%</b>	<b>Total</b>
<b>Liabilitas</b>			<b>Liabilities</b>
Pinjaman yang diterima	0.09%	0.09%	Fund borrowings
Penyisihan imbalan kerja	0.08%	0.06%	Liability for employee benefits
Liabilitas akseptasi	0.00%	0.00%	Acceptances payable
Efek-efek utang yang diterbitkan	8.61%	11.93%	Debt securities issued
Total	<b>8.78%</b>	<b>12.08%</b>	<b>Total</b>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**38. Informasi Mengenai Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)**

**n. Informasi signifikan lainnya**

**Pelaksanaan Program Investasi  
Pemerintah Dalam Rangka Program  
Pemulihan Ekonomi Nasional**

Dampak dari Pandemi Covid-19 yang muncul di Indonesia sejak bulan Maret 2020 membuat Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (UU No 2/2020).

Salah satu program pemulihan ekonomi nasional yakni melalui Program Investasi Pemerintah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 11 Lampiran UU No 2/2020 pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PP No 23/2020) yang telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 23/2020 (PP No 43/2020)

**38. Information of Transaction With Related  
Parties (continued)**

**n. Other significant information**

**Implementation of Government Investment  
Program in the Context of the National  
Economic Recovery Program**

*The impact of the Covid-19 Pandemic that has emerged in Indonesia since March 2020 has made the Government stipulated Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and/or in the Context of Facing Threats that endanger the National Economy and/or Financial System Stability which has been approved by the House of Representatives (DPR) to be later ratified as Law No. 2 of 2020 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2020 on State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the 2019 Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic and/or in the Context of Facing Threats that endanger the National Economy and/or Financial System Stability into Law (Law No 2/2020).*

*One of the national economic recovery programs is through the Government Investment Program as stated in Article 11 of Attachment of Law No. 2/2020 whose implementation is further regulated in Government Regulation No. 23 of 2020 concerning Implementation of the National Economic Recovery Program in order to Support State Financial Policy for Handling the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic and/or Facing Threats That Endanger the National Economy and/or Financial System Stability and Saving the National Economy (Government Regulation No 23/2020) which has been amended by Government Regulation Number 43 of 2020 concerning Amendment to Government Regulation Number 23/2020 (Government Regulation No 43/2020)*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**38. Informasi Mengenai Transaksi Dengan  
Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)**

**n. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada PP 43/2020 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PMK No.118/2020).

Penugasan atas pelaksanaan Investasi Pemerintah tersebut kemudian ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.06/2020 tentang Penugasan Kepada LPEI sebagai Pelaksana Investasi untuk Melaksanakan Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (KMK No. 545/2020).

Pada 28 Desember 2020 telah ditandatangani Perjanjian Pelaksanaan Investasi antara Kementerian Keuangan dan LPEI tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional Kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) No. PRJ-16/KN/2020 dan No. 595/PKS/12/2020 tanggal 28 Desember 2020 (Perjanjian Pelaksanaan Investasi) serta Perjanjian Pemberian Dana Investasi Pemerintah Republik Indonesia Kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Dalam Bentuk Pinjaman Subordinasi Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional No. 75 tanggal 28 Desember 2020 antara LPEI dengan PTPN, yang dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta (Perjanjian Pemberian Dana Investasi).

**38. Information of Transaction With Related  
Parties (continued)**

**n. Other significant information (continued)**

*Further provisions regarding Government Investment Procedures as referred to in Government Regulation 43/2020 are regulated by Regulation of Minister of Finance Number 118/PMK.06/2020 concerning Government Investments in the Context of the National Economic Recovery Program (Regulation of Minister of Finance No.118/2020).*

*The assignment for the implementation of Government Investment was then stipulated in the Decree of Minister of Finance Number 545/KMK.06/2020 concerning Assignment to LPEI as Investment Executor to Implement Government Investment in the Framework of the National Economic Recovery Program for the Company (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (Decree of Minister of Finance No. 545/2020).*

*On 28 December 2020, an Investment Implementation Agreement was signed between the Ministry of Finance and LPEI regarding the Implementation of Government Investments in the Context of the National Economic Recovery Program to PT Perkebunan Nusantara III (Persero) No. PRJ-16/KN/2020 and No. 595/PKS/12/2020 dated 28 December 2020 (Investment Implementation Agreement) and the Investment Fund Provision Agreement by the Government of the Republic of Indonesia to PT Perkebunan Nusantara III (Persero) in the form of a subordinated loan in the context of the National Economic Recovery Program no. 75 dated 28 December 2020 between LPEI and PTPN, which was made before Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notary in Jakarta (Investment Fund Provision Agreement).*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**38. Informasi Mengenai Transaksi Dengan  
Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)**

**n. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)**

Berdasarkan Perjanjian Pelaksanaan Investasi dan Perjanjian Pemberian Dana Investasi, limit Investasi Pemerintah PEN (IP PEN) kepada PTPN sebesar Rp. 4 Triliun yang digunakan untuk membiayai kegiatan belanja modal perkebunan dan pabrik serta modal kerja untuk komoditas sawit dan tebu. Jangka waktu pemberian IP PEN di tetapkan selama 10 tahun atau sampai dengan tahun 2030 termasuk grace period selama 7 tahun.

Selama tahun 2021, LPEI selaku Pelaksana Investasi telah melakukan kegiatan penyaluran dana IP PEN sebesar Rp. 1,75 triliun, termasuk melaksanakan kegiatan monitoring baik onsite dengan melakukan site visit ke lokasi perkebunan dan pabrik PTPN yang dibiayai IP PEN, serta monitoring offsite yang telah dilaporkan kepada Pemberi Investasi antara lain: Laporan Bulanan, Laporan Tengah Tahun, Laporan Tahunan, dan Laporan realisasi pencapaian Key Achievement Indicator.

Pelaksanaan kegiatan penyaluran dana dan monitoring IP PEN selama tahun 2021 telah sesuai dengan ketentuan di dalam PMK No. 118/PMK/2020, KMK No.545/KMK.06/2020, Perjanjian Pelaksanaan Investasi, Perjanjian Pemberian Dana Investasi

**39. Informasi Tambahan**

Rasio aset produktif yang diklasifikasikan *non-performing* terhadap total aset produktif pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah 12,40% dan 17,92%.

s

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**38. Information of Transaction With Related  
Parties (continued)**

**n. Other significant information (continued)**

*Based on the Investment Implementation Agreement and the Investment Fund Provision Agreement, the limit of Government Investment PEN (IP PEN) to PTPN is in the amount of Rp. 4 Trillion which is used to finance capital expenditures for plantations and factories as well as working capital for oil palm and sugar cane commodities. The period of granting of the IP PEN is set for 10 years or up to 2030 including a grace period of 7 years.*

*During 2021, LPEI as the Investment Executor has carried out the distribution of IP PEN funds of Rp. 1.75 trillion, including carrying out monitoring activities both onsite by conducting site visits to PTPN plantation and mill locations financed by IP PEN, as well as offsite monitoring that has been reported to the Investment Provider, among others: Monthly Reports, Mid-Year Reports, Annual Reports, and Key Achievement Indicator realization reports.*

*Implementation of fund distribution activities and monitoring of IP PEN during 2021 has complied with the provisions in Regulation of Minister of No. 118/PMK/2020, Decree of Minister of Finance No.545/KMK.06/2020, the Investment Implementation Agreement, and the Investment Fund Provision Agreement.*

**39. Additional Information**

*As of December 31, 2021 and 2020, the non-performing assets to total earning assets ratios were 12.40% and 17.92%, respectively.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**40. Informasi Segmen Usaha**

Informasi segmen berdasarkan jenis usaha adalah sebagai berikut:

**40. Business Segment Information**

*Segment information based on business type is as follows:*

	31 Desember/December 31, 2021						
	Penugasan Umum/ General Assignment		Penugasan Khusus/ National Interest Account		Entitas anak/ Subsidiary	Eliminasi/ Elimination	
	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia			
Pendapatan segmen	2,932,545	920,739	410,231	--	5	--	4,263,520
Beban segmen					(1)		(3,057,215)
Pendapatan segmen - neto							1,206,305
Pendapatan operasional lainnya							215,420
Penyisihan kerugian							
penurunan nilai aset keuangan	701,377	(613,772)	(345,357)	--	--	--	(257,752)
Penyisihan kerugian estimasi klaim penjaminan							(114)
Beban operasional lainnya							(758,763)
Laba operasional					4	(4)	405,096
Pendapatan bukan operasional - neto							3,943
Pendapatan (Beban) pajak							(21,643)
Laba tahun berjalan							387,396
Aset	<b>95,698,063</b>	<b>9,736,441</b>	<b>15,257,271</b>	--	<b>50,006</b>	<b>(31,700,860)</b>	<b>89,040,921</b>
Liabilitas	<b>64,335,618</b>	<b>9,019,782</b>	<b>582,336</b>	--	<b>2</b>	<b>(15,017,195)</b>	<b>58,920,543</b>

	31 Desember/December 31, 2020						
	Penugasan Umum/ General Assignment		Penugasan Khusus/ National Interest Account		Entitas anak/ Subsidiary	Eliminasi/ Elimination	
	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia			
Pendapatan segmen	3,958,233	830,069	314,579	--	--	--	5,102,881
Beban segmen							(4,262,993)
Pendapatan segmen - neto							839,888
Pendapatan operasional lainnya							317,595
Penyisihan kerugian							
penurunan nilai aset keuangan	446,709	(821,364)	(48,425)	--	--	--	(423,080)
Penyisihan kerugian estimasi klaim penjaminan							(1,946)
Beban operasional lainnya							(676,887)
Laba operasional							55,570
Pendapatan bukan operasional - neto							6,152
Pendapatan (Beban) pajak							226,666
Laba tahun berjalan							288,388
Aset	<b>98,735,902</b>	<b>13,295,412</b>	<b>12,227,029</b>	--	<b>(32,173,783)</b>	<b>92,084,560</b>	
Liabilitas	<b>74,676,154</b>	<b>13,518,419</b>	<b>11,320,914</b>	(528)	<b>(32,226,948)</b>	<b>67,288,011</b>	

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**41. Analisis Jatuh Tempo Aset dan Liabilitas**

	31 Desember/ December 31, 2021			31 Desember/ December 31, 2020			<i>Financial Assets</i>
	Jatuh tempo dalam satu tahun/ One year And below	Jatuh tempo lebih dari satu tahun/ Due beyond one year	Total	Jatuh tempo dalam satu tahun/ One year And below	Jatuh tempo lebih dari satu tahun/ Due beyond one year	Total	
<b>Aset Keuangan</b>							
Giro pada							
Bank Indonesia	2,318	--	2,318	17,913	--	17,913	<i>Current accounts with Bank Indonesia</i>
Giro pada bank	674,115	--	674,115	5,521,119	--	5,521,119	<i>Current accounts with banks</i>
Penempatan pada bank	16,641,155	--	16,641,155	7,998,721	--	7,998,721	<i>Placements with banks</i>
Efek-efek	28,515	531,535	560,050	--	572,273	572,273	<i>Securities</i>
Tagihan akseptasi	460,540	--	460,540	562,727	--	562,727	<i>Acceptances receivable</i>
Tagihan derivatif	6	--	6	--	--	--	<i>Derivatives receivable</i>
Pembayaran dan piutang syariah	20,761,312	63,201,850	83,963,162	22,942,640	67,465,433	90,408,073	<i>Financing and sharia receivables</i>
Piutang pembayaran garansi lainnya	298,034	--	298,034	303,054	--	303,054	<i>Other guarantee receivables</i>
Piutang asuransi dan penjaminan	285,656	--	285,656	35,540	--	35,540	<i>Insurance and guarantee receivables</i>
Aset lain-lain	156,983	--	156,983	187,207	--	187,207	<i>Other assets</i>
Total aset keuangan	39,308,634	63,733,385	103,042,019	37,568,921	68,037,706	105,606,627	<i>Total financial assets</i>
<b>Aset Non Keuangan</b>							
Kas	65	--	65	1,099	--	1,099	<i>Non-financial Assets</i>
Biaya dibayar dimuka	--	15,782	15,782	--	12,068	12,068	<i>Cash</i>
Klaim atas kelebihan pembayaran							<i>Prepaid expenses</i>
Pajak	--	76,671	76,671	--	169,074	169,074	
Aset pajak tangguhan-neto	--	2,767,613	2,767,613	--	2,793,458	2,793,458	<i>Claim for tax refund</i>
Aset tetap	--	1,525,187	1,525,187	--	1,532,395	1,532,395	<i>Deferred tax assets-net</i>
Aset reasuransi	2,615	--	2,615	1,284	--	1,284	<i>Premises and equipment</i>
Aset lain-lain	25,201	--	25,201	37,556	--	37,556	<i>Reinsurance assets</i>
Total aset non keuangan	27,881	4,385,253	4,413,134	39,939	4,506,995	4,546,934	<i>Other assets</i>
	39,336,515	68,118,638	107,455,153	37,608,860	72,544,701	110,153,561	<i>Total non-financial assets</i>
Akumulasi penyusutan			(421,762)			(366,047)	<i>Accumulated depreciation</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai			(17,992,470)			(17,702,954)	<i>Allowance for impairment losses</i>
<b>Total</b>			<b>89,040,921</b>			<b>92,084,560</b>	<b>Total</b>
<b>Liabilitas Keuangan</b>							
Liabilitas segera	32,570	--	32,570	37,936	--	37,936	<i>Financial Liabilities</i>
Efek-efek utang yang diterbitkan	3,088,395	24,623,994	27,712,389	8,880,461	27,600,583	36,481,044	<i>Current liabilities</i>
Pinjaman yang diterima	11,211,450	17,588,121	28,799,571	6,277,620	22,322,153	28,599,773	<i>Debt securities issued</i>
Liabilitas akseptasi	460,540	--	460,540	562,727	--	562,727	<i>Fund borrowings</i>
Liabilitas derivatif	--	--	--	--	--	--	<i>Acceptances payable</i>
Utang asuransi	4,055	--	4,055	2,563	--	2,563	<i>Derivatives payable</i>
Utang penjaminan	62,363	--	62,363	560	--	560	<i>Insurance payable</i>
Liabilitas sewa guna usaha	7,706	3,274	10,980	4,398	10,439	14,837	<i>Guarantee payable</i>
Liabilitas lain-lain	357,048	--	357,048	456,424	--	456,424	<i>Lease payable</i>
Total liabilitas keuangan	15,224,127	42,215,389	57,439,516	16,222,689	49,933,175	66,155,864	<i>Other liabilities</i>
<b>Liabilitas Non Keuangan</b>							
Utang pajak	12,950	--	12,950	11,664	--	11,664	<i>Total financial liabilities</i>
Penyisihan imbalan kerja	--	157,675	157,675	--	182,553	182,553	<i>Taxes payable</i>
Estimasi klaim	392,559	--	392,559	41,129	--	41,129	<i>Provision for employee benefits</i>
Liabilitas asuransi	6,390	--	6,390	3,230	--	3,230	<i>Estimated claims</i>
Liabilitas lain-lain	911,453	--	911,453	893,571	--	893,571	<i>Insurances liabilities</i>
Total liabilitas non keuangan	1,323,352	157,675	1,481,027	949,594	182,553	1,132,147	<i>Other liabilities</i>
<b>Total</b>	<b>16,547,479</b>	<b>42,373,064</b>	<b>58,920,543</b>	<b>17,172,283</b>	<b>50,115,728</b>	<b>67,288,011</b>	<b>Total non-financial liabilities</b>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

## 42. Tambahan Informasi Arus Kas

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

	Perubahan Non Kas/ Non Cash Changes				31 Desember/ December 31, 2021
	Arus kas/Cash flow	Penerimaan/ Receipt	Pembayaran/ Payment	Pergerakan Kurs Mata Uang Asing/ Foreign Exchange Rate	
Rupiah					Rupiah
Liabilitas sewa	14,837	--	(3,857)	--	10,980
Pinjaman yang diterima	28,599,773	38,343,278	(38,143,480)	--	28,799,571
Efek-efek yang diterbitkan	36,481,044	--	(8,781,000)	8,054	27,712,389
Total	97,241,930	43,343,278	(46,928,337)	8,054	93,863,879

	Perubahan Non Kas/ Non Cash Changes				31 Desember/ December 31, 2020
	Arus kas/Cash flow	Penerimaan/ Receipt	Pembayaran/ Payment	Pergerakan Kurs Mata Uang Asing/ Foreign Exchange Rate	
Rupiah					Rupiah
Pinjaman yang diterima	41,492,912	32,679,208	(45,572,347)	--	28,599,773
Efek-efek yang diterbitkan	45,146,915	148,000	(8,833,002)	1,420	36,481,044
Total	108,786,103	42,827,208	(54,405,349)	--	65,080,817

## 43. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan berdasarkan PSAK 71 dan PSAK 73 per 1 Januari 2020

Catatan berikut menunjukkan dampak atas adopsi PSAK 71 pada laporan keuangan yaitu efek atas perubahan klasifikasi dan efek yang timbul dari pergantian atas perhitungan kerugian kredit pada saat terjadinya (*incurred loss*) berdasarkan PSAK 55 dengan kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss*) berdasarkan PSAK 71.

## 42. Additional Cash Flow Information

*Changes in liabilities arising from financing activities in the cash flow statement are as follows:*

## 43. Classification of Financial Assets and Liabilities based on PSAK 71 and PSAK 73 on January 1, 2020

*The following notes show the impact of adoption of PSAK 71 on the effect of financial statements on changes in classification and the effects arising from changes in the calculation of credit losses incurred (loss based on PSAK 55) with expected credit losses based on PSAK 71.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**43. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan berdasarkan PSAK 71 dan PSAK 73 per 1 Januari 2020**

Tabel berikut menunjukkan nilai tercatat dengan klasifikasi berdasarkan PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020:

**43. Classification of Financial Assets and Liabilities based on PSAK 71 and PSAK 73 on January 1, 2020**

*The following table shows the carrying values with classification based on PSAK 71 on January 1, 2020:*

	Klasifikasi berdasarkan PSAK 55/ <i>Classification under PSAK 55</i>	Klasifikasi berdasarkan PSAK 71/ <i>Classification under PSAK 71</i>	Nilai tercatat berdasarkan PSAK 55/ <i>Carrying amount under PSAK 55</i> 31 Desember/ <i>December 2019</i>	Nilai tercatat berdasarkan PSAK 71/ <i>Carrying amount under PSAK 71</i> 1 Januari/ <i>January 2020</i>
<b>Aset Keuangan/Financial Assets</b>				
Giro pada Bank Indonesia/ <i>Current accounts with Bank Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan piutang/ <i>Loans &amp; receivables</i>	Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortized cost</i>	15,090	15,090
Giro pada bank/ <i>Current accounts with banks</i>	Kredit yang diberikan dan piutang/ <i>Loans &amp; receivables</i>	Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortized cost</i>	335,734	335,725
Penempatan pada bank/ <i>Placements with banks</i>	Kredit yang diberikan dan piutang/ <i>Loans &amp; receivables</i>	Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortized cost</i>	17,538,669	17,501,477
Efek-efek/ <i>Securities</i>	Tersedia untuk dijual/ <i>Available for sale</i>	Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ <i>Fair value through other comprehensive income</i>	576,543	576,543
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali/ <i>Reverse repos</i>	Kredit yang diberikan dan piutang/ <i>Loans &amp; receivables</i>	Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortized cost</i>	--	-
Tagihan akseptasi/ <i>Acceptances receivable</i>	Kredit yang diberikan dan piutang/ <i>Loans &amp; receivables</i>	Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortized cost</i>	658,289	652,351
Tagihan derivatif/ <i>Derivatives receivable</i>	Nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Fair value through profit or loss</i>	Nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Fair value through profit or loss</i>	1,410	1,410

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**43. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan berdasarkan PSAK 71 dan PSAK 73 per 1 Januari 2020 (lanjutan)**

**43. Classification of Financial Assets and Liabilities based on PSAK 71 and PSAK 73 on January 1, 2020 (continued)**

	Klasifikasi berdasarkan PSAK 55/ <i>Classification under PSAK 55</i>	Klasifikasi berdasarkan PSAK 71/ <i>Classification under PSAK 71</i>	Nilai tercatat berdasarkan PSAK 55/ <i>Carrying amount under PSAK 55</i> 31 Desember/ December 2019	Nilai tercatat berdasarkan PSAK 71/ <i>Carrying amount under PSAK 71</i> 1 Januari/ January 2020
<b>Aset Keuangan/Financial Assets</b>				
Pembiayaan dan piutang syariah/ <i>Financing and sharia receivables</i>	Kredit yang diberikan dan piutang/ <i>Loans &amp; receivables</i>	Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortized cost</i>	86,525,430	80,518,421
Piutang pembiayaan garansi lainnya/ <i>Other guarantee receivables</i>	Kredit yang diberikan dan piutang/ <i>Loans &amp; receivables</i>	Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortized cost</i>	287,598	283,842
Piutang asuransi dan penjaminan/ <i>Insurance and guarantee receivables</i>	Kredit yang diberikan dan piutang/ <i>Loans &amp; receivables</i>	Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortized cost</i>	1,400	1,400
Aset lain-lain/ <i>Other assets</i>	Kredit yang diberikan dan piutang/ <i>Loans &amp; receivables</i>	Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortized cost</i>	67,530	67,530
<b>Total asset keuangan/ Total financial assets</b>			<b>106,007,693</b>	<b>99,953,789</b>
<b>Liabilitas Keuangan/ Financial Liabilities</b>				
Liabilitas segera/ <i>Current liabilities</i>	Kredit yang diberikan dan piutang/ <i>Loans &amp; receivables</i>	Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortized cost</i>	35,030	35,030
Efek-efek utang yang diterbitkan/ <i>Debt securities issued</i>	Kredit yang diberikan dan piutang/ <i>Loans &amp; receivables</i>	Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortized cost</i>	45,146,915	45,146,915
Pinjaman yang diterima/ <i>Fund borrowings</i>	Kredit yang diberikan dan piutang/ <i>Loans &amp; receivables</i>	Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortized cost</i>	41,492,912	41,492,912
Liabilitas terkait dengan traksaksi efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali/ <i>Liability related to reverse repos</i>	Kredit yang diberikan dan piutang/ <i>Loans &amp; receivables</i>	Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortized cost</i>	--	--

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**43. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan berdasarkan PSAK 71 dan PSAK 73 per 1 Januari 2020 (lanjutan)**

**43. Classification of Financial Assets and Liabilities based on PSAK 71 and PSAK 73 on January 1, 2020 (continued)**

Liabilitas Keuangan/ <i>Financial Liabilities</i>	Klasifikasi berdasarkan PSAK 55/ <i>Classification under PSAK 55</i>	Klasifikasi berdasarkan PSAK 71/ <i>Classification under PSAK 71</i>	Nilai tercatat berdasarkan PSAK 55/ <i>Carrying amount under PSAK 55</i> 31 Desember/ <i>December 2019</i>	Nilai tercatat berdasarkan PSAK 71/ <i>Carrying amount under PSAK 71</i> 1 Januari/ <i>January 2020</i>
Liabilitas akseptasi/ <i>Acceptances payable</i>	Kredit yang diberikan dan piutang/ <i>Loans &amp; receivables</i>	Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortized cost</i>	658,289	658,289
Liabilitas derivatif/ <i>Derivatives payable</i>	Nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Fair value through profit or loss</i>	Nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Fair value through profit or loss</i>	2,258	2,258
Utang asuransi/ <i>Insurance payable</i>	Kredit yang diberikan dan piutang/ <i>Loans &amp; receivables</i>	Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortized cost</i>	2,150	2,150
Utang penjaminan/ <i>Guarantee payable</i>	Kredit yang diberikan dan piutang/ <i>Loans &amp; receivables</i>	Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortized cost</i>	497	497
Liabilitas sewa/ <i>Lease liabilities</i>	Kredit yang diberikan dan piutang/ <i>Loans &amp; receivables</i>	Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortized cost</i>	--	-
Liabilitas lain-lain/ <i>Other liabilities</i>	Kredit yang diberikan dan piutang/ <i>Loans &amp; receivables</i>	Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortized cost</i>	2,073,301	2,073,301
<b>Total liabilitas keuangan/ <i>Total financial liabilities</i></b>			<b>89,411,352</b>	<b>89,411,352</b>

Tabel berikut menyajikan analisis dampak penerapan PSAK 71, neto setelah pajak, pada saat transisi tanggal 1 Januari 2020 pada komponen ekuitas :

*The following table analyze the impact of the adoption of PSAK 71, net after tax, during the transition on 1 January 2020 in the following equity components:*

**Dampak penerapan PSAK 71.  
*Impact of adopting PSAK 71***

Laba ditahan/ <i>Retained earnings</i>	
Saldo 31 Desember 2019 berdasarkan PSAK 55/ <i>Balance under PSAK 55 at December 31, 2019</i>	(3,228,788)
Reklasifikasi berdasarkan PSAK 71/ <i>Reclassification under PSAK 71</i>	-
Pengakuan kerugian ekspektasian berdasarkan PSAK 71 setelah pajak/ <i>Recognition of expected credit losses under PSAK 71 net after tax</i>	(4,540,428)
<b>Saldo 1 Januari 2020 berdasarkan PSAK 71/ <i>Balance under PSAK 71 at January 1, 2020</i></b>	<b>(7,769,216)</b>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**43. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan berdasarkan PSAK 71 dan PSAK 73 per 1 Januari 2020 (lanjutan)**

Tabel berikut adalah rekonsiliasi atas keseluruhan nilai tercatat instrumen keuangan atas klasifikasi dan pengukuran serta perhitungan kerugian kredit pada saat terjadinya (*incurred loss*) berdasarkan PSAK 55 dengan kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss*) berdasarkan PSK 71:

	1 Januari/January 2020			<b>ASSETS</b>
	<b>Sebelum penyesuaian/ Before Adjustment</b>	<b>Impact from transitional adjustment on implementation SFAS 71</b>	<b>Setelah penyesuaian/ After Adjustment</b>	
		Efek penyesuaian transisi penerapan PSAK 71/		
<b>ASET</b>				
Kas	1,350	--	1,350	<b>Cash</b>
Giro pada Bank Indonesia	15,090	--	15,090	<i>Current account with Bank Indonesia</i>
Giro pada bank	335,734	(9)	335,725	<i>Current accounts with banks</i>
Penempatan pada bank	17,538,669	(37,192)	17,501,477	<i>Placements with banks</i>
Efek-efek	576,543	--	576,543	<i>Securities</i>
Tagihan derivatif	1,410	--	1,410	<i>Derivatives receivable</i>
Pembiayaan dan piutang, dan pembiayaan dan piutang syariah	86,525,430	(6,007,009)	80,518,421	<i>Financing and receivables, and financing and sharia receivables</i>
Piutang pembiayaan garansi	287,598	(3,756)	283,842	<i>Guarantee financing receivables</i>
Pajak dibayar dimuka	339,625	--	339,625	<i>Prepaid tax</i>
Biaya dibayar dimuka	14,582	--	14,582	<i>Prepaid expenses</i>
Piutang asuransi dan penjaminan	1,400	--	1,400	<i>guarantee receivables</i>
Aset reasuransi	4,853	--	4,853	<i>Reinsurance assets</i>
Tagihan akseptasi	658,289	(5,938)	652,351	<i>Acceptances receivable</i>
Aset tetap-neto	1,253,355	--	1,253,355	<i>Premises and equipment-net</i>
Aset pajak tangguhan - neto	1,080,267	1,513,476	2,593,743	<i>Deferred tax assets - net</i>
Aset lain-lain	67,530	--	67,530	<i>Other assets</i>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>108,701,725</b>	<b>(4,540,428)</b>	<b>104,161,297</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**43. Classification of Financial Assets and Liabilities based on PSAK 71 and PSAK 73 on January 1, 2020 (continued)**

The following table is a reconciliation of the carrying amount of financial instruments in the classification and measurement and calculation of credit losses incurred (based on PSAK 55) with expected credit losses based on PSAK 71:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**43. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan berdasarkan PSAK 71 dan PSAK 73 per 1 Januari 2020 (lanjutan)**

**43. Classification of Financial Assets and Liabilities based on PSAK 71 and PSAK 73 on January 1, 2020 (continued)**

	1 Januari/January 2020			
	Sebelum penyesuaian/ Before Adjustment	<i>Impact from transitional adjustment on implementation SFAS 71</i>	Setelah penyesuaian/ After Adjustment	
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
Liabilitas segera	35,030	--	35,030	<i>Current liabilities</i>
Liabilitas akseptasi	658,289	--	658,289	<i>Acceptances payable</i>
Utang pajak	45,929	--	45,929	<i>Taxes payable</i>
Efek-efek utang yang diterbitkan	45,146,915	--	45,146,915	<i>Debt securities issued</i>
Liabilitas derivatif	2,258	--	2,258	<i>Derivatives payable</i>
Pinjaman yang diterima	41,492,912	--	41,492,912	<i>Fund borrowings</i>
Utang asuransi	2,150	--	2,150	<i>Insurance payable</i>
Utang penjaminan	497	--	497	<i>Guarantee payable</i>
Liabilitas asuransi	6,515	--	6,515	<i>Insurance liabilities</i>
Estimasi klaim penjaminan	6,848	--	6,848	<i>Estimated guarantee claim</i>
Liabilitas imbalan kerja	292,329	--	292,329	<i>Liability for employee benefits</i>
Liabilitas lain-lain	2,073,301	--	2,073,301	<i>Other liabilities</i>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>89,762,973</b>	--	<b>89,762,973</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>EKUITAS</b>				<b>EQUITY</b>
Kontribusi modal Pemerintah				<i>Government capital contribution</i>
Penugasan Umum	16,946,276	--	16,946,276	<i>General Assignment</i>
Penugasan Khusus	5,200,000	--	5,200,000	<i>National Interest Account</i>
	<b>22,146,276</b>	--	<b>22,146,276</b>	
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual setelah pajak tangguhan	13,245	--	13,245	<i>Unrealized gain on available-for-sale securities, net of deferred tax</i>
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti, setelah pajak tangguhan	8,019	--	8,019	<i>Remeasurement of defined benefit obligation, net of deferred tax</i>
Saldo laba				<i>Retained earnings</i>
Telah ditentukan penggunaannya:				<i>Appropriated:</i>
Cadangan umum	322,161	--	322,161	<i>General reserve</i>
Cadangan tujuan	758,235	--	758,235	<i>Specific reserve</i>
	<b>1,080,396</b>	--	<b>1,080,396</b>	
Belum ditentukan penggunaannya	(4,309,184)	(4,540,428)	(8,849,612)	<i>Unappropriated</i>
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>18,938,752</b>	<b>(4,540,428)</b>	<b>14,398,324</b>	<b>TOTAL EQUITY</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>108,701,725</b>	<b>(4,540,428)</b>	<b>104,161,297</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**43. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan berdasarkan PSAK 71 dan PSAK 73 per 1 Januari 2020 (lanjutan)**

Tabel berikut menyajikan analisis dampak penerapan PSAK 73 pada posisi laporan keuangan pada tanggal 1 Januari 2020:

	1 Januari/January 1, 2020			<b>STATEMENT OF FINANCIAL POSITION ASSET</b>
	Sebelum penyesuaian /Before adjustment	Penyesuaian PSAK 73 adjustment	Setelah penyesuaian /After adjustment	
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN</b>				
<b>ASET</b>				
Biaya dibayar dimuka	4,923	(3,537)	1,386	Prepaid expenses
Aset tetap - Aset hak guna	--	14,922	14,922	Fixed asset - except for-right Fixed asset - Right of use
<b>LIABILITAS</b>				
Liabilitas sewa	--	(11,385)	(11,385)	Lease liabilities

**44. Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif**

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2021.

Amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 April 2021 yaitu:

- Amendemen PSAK 73: Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19 Setelah 30 Juni 2021.

Amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual;
- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjenji, dan Aset Kontinjenji tentang Kontrak Merugi - Biaya Memenuhi Kontrak;
- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan;
- PSAK 69 (Penyesuaian Tahunan 2020): Agrikultur;
- PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020): Instrumen Keuangan; dan
- PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020): Sewa.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**43. Classification of Financial Assets and Liabilities based on PSAK 71 and PSAK 73 on January 1, 2020 (continued)**

*The following table analyze the impact of the adoption of PSAK 73 on financial statement position at 1 January 2020:*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**44. Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar  
yang Telah Disahkan Namun Belum  
Berlaku Efektif (lanjutan)**

Amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang;
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi; dan
- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal.

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 74: Kontrak Asuransi; dan
- Amendemen PSAK 74: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 – Informasi Komparatif.

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, Perusahaan masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi standar tersebut.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**44. Accounting Standards and Standard  
Interpretations which Has Issued But Not  
Yet Effective (continued)**

*Amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2023, with early adoption is permitted, are as follows:*

- Amendments PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Disclosure of Accounting Policies;
- Amendments PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Classification of Liabilities as a Current or Non Current;
- Amendments PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors regarding Definition of Accounting Estimates; and
- Amendments PSAK 46: Income Tax regarding Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction.

*New standard and amendment to standard which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption is permitted, are as follows:*

- PSAK 74: Insurance Contract; and
- Amendments PSAK 74: Insurance Contract regarding Initial Application of PSAK 74 and PSAK 71 – Comparative Information.

*Until the date of the financial statements is authorized, the Group is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**45. Perkembangan Kondisi Ekonomi di Indonesia**

Pada awal tahun 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengumumkan berlakunya "Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Virus Corona." Wabah virus corona menjadi pandemi global yang berdampak terhadap perekonomian Indonesia dan dunia, antara lain ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan menurunnya harga-harga sekuritas di pasar modal.

Resolusi dari dampak ekonomi Indonesia ini, banyak tergantung dari kebijakan fiskal dan moneter yang akan ditempuh oleh Pemerintah Republik Indonesia dan otoritas, yang merupakan suatu tindakan yang berada diluar kendali Bank. Oleh karena itu, tidaklah mungkin untuk menentukan dampak masa depan kondisi ekonomi terhadap likuiditas dan pendapatan Bank dan realisasi dari aset, termasuk pengaruh dari nasabah, kreditur, pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Pengaruh dari ketidakpastian yang ada pada aset dan liabilitas yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pada saat ini tidak dapat diperkirakan jumlahnya. Pengaruh tersebut akan dilaporkan dalam laporan keuangan pada saat diketahui dan dapat diperkirakan jumlahnya.

**45. Development in Indonesia economic condition**

*In early 2020, National Agency for Disaster Management of the Republic of Indonesia announced the enactment of "Status of the Certain Disaster Emergency Conditions Due to Corona Virus Pandemic". The corona pandemic, that become global pandemic may had impacted domestic economy, which was characterized by weakening of the rupiah exchange rate and decline in the prices of securities on the capital market.*

*The resolution of Indonesia economic is dependent to a large degree on any fiscal and monetary measures that may be taken by the Government of Republic of Indonesia and the authority, an action that is beyond the Bank's control. Therefore, it is not possible to determine the impact of future economics condition to the Bank liquidity and earnings, asset realization, effect from customers, debtors, shareholders, and other stakeholders. The effects of this uncertainty on the assets and liabilities reported in the statement of financial position cannot be presently determined. Such effects will be reported in the financial statements when they are known and can be estimated.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**46. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca**

Susunan Dewan Direktur LPEI pada setelah tanggal neraca adalah sebagai berikut:

**46. Subsequent Events**

*The composition of the Board of Directors of LPEI after balance sheet date, are as follows:*

**Subsequent Events**  
**2022**

Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif *)	Rijani Tirtoso	Chairman of Board of Directors concurrently Executive Director *)
Anggota Dewan Direktur **)	Suminto	Member of Board of Directors **)
Anggota Dewan Direktur ***)	Kasan	Member of Board of Directors ***)
Anggota Dewan Direktur ****)	Arus Gunawan	Member of Board of Directors ****)
Anggota Dewan Direktur *****)	Felia Salim	Member of Board of Directors *****)
Anggota Dewan Direktur ******)	D. James Rompas	Member of Board of Directors ******)

- \*) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 522/KMK.06/2021 tentang Penetapan Ketua Dewan Direktur Merangkap Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 31 Desember 2021, menetapkan Rijani Tirtoso sebagai Ketua Dewan Direktur Merangkap Direktur Eksekutif LPEI berlaku efektif setelah 5 hari kerja sejak tanggal ditetapkan dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024.
- \*\*) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 274/KMK.06/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 5 Juni 2020, mengangkat Kasan sebagai anggota dewan direktur sejak 5 Juni 2020 dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023.
- \*\*\*) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 530/KMK.06/2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 19 November 2020, mengangkat Arus Gunawan sebagai anggota dewan direktur sejak 19 November 2020 dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

- \*) Based on Minister of Finance Decision Letter No.522/KMK.06/2021 regarding Appointment of the Chairman of the Board of Directors concurrently as Executive Director Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated December 31, 2021, appointed Rijani Tirtoso as Chairman of the Board of Directors and concurrently as Executive Director LPEI,, effective after 5 working days from the date of appointment with a tenure up to August 31, 2024.
- \*\*) Based on Minister of Finance Decision Letter No. 274/KMK.06/2020 regarding Termination and Appointment of Members of the Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated June 5, 2020, Kasan was appointed as a member of the board of directors since June 5, 2020 for a tenure up to August 31, 2023.
- \*\*\*) Based on Minister of Finance Decision Letter No. 530/KMK.06/2020 regarding Appointment of Members of the Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated November 19, 2020, Arus Gunawan was appointed as a member of the board of directors since November 19, 2020 for a tenure of 5 (five).

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

**46. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca (lanjutan)**

- \*\*\*\*\*) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK.06/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 14 Agustus 2018, memberhentikan Susiwijono Moegiarso dan mengangkat Suminto sebagai anggota dewan direktur sejak 1 September 2018 dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
- \*\*\*\*\*) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 522/KMK.06/2018 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 25 Juli 2018, mengangkat Felia Salim sebagai anggota dewan direktur sejak 25 Juli 2018 dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
- \*\*\*\*\*\*) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 522/KMK.06/2021 tentang Penetapan Ketua Dewan Direktur Merangkap Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 31 Desember 2021, menetapkan Daniel James Rompas kembali menjadi anggota Dewan Direktur LPEI berlaku efektif setelah 5 hari kerja sejak tanggal ditetapkan dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur No. 0004/KDE/01/2022 tanggal 7 Januari 2022, susunan Komite Audit LPEI setelah tanggal neraca adalah sebagai berikut:

**46. Subsequent Events (continued)**

- \*\*\*\*\*) Based on Minister of Finance Decision Letter No. 554/KMK.06/2018 regarding Termination and Appointment of Members of the Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated August 14, 2018, dismissed Susiwijono Moegiarso and Suminto was appointed as a member of the board of directors since September 1, 2018 for a tenure of 5 (five) years.
- \*\*\*\*\*) Based on Minister of Finance Decision Letter No. 522/KMK.06/2018 regarding Appointment of Members of the Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated July 25, 2018, Felia Salim was appointed as a member of the board of directors since July 25, 2018 for a tenure of 5 (five) years.
- \*\*\*\*\*\*) Based on Minister of Finance Decision Letter No.522/KMK.06/2021 regarding Appointment of the Chairman of the Board of Directors concurrently as Executive Director Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated December 31, 2021, appointed Daniel James Rompas return to being a member of the LPEI Board of Directors effective after 5 working days from the date of appointment with a tenure up to August 31, 2024

LPEI's Audit Committee after balance sheet date based on the Board of Directors' Decision Letter No. 0004/KDE/01/ 2022 dated January 7, 2022, is composed of the following:

**Sebsequent Events  
2022**

Ketua	Arus Gunawan
Anggota	Yulida S. Marbun
Anggota	Peter Umar Abdilla A.

Chairman
Member
Member

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

**46. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca (lanjutan)**

Ketua Satuan Kerja Audit Internal LPEI setelah tanggal neraca adalah sebagai berikut:

**Subsequent Events**  
**2022**

Ketua Satuan Kerja Audit Internal

I Nyoman Gede Suarja

*Head of Internal Audit*

Berdasarkan Memorandum Prosedur No.MPO.0003/KDE/01/2022 tanggal 3 Januari 2022, Sekretaris LPEI setelah tanggal neraca adalah sebagai berikut:

*Based on the Memorandum of Procedure No.MPO.0003/CEO/01/2022 dated January 3, 2022, LPEI's secretary after balance sheet date is as follows:*

**Subsequent Events**  
**2022**

Sekretaris LPEI

Chesna F. Anwar

*LPEI's Secretary*

**47. Informasi Keuangan Tambahan**

Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan 31 Desember 2021 dan 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (secara kolektif yang disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir.

**47. Additional Financial Information**

*The accompanying financial information of the Company (parent entity), which comprises the statement of financial position as of December 31, 2021 and 2020, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended December 31, 2021 and 2020 (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and related directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements.*

**48. Penyelesaian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan ini telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh manajemen LPEI pada tanggal 25 Februari 2022.

**48. Completion of The Financial Statements**

*The management is responsible for the preparation of financial statements which are completed and authorized for issue on February 25, 2022.*

# INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

**Lampiran I**  
**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA**  
**(ENTITAS INDUK)**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
 Per 31 Desember 2021 dan 2020  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah  
 kecuali dinyatakan lain)

**Attachment I**  
**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA**  
**(PARENT ENTITY)**  
**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**  
*As of December 31, 2021 and 2020*  
*(Expressed in million Rupiah  
 unless otherwise stated)*

	<i>31 Desember / December 31,</i>		<b>ASSETS</b>
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	
<b>ASET</b>			
Kas	65	1,099	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2,318	17,913	Current account with Bank Indonesia
Giro pada bank			Current accounts with banks
Penugasan Umum	95,563	486,015	General Assignment
Cadangan kerugian penurunan nilai	(9)	(222)	Allowance for impairment losses
	95,554	485,793	
Penugasan Khusus	568,550	5,035,104	National Interest Account
Cadangan kerugian penurunan nilai	--	(54)	Allowance for impairment losses
	568,550	5,035,050	
	664,104	5,520,843	
Penempatan pada bank			Placements with banks
Penugasan Umum	4,759,155	2,405,621	General Assignment
Cadangan kerugian penurunan nilai	(946)	(6,635)	Allowance for impairment losses
	4,758,209	2,398,986	
Penugasan Khusus	11,842,000	5,593,100	National Interest Account
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,263)	(11,418)	Allowance for impairment losses
	11,840,737	5,581,682	
	16,598,946	7,980,668	
Efek-efek	560,050	572,273	Securities
Tagihan derivatif	6	--	Derivatives receivable
Pembiayaan dan piutang, pembiayaan dan piutang syariah dan piutang lainnya			Financing and receivables, financing and sharia receivables and other receivables
Pembiayaan dan piutang, dan pembiayaan dan piutang syariah			Financing and receivables, and financing and sharia receivables
Penugasan Umum			General Assignment
Pembiayaan dan piutang yang diberikan	68,583,154	73,448,592	Financing and Receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14,851,827)	(15,560,422)	Allowance for impairment losses
	53,731,327	57,888,170	
Pembiayaan dan piutang syariah yang diberikan	12,431,504	15,362,114	Financing and sharia receivables
Cadangan penyisihan aset produktif	(2,696,204)	(2,067,206)	Allowance for doubtful accounts
	9,735,300	13,294,908	
Penugasan Khusus			National Interest Account
Pembiayaan dan piutang yang diberikan	2,948,504	1,597,367	Financing and receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai	(400,152)	(44,536)	Allowance for impairment losses
	2,548,352	1,552,831	
Total - neto	66,014,979	72,735,909	Total - net

**INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION**

**Lampiran I**  
**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA**  
**(ENTITAS INDUK)**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**(lanjutan)**  
Per 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**Attachment I**  
**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA**  
**(PARENT ENTITY)**  
**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**  
**(continued)**  
*As of December 31, 2021 and 2020*  
*(Expressed in million Rupiah*  
*unless otherwise stated)*

	<b>31 Desember / December 31,</b>		
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	
<b>ASET (lanjutan)</b>			<b>ASSETS (continued)</b>
Piutang lainnya			<i>Other receivables</i>
Piutang pembiayaan garansi	298,034	303,054	<i>Guarantee financing receivables</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(40,159)	(7,242)	<i>Allowance for impairment losses</i>
	<b>257,875</b>	<b>295,812</b>	
Pajak dibayar dimuka	76,671	169,074	<i>Prepaid tax</i>
Biaya dibayar dimuka	15,782	12,068	<i>Prepaid expenses</i>
Piutang asuransi dan penjaminan	285,656	35,540	<i>Insurance and guarantee receivables</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	--	(909)	<i>Allowance for impairment losses</i>
	<b>285,656</b>	<b>34,631</b>	
Aset reasuransi	2,615	1,284	<i>Reinsurance assets</i>
Tagihan akseptasi			<i>Acceptances receivable</i>
Penugasan Umum	460,540	562,727	<i>General Assignment</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,910)	(4,310)	<i>Allowance for impairment losses</i>
	<b>458,630</b>	<b>558,417</b>	
Penyertaan saham - neto	50,003	--	<i>Equity investment - net</i>
Aset tetap			<i>Premises and equipment</i>
Harga perolehan	1,525,187	1,532,395	<i>Cost</i>
Akumulasi penyusutan	(421,762)	(366,047)	<i>Accumulated depreciation</i>
	<b>1,103,425</b>	<b>1,166,348</b>	
Aset pajak tangguhan - neto	2,767,613	2,793,458	<i>Deferred tax assets - net</i>
Aset lain-lain	182,180	224,763	<i>Other assets</i>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>89,040,918</b>	<b>92,084,560</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>

# INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

**Lampiran I**  
**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
(ENTITAS INDUK)**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN  
(lanjutan)**

Per 31 Desember 2021 dan 2020  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah  
 kecuali dinyatakan lain)

**Attachment I**  
**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
(PARENT ENTITY)**  
**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION  
(continued)**

*As of December 31, 2021 and 2020  
 (Expressed in million Rupiah  
 unless otherwise stated)*

	<i>31 Desember / December 31,</i>		
	<i>2021</i>	<i>2020</i>	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
Liabilitas segera	32,570	37,936	<i>Current liabilities</i>
Liabilitas akseptasi			<i>Acceptances payable</i>
Penugasan Umum	460,540	562,727	<i>General Assignment</i>
Utang pajak	12,950	11,664	<i>Taxes payable</i>
Efek-efek utang yang diterbitkan	27,743,500	36,524,500	<i>Debt securities issued</i>
Biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi	(31,111)	(43,456)	<i>Unamortized debt issuance cost</i>
	<u>27,712,389</u>	<u>36,481,044</u>	
Pinjaman yang diterima			<i>Fund borrowings</i>
Pinjaman	28,799,571	28,599,773	<i>Borrowings</i>
Utang asuransi	4,055	2,563	<i>Insurance payable</i>
Utang penjaminan	62,363	560	<i>Guarantee payable</i>
Liabilitas asuransi	6,390	3,230	<i>Insurance liabilities</i>
Estimasi klaim penjaminan	392,559	41,129	<i>Estimated guarantee claim</i>
Liabilitas imbalan kerja	157,675	182,553	<i>Liability for employee benefits</i>
Liabilitas sewa	10,980	14,837	<i>Lease liabilities</i>
Liabilitas lain-lain	1,268,499	1,349,995	<i>Other liabilities</i>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b><u>58,920,541</u></b>	<b><u>67,288,011</u></b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>EKUITAS</b>			
Kontribusi modal Pemerintah			<i>Government capital contribution</i>
Penugasan Umum	23,640,939	20,946,276	<i>General Assignment</i>
Penugasan Khusus	13,700,000	11,200,000	<i>National Interest Account</i>
	<u>37,340,939</u>	<u>32,146,276</u>	
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak tangguhan	26,462	39,456	<i>Unrealized gain of financial assets at fair value through other comprehensive income, net of deferred tax</i>
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti, setelah pajak tangguhan	119,529	91,645	<i>Remeasurement of defined benefit obligation, net of deferred tax</i>
Saldo laba			<i>Retained earnings</i>
Telah ditentukan penggunaannya:			<i>Appropriated:</i>
Cadangan umum	322,161	322,161	<i>General reserve</i>
Cadangan tujuan	758,235	758,235	<i>Specific reserve</i>
	<u>1,080,396</u>	<u>1,080,396</u>	
Belum ditentukan penggunaannya	(8,446,949)	(8,561,224)	<i>Unappropriated</i>
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b><u>30,120,377</u></b>	<b><u>24,796,549</u></b>	<b>TOTAL EQUITY</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b><u>89,040,918</u></b>	<b><u>92,084,560</u></b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

**INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION**

**Lampiran II**

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA**

**(ENTITAS INDUK)**

**LAPORAN LABA RUGI DAN  
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**Attachment II**

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
(PARENT ENTITY)**

**STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND  
OTHER COMPREHENSIVE INCOME**

*For the Year Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)*

	<i>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember / Year ended December 31,</i>	
	<i>2021</i>	<i>2020</i>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
Pendapatan bunga dan usaha syariah		
Pendapatan bunga		
Penugasan Umum	2,932,545	3,958,233
Penugasan Khusus	410,231	314,579
	<u>3,342,776</u>	<u>4,272,812</u>
Usaha syariah		
Penugasan Umum	920,739	830,069
Total pendapatan bunga dan usaha syariah	<u>4,263,515</u>	<u>5,102,881</u>
Beban bunga	<u>(3,057,214)</u>	<u>(4,262,993)</u>
<b>PENDAPATAN BUNGA DAN USAHA SYARIAH - NETO</b>		
	<b><u>1,206,301</u></b>	<b><u>839,888</u></b>
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA</b>		
Pendapatan dari asuransi		
Pendapatan dari asuransi	12,357	9,843
Premi reasuransi	(7,568)	(5,739)
Pendapatan dari asuransi - neto	<u>4,789</u>	<u>4,104</u>
(Kenaikan)/penurunan pada liabilitas asuransi	(3,190)	2,979
Kenaikan/(Penurunan) pada aset reasuransi	1,348	(3,437)
Beban klaim asuransi dan lainnya	(1,074)	(1,395)
Pendapatan dari penjaminan	79,353	80,194
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	24,715	70,889
Provisi dan komisi selain dari pembiayaan dan piutang	71,443	86,861
Lain-lain	<u>38,036</u>	<u>77,400</u>
<b>TOTAL PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA - NETO</b>	<b><u>215,420</u></b>	<b><u>317,595</u></b>
<b>INCOME AND EXPENSES FROM OPERATIONS</b>		
Interest income and income from sharia		
Interest income		
General Assignment		
National Interest Account		
Income from sharia		
General Assignment		
Total interest income and income from sharia		
Interest expense		
<b>INTEREST INCOME AND INCOME FROM SHARIA - NET</b>		
<b>OTHER OPERATING INCOME</b>		
Income from insurance		
Income from insurance		
Reinsurance premiums		
Income from insurance - net		
(Increase)/decrease in insurance liabilities		
Increase/(Decrease) in reinsurance assets		
Claim expense from insurance and other		
Income from guarantee		
Gain on foreign exchange transactions - net		
Non financing and receivables related fees and commission		
Others		
<b>TOTAL OTHER OPERATING INCOME - NET</b>		

## INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

### Lampiran II

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
(ENTITAS INDUK)**

**LAPORAN LABA RUGI DAN  
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  
(lanjutan)**

Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

Pembentukan cadangan kerugian  
penurunan nilai aset keuangan

Penyisihan kerugian  
estimasi klaim penjaminan

#### BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

Gaji dan tunjangan

Umum dan administrasi

Lain-lain

#### TOTAL BEBAN

#### OPERASIONAL LAINNYA

#### LABA OPERASIONAL

#### PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL - NETO

#### LABA SEBELUM BEBAN PAJAK

#### (BEBAN)/MANFAAT PAJAK

#### LABA TAHUN BERJALAN

#### PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:

#### PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI

Perubahan nilai wajar efek-efek  
yang diukur pada nilai wajar melalui  
penghasilan komprehensif lain - neto

Pajak terkait dengan  
komponen penghasilan  
komprehensif lainnya

**Tahun yang berakhir pada  
tanggal 31 Desember /  
Year ended December 31,**

**2021                  2020**

(257,752)	(423,080)
-----------	-----------

(114)	(1,946)
-------	---------

(467,309)	(395,732)
-----------	-----------

(269,077)	(235,346)
-----------	-----------

(22,377)	(45,809)
----------	----------

(758,763)	(676,887)
-----------	-----------

405,092	55,570
---------	--------

3,947	6,152
-------	-------

409,039	61,722
---------	--------

(21,643)	226,666
----------	---------

387,396	288,388
---------	---------

**INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION**

**Lampiran II**  
**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA**  
**(ENTITAS INDUK)**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN**  
**PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
**(lanjutan)**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**Attachment II**  
**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA**  
**(PARENT ENTITY)**  
**STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND**  
**OTHER COMPREHENSIVE INCOME**  
**(continued)**  
*For the Year Ended*  
*December 31, 2021 and 2020*  
*(Expressed in million Rupiah*  
*unless otherwise stated)*

	<b>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember / Year ended December 31,</b>	
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>		
<b>LAIN YANG TIDAK AKAN</b>		
<b>DIREKLASIFIKASI</b>		
<b>KE LABA RUGI</b>		
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti	35,749	103,864
Pajak terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lainnya	(7,865)	(20,238)
	<b>27,884</b>	<b>83,626</b>
<b>PENGHASILAN</b>		
<b>KOMPREHENSIF LAIN -</b>		
<b>NETO SETELAH PAJAK</b>		
	<b>14,890</b>	<b>109,837</b>
<b>TOTAL PENGHASILAN</b>		
<b>KOMPREHENSIF TAHUN</b>		
<b>BERJALAN</b>		
	<b>402,286</b>	<b>398,225</b>
<b>OTHER COMPREHENSIVE</b>		
<b>INCOME NOT TO BE</b>		
<b>RECLASSIFIED TO</b>		
<b>PROFIT OR LOSS</b>		
Remeasurement of defined benefit obligation		
Tax related to components of other comprehensive income		
<b>OTHER COMPREHENSIVE</b>		
<b>INCOME -</b>		
<b>NET OF TAX</b>		
<b>TOTAL COMPREHENSIVE</b>		
<b>INCOME FOR THE YEAR</b>		

## INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

### LAMPIRAN III LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (ENTITAS INDUK)

### LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

#### Keuntungan(kerugian)

Yang belum direalisasi  
dari kenaikan nilai wajar  
aset keuangan

yang diukur  
pada nilai wajar melalui  
penghasilan

komprehensif lain  
setelah dikurangi  
pajak tangguhan/

*Unrealized gain/(loss)  
from increase in the  
fair value of  
financial assets  
at fair value  
through  
other comprehensive  
income net of  
deferred tax*

Pengukuran  
kembali kewajiban  
imbalan pasti,  
setelah pajak  
tangguhan/

*Remeasurement  
of defined benefit  
obligation,  
net of deferred tax*

	Kontribusi modal/ Pemerintah/ Government capital/ contribution	other comprehensive income net of deferred tax	General reserve	Cadangan umum/ General reserve	Cadangan tujuan/ Specific reserve	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	Total ekuitas/ Total Equity	<i>Balance as of December 31, 2019</i>	<i>Impact of transitional adjustment on the implementation of Statement Financial Accounting Standards (SFAS) No.71</i>
	<u>22,146,276</u>	<u>13,245</u>	<u>8,019</u>	<u>322,161</u>	<u>758,235</u>	<u>(4,309,184)</u>	<u>18,938,752</u>		
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>									
Dampak pergeseran transaksi atas penerapan penyesuaian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.71 Saldo per 1 Januari 2020 setelah penerapan penyesuaian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.71									
Modal tambahan	22,146,276	13,245	8,019	322,161	758,235	(8,849,612)	14,398,324		
Penugasan Umum	4,000,000	--	--	--	--	--	4,000,000		
Penugasan Khusus	6,000,000	--	--	--	--	--	6,000,000		
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto setelah pajak tangguhan	--	26,211	--	--	--	--	26,211		
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti, setelah pajak tangguhan	--	--	83,626	--	--	--	83,626		
Laba tahun berjalan								288,388	
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b><u>32,146,276</u></b>	<b><u>39,456</u></b>	<b><u>91,645</u></b>	<b><u>322,161</u></b>	<b><u>758,235</u></b>	<b><u>(8,561,224)</u></b>	<b><u>24,796,549</u></b>		

Dampak pergeseran transaksi atas  
penerapan penyesuaian Pernyataan Standar  
Akuntansi Keuangan (PSAK) No.71  
Saldo per 1 Januari 2020 setelah  
penerapan penyesuaian Pernyataan  
Standar Akuntansi Keuangan  
(PSAK) No.71

Keuntungan yang belum direalisasi  
atas efek-efek yang diukur pada  
nilai wajar melalui penghasilan  
komprehensif lain - neto  
setelah pajak tangguhan

Pengukuran kembali kewajiban imbalan  
pasti, setelah pajak tangguhan

Laba tahun berjalan

**Saldo per 31 Desember 2020**

**ATTACHMENT III**  
**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA**  
**(PARENT ENTITY)**  
**STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**  
**For the Year Ended December 31, 2021 and 2020**  
**(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)**

## INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

### **LAMPIRAN III LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (ENTITAS INDUK)**

### **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (lanjutan)**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

Keuntungan(kerugian)  
Yang belum direalisasi  
dari kenaikan nilai wajar  
aset keuangan  
yang diukur

pada nilai wajar melalui  
penghasilan  
komprehensif lain  
setelah dikurangi  
pajak tangguhan/  
*Unrealized gain/(loss)*  
*from increase in the  
fair value of  
financial assets*

Pengukuran  
kembali kewajiban  
setelah pajak  
tangguhan/  
*impatien pasti;*

*Saldo laba/Retained earnings*

Belum ditentukan penggunaannya/  
*Remeasurement  
of defined benefit  
obligation,*

Cadangan umum/  
*General reserve*

Cadangan tujuan/  
*Specific reserve*

Belum ditentukan penggunaannya/  
*Unappropriated*

Total ekuitas/  
*Total Equity*

*contribution*

*deferred tax*

*net of deferred tax*

*General reserve*

*Specific reserve*

*Unappropriated*

*Total Equity*

*contribution*

*deferred tax*

*net of deferred tax*

*General reserve*

*Specific reserve*

*Unappropriated*

*Total Equity*

*contribution*

*deferred tax*

*net of deferred tax*

*General reserve*

*Specific reserve*

*Unappropriated*

*Total Equity*

*contribution*

*deferred tax*

*net of deferred tax*

*General reserve*

*Specific reserve*

*Unappropriated*

*Total Equity*

*contribution*

*deferred tax*

*net of deferred tax*

*General reserve*

*Specific reserve*

*Unappropriated*

*Total Equity*

*contribution*

*deferred tax*

*net of deferred tax*

*General reserve*

*Specific reserve*

*Unappropriated*

*Total Equity*

*contribution*

*deferred tax*

*net of deferred tax*

*General reserve*

*Specific reserve*

*Unappropriated*

*Total Equity*

*contribution*

*deferred tax*

*net of deferred tax*

*General reserve*

*Specific reserve*

*Unappropriated*

*Total Equity*

*contribution*

*deferred tax*

*net of deferred tax*

*General reserve*

*Specific reserve*

*Unappropriated*

*Total Equity*

*contribution*

*deferred tax*

*net of deferred tax*

*General reserve*

*Specific reserve*

*Unappropriated*

*Total Equity*

*contribution*

*deferred tax*

*net of deferred tax*

*General reserve*

*Specific reserve*

*Unappropriated*

*Total Equity*

*contribution*

*deferred tax*

*net of deferred tax*

*General reserve*

*Specific reserve*

*Unappropriated*

*Total Equity*

*contribution*

*deferred tax*

*net of deferred tax*

*General reserve*

*Specific reserve*

*Unappropriated*

*Total Equity*

*contribution*

*deferred tax*

*net of deferred tax*

*General reserve*

*Specific reserve*

*Unappropriated*

*Total Equity*

*contribution*

*deferred tax*

*net of deferred tax*

*General reserve*

*Specific reserve*

*Unappropriated*

*Total Equity*

*contribution*

*deferred tax*

*net of deferred tax*

*General reserve*

*Specific reserve*

*Unappropriated*

*Total Equity*

*contribution*

*deferred tax*

*net of deferred tax*

*General reserve*

*Specific reserve*

*Unappropriated*

*Total Equity*

*contribution*

*deferred tax*

*net of deferred tax*

*General reserve*

*Specific reserve*

*Unappropriated*

*Total Equity*

*contribution*

*deferred tax*

*net of deferred tax*

*General reserve*

*Specific reserve*

*Unappropriated*

*Total Equity*

*contribution*

*deferred tax*

*net of deferred tax*

*General reserve*

*Specific reserve*

*Unappropriated*

*Total Equity*

*contribution*

*deferred tax*

*net of deferred tax*

*General reserve*

*Specific reserve*

*Unappropriated*

*Total Equity*

*contribution*

*deferred tax*

*net of deferred tax*

*General reserve*

*Specific reserve*

*Unappropriated*

*Total Equity*

*contribution*

*deferred tax*

*net of deferred tax*

*General reserve*

*Specific reserve*

*Unappropriated*

*Total Equity*

*contribution*

*deferred tax*

*net of deferred tax*

*General reserve*

*Specific reserve*

*Unappropriated*

*Total Equity*

*contribution*

*deferred tax*

*net of deferred tax*

*General reserve*

*Specific reserve*

*Unappropriated*

*Total Equity*

*contribution*

*deferred tax*

*net of deferred tax*

*General reserve*

*Specific reserve*

*Unappropriated*

*Total Equity*

*contribution*

*deferred tax*

*net of deferred tax*

*General reserve*

*Specific reserve*

*Unappropriated*

*Total Equity*

*contribution*

*deferred tax*

*net of deferred tax*

*General reserve*

*Specific reserve*

*Unappropriated*

*Total Equity*

*contribution*

*deferred tax*

*net of deferred tax*

*General reserve*

*Specific reserve*

*Unappropriated*

*Total Equity*

*contribution*

*deferred tax*

*net of deferred tax*

*General reserve*

*Specific reserve*

*Unappropriated*

*Total Equity*

*contribution*

*deferred tax*

*net of deferred tax*

*General reserve*

*Specific reserve*

*Unappropriated*

*Total Equity*

*contribution*

*deferred tax*

*net of deferred tax*

*General reserve*

<

# INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

**LAMPIRAN IV**  
**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA**  
**(ENTITAS INDUK)**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
 Untuk Tahun yang Berakhir pada  
 Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah  
 kecuali dinyatakan lain)

**ATTACHMENT IV**  
**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA**  
**(PARENT ENTITY)**  
**STATEMENTS OF CASH FLOW**  
 For the Year Ended  
 December 31, 2021 and 2020  
 (Expressed in million Rupiah  
 unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember / Year ended December 31,			
	2021	2020		
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>				
Penerimaan bunga, provisi dan komisi				
	3,342,779	4,270,083		
Pendapatan usaha syariah	920,739	830,069		
Pendapatan operasional lainnya - neto	224,896	248,585		
Pembayaran pajak penghasilan badan - neto	91,639	170,551		
Beban operasional lainnya - neto	(613,596)	(710,619)		
Pembayaran bunga dan pembiayaan lainnya	(3,042,626)	(4,057,843)		
Pendapatan bukan operasional - neto	3,071	6,301		
Arus kas dari operasi sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi	926,902	757,127		
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi (Kenaikan) penurunan aset operasi:				
Tagihan derivatif	(6)	1,410		
Pembiayaan dan piutang	3,519,321	6,757,729		
Pembiayaan/piutang syariah	2,930,610	628,337		
Biaya dibayar dimuka	(3,714)	(1,023)		
Piutang asuransi dan penjaminan	(251,025)	(33,231)		
Aset reasuransi	(1,331)	3,569		
Tagihan akseptasi	99,787	99,872		
Aset lain-lain	40,341	(158,157)		
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:				
Liabilitas segera	(5,366)	2,906		
Liabilitas akseptasi	(102,187)	(95,562)		
Utang pajak	1,286	(34,265)		
Liabilitas derivatif	--	(2,258)		
Utang asuransi	1,492	413		
Utang penjaminan	61,803	63		
Liabilitas asuransi	3,160	(3,285)		
Estimasi klaim penjaminan	351,430	34,281		
Liabilitas imbalan kerja	(24,878)	(109,776)		
Liabilitas lain-lain	(81,494)	(726,432)		
<b>Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>7,466,131</b>	<b>7,121,718</b>		
<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>				
Interest, fees and commissions received				
	Sharia income			
Other operating income - net				
Payments of corporate income tax - net				
Other operating expenses - net				
Interest and other financing charges				
Non-operating income - net				
Cash flows from operations before changes in operating assets and liabilities				
Changes in operating assets and liabilities				
(Increase) decrease in operating assets:				
Derivatives receivable				
Financing and receivables				
Sharia financing/receivables				
Prepaid expenses				
Insurance and guarantee receivables				
Reinsurance assets				
Acceptances receivable				
Other assets				
Increase (decrease) in operating liabilities:				
Current liabilities				
Acceptances payable				
Taxes payable				
Derivatives payable				
Insurances payable				
Guarantee payable				
Insurance liabilities				
Estimated guarantee claim				
Liability for employee benefits				
Other liabilities				
<b>Net cash provided by operating activities</b>				

**LAMPIRAN IV**  
**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA**  
**(ENTITAS INDUK)**  
**LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**ATTACHMENT IV**  
**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA**  
**(PARENT ENTITY)**  
**STATEMENTS OF CASH FLOW (continued)**  
For the Year Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

	<b>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember / Year ended December 31,</b>	
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Hasil penjualan aset tetap	875	--
Penjualan (pembelian) efek-efek tersedia untuk dijual	(4,657)	(2,202)
Penyertaan saham	(50,003)	--
Perolehan aset tetap	(44,745)	37,337
<b>Kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas investasi</b>	<b>(98,530)</b>	<b>35,135</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penerimaan pinjaman yang diterima	38,343,278	32,679,208
Penerimaan efek-efek utang yang diterbitkan	--	148,000
Pembayaran pinjaman yang diterima	(38,143,480)	(45,572,347)
Pembayaran efek-efek utang yang diterbitkan yang jatuh tempo	(8,781,000)	(8,833,002)
Pembayaran liabilitas sewa	(3,857)	
Pembayaran ke pemerintah sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak	(64,888)	--
Pembayaran bagian laba pemerintah	(13,570)	--
Penerimaan kontribusi modal dari Pemerintah Republik Indonesia		
Penugasan Umum	2,500,000	4,000,000
Penugasan Khusus	2,500,000	6,000,000
Pembayaran emisi efek-efek utang yang diterbitkan	--	(1,592)
<b>Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan</b>	<b>(3,663,517)</b>	<b>(11,579,733)</b>
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas	24,715	70,889
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>3,728,799</b>	<b>(4,351,991)</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>13,538,852</b>	<b>17,890,843</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>17,267,651</b>	<b>13,538,852</b>
<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>		
Proceeds from sale of premises and equipment		
Sales (purchases) of available for sale securities		
Equity investment		
Acquisitions of premises and equipment		
<b>Net cash (used in) provided by investing activities</b>		
<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>		
Proceeds from fund borrowings		
Proceeds from debt securities issued		
Payments of fund borrowings		
Payments for matured debt securities issued		
Payments of lease liability		
Payments for government as Goverment non Tax Revenue		
Payments government's profit share		
Contributed capital received from Government of the Republic of Indonesia		
General Assignment		
National Interest Account		
Payments for issuance cost of debt securities issued		
<b>Net cash used in financing activities</b>		
Foreign exchange effect related to cash and cash equivalents		
<b>NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND EQUIVALENTS</b>		
<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR</b>		
<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR</b>		

**LAMPIRAN IV**  
**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA**  
**(ENTITAS INDUK)**  
**LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah  
kecuali dinyatakan lain)

**ATTACHMENT IV**  
**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA**  
**(PARENT ENTITY)**  
**STATEMENTS OF CASH FLOW (continued)**  
For the Year Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Expressed in million Rupiah  
unless otherwise stated)

	<b>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember / Year ended December 31,</b>	
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI:</b>		
Kas	65	1,099
Giro pada Bank Indonesia	2,318	17,913
Giro pada bank	664,113	5,521,119
Penempatan pada bank - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	16,601,155	7,998,721
<b>Total kas dan setara kas</b>	<b>17,267,651</b>	<b>13,538,852</b>

**COMPONENTS OF CASH AND  
CASH EQUIVALENTS:**

<i>Cash</i>
<i>Current account with Bank Indonesia</i>
<i>Current accounts with banks</i>
<i>Placements with banks - maturing within three months or less since the acquisition date</i>

**Total cash and cash equivalents**